SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASER

RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2024

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya atas taufik hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubaha Sekretariat Daerah Kabupaten Paser TahunAnggaran 2024 ini akhirnya dapat diselesaikan.

Sekretariat Daerah sekarang ini dalam menjalankan aktifitasnya menghadapi permasalahan baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Semakin besar kewenangan Sekretariat Daerah tersebut, semakin beragam pula kondisi lingkungan yang perlu dicermati secara seksama untuk mengeliminir kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itulah maka diperlukan suatu pola manajemen yang baik, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dari siklus ini bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat signifikan bagi keberhasilan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuannya.

Akhir kata, diharapkan semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dapat digunakan sebagai acuan/ pedoman dalam pelaksanaan anggaran di Sekretariat Daerah agar lebih efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel.

Tana Paser, ... Juli 2024
Sekretaris Daerah

Drs. Katsul Wijaya M. SI
NIP. 19661211 198609 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 3

1.4 SISTEMATIKA 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN LALU **6**

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER 6

2.2 ANALIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 44

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER 48

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 49

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 80

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER **91**

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 91

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER 93

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 95

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER **116**

BAB V PENUTUP **120**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagaiacuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat Daerah hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026; 22.Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun; Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dalam satu tahun;

2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Sekretariat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah, keterkaitan antara Renja Sekretariat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Sekretariat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat**	**80.00%**	**225,411,128,160**	**72**	**60,811,434,386**	**70**	**147,384,088,620**		**60,401,571,412**		**39,841,014,011**		**Rp0**	**0.00%**	**Rp0**	**-**	**100,242,585,423**	**72**	**161,054,019,809**	**90**	**71.45%**	
		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**A**	**496,202,614**	**B**	**322,244,335**	**B**	**390,955,980**		**66,158,004**		**147,609,267**		**Rp -**		**Rp0**		**213,767,271**	**BB**	**536,011,606**	**BB**		**Bagian Perencanaan & Keuangan**
			Capaian Komponen Pengungkit Nilai RB Pada Sekretariat Daerah	**80**		**80**		**80**												**70**				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	223,533,100	6	195,415,396	6	244,516,480	3	46,081,200	0	109,095,983	0	Rp -	0	Rp0	3	155,177,183	9	350,592,579	30.00%	156.84%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60	83,125,000	12	61,253,900	12	65,471,500	0	Rp0	12	23,081,684	0	Rp -	0	Rp0	12	23,081,684	0	84,335,584	0.00%	101.46%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat**	**80.00%**	**225,411,128,160**	**72**	**60,811,434,386**	**70**	**147,384,088,620**		**60,401,571,412**		**39,841,014,011**		**Rp0**	**0.00%**	**Rp0**	-	**100,242,585,423**	**72**	**161,054,019,809**	**90**	**71.45%**	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	189,544,514	5	65,575,039	5	80,968,000	2	20,076,804	1	15,431,600	0	Rp -	0	Rp0	3	35,508,404	8	101,083,443	32.00%	53.33%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**134,158,362,883**	**100**	**29,160,207,487**	**100**	**32,192,442,803**	**21**	**7,895,028,171**	**26**	**11,005,951,142**		**Rp -**		**Rp -**	**47**	**18,900,979,313**	**146.66273**	**48,061,186,800**	**146.66%**	**35.82%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11340	134,073,726,614	2,268	28,270,562,246	2268	31,620,472,868	486	7,742,961,771	486	10,914,913,449	0	Rp -	0	Rp0	972	18,657,875,220	3240	46,928,437,466	28.57%	35.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	48	-	-	-	12	40,374,293	3	33,266,100	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp0	3	33,266,100	3	33,266,100	6.25%	#DIV/0!	
			Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																					
		Pelaksanaan Penatausanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	12	871,224,241	950	513,170,642	186	118,800,300	358	81,290,893	0	Rp -	0	Rp0	544	200,091,193	556	1,071,315,434	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi**	**100**	**5,373,354,076**	**73**	**1,129,899,083**	**100**	**2,171,936,001**	**22.22**	**247,160,662**	**16.67**	**521,896,974**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**38.89**	**769,057,636**	**112.01889**	**1,898,956,719**	**112.02%**	**35.34%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	140	1,483,388,698	28	167,066,441	28	300,000,000	6	60,165,960	6	Rp -	0	Rp -	0	Rp0	12	60,165,960	40	227,232,401	28.57%	15.32%	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	50	326,333,015	8	350,786,000	10	1,121,936,001	2	51,463,488	2	428,054,002	0	Rp -	0	Rp0	4	479,517,490	12	830,303,490	24.00%	254.43%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat**	**80.00%**	**225,411,128,160**	**72**	**60,811,434,386**	**70**	**147,384,088,620**		**60,401,571,412**		**39,841,014,011**		**Rp0**	**0.00%**	**Rp0**	**-**	**100,242,585,423**	**72**	**161,054,019,809**	**90**	**71.45%**	
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40	1,018,180,675	1	11,026,642	8	150,000,000	2	47,531,213	1	3,842,972	0	Rp -	0	Rp0	3	51,374,185	4	62,400,827	10.00%	6.13%	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60	2,545,451,688	12	601,020,000	8	600,000,000	2	88,000,001	0	90,000,000	0	Rp -	0	Rp0	2	178,000,001	14	779,020,001	23.33%	30.60%	
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	**Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah**	**100**	**228,515,634**	**-**	**-**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp0**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp0**	**0**	**Rp0**	**0.00%**	**0.00%**	**Bagian Umum**
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15	224,651,384	-	-	0	Rp -	0	Rp0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp0	0	Rp0	0.00%	0.00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**1,032,027,932**	**83.36**	**189,674,300**	**100**	**132,355,000**	**0.38**	**1,700,000**	**3.85**	**27,754,800**		**Rp -**		**Rp -**	**4.23**	**29,454,800**	**87.590769**	**219,129,100**	**87.59%**	**21.23%**	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500	714,966,470	155	145,121,000	100	70,075,000	1	1,700,000	10	27,754,800	0	Rp -	0	Rp0	11	29,454,800	166	174,575,800	33.20%	24.42%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	900	317,061,462	131	44,553,300	160	62,280,000	0	-	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp0	0	Rp0	131	44,553,300	14.56%	14.05%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**30,072,791,472**	**81.08**	**19,462,212,009**	**100**	**18,001,794,911**	**5.87**	**2,621,539,469**	**7.82**	**7,393,048,237**	**0**	**Rp -**		**Rp -**	**13.69**	**10,014,587,706**	**94.771932**	**29,476,799,715**	**94.77%**	**98.02%**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	80	445,504,954	16	115,363,100	16	87,472,480	1	14,996,100	2	52,824,300	0	Rp -	0	Rp0	3	67,820,400	19	183,183,500	23.75%	41.12%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat**	**80.00%**	**225,411,128,160**	**72**	**60,811,434,386**	**70**	**147,384,088,620**		**60,401,571,412**		**39,841,014,011**		**Rp0**	**0.00%**	**Rp0**	-	**100,242,585,423**	**72**	**161,054,019,809**	**90**	**71.45%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85	1,553,725,383	17	6,012,615,280	17	7,541,275,100	5	602,005,210	2	1,588,501,100	0	Rp -	0	Rp0	7	2,190,506,310	24	8,203,121,590	28.24%	527.96%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	125	2,600,050,608	18	343,146,552	25	694,676,501	1	17,760,000	5	128,833,120	0	Rp -	0	Rp0	6	146,593,120	24	489,739,672	19.20%	18.84%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150	6,340,976,227	5	424,350,550	30	445,409,230	1	11,500,000	5	297,296,200	0	Rp -	0	Rp0	6	308,796,200	11	733,146,750	7.33%	11.56%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	45	239,314,204	23	43,999,800	9	47,008,000	0	-	2	31,413,000	0	Rp -	0	Rp0	2	31,413,000	25	75,412,800	55.56%	31.51%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	750	5,123,930,102	150	8,033,016,753	150	6,130,000,000	10	1,153,214,529	10	3,065,092,075	0	Rp -	0	Rp0	20	4,218,306,604	170	12,251,323,357	22.67%	239.10%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750	13,219,472,430	150	4,489,719,974	150	2,947,953,600	6	822,063,630	6	2,229,088,442	0	Rp -	0	Rp0	12	3,051,152,072	162	7,540,872,046	21.60%	57.04%	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	549,817,565	-	-	12	108,000,000	0	-	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0.00%	0.00%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100**	**510,203,718**	**100**	**-**	**100**	**Rp -**	**0**	**Rp0**	**100**	**Rp -**	**100**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**100**	**Rp0**	**200**	**Rp0**	**200.00%**	**0.00%**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	60	510,203,718	-	-	0	Rp -	0	Rp0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100**	**16,907,786,107**	**75**	**32,574,788,408**	**100**	**60,508,186,816**	**19.35**	**47,943,184,207**	**25.81**	**14,832,286,756**		**Rp -**		**Rp -**	**45.16**	**62,775,470,963**	**120.16129**	**95,350,259,371**	**120.16%**	**563.94%**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor	5600	50,909,034	-	-	1	Rp -	0	-	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0.00%	0.00%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat**	**80.00%**	**225,411,128,160**	**72**	**60,811,434,386**	**70**	**147,384,088,620**		**60,401,571,412**		**39,841,014,011**		**Rp0**	**0.00%**	**Rp0**	-	**100,242,585,423**	**72**	**161,054,019,809**	**90**	**71.45%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	9,896,492,161	12	2,376,679,033	12	2,430,463,176	3	449,602,707	3	1,556,292,756	0	Rp -	0	Rp0	6	2,005,895,463	18	4,382,574,496	30.00%	44.28%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	6,960,384,912	15	22,738,351,375	6	52,564,188,056	1	46,137,605,500	2	2,428,186,000	0	Rp -	0	Rp0	3	48,565,791,500	18	71,304,142,875	72.00%	1024.43%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48		12	7,459,758,000	12	5,513,535,584	2	1,355,976,000	3	10,847,808,000	0	Rp -	0	Rp0	5	12,203,784,000	2	19,663,542,000			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**11,274,732,231**	**221.11**	**8,010,930,290**	**100**	**23,903,206,120.00**	**34.62**	**476,614,660**	**61.54**	**2,844,412,860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.15**	**3,321,027,520**	**317.26385**	**11,331,957,810**	**317.26%**	**100.51 %**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	1,823,714,316	20	708,167,249	3	742,726,200.00	2	73,300,000	2	479,811,400	0	Rp -	0	Rp0	4	553,111,400	24	1,261,278,649	160.00%	69.16%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	5,010,110,738	29	1,473,197,846	20	1,196,683,462.00	2	98,434,150	3	642,366,150	0	Rp -	0	Rp0	5	740,800,300	34	2,213,998,146	34.00%	44.19%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	4,440,907,177	6	5,829,565,195	3	21,963,796,458.00	5	304,880,510	11	1,722,235,310	0	Rp -	0	Rp0	16	2,027,115,820	22	7,856,681,015	146.67%	176.92 %	
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi**	**100**	**10,691,735,857**	**97**	**2,890,252,306**	**100**	**2,502,361,564**	**11.11**	**151,131,870**	**16.67**	**1,444,544,836**	**0**	**0**	**0**	**Rp -**	**27.78**	**1,595,676,706**	**124.99778**	**4,485,929,012**	**125.00%**	**41.96%**	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	60	3,962,658,387	13	1,407,539,901	12	1,245,786,100	2	52,914,150	3	807,660,514	0	Rp -	0	Rp0	5	860,574,664	18	2,268,114,565	30.00%	57.24%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat**	**80.00%**	**225,411,128,160**	**72**	**60,811,434,386**	**70**	**147,384,088,620**		**60,401,571,412**		**39,841,014,011**		**Rp0**	**0.00%**	**Rp0**	-	**100,242,585,423**	**72**	**161,054,019,809**	**90**	**71.45%**	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	60	3,314,336,933	12	1,134,264,490	12	950,636,864	2	98,217,720	3	555,294,322	0	Rp -	0	Rp0	5	653,512,042	17	1,787,776,532	28.33%	53.94%	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	60	1,787,065,921	10	348,447,915	12	305,938,600	0	-	0	81,590,000	0	Rp -	0	Rp0	0	81,590,000	2	430,037,915	3.33%	24.06%	
		Penataan Organisasi	**Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik**	**100**	**4,040,714,399**	**100**	**1,544,398,094**	**100**	**1,018,459,759**	**9.8**	**156,793,348**	**37.25**	**294,902,174**		**Rp -**		**Rp -**	**47.06**	**451,695,522**	**147.05882**	**1,996,093,616**	**147.06%**	**49.40%**	**Bagian Organisasi**
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	247	1,302,098,320	41	743,745,786	41	353,115,894	4	72,459,933	15	65,899,768	0	Rp -	0	Rp0	19	138,359,701	41	882,105,487	16.60%	67.74%	
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20	1,262,318,147	4	514,399,975	4	251,670,976	0	55,283,258	3	60,297,908	0	Rp -	0	Rp0	3	115,581,166	4	629,981,141	20.00%	49.91%	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10	681,748,835	2	121,946,600	2	135,923,827	0	29,050,157	1	53,754,487	0	Rp -	0	Rp0	1	82,804,644	2	204,751,244	20.00%	30.03%	
		Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	184,193,054	1	31,254,606	1	96,391,360	0	Rp0	0	32,077,150	0	Rp -	0	Rp0	0	32,077,150	1	63,331,756	20.00%	34.38%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	15	610,356,043	3	133,051,127	3	181,357,702	1	Rp0	0	82,872,861	0	Rp -	0	Rp0	1	82,872,861	3	215,923,988	20.00%	35.38%	
		Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100**	**8,365,555,485**	**100**	**5,137,323,358**	**100**	**6,562,389,666.00**	**41.67**	**842,261,021**	**25**	**1,328,606,965**		**Rp -**		**Rp -**	**66.67**	**2,170,867,986**	**166.66667**	**7,308,191,344**	**166.67%**	**87.36%**	**Bagian Protokol**
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan/acara yang terlaksana	60	3,506,165,782	12	2,191,422,705	12	2,743,491,129.00	3	396,688,723	3	593,735,701	0	Rp -	0	Rp0	6	990,424,424	6	3,181,847,129	10.00%	90.75%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat**	**80.00%**	**225,411,128,160**	**72**	**60,811,434,386**	**70**	**147,384,088,620**		**60,401,571,412**		**39,841,014,011**		**Rp0**	**0.00%**	**Rp0**	-	**100,242,585,423**	**72**	**161,054,019,809**	**90**	**71.45 %**	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	180	2,449,029,978	36	964,313,025	12	1,605,157,068.00	9	203,559,500	3	162,932,800	0	Rp -	0	Rp0	12	366,492,300	12	1,330,805,325	6.67%	54.34 %	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah dokumentasi tugas pimpinan	60	2,410,359,725	12	1,981,587,628	12	2,213,741,469.00	3	242,012,798	3	571,938,464	0	Rp -	0	Rp0	6	813,951,262	6	2,795,538,890	10.00%	115.98 %	
2	**Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra**	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi**	**100**	**140,592,769,988**	**106.37**	**32,640,870,249**	**100**	**18,109,285,975**	**60.45**	**561,542,300**	**72.35**	**1,602,347,682**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**132.79**	**2,163,889,982**	**239.16**	**34,804,760,231**	**239.16%**	**24.76 %**	
			Nilai LPPD	**3.33**		**2.77**		**2.75**										**2.77**		**5.54**		**100.73%**		
		Administrasi Tata Pemerintahan	**Cakupan Administrasi Pemerintahan dan**	**100**	**1,147,638,721**	**100**	**3,697,859,030**	**100**	**1,513,710,191**	**20**	**160,926,776**	**25**	**427,484,078**		**Rp -**		**Rp -**	**45**	**588,410,854**	**145**	**4,286,269,884**	**145.00%**	**373.49 %**	**Bagian Tata Pemerintahan**
			Kewilayahan yang terfasilitasi																					
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	115	279,300,593	23	2,551,058,407	8	822,428,092	0	55,907,000	3	256,449,200	0	Rp -	0	Rp0	3	312,356,200	3	2,863,414,607	2.61%	1025.21%	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	45	382,556,698	9	718,323,068	9	381,289,309	1	27,580,000	2	41,770,000	0	Rp -	0	Rp0	3	69,350,000	3	787,673,068	6.67%	205.90 %	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15	466,374,604	3	428,477,555	3	309,992,790	3	77,439,776	0	129,264,878	0	Rp -	0	Rp0	3	206,704,654	3	635,182,209	20.00%	136.20 %	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra**	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi**	**100**	**140,592,769,988**	**106.37**	**32,640,870,249**	**100**	**18,109,285,975**	**60.45**	**561,542,300**	**72.35**	**1,602,347,682**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**132.79**	**2,163,889,982**	**239.16**	**34,804,760,231**	**239.16%**	**24.76%**	
			Nilai LPPD	**3.33**		**2.77**		**2.75**										**2.77**		**5.54**		**100.73%**		
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi**	**100**	**2,443,421,838**	**142.16**	**2,246,587,343**	**100**	**802,499,483**	**16.32**	**141,115,435**	**20.03**	**64,282,336**		**Rp -**		**Rp -**	**36.34**	**205,397,771**	**178.50454**	**2,451,985,114**	**178.50%**	**100.35%**	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3750	840,719,420	946	553,310,564	750	302,834,963	208	40,030,122	260	34,334,343	0	Rp -	0	Rp0	468	74,364,465	1414	627,675,029	37.71%	74.66%	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	21	999,838,150	4	1,492,970,080	4	374,602,200	1	59,119,912	2	17,947,993	0	Rp -	0	Rp0	3	77,067,905	7	1,570,037,985	33.33%	157.03%	**Bagian Hukum**
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4370	602,864,269	102	200,306,699	674	125,062,320	24	41,965,401	24	12,000,000	0	Rp -	0	Rp0	48	53,965,401	150	254,272,100	3.43%	42.18%	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan**	**100**	**135,673,694,847**	**100**	**26,260,197,643**	**100**	**15,355,966,832**	**1.91**	**123,273,589**	**14.62**	**974,354,768**		**Rp -**		**Rp -**	**16.53**	**1,097,628,357**	**116.52542**	**27,357,826,000**	**116.53%**	**20.16%**	
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1785	20,674,670,340	357	16,137,023,211	357	12,254,651,832	2	9,375,000	61	835,083,494	0	Rp -	0	Rp0	63	844,458,494	63	16,981,481,705	3.53%	82.14%	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	500	25,882,458,007	100	9,555,029,864	100	2,805,130,000	1	18,875,879	1	68,151,574	0	Rp -	0	Rp0	2	87,027,453	2	9,642,057,317	0.40%	37.25%	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	75	1,210,097,476	5	568,144,568	15	296,185,000	6	95,022,710	7	71,119,700	0	Rp -	0	Rp0	13	166,142,410	13	734,286,978	17.33%	60.68%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra**	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi**	**100**	**140,592,769,988**	**106.37**	**32,640,870,249**	**100**	**18,109,285,975**	**60.45**	**561,542,300**	**72.35**	**1,602,347,682**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**132.79**	**2,163,889,982**	**239.16**	**34,804,760,231**	**239.16%**	**24.76%**	
			Nilai LPPD	**3.33**		**2.77**		**2.75**										**2.77**		**5.54**		**100.73%**		
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Cakupan Kerjasama Daerah yang terfasilitasi**	**100**	**1,328,014,582**	**83.33**	**436,226,233**	**100**	**437,109,469**	**22.22**	**136,226,500**	**12.7**	**136,226,500**		**Rp -**		**Rp -**	**34.92**	**272,453,000**	**118.25063**	**708,679,233**	**118.25%**	**53.36%**	
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah MoU Kerja sama Dalam Negeri yang terlaksanakan	150	593,746,970	25	224,466,320	33	214,723,000	7	58,273,800	4	58,273,800	0	Rp -	0	Rp0	11	116,547,600	36	341,013,920	24.00%	57.43%	**Bagian Kerjasama**
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah MoU yang telah dievaluasi pada Pelaksanaan Kerja sama	150	734,267,612	25	211,759,913	30	222,386,469	7	77,952,700	4	77,952,700	0	Rp -	0	Rp0	11	155,905,400	36	367,665,313	24.00%	50.07%	
3	**Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan**	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**	**Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	**5,616,603,462**	**100**	**2,251,993,881**	**100**	**4,963,637,925**	**93.22**	**737,794,760**	**149.67**	**1,080,379,517**	**0**	**Rp0**	**0**	**Rp0**	**242.89**	**1,818,174,277**	**342.88799**	**4,070,168,158**	**342.89%**	**72.47%**	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase Hasil Proses PBJ**	**100**	**2,222,326,959**	**158.52**	**1,770,769,420**	**100**	**3,020,952,918**	**17.72**	**279,177,576**	**64.06**	**424,193,729**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**81.78**	**703,371,305**	**240.29688**	**2,474,140,725**	**240.30%**	**111.33%**	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	8612	617,577,489	2367	683,038,373	1722	975,120,829	205	141,664,808	1177	251,482,400	0	Rp -	0	Rp0	1382	393,147,208	1382	1,076,185,581	16.05%	174.26%	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1236	1,470,985,984	580	735,875,042	247	1,124,199,904	141	83,412,768	83	93,812,533	0	Rp -	0	Rp0	224	177,225,301	224	913,100,343	18.12%	62.07%	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	108	535,053,945	12	351,856,005	12	921,632,185	5	54,100,000	9	78,898,796	0	Rp -	0	Rp0	14	132,998,796	14	484,854,801	12.96%	90.62%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	**Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan**	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**	**Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	**5,616,603,462**	**100**	**2,251,993,881**	**100**	**Rp4,963,637,925**	**93.22**	**737,794,760**	**149.67**	**1,080,379,517**	**0**	**Rp0**	**0**	**Rp0**	**242.89**	**1,818,174,277**	**342.89**	**4,070,168,158**	**342.89%**	**72.47%**	
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi**	**100**	**1,167,517,235**	**100**	**1,228,645,812**	**100**	**439,551,594**	**20.2**	**182,912,018**	**35.35**	**99,950,881**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**55.56**	**282,862,899**	**155.55**	**1,511,508,711**	**155.56%**	**129.46%**	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100	393,119,559	20	273,700,287	12	119,787,000	2	35,120,685	4	40,037,430	0	Rp -	0	Rp0	6	75,158,115	6	348,858,402	6.00%	88.74%	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	210	282,718,228	42	318,899,805	42	124,013,518	8	90,744,149	15	28,074,000	0	Rp -	0	Rp0	23	118,818,149	23	437,717,954	10.95%	154.82%	**Bagian Perekonomian**
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100	229,090,652	20	460,367,850	20	124,013,518	4	30,832,784	6	19,839,451	0	Rp -	0	Rp0	10	50,672,235	10	511,040,085	10.00%	223.07%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	125	262,588,796	25	175,677,870	25	71,737,558	6	26,214,400	10	12,000,000	0	Rp -	0	Rp0	16	38,214,400	16	213,892,270	12.80%	81.46%	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan**	**100**	**1,368,265,600**	**100**	**977,934,075**	**100**	**1,058,047,899**	**23.08**	**147,307,339**	**26.92**	**481,402,407**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**50**	**628,709,746**	**150**	**1,606,643,821**	**150.00%**	**117.42%**	
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	60	512,664,961	12	251,104,735	2	292,044,840	0	49,000,037	1	65,065,744	0	Rp -	0	Rp0	1	114,065,781	13	365,170,516	21.67%	71.23%	
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	60	366,035,953	12	275,807,661	12	269,433,759	3	21,705,189	3	11,464,590	0	Rp -	0	Rp0	6	33,169,779	18	308,977,440	30.00%	84.41%	**Bagian Administrasi Pembangunan**
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	60	489,564,687	12	451,021,679	12	496,569,300	3	76,602,113	3	404,872,073	0	Rp -	0	Rp0	6	481,474,186	18	932,495,865	30.00%	190.47%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	**Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan**	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**	**Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	**5,616,603,462**	**100**	**2,251,993,881**	**100**	**4,963,637,925**	**93.22**	**737,794,760**	**149.67**	**1,080,379,517**	**0**	**Rp0**	**0**	**Rp0**	**242.89**	**1,818,174,277**	**342.89**	**4,070,168,158**	**342.89%**	**72.47%**	
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam**	**100**	**858,493,667**	**100**	**942,883,714**	**100**	**445,085,514**	**32.22**	**128,397,827**	**23.33**	**74,832,500**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**55.56**	**203,230,327**	**155.55**	**1,146,114,041**	**155.56%**	**133.50%**	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian,Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	171	384,830,926	35	365,849,340	35	237,544,514	8	46,498,922	10	64,350,900	0	Rp -	0	Rp0	18	110,849,822	53	476,699,162	30.99%	123.87%	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	144	235,922,644	25	328,320,399	25	103,742,000	10	41,361,439	11	7,781,600	0	Rp -	0	Rp0	21	49,143,039	46	377,463,438	31.94%	159.99%	**Bagian Sumber Daya Alam**
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air,Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	171	237,740,097	30	248,713,975	30	103,799,000	11	40,537,466	0	2,700,000	0	Rp -	0	Rp0	11	43,237,466	41	291,951,441	23.98%	122.80%	
									Rata-rata capaian kinerja (%)	**17.68%**	**61,700,908,472**	**30.86%**	**42,523,741,210**	**33.48%**	**Rp0**	**18.73%**	**Rp0**	**100.75%**	**104,224,649,682**					

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 46.05%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 103.403.112.611 (Seratus tiga milyar empat ratus tiga juta serratus dua belas ribu enam ratus sebelas rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 177.725.932.520 (Seratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima atus dua puluh rupiah) atau sebesar 58.18%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Sekretariat Daerah sebesar 35,73% dengan predikat kinerja Sangat Rendah
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 1 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 7 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 10 indikator capaian kinerja 0%-50% = 106 indikator

2.1. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. penyusunan perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. penetapan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. penyelenggaraan pembinaan administrasi Pemerintahan, kelembagaan, tatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Daerah;
6. pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah;
7. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat Daerah; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Sekretariat Daerah adalah:

Sekretaris Daerah

A. Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahaan dan Kesejateraan Rakyat membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum,

dan kerja sama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan :

1. Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi.

Bagian tata Pemerintahan membawahi :

a) Subbagian Administrasi Pemerintahan
b) Subbagian Administrasi Kewilayahan
c) Subbagian Otonomi Daerah

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahkan :

a) Subbagian Bina Mental dan Spiritual
b) Subbagian Kesejahteraan Sosial
c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat

3. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Bagian Hukum membawahkan :

a) Subbagian Perundang-Undangan
b) Subbagian Bantuan Hukum
c) Subbagian Dokumentasi dan Reformasi

4. Bagian Kerja Sama

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerja sama dalam negeri dan luar negeri, dan evaluasi kerja sama.

Bagian Kerja Sama membawahkan :

a) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri

b) Subbagian Evaluasi Kerja Sama

B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan :

1. Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengorganisasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian pendistribusian perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

Bagian Perekonomian membawahkan :

a. Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD

b. Subbagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

c. Subbagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

2. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Administrasi Pembangunan membawahkan :

a) Subbagian Penyusunan Program
b) Subbagian Pengendalian Program
c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahkan :

a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

4. **Bagian Sumber Daya Alam, membawahkan**

Bagian Sumber daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasiaan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam peertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan.

Bagian Sumber Daya Alam membawahkan :

a) Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
b) Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup
c) Subbagaian Sumber Daya Alam Energi dan Air

C. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.

Asisten Administrasi Umum membawahkan :

a. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum membawahkan :

a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian

b) Subbagian Perlengkapan

c) Subbagian Rumah Tangga

b. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi membawahkan :

a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana

c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi

c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahkan :

a) Subbagian Protokol

b) Subbagian Komunikasi Pimpinan

c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan

d. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Keuangan membawahkan :

a) Subbagian Perencanaan

b) Subbagian Keuangan

c) Subbagian Pelaporan

Upaya Sekretariat Daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Rata – Rata Nilai Akip Perangkat Daerah;
2. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi;
3. Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuaiketentuan perundang – Undangan;
4. Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah;
5. Bidang pemerintah umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang- undangan;dan
6. Persentase kebijakan Perekonomian dan pembangunan yang terlaksana secara efektif.

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah terdapat dalam Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi umum	Rata – rata Nilai Akip Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	A		
	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi	68	70	72	75	77		76,66
Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang undangan.	85	85	90	90	95		
	Persentasi hasil koordinasi kebijakan daerah Bidang pemerintah umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan	85	85	90	90	95		103,55
Meningkatnya Koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif.	100	100	100	100	100		65,27

Berdasarkan Tabel 2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum memiliki 2 indikator kinerja yaitu :
   1. Rata – Rata Nilai Akip Perangkat Daerah; dan
   2. Indeks Kepuasanan Layanan Administrasi belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar dari target sebesar 72 dengan capaian kinerja sebesar 76,66 %;
b. Sasaran Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra memiliki 2 indikator kinerja yaitu :
   1. Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang – undangan; dan
   2. Persentasi hasil koordinasi kebijakan daerah Bidang pemerintah umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang –undangan belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar dari target sebesar 90 dengan capaian kinerja sebesar 103,55 %
c. Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan memiliki 1 indikator kinerja yaitu :
   1. Persentase Kebijakan Perekonimian dan Pembangunan yang terlaksana secara efektif belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar dari target sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 65,27 %

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Respon dari Penerima Hibah/Lembaga/ perorangan belum memadai atau terlambat melengkapi dokumen yang diperlukan.
2. Ada beberapa dokumen yang realisasi kinerjanya dilaksakan pada triwulan berikutnya
3. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal
4. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah
5. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

NO	TUJUAN / SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	FORMULASI	Target	
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024
1	Meningkatkan kualitas kebijakan publik pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM dari Ombudsman		
2	Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang pemerintahan umum yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang pemerintahan umum dikalikan 100%	90	90
		Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang kesejahteraan rakyat yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang kesejahteraan rakyat dikalikan 100%	90	90
3	Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang perekonomian dan pembangunan yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang perekonomian dan pembangunan dikalikan 100%	100	100
4	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum	Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	umlah nilai AKIP seluruh Perangkat daerah dibagi Jumlah perangkat daerah dikalikan 100%	**BB**	**BB**
			Hasil Survei Kepuasan atas layanan Bagian Umum, Bagian Protokol Pimpinan, Bagian Perencanaan dan Keuangan	**72**	**72**

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu ““PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER”” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah mendukung pencapaian sasaran ke 3 dan 4, yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Sekretariat Daerah telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel Berikut :

Tabel 3.2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
Sekretariat Daerah

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sekretariat Daerah				170,322,412,520	Sekretariat Daerah				221,150,062,417	
I	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Paser	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	4,963,637,925	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Paser	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	5,587,971,912	
A	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa										
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Persentase Hasil Proses PBJ	100	3,020,952,918	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Persentase Hasil Proses PBJ	100	3,020,952,918	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1722	975,120,829	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1722	975,120,829	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	247	1,124,199,904	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	247	1,124,199,904	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	12	921,632,185	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	12	921,632,185	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Paser	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	4,963,637,925	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Paser	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	5,587,971,912	
	Bagian Perekonomian										
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Paser	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	100	439,551,594	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Paser	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	100	811,193,581	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12	119,787,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12	414,634,987	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	42	124,013,518	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	42	124,013,518	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		124,013,518	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		124,013,518	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD		71,737,558	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD		148,531,558	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Paser	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	4,963,637,925	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Paser	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	5,587,971,912	
	Bagian Administrasi Pembangunan										
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Paser	Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan	100	1,058,047,899	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Paser	Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan	100	1,310,739,899	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2	292,044,840	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2	292,044,840	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	269,433,759	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	269,433,759	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	496,569,300	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	749,261,300	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Paser	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	4,963,637,925	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Paser	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	5,587,971,912	
	Bagian Sumber Daya Alam										
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Paser	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100	445,085,514	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Paser	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100	445,085,514	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian,Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	37	237,544,514	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian,Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	37	237,544,514	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	30	103,742,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	30	103,742,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air,Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	35	103,799,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air,Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	35	103,799,000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Paser	1. Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	100	18,109,285,975	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Paser	1. Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	100	18,698,841,454	
	Bagian Tata Pemerintahan										
	Administrasi Tata Pemerintahan	Paser	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	100	1,513,710,191	Administrasi Tata Pemerintahan	Paser	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	100	1,513,710,191	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	8	822,428,092	Penataan Administrasi Pemerintahan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	8	822,428,092	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9	381,289,309	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9	381,289,309	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	309,992,790	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	309,992,790	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Paser	1. Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	100	18,109,285,975	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Paser	1. Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	100	18,698,841,454	
	Bagian Hukum										
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Paser	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	100	802,499,483	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Paser	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	100	2,300,967,520	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Paser	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	750	302,834,963	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Paser	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	750	716,029,100	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Paser	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4	374,602,200	Fasilitasi Bantuan Hukum	Paser	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4	1,070,630,000	
	Pendokumenta sian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Paser	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	674	125,062,320	Pendokumenta sian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Paser	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	674	514,308,420	
	Bagian Kesejahteraan Rakyat										
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Paser	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun kebijakan	100	15,355,966,832	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Paser	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun kebijakan	100	14,355,966,832	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	357	12,254,651,832	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	357	12,254,651,832	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi,Keseh atan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100	2,805,130,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial,Transmigrasi,Keseh atan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100	1,805,130,000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,Kebuday aan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	15	296,185,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,Kebuday aan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	15	296,185,000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Paser	1. Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	100	18,109,285,975	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Paser	1. Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	100	18,698,841,454	
	Bagian Kerjasama										
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Paser	Cakupan Kerjasama Daerah	100	437,109,469	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Paser	Cakupan Kerjasama Daerah	100	528,196,911	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	33	214,723,000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		287,640,682	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Paser	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	30	222,386,469	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Paser	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		240,556,229	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Paser	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	74	147,249,488,620	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Paser	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	74	196,863,249,051	
	Bagian Organisasi										
	Penataan Organisasi	Paser	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan	100	1,018,459,759	Penataan Organisasi	Paser	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan	100	1,469,792,277	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Paser	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	41	353,115,894	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Paser	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	41	786,788,894	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan tata Laksana	4	251,670,976	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan tata Laksana	4	269,330,476	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Paser	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	135,923,827	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Paser	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	135,923,827	
	Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	Paser	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	96,391,360	Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	Paser	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	96,391,360	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3	181,357,702	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah		181,357,720	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Paser	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	74	147,249,488,620	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Paser	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	74	196,863,249,051	
	Bagian Umum										
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paser	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	132,355,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paser	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	380,108,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	70,075,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	197,640,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180	62,280,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180	182,468,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paser	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100	18,588,326,475	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paser	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100	39,102,200,435	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan BangunanKantor	Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	87,472,480	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan BangunanKantor	Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	609,197,400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	17	6,718,938,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	17	11,256,662,260	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25	1,000,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	1,829,268,920	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	30	1,378,953,895	Penyediaan Bahan Logistik	Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	30	2,412,476,455	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	9	47,008,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	9	68,094,800	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150	6,300,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150	16,842,410,000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Paser	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	74	147,249,488,620	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Paser	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	74	196,863,249,051	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	2,947,953,600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	5,976,090,600	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	108,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	108,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paser	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	61,606,114,816	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paser	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	83,390,279,062	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lsitrik	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	1,682,903,176	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lsitrik	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	2,606,901,006	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	54,409,676,056	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	72,637,978,056	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12	5,513,535,584	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12	8,145,400,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Paser Daerah	Paser	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	22,426,108,120	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Paser Daerah	Paser	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	26,964,366,020	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	742,726,200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	1,205,299,500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	1,196,683,462	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	1,891,700,062	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	20,486,698,458	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		23,867,366,458	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Paser	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	74	147,249,488,620	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Paser	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	74	196,863,249,051	
	Fasilitasi Kerumahtangga an Sekretariat Daerah	Paser	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	100	2,275,000,000	Fasilitasi Kerumahtangga an Sekretariat Daerah	Paser	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	100	2,720,484,364	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	12	1,100,000,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	1,125,786,100	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12	675,000,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12	900,636,864	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	12	500,000,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	12	694,061,400	
	Administrasi Keuangan dan Opersional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang difasilitasi	100	1,271,936,001	Administrasi Keuangan dan Opersional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang difasilitasi	100	1,371,936,001	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10	1,121,936,001	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10	1,121,936,001	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	150,000,000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	250,000,000	
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan										
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Paser	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	6,562,389,666	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Paser	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	6,562,389,666	
	Fasilitasi Keprotokolan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	2,743,491,129	Fasilitasi Keprotokolan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	2,743,491,129	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	1,605,157,068	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	1,605,157,068	
	Pendokumenta sian Tugas Pimpinan	Paser	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	2,213,741,469	Pendokumenta sian Tugas Pimpinan	Paser	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		2,213,741,469	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Paser	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	74	147,249,488,620	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Paser	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	74	196,863,249,051	
	Bagian Perencanaan Dan Keuangan										
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Paser	Perencanaan,Jumla hPenganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	276,355,980	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Paser	Perencanaan,Jumla hPenganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	276,355,980	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	129,916,480	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	129,916,480	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	65,471,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	65,471,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	80,968,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	80,968,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	32,192,442,803	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Paser	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	33,725,337,246	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2268	31,620,472,868	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2268	33,153,367,311	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	12	40,374,293	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	12	40,374,293	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD	Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	950	513,170,642	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD	Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	950	513,170,642	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	18,425,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	18,425,000	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	100	900,000,000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daer0ah	Paser	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	100	900,000,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	300,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	300,000,000	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	600,000,000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	600,000,000	

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Desa/Kelurahan, Musrnbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrembang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring sebrbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, saran dan pendapat DPRD berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang RPJMD.

Tidak semua aspirasi tersebut dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Tahun 2024, sehingga sebagian diusulkan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Adapun usulan Program dan Kegiatan masyarakat yang direncanakan pada perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut ; abel berikut:

Tabel 3
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

NO	NAMA	ALAMAT	USULAN	SEMULA	BERTAMBAH / BERKURANG	MENJADI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) KAB. PASER	Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot	613,755,000	50,000,000	75,000,000	125,000,000	BUPATI
2	GPDI PNIEL KENDAROM	Desa Kendarom Kec. Kuaro	146,901,000	30,000,000	90,000,000	120,000,000	BUPATI
3	GPDI ATANG PAIT	Desa Atang Pait Kec. Long Ikis	174,372,000	50,000,000	100,000,000	150,000,000	BUPATI
4	GPdI ALFA OMEGA	Kecamatan Muara Komam Komp. Silkar Indah RT. 07	140,000,000	50,000,000	75,000,000	125,000,000	BUPATI
5	GEREJA PANTEKOSTA JEMAAT MARANATHA TEMPAKAN	RT. 07 Desa Tempakan Kec. Batu Engau	151,290,000	90,000,000	60,000,000	150,000,000	BUPATI
6	GEREJA BETHEL TABERNAKEL BUKIT HERMON	Desa Modang	150,000,000	-	150,000,000	150,000,000	BUPATI
7	BAMAG NASIONAL	Jl. Negara KM. 97 Desa Sandeley	242,500,000	-	200,000,000	200,000,000	BUPATI
8	ASOSIASI PENDETA INDONESIA (API)	GPdI RT. 03 Pekasau Desa Modang	603,200,000	-	100,000,000	100,000,000	BUPATI
9	GPdI JEMAAT BETHANY BATU KAJANG	Jl. Tambang Kideco RT. 25 Desa Batu Kajang	420,000,000	-	125,000,000	125,000,000	BUPATI
10	GPdI JEMAAT SMIRNA MUARA ANDEH	Jl. Propinsi RT. 01 Desa Muara Andeh	531,907,000	-	125,000,000	125,000,000	BUPATI
11	GPdI JEMAAT EKKLESIA KERTA BHAKTI	Jl. Semeru RT. 01 Desa Kerta Bhakti	195,965,000	-	125,000,000	125,000,000	BUPATI
12	GPdI JEMAAT SULILIRAN BARU	RT. 010 Desa Suliliran Baru	345,650,000	-	125,000,000	125,000,000	BUPATI
13	GEREJA GMAHK JEMAAT NAZARET	Jl. Sultan Adam RT. 10 Desa Pasir Belengkong	1,632,000,000	-	100,000,000	100,000,000	BUPATI
14	GPdI JEMAAT BETLEHEM	Jl. Negara Km. 100 RT. 02 Kecamatan Kuaro	200,000,000	-	150,000,000	150,000,000	BUPATI
15	GPdI JEMAAT HALELUYA BUSUI	Jl. Negara Kuaro-Batu Aji Km. 160 Kec. Batu Sopang	371,450,000	-	125,000,000	125,000,000	BUPATI
16	GPdI RANGAN LUAR	Jl. Negara Km. 111 RT. 02 Desa Rangan Kec. Kuaro	304,959,500	-	125,000,000	125,000,000	BUPATI
17	MASJID SABILAL MUHTADIN	Jl. Senaken Gg. Alam Permai Desa Senaken	150,000,000	-	150,000,000	150,000,000	BUPATI
18	MASJID AT-TAQWA	Jl. Kandilo Bahari Kelurahan Tanah Grogot	188,150,000	-	185,000,000	185,000,000	BUPATI
19	MUSHOLLA AL-ANSHAR	RT. 06 Desa Semuntai	35,090,000	-	35,000,000	35,000,000	KETUA DPRD
20	MUSHOLA NIDAUR RAHMAN SDN 019 LONG IKIS	Jl. Mulawarman Desa Tajur	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	KETUA DPRD

NO	NAMA	ALAMAT	USULAN	SEMULA	BERTAMBAH / BERKURANG	MENJADI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
21	MASJID AL IKHLAS	Desa Makmur Jaya RT. 12 Kecamatan Long Kali	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	KETUA DPRD
22	LANGGAR MIFTAHUL JANNAH	Desa Putang Kecamatan Long Kali	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	KETUA DPRD
23	MUSHOLLA NURUL HIKMAH	Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	KETUA DPRD
24	GPdI MARANATHA LONG GELANG	Desa Long Gelang Kecamatan Long Ikis	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	KETUA DPRD
25	LANGGAR BAITURRAHMAN	Blok D RT. 03 Desa Tajur	228,100,000	-	50,000,000	50,000,000	KETUA DPRD
26	MUSHOLLA DARUL IBADAH	Desa Tajur Kecamatan Long Ikis	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	KETUA DPRD
27	LANGGAR AL MUHAJIRIN	Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	KETUA DPRD
28	MASJID NURUL HUDA	Dusun Suka Asih Blok A RT. 05 Desa Suliliran Baru	465,478,000	-	200,000,000	200,000,000	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
29	LANGGAR AL-IKHLAS	Jl. Gajah Mada Gg. Cendana RT. 007/003 Tanah Grogot	150,000,000	-	120,000,000	120,000,000	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
30	MAJELIS TAKLIM AL-AMANAH	Jl. Untung Suropati Gg. Amas RT. 03 Desa Jone	15,710,000	-	15,000,000	15,000,000	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
31	MUSHOLLA AL-ANWAR	Perum BTN KORPRI Tapis Blok B6 RT. 08 Desa Tapis	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
32	LANGGAR BAITURROHMAN	Jl. Ahmad Yani Gg. Arrohman RT. 02 RW. 06 Kelurahan Tanah Grogot	64,150,000	-	60,000,000	60,000,000	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
33	LANGGAR AT-TAQWA	Jl. H. Sadri RT. 002 Desa Lori	336,107,000	-	50,000,000	50,000,000	KABAG KESRA
34	MASJID AL-HIJRAH	Jl. Negara RT. 009 Desa Lombok	220,000,000	-	200,000,000	200,000,000	*KETUA DPRD*
35	MAJELIS HABSYI AT THAIBAH	Jl. Negara Km. 89 RT. 09 Desa Lombok	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	*KETUA DPRD*
36	MASJID AL-FALAH	Desa Sebakung Taka	310,750,000	-	200,000,000	200,000,000	*KETUA DPRD*
37	MUSHOLLA NURUL HIDAYAH	Desa Mendik Karya Kecamatan Long Kali	44,334,000	-	40,000,000	40,000,000	*KETUA DPRD*
38	MASJID AR-RAHMAN	Desa Olung Kecamatan Long Ikis	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	*KETUA DPRD*
39	MAJELIS TA'LIM AL-ISTIQOMAH GUNUNG PUTAR	Jl. Negara Km. 64 RT. 003 Desa Gunung Putar	29,600,000	-	25,000,000	25,000,000	*KETUA DPRD*
40	MAJELIS TA'LIM AL-BADRU GUNUNG PUTAR	Jl. Negara Km. 59 RT. 04 Desa Gunung Putar	24,600,000	-	20,000,000	20,000,000	*KETUA DPRD*

NO	NAMA	ALAMAT	USULAN	SEMULA	BERTAMBAH / BERKURANG	MENJADI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
41	MAJELIS YASINAN AL MUHAJIRIN JULANG	Jl. Negara Km. 60 RT. 02 Desa Gunung Putar	17,850,000	-	15,000,000	15,000,000	*KETUA DPRD*
42	PALANG MERAH INDONESIA (PMI)	Tanah Grogot	350,000,000	350,000,000	-	350,000,000	
43	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PWRI)	Tanah Grogot	60,000,000		15,000,000	75,000,000	
44	Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG)	Tanah Grogot	70,000,000	-	-	-	
45	Kelompok Seni Islam Asy-syifa	Tanah Grogot	19,000,000	-	-	-	
46	Assosiasi Pendeta Indonesia	Tanah Grogot	1,800,000,000	-	-	-	
JUMLAH			11,377,868,500	270,000,000	**3.805.000.000**	4,485,000,000	

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3...

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A						**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti**																
							Nilai LPPD							**18,109,285,975**	**25,378,205,975**							**18,774,117,909**	
1	4	1	2	2		Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	-			-	-	0,00	1,513,710,191	1,513,710,191			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		1,603,675,701	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				23 Dokumen	8 Dokumen	0,00	822,428,092	822,428,092	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			863,549,497	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				9 Dokumen	9 Dokumen	0,00	381,289,309	381,289,309	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			400,353,774	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2	3	Fasiltasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	309,992,790	309,992,790	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			339,772,430	SEKRETARIAT DAERAH
2	4	1	2	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	-			-	-	0,00	802,499,483	802,499,483			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		694,438,092	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				750 Dokumen	750 Dokumen	0,00	302,834,963	302,834,963	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			169,790,346	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A						**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti**																
							Nilai LPPD																
	4	1	2	2	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				4 Kasus	4 Kasus	0,00	374,602,200	374,602,200	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			393,332,310	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				874 Dokumen	874 Dokumen	0,00	125,062,320	125,062,320	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			131,315,436	SEKRETARIAT DAERAH
3	4	1	2	2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan	-			-	100%	0,00	15,355,966,832	22,624,886,832			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	-		16,017,039,174	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				357 Dokumen	357 Dokumen	0,00	12,254,651,832	18,396,369,832	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			12,400,401,924	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2	2	Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	2,805,130,000	3,875,130,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			3,305,643,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2	3	Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	296,185,000	353,387,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			310,994,250	SEKRETARIAT DAERAH
4	4	1	2	2		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Cakupan Kerjasama Daerah yang terfasilitasi	-			-	-	0,00	437,109,469	437,109,469			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		458,964,942	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2	1	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				33 Dokumen	33 Dokumen	0,00	214,723,000	214,723,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			225,459,150	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2	3	Evaluasi Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				30 Laporan	30 Laporan	0,00	222,386,469	222,386,469	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			233,505,792	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B						**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti**							**4,963,637,925**	**4,963,637,925**							**2,212,700,845**	
1	4	1	3	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Hasil Proses PBJ	-			-	-	0,00	3,020,952,918	3,020,952,918			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		766,389,623	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1722 Dokumen	2200 Dokumen	0,00	975,120,829	975,120,829	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			188,937,230	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				247 Dokumen	247 Dokumen	0,00	1,124,199,904	1,124,199,904	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			412,942,068	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Orang	12 Orang	0,00	921,632,185	921,632,185	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			164,510,325	SEKRETARIAT DAERAH
2	4	1	3	2		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	-			-	-	0,00	439,551,594	439,551,594			-	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	-		461,202,582	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2	1	Koordinasi,Sinkronisasi,Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				20 Dokumen	12 Dokumen	0,00	119,787,000	119,787,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			125,776,350	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				42 Laporan	42 Laporan	0,00	124,013,518	124,013,518	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			130,214,194	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	124,013,518	124,013,518	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			130,214,194	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2	4	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				25 Dokumen	25 Dokumen	0,00	71,737,558	71,737,558	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			74,997,844	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B						**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti**							**4,963,637,925**	**4,963,637,925**							**2,212,700,845**	
3	4	1	3	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan	-			-	-	0,00	1,058,047,899	1,058,047,899			-	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	-		467,480,369	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	292,044,840	292,044,840	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			172,933,782	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	269,433,759	269,433,759	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			140,790,047	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	496,569,300	496,569,300	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			153,756,540	SEKRETARIAT DAERAH
4	4	1	3	2		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	-			-	-	0,00	445,085,514	445,085,514			-	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	-		517,628,271	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2	1	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,Kehutanan,Kelautan,dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				35 Dokumen	37 Dokumen	0,00	237,544,514	237,544,514	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			206,316,771	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2	2	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				30 Dokumen	30 Dokumen	0,00	103,742,000	103,742,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			155,613,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2	3	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				35 Dokumen	35 Dokumen	0,00	103,799,000	103,799,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			155,698,500	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C						**Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Kepuasan Layanan Sekretariat.**							**147,249,488,620**	**100,951,279,950**							**45,263,169,891**	
1	4	1	1	2.1		Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	-			-	-	0,00	1,018,459,759	1,018,459,759			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		1,033,848,730	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				41 Dokumen	41 Dokumen	0,00	353,115,894	353,115,894	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			335,237,672	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	4 Laporan	0,00	251,670,976	251,670,976	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			264,254,525	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	135,923,827	135,923,827	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			142,720,018	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	4	Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	96,391,360	96,391,360	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			101,210,928	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	181,357,702	181,357,702	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			190,425,587	SEKRETARIAT DAERAH
2	4	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah	-			-	-	0,00	-	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Sekretariat Daerah		47,029,416	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	-	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			47,029,416	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C						**Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Kepuasan Layanan Sekretariat.**							**147,249,488,620**	**100,951,279,950**							**45,263,169,891**	
3	4	1	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100% undefined undefined	100% undefined undefined	0,00	132,355,000	197,640,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Sekretariat Daerah		149,673,930	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	70,075,000	197,640,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			149,673,930	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				180 Orang	180 Orang	0,00	62,280,000	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			-	SEKRETARIAT DAERAH
4	4	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100%	100%	0,00	18,588,326,475	18,730,948,860			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Sekretariat Daerah		440,364,063	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	0,00	87,472,480	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	0,00	6,718,938,500	18,578,998,860	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			325,263,063	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	0,00	1,000,000,000	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	0,00	1,378,953,895	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	0,00	47,008,000	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				150 Laporan	150 Laporan	0,00	6,300,000,000	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			-	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C						**Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Kepuasan Layanan Sekretariat.**							**147,249,488,620**	**100,951,279,950**							**45,263,169,891**	
	4	1	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	0,00	2,947,953,600	-	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	108,000,000	151,950,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			115,101,000	SEKRETARIAT DAERAH
5	4	1	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	-			100%	100%	0,00	-	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Sekretariat Daerah		106,808,080	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	-	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			106,808,080	SEKRETARIAT DAERAH
6	4	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	-			-	-	0,00	61,606,114,816	8,145,400,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Sekretariat Daerah		10,657,500	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1100 Laporan	0 Laporan	0,00	-	-	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			10,657,500	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1,682,903,176	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	54,409,676,056	-	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	5,513,535,584	8,145,400,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			-	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C						**Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Kepuasan Layanan Sekretariat.**							**147,249,488,620**	**100,951,279,950**							**45,263,169,891**	
7	4	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	-			-	-	0,00	22,426,108,120	27,236,164,520			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Sekretariat Daerah		6,834,382,363	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	0,00	742,726,200	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	0,00	1,196,683,462	1,891,700,062	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			474,810,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	20,486,698,458	25,344,464,458	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			6,359,572,363	SEKRETARIAT DAERAH
8	4	1	1	2.1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	-			-	-	0,00	1,271,936,001	1,371,936,001			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Sekretariat Daerah		813,615,602	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	1,121,936,001	1,121,936,001	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			498,615,602	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	3	Pelaksanaan *Medical Check Up*Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	8 Orang	0,00	150,000,000	250,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			315,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
9	4	1	1	2.1		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	-			-	-	0,00	2,275,000,000	2,661,647,918			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Sekretariat Daerah		3,727,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	1,100,000,000	1,405,072,454	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			2,310,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	675,000,000	950,636,864	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			1,417,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	500,000,000	305,938,600	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			-	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C						**Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Kepuasan Layanan Sekretariat.**							**147,249,488,620**	**100,951,279,950**							**45,263,169,891**	
10	4	1	1	2.1		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	-	0,00	6,562,389,666	6,562,389,666			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		2,023,009,385	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2,743,491,129	2,743,491,129	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			674,264,922	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				36 Laporan	12 Laporan	0,00	1,605,157,068	1,605,157,068	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			635,414,921	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2,213,741,469	2,213,741,469	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			713,329,542	SEKRETARIAT DAERAH
11	4	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai reformasi Birokrasi Nilai SAKIP Perangkat daerah	-			70 B	70 B	0,00	276,355,980	401,355,980			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		109,074,770	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	129,916,480	244,516,480	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			51,938,516	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	65,471,500	65,471,500	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			17,456,250	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	80,968,000	91,368,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			39,680,004	SEKRETARIAT DAERAH
12	4	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	32,192,442,803	33,725,337,246			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		29,022,206,052	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2268 Orang/bulan	2268 Orang/bulan	0,00	31,620,472,868	33,153,367,311	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			28,067,528,219	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				725 Dokumen	725 Dokumen	0,00	513,170,642	513,170,642	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			472,938,575	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	-	-	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			420,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	18,425,000	18,425,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			19,346,250	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	40,374,293	40,374,293	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			42,393,008	SEKRETARIAT DAERAH
13	4	1	1	2.1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	-	-	900,000,000	900,000,000			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		945,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	-	300,000,000	300,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			315,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.1	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	-	600,000,000	600,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			630,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah01 Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

1.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tana Paser,..... 2024
Sekretaris Daerah

Drs. Katsul Wijaya, M.SI
NIP. 19661211 198609 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan RM Noto Sunardi No 1 Telp (0543) 24060 Fax (0543) 22729
Tanah Paser

SURAT KEPUTUSAN
PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DERAH
KABUPATEN PASER
NOMOR : 050/ 10 /Setda/PK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2024

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran Tugas Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;
b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005 Nomor) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;
16. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangja menegah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini bertugas mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Paser

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Bagian Perencanaan dan KeuanganTahun Anggaran 2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal, 20 Juni 2024

PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196612111986091002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 050/ 10 /Setda/PK/2024
TANGGAL : 20 Juni 2024

KOMPOSISI DAN PERSONALIA

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN PASER TAHUN 2024

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Paser

Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Ketua : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Sekretaris : Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

1. Nurmalia Rasyida, SP (Analis Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)
2. Anwar, SE (Perencana Ahli Pertama pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah)
3. Selamet Riyadi. SR (Pengelola Data pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)
4. Raihan Farah Diva, S.Kom (Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser).
5. Siti Rohmatin, SE (Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)
6. Akibah Takdiriah (Verifikator Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser).

PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196612111986091002

RENCANA KERJA PERUBAHAN



RENJA PERUBAHAN TA 2024

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASER

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2024 dapat dilaksanakan.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 ini disusun sebagai implementasi tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dan dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang selaras dengan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2024.

Adapun penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Harapan kami semoga Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser ini bisa digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tana Paser, 05 Agustus 2024

SEKRETARIS DPRD,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER SEKRETARIAT DPRD

M. ISKANDAR ZULKARNAIN, M.Sc

NIP 19780817 200312 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan hukum 2

1.3 Maksud dan tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja SKPD s.d. Triwulan II Tahun 2024 7

2.2 Analisis capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD 25

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat serta Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024 27

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran 30

3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 31

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024 50

BAB IV PENUTUP

4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 64

4.2 Rencana Tindak Lanjut 64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	26
Tabel 3.1	Penyesuaian Target Tujuan/Sasaran Perubahan Renja 2024	30
Tabel 3.2	Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kab. Paser ...	33
Tabel 3.3	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024	50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Revisi Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat DPRD, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
21. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rancangan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Sekretariat DPRD, proses penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD, keterkaitan antara Renja Sekretariat DPRD dengan dokumen RKPD, Renstra Sekretariat DPRD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Sekretariat DPRD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II.

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut

2.3. Faktor Pendorong dan Penghambat serta Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
0						**297.600.981.919**		**188.622.486.446**		**88.906.192.887**		**14.922.335.775**		**19.175.053.169**		-		-		**34.097.388.944**		**222.719.875.390**	-	**73**	**Sekretariat DPRD**
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel		**Nilai evaluasi SAKIP dari APIP**	**A (82)**			**B (63,92)**		**BB (72)**		-		-						**0**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat**	**80**		**189.863.894.061**	**93,71**	**118.685.456.965**	**74**	**48.640.222.441**	**90**	**8.795.906.153**	**91**	**11.774.359.159**					**90**	**20.570.265.312**		**139.255.722.277**	-	**73**	**Bagian Umum dan Keuangan**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten**	**A (82)**		**615.967.369**	**B (63,92)**	**267.747.484**	**BB (72)**	**100.933.780**	**0**	-	**0**	**19.196.000**					**0**	**19.196.000**		**286.943.484**		**47**	**Bagian Umum dan Keuangan**
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	340.108.792	3	150.102.938	2	55.788.110	0	-	0	8.896.000					0	8.896.000	3	158.998.938	27	47	Subbag Program dan Keuangan

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	16.153.908	12	7.610.880	13	2.799.680	3	-	3	-					6	-	18	7.610.880	360	47	Subbag Program dan Keuangan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	259.704.669	3	110.033.666	3	42.345.990	2	-	0	10.300.000					2	10.300.000	5	120.333.666	33	46	Subbag Program dan Keuangan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**33.638.815.678**	**100**	**18.202.716.443**	**100**	**7.073.018.266**	**25**	**1.347.737.957**	**25**	**2.647.304.432**					**50**	**3.995.042.389**	**62,5**	**22.197.758.832**	**63**	**66**	**Bagian Umum dan Keuangan**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2700	orang/ 60 bulan	33.334.905.959	576	18.094.760.978	630	7.040.318.586	125	1.342.870.957	135	2.634.324.752					260	3.977.195.709	836	22.071.956.687	31	66	Subbag Program dan Keuangan
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	Dok	138.140.781	12	66.800.305	12	21.057.920	3	4.867.000	3	4.889.000					6	9.756.000	18	76.556.305	30	55	Subbag Program dan Keuangan

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	**2**	**3**	**4**	**5**			**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11**		**12**		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		**15**
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	Laporan	165.768.938	2	41.155.160	2	11.641.760	1	-	1	8.090.680					2	8.090.680	4	49.245.840	40	30	Subbag Program dan Keuangan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.355.868.345**	**155**	**1.340.155.925**	**100**	**280.444.000**	**25**	**220.306.001**	**25**	**19.853.248**					**50**	**240.159.249**	**205**	**1.580.315.174**	**205**	**117**	**Bagian Umum dan Keuangan**
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	Orang	1.355.868.345	31	1.340.155.925	20	280.444.000	15	220.306.001	4	19.853.248					19	240.159.249	50	1.580.315.174	50	117	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100**	**%**	**5.943.519.990**	**144,5**	**9.124.585.193**	**100**	**4.329.103.043**	**25**	**446.392.067**	**25**	**333.461.667**					**50**	**779.853.734**	**195**	**9.904.438.927**	**195**	**167**	**Bagian Umum dan Keuangan**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	171.343.251	3	157.537.260	2	50.994.400	0	-	1	24.782.900					1	24.782.900	4	182.320.160	40	106	Subbag Rumah Tangga

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	Paket	2.034.401.823	22	5.361.279.233	10	3.341.991.423	2	206.914.500	2	53.712.603					4	260.627.103	26	5.621.906.336	52	276	Subbag Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35	Paket	584.372.693	11	460.899.861	7	181.773.700	1	37.735.900	2	64.888.300					3	102.624.200	14	563.524.061	40	96	Subbag Rumah Tangga
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25	Paket	198.967.483	5	161.063.043	5	40.999.600	1		1	9.168.000					2	9.168.000	7	170.231.043	28	86	Subbag Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20	Dok	317.192.232	4	446.485.000	4	140.571.000	0		1	33.037.500					1	33.037.500	5	479.522.500	25	151	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Laporan	179.590.752	12	261.187.500	12	59.600.920	3	13.801.745	0	20.825.715					3	34.627.460	15	295.814.960	25	165	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225	Laporan	1.869.481.296	96	1.935.410.440	45	441.307.000	39	169.539.922	35	113.246.649					74	282.786.571	170	2.218.197.011	76	119	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan	40	Dok	588.170.460	8	340.722.856	8	71.865.000	2	18.400.000	2	13.800.000					4	32.200	12	372.92	30	63	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Arsip Dinamis pada SKPD																	.000		2.856			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik**	**100**	**%**	**2.773.780.908**	**100**	**3.783.552.932**	**100**	**3.297.912.500**	**25**	**58.966.600**	**25**	**112.370.600**					**50**	**171.337.200**	**150**	**3.954.890.132**	**150**	**143**	**Bagian Umum dan Keuangan**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0	-	3	**3.028.085.400**	**0**	-	**0**	-					**0**	-	**0**	-			Subbag Rumah Tangga
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	170	Unit	2.773.780.908	34	3.783.552.932	34	269.827.100	1	58.966.600	0	112.370.600					1	171.337.200	35	3.954.890.132	21	143	Subbag Rumah Tangga
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor**	**100**	**%**	**8.349.175.065**	**100**	**5.189.490.828**	**100**	**3.398.560.328**	**25**	**709.619.438**	**25**	**179.867.737**					**50**	**889.487.175**	**150**	**6.078.978.003**	**150**	**73**	**Bagian Umum dan Keuangan**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	3.261.024.220	216	2.090.637.323	12	961.735.200	3	177.597.685	3	177.654.169					6	355.251.854	222	2.445.889.177	370	75	Subbag Rumah Tangga

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	5.088.150.845	12	3.098.853.505	12	2.436.825.128	3	532.021.753	3	2.213.568					6	534.235.321	18	3.633.088.826	30	71	Subbag Rumah Tangga
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara**	**100**	**%**	**6.819.456.096**	**100**	**16.667.535.260**	**100**	**2.667.867.504**	**25**	**247.011.385**	**25**	**231.170.427**					**50**	**478.181.812**	**150**	**17.145.717.072**	**150**	**251**	**Bagian Umum dan Keuangan**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	Unit	2.081.214.369	4	7.652.052.745	4	358.399.204	0	25.226.135	1	55.429.142					1	80.655.277	5	7.732.708.022	25	372	Subbag Rumah Tangga
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Unit	1.036.828.454	3	610.902.943	5	271.997.800	0	2.947.800	2	32.559.445					2	35.507.245	5	646.410.188	25	62	Subbag Rumah Tangga
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	250	Buah	82.884.469	50	43.409.000	50	14.640.000	0	-	0	-					0	-	50	43.409.000	20	52	Subbag Rumah Tangga

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	525	Unit	925.453.276	83	748.170.610	105	176.841.600	105	18.600.000	0	23.770.650					105	42.370.650	188	790.541.260	20	85	Subbag Rumah Tangga
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35	Unit	2.044.907.931	5	6.933.691.501	7	1.628.437.900	1	185.113.700	0	83.100.000					1	268.213.700	6	7.201.905.201	24	352	Subbag Rumah Tangga
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1280	Unit	648.167.597	27	679.308.461	256	217.551.000	66	15.123.750	63	36.311.190					129	51.434.940	156	730.743.401	116	113	Subbag Rumah Tangga
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100**	**%**	**123.150.218.320**	**100**	**60.060.810.192**	**100**	**25.660.250.820**	**25**	**5.374.683.705**	**25**	**7.959.901.048**					**50**	**13.334.584.753**	**150**	**73.395.394.945**	**150**	**60**	**Bagian Umum dan Keuangan**
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	1800	orang/ 60 bulan	119.324.045.245	360	57.962.156.039	420	24.180.369.820	90	5.374.683.705	120	7.959.901.048					210	13.334.584.753	570	71.296.740.792	32	60	Subbag Program dan Keuangan
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	750	Paket	1.824.337.993	150	1.120.698.000	30	1.044.893.600	0	-	0	-					0	-	150	1.120.698.000	20	61	Subbag Rumah Tangga
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti	150	Orang	2.001.835.082	30	977.956.153	30	434.987.400	0	-	0	-					0	-	30	977.95	20	49	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Medical Check Up DPRD																			6.153			
		Layanan Administrasi DPRD	**Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD**	**100**	**%**	**7.217.092.290**	**100**	**4.048.862.708**	**100**	**1.832.132.200**	**25**	**391.189.000**	**25**	**271.234.000**					**50**	**662.423.000**	**150**	**4.711.285.708**	**150**	**65**	**Bagian Umum dan Keuangan**
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	20	Laporan	295.096.945	6	122.445.710	12	53.334.400	3	7.245.000	3	-					6	7.245.000	12	129.690.710	60	44	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100	Laporan	3.753.890.083	20	1.568.744.933	20	665.663.400	5	125.350.000	5	85.713.000					10	211.063.000	30	1.779.807.933	30	47	Subbag Rumah Tangga
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	180	Paket	3.168.105.262	36	2.357.672.065	36	1.113.134.400	9	258.594.000	9	185.521.000					18	444.115.000	54	2.801.787.065	30	88	Subbag Rumah Tangga
	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		**Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DRPD**	**90**	**%**		**75**		**80**		**20**		**20**	-				**40**				-		
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu**	**100**	**%**	**107.737.087.858**	**100**	**69.937.029.481**	**100**	**40.265.970.446**	**0**	**6.126.429.622**	**0**	**7.400.694.010**					**0**	**13.527.123.632**		**83.464.153.113**			
			Dokumen KUA, PPAS dan	**6**	**Dok**		**6**	**11.955.501.301**	**6**		**0**		**10**						**10**						

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu			**15.820.265.142**				**8.465.232.456**		**826.534.572**		**2.398.620.072**						**3.225.154.644**		**15.180.655.945**			
			Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	**100**	**%**		**100**		**100**		**25**		**25**						**50**						
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan**	**50**	**Dok Perda**		**7**		**10**		**0**		**1**						**1**		**8**		**16**	**96**	**Bagian Persidangan dan Perundang-undangan**
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5	Dok	51.164.418	1	22.909.300	1	9.259.300	0	-	0	-					0	-	1	22.909.300	20	45	Subbag Kajian dan Perundang-undangan
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	50	Dok	11.319.612.849	7	9.231.930.218	10	6.347.481.956	0	760.071.470	1	2.232.038.845					1	2.992.110.315	8	12.224.040.533	16	108	Subbag Kajian dan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	15	Dok	1.853.295.672	5	1.247.193.388	3	887.861.600	0		0	46.933.561					0	46.933.561	5	1.294.126.949	33	70	Subbag Kajian dan Perundang-undangan
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Ketera	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau	15	Dok	2.545.027.179	3	1.436.749.645	3	938.047.600	0	66.463.102	0	119.647.666					0	186.11	3	1.622.860	20	64	Subbag Kajian dan Perundang-undangan

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	**2**	**3**	**4**	**5**			**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11**		**12**		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		**15**
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		ngan dan/atau Naskah Akademik	Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi																	0.768		.413			
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	5	Dok	51.165.024	1	16.718.750	1	282.582.000	0	-	0	-					0	-	1	16.718.750	20	33	Subbag Kajian dan Perundang-undangan
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran**	**25**	**Rekom**	**3.723.197.388**	**5**	**2.780.179.526**	**5**	**2.865.811.300**	**0**	**18.880.000**	**1**	**268.116.604**					**1**	**286.996.604**	**6**	**3.067.176.130**	**24**	**82**	**Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5	Dok	467.446.302	1	200.280.155	1	129.417.500	0	-	0	-					0	-	1	200.280.155	20	43	Subbag Fasilitasi Penganggaran
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5	Dok	172.074.788	1	75.785.500	1	87.913.900	0	-	0	-					0	-	1	75.785.500	20	44	Subbag Fasilitasi Penganggaran
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5	Dok	813.599.472	1	1.647.582.929	1	1.222.033.100	0	18.880.000	0	14.160.000					0	33.040.000	1	1.680.622.929	20	207	Subbag Fasilitasi Penganggaran
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	5	Dok	168.263.761	1	67.701.600	1	624.411.400	0	-	0	-					0	-	1	67.701.600	20	40	Subbag Fasilitasi Penganggaran

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	**2**	**3**	**4**	**5**			**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11**		**12**		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		**15**
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5	Dok	2.101.813.065	1	788.829.342	1	802.035.400	0	-	1	253.956.604					1	253.956.604	2	1.042.785.946	40	50	Subbag Fasilitasi Penganggaran
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Rekomendasi Pengawasan penyelenggaran pemerintah yang ditindaklanjuti**	**100**	**Rekom**	**44.780.552.893**	**20**	**24.205.284.308**	**20**	**14.718.186.500**	**6**	**2.581.054.964**	**8**	**1.708.007.401**					**14**	**4.289.062.365**	**34**	**28.494.346.673**	**34**	**64**	**Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15	Laporan	8.910.880.502	3	3.975.130.486	3	2.309.574.100	1	301.492.819	1	296.212.849					2	597.705.668	5	4.572.836.154	33	51	Subbag Fasilitasi Pengawasan
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15	Laporan	8.146.685.700	3	4.069.291.482	3	2.307.669.450	1	320.932.337	1	202.574.058					2	523.506.395	5	4.592.797.877	33	56	Subbag Fasilitasi Pengawasan
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15	Laporan	6.991.164.035	3	3.819.980.103	3	2.305.840.450	1	379.319.697	1	254.023.860					2	633.343.557	5	4.453.323.660	33	64	Subbag Fasilitasi Pengawasan
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan	15	Laporan	5.764.834.169	3	3.650.642.720	3	2.304.194.200	1	424.750.876	1	272.896.971					2	697.647.847	5	4.348.290	33	75	Subbag Fasilitasi Pengawasan

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	**2**	**3**	**4**	**5**			**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11**		**12**		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		**15**
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Bidang Perekonomian																			.567			
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	15	Laporan	5.764.766.204	3	3.894.916.806	3	2.307.937.700	1	299.742.738	1	272.115.960					2	571.858.698	5	4.466.775.504	33	77	Subbag Fasilitasi Pengawasan
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5	Dok	170.532.142	1	69.306.000	1	79.938.400	0	12.305.000	1	23.810.020					1	36.115.020	2	105.421.020	40	62	Subbag Fasilitasi Penganggaran
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	15	Laporan	6.754.571.977	3	3.596.050.886	3	2.299.492.300	1	443.799.207	1	206.736.182					2	650.535.389	5	4.246.586.275	33	63	Subbag Fasilitasi Pengawasan
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5	Dok	2.277.118.164	1	1.129.965.825	1	803.539.900	0	398.712.290	1	179.637.501					1	578.349.791	2	1.708.315.616	40	75	Subbag Fasilitasi Penganggaran
		Peningkatan Kapasitas DPRD	**Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap**	**100**	**%**	**19.537.163.941**	**100**	**12.234.568.901**	**100**	**5.437.701.190**	**25**	**363.579.461**	**25**	**1.419.979.300**					**50**	**1.783.558**	**150**	**14.018.12**	**150**	**72**	**Bagian Persidangan dan**

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			peningkatan kapasitas DPRD yang optimal																	**.761**		**7.662**			**Perundang-undangan**
		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	Dok		0	-	1	310.000.000	0	-	0	-					0	-	0	-	-		
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	15	Dok	7.625.819.806	5	3.164.281.472	3	1.994.000.000	0	-	0	38.915.300					0	38.915.300	5	3.203.196.772	33	42	Subbag Humas, Protokol dan Publikasi
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	120	Dok	2.706.855.293	24	1.178.836.095	24	354.681.590	6	65.216.000	0	1.867.461					6	67.083.461	30	1.245.919.556	25	46	Subbag Humas, Protokol dan Publikasi
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	15	Orang	1.736.125.711	5	679.436.734	3	268.936.000	1	49.883.461	0	55.116.539					1	105.000.000	6	784.436.734	40	45	Subbag Persidangan dan Risalah
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	72	Orang	1.518.211.391	6	786.217.000	6	274.720.000	6	63.000.000	0	1.177.280.000					6	1.240.280.000	12	2.026.497.000	17	133	Subbag Persidangan dan Risalah
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	60	Dok	5.895.803.122	12	6.408.185.000	12	2.536.243.600	3	185.480.000	3						6	185.480.000	18	6.593.665.000	30	112	Subbag Humas, Protokol dan Publikasi

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	**2**	**3**	**4**	**5**			**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11**		**12**		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		**15**
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	5	Dok	54.348.618	1	17.612.600	1	9.120.000	0	-	1	146.800.000					1	146.800.000	2	164.412.600	40	303	Subbag Persidangan dan Risalah
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah**	**460**	**Dok**	**9.737.565.330**	**92**	**5.992.003.661**	**62**	**2.625.124.600**	**32**	**711.893.206**	**0**	**30.305.919**					**32**	**742.199.125**	**124**	**6.734.202.786**	**27**	**69**	**Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	5	Laporan	383.316.134	1	128.101.950	1	69.370.000	1	15.628.000	0	4.508.000					1	20.136.000	2	148.237.950	40	39	Subbag Kerjasama dan Aspirasi
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	5	Dok	469.608.812	1	222.286.492	1	84.987.000	1	-	0	4.696.399					1	4.696.399	2	226.982.891	40	48	Subbag Kerjasama dan Aspirasi
		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	450	Dok	8.884.640.384	90	5.641.615.219	60	2.470.767.600	30	696.265.206	0	21.101.520					30	717.366.726	120	6.358.981.945	27	72	Subbag Kerjasama dan Aspirasi
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD**	**20**	**Dok**	**773.483.388**	**3**	**451.037.591**	**4**	**462.824.400**	**1**	**62.105.500**	**1**	**113.985.655**					**2**	**176.091.155**	**5**	**627.128.746**	**25**	**81**	**Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	**2**	**3**	**4**	**5**			**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11**		**12**		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		**15**
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	Dok		0	-	1	149.994.000		-		-											
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	15	Dok	773.483.388	1	451.037.591	3	462.824.400	1	62.105.500	1	113.985.655					2	176.091.155	3	627.128.746	20	81	Subbag Fasilitasi Pengawasan
		Fasilitasi Tugas DPRD	**Dok laporan fasilitasi tugas DPRD**	**145**	**Dok**	**13.364.859.776**	**35**	**12.318.454.193**	**29**	**5.691.090.000**	**7**	**1.562.381.919**	**7**	**1.647.159.059**					**14**	**3.209.540.978**	**49**	**15.527.995.171**	**34**	**116**	**Bagian Persidangan dan Perundang-undangan**
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20	Dok	3.058.315.333	10	3.861.843.676	4	972.213.000	1	218.539.323	1	336.465.985					2	555.005.308	12	4.416.848.984	60	144	Subbag Humas, Protokol dan Publikasi
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	5	Laporan	138.140.781	1	56.948.500	1	25.000.000	0	-	0	-					0	-	1	56.948.500	20	41	Subbag Persidangan dan Risalah
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	60	Dok	5.575.187.321	12	3.688.791.794	12	2.297.127.000	3	381.166.000	3	341.468.683					6	722.634.683	18	4.411.426.477	30	79	Subbag Persidangan dan Risalah
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60	Dok	4.593.216.341	12	4.710.870.223	12	2.396.750.000	3	962.676.596	3	969.224.391					6	1.931.900.987	18	6.642.771.210	30	145	Subbag Humas, Protokol dan Publikasi

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
0						**297.600.981.919**		**188.622.486.446**		**88.906.192.887**		**14.922.335.775**		**19.175.053.169**		-		-		**34.097.388.944**		**222.719.875.390**	-	**73**	**Sekretariat DPRD**
Rata-rata capaian kinerja (%)											23,15 %	12,94%	21, 44%	47,84 %					46, 03%	60, 78%					
Predikat Kinerja																									

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : sub kegiatan dilaksanakan dengan mengacu kepada rencana aksi yang sudah dibuat serta berdasarkan matriks jadwal kegiatan DPRD

Faktor penghambat pencapaian kinerja : terbatasnya personil/Sumber Daya Manusia untuk beberapa jenis jabatan fungsional pelaksana

-	Untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Realisasi kinerja masih 0 karena menunggu hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten pada bulan Mei - Juni 2024
-	Untuk Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Realisasi kinerja masih 0 dikarenakan pada triwulan II masih dalam tahap penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
-	Untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dua indikator kinerja masih 0 dikarenakan belum memasuki masa pelaksanaan kegiatan sesuai matriks kegiatan DPRD
-	Untuk Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Kegiatan dilaksanakan dengan mengacu kepada rencana aksi yang sudah dibuat serta berdasarkan matriks jadwal kegiatan DPRD, Realisasi kinerja masih 1 dokumen perda dari target sebanyak 10 dokumen. Hal ini dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan kegiatan
-	Untuk Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Realisasi kinerja masih 1 dokumen rekomendasi dari target sebanyak 6 rekomendasi dikarenakan belum memasuki waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019
-	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Realisasi kinerja masih 0 dikarenakan penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Perda baru akan dilaksanakan pada bulan Juli (sesuai rencana aksi) dikarenakan masih pada proses penyusunan naskah akademik sebagai dasar pengajuan rencana perda baik itu prakarsa pemerintah daerah maupun prakarsa DPRD
-	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Realisasi kinerja masih 1 dokumen dari target sebanyak 10 dokumen dikarenakan masih dalam tahap pembahasan oleh Pansus Raperda DPRD
-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Realisasi kinerja masih 0 dikarenakan belum adanya usulan kajian perundang-undangan dari anggota DPRD ataupun Alat Kelengkapan DPRD dikarenakan salah satu syarat pengajuan penyelenggaraan kajian perundang-undangan adalah usulan dari pimpinan dan anggota DPRD
-	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Realisasi kinerja masih 0 dikarenakan masih dalam proses penyusunan 4 (empat) buah Naskah Akademik DPRD yang didampingi tenaga ahli dari perguruan tinggi
-	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD Realisasi kinerja masih 0 dikarenakan belum adanya usulan untuk memfasilitasi penyusunan atau perubahan tata tertib DPRD oleh Anggota DPRD Kabupaten Paser, dikarenakan syarat penyusunan atau perubahan tata tertib adalah adanya usulan dari anggota DPRD
-	Sub Kegiatan Orientasi DPRD Sampai dengan triwulan II realisasi kinerja masih 0 dikarenakan baru akan dilaksanakan setelah pelantikan Anggota DPRD yang baru terpilih pada bulan Agustus 2024
-	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Sampai dengan triwulan II realisasi kinerja masih 0 dikarenakan belum ada jadwal pelaksanaan Bimtek DPRD

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	**2**	**3**	**4**	**5**			**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11**		**12**		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		**15**
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya : melakukan penajaman dalam hal penentuan target kinerja agar lebih SMART, menyesuaikan sub kegiatan dengan matriks kegiatan DPRD dan Renja DPRD Tahun 2025																									

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 43,58%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.097.388.944 (Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 88.906.192.887 (Delapan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 38,35%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Sekretariat DPRD sebesar 43,58% dengan predikat kinerja Rendah
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 1 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 10 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 8 indikator capaian kinerja 0%-50% = 47 indikator

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, maka **Sekretariat DPRD** Kabupaten Paser melaksanakan tugas yaitu:

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta memnyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan program sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
b. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
c. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
d. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
e. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Upaya Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel
2. Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolak ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja **Sekretariat DPRD** terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra Sekretariat DPRD							Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026	Tw 1	Tw 2	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas dan Kinerja DPRD	Persentase Kinerja DPRD meningkat	70%	72%	75%	77%	80%	22%	21%	57%
Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	B	B (70)	BB (72)	BB (74)	A (80)	-	-	-
Sasaran 2: Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	75%	80%	82%	85%	90%	22%	21%	52%

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Meningkatkan Kualitas Layanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas dan Kinerja DPRD" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase Kinerja DPRD meningkat", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 43% dari target sebesar 75% dengan capaian kinerja sebesar 57%;
b. Sasaran "Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP", belum mencapai target, dimana realisasinya masih 0 dari target nilai 74 (BB). Hal ini dikarenakan sampai akhir triwulan II tahun 2024 masih belum diterima hasil evaluasi AKIP tahun 2023 dari Inspektorat Kabupaten Paser

c. Sasaran "Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 43% dari target sebesar 82% dengan capaian kinerja sebesar 52%

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat serta Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Tugas yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD melayani segala kegiatan anggota maupun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik itu sifatnya pemberian informasi berkenaan dengan aturan, pelayanan kegiatan rapat-rapat, pelayanan pendampingan kegiatan kunjungan kerja maupun peningkatan sumber daya manusia, serta pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang kesemuanya itu bertujuan menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan.

Fungsi pertama diwujudkan dalam membentuk dan menetapkan Peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah beserta jajarannya, fungsi kedua untuk mewujudkan suatu kesepahaman Bersama di alam penyusunan an penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sedangkan fungsi ketiga diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan produk peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang kesemuanya dijalankan semata-mata sebagai fungsi control pihak legislatif terhadap eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, di dalam menjalankan pencapaian visi dan misi Pemerintah, yang selanjutnya diimplementasikan oleh semua Satuan Kerja Perangkat baik dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten, dengan kata lain DPRD merupakan partner pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan di segala bidang.

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan identifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD di masa yang akan dating. Isu-isu strategis yang dapat diindetifikasikan dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Paser sebagai berikut :

a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum optimal
b. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

c. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD
d. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
e. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 di atas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan administratif dan SOP fasilitasi tugas fungsi DPRD
5. Sub kegiatan dilaksanakan dengan mengacu kepada rencana aksi yang sudah dibuat serta berdasarkan matriks jadwal kegiatan DPRD

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Padatnya agenda kegiatan DPRD tahun 2024, dimana tahun ini merupakan masa transisi dari berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD periode 2019-2024 dan dilantiknya Anggota DPRD periode 2024-2029
2. Terkait masa transisi jabatan DPRD, maka perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran untuk pelayanan administratif dan hak keuangan DPRD, serta fasilitasi ketiga fungsi DPRD
3. Terbatasnya personil/Sumber Daya Manusia untuk beberapa jenis jabatan fungsional pelaksana
4. Untuk pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah masih dalam tahap pembahasan oleh Pansus Raperda DPRD dikarenakan padatnya kegiatan DPRD melaksanakan tugas fungsi lainnya
5. Terdapat 1 (satu) kegiatan baru dan 2 (dua) sub kegiatan baru pada revisi renstra Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 yang baru bisa dimunculkan pada rencana kerja perubahan tahun 2024, mengingat penetapan revisi renstra tercatat bulan September 2023 di mana Renja Murni tahun 2024 sudah ditetapkan

Implikasi yang timbul akibat kondisi di atas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota serta pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Revisi Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Penyesuaian Target Tujuan/Sasaran Perubahan Renja 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024
1	2		4	5
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas dan Kinerja DPRD	Persentase Kinerja DPRD meningkat	Realisasi kegiatan layanan keuangan, kesejahteraan dan administrasi DPRD dan realisasi kegiatan fasilitasi tiga fungsi DPRD / Target kegiatan layanan administrasi dan target kegiatan fasilitasi tiga fungsi DPRD x 100%	75%	85%
Sasaran 1: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	Hasil Evaluasi SAKIP	BB (72)	BB (72)
Sasaran 2: Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Realisasi jumlah raperda yang ditetapkan, jumlah dokumen KUA, PPAS, Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu dan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / Target jumlah raperda yang ditetapkan, jumlah dokumen KUA, PPAS, Perda APBD yang ditetapakn tepat waktu, dan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti x 100%	82%	92%

Memperhatikan tabel 3.1 di atas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2024 mengalami perubahan karena target yang ditetapkan pada renstra sudah tercapai pada tahun 2023.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu "PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER" yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD mendukung pencapaian sasaran ke-3, yaitu "Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah". Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Sekretariat DPRD telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Perubahan RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut

Tabel 3.2
Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024
Kabupaten Paser

Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat**	**90**	**48.640.222.441**	**A**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat**	**90**	**48.640.222.441**	**54.962.612.011**	
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten**	**BB (72)**	**100.933.780**	**I**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten**	**BB (72)**	**100.933.780**	**100.933.780**	
1	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	55.788.110	1	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	55.788.110	55.788.110	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	13 Dok	2.799.680	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	13 Dok	2.799.680	2.799.680	

Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	42.345.990	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	42.345.990	42.345.990	Tambahan pagu kode rekening Belanja Barang Pakai Habis
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**7.073.018.266**	**II**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**7.073.018.266**	**7.274.018.266**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 orang/14 bulan	7.241.318.586	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 orang/14 bulan	7.040.318.586	7.241.318.586	Tambahan Tunjangan ASN
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	21.057.920	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	21.057.920	21.057.920	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	2 Dok	11.641.760	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	2 Dok	11.641.760	11.641.760	

Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
III	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**280.444.000**	**III**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**280.444.000**	**703.613.000**	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	280.444.000	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	280.444.000	703.613.000	tambahan pagu belanja Bimbingan Teknis dan Belanja Perjalanan Dinas
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**4.329.103.043**	**IV**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**4.329.103.043**	6.298.813.533	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	50.944.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	50.944.000	70.697.000	

Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	10 paket	3.341.991.423	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	10 paket	3.341.991.423	4.547.980.993	tambahan pagu untuk Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Modal
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	181.773.700	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	181.773.700	184.268.500	tambahan pagu untuk Belanja Bahan Komputer
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	40.999.600	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	40.999.600	87.869.600	tambahan pagu untuk Belanja Bahan Cetak
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	140.571.000	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	140.571.000	140.571.000	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	59.600.920	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	59.600.920	102.607.040	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat	45 laporan	441.307.000	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	45 laporan	441.307.000	959.151.000	tambahan pagu untuk Belanja

Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				SKPD	Konsultasi SKPD				Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 dokumen	71.865.000	8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 dokumen	71.865.000	205.668.400	tambahan pagu untuk Belanja Perjalanan Dinas
V	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik**	**100%**	**3.297.912.500**	**V**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik**	**100%**	**3.297.912.500**	3.686.713.336	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	3.028.085.400	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	3.028.085.400	3.028.085.400	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	34 unit	269.827.100	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34 unit	269.827.100	658.627.936	tambahan pagu untuk Belanja Modal

Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				atau Bangunan Lainnya	yang Disediakan				
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor**	**100%**	**3.398.560.328**	**VI**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor**	**100%**	**3.398.560.328**	3.442.456.328	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	961.735.200	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	961.735.200	961.735.200	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.436.825.128	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.436.825.128	2.480.721.128	tambahan pagu untuk Belanja Perjalanan Dinas
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara**	**100%**	**2.667.867.504**	**VII**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara**	**100%**	**2.667.867.504**	4.139.261.104	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan	4 unit	358.399.204	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	4 unit	358.399.204	383.399.204	tambahan pagu untuk

Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	271.997.800	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	271.997.800	371.965.400	tambahan pagu untuk Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	14.640.000	3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	14.640.000	14.640.000	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 unit	176.841.600	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 unit	176.841.600	256.921.600	tambahan pagu untuk Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	1.628.437.900	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	1.628.437.900	2.859.423.900	tambahan pagu untuk Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	256 Unit	217.551.000	6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	256 Unit	217.551.000	267.551.000	
VIII	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100%**	**25.660.250.820**	**VIII**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100%**	**25.660.250.820**	27.135.070.765	
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	420 orang/14 bulan	24.180.369.820	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	420 orang/14 bulan	24.180.369.820	25.545.497.765	tambahan pagu untuk Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 paket	1.044.893.600	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 paket	1.044.893.600	1.128.789.600	tambahan pagu untuk Belanja Barang Pakai Habis
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* DPRD	30 orang	434.987.400	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* DPRD	30 orang	434.987.400	460.783.400	tambahan pagu untuk Belanja Perjalanan Dinas keperluan

Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
											MCU
IX	**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD**	**100%**	**1.832.132.200**	**IX**	**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD**	**100%**	**1.832.132.200**	2.181.731.899	
1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 laporan	53.334.400	1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 laporan	53.334.400	87.934.399	tambahan pagu untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 laporan	665.663.400	2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 laporan	665.663.400	1.103.163.400	tambahan pagu untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 paket	1.113.134.400	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 paket	1.113.134.400	990.634.100	
B	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu**	**100%**	**40.725.964.446**	**B**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu**	**100%**	**40.725.964.446**	**34.095.513.476**	
		Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD	**6 Dok**				**Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang**	**6 Dok**			

Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
		yang ditetapkan tepat waktu					**ditetapkan tepat waktu**				
		Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	**100%**				**Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti**	**100%**			
I	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan**	**9 dok Perda**	**8.465.232.456**	**I**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan**	**9 dok Perda**	**8.465.232.456**	6.475.620.356	
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	9.259.300	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	9.259.300	9.259.300	
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	9 dokumen	6.347.481.956	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	9 dokumen	6.347.481.956	4.681.666.356	
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 dokumen	887.861.600	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 dokumen	887.861.600	491.177.600	

Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 dokumen	938.047.600	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 dokumen	938.047.600	943.898.100	tambahan pagu untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	282.582.000	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	282.582.000	349.619.000	tambahan pagu untuk Belanja Perjalanan Dinas
II	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran**	**5 rekomendasi**	**2.865.811.300**	**II**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran**	**5 rekomendasi**	**2.865.811.300**	**1.823.261.300**	
1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	129.417.500	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	129.417.500	129.417.500	
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	87.913.900	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	87.913.900	22.495.900	
3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil	1 dokumen	1.222.033.100	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1 dokumen	1.222.033.100	907.005.100	

Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
		Pembahasan APBD					APBD				
4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	624.411.400	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	624.411.400	333.943.400	
5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	802.035.400	5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	802.035.400	430.399.400	
III	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Rekomendasi Pengawasan penyelenggaran pemerintah yang ditindaklanjuti**	**26 rekomendasi**	**14.718.201.500**	**III**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Rekomendasi Pengawasan penyelenggaran pemerintah yang ditindaklanjuti**	**26 rekomendasi**	**14.718.201.500**	**7.514.627.900**	
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 laporan	2.309.589.100	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 laporan	2.309.589.100	1.012.582.600	
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan	4 laporan	2.307.669.450	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 laporan	2.307.669.450	1.169.011.600	

Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
		Bidang Infrastruktur									
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 laporan	2.305.840.450	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 laporan	2.305.840.450	1.042.577.600	
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 laporan	2.304.194.200	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 laporan	2.304.194.200	1.381.006.600	
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 laporan	2.307.937.700	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 laporan	2.307.937.700	999.153.600	
6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh	1 dokumen	79.938.400	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	1 dokumen	79.938.400	52.587.400	

Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
		BPK									
7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 dokumen	2.299.492.300	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 dokumen	2.299.492.300	1.269.016.600	
8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	803.539.900	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	803.539.900	588.421.900	
IV	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal**	**100%**	**5.747.701.190**	**IV**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal**	**100%**	**5.747.701.190**	**6.701.815.220**	
1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	310.000.000	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	310.000.000	310.113.400	
2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman	3 dokumen	1.994.000.000	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 dokumen	1.994.000.000	1.041708.400	

Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
		Tugas DPRD									
3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	268.936.000	3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	268.936.000	488.366.200	tambahan pagu untuk Belanja Perjalanan Dinas
4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	274.720.000	4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	274.720.000	255.142.000	
5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dok	2.536.243.600	5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dok	2.536.243.600	4.186.895.400	tambahan pagu untuk Belanja Jasa Iklan/Reklame ,Film, dan Pemotretan
6	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dok	9.120.000	6	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dok	9.120.000	2.037.600	
7	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24 dokumen	354.681.590	7	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24 dokumen	354.681.590	417.552.220	tambahan pagu untuk Belanja Barang dan Jasa
V	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Dok laporan penyerapan dan penghimpuna**	**62 Dok**	**2.625.124.600**	**V**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi**	**Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi**	**62 Dok**	**2.625.124.600**	**2.625.124.600**	

Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
		n aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah				**Masyarakat**	**masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah**				
1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	69.370.000	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	69.370.000	69.370.000	
2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dok	84.987.000	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dok	84.987.000	84.987.000	
3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 dokumen	2.470.767.600	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 dokumen	2.470.767.600	2.470.767.600	
VI	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD**	**5 Dok**	**612.803.400**	**VI**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD**	**5 Dok**	**612.803.400**	**1.160.702.400**	
1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dok	149.994.000	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dok	149.994.000	766.470.000	tambahan pagu untuk Belanja Perjalanan Dinas

Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4 laporan	462.809.400	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4 laporan	462.809.400	394.232.400	
VII	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Dok laporan fasilitasi tugas DPRD**	**29 Dok**	**5.691.090.000**	**VII**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Dok laporan fasilitasi tugas DPRD**	**29 Dok**	**5.691.090.000**	**7.794.361.700**	
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	972.213.000	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	972.213.000	2.004.457.200	tambahan pagu untuk Belanja Perjalanan Dinas
2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	25.000.000	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	25.000.000	41.292.700	tambahan pagu untuk Belanja Perjalanan Dinas
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dok	2.297.127.000	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dok	2.297.127.000	1.783.597.000	
4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dok	2.396.750.000	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dok	2.396.750.000	3.965.014.800	tambahan pagu untuk Belanja Perjalanan Dinas

Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
				89.567.186.887					**89.366.186.887**	**89.058.125.487**	

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**								
4.02	**Sekretariat DPRD**								

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat**	**74**	**Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat**	**90**		**48.640.222.441**	**56.213.349.551**	**7.573.127.110**
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten**	**BB (72)**	**Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten**	**BB (72)**	**Sekretariat DPRD**	**100.933.780**	**101.408.590**	**478.810**
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	Sekretariat DPRD	55.788.110	55.788.110	0
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Dok	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Dok	Sekretariat DPRD	2.799.680	2.799.680	0
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Sekretariat DPRD	42.345.990	42.820.800	478.810
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat**	**100%**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat**	**100%**	**Sekretariat DPRD**	**7.073.018.266**	**7.274.018.266**	**201.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Daerah		**Daerah**					
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 orang/14 bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 orang/14 bulan	Sekretariat DPRD	7.040.318.586	7.241.318.586	201.000.000
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	Sekretariat DPRD	21.057.920	21.057.920	0
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dok	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dok	Sekretariat DPRD	11.641.760	11.641.760	0
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**Sekretariat DPRD**	**280.444.000**	**703.613.000**	**423.169.000**
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	Luar kabupaten dan luar provinsi	280.444.000	703.613.000	423.169.000
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan**	**100%**	**Persentase pemenuhan kebutuhan**	**100%**	**Sekretariat DPRD**	**4.329.103.043**	**6.192.735.843**	**1.863.632.800**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		administrasi perkantoran		**administrasi perkantoran**					
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	Sekretariat DPRD	50.944.000	50.994.400	0
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	Sekretariat DPRD	3.341.991.423	4.509.606.823	1.167.615.400
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	Sekretariat DPRD	181.773.700	184.273.700	2.500.000
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	Sekretariat DPRD	40.999.600	82.869.600	41.870.000
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	Sekretariat DPRD	140.571.000	140.571.000	0
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Sekretariat DPRD	59.600.920	59.600.920	0
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	45 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	45 laporan	Sekretariat DPRD	441.307.000	959.151.000	517.844.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 dokumen	Sekretariat DPRD	71.865.000	205.668.400	133.803.400
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik**	**100%**	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik**	**100%**	**Sekretariat DPRD**	**3.297.912.500**	**3.686.732.500**	**388.820.000**
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	Sekretariat DPRD	3.028.085.400	3.028.085.400	0
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 unit	Sekretariat DPRD	269.827.100	658.647.100	388.820.000
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor**	**100%**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor**	**100%**	Sekretariat DPRD	**3.398.560.328**	**3.442.456.328**	**43.896.000**
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Sekretariat DPRD	961.735.200	961.735.200	0

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Sekretariat DPRD	2.436.825.128	2.480.721.128	43.896.000
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara**	**100%**	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara**	**100%**	**Sekretariat DPRD**	**2.667.867.504**	**3.873.947.504**	**1.206.080.000**
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 100dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	Sekretariat DPRD	358.399.204	383.399.204	25.000.000
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	Sekretariat DPRD	271.997.800	371.997.800	100.000.000
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	Sekretariat DPRD	14.640.000	14.640.000	0
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 unit	Sekretariat DPRD	176.841.600	256.921.600	80.080.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	Sekretariat DPRD	1.628.437.900	2.629.437.900	1.001.000.000
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	256 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	256 Unit	Sekretariat DPRD	217.551.000	217.551.000	0
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100%**	**Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100%**	Sekretariat DPRD	**25.660.250.820**	**28.671.705.320**	**3.011.454.500**
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	420 orang/14 bulan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	420 orang/14 bulan	Sekretariat DPRD	24.180.369.820	27.088.132.320	2.907.762.500
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 paket	Sekretariat DPRD	1.044.893.600	1.122.789.600	77.896.000
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* DPRD	30 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* DPRD	30 orang	Luar kabupaten	434.987.400	460.783.400	25.796.000
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD**	**100%**	**Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD**	**100%**	Sekretariat DPRD	**1.832.132.200**	**2.266.732.200**	**434.600.000**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 laporan	Sekretariat DPRD	53.334.400	87.934.400	34.600.000
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 laporan	Sekretariat DPRD	665.663.400	1.065.663.400	400.000.000
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 paket	Sekretariat DPRD	1.113.134.400	1.113.134.400	0
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu**	**100%**	**Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu**	**100%**	Sekretariat DPRD	**40.725.964.446**	**33.353.887.336**	**(7.372.127.110)**
		Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	**6 Dok**	**Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu**	**6 Dok**	Sekretariat DPRD			
		Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	**100%**	**Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti**	**100%**	Sekretariat DPRD			
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan**	**10 dok Perda**	**Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan**	**9 dok Perda**	Sekretariat DPRD	**8.465.232.456**	**6.475.620.356**	**(1.989.612.100)**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	Sekretariat DPRD	9.259.300	9.259.300	0
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 dokumen	Sekretariat DPRD	6.347.481.956	4.681.666.356	(1.665.815.600)
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 dokumen	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 dokumen	Sekretariat DPRD	887.861.600	491.177.600	(396.684.000)
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 dokumen	Sekretariat DPRD	938.047.600	943.898.100	5.850.500
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	Sekretariat DPRD	282.582.000	349.619.000	67.037.000
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran**	**5 rekomendasi**	**Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran**	**5 rekomendasi**	Sekretariat DPRD	**2.865.811.300**	**2.144.617.600**	**(721.193.700)**
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	Sekretariat DPRD	129.417.500	129.417.500	0

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	Sekretariat DPRD	87.913.900	22.495.900	(65.418.000)
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	Sekretariat DPRD	1.222.033.100	1.181.355.400	(40.677.700)
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	Sekretariat DPRD	624.411.400	380.949.400	(243.462.000)
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	Sekretariat DPRD	802.035.400	430.399.400	(371.636.000)
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Rekomendasi Pengawasan penyelenggaran pemerintah yang ditindaklanjuti**	**20 rekomendasi**	**Rekomendasi Pengawasan penyelenggaran pemerintah yang ditindaklanjuti**	**26 rekomendasi**	Sekretariat DPRD	**14.718.201.500**	**7.002.249.900**	**(7.715.951.600)**
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 laporan	Sekretariat DPRD	2.309.589.100	1.012.582.600	(1.297.006.500)
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 laporan	Sekretariat DPRD	2.307.669.450	1.018.883.600	(1.288.785.850)

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 laporan	Sekretariat DPRD	2.305.840.450	1.042.577.600	(1.263.262.850)
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 laporan	Sekretariat DPRD	2.304.194.200	1.168.884.600	(1.135.309.600)
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 laporan	Sekretariat DPRD	2.307.937.700	999.153.600	(1.308.784.100)
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	Sekretariat DPRD	79.938.400	52.587.400	(27.081.000)
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 dokumen	Sekretariat DPRD	2.299.492.300	1.118.888.600	(1.180.603.700)
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	Sekretariat DPRD	803.539.900	588.421.900	(215.118.000)
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Terwujudnya fasilitasi dukungan**	**100%**	**Terwujudnya fasilitasi dukungan**	**100%**	Sekretariat DPRD	**5.747.701.190**	**6.674.862.380**	**927.161.190**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal		**terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal**					
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	Luar kabupaten dan luar provinsi	310.000.000	310.000.000	0
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 dokumen	Luar kabupaten dan luar provinsi	1.994.000.000	1.043.606.000	(950.394.000)
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	Sekretariat DPRD	268.936.000	488.366.200	219.430.200
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	Sekretariat DPRD	274.720.000	255.142.000	(19.578.000)
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dok	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dok	Sekretariat DPRD	2.536.243.600	4.186.920.000	1.650.676.400
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dok	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dok	Sekretariat DPRD	9.120.000	2.037.600	(7.082.400)
4.02.02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24 dokumen	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24 dokumen	Sekretariat DPRD	354.681.590	388.790.580	34.108.990
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Dok laporan penyerapan dan penghimpunan**	**62 Dok**	**Dok laporan penyerapan dan penghimpunan**	**62 Dok**	Sekretariat DPRD	**2.625.124.600**	**2.436.804.600**	**(188.320.000)**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah		**aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah**					
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	Dalam kabupaten	69.370.000	69.370.000	0
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dok	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dok	Sekretariat DPRD	84.987.000	49.433.000	(35.554.000)
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 dokumen	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 dokumen	Dalam kabupaten	2.470.767.600	2.470.767.600	0
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD**	**4 Dok**	**Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD**	**5 Dok**	Sekretariat DPRD	**612.803.400**	**1.160.702.400**	**547.899.000**
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dok	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dok	Sekretariat DPRD	149.994.000	766.470.000	616.476.000
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4 laporan	Luar kabupaten dan luar provinsi	462.809.400	394.232.400	(68.577.000)
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Dok laporan fasilitasi tugas DPRD**	**29 Dok**	**Dok laporan fasilitasi tugas DPRD**	**29 Dok**	Sekretariat DPRD	**5.691.090.000**	**7.160.660.100**	**1.469.570.100**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	Luar kabupaten dan luar provinsi	972.213.000	1.370.738.000	398.525.000
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	Sekretariat DPRD	25.000.000	41.292.700	16.292.700
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dok	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dok	Sekretariat DPRD	2.297.127.000	1.783.597.000	(513.530.000)
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dok	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dok	Sekretariat DPRD	2.396.750.000	3.965.032.400	1.568.282.400
TOTAL ANGGARAN							**89.366.186.887**	**89.567.186.887**	**201.000.000**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta hasil analisis kebutuhan pada Sekretariat DPRD untuk anggaran perubahan tahun 2024. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai tujuan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2 Rencana tindak lanjut

Dokumen perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tana Paser, 05 Agustus 2024

SEKRETARIS DPRD,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER SEKRETARIAT DPRD

M. ISKANDAR ZULKARNAIN, M.Sc
NIP 19780817 200312 1 011

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER

Nomor Dokumen:311.1/ /SATPOL PP/2024





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASER
JL. R.M. NOTO SUNARDI,Tanah Grogot.
Telp : (0543) 21687
Kode Pos : 76211

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER NOMOR
100.3.3.2/KEP-786/2024
TANGGAL 16 AGUSTUS 2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Limpahan Rahmat dan Karunia Nya, sehingga Kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2024 yang akan memuat indikator kinerja kegiatan (Input), Keluaran (Output) dan hasil (Outcome). Pada Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser merencanakan 2 Progam yang dijabarkan pada 9 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan untuk mencapai 2 sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dengan total Anggaran Murni Rp. 21.008.289.022,-

Akhir Kata Semoga Renja Perubahan Tahun 2024 yang sederhana ini dapat menjadi manfaat khususnya Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser pada umumnya.

Tana Paser, 26 Juni 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Paser,

H. MUHAMMAD GUNTUR, S.Sos,MM
NIP. 19670717 198602 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ----------i

DAFTAR ISI ----------ii

1.1. Latar Belakang ----------1

1.2. Landasan Hukum ----------2

1.3. Maksud dan Tujuan ----------4

1.4. Sistematika Penulisan----------5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 ----------7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ----------7

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser ---------- 18

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024---------- 21

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH---------- 22

3.1. Tujuan dan Sasaran ---------- 22

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 ---------- 22

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024 ---------- 30

BAB IV PENUTUP---------- 40

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.---------- 40

4.2. Rencana tindak lanjut---------- 41

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 2. 1 Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Kabupaten Paser 8

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024..... 20

Tabel 3. 1 TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM 22

Tabel 3. 2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024..... 24

Tabel 3. 3 PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. PASER TAHUN 2024..... 31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagaiacuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan

kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisisampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Kabupaten/Kota Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, proses penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasa dalam penulisan Renja Bappeda,serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.2 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2. 1 Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Kabupaten Paser

Periode Pelaksanaan:2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD Kabupaten Paser:

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kotayang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	Meningkatnya Tata Kelola Akuntabilitas Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100	2.457.235.579,32	70	7.900.938.113	95	3.750.589.022	25	2.532.833.467,00	60	4.968.066.944,00					85	7.500.900.411,00	155	25.401.838.524	155	204	Satuan Polisi Pamong Praja
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	37.801.324,59	100	100.592.500	95	157.056.000	25	64.871.907,00	60	40.749.600,00					85	105.621.507,00	185	206.214.007	185	546	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	95	19.668.446,09	8	69.192.500	8	65.656.000	4	19.974.334,00	2	1.350.000,00					6	21.324.334,00	14	90.516.834	14,736842 11	460	Satuan Polisi Pamong Praja
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	95	18.132.878,50	12	31.400.000	12	91.400.000	3	44.897.573,00	3	39.399.600,00					6	84.297.173,00	18	115.697.173	18,947368 42	638	Satuan Polisi Pamong Praja
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI	95	1.664.329.280,24	90	1.973.526.051	90	2.966.266.605	60	.228.532.283,00	70	.753.081.087,00					130	6.981.613.370,00	220	18.955.139.421	231,578 9474	163	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kotayang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
			KEUANGAN PERANGKAT DAERAH																					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	1.554.219.718,47	948	1.839.558.127	85	2.884.675.959	4	.199.556.979,00	85	.730.398.479,00					174	6.929.955.458,00	1122	18.769.513.585	8014,285714	162	Satuan Polisi Pamong Praja
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	110.109.561,76	12	133.967.924	24	81.590.646	3	28.975.304,00	3	22.682.608,00					6	51.657.912,00	18	185.625.836	150	169	Satuan Polisi Pamong Praja
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	0	418.203.048,69	86	4.496.922.700	86	10.000.000	0	-	0	-					0	-	86	4.496.922.700	#DIV/0!	1.075	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	0	366.025.000,00	3474	4.496.922.700	0	-	0	-	0	-					0	-	3474	4.496.922.700	#DIV/0!	1.229	Satuan Polisi Pamong Praja
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	26.420.523,69	10	-	10	5.000.000	0	-	0	-					0	-	10	-	#DIV/0!	-	Satuan Polisi Pamong Praja
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Undangan	0	25.757.525,00	10	-	10	5.000.000	0	-	0	-					0	-	10	-	#DIV/0!	-	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kotayang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	95	175.991.061,07	80	767.087.340	80	278.700.000	50	189.158.027,00	60	59.397.500,00					110	248.555.527,00	190	1.015.642.867	200	577	Satuan Polisi Pamon Praja
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	2	20.606.020,00	6	475.581.840	47	62.194.500	40	55.560.600,00	5	-					45	55.560.600,00	51	531.142.440	2550	2.578	Satuan Polisi Pamon Praja
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5	1.030.290,70	5	6.801.100	20	6.801.100	2	-	10	-					12	-	17	6.801.100	340	660	Satuan Polisi Pamon Praja
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	40	70.801.460,48	45	79.004.400	50	54.004.400	20	-	45	49.412.500,00					65	49.412.500,00	110	128.416.900	275	181	Satuan Polisi Pamon Praja
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	12	7.727.257,50	12	6.150.000	12	6.150.000	3	-	3	920.000,00					6	920.000,00	18	7.070.000	150	91	Satuan Polisi Pamon Praja
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	3.704.962,40	12	2.500.000	12	2.500.000	3	300.000,00	3	970.000,00					6	1.270.000,00	18	3.770.000	150	102	Satuan Polisi Pamon Praja
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	4	72.121.070,00	15	197.050.000	12	147.050.000	4	133.297.427,00	3	8.095.000,00					7	141.392.427,00	22	338.442.427	550	469	Satuan Polisi Pamon Praja

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kotayang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV							
		SKPD	Konsultasi SKPD																				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan atas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	81.577.996,82	48	80.708.922	48	197.618.617	12	23.467.250,00	12	28.221.657,00					24	51.688.907,00	72	132.397.829	600	162	Satuan Polisi Pamon Praja
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Benda/Jasa Surat Menyurat	12	1.854.541,80	12	1.000.000	12	1.000.000	3	-	3	995.600,00					6	995.600,00	18	1.995.600	150	108	Satuan Polisi Pamon Praja
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	36	79.723.455,02	36	79.708.922	36	196.618.617	9	23.467.250,00	9	27.226.057,00					18	50.693.307,00	54	130.402.229	150	164	Satuan Polisi Pamon Praja
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)	95	79.332.867,91	80	482.100.600	80	140.947.800	20	26.804.000,00	40	86.617.100,00					60	113.421.100,00	140	595.521.700	147,3684211	751	Satuan Polisi Pamon Praja
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Satuan Polisi Pamon Praja
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas	7	72.120.781,52	10	323.860.600	10	132.707.800	6	26.804.000,00	2	85.767.100,00					8	112.571.100,00	18	436.431.700	257,1428571	605	Satuan Polisi Pamon

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kotayang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
		Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau lapangan Yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																					Praja
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2	7.212.086,39	4	8.240.000	4	8.240.000	0	-	1	850.000,00					1	850.000,00	5	9.090.000	250	126	Satuan Polisi Pamon Praja
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan di renovasi	1	-	1	150.000.000	0	-	0	-	0	-					0	-	1	150.000.000	100	#DIV/0!	Satuan Polisi Pamon Praja
	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA	70	2.919.463.943,73	55	7.181.109.900	60	7.257.700.000	20	1.651.776.995,00	40	1.412.141.200,00					60	3.063.918.195,00	115	10.245.028.095	164,2857143	351	Satuan Polisi Pamon Praja
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	100	340.659.461,45	100	4.042.769.900	100	4.303.380.000	25	1.237.996.995,00	25	381.061.200,00					50	1.619.058.195,00	150	5.661.828.095	150	1.662	Satuan Polisi Pamon Praja
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui	87	73.204.866,90	100	270.000.000	28	70.000.000	10	9.180.000,00	12	14.093.600,00					22	23.273.600,00	122	293.273.600	140,2298851	401	Satuan Polisi Pamon Praja

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kotayang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
		Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																				
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	"Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	39	73.832.820,60	60	212.000.000	24	62.000.000	8	26.178.000,00	7	9.240.000,00					15	35.418.000,00	75	247.418.000	192,3076923	335	Satuan Polisi Pamon Praja
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	"Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota "	10	17.753.192,63	15	56.536.000	10	17.000.000	0	-	5	7.990.000,00					5	7.990.000,00	20	64.526.000	200	363	Satuan Polisi Pamon Praja
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil	66	113.820.105,74	30	2.581.891.700	250	3.902.380.000	200	1.170.538.995,00	15	155.516.400,00					215	1.326.055.395,00	245	3.907.947.095	371,2121212	3.433	Satuan Polisi Pamon

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kotayang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
		dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																					Praja
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	23	36.661.432,50	1758	699.742.200	1680	180.000.000	400	-	1200	179.271.200,00					1600	179.271.200,00	3358	879.013.400	14600	2.398	Satuan Polisi Pamon Praja
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12	46.745.929,32	30	143.000.000	17	43.000.000	7	26.850.000,00	7	5.550.000,00					14	32.400.000,00	44	175.400.000	366,6666667	375	Satuan Polisi Pamon Praja
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	13	15.302.546,26	30	70.600.000	13	20.000.000	8	5.250.000,00	10	7.530.000,00					18	12.780.000,00	48	83.380.000	369,2307692	545	Satuan Polisi Pamon Praja
		Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen SOP	6	5.000.000,00	2	4.000.000	2	4.000.000	0	-	0	-					0	-	2	4.000.000	33,33333333	80	Satuan Polisi

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kotayang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
		Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan																					Pamon Praja
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	6	5.000.000,00	2	5.000.000	2	5.000.000	0	-	1	1.870.000,00					1	1.870.000,00	3	6.870.000	50	137	Satuan Polisi Pamon Praja
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Sosialisasi PERDA dan Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	100	2.549.522.482,28	100	3.085.400.000	100	2.934.320.000	25	410.620.000,00	25	1.027.407.600,00					50	1.438.027.600,00	150	4.523.427.600	150	177	Satuan Polisi Pamon Praja
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda /Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat /PelakuUsaha	5	22.220.000,00	5	25.000.000	12	25.000.000	0	-	0	8.189.600,00					0	8.189.600,00	5	33.189.600	100	149	Satuan Polisi Pamon Praja
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan	48	2.384.749.293,12	48	2.754.720.000	34	2.776.320.000	12	392.830.000,00	0	995.364.000,00					12	1.388.194.000,00	60	4.142.914.000	125	174	Satuan Polisi Pamon Praja

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kotayang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
		Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota																					
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	30	142.553.189 ,16	30	305.680.000	30	133.000.000	0	17.790.000,00	0	23.854.000,00					0	41.644.000, 00	30	347.324.000	100	244	Satuan Polisi Pamon Praja
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah PPNS Terhadap Kasus Yang Ditangani	0,42	29.282.000, 00	0,42	52.940.000	0,42	20.000.000	1	3.160.000,00	1	3.672.400,00					2	6.832.400,0 0	2,4 2	59.772.400	576,190 4762	204	Satuan Polisi Pamon Praja
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	3	21.210.000, 00	5	52.940.000	4	20.000.000	1	3.160.000,00	0	3.672.400,00					1	6.832.400,0 0	6	59.772.400	200	282	Satuan Polisi Pamon Praja

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kotayang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
			serta Penegakan Perda dan Perkada																					
	Rata-rata capaian kinerja (%)									45	4.184.610.462,00	10	6.380.208.144,00					55	10.564.818.606,00					
	Predikat Kinerja									82	19,92	55	50,29					SR	SR					

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 55%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.564.818.606,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Enam rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 21.008.289.022,- (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Dua rupiah) atau sebesar 50,29%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 45% dengan predikat kinerja Sedang.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 10 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 5 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 1 indikator capaian kinerja 0%-50% = 1 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis Satuan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
2. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Satuan berdasarkan rencana strategis Satuan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
3. pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Satuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Satuan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Satuan;
5. penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
6. perumusan kebijakan di Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
7. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang

Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;

8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Satuan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Satuan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Satuan sesuai ketentuan yang berlaku;
13. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Satuan;
14. pembinaan kelompok jabatan fungsional pada Satuan sesuai dengan kewenangan yang diberikan;pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Satuan;
15. pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
16. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintah di Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindu ngan Masyarakat;
17. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
18. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan

19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser adalah:

1. Pelayanan Publik (Call Center 112)
2. Penyediaan Layanan Dampak Dalam Rangka Penegakan Perda & Perkada (SPM TRANTIBUMLINMAS)

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

"RASIO KASUS PELANGGARAN TRANTIBUM"

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan: Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser	Indeks Rasa Aman	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Rasio kasus pelanggaran trantibum	13,16	12,90	12.64	12,38	12,14	10,16	80,37

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser "memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Rasa Aman", mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100 dari target sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100%;

b. Sasaran “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat”, mencapai target, dimana Rasio realisasinya sebesar 10,16 dari target sebesar 12,64 dengan capaian kinerja sebesar 80,37%.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan telah mencapai 55 % dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Kerjasama Antar Bidang dalam Penyusunan Rencana Kerja Masing-masing
2. Koordinasi lintas sektor dan antar stakeholder baik
3. Adanya dukungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
4. Adanya penyelengaraan Bimtek Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP;

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Tujuan: Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Umum	**Indeks Rasa Aman**	Nilai Indeks Rasa Aman (IRA) Keterangan 0<=IRA<=20 Rasa Aman Sangat Rendah 20<IRA<=40 Rasa Aman Rendah 40<IRA<=60 Rasa Aman Sedang 60<IRA<=80 Rasa Aman Tinggi 80<IRA<=100 Rasa Aman Sangat Tinggi	**100**	**100**
Sasaran: meningkatnya Ketentraman & ketertiban Umum masyarakat kabupaten Paser	**Rasio Kasus Pelanggaran Trantibum**	$\frac{\text{Jumlah Kasus Setahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100.000$	**12,64**	**12,64**

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu ““PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER”**”** yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian;
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif;
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur;
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana;
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan;
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke-5 (Lima), yaitu ***"Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif"***

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut

Tabel 3. 2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Satpol PP**	**INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKRETARIAT**	**100**	**15.095.912.608,-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Satpol PP**	**INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKRETARIAT**	**100**	**24.100.629.447,-**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Satpol PP**	**Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**95**	**157.056.000,-**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Satpol PP**	**Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**95**	**333.775.906,-**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	65.656.000,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	333.775.906,-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	91.400.000,-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Satpol PP**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**95**	**14.311.590.191,-**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Satpol PP**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**95**	**14.355.328.841,-**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	14.229.999.545,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	14.229.999.545,-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24	81.590.646,-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24	125.329.296,-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Satpol PP**	***TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH***	**86**	**27.522.245.008,-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Satpol PP**	**TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**86**	**468.244.000,-**	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	10	34.420.000,-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	10.000.000,-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	433.824.000,-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Satpol PP**	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	85	**278.700.000,-**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Satpol PP**	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	85	**8.709.490.200,-**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47	62.194.500,-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47	8.203.527.500,-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	6.801.100,-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	54.004.400,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	107.988.200,-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	6.150.000,-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	147.050.000,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	397.974.500,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	**Satpol PP**	**TERPENUHINYA JASA PENUNJANG URUSAN**	**12**	**117.909.695,-**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Satpol PP**	TERPENUHINYA JASA PENUNJANG	12	0	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan Daerah		**PEMERINTAHAN DAERAH**			**Pemerintahan Daerah**		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.000.000,-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	116.909.695,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Satpol PP**	**PERSENTASE TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH (BMD)**	**92**	**140.947.800,-**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	PERSENTASE TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH (BMD)	92	**233.790.500,-**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	132.707.800,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP			233.790.500,-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	8.240.000,-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP			0	
2	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Satpol PP**	**Persentase penurunan pelanggaran perda**		**12.455.481.046,-**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Satpol PP**	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	100%	**15.680.973.400,-**	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Satpol PP**	**Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota**	100%	**9.501.161.046,-**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Satpol PP**	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	28	**11.681.941.400,-**	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan	28	70.000.000,-	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan	24	847.721.000,-	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	24	62.000.000,-	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24	471.750.000,-	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24	81.590.646,-	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	250	52.442.000,-	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	250	7.563.576.400,-	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	100%	7.563.565.400,-	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan SatuanPerlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yangBernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1680	1.651.994.000,-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1680	1.651.994.000,-	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	17	43.000.000,-	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	17	321.445.000,-	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	13	20.000.000,-	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	13	530.206.000,-	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	2	4.000.000,-	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	2	0	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2	5.000.000,-	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2	242.818.000,-	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Satpol PP**	**TERLAKSANANYA SOSIALISASI PERDA DAN CAKUPAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA**	**100%**	**2.934.320.000,-**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Satpol PP**	TERLAKSANANYA SOSIALISASI PERDA DAN CAKUPAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	100%	**3.756.214.000,-**	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12	25.000.000,-	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12	69.200.000,-	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap	30	2.776.320.000,-	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan	30	3.346.920.000,-	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
			Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	34	133.000.000,-	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	34	340.094.000,-	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten /Kota	**Satpol PP**	**Rasio Jumlah PPNS Terhadap Kasus Yang Ditangani**	**0,42**	**20.000.000,-**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Satpol PP**	Rasio Jumlah PPNS Terhadap Kasus Yang Ditangani	0,42	**242.818.000,-**	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4	20.000.000,-	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4	242.818.000,-	

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel 3.3 berikut:

							Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas				
6.000,00	65.656.000,00	65.656.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			19.280.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
0.000,00	91.400.000,00	91.400.000,00	60.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			12.508.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.797,00	12.966.103.255,00	14.311.590.191,00	3.542.608.394,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	ASN Satpol PP		10.704.549.559,70	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

0.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
0.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
0.000,00	278.700.000,00	278.700.000,00	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas	ASN Satpol PP		160.355.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

							yang Responsive dan Tangkas				
4.400,00	54.004.400,00	54.004.400,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			54.004.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
0.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			6.150.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

				Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL	Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas				
8.922,00	197.618.617,00	197.618.617,00	116.909.695,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	ASN Satpol PP		81.508.922,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
0.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			1.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

				Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA BAGI HASIL	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas				PRAJA
0.000,00	8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			7.069.979,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
0.000,00	**7.226.500.000,00**	**12.426.332.400,00**	**9.983.070.884,00**							**15.336.770.884,00**	
0.000,00	4.303.380.000,00	9.472.012.400,00	6.968.632.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata	ASN Satpol PP & Masyarakat		11.709.272.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

				Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA BAGI HASIL	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas				PRAJA
0.000,00	180.000.000,00	1.651.994.000,00	1.471.994.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			1.203.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
0.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata			1.349.160.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

				Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA BAGI HASIL	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas				PRAJA
0.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			2.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
0.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

0.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
0.000,00	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			931.160.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

							yang Responsive dan Tangkas			
4.519,00	**20.976.925.672,00**	**27.522.245.008,00**	**10.892.150.489,00**						**26.597.289.529,70**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tanah Grogot, 24 Juli 2024
Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja

H. MUHAMMAD GUNTUR, S.Sos,MM
Pembina TK.I
NIP. 19670717 198602 1 001

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PASER

PENETAPAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
(P-RENJA)

TAHUN 2024

Disusun Oleh Sekretariat Bappedalitbang

Tahun 2024

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
JlKesuma Bangsa Km. 5 Komplek Perkantoran Terpadu Gedung C Lt.1 Kav.1-2
Tana Paser Kode Pos 76211
E-mail Bappedalitbangpaser@Bappedalitbang.paserkab.go.id Website: Bappedalitbang.paserkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN PASER
NOMOR : 188.4/KEP-56.3/Bapplitbang/2024

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

3. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024;
10 Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024.
11 Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser;

12 Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser Tahun 2024

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 18 Juli 2024

Plt. Kepala Bappedalitbang,

PEMERINTAH KABUPATEN BAPPEDALITBANG

Rusdjan Nor, SE, M.Si
NIP.19770309 199803 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangkapendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor … Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappedalitbang, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Bappedalitbang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappedalitbang Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Paser;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Bappedalitbang Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1) Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Bappedalitbang, proses

penyusunan Perubahan Renja Bappedalitbang, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Bappedalitbang, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

2) Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

3) Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

4) Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

1) Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2) Analisis Kinerja Pelayanan Bappedalitbang

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

3) Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1) Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target

2) Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3) Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Bappedalitbang Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (TA 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Th Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II										
1	2	3		4	5			6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	SASARAN 1 : Mewujudkan keselarasan antar Dok perencanaan pembangunan daerah			Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan	**100**	**Persen**		**97**		**98**										**97**		**97%**		**KEPALA**
A		**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD**	**475**	**Persen**	**8.994.864.391**	**201**	**3.708.232.297**	**100**	**3.517.537.725**	**-**	**356.427.643**		**400.332.031**	**-**	**756.759.674**	**0%**	**22%**	**201**	**4.464.991.971**	**42%**	**50%**	**P2EP**
				Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah	475	Persen		111		95		-				-		**0%**		**111**		**23%**			
I.		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodir di dalam APBD	150	Persen	5.545.486.547	36	2.626.526.261	30	2.837.537.725	-	243.457.906		283.371.376	-	**526.829.282**	**0%**	**19%**	**36**	**3.153.355.543**	**24%**	**57%**	
				Konsistensi ketepatan waktu dan pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah	475	Persen		200		100		-				-		**0%**		**200**		**42%**			
1.		5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang masuk kedalam Ranwal Dok perencanaan	250	Persen	310.000.000	80	27.574.397	85	23.860.000	80	9.000.000		-	**80**	**9.000.000**	**94%**	**38%**	**160**	**36.574.397**	**64%**	**12%**	
				Jumlah Dok Rancangan Awal RKPD	4			1		1		1			**1**		**100%**		**2**		**50%**			

2.		5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dok Kebijakan Lainnya	Persentase keselarasan antara Dok RKPD dengan Dok Kebijakan lainnya	500	Persen	1.454.000.000	194	554.409.633	100	236.986.000	97	40.605.700		57.125.960	**97**	**97.731.660**	**97%**	**41%**	**291**	**652.141.293**	**58%**	**45%**	
				Jumlah Telaahan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah	4			1		1		1				**1**		**100%**		**2**		**50%**		
3.		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase masukan stakeholders (pemangku kepentingan) yang disepakati menjadi rancangan awal Dok perencanaan	400	Persen	355.000.000	100	52.835.988	100	70.090.000	100	26.683.430		-	**100**	**26.683.430**	**100%**	**38%**	**200**	**79.519.418**	**50%**	**22%**	
				Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	6			1		2		1				**1**		**50%**		**2**		**33%**		
4.		5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase hasil musrenbang RKPD yang di tindak lanjuti kedalam Renja PD	145	Persen	355.000.000	100	11.610.000	90	18.297.000	100	-			**100**	-	**111%**	**0%**	**200**	**11.610.000**	**138%**	**3%**	
				Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5			1		1		1				**1**		**100%**		**2**		**40%**		
5.		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang sesuai Tema RKPD	450	Persen	675.461.814	180	379.079.586	100	399.439.050	100	75.092.757		58.822.360	**100**	133.915.117	**100%**	**34%**	**280**	512.994.703	**62%**	**76%**	
				Persentase Usulan Musrenbang Kabupaten disetujui dalam RKPD	450	Persen		180		100		100				**100**		**100%**		**280**		**62%**		
				Persentase muatan rancangan awal Dok Perencanaan Daerah yang disetujui sebagai rancangan Akhir	500	Persen		198		100		98				**98**		**98%**		**296**		**59%**		

				Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6			1		2		1				**1**		**50%**		**2**		**33%**	
6.		5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dok Panduan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	4	Dok	110.000.000	1	22.750.000	1	19.800.000	1	9.000.000		-	**1**	9.000.000	**100%**	**45%**	**2**	31.750.000	**50%**	**29%**
				Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh kecamatan	4000			1.133		1.000		1.133				**1.133**		**113%**		**2.266**		**57%**	
7.		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Konsistensi ketepatan waktu pelaksanaan tahapan penyusunan RKPD	500	Persen	2.286.024.733	190	1.578.266.657	100	2.069.065.675	50	83.076.019		167.423.056	**50**	**250.499.075**	**50%**	**12%**	**240**	**1.828.765.732**	**48%**	**80%**
				Dok RKPD	5	Dok		5		1		2				**2**		**200%**		**7**		**140%**	
				Dok RPJPD	1	Dok		-		-		-				**-**				**-**		**0%**	
				Dok RPJMD	2	Dok		-		-		-				**-**				**-**		**0%**	
				Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	17			4		4		2				**2**		**50%**		**6**		**35%**	
II.		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan data perencanaan	475	Persen	1.798.705.422	120	473.956.072	100	355.000.000	-	46.906.315		45.129.500	**-**	**92.035.815**	**0%**	**26%**	**120**	**565.991.887**	**25%**	**31%**
1.		5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah	422	Persen	670.441.600	83	201.952.893	84	135.000.000	50	16.361.448		10.435.620	**50**	**26.797.068**	**60%**	**20%**	**133**	**228.749.961**	**32%**	**34%**
				Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	180			45		45		-				**-**		**0%**		**45**		**25%**	
2.		5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data& informasi perencanaan yang dipublikasikan	500	Persen	1.128.263.822	101	272.003.179	100	220.000.000	5	30.544.867		34.693.880	**5**	**65.238.747**	**5%**	**30%**	**106**	**337.241.926**	**21%**	**30%**
				Profil Pembangunan Daerah	5	Dok		2		1		-				**-**		**0%**		**2**		**40%**	

				Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	5			1		1		-				-		0%		1		20%		
III.		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian kinerja sasaran RPJMD	454	Persen	1.650.672.422	201	607.749.964	100	325.000.000	-	66.063.422		71.831.155	-	137.894.577	0%	42%	201	745.644.541	44%	45%	
1.		5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Tingkat capaian target program prioritas per sasaran RPJMD	500	Persen	816.605.822	2.258	397.855.922	100	160.000.000	101	31.684.900		28.300.855	101	59.985.755	101%	37%	2.359	457.841.677	472%	56%	
				Persentase ketepatan waktu pengendalian Dok perencanaan	500	Persen		180		100		20				20		20%		200		40%		
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4			1		1		-				-		0%		1		25%		
2.		5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi program prioritas KDH	360	Persen	834.066.600	105	209.894.042	80	165.000.000	49	34.378.522		43.530.300	49	77.908.822	61%	47%	154	287.802.864	43%	35%	
				Persentase program dengan capaian kinerja yang telah >=76%	500	Persen		111		100		28				28		28%		139		28%		
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8			2		2		-				-		0%		2		25%		
																Rata - rata capaian kinerja (%)		0%	22%			34%	33%	
																Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
B.		**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD**	**470**	**Persen**	**15.820.541.259**	**144**	**7.513.092.219**	**94**	**3.928.798.200**	**96**	**726.378.552**		**816.225.646**	**96**	**1.542.604.198**	**102%**	**39%**	**240**	**9.055.696.417**	**51%**	**57%**	

I.		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Konsistensi Dok perencanaan PD dengan Dok pembangunan daerah	425	Persen	5.986.311.782	138	3.066.101.378	97	1.740.398.955	-	297.878.040		438.761.351	-	**736.639.391**	**0%**	**42%**	**138**	**3.802.740.769**	**32%**	**64%**	**PPM**
1.		5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Pemerintahan	500	Persen	1.526.442.866	184	618.161.561	100	322.223.955	92	96.201.390	-	38.400.000	**92**	**134.601.390**	**92%**	**42%**	**276**	**752.762.951**	**55%**	**49%**	
				Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Pemerintahan	500	Persen		192		100		98		-		**98**		**98%**		**290**		**58%**		
				Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidan Pemerintahan yang diakomodir penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	12			3		3		-				**-**		**0%**		**3**		**25%**		
2.		5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan Dok perencanaan PD Bidang Pemerintahan	344	Persen	165.000.000	98	22.681.146	100	85.000.000	67	20.065.600		20.065.600	**67**	**40.131.200**	**67%**	**47%**	**165**	**62.812.346**	**48%**	**38%**	
				Persentase konsistensi tolok ukur dalam Dok Renja dengan Renstra Bidang Pemerintahan	400	Persen		92		100		92				**92**		**92%**		**184**		**46%**		
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12			3		2		-				**-**		**0%**		**3**		**25%**		
3.		5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dok Evaluasi Bidang Pemerintahan	475	Persen	216.550.000	196	56.700.000	100	88.000.000	23	9.683.430		22.238.476	**23**	**31.921.906**	**23%**	**36%**	**219**	**88.621.906**	**46%**	**41%**	

				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Pemerintahan	446	Persen		173		90		20				**20**		**22%**		**193**		**43%**		
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Pemerintahan	446	Persen		175		90		40				**40**		**44%**		**215**		**48%**		
				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	16			4		4		-				**-**		**0%**		**4**		**25%**		
4.		5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Pemerintahan	337	Persen	169.560.374	100	267.670.281	100	110.000.000	100	-		56.346.535	**100**	**56.346.535**	**100%**	**51%**	**200**	**324.016.816**	**59%**	**191%**	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	8			2		2		-				**-**		**0%**		**2**		**25%**		
5.		5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Pembangunan Manusia	500	Persen	2.290.949.422	191	966.830.741	100	509.500.000	100	88.340.661		105.281.518	**100**	**193.622.179**	**100%**	**38%**	**291**	**1.160.452.920**	**58%**	**51%**	
				Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Pembangunan Manusia	500	Persen		193		100		94		5		**99**		**99%**		**292**		**58%**		

				Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Diakomodir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24			3		3		-		1		**1**		**33%**		**4**		**17%**	
6.		5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan Dok perencanaan PD Bidang Pembangunan Manusia	424	Persen	225.625.000	176	76.350.000	97	88.000.000	63	-	25	17.689.834	**88**	**17.689.834**	**91%**	**20%**	**264**	**94.039.834**	**62%**	**42%**	
				Persentase konsistensi tolok ukur dalam Dok Renja dengan Renstra Bidang Pembangunan Manusia	500	Persen		154		100		75		15		**90**		**90%**		**244**		**49%**		
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24			3		2		-		1		**1**		**50%**		**4**		**17%**		
7.		5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dok Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia	475	Persen	498.548.120	193	167.958.000	98	99.675.000	93	-	7	78.991.228	**100**	**78.991.228**	**102%**	**79%**	**293**	**246.949.228**	**62%**	**50%**	
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Pembangunan Manusia	446	Persen		187		92		-		84		**84**		**91%**		**271**		**61%**		

				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Pembangunan Manusia	446	Persen		190		92		85		-		**85**		**92%**		**275**		**62%**		
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24			3		4		-		1		**1**		**25%**		**4**		**17%**		
8.		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Pembangunan Manusia	415	Persen	893.636.000	200	889.749.649	100	438.000.000	100	83.586.959	-	99.748.160	**100**	**183.335.119**	**100%**	**42%**	**300**	**1.073.084.768**	**72%**	**120%**	
				Jumlah Laporan Hasil SInkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8			1		2		-		1		**1**		**50%**		**2**		**25%**		
II.		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Konsistensi Dok perencanaan PD dengan Dok pembangunan daerah	425	Persen	5.245.743.809	189	2.279.397.484	95	1.116.000.000	88	294.031.512		186.623.152	**88**	**480.654.664**	**93%**	**43%**	**277**	**2.760.052.148**	**65%**	**53%**	**PSDA**
1.		5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Perekonomian	500	Persen	1.374.617.822	193	496.595.937	100	329.900.000	100	85.634.042	-	19.600.000	**100**	**105.234.042**	**100%**	**32%**	**293**	**601.829.979**	**59%**	**44%**	
				Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Perekonomian	500	Persen		196		100		98		-		**98**		**98%**		**294**		**59%**		

				Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24			3		3		-		1		**1**		**33%**		**4**		**17%**	
2.		5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan Dok perencanaan PD Bidang Perekonomian	424	Persen		191		95		100		-		**100**		**105%**		**291**		**69%**	
				Persentase konsistensi tolok ukur dalam Dok Renja dengan Renstra Bidang Perekonomian	500	Persen	180.000.000	170	78.709.272	100	45.000.000	100	7.313.100	-		**100**	**7.313.100**	**100%**	**16%**	**270**	**86.022.372**	**54%**	**48%**
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	32			2		18		-		1		**1**		**6%**		**3**		**9%**	
3.		5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dok Evaluasi Bidang Perekonomian	475	Persen		183		95		100		-		**100**		**105%**		**283**		**59%**	
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Perekonomian	446	Persen	285.000.000	186	87.096.000	90	60.000.000	33	10.195.000	33	23.641.300	**66**	**33.836.300**	**73%**	**56%**	**252**	**120.932.300**	**56%**	**42%**
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Perekonomian	446	Persen		193		90		37		29		**66**		**73%**		**259**		**58%**	

				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	32			2		24		1		1		**2**		**8%**		**4**		**13%**		
4.		5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Perekonomian	415	Persen	839.000.000	200	488.967.411	100	331.640.000	100	90.682.148	-	55.117.843	**100**	**145.799.991**	**100%**	**44%**	**300**	**634.767.402**	**72%**	**76%**	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	16			2		2		-		1		**1**		**50%**		**3**		**19%**		
5.		5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang SDA	500	Persen	1.182.625.987	197	421.900.189	100	119.460.000	98	32.500.630	1	66.256.967	**99**	**98.757.597**	**99%**	**83%**	**296**	**520.657.786**	**59%**	**44%**	
				Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang SDA	500	Persen		186		100		96		-		**96**		**96%**		**282**		**56%**		
				Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12			3		3		1		-		**1**		**33%**		**4**		**33%**		
6.		5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan Dok perencanaan PD Bidang SDA	424	Persen	185.000.000	188	91.459.254	100	30.000.000	100	3.375.000	-	17.914.942	**100**	**21.289.942**	**100%**	**71%**	**288**	**112.749.196**	**68%**	**61%**	

				Persentase konsistensi tolok ukur dalam Dok Renja dengan Renstra Bidang SDA	500	Persen		172		100		94		-		**94**		**94%**		**266**		**53%**	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	16			4		2		-		-		**-**		**0%**		**4**		**25%**	
7.		5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dok Evaluasi Bidang SDA	475	Persen		180		95		100		-		**100**		**105%**		**280**		**59%**	
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang SDA	446	Persen		188		92		49		-		**49**		**53%**		**237**		**53%**	
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang SDA	446	Persen	355.000.000	186	194.500.320	90	50.000.000	55	-	-	-	**55**	**-**	**62%**	**0%**	**242**	**194.500.320**	**54%**	**55%**	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	16			4		4		1		-		**1**		**25%**		**5**		**31%**	
8.		5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang SDA	415	Persen	844.500.000	200	420.169.101	80	150.000.000	100	64.331.592	-	4.092.100	**100**	**68.423.692**	**125%**	**46%**	**300**	**488.592.793**	**72%**	**58%**	
				Jumlah Laporan Hasil SInkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	8			2		3		-		1		**1**		**33%**		**3**		**38%**	

				pada Bidang SDA																		
III.		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Konsistensi Dok perencanaan PD dengan Dok pembangunan daerah	425	Persen	4.588.485.669	170	2.167.593.357	90	1.072.399.245	83	134.469.000	13	190.841.143	**96**	**325.310.143**	**107%**	**30%**	**266**	**2.492.903.500**	**63%**	**54%**	**INFRASWIL**
1.		5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Infrastruktur	500	Persen	1.102.404.629	181	758.671.873	100	436.639.800	98	59.228.300	-	63.242.585	**98**	**122.470.885**	**98%**	**28%**	**279**	**881.142.758**	**56%**	**80%**	
				Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Infrastruktur	500	Persen		260		100		95		-		**95**		**95%**		**355**		**71%**		
				Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Diakomodir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24			3		3		-		-		**-**		**0%**		**3**		**13%**		
2.		5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan Dok perencanaan PD Bidang Infrastruktur	424	Persen	340.924.129	138	62.182.200	85	72.000.000	100	9.169.700	-	11.282.900	**100**	**20.452.600**	**118%**	**28%**	**238**	**82.634.800**	**56%**	**24%**	
				Persentase konsistensi tolok ukur dalam Dok Renja dengan Renstra Bidang Infrastruktur	500	Persen		123		80		96		-		**96**		**120%**		**219**		**44%**		
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	32			4		2		1		-		**1**		**50%**		**5**		**16%**		

3.		5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dok Evaluasi Bidang Infrastruktur	475	Persen	519.032.900	149	367.494.399	95	115.000.000	100	12.000.000	-	16.800.000	**100**	**28.800.000**	**105%**	**25%**	**249**	**396.294.399**	**52%**	**76%**	
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Infrastruktur	446	Persen		169		90		34		30		**64**		**71%**		**233**		**52%**		
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Infrastruktur	446	Persen		169		90		25		35		**60**		**67%**		**229**		**51%**		
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	32			4		4		1		-		**1**		**25%**		**5**		**16%**		
4.		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Infrastruktur	415	Persen	421.213.900	200	313.785.180	100	241.985.200	100	29.855.300	-	52.247.400	**100**	**82.102.700**	**100%**	**34%**	**300**	**395.887.880**	**72%**	**94%**	
				Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	16			2		2		-		-		**-**		**0%**		**2**		**13%**		
5.		5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Kewilayahan	500	Persen	862.823.411	186	270.915.919	100	81.104.245	85	9.251.200		21.764.800	**85**	**31.016.000**	**85%**	**38%**	**271**	**301.931.919**	**54%**	**35%**	

			Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Kewilayahan	500	Persen		145		100		77				**77**		**77%**		**222**		**44%**	
				Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12			3		3		-				**-**		**0%**		**3**		**25%**	
6.		5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan Dok perencanaan PD Bidang Kewilayahan	424	Persen		168		90		46				**46**		**51%**		**214**		**50%**	
				Persentase konsistensi tolok ukur dalam Dok Renja dengan Renstra Bidang Kewilayahan	500	Persen	314.769.900	101	60.333.721	80	32.530.000	51	-		6.153.600	**51**	**6.153.600**	**64%**	**19%**	**152**	**66.487.321**	**30%**	**21%**
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	16			4		2		1				**1**		**50%**		**5**		**31%**	
7.		5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dok Evaluasi Bidang Kewilayahan	475	Persen		171		100		24				**24**		**24%**		**195**		**41%**	
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Kewilayahan	446	Persen	637.877.900	205	200.705.732	92	53.400.000	72	8.600.000		9.600.000	**72**	**18.200.000**	**78%**	**34%**	**277**	**218.905.732**	**62%**	**34%**

				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Kewilayahan	446	Persen		243		95		42				**42**		**44%**		**285**		**64%**		
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	16			4		4		1				**1**		**25%**		**5**		**31%**		
8.		5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Kewilayahan	415	Persen	389.438.900	200	133.504.333	100	39.740.000	100	6.364.500		9.749.858	**100**	**16.114.358**	**100%**	**41%**	**300**	**149.618.691**	**72%**	**38%**	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4			1		2		-				**-**		**0%**		**1**		**25%**		
																Rata - rata capaian kinerja (%)		**66%**	**39%**			**53%**	**57%**	
																Predikat kinerja		**Sedang**	**Sangat Rendah**			**Rendah**	**Rendah**	
	SASARAN 2 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah			Persentase implementasi hasil kelitbangan	**100**	**Persen**		**74**		**75**										**74**		**74%**		**KEPALA**
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	**90**	**Persen**		**73**		80										**73**		**81%**		
C.		**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**	350	**Persen**	12.222.826.066	**132**	8.522.354.316	75	9.093.308.683	**82**	264.402.872	**-**	317.579.851	**82**	**581.982.723**	**109%**	**6%**	**214**	**9.104.337.039**	**61%**	**74%**	**LITBANG**

I.		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD	300	Persen	2.522.878.226	144	655.590.865	97	945.860.000	67	51.646.820	-	127.539.019	**67**	**179.185.839**	**69%**	**19%**	**211**	**834.776.704**	**70%**	**33%**	
1.		5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Dok Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	5	Dok	1.751.913.000	**1**	**231.900.957**	2	945.860.000		51.646.820		127.539.019	**-**	**179.185.839**	**0%**	**19%**	**1**	**411.086.796**	**20%**	**23%**	
II.		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD	245	Persen	1.439.198.911	**100**	199.153.001	97	350.000.000	**67**	-	**-**	43.102.565	**67**	**43.102.565**	**69%**	**12%**	**167**	**242.255.566**	**68%**	**17%**	
1.		5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dok penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	4	Dok	1.439.198.911	**1**	**199.153.001**	1	350.000.000		-		43.102.565	**-**	**43.102.565**	**0%**	**12%**	**1**	**242.255.566**	**25%**	**17%**	
III.		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD	300	Persen	3.938.240.937	**197**	6.241.214.424	97	6.922.640.000	**100**	150.470.227	**-**	110.590.267	**100**	**261.060.494**	**103%**	**4%**	**297**	**6.502.274.918**	**99%**	**165%**	
1.		5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dok penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	2	Dok	700.000.000	**3**	**977.667.597**	1	750.000.000	**-**	21.357.891		31.036.520	**-**	**52.394.411**	**0%**	**7%**	**3**	**1.030.062.008**	**150%**	**147%**	
				Jumlah Dok Hasil Penelitian dan Pengembangan pertanian, Perkebunan dan Pangan	4			**3**		2								**0%**		**3**		**75%**		
2.		5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dok Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1	Dok	350.000.000	**5**	**4.224.994.489**	1	6.172.640.000	**-**	129.112.336		79.553.747	**-**	**208.666.083**	**0%**	**3%**	**5**	**4.433.660.572**	**500%**	**1267%**	
				Jumlah Dok Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5			**5**		5								**0%**		**5**		**100%**		
IV.		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang difasilitasi untuk diterapkan	187	Persen	4.322.507.992	**131**	1.426.396.026	85	874.808.683	**81**	62.285.825	**2**	36.348.000	**83**	**98.633.825**	**98%**	**11%**	**214**	**1.525.029.851**	**114%**	**35%**	

1.		5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase Uji Coba Inovasi yang Memenuhi Standar	300	Persen	1.177.566.000	**170**	312.774.504	97	218.000.000	**95**	16.362.391		14.362.800	**95**	**30.725.191**	**98%**	**14%**	**265**	**343.499.695**	**88%**	**29%**	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan uji coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi dan Penerapan Teknologi	4			**1**		1		**-**				**-**		**0%**		**1**		**25%**		
2.		5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Persentase inovasi yang memenuhi standar	150	Persen	2.128.557.309	**167**	887.782.481	90	466.880.000	**89**	38.923.434		12.885.200	**89**	**51.808.634**	**99%**	**11%**	**256**	**939.591.115**	**171%**	**44%**	
				Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	16			**1**		1		**-**				**-**		**0%**		**1**		**6%**		
3.		5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal Renja PD	300	Persen	1.016.384.683	**146**	225.839.041	99	189.928.683	**83**	7.000.000		9.100.000	**83**	**16.100.000**	**84%**	**8%**	**229**	**241.939.041**	**76%**	**24%**	
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	**4**			**1**		**1**		**-**				**-**		**0%**		**1**		**25%**		
																Rata - rata capaian kinerja (%)		**90%**	**11%**			**88%**	**63%**	
																Predikat kinerja		**Tinggi**	**Sangat Rendah**			**Tinggi**	**Rendah**	
	SASARAN 1 : Meningkatnya tata kelola dan pelayanan Bappedalitbang			Capaian atas hasil evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Bappedalitbang	**34**	**Persen**		**29,2**		**31**										**29,2**		**86%**		**KEPALA**
D.		**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat**	372	**Persen**	47.154.431.444	**162**	12.416.877.925	82	12.416.877.925	**81**	1.963.300.933		2.683.066.954	**81**	**4.646.367.887**	**99%**	**37%**	**243**	**17.063.245.812**	**65%**	**36%**	**SEKRETARIAT**

			DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
I.		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan Dok perencanaan Perangkat Daerah	500	Persen	2.242.064.811	194	311.371.400	100	311.371.400	100	41.120.516		38.722.880	**100**	**79.843.396**	**100%**	**26%**	**294**	**391.214.796**	**59%**	**17%**	
				Persentase capaian sasaran strategis Bappedalitbang	461	Persen		193		92		21				**21**		**23%**		**214**	**-**	**46%**		
				Capaian nilai penyelenggaraan SPIP pada Bappedalitbang	17,5			7		4		2,5				**2,5**		**57%**		**9**	**-**	**52%**		
				Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	403			136		77		68,50				**68,50**		**89%**		**205**	**-**	**51%**		
				Persentase rata-rata capaian area perubahan RB	350	Persen		146		75		75				**75**		**100%**		**221**	**-**	**63%**		
1.		5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase konsistensi Renja dengan Renstra tahun berkenaan	500	Persen	665.807.000	197	109.600.000	100	109.600.000	100	23.017.200		28.611.480	**100**	**51.628.680**	**100%**	**47%**	**297**	**161.228.680**	**59%**	**24%**	
				Dok Perencanaan PD sesuai ketentuan	16	Dok		9		4		2				**2**		**50%**		**11**		**69%**		
				Persentase keselarasan muatan Renstra dengan RPJMD	100	Persen		-								**-**		**#DIV/0!**		**-**		**0%**		
				Persentase ketersediaan data kinerja	500	Persen		197		100		25				**25**		**25%**		**222**		**44%**		
				Jumlah Dok Perencanaan Perangkat Daerah	25			6		6		2				**2**		**33%**		**8**		**32%**		
2.		5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Persentase RKA-SKPD disusun sesuai KAK	440	Persen	772.402.900	156	49.462.600	98	49.462.600	-	900.000		-	**-**	**900.000**	**0%**	**2%**	**156**	**50.362.600**	**35%**	**7%**	
				Persentase RKA disusun menggunakan SSH&ASB	390	Persen		150		100		-				**-**		**0%**		**150**		**38%**		
				Jumlah Dok RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	8			2		2		-				**-**		**0%**		**2**		**25%**		

3.		5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Kegiatan diakomodir dalam DPA-SKPD	500	Persen	88.308.911	200	17.308.800	100	17.308.800	50	-		-	**50**	**-**	**50%**	0%	**250**	**17.308.800**	**50%**	20%
				Persentase KAK per Kegiatan pada DPA	440	Persen		163		100		100				**100**		**100%**		**263**		**60%**	
				Jumlah Dok DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	8			2		2		1				**1**		**50%**		**3**		**38%**	
4.		5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja tepat waktu	25	Dok	715.546.000	9	135.000.000	5	135.000.000	2	17.203.316		10.111.400	**2**	**27.314.716**	**40%**	20%	**11**	**162.314.716**	**44%**	23%
				Persentase capaian kinerja dan anggaran kegiatan ≥ 80%	470	Persen		190		95		-				**-**		**0%**		**190**		**40%**	
				Persentase pengendalian resiko kegiatan	230	Persen		57		45		19				**19**		**42%**		**76**		**33%**	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20			5		5		1				**1**		**20%**		**6**		**30%**	
II.		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	500	Persen	38.476.663.155	186	10.376.880.245	100	10.376.880.245	100	1.676.519.115		2.231.908.856	**100**	**3.908.427.971**	**100%**	38%	**286**	**14.285.308.216**	**57%**	37%
				Persentase LHP nihil	500	Persen		145		100		100				**100**		**100%**		**245**	**-**	**49%**	
1.		5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesesuaian data kepegawaian dengan Daftar Gaji ASN	500	Persen	36.666.543.244	197	9.844.714.245	100	9.844.714.245	96	1.619.539.600		2.175.619.557	**96**	**3.795.159.157**	**96%**	39%	**293**	**13.639.873.402**	**59%**	37%
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	204			54		55		51				**51**		**93%**		**105**		**51%**	
2.		5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian realisasi kinerja keuangan	479,6	Persen	458.665.500	185	171.108.000	96	171.108.000	11	20.129.554		-	**11**	**20.129.554**	**12%**	12%	**196**	**191.237.554**	**41%**	42%
				Persentase Dok SPJ yang dikembalikan	68	Persen		11		15		-				**-**		**139%**		**11**		**16%**	
				Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1800			572		450		172				**172**		**38%**		**744**		**41%**	

3.		5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan Laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	500	Persen	1.351.454.411	133	361.058.000	100	361.058.000	100	36.849.961		56.289.299	**100**	**93.139.260**	**100%**	**26%**	**233**	**454.197.260**	**47%**	**34%**	
				Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8			2		2		-				**-**		**0%**		**2**		**25%**		
III.		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80	440	Persen	2.274.027.904	87	435.000.000	90	435.000.000	28	17.679.197		265.166.938	**28**	**282.846.135**	**31%**	**65%**	**115**	**717.846.135**	**26%**	**32%**	
1.		5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang mendapatkan Sosialisasi	424	Persen	536.025.500	200	110.000.000	85	110.000.000	-	17.679.197	31	16.960.800	**31**	**34.639.997**	**36%**	**31%**	**231**	**144.639.997**	**54%**	**27%**	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	170			50		40		-		16		**16**		**40%**		**66**		**39%**		
2.		5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian	425	Persen	1.563.002.404	160	325.000.000	85	325.000.000	-	-	100	248.206.138	**100**	**248.206.138**	**118%**	**76%**	**260**	**573.206.138**	**61%**	**37%**	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	348			100		87		-		87		**87**		**100%**		**187**		**54%**		
IV.		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	500	Persen	3.185.274.314	167	1.091.600.000	100	1.091.600.000	77	196.432.105		122.723.680	**77**	**319.155.785**	**77%**	**29%**	**244**	**1.410.755.785**	**49%**	**44%**	
1.		5.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan bulanan bahan instalasi listrik dan penerangan	500	Persen	14.213.100	200	3.000.000	100	3.000.000	-	-	-		**-**	**-**	**0%**	**0%**	**200**	**3.000.000**	**40%**	**21%**	

				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	36			13		8		122		-		**122**		**1525%**		**135**		**375%**	
2.		5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor non aset	500	Persen	145.698.304	18	89.562.244	100	47.500.000		-			**-**	**-**	**0%**	**0%**	**18**	**89.562.244**	**4%**	**61%**
3.		5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan peralatan rumah tangga	400	Persen	92.500.000	-	27.500.000	100	27.500.000		8.958.000		-	**-**	**8.958.000**		**33%**	**-**	**36.458.000**	**0%**	**39%**
4.		5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan bulanan ATK dan alat/bahan kebersihan kantor	500	Persen	619.004.210	196	120.000.000	100	120.000.000	86	36.169.800		18.400.000	**86**	**54.569.800**	**86%**	**45%**	**282**	**174.569.800**	**56%**	**28%**
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	220			1.494		55		624			**624**		**1135%**		**2.118**		**963%**	
5.		5.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan	500	Persen	121.496.000	112	25.000.000	100	25.000.000	2	-		-	**2**	**-**	**2%**	**0%**	**114**	**25.000.000**	**23%**	**21%**
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	24			6		6		6		-		**6**		**100%**		**12**		**50%**	
6.		5.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah media cetak berlangganan	4185	Eksemplar	26.409.200	1.674	5.500.000	837	5.500.000	360	740.000	180	1.480.000	**540**	**2.220.000**	**65%**	**40%**	**2.214**	**7.720.000**	**53%**	**29%**
				Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	3348			837		837		270		270		**540**		**65%**		**1.377**		**41%**	
7.		5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kebutuhan makan dan minum rapat pegawai	15200	Kotak	1.915.953.500	4.369	651.000.000	3.050	651.000.000	660	84.498.705	140	50.091.280	**800**	**134.589.985**	**26%**	**21%**	**5.169**	**785.589.985**	**34%**	**41%**
				Kebutuhan menghadiri Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi antar pemerintahan	545	Kali		243		105		15		8		**23**		**22%**		**266**		**49%**	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraa	420			180		105		12		11		**23**		**22%**		**203**		**48%**	

				n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
8.		5.01.01.2.06.0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Update berita dan informasi per bulan pada website Bappedalitbang	200	berita/bulan	250.000.000	91	212.100.000	40	212.100.000	-	66.065.600	10	52.752.400	**10**	**118.818.000**	**25%**	**56%**	**101**	**330.918.000**	**51%**	**132%**
				Jumlah akses laman website	7000	Kali		15.896		1.400		-		776		**776**		**55%**		**16.672**		**238%**	
				Jumlah Dok Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4			1		1		1		-		**1**		**100%**		**2**		**50%**	
V.		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	400	Persen	318.660.360	126	69.026.280	80	69.026.280	51	-		-	**51**	**-**	**64%**	**0%**	**177**	**69.026.280**	**44%**	**22%**
1.		5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor	400	Persen	318.660.360	163	69.026.280	80	69.026.280	-	-	-	-	**-**	**-**	**0%**	**0%**	**163**	**69.026.280**	**41%**	**22%**
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	28			29		7		-		-		**-**		**0%**		**29**		**104%**	
VI.		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	228	Persen	657.740.900	109	133.000.000	75	133.000.000	36,5	31.550.000		24.544.600	**36,5**	**56.094.600**	**49%**	**42%**	**146**	**189.094.600**	**64%**	**29%**
1.		5.01.01.2.09.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Persentase Kendaraan dinas operasional layak pakai	425	Persen	424.819.000	200	85.000.000	100	85.000.000	33	16.700.000	-	1.752.600	**33**	**18.452.600**	**33%**	**22%**	**233**	**103.452.600**	**55%**	**24%**
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12			3		3		3		-		**3**		**100%**		**6**		**50%**	
2.		5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan kantor kondisi baik	179	Persen	232.921.900	189	48.000.000	100	48.000.000	7	14.850.000	10	22.792.000	**17**	**37.642.000**	**17%**	**78%**	**206**	**85.642.000**	**115%**	**37%**

				Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	340			95		85		85		-		**85**		**100%**		**180**		**53%**		
																Rata - rata capaian kinerja (%)		**72%**	**18%**			**51%**	**16%**	
																Predikat kinerja		**Sedang**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
												TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM					**62,05%**	**26,15%**			**48,63%**	**43,51%**	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 62,05%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.507.648.882 (Tujuh milyar lima ratus tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 29.168.574.533 (Dua puluh sembilan milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) atau sebesar 26,05%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Bappedalitbang sebesar 72% dengan predikat kinerja Sedang.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 5 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 18 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 10 indikator capaian kinerja 0%-50% = 21 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Bappedalitbang

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja (Bappedalitbang Kabupaten Paser, maka Bappedalitbang Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Tugas :

Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Badan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
c. pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Badan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Badan;
e. penetapan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
f. perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Badan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan

tahunan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
l. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan ;
m. pembinaan kelompok jabatan fungsional pada Badan sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
n. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Badan ;
o. pengendalian pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
p. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
q. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
r. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan daerah; dan
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Bappedalitbang adalah:

1. Pelayanan Kesekretariatan;
2. Pelayanan Perumusan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
3. Pelayanan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
4. Pelayanan pembinaan kelompok jabatan fungsional Perencana;
5. Pelayanan penyelenggaraan kerjasama dengan pihak atau instansi terkait dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

Upaya Bappedalitbang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Mewujudkan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah;
   Dengan indikator kinerja : Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah;
   Dengan indikator kinerja :
   a. Persentase implementasi rencana kelitbangan;
   b. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah;
3. Meningkatnya tata kelola dan pelayanan Bappedalitbang.
   Dengan indikator kinerja : Capaian komponen pengungkit nilai IRB pada Bappedalitbang

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang

tercantum pada Renstra Bappedalitbang Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappedalitbang terdapat dalam Tabel 2.1 di bawah ini

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappedalitbang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan: Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	7	7,8	8,5	9	9,5	8,13	86%
Mewujudkan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan	90	93	96	99	100	97	97%
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase implementasi hasil kelitbangan	58	60	62	64	66	74	112%
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	60	65	70	75	80	73	91%
Meningkatnya tata kelola dan pelayanan Bappedalitbang	Capaian komponen pengungkit nilai IRB pada Bappedalitbang	27	29	31	32	34	29,2	86%

Berdasarkan Tabel 2.1 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappedalitbang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "**Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "**Indeks Kualitas Perencanaan**", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 8,13 dari target sebesar 8,5 dengan capaian kinerja sebesar 86%;
b. Sasaran "**Mewujudkan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah**" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "**Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan**", belum mencapai

target, dimana realisasinya sebesar 97 dari target sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 97 %

c. Sasaran "**Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah"** memiliki 2 indikator kinerja yaitu "**Persentase implementasi hasil kelitbangan",** telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 74 dari target sebesar 66 dengan capaian kinerja 112%. **"Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah" ,** belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 73 dari target 75 dengan capaian kinerja 91%.

d. Sasaran **"Meningkatnya tata kelola dan pelayanan Bappedalitbang"** memiliki indikator kinerja yaitu "**Capaian komponen pengungkit nilai IRB pada Bappedalitbang",** belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 29,2 dari target sebesar 34 dengan capaian kinerja 86%.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan di atas 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. *Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan menyusun agenda lebih awal*
2. *Melakukan pendampingan dan konsultasi dengan pihak terkait/instansi yang relevan serta kerjasama dengan tenaga ahli/akademisi*
3. *Pemanfaatan TI dalam kegiatan*

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. *Progress realisai keuangan lambat karena beberapa kegiatan diagendakan selesai pada akhir tahun.*
2. *Kondisi SDM Perencana kurang*
3. *Tata Kerja pasca penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional belum berjalan*

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Bappedalitbang Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tujuan/Sasaran	Indikator	Rumus	Target	
			Renja 2024	P Renja 2024
Tujuan: Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	$IKP = \sum_{i=1}^{3} A_i$ $A_i = \sum_{n=1}^{9} U_n . b_n$ Ket : A_i = Aspek penilaian kualitas perencanaan b_n = Bobot masing-masing unsur U_n = Unsur penyusun Aspek kualitas perencanaan IKP diukur dari 3 Aspek, yaitu: 1. Aspek Proses 2. Aspek Isi, dan 3. Aspek Tindak Lanjut	8,5	8,5
Mewujudkan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan	$\frac{Jumlah\ sasaran\ pembangunan\ jangka\ panjang\ menengah\ dan\ tahunan\ yang\ selaras}{Jumlah\ sasaran} x\ 100\%$	98	99
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase implementasi hasil kelitbangan	$\frac{Jumlah\ rincian\ kegiatan/aktifitas\ yang\ dilaksanakan\ atas\ hasil\ kelitbangan\ dalam\ RKPD}{Jumlah\ hasil\ kelitbangan} x\ 100\%$	75	75
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	$\frac{Jumlah\ kebijakan\ inovasi\ yang\ diterapkan}{Jumlah\ kebijakan\ inovasi\ yang\ diusulkan} x\ 100\%$	80	80
Meningkatnya tata kelola dan pelayanan Bappedalitbang	Capaian komponen pengungkit nilai IRB pada Bappedalitbang	$Nilai\ LKE\ PMPRB\ Bappedalitbang$	31	33

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Paser Tahun 2024 mengalami perubahan hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja (Target Akhir RENSTRA).

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu "PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER" yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Bappedalitbang mendukung pencapaian sasaran ke-3, yaitu "Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah".

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Bappedalitbang telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen

Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2
Rencana Kebutuhan Perubahan Renja Bappedalitbang Tahun 2024

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10		-11	-12
	Bappedalitbang				**29.168.574.533**						**33.244.860.277**	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**29.168.574.533**						**33.244.860.277**	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Paser**	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	74 Persen	**12.416.877.925**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Paser**	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	74	Persen	**13.226.461.669**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen	**311.371.400**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100	Persen	**311.371.400**	
			Persentase capaian sasaran strategis Bappedalitbang	92 Persen				Persentase capaian sasaran strategis Bappedalitbang	92	Persen		
			Capaian nilai penyelenggaraan SPIP pada Bappedalitbang	3,5				Capaian nilai penyelenggaraan SPIP pada Bappedalitbang	3,5			
			Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	81				Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	81			
			Persentase rata-rata capaian area perubahan RB	75 Persen				Persentase rata-rata capaian area perubahan RB	75	Persen		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase konsistensi Renja dengan Renstra tahun berkenaan	100 Persen	109.600.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase konsistensi Renja dengan Renstra tahun berkenaan	100	Persen	109.600.000	
			Persentase ketersediaan data kinerja	100 Persen				Persentase ketersediaan data kinerja	100	Persen		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Persentase RKA-SKPD disusun sesuai KAK	90 Persen	49.462.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Persentase RKA-SKPD disusun sesuai KAK	90	Persen	49.462.600	

			Persentase RKA disusun menggunakan SSH&ASB	80	Persen				Persentase RKA disusun menggunakan SSH&ASB	80	Persen		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Persentase Kegiatan diakomodir dalam DPA-SKPD	100	Persen	17.308.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Persentase Kegiatan diakomodir dalam DPA-SKPD	100	Persen	17.308.800	
			Persentase KAK per Kegiatan pada DPA	90	Persen				Persentase KAK per Kegiatan pada DPA	90	Persen		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan evaluasi kinerja tepat waktu	0	Dokumen	135.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan evaluasi kinerja tepat waktu	0	Dokumen	135.000.000	
			Persentase capaian kinerja dan anggaran kegiatan ≥ 80%	95	Persen				Persentase capaian kinerja dan anggaran kegiatan ≥ 80%	95	Persen		
			Persentase pengendalian resiko kegiatan	45	Persen				Persentase pengendalian resiko kegiatan	45	Persen		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase temuan ditindaklanjuti	100	Persen	10.376.880.245	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase temuan ditindaklanjuti	100	Persen	11.099.379.189	
			Persentase LHP nihil	100	Persen				Persentase LHP nihil	100	Persen		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kesesuaian data kepegawaian dengan Daftar Gaji ASN	100	Persen	9.844.714.245	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kesesuaian data kepegawaian dengan Daftar Gaji ASN	100	Persen	10.496.613.189	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	orang/bulan				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	orang/bulan		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Capaian realisasi kinerja keuangan	96,5	Persen	171.108.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Capaian realisasi kinerja keuangan	96,5	Persen	241.708.000	
			Persentase dokumen SPJ yang dikembalikan	15	Persen				Persentase dokumen SPJ yang dikembalikan	15	Persen		

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	450	Dokumen				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	450	Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Persentase pemenuhan Laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	100	Persen	361.058.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Persentase pemenuhan Laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	100	Persen	361.058.000	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80	90	Persen	435.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80	90	Persen	435.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Persentase ASN yang mendapatkan Sosialisasi	85	Persen	110.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Persentase ASN yang mendapatkan Sosialisasi	85	Persen	110.000.000	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	orang				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	orang		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian	85	Persen	325.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian	85	Persen	325.000.000	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	87	orang				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	87	orang		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	Persen	1.091.600.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	Persen	1.091.600.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Persentase Pemenuhan kebutuhan bulanan bahan instalasi listrik dan penerangan	100	Persen	3.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Persentase Pemenuhan kebutuhan bulanan bahan instalasi listrik dan penerangan	100	Persen	3.000.000	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	paket				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	paket		

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor non aset	100	Persen	47.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor non aset	100	Persen	47.500.000	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55	paket				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55	paket		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Persentase pemenuhan peralatan rumah tangga	100	Persen	27.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Persentase pemenuhan peralatan rumah tangga	100	Persen	27.500.000	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6	paket				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6	paket		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Persentase Pemenuhan kebutuhan bulanan ATK dan alat/bahan kebersihan kantor	100	Persen	120.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Persentase Pemenuhan kebutuhan bulanan ATK dan alat/bahan kebersihan kantor	100	Persen	120.000.000	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang yang disediakan	55	paket				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang yang disediakan	55	paket		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Persentase pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan	100	Persen	25.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Persentase pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan	100	Persen	25.000.000	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6	paket				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6	paket		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan		Jumlah media cetak berlangganan	0	Eksemplar	5.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan		Jumlah media cetak berlangganan	0	Eksemplar	5.500.000	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	837	Dokumen				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	837	Dokumen		
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Kebutuhan makan dan minum rapat pegawai	3050	Kotak	651.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Kebutuhan makan dan minum rapat pegawai	3050	Kotak	651.000.000	
			Kebutuhan menghadiri Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi antar pemerintahan	0	Kali				Kebutuhan menghadiri Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi antar pemerintahan	0	Kali		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105	Laporan				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105	Laporan		
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik		Jumlah Update berita dan informasi per bulan pada	40	berita/bulan	212.100.000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik		Jumlah Update berita dan informasi per bulan pada	40	berita/bulan	212.100.000	

	pada SKPD		website Bappedalitbang				pada SKPD		website Bappedalitbang				
			Jumlah akses laman website	1400	Kali				Jumlah akses laman website	1400	Kali		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Paser	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	80	Persen	69.026.280	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Paser	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	80	Persen	156.111.080	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Persentase Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor	80	Persen	69.026.280	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Persentase Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor	80	Persen	156.111.080	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7	Unit				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7	Unit		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Paser	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	47	Persen	133.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Paser	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	47	Persen	133.000.000	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan		Persentase Kendaraan dinas operasional layak pakai	100	Persen	85.000.000	Penyediaan jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan		Persentase Kendaraan dinas operasional layak pakai	100	Persen	85.000.000	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Persentase Peralatan kantor kondisi baik	93	Persen	48.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Persentase Peralatan kantor kondisi baik	93	Persen	48.000.000	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85	Unit				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85	Unit		
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Kab. Paser**	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	95	Persen	**3.517.537.725**	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Kab. Paser**	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	95	Persen	**3.567.562.225**	
			Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah	95	Persen				Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah	95	Persen		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Paser	Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodir di dalam APBD	30	Persen	2.837.537.725	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Paser	Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodir di dalam APBD	30	Persen	2.837.537.725	

			Konsistensi ketepatan waktu dan pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah	100	Persen				Konsistensi ketepatan waktu dan pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah	100	Persen		
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Persentase permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang masuk kedalam Ranwal dokumen perencanaan	60	Persen	23.860.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Persentase permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang masuk kedalam Ranwal dokumen perencanaan	60	Persen	23.860.000	
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD	1	Dokumen				Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD	1	Dokumen		
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Persentase keselarasan antara dokumen RKPD dengan dokumen Kebijakan lainnya	100	Persen	236.986.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Persentase keselarasan antara dokumen RKPD dengan dokumen Kebijakan lainnya	100	Persen	236.986.000	
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1	Dokumen				Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1	Dokumen		
	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Persentase masukan *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang disepakati menjadi rancangan awal dokumen perencanaan	100	Persen	70.090.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Persentase masukan *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang disepakati menjadi rancangan awal dokumen perencanaan	100	Persen	70.090.000	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	Berita Acara				Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	Berita Acara		
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Persentase hasil musrenbang RKPD yang di tindak lanjuti kedalam Renja PD	30	Persen	18.297.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Persentase hasil musrenbang RKPD yang di tindak lanjuti kedalam Renja PD	30	Persen	18.297.000	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Berita Acara				Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Berita Acara		
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang sesuai Tema RKPD	90	Persen	399.439.050	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang sesuai Tema RKPD	90	Persen	399.439.050	
			Persentase Usulan Musrenbang Kabupaten disetujui dalam RKPD	90	Persen				Persentase Usulan Musrenbang Kabupaten disetujui dalam RKPD	90	Persen		

			Persentase muatan rancangan awal Dokumen Perencanaan Daerah yang disetujui sebagai rancangan Akhir	100	Persen				Persentase muatan rancangan awal Dokumen Perencanaan Daerah yang disetujui sebagai rancangan Akhir	100	Persen		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	Berita Acara				Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	Berita Acara		
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Dokumen Panduan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1	Dokumen	19.800.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Dokumen Panduan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1	Dokumen	19.800.000	
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1000	Usulan				Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1000	Usulan		
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Konsistensi ketepatan waktu pelaksanaan tahapan penyusunan RKPD	100	Persen	2.069.065.675	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Konsistensi ketepatan waktu pelaksanaan tahapan penyusunan RKPD	100	Persen	2.069.065.675	
			Dokumen RKPD	0	Dokumen				Dokumen RKPD	0	Dokumen		
			Dokumen RPJPD	0	Dokumen				Dokumen RPJPD	0	Dokumen		
			Dokumen RPJMD (Tekno dan Ranhir)	1	Dokumen				Dokumen RPJMD (Tekno dan Ranhir)	1	Dokumen		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	Dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	Dokumen		
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Paser	Persentase Ketersediaan data perencanaan	95	Persen	355.000.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Paser	Persentase Ketersediaan data perencanaan	95	Persen	355.000.000	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah	84	Persen	135.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah	84	Persen	135.000.000	
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	45	orang				Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	45	orang		
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data& informasi perencanaan yang dipublikasikan	100	Persen	220.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data& informasi perencanaan yang dipublikasikan	100	Persen	220.000.000	
			Profil Pembangunan Daerah	0	Dokumen				Profil Pembangunan Daerah	0	Dokumen		

			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	Dokumen				Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	Dokumen		
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Paser	Rata-rata capaian kinerja sasaran RPJMD	100	Persen	325.000.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Paser	Rata-rata capaian kinerja sasaran RPJMD	100	Persen	375.024.500	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Tingkat capaian target program prioritas per sasaran RPJMD	100	Persen	160.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Tingkat capaian target program prioritas per sasaran RPJMD	100	Persen	160.000.000	
			Persentase ketepatan waktu pengendalian dokumen perencanaan	100	Persen				Persentase ketepatan waktu pengendalian dokumen perencanaan	100	Persen		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	Laporan				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	Laporan		
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Persentase realisasi program prioritas KDH	80	Persen	165.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Persentase realisasi program prioritas KDH	80	Persen	215.024.500	
			Persentase program dengan capaian kinerja yang telah >=76%	100	Persen				Persentase program dengan capaian kinerja yang telah >=76%	100	Persen		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	Laporan				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	Laporan		
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Kab. Paser**	Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	94	Persen	**3.928.798.200**	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Kab. Paser**	Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	94	Persen	**5.672.193.700**	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Paser	Konsistensi dokumen perencanaan PD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	85	Persen	1.709.198.955	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Paser	Konsistensi dokumen perencanaan PD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	85	Persen	2.263.790.455	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Pemerintahan	100	Persen	322.223.955	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Pemerintahan	100	Persen	374.347.705	
			Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Pemerintahan	100	Persen				Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Pemerintahan	100	Persen		

			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Pemerintahan	85	Persen	85.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Pemerintahan	85	Persen	85.000.000	
			Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Pemerintahan	100	Persen				Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Pemerintahan	100	Persen		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	3	Laporan				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	3	Laporan		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Pemerintahan	95	Persen	88.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Pemerintahan	95	Persen	88.000.000	
			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Pemerintahan	90	Persen				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Pemerintahan	90	Persen		
			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Pemerintahan	90	Persen				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Pemerintahan	90	Persen		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	4	Laporan				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	4	Laporan		

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Pemerintahan	100	Persen	110.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Pemerintahan	100	Persen	110.000.000	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2	Laporan				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2	Laporan		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Pembangunan Manusia	100	Persen	478.300.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Pembangunan Manusia	100	Persen	713.584.000	
			Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Pembangunan Manusia	100	Persen				Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Pembangunan Manusia	100	Persen		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	6	Dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	6	Dokumen		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Pembangunan Manusia	85	Persen	88.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Pembangunan Manusia	85	Persen	88.000.000	
			Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Pembangunan Manusia	100	Persen				Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Pembangunan Manusia	100	Persen		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6	Laporan				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6	Laporan		

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia	95	Persen	99.675.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia	95	Persen	140.654.750	
			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Pembangunan Manusia	90	Persen				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Pembangunan Manusia	90	Persen		
			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Pembangunan Manusia	90	Persen				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Pembangunan Manusia	90	Persen		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6	Laporan				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6	Laporan		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Pembangunan Manusia	100	Persen	438.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Pembangunan Manusia	100	Persen	664.204.000	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2	Laporan				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2	Laporan		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Paser	Konsistensi dokumen perencanaan PD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	85	Persen	1.147.200.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Paser	Konsistensi dokumen perencanaan PD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	85	Persen	2.086.004.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Perekonomian	100	Persen	235.937.811	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Perekonomian	100	Persen	491.759.282	
			Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Perekonomian	100	Persen				Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Perekonomian	100	Persen		

			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	6	Dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	6	Dokumen		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Perekonomian	85	Persen	27.195.600	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Perekonomian	85	Persen	121.728.000	
			Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Perekonomian	100	Persen				Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Perekonomian	100	Persen		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	8	laporan				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	8	laporan		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Perekonomian	95	Persen	81.010.218	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Perekonomian	95	Persen	128.091.968	
			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Perekonomian	90	Persen				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Perekonomian	90	Persen		
			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Perekonomian	90	Persen				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Perekonomian	90	Persen		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	8	laporan				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	8	laporan		

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Perekonomian	100	Persen	331.640.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Perekonomian	100	Persen	476.225.500	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	laporan				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	laporan		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang SDA	100	Persen	244.622.189	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang SDA	100	Persen	350.248.000	
			Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang SDA	100	Persen				Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang SDA	100	Persen		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	3	dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	3	dokumen		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang SDA	85	Persen	47.804.400	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang SDA	85	Persen	123.428.000	
			Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang SDA	100	Persen				Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang SDA	100	Persen		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	Laporan				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	Laporan		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang SDA	95	Persen	28.989.782	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang SDA	95	Persen	58.195.250	

			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang SDA	90	Persen				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang SDA	90	Persen		
			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang SDA	90	Persen				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang SDA	90	Persen		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	Laporan				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	Laporan		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang SDA	100	Persen	150.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang SDA	100	Persen	336.328.000	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2	Laporan				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2	Laporan		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Paser	Konsistensi dokumen perencanaan PD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	85	Persen	1.072.399.245	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Paser	Konsistensi dokumen perencanaan PD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	85	Persen	1.322.399.245	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Infrastruktur	100	Persen	436.639.800	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Infrastruktur	100	Persen	536.639.800	
			Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Infrastruktur	100	Persen				Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Infrastruktur	100	Persen		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	6	Dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	6	Dokumen		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Infrastruktur	85	Persen	72.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Infrastruktur	85	Persen	92.000.000	

			Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Infrastruktur	100	Persen				Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Infrastruktur	100	Persen		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	8	Laporan				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	8	Laporan		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Infrastruktur	95	Persen	115.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Infrastruktur	95	Persen	145.000.000	
			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Infrastruktur	90	Persen				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Infrastruktur	90	Persen		
			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Infrastruktur	90	Persen				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Infrastruktur	90	Persen		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	8	Laporan				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	8	Laporan		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Infrastruktur	100	Persen	241.985.200	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Infrastruktur	100	Persen	321.985.200	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4	Laporan				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4	Laporan		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Kewilayahan	100	Persen	81.104.245	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Kewilayahan	100	Persen	101.104.245	

	Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Kewilayahan	100	Persen		Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Kewilayahan	100	Persen		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Kewilayahan	85	Persen	32.530.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Kewilayahan	85	Persen	32.530.000	
			Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Kewilayahan	100	Persen				Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Kewilayahan	100	Persen		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4	Laporan				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4	Laporan		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Kewilayahan	95	Persen	53.400.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Kewilayahan	95	Persen	53.400.000	
			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Kewilayahan	90	Persen				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Kewilayahan	90	Persen		
			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Kewilayahan	90	Persen				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Kewilayahan	90	Persen		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4	Laporan				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4	Laporan		

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Kewilayahan	100	Persen	39.740.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Kewilayahan	100	Persen	39.740.000	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	Laporan				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	Laporan		
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Kab. Paser**	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	70	Persen	**9.305.360.683**	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Kab. Paser**	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	70	Persen	**10.778.642.683**	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Paser	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD	60	Persen	1.107.912.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Paser	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD	60	Persen	1.320.553.500	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2	Dokumen	1.107.912.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2	Dokumen	1.320.553.500	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	Laporan				Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	Laporan		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kab. Paser	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD	60	Persen	350.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kab. Paser	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD	60	Persen	510.413.000	
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Dokumen penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0	Dokumen	350.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Dokumen penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0	Dokumen	510.413.000	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	Dokumen		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Paser	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD	60	Persen	6.972.640.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Paser	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD	60	Persen	8.072.867.500	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Dokumen penelitian dan pengembangan pertanian,	0	Dokumen	750.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Dokumen penelitian dan pengembangan pertanian,	0	Dokumen	1.850.227.500	

			perkebunan dan pangan						perkebunan dan pangan				
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian danPengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2	Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian danPengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2	Dokumen		
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0	Dokumen		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0	Dokumen		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0	Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0	Dokumen		
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0	Dokumen	-	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0	Dokumen	-	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0	Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0	Dokumen		
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0	Dokumen	6.222.640.000	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0	Dokumen	6.222.640.000	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5	Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5	Dokumen		
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	Dokumen	-	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	Dokumen	-	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	Dokumen		
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Paser	Persentase inovasi dan teknologi yang difasilitasi untuk diterapkan	37	Persen	874.808.683	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Paser	Persentase inovasi dan teknologi yang difasilitasi untuk diterapkan	37	Persen	874.808.683	
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi		Persentase Uji Coba Inovasi yang Memenuhi Standar	60	Persen	218.000.000	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi		Persentase Uji Coba Inovasi yang Memenuhi Standar	60	Persen	218.000.000	

	di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	Laporan		di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	Laporan		
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		Persentase inovasi yang memenuhi standar	30	Persen	466.880.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		Persentase inovasi yang memenuhi standar	30	Persen	466.880.000	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4	Laporan				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4	Laporan		
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal Renja PD	60	Persen	189.928.683	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal Renja PD	60	Persen	189.928.683	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	Laporan				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	Laporan		

Analisis kebutuhan tambahan alokasi pagu indikatif :

1. Kebutuhan tambahan gaji/tunjangan ASN, dimana terdapat penyesuaian
2. Tunjangan Fungsional dan penyesuaian kelas jabatan;
3. Tambahan belanja pendukung kegiatan penelitian dan pengembangan;
4. Tambahan belanja pendukung kegiatan koordinasi dan konsultasi;
5. Tambahan pemenuhan belanja modal peralatan dan perlengkapan kerja;
6. Pengembangan Website

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan Perubahan RKPD telah dibagikan, dimana tidak terdapat penambahan alokasi pagu indikatif perubahan sehingga Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang pada Perubahan RKPD Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

KODE					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang	Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					**29.168.574.533**			**29.168.574.533**		
5					**PERENCANAAN**					**29.168.574.533**			**29.168.574.533**		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	**Kab. Paser**	74	Persen	**12.416.877.925**	76	Persen	**12.416.877.925**		
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	100	Persen	**311.371.400**	100	Persen	**311.371.400**		
						Persentase capaian sasaran strategis Bappedalitbang		92	Persen		95	Persen			
						Capaian nilai penyelenggaraan SPIP pada Bappedalitbang		3,5			4				
						Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP		81			84				
						Persentase rata-rata capaian area perubahan RB		75	Persen		80	Persen			
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase konsistensi Renja dengan Renstra tahun berkenaan		100	Persen	109.600.000	100	Persen	109.600.000		
						Persentase ketersediaan data kinerja		100	Persen		100	Persen			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6	Dokumen		6	Dokumen			
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase RKA-SKPD disusun sesuai KAK		90	Persen	49.462.600	100	Persen	49.462.600		
						Persentase RKA disusun menggunakan SSH&ASB		80	Persen		90	Persen			
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2	Dokumen		2	Dokumen			
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Kegiatan diakomodir dalam DPA-SKPD		100	Persen	17.308.800	100	Persen	17.308.800		
						Persentase KAK per Kegiatan pada DPA		90	Persen		100	Persen			

						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2	Dokumen		2	Dokumen			
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja tepat waktu		0	Dokumen	135.000.000	0	Dokumen	135.000.000		
						Persentase capaian kinerja dan anggaran kegiatan ≥ 80%		95	Persen		100	Persen			
						Persentase pengendalian resiko kegiatan		45	Persen		60	Persen			
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	Laporan		5	Laporan			
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	Kab. Paser	100	Persen	10.376.880.245	100	Persen	10.376.880.245		
						Persentase LHP nihil		100	Persen		100	Persen			
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesesuaian data kepegawaian dengan Daftar Gaji ASN		100	Persen	9.844.714.245	100	Persen	9.844.714.245		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		51	orang/bulan		51	orang/bulan			
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian realisasi kinerja keuangan		96,5	Persen	171.108.000	97	Persen	171.108.000		
						Persentase dokumen SPJ yang dikembalikan		15	Persen		10	Persen			
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		450	Dokumen		450	Dokumen			
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan Laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu		100	Persen	361.058.000	100	Persen	361.058.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2	Laporan		2	Laporan			
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80	Kab. Paser	90	Persen	435.000.000	100	Persen	435.000.000		
5	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang mendapatkan Sosialisasi		85	Persen	110.000.000	87	Persen	110.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		40	orang		45	orang			
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian		85	Persen	325.000.000	90	Persen	325.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		87	orang		87	orang			

5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Paser	100	Persen	1.091.600.000	100	Persen	1.091.600.000		
5	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan bulanan bahan instalasi listrik dan penerangan		100	Persen	3.000.000	100	Persen	3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8	paket		10	paket			
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor non aset		100	Persen	47.500.000	100	Persen	47.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		55	paket		55	paket			
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan peralatan rumah tangga		100	Persen	27.500.000	100	Persen	27.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		6	paket		6	paket			
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan bulanan ATK dan alat/bahan kebersihan kantor		100	Persen	120.000.000	100	Persen	120.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang yang disediakan		55	paket		55	paket			
5	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan		100	Persen	25.000.000	100	Persen	25.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		6	paket		6	paket			
5	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah media cetak berlangganan		0	Eksemplar	5.500.000	0	Eksemplar	5.500.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		837	Dokumen		837	Dokumen			
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kebutuhan makan dan minum rapat pegawai		3050	Kotak	651.000.000	3050	Kotak	651.000.000		
						Kebutuhan menghadiri Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi antar pemerintahan		0	Kali		0	Kali			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		105	Laporan		105	Laporan			

5	01	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Update berita dan informasi per bulan pada website Bappedalitbang		40	berita/bulan	212.100.000	40	berita/bulan	212.100.000			
						Jumlah akses laman website		1400	Kali		1500	Kali				
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	Dokumen		1	Dokumen				
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	Kab. Paser	80	Persen	69.026.280	85	Persen	69.026.280			
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor		80	Persen	69.026.280	85	Persen	69.026.280			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		7	Unit		7	Unit				
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	Kab. Paser	47	Persen	133.000.000	50	Persen	133.000.000			
5	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Persentase Kendaraan dinas operasional layak pakai		100	Persen	85.000.000	100	Persen	85.000.000			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3	Unit		3	Unit				
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan kantor kondisi baik		93	Persen	48.000.000	95	Persen	48.000.000			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		85	Unit		85	Unit				
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	**Kab. Paser**	95	Persen	**3.517.537.725**	96	Persen	**3.517.537.725**			
						Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah		95	Persen		96	Persen				
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodir di dalam APBD	Kab. Paser	30	Persen	2.837.537.725	35	Persen	2.837.537.725			
						Konsistensi ketepatan waktu dan pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah		100	Persen		100	Persen				
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang masuk kedalam Ranwal dokumen perencanaan		60	Persen	23.860.000	65	Persen	23.860.000			

						Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD		1	Dokumen		1	Dokumen			
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase keselarasan antara dokumen RKPD dengan dokumen Kebijakan lainnya		100	Persen	236.986.000	100	Persen	236.986.000		
						Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah		1	Dokumen		1	Dokumen			
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase masukan *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang disepakati menjadi rancangan awal dokumen perencanaan		100	Persen	70.090.000	100	Persen	70.090.000		
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		2	Berita Acara		2	Berita Acara			
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase hasil musrenbang RKPD yang di tindak lanjuti kedalam Renja PD		30	Persen	18.297.000	40	Persen	18.297.000		
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		1	Berita Acara		2	Berita Acara			
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang sesuai Tema RKPD		90	Persen	399.439.050	95	Persen	399.439.050		
						Persentase Usulan Musrenbang Kabupaten disetujui dalam RKPD		90	Persen		95	Persen			
						Persentase muatan rancangan awal Dokumen Perencanaan Daerah yang disetujui sebagai rancangan Akhir		100	Persen		100	Persen			
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		2	Berita Acara		2	Berita Acara			
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen Panduan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan		1	Dokumen	19.800.000	1	Dokumen	19.800.000		
						Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		1000	Usulan		1000	Usulan			
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Konsistensi ketepatan waktu pelaksanaan tahapan penyusunan RKPD		100	Persen	2.069.065.675	100	Persen	2.069.065.675		
						Dokumen RKPD		0	Dokumen		0	Dokumen			
						Dokumen RPJPD		0	Dokumen		0	Dokumen			
						Dokumen RPJMD (Tekno dan Ranhir)		1	Dokumen		1	Dokumen			

						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		4	Dokumen		4	Dokumen			
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan data perencanaan	Kab. Paser	95	Persen	355.000.000	97	Persen	355.000.000		
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah		84	Persen	135.000.000	86	Persen	135.000.000		
						Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		45	orang		45	orang			
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data& informasi perencanaan yang dipublikasikan		100	Persen	220.000.000	100	Persen	220.000.000		
						Profil Pembangunan Daerah		0	Dokumen		0	Dokumen			
						Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		1	Dokumen		1	Dokumen			
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian kinerja sasaran RPJMD	Kab. Paser	100	Persen	325.000.000	100	Persen	325.000.000		
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Tingkat capaian target program prioritas per sasaran RPJMD		100	Persen	160.000.000	100	Persen	160.000.000		
						Persentase ketepatan waktu pengendalian dokumen perencanaan		100	Persen		100	Persen			
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		1	Laporan		1	Laporan			
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi program prioritas KDH		80	Persen	165.000.000	100	Persen	165.000.000		
						Persentase program dengan capaian kinerja yang telah >=76%		100	Persen		100	Persen			
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		2	Laporan		2	Laporan			
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	**Kab. Paser**	94	Persen	**3.928.798.200**	95	Persen	**3.928.798.200**		
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Konsistensi dokumen perencanaan PD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kab. Paser	85	Persen	1.709.198.955	90	Persen	1.709.198.955		
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Pemerintahan		100	Persen	322.223.955	100	Persen	322.223.955		

					RKPD)	Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Pemerintahan		100	Persen		100	Persen			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)		3	Dokumen		3	Dokumen			
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Pemerintahan		85	Persen	85.000.000	87	Persen	478.300.000		
						Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Pemerintahan		100	Persen		100	Persen			
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan		3	Laporan		3	Laporan			
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Pemerintahan		95	Persen	88.000.000	95	Persen	88.000.000		
						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Pemerintahan		90	Persen		94	Persen			
						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Pemerintahan		90	Persen		94	Persen			
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan		4	Laporan		4	Laporan			
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Pemerintahan		100	Persen	110.000.000	100	Persen	99.675.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		2	Laporan		2	Laporan			

5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Pembangunan Manusia		100	Persen	478.300.000	100	Persen	438.000.000		
						Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Pembangunan Manusia		100	Persen		100	Persen			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)		6	Dokumen		6	Dokumen			
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Pembangunan Manusia		85	Persen	88.000.000	87	Persen	1.147.200.000		
						Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Pembangunan Manusia		100	Persen		100	Persen			
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia		6	Laporan		6	Laporan			
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia		95	Persen	99.675.000	95	Persen	235.937.811		
						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Pembangunan Manusia		90	Persen		94	Persen			
						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Pembangunan Manusia		90	Persen		94	Persen			
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia		6	Laporan		6	Laporan			
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Pembangunan Manusia		100	Persen	438.000.000	100	Persen	27.195.600		

						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		2	Laporan		2	Laporan				
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Konsistensi dokumen perencanaan PD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kab. Paser	85	Persen	1.147.200.000	90	Persen	81.010.218			
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Perekonomian		100	Persen	235.937.811	100	Persen	331.640.000			
						Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Perekonomian		100	Persen		100	Persen				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)		6	Dokumen		6	Dokumen				
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Perekonomian		85	Persen	27.195.600	87	Persen	244.622.189			
						Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Perekonomian		100	Persen		100	Persen				
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian		8	laporan		8	laporan				
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Perekonomian		95	Persen	81.010.218	95	Persen	47.804.400			
						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Perekonomian		90	Persen		94	Persen				
						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Perekonomian		90	Persen		94	Persen				
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian		8	laporan		8	laporan				

5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Perekonomian		100	Persen	331.640.000	100	Persen	28.989.782		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		4	laporan		4	laporan			
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang SDA		100	Persen	244.622.189	100	Persen	150.000.000		
						Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang SDA		100	Persen		100	Persen			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)		3	dokumen		3	dokumen			
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang SDA		85	Persen	47.804.400	87	Persen	1.072.399.245		
						Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang SDA		100	Persen		100	Persen			
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA		4	Laporan		4	Laporan			
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang SDA		95	Persen	28.989.782	95	Persen	436.639.800		
						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang SDA		90	Persen		94	Persen			
						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang SDA		90	Persen		94	Persen			
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA		4	Laporan		4	Laporan			

5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang SDA		100	Persen	150.000.000	100	Persen	72.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		2	Laporan		2	Laporan			
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Konsistensi dokumen perencanaan PD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kab. Paser	85	Persen	1.072.399.245	90	Persen	115.000.000		
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Infrastruktur		100	Persen	436.639.800	100	Persen	241.985.200		
						Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Infrastruktur		100	Persen		100	Persen			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)		6	Dokumen		6	Dokumen			
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Infrastruktur		85	Persen	72.000.000	87	Persen	81.104.245		
						Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Infrastruktur		100	Persen		100	Persen			
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur		8	Laporan		8	Laporan			
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Infrastruktur		95	Persen	115.000.000	95	Persen	32.530.000		
						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Infrastruktur		90	Persen		94	Persen			
						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Infrastruktur		90	Persen		94	Persen			

						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur		8	Laporan		8	Laporan			
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Infrastruktur		100	Persen	241.985.200	100	Persen	53.400.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		4	Laporan		4	Laporan			
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Kewilayahan		100	Persen	81.104.245	100	Persen	39.740.000		
						Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Kewilayahan		100	Persen		100	Persen			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)		3	Dokumen		3	Dokumen			
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Kewilayahan		85	Persen	32.530.000	87	Persen	**9.305.360.683**		
						Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Kewilayahan		100	Persen		100	Persen			
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan		4	Laporan		4	Laporan			
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Kewilayahan		95	Persen	53.400.000	95	Persen	1.107.912.000		
						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Kewilayahan		90	Persen		94	Persen			

						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Kewilayahan		90	Persen		94	Persen			
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan		4	Laporan		4	Laporan			
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Kewilayahan		100	Persen	39.740.000	100	Persen	1.107.912.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		1	Laporan		1	Laporan			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	**Kab. Paser**	70	Persen	**9.305.360.683**	75	Persen	350.000.000		
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD	Kab. Paser	60	Persen	1.107.912.000	65	Persen	350.000.000		
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		2	Dokumen	1.107.912.000	1	Dokumen	6.972.640.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		1	Laporan		1	Laporan			
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD	Kab. Paser	60	Persen	350.000.000	65	Persen	750.000.000		
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		0	Dokumen	350.000.000	0	Dokumen	6.222.640.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		1	Dokumen		1	Dokumen			
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD	Kab. Paser	60	Persen	6.972.640.000	65	Persen	874.808.683		
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan		0	Dokumen	750.000.000	0	Dokumen	218.000.000		

						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian danPengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		2	Dokumen		0	Dokumen			
5	05	02	2.03	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		0	Dokumen	6.222.640.000	0	Dokumen	466.880.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		5	Dokumen		1	Dokumen			
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang difasilitasi untuk diterapkan	Kab. Paser	37	Persen	874.808.683	40	Persen	189.928.683		
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase Uji Coba Inovasi yang Memenuhi Standar		60	Persen	218.000.000	65	Persen	**29.168.574.533**		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		1	Laporan		1	Laporan			
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Persentase inovasi yang memenuhi standar		30	Persen	466.880.000	40	Persen	**29.168.574.533**		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		4	Laporan		4	Laporan			
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal Renja PD		60	Persen	189.928.683	65	Persen	**12.416.877.925**		
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		1	Laporan		1	Laporan			

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bappedalitbang mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

5.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tanah Grogot,18 Juli 2024

Kepala Bappedalitbang,

Rusdian Nor,SE., M.Si.
NIP. 19770309 199803 1 004

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. RM Noto Sunardi TANAH GROGOT
Telp : (0543) 24060

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah- NYA sehingga dapat tersusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser yang mengacu pada peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, oleh karena itu sumbang saran dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan Renja Kami.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.

Kepala BKAD Kab. Paser,

Nur Asni, SE, MM
Pembina TK I
NIP. 197212151998032008

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 2

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 5

1.4. Sistematika Penulisan..... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE II TAHUN 2024 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 8

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser 18

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024 31

2.4. Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat..... 32

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 34

3.1. Tujuan dan Sasaran..... 40

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 41

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024..... 50

BAB IV PENUTUP 65

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan..... 65

4.2. Rencana tindak lanjut..... 65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota ……10

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ……21

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Dan Aset Daerah ……24

Tabel 2.4 Usulan Progran dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 ……39

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser ……40

Tabel. 3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser ……43

Tabel. 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024 ……56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser;
23. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser, proses penyusunan Perubahan Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalampenulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
Badan Keuangan Dan Aset Daerah sampai dengan
Triwulan II Tahun 2024

No.	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target Program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2024		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi {%}		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=10/4	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**74**	**169,9825**	**74**	**41,55**	**56,14**	**74**	**243,9825**	**100**	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	76	144,25	76	0	**0,00**	76	**220,25**	**100**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	12	6	3	**50,00**	6	**18**	**100**	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2	7	2	0	**0,00**	2	**9**	**100**	

3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	5	2	0	**0,00**	2	**7**	**100**	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74	169,46	74	41,76	**56,43**	74	**243,46**	**100**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	56	46	48,91	**106,33**	46	**102**	**100**	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	5	4	4	**100,00**	4	**9**	**100**	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	5	3	3	**100,00**	3	**8**	**100**	
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	20	5	4	**80,00**	5	**25**	**100**	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	35	18	13	**72,22**	18	**53**	**100**	
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74	168,37	74	40,97	**55,36**	74	**242,37**	**100**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	2	2	**100,00**	2	**4**	**100**	

2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	75	7	0	**0,00**	7	**82**	**100**	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	322	6	3	**50,00**	6	**328**	**100**	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	723	3	0	**0,00**	3	**726**	**100**	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diadakan	720	400	720	240	**33,33**	720	**1120**	**100**	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	840	40	19	**47,50**	40	**880**	**100**	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	800	1594	800	368	**46,00**	800	**2394**	**100**	
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14	14	14	3	**21,43**	14	**28**	**100**	
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100	188,91	100	34,83	**34,83**	100	**288,91**	**100**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	210	60	35	**58,33**	60	**270**	**100**	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	50	48	18	**37,50**	48	**98**	**100**	

E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD	47	79	47	0	**0,00**	47	**126**	**100**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	4	1	0	**0,00**	1	**5**	**100**	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	14	10	0	**0,00**	10	**24**	**100**	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	32	15	13	**86,67**	15	**47**	**100**	
II	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase penurunan temuan administratif atas laporan keuangan pemerintah daerah**	**10**	**12,5**	**10**	**0**	**0,00**	**10**	**22,5**	**100**	
A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	6	12	6	0	**0,00**	6	**18**	**100**	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	4	2	0	**0,00**	2	**6**	**100**	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	4	2	0	**0,00**	2	**6**	**100**	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	42	84	42	0	**0,00**	42	**126**	**100**	
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	42	84	42	0	**0,00**	42	**126**	**100**	

5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	4	2	0	**0,00**	2	**6**	**100**	
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	4	2	0	**0,00**	2	**6**	**100**	
7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	52	2	0	**0,00**	2	**54**	**100**	
8	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	25	50	25	0	**0,00**	25	**75**	**100**	
9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	42	84	42	0	**0,00**	42	**126**	**100**	
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2	3	2	0	**0,00**	2	**5**	**100**	
B	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Jumlah Pengajuan SPM yang sesuai ketentuan	100	199,9998039	100	29,65	**29,65**	100	**299,9998039**	**100**	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4	8	4	0	**0,00**	4	**12**	**100**	

2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6	13	6	0	**0,00**	6	**19**	**100**	
3	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2	0	2	0	**0,00**	2	**2**	**100**	
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	504	1008	504	0	**0,00**	504	**1512**	**100**	
5	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	2	1	0	**0,00**	1	**3**	**100**	
6	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	42	84	42	0	**0,00**	42	**126**	**100**	

		Kabupaten/Kota									
C	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dokumen Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2	4	2	0	**0,00**	2	**6**	**100**	
1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1	2	1	0	**0,00**	1	**3**	**100**	
2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	2	1	0	**0,00**	1	**3**	**100**	
3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1	2	1	1	**100,00**	1	**3**	**100**	
4	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	2	1	0	**0,00**	1	**3**	**100**	
5	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	11	11	11	0	**0,00**	11	**22**	**100**	
D	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	2	1	0	**0,00**	1	**3**	**100**	

1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	2	1	0	**0,00**	1	**3**	**100**	
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	2	1	0	**0,00**	1	**3**	**100**	
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	140	1	0	**0,00**	1	**141**	**100**	
III	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase permasalahan pengelolaan barang milik daerah selesai ditindaklanjuti**	**60**	**105**	**60**	**0**	**0,00**	**60**	**165**	**100**	
A	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan BMD	42	84	42	0	**0,00**	42	**126**	**100**	
1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	2	1	0	**0,00**	1	**3**	**100**	
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	1	1	0	**0,00**	1	**2**	**100**	
3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1	1	0	**0,00**	1	**2**	**100**	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	4	2	0	**0,00**	2	**6**	**100**	
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2	4	2	0	**0,00**	2	**6**	**100**	
6	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2	30	2	0	**0,00**	2	**32**	**100**	

7	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	12	2	0	**0,00**	2	**14**	**100**	
8	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	12	2	0	**0,00**	2	**14**	**100**	
9	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4	6	4	0	**0,00**	4	**10**	**100**	
10	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	44	2	0	**0,00**	2	**46**	**100**	
11	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	4	2	0	**0,00**	2	**6**	**100**	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)											**18,70**
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											**17,62**
Rata-rata capaian kinerja Subkegiatan(%)											**19,45**
Tingkat Capaian Kinerja											**22,6**

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 22,6 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 106.231.258.049 (seratus enam milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan empat puluh sembilan rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 469.033.946.287 (Empat ratus enam puluh Sembilan milyar tiga puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
2. Rata-rata capaian kinerja Program pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser sebesar 18,07%
3. Rata-rata capaian kinerja Kegiatan pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser sebesar 17,62%
4. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser sebesar 19,45%
5. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 1 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 7 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 5 indikator capaian kinerja 0%-50% = 57 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser, maka Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Kepala badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Keuangan dan Aset Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
   a. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis Badan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman

penyusunan rencana kerja.

b. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran.
c. Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
d. Pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Badan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Badan
e. Penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi
f. Perumusan kebijakan di Bidang Keuangan dan Aset Daerah
g. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Keuangan dan Aset Daerah
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan dan Aset Daerah
i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Badan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
k. Pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku
l. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan
m. Pembinaan Jabatan Fungsional pada Badan sesuai dengan kewenangan yang diberikan
n. Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan pelaksana pada Badan
o. Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD
p. Penyelengaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait

dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Keuangan dan Aset Daerah

q. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi
r. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan daerah; dan
s. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser adalah melaksanakan pengoordinasian di bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang meliputi anggaran. Perbendaharaan akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan barang Milik Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kreteria yang ditetapkan pemerintah dengan kinerja pelayanan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Upaya Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah
2. Meningkatnya kualitas tata kelola aset Daerah
3. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100
Meningkatnya Kualitas tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Anggaran yang di susun tepat waktu sesuai ketentuan perundangan	100	100	100	100	100	0	0
	Persentase SP2D Perangkat Daerah yang diterbitkan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan	100	100	100	100	100	29,65	100
	Persentase Laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu sesuai ketentuan perundangan	100	100	100	100	100	87,80%	87,80%

Meningkatnya kualitas tata kelola aset daerah	Persentase Penyajian Laporan BMD tepat waktu sesuai ketentuan perundangan	100	100	100	100	100	92,85%	92,85%
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP	73	74	74	74	74	74	100

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola keuangan dan aset daerah memiliki memiliki 1 indikator kinerja yaitu “ Opini BPK terhadap LKPD telah mencapai target, dimana target yang ditetapkan adalah WTP dengan realisasinya WTP capaian kinerja sebesar 100%;
b. Sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah memiliki 3 indikator kinerja yaitu :
    1. Persentase Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu sesuai ketentuan perundangan sudah mencapai target. Dimana realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100 % dengan capaian kinerja sebesar 100 % dikarenakan saat sekarang ini masih dalam proses penyusunan KUA DAN PPAS tahapan penyusunan APBD.
    2. Prosentase SP2D perangkat daerah yang diterbitkan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan belum mencapat target dimana realisasinya sampai dengan bulan Juni sebesar 2,30% dari target sebesar 100 % dengan capaian kinerja sebesar 2,30%.
    3. Prosentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu sesuai ketentuan perundangan belum mencapai target, dimana realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100%
c. Meningkatnya kualitas tata kelola aset daerah memiliki 1 indikator, yaitu

persentase penyajian laporan BMD tepat waktu sesuai ketentuan perundangan belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 92,85% dan target sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 92,85%

d. Sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel memiliki 1 indikator yaitu Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP dari target nilai 76, dengan capaian 72,25.

Sedangkan pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser dari 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Laporan Penyelengggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai berikut :

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Angka/Nilai Target/ Standar IKU	Target Renstra PD						Realisasi Capaian						Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Persentase Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundangan	Persen	100	100	100	100	100	100	0	100	100	0	0	0	100	100	
2	Persentase SP2D Perangkat Daerah yang diterbitkan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan	Persen	100	100	100	100	100	100	0	100	100	29,65	0	0	100	100	
3	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang di susun tepat waktu sesuai sesuai ketentuan perundangan	Persen	100	100	100	100	100	100	0	80,49	87,41	87,80	0	0	100	100	
4	Persentase penyajian Laporan BMD tepat waktu sesuai sesuai ketentuan perundangan	Persen	100	100	100	100	100	100	0	95,12	92,85	92,85	0	0	100	100	
5	Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	Nilai	73	73	74	74	74	74	0	72	72,25	74	0	0	74	74	

INSTRUMEN TAMBAHAN CAPAIAN DAN DATA DUKUNG LPPD

TAHUN 2023

OPD: BKAD

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Capaian
1.	Persentase Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N	Anggaran Tahun 2023 Rp. 2,934.893.723,300,00 Realisasi Tahun 2023 Rp.2.557.770.167.256,58	(Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N / Anggaran Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N) x 100	87,15%
2.	Persentase Penurunan SILPA	SILPA Tahun 2022 Rp. 966.609.135.041,53 SILPA Tahun 2023 Rp. 676.092.728.935,56	(Nilai Realisasi SILPA / Total Belanja Anggaran Tahun Sebelumnya x 100	23,16%
3.	Pertambahan Nilai Aset Tetap	Tahun 2022 Rp 5.868.005.184.755,51 Tahun 2023 Rp. 6.396.057.314.747,87	(Nilai Aset Tetap Tahun N dikurang Nilai Aset Tetap Tahun -N / Nilai Aset Tetap Tahun -N) x 100	9,00%

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)

IKK Outcome: Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

No	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah APBD	Rumus | Capaian (2/3x100%)	Ket
1	2	3	4	5
1	515.787.148.362,00	4.513.400.000.000,00	11,43	Seluruh komponen belanja pegawai (gaji, tunjangan, honorarium) di luar guru dan tenaga kesehatan

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)

IKK Outcome: Rasio PAD

No	Jumlah PAD	Jumlah Pendapatan pada APBD	Rumus | Capaian (2/3x100%)	Ket
1	336.970.037.092,00	3.565.790.864.958,00	9,45	- Yang benar adalah PDRB Non Migas (total seluruh PDRB dikurangi sektor pertambangan migas dan sektor industri pengolahan migas). - Yang digunakan adalah PDRB Harga Berlaku

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)

IKK Outcome: Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

No	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures	jumlah belanja APBD	Rumus | Capaian (2/3x100%)	Ket
1	2.551.169.566.920,58	4.513.400.000.000,00	56,52	- Yang dimaksud dengan transfer expenditures adalah hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga - Yang dimaksud dengan belanja urusan pemerintahan adalah seluruh belanja daerah di luar belanja modal - Angka yang diambil adalah angka realisasi

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)

Tahun 2023

IKK Outcome: Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

No	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	Total belanja Operasi dan Modal	Rumus | Capaian (2/3x100%)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	1.636.762.317.673,00	3.267.639.875.000,58	0,45	- Yang dimaksud dengan belanja langsung adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal - Cakupan perhitungan adalah seluruh pengadaan dengan metode kompetitif maupun non kompetitif dari seluruh perangkat daerah yang ada - Angka yang diambil adalah angka realisasi

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)

Tahun 2023

IKK Outcome : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

No	Rumusan	Capaian	Ket
	$\left[\left[\frac{4.006.704.990.104,58}{3.386.218.761.290,00}\right] - 1\right] x\,100\%$	0,18	- Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus - Total belanja APBD adalah total anggaran belanja APBD sebelum perubahan - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)

Tahun 2023

IKK Outcome : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

No	Rumusan	Capaian	Ket
1.	$\left[\left[\frac{301.771.812.899,61}{161.828.006.250,00}\right] - 1\right] x\,100\%$	0,86	- Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus - Total PAD dalam APBD adalah total anggaran PAD dalam APBD sebelum perubahan - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
(MANAJEMEN KEUANGAN)

IKK Outcome: Assets Management

No	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada	Capaian	Keterangan
1	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya)		Cakupan Perhitungan adalah seluruh perangkat daerah
2	Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (ya)		
3	Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya)		
4	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya)		

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN) Tahun 2023

IKK Outcome: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya

No	Nilai Realisasi SiLPA	Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya	Rumus | Capaian (2/3x100%)	Ket
1.	676.092.728.935,56	2.540.654.533.540,14	26,61	- Yang digunakan SiLPA dan total belanja APBD tahun sebelumnya - Angka yang diambil adalah angka realisasi - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)

IKK Outcome: Opini Laporan Keuangan 10 Tahun terakhir

No	10 Tahun terakhir	Opini LaporanKeuangan	Keterangan
1	Tahun 2013	WTP	Dengan Paragraf Penjelasan
2	Tahun 2014	WTP	-
3	Tahun 2015	WTP	-
4	Tahun 2016	WTP	-
5	Tahun 2017	WTP	-
6	Tahun 2018	WTP	-
7	Tahun 2019	WTP	-
No	10 Tahun terakhir	WTP	-
8	Tahun 2020	WTP	-
9	Tahun 2021	WTP	-
10	Tahun 2022	WTP	-
11	Tahun 2023	WTP	-

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Standar Satuan Harga Perangkat Daerah belum sepenuhnya tersedia
2. Belum optimalnya penerapan SIPD terutama terkait penatausahaan keuangan dan pelaporan perangkat daerah
3. Belum optimalnya implementasi Analisa Standar belanja
4. Belum optimalnya identifiaksi dini atas resiko kerusakan awal aset daerah karena kurangnya SDM
5. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
6. Juknis pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang terlambat
7. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
8. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat
9. Pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun

Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka diusulkan beberapa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan proritas tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur pengelola keuangan secara reguler
2. Optimalisasi penerapan ASB

3. Meningkatkan kinerja pengelola barang untuk mengindentifikasi lebih dini kerusakan barang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabuptaen Paser.
4. Meningkatkan efektifitas *sistem reword and punishment* terhadap OPD dalam hal penatausahaan BMD

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

2.4. Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat

Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah no 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Paser nomor 26 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Anggaran.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah tidak bersentuhan dalam hal pelayanan langsung terhadap masyarakat, hal ini di duga menyebabkan selama pelaksanaan musrenbang, tidak ada usulan masyarakat yang berkaitan langsung dengan program kegiatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.

Meskipun demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keuangan dan Aset Daerah diupayakan untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.4 Usulan Progran dan Kegiatan dari
para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Nama Perangakat Daerah: BKAD

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		Tidak ada			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Meningkatnya Kwalitas Tata Kelola keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya Kwalitas tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Anggaran yang di susun tepat waktu sesuai ketentuan perundangan	Σ Jumlah Dokumen Anggaran disusun tepat waktu/ Jumlah Dokumen Anggaran x 100	100	100
	Persentase SP2D Perangkat Daerah yang diterbitkan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan	Σ SP2D yang telah diterbitkan tepat waktu/ Σ Jumlah Seluruh SP2d Yang Diterbitkan x 10	100	100
	Persentase Laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu sesuai ketentuan perundangan	Σ PD yang menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu/ Σ Keseluruhan Perangkat Daerah x 100	100	100
Meningkatnya kualitas tata	Persentase Penyajian Laporan BMD tepat waktu	Σ PD yang menyampaikan Laporan BMD Tepat Waktu/	100	100

kelola aset daerah	sesuai ketentuan perundangan	Σ Keseluruhan Perangkat Daerahx 100		
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP	Hasil Evaluasi Sakip Dari APIP Tahun Sebelumnya	100	100

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu ““PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER”” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke sasaran ke-3 Yaitu .” Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah”

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BKAD										
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dibidang Keuangan										
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab Paser	Tingkat kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	74	**172.112.959.973**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab Paser	Tingkat kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	74	**172.112.959.973**	**x**
A.1	Perencanaan, Pengang- garan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Paser	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	*76*	300.353.177	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Paser	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	*76*	**300.353.177**	
A1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	252.517.677	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	**252.517.677**	
A1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab Paser	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	2	46.297.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab Paser	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	**46.297.500**	

			SKPD								
A1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	1.538.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	**1.538.000**	
A2	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kab Paser*	*Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*74*	169.794.897.858	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kab Paser*	*Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*74*	169.794.897.858	
A2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	169.352.350.418	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	**169.352.350.418**	
A2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Paser	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	284.652.740	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Paser	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	**284.652.740**	
A2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	74.981.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	**74.981.200**	
A2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab Paser	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	30.392.700	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab Paser	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	**30.392.700**	
			Jumlah Laporan					Jumlah Laporan		**52.520.800**	

A2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Paser	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	18	52.520.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Paser	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18		
A3	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kab Paser*	*Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*74*	1.456.473.344	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kab Paser*	*Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*74*	**1.456.473.344**	
A3.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	**10.000.000**	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	**10.000.000**	
A3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	**411.469.250**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	**411.469.250**	
A3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disediakan	Kab Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	**280.040.294**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disediakan	Kab Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	**280.040.294**	
A3	Penyediaan Barang Cetakan dan	Kab Paser	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan	3	**68.722.500**	Penyediaan Barang Cetakan dan	Kab Paser	Jumlah Paket barang cetakan	3	**68.722.500**	

.4	Penggandaan		yang disediakan			Penggandaan		dan penggandaan yang disediakan			
A3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Paser	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang diadakan	720	**1.800.000**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab Paser	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang diadakan	720	**1.800.000**	
A3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	**375.000.000**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	**375.000.000**	
A3.7	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kab Paser	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14	**139.438.400**	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kab Paser	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14	**139.438.400**	
A3.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	800	**170.002.900**	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**800**	**170.002.900**	
A.4	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab Paser*	*Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi*	*100*	**325.821.660**	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab Paser*	*Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi*	*100*	**325.821.660**	
A4.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	60	**800.000**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Paser	Jumlah Laporan enyediaan Jasa Surat Menyurat	60	**800.000**	

1			Menyurat								
A4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	**325.021.660**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	**325.021.660**	
A5	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Kab Paser	*Persentase Pemeliharaan BMD*	*47*	235.413.934	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab Paser*	*Persentase Pemeliharaan BMD*	*47*	**235.413.934**	
A5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	**17.578.434**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	**17.578.434**	
A5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	**8.185.000**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	**8.185.000**	
A5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	15	**209.650.500**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	15	**209.650.500**	
B	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Paser	Prosentase penurunan temuan Administratif atas laporan	10	**489.138.665.475**	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Paser	Prosentase penurunan temuan Administratif atas laporan	10	489.138.665.475	

			keuangan					keuangan			
E1	*Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*	*Kab Paser*	*Jumlah Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu*	*6*	**3.579.854.000**	*koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*	*Kab Paser*	*Jumlah Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu*	*6*	**3.579.854.000**	
E1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab Paser	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	**296.989.000**	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab Paser	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	**296.989.000**	
E1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab Paser	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	**194.261.000**	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab Paser	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	**194.261.000**	
E1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab Paser	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	42	**257.519.000**	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab Paser	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	42	**257.519.000**	
E1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab Paser	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	42	**159.903.000**	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Kab Paser	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	42	**159.903.000**	
E1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab Paser	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	**1.771.827.200**	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab Paser	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	**1.771.827.200**	
E	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Kab Paser	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	2	**649.137.800**	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang	Kab	Jumlah Peraturan Daerah tentang	2	**649.137.800**	

1.8	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			Perubahan APBD dan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paser	Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
B 1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab Paser	Jumlah Dokumen Regulasi serta bijakan Bidang Anggaran	2	**42.093.400**	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidan Anggaran	Kab Paser	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	**42.093.400**	
B 1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	25	**136.386.200**	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	25	**136.386.200**	
B 1.11	koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	42	**32.909.400**	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	42	**32.909.400**	
B 1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2	**38.828.000**	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2	**38.828.000**	
B 2	*Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*	*Kab Paser*	*Persentase Jumlah Pengajuan SPM yang sesuai ketentuan*	*100*	**1.507.361.000**	*Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*	*Kab Paser*	*Persentase Jumlah Pengajuan SPM yang sesuai ketentuan*	*100*	**1.507.361.000**	
B 2	Koordinasi dan Pengelolaan Kas	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan	4	**156.168.000**	Koordinasi dan Pengelolaan Kas	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	4	**156.168.000**	

.1	Daerah		Kas Daerah			Daerah		Pengelolaan Kas Daerah			
B2.2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6	**169.250.000**	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6	**169.250.000**	
B2.3	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2	**103.050.000**	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2	**103.050.000**	
B2.4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan	504	**267.198.000**	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	504	**267.198.000**	

			Instansi Terkait					Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			
B2.5	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab Paser	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	**248.475.000**	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan	Kab Paser	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	**248.475.000**	
B2.6	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	42	**563.220.000**	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	42	**563.220.000**	
B3	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*	Kab Paser	*Dokumen Perda dan Perbub Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	*2*	**1.415.906.700**	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*	*Kab Paser*	*Dokumen Perda dan Perbub Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	*2*	**1.415.906.700**	
B3.1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab Paser	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1	**265.766.600**	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab Paser	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1	**265.766.600**	
B	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD	Kab	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	1	**121.729.200**	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD	Kab	Jumlah Laporan Keuangan SKPD,	1	**121.729.200**	

3.2	dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Paser	Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Paser	BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			
B.3.3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab Paser	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1	**714.416.600**	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab Paser	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1	**714.416.600**	
B.3.4	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	**265.789.800**	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab Paser	Jumlah dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	**265.789.800**	
B.3.5	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten / Kota	Kab Paser	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	11	**48.204.500**	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten / Kota	Kab Paser	Jumlah BLUD Kabupaten/ Kota yang Dibina	11	**48.204.500**	
B.4	*Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*	Kab Paser	*Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan*	*1*	**482.635.543.775**	*Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*	*Kab Paser*	*Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan*	*1*	482.635.543.775	

			Keuangan Daerah					*Keuangan Daerah*			
B4.1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	**467.928.858.775**	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	467.928.858.775	
B4.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	**10.000.000.000**	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	**10.000.000.000**	
B4.3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	**4.706.685.000**	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	**4.706.685.000**	
C	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Persentase Permasalahan Pengelolaan Barang Milik Daerah selesai ditindaklanjuti	60	**5.443.049.544**	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Persentase Permasalahan Pengelolaan Barang Milik Daerah selesai ditindaklanjuti	60	**5.443.049.544**	
C1	*Pengelolaan Barang Milik Daerah*	*Kab Paser*	*Jumlah dokumen Laporan Pengelolaan BMD*	*42*	**5.443.049.544**	*Pengelolaan Barang Milik Daerah*	*Kab Paser*	*Jumlah dokumen Laporan Pengelolaan BMD*	*42*	**5.443.049.544**	
C1.1	Penyusunan Standar Harga	Kab Paser	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	**500.304.000**	Penyusunan Standar Harga	Kab Paser	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	**500.304.000**	
	Penyusunan	Kab Paser	Jumlah Rencana			Penyusunan	Kab Paser	Jumlah Rencana		**17.000.000**	

C1.2	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	**17.000.000**	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Kebutuhan Barang Milik Daerah	1		
C1.3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	**137.000.000**	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	**137.000.000**	
C1.4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	**57.923.267**	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	**57.923.267**	
C1.5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2	**69.779.900**	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2	**69.779.900**	
C1.6	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2	**724.767.000**	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2	**724.767.000**	
C1.7	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	**115.420.000**	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	**115.420.000**	
C1	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	2	**246.228.920**	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	2	**246.228.920**	

.8			Pengelolaan Barang Milik Daerah					Pengelolaan Barang Milik Daerah			
C1.9	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4	**3.041.736.617**	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4	**3.041.736.617**	
C1.10	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	**181.145.000**	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	**181.145.000**	
C1.11	Peyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	**351.744.840**	Peyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Pase	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	**351.744.840**	

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN						PAGU INDIKATIF			
Kode Rekening	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERKURANG/BERTAMBAH	T + 1
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Paser	Tingkat kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	74%	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	42.857.616.405	172.112.959.973	129.255.343.568	189.324.255.970
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	76	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	300.353.177	300.353.177	0	330.388.495
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	252.517.677	252.517.677	0	277.769.445
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	46.297.500	46.297.500	0	50.927.250

5.02.001.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	1.313.000	1.538.000	225.000	1.691.800
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40.603.310.300	169.794.897.858	129.191.587.558	186.774.387.644
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang / bulan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40.172.610.480	169.352.350.418	129.179.739.938	186.287.585.460
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	272.805.120	284.652.740	11.847.620	313.118.014
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	74.981.200	74.981.200	0	82.479.320
5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	30.392.700	30.392.700	0	33.431.970

5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	52.520.800	52.520.800	0	57.772.880
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74%	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	1.454.738.994	1.456.473.344	1.734.350	1.602.120.678
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	10.000.000	10.000.000	0	11.000.000
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	408.473.500	411.469.250	2.995.750	452.616.175
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	281.301.694	280.040.294	-1.261.400	308.044.323

5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	68.722.500	68.722.500	0	75.594.750
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang diadakan	720 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	1.800.000	1.800.000	0	1.980.000
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	375.000.000	375.000.000	0	412.500.000
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	800 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	170.002.900	170.002.900	0	187.003.190
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	139.438.400	139.438.400	0	153.382.240
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100%	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	263.800.000	325.821.660	62.021.660	358.403.826

5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	800.000	800.000	0	880.000
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	263.000.000	325.021.660	62.021.660	357.523.826
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Persentase Pemeliharaan BMD	47%	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	235.413.934	235.413.934	0	258.955.327
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	17.578.434	17.578.434	0	19.336.277
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	8.185.000	8.185.000	0	9.003.500

5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	15 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	209.650.500	209.650.500	0	230.615.550
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Paser	Prosentase penurunan temuan Administratif atas laporan keuangan	10%	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	409.719.665.475	489.138.665.475	79.419.000.000	538.052.532.023
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu	6 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	3.369.854.000	3.579.854.000	210.000.000	3.937.839.400
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Paser	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	296.989.000	296.989.000	0	326.687.900
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	194.261.000	194.261.000	0	213.687.100
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	257.519.000	257.519.000	0	283.270.900

5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	159.903.000	159.903.000	0	175.893.300
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Paser	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	1.666.827.200	1.771.827.200	105.000.000	1.949.009.920
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Paser	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	544.137.800	649.137.800	105.000.000	714.051.580
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	42.093.400	42.093.400	0	46.302.740
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	25 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	136.386.200	136.386.200	0	150.024.820

5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	42 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	32.909.400	32.909.400	0	36.200.340
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	38.828.000	38.828.000	0	42.710.800
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Paser	Persentase Jumlah Pengajuan SPM yang sesuai ketentuan	100%	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	1.378.361.000	1.507.361.000	129.000.000	1.658.097.100
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	156.168.000	156.168.000	0	171.784.800
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	169.250.000	169.250.000	0	186.175.000

5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	103.050.000	103.050.000	0	113.355.000
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	504 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	267.198.000	267.198.000	0	293.917.800
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Paser	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	248.475.000	248.475.000	0	273.322.500

5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	42 Orang	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	434.220.000	563.220.000	129.000.000	619.542.000
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Paser	Dokumen Perda dan Perbub Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	1.415.906.700	1.415.906.700	0	1.557.497.370
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	265.766.600	265.766.600	0	292.343.260
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	121.729.200	121.729.200	0	133.902.120

5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	664.166.600	714.416.600	50.250.000	785.858.260
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	316.039.800	265.789.800	-50.250.000	292.368.780
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	11 lembaga	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	48.204.500	48.204.500	0	53.024.950
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	403.555.543.775	482.635.543.775	79.080.000.000	530.899.098.153

5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	388.848.858.775	467.928.858.775	79.080.000.000	514.721.744.653
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	10.000.000.000	10.000.000.000	0	11.000.000.000
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	4.706.685.000	4.706.685.000	0	5.177.353.500
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Paser	Persentase Permasalahan Pengelolaan Barang Milik Daerah selesai ditindaklanjuti	60%	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	5.443.049.544	5.443.049.544	0	5.987.354.498
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Paser	Jumlah dokumen Laporan Pengelolaan BMD	42 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	5.443.049.544	5.443.049.544	0	5.987.354.498
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Kab. Paser	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	500.304.000	500.304.000	0	550.334.400

5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Paser	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	17.000.000	17.000.000	0	18.700.000
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Paser	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	137.000.000	137.000.000	0	150.700.000
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	57.923.267	57.923.267	0	63.715.594
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	69.779.900	69.779.900	0	76.757.890
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	724.767.000	724.767.000	0	797.243.700
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	115.420.000	115.420.000	0	126.962.000

5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	246.228.920	246.228.920	0	270.851.812
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	3.041.736.617	3.041.736.617	0	3.345.910.279
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	181.145.000	181.145.000	0	199.259.500
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Dana Bagi Hasil	351.744.840	351.744.840	0	386.919.324

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk :
    a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tana Paser, 18 Juli 2024

Kepala
BKAD Kabupaten Paser,

Nur Asni, SE, MM
Pembina TK I
NIP 197212151998032008

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) 2024

BKPSDM Kabupaten Paser

kepegawaian.paserkab.go.id

Jl. R.M. Noto Soenardi Telp/Fax. (0543) 22696

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1007

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024
TANGGAL 16 AGUSTUS 2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASER TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN BUPATI PASER NO.100.3.3.2/KEP-786/2024 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR ISI **4**

DAFTAR TABEL **5**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 6

1.2 Landasan Hukum 7

1.3 Maksud dan tujuan 9

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 12

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan BKPSDM 23

2.3 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.....34

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran.....36

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 37

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 50

BAB IV PENUTUP

4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 55

4.2 Rencana Tindak Lanjut.....55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Renja BKPSDM Kabupaten Paser Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	13
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kabupaten Paser Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	33
Tabel 3.1	Target dan Tujuan dan Sasaran BKPSDM	36
Tabel 3.2	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 BKPSDM Kabupaten Paser	39
Tabel 3.3	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagaiacuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia , proses penyusunan Perubahan Renja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, keterkaitan antaraRenja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan.

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Renja BKPSDM Kabupaten Paser Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	3	4		5		6		7		9		10		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																				
A.	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Indeks**	**80.00**	**31,708,672,222.00**	**B (65)**	**8,084,390,038.00**	**BB (70)**	**9,553,863,608.00**	**71.51**	**2,116,389,497.00**	**71.51**	**4,837,590,305.00**	**102.16**	**6,953,979,802.00**	**71.51**	**23,585,383,468**	**79.78**	**74.38**	
		Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Lainnya	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**Indeks**	**80.00**	**31,708,672,222.00**	**BB (99,53)**	**8,084,390,038.00**	**B (74)**	**9,553,863,608.00**	**74.00**	**1,258,980,374.00**	**74.00**	**3,151,442,991.00**	**100.00**	**4,410,423,365.00**	**74.00**	**23,585,383,468**	**79.78**	**74.38**	**Sekretariat**
		Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu**	**Persen**	**100.00**	**972,831,326.00**	**107.69**	**342,632,568.00**	**100%**	**214,127,500.00**	**35.29**	**28,477,150.00**	**17.65**	**26,290,660.00**	**52.94**	**54,767,810.00**	**52.94**	**630,198,758**	**79.78**	**64.78**	**Sekretariat**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (renstra, ranwal renja, rancangan renja, renja, renja perubahan)	dokumen	21.00	360,031,200.00	5.00	169,437,306.00	5.00	144,127,500.00	1.00	17,002,750.00	2.00	11,657,960.00	**60.00**	28,660,710.00	8.00	**258,798,405**	38.10	**71.88**	**Sekretariat**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (termasuk sektoral dan CaLK)	dokumen	60.00	412,800,126.00	9.00	173,195,262.00	12.00	70,000,000.00	5.00	11,474,400.00	1.00	14,632,700.00	**50.00**	26,107,100.00	15.00	**334,146,347**	25.00	**80.95**	**Sekretariat**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum PD**	**Indeks**	**80.00**	**1,402,364,582.00**	**B (73,60)**	**676,069,664.00**	**BB (80)**	**678,502,400.00**	**85.44**	**67,182,720.00**	**85.44**	**206,733,947.00**	**85.44**	**273,916,667.00**	**151.43**	**-4,617,750,157**	**189.29**	**-329.28**	**Sekretariat**
														-		-		**-5,825,546,928**			

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Renja BKPSDM Kabupaten Paser Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	3	4		5		6		7		9		10		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	44.00	84,920,000.00	2.00	121,407,900.00	39.00	270,393,800.00	-	-	2.00	46,065,000.00	40.00	46,065,000.00	10.00	**154,308,300**	22.73	181.71	**Sekretariat**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	235.00	200,008,050.00	49.00	107,631,435.00	62.00	68,068,600.00	24.00	-	2.00	11,287,400.00	43.33	11,287,400.00	118.00	**124,058,678**	50.21	62.03	**Sekretariat**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	dokumen	50.00	38,022,200.00	12.00	10,803,852.00	4.00	14,145,000.00	-	-	-	-	-	-	24.00	**27,231,095**	48.00	71.62	**Sekretariat**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	10.00	22,968,000.00	2.00	3,600,000.00	2.00	3,000,000.00	2.00	600,000.00	2.00	-	100.00	600,000.00	17.00	**7,800,000**	170.00	33.96	**Sekretariat**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	208.00	751,422,332.00	54.00	208,760,192.00	60.00	170,497,000.00	5.00	48,812,720.00	28.00	99,154,841.00	66.00	147,967,561.00	97.00	**450,494,503**	46.63	59.95	**Sekretariat**
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	5.00	305,024,000.00	818.00	145,991,065.00	1.00	152,398,000.00	-	17,770,000.00	-	50,226,706.00	-	67,996,706.00	822.00	**235,331,690**	16,440.00	77.15	**Sekretariat**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan PD**	**Persen**	**100%**	**7,727,500.00**	**100%**	**6,415,800.00**	**100**	**7,850,000.00**	**100**	**-**	**100.00**	-	**100.00**	**-**	**100.00**	**-99,903,935**	**10,000.00**	**-1,292.84**	**Sekretariat**
														-		-		**-10,803,852**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	50.00	2,282,500.00			10.00	500,000.00	-	-	-	-	**-**	-	10.00	**316,430**	20.00	13.86	**Sekretariat**

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Renja BKPSDM Kabupaten Paser Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	3	4		5		6		7		9		10		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	60.00	5,445,000.00	12.00	6,415,800.00	12.00	7,350,000.00	-	-	-	-	-	-	24.00	**13,009,200**	40.00	238.92	**Sekretariat**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tingkat Kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian PD**	**Persen**	**70.00**	**40,000,000.00**	**78.83**		**B (80)**	**45,000,000.00**	**85.44**	**-**	**85.44**	**-**	**85.44**	**-**	**85.44**	**-105,991,085**	**122.06**	**-264.98**	**Sekretariat**
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	300.00	40,000,000.00	45.00		60.00	45,000,000.00	23.00	-	-	-	51.11	-	68.00	**22,412,706**	22.67	56.03	**Sekretariat**
		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	**Tingkat kepuasan pelayanan Administrasi Keuangan PD**	**Persen**	**70.00**	**28,379,222,056.00**	**B (87,64)**	**6,020,114,739.00**	**BB (80)**	**6,878,405,108.00**	**84.94**	**972,983,104.00**	85.00	**2,270,006,384.00**	**84.97**	**3,242,989,488.00**	**84.97**	**28,379,222,056**	**121.39**	**100.00**	**Sekretariat**
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	dokumen	1,000.00	983,011,431.00	285.00	194,567,811.00	180.00	204,656,150.00	44.00	16,255,400.00	78.00	70,056,081.00	67.78	86,311,481.00	628.00	**10,442,247,730**	62.80	1,062.27	**Sekretariat**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	155.00	27,396,210,625.00	33.00	5,825,546,928.00	37.00	6,673,748,958.00	33.00	956,727,704.00	37.00	2,199,950,303.00	112.12	3,156,678,007.00	97.00	**1,371,177,563**	62.58	5.00	**Sekretariat**
		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan BMD penunjang urusan PD**	**Persen**	**100%**	**288,801,797.00**	**100%**	**650,925,800.00**	**100%**	**1,591,283,500.00**	**83.45**	**181,600,000.00**	**90.00**	**615,600,000.00**	**86.73**	**797,200,000.00**	**86.73**	**288,801,797**	**8,672.50**	**100.00**	**Sekretariat**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	29.00	39,217,397.00			285.00	306,556,800.00	-	-	115.00	-	40.35	-	53.00	**201,422,855**	182.76	513.61	**Sekretariat**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	31.00	249,584,400.00	57.00	650,925,800.00	185.00	1,284,726,700.00	16.00	181,600,000.00	54.00	615,600,000.00	95.89	797,200,000.00	76.00	**1,078,517,610**	245.16	432.13	**Sekretariat**

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Renja BKPSDM Kabupaten Paser Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	3	4		5		6		7		9		10		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan PD**	**Persen**	**100%**	**617,724,961.00**	**108.70**	**388,231,467.00**	**100%**	**138,695,100.00**	**83.45**	**8,737,400.00**	**83.45**	**32,812,000.00**	**83.45**	**41,549,400.00**	**83.45**	**519,644,961**	**8,345.00**	**84.12**	**Sekretariat**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	2.00	217,473,001.00	1.00	5,460,696.00	1.00	6,200,000.00	-	4,137,400.00	4.00	-	**100.00**	4,137,400.00	3.00	**53,341,512**	150.00	24.53	**Sekretariat**
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	40.00	87,716,000.00	10.00	97,721,460.00	7.00	51,030,000.00	-	-	-	14,640,900.00	**-**	14,640,900.00	20.00	**131,347,000**	50.00	149.74	**Sekretariat**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1.00	295,455,960.00	1.00	272,340,921.00	1.00	70,058,100.00	1.00	4,600,000.00	1.00	11,500,000.00	**100.00**	16,100,000.00	2.00	**354,634,265**	200.00	120.03	**Sekretariat**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	40.00	17,080,000.00	1.00	12,708,390.00	7.00	11,407,000.00	-	-	7.00	6,671,100.00	**100.00**	6,671,100.00	11.00	**26,821,300**	27.50	157.03	**Sekretariat**
B	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN**		**Hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit**	**Persen**	**75%**	**30,848,172,934.00**	**185.00**	**13,017,239,017.00**	**200.00**	**9,060,478,127.00**	**185.00**	**908,815,150.00**	**185.00**		**92.50**	**2,543,556,437.00**	**185.00**	**30,848,172,934**	**24,666.67**	**100.00**	
			Indeks Survei Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	**Indeks**	**75%**		**101.15**	**-**	**80.00**	**-**	**80.80**	**-**	**80.80**		**80.80**	**-**	**80.80**	**-13,233,642,315**	**10,773.33**	**-**	

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Renja BKPSDM Kabupaten Paser Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	3	4		5		6		7		9		10		13		14		15		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (diklat teknis, fungsional dan sosio kultural)	Persen	90%		191%		85.00		-		20.00		23.53	-	-	-	-	-	
			Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	90%		84%		90.00		-		10.00		11.11	-	-	-	-	-	
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	Persen	90.00		98.75		80.00		30.00		30.00		75.00		-		-	62.21	
			Persentase ASN bekerja sesuai kompetesi dan kualifikasi dalam jabatan	Persen	90.00	30,848,172,934.00	75.78	13,058,018,890.00	80.00	6,597,307,127.00	20.00	857,409,123.00	20.00	1,686,147,314.00	50.00	2,543,556,437.00	-	19,189,823,022.00	-		
			Persentase pegawai berkinerja baik	Persen	100.00		85.38		100.00		99.98		94.91		94.91		94.91		94.91		
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi kebutuhan pegawai yang terpenuhi berdasarkan jumlah bezzeting/formasi yang diusulkan	Persen	80.00	7,751,894,135.00	480.00	1,225,030,362.00	75.00	1,148,173,887.00	30.00	195,471,287.00	30.00	167,191,480.00	80.00	362,662,767.00	540.00	2,901,385,836.00	675.00	37.43	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Renja BKPSDM Kabupaten Paser Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	3	4		5		6		7		9		10		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase data kepegawaian yang terupdate/diremajakan	**Persen**	**90.00**		**100.00**		**90.00**		**100.00**		**100.00**				**200.00**		**222.22**		**Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	dokumen	10.00	3,457,676,526.00	3.00	581,888,555.00	1.00	758,635,087.00	-	151,485,747.00	-	57,115,950.00	-	208,601,697.00	3.00	1,295,675,254.00	30.00	37.47	**Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	dokumen	5.00	362,717,339.00	1.00	238,977,223.00	1.00	50,160,000.00	-	14,332,240.00	-	6,949,270.00	-	21,281,510.00	1.00	344,881,179.00	20.00	95.08	**Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**
		Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	dokumen	5.00	438,585,460.00	1.00	33,450,708.00	1.00	47,190,000.00	-	-	-	21,512,600.00	-	21,512,600.00	1.00	122,410,553.00	20.00	27.91	**Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	lembaga	1.00	806,718,350.00	1.00	62,694,940.00	1.00	5,655,400.00	-	-	-	-	-	-	1.00	225,161,472.00	100.00	27.91	**Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	5.00	1,043,872,000.00	1.00	139,608,545.00	1.00	175,440,400.00	-	11,424,000.00	-	57,164,860.00	-	68,588,860.00	1.00	427,731,333.00	20.00	40.98	**Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Renja BKPSDM Kabupaten Paser Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	3	4		5		6		7		9		10		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	dokumen	5.00	1,252,163,660.00	1.00	168,505,414.00	1.00	70,822,000.00	-	11,076,000.00	-	4,800,000.00	-	15,876,000.00	1.00	373,961,598.00	20.00	29.87	**Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	5.00	390,160,800.00	1.00	39,355,104.00	1.00	40,271,000.00	-	7,153,300.00	-	19,648,800.00	-	26,802,100.00	1.00	111,564,447.00	20.00	28.59	**Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**
		Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase Penempatan ASN berdasarkan kualifikasi sesuai syarat jabatan**	**Persen**	**90.00**	**12,912,232,449.00**	**102.04**	**9,889,986,386.00**	**80.00**	**3,418,298,590.00**	**-**	**48,271,349.00**	**40.00**	**940,596,151.00**	**50.00**	**988,867,500.00**	**40.00**	**12,421,511,698.00**	**44.44**	**96.20**	**Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN**
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	dokumen	5.00	3,700,834,059.00	1.00	29,146,772.00	1.00	830,956,640.00	-	27,202,000.00	1.00	374,060,520.00	100.00	401,262,520.00	5.00	428,313,013.00	100.00	11.57	**Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN**
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	dokumen	5.00	5,426,019,400.00	1.00	9,386,926,891.00	1.00	2,005,380,000.00	-	1,300,000.00	1.00	510,389,591.00	100.00	511,689,591.00	1.00	11,096,542,207.00	20.00	204.51	**Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN**
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	orang	500.00	2,647,436,600.00	97.00	380,190,846.00	78.00	361,970,750.00	-	6,511,000.00	-	-	-	6,511,000.00	164.00	696,284,342.00	32.80	26.30	**Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN**
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	orang	1,941.00	661,100,390.00	195.00	52,736,887.00	120.00	150,091,200.00	72.00	13,258,349.00	20.00	56,146,040.00	184.00	69,404,389.00	629.00	118,178,636.00	32.41	17.88	**Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN**

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Renja BKPSDM Kabupaten Paser Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	3	4		5		6		7		9		10		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	orang	50.00	476,842,000.00	41.00	40,985,000.00	50.00	69,900,000.00	-	-	-	-	-	-	51.00	82,193,500.00	102.00	17.24	**Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN**
		Mutasi dan Promosi ASN	**Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi**	**Persen**	**90.00**	**6,230,617,850.00**	**67.24**	**716,170,810.00**	**80**	**1,053,875,000.00**	**31.26**	**398,376,027.00**	-	**319,226,100.00**	**39.08**	**717,602,127.00**	**31.26**	**1,588,491,943.00**	**34.74**	**25.49**	**Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN**
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	dokumen	2,000.00	692,264,250.00	778.00	79,776,900.00	1.00	100,000,000.00	112.00	12,310,000.00	61.00	-	43.25	12,310,000.00	1,421.00	190,605,900.00	71.05	27.53	**Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN**
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	dokumen	5.00	4,711,205,600.00	1.00	551,746,726.00	1.00	803,875,000.00	-	365,313,400.00	-	277,825,700.00	-	643,139,100.00	3.00	1,133,941,732.00	60.00	24.07	**Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN**
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	dokumen	3,000.00	827,148,000.00	934.00	124,647,184.00	750.00	150,000,000.00	326.00	20,752,627.00	372.00	41,400,400.00	69.80	62,153,027.00	2,192.00	263,944,311.00	73.07	31.91	**Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN**
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase Aparatur berkinerja baik**	**Persen**	**85.00**	**3,953,428,500.00**	**85.38**	**1,226,831,332.00**	**80.00**	**976,959,650.00**	**99.88**	**215,290,460.00**	**94.91**	**259,133,583.00**	**94.91**	**474,424,043.00**	**180.29**	**2,278,433,545.00**	**212.10**	**57.63**	**Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
			Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan kinerja /disiplin pegawai				**100.00**		**85.00**		**36.00**		**24.00**	**-**	**70.59**		**60.00**				**Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
			Persentase ASN yang mendapatkan penghargaan (SLKS dan ASN berprestasi)				**100.00**		**85.00**		**57.33**		**-**	**-**	**67.45**		**57.33**				**Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Renja BKPSDM Kabupaten Paser Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	3	4		5		6		7		9		10		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen	5.00	384,112,000.00	1.00	86,634,811.00	1.00	49,954,650.00	-	20,324,300.00	-	14,764,800.00	-	35,089,100.00	2.00	202,049,441.00	40.00	52.60	**Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen	5.00	1,339,967,500.00	1.00	133,986,826.00	1.00	164,197,000.00	-	28,313,200.00	-	79,825,200.00	-	108,138,400.00	2.00	480,384,845.00	40.00	35.85	**Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen	5.00	457,617,000.00	1.00	178,681,576.00	1.00	100,000,000.00	-	-	-	8,355,000.00	-	8,355,000.00	1.00	234,888,096.00	20.00	51.33	**Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	orang	6,000.00	580,286,000.00	1,535.00	384,661,815.00	1,200.00	291,578,000.00	688.00	54,138,600.00	298.00	85,604,200.00	82.17	139,742,800.00	4,016.00	655,717,888.00	66.93	113.00	**Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	orang	2,000.00	578,660,000.00	332.00	64,900,400.00	400.00	81,000,000.00	129.00	32,592,400.00	-	3,480,000.00	32.25	36,072,400.00	454.00	163,167,178.00	22.70	28.20	**Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	laporan	5.00	612,786,000.00	1.00	297,735,904.00	1.00	210,000,000.00	-	79,921,960.00	-	32,872,400.00	-	112,794,360.00	6.00	542,226,097.00	120.00	88.49	**Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Pelayanan Proses Perceraian Pegawai	laporan	5.00		150.00	30,230,000.00	150.00	30,230,000.00	-	-	-	-	-	-	1.00	-	20.00	-	**Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
		Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	laporan	1.00		1.00	50,000,000.00	1.00	50,000,000.00	-	-	-	34,231,983.00	-	34,231,983.00	4.00	-	400.00	-	**Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
			Persentase ASN yang telah memiliki sertifikasi kompetensi	**Persen**	**80.00**	**37,530,778,371.00**	**56.75**	**2,269,259,255.00**	**80.00**	**2,463,171,000.00**	**-**	**51,406,027.00**	**-**	**177,930,938.00**	**-**	**229,336,965.00**	**-**	**6,052,089,623.00**	**-**	**16.13**	

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Renja BKPSDM Kabupaten Paser Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	3	4		5		6		7		9		10		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pengembangan SDM	**Persentase ASN Manajerial dan fungsional memiliki sertifikasi**	**Persen**	**90.00**	**37,530,778,371.00**	**59.45**	**2,269,259,255.00**	**80.00**	**2,463,171,000.00**	**-**	**51,406,027.00**	**-**	**177,930,938.00**	**-**	**229,336,965.00**	**-**	**6,052,089,623.00**	**-**	**16.13**	**Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN**
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerian dan Fungsional	**Persentase calon ASN dan ASN yang telah lulus memenuhi diklat penjenjangan**	**Persen**	**97.00**	**37,530,778,371.00**	**84.63**	**2,269,259,255.00**	**93.00**	**2,463,171,000.00**	**-**	**51,406,027.00**	**10.00**	**177,930,938.00**	**10.75**	**229,336,965.00**	**-**	**6,052,089,623.00**	**-**	**16.13**	**Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN**
		Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	laporan	5.00	37,530,778,371.00	1.00	**2,269,259,255.00**	1.00	2,463,171,000.00	-	51,406,027.00	-	177,930,938.00	**-**	229,336,965.00	-	6,052,089,623.00	-	16.13	**Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN**
						-		**-**		**18,614,341,735.00**		**2,167,795,524.00**		**5,015,521,243.00**		**7,183,316,767.00**		**48,827,296,113.00**		**-**	

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 65,49%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.183.316.767 (Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 18.614.341.735 (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah atau sebesar 38,59%.

2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 37,51% dengan predikat kinerja rendah.

3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 11 Indikator, capaian kinerja >70%-100% = 2 Indikator, capaian kinerja >50%-70% = 3 Indikator, capaian kinerja 0%-50% = 27 Indikator.

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan juga menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Badan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
   b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
   c. pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   d. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Badan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja;
   e. penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
   f. perumusan kebijakan di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi kepegawaian Daerah dan pengembangan sumber daya manusia;

g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi kepegawaian Daerah dan pengembangan sumber daya manusia;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi kepegawaian Daerah dan pengembangan sumber daya manusia;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Badan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan;
l. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan;
m. pembinaan Jabatan Fungsional sesuai dengan kewenangan;
n. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana;
o. pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
p. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
q. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
r. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas merencanakan. operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat juga menyelenggarakan fungsi:
a. pemberian petunjuk penyusunan rencana strategis Badan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
b. pemberian petunjuk penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Badan berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
c. perumusan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. pemberian petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran Badan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Badan;

e. pengoordinasian penyusunan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Badan;
f. pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pada Badan;
g. pelaksanaan administrasi keuangan pada Badan;
h. pelaksanaan administrasi barang milik Daerah pada Badan;
i. pelaksanaan administrasi kepegawaian pada Badan;
j. pelaksanaan administrasi umum pada Badan;
k. pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah pada Badan;
l. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah pada Badan;
m. pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Badan;
n. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan;
o. pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan;
p. fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana pada Badan;
q. fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Badan;
r. pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
s. pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Badan;
t. pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
u. pemberian petunjuk penyiapan bahan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
v. pemberian petunjuk penyiapan bahan pembinaan Jabatan Fungsional pada Badan;
w. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Badan;
x. pemberian petunjuk penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
y. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penunjang pemerintah di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
z. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan pada Badan;

aa. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
bb. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kesekretariatan.

(3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan rencana kerja Badan;
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
d. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
e. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
f. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Badan berdasarkan rencana strategis Badan;
g. menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Badan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
i. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi dan menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan;
j. memeriksa bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Badan;
k. memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja berdasarkan rencana strategis Badan;
m. menyiapkan bahan penyusunan rencana keuangan Badan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
n. menyusun dokumen perencanaan pada Badan;
o. melaksanakan koordinasi dan menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran pada Badan;

p. melaksanakan koordinasi dan menyusun dokumen perubahan rencana kerja dan anggaran pada Badan;
q. melaksanakan koordinasi dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran pada Badan;
r. melaksanakan koordinasi dan menyusun perubahan dokumen pelaksanaan anggaran pada Badan;
s. melaksanakan koordinasi dan menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja pada Badan;
t. melaksanakan evaluasi kinerja pada Badan;
u. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan ASN;
v. melaksanakan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
w. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan pada Badan;
x. mengoordinasikan dan melaksanakan akuntansi pada Badan;
y. mengoordinasikan dan menyusun laporan keuangan akhir tahun pada Badan;
z. mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
aa. mengoordinasikan dan menyusun laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran pada Badan;
bb. menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
cc. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
dd. melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi.

(4) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi surat-menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, layanan publikasi dan hubungan masyarakat, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan barang milik Daerah. Subbagian Umum mempunyai urajan tugas:
a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja Badan;
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
d. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas ASN guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
e. memeriksa pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan

dan perpustakaan, perjalanan dinas dan rapat-rapat;

f. mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan;
g. menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan;
h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Badan;
i. mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur Badan;
j. mengontrol pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik Daerah pada Badan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemanfaatan, penatausahaan dan pemeliharaan;
k. menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana;
l. melaksanakan fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Badan;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Subbagian Umum sebagai bahan pertanggungjawaban;
n. melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi.

(5) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan keuangan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Badan;
b. pemberian petunjuk pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c. pemberian petunjuk pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
d. pemberian petunjuk pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
e. pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengadaan dan pemberhentian ASN, Pengelolaan data dan informasi kepegawaian, serta fasilitasi profesi ASN,
f. pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan dan pemberhentian ASN, pengelolaan data dan informasi kepegawaian, serta fasilitasi profesi ASN;

g. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pengadaan dan pemberhentian ASN, pengelolaan data dan informasi kepegawaian, serta fasilitasi profesi ASN;
h. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN;
i. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN;
j. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengadaan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja;
k. pelaksanaan evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN;
l. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN;
m. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian;
n. pelaksanaan evaluasi pemberhentian ASN;
o. pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN;
p. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN;
q. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
r. pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian;
s. pelaksanaan evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian;
t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang pengadaan dan pemberhentian ASN, pengelolaan data dan informasi kepegawaian, serta fasilitasi lembaga profesi ASN;
u. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
v. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pengadaan dan pemberhentian ASN, Pengelolaan data dan informasi kepegawaian, serta fasilitasi lembaga profesi ASN.

(6) Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan program Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Badan;
b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program,

kegiatan dan anggaran Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

d. pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
e. pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi;
f. pemberian petunjuk pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi;
g. pemberian petunjuk pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi;
h. pemberian petunjuk pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi;
i. pelaksanaan pengelolaan mutasi ASN;
j. pelaksanaan pengelolaan kenaikan pangkat ASN;
k. pelaksanaan pengelolaan promosi ASN;
l. pelaksanaan peningkatan kapasitas kinerja ASN;
m. pelaksanaan pengelolaan assessment center;
n. pelaksanaan pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN;
o. pelaksanaan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN;
p. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat;
q. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN;
r. pelaksanaan evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN;
s. pelaksanaan penyusunan administrasi diklat dan sertifikasi Jabatan Fungsional;
t. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat Jabatan Fungsional;
u. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi fungsional ASN;
v. pelaksanaan evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional;
w. pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN;
x. pelaksanaan pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional ASN;
y. pelaksanaan fasilitasi pengembangan karir dalam Jabatan Fungsional;
z. pelaksanaan evaluasi pengembangan Jabatan Fungsional;
aa. pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis;
bb. pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi;
dd. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir pemberian penghargaan dan sanksi;

ee. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang pengembangan dan mutasi.

(7) Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin ASN dan Penghargaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin ASN dan Penghargaan mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin ASN dan Penghargaan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin ASN dan Penghargaan menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan program Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin ASN dan Penghargaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Badan;
b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin ASN dan Penghargaan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
d. pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin ASN dan Penghargaan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
e. pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin ASN dan Penghargaan;
f. pelaksanaan kebijakan di Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin ASN dan Penghargaan;
g. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang penilaian kinerja, disiplin ASN dan penghargaan;
h. pelaksanaan penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
i. pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
j. pelaksanaan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
k. pelaksanaan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai;
l. pelaksanaan pengelolaan tanda jasa bagi pegawai;
m. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur;
n. pelaksanaan pembinaan disiplin ASN;
o. pelaksanaan pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN;
p. pelaksanaan pelayanan proses izin perceraian pegawai;
q. pelaksanaan evaluasi disiplin ASN;
r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas

Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin ASN dan Penghargaan;

s. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

t. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin ASN dan Penghargaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

1. Pelayanan Pengusulan Kenaikan Pangkat
2. Pelayanan Penyesuaian Ijazah
3. Pelayanan Mutasi/Pindah
4. Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Pegawai
5. Pelayanan Pembuatan Kartu Taspen
6. Pelayanan Pembuatan Tanda Jasa/Satya Lencana
7. Pelayanan Rekomendasi Tugas Belajar
8. Pelayanan Rekomendasi Izin Belajar
9. Pelayanan Diklat dan Bimtek/Pendidikan dan Pelatihan
10. Pelayanan Pengajuan Perceraian
11. Pelayanan Cuti Besar dan Tahunan
12. Pelayanan Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala

Upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

Sasaran OPD

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja OPD

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah memiliki target B (70) dengan realisasi tahun 2024 tercapai BB (71,51).

Sasaran OPD

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN

Indikator Kinerja OPD

1. Hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit memiliki target 200 dengan realisasi tahun 2024 yaitu 185.
2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal memiliki target 92% dengan realisasi sampai dengan Triwulan II yaitu 22%.
3. Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural memiliki target 90% dengan realisasi sampe dengan Triwulan II yaitu 40%.
4. Indeks Survei Kepuasan Layanan Kepegawaian memiliki target BB (80) dengan realisasi tercapai sebesar BB (80,80)

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026	2024 (TW I & II)	
Tujuan: Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas								
Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (63)	B (65)	B (70)	BB (73)	BB (75)	BB (71,51)	103%
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN	Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit	125	125	200	175	300	185	93%
	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	75%	80%	92%	90%	95%	20%	22%
	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	85%	85%	90%	95%	98%	40%	44%
	Indeks Survei Kepuasan Masyarakat	BB (80)	BB (80)	BB (80)	BB (80)	BB (80)	BB (80,80)	101%
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)							
	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)							
	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)							

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas".
b. Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Nilai SAKIP Perangkat Daerah", telah melampaui target, dimana realisasinya sebesar BB (71,51) dari target sebesar B (70) dengan capaian kinerja sebesar 103%
c. Sasaran "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN" memiliki 4 indikator kinerja yaitu :
    1. "Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit" belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 185 dari target sebesar 200 dengan capaian kinerja sebesar 93%, dikarenakan belum dilaksanakannya lagi penilaian mandiri di lingkungan Kabupaten Paser untuk Tahun 2024.
    2. "Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal" belum mencapai target, dimana realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar 20% dari target 92% dengan capaian kinerja sebesar 22%.
    3. "Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural" belum mencapai target, dimana realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar 40% dari target 90% dengan capaian kinerja sebesar 44%.
    4. "Indeks Survei Kepuasan Masyarakat", telah melampaui target, dimana realisasinya sebesar B (80,80) dari target B (80) dengan capaian kinerja 101%.

2.3. Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Periode Juni 2024:

1. Keterlibatan Pegawai, Mengikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan sistem merit dapat meningkatkan pemahaman pegawai.
2. Fasilitas dan Aksesibilitas, Memastikan bahwa fasilitas dan aksesibilitas program pendidikan dan pelatihan formal memadai, tidak hanya biaya tetapi juga akses terhadap program yang sesuai.

3. Perhitungan dan Evaluasi Berkelanjutan, Melakukan perhitungan dan evaluasi secara teratur dapat memberikan umpan balik untuk mengidentifikasi hal yang perlu diperbaiki dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Belum dilaksanakannya perhitungan mandiri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sehingga nilai untuk tahun ini belum mencapai target yang ditentukan.
2. Ketidaktersediaan Program yang Relevan, terbatasnya program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan ASN dan bidang pekerjaan.
3. Kurangnya komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pegawai untuk melakukan pengisian survei dapat menghambat perhitungan indeks.
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelatihan dengan jadwal ditentukan oleh pihak penyelenggara pelatihan

Setelah ditemukan faktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan maka diperlukan juga solusi permasalahan diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi pimpinan dan pegawai agar terjalin kerjasama untuk meningkatkan penilaian sistem merit.
2. Memastikan fasilitas dan aksesibilitas program yang relevan sesuai dengan kebutuhan ASN dan bidang pekerjaan.
3. Meningkatkan koordinasi agar terjalin komunikasi yang efektif sehingga dapat tercapai indeks survei yang diinginkan.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan Daerah perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Target Tujuan dan Sasaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Tujuan: Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas				
Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	*Formulasi Pengukuran:* Nilai capaian SAKIP berdasarkan hasil penilaian pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) APIP oleh Inspektorat. $Nilai\ SAKIP = \sum_{i=1}^{n} Skor\ aspek_i$ *Tipe Penghitungan:* Non kumulatif	B (70)	B (70)
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN	Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit	*Formulasi Pengukuran:* Jumlah aspek dan sub aspek dalam komponen penilaian mandiri sistem merit yang telah terpenuhi, yang terdiri atas aspek perencanaan kebutuhan pegawai, aspek pelaksanaan pengadaan pegawai, aspek pengembangan karir, aspek promosi, aspek mutasi dan rotasi, aspek manajemen kinerja, aspek penggajian, aspek penghargaan dan penegakan disiplin, aspek perlindungan dan pelayanan serta aspek ketersediaan sistem informasi. $Index = \sum_{i=1}^{n} Skor\ aspek_i$ *Tipe Penghitungan:* Non kumulatif	200	200

	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	*Formulasi Pengukuran:* Jumlah Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti atau mendapatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan formal baik diklat teknis, fungsional maupun struktural sesuai dengan kebutuhan dibagi dengan jumlah pegawai secara keseluruhan dikali seratus persen. $x = \frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}}{\textit{Jumlah total ASN}}$ x 100% *Tipe Penghitungan:* Kumulatif	85%	92%
	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	*Formulasi Pengukuran:* Jumlah Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti atau mendapatkan fasilitas diklat kepemimpinan atau diklat struktural sesuai dengan kebutuhan dalam jenjang jabatan baik diklat kepemimpinan tingkat IV, III, II maupun I. $x = \frac{\text{Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural}}{\textit{Jumlah total jabatan}}$ x 100% *Tipe Penghitungan:* Kumulatif	90%	90%
	Indeks Survei Kepuasan Masyarakat	*Formulasi Pengukuran:* Perkalian antara skor survey pelayanan kepegawaian dengan jumlah frekuensi dibagi dengan jumlah sampel keseluruhan. $IKM = \frac{\sum_{i=1}^{n} Skor_i \; x \; f_i}{\sum_{i=1}^{n} f_i}$ *Tipe Penghitungan:* Non kumulatif/kuantitatif	BB (80)	BB (80)

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2024 mengalami perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu "PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER" yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air

5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendukung pencapaian sasaran ke-3, yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah".

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
No	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**					
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				**18.614.341.735,00**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**				**26.456.516.206,00**	
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**B (78)**	**10.089.108.806,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**B (78)**	**11.510.505.806,00**	
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kc. Tanah Grogot**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu**	**100%**	**214.127.500,00**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kc. Tanah Grogot**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu**	**100%**	**282.006.000,00**	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	144.127.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	212.168.000,00	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kc. Tanah Grogot	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (termasuk sektoral dan CaLK)	12 dokumen	70.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kc. Tanah Grogot	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (termasuk sektoral dan CaLK)	12 Laporan	69.838.000,00	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
No	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kc. Tanah Grogot**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan PD**	**B (78)**	**6.878.612.958,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kc. Tanah Grogot**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan PD**	**B (78)**	**7.413.650.306,00**	
2.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	180 dokumen	204.864.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	180 Dokumen	204.864.000,00	
2.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 orang	6 .673.748.958,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 orang	7.208.786.306,00	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kc. Tanah Grogot**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian PD**	**B (78)**	**45.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kc. Tanah Grogot**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian PD**	**B (78)**	**44.964.000,00**	
3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kc. Tanah Grogot	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	60 orang	45.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kc. Tanah Grogot	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	60 orang	44.964.000,00	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kc. Tanah Grogot**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum PD**	**B (78)**	**678.502.400,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kc. Tanah Grogot**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum PD**	**B (78)**	**1.232.248.200,00**	
4.1	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kc. Tanah Grogot	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Paket	-	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kc. Tanah Grogot	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Paket	45.077.000,00	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
No	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kc. Tanah Grogot	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 paket	270.393.800,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kc. Tanah Grogot	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	31 paket	471.598.100,00	
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kc. Tanah Grogot	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	45 paket	68.068.600,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kc. Tanah Grogot	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60 paket	234.441.900,00	
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kc. Tanah Grogot	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	14.145.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kc. Tanah Grogot	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	32.750.200,00	
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	3.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	3.600.000,00	
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kc. Tanah Grogot	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 laporan	170.497.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kc. Tanah Grogot	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 laporan	222.397.000,00	
4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	152.398.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	222.384.000,00	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kc. Tanah Grogot**	**Persentase Ketersediaan BMD Penunjang Urusan PD**	**100%**	**1.591.283.500,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kc. Tanah Grogot**	**Persentase Ketersediaan BMD Penunjang Urusan PD**	**100%**	**2.322.196.900,00**	
5.1	Pengadaan Meubel	Kc. Tanah Grogot	Jumlah mebeleur yang diadakan	9 unit	306.556.800,00	Pengadaan Meubel	Kc. Tanah Grogot	Jumlah mebeleur yang diadakan	285 unit	373.672.000,00	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
No	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
5.2	Penggandaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kc. Tanah Grogot	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	48 unit	1.284.726.700,00	Penggandaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kc. Tanah Grogot	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	185 unit	1.948.524.900,00	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kc. Tanah Grogot**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan PD**	**100%**	**7.850.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kc. Tanah Grogot**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan PD**	**100%**	**13.516.000,00**	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kc. Tanah Grogot	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	10 Laporan	500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kc. Tanah Grogot	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	10 Laporan	550.000,00	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kc. Tanah Grogot	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	7.350.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kc. Tanah Grogot	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12.966.000,00	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kc. Tanah Grogot**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD**	**100%**	**138.695.100,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kc. Tanah Grogot**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD**	**100%**	**201.924.400,00**	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kc. Tanah Grogot	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit	6.200.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kc. Tanah Grogot	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	10.795.400,00	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
No	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kc. Tanah Grogot	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	51.030.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kc. Tanah Grogot	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	100.930.000,00	
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kc. Tanah Grogot	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	70.058.100,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kc. Tanah Grogot	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	60.309.000,00	
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kc. Tanah Grogot	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	11.407.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kc. Tanah Grogot	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7 unit	29.890.000,00	
B	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**Persentase Kesesuaian Jabatan Pegawai Berdasarkan Pendidikan**	**85%**	**6.598.882.127,00**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**Persentase Kesesuaian Jabatan Pegawai Berdasarkan Pendidikan**	**85%**	**10.027.655.500,00**	
			Persentase ASN Bekerja sesuai Kompetensi dan Kualifikasi dalam Jabatan	**85%**				**Persentase ASN Bekerja sesuai Kompetensi dan Kualifikasi dalam Jabatan**	**85%**		

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
No	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
			Persentase Pegawai Berkinerja Baik	**100%**				**Persentase Pegawai Berkinerja Baik**	**100%**		
1	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		**Persentase Formasi Kebutuhan Pegawai yang Terpenuhi Berdasarkan Jumlah Bezzeting/Formasi yang Diusulkan**	**80%**	**1.148.173.887,00**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		**Persentase Formasi Kebutuhan Pegawai yang Terpenuhi Berdasarkan Jumlah Bezzeting/Formasi yang Diusulkan**	**80%**	**2.142.711.600,00**	
			Persentase Data Kepegawaian yang Terupdate/diremajakan	**90%**				**Persentase Data Kepegawaian yang Terupdate/diremajakan**	**90%**		
1.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	2 dokumen	758.635.087,00	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	989.575.800,00	
1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	1 dokumen	50.160.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	1 dokumen	68.416.000,00	
1.3	Evaluasi Pemberhentian ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN	1 dokumen	47.190.000,00	Evaluasi Pemberhentian ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN	1 dokumen	94.068.000,00	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
No	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1.4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	5.655.400,00	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	621.442.000,00	
1.5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	175.440.400,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	219.218.000,00	
1.6	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	1 dokumen	70.822.000,00	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	1 dokumen	86.674.800,00	
1.7	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kc. Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	1 Laporan	40.271.000,00	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kc. Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	1 Laporan	63.317.000,00	
2	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Kc. Tanah Grogot**	**Persentase Penempatan ASN berdasarkan kualifikasi sesuai syarat jabatan**	**90%**	**1.053.875.000,00**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Kc. Tanah Grogot**	**Persentase Penempatan ASN yang sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi**	**90%**	**1.227.541.800,00**	
2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	1 dokumen	100.000.000,00	Pengelolaan Mutasi ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	1 dokumen	115.617.800,00	
2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	750 Dokumen	150.000.000,00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	750 Dokumen	308.016.000,00	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
No	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	1 dokumen	803.875.000,00	Pengelolaan Promosi ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	1 dokumen	803.908.000,00	
3	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Kc. Tanah Grogot**	**Persentase Penempatan ASN berdasarkan kualifikasi sesuai syarat jabatan**	**85%**	**3.418.298.590,00**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Kc. Tanah Grogot**	**Persentase Penempatan ASN berdasarkan kualifikasi sesuai syarat jabatan**	**85%**	**5.308.280.800,00**	
3.1	Pengelolaan Assesment Center	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	1 dokumen	830.956.640,00	Pengelolaan Assesment Center	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	1 dokumen	896.735.800,00	
3.2	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	1 dokumen	2.005.380.000,00	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	1 dokumen	3.689.355.000,00	
3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	78 orang	361.970.750,00	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	78 orang	449.278.000,00	
3.4	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN fungsional yang dibina	120 orang	150.091.200,00	Pembinaan Jabatan Fungsional	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN fungsional yang dibina	120 orang	193.522.000,00	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
No	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
3.5	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	50 orang	69.900.000,00	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	50 orang	79.390.000,00	
4	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Kc. Tanah Grogot**	**Persentase Aparatur berkinerja baik**	**80%**	**978.534.650,00**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Kc. Tanah Grogot**	**Persentase Aparatur berkinerja baik**	**100%**	**1.349.121.300,00**	
4.1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen	49.954.650,00	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen	49.917.000,00	
4.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen	164.197.000,00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen	197.839.000,00	
4.3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen	100.000.000,00	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen	122.932.000,00	
4.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	1200 orang	291.578.000,00	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	1200 orang	476.623.800,00	
4.5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN yang dierikan tanda jasa	400 orang	82.575.000,00	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN yang dierikan tanda jasa	400 orang	150.242.500,00	
4.6	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	1 laporan	210.000.000,00	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	1 laporan	209.975.000,00	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
No	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
4.7	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen pelayanan proses izin perceraian pegawai	150 Dokumen	30.230.000,00	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen pelayanan proses izin perceraian pegawai	150 Dokumen	30.230.000,00	
4.8	Evaluasi Disiplin ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN	1 Laporan	50.000.000,00	Evaluasi Disiplin ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN	1 Laporan	111.362.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan					**Pendidikan dan Pelatihan**					
C	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		**Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki Sertifikasi**	**85%**		**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		**Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki Sertifikasi**	**85%**		
1	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Kc. Tanah Grogot**	**Persentase Calon ASN dan ASN yang Telah Lulus Memenuhi Diklat Perjenjangan**	**95%**	**2.463.171.000,00**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Kc. Tanah Grogot**	**Persentase Calon ASN dan ASN yang Telah Lulus Memenuhi Diklat Perjenjangan**	**93%**	**4.918.354.900,00**	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
No	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1.1	Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Kc. Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	1 laporan	2.463.171.000,00	Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Kc. Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	1 laporan	4.918.354.900,00	

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sebelum		Sesudah				Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana
			Target Capaian Kinerja	Anggaran Murni	Target Capaian Kinerja	Anggaran Pergeseran	Target Capaian Kinerja	Anggaran Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang										
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**									
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu**									
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	**144.127.500,00**	5	**144.127.500,00**	5	**144.127.500,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (termasuk sektoral dan CaLK)	12	**70.000.000,00**	12	**70.000.000,00**	12	**70.000.000,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan PD**									
2.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	200	**204.656.150,00**	180	**204.656.150,00**	180	**204.656.150,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
2.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	33	**6.673.748.958,00**	37	**6.673.748.958,00**	37	**7.208.786.306,00**	**535.037.348,00**	**Tanah Grogot**	**APBD**
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian PD**									
3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	60	**45.000.000,00**	60	**45.000.000,00**	60	**45.000.000,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum PD**									
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	**270.393.800,00**	5	**219.422.700,00**	39	**219.422.700,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	45	**68.068.600,00**	62	**68.068.600,00**	62	**68.068.600,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	**14.145.000,00**	4	**14.145.000,00**	4	**14.145.000,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2	**3.000.000,00**	2	**3.000.000,00**	2	**3.000.000,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40	**170.497.000,00**	60	**160.241.000,00**	60	**160.241.000,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1	**152.398.000,00**	1	**152.398.000,00**	1	**152.398.000,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sebelum		Sesudah		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana
			Target Capaian Kinerja	Anggaran Murni	Target Capaian Kinerja	Anggaran Pergeseran	Target Capaian Kinerja	Anggaran Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan BMD Penunjang Urusan PD**									
5.1	Pengadaan Meubel	Jumlah mebeleur yang diadakan	9	**13.193.200,00**	185	**306.556.800,00**	285	**373.672.000,00**	**67.115.200,00**	**Tanah Grogot**	**APBD**
5.2	Penggandaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	48	**764.073.750,00**	73	**1.284.726.700,00**	185	**1.948.524.900,00**	**663.798.200,00**	**Tanah Grogot**	**APBD**
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan PD**									
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	10	**500.000,00**	10	**500.000,00**	10	**500.000,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	**7.350.000,00**	12	**7.350.000,00**	12	**7.350.000,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD**									
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4	**6.200.000,00**	1	**6.200.000,00**	1	**6.200.000,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	**51.030.000,00**	10	**51.030.000,00**	10	**51.030.000,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	**70.058.100,00**	1	**70.058.100,00**	1	**70.058.100,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7	**11.407.000,00**	7	**11.407.000,00**	7	**11.407.000,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
B.	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Kesesuaian Jabatan Pegawai Berdasarkan Pendidikan**									
		Persentase ASN Bekerja sesuai Kompetensi dan Kualifikasi dalam Jabatan									
		Persentase Pegawai Berkinerja Baik									
1.	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Formasi Kebutuhan Pegawai yang Terpenuhi Berdasarkan Jumlah Bezzeting/Formasi yang Diusulkan**									
		Persentase Data Kepegawaian yang									

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sebelum		Sesudah		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana
			Target Capaian Kinerja	Anggaran Murni	Target Capaian Kinerja	Anggaran Pergeseran	Target Capaian Kinerja	Anggaran Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Terupdate/diremajakan									
1.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	1	**758.635.087,00**	2	**719.121.719,00**	2	**719.121.719,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	1	**50.160.000,00**	1	**50.160.000,00**	1	**50.160.000,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
1.3	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN	1	**47.190.000,00**	1	**80.000.000,00**	1	**80.000.000,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
1.4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1	**5.655.400,00**	1	**79.016.960,00**	1	**79.016.960,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
1.5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	1	**175.440.400,00**	1	**175.440.400,00**	1	**175.440.400,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
1.6	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	1	**70.822.000,00**	1	**133.600.000,00**	1	**133.600.000,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
1.7	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	1	**40.271.000,00**	1	**40.271.000,00**	1	**40.271.000,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
2	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Penempatan ASN berdasarkan kualifikasi sesuai syarat jabatan**									
2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	1	**100.000.000,00**	1	**100.000.000,00**	1	**100.000.000,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	1000	**150.000.000,00**	750	**150.000.000,00**	750	**150.000.000,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	1	**803.875.000,00**	1	**500.000.000,00**	1	**500.000.000,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
3	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase Penempatan ASN berdasarkan kualifikasi sesuai syarat jabatan**									
3.1	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	1	**830.956.640,00**	1	**753.088.640,00**	1	**753.088.640,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
3.2	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	1	**2.005.380.000,00**	1	**1.666.968.758,00**	1	**1.666.968.758,00**		**Tanah Grogot**	**APBD**
3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan	100	**361.970.750,00**	78	**361.970.750,00**	78	**361.970.750,00**		**Tanah**	**APBD**

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sebelum		Sesudah			Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana
			Target Capaian Kinerja	Anggaran Murni	Target Capaian Kinerja	Anggaran Pergeseran	Target Capaian Kinerja	Anggaran Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		pendidikan lanjutan								Grogot	
3.4	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN fungsional yang dibina	1	**150.091.200,00**	120	**150.091.200,00**	120	**150.091.200,00**		Tanah Grogot	APBD
3.5	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	1	**69.900.000,00**	50	**69.900.000,00**	50	**69.900.000,00**		Tanah Grogot	APBD
4	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Aparatur berkinerja baik**									
4.1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1	**49.954.650,00**	1	**49.954.650,00**	1	**49.954.650,00**		Tanah Grogot	APBD
4.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1	**164.197.000,00**	1	**240.000.000,00**	1	**240.000.000,00**		Tanah Grogot	APBD
4.3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1	**100.000.000,00**	1	**100.000.000,00**	1	**100.000.000,00**		Tanah Grogot	APBD
4.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	1200	**358.273.000,00**	1200	**291.578.000,00**	1200	**291.578.000,00**		Tanah Grogot	APBD
4.5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	400	**81.000.000,00**	400	**81.000.000,00**	400	**81.000.000,00**		Tanah Grogot	APBD
4.6	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	1	**210.000.000,00**	1	**210.000.000,00**	1	**210.000.000,00**		Tanah Grogot	APBD
4.7	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen pelayanan proses izin perceraian pegawai	150	**30.230.000,00**	150	**40.000.000,00**	150	**40.000.000,00**		Tanah Grogot	APBD
4.8	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN	1	**50.000.000,00**	1	**50.000.000,00**	1	**50.000.000,00**		Tanah Grogot	APBD
C	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki Sertifikasi**									
1	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase Calon ASN dan ASN yang Telah Lulus Memenuhi Diklat Perjenjangan**									
1.1	Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	1	**2.463.171.000,00**	1	**2.463.171.000,00**	1	**2.463.171.000,00**		Tanah Grogot	APBD

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tanah Grogot, Juli 2024

Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Drs. SUWITO
Pembina Utama Muda
NIP. 196508081992031019

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub. Kegiatan.

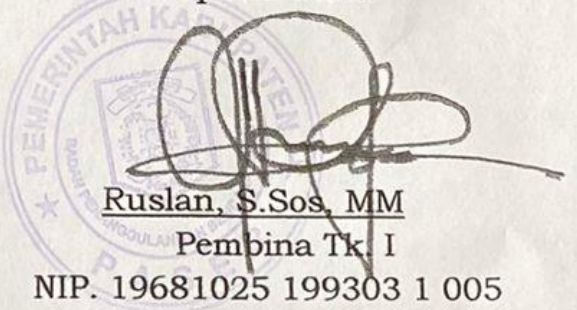
Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser merupakan Rencana Kerja periode satu tahunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser untuk tahun berikutnya, dimana dalam Renja Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun kedepan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja lima tahun kedepan yang terdapat dalam Renstra tahun 2021-2026.

Dalam Renja Perangkat Daerah akan menganalisa setiap tujuan dan sasaran yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dibuat dan kami berharap agar Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

Tana Paser, 02 Agustus 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Paser



Ruslan, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19681025 199303 1 005

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang.....1-2
1.2 Landasan Hukum.....3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....6
1.4 Sistematika Penyusunan.....7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 8
Tabel T-C. 29.....9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....18
Tabel T-C. 30.....19
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....23
Tabel T-C. 31.....24
2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....34
Tabel T-C. 32.....34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....36

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....38
3.3 Program dan Kegiatan.....39
Tabel T-C. 33.....40

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..51

BAB V PENUTUP.....54

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Paser. Berdasarkan diktum kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada daerah yang telah menetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021-2026, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagai bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan Tahun 2024.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan bagian dari dokumen Perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur disertai pagu indikatif dan pendanaannya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan

Renstra) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Dengan demikian Renja merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Seperti yang tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Paser, yang mana telah tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

"TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK BENCANA "

Untuk mewujudkan Visi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan misi dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Adapun Misi yang diemban antara lain :

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang handal dan tangguh dalam menghadapi Pra bencana, Tanggap darurat dan Pascabencana.
b. Memaksimalkan keterlibatan semua stake holder dalam penyelenggaraan bencana.
c. Mewujudkan pelayanan penanganan kedaruratan yang lebih baik dan cepat kepada masyarakat yang terdampak bencana dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan.
d. Mewujudkan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dan berkoordinasi dengan instansi terkait .

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 akan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan yang di dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ada beberapa landasan hukum yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 yang merubah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 tata cara perencanaan, pengendalian danevaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu satu tahun kedepan guna tercapainya efektifitas dan efisiensi sumber daya yang dimiliki dan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan program kegiatan dan Sub. Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta pemenuhan SPM .

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

a. Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi acuan kegiatan dan Sub. Kegiatan.
b. Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan dan Sub. Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana.
c. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan, dan alokasi sumber dana serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana.
d. Terlaksananya SPM yang menjadi Tanggung jawab Pemerintah Daerah khususnya bidang kebencanaan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan susunan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan uraian pengukuran kinerja kegiatan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran program, kegiatan dan Sub. Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah bertujuan untuk :

1. Peningkatan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Umpan balik peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.

Proses penyusunan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dilakukan melalui proses perhitungan pengukuran kinerja untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan penyebab kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan melalui capaian target kinerja.
Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C. 29

Adapun tabel rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai denganRenja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
											I		II									
1	*2*	*3*	*4*	5			6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	Meningkatnya Ketahanan daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Resiko Bencana	193.5		10,916,297,198	100	6,814,215,205	195	3,993,251,064.00		558,739,248.00		929,413,960.00	0	1488153208	-	37.27	100.0	8,302,368,413.00	51.68	76.05

		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif	100		2,492,361,817	30	1,066,442,420	15	Lokasi	823,630,230.00	2	68,490,000.00	3	118,947,863.00	5	187437863	33.33	22.76	35.0	1,253,880,283.00	35.00	50.31
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	100 %		350,000,000	0	-	1	Dokumen	300,000,000.00	-	13,160,000.00	-	30,222,863.00	0	43382863	-	14.46	-	43,382,863.00	0.00	12.40
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	75	Lokasi	1,353,300,000	30	771,267,420	15	Kegiatan	273,630,230.00	2	47,700,000.00	3	87,375,000.00	5	135075000	33.33	49.36	35.0	906,342,420.00	46.67	66.97
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	322	Anggota	558,921,000	140	295,175,000	102	Anggota	150,000,000.00	-	7,630,000.00	-	1,350,000.00	0	8980000	-	5.99	140.0	304,155,000.00	43.48	54.42
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang	100	%	230,140,817	0	-	63	Kawasan	100,000,000.00	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.00	0.00

			mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana																			
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Penanganan Bencana	100	%	6,435,161,606	99.29	4,910,091,922	100	%	2,161,362,926.00	17	362,212,500.00	29	625,252,863.00	45.68716115	987465363	45.69	45.69	145.0	5,897,557,285.00	144.98	91.65
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	100	%	4,572,271,960	6	3,441,979,462	12	Dokumen	1,173,248,320.00	-	220,782,500.00	-	355,850,000.00	#VALUE!	576632500	#VALUE!	49.15	#VALUE!	4,018,611,962.00	#VALUE!	87.89
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100	%	1,562,889,646	519	1,468,112,460	500	orang	988,114,606.00	632	141,430,000.00	42	269,402,863.00	674	410832863	134.80	41.58	1,193.0	1,878,945,323.00	1193.00	120.22
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase sistem dasar penanggulangan bencana	100	%	456,858,208	20	837,680,863	1	Dokumen	1,008,257,908.00	-	128,036,748.00	-	185,213,234.00	0	313249982	-	31.07	20.0	1,150,930,845.00	20.00	251.92

		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	50	Kecamatan	456,858,208	20	837,680,863	1	Dokumen	1,008,257,908.00	-	128,036,748.00	-	185,213,234.00	0	313249982	-	31.07	20.0	1,150,930,845.00	40.00	251.92
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	80	%	30,673,646,546	98.88	14,929,204,963	70	%	6,089,181,226.00	18	1,522,486,115.00	15	1,307,718,247.00	32.53545887	2830204362	46.48	46.48	131.4	17,759,409,325.00	164.27	57.90
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	25	Dokumen	324,180,587	100%	132,244,004	50	cc	70,115,204.00		3,082,020.00	7	28,225,629.00	7	31307649	14.00	44.65	8.0	163,551,653.00	32.00	50.45
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	110,134,910	33.00	50,239,852	16	Dokumen	40,000,000.00	-	-	4	24,445,907.00	4	24445907	25.00	61.11	37.0	74,685,759.00	370.00	67.81

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Dokumen	214,045,677	34.00	82,004,152	17	Laporan	30,115,204.00	-	3,082,020.00	3	3,779,722.00	3	6861742	17.65	22.78	37.0	88,865,894.00	246.67	41.52
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	27,963,966,122	91.873	13,993,933,656	100	%	5,552,269,080.00	27	1,505,563,315.00	22	1,218,483,907.00	49.061873 31	2724047222	49.06	49.06	140.9	16,717,980,878.00	140.93	59.78
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Dokumen	26,698,423,765	42	13,374,536,558	14	Bulan	5,337,269,080.00	3	1,469,453,315	3	1,152,719,907.00	6	2622173222	42.86	49.13	48.0	15,996,709,780.00	68.57	59.92
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	60	Dokumen	1,265,542,357	36	619,397,098	12	Laporan	215,000,000.00	3	36,110,000	3	65,764,000.00	6	101874000	50.00	47.38	42.0	721,271,098.00	70.00	56.99
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1,094,512,025	96	408,018,151	100	%	195,296,942.00	3	5,473,200.00	10	20,060,546.00	13.074319 41	25533746	13.07	13.07	109.1	433,551,897.00	109.07	39.61

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26	Jenis	290,931,180	0	-	1 Paket	3,000,000.00			-	1,500,000.00	0	1500000	-	50.00	-	1,500,000.00	0.00	0.52
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	198	Jenis	290,931,180	35	144,631,905	12 Paket	50,000,000.00	3	6,900,000.00	3	11,500,000.00	6	18400000	50.00	36.80	41.0	163,031,905.00	20.71	56.04
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	198	Jenis	290,931,180	0	-	11 Paket	54,747,902.00	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.00	0.00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	Jenis	57,070,497	36	20,866,886	12 Paket	10,000,000.00	-	-	2	2,929,600.00	2	2929600	16.67	29.30	38.0	23,796,486.00	253.33	41.70
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2500	Eksemplar	19,488,054	984	9,142,760	12 Dokumen	3,200,000.00	-	-	-	-	0	0	-	-	984.0	9,142,760.00	39.36	46.91

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87	Kali	427,831,969	36	378,008,505	12	Laporan	74,349,040.00	1	5,473,200.00	1	4,130,946.00	2	9604146	16.67	12.92	38.0	387,612,651.00	43.68	90.60
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadministrasian umum Berjalan Baik	100	%	270,176,163	80	207,496,020	100	%	87,500,000.00	10	8,367,580.00	30	26,488,165.00	39.83513714	34855745	39.84	39.84	119.8	242,351,765.00	119.84	89.70
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	785	lembar	5,100,000	168	1,256,000	12	Laporan	500,000.00	-	-	-	-	0	0	-	-	168.0	1,256,000.00	21.40	24.63
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	265,076,163	36	206,240,020	12	Laporan	87,000,000.00	3	8,367,580	3	26,488,165.00	6	34855745	50.00	40.06	42.0	241,095,765.00	350.00	90.95
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	100	%	991,711,649	100%	187,513,132	100	%	184,000,000.00	-	-	8	14,460,000.00	7.858695652	14460000	7.86	7.86	8.9	201,973,132.00	8.86	20.37
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	55	Unit	126,800,000	20	42,018,072	11	Unit	174,000,000.00	-	-	1	14,460,000.00	1	14460000	9.09	8.31	21.0	56,478,072.00	38.18	44.54

			Perizinannya																			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99	Unit	58,252,419	64	21,849,100	31 Unit	10,000,000.00	-	-	-	-	0	0	-	-	64.0	21,849,100.00	64.65	37.51
Rata-rata capaian kinerja (%)								66.98		10,082,432,290.00						4,318,357,570.00			87.24		#VALUE!	FALSE
Predikat kinerja								Rendah														

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 adalah sebesar **87,24%.** Dari 2 program , 8 Kegiatan, 21 Sub Kegiatan dengan 20 Sub Kegiatan capaian kinerja keuangannya **sangat memuaskan**, dan 1 Sub Kegiatan capaian kinerja keuangan **Kurang.**

Untuk Capaian /realisasi Kinerja 2 Program,8 Kegiatan, 21 Sub Kegiatan dapat terlihat dari tabel berikut:

Tabel rekapitulasi tingkat pencapaian kinerja berdasarkan realisasi keuangan Tahun 2023

Urutan	Rentang capaian Daya Serap Anggaran	Kategori Capaian	Jumlah Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan	%
I	Capaian ≥ 100	Sangat memuaskan	20	99,98
II	85% ≤capaian 100%	Sangat baik	0	95,35
III	70% ≤capaian <85%	Baik	0	70,79
IV	55% ≤capaian <70%	Cukup	0	55,66
V	Capaian <55 %	Kurang	1	14,21

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser dilakukan penilaian terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dalam pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penilaian disusun dengan melakukan pendekatan terhadap kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan sistem kinerja tersebut didasarkan pada input, output dan outcome, terhadap pelaksanaan kegiatan dalam mencapai visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Secara rinci capaian capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser disajikan pada tabel berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Paser

No.	Indikator	SPM /Standar nasional	IKK	Target Capaian	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	PENANGGULANGAN BENCANA											
1.	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang di legalisasi	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	-	100 %	-	1 dokumen	-	100 %	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2.	Persentase penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Paser (Perjenis Bencana) Rawan Bencana	-	10.000 warga		100 %	8.500 peserta/ warga	9.000 warga	-	-	-	9.000 warga
3.	Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	100 %	-	-	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %
4.	Persentase (%) aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	100 %	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %

5.	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	100 %	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %
6.	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	100 %	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %
7.	Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	Penyusunan Rencana Kontijensi	-	100 %	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %
8.	Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-		100 %	100 %
9.	Persentase Kecepatan Respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100%	100 %
10.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	-	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100%	100 %
11.	Jumlah logistik yang tersedia	Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	-	12 jenis	-	-	6 jenis	6 jenis	-	-	-	12 jenis

12.	Persentase petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	-	100%		-	100%		-	100%		-				-	100%		

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sebagai perangkat daerah yang menangani kebencanaan maka dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, harus memprogramkan kegiatan - kegiatan yang tidak hanya bersifat responsive (tanggap darurat) namun juga menitikberatkan pada preventif atau pencegahan (siaga bencana).
Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma penanggulangan kebencanaan yang diusung pemerintah saat ini yaitu penanganan bencana yang bersifat reaktif atau telah berubah menjadi pengelolaan bencana secara manajerial.

Beberapa isu - isu strategis yang terkait dengan penanggulangan bencana saat ini, antara lain :

1. Kebijakan penanggulangan bencana di daerah belum optimal;
2. Masih tingginya tingkat kerentanan bencana;
3. Masih lemahnya kapasitas masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana;
4. Masih minimnya informasi risiko bencana dan sistem informasi kebencanaan;
5. Belum efektifnya kesiapsiagaan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana;
6. Terbatasnya alokasi pembiayaan anggaran di sektor kebencanaan.

Meskipun perencanaan dalam hal penanganan bencana telah dilaksanakan untuk meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan, serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana, namun pada saat pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya penanganan yang kurang koordinatif.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan. Hasil Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 terlihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024
Kabupaten Paser

No.		Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
A.	**PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase SKPD yang terlayani		**6.318.086.426**		Persentase SKPD yang terlayani		**6.216.387.766**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	B	**68.800.000**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**B**	**70.115.204**
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	16 dokumen	23.200.000	Tana Paser	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	16 dokumen	40.000.000
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	45.600.000	Tana Paser	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	17 laporan	30.115.204

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah		**5.585.004.213**		Tingkat kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**5.571.781.080**
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tana Paser	Daftar Gaji dan Tunjangan PNS	14 bulan	5.323.004.213	Tana Paser	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orang/ bulan	5.337.269.080,00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Tana Paser	Laporan Keuangan perangkat daerah yang akuntabel	12	262.000.000	Tana Paser	Julah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	12 laporan	234.512.000,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Tingkat Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**228.658.213**		**Tingkat Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**195.296.942**
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tana Paser	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang diadakan	1 Bangunan	3.190.000	Tana Paser	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	3.000.000

2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Paser	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Unit	51.200.000	Tana Paser	Jumlah paket peralatan dan perlegkapan kantor yang disediakan	11 paket	79.912.802,00
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tana Paser	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	55.900.000	Tana Paser	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	58.505.340,00
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tana Paser	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	11.000.000	Tana Paser	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	10.000.000
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tana Paser	Jumlah bahan bacaan surat kabar/koran	500 Exemplar	3.885.000	Tana Paser	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 dokumen	3.200.000
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tana Paser	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	103.483.213	Tana Paser	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	73.349.040
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pengadministrasian umum Berjalan Baik**	**100 Persen**	**88.100.000**		Persentase Pengadministrasian umum Berjalan Baik	**100 Persen**	**123.500.000**

1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Paser	Materai yang disediakan	110 Lembar	1.100.000	Tana Paser	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	500.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tana Paser	Tersedianya belanja telepon, air dan listrik	12 bulan	87.000.000	Tana Paser	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	123.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan BMD**	**100 Persen**	**347.524.000**		Persentase Pemeliharaan BMD	**100 Persen**	**222.024.300**
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tana Paser	Jumlah kendaraan dinas operasioonal atau lapangan yang dipelihara dan dibayakan pajak dan perijinannya	11 unit	170.750.000	Tana Paser	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dna dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	212.024.300
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tana Paser	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	32 Unit	11.774.000	Tana Paser	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	31 unit	10.000.000

B.	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup penataan ruang dan penanggulangan bencana**	**100%**	**5.916.375.800**		**Sistem pencegahan dini yang berfungsi (SPP dan SOP)**	**100%**	**3.841.275.024**
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		**Prosentase layanan informasi Rawan Bencana**		**616.130.000**		**Meningkatnya Informasi kepada masyarakat tentang bencana**	**Tercapainya informasi bencana kepada masyarakat**	**0**
1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang di legalisasi	1 Dokumen	350.000.000	Kabupaten Paser	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang di legalisasi	1 Dokumen	0

2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Paser (Perjenis Bencana)	Kabupaten Paser	Meningkatkan informasi kepada masyarakat tentang daerah rawan bencana	8.500 peserta/warga	266.130.000	Kabupaten Paser	Jumlah warga negara terasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	8.500 orang	0
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		**Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif**	**Jumlah daerah yang rawan bencana 10 Kecamatan**	**3.189.579.800**		**Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif**	**Jumlah daerah yang rawan bencana 10 Kecamatan**	**823.630.230**
1.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana	1 Dokumen	0	Kabupaten Paser	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	0

2.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Paser	Kabupaten Paser	Jumlah peserta pelatihan	100 peserta	232.839.000	Kabupaten Paser	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	63 kawasan	100.000.000
3.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten	Tana Paser	Jumlah sarana dan Prasarana penanggulangan bencana	36 unit	1.780.040.800	Tana Paser	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	36 laporan	0
4.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tana Paser	Jumlah peralatan perlindungan kesiapsiagaan bencana (ASN dan PTT)	59 unit	446.700.000	Tana Paser	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	50 unit	0

5.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten /Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Monitoring Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Paser	15 Lokasi daerah rawan bencana	270.000.000	Kabupaten Paser	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) kabupaten/kota yang tertangani	15 kegiatan	273.630.230
6.	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	105 Anggota	100.000.000	Kabupaten Paser	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manjerialnya	102 orang	150.000.000
7.	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kabupaten Paser	Jumlah peta rawan bencana	1 Dokumen	200.000.000	Kabupaten Paser	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi	1 Dokumen	300.000.000
8.	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kabupaten Paser	Jumlah warga yang ikut pelatihan	100 peserta	160.000.000	Kabupaten Paser	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 orang	0
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Presentase warga negara yang mendapat penyelamatan dan evakuasi	100%	**1.932.346.000**		Presentase warga negara yang mendapat penyelamatan dan evakuasi	100%	**2.103.862.926**

1.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam	100%	933.200.000	Kabupaten Paser	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	12 dokumen	1.115.748.320
2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Persentase korban bencana yang dicari, ditolong dan dievakuasi	100%	310.000.000	Kabupaten Paser	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan di evakuasi per jenis kejadian bencana	500 orang	988.114.606
3.	Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jenis logistik yang tersedia	9 bahan pokok	514.146.000	Kabupaten Paser	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	500 orang	0
4.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Paser	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	175.000.000	Kabupaten Paser	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana kabupaten/kota	12 laporan	0
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			**100%**	**209.520.000**				**913.781.868**

1.	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota	Kabupaten Paser	Jumlah monitoring pasca bencana	10 kejadian	209.520.000	Kabupaten Paser	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasindan rekonstruksi pascabencana (R3P) provinsi yang dilegalkan	10 kegiatan	913.781.868
					12.265.662.226				**13.273.921.886**

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN MASYARAKAT

1. Usulan Program, Kegiatan Dan Sub. Kegiatan

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

TABEL T-C.3.2

Usulan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Program : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana**				
	Kegiatan : Pelatihan Jitu Pasna	**Provinsi**	**Peningkatan SDM Tim Jitu Pasna**	**Rp. 15.000.000**	
	Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Kabupaten/Kota	**Provinsi**	**Persentase aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan**	**Rp. 15.000.000**	**Dibutuhkan dan sangat penting untuk peningkatan SDM di Rehabilitasi dan Rekonstruksi,**
		Provinsi	**Peningkatan SDM**		

	Kegiatan : Kontijensi dan PRB			**Rp. 15.000.000**	**Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta Kedaruratan dan Logistik**
2	**Program : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Provinsi**	**Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB**	**Rp. 15.000.000**	
	Kegiatan : Pelatihan penyelamatan & Evakuasi	**Provinsi**	**Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB**	**Rp. 15.000.000**	**Dibutuhkan dan sangat penting untuk peningkatan SDM di Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta Kedaruratan dan Logistik**
	Kegiatan : Pelatihan Pusdalops	**Provinsi**	**Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB**	**Rp. 15.000.000**	
	Kegiatan : Pelatihan Logistik		**Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana**	**Rp. 15.000.000**	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser dalam renstranya memfokuskan pada kegiatan penguatan, kapasitas para pihak dalam penanggulangan bencana serta perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana terpadu. Sasaran yang akan dicapai BPBD Kabupaten Paser antara lain :

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana.
3. Meningkatkan kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana.
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mencapainya, namun tanpa bantuan pemerintah pusat terkait pendanaan, maka pemerintah kabupaten/kota akan kesulitan untuk memenuhinya. Kondisi inilah yang kemungkinan merupakan faktor penghambat pencapaian SPM yang menjadi tugas BPBD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang salah satunya mengatur tentang Pelayanan Dasar pada rsan pemerintah wajib yaitu urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang terdiri dari :

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Pelayanan kebencanaan tersebut diatas wajib diselenggarakan oleh pemerintah bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, yang telah ditentukan mengenai target/sasaran serta indikatornya.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah diikuti dengan diterbitkannya Permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub. Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten/Kota wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 adalah:

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan masalah pembangunan daerah. BPBD Kabupaten paser tahun 2024 dalam rangka mendorong tercapainya visi dan misi pembangunan kabupaten paser terutama misi ketiga Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah melalui peningkatan aksebilitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria specifik, measurabel,achievable, relevant, time bound dan continously improve (SMART-C) maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.
Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, peneta ruang dan penanggulangan bencana.
Indikatornya : Indeks Ketahanan Daerah

3.3 PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN

Program , kegiatan dan Sub. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024, sebanyak 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub. Kegiatan . Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C. 33

Rumusan Peubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Paser

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rek						Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub. Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) (Sebelum)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) (Sesudah)	Sumber Dana	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1						2	3	4	5	6		7	8	9
1	5					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah				**9.814.177.256**	**10.057.662.790**			**14.377.205.633**
1	5	1				**PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan**		**74%**	**5.996.251.272**	**6.216.387.766**		**74%**	**6.547.028.738**

1	5	1	2	1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		**B**	**70.115.204**	**70.115.204**		**B**	**75.000.000**
1	5	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Tana Paser	16 Dokumen	40.000.000	40.000.000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	16 Dokumen	40.000.000
1	5	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tana Paser	17 Laporan	30.115.204	30.115.204	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	17 Laporan	35.000.000
1	5	1	2	2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**5.459.339.126**	**5.571.781.080**		**100 Persen**	**5.981.773.038**
1	5	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Tana Paser	14 orang/bulan	5.244.339.126	5.337.269.080,00	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	14 orang/bulan	5.768.773.038

1	5	1	2	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD/dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Tana Paser	12 Laporan	215.000.000	234.512.000,00	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	12 Laporan	213.000.000
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tingkat Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**195.296.942**	**228.967.182**		**100 Persen**	**210.922.000**
1	5	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Tana Paser	1 Paket	3.000.000	3.000.000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	1 Paket	3.000.000
1	5	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tana Paser	11 Paket	54.747.902	79.912.802,00	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	11 Paket	60.222.000
1	5	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik	Tana Paser	12 Paket	50.000.000	58.505.340,00	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	12 Paket	55.000.000

							kantor yang disediakan							
1	5	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengganda an yang disediakan	Tana Paser	12 Paket	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	12 Paket	12.700.000
1	5	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tana Paser	12 Dokume n	3.200.000	3.200.000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	12 Dokumen	0
1	5	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelengg araan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	Tana Paser	12 Laporan	74.349.040	74.349.040	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	12 Laporan	80.000.000
1	5	1	2	8		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pengadmin istrasian umum Berjalan Baik**		**100 Persen**	**87.500.000**	**123.500.000**		***100 Persen***	**96.333.700**
1	5	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Tana Paser	12 Laporan	500.000	500.000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	12 Laporan	550.000

1	5	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan	Tana Paser	12 bulan	87.000.000	123.000.000,00	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	12 bulan	95.783.700
1	5	1	2	9		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan BMD**		**100 Persen**	**184.000.000**	**222.024.300**		**100 Persen**	**183.000.000**
1	5	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tana Paser	11 unit	174.000.000	212.024.300,00	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	17 unit	174.000.000
1	5	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tana Paser	31 unit	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	35 unit	10.000.000
1	5	3				**PENANGGULANGAN BENCANA**	Cakupan Layanan Penanggulangan Bencana	**Kab. Paser**	**100%**	**3.841.275.024**	**3.841.275.024**		**100%**	**7.614.376.895**

1	5	3	2	1		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Prosentase layanan informasi Rawan Bencana**		**70%**	**0**	**0**		**100%**	**292.743.000**
1	5	3	2	1	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Kab. Paser	10 Kec.	0	0		1 Dokumen	**215.800.000**
1	5	3	2	1	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Paser (Perjenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan		8.500 orang	0	0	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	8.500 orang	292.743.000

							Tempat Tinggalnya							
1	5	3	2	2		**Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif**		70 Persen	**823.630.230**	**823630230**		**70 Persen**	**3.761.598.867**
1	5	3	2	2	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Kab. Paser	1 dokumen	-	0	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	1 dokumen	250.000.000

1	5	3	2	2	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Paser	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kab. Paser	63 kawasan	100.000.000	100000000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	63 orang	269.665.000
1	5	3	2	2	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Kab. Paser	36 Dokumen	-	0	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	36 Dokumen	1.958.044.880
1	5	3	2	2	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Paser	50 unit	-	0	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	50 unit	491.370.000
1	5	3	2	2	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi	Kab. Paser	15 Dokumen	273.630.230	273630230	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	15 Dokumen	246.518.987

							Menimbulkan Bencana							
1	5	3	2	2	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kab. Paser	102 Orang	150.000.000	150000000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	102 Orang	150.000.000
1	5	3	2	2	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kab. Paser	1 Dokumen	300.000.000	300.000.000	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	1 Dokumen	220.000.000
1	5	3	2	2	10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kab. Paser	100 orang	-	0	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	100 orang	176.000.000
1	5	3	2	3		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Presentase warga negara yang mendapat penyelamatan dan evakuasi**	Kab. Paser	100%	2.103.862.926	2.103.862.926		100%	2.968.196.088

1	5	3	2	3	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Masyarakat yang tertimpa bencana	12 Dokumen	1.115.748.320	1.115.748.320	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	12 Dokumen	1.360.135.488
1	5	3	2	3	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Daerah bencana di Kab. Paser	500 orang	988.114.606	988.114.606	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	500 orang	850.000.000
1	5	3	2	3	4	Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Daerah yang kena bencana	500 orang	-	-	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	500 orang	565.560.600

1	5	3	2	3	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Daerah bencana di Kab. Paser	12 Laporan	-	-	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	12 Laporan	192.500.000
1	5	3	2	4		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		Kab. Paser	10	913.781.868	913.781.868			**591.838.940**
1	5	3	2	4	6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Kab. Paser	10 dokumen	913.781.868	913.781.868	Dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil	10 dokumen	591.838.940
							JUMLAH			**9.814.177.256**	**10.057.662.790**			**14.377.205.633**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan, program prioritas dan adanya rekapitulasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

Hasil perumusan program, kegiatan dan Sub. Kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

No.	Prioritas Daerah	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Ket
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan Penanggulangan Bencana	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**3.841.275.024,00**	
1.		**Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**0**	
		- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0	
		- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Paser (Perjenis Bencana)	0	
2.		**Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**823.630.230,00**	

	- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0
	- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Paser	100.000.000,00
	- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten	0
	- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0
	- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten /Kota	273.630.230,00
	- Sub. Kegiata Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000,00
	- Penyusunan Rencana Kontijensi	300.000.000,00
	- Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0
3.	**Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**2.103.862.926,00**
	- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.115.748.320,00
	- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	988.114.606,00
	- Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0

	- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	0
4.	**Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**913.781.868,00**
	- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	913.781.868,00
	Jumlah	**3.841.275.024,00**

Prakiraan maju berdasarkan indikator kinerja dan pagu indikatif yang telah disusun, dalam rumusan rencana program/kegiatan dan Sub. Kegiatan maka diharapkan pada tahun berikutnya dengan program , kegiatan dan Sub. Kegiatan yang telah ditetapkan dapat meningkat seiring dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser dalam hal penanggulangan bencana.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) sangat penting dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser adalah Program Tahunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program BPBD Kabupaten Paser. Dalam pelaksanaan program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) menjadi pedoman untuk peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran BPBD dan untuk memulihkan dampak buruk masyarakat yang terkena bencana menjadi lebih baik di Kabupaten Paser dan pemenuhan SPM tentang kebencanaan.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BPBD Kabupaten Paser agar menjadi lebih baik dimasa datang.

Demikian diharapkan rencana kinerja tahunan ini dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan dan semoga dapat bermanfaat serta mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Paser.

Tana Paser, Agustus 2024
Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Paser

Ruslan, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19681025 199303 1 005

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. PASER
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**9.837.526.296,00**	**10.082.432.290,00**	**10.209.638.830,00**	**372.112.534,00**							**10.235.187.153,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.837.526.296,00**	**10.082.432.290,00**	**10.209.638.830,00**	**372.112.534,00**							**10.235.187.153,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**9.837.526.296,00**	**10.082.432.290,00**	**10.209.638.830,00**	**372.112.534,00**							**10.235.187.153,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan**				**74 %**	**74 %**	**5.996.251.272,00**	**6.089.181.226,00**	**6.216.387.766,00**	**550.777.466,00**							**6.547.028.738,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*				B	B	70.115.204,00	70.115.204,00	70.115.204,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Aparatur dilingkungan BPBD Kab.Paser		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17 Laporan	17 Laporan	30.115.204,00	30.115.204,00	30.115.204,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	5.459.339.126,00	5.552.269.080,00	5.571.781.080,00	112.441.954,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Aparatur dilingkungan BPBD Kab.Paser		5.981.773.038,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	5.244.339.126,00	5.337.269.080,00	5.337.269.080,00	92.929.954,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			5.768.773.038,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	215.000.000,00	215.000.000,00	234.512.000,00	19.512.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			213.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	195.296.942,00	195.296.942,00	228.967.182,00	33.670.240,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Aparatur dilingkungan BPBD Kab.Paser		210.922.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	54.747.902,00	54.747.902,00	79.912.802,00	25.164.900,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			60.222.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	58.505.340,00	8.505.340,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			12.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	74.349.040,00	74.349.040,00	74.349.040,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pengadministrasian umum Berjalan Baik*				100 Persen	100 Persen	87.500.000,00	87.500.000,00	123.500.000,00	36.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Aparatur dilingkungan BPBD Kab.Paser		96.333.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			550.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	87.000.000,00	87.000.000,00	123.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			95.783.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan BMD*				100 Persen	100 Persen	184.000.000,00	184.000.000,00	222.024.300,00	38.024.300,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Aparatur dilingkungan BPBD Kab.Paser		183.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	174.000.000,00	174.000.000,00	212.024.300,00	38.024.300,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			174.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	31 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			9.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**cakupan layanan penanggulangan bencana Indeks Ketahanan Daerah Indeks Resiko Bencana Indeks Ketahanan Daerah**				**100 194,5 65 194.5 % . . .**	**100 194,5 194.5 65 % . . .**	**3.841.275.024,00**	**3.993.251.064,00**	**3.993.251.064,00**	**-153.116.609,00**							**3.688.158.415,00**	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif*				70 Persen	70 Persen	823.630.230,00	823.630.230,00	823.630.230,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat didaerah rawan bencana		886.183.987,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				102 Orang	102 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				15 Kegiatan	15 Kegiatan	273.630.230,00	273.630.230,00	273.630.230,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			246.518.987,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				63 Kawasan	63 Kawasan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			269.665.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Presentase Penanganan Bencana*				100 Persen	100 Persen	2.103.862.926,00	2.161.362.926,00	2.161.362.926,00	57.500.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat di daerah rawan bencana		2.210.135.488,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				12 Dokumen	12 Dokumen	1.115.748.320,00	1.173.248.320,00	1.173.248.320,00	57.500.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			1.360.135.488,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				500 Orang	500 Orang	988.114.606,00	988.114.606,00	988.114.606,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			850.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Prosentase sistem dasar penanggulangan bencana*				0 Persen	0 Persen	913.781.868,00	1.008.257.908,00	1.008.257.908,00	94.476.040,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat didaerah rawan bencana		591.838.940,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				10 Kegiatan	10 Kegiatan	913.781.868,00	1.008.257.908,00	1.008.257.908,00	94.476.040,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			591.838.940,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H								**2.839.341.450.063,00**	**4.131.878.000.000,00**	**5.127.358.823.156,00**	**2.288.017.373.093,00**							**2.385.613.323.724,30**	

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Telp/Fax. 0543-22469 Tana Paser 76211

E-mail: bpbdpaser@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR : 050/ /BPBD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA PELAKSANA,

Menimbang :

a. bahwa menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024;

c. Tim sebagaimana dimaksud di tetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser dengan komposisi dan personaliase bagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Tim Penyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Renja PD

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana Paser

Pada Tanggal : Februari 2024

Kepala Pelaksana,

Ruslan, S.Sos, MM
Pembina Tk.I / IV b
NIP 19681025 199303 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nomor : **050/ /BPBD/2024**
Tanggal : **Februari 2024**
Tentang : **Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024**

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024

Jabatan Dalam Tim	Nama / Jabatan
Pengarah	: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser
Penanggung jawab	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Anggota	:

1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi
4. Hermansyah
5. Marianti, A. Md
6. Yossy Yulianingsih, S.Sos
7. Nor Octavia Saputri

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kab. Paser

Ruslan, S.Sos, MM
Pembina Tk.I / IV b
NIP 19681025 199303 1 005

Nomor : 050/ /BPBD/2024

Tanggal : Februari 2024

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024

1. Pengarah, yaitu:

    a. Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 202**4**, baik dalam hal persiapan, mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 202**4**;
    b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim kelompok kerja Renja Tahun 202**4**;
    c. Menyampaikan laporan kegiatan perkembangan penyusunan Renja melalui Sekretaris BPBD Kabupaten Paser.

1. Penanggungjawab, yaitu:
    a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan Tim Penyusun Renja BPBD Kabupaten Paser Tahun 202**4**;
    b. Membantu Penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Renja Tahun 202**4** BPBD;
    c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun kepada Kepala BPBD Kabupaten Paser.

2. Ketua, yaitu:
    a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusuna Renja

b. Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim penyusun Renja Tahun 2024 BPBD;
c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun kepada Penanggungjawab penyusunan Renja BPBD Kabupaten Paser

3. Anggota, yaitu:
   a. Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah (PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser;
   b. Melakukan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser;
   c. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser;
   d. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
   e. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan;
   f. Merumuskan program prioritas;
   g. Menyesuaikan dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan.

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

Ruslan, S.Sos, MM
Pembina Tk.I / IV.b
NIP 19681025 199303 1 005

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud Dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Denga Triwulan II 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18
2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 20

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 22
3.1 Tujuan dan Sasaran 22
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 23

BAB IV PENUTUP 36

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra 2022 s/d 2023 7

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kab. Paser 19

Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 21

Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 29

Tabel 5 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas PembangunTahun 2024 33

Tabel 6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja.

Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara keseluruhan terdiri dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir, dan Penetapan Ranwal Renja. Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, dimana Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke tiga dalam periode Renstra Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode dalam 1 (satu) tahun, yang

bertujuan untuk merencanakan pembangunan tahunan perangkat daerah, memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Pasal 4 ayat (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Inspektorat Daerah Kabupaten Daerah, hasil pengendalian pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Ranhir Renja Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2024, dalam upaya percepatan pencapaian

indikator kinerja Inspektorat Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser antara lain :

1. Untuk mengoptimlkan peran, fungsi dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

1.1 Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, proses penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah kabupaten Paser, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Inspektorat Daerah kabupaten Paser, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024.

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat :

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikanTelaahan terhadap Kebijakan Nasional;

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat :

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 1

Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
							Triwulan Ke 1		Triwulan Ke 2			
1	2	3	4	7			8		9		12	
				K		RP	K	RP	K	RP	K	RP
	INSPEKTORAT DAERAH					**23.815.248.262**		**3.407.284.042**		**6.209.356.640**		**9.616.640.682**
1	**Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel**		**Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat**	**B (70)**	**Nilai**	**17.781.950.662**	**67,89**	**2.936.623.085**	**0**	**5.739.376.842**	**67,89**	**8.675.999.927**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**76**	**Persen**	**17.781.950.662**	**0**	**2.936.623.085**	**0**	**5.739.376.842**	**0**	**8.675.999.927**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**228.630.000**	**38**	**25.276.280**	**12**	**42.109.600**	**50**	**67.385.880**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	63.036.000	4	9.014.400	0	10.640.000	4	19.654.400
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	4	Laporan	39.024.000	1	0	1	9.119.600	2	9.119.600

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
							Triwulan Ke 1		Triwulan Ke 2			
1	2	3	4	7			8		9		12	
			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	126.570.000	1	16.261.880	1	22.350.000	2	38.611.880
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**14.455.082.162**	**53**	**2.445.014.536**	**40**	**5.216.442.746**	**93**	**7.661.457.282**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/ Bulan	14.246.943.062	63	2.409.156.736	63	5.176.754.996	63	7.585.911.732
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200	Dokumen	153.269.100	75	35.857.800	104	20.083.200	179	55.941.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	54.870.000	0	0	0	19.604.550	0	19.604.550
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**35.268.000**	**10**	**0**	**10**	**0**	**20**	**0**
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	4	Laporan	6.000.000	1	0	1	0	2	0

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
							Triwulan Ke 1		Triwulan Ke 2			
1	2	3	4	7			8		9		12	
			Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Penatausahaan BMD SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan	29.268.000	0	0	0	0	0	0
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**100**	**Persen**	**1.263.322.400**	**0**	**311.562.649**	**66**	**193.632.965**	**66**	**505.195.614**
		Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	50.615.400	0	9.539.000	0	18.564.000	0	28.103.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	43.607.000	0	0	0	0	0	0
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64	Orang	1.169.100.000	0	302.023.649	46	175.068.965	46	477.092.614

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
							Triwulan Ke 1		Triwulan Ke 2			
1	2	3	4	7			8		9		12	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**1.133.310.000**	**0**	**92.522.700**	**9**	**174.784.691**	**9**	**267.307.391**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	0	0	0	0	0	0	0
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	1	Paket	332.231.300	0	0	0	0	0	0
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	248.485.300	0	28.720.000	0	42.610.000	0	71.330.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	81.929.000	0	0	0	0	0	0
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240	Dokumen	5.058.600	0	0	10	1.125.000	10	1.125.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Laporan	47.493.800	0	0	0	8.580.000	0	8.580.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	418.112.000	0	63.802.700	25	122.469.691	25	186.272.391
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**222.511.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
							Triwulan Ke 1		Triwulan Ke 2			
1	2	3	4	7			8		9		12	
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	198.986.700	0	0	0	0	0	0
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	23.524.800	0	0	0	0	0	0
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**100**	**Persen**	**244.517.800**	**0**	**29.004.420**	**33**	**85.511.640**	**33**	**114.516.060**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	244.517.800	0	29.004.420	4	85.511.640	4	114.516.060
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**199.308.800**	**0**	**33.242.500**	**67**	**26.895.200**	**67**	**60.137.700**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	199.308.800	0	33.242.500	4	26.895.200	4	60.137.700
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	0	Unit	0	0	0	0	0	0	0

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
							Triwulan Ke 1		Triwulan Ke 2			
1	2	3	4	7			8		9		12	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	0	Unit	0	0	0	0	0	0	0
2	**Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan**		**Tingkat Maturitas SPIP**	**3 (3.000)**	**Level**	**6.033.297.600**	**0**	**470.660.957**	**0**	**469.979.798**	**0**	**940.640.755**
			Tingkat Kapabiltas APIP	**3 (3.000)**	**Level**		**0**		**0**		**0**	**0**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Indeks Penerapan Manajemen Resiko**	**3,5**	**Persen**	**5.099.143.300**	**3,2**	**416.780.685**		**373.545.626**	**3,2**	**790.326.311**
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Disusun Tepat Waktu**	**100**	**Persen**	**4.131.633.300**	**7**	**294.816.611**	**11**	**292.625.626**	**18**	**587.442.237**
			Persentase Temuan Eksternal Yang Ditindaklanjuti	**91**	**Persen**		**0**		**90,60**		**90,60**	**0**
			Persentase Temuan Internal yang Ditindaklanjuti	**56**	**Persen**		**0**		**0**		**0**	**0**
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	139	Laporan	846.420.000	0	52.482.275	2	98.164.376	2	150.646.651
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	146	Laporan	862.642.000	1	28.730.000	37	79.130.000	38	107.860.000
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3	Laporan	335.484.000	3	89.753.596	0	17.850.000	3	107.603.596

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
							Triwulan Ke 1		Triwulan Ke 2			
1	2	3	4	7			8		9		12	
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	23	Laporan	798.706.000	20	95.581.900	0	49.958.072	20	145.539.972
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	55	Laporan	729.335.300	0	0	0	14.900.000	0	14.900.000
		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yangTerbentuk	1	Kesepakatan	114.460.000	1	0	0	0	1	0
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	Dokumen	444.586.000	0	28.268.840	1	32.623.178	1	60.892.018
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Disusun Tepat Waktu**	**100**	**Persen**	**967.510.000**	**22**	**121.964.074**	**13**	**80.920.000**	**34**	**202.884.074**
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	32	Laporan	967.510.000	7	121.964.074	4	80.920.000	11	202.884.074
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB**	**80**	**Persen**	**934.154.300**		**53.880.272**		**96.434.172**	**0**	**150.314.444**
			Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi pelaksanaan RB	**80**	**Persen**						**0**	**0**

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
							Triwulan Ke 1		Triwulan Ke 2			
1	2	3	4	7			8		9		12	
			dengan peringkat minimal B									
		Pendampingan dan Asistensi	**Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi**	**100**	**Persen**	**934.154.300**	**98**	**53.880.272**	**1**	**96.434.172**	**99**	**150.314.444**
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41	Perangkat Daerah	110.424.000	41	28.560.000	0	0	41	28.560.000
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42	Perangkat Daerah	422.568.000	42	9.636.100	0	80.750.000	42	90.386.100
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	Kegiatan	387.902.300	0	15.684.172	0	15.684.172	0	31.368.344
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1	Perangkat Daerah	13.260.000	0	0	1	0	1	0

Berdasarkan Tabel 1 diatas Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 40,46%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.616.640.682 (sembilan milyar enam ratus enam belas juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 23.815.248.262 (dua puluh tiga triliun delapan ratus lima belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) atau sebesar 40,38%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sebesar 35,64% dengan predikat kinerja sangat rendah.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 1 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 8 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 4 indikator capaian kinerja 0%-50% = 23 indikator

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok yaitu:

"Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah".

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat daerah juga menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Tingkat Maturitas SPIP;
2. Tingkat Kapabilitas APIP; dan
3. Nilai Evaluasi SAKIP.

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	71	71,25	71,5	71,75	72	71,51	N/A
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.309)	N/A
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	N/A
Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	B (65)	B (68)	B (70)	BB (70,5)	BB (71)	B (67,89)	N/A

Berdasarkan Tabel 2 di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)”, pada Tahun 2023 telah melampaui target, dimana realisasinya

sebesar 71,51 dari target sebesar 71,25 dengan capaian kinerja sebesar 100,36%, sedangkan pada Tahun 2024 belum dilaksanakan penilaian;

b. Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan” memiliki 2 indikator kinerja yang pertama yaitu “Tingkat Maturitas SPIP”, pada Tahun 2023 telah melampaui target, dimana realisasinya sebesar Level 3 (3.309) dari target sebesar Level 3 (3.000) dengan capaian kinerja sebesar 110% dan indikator kinerja yang kedua yaitu “Tingkat Kapabilitas APIP” pada Tahun 2023 telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar Level 3 (3.000) dari target sebesar Level 3 (3.000) dengan capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan pada Tahun 2024 belum dilaksanakan penilaian; dan

c. Sasaran 2 “Meningkatnya Pengelolaan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat”, pada Tahun 2023 belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar B (67,89) dari target sebesar B (68) dengan capaian kinerja sebesar 99,83%, sedangkan pada Tahun 2024 belum dilaksanakan penilaian.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. SDM dan APIP yang berkompeten dan telah bersertifikasi;
2. Koordinasi pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik;dan
3. Koordinasi internal di bidang maupun antar struktural berjalan lancer.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya :

1. Adanya kegiatan mandatori dari Pusat yang mengharuskan pelaksanaan kegiatan menggeser kegiatan yang sudah dijadwalkan pada PKPT;
2. Kurangnya SDM Pengawasan serta SDM yang melaksanakan ketugasan administrasi (JFU), sehingga pekerjaan administrasi juga dihandle oleh beberapa JFT;dan

3. Belum memadainya saran prasarana penunjang pengawasan.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengawasan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3

Target Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi	Target Renja 2024
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Hasil Survei dari 3 sumber data, yaitu : Hasil Survei dari 3 sumber data, yaitu : 1. Sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD; 2. Sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan 3. tugas dan fungsi K/L/PD;dan Sumber ekspert atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman.	71,5
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Laporan Hasil Evaluasi dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur	Level 3 (3.000)
	Tingkat Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur	Level 3 (3.000)
Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Paser	B (70)

Memperhatikan tabel 3 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada

APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu ““PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER”” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke-3 yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Paser

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Kab. Paser	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	71,75 (Nilai)	23.315.248.262	Kab. Paser	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	71,75 (Nilai)	29.665.248.262	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Kab. Paser	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	level 3		Kab. Paser	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	level 3		
	Kab. Paser	Tingkat Kapabiltas APIP	level 3		Kab. Paser	Tingkat Kapabiltas APIP	level 3		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Paser	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	3,9 (Nilai)	4.828.133.300	Kab. Paser	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	3,9 (Nilai)	6.210.181.300	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Paser	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Disusun Tepat Waktu	100%	3.878.983.300	Kab. Paser	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Disusun Tepat Waktu	100%	5.177.851.300	
	Kab. Paser	Persentase Temuan Eksternal Yang Ditindaklanjuti	92%		Kab. Paser	Persentase Temuan Eksternal Yang Ditindaklanjuti	92%		
	Kab. Paser	Persentase Temuan Internal yang Ditindaklanjuti	58%		Kab. Paser	Persentase Temuan Internal yang Ditindaklanjuti	58%		
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	135 Laporan	793.380.000	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	135 Laporan	949.372.000	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	140 Laporan	817.252.000	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	140 Laporan	992.282.000	
Reviu Laporan Kinerja	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	291.284.000	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	410.060.000	

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Reviu Laporan Keuangan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	20 Laporan	510.526.000	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	20 Laporan	676.894.000	
Pengawasan Desa	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	50 Laporan	907.495.300	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	50 Laporan	729.335.300	
Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Paser	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	114.460.000	Kab. Paser	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	355.107.000	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Laporan	444.586.000	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Laporan	1.064.801.000	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Paser	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Disusun Tepat Waktu	100%	949.150.000	Kab. Paser	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Disusun Tepat Waktu	100%	1.032.330.000	
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	949.150.000	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	1.032.330.000	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Paser	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	85%	889.712.300	Kab. Paser	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	85%	1.655.184.700	
	Kab. Paser	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	85%		Kab. Paser	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	85%		

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pendampingan dan Asistensi	Kab. Paser	Persentase Pelaksanaan Hasil Pendampingan dan Asistensi	100%	889.712.300	Kab. Paser	Persentase Pelaksanaan Hasil Pendampingan dan Asistensi	100%	1.655.184.700	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat Daerah	79.824.000	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat Daerah	110.424.000	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 Perangkat Daerah	349.808.000	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 Perangkat Daerah	437.528.000	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Paser	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	444.780.300	Kab. Paser	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	1.008.502.700	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	15.300.000	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	98.730.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tana Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80%	17.597.402.662	Tana Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80%	21.799.882.262	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan	100%	224.430.000	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan	100%	236.857.800	

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	59.670.000	Tana Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	63.036.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	39.024.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	39.024.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	125.736.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	134.797.800	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	14.455.082.162	Tana Paser	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	14.847.875.162	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tana Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	14.246.943.062	Tana Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/Bulan	14.639.736.062	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200 Dokumen	153.269.100	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200 Dokumen	153.269.100	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	54.870.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	54.870.000	

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	35.268.000	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	35.268.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.000.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	29.268.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	29.268.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	1.263.322.400	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	2.822.103.400	
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tana Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.615.400	Tana Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	101.357.400	

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tana Paser	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	43.607.000	Tana Paser	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	68.896.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tana Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	1.169.100.000	Tana Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63 Orang	2.651.850.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	952.962.000	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.953.995.400	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	1 Paket	332.231.300	Tana Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	8 Paket	1.017.311.700	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	247.805.300	Tana Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	284.305.300	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tana Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	54.500.000	Tana Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	81.929.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tana Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	5.058.600	Tana Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.058.600	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tana Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	47.493.800	Tana Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	47.493.800	

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	265.873.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	517.897.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tana Paser	Persentaase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	222.511.500	Tana Paser	Persentaase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.411.175.900	
Pengadaan Mebel	Tana Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	198.986.700	Tana Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	150.745.100	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tana Paser	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	23.524.800	Tana Paser	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.260.430.800	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	244.517.800	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	293.297.800	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	244.517.800	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	293.297.800	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	199.308.800	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	199.308.800	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tana Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	199.308.800	Tana Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	199.308.800	

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Kab. Paser	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	71,75 (Nilai)	29.665.248.262
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Kab. Paser	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	level 3	
	Kab. Paser	Tingkat Kapabiltas APIP	level 3	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Paser	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	3,9 (Nilai)	6.210.181.300
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Paser	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Disusun Tepat Waktu	100%	5.177.851.300
	Kab. Paser	Persentase Temuan Eksternal Yang Ditindaklanjuti	92%	
	Kab. Paser	Persentase Temuan Internal yang Ditindaklanjuti	58%	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	135 Laporan	949.372.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	140 Laporan	992.282.000
Reviu Laporan Kinerja	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	410.060.000
Reviu Laporan Keuangan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	20 Laporan	676.894.000
Pengawasan Desa	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	50 Laporan	729.335.300
Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Paser	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	355.107.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan	4 Laporan	1.064.801.000

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Paser	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Disusun Tepat Waktu	100%	1.032.330.000
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	1.032.330.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Paser	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	85%	1.655.184.700
	Kab. Paser	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	85%	
Pendampingan dan Asistensi	Kab. Paser	Persentase Pelaksanaan Hasil Pendampingan dan Asistensi	100%	1.655.184.700
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat Daerah	110.424.000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 Perangkat Daerah	437.528.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Paser	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	1.008.502.700
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	98.730.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tana Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80%	21.799.882.262
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	236.857.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	63.036.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	39.024.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	134.797.800

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	14.847.875.162
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tana Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/Bulan	14.639.736.062
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200 Dokumen	153.269.100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	54.870.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	35.268.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	29.268.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	2.822.103.400
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tana Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	101.357.400
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tana Paser	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	68.896.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tana Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63 Orang	2.651.850.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.953.995.400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	8 Paket	1.017.311.700
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	284.305.300
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tana Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	81.929.000

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tana Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.058.600
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tana Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	47.493.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	517.897.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tana Paser	Persentaase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.411.175.900
Pengadaan Mebel	Tana Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	150.745.100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tana Paser	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.260.430.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	293.297.800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	293.297.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	199.308.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tana Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	199.308.800

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

5.1 Catatan Penting

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi belanja daerah diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD inspektorat.

Dalam hal ini ketersedian anggaran pada Inspektorat Daerah kabupaten Paser belum mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga

kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

5.3 Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tana Paser, Agustus 2023

INSPEKTUR DAERAH,

Hj. DHARNI HARYATI, SE. M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720126 199703 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

RENJA PERUBAHAN 2024



DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Sudirman 76251
email : dkpuspaser@gmail.com

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser Tahun 2021–2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); (khusus 8 OPD yg menangani SPM)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal: (khusus 8 OPD yg menangani SPM)
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

27. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024. (dimasukkan pada Rancangan Akhir);
28. Peraturan Bupati Paser Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser;
29. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target (jika ada)

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Pada bagian ini juga berisikan tanda tangan Kepala OPD.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Renja s.d Triwulan II

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah		**Kategori evaluasi SAKIP dari Inspektorat**	A	9.950.860.529,00	**BB**	7.741.290.795,00	**BB**	**9.008.111.856,00**		**1.793.915.486,00**	**0**	**4.186.115.157,00**					**BB**	5.980.030.643,00	BB	13.721.321.438,00	**0,88**	**1,38**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**80**	**9.950.860.529,00**	**98,12**	**7.741.290.795,00**	**72**	**9.008.111.856,00**		**1.793.915.486,00**	**0**	**4.186.115.157,00**					-	**5.980.030.643,00**	98,12	13.721.321.438,00	**1,23**	**1,38**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu**	**100**	**142.494.076,00**	179,17	**63.962.440,00**	**100**	**117.763.718,00**	**37,50**	**32.451.600,00**	**29,17**	**89.373.200,00**					**66,67**	**121.824.800,00**	245,83	185.787.240,00	**2,46**	**1,30**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	125.946.166,00	12	24.050.040,00	10	104.087.740,00	3	27.951.600,00	3	75.698.200,00					6	103.649.800,00	18	127.699.840,00	**1,80**	**1,01**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	3.749.267,00	12	24.387.200,00	12	3.098.588,00	3	0	3	3.098.000,00				6	3.098.000,00	18	27.485.200,00	**1,50**	**7,33**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	12.798.642,00	**2**	15.525.200,00	2	10.577.390,00	-	4.500.000,00	1	10.577.000,00				1	15.077.000,00	3	30.602.200,00	**1,50**	**2,39**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Presentase kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan**	**100**	**8.961.855.084,00**	100,00	**6.966.015.642,00**	**100**	**7.215.235.075,00**	**8,82**	**1.597.558.746,00**	**71,43**	**3.753.587.361,00**				**80,25**	**5.351.146.107,00**	180,25	12.317.161.749,00	**1,80**	**1,37**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	8.555.898.795,00	12	6.550.271.545,00	12	6.869.292.687,00	3	1.500.765.580,00	3	3.572.918.612,00				6	5.073.684.192,00	18	11.623.955.737,00	**1,50**	**1,36**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	35.599.100,00	3	105.099.897,00	1	29.420.743,00	-	22.152.042,00	1	23.352.942,00				1	45.504.984,00	4	150.604.881,00	**4,00**	**4,23**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	3.375.629,00	1	2.828.000,00	1	2.789.776,00	-	0	1	2.756.800,00				1	2.756.800,00	2	5.584.800,00	**2,00**	**1,65**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17	359.162.534,00	5	306.326.600,00	18	307.269.864,00	-	74.641.124,00	17	148.097.507,00					17	222.738.631,00	22,00	529.065.231,00	**1,29**	**1,47**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	4.694.637,00	5	1.164.800,00	2	3.879.865,00	-	0	2	3.879.500,00					2	3.879.500,00	7	5.044.300,00	**3,50**	**1,07**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	3.124.389,00	**5**	324.800,00	1	2.582.140,00	-	0	1	2.582.000,00					1	2.582.000,00	6	2.906.800,00	**6,00**	**0,93**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100**	**308.473.671,00**	100,00	**284.523.351,00**	**100**	**292.936.919,00**		**115.758.586,00**	**41,88**	**218.246.580,00**					**41,88**	**334.005.166,00**	141,88	618.528.517,00	**1,42**	**2,01**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	10.307.264,00	1	1.390.000,00	20	8.518.400,00	-	0	13	5.673.400,00					13	5.673.400,00	14	7.063.400,00	**0,70**	**0,69**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90	16.552.822,00	13	5.033.600,00	90	13.680.018,00	-	5.669.900,00	63	9.663.700,00					63	15.333.600,00	76	20.367.200,00	**0,84**	**1,23**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46	99.907.891,00	33	63.084.600,00	46	82.568.505,00	-	20.603.800,00	22	46.005.500,00					22	66.609.300,00	55	129.693.900,00	**1,20**	**1,30**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20000	23.208.158,00	4200	8.034.400,00	20000	19.180.296,00	-	0	8336	7.994.500,00					8336	7.994.500,00	12536	16.028.900,00	**0,63**	**0,69**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	12	3.853.145,00	12	1.800.000,00	12	3.184.418,00	-	300.000,00	4	750.000,00					4	1.050.000,00	16	2.850.000,00	**1,33**	**0,74**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	154.644.391,00	30	205.180.751,00	20	165.805.282,00	-	89.184.886,00	16	148.159.480,00					16	237.344.366,00	46	442.525.117,00	**2,30**	**2,86**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100**	**134.469.452,00**	**40,75**	**51.200.800,00**	**100**	**707.673.900,00**	**-**	**0**	**36,36**	**37.760.000,00**					**36,36**	**37.760.000,00**	77,11	88.960.800,00	**0,77**	**0,66**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	134.469.452,00	5	51.200.800,00	11	707.673.900,00	-	0	4	37.760.000,00					4	37.760.000,00	9	88.960.800,00	**0,82**	**0,66**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100**	**285.965.053,00**	**105,36**	**93.276.893,00**	**100**	**236.334.754,00**	**2,19**	**21.962.259,00**	**93,43**	**44.283.941,00**					**95,62**	**66.246.200,00**	200,98	159.523.093,00	**2,01**	**0,56**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	125	1.206.079,00	106	1.208.400,00	125	996.759,00	-	0	125	995.600,00					125	995.600,00	231	2.204.000,00	**1,85**	**1,83**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	284.758.974,00	**12**	92.068.493,00	12	235.337.995,00	3	21.962.259,00	3	43.288.341,00					6	65.250.600,00	18	157.319.093,00	**1,50**	**0,55**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jumlah aset yang tersedia dalam keadaan baik**	**100**	**117.603.193,00**	129,63	**282.311.669,00**	**100**	**438.167.490,00**		**26.184.295,00**	**56,00**	**42.864.075,00**					**56,00**	**69.048.370,00**	185,63	351.360.039,00	**1,86**	**2,99**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	66.884.480,00	5	59.191.514,00	3	55.276.430,00		20.694.295,00	3	28.024.075,00					3	48.718.370,00	8	107.909.884,00	**2,67**	**1,61**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	27.169.304,00	10	7.065.705,00	13	22.453.970,00	-	0	6	9.350.000,00					6	9.350.000,00	16	16.415.705,00	**1,23**	**0,60**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	16.250.046,00	**20**	216.054.450,00	9	360.437.090,00	-	5.490.000,00	5	5.490.000,00					5	10.980.000,00	25	227.034.450,00	**2,78**	**13,97**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Meningkatnya minat baca masyarakat		**Indeks minat baca**	**2,5**	**925.577.400,00**	**4,78593548 9**	**8.115.666.170,00**	**1,75**	**1.139.108.984,00**	-	**177.645.903,00**	**1,91**	**585.284.315,00**					**1,91**	**762.930.218,00**	6,70	8.878.596.388,00	**2,68**	**9,59**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase perpustakaan yang di bina**	**3,5**	**877.661.400,00**	**2,4**	**8.109.071.370,00**	**2**	**1.091.756.619,00**	**-**	**173.782.649,00**	**1,51**	**539.061.815,00**					**1,51**	**712.844.464,00**	3,93	8.821.915.834,00	**1,12**	**10,05**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kunjungan pemustaka**	**9250**	**625.873.790,00**	**14017**	**859.753.917,00**	**8950**	**776.936.064,00**	**-**	**98.675.567,00**	**5723**	**382.421.044,00**					**5723**	**481.096.611,00**	19740	1.340.850.528,00	**2,13**	**2,14**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1	29.241.474,00	1	510.844.537,00	1	149.166.507,00	-	27.594.331,00	1	45.505.231,00					1	73.099.562,00	2	583.944.099,00	**2,00**	**19,97**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5	5.673.915,00	-	0	5	4.689.186,00	-	0	-	0										
		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah tingkat daerah kabupaten/ Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1	6.737.730,00	-	0	1	5.568.372,00	0	0	-	690.000,00										

		Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kabupaten/ kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5	3.888.064,00	-	0	5	3.213.276,00	-	2.920.000,00	5	3.209.400,00											
		Pembinaan Perpustakaan khusus tingkat kabupaten/ kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20	116.938.692,00	-	0	20	96.643.547,00	-	13.111.400,00	7	61.629.804,00											
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40	32.860.700,00	20	122.857.200,00	40	161.842.600,00	-	28.200.000,00	-	65.800.000,00					0	94.000.000,00	20	216.857.200,00	**0,50**	**6,60**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	200	192.207.048,00	5	72.277.536,00	200	158.848.800,00	-	13.275.794,00	-	48.947.309,00					0	62.223.103,00	5	134.500.639,00	**0,00**	**0,00**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	500	164.965.974,00	-	0	500	136.335.516,00		13.574.042,00	866	121.394.100,00					866	134.968.142,00	866	134.968.142,00	**1,73**	**0,82**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10	73.360.195,00	25	28.831.400,00	10	60.628.260,00	-	0	7	35.245.200,00					7	35.245.200,00	32	64.076.600,00	**3,20**	**0,87**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Nilai budaya baca**	**7,65**	**112.666.433,00**	**6,47**	**7.249.317.453,00**	**7,35**	**314.820.555,00**	**-**	**75.107.082,00**	**2,64**	**156.640.771,00**					**2,64**	**231.747.853,00**	9,11	7.481.065.306,00	**1,19**	**66,40**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	jumlah frekuensi layanan kunjungan ke perpustakaan desa dan sekolah	8	12.357.004,00	45	400.022.361,00	8	231.920.000,00	-	57.889.238,00	22	121.124.006,00					22	179.013.244,00	67	579.035.605,00	**8,38**	**46,86**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	3	71.481.754,00	3	37.375.276,00	3	59.075.830,00	-	17.217.844,00	3	35.516.765,00					3	52.734.609,00	6	90.109.885,00	**2,00**	**1,26**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1	12.702.082,00	1	123.877.140,00	1	10.497.797,00	-	0	-	-					0	-	1	123.877.140,00	**1,00**	**9,75**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1	16.125.583,00	2	21.457.700,00	1	13.326.928,00	-	0	-	-					0	-	2	21.457.700,00	**2,00**	**1,33**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**Persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan**	**100**	**47.916.000,00**	**40**	**6.594.800,00**	**100**	**47.352.365,00**	**-**	**3.863.254,00**	**-**	**46.222.500,00**					**-**	**50.085.754,00**	40,00	56.680.554,00	**0,40**	**1,18**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah naskah kuno yang dilestarikan**	**5**	**0**	**2,00**	**6.594.800,00**	**5**	**47.352.365,00**	**-**	**3.863.254,00**	**-**	**33.486.000,00**					**0**	**37.349.254,00**	2,00	43.944.054,00	**0,40**	**#DIV/0!**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pengembangan , penglahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	1	13.736.362,00	-	0	1	47.352.365,00	-	3.863.254,00	-	33.486.000,00					0	37.349.254,00	0	37.349.254,00	**0,00**	**2,72**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota						**5**	**15.756.547,00**	**-**	**0**	**-**	**12.736.500,00**					**0**	**12.736.500,00**	0,00	12.736.500,00	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	45	19.065.422,00	-	0	45	15.756.547,00	-	0	-	12.736.500,00											

	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kearsipan		**Indeks tata kelola arsip daerah**	**30**	**35.398.813.071,39**	**103,333333**	**1.023.920.685,00**	**16**	**1.749.233.188,00**	**-**	**135.929.352,00**	**100,00**	**329.709.545,00**					**100**	**465.638.897,00**	203,33	1.489.559.582,00	**6,78**	**0,04**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku**	**80**	**314.986.793,44**	**124,00**	**413.658.223,00**	**50**	**578.288.898,00**	**-**	**46.430.951,00**	**60,98**	**116.927.144,00**					**60,98**	**163.358.095,00**	184,98	577.016.318,00	**2,31**	**1,83**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase arsip yang telah dibuatkan daftar arsip**	**100**	**71.331.655,00**	**100,00**	**80.953.743,00**	**100**	**218.951.781,00**	**-**	**8.758.871,00**	**-**	**60.911.903,00**					**-**	**69.670.774,00**	100,00	150.624.517,00	**1,00**	**2,11**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	5	4.480.146,00	31	80.953.743,00	5	218.951.781,00	-	8.758.871,00	-	60.911.903,00					0	69.670.774,00	31	150.624.517,00	**6,20**	**33,62**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik**	**100**	**4.245.158,00**	**214,285714**	**81.433.480,00**	**100**	**78.508.395,00**	**-**	**7.255.080,00**	**-**	**25.598.241,00**					**0,00**	**32.853.321,00**	214,29	114.286.801,00	**2,14**	**26,92**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50	4.245.158,00	15	81.433.480,00	50	78.508.395,00	-	7.255.080,00	-	25.598.241,00					0	32.853.321,00	15	114.286.801,00	**0,30**	**26,92**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN**	**50**	**20.799.766,00**	**4100,00**	**251.271.000,00**	**50**	**280.828.722,00**	**-**	**30.417.000,00**	**33,33**	**30.417.000,00**					**33,33**	**60.834.000,00**	4133,33	312.105.000,00	**82,67**	**15,01**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

		Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/ kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1	5.546.304,00	0,00	0	1	4.583.722,00	-	0	-	0											
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5	15.253.462,00	41,00	251.271.000,00	5	276.245.000,00	-	30.417.000,00	2	30.417.000,00					2	60.834.000,00	43	312.105.000,00	**8,60**	**20,46**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Persentase arsip/dokumen daerah yang dilestarikan**	**70**	**34.904.912.519,00**	**172,44**	**501.838.662,00**	**55**	**557.712.105,00**	**-**	**79.594.401,00**	**-**	**189.021.701,00**					**-**	**268.616.102,00**	172,44	770.454.764,00	**2,46**	**0,02**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	**tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK**	**100**	**10.023.961,00**	**380,00**	**77.437.284,00**	**100**	**115.188.202,00**	**-**	**3.790.000,00**	**-**	**76.678.100,00**					**-**	**80.468.100,00**	380,00	157.905.384,00	**3,80**	**15,75**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	50	10.023.961,00	380,00	**77.437.284,00**	50	115.188.202,00	-	3.790.000,00	-	76.678.100,00					0	80.468.100,00	380	157.905.384,00	**7,60**	**15,75**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	**tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana**	**100**	**66.177.247,00**	**100,00**	**137.674.966,00**	**100**	**196.184.000,00**	**-**	**66.805.250,00**	**-**	**103.344.450,00**					**-**	**170.149.700,00**	100,00	307.824.666,00	**1,00**	**4,65**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

			dengan NSPK																				
		Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50	66.177.247,00	100,00	137.674.966,00	50	196.184.000,00	-	66.805.250,00	-	103.344.450,00					0	170.149.700,00	100	307.824.666,00	**2,00**	**4,65**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	**tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK**	**100**	**25.942.095,00**	**100**	**167.014.978,00**	**100**	**153.498.218,00**	**-**	**8.999.151,00**	**100,00**	**8.999.151,00**					**100,00**	**17.998.302,00**	200	185.013.280,00	**2,00**	**7,13**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10	1.995.422,00	50	90.703.922,00	10	76.749.109,00	-	8.999.151,00	-	8.999.151,00					0	17.998.302,00	50	108.702.224,00	**5,00**	**54,48**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10	12.261.838,00	100	76.311.056,00	10	76.749.109,00	-	0	266	0					266	-	366	76.311.056,00	**36,60**	**6,22**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/ Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	1	6.775.855,00	-	0	1	299.857.009,00	-	0	-	0											
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**100**	**3.438.439,00**	**133,75**	**119.711.434,00**	**100**	**92.841.685,00**	**-**	**0**	**-**	**0**					**0**	**-**	133,75	119.711.434,00	**1,34**	**34,82**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1	3.438.439,00	214	119.711.434,00	1	92.841.685,00	-	0	-	0					0	-	214	119.711.434,00	**214,00**	**34,82**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	**Persentase angka pemakaian arsip**	**100**	**178.913.758,95**	**150**	**108.423.800,00**	**100**	**613.232.185,00**	**-**	**9.904.000,00**	**-**	**23.760.700,00**					**0,00**	**33.664.700,00**	150	142.088.500,00	**1,50**	**0,79**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	**tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK**	**100**	**16.010.944,00**	**102,27272773**	**108.423.800,00**	**100**	**613.232.185,00**	**-**	**9.904.000,00**	**-**	**23.760.700,00**					**0,00**	**33.664.700,00**	102,27	142.088.500,00	**1,02**	**8,87**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1	7.313.165,00	3	85.505.000,00	1	356.043.938,00	-	0	-	13.856.700,00					0	13.856.700,00	3	99.361.700,00	**3,00**	**13,59**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1	8.697.779,00	42	22.918.800,00	1	257.188.247,00	-	9.904.000,00	-	9.904.000,00					0	19.808.000,00	42	42.726.800,00	**42,00**	**4,91**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
									JUMLAH		2.107.490.741,00		5.101.109.017,00		-	-	-		7.208.599.758,00		7.208.599.758,00			
											Rata-rata capaian kinerja (%)		Program	10,41										
													Kegiatan	363,96										
													Subkegiatan	208,74										
											Predikat Kinerja													

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 42,75%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.208.599.758,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp.11.933.362.205,00 (Sebelas Milyar Semilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) atau sebesar 100%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaaan Kabupaten Paser sebesar 10,41% dengan predikat kinerja Sangat Rendah.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 3 indikator, capaian kinerja (>70%-100%) = 9 indikator, capaian kinerja (>50%-70%) = 7 indikator capaian kinerja (0%-50%) = 37 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a) Pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja,
b) Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran,
c) Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
d) Pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas,

e) Penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi,
f) Perumusan kebijakan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan,
g) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan,
h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan,
i) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
j) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
k) Pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku,
l) Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas,
m) Pembinaan Jabatan Fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan,
n) Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Dinas,
o) Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD,
p) Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan.
q) Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi,
r) Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah, dan
s) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser adalah:

1. Layanan Sirkulasi
2. Layanan Rujukan/ Referensi
3. Layanan Berkala
4. Layanan Perpustakaan Keliling

5. Layanan Konsultasi (pustakawan)
6. Layanan Audio Visual
7. Layanan Story Telling
8. Layanan Koleksi Huruf Braille
9. Layanan Internet
10. Layanan Komputer
11. Layanan Pengajian
12. Layanan Peminjaman Arsip

Upaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

No	SASARAN	IKU	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Minat Baca	Indeks minat baca	$\frac{\text{Jumlah Pemustaka}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Data Perpustakaan	Bidang Perpustakaan
		Nilai SKM Pemusta terhadap pelayanan perpustakaan	Nilai SKM yang disampaikan pemustaka		
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kearsipan	Indeks tata kelola arsip daerah	$\frac{\text{Jumlah obyek pengawasan arsip yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah target obyek pengawasan arsip 5 tahun}} \times 100\%$	Data Kearsipan	Bidang Kearsipan
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Kategori Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Laporan hasil evaluasi AKIP	Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Bagian Perencanaan

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	IKM Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	72	77	82	87	90	88,36	107,76%
Sasaran Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Indeks Minat Baca	1,05%	1,75%	2,15%	2,25%	2,50%	1,91%	88,83%
	Nilai SKM Pemustaka terhadap Pelayanan Perpustakaan	71	75	80	86	88	88,36	107,76%
Sasaran Meningkatknya Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks tata Kelola Arsip Daerah	12%	16%	20%	24%	28%	100%	500%
Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan tangkas	Indeks Reformasi Birokrasi	61	65	71	75	81	0	0
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan	kategori Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	BB	BB	A	A	-	-

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "IKM Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan", telah melampaui target, dimana realisasinya sebesar 88,36 dari target sebesar 82 dengan capaian kinerja sebesar 107,76%;
b. Sasaran "Meningkatnya Minat Baca Masyarakat" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Minat Baca", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 1,91% dari target sebesar 2,15% dengan capaian kinerja sebesar 88,83 %;

c. Sasaran "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks tata Kelola Arsip Daerah", telah melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 20% dengan capaian kinerja sebesar 500%;
d. Tujuan "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Reformasi Birokrasi",belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0 dari target sebesar 71 dengan capaian kinerja sebesar 0;
e. Sasaran "Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "kategori Evaluasi SAKIP dari Inspektorat", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0 dari target sebesar BB dengan capaian kinerja sebesar 0;

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Meningkatnya pemanfataan perpustakaan oleh masyarakat
2. Meningkatnya kualitas SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kinerja
4. Dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
5. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara pimpinan dan bidang-bidang
6. Terbuka kesempatan untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat melalui berbagai bimbingan seperti penyuluhan/bimtek/sosialisasi/pelatihan.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat Kabupaten Paser
2. Masih dibutuhkan peningkatan terhadap minat baca masyarakat
3. Masih terbatasnya jumlah naskah kuno yang dilaporkan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser
4. Masih terbatasnya jumlah perpustakaan yang telah sesuai dengan SNP (Standar Nasional Perpustakan).

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser telah mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Tujuan & Sasaran

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	IKM Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat	82	82
Sasaran Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Persentase Peningkatan Minat Baca	$\frac{\text{Jumlah Pemustaka}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	2,15%	4,75%
	Nilai SKM Pemustaka terhadap Pelayanan Perpustakaan	Nilai SKM yang disampaikan Pemustaka	80	80
Sasaran Meningkatknya Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks tata Kelola Arsip Daerah	Nilai hasil pengawasan kearsipan	20%	55
Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan tangkas	Indeks Reformasi Birokrasi	Google Form/ Formulir Online	71	71
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan	kategori Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Laporan Nilai Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat	BB	74

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser Tahun 2024 mengalami perubahan dikarenakan terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu ""PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER"" yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air.
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

11. Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke-3, 4 dan 8, yaitu "Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah", "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik", dan "Meningkatnya kualitas Pendidikan".

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**		**Target Capaian 2024**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**		**Target Capaian 2024**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	
(2)	*(3)*	*(4)*		*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*		*(10)*	*(11)*	*(12)*
		TOTAL			***14.850.865.951,00***						***18.152.015.770,50***	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKRETARIAT**	*%*	*74*	***11.825.615.582,00***	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKRETARIAT**	*%*	*100*	***13.681.268.605,50***	**Kegiatan Lanjutan**
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE PD YANG MENYUSUN DAN MENETAPKAN DOKUMEN PERENCANAAN TEPAT WAKTU**	**%**	**100**	*117.763.707,00*	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE PD YANG MENYUSUN DAN MENETAPKAN DOKUMEN PERENCANAAN TEPAT WAKTU**	**%**	**100**	*280.797.698,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	*104.087.749,00*	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	*119.087.740,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	*3.098.568,00*	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	*140.017.568,00*	**Kegiatan Lanjutan**

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tanah Grogot**	jumlah dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2	*10.577.390,00*	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tanah Grogot**	jumlah dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2	*21.692.390,00*	**Kegiatan Lanjutan**
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE KUALITAS DAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**	**%**	**100**	***7.337.660.586,00***	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE KUALITAS DAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**	**%**	**100**	***7.478.473.495,00***	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Tanah Grogot**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	*6.991.718.198,00*	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Tanah Grogot**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	*6.991.718.198,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	*29.420.743,00*	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	3	*170.233.652,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	*2.789.776,00*	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	*2.789.776,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	17	*307.269.864,00*	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	5	*307.269.864,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	2	*3.879.865,00*	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	5	*3.879.865,00*	**Kegiatan Lanjutan**

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	laporan	1	*2.582.140,00*	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	laporan	5	*2.582.140,00*	**Kegiatan Lanjutan**
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Tanah Grogot**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**%**	**100**	***292.936.919,00***	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Tanah Grogot**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**%**	**100**	***538.251.637,00***	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Tanah Grogot**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	20	8.518.400,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Tanah Grogot**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	*8.518.400,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Tanah Grogot**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	90	13.680.018,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Tanah Grogot**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	90	*13.680.018,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Tanah Grogot**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	46	82.568.505,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Tanah Grogot**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	46	*82.568.505,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Tanah Grogot**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	20000	19.180.296,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Tanah Grogot**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	20000	*19.180.296,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	3.184.418,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	*3.184.418,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	20	165.805.282,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	20	*411.120.000,00*	**Kegiatan Lanjutan**

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Tanah Grogot**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**%**	**100**	**707.673.900,00**	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Tanah Grogot**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**%**	**100**	**1.707.690.900,00**	**Kegiatan Lanjutan**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Tanah Grogot**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	11	707.673.900,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Tanah Grogot**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	11	*1.707.690.900,00*	**Kegiatan Lanjutan**
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Tanah Grogot**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**%**	**100**	**236.334.754,00**	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tanah Grogot**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**%**	**100**	**236.334.754,00**	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	125	996.759,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	125	*996.759,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Tanah Grogot**	jumlah item jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar	laporan	12	235.337.995,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Tanah Grogot**	jumlah item jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar	bulan	12	*235.337.995,00*	**Kegiatan Lanjutan**
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE JUMLAH ASET YANG TERSEDIA DALAM KUALITAS BAIK**	**%**	**100**	***3.133.245.716,00***	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE JUMLAH ASET YANG TERSEDIA DALAM KUALITAS BAIK**	**%**	**100**	***3.439.720.121,50***	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Tanah Grogot**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	55.276.430,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Tanah Grogot**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	*65.292.230,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Tanah Grogot**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	13	22.453.970,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Tanah Grogot**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	13	*22.453.970,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Tanah Grogot**	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	9	3.055.515.316,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Tanah Grogot**	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	9	*3.351.973.921,50*	**Kegiatan Lanjutan**
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DIBINA**	**%**	**2,5**	***1.191.756.619,00***	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DIBINA**	**%**	**1,5**	***1.380.410.267,00***	**Kegiatan Lanjutan**

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**JUMLAH KUNJUNGAN PEMUSTAKA**	**orang**	**9050**	***776.936.064,00***	**PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**JUMLAH KUNJUNGAN PEMUSTAKA**	**orang**	**8850**	***890.207.685,00***	**Kegiatan Lanjutan**
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	**Tanah Grogot**	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	dokumen/ layanan	1	149.166.507,00	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	**Tanah Grogot**	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	dokumen/ layanan	1	*155.061.237,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/ kota sesuai standar nasional perpustakaan diwilayah kabupaten/ kota sesuai kewenangannya	perpustakaan	5	4.689.186,00	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/ kota sesuai standar nasional perpustakaan diwilayah kabupaten/ kota sesuai kewenangannya	desa	5	*78.021.237,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat kabupaten/ kota yang dikembangkan	*eksemplar*	*1*	*5.568.372,00*	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat kabupaten/ kota yang dikembangkan	*eksemplar*	***1***	*5.568.372,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	**Tanah Grogot**	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	perpustakaan	5	3.213.276,00	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	**Tanah Grogot**	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	sekolah	5	*3.213.276,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/ kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	perpustakaan	20	96.643.547,00	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/ kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	orang	20	*96.643.547,00*	**Kegiatan Lanjutan**

Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang	40	161.842.600,00	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang	40	*161.842.600,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	layanan	200	*158.848.800,00*	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang dikembangkan Tingkat Kabupaten / Kota Melalui Peningkatan Koleksi	**Tanah Grogot**	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	layanan	3	*158.848.800,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pengembangan Bahan Pustaka	**Tanah Grogot**	Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	*eksemplar*	*500*	*136.335.516,00*	Pengembangan Bahan Pustaka	**Tanah Grogot**	Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	*eksemplar*	*500*	*136.335.516,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	10	60.628.260,00	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	10	*94.673.100,00*	**Kegiatan Lanjutan**
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**NILAI BUDAYA BACA**	**%**	**7,45**	***414.820.555,00***	**PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**NILAI BUDAYA BACA**	**%**	**7,25**	***490.202.582,00***	
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	**Tanah Grogot**	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada satuan pendidikan.	*lokus*	*8*	331.920.000,00	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	**Tanah Grogot**	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada satuan pendidikan.	*lokus/ laporan*	*40*	*231.920.000,00*	**Kegiatan Lanjutan**

Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	**Tanah Grogot**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	*orang*	*3*	*59.075.830,00*	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	**Tanah Grogot**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	*orang*	*3*	*75.413.830,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	**Tanah Grogot**	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	*lokus*	*1*	*10.497.797,00*	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	**Tanah Grogot**	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	*lokus*	*8*	*169.541.824,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	*perpustakaan*	*1*	*13.326.928,00*	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	*perpustakaan*	*1*	*13.326.928,00*	**Kegiatan Lanjutan**
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**Tanah Grogot**	**JUMLAH NASKAH KUNO YANG DILESTARIKAN**	**Naskah**	**5**	***63.108.912,00***	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Tanah Grogot**	**JUMLAH NASKAH KUNO YANG DILESTARIKAN**	**Naskah**	**5**	***63.108.912,00***	**Kegiatan Lanjutan**
PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE NASKAH KUNO YANG DIKELOLA DAN DILESTARIKAN**	**%**	**100**	***47.352.365,00***	**PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE NASKAH KUNO YANG DIKELOLA DAN DILESTARIKAN**	**%**	**100**	***47.352.365,00***	**Kegiatan Lanjutan**
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	**Tanah Grogot**	Jumlah naskah kono yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan	eksemplar	1	47.352.365,00	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	**Tanah Grogot**	Jumlah naskah kono yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan	dokumen	1	*47.352.365,00*	**Kegiatan Lanjutan**
PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DITEMUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DIKELOLA DAN DILESTARIKAN**	*%*	*100*	***15.756.547,00***	**PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DITEMUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DIKELOLA DAN DILESTARIKAN**	*%*	*100*	***15.756.547,00***	**Kegiatan Lanjutan**
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	**Tanah Grogot**	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara hasil seleksi dan pengadaan	*eksemplar*	*45*	*15.756.547,00*	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	**Tanah Grogot**	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara hasil seleksi dan pengadaan	*eksemplar*	***45***	*15.756.547,00*	**Kegiatan Lanjutan**

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ARSIP SECARA BAKU**	**%**	**60**	***578.288.898,00***	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ARSIP SECARA BAKU**	**%**	**40**	***1.304.228.981,00***	**Kegiatan Lanjutan**
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ARSIP YANG TELAH DIBUATKAN DIGITAL ARSIP**	**%**	**100**	***218.951.781,00***	**PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ARSIP YANG TELAH DIBUATKAN DIGITAL ARSIP**	**%**	**100**	***223.451.781,00***	**Kegiatan Lanjutan**
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	5	218.951.781,00	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah/ laporan	20	*223.451.781,00*	**Kegiatan Lanjutan**
PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ARSIP STATIS YANG TELAH DIBUATKAN SECARA BANTU TEMU BALIK**	**%**	**100**	*78.508.395,00*	**PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ARSIP STATIS YANG TELAH DIBUATKAN SECARA BANTU TEMU BALIK**	**%**	**100**	*428.603.500,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	**Tanah Grogot**	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	50	78.508.395,00	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	**Tanah Grogot**	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Dokumen/ Arsip	15	*428.603.500,00*	**Kegiatan Lanjutan**
PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE JUMLAH ARSIP YANG DIMASUKKAN DALAM SIKN MELALUI JIKN**	**%**	**50**	*280.828.722,00*	**PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE JUMLAH ARSIP YANG DIMASUKKAN DALAM SIKN MELALUI JIKN**	**%**	**50**	*652.173.700,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	**Tanah Grogot**	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/ kota melalui JIKN	pengguna	1	4.583.722,00	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	**Tanah Grogot**	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/ kota melalui JIKN	OPD	1	*187.582.000,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	laporan	5	276.245.000,00	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah / laporn	5	*464.591.700,00*	**Kegiatan Lanjutan**

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ARSIP/ DOKUMEN DAERAH YANG DILESTARIKAN**	**%**	**60**	*578.863.755,00*	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ARSIP/ DOKUMEN DAERAH YANG DILESTARIKAN**	**%**	**50**	*1.109.766.820,00*	**Kegiatan Lanjutan**
PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP DENGAN NSPK**	**%**	**100**	*115.168.202,00*	**PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN**	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP DENGAN NSPK**	**%**	**100**	*256.280.900,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	**Tanah Grogot**	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	berkas	50	115.168.202,00	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	**Tanah Grogot**	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Arsip/ berkas	20	*256.280.900,00*	**Kegiatan Lanjutan**
PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA NSPK**	**%**	**100**	*196.184.000,00*	**PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA NSPK**	**%**	**100**	*378.593.520,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	**Tanah Grogot**	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	arsip	50	196.184.000,00	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	**Tanah Grogot**	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	arsip	100	*378.593.520,00*	**Kegiatan Lanjutan**
PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN	**Tanah Grogot**	**TINGKAI KESESUAIAN KEGIATAN PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG DIGABUNG DAN/ ATAU DIBUBARKAN DAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN DENGAN NSPK**	**%**	**100**	*174.669.868,00*	**PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN**	**Tanah Grogot**	**TINGKAI KESESUAIAN KEGIATAN PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG DIGABUNG DAN/ ATAU DIBUBARKAN DAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN DENGAN NSPK**	**%**	**100**	*363.263.400,00*	**Kegiatan Lanjutan**

Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	daftar	10	76.749.109,00	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	arsip/ daftar	50	*143.982.000,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	arsip	10	68.063.750,00	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	arsip/ daftar	100	*157.757.400,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	**Tanah Grogot**	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	arsip	1	29.857.009,00	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	**Tanah Grogot**	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	arsip	1	*61.524.000,00*	**Kegiatan Lanjutan**
AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA DENGAN NSPK**	**%**	**100**	**92.841.685,00**	**AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA DENGAN NSPK**	**%**	**100**	**111.629.000,00**	**Kegiatan Lanjutan**
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	**Tanah Grogot**	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	arsip	1	92.841.685,00	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	**Tanah Grogot**	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	arsip	1	*111.629.000,00*	**Kegiatan Lanjutan**

PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ANGKA PEMAKAIAN ARSIP**	**%**	**100**	***613.232.185,00***	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ANGKA PEMAKAIAN ARSIP**	**%**	**100**	***613.232.185,00***	**Kegiatan Lanjutan**
PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DI KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DENGAN SNPK**	**%**	**100**	***613.232.185,00***	**PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DI KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DENGAN SNPK**	**%**	**100**	***613.232.185,00***	**Kegiatan Lanjutan**
Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	**Tanah Grogot**	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	SOP	1	356.043.938,00	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	**Tanah Grogot**	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	juknis/ SOP	2	*356.043.938,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	**Tanah Grogot**	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip	1	257.188.247,00	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	**Tanah Grogot**	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	OPD/ Arsip	42	*257.188.247,00*	**Kegiatan Lanjutan**

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

Sebelum Perubahan (Murni) Tahun 2024				Sesudah Perubahan Tahun 2024				Bertambah/ Berkurang
Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			**11.933.362.205,00**	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**			**16.584.201.726,00**	**4.650.839.521,00**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR			**11.933.362.205,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR**			**16.584.201.726,00**	**4.650.839.521,00**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			**1.154.865.531,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**4.967.415.264,00**	**3.812.549.733,00**
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DIBINA**	**2**	**1.154.865.531,00**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DIBINA**	**2**	**4.967.415.264,00**	**3.812.549.733,00**
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	**JUMLAH KUNJUNGAN PEMUSTAKA**	**8950**	**776.936.064,00**	**PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**JUMLAH KUNJUNGAN PEMUSTAKA**	**8950**	**1.230.254.939,00**	**453.318.875,00**
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1	149.166.507,00	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1	283.121.807,00	**133.955.300,00**

Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/ kota sesuai standar nasional perpustakaan diwilayah kabupaten/ kota sesuai kewenangannya	5	4.689.186,00	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/ kota sesuai standar nasional perpustakaan diwilayah kabupaten/ kota sesuai kewenangannya	5	155.061.237,00	**150.372.051,00**
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat kabupaten/ kota yang dikembangkan	1	5.568.372,00	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat kabupaten/ kota yang dikembangkan	1	5.568.372,00	-
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	5	3.213.276,00	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	5	3.213.276,00	-
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/ kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	20	96.643.547,00	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/ kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	5	86.483.547,00	**(10.160.000,00)**

Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40	161.842.600,00	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40	161.842.600,00	-
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	200	158.848.800,00	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	200	208.915.300,00	**50.066.500,00**
Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	500	136.335.516,00	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	500	231.375.700,00	**95.040.184,00**
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10	60.628.260,00	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10	94.673.100,00	**34.044.840,00**
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	**NILAI BUDAYA BACA**	**7,35**	**314.820.555,00**	**PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI BUDAYA BACA**	**7,35**	**3.674.051.413,00**	**3.359.230.858,00**

Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada satuan pendidikan.	8	231.920.000,00	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada satuan pendidikan.	8	424.232.000,00	**192.312.000,00**
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1	0	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	2.991.536.831,00	**2.991.536.831,00**
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3	59.075.830,00	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3	75.413.830,00	**16.338.000,00**
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	1	10.497.797,00	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	1	169.541.824,00	**159.044.027,00**
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1	13.326.928,00	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2	13.326.928,00	**-**
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**JUMLAH NASKAH KUNO YANG DILESTARIKAN**	**100**	**63.108.912,00**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**JUMLAH NASKAH KUNO YANG DILESTARIKAN**	**100**	**63.108.912,00**	**-**

PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE NASKAH KUNO YANG DIKELOLA DAN DILESTARIKAN**	**5**	**47.352.365,00**	**PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE NASKAH KUNO YANG DIKELOLA DAN DILESTARIKAN**	**5**	**47.352.365,00**	**-**
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1	47.352.365,00	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1	47.352.365,00	-
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**PERSENTASE KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DIKELOLA DAN DILESTARIKAN**	**5**	**15.756.547,00**	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**PERSENTASE KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DIKELOLA DAN DILESTARIKAN**	**5**	**15.756.547,00**	**-**
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara hasil seleksi dan pengadaan	45	15.756.547,00	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara hasil seleksi dan pengadaan	45	15.756.547,00	-
								-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			**10.778.496.674,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**11.616.786.462,00**	**838.289.788,00**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKRETARIAT**	**72**	**9.008.111.836,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKRETARIAT**	**72**	**9.513.403.346,00**	**505.291.510,00**

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**PERSENTASE PD YANG MENYUSUN DAN MENETAPKAN DOKUMEN PERENCANAAN TEPAT WAKTU**	**100**	**117.763.698,00**	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PD YANG MENYUSUN DAN MENETAPKAN DOKUMEN PERENCANAAN TEPAT WAKTU**	**100**	**243.911.198,00**	**126.147.500,00**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	104.087.740,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	176.677.740,00	**72.590.000,00**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	3.098.568,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	3.098.568,00	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	10.577.390,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	64.134.890,00	**53.557.500,00**
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**PERSENTASE KUALITAS DAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**	**100**	**7.215.235.075,00**	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE KUALITAS DAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**	**100**	**7.467.660.586,00**	**252.425.511,00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	6.869.292.687,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	6.991.718.198,00	**122.425.511,00**

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	29.420.743,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	79.420.743,00	**50.000.000,00**
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	2.789.776,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	2.789.776,00	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18	307.269.864,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18	387.269.864,00	**80.000.000,00**
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	3.879.865,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	3.879.865,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	2.582.140,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	2.582.140,00	-
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**100**	**292.936.919,00**	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**100**	**392.936.919,00**	**100.000.000,00**

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	8.518.400,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	8.518.400,00	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90	13.680.018,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90	13.680.018,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46	82.568.505,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46	82.568.505,00	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20000	19.180.296,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20000	19.180.296,00	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	3.184.418,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	3.184.418,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	165.805.282,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	265.805.282,00	**100.000.000,00**
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**100**	**1.054.681.200,00**	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**100**	**707.673.900,00**	**(347.007.300,00)**

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	1.054.681.200,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	707.673.900,00	**(347.007.300,00)**
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**100**	**236.334.754,00**	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**100**	**236.334.754,00**	**-**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	125	996.759,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	125	996.759,00	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah item jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar	12	235.337.995,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah item jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar	12	235.337.995,00	-
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**PERSENTASE JUMLAH ASET YANG TERSEDIA DALAM KUALITAS BAIK**	**100**	**91.160.190,00**	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PERSENTASE JUMLAH ASET YANG TERSEDIA DALAM KUALITAS BAIK**	**100**	**464.885.989,00**	**373.725.799,00**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	55.276.430,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	55.276.430,00	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	22.453.970,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	22.453.970,00	-

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	13.429.790,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	387.155.589,00	**373.725.799,00**
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ARSIP SECARA BAKU**	**50**	**578.288.898,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ARSIP SECARA BAKU**	**50**	**911.287.176,00**	**332.998.278,00**
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE ARSIP YANG TELAH DIBUATKAN DIGITAL ARSIP**	**100**	**297.460.176,00**	**PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE ARSIP YANG TELAH DIBUATKAN DIGITAL ARSIP**	**100**	**297.460.176,00**	**-**
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5	218.951.781,00	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5	218.951.781,00	-
PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**PERSENTASE ARSIP STATIS YANG TELAH DIBUATKAN SECARA BANTU TEMU BALIK**	**100**		**PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE ARSIP STATIS YANG TELAH DIBUATKAN SECARA BANTU TEMU BALIK**	**100**		
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50	78.508.395,00	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50	78.508.395,00	-
PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN	**PERSENTASE JUMLAH ARSIP YANG DIMASUKKAN**	**50**	**280.828.722,00**	**PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN**	**PERSENTASE JUMLAH ARSIP YANG DIMASUKKAN**	**50**	**613.827.000,00**	**332.998.278,00**

NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	**DALAM SIKN MELALUI JIKN**			**NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA**	**DALAM SIKN MELALUI JIKN**			
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/ kota melalui JIKN	1	4.583.722,00	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/ kota melalui JIKN	1	187.582.000,00	**182.998.278,00**
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5	276.245.000,00	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3	426.245.000,00	**150.000.000,00**
UPPER(	**PERSENTASE ARSIP/ DOKUMEN DAERAH YANG DILESTARIKAN**	**55**	**578.863.755,00**	**UPPER(**	**PERSENTASE ARSIP/ DOKUMEN DAERAH YANG DILESTARIKAN**	**55**	**578.863.755,00**	**-**
PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH)	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP DENGAN NSPK**	**100**	**115.168.202,00**	**PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH)**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP DENGAN NSPK**	**100**	**115.168.202,00**	**-**
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	50	115.168.202,00	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	50	115.168.202,00	-

PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA NSPK**	**100**	**196.184.000,00**	**PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA NSPK**	**100**	**196.184.000,00**	**-**
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50	196.184.000,00	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50	196.184.000,00	-
PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN	**TINGKAI KESESUAIAN KEGIATAN PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG DIGABUNG DAN/ ATAU DIBUBARKAN DAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN DENGAN NSPK**	**100**	**174.669.868,00**	**PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN**	**TINGKAI KESESUAIAN KEGIATAN PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG DIGABUNG DAN/ ATAU DIBUBARKAN DAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN DENGAN NSPK**	**100**	**174.669.868,00**	**-**
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10	76.749.109,00	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10	76.749.109,00	-

Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10	68.063.750,00	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10	68.063.750,00	-
Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	1	29.857.009,00	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	1	29.857.009,00	-
AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA DENGAN NSPK**	**100**	**92.841.685,00**	**AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA DENGAN NSPK**	**100**	**92.841.685,00**	-
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1	92.841.685,00	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1	92.841.685,00	-
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	**PERSENTASE ANGKA PEMAKAIAN ARSIP**	**100**	**613.232.185,00**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**PERSENTASE ANGKA PEMAKAIAN ARSIP**	**100**	**613.232.185,00**	-

PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DI KABUPATEN/KOTA	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DENGAN SNPK**	**100**	**613.232.185,00**	**PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DI KABUPATEN/KOTA**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DENGAN SNPK**	**100**	**613.232.185,00**	**-**
Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1	356.043.938,00	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1	356.043.938,00	-
Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1	257.188.247,00	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1	257.188.247,00	-

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Kearsipan dn Perpustakaan Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

5.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tanah Grogot, 19 Juli 2024

Kepala
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

H.M.Yusuf Sumako, SH.,M.Hum
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196705201997031007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER

PERUBAHAN RENJA

TAHUN ANGGARAN 2024







Diskominfostaper
KABUPATEN PASER

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, kita telah dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2024 ini merupakan bentuk perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dalam 1 tahun kedepan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah merupakan perbaikan dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,kebijakan dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Perubahan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2024 ini. Saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan guna memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tana Paser, Agustus 2024

Kepala,

Drs. H. Arief Rahman, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19680206 198803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 6

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 16

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 27

2.4. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024 28

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 30

3.1. Tujuan dan Sasaran 30

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 31

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024 43

BAB IV PENUTUP 58

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Triwulan 2 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kabupaten Paser 7

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser sampai Triwulan II 25

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser 30

Tabel 3. 2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupatena Paser 33

Tabel 3. 3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024 44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagaiacuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

22. Peraturan Bupati Paser Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Kabupaten Paser;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Paser Tentang Perubahan RKPD Nomor 20 Tahun 2024 Tgl 18 Juli 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser), serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan

Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024 Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Tujuan dan sasaran Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2. 1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Triwulan 2 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kabupaten Paser

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80	40.823.539.999		13.388.465.883	74	7.426.576.079	20	2.119.537.634	22	1.800.013.775	42	3.919.551.409	42	17.308.017.292	52,50	42,40	DKISP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Diskominfostaper	100	1.577.498.809		481.301.592	100	430.800.000	25	94.037.990	25	55.016.070	50	149.054.060	50	630.355.652	50,00	39,96	DKISP
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	391.334.000	1	119.071.777	1	90.000.000	0	51.037.182	0	24.086.070	0	75.123.252	1	194.195.029	20,00	49,62	DKISP
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	668.921.500	1	188.406.466	1	160.800.000	0	29.925.000	0	21.600.000	0	51.525.000	1	239.931.466	20,00	35,87	DKISP
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	107.000.000	1	36.169.398	1	12.000.000	0	0	0	0	0	0	1	36.169.398	20,00	33,80	DKISP
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	99.903.309	1	38.131.360	1	70.000.000	1	13.075.808	0	9.330.000	1	22.405.808	2	60.537.168	40,00	60,60	DKISP
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	96.498.000	1	24.990.091	1	36.000.000	0	0	0	0	0	0	1	24.990.091	20,00	25,90	DKISP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5	107.000.000	1	40.279.700	1	12.000.000	0	0	0	0	0	0	1	40.279.700	20,00	37,64	DKISP

			Realisasi Kinerja SKPD																
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	106.842.000	1	34.252.800	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1	34.252.800	20,00	32,06	DKISP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ketersedian gaji dan Tunjangan ASN	100	34.490.539.117		11.810.890.734	100	6.493.224.810	25	1.953.500.509	25	1.663.407.875	50	3.616.908.384	50	15.427.799.118	50,00	44,73	DKISP
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	33.366.359.967	12	11.416.851.587	12	6.356.913.866	3	1.915.184.440	3	1.619.534.998	6	3.534.719.438	18	14.951.571.025	30,00	44,81	DKISP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	5	1.124.179.150	1	394.039.147	8	136.310.944	2	38.316.069		43.872.877	2	82.188.946	3	476.228.093	60,00	42,36	DKISP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan Adm dalam menunjang kinerja aparatur	100	2.860.215.823		756.610.519	100	368.052.410	25	39.262.375	25	61.887.330	50	101.149.705	50	857.760.224	50,00	29,99	DKISP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	689.649.910	1	139.248.991	1	52.000.000	0	0	0	0	0	0	1	139.248.991	20,00	20,19	DKISP
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	525.066.913	1	123.298.980	1	52.195.410	0	9.200.000	31	16.786.300	31	25.986.300	32	149.285.280	640,00	28,43	DKISP
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	170.000.000	1	22.290.000	1	15.934.000	0	0	12	2.250.000	12	2.250.000	13	24.540.000	260,00	14,44	DKISP
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	31.620.000	12	3.825.000	12	3.600.000	0	0	0	0	0	0	12	3.825.000	20,00	12,10	DKISP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	1.443.879.000	1	467.947.548	14	244.323.000	3	30.062.375	19	42.851.030	22	72.913.405	23	540.860.953	460,00	37,46	DKISP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan	100	1.325.301.250		287.405.600	100	99.500.000	25	28.000.000	25	15.168.000	50	43.168.000	50	330.573.600	50,00	24,94	DKISP
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	720.301.250	1	200.855.600	60	99.500.000	15	28.000.000	16	15.168.000	31	43.168.000	32	244.023.600	640,00	33,88	DKISP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	100	569.985.000		52.257.438	100	34.998.859	25	4.736.760	25	4.534.500	50	9.271.260	50	61.528.698	50,00	10,79	DKISP

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	361.025.000	4	49.262.628	8	31.158.859	2	4.736.760	14	4.534.500	16	9.271.260	20	58.533.888	100,00	16,21	DKISP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	139	208.960.000	16	2.994.810	4	3.840.000	0	0	0	0	0	0	16	2.994.810	11,51	1,43	DKISP
2	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100	17.664.522.974		10.333.787.055	100	5.505.844.560	100	349.454.160	0	962.113.360	100	1.311.567.520	100	11.645.354.575	100,00	65,93	DKISP
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang dapat mengakses Informasi	70	17.664.522.974		10.333.787.055	60	5.505.844.560	15	349.454.160	15	962.113.360	30	1.311.567.520	30	11.645.354.575	42,86	65,93	DKISP
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5	418.092.200	1	139.034.952	1	63.281.280	0	26.725.359	0	0	0	26.725.359	1	165.760.311	20,00	39,65	DKISP
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5	2.862.166.750	1	1.760.901.238	1	472.302.593	0	155.244.799	0	125.908.740	0	281.153.539	1	2.042.054.777	20,00	71,35	DKISP
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5	2.063.518.627	1	564.189.967	1	214.966.968	0	56.000.000	0	42.000.000	0	98.000.000	1	662.189.967	20,00	32,09	DKISP
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5	1.776.238.895	1	419.313.881	1	188.982.596	0	41.888.600	0	30.303.000	0	72.191.600	1	491.505.481	20,00	27,67	DKISP
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	5	1.534.380.005	1	365.997.150	1	333.636.763	0	0	0	3.062.400	0	3.062.400	1	369.059.550	20,00	24,05	DKISP
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	5	9.010.126.497	1	7.084.349.867	1	4.232.674.360	0	69.595.402	0	760.839.220	0	830.434.622	1	7.914.784.489	20,00	87,84	DKISP
3	Meningkatnya Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang terintegrasi	70	66.650.978.340		22.087.651.800	50	17.831.594.650	5	300.331.074		288.743.041	5	589.074.115	5	22.676.725.915	7,14	34,02	DKISP
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan nama domain dan subdomain di Pemerintah Daerah Kab.Paser	15	21.520.416.000	3	6.912.990.117	60	4.090.926.415	5	57.532.500		40.409.639	5	97.942.139	8	7.010.932.256	53,33	32,58	DKISP
		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain	15	2.214.130.000	3	373.377.009	3	203.078.565	0	28.800.000		8.773.000	0	37.573.000	3	410.950.009	20,00	18,56	DKISP

			Pemerintah Kabupaten/Kota																
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	60	19.086.286.000	12	6.538.604.608	41	3.881.144.600	41	28.732.500	0	31.636.639	41	60.369.139	53	6.598.973.747	88,33	34,57	DKISP
		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	220.000.000		1.008.500	1	6.703.250	0	0		0	0	0	0	1.008.500	-	0,46	DKISP
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sistem E-Government yang terbangun	70	45.130.562.340		15.174.661.683	60	13.740.668.235	10	242.798.574		248.333.402	10	491.131.976	10	15.665.793.659	14,29	34,71	DKISP
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7	1.594.120.000	3	602.279.977	1	395.660.050	0	33.013.963		56.247.085	0	89.261.048	3	691.541.025	42,86	43,38	DKISP
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	5	340.230.000	1	118.799.920	1	5.070.904	0	0		1.560.000	0	1.560.000	1	120.359.920	20,00	35,38	DKISP
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	9.201.974.200	1	5.473.612.643	1	919.277.401	0	50.826.600		41.674.939	0	92.501.539	1	5.566.114.182	100,00	60,49	DKISP
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	15	27.368.301.000	3	7.737.791.573	3	11.737.446.650	0	64.159.076	0	57.646.998	0	121.806.074	3	7.859.597.647	20,00	28,72	DKISP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	5	1.195.000.000	1	333.128.200	1	124.092.600	0	20.142.000	0	14.400.000	0	34.542.000	1	367.670.200	20,00	30,77	DKISP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	40	231.644.000	40	43.201.886	40	34.074.000	10	14.880.435	10	0	20	14.880.435	60	58.082.321	150,00	25,07	DKISP
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	37	1.555.606.530	29	306.576.747	2	182.338.890	0	24.763.000		15.064.074	0	39.827.074	29	346.403.821	78,38	22,27	DKISP
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5	1.241.355.910	1	340.531.363	1	125.150.800	0	30.019.300	0	22.460.000	0	52.479.300	1	393.010.663	20,00	31,66	DKISP

		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	7	1.500.574.000	3	177.311.899	1	163.452.000	0	1.350.000		27.297.906	0	28.647.906	3	205.959.805	42,86	13,73	DKISP
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5	705.365.800	1	41.427.475	1	54.104.940	0	3.644.200		11.982.400	0	15.626.600	1	57.054.075	20,00	8,09	DKISP
4	Meningkatnya ketersediaan data informasi statistik daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral	100	2.681.482.830		1.019.264.244	100	530.368.750	25	93.754.876	25	84.163.100	50	177.917.976	50	1.197.182.220	50,00	44,65	DKISP
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terhimpunya data dalam mendukung penyelenggaraan Statistik Sektoral	100	2.681.482.830		1.019.264.244	100	530.368.750	25	93.754.876	25	84.163.100	50	177.917.976	50	1.197.182.220	50,00	44,65	DKISP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5	1.060.080.000	1	318.159.097	30	155.761.895	0	19.200.000		14.400.000	0	33.600.000	1	351.759.097	20,00	33,18	DKISP
		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	20	180.000.000	2	289.423.890	4	68.067.800	0	0		5.540.000	0	5.540.000	2	294.963.890	10,00	163,87	DKISP
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	4	140.000.000		25.750.000	1	19.051.300	0	5.583.438		5.164.300	0	10.747.738	0	36.497.738	-	26,07	DKISP
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	38	190.000.000	2	77.608.070	34	75.007.515	0	40.171.438		20.610.000	0	60.781.438	2	138.389.508	5,26	72,84	DKISP
		Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	5	349.999.830	1	30.058.020	1	47.866.740	0	0		10.728.800	0	10.728.800	1	40.786.820	20,00	11,65	DKISP
		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	5	761.403.000	1	278.265.167	30	164.613.500	0	28.800.000		27.720.000	0	56.520.000	1	334.785.167	20,00	43,97	DKISP
5	Meningkatkan pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi	88	644.081.900		189.942.763	63	94.906.450	10	3.770.000		7.825.600	10	11.595.600	10	201.538.363	11,36	31,29	DKISP
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75	514.000.000		167.009.619	50	89.424.500	10	3.770.000		7.825.600	10	11.595.600	10	178.605.219	13,33	34,75	DKISP

		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	76.000.000	1	8.385.800	1	14.689.500	0	3.770.000		5.785.600	0	9.555.600	1	17.941.400	20,00	23,61	DKISP
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5	260.000.000	1	107.291.115	1	51.354.000	0	0		0	0	0	1	107.291.115	20,00	41,27	DKISP
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	30	163.000.000	12	51.332.704	12	23.381.000	0	0		2.040.000	0	2.040.000	12	53.372.704	40,00	32,74	DKISP
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	75	130.081.900		22.933.144	38	5.481.950	10	0		0	10	0	10	22.933.144	13,33	17,63	DKISP
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	30	130.081.900	9	22.933.144	15	5.481.950	0	0		0	0	0	9	22.933.144	30,00	17,63	DKISP
									31.389.290.489		2.866.847.744		3.142.858.876							
									Rata-rata capaian kinerja (%)		9,13		10,01							
									Predikat Kinerja											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya :																				

Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan untuk Menyusun perencanaan, anggaran dan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawaban Perangkat Daerah. Kegiatan ini didukung 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Realisasi Keuangan s.d. TW 2 pada Kegiatan ini tercapai 34,60 % dan realisasi fisik mencapai 50 %.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diarahkan untuk penyediaan administrasi dan pelaporan keuangan. Manfaat kegiatan ini untuk meningkatkan kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) subkegiatan, yaitu : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Realisasi Keuangan s.d. TW 2 pada Kegiatan ini tercapai 55,70 % dan realisasi fisik mencapai 55,70 %.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah diarahkan untuk penyediaan rapat, koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah serta mendukung kegiatan operasional kantor. Manfaat kegiatan ini untuk meningkatkan kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 5 (lima) subkegiatan, yaitu : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan serta Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Realisasi Keuangan s.d. TW 2 pada Kegiatan ini tercapai 27,48 % dan realisasi fisik mencapai 50 %.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar perkantoran yang sifatnya rutin. Manfaat kegiatan ini untuk meningkatkan kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 (Satu) subkegiatan, yaitu : Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Realisasi Keuangan s.d. TW 2 pada Kegiatan ini tercapai 43,38 % dan realisasi fisik mencapai 50 %.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran. Manfaat kegiatan ini untuk meningkatkan kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (Dua) subkegiatan, yaitu : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Realisasi Keuangan s.d. TW 2 pada Kegiatan ini tercapai 26,49 % dan realisasi fisik mencapai 50 %.

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran. Manfaat kegiatan ini adalah untuk meningkatkan layanan data sectoral dan informasi daerah. Kegiatan ini didukung oleh 6 (Enam) subkegiatan, yaitu : Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas. Realisasi Keuangan s.d. TW 2 pada Kegiatan ini tercapai 23,82 % dan realisasi fisik mencapai 50 %.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk memfasilitasi penyediaan nama domain dan subdomain di Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. Manfaat kegiatan ini adalah untuk membuat layanan aplikasi yang terintegrasi. Kegiatan ini didukung oleh 3 (Tiga) subkegiatan, yaitu : Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota, Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah. Realisasi Keuangan s.d. TW 2 pada Kegiatan ini tercapai 2,39 % dan realisasi fisik mencapai 8 %.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk Percepatan Pembangunan system digitalisasi Layanan publik di Pemerintah Daerah. Manfaat kegiatan ini adalah untuk meningkatkan layanan TIK dan Integrasi layanan secara elektronik. Kegiatan ini didukung oleh 10 (Sepuluh) subkegiatan, yaitu : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah, Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik, Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas serta Pengembangan dan Pengelolaan SUmber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah. Realisasi Keuangan s.d. TW 2 pada Kegiatan ini tercapai 3,57 % dan realisasi fisik mencapai 17 %.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk penyediaan data statistik sectoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Paser. Manfaat kegiatan ini adalah untuk meningkatkan layanan data sektoral dan informasi daerah. Kegiatan ini didukung oleh 6 (Enam) subkegiatan, yaitu : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi, Membangun Metadata Statistik Sektoral, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, Pengmbangan Infrastruktur dan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah. Realisasi Keuangan s.d. TW 2 pada Kegiatan ini tercapai 33,55 % dan realisasi fisik mencapai 50 %.

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk penyediaan Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Paser. Manfaat kegiatan ini adalah untuk

meningkatkan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Kegiatan ini didukung oleh 4 (Empat) subkegiatan, yaitu : Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi Keuangan s.d. TW 2 pada Program ini tercapai 12,22 % dan realisasi fisik mencapai 16 %.

Selanjutnya berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 19,14%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.009.706.620 (Enam Milyar tujuh ratus enam enam ratus dua puluh rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 31.389.290.489 (Tiga puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ratus delapan puluh Sembilan rupiah) atau sebesar 19,15%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser sebesar dengan predikat kinerja
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = *0 indikator*, capaian kinerja >70%-100% = *0 indikator*, capaian kinerja >50%-70% = 0 capaian kinerja 0%-50% = *1 indikator*

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
c. pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;
e. penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
f. perumusan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
l. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
m. pembinaan Jabatan Fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
n. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan pelaksana pada Dinas;
o. pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;

p. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
q. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
r. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan daerah; dan
s. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

1. Pelayanan di bidang Komunikasi dan Informasi Publik

   Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi

   a. perencanaan dan keuangan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
   b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
   c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
   d. pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
   e. pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
   f. pelaksanaan kebijakan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
   g. pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

h. pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
i. pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
j. pelaksanaan pelayanan informasi publik;pelaksanaan penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah;
k. pelaksanaan penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
l. pelaksanaan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
m. pelaksanaan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
n. pelaksanaan manajemen komunikasi krisis;
o. pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik;
p. pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
q. pelaksanaan layanan hubungan media;
r. pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
s. pelaksanaan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
u. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
v. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
w. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelayanan di Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi

a. perencanaan dan keuangan bidang aplikasi informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;

b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Aplikasi Informatika berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
d. pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Aplikasi Informatika guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
e. pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika;
f. pelaksanaan kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika;
g. pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika;
h. pelaksanaan pendaftaran nama domain Pemerintah Daerah;
i. pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
j. pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
k. pelaksanaan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
l. pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
m. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas;
n. pelaksanaan pengelolaan pusat data pemerintahan Daerah;
o. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
p. pelaksanaan pengelolaan *government chief information officer*;
q. monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE;
r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Aplikasi Informatika;
s. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

t. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika; dan
u. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Pelayanan di Bidang Teknologi Komunikasi dan informatika

Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan keuangan Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
d. pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
e. pemberian petunjuk pemberian petunjuk Komunikasi dan Informatika;
f. pelaksanaan kebijakan di Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika;
g. pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika;
h. pelaksanaan penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
i. pelaksanaan penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
j. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
k. pelaksanaan penyelenggaran sistem penghubung layanan pemerintah;

l. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika;
n. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
o. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang teknologi komunikasi dan informatika; dan
p. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Pelayanan di Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi

a. perencanaan dan keuangan Bidang Statistik dan Persandian sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Statistik dan Persandian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
d. pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Statistik dan Persandian guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
e. pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Statistik dan Persandian;
f. pelaksanaan kebijakan di Bidang Statistik dan Persandian;
g. pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Statistik dan Persandian;
h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;

i. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik Daerah yang terintegrasi;
j. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
k. pelaksanaan membangun metadata statistik sektoral;
l. pelaksanaan pengembangan infrastruktur;
m. pelaksanaan penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di Daerah;
n. pelaksanaan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
o. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah;
p. pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan Daerah berbasis elektronik dan non elektronik;
q. pelaksanaan penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah;
r. pelaksanaan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Persandian;
t. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
u. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Statistik dan Persandian; dan
v. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Upaya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Indeks SPBE
2. Persentase desa yang bisamengakses Internet
3. Persentase Instansi pemerintahyang bisa mengaksesinternet
4. Persentase perangkat daerah yang menyediakan pelayanan publikdan

pemerintahanberbasis TIK

5. Persentase website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah
6. Persentase jaringan dan Sistem Aplikasidalam kondisi aman
7. Persentase penanganan umpan balik atas informasi publik yang disebarluaskan

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser sampai Triwulan II

No	Tujuan/sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
			2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik**	**Indeks SPBE**	**2,5**	**2,55**	**2,60**	**2,70**	**2,75**	**2,9**	**2,9**
1	Meningkatnya pelayanan publik dan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Persentase desa yang bisa mengakses Internet	62%	752	80%	85%	85%	85%	85%
		Persentase Instansi pemerintah yang bisa mengakses internet	95%	96%	97%	98%	100%	100%	100%
		Persentase perangkat daerah yang menyediakan pelayanan publik dan pemerintahan berbasis TIK	60%	65%	70%	75%	80%	99%	99%
		Persentase website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah	66%	80%	90,47%	95,23%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik	Persentase jaringan dan Sistem Aplikasi dalam kondisi aman	55%	65%	75%	80%	90%	100%	100%
3	Meningkatnya ketersediaan data informasi statistik daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	60%	75%	80%	85%	90%	100%	100%
4	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Persentase penanganan umpan balik atas informasi publik yang disebarluaskan	86%	88%	90%	92%	95%	100%	100%

Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran s.d. TW 2 Tahun 2024 yang merupakan IKU Dinas telah melampaui target yang ditetapkan. Hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa dari indikator sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas, telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu Indeks SPBE dari Target Capaian 2,6 terealisasi sebesar 2,9.

Indikator Kinerja Program Aplikasi Informatika (Persentase Aplikasi yang Terintegrasi) s.d. TW 2 belum memenuhi target yaitu dari target 50% terealisasi baru 10% yang disebabkan beberapa pengadaan Barang dan Jasa pelaksanaannya mundur dari jadwal yang direncanakan karena masih dalam proses penyelesaian pekerjaan.

Indikator Kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik (Persentase Keluhan Masyarakat atas Pelayanan Pemda yang tertangani) s.d. TW 2 telah memenuhi target yaitu 100%. Hal ini dikarenakan telah terjalin koordinasi yang baik antar PD pengampu kegiatan dan adanya hubungan yang harmonis dengan media.

Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (Tingkat Keamanan Informasi) s.d. TW 2 belum memenuhi target yaitu dari 63% terealisasi baru 16% yang disebabkan beberapa pengadaan Barang dan Jasa pelaksanaannya mundur dari jadwal yang direncanakan karena masih dalam proses penyelesaian pekerjaan.

Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Rasio Perangkat Daerah yang Memiliki Data Statistik Sektoral) s.d. TW 2 belum memenuhi target yaitu dari 100% terealisasi baru 50% yang disebabkan beberapa pengadaan Barang dan Jasa pelaksanaannya mundur dari jadwal yang direncanakan karena masih dalam proses penyelesaian pekerjaan.

Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (Tingkat Keamanan Informasi) s.d. TW 2 belum memenuhi target yaitu dari 63% terealisasi baru 10% yang disebabkan beberapa pengadaan Barang dan Jasa pelaksanaannya mundur dari jadwal yang direncanakan karena masih dalam proses penyelesaian pekerjaan.

Terhadap hasil kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser s.d. TW II Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas, maka kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :

1. Perlunya percepatan pengajuan dokumen pengadaan ke Bagian Pengadaan

Barang/Jasa untuk kegiatan/subkegiatan yang memerlukan proses pengadaan untuk menghindari keterlambatan proses pengadaan dan proses pelaksanaan pekerjaan;

2. Melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sejak dini;
3. Perlunya koordinasi dan optimalisasi capaian kinerja tujuan, sasaran daerah, IKU OPD, serta program untuk mendukung pencapaian target;
4. Melakukan evaluasi hasil (outcome) dari kegiatan/subkegiatan yang telah dilaksanakan serta bisa berkolaborasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan output kegiatan/sub kegiatan secara rutin.

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik memiliki 1 indikator kinerja yaitu Indeks SPBE yang pengukuran indeks penilaian dilakukan tiap akhir tahun;
2. Sasaran kinerja yang terdiri dari 4 sasaran juga belum dilakukan pengukuran kinerja karena pengukuran kinerja keseluruhan di lakukan pada akhir tahun.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan PD yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat. Kinerja yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah :

1. Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang;
2. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah Keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/Keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan

kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Jika tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, terutama dalam hubungannya dengan urusan komunikasi dan informatika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, beberapa isu strategis urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang ditangani oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan infrastruktur TIK Jaringan Intra Pemerintah, Pusat Data dan Sistem Penghubung yang belum semua memenuhi standar;
2. Meningkatnya kebutuhan penggunaan internet di Perangkat Daerah;
3. Belum terintegrasinya berbagai aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan;
4. Sebagian infrastruktur jaringan local area network (LAN) pada Perangkat Daerah belum sesuai standar;
5. Masih terbatasnya ketersediaan perangkat dan aplikasi untuk keamanan jaringan;
6. Diseminasi informasi yang belum optimal;
7. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan keamanan informasi, peliputan dan pelayanan informasi komunikasi publik.

2.4. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun;
2. Dinas Komunikasi,Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser memilki Struktur Organisasi yang efisien yang memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas;

3. Dinas Komunikasi,Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser memilki Sumber Daya Manusia yang Kompeten guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan walaupun guna pelaksanaan pekerjaan kedepannya jumlah SDM kompeten perlu dilakukan peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya;
4. Dinas Komunikasi,Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser memiliki kultur kerja yang positif dan kondusif sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi pegawainya;
5. Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengembangan teknologi informasi di Kabupaten Paser;

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dan Keterampilan di Bidang Teknologi Informasi menyebabkan Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser belum maksimal dalam pelayanan kepada Perangkat Daerah maupun masyarakat;
2. Perkembangan teknologi yang begitu cepat menyebabkan rencana kerja yang disusun menjadi tidak relevan dan perlu perubahan perubahan kebijakan.
3. Keterbatasan infrastruktur yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Statistik dan Persandian perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	**Indeks SPBE**	**Indeks SPBE**	**2,90**	**2,90**
1	Meningkatnya pelayanan publik dan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi				
		Persentase desa yang bisa mengakses Internet	Persentase desa yang bisa mengakses Internet	80%	80%
		Persentase Instansi pemerintah yang bisa mengakses internet	Persentase Instansi pemerintah yang bisa mengakses internet	97%	97%
		Persentase perangkat daerah yang menyediakan pelayanan publik dan pemerintahan berbasis TIK	Persentase perangkat daerah yang menyediakan pelayanan publik dan pemerintahan berbasis TIK	70%	70%

		Persentase website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah	Persentase website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah	90,47%	90,47%
2	Meningkatkan pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik	Persentase jaringan dan Sistem Aplikasi dalam kondisi aman	Persentase jaringan dan Sistem Aplikasi dalam kondisi aman	75%	75%
3	Meningkatnya ketersediaan data informasi statistik daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	80%	80%
4	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Persentase penanganan umpan balik atas informasi publik yang disebarluaskan	Persentase penanganan umpan balik atas informasi publik yang disebarluaskan	90%	90%

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu ““PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER”” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar wilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian

2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke 2, yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan".

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupatena Paser

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		**Persentase aplikasi yang terintegrasi**	**100%**		**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**		**Persentase aplikasi yang terintegrasi**	**100%**		
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan nama domain dan sub domain di Pemerintah Daerah Kab.Paser	60%		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan nama domain dan sub domain di Pemerintah Daerah Kab.Paser	60%		
1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	3 Domain	203.078.565,00	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	3 Domain	203.078.565,00	
2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.703.250,00	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.703.250,00	

3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	42 Unit	3.881.144.600,00	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	42 Unit	4.617.447.680,00	Pemasangan CCTV 15 titik untuk area publik, Serta belanja Modal Peralatan Jaringan untuk menunjang kegiatan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Penambahan Jaringan Metro untuk Mall Pelayanan Publik, Manage Service access Point Untuk Mall Pelayanan Publik
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Sistem E-Government yang terbangun	60%		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Sistem E-Government yang terbangun	60%		
4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	3 Dokumen	11.737.446.650,00	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	3.485.347.758,00	Belanja Internet VSAT Starlink untuk Desa terjauh, belanja Modal Pendukung berupa printer dan laptop serta belanja pendukung lainnya seperti makan minum rapat dan perjalanan dinas untuk koordinasi mengatasi kendala Menara telekomunikasi pada desa N3T
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	124.092.600,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	124.092.600,00	
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	40 Perangkat Daerah	34.074.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	40 Perangkat Daerah	67.782.000,00	Penambahan Perjalanan dinas guna mendukung kegiatan Koordinasi dan Sinkorniasasi data

7	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten Paser	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	125.150.800,00	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten Paser	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	170.144.800,00	Penambahan Perjalanan dinas guna mendukung kegiatan sistem penghubung layanan pemerintah terkait update SPLP
8	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	163.452.000,00	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	281.988.000,00	Belanja perjalanan dinas untuk kegiatan evaluasi Smart City tahap Dua dan Paket Meeting Fullday untuk rakor dewan Smart City Akhir tahun
9	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	395.660.050,00	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	371.067.362,00	Pergeseran Anggaran
10	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Paser	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Aplikasi	182.338.890,00	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Paser	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	182.338.890,00	
11	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	5.070.904,00	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	5.070.904,00	
12	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	919.277.401,00	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1.988.735.014,00	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi(untuk pergantian alat alat command Center dan peningkatan kapasitas server), Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Perjalanan Dinas, Paket Meeting

											Fullday (kegiatan Rakor Call Center 112), Sistem Pemadam Kebakaran Otomatis Ruang Server, Belanja Modal Studio Audio(Pemeliharaan Peralatan Zoom Meeting), TV dan Laptop
13	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	54.104.940,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	542.091.940,00	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Bimtek Government Chief Information Officer (GCIO) untuk Kepala dinas serta Kepala Bidang (Intruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan E-Government) dan Pelatihan bimtek teknis untuk SDM TIK
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		**Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani**	**100%**		**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		**Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani**	**100%**		
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase masyarakat yang dapat mengakses Informasi	60%		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase masyarakat yang dapat mengakses Informasi	60%		
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	63.281.280,00	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	116.665.280,00	Untuk Menunjang Kegiatan Pengaduan Masyarakat (SP4N-Lapor!)
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	472.302.593,00	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1.052.463.843,00	Penambahan Anggaran guna mendukung peliputan Media Center dan kegiatan pelatihan
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	214.966.968,00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	214.966.968,00	

4	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	188.982.596,00	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	204.834.596,00	Untuk Menunjang Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
5	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	333.636.763,00	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	402.568.763,00	Penambahan anggaran kegiatan makan minum serta perjalanan dinas
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	4.232.674.360,00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	5.196.818.960,00	penambahan iklan/advetorial media cetak, makan kegiatan coffe morning/jumpa pers, perjalanan dinas dan belanja modal laptop
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		**Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral**	**100%**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		**Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral**	**100%**		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Terhimpunnya Data dalam mendukung penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Terhimpunnya Data dalam mendukung penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%		
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	30 Dokumen	75.007.515,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	30 Dokumen	75.007.515,00	
2	Koordinasi, Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Paser	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	4 Orang	155.761.895,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Paser	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	4 Orang	181.557.895,00	Penambahan anggaran perjalanan dinas

3	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten Paser	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	68.067.800,00	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten Paser	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	283.771.800,00	Honorarium Tim Penilai Internal Evaluasi enyelenggaraan Statistik Sektoral dan perjalanan dinas
4	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	34 Orang	47.866.740,00	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	34 Orang	147.866.740,00	Pengembangan Aplikasi Portal Satu Data Berbasis C-KAN dan Perjalanan Dinas
5	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten Paser	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	19.051.300,00	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten Paser	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	19.051.300,00	
6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	30 Dokumen	164.613.500,00	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	30 Dokumen	336.045.500,00	Penambahan anggaran untuk mendukung otorisasi statistik sektoral
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN		**tingkat keamanan informasi**	**63%**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN**		**tingkat keamanan informasi**	**63%**		
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50 %		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50 %		
1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	14.689.500,00	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	14.689.500,00	

2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	10 Laporan	51.354.000,00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	10 Laporan	265.542.000,00	Honorarium Tim Computer Security Incident Responeses Team (CSIRT) dan Makan minum kegiatan Pembentukan TIM CSIRT serta Perjalanan dinas untuk kegiatan Information Technology Security Asssetment (ITSA) untuk 4 Aplikasi
3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	12 Perangkat Daerah	23.381.000,00	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	12 Perangkat Daerah	23.381.000,00	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	55 %		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	55 %		
4	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	15 Perangkat Daerah	5.481.950,00	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	15 Perangkat Daerah	5.481.950,00	
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**indeks kepuasan pelayanan Sekretariat**	**74%**		**PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**indeks kepuasan pelayanan Sekretariat**	**74%**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Diskominfostaper	100 %		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Diskominfostaper	100 %		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	90.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	229.762.000,00	Penjilidan serta honorarium dan perjalanan dinas
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	160.800.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	160.800.000,00	

			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	126.886.000,00	Penambahan anggaran untuk kegiatan evalusi kinerja
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	70.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	40.683.000,00	Pergeseran anggaran
6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	36.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	36.000.000,00	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	12.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	40.962.000,00	Penambahan Belanja Honorarium dan perjalanan dinas
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase ketersedian gaji dan Tunjangan ASN	100 %		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase ketersedian gaji dan Tunjangan ASN	100 %		
8	Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Paser	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	6.356.913.866,00	Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Paser	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	6.706.913.866,00	Penambahan gaji dan tunjangan ASN

9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	8 Laporan	136.310.944,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	195.665.044,00	Tambahan anggaran untuk sub kegiatan rutin keuangan berupa honorarium dan perjalanan dinas
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase pelayanan Adm dalam menunjang kinerja aparatur	100 %		Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase pelayanan Adm dalam menunjang kinerja aparatur	100 %		
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	392.707.865,20	Untuk Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor dan penunjang kegiatan
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.195.410,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.877.510,00	Penambahan Belanja Untuk Kegiatan Harkitnas
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.934.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.462.000,00	Tambahan Belanja Cetak, Spanduk, bunga karangan untuk acara harkitnas dan Kebutuhan Kantor
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.600.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.600.000,00	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	244.323.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	407.851.600,00	Tambahan Belanja untuk kegiatan Harkitnas dan tambahan perjalanan dinas
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan	100 %		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan	100 %		
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	99.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	99.500.000,00	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan BMD	100 %		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan BMD	100 %		
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	31.158.859,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	66.722.800,00	Tambahan Pemeliharaan Kendaraan
18	Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	3.840.000,00	Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	129.860.000,00	Tambahan anggaran untuk pembayaran Service Komputer, Printer, Rehap Ruang Video Conference dan Perencanaan Teknis Rehab Ruang Command Center
Jumlah					**31.389.290.489,00**					**29.335.856.058,20**	

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persadian Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian							30.543.470.675,00	31.389.290.489,00	31.739.290.489,00							24.610.297.605,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							30.543.470.675,00	31.389.290.489,00	31.739.290.489,00							24.610.297.605,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							29.918.195.475,00	30.764.015.289,00	31.114.015.289,00							23.916.755.105,00	
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks kepuasan pelayanan Sekretariat				74 %	74 %	6.780.756.265,00	7.426.576.079,00	7.776.576.079,00							8.574.117.913,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Diskominfostaper	-			100 %	100 %	219.800.000,00	430.800.000,00	430.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		356.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	37.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	112.800.000,00	160.800.000,00	160.800.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah			141.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

																		an yang Responsive dan Tangkas				
	2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ketersedian gaji dan Tunjangan ASN	-			100 %	100 %	6.058.404.996,00	6.493.224.810,00	6.493.224.810,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		7.224.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan	5.922.094.052,00	6.356.913.866,00	6.706.913.866,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			6.989.850.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				8 Laporan	8 Laporan	136.310.944,00	136.310.944,00	136.310.944,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			234.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan Adm dalam menunjang kinerja aparatur	-			100 %	100 %	368.052.410,00	368.052.410,00	368.052.410,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah	Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		693.467.913,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

																			an yang Responsive dan Tangkas				
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	52.195.410,00	52.195.410,00	52.195.410,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			121.067.913,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.934.000,00	15.934.000,00	15.934.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	14 Laporan	244.323.000,00	244.323.000,00	244.323.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			344.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan	-			100 %	100 %	99.500.000,00	99.500.000,00	99.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		153.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60 Laporan	60 Laporan	99.500.000,00	99.500.000,00	99.500.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			153.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	-			100 %	100 %	34.998.859,00	34.998.859,00	34.998.859,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		147.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	31.158.859,00	31.158.859,00	31.158.859,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah			82.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

																			an yang Responsive dan Tangkas				
	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani				100 %	100 %	5.505.844.560,00	5.505.844.560,00	5.505.844.560,00							3.785.037.192,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang dapat mengakses Informasi	-			60 %	60 %	5.505.844.560,00	5.505.844.560,00	5.505.844.560,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat dan Perangkat Daerah		3.785.037.192,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	63.281.280,00	63.281.280,00	63.281.280,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	472.302.593,00	472.302.593,00	472.302.593,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			654.057.350,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	214.966.968,00	214.966.968,00	214.966.968,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			456.834.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	188.982.596,00	188.982.596,00	188.982.596,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			398.393.266,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	1 Dokumen	333.636.763,00	333.636.763,00	333.636.763,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			249.676.002,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.232.674.360,00	4.232.674.360,00	4.232.674.360,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah			1.926.076.074,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

																		an yang Responsive dan Tangkas				
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang terintegrasi				50 %	50 %	17.631.594.650,00	17.831.594.650,00	17.831.594.650,00							11.557.600.000,00	
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan nama domain dan sub domain di Pemerintah Daerah Kab.Paser	-			60 %	60 %	3.990.926.415,00	4.090.926.415,00	4.090.926.415,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat dan Perangkat Daerah		4.627.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				3 Domain	3 Domain	103.078.565,00	203.078.565,00	203.078.565,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			525.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	6.703.250,00	6.703.250,00	6.703.250,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				42 Unit	42 Unit	3.881.144.600,00	3.881.144.600,00	3.881.144.600,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola			4.041.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

																		Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas				
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sistem E-Government yang terbangun	-			60 %	60 %	13.640.668.235,00	13.740.668.235,00	13.740.668.235,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat dan Perangkat Daerah		6.930.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	395.660.050,00	395.660.050,00	395.660.050,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			365.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	5.070.904,00	5.070.904,00	5.070.904,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	919.277.401,00	919.277.401,00	919.277.401,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			375.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	11.637.446.650,00	11.737.446.650,00	11.737.446.650,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			4.629.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				1 Dokumen	1 Dokumen	124.092.600,00	124.092.600,00	124.092.600,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			259.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	34.074.000,00	34.074.000,00	34.074.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				2 Unit	2 Unit	182.338.890,00	182.338.890,00	182.338.890,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			375.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Layanan	1 Layanan	125.150.800,00	125.150.800,00	125.150.800,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah			274.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

																		an yang Responsive dan Tangkas				
	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	1 Dokumen	163.452.000,00	163.452.000,00	163.452.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	54.104.940,00	54.104.940,00	54.104.940,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							530.368.750,00	530.368.750,00	530.368.750,00							558.006.000,00	
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral				100 %	100 %	530.368.750,00	530.368.750,00	530.368.750,00							558.006.000,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terhimpunnya Data dalam mendukung penyelenggaraan Statistik Sektoral	-			100 %	100 %	530.368.750,00	530.368.750,00	530.368.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat dan Perangkat Daerah		558.006.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				30 Dokumen	30 Dokumen	155.761.895,00	155.761.895,00	155.761.895,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			218.840.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				4 Orang	4 Orang	68.067.800,00	68.067.800,00	68.067.800,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	19.051.300,00	19.051.300,00	19.051.300,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				34 Orang	34 Orang	75.007.515,00	75.007.515,00	75.007.515,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik				1 Unit	1 Unit	47.866.740,00	47.866.740,00	47.866.740,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

																		an yang Responsive dan Tangkas				
	2	20	02	2.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun				30 Dokumen	30 Dokumen	164.613.500,00	164.613.500,00	164.613.500,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			154.166.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							94.906.450,00	94.906.450,00	94.906.450,00							135.536.500,00	
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	tingkat keamanan informasi				63 %	63 %	94.906.450,00	94.906.450,00	94.906.450,00							135.536.500,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.	-			50 %	50 %	89.424.500,00	89.424.500,00	89.424.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat dan Perangkat Daerah		108.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	14.689.500,00	14.689.500,00	14.689.500,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			17.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				10 Laporan	10 Laporan	51.354.000,00	51.354.000,00	51.354.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				12 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	23.381.000,00	23.381.000,00	23.381.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			36.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terjalinya koordinasi dan komunikasi sandi di perangkat daerah.	-			55 %	55 %	5.481.950,00	5.481.950,00	5.481.950,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat dan Perangkat Daerah		27.536.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	5.481.950,00	5.481.950,00	5.481.950,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			27.536.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	JUMLAH												**30.543.470.675,00**	**31.389.290.489,00**	**31.739.290.489,00**							**24.610.297.605,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

5.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tana Paser, Agustus 2024

Kepala,

Drs. H. Arief Rahman, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19680206 198803 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2024

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Paser Tahun 2024.

Rancangan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan Rencana Kerja periode satu tahunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun 2024, dimana dalam Rancangan Renja OPD tergambar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun, yang merupakan bagian dari ReRencana Strategis (REVIEW RENSTRA) DLH Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya rancangan Renja OPD diharapkan mampu meningkatkan capaian kinerja dalam memberikan pelayanan secara optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Rancangan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup tergambarkan rencana program dan kegiatan serta capaian kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan Renstra. Rencana Kerja OPD juga menganalisa setiap target dan sasaran untuk memperoleh kinerja sesungguhnya serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi sehingga pada pelaksanaannya nanti dapat terlaksana secara optimal.

Akhirnya, kami berharap agar Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi sesuai Renstra DLH Kab. Paser Tahun 2021 – 2026.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar isi ii

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 5

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 23

2.3. Faktor pendorong dan penghambat dan solusi permasalahan dalam pelaksanaan hasil renja PD tahun 2024 27

BAB III Rancangan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Derah 28

3.1 Tujuan dan Sasaran 28

3.2 Review terhadap rancangan perubahan RKPD Tahun 2024 30

3.3 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 57

3.4 Program Kegiatan dan Sub kegiatan 57

BAB V Penutup 32

4.1 **Kaidah-kaidah pelaksanaan.** 32

4.2 **Rencana tindak lanjut** 32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rancangan Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Pergeseran pagu kegiatan Dinas, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Rancangan Rancangan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Lingkungan Hidup, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan I Tahun 2024.

Selanjutnya Rancangan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah :

a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
d. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
h. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional
k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
m. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2020
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah;
p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah;
q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

tentang hasil verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
t. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025
u. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
v. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006 – 2025.
w. Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
x. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
y. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
z. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026
aa. Peraturan Bupati 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rancangan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renja perubahan tahun 2024 pada triwulan ke 3 (tiga) dan 4 (empat) akhir

tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rancangan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup, proses penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup, keterkaitan antaraRenja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Lingkungan Hidup, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

3.4 Rencana Program dan Kegiatan Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

3.5 Target Kinerja

Memuat tabel rencana capaian target kinerja perubahan tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan Rancangan Rencana Kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana Tabel 2.1 dalam format berikut:

Tabel 2.1
Laporan Evaluasi RENJA Triwulan II s/d Bulan April Tahun 2024

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

Sasaran SKPD Tahunan :

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (%)		Ket
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**59.048.766.858**		**0**		**59.048.766.858**		**0**		**0**						**0**		**0**		**0**	
		2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**59.048.766.858**		**0**		**59.048.766.858**		**0**		**0**						**0**		**0**		**0**	
1		**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi terlaksana (%)**	**500**	**18.701.466.002**	**200**	**0**	**100**	**18.701.466.002**	**4,3**	**0**	**54,03**	**0**					**58,33**	**0**	**258,33**	**0**	**51,67**	**0**	
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun (%)	500	579.400.000	191	0	100	579.400.000	8	0	58	0					66	0	257	0	51,4	0	
		2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	185.000.000	4	0	2	185.000.000	0	0	0	0					0	0	4	0	40	0	
		2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	170.300.000	2	0	1	170.300.000	0	0	1	0					1	0	3	0	60	0	
		2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	5	50.000.000	2	0	1	50.000.000	0	0	1	0					1	0	3	0	60	0	

		Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																				
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	13.500.000	2	0	1	13.500.000	0	0	1	0					1	0	3	0	60	0
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5	13.500.000	2	0	1	13.500.000	0	0	0	0					0	0	2	0	40	0
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20	133.600.000	7	0	4	133.600.000	0	0	3	0					3	0	10	0	50	0
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	5	13.500.000	2	0	1	13.500.000	1	0	0	0					1	0	3	0	60	0
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi keuangan terlaksana (%)	500	15.895.762.636	200	0	100	15.895.762.636	16,19	0	30,81	0					47	0	247	0	49,4	0
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	452	15.628.016.636	168	0	90	15.628.016.636	3	0	3	0					6	0	174	0	38,5	0
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60	123.990.000	24	0	12	123.990.000	0	0	6	0					6	0	30	0	50	0
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	75.000.000	2	0	1	75.000.000	0	0	0	0					0	0	2	0	40	0
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	20	35.285.000	8	0	4	35.285.000	0	0	2	0					2	0	10	0	50	0

2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5	33.471.000	2	0	1	33.471.000	0	0	0	0					0	0	2	0	40	0
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang telah mengikuti Bintek (%)	325	275.000.000	292,2	0	65	275.000.000	0	0	75,06	0					75,06	0	367,26	0	113	0
2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	35	275.000.000	30	0	7	275.000.000	0	0	5	0					5	0	35	0	100	0
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran terlayani (%)	500	632.409.300	200	0	100	632.409.300	5,08	0	28,49	0					33,57	0	233,57	0	46,71	0
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25	4.220.500	10	0	5	4.220.500	0	0	0	0					0	0	10	0	40	0
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	192	50.000.000	72	0	38	50.000.000	0	0	0	0					0	0	72	0	37,5	0
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	75	34.213.800	30	0	15	34.213.800	0	0	0	0					0	0	30	0	40	0
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.800	5.475.000	720	0	360	5.475.000	0	0	0	0					0	0	720	0	40	0
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	190	300.000.000	76	0	38	300.000.000	0	0	0	0					0	0	76	0	40	0
2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	800	128.500.000	300	0	200	128.500.000	0	0	0	0					0	0	300	0	37,5	0
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10	110.000.000	4	0	2	110.000.000	0	0	0	0					0	0	4	0	40	0
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor tersedia (%)	397	400.000.000	152	0	80	400.000.000	0	0	0	0					0	0	152	0	38,29	0

	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5	100.000.000	2	0	1	100.000.000	0	0	0	0					0	0	2	0	40	0
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	25	300.000.000	42	0	5	300.000.000	0	0	0	0					0	0	42	0	168	0
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang adnministrasi perkantoran terlayani (%)	500	766.406.066	200	0	100	766.406.066	7,65	0	29,02	0					36,67	0	236,67	0	47,33	0
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.000	2.000.000	400	0	200	2.000.000	0	0	0	0					0	0	400	0	40	0
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	297.914.646	24	0	12	297.914.646	3	0	3	0					6	0	30	0	50	0
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	466.491.420	24	0	12	466.491.420	0	0	0	0					0	0	24	0	40	0
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor terpelihara (%)	490	152.488.000	190	0	100	152.488.000	0	0	26,36	0					26,36	0	216,36	0	44,16	0
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	95	140.308.000	38	0	19	140.308.000	0	0	2	0					2	0	40	0	42,11	0
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	49	12.180.000	19	0	10	12.180.000	0	0	0	0					0	0	19	0	38,78	0
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
	Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																								
2	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase dokumen Perencanaan, kajian lingkungan hidup dan evaluasi Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan (%)**	**389,01**	**1.115.368.000**	**132,5**	**0**	**83,3**	**1.115.368.000**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**	**132,5**	**0**	**34,06**	**0**

		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan dan evaluasinya (%)	450	361.250.000	150	0	100	361.250.000	0	0	0	0					0	0	150	0	33,33	0
		2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	15	276.250.000	6	0	3	276.250.000	0	0	0	0					0	0	6	0	40	0
		2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			85.000.000		0		85.000.000		0	0	0						0		0		0
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan hidup dan evaluasinya (%)	291,65	754.118.000	83,33	0	58,33	754.118.000	0	0	0	0					0	0	83,33	0	28,57	0
		2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			473.418.000		0		473.418.000		0	0	0						0		0		0
		2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS			40.150.000		0		40.150.000		0	0	0						0		0		0
		2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang			240.550.000		0		240.550.000		0	0	0						0		0		0
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																							
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																							
3		**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**persentase cakupan pancegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (%)**	**376**	**2.029.136.190**	**135,22**	**0**	**75**	**2.029.136.190**	**17**	**0**	**13**	**0**					**30**	**0**	**165,22**	**0**	**43,94**	**0**
				persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (%)	**60**		**12,79**		**12**		**3**		**2**						**5**		**17,79**		**29,65**	
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah persetujuan teknis lingkungan yang dikeluarkan (Dokumen)	319	952.141.890	19	0	65	952.141.890	0	0	0	0					0	0	19	0	5,96	0

2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	40	185.190.000	13	0	8	185.190.000	0	0	0	0					0	0	13	0	32,5	0
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	10	102.140.000	4	0	2	102.140.000	0	0	0	0					0	0	4	0	40	0
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota			664.811.890		0		664.811.890		0		0						0		0		0
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pemantauan Lingkungan terlaksana (Jenis)	45	840.000.000	18	0	9	840.000.000	0	0	6	0					6	0	24	0	53,33	0
		Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki sumber pencemar yang di pantau (Perusahaan)	150		60		30		0		19						19		79		52,67	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	200	705.000.000	108	0	40	705.000.000	0	0	0	0					0	0	108	0	54	0
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Laporan)	150	135.000.000	23	0	30	135.000.000	0	0	20	0					20	0	43	0	28,67	0
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan lahan kritis yang di rehabilitasi luar kawasan (Ha)	150	236.994.300	37,74	0	40	236.994.300	33	0	0	0					33	0	70,74	0	47,16	0

		2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi			30.000.000		0		30.000.000		0	0	0						0		0		0
		2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota			191.994.300		0		191.994.300		0	50	0						0		0		0
		2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi			15.000.000		0		15.000.000		0	0	0						0		0		0
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																								
4		**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Rasio Luas RTH (Ruang terbuka Hijau) dan Taman kehati yang dikelola (%)**	**325**	**9.335.653.866**	**115**	**0**	**65**	**9.335.653.866**	**15,76**	**0**	**15,75**	**0**					**31,51**	**0**	**146,51**	**0**	**45,08**	**0**
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan konservasi/ RTH dan taman Kehati terkelola (Lokasi)	60	9.335.653.866	24	0	12	9.335.653.866	3	0	3	0					6	0	30	0	50	0
				Jumlah kawasan konservasi/ RTH dan taman Kehati terkelola (Lokasi)	60		24		12		3		3						6		30		50	
		2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	319,1	8.737.250.448	127,64	0	63,82	8.737.250.448	15,96	0	15,96	0					31,92	0	159,56	0	50	0
		2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	5	62.003.418	2	0	1	62.003.418	0	0	0	0					0	0	2	0	40	0
		2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			536.400.000		0		536.400.000		0		0						0		0		0
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																								
5		**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**persentase jumlah perusahaan/pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3 (%)**	**440**	**352.066.400**	**51,2**	**0**	**100**	**352.066.400**	**0**	**0**	**42**	**0**					**42**	**0**	**93,2**	**0**	**21,18**	**0**

2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	jumlah rekomendasi penyimpanan limbah yang dikeluarkan (Dokumen)	44	107.066.400	7	0	8	107.066.400	0	0	1	0					1	0	8	0	18,18	0
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	9	73.800.000	3	0	1	73.800.000	0	0	3	0					3	0	6	0	66,67	0
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)	3	33.266.400	1	0	1	33.266.400	0	0	2	0					2	0	3	0	100	0
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi pengumpulan limbah yang dikeluarkan (Dokumen)	25	245.000.000	0	0	5	245.000.000	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	20	245.000.000	8	0	4	245.000.000	0	0	0	0					0	0	8	0	40	0

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	:
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya	:
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya	:

6		**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**persentase perusahaan/pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan (%)**	**480**	**194.893.000**	**124,28**	**0**	**100**	**194.893.000**	**19,23**	**0**	**15,39**	**0**					**34,62**	**0**	**158,9**	**0**	**33,1**	**0**	
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase rekomendasi tindaklanjut evaluasi yang diberikan (%)	270	194.893.000	68,33	0	55	194.893.000	11	0	8	0					19	0	87,33	0	32,34	0	
		2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	0	158.425.000	0	0	0	158.425.000	5	0	5	0					9	0	9	0	9	0	
		2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup			36.468.000		0		36.468.000		0		0					0		0		0	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																						
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																						
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																						
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																						
7		**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG**	**persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan (%)**	**500**	**40.350.000**	**200**	**0**	**100**	**40.350.000**	**0**	**0**	**100**	**0**					**100**	**0**	**300**	**0**	**60**	**0**	

			TERKAIT DENGAN PPLH																						
		2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pembinaan (MHA)	7	40.350.000	2	0	1	40.350.000	0	0	1	0					1	0	3	0	42,86	0
		2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	7	40.350.000	2	0	2	40.350.000	0	0	2	0					2	0	4	0	57,14	0
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																							
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																							
8		**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**persentase kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (%)**	**320**	**164.195.000**	**95**	**0**	**65**	**164.195.000**	**5,91**	**0**	**8,86**	**0**					**14,77**	**0**	**109,77**	**0**	**34,3**	**0**
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Kelompok)	150	164.195.000	45	0	29	164.195.000	3	0	4	0					7	0	52	0	34,67	0
		2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	130	128.745.000	40	0	25	128.745.000	2	0	2	0					4	0	44	0	33,85	0

		2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (kelompok)	5	35.450.000	4	0	1	35.450.000	0	0	1	0					1	0	5	0	100	0
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																							
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																							
9		**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah penghargaan pengelolaan kualitas lingkungan hidup (Piagam Adipura)**	**5**	**70.490.000**	**2**	**0**	**1**	**70.490.000**	**1**	**0**	**0**	**0**					**1**	**0**	**3**	**0**	**60**	**0**
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis penilaian dan penghargaan lingkungan hidup terselenggara (Jenis)	15	70.490.000	6	0	3	70.490.000	1	0	0	0					1	0	7	0	46,67	0
		2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			70.490.000		0		70.490.000	4	0	2	0						0		0		0
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																							
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																							
10		**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengaduan lingkungan hidup yang ditangani (%)**	**500**	**175.095.000**	**98**	**0**	**100**	**175.095.000**	**0**	**0**	**9**	**0**					**9**	**0**	**107**	**0**	**21,4**	**0**
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah sangsi administrasi yang diterapkan (Kasus)	10	175.095.000	3	0	2	175.095.000	0	0	0	0					0	0	3	0	30	0
		2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran			115.000.000		0		115.000.000		0	3	0						0		0		0

			dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota																							
	2.11.10.2.01.0006		Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota		60.095.000		0		60.095.000		0		0						0		0		0	
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
	Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																									
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																									
11	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**persentase pengelolaan sampah disumber (%)**	**117**	**26.870.053.400**	**22,57**	**0**	**24**	**26.870.053.400**	**10**	**0**	**0**	**0**					**10**	**0**	**32,57**	**0**	**27,84**	**0**
			persentase sampah yang terangkut ke TPA (%)	**299**		**98**		**61**		**25**		**0**						**25**		**123**		**41,14**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah terangkut ke TPA (Ton)	82.000	26.840.363.400	33.083,88	0	16.500	26.840.363.400	6.875	0	0	0					6.875	0	39.958,88	0	48,73	0
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	20	199.800.000	8	0	4	199.800.000	0	0	2	0					2	0	10	0	50	0
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	20	17.819.000	8	0	4	17.819.000	0	0	0	0					0	0	8	0	40	0

2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	597	10.836.550.200	221	0	106	10.836.550.200	5	0	2	0					7	0	228	0	38,19	0
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan			4.093.844.200		0		4.093.844.200	6.875	0	0	0						0		0		0
2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah			269.867.100		0		269.867.100		0		0						0		0		0
2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah			21.592.000		0		21.592.000		0		0						0		0		0
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah			9.553.505.600		0		9.553.505.600		0		0						0		0		0
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			1.847.385.300		0		1.847.385.300	7.084	0	0	0						0		0		0
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah (%)	500	29.690.000	200	0	100	29.690.000	0	0	28	0					28	0	228	0	45,6	0
2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja (Unit)	10	29.690.000	3	0	2	29.690.000	0	0	1	0					1	0	4	0	40	0
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																							
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**25.229.747.598**		**0**		**25.229.747.598**		**0**		**0**						**0**		**0**		**0**	

		3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**25.229.747.598**		**0**		**25.229.747.598**		**0**		**0**						**0**		**0**		**0**	
12		**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Persentase luasan tahura yang dikelola dan berfungsi dengan baik. (%)**	**389,98**	**25.229.747.598**	**150,16**	**0**	**78,33**	**25.229.747.598**	**0**	**0**	**53**	**0**					**53**	**0**	**203,16**	**0**	**52,09**	**0**	
		3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan dan keamanan dari gangguan dan kerusakan kawasan (Persen)	500	25.229.747.598	200	0	100	25.229.747.598	0	0	53	0					53	0	253	0	50,6	0	
				Persentase tutupan lahan kritis dalam kawasan terlaksana (Persen)	495		195		100		0		53						53		248		50,1		
				Persentase pemanfaatan jasa lingkungan, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat desa penyangga terlaksana (Persen)	170		50		35		0		19						19		69		40,59		
				Persentase pengawasan dan keamanan dari gangguan dan kerusakan kawasan (%)	500		200		100		0		53						53		253		50,6		
				Persentase tutupan lahan kritis dalam kawasan terlaksana (%)	170		49		35		0		19						19		68		40		
				Persentase pemanfaatan jasa lingkungan, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat desa penyangga terlaksana (%)	495		195		100		0		53						53		248		50,1		
		3.28.04.2.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota (Operasi)	25	3.474.858.008	55	0	5	3.474.858.008	0	0	30	0					30	0	85	0	340	0	
		3.28.04.2.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem (Ha)	368	2.082.194.404	318	0	50	2.082.194.404	0	0	40	0					40	0	358	0	97,28	0	
		3.28.04.2.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang	5	18.388.573.936	2	0	1	18.388.573.936	0	0	0	0					0	0	2	0	40	0	

				Kabupaten/ Kota	Ditindak Lanjuti (Permohonan)																					
		3.28.04.2.01.0007		Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/ Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota (Dokumen)	9	205.517.250	8	0	1	205.517.250	0	0	1	0					1	0	9	0	100	0	
		3.28.04.2.01.0008		Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif (Desa)	19	1.078.604.000	10	0	3	1.078.604.000	0	0	1	0					1	0	11	0	57,89	0	

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa :

1. Total realisasi hingga triwulan II adalah 8,80 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.426.814.879 (Sepuluh milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 84.278.514.456 (Delapan puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah)
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dibawah 25 % dengan predikat kinerja Sangat Rendah .

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Dinas Lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
b. Penetapan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah Bahan berbahaya dan Beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta pengelolaan Taman Hutan Rakyat, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup
2. Pelayanan dibidang pemantauan Lingkungan
3. Pelayanan dibidang peningkatan kapasitas Lingkungan hidup
4. Pelayanan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup
5. Pelayanan diseksi penegakan hukum Lingkungan
6. Pelayanan Fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Indek Kualitas Lahan (IKL)
2. Indek Kualitas Udara (IKU)
3. Indek Kualitas Air (IKA)
4. Cakupan sampah tertangani
5. Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan
6. Nilai Evaluasi SAKIP

a. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Secara terperinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser jika mengacu pada Indikator kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada table 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

NO	Angka/Nilai target/standard (IKU,SPM,IKK)		Target Renstra PD						Realisasi Capaian		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan/hutan	Indek Kualitas Lahan (IKL)	72,56	72,61	71,71	71,76	71,81	71,86	71,51	71,71	71,20
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,74	88,92	89,02	89,07	89,12	89,17	90,59	89,53	90,46
3	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	47,85	48,80	48,85	48,90	48,95	49,00	57,50	54,09	54,09
4	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah	Persentase sampah yang tertangani	50,37	59	72	85	100	100	60,66	60,44	71,96
5	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan	Persentase ketaatan pelaku usaha/ kegiatan terhadap ijin lingkungan	82,42	85	90,00	95	100	100	82,42	85	75,00
6	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai evaluasi SAKIP	79,23	62,00	64,00	66,00	68	69	61,51	67,29	N/A

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 " Meningkatnya indeks tutupan lahan/hutan " memiliki 1 indikator kinerja yaitu ""Indek Tutupan Lahan/Hutan"", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar N/A dari target sebesar 71,76 dengan capaian kinerja sebesar N/A %.
2. Sasaran 2 " Meningkatnya indeks Kualitas Udara belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar N/A dari target sebesar 89,07 dengan capaian kinerja sebesar N/A % dan Meningkatnya indeks Kualitas Air belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar N/A dari target sebesar 48,90 dengan capaian kinerja sebesar N/A
3. Sasaran 3 " Meningkatnya Cakupan Pengelolaan sampah" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase sampah yang tertangani", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar N/A dari target sebesar 85 dengan capaian kinerja sebesar N/A %
4. Sasaran 4 " Meningkatnya Ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar N/A dari target sebesar 95 dengan capaian kinerja sebesar N/A %.
5. Sasaran 5 " Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Nilai Evaluasi SAKIP", telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar N/A dari target sebesar 66 dengan capaian kinerja sebesar N/A %.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Pd Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan bulan April Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% yang baru terealisasi hanya 27% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
2. Juknis pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang terlambat
3. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
4. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat
5. Pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rancangan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran pada Rancangan Perubahan Renja DLH

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Rancangan Perubahan Renja 2024
Meningkatkan Upaya konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati	peningkatan Skor Indeks Tutupan Lahan			
Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan/Hutan	Indeks Tutupan Lahan/Hutan	IKL=100-(84,3-(TH x 100))x 50/54,3 IKL=Indek Kualitas Lahan; TH=Tutupan Lahan	71,76	71,76
Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan Skor indeks kualitas udara			
	Peningkatan Skor indeks kualitas air			
Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	$IKU = \frac{IK_{NO2} + IK_{SO2}}{2}$ IKNO2 = Indeks Kualitas NO2 IKSO2 = Indeks Kualitas SO2 Hasil pengujian	89,07	89,07

		kualitas udara		
Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	$PIj = \sqrt{\frac{(Ci/Lij)_M^2 + (Ci/Lij)_R^2}{2}}$ (Ci/Lij) M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij) R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij	48,90	48,90
meningkatnya cakupan area pengelolaan sampah	Persentase cakupan area pengelolaan sampah			
Meningkatkan cakupan pengelolaan sampah	Persentase sampah yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah sampah tertangani (Ton)}}{\text{Total Jumlah timbulan sampah Kabupaten (Ton)}} X$	85	85
Meningkatkan peranserta dan ketaatan masyarakat dan pelaku usaha serta efektifitas pengawasan, pengendalian dan penaatan pada hukum lingkungan	persentase cakupan area pembinaan dan pengawasan PPLH			
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan	$\frac{\text{Jumlah Ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan}}{\text{Total pelaku usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan}} x\ 100$	95	95
Meningkatkan tata kelola dan kinerja organisasi	Indek Reformasi Birokrasi Unit			
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai evaluasi SAKIP		66	66
	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Aksternal		0	0

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Rancangan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu "**PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DISELURUH KABUPATEN PASER "** yang dijabarkan ke dalam empat Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup mendukung pencapaian sasaran ke-3.2, yaitu "Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana".

Sasaran adalah penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan secara terukur setiap tahunnya, untuk itu sasaran yang ditetapkan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Paser guna mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang adalah :

1. Meningkatnya Tutupan Lahan/Hutan
2. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara
3. Meningkatnya Kualitas Air
4. Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah
5. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan
6. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Lingkungan Hidup melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun kebutuhan rencana rancangan perubahan Sebagian besar terdiri dari penyesuaian penambahan kekurangan Gaji ASN dan PTT , Penyediaan sarana dan Prasarana persampahan , penyesuaian pagu DBH-DR, adanya penambahan dana karbon, dan penambahan dana untuk sampling periode kedua sebagai data IKLH.

Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Analisa kebutuhan review terhadap rancangan Perubahan Dinas Lingkungan Hidup

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Dinas Lingkungan Hidup					**Dinas Lingkungan Hidup**					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**84.278.514.456**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**94.897.660.411**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				59.048.766.858	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				69.525.603.880	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.701.466.002	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				18.953.058.526	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**579.400.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**579.400.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	185.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	185.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	170.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	170.300.000	

			Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	13.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	13.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	13.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	13.500.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	133.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	133.600.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	13.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	13.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser			**15.895.762.636**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Paser			**15.970.150.636**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	15.628.016.636	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	15.628.016.636	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	123.990.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	198.378.000	

			Pelaksanaan Tugas ASN					Pelaksanaan Tugas ASN			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	75.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	35.285.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	35.285.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	33.471.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	33.471.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Paser			**275.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Paser			**275.000.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Paser	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Paser	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	275.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	275.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser			**632.409.300**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Paser			**662.409.300**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.220.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.220.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	50.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	15 Paket	34.213.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	15 Paket	34.213.800	

			yang Disediakan					Penggandaan yang Disediakan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.475.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.475.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	300.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	128.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	158.500.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	110.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	110.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Paser			**400.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Paser			**400.000.000**	

	Pengadaan Mebel	Kab. Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	300.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	300.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser			**766.406.066**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Paser			**913.610.590**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	297.914.646	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	297.914.646	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	466.491.420	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	613.695.944	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser			**152.488.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Paser			**152.488.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	140.308.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	140.308.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	12.180.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	12.180.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Paser			**1.115.368.000**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Kab. Paser			**1.115.368.000**	

	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Paser			**361.250.000**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Kab. Paser			**361.250.000**	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	3 Dokumen	276.250.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	3 Dokumen	276.250.000	
	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen	85.000.000	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen	85.000.000	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Paser			**754.118.000**	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Kab. Paser			**754.118.000**	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	473.418.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	473.418.000	
	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Kab. Paser	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1 Dokumen	40.150.000	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Kab. Paser	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1 Dokumen	40.150.000	

	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Paser	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	240.550.000	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Paser	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun	1 Dokumen	240.550.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Paser			**2.029.136.190**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Kab. Paser			**2.875.938.340**	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Paser			**952.141.890**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Kab. Paser			**1.484.834.840**	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	8 Dokumen	185.190.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	8 Dokumen	219.210.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah	2 Dokumen	102.140.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi	2 Dokumen	196.358.150	

	Adaptasi Perubahan Iklim		Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			Adaptasi Perubahan Iklim		Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Paser	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 Dokumen	664.811.890	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Paser	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 Dokumen	1.069.266.690	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Paser			**840.000.000**	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Kab. Paser			**988.007.500**	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	705.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	789.268.000	

	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	30 Titik	135.000.000	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	30 Titik	198.739.500	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Paser			**236.994.300**	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Kab. Paser			**403.096.000**	
	Pelaksanaan rehabilitasi	Kab. Paser	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Ha	30.000.000	Pelaksanaan rehabilitasi	Kab. Paser	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Ha	119.760.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Kab. Paser	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	50 Kegiatan	191.994.300	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Kab. Paser	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	50 Kegiatan	233.914.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Paser	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	10 Kegiatan	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Paser	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	10 Kegiatan	49.422.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Paser			**9.335.653.866**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Kab. Paser			**9.815.748.066**	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Paser			**9.335.653.866**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Kab. Paser			**9.815.748.066**	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Paser	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	63.8171 Ha	8.737.250.448	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Paser	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	63.8171 Ha	9.177.512.948	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	62.003.418	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	62.003.418	
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Paser	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup	1 Unit	536.400.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Paser	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	1 Unit	536.400.000	

			Kewenangan Kabupaten/Kota					Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota			
	Penyusunan RIP KEHATI	Kab. Paser		1 Dokumen						39.831.700	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Paser			**352.066.400**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Kab. Paser			**411.591.900**	
	Penyimpanan sementara Limbah B3	Kab. Paser			**107.066.400**	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Kab. Paser			**115.209.900**	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Paser	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	73.800.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Paser	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	73.800.000	

	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Kab. Paser	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2 Laporan	33.266.400	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Kab. Paser	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2 Laporan	41.409.900	
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser			**245.000.000**	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Paser			**296.382.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan	4 Dokumen	245.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	4 Dokumen	296.382.000	

			Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya					yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/ Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Paser			**194.893.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Kab. Paser			**194.893.000**	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser			**194.893.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Paser			**194.893.000**	

	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	26 Badan Usaha	158.425.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	26 Badan Usaha	158.425.000	
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang	36.468.000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang	36.468.000	
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab. Paser			**40.350.000**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	Kab. Paser			**40.350.000**	
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Kab. Paser			**40.350.000**	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	Kab. Paser			**40.350.000**	

	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2 Dokumen	40.350.000	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2 Dokumen	40.350.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Paser			**164.195.000**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Kab. Paser			**164.195.000**	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser			**164.195.000**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Paser			**164.195.000**	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah Pendampingan Pembinaan	21 Dokumen	128.745.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah Pendampingan	21 Dokumen	128.745.000	

			Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1 Orang	35.450.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1 Orang	35.450.000	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Paser			**70.490.000**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Kab. Paser			**70.490.000**	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser			**70.490.000**	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Paser			**70.490.000**	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	23 Entitas	70.490.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	23 Entitas	70.490.000	

	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Paser			**175.095.000**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Kab. Paser			**199.445.000**	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Paser			**175.095.000**	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Kab. Paser			**199.445.000**	
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	22 Pengaduan	115.000.000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	22 Pengaduan	139.350.000	
	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Paser	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiata	8 Perkara	60.095.000	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Paser	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegia	8 Perkara	60.095.000	

			n yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota					tan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Paser			**26.870.053.400**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Kab. Paser			**35.684.526.048**	
	Pengelolaan Sampah	Kab. Paser			**26.840.363.400**	**Pengelolaan Sampah**	Kab. Paser			**35.654.836.048**	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Paser	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Kelompok	199.800.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Paser	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Kelompok	269.169.100	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Ko	1 Dokumen	17.819.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun	1 Dokumen	17.819.000	

			ta untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada					Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	35 Unit	10.836.550.200	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	35 Unit	19.535.653.748	
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kab. Paser	Jumlah sampah yang tertangani	16500 Ton	4.093.844.200	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kab. Paser	Jumlah sampah yang tertangani	16500 Ton	4.163.844.200	

			melalui proses pengangkutan					melalui proses pengangkutan			
	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Kab. Paser	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	2334 Ton	269.867.100	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Kab. Paser	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	2334 Ton	245.867.100	
	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kab. Paser	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 Laporan	21.592.000	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kab. Paser	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 Laporan	21.592.000	
	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Paser	Jumlah sampah yang terdaur ulang	4500 Ton	9.553.505.600	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Paser	Jumlah sampah yang terdaur ulang	4500 Ton	9.553.505.600	
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Paser	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	17000 Ton	1.847.385.300	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Paser	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	17000 Ton	1.847.385.300	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang	Kab. Paser			**29.690.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang**	Kab. Paser			**29.690.000**	

	Diselenggarakan oleh Pihak Swasta					**Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**					
	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kab. Paser	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	2 Unit	29.690.000	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kab. Paser	Jumlah Unit/Usaha/ Swasta/Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	2 Unit	29.690.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kab. Paser				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	Kab. Paser				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Kab. Paser				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	Kab. Paser				
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kab. Paser			**25.229.747.598**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	Kab. Paser			**25.372.056.531**	
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Kab. Paser			**25.229.747.598**	**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**	Kab. Paser			**25.372.056.531**	
	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	100 Ha	3.474.858.008	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/ Kota yang diamankan	100 Ha	3.641.166.941	

	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	50 Ha	2.082.194.404	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	50 Ha	2.082.194.404	
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	1 Permohonan	18.388.573.936	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	1 Permohonan	18.274.195.936	
	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	1 Dokumen	205.517.250	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	1 Dokumen	205.517.250	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	3 Desa	1.078.604.000	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	3 Desa	1.168.982.000	
					84.278.514.456					**94.897.660.411**	

3.3 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang berasal dari pemangku kepentingan pada perubahan tahun 2024, adapun daftar program dan kegiatan yang menjadi usulan para pemangku kepentingan terkait urusan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan pada perubahan Tahun 2024

No	Program/kegiatan	Lokasi	Catatan pagu musrenbang yang diberikan ke SKPD
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		
1.	Pengadaan Bak Sampah	RT. 10 RW. 005 Kee. Tanah Grogot	100.000.000
2.	Pengadaan Bak Sampah	Desa Padang Pengrapat Kee. Tanah Grogot	100.000.000
3.	Pembuatan Kanopi dan Pagar Transfer Depo Sampah	Semumun	200.000.000
4.	Pembuatan Jalan Masuk Transfer Depo Sampah	Jone	200.000.000
5.	Penambahan Ruangan dan Pembuatan Pagar TPS 3R	Balai Benih	200.000.000
6.	Mobil Pengangkut Sampah (pickup)	Desa Kryan bahagia	250.000.000

3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rancangan Rencana Kerja Dinas lingkungan Hidup Tahun 2024 meliputi 12 Program yaitu :

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1) PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
1) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
2) Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2) Pemantauan dan Evaluasi KLHS
3) Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

3. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
3) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota

4. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
2) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

5. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
1) Pelaksanaan rehabilitasi
2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
3) Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi

3. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

6. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

3) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
4) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

4. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

7. Penyimpanan sementara Limbah B3

1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3

8. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

9. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2) Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

6. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

10. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

1) Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

9. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

10. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

9. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

11. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
2) Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

10. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

12. Pengelolaan Sampah

1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
4) Penanganan sampah melalui pengangkutan
5) Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
6) Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
7) Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
8) Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta

1) Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah

11. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

14. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

15. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
5) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

16. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

17. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

18. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Mebel
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

19. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

20. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

12. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

21. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota

1) Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota
2) Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota
3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota
4) Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota
5) Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota

MATRIK PERUBAHAN DLH 2024 SESUAI RKPD PADA SIPD

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Pagu Anggaran Murni	Pagu Anggaran Pergeseran	Pagu Anggaran Perubahan	Bertambah/ Berkurang
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan							
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**84.178.514.456**	**84.278.514.456**	**94.897.660.411**	**10.619.145.955**
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**59.048.766.858**	**59.048.766.858**	**69.525.603.880**	**10.476.837.022**
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**1.115.368.000**	**1.115.368.000**	**1.115.368.000**	**-**
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**			**361.250.000**	**361.250.000**	**361.250.000**	**-**
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	276.250.000	276.250.000	276.250.000	-
2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.000.000	85.000.000	85.000.000	-
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**			**754.118.000**	**754.118.000**	**754.118.000**	**-**
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	473.418.000	473.418.000	473.418.000	-
2	11	02	2.02	0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.150.000	40.150.000	40.150.000	-

2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240.550.000	240.550.000	240.550.000	-
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**2.029.136.190**	**2.029.136.190**	**2.875.938.340**	**846.802.150**
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**			**952.141.890**	**952.141.890**	**1.484.834.840**	**532.692.950**
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185.190.000	185.190.000	219.210.000	34.020.000
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102.140.000	102.140.000	196.358.150	94.218.150
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	664.811.890	664.811.890	1.069.266.690	404.454.800
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**			**840.000.000**	**840.000.000**	**988.007.500**	**148.007.500**
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	705.000.000	705.000.000	789.268.000	84.268.000
2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135.000.000	135.000.000	198.739.500	63.739.500
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**			**236.994.300**	**236.994.300**	**403.096.000**	**166.101.700**

2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000	30.000.000	119.760.000	89.760.000
2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	191.994.300	191.994.300	233.914.000	41.919.700
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000	15.000.000	49.422.000	34.422.000
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**9.335.653.866**	**9.335.653.866**	**9.815.748.066**	**480.094.200**
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**			**9.335.653.866**	**9.335.653.866**	**9.815.748.066**	**480.094.200**
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.737.250.448	8.737.250.448	9.177.512.948	440.262.500
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.003.418	62.003.418	62.003.418	-
2	11	04	xx	xx	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			39.831.700	39.831.700
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	536.400.000	536.400.000	536.400.000	-
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			**352.066.400**	**352.066.400**	**411.591.900**	**59.525.500**

2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**			**107.066.400**	**107.066.400**	**115.209.900**	**8.143.500**
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73.800.000	73.800.000	73.800.000	-
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.266.400	33.266.400	41.409.900	8.143.500
2	**11**	**5**	**2.02**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**245.000.000**	**245.000.000**	**296.382.000**	**51.382.000**
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	245.000.000	245.000.000	296.382.000	51.382.000
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**194.893.000**	**194.893.000**	**194.893.000**	**-**
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**194.893.000**	**194.893.000**	**194.893.000**	**-**

2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158.425.000	158.425.000	158.425.000	-
2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.468.000	36.468.000	36.468.000	-
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**			**40.350.000**	**40.350.000**	**40.350.000**	**-**
2	**11**	**07**	**2.02**		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**			**40.350.000**	**40.350.000**	**40.350.000**	**-**
2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.350.000	40.350.000	40.350.000	-
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**164.195.000**	**164.195.000**	**164.195.000**	**-**
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**164.195.000**	**164.195.000**	**164.195.000**	**-**

2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	128.745.000	128.745.000	128.745.000	-
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.450.000	35.450.000	35.450.000	-
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**70.490.000**	**70.490.000**	**70.490.000**	**-**
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**70.490.000**	**70.490.000**	**70.490.000**	**-**
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.490.000	70.490.000	70.490.000	-
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**175.095.000**	**175.095.000**	**199.445.000**	**24.350.000**
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**			**175.095.000**	**175.095.000**	**199.445.000**	**24.350.000**
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115.000.000	115.000.000	139.350.000	24.350.000
2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.095.000	60.095.000	60.095.000	-
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**26.870.053.400**	**26.870.053.400**	**35.684.526.048**	**8.814.472.648**
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**			**26.840.363.400**	**26.840.363.400**	**35.654.836.048**	**8.814.472.648**

2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199.800.000	199.800.000	269.169.100	69.369.100
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.819.000	17.819.000	17.819.000	-
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.836.550.200	10.836.550.200	19.535.653.748	8.699.103.548
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.093.844.200	4.093.844.200	4.163.844.200	70.000.000
2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	269.867.100	269.867.100	245.867.100	- 24.000.000
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.592.000	21.592.000	21.592.000	-
2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.553.505.600	9.553.505.600	9.553.505.600	-
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.847.385.300	1.847.385.300	1.847.385.300	-
2	**11**	**11**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**			**29.690.000**	**29.690.000**	**29.690.000**	**-**
2	11	11	2.03	0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.690.000	29.690.000	29.690.000	-

2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**18.701.466.002**	**18.701.466.002**	**18.953.058.526**	**251.592.524**
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**579.400.000**	**579.400.000**	**579.400.000**	**-**
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185.000.000	185.000.000	185.000.000	-
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170.300.000	170.300.000	170.300.000	-
2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-
2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.500.000	13.500.000	13.500.000	-
2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.500.000	13.500.000	13.500.000	-
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	133.600.000	133.600.000	133.600.000	-
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.500.000	13.500.000	13.500.000	-
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**15.895.762.636**	**15.895.762.636**	**15.970.150.636**	**74.388.000**

2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.628.016.636	15.628.016.636	15.628.016.636	-
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123.990.000	123.990.000	198.378.000	74.388.000
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.285.000	35.285.000	35.285.000	-
2	11	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.471.000	33.471.000	33.471.000	-
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**275.000.000**	**275.000.000**	**275.000.000**	**-**
2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275.000.000	275.000.000	275.000.000	-
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**632.409.300**	**632.409.300**	**662.409.300**	**30.000.000**
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.220.500	4.220.500	4.220.500	-
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan,	34.213.800	34.213.800	34.213.800	-

							Semua Kelurahan				
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.475.000	5.475.000	5.475.000	-
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-
2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	128.500.000	128.500.000	158.500.000	30.000.000
2	11	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110.000.000	110.000.000	110.000.000	-
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**400.000.000**	**400.000.000**	**400.000.000**	**-**
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**766.406.066**	**766.406.066**	**913.610.590**	**147.204.524**
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	297.914.646	297.914.646	297.914.646	-

2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	466.491.420	466.491.420	613.695.944	147.204.524
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**152.488.000**	**152.488.000**	**152.488.000**	**-**
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140.308.000	140.308.000	140.308.000	-
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.180.000	12.180.000	12.180.000	-
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**-**
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**-**
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**			**25.129.747.598**	**25.229.747.598**	**25.372.056.531**	**142.308.933**
3	**28**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**			**25.129.747.598**	**25.229.747.598**	**25.372.056.531**	**142.308.933**
3	28	04	2.01	0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.474.858.008	3.474.858.008	3.641.166.941	166.308.933
3	28	04	2.01	0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.082.194.404	2.082.194.404	2.082.194.404	-
3	28	04	2.01	0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.388.573.936	18.388.573.936	18.274.195.936	- 114.378.000
3	28	04	2.01	0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	205.517.250	205.517.250	205.517.250	-

3	28	04	2.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	978.604.000	1.078.604.000	1.168.982.000	90.378.000
Jumlah								**84.178.514.456**	**84.278.514.456**	**94.897.660.411**	**10.619.145.955**

3.4 Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
					Dinas Lingkungan Hidup				**71.531.924.938**	**84.178.514.456**	**84.613.314.456**						**29.837.002.691**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**46.402.177.340**	**59.048.766.858**	**59.383.566.858**						**29.837.002.691**
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**46.402.177.340**	**59.048.766.858**	**59.383.566.858**						**29.837.002.691**
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**16.099.311.232**	**18.137.095.002**	**18.729.626.002**						**15.459.623.770**
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun**	**100 %**	**100 %**	**579.400.000**	**579.400.000**	**579.400.000**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**525.433.239**
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	185.000.000	185.000.000	189.160.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas		222.653.239

2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	170.300.000	170.300.000	170.300.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas		110.000.000
2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas		5.880.000
2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.500.000	13.500.000	13.500.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		13.500.000
2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.500.000	13.500.000	13.500.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		13.500.000
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	133.600.000	133.600.000	133.600.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas		146.400.000
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	13.500.000	13.500.000	13.500.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		13.500.000

2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase pelayanan administrasi keuangan terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**13.510.075.546**	**15.331.391.636**	**15.331.391.636**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**13.670.922.685**
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	13.242.329.546	15.063.645.636	15.628.016.636	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		13.529.528.485
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	123.990.000	123.990.000	123.990.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas		89.394.200
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		25.000.000
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	35.285.000	35.285.000	35.285.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas		13.500.000
2	11	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	33.471.000	33.471.000	33.471.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas		13.500.000

2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang telah mengikuti Bintek**	**100 %**	**100 %**	**100.000.000**	**275.000.000**	**275.000.000**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**50.000.000**
2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	7 Orang	100.000.000	275.000.000	275.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas		50.000.000
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi perkantoran terlayani**	**100 %**	**100 %**	**632.409.300**	**632.409.300**	**632.409.300**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**376.543.145**
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	4.220.500	4.220.500	4.220.500	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas		4.500.000
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	36 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas		50.000.000
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	34.213.800	34.213.800	34.213.800	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas		35.054.250

2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	360 Dokumen	5.475.000	5.475.000	5.475.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas		5.988.895
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	38 Laporan	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas		235.000.000
2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	200 Dokumen	128.500.000	128.500.000	128.500.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas		30.000.000
2	11	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	110.000.000	110.000.000	110.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas		16.000.000
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana kantor tersedia**	**80 %**	**80 %**	**400.000.000**	**400.000.000**	**400.000.000**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**100.852.261**
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas		20.000.000

2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		80.852.261
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan administrasi penunjang urusan pemerintah terlaksana**	**-**	**100 %**	**16.099.311.232**	**18.137.095.002**	**18.729.626.002**						**15.459.623.770**
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penunjang adnministrasi perkantoran terlayani**	**-**	**100 %**	**724.938.386**	**766.406.066**	**766.406.066**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**578.372.440**
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	300 Laporan	2.000.000	0	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		0
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	297.914.646	297.914.646	297.914.646	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		270.000.000
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan administrasi penunjang urusan pemerintah terlaksana**	**-**	**100 %**	**16.099.311.232**	**18.137.095.002**	**18.729.626.002**						**15.459.623.770**

2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penunjang adnministrasi perkantoran terlayani**	**-**	**100 %**	**724.938.386**	**766.406.066**	**766.406.066**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**578.372.440**
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	425.023.740	0	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		0
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan administrasi penunjang urusan pemerintah terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**16.099.311.232**	**18.137.095.002**	**18.729.626.002**						**15.459.623.770**
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana kantor terpelihara**	**100 %**	**100 %**	**152.488.000**	**152.488.000**	**152.488.000**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**157.500.000**
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	140.308.000	0	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		0
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	12.180.000	12.180.000	12.180.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		12.500.000

2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase dokumen Perencanaan, kajian lingkungan hidup dan evaluasi Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan**	**83.3 %**	**83.3 %**	**1.115.368.000**	**1.115.368.000**	**1.115.368.000**						**1.102.291.040**
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan dan evaluasinya**	**100 %**	**100 %**	**361.250.000**	**361.250.000**	**361.250.000**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**466.000.000**
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	276.250.000	276.250.000	276.250.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		133.000.000
2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokuman	1 Dokuman	85.000.000	85.000.000	85.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		333.000.000
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan hidup dan evaluasinya**	**58,33 %**	**58,33 %**	**754.118.000**	**754.118.000**	**754.118.000**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**636.291.040**
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	473.418.000	473.418.000	473.418.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		333.000.000

2	11	02	2.02	0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	2 Dokuman	2 Dokuman	40.150.000	40.150.000	40.150.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		36.000.000
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	240.550.000	240.550.000	240.550.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang Kab. Paser, Batu Sopang, Songka	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		267.291.040
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan persentase cakupan pancegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan**	**75 12 % %**	**12 75 % %**	**1.920.781.890**	**2.029.136.190**	**2.085.776.190**						**1.601.240.000**
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah persetujuan teknis lingkungan yang dikeluarkan**	**65 Dokumen**	**65 Dokumen**	**843.787.590**	**952.141.890**	**952.141.890**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**465.180.000**
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	8 Dokumen	8 Dokumen	218.790.000	185.190.000	185.190.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		201.780.000

2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	102.140.000	102.140.000	102.140.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		117.400.000
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	522.857.590	664.811.890	721.451.890	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		146.000.000
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Jenis Pemantauan Lingkungan terlaksana Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki sumber pencemar yang di pantau**	**30 Perusahaan 9 Jenis**	**30 Perusahaan 9 Jenis**	**840.000.000**	**840.000.000**	**840.000.000**			-	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**835.000.000**
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12 Laporan	1 Laporan	705.000.000	705.000.000	705.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		700.000.000
2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	30 Titik	30 Titik	135.000.000	135.000.000	135.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		135.000.000
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Luasan lahan kritis yang di rehabilitasi luar kawasan**	**40 Ha**	**40 Ha**	**236.994.300**	**236.994.300**	**236.994.300**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**301.060.000**

2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Ha	1 Ha	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		45.000.000
2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	50 Kegiatan	50 Kegiatan	191.994.300	191.994.300	191.994.300	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		236.060.000
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		20.000.000
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Rasio Luas RTH (Ruang terbuka Hijau) dan Taman kehati yang dikelola**	**65 %**	**65 %**	**7.572.885.418**	**9.335.653.866**	**9.335.653.866**						**470.800.000**
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Jumlah kawasan konservasi/ RTH dan taman Kehati terkelola**	**12 Lokasi**	**12 Lokasi**	**7.572.885.418**	**9.335.653.866**	**9.335.653.866**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**470.800.000**
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	63.8171 Ha	63.8171 Ha	6.974.482.000	8.737.250.448	8.737.250.448	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		200.400.000

2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	62.003.418	62.003.418	62.003.418	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		70.000.000
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	536.400.000	536.400.000	536.400.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah		200.400.000
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**persentase jumlah perusahaan/pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3**	**100 %**	**100 %**	**152.066.400**	**352.066.400**	**352.066.400**						**250.000.000**
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**jumlah rekomendasi penyimpanan limbah yang dikeluarkan**	**8 Dokumen**	**1 Dokumen**	**107.066.400**	**107.066.400**	**107.066.400**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**170.000.000**
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	3 Dokumen	73.800.000	73.800.000	73.800.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		110.000.000
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	3 Laporan	3 Laporan	33.266.400	33.266.400	33.266.400	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		60.000.000

2	**11**	**05**	**2.02**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen pengelolaan Limbah B3 dan/atau pengumpulan Limbah B3**	**5 Dokumen**	**1 Dokumen**	**45.000.000**	**245.000.000**	**245.000.000**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**80.000.000**
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	245.000.000	245.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		80.000.000
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**persentase perusahaan/pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan**	**100 %**	**100 %**	**161.293.000**	**194.893.000**	**194.893.000**						**265.000.000**
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase rekomendasi tindaklanjut evaluasi yang diberikan**	**55 %**	**55 %**	**161.293.000**	**194.893.000**	**194.893.000**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**265.000.000**

2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	24 Badan Usaha	24 Badan Usaha	124.825.000	158.425.000	158.425.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		230.000.000
2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang	2 Orang	36.468.000	36.468.000	36.468.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		35.000.000
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan**	**100 %**	**100 %**	**40.350.000**	**40.350.000**	**40.350.000**						**50.000.000**
2	**11**	**07**	**2.02**		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**Jumlah MHA yang mendapatkan pembinaan**	**1 MHA**	**1 MHA**	**40.350.000**	**40.350.000**	**40.350.000**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**50.000.000**
2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2 Dokumen	2 Dokumen	40.350.000	40.350.000	40.350.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		50.000.000

2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**persentase kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup**	**65 %**	**65 %**	**164.195.000**	**164.195.000**	**164.195.000**						**200.000.000**
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlahkelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan**	**29 Kelompok**	**29 Kelompok**	**164.195.000**	**164.195.000**	**164.195.000**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**200.000.000**
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	21 Dokumen	21 Dokumen	128.745.000	128.745.000	128.745.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		170.000.000
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1 Orang	1 Orang	35.450.000	35.450.000	35.450.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		30.000.000
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah penghargaan pengelolaan kualitas lingkungan hidup**	**1 Piagam Adipura**	**1 Piagam Adipura**	**70.490.000**	**70.490.000**	**70.490.000**						**20.000.000**
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jenis penilaian dan penghargaan lingkungan hidup terselenggara**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**70.490.000**	**70.490.000**	**70.490.000**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**20.000.000**

2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	23 Entitas	23 Entitas	70.490.000	70.490.000	70.490.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		20.000.000
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengaduan lingkungan hidup yang ditangani**	**100 %**	**100 %**	**175.095.000**	**175.095.000**	**175.095.000**						**120.000.000**
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah sangsi administrasi yang diterapkan**	**2 Kasus**	**2 Kasus**	**175.095.000**	**175.095.000**	**175.095.000**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**120.000.000**
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	27 Pengaduan	27 Pengaduan	115.000.000	115.000.000	115.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		20.000.000
2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	8 Perkara	8 Perkara	60.095.000	60.095.000	60.095.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		100.000.000
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**46.402.177.340**	**59.048.766.858**	**59.383.566.858**						**29.837.002.691**
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**persentase pengelolaan sampah disumber persentase sampah yang terangkut ke TPA**	**24 61 % %**	**24 61 % %**	**18.930.341.400**	**27.434.424.400**	**27.120.053.400**						**10.298.047.881**

2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Jumlah sampah terangkut ke TPA**	**16500 Ton**	**16500 Ton**	**18.900.651.400**	**27.404.734.400**	**27.404.734.400**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**10.295.047.881**
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	199.800.000	0	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		0
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**persentase pengelolaan sampah disumber persentase sampah yang terangkut ke TPA**	**24 61 % %**	**24 61 % %**	**18.930.341.400**	**27.434.424.400**	**27.120.053.400**						**10.298.047.881**
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Jumlah sampah terangkut ke TPA**	**16500 Ton**	**16500 Ton**	**18.900.651.400**	**27.404.734.400**	**27.404.734.400**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**10.295.047.881**
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	1 Dokumen	17.819.000	0	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		0

2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	30 Unit	30 Unit	8.725.150.200	10.836.550.200	11.086.550.200	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		6.601.819.471
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	16500 Ton	16500 Ton	4.093.844.200	4.093.844.200	4.093.844.200	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		3.447.800.000
2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	2334 Ton	2334 Ton	303.467.100	269.867.100	269.867.100	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		0
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 Laporan	2 Laporan	21.592.000	21.592.000	21.592.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		0
2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	4500 Ton	4500 Ton	3.691.593.600	10.117.876.600	9.553.505.600	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		0
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	17000 Ton	17000 Ton	1.847.385.300	1.847.385.300	1.847.385.300	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		0
2	**11**	**11**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	-	-	-	**29.690.000**	**29.690.000**	**29.690.000**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air**	**Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat**	**3.000.000**

2	11	11	2.03	0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	2 Unit	2 Unit	29.690.000	0	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		0
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**25.129.747.598**	**25.129.747.598**	**25.229.747.598**						**0**
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				**25.129.747.598**	**25.129.747.598**	**25.229.747.598**						**0**
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Persentase luasan tahura yang dikelola dan berfungsi dengan baik.**	**78.33 %**	**78.33 %**	**25.129.747.598**	**25.129.747.598**	**25.229.747.598**						**0**
3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan jasa lingkungan, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat desa penyangga terlaksana Persentase pengawasan dan keamanan dari gangguan dan kerusakan kawasan Persentase tutupan lahan kritis dalam kawasan terlaksana	100 % 100 Persen 35 % 35 Persen	100 % 100 Persen 35 % 35 Persen	25.129.747.598	25.129.747.598	25.129.747.598			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air	Dinas lingkungan Hidup dan Para Pelaku Usaha, serta Masyarakat	0
3	28	04	2.01	0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	50 Operasi	50 Operasi	3.474.858.008	3.474.858.008	3.474.858.008	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		0

3	28	04	2.01	0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	80 Ha	80 Ha	3.614.809.850	3.614.809.850	2.082.194.404	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		0
3	28	04	2.01	0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	1 Permohonan	1 Permohonan	16.855.958.490	16.855.958.490	18.388.573.936	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi HasilDBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		0
3	28	04	2.01	0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	205.517.250	205.517.250	205.517.250	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		0
3	28	04	2.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	3 Desa	3 Desa	978.604.000	978.604.000	1.078.604.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air		0
J U M L A H									**71.531.924.938**	**84.178.514.456**	**84.613.314.456**						**29.837.002.691**

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rancangan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tana Paser, 22 Juli 2024

Kepala Dinas

Achmad Safari, SP, M.Si
Pembina TK.I / IVb
NIP. 19781031 200212 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Komp. Perkantoran Gedung E Lantai 2 Kavling A
Jalan Kesuma Bangsa Km.5, Tanah Grogot, Kab.Paser Kode Pos 76251
Email: dlhkab.paser@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER

NOMOR : B/800/02.2/Sekrt/DLH/I/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran Tugas Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Penyusun Renja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser;

b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
   Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Paser No 71 tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor.59 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangja menegah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini bertugas mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Paser;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 09 Januari 2024

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Achmad Safari, SP, M.Si
Pembina TK.I / IVb
NIP.19781031 200212 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Paser (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser
3. Kepala BKAD Kabupaten Paser di Tana Paser
4. Kepala Bappeda Kabupaten Paser di Tana Paser.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PASER
NOMOR : **B/800/02.2/Sekrt/DLH/I/2024**
PADA TANGGAL : 09 Januari 2024

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2025 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASER

Ketua	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
Sekretaris	: Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
Anggota	: 1. Perencana Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kab. Paser 2. Kasubbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Paser
Sekretariat Kab. Paser	: 1. Edi Sudman, SE, staf Perencanaan Program Dinas Lingkungan Hidup 2. Tina Nurliah Rosita, S.I.Kom, staf Perencanaan Program Dinas Lingkungan Hidup Kab. Paser

Kepala,

Achmad Safari, SP, M.Si
Pembina TK.I / IV b
NIP.19781031 200212 1 003

DINAS PEMUDA
OLAHRAGA &
PARIWISATA
KABUPATEN PASER

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mengembangkan potensi kepemudaan, olahraga dan pariwisata agar lebih berkualitas, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser selaku penanggungjawab tekhnis penyelenggaraan pembangunan daerah dalam bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berkewajiban menyusun Perubahan Renja Tahun 2024 yang pada hakikatnya merupakan rancangan agenda kerja tahunan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan akhir Perubahan rencana kerja SKPD Tahun 2024 ini berpedoman pada Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan mengacu pada perubahan renja tahun sebelumnya dan Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026 serta usulan program dan kegiatan hasil Musyarawarah Rencana Pembangunan Kecamatan. Dokumen Perencanaan ini merupakan janji yang harus ditunaikan.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser berkomitmen untuk membangun Kabupaten Paser melalui tugas pokok dan fungsinya yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Paser berhasil menyusunRancangan akhir Perubahan Renja SKPD tahun 2024 yang fokus dalam pengembangan dan peningkatan potensi pemuda, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Paser.

Tugas membangun daerah dalam bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan kedepan adalah tugas bersama, bukan merupakan tugas pemerintah semata. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dan sinergi dari masyarakat luas dan kerja keras tanpa pamrih.

Penyusunan Rancangan akhir Perubahan Renja 2024 ini tidak terlepas dari peran serta seluruh Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan dokumen ini tentu saja masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dari semua pihak dalam penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan.

Akhirnya, semoga Rancangan akhir Perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda kerja tahunan pembangunan pemuda, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Paser.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagaiacuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan

untuk tahun berjalan;

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Rancangan akhir perubahan Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser mengacu padakerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Selanjutnya Rancangan akhir Renja Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan akhir Perubahan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah 2023 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor …… Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor …… Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan akhir perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Perubahan Rencana kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.4 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.5 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Rancangan Renja

1.6 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rancangan akhir perubahan Renja tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I1 tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2023 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN PASER

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun Anggaran 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah mengacu pada sasaran RKPD :

1 Persentase Organisasi Pemuda yang aktif

2 Persentase Wirausaha Muda

3 Cakupan Pembinaan Olahraga

4 Jumlah Atlet berprestasi

5 Gugus Pramuka Yang aktif

6 Persentasi detinasi wisata yang baik

7 Pertumbuhan Jumlah wisatawan

8 Jumlah produk ekonomi kreatif yang memperoleh Perlindungan Hak Cipta dari HAKI

9 Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis seni dan budaya

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2022 - 2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d RENJA PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD yg di Evaluasi 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA PD Tahun 2022 s.d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Tahun 2022 s.d 2026 (%)		Ket.
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		13 = (12/7)*100		14 = (6+12)		15 = (14/5)*100		17
				K		Rp	36	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
I	Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS	persentase wirausaha muda	18	persen	5.700.000.000	33	1.248.914.300	33	1.069.273.100	8,25	97.796.556	8,25	0	8,25	0	8,25	-	33	97.796.556	100,00	9,15	66,00	1.346.710.856	371,20	23,63	

	pembangunan	**DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**persentase organisasi pemuda yang aktif**	**100**	**persen**		**16**		**15,56**		**3,89**		**3,89**		**3,89**		**3,89**		**15,56**		**100,00**		**31,12**		**31,12**		
A	**Meningkatnya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan pengembangan kepemudaan dalam usaha kemandirian**	**242**	**orang**	**5.000.000.000**	**122**	**505.591.500**	**122**	**561.843.500**	**10**	**67.409.556**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**10**	**67.409.556**	**8,20**	**12,00**	**132,00**	**573.001.056**	**54,55**	**11,46**	
1	Persentase Kelompok Wirausaha Muda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang di tingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	250	Orang	610.000.000	40	252.627.900	40	85.373.900	10	35.962.756							10	35.962.756	25,00	42,12	50,00	288.590.656	20,00	47,31	
2	Persentase Kelompok Wiraus	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas	Jumlah dokumen hasil koordinasi strategis	100	Persen	300.000.000	1	202.466.800	1	476.469.600	0	31.446.800							0	31.446.800	-	6,60	1,00	233.913.600	1,00	77,97	

	aha Muda	Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/ RAD Tingkat Kabupaten/Kota	lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui inplementasi rencana aksi daerah RAD tingkat Kabupaten Kota																											
3	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah pemuda dan/atau berprestasi penerima penghargaan	36	orang	4.090.000.000	40	50.496.800	40	0	0	0							-	-	-	#DIV/0!	40,00	50.496.800	111,11	1,23					
B	**Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**cakupan pemuda yang berperan aktif dalam pembangunan**	**200**	**orang**	**700.000.000**	**1**	**743.322.800**	**1**	**507.429.600**	**1**	**30.387.000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**1**	**30.387.000**	**1000,0**	**5,99**	**2,00**	**773.709.800**	**1**	**110,53**					
1	Meningkatnya jumlah pemuda yang memiliki jiwa kewirausahaan	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	jumlah pemuda yang dilatih	25	orang	700.000.000	1	743.322.800	1	507.429.600	1	30.387.000							0	30.387.000	-	5,99	1,00	773.709.800	4	110,53					

																		Rata-rata capaian kinerja (%)			54,10	9		27,77	60,99	
																		Predikat Kinerja			Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Rendah	
II	Meningkatnya Prestasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	jumlah atlet berprestasi	15	orang	2.542.920.000	3	36.349.401.468	3	58.279.248.299	1	284.619.699	0	0	0	0	0	-	1	284.619.699	33,33	0,49	4	36.634.021.167	26,67	1440,63	
			persentase pembinaan cabang olahraga	68	persen		23		23		6		6		6		6		23		100,00		46		67,65		
A	terselenggaranya Kejuaraan Olahraga tingkat daerah	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	12	kali	1.732.000.000	1	6.538.928.570	1	7.698.865.399	0	0	0	-	0	0	0	-	0	-	-	0,00	1	6.538.928.570	8,33	377,54	
1	terselenggaranya kejuaraan olahraga multi dan singel event	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kejuaraan olahraga	1	kali	1.732.000.000	1	6.538.928.570	1	7.698.865.399	0	0							0	-	-	0,00	1	6.538.928.570	100,00	377,54	
B	meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	terbinanya dan berkembangnya organisasi olahraga	1	orang/kali	32.920.000	100	13.179.720.000	100	2.474.286.000	0	158.126.571	0	0	0	0	-	0	0	158.126.571	-	6,39	100	13.337.846.571	10000,00	40515,94	

1	meningkatnya pengembangan organisasi keolahrgaan	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terbinanya organisasi keolahragaan kabupaten	2	organisasi	1.694.159.000	1	13.146.800.000	1	2.231.786.000	0	158.126.571							0	158.126.571	-	7,09	1	13.304.926.571	50,00	785,34	
2	meningkatnya pengembangan organisasi keolahrgaan	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	jumlah dokumen hasil peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan	1	Dokumen	32.920.000	1	32.920.000	1	242.500.000	0	0							0	-	-	0,00	1	32.920.000	100,00	100,00	
C	**Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**terbinanya olahraga rekreasi**	**9**	**kali**	**778.000.000**	**3**	**16.630.752.898**	**3**	**48.106.096.900**	**1**	**126.493.128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**1**	**126.493.128**	**33,33**	**0,26**	**4**	**16.757.246.026**	**44,44**	**2153,89**	
1	tersediannya sarana dan prasarana olahraga	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Terpeliharanya sarana dan Prasarana olahraga	3	buah	778.000.000	3	16.630.752.898	3	48.106.096.900	1	126.493.128							1	126.493.128	33,33	0,26	4	16.757.246.026	133,33	2153,89	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)			**11,11**	**2,21791405 3**		**3.350,93**	**14.349,12**	
																		Predikat Kinerja			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	

III	**Meningkatnya pengembangan kapasitas kepramukaan**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**berkembangnya kapasitas kepramukaan**	**100**	**keg**	**300.000.000**	**100**	**387.268.480**	**100**	**906.485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**387.268.480**	**100,00**	**129,09**	
A	**Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**terbinanya dan berkembangnya organisasi kepramukaan**	**100**	**keg**	**300.000.000**	**100**	**700.000.000**	**100**	**906.485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**700.000.000**	**100,00**	**233,33**	
1	Meningkatnya kapasitas Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan	100	persen	300.000.000	100	700.000.000	100	906.485.000	0	0							**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**700.000.000**	**100,00**	**233,33**	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)			**-**	**-**			**100,00**	**233,33**	
																		Predikat Kinerja			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
IV	**pelaksanaan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terselenggaranya urusan penunjang pemerintahan**	**193**	**dokumen/bulan/unit/kotak**	**24.117.585.150**	**193**	**6.262.267.200**	**193**	**7.415.134.118**	**48**	**1.154.475.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48**	**1.154.475.835**	**24,87**	**15,57**	**241,0**	**7.416.743.035**	**124,87**	**30,75**	

A	**terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**presentase PD yang menyusun laporan kinerja tepat waktu**	**26**	**dokumen**	**126.300.000**	**26**	**197.668.100**	**26**	**167.192.048**	**7**	**21.956.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**21.956.281**	**26,92**	**13,13**	**33,00**	**219.624.381**	**126,92**	**173,89**	
1	terlaksanya proses perencanaan kinerja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra dan renja SKPD, penginputan SIPD	2	dokumen	70.000.000	2	167.450.000	2	106.000.000	1	9.036.600							**1**	**9.036.600**	**50,00**	**8,53**	**3,00**	**176.486.600**	**150,00**	**252,12**	
2	terlaksanya evaluasi kinerja perangkat daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan reliasi kinerja	12	dokumen	56.300.000	12	15.023.100	12	45.997.048	3	4.272.400							**3**	**4.272.400**	**25,00**	**9,29**	**15,00**	**19.295.500**	**125,00**	**34,27**	
2	terlaksanya evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	evaluasi renja dan laporan realisasi	12	dokumen	56.300.000	12	15.195.000	12	15.195.000	3	8.647.281							**3**	**8.647.281**	**25,00**	**56,91**	**15,00**	**23.842.281**	**125,00**	**42,35**	
B	**Pelaksanaan adm keuangan perangkat daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**terselenggaranya adminastrasi keuangan yang baik**	**112**	**bulan**	**22.240.301.072**	**112**	**6.614.347.090**	**112**	**6.892.926.773**	**28**	**1.069.915.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28**	**1.069.915.799**	**25,00**	**15,52**	**140,00**	**7.684.262.889**	**125,00**	**34,55**	
1	terlaksanya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	21.148.782.235	12	6.276.082.830	12	6.586.206.493	3	1.008.631.974							**3**	**1.008.631.974**	**25,00**	**15,31**	**15,00**	**7.284.714.804**	**125,00**	**34,45**	
2	Terselenggaranya laporan	Koordinasi dan Pelaksanaan	tersedianya laporan keuangan yang	100	%	1.091.518.837	100	338.264.260	100	306.720.280	25	61.283.825							**25**	**61.283.825**	**25,00**	**19,98**	**125,00**	**399.548.085**	**125,00**	**36,60**	

	keuangan	Akuntansi SKPD	akuntabel																									
C	**Pelaksanaan ADM umum perangkat daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**terselenggaranya administrasi umum yang baik**	**50**	**unit/bulan/kotak**	**1.594.500.000**	**50**	**457.172.725**	**50**	**304.233.297**	**13**	**62.603.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**13**	**62.603.755**	**26,00**	**20,58**	**63,00**	**519.776.480**	**126,00**	**32,60**	
1	Tersediany peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan perelatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	129.000.000	12	91.416.900	12	17.500.000	3	0							3	0	25,00	0,00	15,00	91.416.900	125,00	70,87	
2	Tersediany bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	frekuensi penyediaan kebersihan kantor dan ATK	12	bulan	116.000.000	12	65.208.325	12	52.213.297	3	13.421.600							3	13.421.600	25,00	25,71	15,00	78.629.925	125,00	67,78	
3	Tersediany barang cetak dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	frekuensi penyedian barang cetak dan penggandaan	12	bulan	44.500.000	12	5.187.500	12	15.000.000	3	0							3	0	25,00	0,00	15,00	5.187.500	125,00	11,66	
4	terlaksnanya rapat koordinasi dan konsultasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat2 koordinasi dan konsultasi	12	bulan	970.000.000	12	228.865.000	12	180.000.000	3	49.182.155							3	49.182.155	25,00	27,32	15,00	278.047.155	125,00	28,66	
5	Tersediany Data Penunjang Website Disporapar	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah jenis database disporapar yang ada dan terupdate	2	Jenis	335.000.000	2	66.495.000	2	39.520.000	1	0							1	0	50,00	0,00	3,00	66.495.000	150,00	19,85	
D	**Terpeliharanya barang Milik daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerin**	**terselenggaranya pemelihraan barang milik daerah**	**5**	**kali /unit**	**156.484.078**	**5**	**78.389.284**	**5**	**50.782.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**78.389.284**	**100,00**	**50,09**	

		tahan Daerah																										
1	terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	4	Unit	132.500.000	4	62.966.000	4	49.362.000	0	0							**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**62.966.000**	**100,00**	**47,52**	
2	terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan yang terpelihara	1	Unit	23.984.078	1	1.420.000	1	1.420.000	0	0							**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1.420.000**	**100,00**	**5,92**	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)			**19,48**	**12,31**			**119,48**	**72,78**	
																		Predikat Kinerja			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Tinggi**	**Sedang**	
V	**meningkatnya daya tarik pariwisata dan PAD dari sektor pariwisata**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**persentase destinasi wisata yang baik**	**13**	**objek dan pelaku wisata**	**7.723.360.000**	**15**	**7.695.498.871**	**15**	**17.396.036.246**	**1**	**131.520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**131.520.000**	**6,67**	**0,76**	**16,00**	**7.827.018.871**	**123,08**	**101,34**	

A	**Terlaksananya pengelolaan daya tarik wisata**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**terkelolanya daya tarik wisata kabupaten**	**2**	**objek**	**3.846.620.000**	**2**	**814.548.450**	**2**	**15.319.428.450**	**1**	**131.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**131.100.000**	**50,00**	**0,86**	**3,00**	**945.648.450**	**150,00**	**24,58**	
1	Meningkatnya daya tarik wisata kabupaten/kota	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang ditetapkan	1	Lokasi	3.631.620.000	1	12.452.950	1	15.309.335.500	1	131.100.000							1	**131.100.000**	**100,00**	**0,86**	**2,00**	**143.552.950**	**200,00**	**3,95**	
2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	1	Lokasi	215.000.000	1	802.095.500	1	10.092.950	0	0							0	**0**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**802.095.500**	**100,00**	**373,07**	
B	**Terlaksananya Kawasan wisata**	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**jumlah daya Kawasan wisata yang dikelola dan dikembangkan**	**11**	**Objek**	**30.120.000**	**11**	**30.120.000**	**11**	**21.240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**11,00**	**30.120.000**	**100,00**	**100,00**	
1	Meningkatnya Kawasan wisata kabupaten/kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah destinasi yang dimonitoring dan dikelola	11	Lokasi	30.120.000	11	30.120.000	11	21.240.000	0	0							0	**0**	**0,00**	**0,00**	**11,00**	**30.120.000**	**100,00**	**100,00**	
C	**Terlaksananya pengelolaan daya**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisa**	**terkelolanya destinasi pariwisa**	**1**	**Lokasi**	**3.846.620.000**	**2**	**9.202.995.496**	**2**	**2.055.367.796**	**0**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**0,00**	**0,02**	**2,00**	**9.203.415.496**	**200,00**	**239,26**	

	tarik wisata	**ta Kabupaten/Kota**	**ta kabupaten**																									
1	Meningkatnya daya tarik wisata kabupaten/kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	1	Destinasi	3.631.620.000	1	9.146.682.496	1	1.032.498.796	0	420.000							**0**	**420.000**	**0,00**	**0,04**	**1,00**	**9.147.102.496**	**100,00**	**251,87**	
2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah masyarakat yang dibina pada destinasi wisata	1	kelompok	215.000.000	1	56.313.000	1	1.022.869.000	0	0							**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**56.313.000**	**100,00**	**26,19**	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)			**50,00**	**0,86**		**150,00**	**24,58**	
																		Predikat Kinerja			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	
VII	**Meningkatnya Kunjungan wisatawan**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**jumlah kunjungan wisatawan**	**16**	**media dan kali**	**483.641.905**	**5**	**479.528.304**	**5,00**	**3.658.893.349**	**1,00**	**352.162.844**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,00**	**352.162.844**	**20,00**	**9,62**	**6,00**	**831.691.148**	**37,50**	**171,96**	
A	**Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwis**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah media pemasaran pariwisata**	**16**	**media dan kali**	**483.641.905**	**5**	**1.871.574.100**	**5**	**3.658.893.349**	**2**	**352.162.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**352.162.844**	**40,00**	**9,62**	**7,00**	**2.223.736.944**	**43,75**	**459,79**	

	ata Kabupaten/Kota																									
1	meningkatnya promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	frekuensi kegiatan promosi dan target pemasaran pariwisata	5	jenis	210.000.000	5	1.739.839.000	5	18.298.283	0	0							**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**1.739.839.000**	**100,00**	**828,49**	
2	meningkatnya pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negri	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	frekuensi kegiatan promosi dan target pemasaran pariwisata	2	kali	273.641.905	2	74.845.100	2	18.298.283	0	0							**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**74.845.100**	**100,00**	**27,35**	
3	meningkatnya pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negri	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	frekuensi kegiatan promosi dan target pemasaran pariwisata	2	kali	273.641.905	2	28.445.000	2	933.250.283	1	222.110.240							**1**	**222.110.240**	**50,00**	**23,80**	**3,00**	**250.555.240**	**150,00**	**91,56**	
4	meningkatnya pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	jenis media informasi	5	jenis	273.641.905	2	28.445.000	2	2.689.046.500	1	130.052.604							**1**	**130.052.604**	**50,00**	**4,84**	**3,00**	**158.497.604**	**60,00**	**57,92**	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)			**40,00**	**9,62**		**43,75**	**459,79**	

																			Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
VIII	**Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Kepariwisataan daerah**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Jumlah produk ekonomi kreatif yang memperoleh perlindungan hak cipta dari HAKI**	**16**	**produk**	**853.747.555**	**100**	**1.403.123.555**	**100**	**1.915.800.000**	**1**	**68.715.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**68.715.306**	**1,00**	**3,59**	**101,00**	**1.471.838.861**	**631,25**	**172,40**	
A		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Tingkat pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan usaha ekonomi kreatif**	**16**	**Persen**	**853.747.555**	**100**	**1.403.123.555**	**100**	**1.915.800.000**	**1**	**68.715.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**68.715.306**	**1,00**	**3,59**	**101,00**	**1.471.838.861**	**631,25**	**172,40**	
1	Jumlah produk ekraf yang memperoleh hak cipta	Pengembangan Pendidikan	Jumlah dokumen hasil pengembangan sistem pemasaran ekonomi kreatif	1	Dokumen	635.579.755	1	1.105.579.755	1	200.000.000	0	0							**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1.105.579.755**	**100,00**	**173,95**	
2	Jumlah produk ekraf yang memperoleh hak cipta	Pengembangan Sistem Pemasaran	jumlah dokumen hasil pencatatan atas hak cipta dan hak terkait	1	Dokumen	15.499.800	1	54.529.800	1	900.000.000	1	68.715.306							**1**	**68.715.306**	**100,00**	**7,64**	**2,00**	**123.245.106**	**200,00**	**795,14**	
3	Jumlah produk ekraf yang	Penyusunan Rencana Aksi	jumlah dokumen pelindungan hasil	1	Dokumen	25.424.800	1	52.904.800	1	355.000.000	0	0							**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**52.904.800**	**100,00**	**208,08**	

	memperoleh hak cipta	Pengembangan Ekonomi Kreatif	kreativitas yang berupa kekayaan intelektual pelaku ekraf																										
4	Jumlah produk ekraf yang memperoleh hak cipta	Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekraf	1	Dokumen	18.031.300	1	23.331.300	1	150.000.000	0	0								**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**23.331.300**	**100,00**	**129,39**	
5	Jumlah produk ekraf yang memperoleh hak cipta	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekraf	1	Dokumen	159.211.900	1	166.777.900	1	100.000.000	0	0								**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**166.777.900**	**100,00**	**104,75**	
6	Jumlah produk ekraf yang memperoleh hak cipta	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekraf	1	Dokumen	18.031.300	1	23.331.300	1	200.000.000	0	0								**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**23.331.300**	**100,00**	**129,39**	
7	Jumlah produk ekraf yang memperoleh hak cipta	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekraf	1	Dokumen	159.211.900	1	166.777.900	1	10.800.000	0	0								**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**166.777.900**	**100,00**	**104,75**	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)			**1,00**	**3,59**			**631,25**	**172,40**	
																		Predikat Kinerja			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
IX	**Terbentuk dan terbinanya SDm Pariwisata dan**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**	**Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya**	**120**	**kelompok usaha**	**509.971.500**	**70**	**862.702.700**	**70**	**1.347.929.205**	**11**	**80.306.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**80.306.406**	**15,71**	**5,96**	**81,00**	**943.009.106**	**67,50**	**184,91**	

	ekonomi kreatif	**PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**																									
A	**Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**lembaga yang aktif**	**13**	**kelompok usaha**	**509.971.500**	**70**	**862.702.700**	**70**	**1.347.929.205**	**11**	**80.306.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**80.306.406**	**15,71**	**5,96**	**81,00**	**943.009.106**	**623,08**	**184,91**	
1	Jumlah pelaku ekraf berbasis seni dan budaya	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekraf dan kelompok sadar wisata yang terbina	70	orang	20.000.000	10	152.731.200	10	270.707.600	0	0							**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**152.731.200**	**14,29**	**763,66**	
2	Jumlah pelaku ekraf berbasis seni dan budaya	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	60	Orang	35.000.000	60	35.000.000	60	530.227.205	10	50.706.406							**10**	**50.706.406**	**16,67**	**9,56**	**70,00**	**85.706.406**	**116,67**	**244,88**	
3	Jumlah pelaku ekraf berbasis seni dan budaya	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konserva	1	Laporan	215.000.000	1	215.000.000	1	155.483.800	1	28.500.000							**1**	**28.500.000**	**100,00**	**18,33**	**2,00**	**243.500.000**	**200,00**	**113,26**	

			si ekonomi kreatif																									
4	Jumlah pelaku ekraf berbasis seni dan budaya	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitas pengembangan kompetensi SDM ekonomi kreatif	10	Orang	219.971.500	10	439.971.500	10	344.167.000	0	0							**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**439.971.500**	**100,00**	**200,01**	
5	Jumlah pelaku ekraf berbasis seni dan budaya	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Dokumen	20.000.000	1	20.000.000	1	26.048.600	0	0							**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**20.000.000**	**100,00**	**100,00**	
6	Jumlah pelaku ekraf berbasis seni dan budaya	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Dokumen	20.000.000	1	20.000.000	1	21.295.000	0	1.100.000							**0**	**1.100.000**	**0,00**	**5,17**	**1,00**	**21.100.000**	**100,00**	**105,50**	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)			**15,71**	**5,96**			**623,08**	**184,91**	
																		Predikat Kinerja			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM	**91.988.799.317,00**				**2.169.596.646,00**			**56.858.301.524,00**				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM						2,36	5,64		121,55	297,47		
PREDIKAT KINERJA PROGRAM						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :	**Mulai berangsur normalnya kondisi akibat pendemi covid-19 sehingga diharapakan dapat melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan**
Faktor penghambat pencapaian kinerja :	**Kondisi Pendemi Covid-19 yang masih berlangsung sehingga masih ada pembatasan dalam pelaksanaan kegaiatan yang mengumpulkan peserta/masa**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :	**Perlunya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program, kegiatan , dan sub kegiatan**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :	**Peningkatan Realisasi capaian kinerja program,kegiatan dan sub kegiatan**

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2023 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan I adalah 2,36 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.169.596.646 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Raus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam ratus Empat Puluh enam Rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 91.988.799.317 (Sembilan Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tuga Ratus Tujuh Belas Rupiah) atau sebesar 5,64%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada (Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata kabupaten Paser) sebesar 22,35 % dengan predikat kinerja Sangat rendah.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) =1 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 0 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 0 indikator, capaian kinerja 0%-50% = 31 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Paser, maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kab.Paser mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di Bidang kepemudaan, keolahrgaan, dan pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk wisata sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah.
2. Penetapan kebijakan di Bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
3. Pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk wisata sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan
5. Penyelenggaraan kegiatan ketattausahaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata adalah:

1. Pelayanan di Bidang kepemudaan
2. Pelayanan Di Bidang Keolahragaan

3. Pelayanan di Bidang kepariwisataan

Upaya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Tingkat hunian akomodasi
2. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
3. Persentase cabang olahraga yang melakukan pembinaan usia dini
4. Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMDdan keuangan yang non materil dari BPK RI dan APIP
5. Nilai evaluasi Sakip dan APIP Disporapar

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
sampai dengan Triwulan I
Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2023	2023	2024	2025	2026		
Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan sektor keparwisataan daerah	Peningkatan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	0,33%	0,34%	0,35%	0,36%	0,37%		
Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	43,67%	44,76%	45,31%	50,22%	50,76%		
Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup pemuda	Persentase pemuda pengangguran terbuka	0.065%	0,064%	0,064%	0,063%	0,061%		
Sasaran : Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	52,58%	52,84%	53,10%	53,35%	53,61%		
Tujuan : Meningkatkan kegemaran berolahraga	Persentase organisasi desa/kelurahan yang melakukan kegiatan olahraga minimal 3	10,42%	13,89%	17,36%	20,83%	24,315		

	kali seminggu							
Sasaran : Meningkatnya pembinaan olahraga	Persentase cabang olahraga yang melakukan pembinaan usia dini	30%	35%	40%	45%	50%		
Tujuan : Meningkatkan kinerja OPD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Indeks reformasi birokrasi	60	65	70	75	80		
Sasaran : Meningkatnya akuntabiltas kinerja dan pengeloaan BMD dan keuangan yang akuntabel	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang non materiil dari BPK dan APIP	0	0	0	0	0		
	Nilai evaluasi Sakip dan Apip Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	B	B	BB	BB	A		

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Meningkatkan pertumbuhan sektor kepariwisataan daerah memiliki 1 indikator kinerja yaitu Peningkatan PDRB sektor akomodasi dan makan minum belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar ..... % dari target sebesar 0,35 % dengan capaian kinerja sebesar ……. %;
b. Sasaran meningkatkan kontribusi sektor jasa dan pariwisata memiliki 1 indikator kinerja yaitu tingkat hunian akomodasi, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar ..... % dari target sebesar 45,31% dengan capaian kinerja sebesar ..... %
c. Tujuan meningkatkan kualitas hidup pemuda memiliki 1 indikator kinerja yaitu persentase pemuda pengangguran terbuka belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar ..... % dari target sebesar 0,064% dengan capaian kinerja ..... %
d. Sasaran meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan memiliki 1 indikator kinerja yaitu persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar .....% dari target 53,10% dengan capaian kinerja .....%
e. Tujuan Meningkatkan kegemaran berolahraga memiliki 1 indikator kinerja yaitu persentase organisasi desa/ kelurahan yang melakukan kegiatan olahraga minimal 3 kali seminggu belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar .....% dari target 17,36 % dengan capaian kinerja sebesar .....%
f. Sasaran meningkatnya pembinaan olahraga memiliki 1 indkator kinerja yaitu persentase cabang olahraga yang melakukan pembinaan usia dini belum mencapai target, dimana

realisasinya sebesar ..... % dari target 40 % dengan capaian kinerja ..... %.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
2. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
3. Pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan Dan Keolahrgaan serta kepariwisataan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2023
Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan sektor keparwisataan daerah	Peningkatan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Tren perhitungan tahun sebelumnya dari BPS	0,35%	0,35%
Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{Jumlah\ Kamar\ terjual}{Jumlah\ kamar\ tersedia}$ x 100%	45,31%	45,31%
Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup pemuda	Persentase pemuda pengangguran terbuka	$\frac{Jumlah\ pemuda\ pengangguran}{Jumlah\ \ pemuda}$ x 100%	0.064%	0.064%
Sasaran : Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	$\frac{Jumlah\ pemuda\ yang\ Bekerja}{Jumlah\ \ pemuda}$ x 100%	53,10%	53,10%
Tujuan : Meningkatkan kegemaran berolahraga	Persentase organisasi desa/kelurahan yang melakukan kegiatan olahraga minimal 3 kali seminggu	$\frac{Jumlah\ desa\ dan\ kelurahan\ berolahraga\ 3x1\ minggu}{Jumlah\ Desa\ dan\ kelurahan}$ x 100%	17,36%	17,36%
Sasaran : Meningkatnya pembinaan olahraga	Persentase cabang olahraga yang melakukan pembinaan usia dini	$\frac{Cabor\ yang\ melakukan\ pembinaan\ usia\ dini}{Seluruh\ cabor}$ x 100%	40%	40%
Tujuan : Meningkatkan kinerja OPD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Indeks reformasi birokrasi	Hasil evaluasi RB	70	70

Sasaran : Meningkatnya akuntabiltas kinerja dan pengeloaan BMD dan keuangan yang akuntabel	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang non materiil dari BPK dan APIP	laporan temuan dari BPK dan APIP	0	0
	Nilai evaluasi Sakip dan Apip Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Nilai evaluasi dari APIP	BB	BB

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2023 tidak mengalami perubahan meskipun

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu "PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DISSELURUH KABUPATEN PASER" yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke 2, yaitu "Berkembangnya

sektor kepariwisataan".

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

REKAP ANGGARAN PERUBAHAN
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening						Uraian	Anggaran Belanja			Bertambah / Berkurang	Rincian Perubahan					Keterangan
							Murni	Pergeseran	Perubahan		fisik	operasional	perjadin	honorarium/ptt	gaji tunjangan asn	
1						2	3	4	5	6						7
2	**19**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**167.192.048**	**167.192.048**	**298.860.296**	**131.668.248**						
2	19	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.000.000	106.000.000,00	174.286.000	68.286.000			Rp 68.286.000,00			Pendampingan kegiatan bidang dalam penyusunan program renja berupa rapat koordinasi dan konsultasi
2	19	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.997.048	45.997.048,00	77.701.048	31.704.000			Rp 31.704.000,00			Koordinasi dalam mendukung laporan capaian kinerja program kegiatan OPD
2	19	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.195.000	15.195.000,00	46.873.248	31.678.248			Rp 31.678.248,00			Koordinasi dalam mendukung evaluasi program kegiatan OPD
2	**19**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan**	**6.892.926.773**	**6.892.926.773**	**7.016.964.730**	**124.037.957**						

						Perangkat Daerah										
2	1 9	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.586.206.493	6.586.206.493,00	6.656.496.270	70.289.777					Rp 70.289.777,00	Kekurangan Gaji dan tunjangan ASN
2	1 9	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	306.720.280	306.720.280,00	360.468.460	53.748.180			Rp 34.315.380,00	Rp 19.432.800,00		Kekurangan honor pengelola keuangan akibat kenaikan pagu disporapar dan-' kekurangan nilai BPJS
2	**1 9**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**304.233.297**	**304.233.297**	**642.661.297**	**338.428.000**						
2	1 9	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000	17.500.000,00	96.000.000	78.500.000		Rp 78.500.000,00				Lemari Arsip, komputer tablet, Vacum cleaner
2	1 9	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.213.297	52.213.297,00	52.213.297	0						
2	1 9	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000,00	15.000.000	0						
2	1 9	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000	180.000.000,00	391.154.000	211.154.000			Rp 211.154.000,00			Koordinasi Kepala dinas dan sekretaris
2	1 9	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	39.520.000	39.520.000,00	88.294.000	48.774.000			Rp 48.774.000,00			pendampingan kegiatan bidang dalam rangka berita pada website dan aplikasi simparda

2	**19**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.782.000**	**50.782.000**	**50.782.000**	0						
2	19	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.362.000	49.362.000,00	49.362.000	0						
2	19	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.420.000	1.420.000,00	1.420.000	0						
2	**19**	**02**	**2**	**01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**561.843.500**	**561.843.500**	**834.573.700**	272.730.200						
2	19	02	2	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader	85.373.900	85.373.900,00	85.373.900	0						

						Kabupaten/Kota										
2	19	02	2	01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	476.469.600	476.469.600,00	651.639.800	175.170.200		Rp 175.170.200,00				Hari Sumpah Pemuda
2	19	02	2	01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	0	-	97.560.000	97.560.000		Rp 97.560.000,00				Penunjang kegiatan Peserta
2	**19**	**02**	**2**	**02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**507.429.600**	**507.429.600**	**1.401.666.300**	894.236.700						
2	19	02	2	02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	507.429.600	507.429.600,00	1.401.666.300	894.236.700		Rp 894.236.700,00				Polri, TNI, OKP

2	**19**	**03**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**7.698.865.399**	**7.698.865.399**	**11.708.313.771**	4.009.448.372						
2	19	03	2	02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	7.698.865.399	7.698.865.399,00	11.708.313.771	4.009.448.372		Rp 3.645.688.372,00	Rp 363.760.000,00			Kegiatan Bapor Korpri, sepakbila u-11 dan u-13, sewa ruangan, kegiatan olahraga masyarakat tradisional dan NPC, Event Sepeda
2	**19**	**03**	**2**	**04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**2.474.286.000**	**2.474.286.000**	**2.474.286.000**	0						
2	19	03	2	04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.231.786.000	2.231.786.000,00	2.231.786.000	0						
2	19	03	2	04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	242.500.000	242.500.000,00	242.500.000	0						
2	**19**	**03**	**2**	**05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**47.906.096.900**	**48.106.096.900**	**63.606.096.900**	15.700.000.000						

2	19	03	2	05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	47.906.096.900	48.106.096.900,00	63.606.096.900	15.700.000.000	Rp 15.700.000.000,00					Rehabilitasi lapangan GOR tanah grogot, Pengecatan lapangan tenis singa maulana, Pembersihan lahan parkir stadion KM 5, rehab lahan parkir stadion sadurengas, Rehab jaringan listrik GOR tapis, Pengadaan prasrana gedung koni, Pengadaan videotron stadion sadurengas, pengadaan lampu sorot stadion, rehab dan penambahan atap lapangan pickeball(indoor) desa tapis, Perencanaan 5 venue sapras olahraga
										0						
2	**19**	**04**	**2**	**01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**906.485.000**	**906.485.000**	**509.965.000**	-396.520.000						
2	19	04	2	01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	906.485.000	906.485.000,00	509.965.000	-396.520.000						
3	**26**	**02**	**2**	**01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota**	**15.319.428.450**	**15.319.428.450**	**21.067.258.250**	5.747.829.800						
3	26	02	2	01	05	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	15.309.335.500	15.309.335.500,00	21.057.165.300	5.747.829.800	Rp 5.747.829.800,00					Penyempurnaan pembangunan rehabilitasi ringan sedang dan berat sapras pendukung di objek wisata tersebar 10 kecamatan dan Pendampingan hukum

3	26	02	2	01	06	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	10.092.950	10.092.950,00	10.092.950	0						
3	**26**	**02**	**2**	**02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota**	**21.240.000**	**21.240.000**	**21.240.000**	0						
3	26	02	2	02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	21.240.000	21.240.000,00	21.240.000	0						
3	**26**	**02**	**2**	**03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota**	**2.055.367.796**	**2.055.367.796**	**4.578.784.796**	2.523.417.000						
3	26	02	2	03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	1.032.498.796	1.032.498.796,00	2.541.403.796	1.508.905.000						
3	26	02	2	03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	1.022.869.000	1.022.869.000,00	2.037.381.000	1.014.512.000		Rp 1.014.512.000,00				Peningkatan mutu SDM kepariwisataan yang terintegrasi dan berkesinambungan

3	**26**	**03**	**2**	**01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**3.658.893.349**	**3.658.893.349**	**12.088.831.349**	8.429.938.000						
3	26	03	2	01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	18.298.283	18.298.283,00	18.298.283	0						
3	26	03	2	01	04	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	18.298.283	18.298.283,00	18.298.283	0						
3	26	03	2	01	06	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	933.250.283	933.250.283,00	1.748.202.283	814.952.000		Rp 814.952.000,00				Rapat kerja bidang destinasi pariwisata se kalimantan timur dikabupaten paser tahun 2025
3	26	03	2	01	07	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2.689.046.500	2.689.046.500,00	10.304.032.500	7.614.986.000		Rp 7.614.986.000,00				Digitalisasi kepariwisataan, event HUT Kab.Paser, Putri Pariwisata, adwindo

3	**26**	**04**	**2**	**02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**1.915.800.000**	**1.915.800.000**	**2.408.499.000**	492.699.000						
3	26	04	2	02	02	Pengembangan Pendidikan	200.000.000	200.000.000,00	220.000.000	20.000.000						
3	26	04	2	02	05	Pengembangan Sistem Pemasaran	900.000.000	900.000.000,00	1.223.733.000	323.733.000		Rp 323.733.000,00				Sewa videitron visual, Honor juri, Belanja bersifat perlombaan, belanja tenda lipat, Honor komite ekraf, Nara sumber, Belanja seni pertunjukan, Belanja sewa, Belanja jasa elektone, belanja seni pertunjukan tari, **Belanja alat musik**
3	26	04	2	02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	355.000.000	355.000.000,00	503.966.000	148.966.000	Rp 148.966.000,00					Belanja Modal bangunan gedung kantor
3	26	04	2	02	14	Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual	150.000.000	150.000.000,00	150.000.000	0						
3	26	04	2	02	20	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100.000.000	100.000.000,00	55.674.000	-44.326.000						
3	26	04	2	02	21	Perlindungan Hasil Kreativitas	200.000.000	200.000.000,00	244.326.000	44.326.000		Rp 18.530.000,00	Rp 25.796.000,00			Perdin dan operasional
3	26	04	2	02	22	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	10.800.000	10.800.000,00	10.800.000	0						

3	**26**	**05**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**1.347.929.205**	**1.347.929.205**	**1.507.968.005**	160.038.800						
3	26	05	2	01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	270.707.600	270.707.600,00	270.707.600	0						
3	26	05	2	01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	530.227.205	530.227.205,00	530.227.205	0						
3	26	05	2	01	08	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	155.483.800	155.483.800,00	155.483.800	0						
3	26	05	2	01	09	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	344.167.000	344.167.000,00	344.167.000	0						
3	26	05	2	01	10	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	26.048.600	26.048.600,00	56.350.400	30.301.800		Rp 20.545.800,00	Rp 9.756.000,00			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
3	26	05	2	01	11	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	21.295.000	21.295.000,00	151.032.000	129.737.000		Rp 76.660.500,00	Rp 66.942.000,00			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jumlah	**91.788.799.317**	**91.988.799.317**	**130.216.751.394**	**38.227.952.077**						

BAB IV
PENUTUP

Rancangan akhir perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rancangan akhir perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Rancangan akhir perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tanah Grogot, Juli 2024

Kepala
Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata

Kurniawan.S.Sos
Nip. 19700122 199203 1 003

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(P -RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kompleks Perkantoran Jl. Kusuma Bangsa KM. 05 Gedung C Lantai 2
Tana Paser, 76211

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024
TANGGAL 16 AGUSTUS 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASER
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan sistematika Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dokumen ini telah mengacu pada RPJMD pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Dinamika perubahan lingkungan strategis yang bergerak dengan cepat, dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan senada dengan Visi Misi Bupati dan wakil Bupati Paser terpilih 2021-2026, Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Paser dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) tahun 2024 secara terpadu dan terukur, Dengan Demikian seluruh program kegiatan dilingkungan Dinas pemberdayaan Masyarkat dan Desa kabupaten Paser tahun 2024, mengacu pada dokumen tersebut.

Akhirnya dengan memohon rahmat dari Tuhan yang Maha Esa, atas segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Paser, Kami berharap agar Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini pada akhirnya dapat direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Paser dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.

Paser, 31 Juli 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



Drs. CHANDRA IRWANADHI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660731 198609 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Bab I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 6

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan DPMD 12

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024 17

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMD 19

3.1. Tujuan Dan Sasaran DPMD 19

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 20

3.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2024 33

Bab IV PENUTUP 46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Tahun 2024 Semester I 7

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Triwulan II Tahun 2024..... 14

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran DPMD 19

Tabel 3.2. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024..... 22

Tabel 3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja DPMD Tahun 2024..... 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

22. Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target .

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.I

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser

Periode Pelaksanaan: Semester I

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa			**75.082.624.962**		**29.504.372.194**		**15.169.972.568**		**1.812.583.026**		**3.554.581.546**						**5.367.164.572**					
1	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**80**	**40.089.463.109**	**150,43**	**13.179.814.968**	**74 %**	**7.546.105.468**	**0**	**1.076.660.813**	**0**	**2.243.140.883**		**-**		**-**	**0,00**	**3.319.801.696**	**150,43**	**16.499.616.664**	**1,88**	**0,41**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Presentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu**	**100**	**420.337.990**	**200**	**271.010.123**	**100 %**	**101.271.000**	**25,00**	**42.610.649**	**25**	**24.860.076**		**-**		**-**	**50,00**	**67.470.725**	**250,00**	**338.480.848**	**2,50**	**0,81**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	326.290.122	12	209.553.679	6 Dokumen	70.300.000	2	42.610.649	1	4.813.500					**3**	47.424.149	15	256.977.828	0,50	0,79	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48	6.400.000	12	3.600.000	12 laporan	3.600.000	3		3	899.800					**6**	899.800	18	4.499.800	0,38	0,70	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	87.647.868	12	57.856.444	6 Laporan	27.371.000	2		1	19.146.776					**3**	19.146.776	15	77.003.220	0,50	0,88	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Presentasi Kualitas Penataushaan dan Pertanggungjawaban keuangan**	**100**	**36.717.648.537**	**200**	**11.214.956.011**	**100 %**	**6.926.696.168**	**25**	**992.434.499**	**25**	**2.099.651.301**		**-**		**-**	**50**	**3.092.085.800**	**250**	**14.307.041.811**	**2,50**	**0,39**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9160	34.639.836.263	784	10.455.586.507	14 Orang/bulan	6.564.896.168	3	959.434.499	5	1.987.742.157					**8**	2.947.176.656	792	13.402.763.163	0,09	0,39	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2070	1.944.721.094	800	716.474.904	400 dokumen	340.000.000	96	33.000.000	177	111.909.144					**273**	144.909.144	1073	861.384.048	0,52	0,44	
		Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75	133.091.180	30	42.894.600	15 Laporan	21.800.000	3	-	4	-					**7**	-	37	42.894.600	0,49	0,32	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Presentasi Barang Milik Daerah yang terdata**	**80**	**155.008.489**	**60**	**91.751.601**	**40 %**	**30.721.800**	**12**	**-**	**8**	**13.295.426**		**-**		**-**	**20**	**13.295.426**	**80**	**105.047.027**	**1,00**	**0,68**	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	155.008.489	18	91.751.601	10 Laporan	30.721.800	3	-	2	13.295.426					**5**	13.295.426	23	105.047.027	2,30	0,68	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**100**	**234.650.000**	**200**	**240.229.000**	**100 %**	**15.000.000**	**0**	**-**	**0**	**-**					**0**	**-**	**200**	**240.229.000**	**2,00**	**1,02**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56	234.650.000	32	240.229.000	10 Orang	15.000.000	0	-	0	-					**0**	-	32	240.229.000	0,57	1,02	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jumlah Aset yang tersedia dalam keadaan baik**	**100**	**453.669.615**	**200**	**154.292.475**	**100 %**	**66.232.500**	**25**	**1.107.300**	**10**	**1.696.500**		**-**		**-**	**35**	**2.803.800**	**235**	**157.096.275**	**2,35**	**0,35**	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	56.472.175	20	28.478.490	10 unit	11.192.500	0	-	2	-					**2**	-	22	28.478.490	0,44	0,50	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	397.197.440	8	125.813.985	4 unit	55.040.000	2	1.107.300	0	1.696.500					**2**	2.803.800	10	128.617.785	0,50	0,32	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**2.108.148.479**	**200**	**1.207.575.758**	**100 %**	**406.184.000**	**25**	**40.508.365**	**25**	**103.637.580**		**-**		**-**	**50**	**144.145.945**	**250**	**1.351.721.703**	**2,50**	**0,64**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	131.885.423	14	335.117.500	2 Paket	28.139.000	0	-	0	-					**0**	-	14	335.117.500	0,82	2,54	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200	714.155.428	80	260.698.350	40 Paket	127.500.000	9	9.200.000	15	40.106.800					**24**	49.306.800	104	310.005.150	0,52	0,43	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	123.628.275	24	40.414.400	12 Paket	22.302.000	0	-	0	480.000					**0**	480.000	24	40.894.400	2,00	0,33	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3620	12.088.098	300	600.000	724 Dokumen	5.000.000	90	-	91	-					**181**	-	481	600.000	0,13	0,05	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	1.115.407.875	72	567.358.008	36 Laporan	221.068.000	3	31.308.365	38	63.050.780					**41**	94.359.145	113	661.717.153	0,63	0,59	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	120	10.983.380	48	3.387.500	24 Paket	2.175.000	0	-	24	-					**24**	-	72	3.387.500	0,60	0,31	
2	**Meningkatkan Administrasi Desa dalam Mewujudkan Good and Clean Government**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa**	**12**	**363.989.831**	**5**	**139.781.014**	**8 %**	**31.836.000**	**0**	**-**	**0**	**-**		**-**		**-**	**0**	**-**	**5**	**139.781.014**	**0,42**	**0,38**	
		Penyelenggaraan Penataan Desa	**Presentase Desa yang batas desanya ditetapkan**	**20**	**363.989.831**	**17,23**	**139.781.014**	**9 %**	**31.836.000**	**12,23**	**-**	**0**	**-**		**-**		**-**	**12,23**	**-**	**29,46**	**139.781.014**	**1,47**	**0,38**	
		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	4	181.994.916	0	2.282.000	1 Desa	2.500.000	0	-	0	-					**0**	-	0	2.282.000	0,00	0,01	
		Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	4	181.994.916	0	2.192.000	1 Desa	2.500.000	0	-	0	-					**0**	-	0	2.192.000	0,00	0,01	
		Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Laporan	13.275.000	0	-	0	-					**0**						
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi					0 Unit	13.561.000	0	-	0	-					**0**						
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti**	**6**	**295.104.898**	**189,21**	**255.735.300**	**4 %**	**101.250.000**	**89,21**	**4.800.000**		**12.000.000**		**-**		**-**	**89,21**	**16.800.000**	**278,42**	**272.535.300**	**46,40**	**0,92**	
		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	**Persentase Kawasan Desa yang terbentuk**	**6**	**295.104.898**	**5,88**	**255.735.300**	**4 %**	**101.250.000**	**89,21**	**4.800.000**		**12.000.000**		**-**		**-**	**89,21**	**16.800.000**	**95,09**	**272.535.300**	**15,85**	**0,92**	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5	295.104.898	3	255.735.300	1 dokumen	101.250.000	0	4.800.000	0	12.000.000					**0**	16.800.000	3	272.535.300	0,60	0,92	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Presentasi LHP Desa yang selesai ditindaklanjuti**	**100**	**20.340.465.638**	**200**	**9.035.870.670**	**100 %**	**4.447.646.600**	**0**	**593.791.216**		**865.957.046**		**-**		**-**	**0**	**1.459.748.262**	**200**	**10.495.618.932**	**2,00**	**0,52**	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Persentase Desa memiliki adminitrasi dan laporan desa yang berkualitas**	**100**	**20.340.465.638**	**135**	**9.035.870.670**	**70 %**	**4.447.646.600**	**30,65**	**593.791.216**	**9,35**	**865.957.046**		**-**		**-**	**40**	**1.459.748.262**	**175**	**10.495.618.932**	**1,75**	**0,52**	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	50	7.772.664.829	48	2.871.204.828	10 Dokumen	1.717.656.000	12	392.160.016	0	379.460.096					**12**	771.620.112	60	3.642.824.940	1,20	0,47	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa					3 Dokumen	5.000.000	0	-	0	-					**0**						
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	695	754.505.480	278	923.577.500	139 dokumen	186.233.900	0	14.440.000	0	48.054.100					**0**	62.494.100	278	986.071.600	0,40	1,31	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	60	1.957.268.104	254	956.826.375	12 Dokumen	415.499.900	3	61.105.500	3	120.753.950					**6**	181.859.450	260	1.138.685.825	4,33	0,58	
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	387	686.500.000	72	450.708.850	100 Orang	7.000.000	0	-	0	-					**0**	-	72	450.708.850	0,19	0,66	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	50	140.365.000	19	58.024.500	0 Laporan	4.100.000	0	-	0	-					**0**	-	19	58.024.500	0,38	0,41	
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	15	483.131.973	164	187.713.800	3 Dokumen	95.754.300	0	9.600.000	0	31.440.000					**0**	41.040.000	164	228.753.800	10,93	0,47	
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja	50	1.319.799.584	11	578.699.300	10 dokumen	241.666.500	0	14.200.000	0	67.680.000					**0**	81.880.000	11	660.579.300	0,22	0,50	
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian	5	4.111.192.072	73	1.752.214.633	1 Laporan	972.887.000	0	18.610.000	0	51.705.900					**0**	70.315.900	73	1.822.530.533	14,60	0,44	
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5	156.190.560	16	41.620.000	1 laporan	15.500.000	0	1.480.000	0	-					**0**	1.480.000	16	43.100.000	3,20	0,28	
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	625	478.211.400	245	176.335.500	125 Dokumen	87.722.100	94	4.800.000	31	12.000.000					**125**	16.800.000	370	193.135.500	0,59	0,40	
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	5	511.577.146	205	406.013.780	1 Dokumen	155.499.900	0	17.880.000	0	48.716.000					**0**	66.596.000	205	472.609.780	41,00	0,92	
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	360	69.615.000	79	9.570.000	90 Orang	13.100.000	0	-	0	-					**0**	-	79	9.570.000	0,22	0,14	
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	20	1.000.000.000	5	374.037.660	5 desa	307.562.000	2	49.915.700	5	39.064.000					**7**	88.979.700	12	463.017.360	0,60	0,46	
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	5	271.738.001	140	54.662.200	1 laporan	22.683.000	0	-	0	-					**0**	-	140	54.662.200	28,00	0,20	
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	30	627.706.491	16	172.807.500	6 dokumen	199.782.000	0	9.600.000	9	67.083.000					**9**	76.683.000	25	249.490.500	0,83	0,40	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**100**		**145**		**90 %**		**75**								**75**		**220**		**2,20**		
			Lembaga Adat Desa yang aktif	**90**	**13.993.601.486**	**114**	**6.893.170.242**	**70 %**	**3.043.134.500**	**60**	**137.330.997**		**433.483.617**		-		-	**60**	**570.814.614**	**174**	**7.463.984.856**	**1,93**	**0,53**	
			Masyarakat Hukum Adat yang aktif	**2**		**4**		**2 lembaga**		**2**								**2**		**6**		**3,00**		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Desa yang lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga Adatnya yang terfasilitasi**	**95**	**13.993.601.486**	**144**	**6.893.170.242**	**80 %**	**3.043.134.500**	**70**	**137.330.997**		**433.483.617**		-		-	**70**	**570.814.614**	**214**	**7.463.984.856**	**2,25**	**0,53**	
		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	5	632.104.587	11	557.588.618	1 dokumen	97.310.000	0	9.200.000	0	37.832.400					**0**	47.032.400	11	604.621.018	2,20	0,96	
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	25	865.079.843	8	602.513.200	5 dokumen	144.800.000	3	18.870.000	0	37.960.000					**3**	56.830.000	11	659.343.200	0,44	0,76	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	70	182.027.891	45	47.302.900	15 lembaga	71.814.000	10	17.381.100	1	29.692.400					**11**	47.073.500	56	94.376.400	0,80	0,52	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	30	130.480.000	4	9.515.000	6 Dokumen	29.510.500	2		2	7.160.000					**4**	7.160.000	8	16.675.000	0,27	0,13	
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50	868.816.781	30	789.746.900	10 Laporan	627.200.000	3	47.992.400	4	190.680.100					**7**	238.672.500	37	1.028.419.400	0,74	1,18	
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	75	107.741.000	4	107.750.254	18 Laporan	72.500.000	0	-	0	-					**0**	-	4	107.750.254	0,05	1,00	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20	11.207.351.383	8	4.778.753.370	4 Dokumen	2.000.000.000	0	43.887.497	1	130.158.717					**1**	174.046.214	9	4.952.799.584	0,45	0,44	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)										14,51		9,65						23,06		130,70		3,71	0,59	
Predikat Kinerja																								

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester II dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 23,06%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.367.164.572 (Lima milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 15.169.972.568 (Lima belas milyar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar 35,38%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser sebesar 17,36% dengan predikat kinerja SR (penentuan peringkat disesuaikan skala pada Tabel T-E.1 PMDN Halaman 494).
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 4 indikator, capaian kinerja >70%-100% =3 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 6 indikator capaian kinerja 0%-50% =31 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja,
b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran,
c. pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
d. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas:
e. penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi:
f. perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan,
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
k. pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku,
l. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas,

m. pembinaan jabatan fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan,
n. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Dinas:
o. pengendalian pelaksanaan tugas UPTD:
p. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
q. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi:
r. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah, dan
s. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan dalam dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan 2 tujuan dan 3 sasaran strategis yaitu :
Tujuan Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kemandirian desa
b. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yg responsif dan tangkas

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

a. Meningkatkan Administrasi Desa dalam Mewujudkan Good and Clean Government
b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah

Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

a. Presentase Desa yng memiliki Administrasi Desa yang Baik
b. Presentase Desa yang terfasilitasi dalam Kerasama antar Desa
c. Presentase Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan
d. Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK dan APIP Eksternal
e. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 -2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II
Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator		IKK	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
				2022	2023	2024	2025	2026		
	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan lndeks Desa Membangun	**%**	**outcome**							
	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa (desa tertinggal dan berkembang)	**Desa**	**output**							
	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangijumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya (desa tertinggal dan berkembang)	**Desa**	**output**							
	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan (desa tertinggal dan berkembang)	**Lembaga**	**output**							
	Jumlah peningkatan desa yang lembaga	**Desa**	**output**							

Tujuan/Sasaran	Indikator		IKK	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
				2022	2023	2024	2025	2026		
	kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan (desa tertinggal dan berkembang)									
	Iumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan lndeks Desa Membangun per tahun	**%**	**outcome**							
	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	**Desa**	**output**							
	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	**Desa**	**output**							
	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	**Lembaga**	**output**							
	Jumlah peningkatan desa yang lembaga	**Desa**	**output**							

Tujuan/Sasaran	Indikator		IKK	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
				2022	2023	2024	2025	2026		
	kemasyarakata n dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdavaan									
Tujuan: Meningkatkan kemandirian desa	Persentase pengentasan desa tertinggal			80	85	100	100	100	100	100
	Persentase peningkatan status desa mandiri			10	12	22	26	30	22	100
Sasaran:										
Meningkatkan Administrasi Desa dalam Mewujudkan Good and Clean Presentase Desa Government	Presentase Desa yang memiliki Administrasi Desa yang baik			28	35	40	45	50	41,50	104
	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar Desa			6	7	89,21	89,21	89,21	89,21	100
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Presentase Desa yang lembaga ke masyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan keg iatan ekonomi pro duktif dan pember dayaan			25	30	37	43	50	35,97	97
Tujuan: Meningkatkan tata kelola perangkat Daerah yang rresponsif dan tangkas	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi			61	65	71	75	81		
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspek torat			B	BB	BB	BB	A	BB	100

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

a. Meningkatkan kemandirian desa memiliki 2 indikator kinerja yaitu "Persentase pengentasan desa tertinggal", telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100 %; indikator kinerja berikutnya "Persentase peningkatan status desa mandiri", juga telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 22% dari target sebesar 22% dengan capaian kinerja sebesar 100%;
b. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yg responsif dan tangkas memiliki 1 indikator yaitu "Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi" belum mencapai target karena belum dilakukan penilaian mandiri pelaksanaan birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

a. Meningkatkan Administrasi Desa dalam Mewujudkan Good and Clean Government memiliki 2 indikator kinerja yaitu "Presentase Desa yang memiliki Administrasi Desa yang Baik", telah melampaui target, dimana realisasinya sebesar 41,50% dari target sebesar 40% dengan capaian kinerja sebesar 104 %; indikator kinerja berikutnya "Presentase Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama antar Desa", juga telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 89,21% dari target sebesar 89,21% dengan capaian kinerja sebesar 100%;
b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat memiliki 1 indikator yaitu "Presentase Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaani" belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 35,97% dari target sebesar 37% dengan capaian kinerja sebesar 97%;
c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah memiliki 2 indikator kinerja yaitu "Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK dan APIP Eksternal", telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0 dari target sebesar 0 dengan capaian kinerja sebesar 100 %; indikator kinerja berikutnya "Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat", juga telah mencapai target, dimana realisasinya B dari target B dengan capaian kinerja sebesar 100%;

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong

dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Komitmen dan Motivasi dari Pimpinan
2. Kerjasama Tim yang solid bersama seluruh stake holder yang terlibat
3. Program Satu Malam Bersama Desa (Salam Berdesa) yang melibatkan DPMD, Kecamatan dan Desa terkait (Aparatur Desa, Tokoh masyarakaat, tokoh adat, LKD), Pendamping Desa.
4. Regulasi dan edaran dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah terkait Kerjasama Antar Desa dan mengharuskan untuk segera melakukan percepatan pelaksanaan di daerah, diantaranya :
   a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
5. Komitmen bahwa laporan harus selesai 3 bulan setelah akhir tahun anggaran dan laporan BPD harus selesai 4 bulan setelah akhir tahun anggaran
6. Rutin dilakukan pembinaan, bimbingan updating data melalui layanan konsultasi langsung, youtube, WA dan sosmed lainnya.
7. Membentuk Pokja Prodeskel di setiap desa

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Berdasarkan Permendagri No.45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa harus berbentuk polygon, sementara data batas yang telah dilakukan pelacakan dan berita acara kesepakatan masih dalam bentuk segmen
2. Masih sering terjadi sengketa dalam penentuan batas administrasi desa
3. Ketersediaan Anggaran untuk peningkatan kapasitas BPD belum memadai, karena berdasarkan surat edaran kemendagri No.140/11455/SJ Tanggal 18 Oktober 2019 agar pelaksanaan peningkatan kompetensi aparatur desa dilaksanakan melalui 3 (tiga) balai Pemdes (Malang, Yogyakarta dan Lampung)

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Tujuan: Meningkatkan kemandirian desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	$\sum \mathrm{P}Dt = \frac{\sum \mathrm{D}}{\sum \mathrm{D}}\ x\ 100\%$ Keterangan : ∑Dadm : Jumlah desa tertinggal yang meningkat statusnya ∑D : Target Desa yang meningkat statusnya dari desa tertinggal	100%	100%
	Persentase peningkatan status desa mandiri	$\sum \mathrm{P}DM = \frac{\sum \mathrm{DM}}{\sum \mathrm{D}}\ x\ 100\%$ Keterangan : ∑Dadm : Jumlah desa Mandiri ∑D : Jumlah Desa se Kabupaten Paser	22%	22%
Sasaran:				
Meningkatkan Administrasi Desa dalam Mewujudkan Good and Clean Government	Presentase Desa yang memiliki Administrasi Desa yang Baik	$\sum \mathrm{P}\mathrm{dadm} = \frac{\sum \mathrm{Dadm}}{\sum \mathrm{D}}\ x\ 100\%$ Keterangan : ∑Dadm : Jumlah desa dengan administrasi yang baik ∑D : Target desa dengan administrasi yang baik tahun 2022-2026	40%	40%
	Presentase Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama antar Desa	$\sum \mathrm{PDk}ad = \frac{\sum \mathrm{Dkad}}{\sum \mathrm{D}}\ x\ 100\%$ Keterangan : ∑Dkad : Jumlah desa yang terfasilitasidalam Kerjasama antar desa	89,21%	89,21%

		∑D : Jumlah Desa se Kabupaten Paser		
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Presentase Desa yang lembaga kemasyarakatan danlembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	$\frac{\sum \text{PDl}kd}{\sum \text{D}} = \frac{\sum \text{Dlkd}}{\sum \text{D}}\ x\ 100\%$ Keterangan : ∑Dkad : Jumlah desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan ∑D : Jumlah Desa se Kabupaten Paser	37%	37%
Tujuan: Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yg responsif dan tangkas	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	71	71
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspek torat	Kategori evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	BB

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu ““PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER”” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai

berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran sasaran ke-3 yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah” dan sasaran ke-10 yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat” Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Pemberdayaan Masyarakaat dan Desa telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				15.169.972.568	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				17.653.212.568	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				15.169.972.568	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				17.653.212.568	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	74 %	7.546.105.468	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	74 %	8.375.483.868	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu	100 %	101.271.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu	100 %	259.369.400	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	70.300.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	198.564.400	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	3.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	3.600.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	27.371.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	57.205.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentasi Kualitas Penataushaan dan Pertanggungjawaban keuangan	100 %	6.926.696.168	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentasi Kualitas Penataushaan dan Pertanggungjawaban keuangan	100 %	6.975.476.168	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	6.564.896.168	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	6.564.896.168	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	400 dokumen	340.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	400 dokumen	388.780.000	Untuk menunjang Rakor DMPD, Kaltim Village Awards dan Laporan Pajak
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	15 Laporan	21.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	15 Laporan	21.800.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Presentasi Barang Milik Daerah yang terdata	40 %	30.721.800	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Presentasi Barang Milik Daerah yang terdata	40 %	50.721.800	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	30.721.800	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	50.721.800	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	15.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	125.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	15.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	125.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jumlah Aset yang tersedia dalam keadaan baik	100 %	66.232.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jumlah Aset yang tersedia dalam keadaan baik	100 %	126.232.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	11.192.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	11.192.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	4 unit	55.040.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	4 unit	115.040.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	406.184.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	838.684.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	28.139.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	188.139.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	127.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	158.500.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	22.302.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	22.302.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	724 Dokumen	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	724 Dokumen	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	221.068.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	462.568.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	2.175.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	2.175.000	
2	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa	8 %	31.836.000	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa	8 %	218.843.000	
	Penyelenggaraan Penataan Desa		Presentase Desa yang batas desanya ditetapkan	9 %	31.836.000	Penyelenggaraan Penataan Desa		Presentase Desa yang batas desanya ditetapkan	9 %	218.843.000	
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	2.500.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	2.500.000	
	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1 Desa	2.500.000	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1 Desa	2.500.000	
	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat		Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	13.275.000	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat		Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	79.451.500	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang	0 Unit	13.561.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang	1 Unit	134.391.500	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			terfasilitasi					terfasilitasi			
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti	4 %	101.250.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti	4 %	101.250.000	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Persentase Kawasan Desa yang terbentuk	4 %	101.250.000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Persentase Kawasan Desa yang terbentuk	4 %	101.250.000	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	101.250.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	101.250.000	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Presentasi LHP Desa yang selesai ditindaklanjuti	100 %	4.447.646.600	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Presentasi LHP Desa yang selesai ditindaklanjuti	100 %	5.269.584.300	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Desa memiliki adminitrasi dan laporan desa yang berkualitas	70 %	4.447.646.600	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Desa memiliki adminitrasi dan laporan desa yang berkualitas	70 %	5.269.584.300	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10 Dokumen	1.717.656.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10 Dokumen	1.717.656.000	pergeseran antar korek
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	3 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	3 Dokumen	5.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	139 dokumen	186.233.900	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	139 dokumen	469.227.900	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	12 Dokumen	415.499.900	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	12 Dokumen	557.044.700	Penunjang Monitoring, konsultasi dan koordinasi terkait pengelolaan keuangan desa
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang	7.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang	7.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	0 Laporan	4.100.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan	186.310.000	
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	3 Dokumen	95.754.300	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	3 Dokumen	150.427.500	Penunjang monitoring dalam rangka pengawasan
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja	10 dokumen	241.666.500	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja	10 dokumen	423.321.200	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan,	1 Laporan	972.887.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan,	1 Laporan	472.887.000	Anggaran di pindahkan Ke Setda Kab. Paser bagian

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Desa		Pengangkatan dan Pemberhentian			Desa		Pengangkatan dan Pemberhentian			umum untuk pengadaan mobil
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	15.500.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	15.500.000	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah Dokumen Profil Desa	125 Dokumen	87.722.100	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah Dokumen Profil Desa	125 Dokumen	112.222.100	Untuk menunjang mendapatkan panji-panji Kab.Paser
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	155.499.900	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	419.485.900	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	90 Orang	13.100.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	90 Orang	13.100.000	
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5 desa	307.562.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5 desa	389.294.000	
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1 laporan	22.683.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1 laporan	22.683.000	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa	6 dokumen	199.782.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa	6 dokumen	308.425.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelurahan		serta Lomba Desa dan Kelurahan			Kelurahan		serta Lomba Desa dan Kelurahan			
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	90 %	3.043.134.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	90 %	3.688.051.400	
			Lembaga Adat Desa yang aktif	70 %				Lembaga Adat Desa yang aktif	70 %		
			Masyarakat Hukum Adat yang aktif	2 lembaga				Masyarakat Hukum Adat yang aktif	2 lembaga		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Desa yang lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga Adatnya yang terfasilitasi	80 %	3.043.134.500	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Desa yang lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga Adatnya yang terfasilitasi	80 %	3.688.051.400	
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	97.310.000	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	242.068.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 dokumen	144.800.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 dokumen	543.511.900	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 lembaga	71.814.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 lembaga	112.364.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	6 Dokumen	29.510.500	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	6 Dokumen	29.510.500	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Laporan	627.200.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Laporan	627.200.000	pergeseran antar korek
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	72.500.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	133.397.000	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dokumen	2.000.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dokumen	2.000.000.000	

Catatan :

- **Kolom 6 diisi dengan APBD terakhir**

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**15.169.972.568**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**15.869.972.568**	**700.000.000**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**15.169.972.568**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**15.869.972.568**	**700.000.000**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**74 %**	**7.546.105.468**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**74 %**	**7.546.105.468**	**-**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Presentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu**	**100 %**	**101.271.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Presentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu**	**100 %**	**101.271.000**	**-**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	70.300.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	70.300.000	-

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	3.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	3.600.000	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	27.371.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	27.371.000	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Presentasi Kualitas Penataushaan dan Pertanggungjawaban keuangan**	**100 %**	**6.926.696.168**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Presentasi Kualitas Penataushaan dan Pertanggungjawaban keuangan**	**100 %**	**6.926.696.168**	**-**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	6.564.896.168	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	6.564.896.168	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	400 dokumen	340.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	400 dokumen	340.000.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	15 Laporan	21.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	15 Laporan	21.800.000	-

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Presentasi Barang Milik Daerah yang terdata**	**40 %**	**30.721.800**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Presentasi Barang Milik Daerah yang terdata**	**40 %**	**30.721.800**	**-**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	30.721.800	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	30.721.800	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**100 %**	**15.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**100 %**	**15.000.000**	**-**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	15.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	15.000.000	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Jumlah Aset yang tersedia dalam keadaan baik**	**100 %**	**66.232.500**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Jumlah Aset yang tersedia dalam keadaan baik**	**100 %**	**66.232.500**	**-**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	11.192.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	11.192.500	-

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	55.040.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	55.040.000	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**406.184.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**406.184.000**	**-**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	28.139.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	28.139.000	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	127.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	127.500.000	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	22.302.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	22.302.000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	724 Dokumen	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	724 Dokumen	5.000.000	-

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	221.068.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	221.068.000	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	2.175.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	2.175.000	-
2	**PROGRAM PENATAAN DESA**		**Persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa**	**8 %**	**31.836.000**	**PROGRAM PENATAAN DESA**		**Persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa**	**8 %**	**31.836.000**	**-**
	Penyelenggaraan Penataan Desa		**Presentase Desa yang batas desanya ditetapkan**	**9 %**	**31.836.000**	**Penyelenggaraan Penataan Desa**		**Presentase Desa yang batas desanya ditetapkan**	**9 %**	**31.836.000**	**-**
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	2.500.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	2.500.000	-
	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1 Desa	2.500.000	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1 Desa	2.500.000	-

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat		Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	13.275.000	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat		Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	13.275.000	-
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	0 Unit	13.561.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	13.561.000	-
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		**Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti**	**4 %**	**101.250.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		**Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti**	**4 %**	**101.250.000**	**-**
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		**Persentase Kawasan Desa yang terbentuk**	**4 %**	**101.250.000**	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**		**Persentase Kawasan Desa yang terbentuk**	**4 %**	**101.250.000**	**-**
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	101.250.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	101.250.000	-
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		**Presentasi LHP Desa yang selesai ditindaklanjuti**	**100 %**	**4.447.646.600**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Presentasi LHP Desa yang selesai ditindaklanjuti**	**100 %**	**4.447.646.600**	**-**
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		**Persentase Desa memiliki adminitrasi dan laporan desa yang berkualitas**	**70 %**	**4.447.646.600**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		**Persentase Desa memiliki adminitrasi dan laporan desa yang berkualitas**	**70 %**	**4.447.646.600**	**-**

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10 Dokumen	1.717.656.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10 Dokumen	1.717.656.000	-
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	3 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	3 Dokumen	5.000.000	-
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	139 dokumen	186.233.900	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	139 dokumen	186.233.900	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	12 Dokumen	415.499.900	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	12 Dokumen	415.499.900	-
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang	7.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang	7.000.000	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	0 Laporan	4.100.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan	4.100.000	-
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	3 Dokumen	95.754.300	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	3 Dokumen	95.754.300	-

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja	10 dokumen	241.666.500	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja	10 dokumen	241.666.500	-
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian	1 Laporan	972.887.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian	1 Laporan	972.887.000	-
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	15.500.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	15.500.000	-
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah Dokumen Profil Desa	125 Dokumen	87.722.100	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah Dokumen Profil Desa	125 Dokumen	87.722.100	-
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	155.499.900	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	155.499.900	-
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	90 Orang	13.100.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	90 Orang	13.100.000	-
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam	5 desa	307.562.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam	5 desa	307.562.000	-

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penetapan Dan Penegasan Batas Desa					Penetapan Dan Penegasan Batas Desa			
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1 laporan	22.683.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1 laporan	22.683.000	-
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6 dokumen	199.782.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6 dokumen	199.782.000	-
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**90 %**	**3.043.134.500**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**90 %**	**3.743.134.500**	**700.000.000**
			Lembaga Adat Desa yang aktif	**70 %**				**Lembaga Adat Desa yang aktif**	**70 %**		
			Masyarakat Hukum Adat yang aktif	**2 lembaga**				**Masyarakat Hukum Adat yang aktif**	**2 lembaga**		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan		**Persentase Desa yang lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga Adatnya yang terfasilitasi**	**80 %**	**3.043.134.500**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan**		**Persentase Desa yang lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga Adatnya yang terfasilitasi**	**80 %**	**3.743.134.500**	**700.000.000**

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					**Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	97.310.000	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	97.310.000	-
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 dokumen	144.800.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 dokumen	144.800.000	-
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	15 lembaga	71.814.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	15 lembaga	71.814.000	-

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen	29.510.500	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen	29.510.500	-
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Laporan	627.200.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Laporan	627.200.000	-
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	72.500.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	72.500.000	-
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim	4 Dokumen	2.000.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim	4 Dokumen	2.700.000.000	700.000.000

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tanah Grogot, 31 Juli 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Dr. CHANDRA IRWANADHI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660731 198609 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS SOSIAL KABUPATEN PASER

TAHUN 2024

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.33.2/KEP-786/2024
TANGGAL 16 Agustus 2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PASER
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 3
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 8
1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial 17
2.3. Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024 23

BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran 25
3.2. Review Terhadapa Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 26
3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024 41

BAB. IV PENUTUP

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan 55
4.2. Rencana tindak lanjut 56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangkapendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Sosial, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal:
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

24. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Sosial Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Sosial, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Sosial, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Sosial, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas

dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Sosial Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Kota dan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Paser Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah mengacu pada sasaran RKPD :

1. Persentase PMKS
2. Nilai SAKIP dari APIP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d RENJA PD Tahun Lalu (2022 s.d 2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian (Kinerja) dan Anggaran RENSTRA PD Tahun 2021 s.d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Tahun 2021 s.d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		13 = (6+12)		14 = (13/5)*100		15	16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)		
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan sekretariat**	**100 %**	**36.661.133.637**	**72**	**12.778.851.487**	**74 Persen**	**7.181.696.729**	**18**	**1.292.635.643**	**18**	**1.770.101.792**	**-**	**-**	**-**	**-**	36	**3.062.737.435**	**72**	**15.841.588.922**	**72,00**	**43,21**	**Sekretariat**	
	1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**771.451.001**	**100**	**323.570.023**	**100 Persen**	**146.688.855**	**22,2**	**21.942.438**	**33,3**	**18.996.658**	**0,0**	**-**	**0,0**	**-**	56	**40.939.096**	**100**	**364.509.119**	**100,00**	**47,25**	**Sekretariat**	
	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	375.691.101	6	174.458.696	3 Dokumen	90.759.254	1	13.962.438	1	1.230.000	0	-	-	-	2	15.192.438	8	189.651.134	53,33	50,48	Sekretariat	
	1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	29.250.000	2	16.824.500	1 Dokumen	2.250.000	0	-	1	-	0	-	-	-	1	-	3	16.824.500	60,00	57,52	Sekretariat	
	1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	5 Dokumen	26.250.000	2	6.020.800	1 Dokumen	2.250.000	0	-	1	-	0	-	-	-	1	-	3	6.020.800	60,00	22,94	Sekretariat	
	1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	5 Dokumen	29.020.900	2	5.801.500	1 Dokumen	2.250.000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	2	5.801.500	40,00	19,99	Sekretariat	
	1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	25.250.000	2	4.415.600	1 Dokumen	2.250.000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	2	4.415.600	40,00	17,49	Sekretariat	
	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	128.364.300	2	50.524.300	1 Laporan	20.076.900	1	-	0	13.567.258	0	-	-	-	1	13.567.258	3	64.091.558	60,00	49,92	Sekretariat	
	1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	157.604.500	2	65.524.627	1 Laporan	26.852.701	0	7.980.000	0	4.199.400	0	-	-	-	-	12.179.400	2	77.704.027	40,00	49,30	Sekretariat	
	1.06.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**31.214.432.933**	**100**	**10.748.856.132**	**100 Persen**	**6.096.288.110**	**24,3**	**1.133.343.794**	**27,0**	**1.579.578.114**	**0,0**	**-**	**0,0**	**-**	**51**	**2.712.921.908**	**100**	**13.461.778.040**	**100,00**	**43,13**	**Sekretariat**	
	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang	30.732.182.933	68	10.619.233.958	34 Orang/Bulan	6.010.239.117	8	1.110.782.654	10	1.574.580.849	-	-	-	-	18	2.685.363.503	86	13.304.597.461	53,75	43,29	Sekretariat	
	1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	244.750.000	2	61.881.989	1 Dokumen	25.000.000	0	4.998.000	0	-	-	-	-	-	-	4.998.000	2	66.879.989	40,00	27,33	Sekretariat	
	1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	237.500.000	2	67.740.185	1 Laporan	47.749.000	1	14.890.740	0	4.997.265	-	-	-	-	1	19.888.005	3	87.628.190	60,00	36,90	Sekretariat	
	1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD	5 Laporan	36.302.575	2	20.989.998	1 Laporan	13.299.993	0	2.672.400	0	-	-	-	-	-	-	2.672.400	2	23.662.398	40,00	65,18	Sekretariat	
	1.06.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani**	**100 %**	**1.692.320.393**	**100**	**776.123.703**	**100 Persen**	**401.595.800**	**0,0**	**34.429.100**	**20,0**	**63.252.872**	**-**	**-**	**-**	**-**	20	**97.681.972**	**100**	**873.805.675**	**100,00**	**51,63**	**Sekretariat**	
	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	10.420.000	2	2.631.500	1 Paket	1.247.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2	2.631.500	10,00	25,25	Sekretariat	
	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	127.000.000	8	131.443.450	6 Paket	89.568.800	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	8	131.443.450	66,67	103,50	Sekretariat	
	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	179.806.450	4	67.997.700	1 Paket	40.780.000	0	-	1	7.330.200	0	-	0	-	1	7.330.200	5	75.327.900	62,50	41,89	Sekretariat	
	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	103.656.000	2	31.258.200	1 Paket	10.000.000	0	-	0	2.100.000	0	-	0	-	-	2.100.000	2	33.358.200	12,50	32,18	Sekretariat	

	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	1.271.437.943	2	542.792.853	1	Laporan	260.000.000	0	34.429.100	1	53.822.672	0	-	0	-	1	88.251.772	100	631.044.625	2.000,00	49,63	Sekretariat	
	1.06.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi**	**100**	**%**	**2.679.125.160**	**100**	**811.103.787**	**100**	**Persen**	**468.523.964**	**0,0**	**102.920.311**	**0,0**	**105.122.448**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**208.042.759**	**100**	**1.019.146.546**	**100,00**	**38,04**	**Sekretariat**	
	1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	12.500.000	2	3.480.000	1	Laporan	1.500.000	0	-	0	1.490.000	0	-	0	-	-	1.490.000	2	4.970.000	40,00	39,76	Sekretariat	
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	Laporan	163.168.040	2	28.877.422	1	Laporan	44.400.000	0	4.022.851	0	2.721.452	0	-	0	-	-	6.744.303	2	35.621.725	20,00	21,83	Sekretariat	
	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	Laporan	2.503.457.120	2	778.746.365	1	Laporan	422.623.964	0	98.897.460	0	100.910.996	0	-	0	-	-	199.808.456	2	978.554.821	20,00	39,09	Sekretariat	
	1.06.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100**	**%**	**303.804.150**	**100**	**119.197.842**	**100**	**Persen**	**68.600.000**	**0,0**	**-**	**46,7**	**3.151.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	47	**3.151.700**	**100**	**122.349.542**	**100,00**	**40,27**	**Sekretariat**	
	1.06.01.2.09.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit	247.681.950	13	105.287.842	7	Unit	60.000.000	0	-	3	1.361.700	0	-	0	-	3	1.361.700	16	106.649.542	53,33	43,06	Sekretariat	
	1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang di pelihara	40	Unit	56.122.200	15	13.910.000	8	Unit	8.600.000	0	-	4	1.790.000	0	-	0	-	4	1.790.000	19	15.700.000	47,50	27,97	Sekretariat	
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial**	**100**	**%**	**1.296.636.654**	**100**	**771.856.671**	**100**	**%**	**362.429.700**	**25**	**69.911.800**	**25**	**36.050.900**	**0,0**	**-**	**0,0**	**-**	**50,0**	**105.962.700**	**100**	**877.819.371**	**100,00**	**67,70**	**Bid. Pemsos**	
	1.06.02.2.01	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**Persentase komunitas adat terpencil yang mendapatkan pemberdayaan dan bimbingan**	**100**	**%**	**583.183.259**	**100**	**178.995.800**	**100**	**%**	**115.485.000**	**0**	**20.858.000**	**0**	**6.900.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	-	**27.758.000**	**100**	**206.753.800**	**100,00**	**35,45**	**Bid. Pemsos**	
	1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	43	Keluarga	445.182.207	18	128.383.800	8	Keluarga	88.210.430	0	20.858.000	0	6.900.000	0	-	0	-	-	27.758.000	18	156.141.800	41,86	35,07	Bid. Pemsos	
	1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	48	Keluarga	138.001.052	40	50.612.000	20	Keluarga	27.274.570	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	40	50.612.000	83,33	36,68	Bid. Pemsos	
	1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerbitan izin undian gratis dan pengumpulan sumbangan**	**100**	**Org**	**199.002.052**	**100**	**134.046.880**	**100**	**%**	**62.163.100**	**0**	**9.200.000**	**50**	**17.812.900**	**0**	**-**	**0**	**-**	50	27.012.900	**150**	**161.059.780**	**150,00**	**80,93**	**Bid. Pemsos**	
	1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10	Dokumen	199.002.052	2	134.046.880	4	Dokumen	62.163.100	0	9.200.000	2	17.812.900	0	-	0	-	2	27.012.900	4	161.059.780	40,00	80,93	Bid. Pemsos	
	1.06.02.2.04	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan atau pelatihan**	**100**	**%**	**514.451.343**	**100**	**458.813.991**	**100**	**%**	**184.781.600**	**75**	**39.853.800**	**25**	**11.338.000**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	100	51.191.800	**200**	**510.005.791**	**200,00**	**99,14**	**Bid. Pemsos**	
	1.06.02.2.04.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Org	182.046.424	20	94.455.904	10	Orang	30.705.200	0	-	10	4.438.000	0	-	0	-	10	4.438.000	30	98.893.904	30,00	54,32	Bid. Pemsos	
	1.06.02.2.04.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Org	199.658.991	20	162.740.900	10	Orang	89.015.000	10	21.450.600	0	-	0	-	0	-	10	21.450.600	30	184.191.500	60,00	92,25	Bid. Pemsos	
	1.06.02.2.04.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Lembaga	132.745.928	80	201.617.187	20	Lembaga	65.061.400	20	18.403.200	0	6.900.000	0	-	0	-	20	25.303.200	100	226.920.387	166,67	170,94	Bid. Pemsos	
	1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial**	**100**	**%**	**2.412.729.108,00**	**100,00**	**1.256.661.084,00**	**100**	**%**	**812.538.859**	**7,76**	**59.777.255**	**13,83**	**35.411.900**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**21,6**	**95.189.155**	**100**	**1.351.850.239**	**100,00**	**56,03**	**Bid. Rehsos**	
	1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100**	**%**	**1.327.501.336,00**	**100,00**	**833.272.661,00**	**100**	**%**	**628.918.700**	**0**	**24.894.000**	**0,08**	**6.900.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,1**	31.794.000	**100**	**865.066.661**	**100,08**	**65,17**	**Bid. Rehsos**	
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75	Org	351.097.198	174	109.491.910	380	Orang	124.908.000	0	-	0	**-**	0	**-**	0	**-**	-	-	174	109.491.910	232,00	31,19	Bid. Rehsos	
	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	27	Org	66.500.000	-	-	90	Orang	45.740.000	0	-	0	**-**	0	**-**	0	**-**	-	-	0	-	-	-	Bid. Rehsos	

1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	141	Org	723.749.138	100	480.446.325	85	Orang	158.564.750	0	9.200.000	0	6.900.000	0	-	0	-	-	16.100.000	100	496.546.325	70,92	68,61	Bid. Rehsos	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Org	47.500.000	-	-	10	Orang	8.025.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	Bid. Rehsos	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	42	Org	57.800.000	70	192.227.026	15	Orang	29.568.700	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	70	192.227.026	166,67	332,57	Bid. Rehsos	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	50	Org	80.855.000	40	51.107.400	90	Orang	34.947.250	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	40	51.107.400	80,00	63,21	Bid. Rehsos	
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan	12	Org	25.000.000	-	-	22	Orang	16.630.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	Bid. Rehsos	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Org	40.000.000	-	-	10	Orang	52.850.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	Bid. Rehsos	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Org	20.000.000	500	54.797.408	500	Orang	41.760.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	500	54.797.408	6.250,00	273,99	Bid. Rehsos	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Org	40.000.000	-	-	5	Orang	31.090.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	Bid. Rehsos	
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Org	62.500.000	-	-	5	Orang	49.395.000	0	15.694.000	1	-	0	-	0	-	1	15.694.000	1	15.694.000	5,00	25,11	Bid. Rehsos	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	13	Org	42.500.000	-	-	3	Orang	35.440.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	Bid. Rehsos	
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100**	**%**	**1.085.227.772**	**100**	**423.388.423**	**100**	**%**	**183.620.159**	**15,52**	**34.883.255**	**27,59**	**28.511.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43,1**	**63.395.155**	**143**	**486.783.578**	**143,10**	**44,86**	**Bid. Rehsos**	
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	28	Org	222.944.652	11	45.015.133	5	Orang	20.365.159	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	11	45.015.133	39,29	20,19	Bid. Rehsos	
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Org	142.221.320	53	52.497.227	18	Orang	25.410.000	0	5.300.000	0	6.114.500	0	-	0	-	-	11.414.500	53	63.911.727	106,00	44,94	Bid. Rehsos	
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	45	Org	116.100.000	33	47.640.000	9	Orang	19.215.000	3	500.000	6	7.750.000	0	-	0	-	9	8.250.000	42	55.890.000	93,33	48,14	Bid. Rehsos	
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	85	Org	543.961.800	43	264.075.263	25	Orang	104.250.000	6	29.083.255	10	14.647.400	0	-	0	-	16	43.730.655	59	307.805.918	69,41	56,59	Bid. Rehsos	
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5	Dokumen	60.000.000	2	14.160.800	1	Dokumen	14.380.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2	14.160.800	40,00	23,60	Bid. Rehsos	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**100**	**%**	**3.518.663.126**	**100**	**2.690.104.837**	**100**	**%**	**1.028.176.800**	**46,14**	**62.905.700**	**29,47**	**107.452.480**	**0,00**	**-**	**0**	**-**	**75,6**	**170.358.180**	**100**	**2.860.463.017**	**100,00**	**81,29**	**Bid. Linjamsos**	
1.06.05.2.01	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Persentase anak-anak terlantar yang dipelihara**	**100**	**%**	**693.882.048**	**100**	**183.281.400**	**100**	**%**	**175.920.500**	**66,67**	**26.791.700**	**33,33**	**20.611.700**	**0,00**	**-**	**0**	**-**	**100,0**	**47.403.400**	**200**	**230.684.800**	**200,00**	**33,25**	**Bid. Linjamsos**	

1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Org	248.317.563	8	51.125.000	5	Orang	45.173.000	5	4.110.000	0	-	0	-	0	-	5	4.110.000	13	55.235.000	52,00	22,24	Bid. Linjamsos	
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Org	233.250.153	8	83.595.400	5	Orang	82.092.500	5	22.681.700	0	6.900.000	0	-	0	-	5	29.581.700	13	113.177.100	52,00	48,52	Bid. Linjamsos	
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Org	212.314.332	8	48.561.000	5	Orang	48.655.000	0	-	5	13.711.700	0	-	0	-	5	13.711.700	13	62.272.700	52,00	29,33	Bid. Linjamsos	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase data fakir miskin yang dikelola**	**100**	**%**	**2.824.781.078**	**100**	**2.506.823.437**	**100**	**%**	**852.256.300**	**25,61**	**36.114.000**	**25,61**	**86.840.780**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**51,2**	122.954.780	**151**	**2.629.778.217**	**151,21**	**93,10**	**Bid. Linjamsos**	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	39000	Org	424.392.248	6401	274.799.874	450	Orang	107.498.000	125	19.040.000	125	20.660.000	0	-	0	-	250	39.700.000	6651	314.499.874	17,05	74,11	Bid. Linjamsos	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	8000	Keluarga	1.519.824.850	1601	531.766.200	1000	Keluarga	498.661.300	250	17.074.000	250	57.580.780	0	-	0	-	500	74.654.780	2101	606.420.980	26,26	39,90	Bid. Linjamsos	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Keluarga	709.870.000	51	1.700.257.363	400	Keluarga	213.148.000	100	-	100	8.600.000	0	-	0	-	200	8.600.000	251	1.708.857.363	1.255,00	240,73	Bid. Linjamsos	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Org	170.693.980	-	-	5	Keluarga	32.949.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	Bid. Linjamsos	
1.06.06.	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Cakupan Layanan Penanganan Bencana**	**100**	**%**	**2.255.907.501,00**	**100**	**856.008.638,00**	**100**	**%**	**747.925.000**	**0**	**31.885.000**	**35,44**	**98.321.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**35,4**	**130.206.000**	**100**	**986.214.638**	**100,00**	**43,72**	**Bid. Pen Ben**	
1.06.06.2.01.	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan**	**100**	**%**	**1.685.050.298**	**100**	**707.872.638**	**100**	**%**	**618.500.000**	**0**	**9.200.000**	**70,88**	**68.161.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**70,9**	**77.361.000**	**171**	**785.233.638**	**170,88**	**46,60**	**Bid. Pen Ben**	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2200	Org	755.594.298	565	279.131.000	400	Orang	284.195.000	0	-	226	7.530.000	0	-	0	-	226	7.530.000	791	286.661.000	35,95	37,94	Bid. Pen Ben	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	250	Org	728.678.000	95	327.308.542	80	Orang	85.600.000	0	-	80	24.851.000	0	-	0	-	80	24.851.000	175	352.159.542	70,00	48,33	Bid. Pen Ben	
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampung Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Unit	-	-	-	1	Unit	102.060.000	0	-	0	25.230.000	0	-	0	-	-	25.230.000	0	25.230.000	-	#DIV/0!	Bid. Pen Ben	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Org	200.778.000	90	101.433.096	70	Orang	59.805.000	0	9.200.000	70	6.900.000	0	-	0	-	70	16.100.000	160	117.533.096	320,00	58,54	Bid. Pen Ben	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Org	-	-	-	50	Orang	86.840.000	0	-	50	3.650.000	0	-	0	-	50	3.650.000	50	3.650.000	500,00	#DIV/0!	Bid. Pen Ben	
1.06.06.2.02.	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kesiapsiagaan bencana**	**100**	**%**	**570.857.203**	**100**	**148.136.000**	**100**	**%**	**129.425.000**	**0,00**	**22.685.000**	**0,00**	**30.160.000**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**52.845.000**	**100**	**200.981.000**	**100,00**	**35,21**	**Bid. Pen Ben**	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Kampung	190.364.740	2	66.261.000	1	Kampung	59.425.000	0	9.200.000	0	14.080.000	0	-	0	-	-	23.280.000	2	89.541.000	25,00	47,04	Bid. Pen Ben	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	130	Org	380.492.463	70	81.875.000	30	Orang	70.000.000	0	13.485.000	0	16.080.000	0	-	0	-	-	29.565.000	70	111.440.000	53,85	29,29	Bid. Pen Ben	
1.06.07.	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**TMP Dalam Kondisi Baik**	**100**	**%**	**777.620.392**	**100**	**388.466.783**	**100**	**%**	**162.051.235**	**0,00**	**35.818.000**	**0**	**22.411.400**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**58.229.400**	**100**	**446.696.183**	**100,00**	**57,44**	**Bid. Pemsos**	
1.06.07.2.01.	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara**	**100**	**%**	**777.620.392**	**100**	**388.466.783**	**100**	**%**	**162.051.235**	**0,00**	**35.818.000**	**0**	**22.411.400**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**58.229.400**	**1**	**446.696.183**	**1,00**	**57,44**	**Bid. Pemsos**	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	60	Makam	777.620.392	12	388.466.783	12	Makam	162.051.235	0	35.818.000	0	22.411.400	0	-	0	-	-	58.229.400	1	446.696.183	1,67	57,44	Bid. Pemsos	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks kepuasan layanan sekretariat**	**100**	**%**	**2.914.307.110**	**72**	**228.016.963**	**74**	**Persen**	**147.214.248**	**18**	**13.710.500**	**18**	**12.670.917**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36**	**26.381.417**	**108**	**254.398.380**	**108,00**	**8,73**	**UPTD Pelkesos**	
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani**	**100**	**%**	**2.666.625.160**	**100**	**194.378.633**	**100**	**Persen**	**64.000.248**	**0**	**-**	**50**	**4.047.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**4.047.800**	**100**	**198.426.433**	**100,00**	**7,44**	**UPTD Pelkesos**	

	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	163.168.040	2	41.584.533	1	Laporan	20.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	2	41.584.533	10,00	25,49	UPTD Pelkesos	
	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	2.503.457.120	2	152.794.100	1	Paket	44.000.248	0	-	1	4.047.800	0	-	0	-	1	4.047.800	3	156.841.900	37,50	6,27	UPTD Pelkesos	
	1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi**	**100**	**%**	**163.168.040**	**100**	**48.774.516**	**100**	**%**	**40.214.000**	**0**	**11.010.500**	**0**	**3.531.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.541.500**	**100**	**63.316.016**	**100,00**	**38,80**	**UPTD Pelkesos**	
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	Laporan	163.168.040	2	48.774.516	1	Laporan	40.214.000	0	11.010.500	0	3.531.000	0	-	0	-	-	14.541.500	2	63.316.016	20,00	38,80	UPTD Pelkesos	
Fak	**1.06.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100**	**%**	**247.681.950**	**100**	**33.638.330**	**100**	**100**	**43.000.000**	**0**	**2.700.000**	**0**	**5.092.117**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	7.792.117	**100**	**41.430.447**	**100,00**	**16,73**	**UPTD Pelkesos**	
	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit	247.681.950	2	33.638.330	1	Unit	43.000.000	0	2.700.000	0	5.092.117	0	-	0	-	-	7.792.117	2	41.430.447	6,67	16,73	UPTD Pelkesos	
Fak	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan layanan rehabilitasi sosial**	**100**	**%**	**2.713.616.925**	**100**	**1.377.653.948**	**100**	**persen**	**721.180.000**	**12,5**	**136.795.512**	**75**	**137.472.218**	**0**	**-**	**0,0**	**-**	**88**	**274.267.730**	**100**	**1.651.921.678**	**100,00**	**60,88**	**UPTD Pelkesos**	
	1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100**	**%**	**2.713.616.925**	**100**	**1.377.653.948**	**100**	**Persen**	**721.180.000**	**12,5**	**136.795.512**	**75,0**	**137.472.218**	**-**	**-**	**-**	**-**	**88**	**274.267.730**	**188**	**1.651.921.678**	**187,50**	**60,88**	**UPTD Pelkesos**	
	1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Org	2.169.655.125	16	1.256.237.450	6	Orang	658.300.000	2	133.011.512	2	130.786.388	0	-	0	-	4	263.797.900	20	1.520.035.350	50,00	70,06	UPTD Pelkesos	
	1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	85	Org	543.961.800	25	121.416.498	10	Orang	62.880.000	0	3.784.000	10	6.685.830	0	-	0	-	10	10.469.830	35	131.886.328	41,18	24,25	UPTD Pelkesos	
											11.163.212.571										**3.923.332.017**	**24.270.952.428**				
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM		**97,50**	**52,38**		
																					PREDIKAT KINERJA PROGR		**Sangat Tinggi**	**Rendah**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

1. Dukungan pimpinan daerah dan segenap stackholder dalam rangka pelaksanaan tugas
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara pimpinan dan bidang-bidang
3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang cukup memadai

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dalam masalah penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
5. Keterbatasan sumber daya manusia khususnya pekerja sosial dan penyuluh sosial dalam hal penanganan PPKS
6. Bantuan sosial berupa permakanan, sandang dan alat bantu bagi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis untuk kebutuhan dasarnya masih dalam proses verifikasi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : 1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dalam masalah penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

Berdasarkan tabel hasil evaluasi Renja Dinas Sosial Kabupaten Paser diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 45,93%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **3.923.332.017** (tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh belas rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 11.163.212.571 (Sebelas Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Belas Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 35,15%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Sosial sebesar 26,18 % dengan predikat kinerja Sangat Rendah
3. Capaian kinerja kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 3 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 4 indikator capaian kinerja 0%-50% = 8 Indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser, maka Dinas Sosial Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Dinas Sosial Kabupaten Paser mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
3. Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja sesuai dengan ketentuan;

4. Pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah yang telah ditetapkkan guna pencapaian kinerja;
5. Penetapan standar operasioanal prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
6. Perumusan kebijakan di Bidang Sosial yang meliputi pemberdayaan social, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi social, perlindungan dan jaminan social, penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuagan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan;
10. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan;
11. Pembinaan Jabatan Fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenagan yang diberikan;
12. Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
13. Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
14. Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintah di Bidang Sosial;
15. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui social penilaian yang tersedia sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
16. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Sosial adalah:

1. Rekomendasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
2. Rekomendasi undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang
3. Pemberian bantuan logistik bagi korban bencana alam dan social
4. Bantuan Transport Pemulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
5. Bantuan Sosial Terencana bagi Disabilitas
6. Bantuan Sosial Terencana bagi Anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
7. Bantuan Atensi bagi Lanjut Usia melalui LKS LU
8. Lanyanan Rujukan Anak Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Butuh Perlindungan Khusus
9. Bantuan Transport Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
10. Bantuan Pemakaman Orang Terlantar (OT)

Upaya Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Sosial
2. Persentase PMKS
3. Indeks reformasi birokrasi
4. Nilai SAKIP dari APIP

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Sosial terdapat dalam Tabel di bawah ini:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
Kabupaten Paser

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10*	*12*	*13*	*14*
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		V	25	17	16	15	15,77	9,40	100	100	
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	V		100	100	100	100	98,28	10,27	100	100	
3	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	V		100	100	100	100	100	21,72	100	100	
4	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhinya Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	V		100	100	100	100	98,86	16,25	100	100	
5	Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	V		100	100	100	100	100	23,87	100	100	
6	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah	V		100	100	100	100	100	55,27	100	100	
7	Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP		V	B	BB	BB	BB	B	B	A	A	
8	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		V	0	0	0	4	500	146	4	4	
9	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		V	0	0	0	0	1	0	1	1	
10	Jumlah penyandang disabilitasterlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		V	5	10	13	15	18	11	15	15	
11	Jumlah kendaraan roda empatyang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		V	0	0	0	0	1	0	1	1	
12	Jumlah penyandang disabilitasterlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		V	15	15	15	15	243	0	15	15	
13	Jumlah rumah singgah/ shelter/t empat tinggal sementara yang dimiliki sesuaistandar		V	0	0	1	0	1	1	1	1	
14	Jumlah penyandang disabilitasterlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		V	7	5	5	5	60	0	5	5	

15	Jumlah penyandang disabilitasterlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		V	36	25	30	25	34	0	25	25	
16	Jumlah alat bantu yang tersediadi rumah singgah/ shelter		V	3	3	3	3	3	3	3	3	
17	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia		V	1	1	1	1	1	0	1	1	
18	Jumlah penyandang disabilitasterlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		V	6	6	6	6	3	0	6	6	
19	Jumlah tenaga Kesehatan yangdisediakan di rumah singgah		V	2	2	2	2	2	2	2	2	
20	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yangdisediakan		V	52	52	52	52	52	0	52	52	
21	Jumlah penyandang disabilitasterlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		V	10	8	8	8	27	0	8	8	
22	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluargadan masyarakat		V	10	10	10	10	10	0	10	10	
23	Jumlah penyandang disabilitasterlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		V	0	0	4	4	3	0	4	4	
24	Jumlah penyandang disabilitasterlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar		V	0	5	5	5	6	5	5	5	
25	Jumlah penyandang disabilitasterlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		V	0	5	5	5	18	2	5	5	

26	Jumlah penyandang disabilitasterlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		V	5	5	5	5	18	9	5	5	
27	Jumlah penyandang disabilitasterlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		V	0	0	3	5	17	11	5	5	

Berdasarkan Tabel di atas, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kualitas layanan sosial” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Sosial” mencapai target, dimana realisasinya sebesar 43% dari target sebesar 87% dengan capaian kinerja sebesar 49,43%;
b. Sasaran “Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan social” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase PMKS”, dimana realisasinya sebesar 9,40% dari target sebesar 16 % dengan capaian kinerja sebesar 58,77 %.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara pimpinan dan bidang-bidang
3. Ketersedian Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Terbuka kesempatan untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat melalui berbagai bimbingan seperti penyuluhan/bimtek/sosialisasi/pelatihan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Letak geografis, Kabupaten Paser dibeberapa daerah desa pedalaman yang jauh dari pusat-pusat Kecamatan dan Kabupaten sulit dijangkau sehingga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani oleh Dinas Sosial yang datang dan yang mengajukan permohonan serta yang diantar oleh pihak lain ke dinas
2. Keterbatasan sumber daya manusia khususnya pekerja sosial dan penyuluh sosial dalam hal penanganan PPKS
3. Bantuan sosial berupa permakanan, sandang dan alat bantu bagi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis untuk kebutuhan dasarnya masih dalam proses verifikasi
4. Bantuan sosial berupa tandon bagi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) masih dalam proses verifikasi

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang sosial perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Paser

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas layanan sosial	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Sosial		87 %	87 %
Sasaran: 1. Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS}}{\text{Jumlah Penduduk Kab Paser}}$ X 100%	16 %	16 %
Tujuan 2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang reponsif dan tangkas	Indeks reformasi birokrasi		70 %	70 %
Sasaran 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP dari APIP	Hasil Evaluasi SAKIP	BB (70,01)	BB (70,01)

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan melihat realisasi hasil pencapaian kinerja tahun 2023 dan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu ““PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER”” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Sosial mendukung pencapaian sasaran ke 10, yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Sosial telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2.
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Sosial

No	Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cacatan Penting
		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
	1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11.363.212.571**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**12.940.706.170**	
	1.06.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**10.494.818.323**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**11.877.827.922**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks kepuasan layanan sekretariat**	**74%**	**7.181.696.729**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks kepuasan layanan sekretariat**	**74%**	**7.363.404.229**	
	1.06.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	**146.688.855**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	**205.682.855**	
	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	90.759.254	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	90.759.254	
	1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	

	1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	
	1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	
	1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	
	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20.076.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20.076.900	
	1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	26.852.701	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	85.846.701	
	1.06.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	6.096.288.110	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**6.111.888.110**	
	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	6.010.239.117	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	6.025.839.117	
	1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	25.000.000	

	1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	47.749.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	47.749.000	
	1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	13.299.993	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	13.299.993	
	1.06.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani**	**100%**	**401.595.800**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani**	**100%**	**508.709.300**	
	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.247.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.247.000	
	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	89.568.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	89.568.800	
	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.780.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.180.000	
	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	260.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	352.713.500	
	1.06.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi**	**100%**	468.523.964	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi**	**100%**	**468.523.964**	

	1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.500.000	
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	44.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	44.400.000	
	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	422.623.964	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	422.623.964	
	1.06.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**68.600.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**68.600.000**	
	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	60.000.000	
	1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang di pelihara	8 Unit	8.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang di pelihara	8 Unit	8.600.000	
2.	**1 06 02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial**	**100%**	**362.429.700**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial**	**100%**	**457.772.100**	
	1 06 02 2.01	**Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**		**Persentase komunitas adat terpencil yang mendapatkan pemberdayaan dan bimbingan**	**100%**	**115.485.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**		**Persentase komunitas adat terpencil yang mendapatkan pemberdayaan dan bimbingan**	**100%**	**115.485.000**	
	1 06 02 2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Kab. Paser	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Keluarga	88.210.430	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Kab. Paser	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Keluarga	88.210.430	

	1 06 02 2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kab. Paser	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	27.274.570	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kab. Paser	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	27.274.570	
	1 06 02 2.02	**Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase penerbitan izin undian gratis dan pengumpulan sumbangan**	**100%**	**62.163.100**	**Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase penerbitan izin undian gratis dan pengumpulan sumbangan**	**100%**	**95.085.100**	
	1 06 02 2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4 Dokumen	62.163.100	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4 Dokumen	95.085.100	
	1 06 02 2.03	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan atau pelatihan**	**100%**	**184.781.600**	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan atau pelatihan**	**100%**	**247.202.000**	
	1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Kab. Paser	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30.705.200	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Kab. Paser	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	54.329.600	
	1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	89.015.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	104.765.000	

	1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosialyang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	65.061.400	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	88.107.400	
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial**	**100%**	**812.538.859**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial**	**100%**	**1.303.339.808**	
	1.06.04.2.01	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**628.918.700**	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**932.313.650**	
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan KebutuhanPermakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	380 Orang	124.908.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan KebutuhanPermakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	380 Orang	134.194.000	
	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	45.740.000	Penyediaan Sandang	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	45.740.000	
	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantudan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	158.564.750	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	238.445.400	
	1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	8.025.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	72.845.000	

	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Paser	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	29.568.700	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Paser	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	87.774.200	
	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	34.947.250	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	34.947.250	
	1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Paser	umlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	16.630.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Paser	umlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	16.630.000	
	1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	52.850.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	60.550.000	
	1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2203 Orang	41.760.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2203 Orang	125.262.800	
	1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	31.090.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	31.090.000	

	1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	49.395.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	49.395.000	
	1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Paser	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	35.440.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Paser	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	35.440.000	
	1.06.04.2.02	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**		**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**183.620.159**	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**		**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**371.026.158**	
	1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	20.365.159	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	34.939.158	
	1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	25.410.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	58.368.000	
	1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	19.215.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	23.015.000	
	1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Paser	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	104.250.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Paser	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	240.324.000	

	1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	14.380.000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	14.380.000	
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**100%**	**1.028.176.800**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**100%**	**1.147.554.050**	
	1.06.05.2.01	**Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**		**Persentase anak-anak terlantar yang dipelihara**	**100%**	**175.920.500**	**Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**		**Persentase anak-anak terlantar yang dipelihara**	**100%**	**236.051.750**	
	1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Paser	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	45.173.000	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Paser	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	45.173.000	
	1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kab. Paser	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	82.092.500	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kab. Paser	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	116.794.500	
	1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Paser	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	48.655.000	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Paser	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	74.084.250	
	1.06.05.2.02	**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase data fakir miskin yang dikelola**	**100%**	**852.256.300**	**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase data fakir miskin yang dikelola**	**100%**	**911.502.300**	
	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	450 orang	107.498.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	450 orang	107.498.000	
	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	498.661.300	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	498.661.300	

	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Paser	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Keluarga	213.148.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Paser	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Keluarga	272.394.000	
	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Keluarga	32.949.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Paser	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Keluarga	32.949.000	
5.	**1.06.06.**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Cakupan Layanan Penanganan Bencana**	**100%**	**747.925.000**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Cakupan Layanan Penanganan Bencana**	**100%**	**776.294.100**	
	1.06.06.2.01	**Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan**	**100%**	**618.500.000**	**Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan**	**100%**	**618.500.000**	
	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian)kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	284.195.000	Penyediaan Makanan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian)kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	284.195.000	
	1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	85.600.000	Penyediaan Sandang	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	85.600.000	
	1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampung Pengungsi	Kab. Paser	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	102.060.000	Penyediaan Tempat Penampung Pengungsi	Kab. Paser	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	102.060.000	

	1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	59.805.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	59.805.000	
	1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Paser	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	86.840.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Paser	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	86.840.000	
	1.06.06.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kesiapsiagaan bencana**	**100%**	**129.425.000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kesiapsiagaan bencana**	**100%**	**157.794.100**	
	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Paser	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kampung	59.425.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Paser	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kampung	59.425.000	
	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	70.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	98.369.100	
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**TMP Dalam Kondisi Bai**	**100%**	**362.051.235**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**TMP Dalam Kondisi Ba**	**100%**	**829.463.635**	
	1.06.07.2.01	**Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**		**Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara**	**100%**	**362.051.235**	**Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**		**Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara**	**100%**	**829.463.635**	

	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	12 Makam	362.051.235	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	12 Makam	829.463.635	
	UPTD PELKESOS BULAU SAYANG										**1.062.878.248**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks kepuasan layanan sekretariat**	**74%**	**147.214.248**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks kepuasan layanan sekretariat**	**74%**	**147.214.248**	
	1.06.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani**	**100%**	**64.000.248**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani**	**100%**	**64.000.248**	
	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediaka	1 Laporan	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediaka	1 Laporan	20.000.000	
	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.000.248	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.000.248	
	1.06.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi**	**100%**	**40.214.000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi**	**100%**	**40.214.000**	
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	40.214.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	40.214.000	
	1.06.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**43.000.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**43.000.000**	

	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	43.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	43.000.000	
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial**	**100%**	**721.180.000**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial**	**100%**	**915.664.000**	
	1.06.04.2.02	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**721.180.000**	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**915.664.000**	
	1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	658.300.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	814.514.000	
	1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Paser	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	62.880.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Paser	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	101.150.000	

Berdasarkan tabel 3.2. diatas, berikut alasan penambahan anggaran perubahan tahun 2024 :

- Dinas Sosial salah satu perangkat daerah yang masuk urusan wajib pelayanan dasar, dimana tugas Dinas Sosial sebagai pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- Penambahan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di UPTD Pelkesos Bulau Sayang yang semula di anggarkan untuk 6 orang PPKS, sejalan dengan keadaan di lapangan jumlah PPKS yang di urus mengalami kenaikan ± 4 s/d 5 PPKS setiap bulannya.
- Untuk pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember dan pengusulan calon Pahlawan Nasional Sultan Ibrahim Chaliluddin harus membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian gelar dalam bentuk kegiatan seminar.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.3.
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Paser Tahun 2024

No	Kode Rekening	Sebelum Perubahan (Murni) Tahun 2024				Sesudah Perubahan Tahun 2024				Bertambah/ Berkurang
		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**11.363.212.571**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**11.557.696.571**	**194.484.000**
	1.06.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**10.494.818.323**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**10.494.818.323**	**-**
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan sekretariat**	**74%**	**7.181.696.729**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan sekretariat**	**74%**	**7.181.696.729**	**-**
	1.06.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	**146.688.855**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	**146.688.855**	**-**
	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	90.759.254	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	90.759.254	-
	1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	-

	1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	-
	1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	-
	1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000	-
	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20.076.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20.076.900	-
	1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	26.852.701	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	26.852.701	-
	1.06.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**6.096.288.110**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**6.096.288.110**	-
	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	6.010.239.117	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	6.010.239.117	-
	1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	25.000.000	-

	1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	47.749.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	47.749.000	-
	1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	13.299.993	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	13.299.993	-
	1.06.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani**	**100%**	**401.595.800**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani**	**100%**	**401.595.800**	-
	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.247.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.247.000	-
	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	89.568.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	89.568.800	-
	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.780.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.780.000	-
	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	-
	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	260.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	260.000.000	-
	1.06.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi**	**100%**	**468.523.964**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi**	**100%**	**468.523.964**	-

	1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.500.000	-
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	44.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	44.400.000	-
	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	422.623.964	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	422.623.964	-
	1.06.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**68.600.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**68.600.000**	-
	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	60.000.000	-
	1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang di pelihara	8 Unit	8.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang di pelihara	8 Unit	8.600.000	-
2.	**1 06 02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial**	**100%**	**362.429.700**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial**	**100%**	**362.429.700**	-
	1 06 02 2.01	**Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**Persentase komunitas adat terpencil yang mendapatkan pemberdayaan dan bimbingan**	**100%**	**115.485.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**Persentase komunitas adat terpencil yang mendapatkan pemberdayaan dan bimbingan**	**100%**	**115.485.000**	-
	1 06 02 2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Keluarga	88.210.430	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Keluarga	88.210.430	-

	1 06 02 2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	27.274.570	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	27.274.570	-
	1 06 02 2.02	**Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerbitan izin undian gratis dan pengumpulan sumbangan**	**100%**	**62.163.100**	**Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerbitan izin undian gratis dan pengumpulan sumbangan**	**100%**	**62.163.100**	-
	1 06 02 2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4 Dokumen	62.163.100	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4 Dokumen	62.163.100	-
	1 06 02 2.03	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan atau pelatihan**	**100%**	**184.781.600**	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan atau pelatihan**	**100%**	**184.781.600**	-
	1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30.705.200	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30.705.200	-
	1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	89.015.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	89.015.000	-

	1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	65.061.400	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	65.061.400	-
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial**	**100%**	**812.538.859**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial**	**100%**	**812.538.859**	-
	1.06.04.2.01	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**628.918.700**	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**628.918.700**	-
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	380 Orang	124.908.000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	380 Orang	124.908.000	-
	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	45.740.000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	45.740.000	-
	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	158.564.750	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	158.564.750	-

	1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	8.025.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	8.025.000	-
	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	29.568.700	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	29.568.700	-
	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	34.947.250	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	34.947.250	-
	1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	umlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	16.630.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	umlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	16.630.000	-
	1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	52.850.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	52.850.000	-
	1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2203 Orang	41.760.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2203 Orang	41.760.000	-

	1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	31.090.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	31.090.000	-
	1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	49.395.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	49.395.000	-
	1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	35.440.000	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	35.440.000	-
	1.06.04.2.02	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**183.620.159**	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**183.620.159**	-
	1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	20.365.159	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	20.365.159	-
	1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	25.410.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	25.410.000	-
	1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	19.215.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	19.215.000	-
	1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	104.250.000	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	104.250.000	-

	1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	14.380.000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	14.380.000	-
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**100%**	**1.028.176.800**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**100%**	**1.028.176.800**	-
	1.06.05.2.01	**Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Persentase anak-anak terlantar yang dipelihara**	**100%**	**175.920.500**	**Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Persentase anak-anak terlantar yang dipelihara**	**100%**	**175.920.500**	-
	1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	45.173.000	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	45.173.000	-
	1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	82.092.500	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	82.092.500	-
	1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	48.655.000	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	48.655.000	-
	1.06.05.2.02	**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase data fakir miskin yang dikelola**	**100%**	**852.256.300**	**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase data fakir miskin yang dikelola**	**100%**	**852.256.300**	-
	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	450 orang	107.498.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	450 orang	107.498.000	-
	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	498.661.300	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	498.661.300	-

	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Keluarga	213.148.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Keluarga	213.148.000	-
	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Keluarga	32.949.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Keluarga	32.949.000	-
5.	**1.06.06.**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Cakupan Layanan Penanganan Bencana**	**100%**	**747.925.000**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Cakupan Layanan Penanganan Bencana**	**100%**	**747.925.000**	-
	1.06.06.2.01	**Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan**	**100%**	**618.500.000**	**Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan**	**100%**	**618.500.000**	-
	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	284.195.000	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	284.195.000	-
	1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	85.600.000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	85.600.000	-
	1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampung Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	102.060.000	Penyediaan Tempat Penampung Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	102.060.000	-

	1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	59.805.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	59.805.000	-
	1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	86.840.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	86.840.000	-
	1.06.06.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kesiapsiagaan bencana**	**100%**	**129.425.000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kesiapsiagaan bencana**	**100%**	**129.425.000**	-
	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kampung	59.425.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kampung	59.425.000	-
	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	70.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	70.000.000	-
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**TMP Dalam Kondisi Bai**	**100%**	**362.051.235**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**TMP Dalam Kondisi Ba**	**100%**	**362.051.235**	-
	1.06.07.2.01	**Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara**	**100%**	**362.051.235**	**Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara**	**100%**	**362.051.235**	-

	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	12 Makam	362.051.235	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	12 Makam	362.051.235	-
	UPTD PELKESOS BULAU SAYANG				**868.394.248**				**1.062.878.248**	**194.484.000**
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan sekretariat**	**74%**	**147.214.248**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan sekretariat**	**74%**	**147.214.248**	-
	1.06.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani**	**100%**	**64.000.248**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani**	**100%**	**64.000.248**	-
	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediaka	1 Laporan	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediaka	1 Laporan	20.000.000	-
	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.000.248	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.000.248	-
	1.06.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi**	**100%**	**40.214.000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi**	**100%**	**40.214.000**	-
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	40.214.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	40.214.000	-
	1.06.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**43.000.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**43.000.000**	-

	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	43.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	43.000.000	-
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial**	**100%**	**721.180.000**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial**	**100%**	**915.664.000**	**194.484.000**
	1.06.04.2.02	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**721.180.000**	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**915.664.000**	**194.484.000**
	1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	658.300.000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	814.514.000	156.214.000
	1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	62.880.000	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	101.150.000	38.270.000

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial mempunyai tanggung jawab untuk :
    a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

5.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

PERUBAHAN RENJA
TAHUN 2024



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASER



SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2024 dapat tersusun. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan) Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026.

Dinas Kesehatan Kabupaten Paser sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bidang kesehatan, memiliki komitmen besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut tertuang dalam Visi pembangunan Daerah Kabupaten Paser periode RPJMD 2016–2021 yaitu " **Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera**". Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan satu misi menjadi urusan Dinas Kesehatan yaitu **"** Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing. Salah satu arah dari Misi 4 ini meliputi pengembangan pelayanan Kesehatan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2024, telah menyesuaikan dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan penetapan indikator kinerja . Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan anggaran perubahan tahun 2024 guna pencapaian kinerja tahunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tana Paser, 3 September 2024

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS KESEHATAN

Amri Yulihardi, S.STP.M.Si

NIP. 19840726 200212 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistimatika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	6
	2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	7
	2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024	33
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Tujuan dan Sasaran	33
	3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024	35
	3.3 Rencana Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	183
BAB IV	PENUTUP	399

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagaiacuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangkapendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan sub kegiatan, penambahan kegiatan dan Sub Kegiatan baru/ sub kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan penambahan / pengurangan pagu kegiatan dan sub kegiatan , serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
d. Adanya alokasi anggaran bantuan keuangan provinsi yang masuk dalam struktur anggaran Dinas Kesehatan.
e. Penyesuian Kegiatan dan Subkegiatan khususnya yang bersumber dari alokasi anggaran DAK Fisik dan DAK Non Fisik Tahun 2024

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang

dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kesehatan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal:
18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser;
27. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Kesehatan, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan, keterkaitan antara Renja Dinas Kesehatan dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Kesehatan serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kesehatan, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang

diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung tercapai/ penyebab tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

`

TABEL. 2.2
EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024
SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE 2 (DUA) TAHUN 2024

	Kode Perangkat Daerah / Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi S.d Triwulan ke 2		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%)		Predikat	
					Triwulan ke 1		Triwulan ke 2							
(1)	(2)	(5)	(7)		(8)		(9)		(12)		(13)		(14)	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	Dinas Kesehatan													
	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN (UKP) DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)	Cakupan Pelayanan UKM dan UKP		107.635.135.893		14.898.985.648		4.898.135.952	0%	19.834.269.599	0,00%	16,43%		
									-	-				
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang disediakan		41.648.208.093		107.382.794		144.275.890	0%	251.658.684	0,0%	0,66%		
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2		0			-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah

	Pendukungnya													
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2	2.204.259.213	0	-		-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	4	1.116.000.000	0	-		-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	11	12.980.000.000				-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1	5.700.000.000	0	-		-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	371.000.000	0	-		-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	1.664.761.000	0	-		-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3	530.000.000	0	-		-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	9.225.000.000,00	0	59.350.354		-	-	59.350.354	0,0	0,64	Sangat Rendah	Sangat Rendah

`

1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1	72.038.000	1	21.792.440		-	1,00	21.792.440	100,0	30,25	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1	7.725.149.880	0	-		144.275.890	-	144.275.890	0,0	1,87	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	18207	60.000.000	955	26.240.000		-	955	26.240.000	5,2	43,73	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		64.856.927.800		14.723.182.647		4.748.004.062	0%	19.508.334.708	0,0%	23,73%		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.477	467.104.000	1059	4.206.988	1090	7.448.600	2.149,00	11.655.588	39,2	2,50	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.285	55.000.000	995	8.926.000	1142	-	2.137,00	8.926.000	40,4	16,23	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.285	1.254.840.106	911	5.920.512	1278	181.500	2.189,00	6.102.012	41,4	0,49	Sangat Rendah	Sangat Rendah

	Lahir													
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25.212	156.000.000	5684	6.359.750	5396	-	##########	6.359.750	43,9	4,08	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.909	1.046.644.000	12807	18.421.000	480		##########	18.421.000	39,2	1,76	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	198.653	262.000.000	23509	40.886.685	29056	-	##########	40.886.685	26,5	15,61	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.471	156.500.000	3638	5.997.000	4095	-	7.733,00	5.997.000	41,9	3,83	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85.245	170.000.000	8488	-	8340	-	##########	-	19,7	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.889	275.000.000	1083	2.400.000	579	-	1.662,00	2.400.000	24,1	0,87	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	484	300.000.000	219	34.116.300	70	-	289,00	34.116.300	59,7	11,37	Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.121	3.694.326.900	916	1.373.000	1694	865.000	2.610,00	2.238.000	232,8	0,06	Sangat Tinggi	Sangat Rendah

`

1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12.284	300.000.000	1892	18.580.500	2792	4.730.000	4.684,00	23.310.500	38,1	7,77	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	120.000.000	1	14.506.400		-	1,00	14.506.400	100,0	12,09	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19	325.230.000	0	34.264.000		7.571.500	-	41.835.500	0,0	12,86	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	60.000.000	0	15.729.312		6.900.000	-	22.629.312	0,0	37,72	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	461.120.000	1	25.258.000	0	2.328.000	1,00	27.586.000	100,0	5,98	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	271.254.500	0	31.264.344		18.000.000	-	49.264.344	0,0	18,16	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	75.000.000	0	22.158.950	0	16.183.909	-	38.342.859	0,0	51,12	Sangat Rendah	Rendah
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	40.000.000	0	4.037.700		-	-	4.037.700	0,0	10,09	Sangat Rendah	Sangat Rendah

1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	13.137	40.000.000	332	8.440.750	368	4.110.000	700,00	12.550.750	5,3	31,38	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50	19.314.000		-	14	-	14,00	-	28,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	857.701.800	1	50.664.488		6.686.000	1,00	57.350.488	100,0	6,69	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	50.811.538.100	0	13.547.623.058		4.515.874.353	-	18.063.497.410	0,0	35,55	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	10	135.429.500	0	21.715.200		-	-	21.715.200	0,0	16,03	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1.720.000.000	1	628.564.000		4.370.000	1,00	632.934.000	100,0	36,80	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	6	318.770.000	6	76.893.000	0	134.770.200	6,00	211.663.200	100,0	66,40	Sangat Tinggi	Sedang
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	1	40.000.000	0	14.563.190	1	840.000	1,00	15.403.190	100,0	38,51	Sangat Tinggi	Sangat Rendah

	Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Pemberian Obat Massal)												
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	40.000.000	0	5.927.600		-	-	5.927.600	0,0	14,82	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	2	100.000.000	2	13.573.700		-	2,00	13.573.700	100,0	13,57	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600	200.000.000	58	-	220,0	-	278,00	-	46,3	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40	100.000.000	12	2.481.250	14	17.145.000	26,00	19.626.250	65,0	19,63	Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100	396.409.894	28	-		-	28,00	-	28,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1	378.467.000	1	58.329.970		-	1,00	58.329.970	100,0	15,41	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	209.278.000,00	0			37.148.000	-	37.148.000	0,0	17,75	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegras	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi		130.000.000	25%	41.475.243		5.856.000	25%	47.331.243	25,0%	36,41%		

1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3	130.000.000	2	41.475.243	0	5.856.000	2,00	47.331.243	66,7	36,41	Sedang	Sangat Rendah
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan		1.000.000.000	25%	26.944.964		-	25%	26.944.964	25,0%	53,89%		
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2	1.000.000.000	2	26.944.964		-	2,00	26.944.964	100,0	2,69	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang Kompeten		23.547.933.100		5.075.547.000		7.921.706.000	0,0%	12.997.253.000	0,00%	56,59%		
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM		23.143.759.100	15%	5.075.547.000		7.921.706.000	15%	12.997.253.000	15,0%	56,77%		
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan	410	22.854.700.000	410	5.052.564.000		7.921.706.000	410,00	12.974.270.000	100,0	56,77	Sangat Tinggi	Rendah

	Kesehatan Sesuai Standar	Kesehatan (Fasyankes)												
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	289.059.100	0	22.983.000		-	-	22.983.000	0,0	7,95	Sangat Rendah	Sangat Rendah
									-	-				
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK.		404.174.000	0%	-		-	0%	-	0,0%	0,00%		
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	40	404.174.000	0	-		-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
									-	-				
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Obat, Alkes dan Makanan dan Minuman		80.000.000		11.916.500		14.052.000	0%	25.968.500	0,00%	32,46%		
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha	Presentase pemberian rekomendasi penerbitan izin apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT).		35.000.000	25%	11.916.500	25%	5.810.000	50%	17.726.500	50,0%	50,65%		

	Mikro Obat Tradisional (UMOT)												
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	35.000.000	1	11.916.500		5.810.000	1,00	17.726.500	100,0	50,65	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
									-	-				
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Presentase sertifikat laik higienis sanitasi TPM yang diterbitkan.		15.000.000	0%	-		-	0%	-	0,0%	0,00%		
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	15.000.000	0	-		-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah

	dan Depot Air Minum (DAM)													
									-	-				
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Presentasi stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diterbitkan/terpasang.		15.000.000	0	-		-	0%	-	0,0%	0,00%		
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	15.000.000	0	-		-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Persentase hasil pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang ditindaklanjut*		15.000.000	0	-		8.242.000	0%	8.242.000	0,0%	54,95%		
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1	15.000.000	0	-		8.242.000	-	8.242.000	0,0	70,00	Sangat Rendah	Sedang

	Pengawasan													
									-	-				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif		7.071.742.000		22.821.035		23.868.514	0,00%	46.689.549	0,00%	0,38%		
									-	-				
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Germas)	Presentase kecamatan/desa/PKM yang mendapatkan Advokasi, Pemberdayaan , Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor		50.000.000	0%	4.578.049		11.126.250	0%	15.704.299	0,0%	31,41%		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	50.000.000,00	0	4.578.049		11.126.250	-	15.704.299	0,0	31,41	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang mempraktikkan PHBS		300.000.000	0%	-		-	0%	-	0,0%	0,00%		
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	300.000.000,00	0	-		-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
									-					

										-				
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM aktif		6.721.742.000	0%	18.242.986		12.742.264	0%	30.985.250	0,0%	0,26%		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	6.721.742.000	0	18.242.986		12.742.264	-	30.985.250	0,0	0,46	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Kesekretariatan		179.943.570.187		12.730.397.993		74.196.217.477	-	86.926.615.470	0,00%	48,31%		
									-	-				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun		247.752.000	20%	21.844.000		4.880.000	20%	26.724.000	0,2%	10,79%		
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	168.324.000	0	18.130.000		3.000.000	-	21.130.000	0,0	12,55	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24	10.000.000	24	1.520.000		940.000	24,00	2.460.000	100,0	24,60	Sangat Tinggi	Sangat Rendah

1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	24	25.000.000	0	1.444.000		940.000	-	2.384.000	0,0	9,54	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	44.428.000	1	750.000			1,00	750.000	100,0	1,69	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
									-	-				
	Adminitrasi Keuangan	Presentase dokumen dan laporan adminitrasi keuangan yang tersusun		174.359.576.157	25%	12.270.961.418		74.118.467.377	25%	86.389.428.795	25,0%	49,55%		
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15260	174.209.876.157	3.270	12.252.525.884	5.305	74.096.017.377	8.575	86.348.543.261	56,2	49,57	Rendah	Sangat Rendah
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	10.000.000	0	3.600.000		-	-	3.600.000	0,0	36,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	15.000.000	0	-	1	14.930.000	1,00	14.930.000	100,0	99,53	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12	124.700.000	0	14.835.534	6	7.520.000	6,00	22.355.534	50,0	17,93	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Laporan BMD*		25.000.000	0	-		-	0%	-	0,0%	0,00%		
1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik	1	25.000.000	0	-		-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah

	Barang Milik Daerah pada SKPD	Daerah pada SKPD												
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase adminitrasi kepegawaian PD yang tersusun		276.778.000	0	54.026.016		26.378.000	0%	80.404.016	0,0%	29,05%		
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	20.000.000	0	-			-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	256.778.000	0	54.026.016	1	26.378.000	1,00	80.404.016	100,0	31,31	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		2.369.487.000	15%	139.819.635		-	15%	139.819.635	15,0%	5,90%		
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10.000.000	1	9.984.561		-	1,00	9.984.561	100,0	99,85	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1.944.808.400	0	-			-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	26.078.600	0	-		-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	100.000.000	0	42.403.190		-	-	42.403.190	0,0	42,40	Sangat Rendah	Sangat Rendah
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	35.000.000	0	-		-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1	3.600.000	0	-	0	-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah

	Perundang-undangan	Disediakan												
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	250.000.000	0	87.431.884		-	-	87.431.884	0,0	34,97	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan		1.531.217.190	0%	-		-	0%	-	0,0%	0,00%		
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	1.285.682.100,00	0	-		-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	230.000.000	0	-		-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	15.535.090	0	-		-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		912.541.370	25%	209.506.224		46.492.100	25%	255.998.324	25,0%	28,06%		
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.200.000	0	-		-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	5.000.000	0	-		-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	905.341.370	0	209.506.224		46.492.100	-	255.998.324	0,0	28,28	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase barang milik daerah yang terpelihara		221.218.470	15%	34.240.700		-	15%	34.240.700	15,0%	15,48%		

	Urusan Pemerintahan Daerah													
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	63.218.470	2	30.220.000	0	-	2,00	30.220.000	66,7	47,80	Sedang	Sangat Rendah
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80	148.000.000	0	4.020.700	48	-	48,00	4.020.700	60,0	2,72	Rendah	Sangat Rendah
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	10.000.000,00	0	-		-	-	-	0,0	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	TOTAL			**318.278.381.180**	**0,00%**	**32.739.668.176**	**0,00%**	**87.053.979.943**		**119.830.796.118**	**32,20%**	**35,66**	Sangat Rendah	Sangat Rendah

`

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan 2(dua) adalah 33,22 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 119.830.796.118,- (seratus sembilan belas milyar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 318.278.381.180,- (tiga ratus delapan belas milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh) atau sebesar 35,66 %. Dengan predikat sangat rendah
2. Capaian kinerja sub kegiatan dengan predikat kinerja sangat tinggi (91- 100%) = 18 indikator, capaian kinerja predikat tinggi (76 - 90%) = 0 indikator, capaian kinerja predikat sedang (66-75 %) = 2 indikator capaian kinerja predikat rendah (51- 66%) = 4 indikator serta capaian kinerja sangat rendah ≤ 50 % = 61 indikator

Dari Gambaran diatas Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Kesehatan baru mencapai 33,22% dengan predikat kinerja sangat rendah.

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Tugas

Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

1. Penyusunan perencanaan program dab kegiatan operasional di bidang Kesehatan masyarkat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan serta sumber daya Kesehatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
3. Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;
5. Penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
6. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan yang meliputi bidang pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
7. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, peningkatan kapasitas sumber daya

manusia kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;

8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
11. Pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku ;
12. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
13. Pembinaan Jabatan Fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan ;
14. Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Dinas;
15. Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
16. Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah dibidang kesehatan .
17. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
18. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah ; dan
19. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Kesehatan adalah:

1) Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil;
2) Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3) Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4) Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan balita;

a. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

5) Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif;
6) Pelaksanaan pengelolaan pelayarian kesehatan pada usia lanjut;
7) Pelaksanaan pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
8) Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
9) Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga;
10) Pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan;
11) Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur,asuhan mandiri, dan tradisional lainnya;

`

12) Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa;
13) Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika psikotropika dan zat adiktif;
14) Pelaksanaan deteksi dini penyalahgunaan narkotika psikotropika;
15) Pelaksanaan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
16) Pelaksanaan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidupbersih dan sehat;
17) Pelaksanaan penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
18) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
19) Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
20) Pelaksanaan pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita diabetesmelitus;
21) Pelaksanaan perigelolaan pelayanan Kesehatan orang terdugatuberkulosis;
22) Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV;
23) Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa;
24) Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;
25) Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan;
26) Pelaksanaan pengelolaan surveilans kesehatan;
27) Pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus;
28) Pelaksanaan pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatandan pasca krisis ksehatan;
29) Pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidakmenular;
30) Pelaksanaan pengambilan dan pengiriman specimen penyakitpotensial kejadian luat biasa ke laboratorium rujukan/nasional;
31) Pelaksanaan penyelenggaraan kabupaten/kota sehat;
32) Pelaksanaan investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal);
33) Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah
34) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga;
35) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum;
36) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembiriaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan;
37) Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan;
38) Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga;

`

39) pelaksanaan pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya;
40) Pelaksanaan pembangunan puskesmas;
41) Pelaksanaan pembangunan fasilitas kesehatan lainnya;
42) Pelaksanaan pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan;
43) Pelaksanaan pengembangan rumah sakit;
44) Pelaksanaan pengembangan puskesmas;
45) Pelaksanaan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya;
46) Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit;
47) Pelaksanaan rehabilitast dart pemeliharaan puskesmas;
48) Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya;
49) Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenagakesehatan ;
50) Pelaksanaan pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan;
51) Pelaksanaan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanankesehatan ;
52) Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;
53) Pelaksanaan penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan;
54) Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota;
55) Pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawatdarurat terpadu
56) Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kesehatan;
57) Pelaksanaan pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet;
58) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan perizinan rumah sakit kelas c, d dan fasilitas pelayanankesehatan lainnya;
59) P e1aksariaan peningkatan tata Kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten;
60) Pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan;
61) P elaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan
62) Pelaksanaan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;
63) pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi ;
64) Pelaksanaan pengadaan obat, v aksin;
65) Pelaksanaan pengadaan bahan habis pakai;
66) Pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala alat Kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;
67) P elaksanaan pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan ;
68) Pelaksanaan pembiriaan dan pengawasan tenaga kesehatan sertatindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan;
69) Pelaksanaan perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumberdaya manusia kesehatan ;
70) Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatansesuai standar;
71) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan;
72) Pelaksanaan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknissumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten ;
73) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional;

74) Pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek,toko obat, toko alat kesehatandan optikal, usaha mikro obat tradisional;
75) Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotek, toko obat, toko alat kesehatari dan optikal, usaha mikro obat tradisional;
76) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dark PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
77) pelaksanaa pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas l tertentu perusahaan rumah tangga;
78) Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja padaDinas Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja padaDinas;
79) pelaksanaan administrasi keuangan pada Dinas;
80) pelaksanaan administrasi barang milik Daerah pada Dinas;
81) Pelaksanaan administrasi pendapatan Daerah kewenangan padaDinas;
82) Pelaksanaan administrasi kepegawaian pada Dinas;
83) Pelaksanaan administrasi umum pada Dinas;
84) Pengadaan barang mílik Daerah penunjaiig urusan pemerintah daerahpada Dinas;
85) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah pada dinas;
86) Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas;
87) Pelaksanaan penyiapan bahan pelaporan penerapan standarpelayanan minimal dibidang kesehatan;
88) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraanpemerintahan ;
89) Fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
90) Fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dilingkungan Dinas.

`

Upaya Dinas Kesehatan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari sasaran dan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak	Angka kematian ibu	8
		Angka kematian bayi	5.3 per 1000 kelahiran hidup
		Angka kematian balita	6.4 per 1000 kelahiran hidup
		Prevalensi stunting	12,40%
2	Meningkatnya kwalitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) (Permenpan No. 14 Tahun 2017	86,61
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,3
3	Menurunnya Angka Kesakitan dan Angka Kematian akibat PM dan PTM	Angka Kesakitan	17.5%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan BMD dan keuangan yang akuntabel	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB (73)

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD berdasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan terdapat dalam Tabel di bawah ini

`

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan II

Tahun 2024

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran			Capaian Kinerja		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024 (semester1)	2022	2023	2024
1	Tujuan 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup (UHH)	72.80	72.90	73,10	73,20	73,30	72.89	72.99	-	100%	100%	-
	Sasaran 1. Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak	Angka kematian ibu (-)	10 kasus	9 kasus	8 kasus	6 kasus	4 kasus	5 kasus	11 kasus	4 kasus	200%	82%	200%
		Angka kematian bayi (-)	7.3 per 1000 kelahiran hidup	6.3 per 1000 kelahiran hidup	5.3 per 1000 kelahiran hidup	4.3 per 1000 kelahiran hidup	3.3 per 1000 kelahiran hidup	13.2 per 1000 KH	10.2 per 1000 KH	20,05 per 1000 KH	55%	62%	26%
		Angka kematian balita (-)	8.4 per 1000 kelahiran hidup	7.4 per 1000 kelahiran hidup	6.4 per 1000 kelahiran hidup	5.4 per 1000 kelahiran hidup	4.4 per 1000 kelahiran hidup	13.95 per 1000 KH	12.6per 1000 KH	20,5 per 1000 KH	60%	59%	31%
		Prevalensi stunting (-)	14. 40 %	13.40%	12.40%	11.40%	10.40%	15.89%	13.98%	13,30%	91%	96%	93%
	Sasaran 2. Meningkatnya kwalitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) (Permenpan No. 14 Tahun 2017	76.61	81.61	86.61	91.61	96.61	81.89	84.7	84,31	107%	104%	97%
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0.2	0.3	0.4	0,5	0,6	0.22	0.259	0,27	110%	86%	90%
	Sasaran 3. Menurunnya Angka Kesakitan dan Angka Kematian akibat PM dan PTM	Angka Kesakitan (-)	18.5%	18%	17.5%	17%	16.5%	23.5%	23%	-	79%	78%	-
2	Tujuan 2. Meningkatkan kinerja OPD												
	Sasaran 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	C (67)	B (69)	BB (73)	BB	A	B (68,75)	B (68,94)	B (69.11)	103%	100%	95%

`

Berdasarkan Tabel 2.3 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1 “Meningkatnya Derajat Kesehatah Masyarakat” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “ **Umur harapan hidup (UHH)** ”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 72,99 dari target sebesar 72,90. dengan capaian kinerja sebesar 100 %
   1) Sasaran 1“ Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak “ memiliki 4 indikator kinerja yang bersifat negatif (-) artinya semakin rendah capaian maka semakin baik Kinerjanya , yaitu :
      a. Angka Kematian Ibu, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 4 kasus dari target sebesar 8 kasus .dengan capaian kinerja sebesar 200 %
      b. Angka Kematian bayi, belum memcapai target, dimana realisasi sebesar 20,05 per 1000 KH dari target 5,3 per 1000 KH dengan capaian kinerja sebesar 26 %.
      c. Angka Kematian Balita, belum mencapai target, dimana realisasi sebesar 20,5 per 1000 KH dari target 6,4 per 1000 KH, dengan capaian kinerja sebesar 31 %
      d. Prefalensi Stunting , belum mencapai target , dimana realisasi sebesar 13,3 persen dari target 12,4 % denga,n capaian kinerja sebesar 93 %
   2) Sasaran 2 “ Meningkatkan kualitas pelayanaan kesehatan” memliki 2 indikator kinerja yaitu :
      a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum mencapai target dimana realisasi 84,71 dari target 86,61 ,dengan capaian kinerja sebesar 97 %
   3) Indeks Keluarga Sehat (IKS) , belum mencapai target dimana saat ini realisasi masih 0,27 adapun target 4, dengan capaian kinerja sebesar 68%
   4) Sasaran 3 “ Menurunkan Angka Kesakitan dan Angka Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular “ memiliki 1 Indikator yaitu “Angka Kesakitan (-)” , tahun 2023 belum mencapai target , dimana realisasi sebesar 23% dari target 17,5 % atau capaian kinerja baru 79%
2. Tujuan 2 “Meningkatkan Kinerja OPD “ memiliki 1 sasaran yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja” dengan indikator “Nilai SAKIP “ belum mencapai target , realisasi B (69,11) dari target BB (73) , dengan capaian kinerja sebesar 95%

Tabel 2.4
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	**5.477**	**2149**	**39,24**	**50193**	**26897**	**53,59**	**66,03**
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**5.285**	**2137**	**40,44**	**16680**	**7236**	**43,38**	**62,13**
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	**5.282**	**2189**	**41,44**	**29128**	**13663**	**46,91**	**64,90**
4	Pelayanan Kesehatan Balita	**25.212**	**11080**	**43,95**	**123871**	**65302**	**52,72**	**70,31**
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	**56.781**	**13287**	**23,40**	**907734**	**51776**	**5,70**	**26,25**
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	**196.143**	**52565**	**26,80**	**202102**	**58524**	**28,96**	**41,28**
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	**21.069**	**8038**	**38,15**	**64074**	**51043**	**79,66**	**77,98**
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	**83.094**	**16788**	**20,20**	**84038**	**17732**	**21,10**	**30,75**

`

9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	**3.202**	**1662**	**51,91**	**4130**	**2590**	**62,71**	**83,26**
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	**373**	**289**	**77,48**	**912**	**892**	**97,81**	**126,38**
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	**7.286**	**2610**	**35,82**	**9798**	**5122**	**52,28**	**61,96**
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**7.785**	**4684**	**60,17**	**8598**	**5497**	**63,93**	**92,13**

Pada tabel 2.4 diatas dapat dilihat gambaran pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sampai dengan triwulan ke 2

Tabel 2.5
Capaian IKK Outcome urusan Kesehatan
Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2024

No. IKK	IKK Outcome	Rumus	Penyebut	pembilang	Persentase Capaian
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan Jumlah Penduduk di kabupaten/kota	264	303424	0,0870%
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi. Jumlah RS di kabupaten/kota	2	2	100%
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	2149	5477	39%
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	2137	5285	40%
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	2189	5282	41%
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah balita di kabupaten/kota	11080	25212	43,9%
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	13287	56781	23,4%
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	52565	196143	26,8%
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota	8038	21069	38,2%
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	16788	83094	20%
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	1662	3202	52%
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	289	373	77%
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	2610	7286	36%
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	4684	7785	60%

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari rencana target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser sampai dengan Semester 1 2024 antara lain :

1. Penetapan dan pengesahan anggaran di tahun sebelumnya sehingga pelaksaan kegiatan dapat segera mulai di awal tahun anggaran .
2. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang sudah memadai.
3. Dukungan dan dorongan dari pimpinan untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatiakan aturan dan ketentuan yang berlaku serta kelegkapan administrasi.
4. Masyarakat sebagai penerima layanan, khususnya pelayanan Kesehatan masih memilih pelayanan milik pemerintah.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Terjadinya beberapa kali pergantian kepemimpinan (Plt. Kepala Dinas) sehingga mempengaruhi proses pelaksanaan penunjukan / tender pengadaan barang dan jasa,
2. Masih adanya kekurangan / belum teranggarkan belanja kegiatan -kegiatan prioritas baik terkait pelayanan maupun pemenuhan Sarana dan Prasarana pada Dinas Kesehatan maupun di UPTD.
3. Pelaksana / penanggung jawab kegiatan / sub kegiatan yang kurang respon terhadap arahan atau pun petunjuk pimpinan
4. Masih terjadinya kekeliruan dalam penginputan belanja di RKA khususnya kode rekening belanja, sehingga belum dapat di gunakan sehingga menunggu perbaikan pada tahapan perubahan anggaran.
5. Kegiatan pelatihan/BImtek atau sejenisnya yang akan diikuti (mengikuti kelas regular) di Lembaga diklat /bimtek baru akan membuka kelas pada triwulan 3 dan 4 mendatang Sehingga realisasi kegitan baru ada pada di semester ke 2.
6. Kegiatan Pengadaan Konstruksi, Belanja Modal Sebagian besar baru mulai proses pemilihan penyedia pada triwulan ke 2 , sehingga progres fisik dan keuangan baru akan terlihat pada triwulan 3 dan 4 mendatang.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

`

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Kesehatan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2024

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula	Target	
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024
1	Tujuan 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup (UHH)	Mengunakan rilis hasil pengukuran BPS	73,10	73,10
	Sasaran 1. Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak	Angka kematian ibu (-)	Jumlah kematian ibu dalam waktu 1 Tahun	8 kasus	8 kasus
		Angka kematian bayi (-)	Jumlah kematian bayi < 1 tahun / Jumlah kelahiran hidup) * 1.000	5.3 per 1000 kelahiran hidup	5.3 per 1000 kelahiran hidup
		Angka kematian balita (-)	Jumlah kematian anak < 5 tahun / Jumlah kelahiran hidup) * 1.000	6.4 per 1000 kelahiran hidup	6.4 per 1000 kelahiran hidup
		Prevalensi stunting (-)	Hasil perhitungan survei	12.40%	12.40%
	Sasaran 2. Meningkatnya kwalitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) (Permenpan No. 14 Tahun 2017	Hasil pengukuran pendapat masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif. dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat	86.61	86.61
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Hasil pengukuran 12 indikator Keluarga Sehat	0,4	0,4
	Sasaran 3. Menurunnya Angka Kesakitan dan Angka Kematian akibat PM dan PTM	Angka Kesakitan (-)	jumlah total kasus penyakit dibagi dengan total populasi	17.5%	17.5%
2	Tujuan 2. Meningkatkan kinerja OPD				
	Sasaran 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Hasil Penilaian AKIP tahun sebelumnya oleh APIP	BB (73)	BB (73)

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

`

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu ““PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER”” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan mendukung pencapaian sasaran ke- 9, yaitu “ Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Kesehatan telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

`

Tabel. 3.2

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Kesehatan

TC - 31

No.			Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2			3		4	6	9	3		4	6	9	
			Dinas Kesehatan				330.524.675.672	Dinas Kesehatan				330.524.675.672	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				330.524.675.672	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				330.524.675.672	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				330.524.675.672	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				330.524.675.672	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	185.347.483.502	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	185.347.483.502	
01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	247.752.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	247.752.000	
01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	168.324.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	168.324.000	
01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24 Dokumen	10.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24 Dokumen	10.000.000	

`

01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	24 Dokumen	25.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	24 Dokumen	25.000.000	
01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	44.428.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	44.428.000	
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase dokumen dan laporan adminitrasi keuangan yang tersusun	100 %	179.763.489.472	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase dokumen dan laporan adminitrasi keuangan yang tersusun	100 %	179.763.489.472	
01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15260 Orang/bulan	179.613.789.472		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15260 Orang/bulan	179.613.789.472	
01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	
01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	124.700.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	124.700.000	

					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Laporan BMD	100 %	25.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Laporan BMD	100 %	25.000.000	
01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000	
01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pembinaan Pegaawai	1 Dokumen	276.778.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pembinaan Pegaawai	1 Dokumen	276.778.000	
01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	20.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	20.000.000	
01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	256.778.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	256.778.000	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	2.369.487.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	2.369.487.000	
01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.944.808.400		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.944.808.400	

`

01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	26.078.600		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	26.078.600	
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	
01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	
01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.600.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.600.000	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.000.000	
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	1.531.217.190	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	1.531.217.190	
01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.285.682.100		Kabupaten Paser	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.285.682.100	
01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	230.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	230.000.000	
01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.535.090		Kabupaten Paser	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.535.090	

01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	912.378.020	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	912.378.020	
01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.200.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.200.000	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000	
01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	905.341.370		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	905.341.370	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	221.218.470	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	221.218.470	
01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	63.218.470		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	63.218.470	
01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	148.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	148.000.000	
01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	113.487.761.070	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	113.487.761.070	
02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	41.648.208.093	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	41.648.208.093	
02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya					Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	2.204.259.213		Kabupaten Paser	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	2.204.259.213	
02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan					Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	4 Unit	1.116.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	4 Unit	1.116.000.000	
02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas					Pengembangan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	11 Unit	12.980.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	11 Unit	12.980.000.000	
02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	5.700.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	5.700.000.000	
02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	371.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	371.000.000	
02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	11 Unit	1.664.761.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	11 Unit	1.664.761.000	
02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit	530.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit	530.000.000	
02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	290 Unit	9.225.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	290 Unit	9.225.000.000	
02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20 Unit	72.038.000		Kabupaten Paser	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20 Unit	72.038.000	
02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	7.725.149.880		Kabupaten Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	7.725.149.880	
02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga					
				Kabupaten Paser	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	18207 Keluarga	60.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	18207 Keluarga	60.000.000	

02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	70.709.552.977	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	70.709.552.977	
02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5477 Orang	467.104.000		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5477 Orang	467.104.000	
02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5285 Orang	55.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5285 Orang	55.000.000	
02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
				Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5285 Orang	1.254.840.106		Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5285 Orang	1.254.840.106	
02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
				Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25212 Orang	156.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25212 Orang	156.000.000	
02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33909 Orang	1.046.644.000		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33909 Orang	1.046.644.000	
02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	198653 Orang	262.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	198653 Orang	262.000.000	
02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18471 Orang	156.500.000		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18471 Orang	156.500.000	

`

02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85245 Orang	170.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85245 Orang	170.000.000	
02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6889 Orang	275.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6889 Orang	275.000.000	
02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	484 Orang	300.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	484 Orang	300.000.000	
02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1121 Orang	3.694.326.900		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1121 Orang	3.694.326.900	
02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12284 Orang	300.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12284 Orang	300.000.000	
02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	120.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	120.000.000	

`

02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19 Dokumen	325.230.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19 Dokumen	325.230.000	
02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	60.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	60.000.000	
02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	461.120.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	461.120.000	
02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	271.254.500		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	271.254.500	
02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	75.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	75.000.000	
02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	40.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	40.000.000	
02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	13137 Orang	40.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	13137 Orang	40.000.000	

`

02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	19.314.000		Kabupaten Paser	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	19.314.000	
02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1.523.664.800		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1.523.664.800	
02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	50.811.538.100		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	50.811.538.100	
02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	10 Unit	135.429.500		Kabupaten Paser	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	10 Unit	135.429.500	
02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	6.906.662.177		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	6.906.662.177	
02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					
				Kabupaten Paser	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	7 Unit	318.770.000		Kabupaten Paser	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	7 Unit	318.770.000	
02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	40.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	40.000.000	
02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	40.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	40.000.000	
02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	2 Unit	100.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	2 Unit	100.000.000	
02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang	200.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang	200.000.000	
02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40 Orang	100.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40 Orang	100.000.000	
02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	396.409.894		Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	396.409.894	
02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	378.467.000		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	378.467.000	
02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	209.278.000		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	209.278.000	
02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100 %	130.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100 %	130.000.000	
02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	130.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	130.000.000	
02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	100 %	1.000.000.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	100 %	1.000.000.000	
02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Unit	1.000.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Unit	1.000.000.000	
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	24.235.689.100	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	24.235.689.100	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	23.143.759.100	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	23.143.759.100	

`

03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	351 Orang	22.854.700.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	351 Orang	22.854.700.000	
03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	289.059.100		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	289.059.100	
03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK	85 %	1.091.930.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK	85 %	1.091.930.000	
03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	40 Orang	1.091.930.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	40 Orang	1.091.930.000	
04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase obat, alkes & makanan minuman di peredaran yg memenuhi syarat	100 %	80.000.000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase obat, alkes & makanan minuman di peredaran yg memenuhi syarat	100 %	80.000.000	
04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase pemberian izin untuk apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	100 %	35.000.000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase pemberian izin untuk apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	100 %	35.000.000	
04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,					

			Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	35.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	35.000.000	
04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Presentase sertifikat laik higienis sanitasi TPM yang diterbitkan	50 %	15.000.000	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Presentase sertifikat laik higienis sanitasi TPM yang diterbitkan	50 %	15.000.000	
04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	15.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	15.000.000	
04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Presentasi penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanandan sentra makanan jajanan	60 %	15.000.000	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Presentasi penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanandan sentra makanan jajanan	60 %	15.000.000	
04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	15.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	15.000.000	
04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Persentase hasil pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang ditindaklanjut	55 %	15.000.000	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Persentase hasil pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang ditindaklanjut	55 %	15.000.000	
04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Unit	15.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Unit	15.000.000	
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	7.373.742.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	7.373.742.000	
05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase kec yang mendapatkan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	60 %	352.000.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase kec yang mendapatkan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	60 %	352.000.000	
05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	352.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	352.000.000	
05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Keluarga yang mempraktikkan PHBS	35	300.000.000	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Keluarga yang mempraktikkan PHBS	35	300.000.000	

`

05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	300.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	300.000.000	
05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	6.721.742.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	6.721.742.000	
05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.721.742.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.721.742.000	
			RSUD Panglima Sebaya				140.615.139.861	RSUD Panglima Sebaya				140.615.139.861	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				140.615.139.861	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				140.615.139.861	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				140.615.139.861	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				140.615.139.861	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	115.851.070.174	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	115.851.070.174	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	672.416.916	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	672.416.916	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	600.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	600.000.000	
01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	72.416.916		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	72.416.916	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	115.178.653.258	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	115.178.653.258	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	115.178.653.258		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	115.178.653.258	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	9.495.689.687	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	9.495.689.687	
02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	9.495.689.687	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	9.495.689.687	
02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	2.500.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	2.500.000.000	
02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
				Kabupaten Paser	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	50 Unit	6.995.689.687		Kabupaten Paser	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	50 Unit	6.995.689.687	
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	15.268.380.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	15.268.380.000	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	15.268.380.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	15.268.380.000	

03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	374 Orang	15.268.380.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	374 Orang	15.268.380.000	
			UPTD Perbekalan Obat dan Alkes				1.272.776.500	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes				1.272.776.500	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.272.776.500	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.272.776.500	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.272.776.500	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.272.776.500	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	318.231.200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	318.231.200	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	154.192.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	154.192.900	
01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.241.500		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.241.500	
01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.448.010		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.448.010	
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	40.039.590		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	40.039.590	
01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	43.719.800		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	43.719.800	

`

01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	36.744.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	36.744.000	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	109.855.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	109.855.500	
01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.135.500		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.135.500	
01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	17.720.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	17.720.000	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	54.182.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	54.182.800	
01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	54.182.800		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	54.182.800	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	694.145.300	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	694.145.300	

`

02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	608.705.300	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	608.705.300	
02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya					Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	323.225.300		Kabupaten Paser	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	323.225.300	
02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Paket	285.480.000		Kabupaten Paser	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Paket	285.480.000	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan yang tersedia	100 %	85.440.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan yang tersedia	100 %	85.440.000	
02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	85.440.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	85.440.000	
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	260.400.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	260.400.000	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	226.800.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	226.800.000	
03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Orang	260.400.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Orang	260.400.000	
			UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah				1.947.899.997	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah				1.947.899.997	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.947.899.997	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.947.899.997	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.087.215.397	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.087.215.397	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	53.352.397	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	53.352.397	
01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.335.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.335.000	
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.942.400		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.942.400	
01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.925.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.925.000	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.149.997		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.149.997	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	223.725.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	223.725.000	
01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	210.525.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	210.525.000	
01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.200.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.200.000	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	10.138.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	10.138.000	
01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	10.138.000		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	10.138.000	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	800.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	800.000.000	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	800.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	800.000.000,00	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	436.384.600	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	436.384.600	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	436.384.600	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	436.384.600	

`

02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah					Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1200 Orang	18.240.000		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1200 Orang	18.240.000	
02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	402.144.600		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	402.144.600	
02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					
				Kabupaten Paser	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	16.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	16.000.000	
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	424.300.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	424.300.000	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	424.300.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	424.300.000	
03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	11 Orang	424.300.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	11 Orang	424.300.000	
			Rumah Sakit Umum Daerah Kerang				1.986.435.272	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang				1.986.435.272	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.986.435.272	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.986.435.272	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.403.886.343	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.403.886.343	

`

01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	195.673.603	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	195.673.603	
01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.250.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.250.000	
01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.052.240		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.052.240	
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	116.067.113		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	116.067.113	
01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.836.250		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.836.250	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	55.468.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	55.468.000	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	197.996.740	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	197.996.740	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	197.996.740		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	197.996.740	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	117.416.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	117.416.000	

`

01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	82.416.000		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	82.416.000	
01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	35.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	35.000.000	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	892.800.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	892.800.000	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	892.800.000		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	892.800.000	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	582.548.929	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	582.548.929	
02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	158.648.929	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	158.648.929	
02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	50.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	
02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	15 Unit	10.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	15 Unit	10.000.000	
02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	98.648.929		Kabupaten Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	98.648.929	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	423.900.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	423.900.000	
02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit					Operasional Pelayanan Rumah Sakit					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	423.900.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	423.900.000	
			UPTD Puskesmas Tanah grogot				4.531.244.287	UPTD Puskesmas Tanah grogot				4.531.244.287	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.531.244.287	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.531.244.287	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.531.244.287	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.531.244.287	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	2.813.447.237	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	2.813.447.237	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	266.149.250	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	266.149.250	
01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.879.200		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.879.200	

01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	102.743.150		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	102.743.150	
01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	38.330.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	38.330.000	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	110.196.900		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	110.196.900	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	136.788.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	136.788.000	
01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.800.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.800.000	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	134.988.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	134.988.000	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	43.194.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	43.194.700	
01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	18.039.700		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	18.039.700	
01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					

				Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	25.155.000		Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	25.155.000	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	0	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	0	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	##################		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	###############	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.320.047.050	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.320.047.050	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	1.320.047.050	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	1.320.047.050	
02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1165 Orang	23.105.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1165 Orang	23.105.000,00	
02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1126 Orang	11.350.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1126 Orang	11.350.000,00	
02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
				Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1068 Orang	6.100.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1068 Orang	6.100.000,00	
02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
				Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3977 Orang	7.100.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3977 Orang	7.100.000,00	
02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan	6447 Orang	111.492.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan	6447 Orang	111.492.000,00	

					Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26759 Orang	22.100.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26759 Orang	22.100.000,00	
02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2827 Orang	16.100.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2827 Orang	16.100.000,00	
02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11184 Orang	38.100.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11184 Orang	38.100.000,00	
02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	509 Orang	7.100.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	509 Orang	7.100.000,00	
02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	47 Orang	5.100.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	47 Orang	5.100.000,00	
02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	782 Orang	21.980.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	782 Orang	21.980.000,00	

`

02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1962 Orang	16.020.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1962 Orang	16.020.000,00	
02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0,00	
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	296.862.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	296.862.000,00	
02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	32.670.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	32.670.000,00	
02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	13.200.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	13.200.000,00	
02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	
02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	23.190.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	23.190.000,00	
02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	47 Orang	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	47 Orang	0,00	

`

02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	239.522.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	239.522.000,00	
02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	207.201.136,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	207.201.136,00	
02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	15.750.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	15.750.000,00	
02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	528.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	528.000,00	
02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	17.452.050,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	17.452.050,00	
02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93 Orang	3.300.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93 Orang	3.300.000,00	
02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan	5 Orang	3.960.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan	5 Orang	3.960.000,00	

					pelayanan kesehatan sesuai standar					pelayanan kesehatan sesuai standar			
02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	2.640.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	2.640.000,00	
02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	164.886.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	164.886.000,00	
02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	13.238.864,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	13.238.864,00	
02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	13238864	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	13238864	
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	393.900.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	393.900.000	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	393.900.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	393.900.000	
03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Orang	393.900.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Orang	393.900.000	
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	3.850.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	3.850.000	

`

05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	0	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	0	
05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	3.850.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	3.850.000	
			UPTD Puskesmas Senaken				2.928.614.592	UPTD Puskesmas Senaken				2.928.614.592	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.928.614.592	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.928.614.592	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.928.614.592	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.928.614.592	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.837.494.925	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.837.494.925	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	164.268.160	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	164.268.160	
01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.011.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.011.000	
01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.012.160		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.012.160	
01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.000.000	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	89.245.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	89.245.000	
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	5.649.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	5.649.000	
01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5.649.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5.649.000	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	71.585.280	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	71.585.280	
01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.140.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.140.000	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.445.280		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.445.280	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	268.448.880	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	268.448.880	
01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					

				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	7.800.000		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	7.800.000	
01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	21.300.000		Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	21.300.000	
01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	225.928.880		Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	225.928.880	
01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	13.420.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	13.420.000	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	1.327.543.605	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	1.327.543.605	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.327.543.605		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.327.543.605	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.009.771.667	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.009.771.667	
02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	11.600.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	11.600.000	
02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					

				Kabupaten Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	11.600.000		Kabupaten Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	11.600.000	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	971.106.075	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	971.106.075	
02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	485 Orang	19.920.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	485 Orang	19.920.000,00	
02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	463 Orang	29.220.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	463 Orang	29.220.000,00	
02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
				Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88 Orang	2.200.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88 Orang	2.200.000,00	
02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
				Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3508 Orang	42.240.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3508 Orang	42.240.000,00	
02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2902 Orang	56.392.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2902 Orang	56.392.000,00	
02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6000 Orang	15.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6000 Orang	15.000.000,00	
02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					

				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2294 Orang	5.500.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2294 Orang	5.500.000,00	
02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5971 Orang	5.500.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5971 Orang	5.500.000,00	
02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	306 Orang	1.966.667,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	306 Orang	1.966.667,00	
02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	24 Orang	1.650.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	24 Orang	1.650.000,00	
02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	412 Orang	11.270.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	412 Orang	11.270.000,00	
02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	7.812.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	7.812.000,00	
02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	299.061.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	299.061.000,00	
02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					

				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	16.640.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	16.640.000,00	
02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	
02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	31.824.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	31.824.000,00	
02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	153.492.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	153.492.000,00	
02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	179.021.408,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	179.021.408,00	
02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	660.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	660.000,00	
02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	6.125.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	6.125.000,00	
02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18 Orang	3.300.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18 Orang	3.300.000,00	

02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	660.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	660.000,00	
02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	4.752.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	4.752.000,00	
02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	76.900.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	76.900.000,00	
02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	27.065.592,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	27.065.592,00	
02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	27.065.592,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	27.065.592,00	
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	81.348.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	81.348.000	
05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	81348000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	81348000	
05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	81348000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	81348000	
			UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser				2.567.172.851	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser				2.567.172.851	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.567.172.851	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.567.172.851	

			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.567.172.851	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.567.172.851	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	931.343.851	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	931.343.851	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	247.493.480	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	247.493.480	
01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.415.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.415.000	
01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	57.136.200		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	57.136.200	
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.762.410		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.762.410	
01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.904.800		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.904.800	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	127.275.070		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	127.275.070	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	32.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	32.000.000	
01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	

01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	167.955.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	167.955.000	
01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	41.085.000		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	41.085.000	
01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.870.000		Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.870.000	
01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	120.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	120.000.000	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	483.895.371	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	483.895.371	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	483.895.371		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	483.895.371	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.235.572.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.235.572.000	

`

02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	5.040.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	5.040.000	
02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	5.040.000		Kabupaten Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	5.040.000	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	589.980.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	589.980.000	
02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	123 Orang	70.630.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	123 Orang	70.630.000,00	
02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	18.600.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	18.600.000,00	
02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
				Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
				Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	413 Orang	103.610.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	413 Orang	103.610.000,00	
02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan	1157 Orang	22.540.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan	1157 Orang	22.540.000,00	

					Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	63.830.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	63.830.000,00	
02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	125 Orang	29.020.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	125 Orang	29.020.000,00	
02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4 Orang	12.820.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4 Orang	12.820.000,00	
02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21 Orang	28.880.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21 Orang	28.880.000,00	

`

02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dokumen	155.106.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dokumen	155.106.000,00	
02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	17.194.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	17.194.000,00	
02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	57.168.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	57.168.000,00	
02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	213.792.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	213.792.000,00	
02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	236.148.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	236.148.000,00	
02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	5.280.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	5.280.000,00	
02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					

				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	500 Orang	90.050.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	500 Orang	90.050.000,00	
02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	75.864.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	75.864.000,00	
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	371.300.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	371.300.000	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	371.300.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	371.300.000	
03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	10 Orang	371.300.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	10 Orang	371.300.000	
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	28.957.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	28.957.000	

`

05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	28.957.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	28.957.000	
05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	28.957.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	28.957.000	
			UPTD Puskesmas Mendik				2.058.894.919	UPTD Puskesmas Mendik				2.058.894.919	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.058.894.919	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.058.894.919	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.058.894.919	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.058.894.919	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	825.909.281	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	825.909.281	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	76.445.636	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	76.445.636	
01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.260.400		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.260.400	
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.105.236		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.105.236	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74 Laporan	38.470.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74 Laporan	38.470.000	
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	118.250.001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	118.250.001	
01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	28.910.001		Kabupaten Paser	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	28.910.001	
01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	89.340.000		Kabupaten Paser	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	89.340.000	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	41.300.100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	41.300.100	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	41.300.100		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	41.300.100	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	41.303.814	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	41.303.814	
01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	28.353.814		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	28.353.814	
01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	12.950.000		Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	12.950.000	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	508.800.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	508.800.000	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit Kerja	536.219.730		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit Kerja	536.219.730	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.035.175.638	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.035.175.638	
02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	36.407.750	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	36.407.750	
02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	26.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	26.000.000	
02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 Unit	10.407.750		Kabupaten Paser	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 Unit	10.407.750	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	983.866.392	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	983.866.392	
02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	179 Orang	42.818.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	179 Orang	42.818.000,00	
02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					

				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130 Orang	40.640.888,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130 Orang	40.640.888,00	
02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
				Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang	10.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang	10.000.000,00	
02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
				Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	819 Orang	31.200.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	819 Orang	31.200.000,00	
02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1536 Orang	72.288.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1536 Orang	72.288.000,00	
02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1254 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1254 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1746 Orang	26.400.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1746 Orang	26.400.000,00	
02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan	100 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan	100 Orang	5.000.000,00	

					Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	174 Orang	17.672.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	174 Orang	17.672.000,00	
02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	179 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	179 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14 Dokumen	161.591.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14 Dokumen	161.591.000,00	
02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	4.752.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	4.752.000,00	
02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	21.958.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	21.958.000,00	
02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	136.238.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	136.238.000,00	
02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1200 Dokumen	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1200 Dokumen	0,00	
02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	408 Dokumen	247.824.504,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	408 Dokumen	247.824.504,00	
02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	792.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	792.000,00	
02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 Orang	4.224.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 Orang	4.224.000,00	
02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	30 Orang	50.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	30 Orang	50.000.000,00	
02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	13.416.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	13.416.000,00	
02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	77.052.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	77.052.000,00	

02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	14901496	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	14901496	
02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	14901496	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	14901496	
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	194.240.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	194.240.000	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	162.300.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	162.300.000	
03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	5 Orang	162.300.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	5 Orang	162.300.000	
03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK	85 %	31.940.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK	85 %	31.940.000	
03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	4 Orang	31.940.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	4 Orang	31.940.000	
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	3.570.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	3.570.000	

`

05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	0	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	0	
05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	3.570.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	3.570.000	
			UPTD Puskesmas Suliliran Baru				3.223.421.877	UPTD Puskesmas Suliliran Baru				3.223.421.877	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.223.421.877	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.223.421.877	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.223.843.988	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.223.843.988	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	110.830.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	110.830.000	
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.830.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.830.000	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50.400.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50.400.000	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.400.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.400.000	

`

01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	44.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	44.000.000	
01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	44.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	44.000.000	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	1.018.600.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	1.018.600.000	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	##################		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	###############	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.446.749.889	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.446.749.889	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	1.422.341.889	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	1.422.341.889	
02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	264 Orang	58.312.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	264 Orang	58.312.000,00	
02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
				Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239 Orang	10.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239 Orang	10.000.000,00	

02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
				Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	927 Orang	63.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	927 Orang	63.000.000,00	
02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang	69.712.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang	69.712.000,00	
02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2217 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2217 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	831 Orang	6.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	831 Orang	6.000.000,00	
02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5 Orang	5.000.000,00	

02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80 Orang	25.310.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80 Orang	25.310.000,00	
02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	412 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	412 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	262.452.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	262.452.000,00	
02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	
02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	26.748.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	26.748.000,00	
02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	
02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	19.513.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	19.513.000,00	
02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	217.334.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	217.334.000,00	
02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	449.304.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	449.304.000,00	
02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80 Orang	11.780.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80 Orang	11.780.000,00	
02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	412 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	412 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang	2.888.889,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang	2.888.889,00	
02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	86.688.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	86.688.000,00	
02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	78.300.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	78.300.000,00	
02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	24.408.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	24.408.000,00	
02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	24.408.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	24.408.000,00	

`

03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	544.200.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	544.200.000	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	544.200.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	544.200.000	
03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	14 Orang	544.200.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	14 Orang	544.200.000	
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	8.628.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	8.628.000	
05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	8.628.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	8.628.000,00	
05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	8.628.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	8.628.000,00	
			UPTD Puskesmas Suatang Baru				2.143.019.499	UPTD Puskesmas Suatang Baru				2.143.019.499	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.143.019.499	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.143.019.499	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.143.019.499	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.143.019.499	

`

01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	936.209.112	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	936.209.112	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	80.966.650	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	80.966.650	
01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.496.300		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.496.300	
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	38.187.550		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	38.187.550	
01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.612.800		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.612.800	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	19.670.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	19.670.000	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	63.877.456	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	63.877.456	
01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40 Laporan	456.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40 Laporan	456.000	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.024.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.024.000	

`

01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	30.397.456		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	30.397.456	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	240.932.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	240.932.700	
01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	30.682.700		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	30.682.700	
01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	10.750.000		Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	10.750.000	
01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	199.500.000		Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	199.500.000	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	492.900.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	492.900.000	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	0,00	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	819.010.387	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	819.010.387	
02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	3.840.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	3.840.000	

			Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	3.840.000		Kabupaten Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	3.840.000	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	800.566.830	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	800.566.830	
02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121 Orang	28.893.030,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121 Orang	28.893.030,00	
02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115 Orang	31.696.340,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115 Orang	31.696.340,00	
02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
				Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136 Orang	1.100.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136 Orang	1.100.000,00	
02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
				Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang	40.040.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang	40.040.000,00	
02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	633 Orang	36.925.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	633 Orang	36.925.000,00	

`

02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4789 Orang	9.900.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4789 Orang	9.900.000,00	
02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	612 Orang	7.817.700,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	612 Orang	7.817.700,00	
02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2393 Orang	15.862.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2393 Orang	15.862.000,00	
02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91 Orang	20.066.200,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91 Orang	20.066.200,00	
02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	17 Orang	2.200.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	17 Orang	2.200.000,00	
02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	129 Orang	11.528.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	129 Orang	11.528.000,00	
02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	175 Orang	906.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	175 Orang	906.000,00	
02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	121.731.500,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	121.731.500,00	
02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0,00	
02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	17.066.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	17.066.000,00	
02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	
02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	24.456.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	24.456.000,00	
02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	
02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	175.630.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	175.630.000,00	
02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					

				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	198.537.060,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	198.537.060,00	
02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	660.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	660.000,00	
02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	9.280.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	9.280.000,00	
02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	528.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	528.000,00	
02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	8.592.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	8.592.000,00	
02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	37.152.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	37.152.000,00	
02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	14.603.557,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	14.603.557,00	
02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	14.603.557,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	14.603.557,00	

`

03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	339.800.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	339.800.000	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	339.800.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	339.800.000	
03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	9 Orang	339.800.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	9 Orang	339.800.000	
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	48.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	48.000.000	
05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	0	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	0	
05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	48.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	48.000.000	
			UPTD Puskesmas Kerang				2.844.635.147	UPTD Puskesmas Kerang				2.844.635.147	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.844.635.147	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.844.635.147	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.844.635.147	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.844.635.147	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.245.791.147	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.245.791.147	

01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	79.430.734	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	79.430.734	
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.800.734		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.800.734	
01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	31.630.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	31.630.000	
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	73.340.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	73.340.000	
01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	73.340.000		Kabupaten Paser	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	73.340.000	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	104.015.982	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	104.015.982	
01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.140.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.140.000	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	58.514.166		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	58.514.166	
01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	44.361.816		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	44.361.816	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	924.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	924.000.000	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.285.544.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.285.544.000	
02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	29.515.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	29.515.000	
02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	29.515.000		Kabupaten Paser	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	29.515.000	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	1.193.450.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	1.193.450.000	
02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang	77.232.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang	77.232.000,00	
02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang	41.418.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang	41.418.000,00	

02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
				Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang	6.980.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang	6.980.000,00	
02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
				Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1555 Orang	19.800.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1555 Orang	19.800.000,00	
02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	898 Orang	63.728.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	898 Orang	63.728.000,00	
02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	20.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	20.000.000,00	
02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	949 Orang	15.840.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	949 Orang	15.840.000,00	
02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5058 Orang	20.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5058 Orang	20.000.000,00	
02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	230 Orang	14.180.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	230 Orang	14.180.000,00	

`

02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	28 Orang	16.020.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	28 Orang	16.020.000,00	
02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	294 Orang	14.850.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	294 Orang	14.850.000,00	
02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	20.118.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	20.118.000,00	
02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	243.654.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	243.654.000,00	
02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	14.652.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	14.652.000,00	
02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	39.408.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	39.408.000,00	
02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	168.354.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	168.354.000,00	
02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					

				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	202.438.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	202.438.000,00	
02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	134.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	134.000,00	
02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	6.470.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	6.470.000,00	
02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Orang	9.504.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Orang	9.504.000,00	
02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	44.810.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	44.810.000,00	
02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	133.860.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	133.860.000,00	
02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	0	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	0	
02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	62579000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	62579000	
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	313.300.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	313.300.000	

`

03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	313.300.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	313.300.000	
03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	9 Orang	313.300.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	9 Orang	313.300.000	
			UPTD Puskesmas Long Kali				3.031.324.623	UPTD Puskesmas Long Kali				3.031.324.623	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.031.324.623	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.031.324.623	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.031.324.623	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.031.324.623	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.188.654.023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.188.654.023	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	187.395.430	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	187.395.430	
01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	126.405.430		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	126.405.430	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	45.990.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	45.990.000	

01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	53.140.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	53.140.000	
01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	50.640.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	50.640.000	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	90.812.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	90.812.000	
01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	40.812.000		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	40.812.000	
01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000	
01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	857.306.593	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	857.306.593	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	857.306.593		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	857.306.593	

`

02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.628.498.600	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.628.498.600	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	1.596.319.056	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	1.596.319.056	
02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	215 Orang	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	215 Orang	0,00	
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28 Orang	82.560.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28 Orang	82.560.000,00	
02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	0,00	
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26 Orang	8.775.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26 Orang	8.775.000,00	
02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
				Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	186 Orang	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	186 Orang	0,00	
02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
				Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	142.734.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	142.734.000,00	
02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1300 Orang	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1300 Orang	0,00	
				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan	1826 Orang	83.520.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan	1826 Orang	83.520.000,00	

`

					Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3800 Orang	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3800 Orang	0,00	
02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	0,00	
02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	
02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang	0,00	
02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	18.072.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	18.072.000,00	
02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	10.800.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	10.800.000,00	
02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang	5 Orang	7.200.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang	5 Orang	7.200.000,00	

					Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	293.113.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	293.113.000,00	
02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	15.216.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	15.216.000,00	
02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	47.122.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	47.122.000,00	
02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	249.216.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	249.216.000,00	
02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	420.767.056,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	420.767.056,00	
02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan	3.600.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan	3.600.000,00	
02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang	3.600.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang	3.600.000,00	

02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	7 Orang	15.648.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	7 Orang	15.648.000,00	
02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	52.800.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	52.800.000,00	
02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	141.576.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	141.576.000,00	
02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	32.179.544,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	32.179.544,00	
02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	32.179.544,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	32.179.544,00	
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	201.500.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	201.500.000	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	201.500.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	201.500.000	
03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	6 Orang	201.500.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	6 Orang	201.500.000	
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	12.672.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	12.672.000	
05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	12.672.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	12.672.000	

			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6 Dokumen	12.672.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6 Dokumen	12.672.000	
			UPTD Puskesmas Pasir Belengkong				2.417.217.383	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong				2.417.217.383	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.417.217.383	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.417.217.383	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.417.217.383	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.417.217.383	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.039.021.716	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.039.021.716	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	250.538.892	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	250.538.892	
01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.893.200		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.893.200	
01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	84.032.937		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	84.032.937	
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	56.670.755		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	56.670.755	

`

01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.696.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.696.000	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.246.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.246.000	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	64.114.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	64.114.000	
01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	570.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	570.000	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.144.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.144.000	
01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.400.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.400.000	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	44.006.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	44.006.000	
01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	18.546.000		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	18.546.000	

`

01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	25.460.000		Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	25.460.000	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	612.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	612.000.000	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	612.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	612.000.000	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	961.620.467	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	961.620.467	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	933.227.667	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	933.227.667	
02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239 Orang	29.172.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239 Orang	29.172.000,00	
02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	17.970.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	17.970.000,00	
02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
				Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217 Orang	7.500.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217 Orang	7.500.000,00	
02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
				Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1100 Orang	11.666.667,00		Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1100 Orang	11.666.667,00	
02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2038 Orang	63.768.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2038 Orang	63.768.000,00	
02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	733 Orang	7.500.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	733 Orang	7.500.000,00	
02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	552 Orang	7.500.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	552 Orang	7.500.000,00	
02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1216 Orang	7.500.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1216 Orang	7.500.000,00	
02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145 Orang	7.500.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145 Orang	7.500.000,00	
02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	38 Orang	7.500.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	38 Orang	7.500.000,00	
02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	244 Orang	13.068.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	244 Orang	13.068.000,00	

`

02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	239 Orang	13.068.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	239 Orang	13.068.000,00	
02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	316 Dokumen	211.283.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	316 Dokumen	211.283.000,00	
02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18 Dokumen	10.710.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18 Dokumen	10.710.000,00	
02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	78 Dokumen	54.678.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	78 Dokumen	54.678.000,00	
02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	
02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	396 Dokumen	239.550.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	396 Dokumen	239.550.000,00	
02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	144.270.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	144.270.000,00	
02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan	1.788.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan	1.788.000,00	
02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	39 Orang	7.784.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	39 Orang	7.784.000,00	
02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	
02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	28 Dokumen	12.480.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	28 Dokumen	12.480.000,00	
02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	60 Dokumen	51.972.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	60 Dokumen	51.972.000,00	
02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	28.392.800,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	28.392.800,00	
02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	28.392.800,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	28.392.800,00	
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	408.800.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	408.800.000	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	408.800.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	408.800.000	

			Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					
03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	11 Orang	408.800.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	11 Orang	408.800.000	
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	7.775.200	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	7.775.200	
05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	0	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	0	
05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	7.775.200		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	7.775.200	
			UPTD Puskesmas Kayungo				2.045.951.214	UPTD Puskesmas Kayungo				2.045.951.214	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.045.951.214	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.045.951.214	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.045.951.214	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.045.951.214	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	828.976.734	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	828.976.734	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	214.500.830	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	214.500.830	
01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					

				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	48.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	48.000.000	
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	23.279.400		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	23.279.400	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	143.221.430		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	143.221.430	
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	12.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	12.000.000	
01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12.000.000	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	41.998.316	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	41.998.316	
01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	39.998.316		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	39.998.316	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	117.046.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	117.046.000	
01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	19.772.000		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	19.772.000	
01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	97.274.000		Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	97.274.000	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	443.431.588	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	443.431.588	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	443.431.588		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	443.431.588	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	926.774.480	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	926.774.480	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	902.495.480	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	902.495.480	
02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	125 Orang	43.863.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	125 Orang	43.863.000,00	
02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	119 Orang	20.790.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	119 Orang	20.790.000,00	
02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
				Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114 Orang	5.400.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114 Orang	5.400.000,00	
02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	904 Orang	107.934.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	904 Orang	107.934.000,00	
02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	775 Orang	64.602.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	775 Orang	64.602.000,00	
02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4454 Orang	10.399.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4454 Orang	10.399.000,00	
02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	591 Orang	5.976.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	591 Orang	5.976.000,00	
02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	409 Orang	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	409 Orang	0,00	
02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	113 Orang	6.370.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	113 Orang	6.370.000,00	
02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5 Orang	3.400.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5 Orang	3.400.000,00	

`

02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18 Orang	7.376.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18 Orang	7.376.000,00	
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	22 Orang	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	22 Orang	0,00	
02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	269 Orang	4.684.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	269 Orang	4.684.000,00	
02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	80.663.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	80.663.000,00	
02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	4.772.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	4.772.000,00	
02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	45.580.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	45.580.000,00	
02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	268.772.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	268.772.000,00	
02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	108.248.480,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	108.248.480,00	

`

02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1.080.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1.080.000,00	
02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	4.684.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	4.684.000,00	
02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	500 Orang	61.042.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	500 Orang	61.042.000,00	
02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	13.640.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	13.640.000,00	
02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	33.220.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	33.220.000,00	
02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	24.279.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	24.279.000,00	
02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	24.279.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	24.279.000,00	
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	290.200.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	290.200.000	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	290.200.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	290.200.000	

`

			UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					
03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	8 Orang	290.200.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	8 Orang	290.200.000	
			UPTD Puskesmas Sebakung Taka				1.913.223.267	UPTD Puskesmas Sebakung Taka				1.913.223.267	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.913.223.267	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.913.223.267	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.913.223.267	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.913.223.267	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	924.237.267	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	924.237.267	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	164.261.770	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	164.261.770	
01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.934.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.934.000	
01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.632.770		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.632.770	
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					

				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.795.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.795.000	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	99.900.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	99.900.000	
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	162.572.854	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	162.572.854	
01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	162.572.854		Kabupaten Paser	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	162.572.854	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	47.938.292	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	47.938.292	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.078.292		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.078.292	
01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	17.860.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	17.860.000	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	25.941.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	25.941.800	
01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	25.941.800		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	25.941.800	

01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	518.232.400	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	518.232.400	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	523.522.551		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	523.522.551	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	844.386.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	844.386.000	
02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	16.000.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	16.000.000	
02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	16.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	16.000.000	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	828.386.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	828.386.000	
02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88 Orang	77.040.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88 Orang	77.040.000,00	
02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	69 Orang	4.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	69 Orang	4.000.000,00	
02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84 Orang	4.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84 Orang	4.000.000,00	
02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
				Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	823 Orang	4.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	823 Orang	4.000.000,00	
02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1129 Orang	32.142.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1129 Orang	32.142.000,00	
02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3618 Orang	3.960.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3618 Orang	3.960.000,00	
02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	376 Orang	11.880.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	376 Orang	11.880.000,00	
02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3618 Orang	4.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3618 Orang	4.000.000,00	
02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55 Orang	4.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55 Orang	4.000.000,00	
02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	13 Orang	2.200.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	13 Orang	2.200.000,00	
02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19 Orang	15.400.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19 Orang	15.400.000,00	
02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	147 Orang	16.500.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	147 Orang	16.500.000,00	
02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	45 Dokumen	162.179.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	45 Dokumen	162.179.000,00	
02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	13.520.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	13.520.000,00	
02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35 Dokumen	33.255.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35 Dokumen	33.255.000,00	
02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	882 Dokumen	144.690.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	882 Dokumen	144.690.000,00	
02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	150 Dokumen	164.484.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	150 Dokumen	164.484.000,00	

02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	32 Laporan	7.920.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	32 Laporan	7.920.000,00	
02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	2.640.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	2.640.000,00	
02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	13.728.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	13.728.000,00	
02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	106.848.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	106.848.000,00	
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	137.100.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	137.100.000	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	137.100.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	137.100.000	
03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang	137.100.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang	137.100.000	
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	7.500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	7.500.000	

			MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	7.500.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	7.500.000	
05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	7.500.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	7.500.000	
			UPTD Puskesmas Muara Komam				3.547.526.110	UPTD Puskesmas Muara Komam				3.547.526.110	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.547.526.110	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.547.526.110	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.547.526.110	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.547.526.110	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.447.743.666	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.447.743.666	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	102.571.602	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	102.571.602	
01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.145.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.145.000	
01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	

`

01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.316.602		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.316.602	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	36.110.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	36.110.000	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	72.827.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	72.827.800	
01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	706.800		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	706.800	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	72.121.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	72.121.000	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	85.832.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	85.832.500	
01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	34.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	34.000.000	
01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.560.000		Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.560.000	
01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana					

`

			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	41.272.500		Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	41.272.500	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	1.139.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	1.139.000.000	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.139.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.139.000.000	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.729.748.444	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.729.748.444	
02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	21.420.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	21.420.000	
02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga					
				Kabupaten Paser	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	200 Keluarga	21.420.000		Kabupaten Paser	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	200 Keluarga	21.420.000	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	588.776.444	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	588.776.444	
02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	206 Orang	67.865.100		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	206 Orang	67.865.100	
02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	65.256.500		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	65.256.500	

`

02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
				Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	219 Orang	6.440.000		Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	219 Orang	6.440.000	
02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
				Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1189 Orang	38.634.000		Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1189 Orang	38.634.000	
02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2310 Orang	129.716.044		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2310 Orang	129.716.044	
02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9078 Orang	24.180.000		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9078 Orang	24.180.000	
02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	928 Orang	28.030.000		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	928 Orang	28.030.000	
02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	933 Orang	11.474.000		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	933 Orang	11.474.000	
02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	172 Orang	8.224.000		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	172 Orang	8.224.000	

`

02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	9.926.000		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	9.926.000	
02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7 Orang	20.368.000		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7 Orang	20.368.000	
02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	15.202.800		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	15.202.800	
02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	234.112.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	234.112.000	
02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12680000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12680000	
02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	10212000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	10212000	
02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	2600000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	2600000	
02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	94289000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	94289000	
02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	224.434.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	224.434.000	
02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	475.603.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	475.603.000	
02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	2160000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	2160000	
02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7 Orang	2.176.000		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7 Orang	2.176.000	
02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	4.224.000		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	4.224.000	
02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					

				Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	300 Orang	66.034.000		Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	300 Orang	66.034.000	
02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	40.320.000		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	40.320.000	
02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	100.848.000		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	100.848.000	
02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	13.320.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	13.320.000,00	
02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	13.320.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	13.320.000,00	
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	356.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	356.000.000	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	356.000.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	356.000.000	
03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Orang	356.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Orang	356.000.000	
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	14.034.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	14.034.000	
05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	14.034.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	14.034.000	

`

			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	14.034.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	14.034.000	
			UPTD Puskesmas Krayan				1.612.559.223	UPTD Puskesmas Krayan				1.612.559.223	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.612.559.223	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.612.559.223	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.612.559.223	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.612.559.223	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	817.993.023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	817.993.023	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	177.406.133	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	177.406.133	
01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.705.200		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.705.200	
01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.028.933		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.028.933	

`

01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.562.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.562.000	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.110.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.110.000	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	37.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	37.500.000	
01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	36.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	36.000.000	
01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	45.186.790	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	45.186.790	
01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	26.696.790		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	26.696.790	

`

01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.680.000		Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.680.000	
01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	12.810.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	12.810.000	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	557.900.100	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	557.900.100	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	557.900.100		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	557.900.100	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	645.976.200	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	645.976.200	
02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	73.399.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	73.399.000	
02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7 Unit	73.399.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7 Unit	73.399.000	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	530.620.200	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	530.620.200	
02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135 Orang	32.060.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135 Orang	32.060.000,00	
02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	129 Orang	18.350.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	129 Orang	18.350.000,00	
02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
				Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127 Orang	8.900.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127 Orang	8.900.000,00	
02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
				Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	585 Orang	25.440.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	585 Orang	25.440.000,00	
02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	936 Orang	10.062.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	936 Orang	10.062.000,00	
02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1114 Orang	3.300.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1114 Orang	3.300.000,00	
02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang	32.820.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang	32.820.000,00	
02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	504 Orang	7.260.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	504 Orang	7.260.000,00	

`

02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	148 Orang	7.260.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	148 Orang	7.260.000,00	
02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8 Orang	2.310.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8 Orang	2.310.000,00	
02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	10.684.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	10.684.000,00	
02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	2.640.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	2.640.000,00	
02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	139.058.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	139.058.000,00	
02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	16.621.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	16.621.000,00	
02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	56.110.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	56.110.000,00	

`

02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	4.006.200,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	4.006.200,00	
02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	9.048.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	9.048.000,00	
02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	72.656.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	72.656.000,00	
02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	52.123.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	52.123.000,00	
02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	720.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	720.000,00	
02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	0,00	
02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	6.270.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	6.270.000,00	
02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	2.050.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	2.050.000,00	
02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	10.872.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	10.872.000,00	
02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100 %	41.957.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100 %	41.957.000,00	
02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	41.957.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	41.957.000,00	
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	142.590.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	142.590.000	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	104.200.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	104.200.000	
03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	3 Orang	104.200.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	3 Orang	104.200.000	
03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK	85 %	38.390.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK	85 %	38.390.000	

03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	5 Orang	38.390.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	5 Orang	38.390.000	
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	6.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	6.000.000	
05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	0	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	0	
05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.000.000	
			UPTD Puskesmas Lolo				1.632.798.538	UPTD Puskesmas Lolo				1.632.798.538	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.632.798.538	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.632.798.538	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.632.798.538	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.632.798.538	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	603.797.224	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	603.797.224	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	80.253.550	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	80.253.550	
01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					Penyediaan Komponen Instalasi					

`

			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.353.700		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.353.700	
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.320.050		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.320.050	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	38.579.800		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	38.579.800	
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	25.667.404	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	25.667.404	
01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	25.667.404		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	25.667.404	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	55.027.330	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	55.027.330	
01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	680.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	680.000	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	54.347.330		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	54.347.330	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Barang Milik Daerah (BMD) yang Terpelihara	100 %	28.447.460	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Barang Milik Daerah (BMD) yang Terpelihara	100 %	28.447.460	
01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan					

`

			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3.987.460		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3.987.460	
01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	24.460.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	24.460.000,00	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	414.401.480	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	414.401.480	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	414.401.480		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	414.401.480	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	841.601.314	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	841.601.314	
02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	9.449.300	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	9.449.300	
02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	9.449.300		Kabupaten Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	9.449.300	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	697.809.014	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	697.809.014	
02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	168 Orang	28.184.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	168 Orang	28.184.000,00	
02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	159 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	159 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
				Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
				Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	818 Orang	55.968.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	818 Orang	55.968.000,00	
02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	727 Orang	45.224.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	727 Orang	45.224.000,00	
02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6170 Orang	7.588.444,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6170 Orang	7.588.444,00	
02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	826 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	826 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2694 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2694 Orang	5.000.000,00	

`

02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	122 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	122 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	14 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	14 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	127 Orang	15.824.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	127 Orang	15.824.000,00	
02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	209 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	209 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	76.114.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	76.114.000,00	
02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	6.384.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	6.384.000,00	
02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	14.496.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	14.496.000,00	

`

02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	112.992.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	112.992.000,00	
02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	269.806.570,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	269.806.570,00	
02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33 Orang	2.112.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33 Orang	2.112.000,00	
02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	3.168.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	3.168.000,00	
02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	24.948.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	24.948.000,00	
02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	134.343.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	134.343.000,00	
02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	134.343.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	134.343.000,00	
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	169.300.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	169.300.000	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	169.300.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	169.300.000	

`

03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	5 Orang	169.300.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	5 Orang	169.300.000	
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	18.100.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	18.100.000	
05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	0	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	0	
05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	18.100.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	18.100.000	
			UPTD Puskesmas Long Ikis				4.689.416.037	UPTD Puskesmas Long Ikis				4.689.416.037	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.689.416.037	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.689.416.037	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.689.416.037	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.689.416.037	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	2.531.056.037	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	2.531.056.037	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	79.405.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	79.405.600	
01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.725.300		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.725.300	
01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	
01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.180.300		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.180.300	
01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material					Penyediaan Bahan/Material					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.140.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.140.000	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	15.360.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	15.360.000	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	106.681.300	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	106.681.300	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	106.681.300		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	106.681.300	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	2.331.908.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	2.331.908.000	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.331.908.000		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.331.908.000	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.558.860.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.558.860.000	

`

			UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	1.375.459.200	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	1.375.459.200	
02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	654 Orang	44.640.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	654 Orang	44.640.000,00	
02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	654 Orang	24.480.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	654 Orang	24.480.000,00	
02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
				Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	443 Orang	6.228.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	443 Orang	6.228.000,00	
02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
				Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	686 Orang	147.312.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	686 Orang	147.312.000,00	
02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2438 Orang	62.040.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2438 Orang	62.040.000,00	
02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	
02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2276 Orang	23.760.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2276 Orang	23.760.000,00	
02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	
02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	
02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	32 Orang	23.760.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	32 Orang	23.760.000,00	
02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	531 Orang	19.668.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	531 Orang	19.668.000,00	
02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9 Orang	6.336.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9 Orang	6.336.000,00	
02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	254.024.200,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	254.024.200,00	
02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					

				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	27.192.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	27.192.000,00	
02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	50.556.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	50.556.000,00	
02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	186.360.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	186.360.000,00	
02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	361.271.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	361.271.000,00	
02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	102 Orang	7.920.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	102 Orang	7.920.000,00	
02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	5.280.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	5.280.000,00	
02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	40 Orang	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	40 Orang	0,00	
02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	5.880.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	5.880.000,00	
02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	118.752.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	118.752.000,00	
02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	183.400.800,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	183.400.800,00	
02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	183.400.800,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	183.400.800,00	
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	553.500.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	553.500.000	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	553.500.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	553.500.000	
03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang	553.500.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang	553.500.000	
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	46.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	46.000.000	
05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	0	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	0	
05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	46.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	46.000.000	
			UPTD Puskesmas Kuaro				3.467.648.175	UPTD Puskesmas Kuaro				3.467.648.175	

`

			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.467.648.175	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.467.648.175	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.467.648.175	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.467.648.175	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.595.984.175	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.595.984.175	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	132.160.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	132.160.000	
01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	45.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	45.000.000	
01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.000.000	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	73.160.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	73.160.000	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	67.547.612	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	67.547.612	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	67.547.612		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	67.547.612	

01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	50.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	50.000.000	
01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	50.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	50.000.000	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	1.308.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	1.308.000.000	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.308.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.308.000.000	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.572.324.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.572.324.000	
02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	98.870.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	98.870.000	
02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	80.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	80.000.000	
02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	36 Paket	18.870.000		Kabupaten Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	36 Paket	18.870.000	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	1.446.633.744	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	1.446.633.744	
02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	437 Orang	80.821.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	437 Orang	80.821.000,00	
02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	306 Orang	17.835.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	306 Orang	17.835.000,00	
02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
				Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	430 Orang	43.275.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	430 Orang	43.275.000,00	
02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	932 Orang	132.486.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	932 Orang	132.486.000,00	
02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10393 Orang	11.040.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10393 Orang	11.040.000,00	
02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2020 Orang	17.930.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2020 Orang	17.930.000,00	

`

02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2522 Orang	4.840.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2522 Orang	4.840.000,00	
02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1030 Orang	4.840.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1030 Orang	4.840.000,00	
02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	12.920.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	12.920.000,00	
02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	376 Orang	7.900.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	376 Orang	7.900.000,00	
02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	516 Orang	3.960.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	516 Orang	3.960.000,00	
02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	421.848.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	421.848.000,00	
02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	7.710.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	7.710.000,00	

02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7.650.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7.650.000,00	
02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	220.040.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	220.040.000,00	
02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	329.417.744,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	329.417.744,00	
02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	1.320.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	1.320.000,00	
02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 Orang	3.300.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 Orang	3.300.000,00	
02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17 Orang	12.920.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17 Orang	12.920.000,00	
02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	17.640.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	17.640.000,00	

`

02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	86.941.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	86.941.000,00	
02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	26.820.256,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	26.820.256,00	
02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	26.820.256,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	26.820.256,00	
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	290.100.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	290.100.000	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	290.100.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	290.100.000	
03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	8 Orang	290.100.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	8 Orang	290.100.000	
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	9.240.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	9.240.000	
05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	0	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	0	
05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	9.240.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	9.240.000	
			UPTD Puskesmas Padang Pengrapat				2.196.021.880	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat				2.196.021.880	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.196.021.880	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.196.021.880	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	998.515.047	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	998.515.047	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	113.004.970	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	113.004.970	
01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.897.500		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.897.500	
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.321.980		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.321.980	
01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	12.897.490		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	12.897.490	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	63.888.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	63.888.000	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	36.116.300	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	36.116.300	
01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.916.300		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.916.300	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	176.848.493	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	176.848.493	
01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	27.208.000		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	27.208.000	
01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	22.935.000		Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	22.935.000	
01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	126.705.493		Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	126.705.493	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	672.545.284	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	672.545.284	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	672.545.284		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	672.545.284	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	907.306.833	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	907.306.833	

`

02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	8.160.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	8.160.000	
02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	8.160.000		Kabupaten Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	8.160.000	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	884.983.401	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	884.983.401	
02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	141 Orang	43.960.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	141 Orang	43.960.000,00	
02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	148 Orang	21.902.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	148 Orang	21.902.000,00	
02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
				Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
				Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1067 Orang	46.956.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1067 Orang	46.956.000,00	
02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan	916 Orang	66.416.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan	916 Orang	66.416.000,00	

					Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2465 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2465 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	698 Orang	6.691.333,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	698 Orang	6.691.333,00	
02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	16.484.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	16.484.000,00	
02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	140 Orang	11.564.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	140 Orang	11.564.000,00	

`

02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	35 Orang	5.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	35 Orang	5.000.000,00	
02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	161.447.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	161.447.000,00	
02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	26.444.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	26.444.000,00	
02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	23.246.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	23.246.000,00	
02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	164.256.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	164.256.000,00	
02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	174.423.568,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	174.423.568,00	
02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	15.100.500,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	15.100.500,00	
02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77 Orang	11.608.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77 Orang	11.608.000,00	
02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	23.780.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	23.780.000,00	
02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	45.705.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	45.705.000,00	
02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	14.163.432,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	14.163.432,00	
02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	14.163.432,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	14.163.432,00	
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	290.200.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	290.200.000	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	290.200.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	290.200.000	
03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	11 Orang	290.200.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	11 Orang	290.200.000	
			UPTD Puskesmas Tanjung Aru				2.561.916.666	UPTD Puskesmas Tanjung Aru				2.561.916.666	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.561.916.666	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.561.916.666	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.561.916.666	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.561.916.666	

`

01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	767.132.483	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	767.132.483	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	148.016.956	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	148.016.956	
01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	
01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	
01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.720.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.720.000	
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.969.456		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.969.456	
01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.067.500		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.067.500	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	42.260.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	42.260.000	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15.678.040	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15.678.040	
01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					

				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	14.478.040		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	14.478.040	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	35.511.806	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	35.511.806	
01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	26.095.806		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	26.095.806	
01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	9.416.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	9.416.000,00	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	567.925.681	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	567.925.681	
01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	567.925.681		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	567.925.681	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.207.769.183	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.207.769.183	
02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	135.607.600	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	135.607.600	
02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat					

			Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	101.032.600		Kabupaten Paser	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	101.032.600	
02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	34.575.000		Kabupaten Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	34.575.000	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	980.600.800	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	980.600.800	
02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136 Orang	26.300.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136 Orang	26.300.000,00	
02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130 Orang	23.202.550,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130 Orang	23.202.550,00	
02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
				Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130 Orang	9.504.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130 Orang	9.504.000,00	
02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
				Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	460 Orang	33.560.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	460 Orang	33.560.000,00	
02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1416 Orang	46.464.900,00		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1416 Orang	46.464.900,00	
02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5640 Orang	21.649.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5640 Orang	21.649.000,00	
02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	442 Orang	21.649.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	442 Orang	21.649.000,00	
02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2557 Orang	5.281.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2557 Orang	5.281.000,00	
02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	370 Orang	5.281.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	370 Orang	5.281.000,00	
02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	15 Orang	7.061.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	15 Orang	7.061.000,00	
02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	115 Orang	25.106.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	115 Orang	25.106.000,00	

`

02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang	7.061.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang	7.061.000,00	
02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	162.008.600,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	162.008.600,00	
02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	46.843.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	46.843.000,00	
02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	29.554.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	29.554.000,00	
02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	107.372.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	107.372.000,00	
02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	291.577.750,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	291.577.750,00	
02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	12.400.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	12.400.000,00	
02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Orang	940.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Orang	940.000,00	
02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	19.492.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	19.492.000,00	
02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	78.294.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	78.294.000,00	
02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	91.560.783,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	91.560.783,00	
02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	91.560.783,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	91.560.783,00	
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	581.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	581.000.000	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	581.000.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	581.000.000	
03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	16 Orang	581.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	16 Orang	581.000.000	
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	6.015.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	6.015.000	
05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	6.015.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	6.015.000	

05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.015.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.015.000	
			UPTD Puskesmas Batukajang				2.965.527.063	UPTD Puskesmas Batukajang				2.965.527.063	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.965.527.063	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.965.527.063	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.965.527.063	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.965.527.063	
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.461.726.063	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.461.726.063	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	145.817.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	145.817.000	
01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.600.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.600.000	
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	56.927.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	56.927.000	
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121 Laporan	85.290.000		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121 Laporan	85.290.000	
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	29.250.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	29.250.000	

`

01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					
				Kabupaten Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	29.250.000		Kabupaten Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	29.250.000	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	30.936.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	30.936.000	
01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	592.800		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	592.800	
01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.343.200		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.343.200	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	48.995.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	48.995.000	
01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	21.845.000		Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	21.845.000	
01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	7.150.000		Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	7.150.000	
01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	20.000.000		Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	20.000.000	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	1.120.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	1.120.000.000	

`

01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
				Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	##################		Kabupaten Paser	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	###############	
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.147.901.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	1.147.901.000	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	1.119.581.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	1.119.581.000	
02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	509 Orang	43.336.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	509 Orang	43.336.000,00	
02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
				Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	486 Orang	8.250.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	486 Orang	8.250.000,00	
02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
				Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	442 Orang	8.250.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	442 Orang	8.250.000,00	
02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
				Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3074 Orang	24.900.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3074 Orang	24.900.000,00	
02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5088 Orang	39.204.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5088 Orang	39.204.000,00	
02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					

`

				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17361 Orang	15.840.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17361 Orang	15.840.000,00	
02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815 Orang	33.110.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815 Orang	33.110.000,00	
02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7256 Orang	5.280.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7256 Orang	5.280.000,00	
02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	329 Orang	19.750.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	329 Orang	19.750.000,00	
02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	38 Orang	4.720.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	38 Orang	4.720.000,00	
02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	453 Orang	19.060.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	453 Orang	19.060.000,00	
02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
				Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	641 Orang	4.560.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	641 Orang	4.560.000,00	

`

02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	292.453.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	292.453.000,00	
02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	19.500.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	19.500.000,00	
02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	6.000.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	6.000.000,00	
02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	19.332.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	19.332.000,00	
02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					
				Kabupaten Paser	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	34 Orang	0,00		Kabupaten Paser	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	34 Orang	0,00	
02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	124.488.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	124.488.000,00	
02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	150 Dokumen	263.008.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	150 Dokumen	263.008.000,00	

`

02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	3.432.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	3.432.000,00	
02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	104 Orang	7.218.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	104 Orang	7.218.000,00	
02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	1.440.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	1.440.000,00	
02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					
				Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	200 Orang	41.070.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	200 Orang	41.070.000,00	
02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	14.400.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	14.400.000,00	
02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					
				Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	100.980.000,00		Kabupaten Paser	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	100.980.000,00	
02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	28.320.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	28.320.000,00	
02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	28.320.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	28.320.000,00	

`

03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	331.400.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	331.400.000	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	331.400.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	331.400.000	
03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					
				Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	9 Orang	331.400.000		Kabupaten Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	9 Orang	331.400.000	
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	24.500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	24.500.000	
05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	24.500.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	24.500.000	
05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
				Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	24.500.000		Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	24.500.000	

`

`

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2		2			3	4	5	6	8	9	10
						Dinas Kesehatan				336.065.946.830	330.524.675.672	Dinas Kesehatan
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				336.065.946.830	330.524.675.672	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				336.065.946.830	330.524.675.672	
297	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	179.943.406.837	185.347.483.502	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	247.752.000	247.752.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	168.324.000	168.324.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	10.000.000	10.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	25.000.000	25.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	44.428.000	44.428.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase dokumen dan laporan adminitrasi keuangan yang tersusun	100 %	100 %	174.359.576.157	179.763.489.472	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1090 Orang/bulan	15260 Orang/bulan	174.209.876.157	179.613.789.472	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	124.700.000	124.700.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan BMD	100 %	100 %	25.000.000	25.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	25.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pembinaan Pegaawai	1 Dokumen	1 Dokumen	276.778.000	276.778.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	256.778.000	256.778.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	2.369.487.000	2.369.487.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.944.808.400	1.944.808.400	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	26.078.600	26.078.600	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000	100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.000.000	35.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000	3.600.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	250.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	100 %	1.531.217.190	1.531.217.190	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	1.285.682.100	1.285.682.100	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	230.000.000	230.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	15.535.090	15.535.090	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	912.378.020	912.378.020	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.200.000	2.200.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	905.178.020	905.341.370	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	100 %	221.218.470	221.218.470	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	63.218.470	63.218.470	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	80 Unit	148.000.000	148.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	10.000.000	10.000.000	DINAS KESEHATAN
306	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	120.734.461.993	113.487.761.070	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	100 %	38.350.776.393	41.648.208.093	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-	2 Unit	2.204.259.213	2.204.259.213	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						

							Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	4 Unit	4 Unit	1.116.000.000	1.116.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas						
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	11 Unit	0	12.980.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	5.000.000.000	5.700.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit	371.000.000	371.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Unit	11 Unit	1.664.761.000	1.664.761.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit	3 Unit	530.000.000	530.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	290 Unit	19.705.000.000	9.225.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	20 Unit	25.000.000	72.038.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						

							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	2 Paket	7.674.756.180	7.725.149.880	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	18207 Keluarga	18207 Keluarga	60.000.000	60.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	82.203.685.600	70.709.552.977	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5477 Orang	5477 Orang	467.104.000	467.104.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5285 Orang	5285 Orang	55.000.000	55.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5285 Orang	5285 Orang	96.100.000	1.254.840.106	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25212 Orang	25212 Orang	156.000.000	156.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33909 Orang	33909 Orang	1.046.644.000	1.046.644.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	198653 Orang	198653 Orang	262.000.000	262.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18471 Orang	18471 Orang	156.500.000	156.500.000	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85245 Orang	85245 Orang	170.000.000	170.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6889 Orang	6889 Orang	275.000.000	275.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	484 Orang	484 Orang	300.000.000	300.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1121 Orang	1121 Orang	3.435.000.000	3.694.326.900	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12284 Orang	12284 Orang	300.000.000	300.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000	120.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19 Dokumen	19 Dokumen	275.000.000	325.230.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	60.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000	461.120.000	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	271.254.500	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	40.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	13137 Orang	13137 Orang	40.000.000	40.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	50 Orang	0	19.314.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	355.000.000	1.523.664.800	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	1 Dokumen	51.761.538.100	50.811.538.100	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	10 Unit	10 Unit	135.429.500	135.429.500	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	21.235.403.000	6.906.662.177	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	6 Unit	7 Unit	140.000.000	318.770.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	40.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	40.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	2 Unit	2 Unit	100.000.000	100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang	600 Orang	200.000.000	200.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40 Orang	40 Orang	100.000.000	100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	100 Orang	100.000.000	396.409.894	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota						
							Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	426.967.000	378.467.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0	209.278.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100 %	100 %	130.000.000	130.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	130.000.000	130.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	100 %	100 %	50.000.000	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Unit	2 Unit	50.000.000	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
307	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	22.968.078.000	24.235.689.100	
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	22.894.700.000	23.143.759.100	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	351 Orang	351 Orang	22.854.700.000	22.854.700.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	289.059.100	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK	85 %	85 %	73.378.000	1.091.930.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						

							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	40 Orang	40 Orang	73.378.000	1.091.930.000	DINAS KESEHATAN
308	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase obat, alkes & makanan minuman di peredaran yg memenuhi syarat	100 %	100 %	80.000.000	80.000.000	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian izin untuk apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	100 %	100 %	35.000.000	35.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	35.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Presentase sertifikat laik higienis sanitasi TPM yang diterbitkan	50 %	50 %	15.000.000	15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Presentasi penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanandan sentra makanan jajanan	60 %	60 %	15.000.000	15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						

							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase hasil pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang ditindaklanjut	55 %	55 %	15.000.000	15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Unit	1 Unit	15.000.000	15.000.000	DINAS KESEHATAN
309	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	90 %	12.340.000.000	7.373.742.000	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kec yang mendapatkan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	60 %	60 %	50.000.000	352.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	352.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang mempraktikkan PHBS	35	35	300.000.000	300.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	300.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	58 %	11.990.000.000	6.721.742.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya						

						Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	11.990.000.000	6.721.742.000	DINAS KESEHATAN
						RSUD Panglima Sebaya				126.859.110.899	140.615.139.861	RSUD Panglima Sebaya
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				126.859.110.899	140.615.139.861	RSUD Panglima Sebaya
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				126.859.110.899	140.615.139.861	RSUD Panglima Sebaya
310	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	102.095.041.212	115.851.070.174	RSUD Panglima Sebaya
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	672.416.916	672.416.916	RSUD Panglima Sebaya
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						RSUD Panglima Sebaya
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	600.000.000	600.000.000	RSUD Panglima Sebaya
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						RSUD Panglima Sebaya
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	72.416.916	72.416.916	RSUD Panglima Sebaya
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	101.422.624.296	115.178.653.258	RSUD Panglima Sebaya
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						RSUD Panglima Sebaya
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	101.422.624.296	115.178.653.258	RSUD Panglima Sebaya
313	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	9.495.689.687	9.495.689.687	RSUD Panglima Sebaya
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	100 %	9.495.689.687	9.495.689.687	RSUD Panglima Sebaya
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						RSUD Panglima Sebaya
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-	1 Unit	0	2.500.000.000	RSUD Panglima Sebaya

	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						RSUD Panglima Sebaya
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 Unit	50 Unit	9.495.689.687	6.995.689.687	RSUD Panglima Sebaya
314	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	15.268.380.000	15.268.380.000	RSUD Panglima Sebaya
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	15.268.380.000	15.268.380.000	RSUD Panglima Sebaya
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						RSUD Panglima Sebaya
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	374 Orang	374 Orang	15.268.380.000	15.268.380.000	RSUD Panglima Sebaya
						UPTD Perbekalan Obat dan Alkes				1.143.937.000	1.272.776.500	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.143.937.000	1.272.776.500	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.143.937.000	1.272.776.500	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
315	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	307.771.700	318.231.200	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	147.468.900	154.192.900	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	31.241.500	31.241.500	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.448.010	2.448.010	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	40.039.590	40.039.590	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes

	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	43.719.800	43.719.800	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	7 Laporan	30.020.000	36.744.000	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	106.120.000	109.855.500	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	86.400.000	90.135.500	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	17.720.000	17.720.000	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	100 %	54.182.800	54.182.800	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	54.182.800	54.182.800	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
322	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	609.365.300	694.145.300	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	100 %	523.925.300	608.705.300	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						UPTD Perbekalan Obat dan Alkes

							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-	1 Unit	287.225.300	323.225.300	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Paket	2 Paket	236.700.000	285.480.000	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan yang tersedia	100 %	100 %	85.440.000	85.440.000	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	85.440.000	85.440.000	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
323	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	226.800.000	260.400.000	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	226.800.000	226.800.000	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Orang	7 Orang	226.800.000	260.400.000	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
						UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah				1.919.099.997	1.947.899.997	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.919.099.997	1.947.899.997	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
324	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	1.087.215.397	1.087.215.397	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	53.352.397	53.352.397	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.335.000	1.335.000	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.942.400	22.942.400	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.925.000	3.925.000	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	25.149.997	25.149.997	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	223.725.000	223.725.000	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1.000.000	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	210.525.000	210.525.000	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12.200.000	12.200.000	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	100 %	10.138.000	10.138.000	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	10.138.000	10.138.000	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	800.000.000	800.000.000	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	800.000.000,00	800.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
338	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	436.384.600	436.384.600	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	436.384.600	436.384.600	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah						UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1200 Orang	1200 Orang	18.240.000	18.240.000	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	402.144.600	402.144.600	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	16.000.000	16.000.000	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
339	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	395.500.000	424.300.000	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	395.500.000	424.300.000	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	11 Orang	11 Orang	395.500.000	424.300.000	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
						Rumah Sakit Umum Daerah Kerang				1.936.435.272	1.986.435.272	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.936.435.272	1.986.435.272	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
340	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	511.086.343	1.403.886.343	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	195.673.603	195.673.603	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang

	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.250.000	5.250.000	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.052.240	14.052.240	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	116.067.113	116.067.113	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.836.250	4.836.250	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	55.468.000	55.468.000	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	197.996.740	197.996.740	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	197.996.740	197.996.740	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	100 %	117.416.000	117.416.000	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	82.416.000	82.416.000	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit	35.000.000	35.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang

	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	0	892.800.000	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	0 Unit Kerja	0	892.800.000	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
354	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	1.425.348.929	582.548.929	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	100 %	158.648.929	158.648.929	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	50.000.000	50.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	15 Unit	15 Unit	10.000.000	10.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	98.648.929	98.648.929	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	1.266.700.000	423.900.000	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	1.266.700.000	423.900.000	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang
						UPTD Puskesmas Tanah grogot				2.934.900.000	4.531.244.287	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.934.900.000	4.531.244.287	UPTD Puskesmas Tanah grogot

	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.934.900.000	4.531.244.287	UPTD Puskesmas Tanah grogot
355	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	2.306.131.950	2.813.447.237	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	266.149.250	266.149.250	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.879.200	14.879.200	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	102.743.150	102.743.150	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	38.330.000	38.330.000	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	110.196.900	110.196.900	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	136.788.000	136.788.000	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.800.000	1.800.000	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	134.988.000	134.988.000	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	100 %	43.194.700	43.194.700	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						UPTD Puskesmas Tanah grogot

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	18.039.700	18.039.700	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	25.155.000	25.155.000	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	1.860.000.000	0	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.860.000.000,00	2.367.315.287,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
366	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	234.868.050	1.320.047.050	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	234.868.050	1.320.047.050	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1165 Orang	1165 Orang	1.100.000,00	23.105.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1126 Orang	1126 Orang	1.100.000,00	11.350.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1068 Orang	1068 Orang	6.100.000,00	6.100.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3977 Orang	3977 Orang	7.100.000,00	7.100.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6447 Orang	6447 Orang	11.100.000,00	111.492.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot

	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26759 Orang	26759 Orang	22.100.000,00	22.100.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2827 Orang	2827 Orang	16.100.000,00	16.100.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11184 Orang	11184 Orang	38.100.000,00	38.100.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	509 Orang	509 Orang	7.100.000,00	7.100.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	47 Orang	47 Orang	5.100.000,00	5.100.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	782 Orang	782 Orang	10.100.000,00	21.980.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1962 Orang	1962 Orang	8.100.000,00	16.020.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen	0,00	296.862.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					UPTD Puskesmas Tanah grogot

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	32.670.000,00	32.670.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0,00	13.200.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	23.190.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	47 Orang	47 Orang	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	0,00	239.522.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	51.546.000,00	207.201.136,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen	0,00	15.750.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	528.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						UPTD Puskesmas Tanah grogot

							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	17.452.050,00	17.452.050,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	93 Orang	0,00	3.300.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	5 Orang	0,00	3.960.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	2.640.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	164.886.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
												UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	13.238.864,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	13238864	UPTD Puskesmas Tanah grogot
367	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	393.900.000	393.900.000	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	393.900.000	393.900.000	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Orang	12 Orang	393.900.000	393.900.000	UPTD Puskesmas Tanah grogot
368	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	90 %	0	3.850.000	UPTD Puskesmas Tanah grogot

	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	58 %	0	0	UPTD Puskesmas Tanah grogot
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						UPTD Puskesmas Tanah grogot
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0	3.850.000	UPTD Puskesmas Tanah grogot
						UPTD Puskesmas Senaken				2.003.722.987	2.928.614.592	UPTD Puskesmas Senaken
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.003.722.987	2.928.614.592	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.003.722.987	2.928.614.592	UPTD Puskesmas Senaken
369	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	1.829.951.320	1.837.494.925	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	164.268.160	164.268.160	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.011.000	12.011.000	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.000.000	4.000.000	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.012.160	40.012.160	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.000.000	19.000.000	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	89.245.000	89.245.000	UPTD Puskesmas Senaken

	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	100 %	5.649.000	5.649.000	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5.649.000	5.649.000	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	71.585.280	71.585.280	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.140.000	1.140.000	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	70.445.280	70.445.280	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	100 %	268.448.880	268.448.880	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	7.800.000	7.800.000	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	21.300.000	21.300.000	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	225.928.880	225.928.880	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit	13.420.000	13.420.000	UPTD Puskesmas Senaken

	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	1.320.000.000	1.327.543.605	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.320.000.000	1.327.543.605	UPTD Puskesmas Senaken
378	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	173.771.667	1.009.771.667	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	100 %	11.600.000	11.600.000	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	11.600.000	11.600.000	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	162.171.667	971.106.075	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	485 Orang	485 Orang	1.440.000,00	19.920.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	463 Orang	463 Orang	14.500.000,00	29.220.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88 Orang	88 Orang	2.200.000,00	2.200.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3508 Orang	3508 Orang	42.240.000,00	42.240.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						UPTD Puskesmas Senaken

							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2902 Orang	2902 Orang	7.560.000,00	56.392.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	6000 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2294 Orang	2294 Orang	5.500.000,00	5.500.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5971 Orang	5971 Orang	5.500.000,00	5.500.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	306 Orang	306 Orang	1.966.667,00	1.966.667,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	24 Orang	24 Orang	1.650.000,00	1.650.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	412 Orang	412 Orang	3.350.000,00	11.270.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	25 Orang	1.940.000,00	7.812.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	1.520.000,00	299.061.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						UPTD Puskesmas Senaken

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0,00	16.640.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	31.824.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	0,00	153.492.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	50.360.000,00	179.021.408,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	660.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	12 Dokumen	6.125.000,00	6.125.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18 Orang	18 Orang	660.000,00	3.300.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	4 Orang	660.000,00	660.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						UPTD Puskesmas Senaken

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	4.752.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						UPTD Puskesmas Senaken
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	76.900.000,00	UPTD Puskesmas Senaken
												UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	27.065.592,00	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	27.065.592,00	UPTD Puskesmas Senaken
379	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	90 %	0	81.348.000	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	58 %	0,00	81348000	UPTD Puskesmas Senaken
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	81348000	UPTD Puskesmas Senaken
						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser				1.879.768.480	2.567.172.851	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.879.768.480	2.567.172.851	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.879.768.480	2.567.172.851	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
380	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	913.448.480	931.343.851	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	247.493.480	247.493.480	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.415.000	3.415.000	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	57.136.200	57.136.200	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser

	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	52.762.410	52.762.410	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.904.800	6.904.800	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	127.275.070	127.275.070	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	32.000.000	32.000.000	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	30.000.000	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	100 %	167.955.000	167.955.000	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	41.085.000	41.085.000	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	6.870.000	6.870.000	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	120.000.000	120.000.000	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser

	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	466.000.000	483.895.371	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	466.000.000	483.895.371	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
397	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	595.020.000	1.235.572.000	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	100 %	5.040.000	5.040.000	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	5.040.000	5.040.000	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	589.980.000	589.980.000	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	123 Orang	123 Orang	70.630.000,00	70.630.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	60 Orang	18.600.000,00	18.600.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	50 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	413 Orang	413 Orang	103.610.000,00	103.610.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser

							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1157 Orang	1157 Orang	22.540.000,00	22.540.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	500 Orang	63.830.000,00	63.830.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	125 Orang	125 Orang	29.020.000,00	29.020.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	2000 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	150 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4 Orang	4 Orang	12.820.000,00	12.820.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21 Orang	21 Orang	28.880.000,00	28.880.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2 Orang	2 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	10 Dokumen	0,00	155.106.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0,00	17.194.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	57.168.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	10 Dokumen	0,00	213.792.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	236.148.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	5.280.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	2 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	500 Orang	500 Orang	90.050.000,00	90.050.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	75.864.000,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser

												UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
												UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
398	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	371.300.000	371.300.000	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	371.300.000	371.300.000	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	10 Orang	10 Orang	371.300.000	371.300.000	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
399	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	90 %	0	28.957.000	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	58 %	0	28.957.000	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0	28.957.000	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
						UPTD Puskesmas Mendik				1.365.064.189	2.058.894.919	UPTD Puskesmas Mendik
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.365.064.189	2.058.894.919	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.365.064.189	2.058.894.919	UPTD Puskesmas Mendik
400	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	786.099.551	825.909.281	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	76.445.636	76.445.636	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						UPTD Puskesmas Mendik

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.260.400	3.260.400	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	47.105.236	47.105.236	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74 Laporan	74 Laporan	26.080.000	38.470.000	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	100 %	118.250.001	118.250.001	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	28.910.001	28.910.001	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	89.340.000	89.340.000	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	41.300.100	41.300.100	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	41.300.100	41.300.100	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	100 %	41.303.814	41.303.814	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	28.353.814	28.353.814	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	27 Unit	12.950.000	12.950.000	UPTD Puskesmas Mendik

	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	508.800.000	508.800.000	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	508.800.000	536.219.730	UPTD Puskesmas Mendik
401	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	384.724.638	1.035.175.638	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	100 %	36.407.750	36.407.750	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	2 Unit	26.000.000	26.000.000	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	10.407.750	10.407.750	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	348.316.888	983.866.392	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	179 Orang	179 Orang	20.000.000,00	42.818.000,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130 Orang	130 Orang	11.288.888,00	40.640.888,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang	165 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	819 Orang	819 Orang	31.200.000,00	31.200.000,00	UPTD Puskesmas Mendik

	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1536 Orang	1536 Orang	10.000.000,00	72.288.000,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1254 Orang	1254 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1746 Orang	1746 Orang	26.400.000,00	26.400.000,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25 Orang	25 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11 Orang	11 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	174 Orang	174 Orang	5.000.000,00	17.672.000,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	179 Orang	179 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14 Dokumen	14 Dokumen	0,00	161.591.000,00	UPTD Puskesmas Mendik

	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	2 Dokumen	0,00	4.752.000,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	21.958.000,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	0,00	136.238.000,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1200 Dokumen	1200 Dokumen	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	408 Dokumen	408 Dokumen	159.428.000,00	247.824.504,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	792.000,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	30 Orang	0,00	4.224.000,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	13.416.000,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						UPTD Puskesmas Mendik

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	77.052.000,00	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0	14901496	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	14901496	UPTD Puskesmas Mendik
402	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	194.240.000	194.240.000	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	162.300.000	162.300.000	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	5 Orang	5 Orang	162.300.000	162.300.000	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK	85 %	85 %	31.940.000	31.940.000	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	4 Orang	4 Orang	31.940.000	31.940.000	UPTD Puskesmas Mendik
403	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	90 %	0	3.570.000	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	58 %	0	0	UPTD Puskesmas Mendik
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						UPTD Puskesmas Mendik
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0	3.570.000	UPTD Puskesmas Mendik

						UPTD Puskesmas Suliliran Baru				2.228.614.889	3.223.421.877	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.228.614.889	3.223.421.877	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
404	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	1.223.830.000	1.223.843.988	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	110.830.000	110.830.000	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	50.000.000	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	60.830.000	60.830.000	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	50.400.000	50.400.000	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	50.400.000	50.400.000	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	100 %	44.000.000	44.000.000	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	44.000.000	44.000.000	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	1.018.600.000	1.018.600.000	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.018.600.000,00	1.018.613.988,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
412	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	460.584.889	1.446.749.889	UPTD Puskesmas Suliliran Baru

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	460.584.889	1.422.341.889	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	264 Orang	264 Orang	10.000.000,00	58.312.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239 Orang	239 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	927 Orang	927 Orang	63.000.000,00	63.000.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang	201 Orang	10.000.000,00	69.712.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2217 Orang	2217 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	831 Orang	831 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						UPTD Puskesmas Suliliran Baru

							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5 Orang	5 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80 Orang	80 Orang	10.000.000,00	25.310.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	412 Orang	412 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	262.452.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	26.748.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	19.513.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						UPTD Puskesmas Suliliran Baru

							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	217.334.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	308.696.000,00	449.304.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80 Orang	80 Orang	5.000.000,00	11.780.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	412 Orang	412 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang	12 Orang	2.888.889,00	2.888.889,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	86.688.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	78.300.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0	24.408.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	24.408.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
413	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	544.200.000	544.200.000	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	544.200.000	544.200.000	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						UPTD Puskesmas Suliliran Baru

							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	14 Orang	14 Orang	544.200.000	544.200.000	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
414	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	90 %	0	8.628.000	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	58 %	0	8.628.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						UPTD Puskesmas Suliliran Baru
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	0	8.628.000,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru
						UPTD Puskesmas Suatang Baru				1.464.965.576	2.143.019.499	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.464.965.576	2.143.019.499	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.464.965.576	2.143.019.499	UPTD Puskesmas Suatang Baru
415	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	878.676.806	936.209.112	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	80.966.650	80.966.650	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.496.300	5.496.300	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	38.187.550	38.187.550	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.612.800	17.612.800	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						UPTD Puskesmas Suatang Baru

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	19.670.000	19.670.000	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	63.877.456	63.877.456	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40 Laporan	40 Laporan	456.000	456.000	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	33.024.000	33.024.000	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	30.397.456	30.397.456	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	100 %	240.932.700	240.932.700	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	30.682.700	30.682.700	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	10.750.000	10.750.000	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	199.500.000	199.500.000	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	492.900.000	492.900.000	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	12 Unit Kerja	492900000	0,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru

418	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	246.488.770	819.010.387	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	100 %	3.840.000	3.840.000	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	3.840.000	3.840.000	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	242.648.770	800.566.830	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121 Orang	121 Orang	5.805.030,00	28.893.030,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115 Orang	115 Orang	5.792.340,00	31.696.340,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136 Orang	136 Orang	1.100.000,00	1.100.000,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang	540 Orang	40.040.000,00	40.040.000,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	633 Orang	633 Orang	17.125.000,00	36.925.000,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						UPTD Puskesmas Suatang Baru

							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4789 Orang	4789 Orang	9.900.000,00	9.900.000,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	612 Orang	612 Orang	7.817.700,00	7.817.700,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2393 Orang	2393 Orang	15.862.000,00	15.862.000,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91 Orang	91 Orang	20.066.200,00	20.066.200,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	17 Orang	17 Orang	2.200.000,00	2.200.000,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	129 Orang	129 Orang	4.400.000,00	11.528.000,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	175 Orang	175 Orang	510.000,00	906.000,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen	0,00	121.731.500,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						UPTD Puskesmas Suatang Baru

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0,00	17.066.000,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	24.456.000,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	0,00	175.630.000,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	24 Dokumen	112.030.500,00	198.537.060,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	660.000,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	5 Orang	0,00	9.280.000,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	1 Orang	0,00	528.000,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						UPTD Puskesmas Suatang Baru

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	8.592.000,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	37.152.000,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
												UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0	14.603.557,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	14.603.557,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru
419	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	339.800.000	339.800.000	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	339.800.000	339.800.000	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	9 Orang	9 Orang	339.800.000	339.800.000	UPTD Puskesmas Suatang Baru
420	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	90 %	0	48.000.000	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	58 %	0	0	UPTD Puskesmas Suatang Baru
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						UPTD Puskesmas Suatang Baru
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0	48.000.000	UPTD Puskesmas Suatang Baru
						UPTD Puskesmas Kerang				1.903.801.716	2.844.635.147	UPTD Puskesmas Kerang
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.903.801.716	2.844.635.147	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.903.801.716	2.844.635.147	UPTD Puskesmas Kerang

421	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	1.180.786.716	1.245.791.147	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	79.430.734	79.430.734	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	37.800.734	37.800.734	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	31.630.000	31.630.000	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	100 %	73.340.000	73.340.000	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	73.340.000	73.340.000	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	104.015.982	104.015.982	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.140.000	1.140.000	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	58.514.166	58.514.166	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	44.361.816	44.361.816	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	924.000.000	924.000.000	UPTD Puskesmas Kerang

	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	924.000.000	0	UPTD Puskesmas Kerang
423	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	409.715.000	1.285.544.000	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	100 %	29.515.000	29.515.000	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket	29.515.000	29.515.000	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	380.200.000	1.193.450.000	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang	261 Orang	15.840.000,00	77.232.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang	261 Orang	15.840.000,00	41.418.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang	261 Orang	6.980.000,00	6.980.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1555 Orang	1555 Orang	19.800.000,00	19.800.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	898 Orang	898 Orang	20.000.000,00	63.728.000,00	UPTD Puskesmas Kerang

	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	949 Orang	949 Orang	15.840.000,00	15.840.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5058 Orang	5058 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	230 Orang	230 Orang	14.180.000,00	14.180.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	28 Orang	28 Orang	16.020.000,00	16.020.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	294 Orang	294 Orang	14.850.000,00	14.850.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	10 Orang	16.650.000,00	20.118.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	46.940.000,00	243.654.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0,00	14.652.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					UPTD Puskesmas Kerang

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	39.408.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	0,00	168.354.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	80.100.000,00	202.438.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	134.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	20 Orang	6.470.000,00	6.470.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Orang	3 Orang	5.880.000,00	9.504.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	100 Orang	44.810.000,00	44.810.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	133.860.000,00	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0	0	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	62579000	UPTD Puskesmas Kerang
424	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	313.300.000	313.300.000	UPTD Puskesmas Kerang

	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	313.300.000	313.300.000	UPTD Puskesmas Kerang
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						UPTD Puskesmas Kerang
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	9 Orang	9 Orang	313.300.000	313.300.000	UPTD Puskesmas Kerang
						UPTD Puskesmas Long Kali				1.750.106.030	3.031.324.623	UPTD Puskesmas Long Kali
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.750.106.030	3.031.324.623	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.750.106.030	3.031.324.623	UPTD Puskesmas Long Kali
425	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	1.096.347.430	1.188.654.023	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	187.395.430	187.395.430	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15.000.000	15.000.000	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	126.405.430	126.405.430	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	45.990.000	45.990.000	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	53.140.000	53.140.000	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000	2.500.000	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						UPTD Puskesmas Long Kali

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	50.640.000	50.640.000	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	100 %	90.812.000	90.812.000	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	40.812.000	40.812.000	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20.000.000	20.000.000	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	30.000.000	30.000.000	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	765.000.000	857.306.593	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	765.000.000	857.306.593	UPTD Puskesmas Long Kali
430	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	452.258.600	1.628.498.600	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	452.258.600	1.596.319.056	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	215 Orang	215 Orang	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	28 Orang	0,00	82.560.000,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Long Kali

							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	26 Orang	0,00	8.775.000,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	186 Orang	186 Orang	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	1200 Orang	142.734.000,00	142.734.000,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1300 Orang	1300 Orang	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1826 Orang	0,00	83.520.000,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3800 Orang	3800 Orang	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	1200 Orang	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang	295 Orang	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						UPTD Puskesmas Long Kali

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	25 Orang	18.072.000,00	18.072.000,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	12 Orang	10.800.000,00	10.800.000,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	5 Orang	7.200.000,00	7.200.000,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	293.113.000,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	4 Dokumen	0,00	15.216.000,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	47.122.000,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0,00	249.216.000,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	254.204.600,00	420.767.056,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	6 Laporan	0,00	3.600.000,00	UPTD Puskesmas Long Kali

	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang	8 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	7 Orang	7 Orang	15.648.000,00	15.648.000,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	52.800.000,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	141.576.000,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0	32.179.544,00	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	32.179.544,00	UPTD Puskesmas Long Kali
431	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	201.500.000	201.500.000	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	201.500.000	201.500.000	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						UPTD Puskesmas Long Kali
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	6 Orang	6 Orang	201.500.000	201.500.000	UPTD Puskesmas Long Kali
432	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	90 %	0	12.672.000	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	58 %	0	12.672.000	UPTD Puskesmas Long Kali
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya						UPTD Puskesmas Long Kali

						Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	6 Dokumen	0	12.672.000	UPTD Puskesmas Long Kali
						UPTD Puskesmas Pasir Belengkong				1.511.525.559	2.417.217.383	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.511.525.559	2.417.217.383	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.511.525.559	2.417.217.383	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
433	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	970.658.892	1.039.021.716	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	250.538.892	250.538.892	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.893.200	2.893.200	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	84.032.937	84.032.937	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	56.670.755	56.670.755	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.696.000	7.696.000	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	99.246.000	99.246.000	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	64.114.000	64.114.000	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						UPTD Puskesmas Pasir Belengkong

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	570.000	570.000	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	55.144.000	55.144.000	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.400.000	8.400.000	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	100 %	44.006.000	44.006.000	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	18.546.000	18.546.000	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	25.460.000	25.460.000	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	612.000.000	612.000.000	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	612.000.000	612.000.000	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
435	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	132.066.667	961.620.467	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	132.066.667	933.227.667	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450 Orang	239 Orang	7.500.000,00	29.172.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong

	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	30 Orang	7.500.000,00	17.970.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	382 Orang	217 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2362 Orang	1100 Orang	11.666.667,00	11.666.667,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2221 Orang	2038 Orang	7.500.000,00	63.768.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	733 Orang	733 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	552 Orang	552 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4820 Orang	1216 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	436 Orang	145 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	38 Orang	38 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong

	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1055 Orang	244 Orang	7.500.000,00	13.068.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	247 Orang	239 Orang	7.500.000,00	13.068.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	316 Dokumen	0,00	211.283.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	18 Dokumen	0,00	10.710.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	78 Dokumen	0,00	54.678.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	396 Dokumen	0,00	239.550.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	27.900.000,00	144.270.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	6 Laporan	0,00	1.788.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong

	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 Orang	39 Orang	5.000.000,00	7.784.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	5 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	28 Dokumen	0,00	12.480.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	60 Dokumen	0,00	51.972.000,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0	28.392.800,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	28.392.800,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
436	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	408.800.000	408.800.000	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	408.800.000	408.800.000	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	11 Orang	11 Orang	408.800.000	408.800.000	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
437	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	90 %	0	7.775.200	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong

	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	58 %	0	0	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	4 Dokumen	0	7.775.200	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
						UPTD Puskesmas Kayungo				1.330.989.626	2.045.951.214	UPTD Puskesmas Kayungo
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.330.989.626	2.045.951.214	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.330.989.626	2.045.951.214	UPTD Puskesmas Kayungo
438	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	773.745.146	828.976.734	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	214.500.830	214.500.830	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	48.000.000	48.000.000	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	23.279.400	23.279.400	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0 Laporan	143.221.430	143.221.430	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	100 %	12.000.000	12.000.000	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	12.000.000	12.000.000	UPTD Puskesmas Kayungo

	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	41.998.316	41.998.316	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	39.998.316	39.998.316	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	100 %	117.046.000	117.046.000	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	19.772.000	19.772.000	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	97.274.000	97.274.000	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	388.200.000	443.431.588	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	388.200.000	443.431.588	UPTD Puskesmas Kayungo
441	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	267.044.480	926.774.480	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	267.044.480	902.495.480	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	125 Orang	125 Orang	2.219.000,00	43.863.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						UPTD Puskesmas Kayungo

							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	119 Orang	119 Orang	8.904.000,00	20.790.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114 Orang	114 Orang	5.400.000,00	5.400.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	904 Orang	904 Orang	107.934.000,00	107.934.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	775 Orang	775 Orang	18.904.000,00	64.602.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4454 Orang	4454 Orang	10.399.000,00	10.399.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	591 Orang	591 Orang	5.976.000,00	5.976.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	409 Orang	409 Orang	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	113 Orang	113 Orang	6.370.000,00	6.370.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5 Orang	5 Orang	3.400.000,00	3.400.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Kayungo

							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18 Orang	18 Orang	7.376.000,00	7.376.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	22 Orang	22 Orang	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	269 Orang	269 Orang	4.684.000,00	4.684.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen	0,00	80.663.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0,00	4.772.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	45.580.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	0,00	268.772.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	19.752.480,00	108.248.480,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	1.080.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						UPTD Puskesmas Kayungo

							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	20 Orang	4.684.000,00	4.684.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	500 Orang	500 Orang	61.042.000,00	61.042.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	13.640.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	33.220.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0	24.279.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	24.279.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
442	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	290.200.000	290.200.000	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	290.200.000	290.200.000	UPTD Puskesmas Kayungo
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						UPTD Puskesmas Kayungo
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	8 Orang	8 Orang	290.200.000	290.200.000	UPTD Puskesmas Kayungo
						UPTD Puskesmas Sebakung Taka				1.280.167.116	1.913.223.267	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.280.167.116	1.913.223.267	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.280.167.116	1.913.223.267	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
443	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	918.947.116	924.237.267	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	164.261.770	164.261.770	UPTD Puskesmas Sebakung Taka

	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	8.934.000	8.934.000	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.632.770	12.632.770	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000	25.000.000	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.795.000	17.795.000	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	99.900.000	99.900.000	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	100 %	162.572.854	162.572.854	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	162.572.854	162.572.854	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	47.938.292	47.938.292	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	30.078.292	30.078.292	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	17.860.000	17.860.000	UPTD Puskesmas Sebakung Taka

	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	25.941.800	25.941.800	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	25.941.800	25.941.800	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	518.232.400	518.232.400	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	518.232.400	523.522.551	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
444	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	224.120.000	844.386.000	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	100 %	16.000.000	16.000.000	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	16.000.000	16.000.000	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	208.120.000	828.386.000	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88 Orang	88 Orang	51.480.000,00	77.040.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	69 Orang	69 Orang	4.000.000,00	4.000.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						UPTD Puskesmas Sebakung Taka

							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84 Orang	84 Orang	4.000.000,00	4.000.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	823 Orang	823 Orang	4.000.000,00	4.000.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1129 Orang	1129 Orang	2.310.000,00	32.142.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3618 Orang	3618 Orang	3.960.000,00	3.960.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	376 Orang	376 Orang	11.880.000,00	11.880.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3618 Orang	3618 Orang	4.000.000,00	4.000.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55 Orang	55 Orang	4.000.000,00	4.000.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	13 Orang	13 Orang	2.200.000,00	2.200.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19 Orang	19 Orang	2.200.000,00	15.400.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						UPTD Puskesmas Sebakung Taka

							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	147 Orang	147 Orang	6.600.000,00	16.500.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	45 Dokumen	0,00	162.179.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	13.520.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	35 Dokumen	0,00	33.255.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	882 Dokumen	882 Dokumen	40.590.000,00	144.690.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	150 Dokumen	150 Dokumen	66.900.000,00	164.484.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	32 Laporan	0,00	7.920.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	12 Orang	0,00	2.640.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	13.728.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						UPTD Puskesmas Sebakung Taka

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	106.848.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
445	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	137.100.000	137.100.000	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	137.100.000	137.100.000	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang	4 Orang	137.100.000	137.100.000	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
446	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	90 %	0	7.500.000	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	58 %	0	7.500.000	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						UPTD Puskesmas Sebakung Taka
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	3 Dokumen	0	7.500.000	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
						UPTD Puskesmas Muara Komam				2.366.428.346	3.547.526.110	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.366.428.346	3.547.526.110	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.366.428.346	3.547.526.110	UPTD Puskesmas Muara Komam
447	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	1.400.231.902	1.447.743.666	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	102.571.602	102.571.602	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.145.000	7.145.000	UPTD Puskesmas Muara Komam

	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000	25.000.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	34.316.602	34.316.602	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	36.110.000	36.110.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	72.827.800	72.827.800	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	706.800	706.800	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan	72.121.000	72.121.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	100 %	85.832.500	85.832.500	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	34.000.000	34.000.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	10.560.000	10.560.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	41.272.500	41.272.500	UPTD Puskesmas Muara Komam

	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	1.139.000.000	1.139.000.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.139.000.000	1.139.000.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
459	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	610.196.444	1.729.748.444	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	100 %	21.420.000	21.420.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	200 Keluarga	200 Keluarga	21.420.000	21.420.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	588.776.444	588.776.444	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	206 Orang	206 Orang	18.429.100	67.865.100	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	13.786.500	65.256.500	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	219 Orang	219 Orang	6.440.000	6.440.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1189 Orang	1189 Orang	38.634.000	38.634.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2310 Orang	2310 Orang	18.928.044	129.716.044	UPTD Puskesmas Muara Komam

	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9078 Orang	9078 Orang	24.180.000	24.180.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	928 Orang	928 Orang	28.030.000	28.030.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	933 Orang	933 Orang	11.474.000	11.474.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	172 Orang	172 Orang	8.224.000	8.224.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	20 Orang	9.926.000	9.926.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	7 Orang	8.224.000	20.368.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	10.054.800	15.202.800	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen	0,00	234.112.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0,00	12680000	UPTD Puskesmas Muara Komam

	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	10212000	10212000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	2600000	2600000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	94289000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	0,00	224.434.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	313600000	475.603.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	2160000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	7 Orang	0,00	2.176.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	2 Orang	0,00	4.224.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						UPTD Puskesmas Muara Komam

							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	300 Orang	300 Orang	66034000	66.034.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	40.320.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	100.848.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
												UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0	13.320.000,00	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	13.320.000,00	UPTD Puskesmas Muara Komam
460	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	356.000.000	356.000.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	356.000.000	356.000.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Orang	12 Orang	356.000.000	356.000.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
461	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	90 %	0	14.034.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	58 %	0	14.034.000	UPTD Puskesmas Muara Komam
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						UPTD Puskesmas Muara Komam
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0	14.034.000	UPTD Puskesmas Muara Komam

						UPTD Puskesmas Krayan				1.163.853.123	1.612.559.223	UPTD Puskesmas Krayan
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.163.853.123	1.612.559.223	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.163.853.123	1.612.559.223	UPTD Puskesmas Krayan
462	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	706.092.923	817.993.023	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	177.406.133	177.406.133	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.705.200	20.705.200	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0	0	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	51.028.933	51.028.933	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.562.000	20.562.000	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	85.110.000	85.110.000	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	37.500.000	37.500.000	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.500.000	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	36.000.000	36.000.000	UPTD Puskesmas Krayan

	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	100 %	45.186.790	45.186.790	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	26.696.790	26.696.790	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	5.680.000	5.680.000	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	12.810.000	12.810.000	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	446.000.000	557.900.100	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	446.000.000,00	557.900.100	UPTD Puskesmas Krayan
469	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	315.170.200	645.976.200	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	100 %	73.399.000	73.399.000	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7 Unit	7 Unit	73.399.000	73.399.000	UPTD Puskesmas Krayan

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	238.491.200	530.620.200	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135 Orang	135 Orang	12.080.000,00	32.060.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	129 Orang	129 Orang	18.350.000,00	18.350.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127 Orang	127 Orang	8.900.000,00	8.900.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	585 Orang	585 Orang	25.440.000,00	25.440.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	936 Orang	936 Orang	8.190.000,00	10.062.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1114 Orang	1114 Orang	3.300.000,00	3.300.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang	505 Orang	32.820.000,00	32.820.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	504 Orang	504 Orang	7.260.000,00	7.260.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						UPTD Puskesmas Krayan

							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	148 Orang	148 Orang	7.260.000,00	7.260.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8 Orang	8 Orang	2.310.000,00	2.310.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	12 Orang	7.120.000,00	10.684.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	12 Orang	2.640.000,00	2.640.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	9.290.000,00	139.058.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.055.000,00	16.621.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	56.110.000,00	56.110.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	4.006.200,00	4.006.200,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	9.048.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						UPTD Puskesmas Krayan

							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	13.340.000,00	72.656.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	52.123.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	720.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	9 Orang	2.970.000,00	6.270.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	9 Orang	2.050.000,00	2.050.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	10.872.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100 %	100 %	3.280.000,00	41.957.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.280.000,00	41.957.000,00	UPTD Puskesmas Krayan
470	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	142.590.000	142.590.000	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	104.200.000	104.200.000	UPTD Puskesmas Krayan

	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	3 Orang	3 Orang	104.200.000	104.200.000	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK	85 %	85 %	38.390.000	38.390.000	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	5 Orang	5 Orang	38.390.000	38.390.000	UPTD Puskesmas Krayan
471	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	90 %	0	6.000.000	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	58 %	0	0	UPTD Puskesmas Krayan
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						UPTD Puskesmas Krayan
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0	6.000.000	UPTD Puskesmas Krayan
						UPTD Puskesmas Lolo				1.068.630.578	1.632.798.538	UPTD Puskesmas Lolo
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.068.630.578	1.632.798.538	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.068.630.578	1.632.798.538	UPTD Puskesmas Lolo
472	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	554.468.264	603.797.224	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	80.253.550	80.253.550	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						UPTD Puskesmas Lolo

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.353.700	3.353.700	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	38.320.050	38.320.050	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	38.579.800	38.579.800	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	100 %	25.667.404	25.667.404	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	25.667.404	25.667.404	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	55.027.330	55.027.330	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	680.000	680.000	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	54.347.330	54.347.330	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah (BMD) yang Terpelihara	100 %	100 %	28.447.460	28.447.460	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	3.987.460	3.987.460	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	24.460.000,00	24.460.000,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	365.072.520	414.401.480	UPTD Puskesmas Lolo

	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	365.072.520	414.401.480	UPTD Puskesmas Lolo
473	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	344.862.314	841.601.314	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	100 %	9.449.300	9.449.300	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	9.449.300	9.449.300	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	335.413.014	697.809.014	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	168 Orang	168 Orang	13.400.000,00	28.184.000,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	159 Orang	159 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152 Orang	152 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	818 Orang	818 Orang	55.968.000,00	55.968.000,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	727 Orang	727 Orang	8.000.000,00	45.224.000,00	UPTD Puskesmas Lolo

	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6170 Orang	6170 Orang	7.588.444,00	7.588.444,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	826 Orang	826 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2694 Orang	2694 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	122 Orang	122 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	14 Orang	14 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	127 Orang	127 Orang	5.000.000,00	15.824.000,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	209 Orang	209 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen	0,00	76.114.000,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0,00	6.384.000,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					UPTD Puskesmas Lolo

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	14.496.000,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	0,00	112.992.000,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	1 Dokumen	205.968.570,00	269.806.570,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33 Orang	33 Orang	2.112.000,00	2.112.000,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	5 Orang	2.376.000,00	3.168.000,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	24.948.000,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0	134.343.000,00	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	134.343.000,00	UPTD Puskesmas Lolo
474	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	169.300.000	169.300.000	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	169.300.000	169.300.000	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	5 Orang	5 Orang	169.300.000	169.300.000	UPTD Puskesmas Lolo

475	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	90 %	0	18.100.000	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	58 %	0	0	UPTD Puskesmas Lolo
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						UPTD Puskesmas Lolo
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0	18.100.000	UPTD Puskesmas Lolo
						UPTD Puskesmas Long Ikis				3.504.994.900	4.689.416.037	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.504.994.900	4.689.416.037	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.504.994.900	4.689.416.037	UPTD Puskesmas Long Ikis
476	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	2.517.994.900	2.531.056.037	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	79.405.600	79.405.600	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.725.300	1.725.300	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000	40.000.000	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	21.180.300	21.180.300	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.140.000	1.140.000	UPTD Puskesmas Long Ikis

	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.360.000	15.360.000	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	106.681.300	106.681.300	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	106.681.300	106.681.300	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	2.331.908.000	2.331.908.000	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.331.908.000	2.331.908.000	UPTD Puskesmas Long Ikis
487	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	-	100 %	433.500.000	1.558.860.000	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	433.500.000	1.375.459.200	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	654 Orang	654 Orang	22.836.000,00	44.640.000,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	654 Orang	654 Orang	5.000.000,00	24.480.000,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	443 Orang	443 Orang	5.000.000,00	6.228.000,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	686 Orang	686 Orang	124.088.000,00	147.312.000,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						UPTD Puskesmas Long Ikis

							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2438 Orang	2438 Orang	5.000.000,00	62.040.000,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19433 Orang	0 Orang	7.040.000,00	0,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2276 Orang	2276 Orang	20.656.000,00	23.760.000,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8117 Orang	0 Orang	7.040.000,00	0,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	367 Orang	0 Orang	7.040.000,00	0,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	32 Orang	32 Orang	3.300.000,00	23.760.000,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	531 Orang	531 Orang	5.000.000,00	19.668.000,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9 Orang	9 Orang	5.000.000,00	6.336.000,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen	0,00	254.024.200,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						UPTD Puskesmas Long Ikis

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0,00	27.192.000,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	50.556.000,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	0,00	186.360.000,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	193.500.000,00	361.271.000,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	102 Orang	102 Orang	5.000.000,00	7.920.000,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	2 Orang	5.000.000,00	5.280.000,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	40 Orang	40 Orang	13.000.000,00	0,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	5.880.000,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	118.752.000,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0	183.400.800,00	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	183.400.800,00	UPTD Puskesmas Long Ikis

488	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	553.500.000	553.500.000	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	553.500.000	553.500.000	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang	15 Orang	553.500.000	553.500.000	UPTD Puskesmas Long Ikis
489	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	90 %	0	46.000.000	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	58 %	0	0	UPTD Puskesmas Long Ikis
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						UPTD Puskesmas Long Ikis
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0	46.000.000	UPTD Puskesmas Long Ikis
						UPTD Puskesmas Kuaro				2.280.327.612	3.467.648.175	UPTD Puskesmas Kuaro
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.280.327.612	3.467.648.175	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.280.327.612	3.467.648.175	UPTD Puskesmas Kuaro
490	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	1.557.707.612	1.595.984.175	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	132.160.000	132.160.000	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000	6.000.000	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						UPTD Puskesmas Kuaro

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	45.000.000	45.000.000	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8.000.000	8.000.000	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	73.160.000	73.160.000	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	67.547.612	67.547.612	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	67.547.612	67.547.612	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	50.000.000	50.000.000	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	1.308.000.000	1.308.000.000	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	1.308.000.000	1.308.000.000	UPTD Puskesmas Kuaro
500	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	432.520.000	1.572.324.000	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	100 %	98.870.000	98.870.000	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit	80.000.000	80.000.000	UPTD Puskesmas Kuaro

	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	36 Paket	36 Paket	18.870.000	18.870.000	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	333.650.000	1.446.633.744	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	437 Orang	437 Orang	9.205.000,00	80.821.000,00	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	306 Orang	0,00	17.835.000,00	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	430 Orang	430 Orang	43.275.000,00	43.275.000,00	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	932 Orang	932 Orang	28.080.000,00	132.486.000,00	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10393 Orang	10393 Orang	11.040.000,00	11.040.000,00	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2020 Orang	2020 Orang	17.930.000,00	17.930.000,00	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2522 Orang	2522 Orang	4.840.000,00	4.840.000,00	UPTD Puskesmas Kuaro

	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1030 Orang	1030 Orang	4.840.000,00	4.840.000,00	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	30 Orang	12.920.000,00	12.920.000,00	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	376 Orang	376 Orang	7.900.000,00	7.900.000,00	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	516 Orang	0,00	3.960.000,00	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12.400.000,00	421.848.000,00	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	7.710.000,00	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	7.650.000,00	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0,00	220.040.000,00	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	12 Dokumen	165.000.000,00	329.417.744,00	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						UPTD Puskesmas Kuaro

							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan	0,00	1.320.000,00	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 Orang	30 Orang	3.300.000,00	3.300.000,00	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17 Orang	17 Orang	12.920.000,00	12.920.000,00	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	17.640.000,00	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	86.941.000,00	UPTD Puskesmas Kuaro
												UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0	26.820.256,00	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	26.820.256,00	UPTD Puskesmas Kuaro
501	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	290.100.000	290.100.000	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	290.100.000	290.100.000	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	8 Orang	8 Orang	290.100.000	290.100.000	UPTD Puskesmas Kuaro
502	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	90 %	0	9.240.000	UPTD Puskesmas Kuaro

	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	58 %	0	0	UPTD Puskesmas Kuaro
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						UPTD Puskesmas Kuaro
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0	9.240.000	UPTD Puskesmas Kuaro
						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat				1.591.883.596	2.196.021.880	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.591.883.596	2.196.021.880	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
503	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	990.669.763	998.515.047	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	113.004.970	113.004.970	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.897.500	12.897.500	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23.321.980	23.321.980	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	12.897.490	12.897.490	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	63.888.000	63.888.000	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	36.116.300	36.116.300	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.200.000	1.200.000	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	34.916.300	34.916.300	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	100 %	176.848.493	176.848.493	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	27.208.000	27.208.000	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	22.935.000	22.935.000	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	126.705.493	126.705.493	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	664.700.000	672.545.284	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	664.700.000	672.545.284	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
521	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	311.013.833	907.306.833	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	100 %	8.160.000	8.160.000	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat

							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	8.160.000	8.160.000	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	302.853.833	884.983.401	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	141 Orang	141 Orang	17.672.000,00	43.960.000,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	148 Orang	148 Orang	13.580.000,00	21.902.000,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	30 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1067 Orang	1067 Orang	46.956.000,00	46.956.000,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	916 Orang	916 Orang	5.000.000,00	66.416.000,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2465 Orang	2465 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	698 Orang	698 Orang	6.691.333,00	6.691.333,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat

							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	16.484.000,00	16.484.000,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	20 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	140 Orang	0,00	11.564.000,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	35 Orang	35 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	35.460.000,00	161.447.000,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	26.444.000,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	23.246.000,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	20.420.000,00	164.256.000,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	95.490.000,00	174.423.568,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	12 Dokumen	15.100.500,00	15.100.500,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77 Orang	77 Orang	5.000.000,00	11.608.000,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	23.780.000,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	45.705.000,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0	14.163.432,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	14.163.432,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
522	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	290.200.000	290.200.000	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	290.200.000	290.200.000	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	11 Orang	11 Orang	290.200.000	290.200.000	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
						UPTD Puskesmas Tanjung Aru				1.766.260.602	2.561.916.666	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.766.260.602	2.561.916.666	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.766.260.602	2.561.916.666	UPTD Puskesmas Tanjung Aru

523	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	718.206.802	767.132.483	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	148.016.956	148.016.956	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.720.000	19.720.000	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	53.969.456	53.969.456	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.067.500	7.067.500	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	42.260.000	42.260.000	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	15.678.040	15.678.040	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.200.000	1.200.000	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	14.478.040	14.478.040	UPTD Puskesmas Tanjung Aru

	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	100 %	35.511.806	35.511.806	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	26.095.806	26.095.806	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	9.416.000,00	9.416.000,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	519.000.000	567.925.681	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	519.000.000,00	567.925.681	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
536	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	467.053.800	1.207.769.183	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	100 %	135.607.600	135.607.600	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	101.032.600	101.032.600	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	34.575.000	34.575.000	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	331.446.200	980.600.800	UPTD Puskesmas Tanjung Aru

	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136 Orang	136 Orang	11.384.000,00	26.300.000,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130 Orang	130 Orang	10.395.550,00	23.202.550,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130 Orang	130 Orang	9.504.000,00	9.504.000,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	460 Orang	460 Orang	33.560.000,00	33.560.000,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1416 Orang	1416 Orang	6.990.900,00	46.464.900,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5640 Orang	5640 Orang	21.649.000,00	21.649.000,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	442 Orang	442 Orang	21.649.000,00	21.649.000,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2557 Orang	2557 Orang	5.281.000,00	5.281.000,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	370 Orang	370 Orang	5.281.000,00	5.281.000,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru

	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	15 Orang	15 Orang	7.061.000,00	7.061.000,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	115 Orang	115 Orang	7.589.000,00	25.106.000,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang	145 Orang	7.061.000,00	7.061.000,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	0 Dokumen	0,00	162.008.600,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0,00	46.843.000,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	29.554.000,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0 Dokumen	0,00	107.372.000,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	176.451.750,00	291.577.750,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	10 Orang	6.649.000,00	12.400.000,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					UPTD Puskesmas Tanjung Aru

							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Orang	3 Orang	940.000,00	940.000,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	19.492.000,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	78.294.000,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0	91.560.783,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	91.560.783,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
537	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	581.000.000	581.000.000	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	581.000.000	581.000.000	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	16 Orang	16 Orang	581.000.000	581.000.000	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
538	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	90 %	0	6.015.000	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	58 %	0	6.015.000	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						UPTD Puskesmas Tanjung Aru
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0	6.015.000	UPTD Puskesmas Tanjung Aru
						UPTD Puskesmas Batukajang				2.058.858.000	2.965.527.063	UPTD Puskesmas Batukajang

	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.058.858.000	2.965.527.063	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.058.858.000	2.965.527.063	UPTD Puskesmas Batukajang
539	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	BB	1.374.998.000	1.461.726.063	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100 %	100 %	145.817.000	145.817.000	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.600.000	3.600.000	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	56.927.000	56.927.000	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121 Laporan	121 Laporan	85.290.000	85.290.000	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	100 %	100 %	29.250.000	29.250.000	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	29.250.000	29.250.000	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	30.936.000	30.936.000	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	592.800	592.800	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	30.343.200	30.343.200	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara.	100 %	100 %	48.995.000	48.995.000	UPTD Puskesmas Batukajang

	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	21.845.000	21.845.000	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	7.150.000	7.150.000	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	20.000.000	20.000.000	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100 %	100 %	1.120.000.000	1.120.000.000	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.120.000.000,00	1.206.728.063,00	UPTD Puskesmas Batukajang
540	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	100 %	352.460.000	1.147.901.000	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	100 %	352.460.000	1.119.581.000	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	510 Orang	509 Orang	13.280.000,00	43.336.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	509 Orang	486 Orang	8.250.000,00	8.250.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	442 Orang	442 Orang	8.250.000,00	8.250.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						UPTD Puskesmas Batukajang

							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3977 Orang	3074 Orang	24.900.000,00	24.900.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4260 Orang	5088 Orang	8.340.000,00	39.204.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17361 Orang	17361 Orang	15.840.000,00	15.840.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	810 Orang	815 Orang	33.110.000,00	33.110.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6100 Orang	7256 Orang	5.280.000,00	5.280.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	590 Orang	329 Orang	19.750.000,00	19.750.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	38 Orang	4.720.000,00	4.720.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	453 Orang	453 Orang	7.240.000,00	19.060.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	813 Orang	641 Orang	4.560.000,00	4.560.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						UPTD Puskesmas Batukajang

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	292.453.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	19.500.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	19.332.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	34 Orang	34 Orang	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0,00	124.488.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	150 Dokumen	150 Dokumen	149.140.000,00	263.008.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan	0,00	3.432.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	104 Orang	104 Orang	1.290.000,00	7.218.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang

	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	4 Orang	1.440.000,00	1.440.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	200 Orang	200 Orang	41.070.000,00	41.070.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	14.400.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	100.980.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0	28.320.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	28.320.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang
541	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	331.400.000	331.400.000	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	100 %	331.400.000	331.400.000	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						UPTD Puskesmas Batukajang
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	9 Orang	9 Orang	331.400.000	331.400.000	UPTD Puskesmas Batukajang
542	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persentase UKBM Aktif)	90 %	90 %	0	24.500.000	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif))	58 %	58 %	0	24.500.000	UPTD Puskesmas Batukajang
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya						UPTD Puskesmas Batukajang

						Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0	24.500.000	UPTD Puskesmas Batukajang

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai nilai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

5.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tanah Paser, 3 September 2024

Kepala Dinas Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS KESEHATAN

Amrti Yulihardi, S.STP,M.Si

NIP. 19840726 200212 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DPPKBPPPA PEMERINTAH KABUPATEN PASER

P-RENJA TAHUN 2024

PERUBAHAN-RENCANA KERJA (P-RENJA)

Perangkat Daerah Tahun 2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASER





Jalan K.H.Akhmad Dahlan No.54 Telp/ Fax. (0543) 23636



TANA PASER

2024

DPPKBPPPA

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2/KEP- 786/2024
TANGGAL 16 Agustus 2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASER
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN BUPATI PASER NO. 100.3.3.2/KEP-786/2024 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.....
Daftar Isi..... i
Daftar Tabel ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum..... 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan …….. 6
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2024..... 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II 2024..... 9
2.2 Analisis Capaian kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten paser..... 27
2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil renja PD Tahun 2024 42
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 44
3.1 Tujuan dan Sasaran 44
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 48
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024 79
BAB IV PENUTUP..... 123
4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan 123
4.2 Rencana Tindak Lanjut..... 124

DAFTAR TABEL

Tabel 2.I Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 (Tabel E.55) 10

Tabel 2.2 Pencapaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 (Tabel TC.30) 32

Tabel 3.I Perubahan Pencapaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 45

Tabel 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (TC. 31)..... 50

Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024 (TC. 33)……. 80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagaiacuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2024

.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Pengendal;ian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokokbahasan dalam penulisan RenjaBappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten

Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Paser

Periode Pelasanaan : Triwulan II

Formulir E.55

Kode	Sasaran	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD tahun s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		13=6+12		14=13/5x100%		(15)
				K		Rp	K	RP	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP**	**80**	**A**																				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**76**	%	**11.688.044.573**	**72**	**9.014.571.627,00**	72	**11.041.981.917,00**		**1.953.217.922,00**	72	**3.889.262.296,00**					72	5.842.480.218	72	14.857.051.845	95	52,91	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		B	**144.898.853,00**	**65,83**	**330.294.546,00**	65,83	272.674.026,00	65,83	68.204.678,00	65,83	64.708.650,00					65,83	132.913.328	65,83	463.207.874	100,00	48,74	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat Daerah	6	Dokumen	122.720.977,00	8	277.736.146,00	6	232.247.556,00	2	60.048.178,00	1	54.948.150,00					3	114.996.328	11	392.732.474	50,00	49,51	
		Evaluasi Kinjerja perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	4	Laporan	22.177.876,00	5	52.558.400,00	4	40.426.470,00	2	8.156.500,00	1	9.760.500,00					3	17.917.000	8	70.475.400	75,00	44,32	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	%	**10.963.649.901,00**		**7.853.039.048,00**	100	**10.138.701.971,00**	25	**1.782.091.858,00**	25	**3.636.520.020,00**					50	5.418.611.878	50	13.271.650.926	50,00	53,44	

Kode	Sasaran	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD tahun s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjnagan ASN	14	Bulan	10.817.906.705,00	13	7.636.721.512,00	14	9.985.101.971,00	3	1.733.920.858,00	5	3.574.726.720,00					8	5.308.647.578	21	12.945.369.090	57,14	53,17	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran	10	Dokumen	145.743.196,00	19	216.317.536,00	10	153.600.000,00	4	48.171.000,00	3	61.793.300,00					7	109.964.300	26	326.281.836	70,00	71,59	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen dan pelaporan Barang Milik Daerah perangkat daerah yang tersusun**	**100**	%	**16.000.000,00**			100	**53.548.720,00**		**9.836.000,00**	20	**16.343.600,00**					20	26.179.600	20	26.179.600	20	48,89	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	1	Dokumen	16.000.000,00	0	0,00	1	53.548.720,00		9.836.000,00	1	16.343.600,00					1	26.179.600	1	26.179.600	100,00	48,89	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	%	**370.719.595,00**	**100**		100	**376.560.000,00**		**62.836.298,00**	30	**156.507.797,00**					30	219.344.095	100	219.344.095	30,00	58,25	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10	Jenis	2.995.520,00	10	876.000,00	10	3.000.000,00	10	2.997.700,00	0	0,00					10	2.997.700	20	3.873.700	100,00	99,92	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	70	Paket	158.273.930,00	50	131.467.800,00	70	148.600.000,00		12.586.300,00	30	75.733.800,00					30	88.320.100	80	219.787.900	42,86	59,43	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Ceatakan dan Penggandaan yang disediakan	10	Paket	25.000.000,00	40	16.306.200,00	10	14.960.000,00		6.954.000,00	0	0,00					0	6.954.000	40	23.260.200	0,00	46,48	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485	Laporan	184.450.145,00	26	253.603.674,00	485	210.000.000,00		40.298.298,00	30	80.773.997,00					30	121.072.295	56	374.675.969	6,19	57,65	

Kode	Sasaran	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD tahun s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	**100**	**%**	**7.000.000,00**	**100**	**89.352.500,00**	**100**	**10.247.100,00**		**0,00**	**0**	**0,00**					0	0	100	89.352.500	0,00	0,00	
		Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8	Unit	7.000.000,00	8	89.352.500,00	8	10.247.100,00		0,00	0	0,00					0	0	8	89.352.500	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	**Persentase jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	**100**	**%**	**97.393.810,00**	**100**	**32.972.854,00**	**100**	**90.465.900,00**		**30.249.088,00**	**100**	**15.182.229,00**					100	45.431.317	100	78.404.171	100,00	50,22	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	Lembar	9.000.000,00	1	1.640.000,00	######	45.465.900,00		25.134.100,00	10	7.763.000,00					10	32.897.100	11	34.537.100	6,67	72,36	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	88.393.810,00	11	31.332.854,00	12	45.000.000,00		5.114.988,00	2	7.419.229,00					2	12.534.217	13	43.867.071	16,67	27,85	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	**Persentase Sarana Prasarana Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100**	%	**88.382.414,00**	**100**	**55.615.756,00**	100	**99.784.200,00**		**0,00**	0	**0,00**					0	0	100	55.615.756	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanannya	7	Unit	57.629.138,00	6	44.020.756,00	7	86.784.200,00			0	0,00					0	0	6	44.020.756	0,00	0,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	8	Unit	21.900.276,00	8	4.973.500,00	8	5.000.000,00			0	0,00					0	0	8	4.973.500	0,00	0,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	5.840.000,00	1	4.791.500,00	1	5.000.000,00			0	0,00					0	0	1	4.791.500	0,00	0,00	

Kode	Sasaran	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD tahun s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	3.013.000,00	1	830.000,00	1,00	3.000.000,00			0	0,00					0	0	1	830.000	0,00	0,00	
	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan		Persentase Perempuan Dalam legislatif	23	%	427.513.509,00			20	1.263.171.010,00		21.666.882,00	20%	214.781.039,00					20%	236.447.921	0	236.447.921	1,00	18,72	
			Persentase perempuan dalam Jabatan Tenaga Profesional	43,59	%				43,59				28,63						28,63	0	29	0	65,68	#DIV/0!	
			persentase Sumbangan Perempuan Dalam pemerintahan	28	%				26				26						26	0	26	0	100,00	#DIV/0!	
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	**Persentase Partisipasi perempuan**	49,5	%	427.513.509,00	35	879.410.592,00	43,50	**1.263.171.010,00**			53						53	236.447.921	88	1.115.858.513	121,84	18,72	
			Persentase Perangkat daerah yang Melaksanakan PPRG	100	%		53		83,33			**21.666.882,00**	53	**214.781.039,00**					53	0	106	0	63,60		
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	**Persentase pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**20**	%	**86.038.754,00**	**100**	**272.227.004,00**	100	**359.571.010,00**		**21.666.882,00**		**24.443.522,00**					0	46.110.404	100	318.337.408	0,00	12,82	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) kewenangan Kabupaten	20	Perangkat Daerah	57.359.170,00	5	17.256.552,00	20	319.995.000,00		21.666.882,00		24.443.522,00					0	46.110.404	5	63.366.956	0,00	14,41	
		Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan	20	Perangkat Daerah	28.679.584,00	40	254.970.452,00	20	39.576.010,00				0,00					0	0	40	254.970.452	0,00	0,00	

Kode	Sasaran	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD tahun s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
			Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif gender																						
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	**Jumlah Organisasi Masyarakat yang di Fasilitasi**	**60**	Ormas	**105.874.755,00**	**12**	**453.688.700,00**	60	**53.600.000,00**	3	**0,00**	3	**7.271.200,00**					6	7.271.200	18	460.959.900	10,00	13,57	
		Advokasi Kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Lembaga	105.874.755,00	10	453.688.700,00	10	53.600.000,00	2		2	7.271.200,00					4	7.271.200	14	460.959.900	185,00	13,57	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan**	**35**	Lembaga	**235.600.000,00**	**25**	**430.669.107,00**	32	**850.000.000,00**		**0,00**		**183.066.317,00**					0	183.066.317	25	613.735.424	0,00	21,54	
		Advokasi kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10	Lembaga	35.500.000,00	1	346.242.456,00	10	550.000.000,00				176.591.519,00					0	176.591.519	1	522.833.975	0	32,11	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Mendapat Peningkatan	800	orang	200.100.000,00	40	84.426.651,00	800	300.000.000,00	100		400	6.474.798,00					500	6.474.798	540	90.901.449	62,50	2,16	
	Meningkatnya Perlindungan Perempua		Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	100	%	67.098.689,00			100	100.000.000,00	100	8.902.200,00	100	7.466.400,00					100	16.368.600	100	16.368.600	100,00	16,37	

Kode	Sasaran	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD tahun s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
	n dan Pemenuhan Hak Serta Kualitas Hidup Anak		Persentase kekerasan terhadap Anak yang tertangani	100	%				100		100		100						100	0	100	0	100,00		
		Program Perlindungan Perempuan	**Cakupan Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan**	**100**	%	**67.098.689,00**	**100**	**242.113.565,00**	100	**100.000.000,00**	100	**8.902.200,00**	100	**7.466.400,00**					100	16.368.600	100	258.482.165	100,00	16,37	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang di Fasilitasi**	**60**	%	**67.098.689,00**	**75**	**154.438.965,00**	60,00	**100.000.000,00**		**8.902.200,00**	7,47 %	**7.466.400,00**					0,07	16.368.600	75	170.807.565	0,12	16,37	
		Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan Korban kekerasan kewennagan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas	50	orang	67.098.689,00	50	154.438.965,00	50	100.000.000,00		8.902.200,00	0	7.466.400,00					0	16.368.600	50	170.807.565	0,00	16,37	
	Meningkatkan Pemberdayaan perempuan		Persentase Perempuan Dalam legislatif	23	%	115.040.967,00			20	104.828.990,00		26.713.812,00	20%	23.235.761,00					0,2	49.949.573	0	49.949.573	1,00	47,65	
			Persentase perempuan dalam Jabatan Tenaga Profesional	43,59	%				43,59				28,63						28,63	0	29	0	65,68		
			persentase Sumbangan Perempuan Dalam pemerintahan	28	%				26				26						26	0	26	0	100,00		
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi keluarga yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan**	**90**	%	**0,00**	**44**	**77.994.573,00**	40	**53.600.000,00**		**15.682.812,00**	10	**13.400.000,00**					10	29.082.812	54	107.077.385	25,00	54,26	

Kode	Sasaran	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD tahun s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga KG dan Hak Anak yang difasilitasi**	**10**	Lembaga	**0,00**	**10**	**77.994.573,00**	10	**53.600.000,00**	2	**15.682.812,00**	3	**13.400.000,00**					5	29.082.812	15	107.077.385	50,00	54,26	
		Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupatenn /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	0,00	5	77.994.573,00	5	53.600.000,00	1	15.682.812,00	2	1.350.000,00					3	17.032.812	8	95.027.385	60,00	31,78	
		Program pengelola Sistem Data Gender dan ANAK	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Sistem data Gender atau Data Anak**	**95,24**	%	**115.040.967,00**	**25**	**7.259.300,00**	83	**51.228.990,00**		**11.031.000,00**		**9.835.761,00**					0	20.866.761	25	28.126.061	0,00	40,73	
		Pengumpulan Pengelolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di tingkat Daerah Kabupaten /Kota	**Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak**	**1**	Dokumen	**115.040.967,00**	**1**	**20.259.300,00**	1	51.228.990,00		11.031.000,00		9.835.761,00					0	20.866.761	1	41.126.061	0,00	40,73	
		Penyediaan Data Gender dan Anak kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	5	Dokumen	115.040.967,00	2	20.259.300,00	5	51.228.990,00		11.031.000,00		9.835.761,00					0	20.866.761	2	41.126.061	0,00	40,73	
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan pemenuhan Hak Serta Kualitas Hidup Anak		Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	100	%	196.617.422,00			100	405.800.000,00	100	14.051.300,00	100	203.705.250,00					100	217.756.550	100	217.756.550	100,00	53,66	
			Persentase kekerasan terhadap Anak yang tertangani	100	%				100		100		100						100		100	0	100,00		

Kode	Sasaran	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD tahun s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**Nilai Evaluasi kabupaten Layak Anak (KLA)**	**800**	point	**116.617.422,00**	**523**	**205.787.100,00**	700	**272.200.000,00**	523	**0,00**	819	**155.072.150,00**					523	155.072.150	1,00	360.859.250	74,71	56,97	
		Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	**Jumlah lembaga/Institusi yang dibina**	**10**	**lembaga**	**22.934.921,00**	**9**	**137.761.800,00**	**10**	**216.550.000,00**		**0,00**	**10**	**152.972.150,00**					10	152.972.150	19	290.733.950	100,00	70,64	
		Advokasi kebijakan dan Pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah Media dan dunia Usaha	10	Organisasi	22.934.921,00	57	137.761.800,00	10	216.550.000,00		0,00	10	152.972.150,00					10	152.972.150	67	290.733.950	100,00	70,64	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Yang difasilitasi**	**10**	Lembaga	**93.682.501,00**	**10**	**68.025.300,00**	10	**55.650.000,00**		**0,00**		**2.100.000,00**					0	2.100.000	10	70.125.300	0,00	3,77	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	25	Dokumen	42.927.143,00	5	55.340.330,00	5	39.968.000,00		0,00		0,00					0	0	5	55.340.330	0,00	0,00	

Kode	Sasaran	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD tahun s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
		Penguatan jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	5	Dokumen	50.755.358,00	5	12.684.970,00	5	15.682.000,00		0,00		2.100.000,00					0	2.100.000	5	14.784.970	0,00	13,39	
		Program Perlindungan Khusus Anak	**Cakupan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan khusus**	**100**	%	**80.000.000,00**	**100**	**308.559.584,00**	100	**133.600.000,00**	100	**14.051.300,00**	100	**48.633.100,00**					100	62.684.400	100	371.243.984	100,00	46,92	
		Pencegahan kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Anak yang di koordinasikan**	**10**	Kasus	**80.000.000,00**	**17**	**251.162.773,00**	10	**133.600.000,00**		**14.051.300,00**	3	**48.633.100,00**					3	62.684.400	20	313.847.173	30,00	46,92	
		Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat Daerah yang mendapat Advokasi kebijakan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	55	OPD	80.000.000,00	11	180.872.878,00	55	133.600.000,00		14.051.300,00	5	48.633.100,00					5	62.684.400	16	243.557.278	9,09	46,92	
	Menurunnya Angka kelahiran		Angka kelahiran Total (TFR)	1,5		153.992.004,81			2	**683.846.000,00**	2,27	**55.831.326,00**	2,27	**147.108.809,00**					2,27	202.940.135	2	202.940.135	113,50	29,68	
		Program Pengendalian penduduk	**Angka kelahiran kasar**	**10**	%	**153.992.004,81**	**1,75**	**500.072.730,00**	10	**683.846.000,00**	1,75	**55.831.326,00**	1,75	**147.108.809,00**					1,75	202.940.135	4	703.012.865	17,50	29,68	
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengedalian Kuantitas Penduduk	**Jumlah Dokumen Yang di selaraskan**	**5**	Dokumen	**128.082.004,81**	**1**	**83.076.000,00**	5	**192.546.000,00**	0	**25.126.800,00**	0	**83.103.209,00**					0	108.230.009	1	191.306.009	0,00	56,21	

Kode	Sasaran	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD tahun s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design pembangunan kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	5	Dokumen	32.020.504,81			5	68.766.000,00		23.641.800,00		26.517.800					0	50.159.600	0	50.159.600	81,5	72,94	
		Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang kependudukan	Jumlah Survey/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang kependukan	5	Dokumen	32.020.500,00			5	0,00		0,00							0	0	0	0	0,00		
		Advokasi, sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan kependudukan Jalur Formal di satuan pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan, Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalujr Non Formal dan Informal	50	Satuan Pendidikan	32.020.500,00	20	83.076.000,00	50	75.000.000,00		0,00	10	31.075.200,00					10	31.075.200	30	114.151.200	20,00	41,43	
		Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Pemanfaatan kajian dampak kependudukan Beserta Model Solusi strategi Sebagai Peringatan Dini Dampak kependudukan Kepada pemangku Kepentingan	50	Organisasi	16.010.250,00			50	42.390.000,00		0,00		20.696.909					0	20.696.909	0	20.696.909	0,00	48,82	
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan rapat Pengendalian Program bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudian dan Keluarga berencana)	5	Laporan	16.010.250,00			5	6.390.000,00		1.485.000,00		4.813.300					0	6.298.300	0	6.298.300	0,00	98,56	

Kode	Sasaran	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD tahun s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Penduduk**	**1**	Dokumen	**25.910.000,00**	**5**	**416.996.730,00**	1	**491.300.000,00**	0	**30.704.526,00**	0	**64.005.600,00**					0	94.710.126	5	511.706.856	0,00	19,28	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	5	Laporan	6.000.000,00	4	85.422.965,00	5	28.950.000,00	1	6.124.419,00	1	6.744.800,00					2	12.869.219	6	98.292.184	40,00	44,45	
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan Informasi keluarga tersedianya	1	Dokumen	0,00	0	0,00	1	230.000.000,00	0	9.755.200,00		5.900.000,00					0	15.655.200	0	15.655.200	0,00	6,81	
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan Pencatatan dan pengumpulan Data keluarga	5	Laporan	6.000.000,00	5	166.739.565,00	5	208.050.000,00	1	14.824.907,00	1	34.747.200,00					2	49.572.107	7	216.311.672	40,00	23,83	
		Pengolahan dan Pelaporan Data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB	1	Dokumen	13.910.000,00	1	4.954.000,00	1	24.300.000,00				16.613.600,00					0	16.613.600	1	21.567.600	0	68,37	
	Menurunnya kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi / Unmet Need		Unmet Need peserta KB	3	%	3.304.559.300,00			5	2.527.077.000,00	11,55	**67.602.683,00**	11,55	**535.686.093,00**					11,55	603.288.776	12	603.288.776	231,00	23,87	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**Rasio Akseptor KB**	**77**	%	**3.249.713.300,00**	**72,52**	**3.623.305.597,00**	76,00	**2.094.877.000,00**	67,26	**63.002.683,00**	67,26	**462.368.193,00**					67,26	525.370.876	140	4.148.676.473	88,50	25,08	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Jumlah Peserta Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai kearifan Budaya Lokal**	**100**	Peserta	**746.473.650,00**	**40**	**815.303.136,00**	########	**734.800.000,00**	25	**8.590.683,00**		**56.443.317,00**					25	65.034.000	65	880.337.136	25,00	8,85	

Kode	Sasaran	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD tahun s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)	2	Balai	564.604.000,00	1	330.984.702,00	2	132.200.000,00	3	0,00		24.276.000,00					3	24.276.000	4	355.260.702	150,00	18,36	
		Pelaksanaan mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat Koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi desa (Rakordes), dan mini lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan Mekanisme Operasional Program Bangga kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga Berencana) melalui Rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	3	Laporan	124.869.650,00	3	277.645.426,00	3	262.600.000,00	1	8.590.683,00		11.788.317,00					1	20.379.000	4	298.024.426	33,33	7,76	
		pengendalian program KKBPK	Jumlah Laporan hasil Pengendalian program KKBPK	5	Laporan	12.000.000,00	4	57.529.808,00	5	140.000.000,00		0,00	0	20.379.000,00					0	20.379.000	4	77.908.808	0,00	14,56	
		promosi dan KIE proghram Bangga Kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah Dokumen promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elketronik serta Media Luar Ruangan	1	Dokumen	30.000.000,00	0	277.645.426,00	1	100.000.000,00		0,00	0	0,00					0	0	0	277.645.426	0,00	0,00	
		Advokasi program Bangga kencana oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholkder dan Moitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stakeholder dan Mitra kerja	21	Organisasi	15.000.000,00	7	547.200,00	21	100.000.000,00									0	0	7	547.200	0,00	0,00	

Kode	Sasaran	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD tahun s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB	**Jumlah tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PLKB/PKB)**	**288**	**orang**	**700.700.000,00**	**4**	**1.109.462.215,00**	**5**	**432.000.000,00**											4	1.109.462.215		0,00	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP)	288	orang	700.700.000,00	288	703.394.779,00	288	432.000.000,00											288	703.394.779		0,00	
		Pemberdayaan dan peningkatan peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat bDaerah Kabupaten/Kota Dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang berperan Dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**12**	**Organisasi**	**623.065.000,00**	**9**	**255.408.039,00**	**12**	**256.750.000,00**											9	255.408.039		0,00	
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12	Dokumen	620.065.000,00	1	102.058.179,00	1	3.750.000,00											1	102.058.179		0,00	
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Proghram Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	21	Kampung	3.000.000,00	0	128.270.000,00	21	253.000.000,00											0	128.270.000		0,00	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan KB di daerah Kabupaten dengan Kegiatan pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi**	**100**	%	**1.179.474.650,00**	**100**	**1.433.132.207,00**	100	**671.327.000,00**	25,64	**54.412.000,00**		**405.924.876,00**					25,64	460.336.876	126	1.893.469.083	25,64	68,57	

Kode	Sasaran	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD tahun s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjnag Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaring	Jumlah Laporan pengendalian pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke Fasilitasi kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	28	Laporan	1.051.565.000,00	68	103.665.050,00	28	72.220.000,00	15	17.859.192,00	16	35.861.192,00					31	53.720.384	99	157.385.434	110,71	74,38	
		Pembinaan Pelayanan Keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil Pembinaan pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan Reproduksi di Fasilitasi kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	28	Laporan	122.909.650,00	50	45.335.000,00	28	62.580.000,00	10	22.752.808,00	5	24.089.984,00					15	46.842.792	65	92.177.792	53,57	74,85	
		Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	1000	orang	5.000.000,00	1000	492.519.957,00	1000	536.527.000,00				126.020.000,00							1.000	492.519.957		0,00	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**Persentase Kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Aktif**	**100**	%	**54.846.000,00**	**100**	**1.454.291.589,00**	100	**432.200.000,00**		4.600.000,00		73.317.900,00					0	77.917.900	100	1.532.209.489	0,00	18,03	
		Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Cakupan pembangunan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**100**	%	**54.846.000,00**	**100**	**1.454.291.589,00**	100	**432.200.000,00**		**4.600.000,00**		**73.317.900,00**					0	77.917.900	100	1.532.209.489	0,00	18,03	
		Orientasi dan pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan pelatihan teknis Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan UPPKA)	100	Peserta	50.000.000,00	5	84.462.590,00	100	132.200.000,00		4.600.000,00		73.317.900,00					0	77.917.900	5	162.380.490	0,00	58,94	

Kode	Sasaran	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD tahun s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
		Pengadaan sarana kelompok Kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS dan usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)	6	Unit	4.846.000,00	6	379.833.000,00	6	300.000.000,00									0	0	6	379.833.000	0,00	0,00	
		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berperan Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga**	**38**	Kelompok	**0,00**	**0**	**0,00**	38	**1.209.600.000,00**		**0,00**							0	0	0	0	0,00	0,00	
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja, calon pengangtin/calon PUS, Ibu hamil, Pasca Salin/Kelahiran Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga ebresiko stunting ((termasuk remaja, calon pengangtin/calon PUS, Ibu hamil, Pasca Salin/Kelahiran Baduta/Balita)	1	Laporan	0,00	0	0,00	0	576.000.000,00									0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
		Pendampingan keluarga berisiko stunting (termasuk remaja, calon pengantin, calon PUS, Ibu hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	Jumlah keluarga beresiko stunting (termasuk remaja, calon pengantin, calon PUS, Ibu hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita) yang mendapatkan pendampingkan	1	Laporan	0,00	0	0,00		633.600.000,00									0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
		UPTD PPA																			0	0			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP**	**80**	**A**																				

Kode	Sasaran	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD tahun s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**76**	%	**434.353.213,00**	**72**	**23.368.200,00**	72	**69.601.000,00**		**12.260.000,00**	72	**13.910.000,00**					72	26.170.000	144	49.538.200	0	37,60	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	%	**367.724.075,00**	**68**	**9.287.400,00**	100	**53.461.000,00**	31	**12.260.000,00**	35	**13.910.000,00**					66	26.170.000	134	35.457.400	66,00	48,95	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	70	Paket	158.273.930,00	8	9.287.400,00	70	10.501.000,00		0,00		0,00					0	0	8	9.287.400	0,00	0,00	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Ceatakan dan Penggandaan yang disediakan	10	Paket	25.000.000,00	0	0,00	10	3.000.000,00		0,00		0,00					0	0	0	0	0,00	0,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485	Laporan	184.450.145,00	0	0,00	485	39.960.000,00	2	12.260.000,00	2	13.910.000,00					4	26.170.000	4	26.170.000	0,82	65,49	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	**Persentase jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	**100**	%	**9.000.000,00**	**0**	**590.000,00**	100	**1.140.000,00**		**0,00**		**0,00**					0	0	0	590.000	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	Lembar	9.000.000,00	1	590.000,00	150	1.140.000,00		0,00		0,00					100	0	100	590.000	66,67	0,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	**Persentase Sarana Prasarana Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100**	%	**57.629.138,00**	**0**	**13.490.800,00**	100	**15.000.000,00**		**0,00**		**0,00**					0	0	0	13.490.800	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanannya	7	Unit	57.629.138,00	0	13.490.800,00	7	15.000.000,00		0,00		0,00					0	0	0	13.490.800	0,00	0,00	
		Program Perlindungan Khusus Anak	**Cakupan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus**	**100**	%	**60.108.682,00**	**100**	**370.807.973,00**	100	**301.900.000,00**	13	**40.180.000,00**	22	**67.142.000,00**					35	107.322.000	135	478.129.973	35,00	35,55	

Kode	Sasaran	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD tahun s/d 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
		Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang nenerlukan koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Anak yang memrlukan Perlindungan Khusus yang dilayani**	**40**	**orang**	**60.108.682,00**	**10**	**370.807.973,00**	**40**	**301.900.000,00**	**5**	**40.180.000,00**	**4**	**67.142.000,00**					**9**	**107.322.000**	19	478.129.973	**22,50**	35,55	
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	40	orang	60.108.682,00	10	370.807.973,00	40	301.900.000,00	5	40.180.000,00	4	67.142.000,00					9	107.322.000	19	478.129.973	22,50	35,55	

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 86,69%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.898.896.156,- (Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus lima Puluh Enam Rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 16.157.805.917,-(Enam Belas Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah) atau sebesar 42,70%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Paser sebesar 30% dengan predikat kinerja sangat rendah.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 1 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 6 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 6 indikator capaian kinerja 0%-50% = 42 indikator.

2.2. Analisis capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Organoisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoodinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevalusai dan melaporkan pelaksanaa kebijakan dalam penyelnggaraan Urusan Pemerintah di Bidang penhendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
   (1). Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
   a. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana Pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
   b. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas bersadarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
   c. Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   d. Pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah di tetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;
   e. Penetapan standar operasional prosedur dan stnadar pelayanan di lingkumngan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
   f. Perumusan kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan, pengelolaan Sistem data Gender dan Anak, Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak;

g. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera, Pengarusutaman Gender, dan Pemberdayaan Perempuan, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera, Pengarusutaman Gender, dan Pemberdayaan Perempuan, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas guna mengetahui permasalahan yang di hadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;
k. Pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
l. Penyelengaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
m. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan;

n. Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Dinas;
o. Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD
p. Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pengarusutaman Gander, dan perlindungan Perempuan dan Anak.
q. Pelaksanaan penialian tugas bawahan melalui system penialian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
r. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan
s. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser adalah:

1. Pelayanan pemenuhan alat kotrasepsi dalam upaya pengendaian penduduk;
2. Perlayanan fasilitasi kelompok bina keluarga dalam pembinaan keluarga Sejahtera;
3. Pelayanan perlindungan anak;
4. Pelayanan perlindungan dan pemberdayaan Perempuan;
5. Pelayanan kesekretariatan; dan
6. Pelayanan Kasus pada UPTD PPA.

Upaya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Persentase Perempuan Dalam Legislatif;
2. Persentase Perempuan Dalam Jabatan Tenaga Profesional;
3. Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan;
4. Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani;
5. Persentase Kekerasan Terhadap anak yang tertangani;
6. Angka Kelahiran Total TFR);
7. Unmet Need Peserta KB; dan
8. Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP.

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

T-C.30

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcames)/Kegiatan (Output)		SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Realisasi S/d TW II Tahun 2024	Capaian Kinerja s/d Tw II Tahun 2024 (%)	Catatan Analisis
						Tahun 2022 (Tahun n-3)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n-1)			
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*		*14*
	Tujuan : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan	**IDG**				**68**	**71**	**74**	**77**	**80**	**64,94**	**68,35**	**68,35**	**92,36**	
I	**Sasaran: Meningkatnya Kesetaraan Gender**	**Persentase Perempuan Dalam Legislatif**	**%**			**20**	**20**	**20**	**23**	**23**	**20**	**23,33**	**23,33**	**116,65**	
II		**Persentase Perempuan Dalam Jabatan Tenaga Profesional**	**%**			**43,59**	**43,59**	**43,59**	**44,59**	**44,59**	**53,8**	**51,44**	**51,44**	**118,01**	
III		**Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam pemerintah**	**%**			**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**23,24**	**23,75**	**23,75**	**87,96**	
A					**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**						**44%**	**5,50%**			
1					Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG						17 PD	22 PD			

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcames)/Kegiatan (Output)		SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Realisasi S/d TW II Tahun 2024	Capaian Kinerja s/d Tw II Tahun 2024 (%)	Catatan Analisis
						Tahun 2022 (Tahun n-3)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n-1)			
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*		*14*
2					Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota						2 Program	2 Program			
3					Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan						4 lembaga	10 Lembaga			
4					Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih						50 Orang	0			
5					Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan						2 Lembaga	10 Organisasi Wanita			
6					Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota						2 Lembaga	2 Lembaga			
	Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	**IPG**				**75**	**78**	**84**	**87**	**89**	**64,94**	**68,35**	**68,35**	**81,37**	

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcames)/Kegiatan (Output)		SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Realisasi S/d TW II Tahun 2024	Capaian Kinerja s/d Tw II Tahun 2024 (%)	Catatan Analisis
						Tahun 2022 (Tahun n-3)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n n-1)			
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*		*14*
IV	**Sasaran : Meningkatnya perlindungan perempuan dan pemenuhan Hak serta kualitas hidup Anak**	**Indeks Kepuasan Layanan Perlindungan Anak dan perempuan**	%			**82**	**83**	**85**	**87**	**89**	**82**	**30**		**0,00**	
V		**Persentase kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani**	%			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**			**100**	**100,00**	
B					**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**						**10,52**	**0,006 825**			
1					Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi						4 Kebijakan	2 Kebijakan			
2					Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi						0	1 Lembaga			
3					Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani						100%	100%			

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcames)/Kegiatan (Output)		SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Realisasi S/d TW II Tahun 2024	Capaian Kinerja s/d Tw II Tahun 2024 (%)	Catatan Analisis
						Tahun 2022 (Tahun n-3)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n-1)			
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*		*14*
	Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	**IPG**				**75**	**78**	**84**	**87**	**89**	**64,94**	**68,35**	**68,35**	**81,37**	
VI	**Sasaran : Meningkatnya perlindungan perempuan dan pemenuhan Hak serta kualitas hidup Anak**	**Proporsi Perempuan Usia 20-24 Tahun menikah < Usia 18 Tahun**	**%**			**0,56**	**0,54**	**0,52**	**0,45**	**0,42**	**0,56**	**0,01**		**0,00**	
VII		**Persentase kekerasan Terhadap Anak yang Tertangani**	**%**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**			**100**	**100,00**	
C					**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten**						**100%**	**100%**			
1					Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak						0	18			

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcames)/Kegiatan (Output)		SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Realisasi S/d TW II Tahun 2024	Capaian Kinerja s/d Tw II Tahun 2024 (%)	Catatan Analisis
						Tahun 2022 (Tahun n-3)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n-1)			
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*		*14*
2					Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal						0	1			
3					Persentase korban kekerasan anak yang terlayani						50,75	100%			
4					Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan						1	3			
5					Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)						1	1			
	Tujuan : Mengendalikan pertumbuhan penduduk	**Laju Pertumbuhan Penduduk**				**1,95**	**1,9**	**1,85**	**1,83**	**1,8**	**2,27**	**2,19**	**2,19**	**81,62**	
VIII	**Sasaran : Menurunnya angka kelahiran**	**Jumlah Angka Kjelahiran Total (TFR)**	**%**			**2,1**	**2,1**	**2**	**1,5**	**1,5**	**2,27**	**2,19**	**2,19**	**90,50**	
D					**TFR (Angka Kelahiran Total)**						**2,27**	**2,19**			
1					Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan							3 Dokumen			

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcames)/Kegiatan (Output)		SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Realisasi S/d TW II Tahun 2024	Capaian Kinerja s/d Tw II Tahun 2024 (%)	Catatan Analisis
						Tahun 2022 (Tahun n-3)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n-1)			
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*		*14*
2					Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun							60,95			
3					Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)							23,9			
4					Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)							0			
5					Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK							0			
	Tujuan : Mengendalikan pertumbuhan penduduk	**Laju Pertumbuhan Penduduk**				**1,95**	**1,9**	**1,85**	**1,83**	**1,8**	**2,27**	**2,19**	**2,19**	**81,62**	
IX	**Sasaran : Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ UnmetNeed**	**Unmet Need Peserta KB**	**%**			**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**17,5**	**11,83**	**11,83**	**-37,00**	

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcames)/Kegiatan (Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Realisasi S/d TW II Tahun 2024	Capaian Kinerja s/d Tw II Tahun 2024 (%)	Catatan Analisis
					Tahun 2022 (Tahun n-3)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n-1)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*		*14*
E				**Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)**						**60,46**	**55,22**			
1				Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP						93,9	54,1			
2				Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						60,89	72,52			
3				Pemerintah Daerah kab/kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif						144 Kelompok	21 Kelompok			
4				Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan						75,82	25,8			
F				**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)**						**27,85**	**11,55**			
1				Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah										
2				Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)						31,1	64,17			

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcames)/Kegiatan (Output)		SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Realisasi S/d TW II Tahun 2024	Capaian Kinerja s/d Tw II Tahun 2024 (%)	Catatan Analisis
						Tahun 2022 (Tahun n-3)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n-1)			
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*		*14*
	Tujuan : Meningkatnya tata Kelola Perangakat Daerah yang responsive dan Tangkas	**Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi**				**60 (CC)**	**65 (CC)**	**70**	**75 (B)**	**80 (A)**	**65,83**	**69,93**	**69,93**	**99,90**	
X	**Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP**				**60 (CC)**	**65 (CC)**	**70**	**75 (B)**	**80 (A)**	**65,83**	**69,93**	**69,93**	**99,90**	

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, pencapaian targhet tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser sampai dengan triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagaiberikut :

a. Tujuan “Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan ” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “ IDG ”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 68,35 dari target sebesar 74 dengan capaian kinerja sebesar 92,36%

   Tujuan “ Meningkatnya Kuliatas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak” memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu IPG “ telah mecapai target, dimana realisasi 73,15 dari target sebesar 84 dengan capaian kinerja sebesar 87,08%

   Tujuan “ Pengendalian Pertumbuhan Penduduk” memilik 1 indikator kinerja yaitu “ Laju Pertumbuhan Penduduk”, telah mencapai target, diman realisasi 2,27 dari target sebesar 1,85 dengan capaian kinerja sebesar 77,30%

   Tujuan “Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang responsive dan tangkas” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “ Penilaian Mandiri Repormasi Birokrasi”, telah mencapai target dimana realisasi 65,83 (CC) dari target sebesar 70(B) dengan capaian kinerja sebesar 94,04%;

b. Sasaran “Meningkatnya Kesetaraan gender ” memiliki 3 indikator kinerja yaitu :

   1. Persentase Perempuan Dalam Legislatif”, telah melampaui capaian target, dimana realisasinya sebesar 30 dari target sebesar 20 .dengan capaian kinerja sebesar 150 %
   2. Persentase Perempuan dalam jabatan tenaga profesional, telah telah melampaui capaian target , dimana realisasinya sebesar 51,44 dari target sebesar 43,59 dengan capaian kinerja sebesar 118,01%,

3. Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam pemerintah, telah telah mencapai target , dimana realisasinya sebesar 23,75 dari target sebesar 27 dengan capaian kinerja sebesar 87,96%,

Sasaran “meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak serta Kualitas hidup Anak ” memiliki 2 indikator kinerja yaitu :

1. Persentase kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100 dari target sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100 %
2. Persentase kekerasan Terhadap anak yang Tertangani”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100 dari target sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100%

Sasaran “Menurunnya Angka Kelahiran ” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Angka Kelahiran total (TFR) ”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 2,27 dari target sebesar 2 dengan capaian kinerja sebesar 87,50%

Sasaran “Menurunnya Menurunnya Kebutuhan Ber -KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need ” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Unmet Need Peserta KB ”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 11,83 dari target sebesar11 dengan capaian kinerja sebesar 92,45%

Sasaran “Menurunnya Menurunnya Kebutuhan Ber -KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need ” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Unmet Need Peserta KB ”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 11,83 dari target sebesar11 dengan capaian kinerja sebesar 92,45%

Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP ”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 65,83 dari target sebesar70 dengan capaian kinerja sebesar 94,04%

2.3. Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 30% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah dalam Program Kependudukan Serta Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Dukungan yang tinggi dari lintas sertoral terkait dan mitra terkait;
3. Tersedianya regulasi dalam program kependudukan.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Terbatasnya sumber daya manusia di bidang pembangunan kependudukan serta pembnerdayaan perempuan dan perlindungajn anak;
2. Terbatasnya anggaran dalam program kependudukan dan pemberdayaan perempuan dan perlindumngan anak;
3. Geografi yang sebagian sulit serta wilayah daerah yang sangat luas; dan
4. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam program kependudukan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungananak serta pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Target	
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Tujuan : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan	IDG			74	74
Sasaran 1.1 Meningkatnya Kesetaraan Gender	Persentaser Perempuan dalam legislatif	$\frac{\sum Perempuan\ yang\ Produktif\ di\ legislatif}{\sum Anggota\ Dewan\ Yang\ Duduk} x\ 100$	keterwakilan perempuan dilembaga Legislatif dapat berperan dan partisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan. Sehingga ketika kebijakankebijakan yang dibuat dapat mendukung perspektif gender. Dalam hal ini perempuan terlibat dalam proses pembuatan keputusan, sehingga dapat masuk ke dalam sektor-sektor strategis, dalam jangka panjang	20	20
	Persensate perempuan dalam jabatan tenaga profesional	$\frac{\sum Perempuan\ yang\ menduduki\ jabatan\ Tenaga\ Profesional}{\sum jabartan\ Tenaga\ Profesional\ yang\ ada} x\ 100$	Umumnya Perempuan yang memiliki jabatan tenaga Profesional dalam kehidupannya mempraktikkan keahlian khusus dan menjalankannya, memiliki keahlian tertentu dan juga semangat untuk melakukan kegiatan kerja. Bertindak objektif dalam setiap pengambilan keputusan	43,59	43,59
	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam pemerintah	$\frac{\sum Kelompok\ Uasaha\ Perempuan}{\sum Kelompok\ Usaha} x\ 100$	Sumbangan pendapatan perempuan merupakan salah satu dari indikator yang dipakai untuk menghitung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Yang mana perempuan Indonesia berkontribusi terhadap pendapatan keluarga	27	27
Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	IPG			84	84

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Target	
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Sasaran 2.1 Meningkatnya perlindungan perempuan dan pemenuhan Hak serta kualitas hidup Anak	Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	$\frac{\Sigma \text{ Perempuan Korban Kekerasan}}{\Sigma \text{ Perempuan korban kekerasan yang di tangani}} x\,100$	Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik	100	100
	Persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani	$\frac{\Sigma \text{ Anak Korban Kekerasan}}{\Sigma \text{ Anak korban kekerasan yang di tangani}} x\,100$	Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.	100	100
Tujuan : Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk			1,85	1,85

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Target	
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Sasaran 3.1 Menurunnya angka kelahiran	Jumlah angka kelahiran total (TFR)	$TFR = 5\sum_{i=1}^{7} ASFR\ i$ $ASFRi = \frac{bi}{F\ pi} X\ K$ Angka Kelahiran Remaja Umur 15 – 19 Tahun (ASPR) TFR= Angka Kelahiran Total ASFRi = Angka Kelahiran Menurut Kelompok umur b i= Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok um pada tahun tertentu p i= Jumlah Penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengah tahun yang sama i= Kelompok umur (i = 1 untuk kelompok umur 15 – 19 1 = 2 untuk kelompok umur 20 -24 i= 7 untuk kelompok umur 45 -49 K= Bilangan Konstanta biasanya 1000	Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seoramg ibu selama masa refroduksi, yaitu sejak awal usia subur sampai akhir nasa reproduksinya	2	2
Sasaran 3.2 Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ UnmetNeed	Unmet Need Peserta KB	$\frac{\sum Akseptor\ Tidak\ Ingin\ Anak\ Lagi}{\sum PUS\ ber\ KB} X\ 100$	PUS yg tidak menggunakan alat kontrasepsi atau tdk Ber KB dg berbagai alasan 1. Kurang pengetahuan tentang pentingnya ber-KB 2. Akses untuk ber KB yang sulit 3. Tidak ada petugas 4. dan alasan lainnya	5	11
Tujuan : Meningkatnya tata Kelola Perangakat Daerah yang responsive dan Tangkas	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi			70(B)	70(B)
Sasaran 4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP	Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Definisi Oprasional : Nilai SAKIP merupakan hasil Evaluasi atas komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	70(B)	70(B)

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa terget tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2024 telah mengalami peruabhan pada indicator sasaran Unmet Need Peserta KB yang sebelumnya target kinerja 5(Lima) menjadi 11 (Sebelas).

Meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini di karenakan perubahan anggaran di maksud di arahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu ““PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER”” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air

Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing Priorotas Daerah Kabupaten Paser di tuangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian.
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke 3 (tiga) , yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel.3.2

Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

T-C . 31

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*		*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*		*-11*
						16.157.805.917,00						**20.670.648.817,00**
						11.365.781.917,00						13.669.403.807,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	72	%	**9.591.981.917,00**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	72	%	**12.598.174.817,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**65,83**	**B**	**272.674.026,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**65,83**	**B**	**1.122.674.026,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan perangkat Daerah	6	Dokumen	232.247.556,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan perangkat Daerah	6	Dokumen	382.247.556,00

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Evaluasi Kinjerja perangkat Daerah		Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	4	Laporan	40.426.470,00	Evaluasi Kinjerja perangkat Daerah		Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	4	Laporan	740.426.470,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun**	100	%	**8.738.701.971,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun**	100	%	**10.388.701.971,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjnagan ASN	14	Bulan	8.585.101.971,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjnagan ASN	14	Bulan	10.085.101.971,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	10	Dokumen	153.600.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	10	Dokumen	303.600.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase Dokumen dan pelaporan Barang Milik Daerah perangkat daerah yang tersusun**	100	%	**53.548.720,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen dan pelaporan Barang Milik Daerah perangkat daerah yang tersusun**	100	%	**203.548.720,00**

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	1	Dokumen	53.548.720,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	1	Dokumen	203.548.720,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	%	**376.560.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	%	**636.000.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10	Jenis	3.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10	Jenis	6.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	70	Paket	148.600.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	70	Paket	250.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Ceatakan dan Penggandaan yang disediakan	10	Paket	14.960.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Ceatakan dan Penggandaan yang disediakan	10	Paket	30.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485	Laporan	210.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485	Laporan	350.000.000,00

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	**100**	**%**	**10.247.100,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	**100**	**%**	**20.000.000,00**
	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya		Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8	Unit	10.247.100,00	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya		Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8	Unit	20.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		**Persentase jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	**100**	**%**	**90.465.900,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah**		**Persentase jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	**100**	**%**	**130.465.900,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150,00	Lembar	45.465.900,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150,00	Lembar	65.465.900,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	45.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	65.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		**Persentase Sarana Prasarana Penunjang Urusan pemerintahan**	100	%	**49.784.200,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**		**Persentase Sarana Prasarana Penunjang Urusan pemerintahan**	100	%	**96.784.200,00**

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Pemeliharaan Daerah		**Daerah yang terpelihara**				**Pemeliharaan Daerah**		**Daerah yang terpelihara**			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanannya	7	Unit	36.784.200,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanannya	7	Unit	56.784.200,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	8	Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	8	Unit	10.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	20.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1,00	Unit	3.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1,00	Unit	10.000.000,00
	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan		Persentase Perempuan Dalam legislatif	20	%	1.163.171.010,00	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan		Persentase Perempuan Dalam legislatif	20	%	1.713.171.010,00

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
			Persentase perempuan dalam Jabatan Tenaga Profesional	43,59	%				Persentase perempuan dalam Jabatan Tenaga Profesional	43,59	%	
			persentase Sumbangan Perempuan Dalam pemerintahan	26	%				persentase Sumbangan Perempuan Dalam pemerintahan	26	%	
	Program Pengarusutamanaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase Partisipasi perempuan	43,50	%	**1.163.171.010,00**	**Program Pengarusutamanaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**		Persentase Partisipasi perempuan	43,50	%	**1.713.171.010,00**
			Persentase Perangkat daerah yang Melaksanakan PPRG	83,33	%				Persentase Perangkat daerah yang Melaksanakan PPRG	83,33	%	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota		**Persentase pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	100	%	**359.571.010,00**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota**		**Persentase pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	100	%	**659.571.010,00**

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) kewenangan Kabupaten	20	Perangkat Daerah	319.995.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) kewenangan Kabupaten	20	Perangkat Daerah	469.995.000,00
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif gender	20	Perangkat Daerah	39.576.010,00	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif gender	20	Perangkat Daerah	189.576.010,00
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan		**Jumlah Organisasi Masyarakat yang di Fasilitasi**	60	Ormas	**53.600.000,00**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan**		**Jumlah Organisasi Masyarakat yang di Fasilitasi**	60	Ormas	**203.600.000,00**

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Kewenangan Kabupaten / Kota						**Kewenangan Kabupaten / Kota**					
	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Lembaga	53.600.000,00	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Lembaga	203.600.000,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan**	32	Lembaga	**750.000.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan**	32	Lembaga	**850.000.000,00**

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Advokasi kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10	Lembaga	550.000.000,00	Advokasi kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10	Lembaga	550.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Mendapat Peningkatan	800	Orang	200.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Mendapat Peningkatan	800	orang	300.000.000,00
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Serta Kualitas Hidup Anak		Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	100	%	100.000.000,00	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Serta Kualitas Hidup Anak		Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	100	%	300.000.000,00
			Persentase kekerasan terhadap Anak yang tertangani	100	%				Persentase kekerasan terhadap Anak yang tertangani	100	%	
	Program Perlindungan Perempuan		**Cakupan Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan Penanganan**	100	%	**100.000.000,00**	**Program Perlindungan Perempuan**		**Cakupan Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh**	100	%	**300.000.000,00**

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
			Pengaduan Oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan						**petugas terlatih di dalam Unit pelayanan**			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah kabupaten/Kota		**Jumlah lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang di Fasilitasi**	60,00	%	**100.000.000,00**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah kabupaten/Kota**		**Jumlah lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang di Fasilitasi**	60,00	%	**300.000.000,00**
	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan Korban kekerasan kewennagan Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas	50	Orang	100.000.000,00	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan Korban kekerasan kewennagan Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas	50	orang	300.000.000,00
	Meningkatkan Pemberdayaan perempuan		Persentase Perempuan Dalam legislatif	20	%	104.828.990,00	Meningkatkan Pemberdayaan perempuan		Persentase Perempuan Dalam legislatif	20	%	404.828.990,00
			Persentase perempuan dalam Jabatan Tenaga Profesional	43,59	%				Persentase perempuan dalam Jabatan Tenaga Profesional	43,59	%	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
			persentase Sumbangan Perempuan Dalam pemerintahan	26	%				persentase Sumbangan Perempuan Dalam pemerintahan	26	%	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi keluarga yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan**	40	%	**53.600.000,00**	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**		**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi keluarga yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan**	40	%	**203.600.000,00**
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/kota		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga KG dan Hak Anak yang difasilitasi**	10	Lembaga	**53.600.000,00**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/kota**		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga KG dan Hak Anak yang difasilitasi**	10	Lembaga	**203.600.000,00**
	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupatenn /Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga	5	Dokumen	53.600.000,00	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupatenn /Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga	5	Dokumen	203.600.000,00

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
			kewenangan Kabupaten/Kota						kewenangan Kabupaten/Kota			
	Program pengelola Sistem Data Gender dan ANAK		**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Sistem data Gender atau Data Anak**	83	%	**51.228.990,00**	**Program pengelola Sistem Data Gender dan ANAK**		**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Sistem data Gender atau Data Anak**	83	%	**201.228.990,00**
	Pengumpulan Pengelolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di tingkat Daerah Kabupaten /Kota		**Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak**	1	Dokumen	51.228.990,00	**Pengumpulan Pengelolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di tingkat Daerah Kabupaten /Kota**		**Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak**	1	Dokumen	201.228.990,00
	Penyediaan Data Gender dan Anak kewenangan Kabupaten /Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	5	Dokumen	51.228.990,00	Penyediaan Data Gender dan Anak kewenangan Kabupaten /Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	5	Dokumen	201.228.990,00
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan pemenuhan Hak		Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	100	%	405.800.000,00	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan pemenuhan Hak		Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	100	%	855.800.000,00

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Serta Kualitas Hidup Anak		Persentase kekerasan terhadap Anak yang tertangani	100	%		Serta Kualitas Hidup Anak		Persentase kekerasan terhadap Anak yang tertangani	100	%	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		**Nilai Evaluasi kabupaten Layak Anak (KLA)**	700	Point	**272.200.000,00**	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**		**Nilai Evaluasi kabupaten Layak Anak (KLA)**	700	point	**572.200.000,00**
	Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota		**Jumlah lembaga/Institusi yang dibina**	**10**	**lembaga**	**216.550.000,00**	**Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota**		**Jumlah lembaga/Institusi yang dibina**	**10**	**lembaga**	**216.550.000,00**
	Advokasi kebijakan dan Pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah Media dan dunia Usaha	10	Organisasi	216.550.000,00	Advokasi kebijakan dan Pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah Media dan dunia Usaha	10	Organisasi	216.550.000,00

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Yang difasilitasi**	10	Lembaga	**55.650.000,00**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Yang difasilitasi**	10	Lembaga	**355.650.000,00**
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	39.968.000,00	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	189.968.000,00
	Penguatan jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	5	Dokumen	15.682.000,00	Penguatan jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	5	Dokumen	165.682.000,00

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Program Perlindungan Khusus Anak		**Cakupan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan khusus**	100	%	**133.600.000,00**	**Program Perlindungan Khusus Anak**		**Cakupan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan khusus**	100	%	**283.600.000,00**
	Pencegahan kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Anak yang di koordinasikan**	10	Kasus	**133.600.000,00**	**Pencegahan kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Anak yang di koordinasikan**	10	Kasus	**283.600.000,00**
	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat Daerah yang mendapat Advokasi kebijakan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	55	OPD	133.600.000,00	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat Daerah yang mendapat Advokasi kebijakan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	55	OPD	283.600.000,00
						4.420.523.000,00						**4.239.033.000,00**
	Menurunnya Angka kelahiran		Angka kelahiran Total (TFR)	2		**683.846.000,00**	Menurunnya Angka kelahiran		Angka kelahiran Total (TFR)	2		**1.076.756.000,00**

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Program Pengendalian penduduk		**Angka kelahiran kasar**	10	%	**683.846.000,00**	**Program Pengendalian penduduk**		**Angka kelahiran kasar**	10	%	**1.076.756.000,00**
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengedalian Kuantitas Penduduk		**Jumlah Dokumen Yang di selaraskan**	5	Dokumen	**192.546.000,00**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengedalian Kuantitas Penduduk**		**Jumlah Dokumen Yang di selaraskan**	5	Dokumen	**386.156.000,00**
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design pembangunan kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	5	Dokumen	68.766.000,00	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design pembangunan kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	5	Dokumen	118.766.000,00
	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang kependudukan		Jumlah Survey/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang kependukan	5	Dokumen	17.520.000,00	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang kependudukan		Jumlah Survey/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang kependukan	5	Dokumen	67.520.000,00

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
	Advokasi, sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan kependudukan Jalur Formal di satuan pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal		Jumlah satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan, Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalujr Non Formal dan Informal	50	Satuan Pendidikan	75.000.000,00	Advokasi, sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan kependudukan Jalur Formal di satuan pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal		Jumlah satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan, Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalujr Non Formal dan Informal	50	Satuan Pendidikan	105.000.000,00
	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Pemanfaatan kajian dampak kependudukan Beserta Model Solusi strategi Sebagai Peringatan Dini Dampak kependudukan Kepada pemangku Kepentingan	50	Organisasi	24.870.000,00	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Pemanfaatan kajian dampak kependudukan Beserta Model Solusi strategi Sebagai Peringatan Dini Dampak kependudukan Kepada pemangku Kepentingan	50	Organisasi	74.870.000,00

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana		Jumlah Laporan rapat Pengendalian Program bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudian dan Keluarga berencana)	5	Laporan	6.390.000,00	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana		Jumlah Laporan rapat Pengendalian Program bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudian dan Keluarga berencana)	5	Laporan	20.000.000,00
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Penduduk**	1	Dokumen	**491.300.000,00**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Penduduk**	1	Dokumen	**690.600.000,00**
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	5	Laporan	28.950.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	5	Laporan	78.250.000,00
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Jumlah data dan Informasi keluarga tersedianya	1	Dokumen	230.000.000,00	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Jumlah data dan Informasi keluarga tersedianya	1	Dokumen	230.000.000,00
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Jumlah laporan Pencatatan dan pengumpulan Data keluarga	5	Laporan	208.050.000,00	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Jumlah laporan Pencatatan dan pengumpulan Data keluarga	5	Laporan	208.050.000,00

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Pengolahan dan Pelaporan Data pengendalian lapangan dan pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB	1	Dokumen	24.300.000,00	Pengolahan dan Pelaporan Data pengendalian lapangan dan pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB	1	Dokumen	174.300.000,00
	Menurunnya kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi / Unmet Need		Unmet Need peserta KB	5	%	3.736.677.000,00	Menurunnya kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi / Unmet Need		Unmet Need peserta KB	5	%	3.162.277.000,00
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		**Rasio Akseptor KB**	76,00	%	**2.094.877.000,00**	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**		**Rasio Akseptor KB**	76,00	%	**2.730.077.000,00**
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		**Jumlah Peserta Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai kearifan Budaya Lokal**	100,00	Peserta	**734.800.000,00**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**Jumlah Peserta Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai kearifan Budaya Lokal**	100,00	Peserta	**1.184.800.000,00**
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan	2	Balai	132.200.000,00	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan	2	Balai	232.200.000,00

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
			keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)						keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)			
	Pelaksanaan mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat Koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi desa (Rakordes), dan mini lokakarya (Minilok)		Jumlah laporan Mekanisme Operasional Program Bangga kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga Berencana) melalui Rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	3	Laporan	262.600.000,00	Pelaksanaan mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat Koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi desa (Rakordes), dan mini lokakarya (Minilok)		Jumlah laporan Mekanisme Operasional Program Bangga kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga Berencana) melalui Rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	3	Laporan	262.600.000,00
	pengendalian program KKBPK		Jumlah Laporan hasil Pengendalian program KKBPK	5	Laporan	140.000.000,00	pengendalian program KKBPK		Jumlah Laporan hasil Pengendalian program KKBPK	5	Laporan	290.000.000,00

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
	promosi dan KIE proghram Bangga Kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang		Jumlah Dokumen promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elketronik serta Media Luar Ruangan	1	Dokumen	100.000.000,00	promosi dan KIE proghram Bangga Kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang		Jumlah Dokumen promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elketronik serta Media Luar Ruangan	1	Dokumen	200.000.000,00
	Advokasi program Bangga kencana oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholkder dan Moitra Kerja		Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stakeholder dan Mitra kerja	21	Organisasi	100.000.000,00	Advokasi program Bangga kencana oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholkder dan Moitra Kerja		Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stakeholder dan Mitra kerja	21	Organisasi	200.000.000,00
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB		**Jumlah tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PLKB/PKB)**	**5**	**Orang**	**432.000.000,00**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB**		**Jumlah tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PLKB/PKB)**	**5**	**orang**	**432.000.000,00**

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP)	288	Orang	432.000.000,00	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP)	288	orang	432.000.000,00
	Pemberdayaan dan peningkatan peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat bDaerah Kabupaten/Kota Dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		**Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang berperan Dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**12**	**Organisasi**	**256.750.000,00**	**Pemberdayaan dan peningkatan peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat bDaerah Kabupaten/Kota Dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		**Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang berperan Dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**12**	**Organisasi**	**256.750.000,00**
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	Dokumen	3.750.000,00	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	Dokumen	3.750.000,00
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Proghram Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga	21	Kampung	253.000.000,00	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Proghram Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga	21	Kampung	253.000.000,00

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
			Berencana) di Kampung KB						Berencana) di Kampung KB			
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		**Cakupan pelayanan KB di daerah Kabupaten dengan Kegiatan pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi**	100	%	**671.327.000,00**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan pelayanan KB di daerah Kabupaten dengan Kegiatan pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi**	100	%	**856.527.000,00**
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjnag Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaring		Jumlah Laporan pengendalian pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke Fasilitasi kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	28	Laporan	72.220.000,00	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjnag Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaring		Jumlah Laporan pengendalian pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke Fasilitasi kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	28	Laporan	159.720.000,00

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Pembinaan Pelayanan Keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah laporan hasil Pembinaan pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan Reproduksi di Fasilitasi kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	28	Laporan	62.580.000,00	Pembinaan Pelayanan Keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah laporan hasil Pembinaan pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan Reproduksi di Fasilitasi kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	28	Laporan	160.280.000,00
	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang		Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	1000	orang	536.527.000,00	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang		Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	1000	orang	536.527.000,00
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		**Persentase Kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Aktif**	**100**	**%**	**1.641.800.000,00**	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**		**Persentase Kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Aktif**	**100**	**%**	**432.200.000,00**
	Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		**Cakupan pembangunan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	100	%	**432.200.000,00**	**Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Cakupan pembangunan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	100	%	**432.200.000,00**

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Orientasi dan pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan pelatihan teknis Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan UPPKA)	100	Peserta	132.200.000,00	Orientasi dan pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan pelatihan teknis Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan UPPKA)	100	Peserta	132.200.000,00
	Pengadaan sarana kelompok Kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS dan usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)	6	Unit	300.000.000,00	Pengadaan sarana kelompok Kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS dan usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)	6	Unit	300.000.000,00
	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan		**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berperan Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga**	38	Kelompok	**1.209.600.000,00**	**Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan**		**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berperan Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga**	38	Kelompok	**1.209.600.000,00**

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
	kesejahteraan Keluarga						**kesejahteraan Keluarga**					
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja, calon pengangtin/calon PUS, Ibu hamil, Pasca Salin/Kelahiran Baduta/Balita)		Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga ebresiko stunting ((termasuk remaja, calon pengangtin/calon PUS, Ibu hamil, Pasca Salin/Kelahiran Baduta/Balita)	1	Laporan	576.000.000,00	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja, calon pengangtin/calon PUS, Ibu hamil, Pasca Salin/Kelahiran Baduta/Balita)		Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga ebresiko stunting ((termasuk remaja, calon pengangtin/calon PUS, Ibu hamil, Pasca Salin/Kelahiran Baduta/Balita)	1	Laporan	576.000.000,00
	Pendampingan keluarga berisiko stunting (termasuk remaja, calon pengantin, calon PUS, Ibu hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)		Jumlah keluarga beresiko stunting (termasuk remaja, calon pengantin, calon PUS, Ibu hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita) yang mendapatkan pendampingkan	1	Laporan	633.600.000,00	Pendampingan keluarga berisiko stunting (termasuk remaja, calon pengantin, calon PUS, Ibu hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)		Jumlah keluarga beresiko stunting (termasuk remaja, calon pengantin, calon PUS, Ibu hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita) yang mendapatkan pendampingkan	1	Laporan	633.600.000,00

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
	UPTD PPA					**371.501.000,00**	**UPTD PPA**					**559.641.000,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	72	%	**69.601.000,00**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	72	%	**109.641.000,00**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	%	**53.461.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	%	**93.501.000,00**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	70	Paket	10.501.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	70	Paket	10.501.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Ceatakan dan Penggandaan yang disediakan	10	Paket	3.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Ceatakan dan Penggandaan yang disediakan	10	Paket	3.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485	Laporan	39.960.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485	Laporan	80.000.000,00

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		**Persentase jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	100	%	**1.140.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah**		**Persentase jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	100	%	**1.140.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	Lembar	1.140.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	Lembar	1.140.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah		**Persentase Sarana Prasarana Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang terpelihara**	100	%	**15.000.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah**		**Persentase Sarana Prasarana Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang terpelihara**	100	%	**15.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanannya	7	Unit	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanannya	7	Unit	15.000.000,00
	Program Perlindungan Khusus Anak		**Cakupan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus**	100	%	**301.900.000,00**	**Program Perlindungan Khusus Anak**		**Cakupan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus**	100	%	**450.000.000,00**

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang nenerlukan koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Anak yang memrlukan Perlindungan Khusus yang dilayani**	**40**	**orang**	**301.900.000,00**	**Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang nenerlukan koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Anak yang memrlukan Perlindungan Khusus yang dilayani**	**40**	**orang**	**450.000.000,00**
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	40	orang	301.900.000,00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	40	orang	450.000.000,00

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

T-C.33.

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA							11.015.184.094,00	15.886.304.917,00	17.336.304.917,00							17.058.097.217,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.015.184.094,00	15.886.304.917,00	17.336.304.917,00							17.058.097.217,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							10.119.238.094,00	11.465.781.917,00	12.915.781.917,00							12.455.168.897,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks kepuasan pelayanan masyarakat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik				74 85 % %	74 85 % %	8.495.438.094,00	9.591.981.917,00	11.041.981.917,00							11.209.808.676,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Nilai Repormasi Birokrasi	-			B	B	272.674.026,00	272.674.026,00	272.674.026,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	OPD/ Dokumen SAKIP		281.443.220,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	232.247.556,00	232.247.556,00	232.247.556,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			259.247.556,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	40.426.470,00	40.426.470,00	40.426.470,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			22.195.664,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	7.642.158.148,00	8.738.701.971,00	8.738.701.971,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	Perangkat daerah		10.143.219.487,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	7.488.558.148,00	8.585.101.971,00	9.985.101.971,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			9.985.101.971,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	153.600.000,00	153.600.000,00	153.600.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			158.117.516,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Yang Tersusun	-			1 Dokumen	1 Dokumen	54.545.920,00	53.548.720,00	53.548.720,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Dokumen		23.650.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	54.545.920,00	53.548.720,00	53.548.720,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			23.650.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Perangkat Daerah		103.515.609,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			103.515.609,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	381.560.000,00	381.560.000,00	381.560.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Perangkat Daerah		461.699.504,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			3.295.072,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			21.589.994,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				70 Paket	70 Paket	148.600.000,00	148.600.000,00	148.600.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			152.101.323,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	14.960.000,00	14.960.000,00	14.960.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			23.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				485 Laporan	485 Laporan	215.000.000,00	215.000.000,00	210.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			202.203.506,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			59.409.609,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kesediaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	35.000.000,00	10.247.100,00	10.247.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Barang Milik Daerah		7.150.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	35.000.000,00	10.247.100,00	10.247.100,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			7.150.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	46.500.000,00	72.250.100,00	72.250.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Semua Pegawai		69.992.052,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	150 Laporan	1.500.000,00	27.250.100,00	45.465.900,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			8.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			61.192.052,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	100 Persen	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kinerja Perangkat Daerah		119.138.804,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	86.784.200,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			86.784.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			24.090.304,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			5.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			2.764.300,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG				43.50 83.33 % %	43.50 83.33 % %	1.013.171.010,00	1.263.171.010,00	1.263.171.010,00							586.437.419,00	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PelembagaanPengaurutaman Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kabupaten Kota	-			100 Persen	100 Persen	109.571.010,00	359.571.010,00	359.571.010,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga Pemerintah		29.594.374,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				55 Perangkat Daerah	55 Perangkat Daerah	69.995.000,00	319.995.000,00	319.995.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			14.797.187,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				66 Perangkat Daerah	66 Perangkat Daerah	39.576.010,00	39.576.010,00	39.576.010,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			14.797.187,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Ormas yang di Fasilitasi	-			60 Organisasi	60 Organisasi	53.600.000,00	53.600.000,00	53.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	organisasi Masyarakat		217.318.045,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	
	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			106.715.323,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	
	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Organisasi	10 Organisasi	53.600.000,00	53.600.000,00	53.600.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			110.602.722,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan	-			32 Lembaga	32 Lembaga	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan		339.525.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				10 Lembaga	10 Lembaga	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			19.525.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				800 Orang	800 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			320.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							176.145.388,00	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan Kekerasan	-			40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan	Perempuan yang mendapatkan pelayanan Pencegahan kekerasan		75.711.230,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													Masyarakat				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			75.711.230,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan korban Kekerasan yang Mendapatkan layanan Rujukan Lanjutan	-			20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	Perempuan Korban kekerasan		23.622.929,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			23.100.429,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Layanan	20 Layanan	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			522.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga-lembaga Penyedia Layanann Perlindungan Perempuan yang di fasilitasi	-			60 Lembaga	60 Lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	lembaga Penyedia Layanann Perlindungan Perempuan		76.811.229,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			1.650.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			72.411.229,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																	
	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			1.650.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			1.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio KDRT				0.029 %	0.029 %	53.600.000,00	53.600.000,00	53.600.000,00							108.339.443,00	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang di Fasilitasi	-			20 Keluarga	20 Keluarga	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	keluarga/ orang		61.341.321,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				55 Perangkat Daerah	55 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			2.997.843,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			58.343.478,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga KG dan Hak Anak Yang di Fasilitasi	-			10 Lembaga	10 Lembaga	53.600.000,00	53.600.000,00	53.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga / lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga KG dan Hak Anak		44.000.280,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				10 Lembaga	10 Lembaga	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			43.535.375,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	53.600.000,00	53.600.000,00	53.600.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			464.905,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Keluarga Yang Mendapatkan Layanan	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	keluarga		2.997.842,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Layanan	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			2.997.842,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender atau data anak				71.43 %	71.43 %	51.228.990,00	51.228.990,00	51.228.990,00							78.728.449,00	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak	-			5 Dokumen	5 Dokumen	51.228.990,00	51.228.990,00	51.228.990,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen		78.728.449,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																	
	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				5 Dokumen	5 Dokumen	51.228.990,00	51.228.990,00	51.228.990,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			78.728.449,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)				700 Poin	700 Poin	272.200.000,00	272.200.000,00	272.200.000,00							111.899.522,00	
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/ Institusi yang di Bina	-			40 Lembaga	40 Lembaga	216.550.000,00	216.550.000,00	216.550.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga		49.714.015,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																	
	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				10 Organisasi	10 Organisasi	216.550.000,00	216.550.000,00	216.550.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			23.828.508,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			25.885.507,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Hidup Anak Yang di Fasilitasi	-			10 Lembaga	10 Lembaga	55.650.000,00	55.650.000,00	55.650.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga		62.185.507,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	39.968.000,00	39.968.000,00	39.968.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			3.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	15.682.000,00	15.682.000,00	15.682.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			58.885.507,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus				100 %	100 %	133.600.000,00	133.600.000,00	133.600.000,00							183.810.000,00	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap anak yang di Koordinasikan	-			10 Kasus	10 Kasus	133.600.000,00	133.600.000,00	133.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	anak yang mendapat kekerasan		83.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																	
	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				55 Orang	55 Orang	133.600.000,00	133.600.000,00	133.600.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			83.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang di Layani	-			40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	Anak yang memerlukan perlindungan		100.210.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				200 Orang	200 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			100.210.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							895.946.000,00	4.420.523.000,00	4.420.523.000,00							4.602.928.320,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pemanfaatan Kebijakan dan Data Kependudukan				10 %	10 %	531.146.000,00	531.146.000,00	683.846.000,00							283.876.593,00	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	jumlah Dokumen yang di selaraskan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	192.546.000,00	192.546.000,00	192.546.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan	Dokumen		136.004.593,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													Masyarakat				
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																	
	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	68.766.000,00	68.766.000,00	68.766.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			17.000.575,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan																	
	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				5 Dokumen	5 Dokumen	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			17.000.574,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																	
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			17.000.574,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			17.000.574,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																	
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				50 Organisasi	50 Organisasi	24.870.000,00	24.870.000,00	42.390.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			17.000.574,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																	
	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				5 Kegiatan	5 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			17.000.574,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																	
	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				5 Kegiatan	5 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan			17.000.574,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													Masyarakat				
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																	
	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				5 Kegiatan	5 Kegiatan	6.390.000,00	6.390.000,00	6.390.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			17.000.574,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Penduduk	-			10 Dokumen	10 Dokumen	338.600.000,00	338.600.000,00	338.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen		147.872.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																	
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			11.792.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			4.730.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																	
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				5 Laporan	5 Laporan	28.950.000,00	28.950.000,00	28.950.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			5.060.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																	
	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			4.730.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			4.840.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																	
	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				5 Laporan	5 Laporan	79.650.000,00	79.650.000,00	208.050.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																	
	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	24.300.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			12.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																	
	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat			4.620.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB				76.5 %	76.5 %	232.600.000,00	3.757.177.000,00	2.094.877.000,00							4.189.945.698,00	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pesera Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya lokal	-			100 Peserta	100 Peserta	112.600.000,00	3.637.177.000,00	3.637.177.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Peserta Advokasi		784.622.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pengendalian Program KKBPK																	
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				5 Laporan	5 Laporan	0,00	3.524.577.000,00	140.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			13.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																	
	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				21 Unit	21 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			11.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	132.200.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			621.064.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																	
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				3 Laporan	3 Laporan	112.600.000,00	112.600.000,00	262.600.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			106.358.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																	
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			33.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				-	10 Organisasi	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-			5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Tenaga Penyuluh KB		840.867.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																	
	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				50 Unit	50 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			64.597.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				288 Orang	288 Orang	0,00	0,00	432.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			770.770.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																	
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				20 Organisasi	20 Organisasi	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			5.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten dengan Kegiatan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	-			100 Persen	100 Persen	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pelayanan KB di kabupaten		1.766.493.499,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				100 Laporan	100 Laporan	59.720.000,00	59.720.000,00	72.220.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			1.170.483.391,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1000 Orang	1000 Orang	0,00	0,00	536.527.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			3.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																	
	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				28 Unit	28 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			3.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				28 Laporan	28 Laporan	60.280.000,00	60.280.000,00	62.580.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			80.540.208,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																	
	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			2.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																	
	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				28 Laporan	28 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			506.669.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang Berperan Serta Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	-			12 Organisasi	12 Organisasi	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Organisasi Kemasyarakatan		797.962.199,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																	
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				12 Organisasi	12 Organisasi	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			107.090.699,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																	
	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	3.750.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			682.071.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pembinaan Terpadu Kampung KB																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			5.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																	
	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				21 Kampung	21 Kampung	0,00	0,00	253.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			3.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera				100 %	100 %	132.200.000,00	132.200.000,00	1.641.800.000,00							129.106.029,00	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-			100 Persen	100 Persen	132.200.000,00	132.200.000,00	132.200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Keluarga yang sejahtera		79.056.029,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			3.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				50 Keluarga	50 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			3.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				-	1 Unit	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				38 Orang	38 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			2.606.029,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	
	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				5 Laporan	5 Laporan	132.200.000,00	132.200.000,00	132.200.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			64.350.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga																	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			3.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				18 Kelompok	18 Kelompok	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			2.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Berperan Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	-			38 Organisasi	38 Organisasi	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Organisasi Kemasyarakatan		50.050.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																	
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				83 Organisasi	83 Organisasi	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			1.860.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			41.719.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																	
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				42 Organisasi	42 Organisasi	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			1.860.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																	
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			2.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			1.860.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	
	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	1 laporan	0,00	0,00	576.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	
UPTD PPA Kabupaten Paser							371.501.000,00	371.501.000,00	371.501.000,00							419.500.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							371.501.000,00	371.501.000,00	371.501.000,00							419.500.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							371.501.000,00	371.501.000,00	371.501.000,00							419.500.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	69.601.000,00	69.601.000,00	69.601.000,00							79.500.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	53.461.000,00	53.461.000,00	53.461.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive	Pelayanan Perangkat Daerah		61.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													dan Tangkas				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	10.501.000,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	39.960.000,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah yang Tersedia Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Semua Pegawai di Perangkat daerah		1.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.140.000,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase sarana prasarana penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-			100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Sarana penunjang di Perangkat Daerah		17.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			17.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-				-	-	301.900.000,00	301.900.000,00	301.900.000,00							340.000.000,00	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus Yang diLayani Jumlah Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang di Layani undefined	-			40 Orang undefined undefined	40 Orang undefined undefined	301.900.000,00	301.900.000,00	301.900.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	anak yang memerlukan perlindungan khusus		340.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20
	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				50 Orang	50 Orang	0,00	301.900.000,00	301.900.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas				340.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PPPA
							11.015.184.094,00	**15.886.304.917,00**	**17.336.304.917,00**								**17.058.097.217,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk:

a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.
3. Terdapat beberapa perubahan Pagu Anggaran Tahun 2024 yang tidak mempengaruhi perubahan target capaian di sebabkan antara lain volume Prioritas dalam rincian belanja kegiatan yang bertambah namun tidak merubah target capaian kinerja kegiatan.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

RENJA 2024

Dinas Pendidikan Dan kebudayaan

KABUPATEN PASER

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ijin dan perlindunganNya penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kabudayaan tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Perubahan RENJA-PD) ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Bupati Paser Nomor 03 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.

Dalam peraturan-peraturan tersebut diamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyusun rancangan akhir perubahan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah tahun berikutnya. Untuk memenuhi ketentuan diatas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Perubahan RENJA-PD) yang terdiri dari dari 11 (Sebelas) Program, 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan dan 104 (Seratus Empat) Sub Kegiatan dengan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Paser sebesar Rp **795.491.315.107,00**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rancangan Perubahan RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser tahun 2024 ini dijadikan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan bagi seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser tahun 2025.

Tana Paser, 20 Juni 2024
Kepala,

M. YUNUS SYAM, S.Pd, M.Si
Pembina Tk.I / IV B
NIP. 197012031994121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Landasan Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 23
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 25
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 25
3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah 26
3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 36
BAB IV Penutup.....56
4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....56
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....57

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun; Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024 Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Formulir E.8 1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Periode Pelaksanaan : Tahun 2024

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah sampai dengan RENJA Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/*5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					2.147.520.829.313,38		**1.052.933.170.085,00**		**891.063.824.656,00**		**82.359.642.289,00**		**149.522.512.997,00**					0	231.882.155.286,00	0	1.284.815.325.371,00		60 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		URUSAN PEMER			2.127.170.111.375,38		1.044.435.550.173,00		881.544.727.606,00		**82.198.998.**		**149.108.04**					0	231.307.046.914,00	0	1.275.742.597.087,00		60 %	

		INTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									**317,00**		**8.597,00**										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			2.127.170.111.375,38		1.044.435.550.173,00		881.544.727.606,00		**82.198.998.317,00**		**149.108.048.597,00**				0	231.307.046.914,00	0	1.275.742.597.087,00		60 %	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Angka Putus Sekolah SMP**	**2**	**1.013.306.862.483,38**	**0,06**	**426.152.347.660,00**	**1%**	**448.282.791.820,00**		**13.985.820.387,00**		**30.987.468.099,00**				**0**	**44.973.288.486,00**	**0**	**471.125.636.146,00**	**3 %**	**46 %**	
			APK PAUD	**40**		**0,02**		**39 %**									**0**		**0**		**0 %**		
			APM SD	**146**		**35,59**		**99 %**									**0**		**36**		**24 %**		
			APM SMP	**203**		**99,01**		**96 %**									**0**		**99**		**49 %**		
			APK SD	**195**		**85,15**		**106%**									**0**		**85**		**44 %**		

			APK SMP	194		92,14		96%										0		92		47%		
			Angka Putus Sekolah SD	196		74,69		1%										0		75		38%		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD	101	641.524.299.153,00	96	266.958.367.507,00	100%	254.960.969.592,00		8.754.588.133,00		21.562.699.758,00					0	30.317.287.891,00	96	297.275.655.398,00	95%	46%	
			Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat	94		74		93,50%										0		74		79%		
			Persentase Ketersediaan Operasional SD	101		100		100%										0		100		99%		
			Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	55		86		56%										0		86		155%		
			Persentase ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi baik	93		52		93%										0		52		57%		

			Persentase SD/Sederajat Terakreditasi	**101**		**73**		**100%**									**0**		**73**		**72%**		
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	14	3.928.111.840,00	12	1.863.466.473,00	5	1.980.031.400,00								0	-	12	1.863.466.473,00	86%	47%	
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	34	5.710.336.500,00	31	3.299.097.402,00	7	2.101.573.600,00								0	-	31	3.299.097.402,00	91%	58%	
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	14	5.918.188.252,00	13	2.662.636.534,00	5	2.984.813.600,00								0	-	13	2.662.636.534,00	93%	45%	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	129	53.880.441.999,00	120	22.108.085.920,00	21	31.103.311.399,00		9.268.000,00		27.130.000,00				0	36.398.000,00	120	22.144.483.920,00	93%	41%	
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,	24	14.246.718.791,00	16	3.795.194.920,00	3	3.091.313.600,00		17.020.000,00		-				0	17.020.000,00	16	3.812.214.920,00	67%	27%	

		Sekolah /Guru/P enjaga Sekolah	Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun																				
		Rehabili tasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah /Guru/P enjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilit asi Sedang/Be rat	8	1.285.0 85.080, 00	5	1.130.6 52.926, 00	3	2.887.01 2.400,00				-				0	-	5	1.130.6 52.926, 00	6 3 %	88 %	
		Pengad aan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 2	4.550.7 29.629, 00	2 4	2.107.6 87.729, 00	1	2.287.73 7.900,00				-				0	-	2 4	2.107.6 87.729, 00	2 0 0 %	46 %	
		Pengad aan Perleng kapan Sekolah	Jumlah Perlengkap an Sekolah yang Tersedia	9	29.675. 650.90 0,00	3	31.753. 249.00 9,00	6	29.675.6 50.900,0 0		29.18 6.000, 00	2	10.94 3.699 .600, 00				2	10.972 .885.6 00,00	5	42.726. 134.60 9,00	5 6 %	14 4 %	
		Penyedi aan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3 1 7 0 1	25.000. 000,00	4	4.551.2 26.450, 00	316 96	25.000.0 00,00		12.90 8.000, 00		-				0	12.908 .000,0 0	4	4.564.1 34.450, 00	0 %	18 25 7 %	

		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	516	995.467.400,00	416	476.190.600,00	100	508.472.100,00		3.375.000,00		148.705.000,00					0	152.080.000,00	416	628.270.600,00	81%	63%	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3239	121.830.055.698,00	2064	76.832.049.439,00	1087	40.857.412.058,00		8.460.184.000,00	1853	10.046.914.196,00					1853	18.507.098.196,00	3917	95.339.147.635,00	121%	78%	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	102	3.493.855.011,00	2	705.834.320,00	100	2.725.100.891,00		29.719.800,00	490	52.934.652,00					490	82.654.452,00	492	788.488.772,00	482%	23%	

		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	624	1.090.020.280,00	416	560.030.400,00	208	489.560.000,00		60.622.400,00		60.104.150,00				0	120.726.550,00	416	680.756.950,00	67%	62%	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	746	131.347.464.784,00	491	76.497.530.135,00	225	45.934.927.683,00				-				0	-	491	76.497.530.135,00	66%	58%	
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	39	9.401.113.240,00	24	4.351.573.601,00	14	4.892.603.800,00				2.230.000,00				0	2.230.000,00	24	4.353.803.601,00	62%	46%	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	417	821.256.810,00	416	215.840.810,00	1	595.900.000,00		2.456.000,00	2	84.473.500,00				2	86.929.500,00	418	302.770.310,00	100%	37%	
		Pengadaan Perlengkapan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	6	11.485.832.100,00	4	4.551.226.450,00	1	3.368.440.900,00				30.920.400,00				0	30.920.400,00	4	4.582.146.850,00	67%	40%	

		Peserta Didik																					
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	89	180.935.189.491,00	24	16.007.781.978,00	50	66.432.024.361,00		88.798.933,00		128.558.260,00				0	217.357.193,00	24	16.225.139.171,00	27%	9%	
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9	1.026.999.000,00	7	867.488.350,00	1	130.000.000,00				-				0	-	7	867.488.350,00	78%	84%	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	11226	896.147.900,00	11000	274.251.600,00	226	582.798.900,00		37.470.000,00		27.680.000,00				0	65.150.000,00	11000	339.401.600,00	98%	38%	
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	55	58.980.634.448,00	32	12.347.272.461,00	11	12.307.284.100,00		3.580.000,00		9.350.000,00				0	12.930.000,00	32	12.360.202.461,00	58%	21%	
																	0	-	0	-			
		Pengelolaan	**Angka Kelulusan SMP**	**101**	**289.246.243.003,38**	**96**	**127.952.937.461,00**	**100%**	**144.679.639.598,00**		**4.388.**		**8.308.266.**				**0**	**12.696**	**96**	**140.64**	**95%**	**49%**	

		Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Persentase Ketersediaan Operasional SMP**	**94**		**74**		**100 %**			**056.529,00**		**565,00**					**.323.094,00**	**74**	**9.260.555,00**	**79 %**		
			Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	**101**		**100**		**71 %**											**100**		**99 %**		
			Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	**56**		**86**		**89 %**											**86**		**154 %**		
			Persentase Satuan Pendidikan SMP yang dibina	**93**		**52**		**100 %**											**52**		**56 %**		
			Persentase SMP/Sederajat Terkareditasi	**101**		**73**		**99 %**											**73**		**72 %**		
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11	4.779.040.960,00	5	2.447.567.042,00	5	2.215.232.600,00				-					0	-	5	2.447.567.042,00	45 %	51 %	
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	27	9.143.100.872,00	17	4.487.778.007,00	13	4.168.674.400,00				45.668.000,00					0	45.668.000,00	17	4.533.446.007,00	63 %	50 %	
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	12	4.532.691.278,00	3	1.266.194.050,00	9	3.245.192.850,00		1.784.000,00		1.784.000,00					0	3.568.000,00	3	1.269.762.050,00	25 %	28 %	

		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	30	20.693.254.700,00	21	12.592.964.410,00	15	7.905.077.100,00				7.434.000,00					0	7.434.000,00	21	12.600.398.410,00	70%	61%	
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	53	12.418.858.149,00	12	4.341.909.320,00	42	7.675.738.750,00				3.721.600,00					0	3.721.600,00	12	4.345.630.920,00	23%	35%	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	61	21.740.012.400,00	17	4.100.734.570,00	42	17.523.079.400,00		33.280.484,00		27.886.000,00					0	61.166.484,00	17	4.161.901.054,00	28%	19%	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	22	9.099.541.189,00	22	5.115.185.745,00	8	3.890.524.800,00				-					0	-	22	5.115.185.745,00	100%	56%	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	1.018.994.022,00	3	732.280.644,00	1	247.811.550,00				-					0	-	3	732.280.644,00	60%	72%	

		Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	4	1.431.525.600,00			4	1.431.525.600,00				1.160.000,00				0	1.160.000,00	0	1.160.000,00	0 %	0 %	
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13	2.419.403.600,00	9	680.361.450,00	4	1.714.994.600,00				-				0	-	9	680.361.450,00	69 %	28 %	
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15	2.574.565.045,00	8	1.567.931.852,00	3	886.712.900,00				-				0	-	8	1.567.931.852,00	53 %	61 %	
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	15	10.447.312.472,00	6	9.045.915.217,00	9	1.040.919.321,00				77.790.915,00				0	77.790.915,00	6	9.123.706.132,00	40 %	87 %	
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	12	24.263.835.500,00	2	4.806.610.143,00	8	17.873.262.500,00		3.685.200,00		2.758.422.900,00				0	2.762.108.100,00	2	7.568.718.243,00	17 %	31 %	

		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5	2.194.437.200,00	2	833.516.331,00	3	1.306.487.200,00				30.875.800,00					0	30.875.800,00	2	864.392.131,00	40%	39%	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	255	3.847.164.600,00	13	861.107.000,00	240	2.949.484.500,00		19.200.000,00		296.227.200,00					0	315.427.200,00	13	1.176.534.200,00	5%	31%	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1480	60.345.172.280,00	946	35.571.194.630,00	526	20.829.724.550,00		4.201.828.000,00	481	4.841.254.400,00					481	9.043.082.400,00	1427	44.614.277.030,00	96%	74%	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/G	254	2.176.413.350,00	154	267.719.600,00	100	1.868.790.350,00		37.259.846,00		29.819.100,00					0	67.078.946,00	154	334.798.546,00	61%	15%	

		Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	olongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi																				
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	224	1.752.267.000,00	154	395.668.492,00	70	1.354.341.000,00		70.131.000,00		46.330.000,00				0	116.461.000,00	154	512.129.492,00	69%	29%	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	399	58.925.444.057,38	313	29.877.469.149,00	77	20.338.174.777,00				-				0	-	313	29.877.469.149,00	78%	51%	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi	141	653.584.310,00	140	161.191.060,00	1	472.776.250,00		3.642.000,00		48.675.200,00				0	52.317.200,00	140	213.508.260,00	99%	33%	

		Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																				
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	90	2.581.116.500,00	13	793.720.846,00	77	1.781.043.300,00		17.245.999,00		71.649.450,00					0	88.895.449,00	13	882.616.295,00	14%	34%	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	31	23.513.268.919,00	6	1.666.933.755,00	17	21.727.714.100,00				19.568.000,00					0	19.568.000,00	6	1.686.501.755,00	19%	7%	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4	4.568.724.000,00	3	4.363.860.248,00	1	138.383.600,00				-					0	-	3	4.363.860.248,00	75%	96%	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15	4.126.515.000,00	6	1.975.123.900,00	9	2.093.973.600,00				-					0	-	6	1.975.123.900,00	40%	48%	
																		0	-	0	-			

			Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	**67**		**66**		**66,63 %**									**0**		**66**	**30.562.614.492,00**	**99 %**		
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik**	**67**	**75.112.430.327,00**	**50**	**28.720.601.211,00**	**67,63 %**	**44.381.902.030,00**		**800.324.825,00**		**1.041.688.456,00**					**1.842.013.281,00**	**50**	**-**	**75 %**	**41 %**	
			Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang dibina	**101**		**100**		**100 %**											**100**	**-**	**99 %**		
			Presentase Ketersediaan Operasional PAUD	**101**		**100**		**100 %**											**100**	**-**	**99 %**		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	58	14.188.060.420,00	37	4.406.666.655,00	32	9.689.902.300,00		37.780.000,00		25.719.500,00					63.499.500,00	37	4.470.166.155,00	64 %	32 %	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	34	5.184.520.600,00	14	1.542.612.529,00	21	3.587.305.600,00		1.450.000,00		50.556.000,00					52.006.000,00	14	1.594.618.529,00	41 %	31 %	
		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	9	984.989.100,00			9	984.989.100,00				43.443.892,00					43.443.892,00	0	43.443.892,00	0 %	4 %	

		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	24	1.718.462.000,00	6	124.647.450,00	20	1.587.490.000,00				6.060.000,00					0	6.060.000,00	6	130.707.450,00	25%	8%	
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	5816	402.859.670,00	408	302.335.670,00	5406	120.000.000,00		38.036.000,00	2703	21.300.000,00					2703	59.336.000,00	3111	361.671.670,00	53%	90%	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	157	5.873.094.760,00	101	4.266.018.260,00	53	1.919.600.000,00		393.300.000,00		513.661.700,00					0	906.961.700,00	101	5.172.979.960,00	64%	88%	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	54	3.272.548.880,00	3	145.141.650,00	51	3.112.678.030,00				-					0	-	3	145.141.650,00	6%	4%	

			Kompetensi dan Kualifikasi																				
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	456	2.175.828.070,00	205	380.865.300,00	251	2.050.000.000,00		269.039.000,00	120	331.264.400,00					120	600.303.400,00	325	981.168.700,00	71%	45%	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1085	27.678.807.427,00	650	15.593.625.304,00	251	9.659.440.000,00				8.211.300,00					0	8.211.300,00	650	15.601.836.604,00	60%	56%	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	299	326.594.000,00	298	102.600.000,00	1	253.194.000,00		32.040.000,00		6.503.000,00					0	38.543.000,00	298	141.143.000,00	100%	43%	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang	13	2.830.263.700,00	14	1.856.088.393,00	4	940.901.300,00		1.630.000,00		8.050.000,00					0	9.680.000,00	14	1.865.768.393,00	108%	66%	

		Sekolah /TU	Telah Dibangun																				
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	28	6.492.120.200,00			28	6.492.120.200,00		11.050.000,00		26.918.664,00				0	37.968.664,00	0	37.968.664,00	0 %	1 %	
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2	3.984.281.500,00			2	3.984.281.500,00		15.999.825,00		-				0	15.999.825,00	0	15.999.825,00	0 %	0 %	
																	0	-	0	-			
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang aktif**	**135**	**7.423.890.000,00**		**2.520.441.481,00**	**35**	**4.260.280.600,00**		**42.850.900,00**		**74.813.320,00**				**0**	**117.664.220,00**	**0**	**2.638.105.701,00**	**0 %**	**36 %**	
		Pembangunan Gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun	24	3.100.344.660,00	8	1.572.775.627,00	15	1.506.118.100,00		1.900.000,00		2.080.000,00				0	3.980.000,00	8	1.576.755.627,00	33 %	51 %	
		Pengadaan Alat Praktik dan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa	11	680.186.800,00	1	223.713.000,00	10	455.186.800,00				-				0	-	1	223.713.000,00	9 %	33 %	

		Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia																				
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	53	160.898.920,00	2	86.943.340,00	51	60.000.000,00				-				0	-	2	86.943.340,00	4%	54%	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27	2.746.163.000,00	12	471.404.994,00	9	1.698.810.000,00		16.583.700,00	7	43.040.920,00				7	59.624.620,00	19	531.029.614,00	70%	19%	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	19	38.990.000,00	9	8.835.000,00	1	20.000.000,00		780.000,00		1.537.500,00				0	2.317.500,00	9	11.152.500,00	47%	29%	

		n di Bidang Pendidikan	Layanan di Bidang Pendidikan																				
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	118	697.306.620,00	14	156.769.520,00	100	520.165.700,00		23.587.200,00	50	28.154.900,00					50	51.742.100,00	64	208.511.620,00	54 %	30 %	
																		0	-	0	-			
																		0	-	0	-			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	**Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal**	**300**	**1.839.739.150,00**		**273.149.313,00**	**100**	**1.798.056.000,00**		**14.427.725,00**		**269.734.400,00**					**0**	**284.162.125,00**	**0**	**557.311.438,00**	**0 %**	**30 %**	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**Jumlah Mapel Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**		**1.839.739.150,00**		**273.149.313,00**	**1**	**1.399.702.000,00**		**14.427.725,00**		**269.734.400,00**					**0**	**284.162.125,00**	**0**	**557.311.438,00**		**30 %**	
		Penyusunan Silabus	Jumlah Silabus Muatan Lokal	2	382.160.000,00	1	139.605.813,00	1	210.726.500,00				-					0	-	1	139.605.813,00	50 %	37 %	

		Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pendidikan Dasar yang Tersusun																				
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	51	940.428.800,00	1	120.493.500,00	50	802.505.300,00				269.734.400,00				0	269.734.400,00	1	390.227.900,00	2%	41%	
		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2	517.150.350,00	0	13.050.000,00	1	386.470.200,00		14.427.725,00		-				0	14.427.725,00	0	27.477.725,00	0%	5%	
																	0	-	0	-			
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak	**Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**					**100%**	**398.354.000,00**		**-**						**0**	**-**	**0**	**-**			

		Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																					
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2	324.401.250,00			1	200.788.000,00				60.000.000,00				0	60.000.000,00	0	60.000.000,00	0 %	18 %	
		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	3	295.649.200,00			1	197.566.000,00				103.791.759,00				0	103.791.759,00	0	103.791.759,00	0 %	35 %	

																		0	-				
																0	-	0	-				
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Pendidik Sesuai Standar**		**5.145.411.050,00**		**124.680.608,00**	**91 %**	**4.903.569.350,00**		**134.227.396,00**		**-**				**0**	**134.227.396,00**	**0**	**134.227.396,00**		**5 %**	
			Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai Standar					**60 %**									**0**		**0**				
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP**		**5.145.411.050,00**		**124.680.608,00**	**94 %**	**4.903.569.350,00**		**134.227.396,00**		**-**				**0**	**134.227.396,00**	**0**	**258.908.004,00**		**5 %**	

		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	94	3.141.055.000,00	89	73.329.208,00	1	3.064.813.300,00		54.336.000,00						0	54.336.000,00	89	127.665.208,00	95%	4%	
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	94	2.004.356.050,00	22	51.351.400,00	1	1.838.756.050,00		79.891.396,00						0	79.891.396,00	22	131.242.796,00	23%	7%	

																	0	-	0	-			
																	0	-	0	-			
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	**Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan Pendidikan Sesuai Ketentuan**		**2.840.852.480,00**		**1.675.859.400,00**	**100 %**	**159.218.000,00**		**19.158.000,00**		**4.422.700,00**				**0**	**23.580.700,00**	**0**	**1.699.440.100,00**		**60 %**	
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**Presentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**		**106.535.000,00**		**36.135.000,00**	**100 %**	**55.000.000,00**		**15.910.000,00**		**-**				**0**	**15.910.000,00**	**0**	**52.045.000,00**		**49 %**	
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	7	50.400.000,00	3	15.000.000,00	1	20.000.000,00								0	-	3	15.000.000,00	43 %	30 %	

		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	11	56.135.000,00	10	21.135.000,00	1	35.000.000,00		15.910.000,00						0	15.910.000,00	10	37.045.000,00	91%	66%	
																	0	-	0	-			
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**Presentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**		**2.734.317.480,00**		**1.639.724.400,00**	**100%**	**104.218.000,00**		**3.248.000,00**		**4.422.700,00**				**0**	**7.670.700,00**	**0**	**1.647.395.100,00**		**60%**	
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan	51	51.608.000,00	16	18.788.400,00	1	21.218.000,00		3.248.000,00		4.422.700,00				0	7.670.700,00	16	26.459.100,00	31%	51%	

		kan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																				
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	205	59.210.000,00	204	20.906.000,00	1	38.000.000,00				-				0	-	204	20.906.000,00	100%	35%	
		Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	229	2.623.499.480,00	114	1.600.030.000,00	1	45.000.000,00				-				0	-	114	1.600.030.000,00	50%	61%	

																	0	-	0	-			
																	0	-	0	-			
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	**persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal**		**535.999.000,00**		**67.089.916,00**	**100 %**	**466.000.000,00**		**14.443.350,00**		**-**					**0**	**14.443.350,00**	**0**	**81.533.266,00**		**15 %**	
		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga yang Dibina**		**535.999.000,00**		**67.089.916,00**	**10 Kecamatan**	**466.000.000,00**		**14.443.350,00**		**-**					**0**	**14.443.350,00**	**0**	**81.533.266,00**		**15 %**	
		Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	2	69.999.000,00	2	67.089.916,00										0	-	2	67.089.916,00	100 %	96 %	

		Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	4	100.000.000,00			4	100.000.000,00		14.443.350,00						0	14.443.350,00	0	14.443.350,00	0 %	14 %	
		Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	3	110.000.000,00			3	110.000.000,00								0	-	0	-	0 %	0 %	
		Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	200	85.000.000,00			200	85.000.000,00								0	-	0	-	0 %	0 %	

		Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	50	171.000.000,00			50	171.000.000,00								0	-	0	-	0 %	0 %	
																	0	-	0	-			
																	0	-	0	-			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**		**1.103.501.247.212,00**		**616.142.423.276,00**	**100 %**	**425.935.092.436,00**		**68.030.921.459,00**		**117.846.423.398,00**					**0**	**185.877.344.857,00**	**0**	**802.019.768.133,00**		**73 %**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	**Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Perencana**		**2.116.991.080,00**		**1.013.256.262,00**	**100 %**	**1.092.647.700,00**		**151.749.200,00**		**116.866.981,00**					**0**	**268.616.181,00**	**0**	**1.281.872.443,00**		**61 %**	

		Perangkat Daerah	**an tepat Waktu**																				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	1.612.648.500,00	10	814.471.002,00	6	793.609.500,00		128.240.500,00	3	90.904.700,00				3	219.145.200,00	13	1.033.616.202,00	81%	64%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	172.774.800,00	8	52.285.000,00	2	119.290.000,00		-		-				0	-	8	52.285.000,00	80%	30%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	331.567.780,00	2	146.500.260,00	1	179.748.200,00		23.508.700,00		25.962.281,00				0	49.470.981,00	2	195.971.241,00	67%	59%	
																	0	-	0	-			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Kualitas Penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan**		**1.089.481.223.560,00**		**609.601.533.316,00**	**100%**	**420.009.764.736,00**		**67.679.038.080,00**		**117.300.584.807,00**				**0**	**184.979.622.887,00**	**0**	**794.581.156.203,00**		**73%**	

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	248	1.087.237.248.560,00	24	608.588.945.865,00	2.462	418.813.773.736,00		67.621.838.080,00	2222	117.194.076.407,00					2222	184.815.914.487,00	2246	793.404.860.352,00	90%	73%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25	2.243.975.000,00	24	1.012.587.451,00	1	1.195.991.000,00		57.200.000,00		106.508.400,00					0	163.708.400,00	24	1.176.295.851,00	96%	52%	
																		0	-	0	-			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran**		**850.088.700,00**		**328.719.060,00**	**100%**	**503.944.000,00**		**19.200.000,00**		**65.414.500,00**					**0**	**84.614.500,00**	**0**	**413.333.560,00**		**49%**	
		Pengamanan Barang Milik	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	68	850.088.700,00	41	328.719.060,00	24	503.944.000,00		19.200.000,00	10	65.414.500,00					10	84.614.500,00	51	413.333.560,00	75%	49%	

		Daerah SKPD	Daerah SKPD																				
																0	-	0	-				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**1.107.794.000,00**		**403.119.200,00**	**12 Bulan**	**697.854.000,00**		**47.600.000,00**		**87.037.200,00**				**0**	**134.637.200,00**	**0**	**537.756.400,00**		**49 %**	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7	832.394.000,00	6	369.569.200,00	1	456.854.000,00		47.600.000,00		35.700.000,00				0	83.300.000,00	6	452.869.200,00	86 %	54 %	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5094	64.400.000,00	267	33.550.000,00	1.800	30.000.000,00		-		-				0	-	267	33.550.000,00	5 %	52 %	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	20	211.000.000,00			10	211.000.000,00		-		51.337.200,00				0	51.337.200,00	0	51.337.200,00	0 %	24 %	

		Undangan	Perundang-Undangan																				
																	0	-	0	-			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran**		**8.189.742.899,00**		**3.931.681.556,00**	**12 Bulan**	**2.835.896.075,00**		**92.458.660,00**		**117.894.591,00**				**0**	**210.353.251,00**	**0**	**4.142.034.807,00**		**51 %**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19	6.548.464.732,00	16	3.104.657.050,00	2	1.989.544.195,00		-		-				0	-	16	3.104.657.050,00	84 %	47 %	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	620.043.287,00	48	323.553.680,00	2	295.000.000,00		49.593.700,00		38.925.800,00				0	88.519.500,00	48	412.073.180,00	96 %	66 %	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	27	99.300.000,00	24	35.868.850,00	3	99.300.000,00		-		8.783.000,00				0	8.783.000,00	24	44.651.850,00	89 %	45 %	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsult	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	27	921.934.880,00	24	467.601.976,00	3	452.051.880,00		42.864.960,00		70.185.791,00				0	113.050.751,00	24	580.652.727,00	89 %	63 %	

		asi SKPD	Konsultasi SKPD																				
																0	-	0	-				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1.506.948.595,00**		**795.816.782,00**	**100 %**	**644.985.925,00**		**40.875.519,00**		**158.625.319,00**					**0**	**199.500.838,00**	**0**	**995.317.620,00**		**66 %**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	132.727.760,00	24	49.366.572,00	12	51.005.000,00		2.488.319,00		4.681.779,00					0	7.170.098,00	24	56.536.670,00	67 %	43 %	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29	1.374.220.835,00	24	746.450.210,00	5	593.980.925,00		38.387.200,00		153.943.540,00					0	192.330.740,00	24	938.780.950,00	83 %	68 %	
																0	-	0	-				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	**Persentase Jasa Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional**		**248.458.378,00**		**68.297.100,00**	**100 %**	**150.000.000,00**		**-**		**-**					**0**	**-**	**0**	**68.297.100,00**		**27 %**	

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	248.458.378,00	17	68.297.100,00	5	150.000.000,00		-							0	-	17	68.297.100,00	59%	27%	
																		0	-	0	-			
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAY			**20.350.717.938,00**		**8.497.619.912,00**		**9.519.097.050,00**		**160.643.972,00**		**414.464.400,00**					**0**	**575.108.372,00**	**0**	**9.072.728.284,00**		**45%**	

		ANAN DASAR																					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			**20.350.717.938,00**		**8.497.619.912,00**		**9.519.097.050,00**		**160.643.972,00**		**414.464.400,00**				**0**	**575.108.372,00**	**0**	**9.072.728.284,00**		**45 %**	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase penyelenggaraan Event Kebudayaan Sesuai Dengan Standar Kebudayaan**		**2.255.582.130,00**		**854.311.512,00**	**70 %**	**1.290.781.600,00**		**-**		**199.704.500,00**				**0**	**199.704.500,00**	**0**	**1.054.016.012,00**		**47 %**	
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase Obyek Kebudayaan Masyarakat yang dikelola**		**79.693.800,00**		**24.933.000,00**	**1 Kegiatan**	**50.000.000,00**								**0**	**-**	**0**	**24.933.000,00**		**31 %**	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanf	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan	12	79.693.800,00	2	24.933.000,00	10	50.000.000,00								0	-	2	24.933.000,00	17 %	31 %	

		aatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan																				
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kesenian tradisional masyarakat yang di lestarikan**		**2.175.888.330,00**		**829.378.512,00**	**23 Objek**	**1.240.781.600,00**		**-**		**199.704.500,00**				0	199.704.500,00	0	1.029.083.012,00		47 %	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	63	2.175.888.330,00	21	829.378.512,00	23	1.240.781.600,00				199.704.500,00				0	199.704.500,00	21	1.029.083.012,00	33 %	47 %	
		PROGRAM	**Persentase Kelompok Seni/Sanggar**		**6.408.104.278,00**		**2.626.332.088,00**	**30 %**	**2.317.036.800,00**		**74.19**		**141.0**				0	215.25	0	2.841.5		44 %	

		PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Kesenian yang aktif**								**5.172,00**		**57.900,00**					3.072,00		85.160,00			
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kelompok seni yang dibina**		**6.408.104.278,00**		**2.626.332.088,00**	**84 Seni**	**2.317.036.800,00**		**74.195.172,00**		**141.057.900,00**				0	215.253.072,00	0	2.841.585.160,00		44 %	
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	20	1.362.854.200,00	10	319.588.888,00	10	852.036.800,00		35.620.524,00		131.855.500,00				0	167.476.024,00	10	487.064.912,00	50 %	36 %	
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembag	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan	134	5.045.250.078,00	32	2.306.743.200,00	10	1.465.000.000,00		38.574.648,00	5	9.202.400,00				5	47.777.048,00	37	2.354.520.248,00	28 %	47 %	

		a Kesenian Tradisional	Kapasitasnya																					
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	**Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah**		**7.659.348.450,00**		**2.801.167.345,00**	**5 Event**	**4.376.413.650,00**								0	-	0	2.801.167.345,00		37 %	
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sejarah Lokal yang dibina**		**7.659.348.450,00**		**2.801.167.345,00**	**1 Objek**	**4.376.413.650,00**								0	-	0	2.801.167.345,00		37 %	
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	70	6.006.413.650,00	50	2.339.406.975,00	10	3.241.413.650,00				-					0	-	50	2.339.406.975,00	71 %	39 %	
		Peningkatan	Jumlah Dokumen Data dan	16	1.652.934.800,00	12	461.760.370,00	4	1.135.000.000,00				2.430					0	2.430.000,00	12	464.19	75 %	28 %	

		Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat									.000,00								0.370,00			
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**		**97.040.000,00**		**16.644.800,00**	**80 %**	**77.040.000,00**		**20.848.800,00**		**-**					0	20.848.800,00	0	37.493.600,00		39 %	
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya**		**97.040.000,00**		**16.644.800,00**	**14 Objek**	**77.040.000,00**		**20.848.800,00**		**-**					0	20.848.800,00	0	37.493.600,00		39 %	
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	32	97.040.000,00	2	16.644.800,00	22	77.040.000,00		20.848.800,00							0	20.848.800,00	2	37.493.600,00	6 %	39 %	

		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**Presentase Peningkatan Pengunjung Museum Sadurengas Pertahun**	**59**	**3.930.643.080,00**	**33**	**2.199.164.167,00**	**14**	**1.457.825.000,00**		**65.600.000,00**		**73.702.000,00**					0	139.302.000,00	33	2.338.466.167,00	56%	59%	
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	**Jumlah museum yang di kelola**	**3**	**3.930.643.080,00**	**2**	**2.199.164.167,00**	**1**	**1.457.825.000,00**		**65.600.000,00**		**73.702.000,00**					0	139.302.000,00	2	2.338.466.167,00	67%	59%	
		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	175	640.000.000,00	35	364.984.400,00	125	220.000.000,00			36	24.502.000,00					36	24.502.000,00	71	389.486.400,00	41%	61%	
		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	15	321.791.280,00	6	150.845.568,00	5	160.000.000,00		8.800.000,00		6.600.000,00					0	15.400.000,00	6	166.245.568,00	40%	52%	

		Permuseuman																					
		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	5	1.449.135.400,00	4	844.940.660,00	1	550.025.000,00				-				0	-	4	844.940.660,00	80%	58%	
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	3	1.519.716.400,00	2	838.393.539,00	1	527.800.000,00		56.800.000,00		42.600.000,00				0	99.400.000,00	2	937.793.539,00	67%	62%	

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester II dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 17%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 231.882.155.286,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp 891.063.824.656,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 60%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 78% dengan predikat kinerja Sangat Baik
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 6 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 45 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 31 indikator capaian kinerja 0%-50% = 50 indikator.
4. Adanya sub kegiatan yang sebagian kinerjanya dibawah 50%, hal ini karena masih pada koordinasi dan pelaksaanya dilakukan di triwulan III dsn IV

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, Pendidikan Dasar, PAUD, Pendidikan Nonformal dan Informal, kebudayaan serta pembinaan ketenagaan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
   - penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, pendidikan dasar, PAUD, Pendidikan nonformal dan informal, kebudayaan serta pembinaan ketenagaan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
   - penetapan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
   - pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi kebijakan, kelembagaan dan sarana prasarana, pendidikan dasar, PAUD, Pendidikan nonformal dan informal, kebudayaan serta pembinaan ketenagaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
   - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
   - penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

1. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan

pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan Pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugastugas pembantuan lainnya;

i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, Pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.
m. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
c. pelaksanaan tata usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundangundangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
f. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
g. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
h. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
i. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
j. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal melaksanakan melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan

anak usia dini dan pendidikan nonformal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.;
h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal.

Seksi Kurikulum dan Penilaian

Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan kurikulum dan penilaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kurikulum dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kurikulum dan Penilaian.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan kelembagaan dan sarana prasarana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
f. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

4. Bidang Pembinaan SD

Bidang Pembinaan SD melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan SD menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar; dan
h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan SD.

Seksi Kurikulum dan Penilaian

Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan kurikulum dan penilaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kurikulum dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar;
c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
d. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar; dan
f. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kurikulum dan Penilaian.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan urusan kelembagaan dan sarana prasarana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar; dan
e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
f. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

5. Bidang Pembinaan SMP

Bidang Pembinaan SMP melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembinaan SMP menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama; dan
g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Pembinaan SMP.

Seksi Kurikulum dan Penilaian

Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan kurikulum dan penilaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kurikulum dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah pertama;
c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama; dan
e. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kurikulum dan Penilaian.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan kelembagaan dan sarana prasarana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan sekolah menengah pertama;
d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama; dan
e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

6. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi serta kesenian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi serta kesenian;
b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
j. penyusunan bahan cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi serta kesenian kabupaten;
k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Kebudayaan

7. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan Pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenagakependidikan dalam kabupaten/kota;
f. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
h. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pendidikan Nonformal

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan urusan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Pendidikan dan Nonformal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal dan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pendidikan Nonformal

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan urusan pendidikan dan tenaga kependidikan Pendidikan dasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

8. **Unit Pelaksana Teknis Daerah**
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

9. Kelompok Jabatan Fungsional
a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
c. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

10. Sub Koordinator Jabatan Fungsional
a. Sub Koordinator Jabatan Fungsional merupakan jabatan pengawas yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional.
b. Sub Koordinator Jabatan Fungsional diberikan kegiatan tugas dan fungsi mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dalam jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya.
c. Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Angka Harapan Lama Sekolah
2. Rata-rata Lama Sekolah
3. Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan
4. Nila Evaluasi SAKIP dan APIP

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel 2.1 di bawah ini :

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II

Tahun 2024

Tabel 2.2

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
			2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatkan kualitas Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah	13.25	13.30	13.35	13.40	13.50	13,27	59,32%
		Rata-rata Lama Sekolah	8.60	8.70	8.80	8.90	9.00	8,80	102,33%
Meningkatkan Kehidupan Berbudaya	Meningkatnya kehidupan berbudaya	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan	35%	40%	43%	45%	50%	19,45	55,57%
		Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas yang Menggunakan Bahasa Daerah	45%	50%	55%	60%	75%		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang resposif dan tangkas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	B	B	B	BB	BB	B	60,61
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai IKM	80	85	90	92	93		

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan "Meningkatnya Kualitas Pendidikan" memiliki 2 indikator kinerja yaitu "Angka Harapan Lama Sekolah" belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 7,86 dari target sebesar 13,25 dengan capaian kinerja sebesar 59,32 %; sedangkan indikator "Rata-rata Lama Sekolah", telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 8,61 dari target sebesar 8,61 dengan capaian kinerja sebesar 100,11 %.
2. Tujuan "Meningkatnya Kehidupan Berbudaya" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan", telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 19,45 dari target sebesar 35 % dengan capaian kinerja sebesar 55,57 %.
3. Tujuan "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang resposif dan tangkas" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP", telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar B dari target sebesar B dengan capaian kinerja sebesar 60,61%.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
2. Juknis pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang terlambat

3. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
4. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat
5. Pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Meningkatkan kualitas Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS = \frac{Jumlah\ penduduk\ usia_i\ yang\ bersekolah}{Jumlah\ penduduk\ usia_i\ pada\ tahun\ t}$ Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat / kelas yang sedang / pernah dijalani dan jenjang Pendidikan tertinggi yang di tamatkan.	13.30	13.30
		Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{lama\ sekolah\ penduduk}{jumlah\ penduduk}$ Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	8.70	8.70
Meningkatkan Kehidupan Berbudaya	Meningkatnya kehidupan berbudaya	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan	$\frac{Jumlah\ Warisan\ Budaya\ Benda\ dan\ Tak\ Benda\ yang\ Telah\ ditetapkan}{Jumlah\ warisan\ budaya\ yang\ ada} x\ 100$ Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	40%	40%
	Meningkatnya kehidupan berbudaya	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan	$\frac{Jumlah\ penduduk\ usia\ 5\ tahun\ keatas\ berbahasa\ daerah}{Jumlah\ Penduduk\ 5\ Tahun\ keatas} x\ 100$ Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	45%	50%
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang resposif dan tangkas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP (tahun sebelumnya) dari APIP	B	B

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik DInas Pendidikan	Nilai IKM	$\frac{total\ nilai\ dari\ persepsi\ per\ unsur}{Total\ Nilai\ yang\ terisi} x\ Nilai\ Penimbang$ Nilai kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85	90

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2024 mengalami perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu "PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER"" yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke-8, yaitu “Meningkatnya Kualitas Pendidikan”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan PRKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
				795.991.315.107,00					**811.856.542.583,00**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**793.197.850.107,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**802.946.663.933,00**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Paser**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**100%**	**416.308.907.010,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Paser**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**100%**	**419.539.634.936,00**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan tepat Waktu	100%	836.101.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan tepat Waktu	100%	1.042.647.700,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	611.201.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	743.609.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	94.900.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	119.290.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	130.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	179.748.200,00

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Paser**	**Prosentase Kualitas Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan yang Akuntable**	**100%**	**411.027.060.010,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Prosentase Kualitas Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan yang Akuntable**	**100%**	**413.596.769.236,00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.462 Orang/ Bulan	410.557.060.010,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.462 Orang/ Bulan	412.813.773.736,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	470.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	782.995.500,00

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Paser**	**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**239.000.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**421.472.000,00**
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24 Dokumen	239.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24 Dokumen	421.472.000,00

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Paser**	**Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**647.854.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**647.854.000,00**
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	406.854.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	406.854.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Paser	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.800 Orang	30.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Paser	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.800 Orang	30.000.000,00

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	211.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	211.000.000,00

Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Paser**	**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran**	**12 Bulan**	**2.530.309.680,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran**	**12 Bulan**	**2.802.309.680,00**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.783.957.800,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.855.957.800,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	295.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	295.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	99.300.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	99.300.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	352.051.880,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	552.051.880,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Paser**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**878.582.320,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**878.582.320,00**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	51.005.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	51.005.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	827.577.320,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	827.577.320,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Paser**	**Persentase Jasa Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional**	**100%**	**150.000.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Jasa Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional**	**100%**	**150.000.000,00**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	150.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	150.000.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Kab. Paser**	**Angka Putus Sekolah SMP**	**1%**	**369.657.026.647,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Kab. Paser**	**Angka Putus Sekolah SMP**	**1%**	**376.175.112.547,00**
		APK PAUD	**39%**				**APK PAUD**	**39%**	
		APM SD	**98,50%**				**APM SD**	**98,50%**	
		APM SMP	**96%**				**APM SMP**	**96%**	
		APK SD	**106,00 %**				**APK SD**	**106,00 %**	
		APK SMP	**96%**				**APK SMP**	**96%**	
		Angka Putus Sekolah SD	**0,70%**				**Angka Putus Sekolah SD**	**0,70%**	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Kab. Paser**	**Angka Kelulusan SD**	**100%**	**212.572.349.026,00**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Kab. Paser**	**Angka Kelulusan SD**	**100%**	**214.183.229.026,00**
		Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat	**93,50%**				**Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat**	**93,50%**	
		Persentase Ketersediaan Operasional SD	**100%**				**Persentase Ketersediaan Operasional SD**	**100%**	
		Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	**55.63 %**				**Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD**	**55.63 %**	

		Persentase ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi baik	**93.03 %**				**Persentase ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi baik**	**93.03 %**	
		Persentase SD/Sederajat Terakreditasi	**100%**				**Persentase SD/Sederajat Terakreditasi**	**100%**	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5 Ruang	1.958.021.400,00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5 Ruang	1.958.021.400,00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	7 Ruang	1.901.573.600,00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	7 Ruang	1.901.573.600,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	5 Ruang	2.753.433.600,00	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	5 Ruang	2.753.433.600,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	21 Unit	11.137.805.299,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	21 Unit	11.137.805.299,00
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	3 Unit	3.075.383.600,00	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	3 Unit	3.075.383.600,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Direhabilitasi	3 Unit	2.633.931.400,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Direhabilitasi	3 Unit	2.633.931.400,00
Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	1 Paket	100.000.000,00	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	1 Paket	100.000.000,00
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Sekolah	6 Paket	20.746.593.900,00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Sekolah	6 Paket	20.746.593.900,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	31696 Peserta Didik	25.000.000,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	31696 Peserta Didik	25.000.000,00

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Paser	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	653.406.000,00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Paser	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	653.406.000,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.087 Orang	44.249.398.179,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.087 Orang	44.429.398.179,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	718.812.850,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	718.812.850,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	208 Satuan Pendidikan	497.560.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	208 Satuan Pendidikan	497.560.000,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	208 Satuan Pendidikan	34.988.820.000,00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	208 Satuan Pendidikan	36.114.700.000,00
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	14 Ruang	4.883.423.800,00	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	14 Ruang	4.883.423.800,00
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	290.400.000,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	595.400.000,00
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	3.368.440.900,00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	3.368.440.900,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	50 Ruang	66.723.195.398,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	50 Ruang	66.723.195.398,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	130.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	130.000.000,00
Penyelengaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	208 Satuan Pendidikan	429.865.000,00	Penyelengaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	208 Satuan Pendidikan	429.865.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	11.307.284.100,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	11.307.284.100,00

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Kab. Paser**	**Angka Kelulusan SMP**	**100%**	**117.247.570.721,00**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Kab. Paser**	**Angka Kelulusan SMP**	**100%**	**118.950.382.621,00**
		Persentase Ketersediaan Operasional SMP	**100%**				**Persentase Ketersediaan Operasional SMP**	**100%**	
		Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	**71%**				**Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP**	**71%**	
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	**88.75 %**				**Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik**	**88.75 %**	
		Persentase Satuan Pendidikan SMP yang dibina	**100%**				**Persentase Satuan Pendidikan SMP yang dibina**	**100%**	
		Persentase SMP/Sederajat Terkareditasi	**98.90 %**				**Persentase SMP/Sederajat Terkareditasi**	**98.90 %**	

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru Kepala Sekolah TU yang dibangun	5 Ruang	2.215.232.600,00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru Kepala Sekolah TU yang dibangun	5 Ruang	2.215.232.600,00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	13 Ruang	4.168.674.400,00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	13 Ruang	4.168.674.400,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	9 Ruang	3.589.692.850,00	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	9 Ruang	3.589.692.850,00
Pembangunan Laboratorium	Kab. Paser	Jumlah Laboratorium yang Dibangun	15 Ruang	7.905.077.100,00	Pembangunan Laboratorium	Kab. Paser	Jumlah Laboratorium yang Dibangun	15 Ruang	7.905.077.100,00
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	42 Unit	7.875.738.750,00	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	42 Unit	7.875.738.750,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun	42 Unit	6.450.337.250,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun	42 Unit	6.450.337.250,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas yang di rehabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	3.885.555.400,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas yang di rehabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	3.885.555.400,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Paser	Jumlah Laboratorium yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	247.811.550,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Paser	Jumlah Laboratorium yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	247.811.550,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Kab. Paser	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	4 Ruang	1.431.525.600,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Kab. Paser	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	4 Ruang	1.431.525.600,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	1.511.113.600,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	1.511.113.600,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	743.615.900,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	743.615.900,00
Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah yang Tersedia	9 Paket	815.194.721,00	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah yang Tersedia	9 Paket	815.194.721,00
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	8 Paket	9.370.912.400,00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	8 Paket	9.370.912.400,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 Paket	1.306.487.200,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 Paket	1.306.487.200,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Paser	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	240 Peserta Didik	1.819.683.800,00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Paser	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	240 Peserta Didik	1.495.844.000,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	526 Orang	21.114.808.550,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	526 Orang	21.114.808.550,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	415.866.500,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	415.866.500,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	70 Satuan Pendidikan	450.000.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	70 Satuan Pendidikan	1.634.341.000,00

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	77 Satuan Pendidikan	16.843.645.000,00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	77 Satuan Pendidikan	17.250.125.000,00
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	296.526.250,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	472.776.250,00
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	3657 Satuan Pendidikan	830.000.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	3657 Satuan Pendidikan	1.089.165.700,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang	21.727.714.100,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang	21.727.714.100,00
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	138.383.600,00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	138.798.600,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	2.093.973.600,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	2.093.973.600,00

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Kab. Paser**	**Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD**	**67.63 %**	**35.863.187.050,00**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Kab. Paser**	**Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD**	**67.63 %**	**39.067.581.050,00**
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	**67.63 %**				**Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik**	**67.63 %**	
		Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang dibina	**100%**				**Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang dibina**	**100%**	
		Presentase Ketersediaan Operasional PAUD	**100%**				**Presentase Ketersediaan Operasional PAUD**	**100%**	

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	32 Unit	8.391.145.350,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	32 Unit	8.391.145.350,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Paser	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	21 Unit	3.316.497.600,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Paser	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	21 Unit	3.316.497.600,00
Pengadaan Mebel PAUD	Kab. Paser	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	9 Paket	904.485.100,00	Pengadaan Mebel PAUD	Kab. Paser	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	9 Paket	904.485.100,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kab. Paser	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD	20 Paket	287.490.000,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kab. Paser	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD	20 Paket	287.490.000,00
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Paser	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	5.406 Peserta Didik	120.000.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Paser	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	5.406 Peserta Didik	120.000.000,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	53 Orang	1.919.600.000,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	53 Orang	1.919.600.000,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	51 Orang	100.000.000,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	51 Orang	100.000.000,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Paser	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	204 Satuan Pendidikan	1.700.000.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Paser	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	204 Satuan Pendidikan	1.700.000.000,00
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Paser	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	204 Satuan Pendidikan	8.755.400.000,00	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Paser	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	204 Satuan Pendidikan	8.806.600.000,00

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	3.253.194.000,00
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	858.093.300,00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	858.093.300,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	28 Ruang	5.280.466.200,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	28 Ruang	5.280.466.200,00
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	4.130.009.500,00	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	4.130.009.500,00

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Kab. Paser**	**Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang aktif**	**35%**	**3.973.919.850,00**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Kab. Paser**	**Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang aktif**	**35%**	**3.973.919.850,00**
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Dipelihara	15 Unit	1.380.090.050,00	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Dipelihara	15 Unit	1.380.090.050,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	10 Paket	610.019.800,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	10 Paket	610.019.800,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	51 Orang	60.000.000,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	51 Orang	60.000.000,00
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	9 Satuan Pendidikan	1.698.810.000,00	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	9 Satuan Pendidikan	1.698.810.000,00

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	20.000.000,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	20.000.000,00
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah lembaga Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	100 Peserta Didik	205.000.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah lembaga Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	100 Peserta Didik	205.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	**Kab. Paser**	**Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal**	**100%**	**1.112.366.800,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Kab. Paser**	**Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal**	**100%**	**1.112.366.800,00**
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**Kab Paser**	**Jumlah Mapel Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**1 Mapel**	**812.366.800,00**	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**Kab Paser**	**Jumlah Mapel Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**1 Mapel**	**812.366.800,00**
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	150.000.000,00	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	150.000.000,00
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	50 Orang	562.366.800,00	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	50 Orang	562.366.800,00
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	100.000.000,00

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	**Kab. Paser**	**Prosentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**100%**	**300.000.000,00**	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Kab. Paser**	**Prosentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**100%**	**300.000.000,00**
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Paser	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	150.000.000,00	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Paser	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	150.000.000,00
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Paser	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Kegiatan	150.000.000,00	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Paser	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Kegiatan	150.000.000,00

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Kab. Paser**	**Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Pendidik Sesuai Standar**	**91%**	**5.369.331.650,00**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Kab. Paser**	**Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Pendidik Sesuai Standar**	**91%**	**5.369.331.650,00**
		Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai Standar	**60%**				**Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai Standar**	**60%**	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Kab. Paser**	**Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP**	**94%**	**5.369.331.650,00**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Kab. Paser**	**Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP**	**94%**	**5.369.331.650,00**

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	3.308.187.150,00	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	3.308.187.150,00
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	2.061.144.500,00	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	2.061.144.500,00

PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	**Kab. Paser**	**Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan Pendidikan Sesuai Ketentuan**	**100%**	**159.218.000,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Kab. Paser**	**Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan Pendidikan Sesuai Ketentuan**	**100%**	**159.218.000,00**
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**Kab. Paser**	**Presentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**100%**	**55.000.000,00**	**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Kab. Paser**	**Presentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**100%**	**55.000.000,00**
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlayani	1 Dokumen	20.000.000,00	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlayani	1 Dokumen	20.000.000,00

Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	35.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	35.000.000,00
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**Kab. Paser**	**Presentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**100%**	**104.218.000,00**	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Kab. Paser**	**Presentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**100%**	**104.218.000,00**
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	1 Dokumen	21.218.000,00	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	1 Dokumen	21.218.000,00
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyaraka	1 Dokumen	38.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyaraka	1 Dokumen	38.000.000,00
Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Pembinaan Bunda PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	45.000.000,00	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Pembinaan Bunda PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	45.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	**Kab. Paser**	**persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal**	**100%**	**591.000.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**Kab. Paser**	**persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal**	**100%**	**591.000.000,00**

Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Paser**	**Jumlah Lembaga yang Dibina**	**10 Kecamatan**	**591.000.000,00**	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Jumlah Lembaga yang Dibina**	**10 Kecamatan**	**591.000.000,00**
Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	10 Kamus	50.000.000,00	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	10 Kamus	50.000.000,00
Vitalitas, Konservasi dan Revitalitasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	4 Bahasa	50.000.000,00	Vitalitas, Konservasi dan Revitalitasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	4 Bahasa	50.000.000,00
Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/kota	Kab. Paser	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kaupaten/Kota	5 Publikasi	50.000.000,00	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/kota	Kab. Paser	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kaupaten/Kota	5 Publikasi	50.000.000,00
Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	10 Orang	110.000.000,00	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	10 Orang	110.000.000,00
Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	200 Buku	85.000.000,00	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	200 Buku	85.000.000,00

Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Peserta Didik	121.000.000,00	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Peserta Didik	121.000.000,00
Penyusunan Modul dan Bahan Ajar bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Modul dan Bahan Ajar bahasan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	1 Dokumen	125.000.000,00	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Modul dan Bahan Ajar bahasan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	1 Dokumen	125.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**2.793.465.000,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**8.909.878.650,00**
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Kab. Paser**	**Persentase penyelenggaraan Event Kebudayaan Sesuai Dengan Standar Kebudayaan**	**70%**	**600.000.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Kab. Paser**	**Persentase penyelenggaraan Event Kebudayaan Sesuai Dengan Standar Kebudayaan**	**70%**	**1.165.781.600,00**
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Paser**	**Prosentase Obyek Kebudayaan Masyarakat yang dikelola**	**1 Kegiatan**	**50.000.000,00**	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Prosentase Obyek Kebudayaan Masyarakat yang dikelola**	**1 Kegiatan**	**50.000.000,00**
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Paser	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek	50.000.000,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Paser	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek	50.000.000,00

Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Paser**	**Jumlah kesenian tradisional masyarakat yang di lestarikan**	**23 Objek**	**550.000.000,00**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Jumlah kesenian tradisional masyarakat yang di lestarikan**	**23 Objek**	**1.115.781.600,00**
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Paser	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	23 Obyek	550.000.000,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Paser	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	23 Obyek	1.115.781.600,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Kab. Paser**	**Persentase Kelompok Seni/Sanggar Kesenian yang aktif**	**30%**	**1.218.600.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Kab. Paser**	**Persentase Kelompok Seni/Sanggar Kesenian yang aktif**	**30%**	**1.782.818.400,00**
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Paser**	**Jumlah kelompok seni yang dibina**	**84 Seni**	**1.218.600.000,00**	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Jumlah kelompok seni yang dibina**	**84 Seni**	**1.782.818.400,00**
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Orang	583.600.000,00	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Orang	717.818.400,00
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Paser	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	635.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Paser	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	1.065.000.000,00

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	**Kab. Paser**	**Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah**	**5 Event**	**325.000.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Kab. Paser**	**Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah**	**5 Event**	**4.426.413.650,00**
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Paser**	**Jumlah Sejarah Lokal yang dibina**	**1 Objek**	**325.000.000,00**	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Jumlah Sejarah Lokal yang dibina**	**1 Objek**	**4.426.413.650,00**
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Dierdayakan	10 Orang	250.000.000,00	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Dierdayakan	10 Orang	3.241.413.650,00
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	75.000.000,00	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	1.185.000.000,00

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Kab. Paser**	**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**	**80%**	**27.040.000,00**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Kab. Paser**	**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**	**80%**	**27.040.000,00**
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Kab. Paser**	**Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya**	**14 Objek**	**27.040.000,00**	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya**	**14 Objek**	**27.040.000,00**
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kab. Paser	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	22 Obyek	27.040.000,00	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kab. Paser	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	22 Obyek	27.040.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**Kab. Paser**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Museum Sadurengas Pertahun**	**14%**	**622.825.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Kab. Paser**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Museum Sadurengas Pertahun**	**14%**	**1.507.825.000,00**

Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	**Kab. Paser**	**Jumlah museum yang di kelola**	**1 Unit**	**622.825.000,00**	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Jumlah museum yang di kelola**	**1 Unit**	**1.507.825.000,00**
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Kab. Paser	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	125 Unit	70.000.000,00	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Kab. Paser	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	125 Unit	70.000.000,00
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang	75.000.000,00	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang	75.000.000,00
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	200.025.000,00	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	200.025.000,00
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	277.800.000,00	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1.162.800.000,00

Penambahan Dana rencana awal di anggaran perubahan tahun 2024 dalam urusan bidang Pendidikan seperti anggaran Program Pengelolaan Pendidikan SD, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pada urusan pemerintahan bidang kebudayaan dalam program pengembangan kebudayaan, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Program pembinaan sejarah dalam kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Pengelolaan Permuseuman dalam kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota sudah sesuai dengan target capaian indicator kinerja pada analisis kebutuhan . Dimana pemanfaatan penambahan anggaran pada anggaran perubahan ini sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan capaian target indikator kinerja tersebut.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser pada Perubahan APBDTahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

Diisi Matriks Renja yang bersumber dari SIPD

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	MURNI					PERUBAHAN	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									795.491.315.107,00				891.063.824.656,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				793.197.850.107,00				881.544.727.606,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Kab. Paser	100%	416.308.907.010,00	APBD		100%	425.935.092.436,00

1	**01**	**01**	**2.01**		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan tepat Waktu	Kab. Paser	100%	836.101.000,00			100%	1.092.647.700,00
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	6 Dokumen	611.201.000,00			6 Dokumen	793.609.500,00
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	2 Dokumen	94.900.000,00			2 Dokumen	119.290.000,00
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	1 Laporan	130.000.000,00			1 Laporan	179.748.200,00
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Kualitas Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan yang Akuntable**	**Kab. Paser**	**100%**	**411.027.060.010,00**			**100%**	**420.009.764.736,00**
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	2.462 Orang/Bulan	410.557.060.010,00			2.462 Orang/Bulan	418.813.773.736,00
1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	1 Laporan	470.000.000,00			1 Laporan	1.195.991.000,00
1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Paser**	**100%**	**239.000.000,00**			**100%**	**503.944.000,00**
1	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Paser	24 Dokumen	239.000.000,00			24 Dokumen	503.944.000,00

1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Pasaer**	**12 Bulan**	**647.854.000,00**			**12 Bulan**	**697.854.000,00**
1	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pasaer	1 Dokumen	406.854.000,00			1 Dokumen	456.854.000,00
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pasaer	1.800 Orang	30.000.000,00			1.800 Orang	30.000.000,00
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaer	100 Orang	211.000.000,00			10 Orang	211.000.000,00
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Pasaer**	**12 Bulan**	**2.530.309.680,00**			**12 Bulan**	**2.835.896.075,00**
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaer	2 Paket	1.783.957.800,00			2 Paket	1.989.544.195,00
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaer	2 Paket	295.000.000,00			2 Paket	295.000.000,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pasaer	3 Paket	99.300.000,00			3 Paket	99.300.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaer	3 Laporan	352.051.880,00			3 Laporan	452.051.880,00

1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Pasaer**	**100%**	**878.582.320,00**			**100%**	**644.985.925,00**
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pasaer	5 Laporan	51.005.000,00			12 Laporan	51.005.000,00
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaer	5 Laporan	827.577.320,00			5 Laporan	593.980.925,00
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional**	**Kab. Pasaer**	**100%**	**150.000.000,00**			**100%**	**150.000.000,00**
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pasaer	5 Unit	150.000.000,00			5 Unit	150.000.000,00
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Putus Sekolah SMP**	**Kab. Pasaer**	**1%**	**369.657.026.647,00**	APBD		**1%**	**448.282.791.820,00**
						APK PAUD		**39%**				**39%**	
						APM SD		**98,50%**				**98,50%**	
						APM SMP		**96%**				**96%**	
						APK SD		**106,00%**				**106,00%**	
						APK SMP		**96%**				**96%**	
						Angka Putus Sekolah SD		**0,70%**				**0,70%**	
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Kelulusan SD**	**Kab. Pasaer**	**100%**	**212.572.349.026,00**			**100%**	**254.960.969.592,00**
						Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat		**93,50%**				**93,50%**	

						Persentase Ketersediaan Operasional SD		**100%**				**100%**	
						Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD		**55.63 %**				**55.63 %**	
						Persentase ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi baik		**93.03 %**				**93.03 %**	
						Persentase SD/Sederajat Terakreditasi		**100%**				**100%**	
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	5 Ruang	1.958.021.400,00			5 Ruang	1.980.031.400,00
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	Kab. Paser	7 Ruang	1.901.573.600,00			7 Ruang	2.101.573.600,00
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	Kab. Paser	5 Ruang	2.753.433.600,00			5 Ruang	2.984.813.600,00
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	Kab. Paser	21 Unit	11.137.805.299,00			21 Unit	31.103.311.399,00
1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	Kab. Paser	3 Unit	3.075.383.600,00			3 Unit	3.091.313.600,00
1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Direhabilitasi	Kab. Paser	3 Unit	2.633.931.400,00			3 Unit	2.887.012.400,00
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Paser	1 Paket	100.000.000,00			1 Paket	2.287.737.900,00

1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah	Kab. Paser	6 Paket	20.746.593.900,00			6 Paket	29.675.650.900,00
1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Paser	31696 Peserta Didik	25.000.000,00			31696 Peserta Didik	25.000.000,00
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Paser	100 Peserta Didik	653.406.000,00			100 Peserta Didik	508.472.100,00
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	1.087 Orang	44.249.398.179,00			1087 Orang	40.857.412.058,00
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser	100 Orang	718.812.850,00			100 Orang	2.725.100.891,00
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Paser	208 Satuan Pendidikan	497.560.000,00			208 Satuan Pendidikan	489.560.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kab. Paser	208 Satuan Pendidikan	34.988.820.000,00			225 Satuan Pendidikan	45.934.927.683,00
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Kab. Paser	14 Ruang	4.883.423.800,00			14 Ruang	4.892.603.800,00

1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	1 Dokumen	290.400.000,00			1 Dokumen	595.900.000,00
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Paser	1 Paket	3.368.440.900,00			1 Paket	3.368.440.900,00
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Paser	50 Ruang	66.723.195.398,00			50 Ruang	66.432.024.361,00
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Paser	1 Unit	130.000.000,00			1 Unit	130.000.000,00
1	01	02	2.01	0050	Penyelengaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kab. Paser	208 Satuan Pendidikan	429.865.000,00			226 Satuan Pendidikan	582.798.900,00
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Paser	11 Ruang	11.307.284.100,00			11 Ruang	12.307.284.100,00
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Angka Kelulusan SMP**	**Kab. Paser**	**100%**	**117.247.570.721,00**			**100%**	**144.679.639.598,00**
						Persentase Ketersediaan Operasional SMP		**100%**				**100%**	
						Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP		**71%**				**71%**	
						Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik		**88.75 %**				**88.75 %**	

						Persentase Satuan Pendidikan SMP yang dibina		**100%**				**100%**	
						Persentase SMP/Sederajat Terkareditasi		**98.90 %**				**98.90 %**	
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru Kepala Sekolah TU yang dibangun	Kab. Paser	5 Ruang	2.215.232.600,00			5 Ruang	2.215.232.600,00
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	Kab. Paser	13 Ruang	4.168.674.400,00			13 Ruang	4.168.674.400,00
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	Kab. Paser	9 Ruang	3.589.692.850,00			9 Ruang	3.245.192.850,00
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Dibangun	Kab. Paser	15 Ruang	7.905.077.100,00			15 Ruang	7.905.077.100,00
1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	Kab. Paser	42 Unit	7.875.738.750,00			42 Unit	7.675.738.750,00
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun	Kab. Paser	42 Unit	6.450.337.250,00			42 Unit	17.523.079.400,00
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang di rehabilitasi Sedang/Berat	Kab. Paser	8 Ruang	3.885.555.400,00			8 Ruang	3.890.524.800,00
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Paser	1 Ruang	247.811.550,00			1 Ruang	247.811.550,00
1	01	02	2.02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Kab. Paser	4 Ruang	1.431.525.600,00			4 Ruang	1.431.525.600,00

1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Paser	4 Unit	1.511.113.600,00			4 Unit	1.714.994.600,00
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Paser	3 Unit	743.615.900,00			3 Unit	886.712.900,00
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah yang Tersedia	Kab. Paser	9 Paket	815.194.721,00			9 Paket	1.040.919.321,00
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kab. Paser	8 Paket	9.370.912.400,00			8 Paket	17.873.262.500,00
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab. Paser	3 Paket	1.306.487.200,00			3 Paket	1.306.487.200,00
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Paser	240 Peserta Didik	1.819.683.800,00			240 Peserta Didik	2.949.484.500,00
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	526 Orang	21.114.808.550,00			526 Orang	20.829.724.550,00
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser	100 Orang	415.866.500,00			100 Orang	1.868.790.350,00

1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Paser	70 Satuan Pendidikan	450.000.000,00			70 Satuan Pendidikan	1.354.341.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kab. Paser	77 Satuan Pendidikan	16.843.645.000,00			77 Satuan Pendidikan	20.338.174.777,00
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	1 Dokumen	296.526.250,00			1 Dokumen	472.776.250,00
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Paser	3657 Satuan Pendidikan	830.000.000,00			77 Satuan Pendidikan	1.781.043.300,00
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Paser	12 Ruang	21.727.714.100,00			17 Ruang	21.727.714.100,00
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Paser	1 Paket	138.383.600,00			1 Paket	138.383.600,00
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Paser	9 Ruang	2.093.973.600,00			9 Ruang	2.093.973.600,00
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD**	**Kab. Paser**	**67.63 %**	**35.863.187.050,00**			**67.63 %**	**44.381.902.030,00**
						Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik		**67.63 %**				**67.63 %**	
						Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang dibina		**100%**				**100%**	

						Presentase Ketersediaan Operasional PAUD		**100%**				**100%**	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	Kab. Paser	32 Unit	8.391.145.350,00			32 Unit	9.689.902.300,00
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	Kab. Paser	21 Unit	3.316.497.600,00			21 Unit	3.587.305.600,00
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kab. Paser	9 Paket	904.485.100,00			9 Paket	984.989.100,00
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD	Kab. Paser	20 Paket	287.490.000,00			20 Paket	1.587.490.000,00
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Paser	5.406 Peserta Didik	120.000.000,00			5406 Peserta Didik	120.000.000,00
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kab. Paser	53 Orang	1.919.600.000,00			53 Orang	1.919.600.000,00
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser	51 Orang	100.000.000,00			51 Orang	3.112.678.030,00
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Paser	204 Satuan Pendidikan	1.700.000.000,00			251 Satuan Pendidikan	2.050.000.000,00
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kab. Paser	204 Satuan Pendidikan	8.755.400.000,00			251 Satuan Pendidikan	9.659.440.000,00

1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	1 Dokumen	100.000.000,00			1 Dokumen	253.194.000,00
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Paser	4 Ruang	858.093.300,00			4 Ruang	940.901.300,00
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Paser	28 Ruang	5.280.466.200,00			28 Ruang	6.492.120.200,00
1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kab. Paser	2 Unit	4.130.009.500,00			2 Unit	3.984.281.500,00
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang aktif**	**Kab. Paser**	**35%**	**3.973.919.850,00**			**35%**	**4.260.280.600,00**
1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Dipelihara	Kab. Paser	15 Unit	1.380.090.050,00			15 Unit	1.506.118.100,00
1	01	02	2.04	0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	10 Paket	610.019.800,00			10 Paket	455.186.800,00
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser	51 Orang	60.000.000,00			51 Orang	60.000.000,00
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kab. Paser	9 Satuan Pendidikan	1.698.810.000,00			9 Satuan Pendidikan	1.698.810.000,00

1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	1 Dokumen	20.000.000,00			1 Dokumen	20.000.000,00
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah lembaga Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	100 Peserta Didik	205.000.000,00			100 Peserta Didik	520.165.700,00
1	01	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal**	**Kab. Paser**	**100%**	**1.112.366.800,00**			**100%**	**1.798.056.000,00**
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**Jumlah Mapel Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Kab Paser**	**1 Mapel**	**812.366.800,00**			**1 Mapel**	**1.399.702.000,00**
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab Paser	1 Dokumen	150.000.000,00			1 Dokumen	210.726.500,00
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Kab Paser	50 Orang	562.366.800,00			50 Orang	802.505.300,00
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab Paser	1 Dokumen	100.000.000,00			1 Dokumen	386.470.200,00

1	**01**	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Kab. Paser**	**100%**	**300.000.000,00**			**100%**	**398.354.000,00**
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kab. Paser	1 Dokumen	150.000.000,00			1 Dokumen	200.788.000,00
1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kab. Paser	1 Dokumen	150.000.000,00			1 Dokumen	197.566.000,00
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Pendidik Sesuai Standar**	**Kab. Paser**	**91%**	**5.369.331.650,00**			**91%**	**4.903.569.350,00**
						Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai Standar		**60%**				**60%**	
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP**	**Kab. Paser**	**94%**	**5.369.331.650,00**			**94%**	**4.903.569.350,00**

1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	1 Dokumen	3.308.187.150,00			1 Dokumen	3.064.813.300,00
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	1 Laporan	2.061.144.500,00			1 Laporan	1.838.756.050,00
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan Pendidikan Sesuai Ketentuan**	**Kab. Paser**	**100%**	**159.218.000,00**			**100%**	**159.218.000,00**
1	**01**	**05**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Presentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Kab. Paser**	**100%**	**55.000.000,00**			**100%**	**55.000.000,00**
1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlayani	Kab. Paser	1 Dokumen	20.000.000,00			1 Dokumen	20.000.000,00

1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	1 Dokumen	35.000.000,00			1 Dokumen	35.000.000,00
1	**01**	**05**	**2.02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Presentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Kab. Paser**	**100%**	**104.218.000,00**			**100%**	**104.218.000,00**
1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	Kab. Paser	1 Dokumen	21.218.000,00			1 Dokumen	21.218.000,00
1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyaraka	Kab. Paser	1 Dokumen	38.000.000,00			1 Dokumen	38.000.000,00
1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pembinaan Bunda PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	1 Dokumen	45.000.000,00			1 Dokumen	45.000.000,00
1	**01**	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal**	**Kab. Paser**	**100%**	**591.000.000,00**			**100%**	**466.000.000,00**

1	**01**	**06**	**2.01**		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga yang Dibina**	**Kab. Pasir**	**10 Kecamatan**	**591.000.000,00**			**10 Kecamatan**	**466.000.000,00**
1	01	06	2.01	0001	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Kab. Pasir	10 Kamus	50.000.000,00				
1	01	06	2.01	0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalitasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	Kab. Pasir	4 Bahasa	50.000.000,00			Bahasa	100.000.000,00
1	01	06	2.01	0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kaupaten/Kota	Kab. Pasir	5 Publikasi	50.000.000,00				
1	01	06	2.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	Kab. Pasir	10 Orang	110.000.000,00			3 Orang	110.000.000,00
1	01	06	2.01	0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	Kab. Pasir	200 Buku	85.000.000,00			200 Buku	85.000.000,00

1	01	06	2.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	50 Peserta Didik	121.000.000,00			50 Peserta Didik	171.000.000,00
1	01	06	2.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar bahasan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Kab. Paser	1 Dokumen	125.000.000,00				-
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**2.293.465.000,00**				**9.519.097.050,00**
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase penyelenggaraan Event Kebudayaan Sesuai Dengan Standar Kebudayaan**	**Kab. Paser**	**70%**	**100.000.000,00**			**70%**	**1.290.781.600,00**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Obyek Kebudayaan Masyarakat yang dikelola**	**Kab. Paser**	**1 Kegiatan**	**50.000.000,00**			**1 Kegiatan**	**50.000.000,00**
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kab. Paser	10 Objek	50.000.000,00			10 Objek	50.000.000,00

2	**2 2**	**0 2**	**2.0 2**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kesenian tradisional masyarakat yang di lestarikan**	**Kab. Paser**	**23 Objek**	**550.000.000,00**			**23 Objek**	**1.240.781.600,00**
2	2 2	0 2	2.0 2	000 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kab. Paser	23 Obyek	550.000.000,00			23 Obyek	1.240.781.600,00
2	**2 2**	**0 3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Kelompok Seni/Sanggar Kesenian yang aktif**	**Kab. Paser**	**30%**	**1.218.600.000,00**			**30%**	**2.317.036.800,00**
2	**2 2**	**0 3**	**2.0 1**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelompok seni yang dibina**	**Kab. Paser**	**84 Seni**	**1.218.600.000,00**			**84 Seni**	**2.317.036.800,00**
2	2 2	0 3	2.0 1	000 1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kab. Paser	10 Orang	583.600.000,00			10 Orang	852.036.800,00
2	2 2	0 3	2.0 1	000 3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Paser	10 Lembaga	635.000.000,00			10 Lembaga	1.465.000.000,00

2	**2 2**	**0 4**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah**	**Kab. Paser**	**5 Event**	**325.000.000,00**			**5 Event**	**4.376.413.650,00**
2	**2 2**	**0 4**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sejarah Lokal yang dibina**	**Kab. Paser**	**1 Objek**	**325.000.000,00**			**1 Objek**	**4.376.413.650,00**
2	2 2	0 4	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Dierdayakan	Kab. Paser	10 Orang	250.000.000,00			10 Orang	3.241.413.650,00
2	2 2	0 4	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Kab. Paser	4 Dokumen	75.000.000,00			4 Dokumen	1.135.000.000,00
2	**2 2**	**0 5**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**	**Kab. Paser**	**80%**	**27.040.000,00**			**80%**	**77.040.000,00**
2	**2 2**	**0 5**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya**	**Kab. Paser**	**14 Objek**	**27.040.000,00**			**14 Objek**	**77.040.000,00**
2	2 2	0 5	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kab. Paser	22 Obyek	27.040.000,00			22 Obyek	77.040.000,00
2	**2 2**	**0 6**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Museum Sadurengas Pertahun**	**Kab. Paser**	**14%**	**622.825.000,00**			**14%**	**1.457.825.000,00**
2	**2 2**	**0 6**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Jumlah museum yang di kelola**	**Kab. Paser**	**1 Unit**	**622.825.000,00**			**1 Unit**	**1.457.825.000,00**

2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Kab. Paser	125 Unit	70.000.000,00			125 Unit	220.000.000,00
2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Kab. Paser	5 Orang	75.000.000,00			5 Orang	160.000.000,00
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kab. Paser	1 Unit	200.025.000,00			1 Unit	550.025.000,00
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Kab. Paser	1 Unit	277.800.000,00			1 Unit	527.800.000,00

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2 Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

Tana Paser, 20 Juni 2024

Kepala,

M. YUNUS SYAM, S.Pd, M.Si
Pembina TK.I / IV B
NIP. 197012031994121002

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PERHUBUNGAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2024

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PERHUBUNGAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah- Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dokumen ini merupakan implementasi dari Renstra dan bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Paser di Bidang Perhubungan secara tahunan untuk tahun 2024 agar kebijakan yang dimaksud tepat sasaran sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Perubahan Renja Perangkat Daerah ini adalah dokumen perencanaan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Kami mengharapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi, dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya kami mengharapkan kritik, saran, masukan serta dukungan semua pihak, demi suksesnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan ini dan atas bantuan semua pihak yang terkait dengan penyusunan Renja Dinas Perhubungan ini diucapkan terima kasih.

Tanah Grogot 16 Agustus 2024
Kepala Dinas



H. INAYATULLAH, ST, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750511 199903 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar iii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel v

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud Dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD. 18

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat serta Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 21

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran 24

3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 25

3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39

3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024 44

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan..... 68

4.2 Rencana Tindak Lanjut..... 68

LAMPIRAN 70

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Periode Pelaksanaan hingga Triwulan II Tahun 2024 10

Tabel 2.2 Sasaran Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser 19

Tabel 2.3 Sasaran Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 20

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Paser 24

Tabel 3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Perhubungan..... 27

Tabel 3.3 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser 39

Tabel 3.4 Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Paser 45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangkapendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Surat Edaran Bupati Paser Nomor 000.7.2.4 / 36/ P2EP-Bapplitbag Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perhubungan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi,

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan yang terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
17. Peraturan Bupati Paser Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan organisasi unit pelaksanaan daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser;
18. Peraturan Bupati Paser Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser;
19. Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
20. Perbub. No 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024
21. PERDA Nomor 7 Tahun 2024 Tentang P APBD TA 2024, Tanggal 20 September 2024
22. PERBUP Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Penjabaran P APBD TA 2024, Tanggal 20 September 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Perhubungan Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Paser serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokokbahasan dalam penulisan Perubahan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan

Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2023 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2020 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2020 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Targer dan realisasi renja Tahun 2023				Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Predikat	
			Target		Realisasi					Triwulan-I		Triwulan-II							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
			K	Rp	K	Rp	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	-		34,976,682,906			0	-	34,779,586,476	0	3,129,153,424	-	-	-	8,717,049,999	0	25.06	SR	SR
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	-		33,503,013,166			0	-	33,158,947,088	0	2,971,011,424	-		-	8,228,512,931	0	24.82	SR	SR
2.15.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Indeks kepuasan pelayanan sekretariat 2. presentase perangkat daerah dengannilai IRB baik**	**72 % 80 %**	**14,039,784,388**	**72 %. 80 %**	**13,377,817,545**	**72 % 80 %**	**%**	**14,070,813,440**	**15 % 20 %**	**2,582,141,858**	**20 % 20 %**	**4,377,393,752**	**35 % 40 %**	**6,959,535,610**	**50 50**	**49.46**	**SR**	**SR**
2.15.001.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD**	**4**	**22,912,200**	**4**	**21,848,200**	**4**	**Dokumen**	**47,912,700**	**-**	**3,600,000**	**-**	**7,789,000**	**-**	**11,389,000**	**-**	**23.77**	**SR**	**SR**
2.15.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah	1	9,906,800	1	9,456,800	1	Dokumen	34,906,800	-	3,600,000	-	6,889,000	-	10,489,000	0	30.05	SR	SR
2.15.001.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD	1	4,055,000	1	4,055,000	1	Dokumen	4,055,000	-	-	-	900,000	-	900,000	0	22.19	SR	SR
2.15.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	6,875,600	1	6,261,600	1	Dokumen	6,875,900	-	-	-	-	-	-	0	0.00	SR	SR
2.15.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	2,074,800	1	2,074,800	1	Dokumen	2,075,000	-	-	-	-	-	-	0	0.00	SR	SR
2.15.001.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentasi administrasi keuangan yang terlaksana**	**100**	**9,443,210,727**	**100**	**9,443,210,727**	**100**	**%**	**9,312,621,328**	**7**	**1,645,516,255**	**7**	**3,342,548,436**	**14**	**4,988,064,691**	**14.00**	**53.56**	**SR**	**R**
2.15.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	8,540,574,927	56	8,540,574,927	56	Orang/bulan	8,481,739,328	56	1,472,919,420	56	3,094,015,019	28	4,566,934,439	50.00	53.84	SR	R
2.15.001.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	902,635,800	1	902,635,800	1	Dokumen	830,882,000	-	172,596,835	-	248,533,417	-	421,130,252	0	50.68	SR	R

2.15.001.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**40,668,000**	**100**	**39,267,738**	**100**	**%**	**40,000,000**	**-**	**4,261,200**	**-**	**-**	**-**	**4,261,200**	**-**	**10.65**	**SR**	**SR**
2.15.001.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	40,668,000	2	39,267,738	2	Orang	40,000,000	-	4,261,200	-	-	-	4,261,200	-	10.65	SR	SR
2.15.001.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah**	**100**	**731,114,165**	**100**	**684,594,030**	**100**	**%**	**450,685,382**	**5.8**	**87,129,869**	**12**	**112,320,660**	**17.30**	**199,450,529**	**17.30**	**19.60**	**SR**	**SR**
2.15.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2,365,200	1	2,295,000	4	Paket	2,375,000	-	-	-	-	-	-	0	0.00	SR	SR
2.15.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	237,706,865	7	236,005,300	7	Paket	163,520,000	-		-	-	-	-	0	0.00	SR	SR
2.15.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	56,975,400	1	41,950,544	40	Paket	47,975,040	-	-	11	13,937,121	11	13,937,121	27.50	29.05	SR	SR
2.15.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	17,062,100	1	12,601,400	1	Paket	17,062,100	-	-	-	2,866,000	-	2,866,000	-	16.80	SR	SR
2.15.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65	417,004,600	67	391,741,786	70	Laporan	219,753,242	12	87,129,869	10	95,517,539	22	182,647,408	31.43	83.11	SR	T
2.15.001.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan skpd**	**100**	**3,645,250,346**	**100**	**3,627,353,182**	**100**	**%**	**3,148,545,980**	**8**	**825,316,681**	**8**	**844,545,487**	**16**	**1,669,862,168**	**16.00**	**53.04**	**SR**	**R**
2.15.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	991,800	1	900,000	1	Laporan	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	SR	SR
2.15.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	3,629,795,826	1	3,614,577,354	12	Laporan	3,129,794,480	3	823,483,921	3	841,783,279	6	1,665,267,200	50.00	53.21	SR	SR
2.15.001.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	3,050,000	1	2,627,550	15	Laporan	3,050,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	SR	SR
2.15.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	11,412,720	1	9,248,278	12	Laporan	14,701,500	3	1,832,760	3	2,762,208	6	4,594,968	50.00	31.26	SR	SR
2.15.001.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang skpd**	**31**	**156,628,950**	**16**	**125,244,775**	**31**	**unit**	**1,071,048,050**	**2**	**16,317,853**	**3**	**70,190,169**	**5**	**86,508,022**	**16.13**	**8.08**	**SR**	**SR**

2.15.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	150,988,950	7	122,836,511	15	Unit	163,908,050	1	15,297,445	2	69,088,128	3	84,385,573	20.00	51.48	SR	R
2.15.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	5,640,000	9	2,408,264	15	Unit	5,640,000	1	1,020,408	1	1,102,041	2	2,122,449	13.33	37.63	SR	SR
2.15.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	1	Unit	901,500,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	SR	SR
2.15.002	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar**		**16,237,511,578**		**16,021,170,185**	**90**	**%**	**16,843,029,648**	**1.14**	**342,016,470**	**3.17**	**681,467,812**	4	**1,023,484,282**	**4.79**	**6.08**	**SR**	**SR**
2.15.002.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk LLAJ**	**100**	**27,128,800**	**100**	**11,130,000**	**100**	**%**	**37,128,800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.00**	**SR**	**SR**
2.15.002.2.01.002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	27,128,800	1	11,130,000	1	Dokumen	37,128,800	-	-	-	-	-	-	-	0.00	SR	SR
2.15.002.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah perlengkapan jalan yang terpasang**	**100**	**14,482,771,700**	**100**	**14,383,334,143**	**100**	**%**	**15,065,463,263**	**7**	**106,695,770**	**11**	**330,690,627**	**18**	**437,386,397**	**17.52**	**2.90**	**SR**	**SR**
2.15.002.2.02.002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	528	13,891,250,300	1325	13,794,424,450	222	Unit	14,639,173,263	-	30,246,170	-	178,892,393	-	209,138,563	-	1.43	SR	SR
2.15.002.2.02.003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5419	264,231,400	168	261,689,693	1	Unit	119,060,000	-	25,324,600	-	59,100,234	-	84,424,834	-	70.91	SR	S
2.15.002.2.02.004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	941	327,290,000	961	327,220,000	951	Unit	307,230,000	75	51,125,000	225	92,698,000	300	143,823,000	31.55	46.81	ST	SR
2.15.002.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase jumlah sarana dan prasarana terminal yang dikembangkan**	**100**	**599,608,000**	**100**	**550,323,500**	**100**	**%**	**581,248,700**	**-**	**80,249,300**	**-**	**-**	**-**	**80,249,300**	**-**	**13.81**	**SR**	**SR**
2.15.002.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1	599,608,000	1	550,323,500	1	Unit	581,248,700	-	80,249,300	-	103,715,800	-	183,965,100	-	31.65	SR	SR
2.15.002.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Terlaksananya penerbitan izin penyelenggaraan parkir**	**1**	**29,999,040**	**1**	**29,962,400**	**1**	**Dokumen**	**59,999,040**	**-**	**12,720,000**	**-**	**-**	**-**	**12,720,000**	**-**	**21.20**	**SR**	**SR**

2.15.002.2.04.001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	29,999,040	1	29,962,400	1	Dokumen	59,999,040	-	12,720,000	-	-	-	12,720,000	-	21.20	SR	SR
2.15.002.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Tersedinya Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten**	**3**	**135,984,838**	**3**	**104,096,405**	**3**	**Dokumen**	**290,984,838**	**-**	**-**	**-**	**82,571,300**	**-**	**82,571,300**	**-**	**28.38**	**SR**	**SR**
2.15.002.2.06.001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	41,996,968	1	36,716,405	1	Laporan	111,996,968	-	-	-	49,038,400	-	49,038,400	-	43.79	SR	SR
2.15.002.2.06.004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1	31,999,620	1	31,035,000	1	Laporan	81,999,620	-	-	-	23,401,000	-	23,401,000	-	28.54	SR	SR
2.15.002.2.06.005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	61,988,250	1	36,345,000	1	Laporan	96,988,250	-	-	-	10,131,900	-	10,131,900	-	10.45	SR	**SR**
2.15.002.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Peningkatan jumlah pengemudi kendaraan bermotor yang kompeten dan memenuhi persyaratan**	**35**	**81,945,950**	**10**	**81,898,092**	**35**	**orang**	**66,585,992**	**-**	**6,900,000**	**-**	**2,300,000**	**-**	**9,200,000**	**-**	**13.82**	**SR**	**SR**
2.15.002.2.08.004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1	81,945,950	2	81,898,092	1	Laporan	66,585,992	-	6,900,000	-	2,300,000	-	9,200,000	-	13.82	**SR**	**SR**
2.15.002.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah**	**15**	**57,715,500**	**15**	**56,920,500**	**15**	**unit**	**44,985,000**	**-**	**-**	**-**	**11,980,000**	**-**	**11,980,000**	**-**	**46.66**	**ST**	**SR**

		Kabupaten/Kota																
2.15.002.2.09.001	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	15	57,715,500	15	56,920,500	15	Unit	44,985,000	-	-	-	11,980,000	-	11,980,000	-	26.63	SR	SR
2.15.002.2.16	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya dokumen hasil kegiatan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan umum**	**1**	**822,357,750**	**1**	**803,505,145**	**1**	**Dokumen**	**696,634,015**	**-**	**135,451,400**	**-**	**253,925,885**	**-**	**389,377,285**	**-**	**55.89**	**SR**	**R**
2.15.002.2.16.003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	822,357,750	1	803,505,145	1	Laporan	696,634,015	-	135,451,400	-	253,925,885	-	389,377,285	-	55.89	SR	R
2.15.003	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-perorang atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten**	**90**	**3,111,917,200**	**90**	**3,083,307,756**	**90**	**%**	**2,245,104,000**	**7**	**46,853,096**	**7**	**-**	14	**245,493,039**	**15.56**	**10.93**	**SR**	**SR**
2.15.003.2.06	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**	**Tersedianya data penetapan Lintas Penyeberangan dan PersetujuanPengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/AtauJaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**	**1**	**156,917,400**	**1**	**155,888,751**	**1**	**Dokumen**	**370,529,000**	**-**	**32,041,200**	**-**	**70,417,485**	**-**	**102,458,685**	**-**	**27.65**	**SR**	**SR**

2.15.003.2.06.002	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah	1	156,917,400	1	155,888,751	1	Laporan	370,529,000	-	32,041,200	-	70,417,485	-	102,458,685	-	27.65	SR	SR
2.15.003.2.13	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Terpeliharanya prasarana Pelabuhan Sungai & danau**	**2**	**2,954,999,800**	**3**	**2,927,419,005**	**2**	**unit**	**1,874,575,000**	**-**	**78,245,400**	**-**	**64,788,954**	**-**	**143,034,354**	**-**	**7.63**	**SR**	**SR**
2.15.003.2.13.006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	4	2,954,999,800	4	2,927,419,005	4	Unit	1,874,575,000	-	78,245,400	-	64,788,954	-	143,034,354	0	7.63	SR	SR
2.15.0.00.0.00.01.0002	**UPTD**	**-**	**0**		**0**		**0**	**-**	**1,620,639,388**	**-**	**158,142,000**	**-**	**273,690,528**	**-**	**488,537,068**	**0**	30.14	SR	SR
2.15.0.00.0.00.01.0002	**UPTD Terminal Kuaro**	**-**	**0**	**94,499,790**	**0**	**68,729,591**	**0**	**-**	**118,124,738**	**-**	**3,528,000**	**-**	**27,767,000**	**-**	**31,295,000**	**0**	26.49	SR	SR
2.15.002	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar**	**90**	**94,499,790**	**90**	**68,729,591**	**90**	**%**	**118,124,738**	**1.4**	**3,528,000**	**3.17**	**27,767,000**	5	**31,295,000**	**5.08**	**26.49**	**SR**	**SR**
2.15.002.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**15**	**94,499,790**	**15**	**68,729,591**	**15**	**unit**	**118,124,738**	**-**	**3,528,000**	**-**	**27,767,000**	**-**	**31,295,000**	**0.00**	**26.49**	**SR**	**SR**
2.15.002.2.09.002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	94,499,790	12	68,729,591	12	Laporan	118,124,738	3	3,528,000	3	27,767,000	6	31,295,000	50.00	26.49	SR	SR
2.15.0.00.0.00.01.0003	**UPT Pelabuhan Tana Paser**	**-**	**0**	**374,773,800**	**0**	**348,269,500**	**0**	**-**	**387,995,962**	**-**	**60,806,000**	**-**	**123,593,021**	**-**	**184,399,021**	**0**	**47.53**	**SR**	**SR**

2.15.003	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-perorang atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten**	**90**	**374,773,800**	**90**	**348,269,500**	**90**	**%**	**387,995,962**	**7**	**60,806,000**	**7**	**123,593,021**	14	**184,399,021**	**15.56**	**47.53**	**SR**	**SR**
2.15.003.2.13	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Terpeliharanya Prasarana Pelabuhan Sungai & Danau**	**1**	**374,773,800**	**1**	**348,269,500**	**2**	**unit**	**387,995,962**	**-**	**60,806,000**	**-**	**123,593,021**	**-**	**184,399,021**	**0**	**47.53**	**SR**	**SR**
2.15.003.2.13.003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1	374,773,800	1	348,269,500	1	Unit	387,995,962	-	60,806,000	-	123,593,021	-	184,399,021	0	47.53	SR	SR
2.15.0.00.0.00.01.0004	**UPTD Terminal Kota**	**-**	**0**	**268,343,750**	**0**	**245,834,500**	**0**	**-**	**287,869,188**	**-**	**44,480,000**	**-**	**73,002,507**	**-**	**117,482,507**	**0**	**40.81**	**SR**	**SR**
2.15.002	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar**	**90**	**268,343,750**	**90**	**245,834,500**	**90**	**%**	**287,869,188**	**1.4**	**44,480,000**	**3.17**	**73,002,507**	4.57	**117,482,507**	**5.08**	**40.81**	**SR**	**ST**
2.15.002.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**15**	**268,343,750**	**15**	**245,834,500**	**15**	**unit**	**287,869,188**	**-**	**44,480,000**	**-**	**73,002,507**	**-**	**117,482,507**	**0**	**40.81**	**SR**	**SR**
2.15.002.2.09.002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	268,343,750	12	245,834,500	12	Laporan	287,869,188	3	44,480,000	3	73,002,507	6	117,482,507	50.00	40.81	SR	SR
2.15.0.00.0.00.01.0005	**UPTD PKB**	**-**		**736,052,400**		**715,223,700**	**0**	**-**	**826,649,500**	**-**	**49,328,000**	**-**	**49,328,000**	**-**	**155,360,540**	**0**	**18.79**	**SR**	**SR**
2.15.002	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar**	**90**	**736,052,400**	**90**	**715,223,700**	**90**	**%**	**826,649,500**	**1.4**	**49,328,000**	**3.17**	**49,328,000**	4.57	**155,360,540**	5.08	**18.79**	**SR**	**SR**
2.15.002.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Peningkatan Jumlah kendaraan yg telah diuji kelaikannya**	**12,265**	**736,052,400**	**11302**	**715,223,700**	**13,500**	**unit**	**826,649,500**	**1,024**	**49,328,000**	**745**	**106,032,540**	**1,769**	**155,360,540**	**13.10**	**18.79**	**SR**	**SR**
2.15.002.2.05.003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	12265	586,052,400	11,294	571,192,200	11,539	Unit	462,649,500	11,404	49,328,000	11,478	106,032,540	5,721	155,360,540	49.58	33.58	SR	SR

2.15.002.2.05.007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9	150,000,000	9	144,031,500	9	Unit	364,000,000	-	-	-	-	-	-	0	0.00	SR	SR

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 11, 14%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8,717,049,999.00 (Delapan milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 34,779,586,476.00 (Tiga puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar 25,06%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Perhubungan sebesar 11,14 %, dengan predikat kinerja "**Sangat Rendah"**
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 0 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 0 indikator capaian kinerja 0%-50% = 38 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu: melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser adalah:

a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang

   perhubungan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah

Daerah;

b. penetapan kebijakan di bidang perhubungan;
c. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan

   yang meliputi perhubungan darat, perhubungan laut dan udara serta

   pembinaan dan pengendalian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Upaya Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

TABEL 2.2
Sasaran Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
1	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	1. Indeks kepuasan pelayanan masyarakat 2. Presentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik.
2	Mengoptimalkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman dan nyaman	1. Presentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar 2. Peresentase penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-perongan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja

pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel 2.3 di bawah ini

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan
sampai dengan Triwulan II
Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi	Indeks Reformasi Birokrasi Unit	60	65	70	75	80	11,18 %	17,20
Sasaran: Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Jumlah temuan penyimpanan pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dan BPK RI dan APIP Eksternal	0	0	0	0	0	0	100 %
	Predikat Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	B	B	BB	A	A		
Tujuan: Meningkatkan kualitas infrastruktur Transportasi	Persentase Infrastruktur Transportasi yang berkualitas baik	71	75	80	84	90	13,54 %	18,05 %
Sasaran: Mengoptimalkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman dan nyaman	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Berkualitas baik serta terwujudnya sinergitas antar instansi terkait	70	75	80	85	90	13,54 %	18,05 %

Berdasarkan Tabel 2.3 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan **Meningkatkan Tata Kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi**" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Reformasi

Birokrasi Unit", telah belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 11,18 % dari target sebesar 65 % dengan capaian kinerja sebesar 17,2 %;

Tujuan **Meningkatkan kualitas infrastruktur Transportasi**" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase Infrastruktur Transportasi yang berkualitas baik", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 13,54 % dari target sebesar 75 % dengan capaian kinerja sebesar 18,05 %

b. Sasaran "**Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel"** memiliki indikator kinerja yaitu "Jumlah temuan penyimpanan pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dan BPK RI dan APIP Eksternal", telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0 dari target sebesar 0 dengan capaian kinerja sebesar 100 %

Sasaran "**Mengoptimalkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman dan nyaman"** memiliki indikator kinerja yaitu "Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Berkualitas baik serta terwujudnya sinergitas antar instansi terkait", ", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 13,54 % dari target sebesar 75 % dengan capaian kinerja sebesar 18,05 %

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
2. Juknis pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang terlambat
3. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
4. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat
5. Pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun

Untuk Mengatasi faktor-faktor penghambat maka dinas Perhubungan Kabupaten Paser melakukan evaluasi dengan melakukan penambahan anggaran serta melakuan optimalisasi penyerapan anggaran dan belanja. Langkah ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan yang diikuti dengan disiplin dalam melaksanakan rencana tersebut. Langkah selanjutnya adalah mempercepat proses pengadaan barang / jasa (PBJ) pemerintah. Selain itu, pengukuran atas kinerja pelaksanaan anggaran juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, mendorong akselerasi, memastikan terpenuhinya tata kelola pelaksanaan anggaran, serta mendorong pencapaian output yang ditargetkan.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang

dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Perhubungan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Target Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Tujuan: **Meningkatkan Tata Kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi**	Indeks Reformasi Birokrasi Unit	Nilai Indeks RB	70 %	70 %
Sasaran: **Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel**	Jumlah temuan penyimpanan pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dan BPK RI dan APIP Eksternal	Jumlah penyimpangan yang ditemui	0	0
	Predikat Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	BB
Tujuan: **Meningkatkan**	Persentase Infrastruktur Transportasi yang	Jumlah Infrastruktur	80 %	80 %

kualitas infrastruktur Transportasi	berkualitas baik	Transportasi yang berkualitas baik / Jumlah Infrastruktur		
Sasaran: Mengoptimalkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman dan nyaman	Presentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar	Jumlah Sarana dan prasarana LLAJ yang tersedia/ terpelihara / Jumlah Kebutuhan Sarana dan prasarana LLAJ x 100%	100%	100%
		Jumlah Dokumen administrasi dan teknis sarana dan prasarana LLAJ yang tersusun / Jumlah dokumen administrasi dan teknis sarana dan prasarana LLAJ		
	Peresentase penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-perongan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten	Jumlah Dokumen yang disusun / Jumlah Rencana Dokumen yang disusun Per-tahun x 100%	100%	100%
	Presentasi pelaksanaan rencana induk perkretaapian	Jumlah Dokumen yang disusun / Jumlah Rencana Dokumen yang disusun Per-tahun x 100%	100%	100%

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu “PERCEPATAN TRANSFORMASI

EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**”** yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke-3.1 yaitu “Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Perhubungan Kabupaten Paser telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Perhubungan

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Kab. Paser	**1. Indeks kepuasan pelayanan masyarakat** **2. Presentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik**	**74 %** **85 %**	**14.474.975.060**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Kab. Paser	**1. Indeks kepuasan pelayanan masyarakat** **2. Presentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik**	**74 %** **85 %**	**16,803,895,089**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Paser	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD**	**4 dokumen**	**47.912.700**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Paser	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD**	**4 dokumen**	**47.912.700**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	34.906.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	34.906.800	

	Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	4.055.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	4.055.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1 dokumen	6.875.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja		6.875.900	
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen		
	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	2.075.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	2.075.000	
1.2	**Administrasi KeuanganPerangkat Daerah**	Kab. Paser	**Persentasi administrasi keuangan yang terlaksana**	**100%**	**9.716.782.948**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Paser	**Persentasi administrasi keuangan yang terlaksana**	**100%**	**9.716.782.948**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ bulan	8.885.900.948	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ bulan	8.885.900.948	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	830.882.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	883,407,200	
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Paser	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	**100%**	**40.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Paser	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	**100%**	**40.000.000**	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Paser	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	40.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Paser	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	40.000.000	
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Paser	**Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**450.685.382**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Paser	**Terlaksananya Pengadministrasian UmumPerangkat Daerah**	**100%**	**1,528,041,782**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.375.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.375.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	163.520.000	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1,089,872,400	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	47.975.040	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	47.975.040	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	1 Paket	17.062.100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.062.100	
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	219.753.242	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	370.757.242	
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Paser	**Tersedianya jasa penunjangurusan skpd**	**100%**	**3.148.545.980**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Paser	**Tersedianya jasa penunjangurusan skpd**	**100%**	**4,323,969,209**	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.129.794.480	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4,305,217,709	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	3.050.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	3.050.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.701.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.701.500	
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusa n Pemerintah Daerah**	Kab. Paser	**Terlaksananya pemeliharaan barang skpd**	**31 unit**	**1.071.048.050**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Paser	**Terlaksananya pemeliharaan barang skpd**	**31 unit**	1,094,663,250	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	163.908.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizina n Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	187,523,250	

	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	5.640.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	5.640.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	901.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	901.500.000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Kab. Paser	**Presentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar**	**90**	**18,075,673,074**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Kab. Paser	**Presentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar**	**90**	**34,049,997,246**	
2.1	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota**	Kab. Paser	**Persentase terlaksananya penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk LLAJ**	**100 %**	**37.128.800**	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota**	Kab. Paser	**Persentase terlaksananya penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk LLAJ**	**100 %**	**37.128.800**	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	37.128.800	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	37.128.800	
2.2	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Kab. Paser	**Persentase jumlah perlengkapan jalan yang Terpasang**	**100**	**15.065.463.263**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Kab. Paser	**Persentase jumlah perlengkapan jalan yang terpasang**	**100**	**29,826,504,235**	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	302 unit	14.639.173.263	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	302 unit	28,765,776,235	

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan PrasaranaJalan	Kab. Paser	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	119.060.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan PrasaranaJalan	Kab. Paser	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	723,408,000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	951 unit	307.230.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	951 Unit	337,320,000	
2.3	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Kab. Paser	**Terlaksananya penerbitan izin penyelenggaraan parkir**	**1 dokumen**	**59.999.040**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Kab. Paser	**Terlaksananya penerbitan izin penyelenggaraan parkir**	**1 dokumen**	**59.999.040**	
	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	59.999.040	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	59.999.040	
2.4	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Kab. Paser	**Peningkatan Jumlah kendaraan yg telah diuji kelaikannya**	**13.500 Unit**	**826.649.500**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Kab. Paser	**Peningkatan Jumlah kendaraan yg telah diuji kelaikannya**	**13.500 Unit**	**1.026.649.500**	
	RegistrasiKendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	13.491 unit	462.649.500	RegistrasiKendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	13.491 unit	662.649.500	

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	364.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	364.000.000	
2.5	**Pelaksanaan Manajemendan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota**	Kab. Paser	**Tersedinya Dokumen Manajemen dan RekayasaLalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten**	**3 Dokumen**	**290.984.838**	**Pelaksanaan Manajemendan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota**	Kab. Paser	**Tersedinya Dokumen Manajemen dan RekayasaLalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten**	**3 Dokumen**	**290.984.838**	
	Penataan Manajemendan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	111.996.968	Penataan Manajemendan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kot a	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	111.996.968	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	81.999.620	Pengawasan dan Pengendalian EfektivitasPelak sanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kot a	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	81.999.620	
	Forum Lalu Lintas DanAngkutan Jalan Kabupten/ Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	96.988.250	Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupten/ Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	96.988.250	

2.6	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Kab. Paser	**Peningkatan jumlah pengemu dikendaraan bermotor yang kompeten dan memenuhi persyaratan**	**35 Orang**	**66.585.992**	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Kab. Paser	**Peningkatan jumlah pengemu dikendaraan bermotor yang kompeten dan memenuhi persyaratan**	**35 Orang**	**81,685,992**	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Per4syaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	66.585.992	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Per4syaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	81,685,992	
2.7	**Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang AntarKota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Paser	**Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**450.978.926**	**Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Paser	**Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**493,762,126**	
	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atauBarang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Unit	44.985.000	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atauBarang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Unit	44.985.000	

	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (UPTD Terminal Kota)	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Bulan	287.869.188	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (UPTD Terminal Kota)	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Bulan	287.869.188	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (UPTD Terminal Kuaro)	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Bulan	118.124.738	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (UPTD Terminal Kuaro)	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Bulan	160,907,938	
2.8	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Kab. Paser	**Persentase jumlah sarana dan prasarana terminal yang dikembangkan**	**100**	**581.248.700**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Kab. Paser	**Persentase jumlah sarana dan prasarana terminal yang dikembangkan**	**100**	**581.248.700**	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kab. Paser	*Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara*	1 Unit	581.248.700	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kab. Paser	*Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara*	1 Unit	581.248.700	
2.9	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk**		**Tersedianya dokumen hasil kegiatan**			**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk**		**Tersedianya dokumen hasil kegiatan**			

	AngkutanOrang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Paser	**pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan umum**	**1 Dokumen**	**696.634.015**	**AngkutanOrang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan danPerdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Kab. Paser	**pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutanumum**	**1 Dokumen**	**1,652,034,015**	
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu)Daerah Provinsi	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	696.634.015	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu)Daerah Provinsi	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,652,034,015	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Kab. Paser	**Peresentase penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-perongan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten**	**90**	**2,583,800,562**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Kab. Paser	**Peresentase penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-perongan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten**	**90**	**3,258,044,462**	
3.1	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada JaringanJalan**	Kab. Paser	**Tersedianya data penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam**	**1 Dokumen**	**370.529.000**	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada JaringanJalan**	Kab. Paser	**Tersedianya data penetapanLintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah**	**1 Dokumen**	**400.529.000**	

	Kabupaten/Kota dan/atau jaringan jalurKereta Api Kabupaten/ Kota		**Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/AtauJaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**			**Kabupaten/ Kota dan/atau jaringan jalurKereta Api Kabupaten/ Kota**		**Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/AtauJaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**			
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	370.529.000	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	400.529.000	
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		**Terpeliharanya Prasarana Pelabuhan Sungai & Danau**		**2.262.570.962**	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**		**Terpeliharanya Prasarana Pelabuhan Sungai & Danau**		**2,857,515,462**	
	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Kab. Paser	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan		1.874.575.000	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Kab. Paser	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan		2,360,635,000	
	Pengoperasian dan	Kab. Paser	Jumlah Pelabuhan		387.995.962	Pengoperasian dan	Kab. Paser	Jumlah Pelabuhan		496,880,462	

	Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara			Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara			
Total Pagu					**35.183.748.096**	**Total Pagu**				**54,111,936,797**	

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. saran dan pendapat DPRD berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Tidak semua aspirasi tersebut dapat diakomodir dalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2024, sehingga sebagian diusulkan dalam Perubahan Renja Tahun 2024

Tabel. 3.3
Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

No	Program/ Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) **/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota, Penyediaan**				
1.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Kerang, Kec. Batu Engau	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	8 Titik	Musrenbang

2.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Sandeley RT. 01 sampai dengan RT. 04 Kec. Long Ikis	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	8 Titik	Musrenbang
3.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Umum Desa Rangan, Kec. Kuaro	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	8 Titik	Musrenbang
4	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	RT. 01 sampai dengan RT. 04 desa Muara Adang, Kec. Longikis	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	8 Titik	Musrenbang
5	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Krayan Makmur, Kec. Longikis	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	8 Titik	Musrenbang
6	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	RT. 01 Desa Munggu, Kec. Longkali	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	8 Titik	Musrenbang
7	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	RT. 001 sampai dengan RT. 004 Desa Muara Pias, Kec. Longkali	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	8 Titik	Musrenbang
8	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	RT. 01 dan RT. 02 Desa Pinang Jatus, Kec. Longkali	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	8 Titik	Musrenbang
9	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Mendik Karya, Kec. Longkali	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	8 Titik	Musrenbang
10	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Sebakung Taka, Kec. Longkali	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	8 Titik	Musrenbang
11	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	RT.06 sampai dengan RT.08 Desa Petiku, Kec. Longkali	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	8 Titik	Musrenbang
12	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Umum RT. 12 Kel. Muara Komam, Kec. Muara Komam	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	3Titik	Musrenbang
13	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	RT 001 sampai dengan RT. 004, Desa Batu Butok, Kec. Muara Komam	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	8 Titik	Musrenbang
14	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	RT. 1 dan RT. 2 Desa Prayon, Kec. Muara Komam	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	8 Titik	Musrenbang
15	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	RT. 01, RT. 02 Dan RT. 03, Desa Muara Payang, Kec. Muara Komam	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	8 Titik	Musrenbang

16	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Muser, Kec. Muara Samu	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	8 Titik	Musrenbang
17	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Suweto, Kec. Muara Samu	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	8 Titik	Musrenbang
18	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Lempesu, Kec. Pasir Belengkong	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	8 Titik	Musrenbang
19	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	RT. 001 sampai dengan RT. 004 Desa Suatang Keteban, Kec. Pasir Belengkong	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	8 Titik	Musrenbang
20	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Sempulang, Kec. Tanah Grogot	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	8 Titik	Musrenbang
21	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Tapis, Kec. Tanah Grogot	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	13 Titik	Pokir
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN/ Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau				
1	Pembangunan Dermaga Sungai	RT.001 Desa Lomu, Kec. Batu Engau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	130 m^2	Musrenbang
Penelaahan Usulan program dan masyarakat Tambahan					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) /Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota, Penyediaan				
1	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Segendang Kec. Batu Engau	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
2	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Uko Kec. Muara Komam	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	

3	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Pondong Kec. Kuaro	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
4	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Long Gelang Kec. Long Ikis	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
5	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (IKK)	Kec. Muara Samu	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
6	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	UPTD Pelabuhan Tana Paser (Dermaga Senaken)	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
7	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jl. Ulin RT. 06 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
8	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Rantau Panjang Kec. Tanah Grogot	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
9	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Pepara Kec. Tanah Grogot	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
10	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Kerta Bumi Kec. Kuaro	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
11	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Kendarom Kec. Kuaro	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
12	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Padang Jaya Kec. Kuaro	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
13	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Lolo Kec. Kuaro	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
14	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Klempang Sari Kec. Kuaro	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
15	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Tajur Kec. Long Ikis	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
16	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Semuntai Kec. Long Ikis	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
17	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Sawit JayaKec. Long Ikis	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	

18	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Muara Langon Kec. Muara Komam	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
19	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Muara Kuaro Kec. Muara Komam	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
20	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Sei Terik Kec. Batu Sopang	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
21	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Songka Kec. Batu Sopang	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
22	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Busui Kec. Batu Sopang	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
23	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Kresik Bura Kec. Pasir Belengkong	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
24	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Bekoso Kec. Pasir Belengkong	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
25	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Olung Pinang Kec. Pasir Belengkong	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
26	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Tebru Paser Damai Kec. Batu Engau	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
27	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Kerang Dayo Kec. Batu Engau	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
28	Pengadaan dan Pemasangan Komponen Pendukung Serta Penggantian Armatur LPJU Type LHE dan HPS Menjadi Type LED	Kec. Long Kali	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
29	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Janju Kec. Tanah Grogot	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
30	Pengadaan Armatur LPJU Type LED untuk IKK - Armatur Lampu LPJU Type LED 90 watt (70 Buah)	Kec. Long Kali	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	

31	Pengadaan Armatur LPJU Type LED untuk IKK - Armatur Lampu LPJU Type LED 90 watt (265 Buah) - Armatur Lampu LPJU Type LED 120 watt (50 Buah)	Kec. Batu Sopang dan Kec. Muara Komam	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
32	Pengadaan dan Pemasangan Komponen Pendukung serta Penggantian Armatur LPJU di Jalur 2 IKK	Kec. Muara Komam	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
33	Pengadaan dan Pemasangan Komponen Pendukung serta Penggantian Armatur LPJU di Jalur 2 IKK	Kec. Batu Sopang	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	
34	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jl. Pandu Kec. Tanah Grogot	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	1 Paket	

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah:

Tabel 3.4
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KAB. PASER
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**23,321,340,580.00**	**31,591,001,588.00**	**33,563,108,708.00**	**10,241,768,128.00**							**29,296,930,546.00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**23,321,340,580.00**	**31,591,001,588.00**	**33,563,108,708.00**	**10,241,768,128.00**							**29,296,930,546.00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**23,321,340,580.00**	**31,591,001,588.00**	**33,563,108,708.00**	**10,241,768,128.00**							**29,296,930,546.00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**indeks kepuasan pelayanan masyarakat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik**				**74 85 % %**	**74 85 % %**	**13,772,237,870.00**	**14,531,638,198.00**	**14,474,975,060.00**	**2,978,020,256.00**							**16,750,258,126.00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD*				4 Dokumen	4 Dokumen	47,912,700.00	47,912,700.00	47,912,700.00	0.00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Aparatur Sipil Negara (ASN)		48,503,723.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

	01																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	34,906,800.00	34,906,800.00	34,906,800.00	0.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			13,185,950.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,055,000.00	4,055,000.00	4,055,000.00	0.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			10,401,198.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,875,900.00	6,875,900.00	6,875,900.00	0.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			13,152,355.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2,075,000.00	2,075,000.00	2,075,000.00	0.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			11,764,220.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentasi administrasi keuangan yang terlaksana*				100 %	100 %	8,553,221,000.00	9,312,621,328.00	9,716,782,948.00	1,163,561,948.00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Aparatur Sipil Negara (ASN)		12,002,632,952.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	7,722,339,000.00	8,481,739,328.00	8,885,900,948.00	1,163,561,948.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			11,242,222,237.00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	830,882,000.00	830,882,000.00	830,882,000.00	0.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			760,410,715.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Aparatur Sipil Negara (ASN)		70,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			70,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksanaanya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	444,432,140.00	444,432,140.00	450,685,382.00	6,253,242.00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Aparatur Sipil Negara (ASN)		477,312,114.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2,375,000.00	2,375,000.00	2,375,000.00	0.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			12,161,723.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	163,520,000.00	163,520,000.00	163,520,000.00	0.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			119,280,103.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	47,975,040.00	47,975,040.00	47,975,040.00	0.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			80,872,970.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17,062,100.00	17,062,100.00	17,062,100.00	0.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			22,710,187.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	70 Laporan	213,500,000.00	213,500,000.00	219,753,242.00	6,253,242.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			242,287,131.00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan skpd*				100 %	100 %	3,648,545,980.00	3,648,545,980.00	3,148,545,980.00	-500,000,000.00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Aparatur Sipil Negara (ASN)		3,688,254,274.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			6,571,270.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3,629,794,480.00	3,629,794,480.00	3,129,794,480.00	-500,000,000.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			3,458,862,362.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			10,059,550.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14,701,500.00	14,701,500.00	14,701,500.00	0.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			212,761,092.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanaya pemeliharaan barang skpd*				31 Unit	31 Unit	1,038,126,050.00	1,038,126,050.00	1,071,048,050.00	32,922,000.00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Aparatur Sipil Negara (ASN)		463,555,063.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	130,986,050.00	130,986,050.00	163,908,050.00	32,922,000.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			212,761,092.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	5,640,000.00	5,640,000.00	5,640,000.00	0.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			8,506,840.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	901,500,000.00	901,500,000.00	901,500,000.00	0.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			242,287,131.00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar**				**90 %**	**90 %**	**7,515,302,148.00**	**15,014,259,390.00**	**16,843,029,648.00**	**950,667,507.00**							**8,465,969,655.00**	

	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk LLAJ*				100 %	100 %	37,128,800.00	37,128,800.00	37,128,800.00	0.00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	asyarakat		127,502,037.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	37,128,800.00	37,128,800.00	37,128,800.00	0.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			127,502,037.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah perlengkapan jalan yang terpasang*				100 %	100 %	4,505,092,337.00	13,236,693,005.00	15,065,463,263.00	10,560,370,926.00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	asyarakat		5,588,685,128.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	

			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia				222 Unit	222 Unit	4,078,802,337.00	12,810,403,005.00	14,639,173,263.00	10,560,370,926.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			3,509,792,215.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																	
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	119,060,000.00	119,060,000.00	119,060,000.00	0.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			1,358,892,915.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				951 Unit	951 Unit	307,230,000.00	307,230,000.00	307,230,000.00	0.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			719,999,998.00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Persentase jumlah sarana dan prasarana terminal yang dikembangkan*				100 %	100 %	581,248,700.00	581,248,700.00	581,248,700.00	0.00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	asyarakat		1,063,275,206.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	581,248,700.00	581,248,700.00	581,248,700.00	0.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			1,063,275,206.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Terlaksanannya penerbitan izin penyelenggaraan parkir*				1 Dokumen	1 Dokumen	59,999,040.00	59,999,040.00	59,999,040.00	0.00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	asyarakat		98,513,210.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		

			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	59,999,040.00	59,999,040.00	59,999,040.00	0.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			98,513,210.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Tersedinya Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten*				3 Dokumen	3 Dokumen	290,984,838.00	290,984,838.00	290,984,838.00	0.00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	asyarakat		580,516,919.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota				1 Laporan	1 Laporan	81,999,620.00	81,999,620.00	81,999,620.00	0.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			157,523,100.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																	

			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota				1 Laporan	1 Laporan	96,988,250.00	96,988,250.00	96,988,250.00	0.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			125,167,300.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	111,996,968.00	111,996,968.00	111,996,968.00	0.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			297,826,519.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Peningkatan jumlah pengemudi kendaraan bermotor yang kompeten dan memenuhi persyaratan*				35 Orang	35 Orang	66,585,992.00	66,585,992.00	66,585,992.00	0.00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	asyarakat		96,138,130.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																	

			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota				1 Laporan	1 Laporan	66,585,992.00	66,585,992.00	66,585,992.00	0.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			96,138,130.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota*				100 %	100 %	450,978,926.00	44,985,000.00	44,985,000.00	-405,993,926.00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	asyarakat		135,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia				15 Unit	15 Unit	44,985,000.00	44,985,000.00	44,985,000.00	0.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			135,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya dokumen hasil kegiatan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan umum*				1 Dokumen	1 Dokumen	696,634,015.00	696,634,015.00	696,634,015.00	0.00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	asyarakat		776,339,025.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				1 Laporan	1 Laporan	696,634,015.00	696,634,015.00	696,634,015.00	0.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			776,339,025.00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-perorang atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten**				**90 %**	**90 %**	**2,033,800,562.00**	**2,045,104,000.00**	**2,245,104,000.00**	**2,046,902,203.00**							**4,080,702,765.00**	

	2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	*Tersedianya data penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	370,529,000.00	370,529,000.00	370,529,000.00	0.00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	asyarakat		925,123,467.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.06.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	370,529,000.00	370,529,000.00	370,529,000.00	0.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			925,123,467.00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Terpeliharanya Prasarana Pelabuhan Sungai & Danau*				2 Unit	2 Unit	1,663,271,562.00	1,674,575,000.00	1,874,575,000.00	211,303,438.00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	asyarakat		3,155,579,298.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.00006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau																	
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan				4 Unit	4 Unit	1,324,575,000.00	1,674,575,000.00	1,874,575,000.00	550,000,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			3,155,579,298.00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPTD TERMINAL KUARO							**0.00**	**118,124,738.00**	**118,124,738.00**	**118,124,738.00**							**125,779,221.00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0.00**	**118,124,738.00**	**118,124,738.00**	**118,124,738.00**							**125,779,221.00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**0.00**	**118,124,738.00**	**118,124,738.00**	**118,124,738.00**							**125,779,221.00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar**				**90 %**	**90 %**	**0.00**	**118,124,738.00**	**118,124,738.00**	**125,779,221.00**							**125,779,221.00**	

	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota*				100 %	100 %	0.00	118,124,738.00	118,124,738.00	118,124,738.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	asyarakat		125,779,221.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.00 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota				12 Laporan	12 Laporan	0.00	118,124,738.00	118,124,738.00	118,124,738.00	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			125,779,221.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.00 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
		UPT PELABUHAN TANA PASER							**0.00**	**387,995,962.00**	**387,995,962.00**	**387,995,962.00**							**963,809,235.00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0.00**	**387,995,962.00**	**387,995,962.00**	**387,995,962.00**							**963,809,235.00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**0.00**	**387,995,962.00**	**387,995,962.00**	**387,995,962.00**							**963,809,235.00**	

1.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-perorang atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten**				**90 %**	**90 %**	**0.00**	**387,995,962.00**	**387,995,962.00**	**963,809,235.00**							**963,809,235.00**	
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Terpeliharanya Prasarana Pelabuhan Sungai & Danau*				2 Unit	2 Unit	0.00	387,995,962.00	387,995,962.00	387,995,962.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	asyarakat		963,809,235.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	0.00	387,995,962.00	387,995,962.00	387,995,962.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			963,809,235.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
		UPTD TERMINAL KOTA							**0.00**	**287,869,188.00**	**287,869,188.00**	**287,869,188.00**							**308,087,751.00**	

	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0.00**	**287,869,188.00**	**287,869,188.00**	**287,869,188.00**							**308,087,751.00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**0.00**	**287,869,188.00**	**287,869,188.00**	**287,869,188.00**							**308,087,751.00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar**				**90 %**	**90 %**	**0.00**	**287,869,188.00**	**287,869,188.00**	**308,087,751.00**							**308,087,751.00**	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota*				100 %	100 %	0.00	287,869,188.00	287,869,188.00	287,869,188.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	asyarakat		308,087,751.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota				12 Laporan	12 Laporan	0.00	287,869,188.00	287,869,188.00	287,869,188.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			308,087,751.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	

		UPTD PKB							**0.00**	**826,649,500.00**	**826,649,500.00**	**826,649,500.00**						**558,511,527.00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0.00**	**826,649,500.00**	**826,649,500.00**	**826,649,500.00**						**558,511,527.00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**0.00**	**826,649,500.00**	**826,649,500.00**	**826,649,500.00**						**558,511,527.00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar**				**90 %**	**90 %**	**0.00**	**826,649,500.00**	**826,649,500.00**	**558,511,527.00**						**558,511,527.00**	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Peningkatan Jumlah kendaraan yg telah diuji kelaikannya*				13500 Unit	13500 Unit	0.00	826,649,500.00	826,649,500.00	826,649,500.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	asyarakat		558,511,527.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																	
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				11539 Unit	11539 Unit	0.00	462,649,500.00	462,649,500.00	462,649,500.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			338,896,527.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																	

	05.0003																		
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	9 Unit	0.00	364,000,000.00	364,000,000.00	364,000,000.00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah			219,615,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
	J U M L A H								**23,321,340,580.00**	**31,591,001,588.00**	**33,563,108,708.00**	**10,241,768,128.00**						**29,296,930,546.00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tanah Grogot 16 Agustus 2024
Kepala Dinas

H. INAYATULLAH, ST, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750511 199903 1 005

Lampiran

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. D.I. Panjaitan Kecamatan Tanah Grogot
Kabupaten Paser Kalimantan Timur Kode Pos 76211
Email : perhubunganpaser@gmail.com Web. https://dishub.paserkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER
NOMOR : 188.4 / 011 /DISHUB-2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER

Menimbang : a. Bahwa Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun;

b. Bahwa Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Paser disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan dinas Perhubungan Kabupaten Paser;

c. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruF, dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Paser;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Dinas Perhubungan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangja menegah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor. 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2006 Nomor 6);
10. Paraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 4); dan
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 05 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
13. Perbub. No 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024
14 Surat Edaran Bupati Paser Nomor 000.7.2.4 / 36/ P2EP-Bapplitbag Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER.**

PERTAMA : Mengesahkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Paser sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2024 dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Perubahan Rencana Kerja 2024

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 22 Juli 2024

Kepala Dinas,

H. Inayatullah, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19750511 199903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR : 188.4 / 011 /DISHUB-2024
TANGGAL : 22 Juli 2024

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUNAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER TAHUN 2024

Ketua	:	Kepala Dinas
Wakil Ketua	:	Sekretaris
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Anggota	:	1. Kepala Bidang Prasarana LLAJ
		2. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
		3. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		4. Kepala UPTD. Pelabuhan Tana Paser
		5. Kepala UPTD. Terminal Kota
		6. Kepala UPTD. Terminal Kuaro
		7. Kepala UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor
Sekretariat :		1. Ratmini, SE
		2. Budi Santoso, SP
		3. Hariyati

Kepala Dinas,

H. Inayatullah, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19750511 199903 1 005

PERUBAHAN RENJA

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya telah disusun Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 Disnakertrans Kabupaten Paser. Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 Disnakertrans Kabupaten Paser adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Disnakertrans Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2024.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Disnakertrans Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun sebagai implementasi tahunan dari Reviu Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 dan dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang selaras dengan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Paser.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 Disnakertrans , merupakan tahun ketiga dari dokumen Reviu Renstra Disnakertrans 2021-2026. Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 Disnakertrans mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Paser. Oleh karenanya penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 Disnakertrans dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Disnakertrans, evaluasi pelaksanaan Renja Disnakertrans sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 Disnakertrans berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 Disnakertrans disamping sebagai dokumen rencana kerja juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang yang jelas dari program kegiatan Disnakertrans sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 Disnakertrans Kabupaten Paser. Kami berharap agar Rancangan Akhir Perubahan Renja ini dapat bermanfaat baik bagi seluruh aparatur Disnakertrans maupun seluruh pihak terkait. Kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 Disnakertrans Kabupaten Paser ini masih terdapat kekurangan dan perlu penyempurnaan untuk perbaikan selanjutnya. Untuk itu, kami mohon masukan dan saran untuk penyempurnaan Renja agar menjadi lebih baik di masa mendatang.

Tana Paser, 02 Agustus 2024
kepala Disnakertrans



RIZKY NOVIAR,S.STP
NIP. 197905071998101001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB. I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB. II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.... 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14
2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan 26
BAB. III RENCANA KERJA PENDANAAN DISNAKERTRANS
3.1 Tujuan dan Sasaran 29
3.2 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2024 30
3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 44
3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Disnakertrans Kabupaten Paser Tahun2024.....44
BAB. IV PENUTUP
4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 57
4.2 Rencana Tindak Lanjut 57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan dengan merujuk pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan dilakukan akibat adanya ketidaksesuaian rencana kerja dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta perubahan kebijakan nasional maupun provinsi, sehingga mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Menindaklanjuti hal tersebut, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Disnakertrans Tahun 2024 dilakukan dengan tetap merujuk kepada Reviu Renstra Disnakertrans 2016-2021 serta memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024.

Adapun dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Disnakertrans Tahun 2024 memuat perubahan dan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja. Hal ini dilakukan akibat adanya perkembangan kondisi dan progres kegiatan dilapangan. Perubahan juga dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia sehingga menghasilkan kinerja yang mendukung pencapaian target Renstra Disnakertrans dan RPJMD Kabupaten Paser.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); (khusus 8 OPD yg menangani SPM)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Reviu Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 2.

Adapun tujuan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;

Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISNAKERTRANS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Disnakertrans Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disnakertrans

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III RENCANA KERJA PENDANAAN DISNAKERTRANS

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISNAKERTRANS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Disnakertrans Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi atau diukur dalam pelaksanaannya. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategi.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sampai dengan Triwulan II sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 s/d Triwulan II

Kode	Perangkat Daerah / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Sisa Anggaran
						Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV						
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		
			K		RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	35	C		0		0		0							0	0
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Disnakertrans	79	B				79.49		0				100.62		127.37		0
2.07.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	74	Persen	9,783,671,406.00	18	1,804,460,300.00	22.00	2,772,943,066.00		-		-	40.00	4,577,403,366.00	54.05	46.79	5,206,268,040.00
2.07.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Sasaran strategis Disnakertrans	90	persen	275,101,600.00	20	43,071,300.00	20.00	110,074,400.00		-		-	42.22	153,145,700.00	46.91	55.67	121,955,900.00
2.07.001.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Laporan	48,139,200.00	1	-	1.00	24,123,600.00					2.00	24,123,600.00	50.00	50.11	24,015,600.00
2.07.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	3	Dokumen	206,554,000.00	0	22,836,300.00	1.00	85,950,800.00					1.00	108,787,100.00	33.33	52.67	97,766,900.00
2.07.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	20,408,400.00	1	20,235,000.00	-	-					1.00	20,235,000.00	100.00	99.15	173,400.00
2.07.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100	Persen	7,309,806,606.00	25	1,394,821,040.00	25.00	2,061,324,593.00		-		-	50.00	3,456,145,633.00	50.00	47.28	3,853,660,973.00
2.07.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (34 Orang)	34	orang	7,109,806,606.00	34	1,382,071,040.00	34.00	2,001,584,093.00					17.00	3,383,655,133.00	50.00	47.59	3,726,151,473.00
2.07.001.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	200,000,000.00	3	12,750,000.00	3.00	59,740,500.00					6.00	72,490,500.00	50.00	36.25	127,509,500.00

2.07.001.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100**	**persen**	**816,334,960.00**	**25**	**101,419,960.00**	**25.00**	**320,395,547.00**		**-**		**-**	**50.00**	**421,815,507.00**	**50.00**	**51.67**	**394,519,453.00**
2.07.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Paket	414,636,250.00	2	0	3.00	206,178,000.00					5.00	206,178,000.00	71.43	49.73	208,458,250.00
2.07.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	69,300,290.00	1	16,030,900.00	2.00	16,226,200.00					3.00	32,257,100.00	60.00	46.55	37,043,190.00
2.07.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	44,168,420.00	1	5,526,800.00	1.00	-					2.00	5,526,800.00	66.67	12.51	38,641,620.00
2.07.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	Laporan	288,230,000.00	10	79,862,260.00	2.00	97,991,347.00					12.00	177,853,607.00	75.00	61.71	110,376,393.00
2.07.001.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**persen**	**1,059,454,920.00**	**25**	**265,148,000.00**	**25.00**	**214,321,926.00**		**-**		**-**	**50.00**	**479,469,926.00**	**50.00**	**45.26**	**579,984,994.00**
2.07.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	748,000.00	12	748,000.00	-	-					12.00	748,000.00	100.00	100.00	-
2.07.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	51,706,920.00	3	-	3.00	16,021,926.00					6.00	16,021,926.00	50.00	30.99	35,684,994.00
2.07.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	Laporan	1,007,000,000.00	4	264,400,000.00	4.00	198,300,000.00					8.00	462,700,000.00	57.14	45.95	544,300,000.00
2.07.001.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah**	**100**	**pesen**	**322,973,320.00**	**25**	**-**	**25.00**	**66,826,600.00**		**-**		**-**	**50.00**	**66,826,600.00**	**50.00**	**20.69**	**256,146,720.00**
2.07.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dipelihara dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	unit	52,393,320.00	0	-	1.00	22,030,000.00					1.00	22,030,000.00	33.33	42.05	30,363,320.00
2.07.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	Unit	75,580,000.00	0		6.00	27,525,000.00					6.00	27,525,000.00	46.15	36.42	48,055,000.00
2.07.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	195,000,000.00	0	-	-	17,271,600.00					-	17,271,600.00	-	8.86	177,728,400.00

	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Memiliki Kompetensi dan Telah Ditempatkan	**Pertumbuhan jumlah tenaga Kerja yang siap kerja**	**30**	**Persen**		**5**								**5.00**		**16.67**		
	Terserapnya Tenaga Kerja Terlatih yang Bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	30	Persen														
2.07.002	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Capaian Program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	100	persen	21,002,000.00	10	-	40.00	-		-		-	50.00	-	50.00	-	21,002,000.00
2.07.002.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang tersusun	1	dokumen	21,002,000.00	0			-			-	-	-	-	-	-	21,002,000.00
2.07.002.2.01.002	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	10	Orang	21,002,000.00	0	-		-						-	-	-	21,002,000.00
2.07.003	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**70**	**persen**	**14,387,888,481.00**	**0**	**276,051,993.00**	**35.00**	**6,172,369,483.00**		**-**		**-**	**35.00**	**6,448,421,476.00**	**50.00**	**44.82**	**7,939,467,005.00**
2.07.003.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Presentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	80	persen	14,085,701,220.00	30	202,896,601.00	34.20	6,082,864,866.00					71.70	6,285,761,467.00		44.63	7,799,939,753.00
2.07.003.2.01.001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	260	orang	5,572,487,114.00	16	102,124,601.00	192.00	4,373,271,988.00					208.00	4,475,396,589.00	80.00	80.31	1,097,090,525.00
2.07.003.2.01.003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4	Unit	4,221,299,800.00	0	-	0	50,790,500.00					-	50,790,500.00	-	1.20	4,170,509,300.00
2.07.003.2.01.004	**Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Unit Kompetensi**	**Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun n**	**162**	**orang**	**4,291,914,306.00**	**46**	**100,772,000.00**	**79.00**	**1,658,802,378.00**					**125.00**	**1,759,574,378.00**	**77.16**	**41.00**	**2,532,339,928.00**
2.07.003.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Presentase pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	80	persen	104,187,261.00	30	33,525,400.00	30.00	22,373,200.00		-		-	67.50	55,898,600.00	84.38	53.65	48,288,661.00
2.07.003.2.02.001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	8	lembaga	104,187,261.00	2	33,525,400.00	2.00	22,373,200.00					4.00	55,898,600.00	50.00	53.65	48,288,661.00

2.07.003.2.03	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Presentase pendaftarandan rekomendasi LPK**	**70**	**persen**	**48,000,000.00**	**0**	**-**	**12.50**	**15,731,785.00**		**-**		**-**	**12.50**	**15,731,785.00**	**17.86**	**32.77**	**32,268,215.00**
2.07.003.2.03.001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1	Perizinan	48,000,000.00	0	0	-	15,731,785.00					-	15,731,785.00	-	32.77	32,268,215.00
2.07.003.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Presentase Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil	70	persen	50,000,000.00	0	-	20.00	11,257,200.00		-		-	20.00	11,257,200.00	28.57	22.51	38,742,800.00
2.07.003.2.04.001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang melaksanakan konsultasi produktifitas	5	perusahaan	50,000,000.00	0	-	1.00	11,257,200.00					1.00	11,257,200.00	20.00	22.51	38,742,800.00
2.07.003.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengukuran Produktivitas Daerah Kab/Kota	80	persen	100,000,000.00	25	39,629,992.00	25.00	40,142,432.00		-		-	56.25	79,772,424.00	70.31	79.77	20,227,576.00
2.07.003.2.05.001	**Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah**	**4**	**Dokumen**	**100,000,000.00**	**1**	**39,629,992.00**	**1.00**	**40,142,432.00**					**2.00**	**79,772,424.00**	**50.00**	**79.77**	**20,227,576.00**
2.07.004	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30	persen	851,953,221.00	10	104,561,827.00	7.04	272,768,659.00					17.04	377,330,486.00	56.80	44.29	
2.07.004.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	27	Persen	654,234,092.00	10	104,561,827.00	7.00	238,404,143.00					17.00	342,965,970.00	62.96	52.42	11,489,817.00
2.07.004.2.01.002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	500	orang	60,597,560.00	10	20,703,600.00	55.00	28,404,143.00					65.00	49,107,743.00	13.00	81.04	11,489,817.00
2.07.004.2.01.003	**Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja**	**Jumlah Pencari kerja yang mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan**	**60**	**Orang**	**24,636,532.00**	**0**	**16,040,000.00**	**-**	**-**					**-**	**16,040,000.00**	**-**	**65.11**	**8,596,532.00**
2.07.004.2.01.005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	40	Orang	569,000,000.00	0	67,818,227.00	50.00	210,000,000.00					50.00	277,818,227.00	125.00	48.83	291,181,773.00

2.07.004.2.02	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase LPTKS yang memiliki ijin sesuai dengan regulasi yang berlaku**	**30**	**Persen**	**27,231,160.00**	**0**	**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**27,231,160.00**
2.07.004.2.02.002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	7	LPTKS	27,231,160.00	0	0	-	-					-	-	-	-	27,231,160.00
2.07.004.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja	100	persen	170,487,969.00	25	-	25.00	34,364,516.00					50.00	34,364,516.00	50.00	20.16	7,655,084.00
2.07.004.2.03.001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Apliakasi Informasi Pasar Kerja Online	3	Dokumen	42,019,600.00	0	-	-	34,364,516.00					-	34,364,516.00	-	81.78	7,655,084.00
2.07.004.2.03.002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	1250	Orang	128,468,369.00	309	-	464.00	-					773.00	-	61.84	-	128,468,369.00
	Terwujudnya Hubungan yang Kondusif Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	**Tingkat Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja**	**40**	**Persen**		**16**		**14.61**						**30.61**		**76.53**		
	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	40	Persen		0		50.00						50.00		125.00		
2.07.005	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	40	persen	10,320,525,666.00	16	45,469,100.00	10.00	4,809,548,095.00					26.00	4,855,017,195.00	65.00	47.04	5,268,621,145.00
2.07.005.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	15	persen	261,246,466.00	5	21,507,400.00	5.00	28,782,882.00					10.00	50,290,282.00	66.67	19.25	14,068,858.00

2.07.005.2.01.001	**Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan**	**Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online**	**20**	**perusahaan**	**24,722,000.00**	**2**	**3,066,000.00**	**4.00**	**7,587,142.00**					**6.00**	**10,653,142.00**	**30.00**	**43.09**	**14,068,858.00**
2.07.005.2.01.002	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja sama	6	perusahaan	29,802,000.00	3	9642400	1.00	19,045,100.00					4.00	28,687,500.00	66.67	96.26	1,114,500.00
2.07.005.2.01.003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	11	Laporan	206,722,466.00	2	8,799,000.00	4.00	2,150,640.00					6.00	10,949,640.00	54.55	5.30	195,772,826.00
2.07.005.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan	90	Persen	10,059,279,200.00	30	23,961,700.00	15.00	4,780,765,213.00					45.00	4,804,726,913.00	50.00	47.76	5,254,552,287.00
2.07.005.2.02.001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5	Perkara	80,606,000.00	1	-	2.00	16,230,000.00					3.00	16,230,000.00	60.00	20.13	64,376,000.00
2.07.005.2.02.002	**Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perkara Perselisihan Yang Terselesaikan**	**14**	**Perkara**	**43,096,000.00**	**1**	**7,504,800.00**	**7.00**	**15,009,600.00**					**8.00**	**22,514,400.00**	**57.14**	**52.24**	**20,581,600.00**
2.07.005.2.02.003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	21	Asosiasi dengan serikat pekerja	31,042,000.00	1	-	2.00	17,213,800.00					3.00	17,213,800.00	14.29	55.45	13,828,200.00
2.07.005.2.02.004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	Lembaga	56,240,000.00	1	-	-	1,800,000.00					1.00	1,800,000.00	100.00	3.20	54,440,000.00
2.07.005.2.02.005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (32268 Orang)	47026	orang/bulan	9,848,295,200.00	11756	16,456,900.00	11,756.00	4,730,511,813.00					23,512.00	4,746,968,713.00	50.00	48.20	5,101,326,487.00

	Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Baru Sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Melalui Penyelenggaraan Transmigrasi	**Persentase peningkatan kualitas hidup warga Transmigran baru**	**100**	**Persen**		**25**		**25.00**						**50.00**		**50.00**		
	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	**Persentase peningkatan pengembangan kawasan transmigrasi baru**	**50**	**Persen**		**0**		**20.00**								**-**		
3.32.002	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Cakupan Kawasan Transmigrasi yang sesuai perencanaan**	**100**	**persen**	**134,700,000.00**	**0**	**29,107,700.00**	**50.00**	**55,730,111.00**					**50.00**	**84,837,811.00**	**50.00**	**62.98**	**49,862,189.00**
3.32.002.2.01	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**Persentase ketersediaan lahan kawasan transmigrasi**	**25**	**Persen**	**134,700,000.00**	**0**	**29,107,700.00**	**10.00**	**55,730,111.00**					**10.00**	**84,837,811.00**	**40.00**	**62.98**	**49,862,189.00**
3.32.002.2.01.001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang nisa dibangun dan dikerja samakan dengan daerah lain	1	Dokumen	64,100,000.00	0	9,786,400.00	-	18,591,400.00					-	28,377,800.00	-	44.27	35,722,200.00
3.32.002.2.01.002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	1	Kawsan Transmigrasi	70,600,000.00	0	19,321,300.00	-	37,138,711.00					-	56,460,011.00	-	79.97	14,139,989.00
3.32.003	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Presentase Peningkatan Jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan**	**80**	**persen**	**108,200,000.00**	**0**	**11,257,200.00**	**40.00**	**3,550,000.00**					**40.00**	**14,807,200.00**	**50.00**	**13.69**	**53,230,000.00**
3.32.003.2.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pertumbuhan penduduk pada kawasan transmigrasi baru**	**29**	**Persen**	**108,200,000.00**	**0**	**11,257,200.00**	**9.00**	**3,550,000.00**					**9.00**	**14,807,200.00**	**31.03**	**13.69**	**53,230,000.00**
3.32.003.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	2	Laporan	54,100,000.00	0	-		870,000.00					-	870,000.00	-	1.61	53,230,000.00
3.32.003.2.01.002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni,Layak Usaha,dan Layak Berkembang)	2	Dokumen	54,100,000.00	0	11,257,200.00		2,680,000.00					-	13,937,200.00	-	25.76	40,162,800.00

3.32.004	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah Kawasan perkotaan baru yang berkembang dgn memiliki sarana dan prasarana**	**1**	**Kawasan**	**126,726,200.00**	**0**	**17,039,000.00**	**-**	**27,901,900.00**					**-**	**44,940,900.00**	**-**	**35.46**	**81,785,300.00**
3.32.004.2.01	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**Persentase layanan dasar yang dapat di akses warga trans baru**	**80**	**Persen**	**126,726,200.00**	**0**	**17,039,000.00**	**40.00**	**27,901,900.00**					**40.00**	**44,940,900.00**	**50.00**	**35.46**	**81,785,300.00**
3.32.004.2.01.001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah kepala keluarga transmigrasi yang dibina	55	KK	58,100,000.00	0	-	-	4,020,000.00					-	4,020,000.00	-	6.92	54,080,000.00
3.32.004.2.01.002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi,Kelembagaan	1	Satuan Pemukiman	68,626,200.00	0	17,039,000.00	-	23,881,900.00					-	40,920,900.00	-	59.63	27,705,300.00
	Total				**35,734,666,974.00**		**2,287,947,120.00**		**14,114,811,314.00**		**-**		**-**		**16,402,758,434.00**	**46.98**	**45.90**	**18,620,235,679.00**

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi Tahun 2024 semester I dapat dijelaskan bahwa :

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 46,98 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 16.402.758.434,00 (Enam Belas milyar empat ratus dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga pulu empat rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 35.734.666.974 (Tiga puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) atau sebesar 6,40 %
2. Rata-rata capaian kinerja program pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 46,98 % dengan predikat kinerja rendah (penentuan peringkat disesuaikan skala pada Tabel T-E.1 PMDN Halaman 494).
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 1 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 10 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 8 indikator capaian kinerja 0%-50% = 13 indikator

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Paser, dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Paser;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi;
c. penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Ketenagakerjaan dan transmigrasi yang meliputi penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi;
e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaran tugas dan fungsi dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dibantu oleh Sekretariat dan 4 (empat) bidang yang diatur Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2023 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tugas dan fungsi Sekretariat dan 4 (empat) bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum meliputi perencanaan program, kepegawaian, kelembagaan, penatausahaan keuangan, perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga dinas, dan memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di lingkungan dinas.

b. Fungsi Sekretariat

1. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas:
2. pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
3. pelaksanaan pembantuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas ;
4. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
5. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
6. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian dan kediklatan;
7. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

1.1. Kepala Sub Bagian Umum

a. Tugas sub bagian umum

Sub bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola barang milik daerah dan administrasi kepegawaian.

b. Fungsi sub bagian umum

1. pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah pada Dinas;
2. pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemanfaatan, penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) pengamanan dan pemeliharaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;

   pelaksanaan penyusunan analisis jabatan (ANJAB), pengusulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan, evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan Dinas;
3. pelaksanaan penyusunan penempatan dan pemindahan, kepangkatan, penggajian, usulan pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan disiplin, serta peningkatan kesejahteraan PNS di lingkungan Dinas;

4. pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/fasilitatif;
5. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan Dinas;
6. pelaksanaan penyusunanpenerapan ketentuan tata naskah Dinas, tata kearsipan, pakaian Dinas, jam kerja dan perjalanan Dinas pegawai di lingkungan Dinas;dan
7. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.

1.2. Kepala Sub Bagian Keuangan

a. Tugas sub bagian keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Dinas.

b. Fungsi sub bagian keuangan

1. pelaksanaan penyusunan anggaran belanja Dinas yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung, termasuk perubahannya;
2. pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA);
3. pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM);
4. pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-UP), surat perintah pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat perintah pembayaran tambah uang (SPP –TU);
5. pelaksanaanverifikasi surat pemintaan pembayaran (SPP);
6. pelaksanaan pengujian tagihan dan melaksanakan pembayaran atas persetujuan kepala Dinas selaku pengguna anggaran;
7. pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan;
8. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
9. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan pada unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas;
10. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.

2. Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja
   a. Tugas Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja Bidang Penempatan dan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengembangan bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, sertapenempatan tenaga kerja.
   b. Fungsi Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja
      1. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pengembangan bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta penempatan tenaga kerja sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
      2. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta penempatan tenaga kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
      3. pelaksanaan fasilitas penempatan dan peningkatan kesempatan kerja; pelaksanaan pembinaan SDM, pengembangan dan penempatan tenaga kerja;
      4. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri;
      5. pelaksanaan pengkoordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja Kabupaten;
      6. pelaksanaan pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
      7. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja;
      8. pelaksanaan pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair Kabupaten;
      9. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja dengan seksi Pengembangan Bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta Penempatan Tenaga Kerja;

10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan penempatan dan peningkatan kesempatan kerja; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja.
12. pelaksanaan pembinaan bursa kerja di lembaga satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pelatihan (bursa kerja khusus/BKK);
13. pelaksanaan penyelenggaraan bursa kerja (Job MarketFair);
14. pelaksanaan data lowongan kerja dengan System Daring (On-Line System) atau penyelenggaraan bursa kerja secara elektronik (Bursa Kerja On-Line/BKOL);
15. pelaksanaan penyusunan proyeksi permintaan dan penawaran tenaga kerja;
16. pelaksanaan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja;
17. pelaksanaan pengelolaan informasi ketenagakerjaan, meliputi pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi ketenagakerjaan;
18. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja; dan
19. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja.
20. prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
21. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penempatan tenaga kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
22. pelaksanaan pemantauan wajib lapor lowongan kerja;
23. pelaksanaan pelayanan pencari kerja (AK1);
24. pelaksanaan pelayanan pengantaran/perantaraan kerja, pelayanan penempatan AKL, AKAD dan AKN;
25. pelaksanaan pelayanan surat izin pengarahan;
26. pelaksanaan penerbitan surat pesetujuan penerbitan;
27. pelaksanaan pelayanan perizinan memperkerjakan tenaga asing (IMTA);

28. pelaksanaan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
29. pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan LPTKS;

3. Bidang Hubungan Industrial
   a. Tugas Bidang Hubungan Industrial

      Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja
   b. Fungsi Bidang Hubungan Industrial dan kesejahteraan tenaga kerja
      1. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
      2. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
      3. pelaksanaanperencanaanteknis operasional program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
      4. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan terkait dengan hubungan industrial sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra OPD;
      5. pelaksanaan program hubungan industrial guna pelaksanaan rencana strategis OPD;
      6. pelaksanaan penyusunan dan mengolah data hubungan industrial dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan hubungan industrial dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan hubungan industrial;
      7. pelaksanaan pelayanan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengesahan pearturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah;

9. pelaksanaan pengawasan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan hubungan industrial;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Hubungan Industrial;dan
11. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Hubungan Industrial.

4. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

a. Tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerjamempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengembangan produktivitas kerja, serta pelatihan dan pemagangan.

b. Fungsi Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

1. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pengembangan produktivitas kerja serta pelatihan dan pemagangan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
2. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan produktivitas kerja, serta pelatihan dan pemagangan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
3. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan terkait dengan pelatihan, serta pemagangan dan produktivitas kerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) OPD;
4. Pelaksanaan program pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja guna pelaksanaan rencana strategis OPD;
5. Pelaksanaan penyusunan dan mengolah data pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;

6. pelaksanaan pelayanan pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
8. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemagangan kerja guna menguasai keterampilan atau keahlian tertentu serta pelatihan berdasarkan unit kopetensi;

9. pelaksanaan perizinan dan pendaftaran dan pelatihan kerja;
10. pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat daerah;
11. pelaksanaan penyelenggaraan standarisasi dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. pelaksanaan pengembangan produktivitas guna peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
13. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja;
14. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan BidangPelatihan dan Produktivitas Kerja; dan
15. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja.

5. Bidang Transmigrasi

a. Tugas Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi.

b. Fungsi Bidang Transmigrasi

1. pelaksanaanperumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah;

2. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
3. pelaksanaan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi;
4. pelaksanaan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi dan eks transmigrasi;
5. pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan Daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang ketransmigrasian Kabupaten;
6. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan Seksi penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan transmigrasi; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Transmigrasi.

6. UPTD Balai Latihan Kerja

Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagai berikut :

a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Tugas dan Fungsinya UPTD BLK adalah sebagai berikut :

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD BLK sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTD BLK sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTD BLK sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

d. pelaksanaan promosi program pelatihan kerja;
e. pelaksanaan penyusunan kegiatan pelatihan tenaga kerja;
f. pelaksanaan penyusunan instruktur dan calon peserta pelatihan;
g. pelaksanaan pengadaan suku cadang dan peralatan pelatihan;
h. pelaksanaan ketatausahaan UPTD BLK;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPTD BLK; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi UPTD BLK.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sejumlah jenis pelayan yang diberika Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota
6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
7. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
8. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Presentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan ditempatkan
2. Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan
3. Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan perkotaan baru
4. Nilai SAKIP Disnakertrans

Analisa Kinerja Pelayanan Disnakertrans Kabupaten Paser didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Disnakertrans Kabupaten Paser

Sampai Dengan Triwulan II

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang responsife dan tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokras	30 C	50 C	35	35	35	0	0
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Disnakertrans	62 B	62 B	79	79	79	79,49	100,62%
Tujuan : Meningkatnya Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi dan telah ditempatkan	Pertumbuhan jumlah tenaga Kerja yang siap kerja	30%	30%	40%	40%	40%	0	0
Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	30%	30%	40%	40%	40%	0	0
Tujuan : Mewujudkan Hubungan yang Kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja	Tingkat Hubungan Industrial yang kondusif antara pengusaha dan pekerja	40%	40%	40%	40%	40%	14,61	76,53
Sasaran : Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	40%	40%	40%	40%	40%	50%	125%

Tujuan : Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan Transmigrasi	Persentase peningkatan kualitas hidup warga Transmigran baru			100%	100%	100%	0	0
Sasaran : Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan pengembangan kawasan transmigrasi baru			50%	50%	100%	0	0

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang resposif dan tangkas” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Penilaian mandiri pelaksanaan birokrasi reformasi ”, belum mencapai target dikarenakan capaian tersebut diukur pada saat akhir tahun.

b. Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “.Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat”, Melebihi target, dimana realisasi sebesar 79,49 dari target 79 dengan capaian 100,62% adalah Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

c. Tujuan : Meningkatnya Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi dan telah ditempatkan, memiliki 1 indikator kinerja yaitu : Pertumbuhan jumlah tenaga Kerja yang siap kerja, belum mencapai target, dimana realisasi sebesar 0% dari target sebesar 30 % dengan capaian kinerja 0 %.

d. Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja, memiliki 1 indikator yaitu: Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan, belum mencapai target, dimana realiasasi sebesar 0% dari target sebesar 30 % dengan capaian kinerja 0 %

e. Tujuan : Mewujudkan Hubungan yang Kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja , memiliki 1 indikator yaitu :

Tingkat Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 14,61 % dari target sebesar 40 % dengan capaian kinerja 76,53%

f. Sasaran : Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis, memiliki 1 indikator yaitu : Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan, melebihii target, dimana realisasinya sebesar 50% dari target 40 % dengan capaian kinerja 125 %

g. Tujuan : Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan Transmigrasi, memiliki 1 indikator yaitu : Persentase peningkatan kualitas hidup warga Transmigran baru, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0 % dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 0 %

h. Sasaran : Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi, memiliki 1 indikator yaitu : Persentase peningkatan pengembangan kawasan transmigrasi baru, belum mencapai target dikarenakan capaian tersebut diukur pada saat akhir tahun

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Adanya pelaksanaan rapat setiap triwulan
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Beberapa Kegiatan dan Subkegiatan masih 0 realisasinya karena dilaksanakan pada triwulan III dan IV.
2. Kurangnya Koordinasi di awal triwulan
3. Pelaksanaan kegiatan bidang belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TPT KABUPATEN DENGAN PROVINSI DAN NASIONAL

Di dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi memangku 1 indikator yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Sasaran strategis Kabupaten "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat", dengan capaian sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS KABUPATEN	INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN	TARGET KABUPATEN (RKPD Perubahan 2023)	REALISASI 2023	CAPAIAN	REALISASI PROVINSI	REALISASI NASIONAL
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,50%	4,72%	95,11%	5,31%	5,32 %

Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS) No. 59/11/Th. XXVI, 06 November 2023, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Target TPT ini merupakan pernyataan dimana semakin besar realisasi menunjukkan rendahnya kinerja. Realisasi TPT tahun 2023 sebesar 4,72% adalah di bawah target Kabupaten sebesar 4,5% dengan selisih 0,22% , namun kinerja ini mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2022 sebesar 4,88%. Realisasi TPT Kabupaten Paser di atas realisasi TPT Provinsi Kalimantan Timur yaitu 5,31% serta diatas Realisasi TPT Nasional yang 5,32%.

Kondisi ini disebabkan oleh :

1. Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Paser tahun 2023 telah pulih dibandingkan sebelum pandemik selaras dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser yang semakin membaik paska pandemik. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Paser tahun 2023 sebesar 4,72% , turun 0,16 persen poin dibandingkan tahun 2022.

2. Meningkatnya Program Pelatihan Ketenagakerjaan dan pemagangan dengan mengirim peserta pelatihan ke Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Timur serta mengirim peserta pemagangan ke beberapa perusahaan di Kabupaten Paser.

3. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan kesempatan kerja dengan dibukanya lowongan pekerjaan pada perusaahaan yang baru beroperasi di Kecamatan Batu Sopang, serta meningkatnya lowongan pekerjaan pada perusahaan lainnya.

4. Angka pengangguran di Kabupaten Paser juga disebakan banyaknya tamatan SMK/Akademi/Perguruan Tinggi yang tidak terampung di pasar kerja serta pendatang baru dengan adanya IKN dimana Kabupaten Paser yang juga merupakan Kabupaten penyangga menjadi daya tarik bagi pendatang untuk mencari pekerjaan di Kabupaten ini sementara mereka tidak memiliki keahliannya yang disyaratkan.

Upaya untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka :

1. Meningkatkan koordinasi, Kerjasama dan kolaborasi berbagai bidang serta lintas sektor baik pemerintah dan dunia usaha, Karena untuk menekan Angka Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Paser perlu, perhatian dan penyelesaian bersama dari beberapa

2. unsur yang terlibat seperti dunia Pendidikan, instansi yang terlibat dengan pengembangan usaha kreatif serta sektor pekerja informal , pertanian, perikanan, para perlaku usaha dan stakeholder terkait.

3. Memfasilitasi masyarakat agar dapat berwirausaha karena selain mendapatkan pekerjaan yang tidak bergantung pada kesepakatan upah minimum sehingga dapat menekan risiko untuk menganggur, wirausahawan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Selain itu, sarana/prasarana penunjang juga perlu dibangun, karena hal tersebut dapat meningkatkan peluang investor untuk berinvestasi.

4. Pelatihan keahlian atau skill tambahan juga diperlukan agar para angkatan kerja lebih dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan lapangan pekerjaan yang adaptif terhadap perkembangan jaman dan teknologi serta mengikuti era revolusi industri 4.0.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISNAKERTRANS

3.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Reviu Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sejalan dengan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terpencil dan Transmigrasi, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Tujuan : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang responsife dan tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokras	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	35	35
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Disnakertrans	Nilai SAKIP dari Inspektorat	79	79
Tujuan : Meningkatnya Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi dan telah ditempatkan	Pertumbuhan jumlah tenaga Kerja yang siap kerja	$\frac{Jumlah\ tenaga\ kerja\ yang\ lulus\ pelatihan}{\text{Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan}} \text{ X } 100$	40 %	40 %
Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja } bersertifikat\ kompetensi\ yang\ ditempatkan}{Jumlah\ Seluruh\ Pencari\ Kerja\ yang\ memiliki\ Sertifikat\ Kompetensi} \text{ X } 100$	40 %	40 %

Tujuan : Mewujudkan Hubungan yang Kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningka tkan kesejahte raan Pekerja	Tingkat Hubungan Industrial yang kondusif antara pengusaha dan pekerja	$\frac{Jumlah\ kasus\ perselisihanyang\ diselesaikan}{\text{Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar}} \text{X } 100$	40 %	40 %
Sasaran : Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	$\frac{Jumlah\ kasus\ yang\ diselesaikan\ melalui\ PB}{\text{Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar}} \text{X } 100$	40 %	49 %
Tujuan : Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelen ggaraan Transmigrasi	Persentase peningkatan kualitas hidup warga Transmigran baru	$\frac{Jumlah\ warga\ Transmigran\ yang\ dapat\ mengakses\ layanan\ dasar}{\text{Jumlah seluruh warga transmigran}} \text{X } 100$	100 %	100 %
Sasaran : Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan pengembangan kawasan transmigrasi baru	$\frac{Jumlah\ satuan\ pemukiman\ baru\ yang\ dibangun}{\text{Jumlah satuan pemukimna baru yang direncanakan}} \text{X } 100$	50%	50%

Memperhatikan tabel 3.1 Di atas, menunjukkan bahwa target tujuan dan sasaran pada perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak semua mengalami perubahan kecuali pada sasaran Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis karena memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya. Meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggran 2024, namun perubahan anggaran dimaksud diarahakan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu "**PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DISELURUH KABUPATEN PASER"** yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.

2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air.
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian.
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur.
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana.
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung pencapaian sasaran ke 3 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, dan sasaran ke 6 yaitu Meningkatkan kualitas dan layanan infrastruktur serta pencapaian sasaran ke 10 , yaitu Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan Akhir P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Rancangan Akhir Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA				**35.365.040.774,00**	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA**				**40.549.470.674**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKERTARIAT**	**74 %**	**9.783.671.406,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKERTARIAT**	74 %	**10.577.367.006**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Semua Kecamatan**	**Presentase Capaian Sasaran Strategis Disnakertrans**	**90 %**	**275.101.600,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Semua Kecamatan**	**Presentase Capaian Sasaran Strategis Disnakertrans**	**90 %**	**336.637.600**	**Prioritas Pendukung I**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	206.554.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	265.090.000	Prioritas Pendukung I
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 Dokumen	20.408.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	20.408.400,00	Prioritas Pendukung I

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	48.139.200,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	48.139.200,00	Prioritas Pendukung I
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Semua Kecamatan**	**Persentase pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**100**	**persen**	**7.309.806.606,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Semua Kecamatan**	**Persentase pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**100**	**persen**	**7.525.891.806**	**Prioritas Pendukung I**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	Orang	7.109.806.606,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	Orang	7.109.806.606,00	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	200.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	416.085.200	Prioritas Pendukung I
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran**	**100**	**%**	**816.334.960,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran**	**100**	**%**	**1.323.109.360**	**Prioritas Pendukung I**
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	414.636.250,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Paket	694.522.950	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kecamatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	69.300.290,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kecamatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	Paket	95.041.990	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	44.168.420,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	44.168.420,00	Prioritas Pendukung I
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	16	Laporan	288.230.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	31	Laporan	489.376.000	Prioritas Pendukung I

dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Semua Kecamatan**	**Presentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**%**	**1.059.454.920,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kecamatan**	**Presentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**%**	**1.059.454.920,00**	**Prioritas Pendukung I**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	748,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	748,000	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	51.706.920	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	51.706.920	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.007.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.007.000.000,00	Prioritas Pendukung I
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Semua Kecamatan**	**Presentase terpenuhinya barang milik daerah**	**100**	**%**	**322.973.320,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kecamatan**	**Presentase terpenuhinya barang milik daerah**	**100**	**%**	**335.273.320**	**Prioritas Pendukung I**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dipelihara dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	52.393.320	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dipelihara dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	64.693.320	Prioritas Pendukung I

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kecamatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	Unit	75.580.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kecamatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	Unit	75.580.000,00	Prioritas Pendukung I
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kecamatan	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	195.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kecamatan	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	195.000.000,00	Prioritas Pendukung I
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Semua Kecamatan**	**CAPAIAN PROGRAM TENAGA KERJA YANG DAPAT DILAKSANAKAN SETIAP TAHUNNYA**	**100**	**%**	**21.002.000,00**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Semua Kecamatan**	**CAPAIAN PROGRAM TENAGA KERJA YANG DAPAT DILAKSANAKAN SETIAP TAHUNNYA**	**100**	**%**	**21.002.000,00**	**Prioritas Pendukung I**
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Semua Kecamatan	**Persentase dokumen ketenagakerjaan yang tersusun**	**75**	**%**	**21.002.000,00**	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Semua Kecamatan	**Persentase dokumen ketenagakerjaan yang tersusun**	**75**	**%**	**21.002.000,00**	Prioritas Pendukung I
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Semua Kecamatan	Jumlah SDM Perusahaan yang Mampu Menyusun RTK Mikro	10	Orang	21.002.000,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Semua Kecamatan	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	10	Orang	**21.002.000,00**	Prioritas Pendukung I
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Semua Kecamatan**	**Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**70**	**%**	**14.387.888.481,00**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Semua Kecamatan**	**Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**70**	**%**	**17.600.859.681**	**Prioritas Pendukung I**
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**80**	**%**	**14.085.701.220,00**	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**80**	**%**	**17.298.672.420**	**Prioritas Pendukung I**

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Semua Kecamatan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	260	Orang	5.572.487.114,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Semua Kecamatan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	260	Orang	6.168.472.814	Prioritas Pendukung I
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tanah Grogot	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	4	Unit	4.221.299.800,00	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tanah Grogot	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	6	Unit	5.168.035.300	
Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Tanah Grogot	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja		0	0	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Tanah Grogot	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	97	unit	459.000.000	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tanah Grogot	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	162	Orang	4.291.914.306,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tanah Grogot	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	218	orang	5.503.164.306	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		**Presentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swastaa**	**80**	**%**	**104.187.261,00**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**		**Presentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swastaa**	**80**	**%**	**104.187.261,00**	**Prioritas Pendukung I**
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Semua Kecamatan	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	8	Lembaga	104.187.261,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Semua Kecamatan	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	8	Lembaga	**104.187.261,00**	Prioritas Pendukung I
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pendaftaran dan Rekomendasi LPK**	**70**	**%**	**48.000.000,00**	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pendaftaran dan Rekomendasi LPK**	**70**	**%**	**48.000.000,00**	**Prioritas Pendukung I**

Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Semua Kecamatan	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1	Perijinan	48.000.000,00	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Semua Kecamatan	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1	Perijinan	**48.000.000,00**	Prioritas Pendukung I
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Semua Kecamatan**	**Presentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**70**	**%**	**50.000.000,00**	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Semua Kecamatan**	**Presentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**70**	**%**	**50.000.000,00**	**Prioritas Pendukung I**
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Semua Kecamatan	Jumlah perusahaan kecil yang Mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	5	Perusahaan	50.000.000,00	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Semua Kecamatan	Jumlah perusahaan kecil yang Mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	5	Perusahaan	**50.000.000,00**	Prioritas Pendukung I
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah kab/Kota**	**80**	**%**	**100.000.000,0**	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah kab/Kota**	**80**	**%**	**100.000.000,0**	**Prioritas Pendukung I**
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah	4	Dokumen	100.000.000,0	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah	4	Dokumen	**100.000.000,0**	Prioritas Pendukung I
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Semua Kecamatan**	**Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan**	**30**	**%**	**851.953.221,00**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Semua Kecamatan**	**Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan**	**30**	**%**	**1.507.081.621**	**Prioritas Pendukung I**
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Semua Kecamatan**	**Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota**	**27**	**%**	**654.234.092,00**	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Semua Kecamatan**	**Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota**	**27**	**%**	**780.264.092**	**Prioritas Pendukung I**

Pelayanan antar Kerja	**Semua Kecamatan**	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	500	Orang	60.597.560,00	Pelayanan antar Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	500	Orang	60.597.560,00	Prioritas Pendukung II
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	**Semua Kecamatan**	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	60	Orang	24.636.532,00	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Muara Samu	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	60	Orang	24.636.532,00	Prioritas Pendukung II
Perluasan Kesempatan Kerja	**Semua Kecamatan**	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melaui Program Perluasan Kesempatan Kerja	30	Orang	569.000.000,00	Perluasan Kesempatan Kerja	Batu Kajang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melaui Program Perluasan Kesempatan Kerja	90	Orang	619.000.000	Prioritas Pendukung II
Penyelenggaraan Unit layanan Disabilitas ketenagakerjaan	**Semua Kecamatan**	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	0	Orang	0	Penyelenggaraan Unit layanan Disabilitas ketenagakerjaan	**Semua Kecamatan**	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	5	Orang	76.030.000	
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Semua Kecamatan**	**Persentase LPTKS yang memiliki ijin sesuai dengan regulasi yang berlaku**	**34**	**%**	**27.231.160,00**	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Semua Kecamatan**	**Persentase LPTKS yang memiliki ijin sesuai dengan regulasi yang berlaku**	**34**	**%**	**27.231.160,00**	**Prioritas Pendukung II**
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	**Semua Kecamatan**	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	7	LPTKS	27.231.160,00	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Desa Riwang, Tanjung Harapan	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	7	LPTKS	**27.231.160,00**	Prioritas Pendukung II
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Semua Kecamatan**	**Presentase Informasi Lowongan Kerja**	**100**	**%**	**170.487.969,00**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Batu Engau**	**Presentase Informasi Lowongan Kerja**	**100**	**%**	**699.586.369**	**Prioritas Pendukung II**

Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	**Semua Kecamatan**	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	3	Dokumen	42.019.600,00	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Semua Kecamatan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	3	Dokumen	83.000.000	Prioritas Pendukung II
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	**Semua Kecamatan**	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (karirhub)	1000	Orang	128.468.369,00	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Batu Engau	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (karirhub)	1200	Orang	616.586.369	Prioritas Pendukung II
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Muara Kuaro**	**PERSENTASE TINGKAT PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA**	**40**	**%**	**10.320.525.666,00**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Muara Kuaro**	**PERSENTASE TINGKAT PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA**	**40**	**%**	**10.843.160.366**	**Prioritas Pendukung II**
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Semua Kecamatan**	**Persentase kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan**	**15**	**%**	**261.246.466,00.**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Semua Kecamatan**	**Persentase kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan**	**15**	**%**	**295.248.666**	**Prioritas Pendukung II**
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Semua Kecamatan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	16	Perusahaan	24.722.000,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Semua Kecamatan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	16	Perusahaan	24.722.000,00	Prioritas Pendukung II

Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Semua Kecamatan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja sama	6	Perusahaan	29.802.000,00	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan		Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja sama	6	Perusahaan	29.802.000,00	Rutin
Penyelenggraan pendataan dan informasi sarana hubungan indsustrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta pengupahan	Tana Paser	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	10	Laporan	206.722.466,00	Penyelenggraan pendataan dan informasi sara hubungan indsustrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta pengupahan	Tana Paser	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	10	laporan	240.724.666	Rutin
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota)	Tana Paser	**Persentase perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan**	**90**	**%**	**10.059.279.200,00**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota)**	Tana Paser	**Persentase perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan**	**90**	**%**	**10.547.911.700**	**Rutin**
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5	Perkara	80.606.000,00	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7	Perkara	206.992.500	Rutin
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok	Tana Paser	Jumlah Perkara Perselisihan Yang Terselesaikan	14	Perkara	43.096.000,00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok	Tana Paser	Jumlah Perkara Perselisihan Yang Terselesaikan	14	Perkara	43.096.000,00	Rutin

Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Tana Paser	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	21	Asosiasi dengan serikat pekerja	31.042.000,00	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Tana Paser	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	21	Asosiasi dengan serikat pekerja	31.042.000,00	Rutin
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	Lembaga	56.240.000,00	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	Lembaga	388.436.000	Rutin
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Tana Paser	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	32268	Orang	9.848.295.200,00	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Tana Paser	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	47026	Orang	9.878.345.200	Rutin
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					**369.626.200**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**					**567.565.700**	

PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Tana Paser**	**CAKUPAN KAWASAN TRANSMIGRASI YANG SESUAI PERENCANAAN**	**100**	**%**	**134.700.000,00**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Tana Paser**	**CAKUPAN KAWASAN TRANSMIGRASI YANG SESUAI PERENCANAAN**	**100**	**%**	**134.700.000,00**	**Rutin**
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	**Tana Paser**	**Persentase ketersediaan lahan kawasan transmigrasi**	**35**	**%**	**134.700.000,00**	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**Tana Paser**	**Persentase ketersediaan lahan kawasan transmigrasi**	**35**	**%**	**134.700.000,00**	**Rutin**
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Tana Paser	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang nisa dibangun dan dikerja samakan dengan daerah lain	1	Dokumen	64.100.000,00	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Tana Paser	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang nisa dibangun dan dikerja samakan dengan daerah lain	1	Dokumen	64.100.000,00	Rutin
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Tana Paser	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	1	Kawasan Transmigrasi	70.600.000,00	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Tana Paser	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	1	Kawasan Transmigrasi	70.600.000,00	Rutin
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Tana Paser**	**PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH KK TRANSMIGRAN SEJAHETRA YG DITEMPATKAN**	**80**	**%**	**108.200.000**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Tana Paser**	**PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH KK TRANSMIGRAN SEJAHETRA YG DITEMPATKAN**	**80**	**%**	**108.200.000**	**Rutin**
Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tana Paser	**Persentase pertumbuhan penduduk pada kawasan transmigrasi baru**	29	%	**108.200.000**	**Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Tana Paser	**Persentase pertumbuhan penduduk pada kawasan transmigrasi baru**	29	%	**108.200.000**	Rutin

Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	2	Laporan	54.100.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	2	Laporan	54.100.000,00	Rutin
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Tana Paser	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni,Layak Usaha,dan Layak Berkembang)	2	Dokumen	54.100.000,00	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Tana Paser	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni,Layak Usaha,dan Layak Berkembang)	2	Dokumen	54.100.000,00	Rutin
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Tana Paser**	**Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi**	**100**	**%**	**126.726.200,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Tana Paser**	**Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi**	**100**	**%**	**324.652.700**	**Rutin**
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	**Tana Paser**	**Persentase layanan dasar yang dapat di akses warga trans baru**	**90**	**%**	**126.726.200,00**	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**Tana Paser**	**Persentase layanan dasar yang dapat di akses warga trans baru**	**90**	**%**	**324.652.700**	**Rutin**
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Tana Paser	Jumlah kepala keluarga transmigrasi yang dibina	55	KK	58.100.000,00	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Tana Paser	Jumlah kepala keluarga transmigrasi yang dibina	55	KK	203.652.700	Rutin
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Tana Paser	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan	1	Satuan pemukiman	68.626.200,00	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Tana Paser	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka	1	Satuan pemukiman	68.626.200,00	Rutin

dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi,Kelembagaan			dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi,Kelembagaan			

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Rancangan Akhir perubahan Renja 2024 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik dari kelompok masyarkat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RANCANGAN PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2024

Pagu sebelum Perubahan					Pagu Rancangan Akhir Perubahan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA				**35.365.040.774**	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA**				**40.549.470.674**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKERTARIAT**	**74%**	**9.783.671.406**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKERTARIAT**	74 %	**10.577.367.006**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Semua Kecamatan**	**Presentase Capaian Sasaran Strategis Disnakertrans**	**90%**	**275.101.600**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Semua Kecamatan**	**Presentase Capaian Sasaran Strategis Disnakertrans**	**90 %**	**333.637.600**	**Prioritas Pendukung I**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	206.554.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	265.090.000	Prioritas Pendukung I
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	20.408.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	20.408.400	Prioritas Pendukung I

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	48.139.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	48.139.200	Prioritas Pendukung I
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Semua Kecamatan**	**Persentase pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**100**	**7.309.806.606**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Semua Kecamatan**	**Persentase pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**100**	**7.525.891.806**	**Prioritas Pendukung I**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	7.109.806.606	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	7.109.806.606	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	200.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	416.085.200	Prioritas Pendukung I
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran**	**100 %**	**816.334.960**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran**	**100 %**	**1.323.109.360**	**Prioritas Pendukung I**
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Semua Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	414.636.250	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	694.522.950	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kecamatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	69.300.290	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kecamatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	95.041.990	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	44.168.420	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	44.168.420	Prioritas Pendukung I
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	288.230.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	489.376.000	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Semua Kecamatan**	**Presentase terpenuhinya jasa penunjang**	**100 %**	**1.059.454.920**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Semua Kecamatan**	**Presentase terpenuhinya jasa**	**100 %**	**1.059.454.920**	**Prioritas Pendukung I**

		urusan pemerintah daerah			**Pemerintahan Daerah**		**penunjang urusan pemerintah daerah**			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	748,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	748,000	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51.706.920	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51.706.920	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.007.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.007.000.000	Prioritas Pendukung I
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Semua Kecamatan**	**Presentase terpenuhinya barang milik daerah**	**100 %**	**322.973.320**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kecamatan**	**Presentase terpenuhinya barang milik daerah**	**100 %**	**335.273.320**	**Prioritas Pendukung I**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dipelihara dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	52.393.320	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dipelihara dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	64.693.320	Prioritas Pendukung I
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kecamatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	75.580.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kecamatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	75.580.000	Prioritas Pendukung I
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kecamatan	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	195.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kecamatan	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	195.000.000	Prioritas Pendukung I

		dipelihara/direhabilitasi					dipelihara/direhabilitasi			
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Semua Kecamatan**	**CAPAIAN PROGRAM TENAGA KERJA YANG DAPAT DILAKSANAKAN SETIAP TAHUNNYA**	**100 %**	**21.002.000**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Semua Kecamatan**	**CAPAIAN PROGRAM TENAGA KERJA YANG DAPAT DILAKSANAKAN SETIAP TAHUNNYA**	**100 %**	**21.002.000**	**Prioritas Pendukung I**
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		**Persentase dokumen ketenagakerjaan yang tersusun**	**75%**	21.002.000	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**Jumlah Dokumen Ketenagakerjaan yang tersusun**	75%	**21.002.000**	Prioritas Pendukung I
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Semua Kecamatan	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	10 Orang	21.002.000	Faslitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Semua Kecamatan	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	10 Orang	**21.002.000**	Prioritas Pendukung I
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Semua Kecamatan**	**Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**70 %**	**14.387.888.481**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Semua Kecamatan**	**Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**70 %**	**17.600.859.681**	**0Prioritas Pendukung I**
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**80 %**	**14.085.701.220**	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**80 %**	**17.298.672.420**	**Prioritas Pendukung I**
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Semua Kecamatan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	260 Orang	5.572.487.114	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Semua Kecamatan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	260 Orang	6.168.472.814	Prioritas Pendukung I

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan unit Kompetensi	Semua Kecamatan	Jumlah tenga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	162 orang	4.291.914.306	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan unit Kompetensi		Jumlah tenga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	218 Orang	5.503.164.306	
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tanah Grogot	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	4 Unit	4.221.299.800	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tanah Grogot	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	6 Unit	5.168.035.300	
Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Tanah Grogot	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	0	0	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Tanah Grogot	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	97 Unit	459.000.000	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		**Presentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swastaa**	**80 %**	**104.187.261**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**		**Presentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swastaa**	**80 %**	**104.187.261**	**Prioritas Pendukung I**
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Semua Kecamatan	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	8 Lembaga	104.187.261	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Semua Kecamatan	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	8 Lembaga	**104.187.261**	Prioritas Pendukung I
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pendaftaran dan Rekomendasi LPK**	**70 %**	**48.000.000**	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pendaftaran dan Rekomendasi LPK**	**70 %**	**48.000.000**	**Prioritas Pendukung I**
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Semua Kecamatan	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1 Perijinan	48.000.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Semua Kecamatan	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1 Perijinan	**48.000.000**	Prioritas Pendukung I
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Semua Kecamatan**	**Presentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**70 %**	**50.000.000**	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Semua Kecamatan**	**Presentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**70 %**	**50.000.000**	**Prioritas Pendukung I**
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Semua Kecamatan	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi	5 Perusahaan	50.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas	Semua Kecamatan	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi	5 Perusahaan	**50.000.000**	Prioritas Pendukung I

		Peningkatan Produktivitas			kepada Perusahaan Kecil		Peningkatan Produktivitas			
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah kab/Kota**	**80 %**	**100.000.000**	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah kab/Kota**	**80 %**	**100.000.000**	**Prioritas Pendukung I**
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen	100.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4Dokumen	**100.000.000**	Prioritas Pendukung I
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Semua Kecamatan**	**Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan**	**30 %**	**851.953.221**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Semua Kecamatan**	**Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan**	**30 %**	**1.507.081.621**	**Prioritas Pendukung I**
Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Semua Kecamatan**	**Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota**	**27%**	**654.234.092**	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota**	**Semua Kecamatan**	**Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota**	**27%**	**780.264.092**	**Prioritas Pendukung I**
Pelayanan antar Kerja	Semua Kecamatan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	500 Orang	60.597.560	Pelayanan antar Kerja	Semua Kecamatan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	500 Orang	60.597.560	Prioritas Pendukung II
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Semua Kecamatan	Jumlah pencari kerja yang mengikuti Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	60 Orang	24.636.532	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Muara Samu	Jumlah pencari kerja yang mengikuti Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	60 Orang	24.636.532	Prioritas Pendukung II
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Semua Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	0	0	Penyelengga raan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerj aan	Semua Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	5 Orang	76.030.000	
Perluasan Kesempatan Kerja	Semua Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan	30 Orang	569.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Batu Kajang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program	90 Orang	619.000.000	Prioritas Pendukung II

		Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja					Perluasan Kesempatan Kerja			
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Semua Kecamatan**	**Persentase LPTKS yang memiliki ijin sesuai dengan regulasi yang berlaku**	**30%**	**27.231.160**	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Batu Kajang**	**Persentase LPTKS yang memiliki ijin sesuai dengan regulasi yang berlaku**	**30%**	**27.231.160**	**Prioritas Pendukung II**
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Semua Kecamatan	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	7 LPTKS	27.231.160	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Desa Riwang, Tanjung Harapan	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	7 LPTKS	27.231.160	Prioritas Pendukung II
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Semua Kecamatan**	**Presentase Informasi Lowongan Kerja**	**100 %**	**170.487.969**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Batu Engau**	**Presentase Informasi Lowongan Kerja**	**100 %**	**699.586.369**	**Prioritas Pendukung II**
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Semua Kecamatan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	3 Dokumen	42.019.600	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Semua Kecamatan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	3 Dokumen	83.000.000	Prioritas Pendukung II
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Semua Kecamatan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (karirhub)	1000 Orang	128.468.369	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Batu Engau	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (karirhub)	1200 Orang	616.586.369	Prioritas Pendukung II
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Semua Kecamatan**	**PERSENTASE TINGKAT PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA**	**40 %**	**10.320.525.666**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Muara Kuaro**	**PERSENTASE TINGKAT PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA**	**40 %**	**10.843.160.366**	**Prioritas Pendukung II**

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Semua Kecamatan**	**Persentase kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan**	**15%**	**261.246.466**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Semua Kecamatan**	**Persentase kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan**	**15%**	**295.248.666**	**Prioritas Pendukung II**
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Semua Kecamatan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	16 Perusahaan	24.722.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Semua Kecamatan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	16 Perusahaan	24.722.000	Prioritas Pendukung II
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Semua Kecamatan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja sama	6 Perusahaan	29.802.000	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan		Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja sama	6 Perusahaan	29.802.000	Rutin
Penyelenggraan pendataan dan informasi sarana hubungan indsustrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta pengupahan	Tana Paser	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	10 Laporan	206.722.466	Penyelenggraan pendataan dan informasi sara hubungan indsustrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta pengupahan	Tana Paser	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	10 laporan	240.724.666	Rutin
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan		**Persentase perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan**	**90%**	**10.059.279.200**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok**		**Persentase perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan**	**90%**	**10.547.911.700**	**Rutin**

Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota)					**Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota)**					
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 Perkara	80.606.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7 Perkara	206.992.500	Rutin
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah Perkara Perselisihan Yang Terselesaikan	14 Perkara	43.096.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah Perkara Perselisihan Yang Terselesaikan	14 Perkara	43.096.000	Rutin
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Tana Paser	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	21 Asosiasi dengan serikat pekerja	31.042.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Tana Paser	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	21 Asosiasi dengan serikat pekerja	31.042.000	Rutin
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	56.240.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	388.436.000	Rutin

Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Tana Paser	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	32268 Orang	9.848.295.200	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Tana Paser	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	47026 Orang	9.878.345.200	Rutin
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				**369.626.200**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**567.565.700**	
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Tana Paser**	**CAKUPAN KAWASAN TRANSMIGRASI YANG SESUAI PERENCANAAN**	**100 %**	**134.700.000**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Tana Paser**	**CAKUPAN KAWASAN TRANSMIGRASI YANG SESUAI PERENCANAAN**	**100 %**	**134.700.000**	**Rutin**
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	**Tana Paser**	**Persentase ketersediaan lahan kawasan transmigrasi**	**25%**	**134.700.000**	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**Tana Paser**	**Persentase ketersediaan lahan kawasan transmigrasi**	**25%**	**134.700.000**	**Rutin**
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Tana Paser	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerja samakan dengan daerah lain	1 Dokumen	64.100.000	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Tana Paser	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerja samakan dengan daerah lain	1 Dokumen	64.100.000	Rutin
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Tana Paser	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	70.600.000	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Tana Paser	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	70.600.000	Rutin
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Tana Paser**	**PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH KK TRANSMIGRAN SEJAHETRA YG DITEMPATKAN**	**80 %**	**108.200.000**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Tana Paser**	**PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH KK TRANSMIGRAN SEJAHETRA YG DITEMPATKAN**	**80 %**	**108.200.000**	**Rutin**

Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tana Paser	**Persentase pertumbuhan penduduk pada kawasan transmigrasi baru**	29%	**108.200.000**	**Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Tana Paser	**Persentase pertumbuhan penduduk pada kawasan transmigrasi baru**	29%	**108.200.000**	Rutin
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tana Paser	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	54.100.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota)	2 Laporan	54.100.000	Rutin
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Tana Paser	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	2 Dokumen	54.100.000	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Tana Paser	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	2 Dokumen	54.100.000	Rutin
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Tana Paser**	**Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi**	**1 Kawasan**	**126.726.200**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Tana Paser**	**Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi**	**1 Kawasan**	**324.652.700**	**Rutin**
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	**Tana Paser**	**Persentase layanan dasar yang dapat di akses warga trans baru**	**80%**	**126.726.200**	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**Tana Paser**	**Persentase layanan dasar yang dapat di akses warga trans baru**	**80%**	**324.652.700**	**Rutin**
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Tana Paser	Jumlah kepala keluarga transmigrasi yang dibina	55 KK	58.100.000	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Tana Paser	Jumlah kepala keluarga transmigrasi yang dibina	55 KK	203.652.700	Rutin
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam	Tana Paser	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka	1 Satuan pemukiman	68.626.200	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam	Tana Paser	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan	1 Satuan pemukiman	68.626.200	Rutin

Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi, Kelembagaan			Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		Infrastruktur Sosial,Ekonomi,Kelembagaan			

BAB IV

P E N U T U P

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Disnakertrans Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Reviu Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabuputen Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD dan Rancangan Akhir Perubahan Renja.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi
   kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024.

5.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung E Lantai 2 Kav. B
Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kode Pos 76211
Website : https://disnakertrans.paserkab.go.id
E-mail:disnakertrans31@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PASER

NOMOR : 61 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PASER

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja tersebut;
b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026- ;
13. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Penyusuna Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini adalah menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;

KETIGA : Tim penyusun dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 25 April 2024

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

Ir. Madju P Simangunsong

NIP. 196407311990031007

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Paser di Tana Paser (sebagai laporan)
2. Kepala BPKAD Kabupaten Paser di Tana Paser
3. Inspektur Inpektorat Kabupaten Paser di Tana Paser
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMGRASI KABUPATEN PASER
NOMOR : 61 Tahun 2024
TANGGAL : 25 April 2024

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASI
KABUPATEN PASER

Ketua	:	Kepala Dinas
Wakil Ketua	:	Sekretaris
Sekretaris	:	Perencana Ahli Muda
Anggota	:	1. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
		2. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja
		3. Kepala Bidang Hubungan Industrial
		4. Kepala Bidang Transmigrasi
		5. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja
Sekretariat	:	1. Mega Suryathni
		2. Muhammad Ismail, S.Kom

Ditetapkan : Tana Paser
Pada tanggal : 25 April 2024

Kepala Dinas



Ir. Madju P Simangunsong

NIP. 196407311990031007

REKAP KEGIATAN PBK PER KEJURUAN
UPTD BLK KABUPATEN PASER TAHUN 2023

NO	PELATIHAN		SUMBER DANA	DURASI	PAKET	JUMLAH PESERTA (Orang)	JUMLAH LULUS PBK (Orang)	LULUS UJK (Orang)	Keterangan
	KEJURUAN	SUB KEJURUAN							
1	Processing	Pembuatan Roti dan Kue	RM	140 JP	1	16	16	15	
2	Garmen Apparel	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	RM	260 JP	1	16	15	11	
3	Teknik Las	Plate SMAW 3G UP/PF	RM	340 JP	1	16	14	9	
4	Teknik Otomatif	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Konvensional	RM	260 JP	2	32	27	8	
5	Teknik Listrik	Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	RM	260 JP	1	16	15	15	
		TOTAL		1520 JP	6	96	87	58	

Tana Paser, 03 Oktober 2023
Kepala UPTD BLK,

Hj. Sumarliani, SE.
NIP. 19651005 199203 2 011

DATA TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN *BERBASIS KOMPETENSI*
TAHUN 2023 DI UPTD BLK KABUPATEN PASER
DI UPTD BLK KABUPATEN PASER

APBN						APBD					
NO	TAHUN	JUMLAH PELATIHAN (PAKET)	JUMLAH PESERTA (ORANG)	JUMLAH PESERTA LULUS (ORANG)	JUMLAH PESERTA TIDAK LULUS (ORANG)	NO	TAHUN	JUMLAH PELATIHAN (PAKET)	JUMLAH PESERTA PER PAKET (ORANG)	JUMLAH PESERTA LULUS (ORANG)	JUMLAH PESERTA TIDAK LULUS (ORANG)
1	2023	6	96	87	9	1	2023	3	48	39	9
TOTAL KESELURUHAN		6	96	87	9	TOTAL KESELURUHAN		3	48	39	9

REKAP PESERTA APBN DAN APBD TA 2023

NO	KEGIATAN	LULUS (ORANG)	TIDAK LULUS (ORANG)	JUMLAH PESERTA (ORANG)
1	APBN	87	9	96
2	APBD	39	9	48
TOTAL		126	18	144

Tana Paser, 22 Januari 2024
Kepala UPTD BLK Paser

Decy Mutia Suhartini, S.Pi
NIP 19831212 201001 2 017

DATA REKAP UJI KOMPETENSI

UPTD BLK KABUPATEN PASERTA TA. 2023

NO	SKEMA	TUK	TANGGAL PELAKSANAAN UJK (2 Hari Pelaksanaan)	Jumlah Asesi (Orang)	Jumlah Kompeten (Orang)	Jumlah Belum Kompeten (Orang)	Keterangan
1	Pembuatan Roti dan Kue	Processing	26 - 27 Juni 2023	16	15	1	
2	Pemeliharaan Kendaraan ringan sistem konvensional	Teknik Otomotif	26 - 27 Juni 2023	16	2	14	
3	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	Garmen Apparel	26 - 27 Juni 2023	16	11	5	
4	Plate Welder SMAW 3G UP/PF	Teknik Las	12 - 13 Juli 2023	16	9	7	
5	Pemeliharaan Kendaraan ringan sistem konvensional	Teknik Otomotif	15 - 16 September 2023	16	6	10	
6	Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	Teknik Listrik	15 - 16 September 2023	16	15	1	

Kepala UPTD BLK Paser,

Hj. Sumarliani,SE

NIP.19651005 199203 2 011

PENYERAPAN ALUMNI

DI UPTD BLK KABUPATEN PASER TA. 2023

NO	NAMA	TTL	NO HP	ALAMAT	PROGRAM PELATIHAN	TAHUN	PEKERJAAN	NAMA USAHA	ALAMAT USAHA	BIDANG	JABATAN
1	HAIRUL AZIS	Binuang,13/09/1994	081223121698	Jl. Jend A Yani RT. 08, Kuaro	Pembuatan Roti dan Kue	2023	Wirausahan/ Mandiri	Roti Gembung	Pondok Pesantren Hidayatullah Kuaro	Pembuatan roti	Pemilik
2	ZANNATUL ULLIYA SARI	Tepian batang, 25/11/2002	081348441324	Tepian batang	Pembuatan Roti dan Kue	2023	Wirausahan/ Mandiri	Dapur anna	Tepian Batang	Makanan	Karyawan
3	CAHYANINGRUM TRI RAHAYU	Samarinda, 12/08/1987	08115527666	Keresik Bura RT 010, Paser Belengkong	Pembuatan Roti dan Kue	2023	Wirausahan/ Mandiri		Kresik Bura	Usaha Mandiri	
4	SITI KHUSNUL KHOTIMAH	Jember, 14/06/1987	081350782951	Long ikis Paser	Pembuatan Roti dan Kue	2023	Wirausahan/ Mandiri	Usaha jualan kue	Long ikis Paser	Roti dan kue	Owner
5	ASNIAH	Tanah Grogot, 06/07/1984	081254465826	Jl. Noto Sunardi Gg. Nusantara	Pembuatan Roti dan Kue	2023	Wirausahan/ Mandiri	REVA CAKE	Noto Sunardi Gg. Nusantara	Usaha Mandiri	Owner
6	NOORMAYATI	Balikpapan, 03/10/1982	081350485929	Jln. Negara janju km07 Rt/ Rw 001	Pembuatan Roti dan Kue	2023	Wirausahan/ Mandiri	EricMotor	Janju km 07 RT.001	Bengkel motor	Owner
7	SINGGIH SUSANTO	Jakarta, 10/04/1991	082255194794	Jl. Merawen RT. 16, Desa Jone	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Konvensional	2023	Wirausahan/ Mandiri	Pt. Sims	Batu kajang	Pertambangan	Mekanik
8	NOORDIANSYAH ARBIE	Lolo, 03/10/1991	081254499311	Keluang Paser Jaya Rt.002 Kec.Kuaro	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Konvensional	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	PT. GLSP	Batu kajang	Pertambangan	Helper
9	AGUS SETIAWAN	Mengkudu, 12/09/1999	82252077338	Jl. Mengkudu RT. 004, Batu Engau	Plate Welder SMAW 3G UP/PF	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	HBS GARAGE	Batu engau	Bengkel Las	
10	ALDIO DEVA DWI PUTRA RISDY	Tanah grogot, 01/08/1999	082152241514	Keluang Paser Jaya, Kec. Kuaro	Plate Welder SMAW 3G UP/PF	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	PT. Grup Lima Sekawan Paser	Batu sopang	Pertambangan	Helper
11	TAUFIK RAHMAN	Tanah Grogot, 07/01/1991	082253602110	Jl. HOS Cokroaminoto	Plate Welder SMAW 3G UP/PF	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	PT. GLSP	Batu kajang	Pertambangan	Leaading/ Leader
12	ALIAS	Tanah Grogot, 25/05/1997	'082251271827	Jl. Sultan Hasanuddin RT.004. RW.002, Tanah Grogot	Plate Welder SMAW 3G UP/PF	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	PT. BANK MANDIRI	JL. Ahmad Yani, Kec. Kuaro	Bank	Sales Generalis Produktif
13	AHMAD EFENDI	Tana Periuk, 12/07/2002	085751786179	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo GG Cahaya	Plate Welder SMAW 3G UP/PF	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	Hotel Indah	Jl. R. A Kartini. Tanah Grogot	Perhotelan	Karyawan

14	BADARIAH	Negara, 01/11/1991	082236361610	Biu kecamatan Muara samu	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	2023	Wirausahan/ Mandiri	KHUMAIRA ZAHRA	Usaha Mandiri	Garmen	
15	NURLAELI FAJRIYAH	Tanah Grogot, 23/02/2002	083141852358	Jln.Negara,Gg Bersama 8 RT 07, Tanah Priuk	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	2023	Wirausahan/ Mandiri	DELLVA BOUTIQ	Jln.Negara, GG Bersama 8 RT 07, Desa Tanah Priuk	Garmen	Pemilik usaha
16	YUSTI LIKARIA	Balikpapan, 01/10/1998	085217756469	Jl.D.I. Panjaitan, RT. 001	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	STIT IBNU RUSYD	Jl. Negara Tanah Periuk	Pendidikan	Sekretaris Prodi Kampus
17	F. HELFRIDA MANURUNG	Tornaganjang, 30/05/1984	081257656530	Perumahan taman jalin lestari blok No. 30	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	2023	Wirausahan/ Mandiri	Jahit Busana wanita	Kilo 4 kendur	Garmen	owner
18	Muhammad Riski Fazdillah	Tanah Grogot, 26/08/1999	085751300719	Jln.untung Suropati,jone GG.alif 2	Plate Welder SMAW 3G UP/PF	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	PLTD tanah grogot	Jl.Noto sunardi	Perawatan jaringan/rintis	Rintis ste
19	Zuhair Al Azhar	Balikpapan,12/08/2001	'087724621963	Jl.Al-falah RT 038 NO 47 BALIKPAPAN BARU ILIR	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Konvensional	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	PT.ETI	Jl.Karang anyar Kilang Mandiri	Project	General Worker
20	Muhammad fauzi annoor	Tanah grogot, 09/01/1996	'085249406385	Jl lambung mangkurat rt 10 rw 05	Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	PT Amartha mikro fintek	Jl senaken Gg. alam permai	Keuangan	Business partner
21	Shokip Noviful	Kayungo, 01/09/1998	085787851579	Tajer Mulya RT.004, Kec. Long Ikis	Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	PLN RAYON LONGIKIS	Jln Penajam-kuaro No27, Tajur Kec. Long Ikis	Perawatan jaringan/ Jaringan Baru	Hermet
22	Jalaludin Assayuti	Kerayan jaya, 07/07/2000	082285669404	Kerayan jaya. Rt,9.kec, longikis.kab, paser	Plate Welder SMAW 3G UP/PF	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	PT. PGK TEKTIK	Jln. Amd Km.6 Balikpapan	Perusahaan	Welder

Kepala UPTD BLK Paser

Hj. Sumarliani, SE

NIP 196510051992032011

DATA REKAP KEGIATAN PELATIHAN BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
TAHUN 2023

NO	Jenis pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Lulus Pelatihan	Jumlah Ditempatkan
1	Pelatihan Mekanik Lat Berat	30 Orang	30 Orang	On Proses wawancara (Mei 2024)

Tana Paser, 17 April 2024

Kepala Dinas

Ir. Madju P Simangusong

NIP. 196407311990031007

BERITA ACARA

Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Paser.

Pada hari Kamis tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Paser yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan Materi
   a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDALITBANG Kab. Paser
   b. Arah Kebijakan Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2025 oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur
   c. Kebutuhan Transformasi (Percepatan Pengembangan Industri Hilirisasi) dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terbarukan di Kab. Paser Oleh Dekan Fakultas Kehutanan UNMUL Samarinda
   d. Rancangan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Paser Tahun 2025 oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Paser
   e. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Paser Oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Paser
   f. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perkebunan dan Peternakan Oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Paser
   g. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perikanan Oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. Paser
   h. RPJMD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM Kab. Paser Oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdaganan dan Koperasi, UKM Kab. Paser
   i. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Paser Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Paser.
   j. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Paser Oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Paser
   k. Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga Kab. Paser oleh Perencana Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga Kab. Paser

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Paser terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :
   Hari dan Tanggal : Kamis, 14 Maret 2024
   Jam : 13.00 Wita
   Tempat : Ruang Rapat Simpepeda Bappedalitbang Kabupaten Paser

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan ususlan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Kabupaten ;

KEDUA : Menyepakati Rancangan Renja Perangkat Daerah:
   1) Dinas Ketahanan Pangan Kab. Paser
   2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Paser

3) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Paser
4) Dinas Perikanan Kab. Paser
5) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM Kab. Paser
6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Paser
7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Paser
8) Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga Kab. Paser

Kabupaten Paser Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;

KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;

KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Paser ini; dan

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 14 Maret 2024

Pimpinan Sidang
Sekretaris Disbunak Kab. Paser

Siti Nurjanah, SP, MP
NIP. 19750101 200003 2 007

Menyetujui, Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Paser

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Fikri Jufri, SP, MP	BAPPEDALITBANG Kab. Paser		
2.	Dr. Erwan Wahyudi, SP, M.Si	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Paser		
3.	Ir. Taharuddin	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Paser		
4.	Ir. Sadaruddin	Dinas Perikanan Kab. Paser		
5.	Djoko Bawono, SP, M.Si	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Paser		
6.	Ir. Toto Ifrianto, ST, M. Ling	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Paser		
7.	Yusup, SP, MP	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM Kab. Paser		
8.	Ir. Madju P. Simangunsong	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Paser		
9.	Roni Fitriansyah, S.Sos	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga Kab. Paser		
10.	Muhammad Tauhid, S.Sos, MM	Kecamatan Batu Engau		
11.	Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut, MP	Dekan Fakultas Kehutanan UNMUL Samarinda		
12.	Asman, SP, MP	Dekan Fakultas Pertanian dan Bisnis Digital Univ. Muhammadiyah Kaltim		
13.	Bayu Agung Prasetio, S.ST, SE, M.Si	Kepala BPS Kab. Paser		

PERUBAHAN RENCANA KERJA

2024

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN PASER

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser sebagai unit kerja yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawabnya diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan tugas yang demikian penting, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser harus memiliki dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki maka disusunlah Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

Tana Paser, 16 Agustus 2024

Kepala Dinas,

Hulaimi, S.Sos., M.Si

NIP. 19641228 198602 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**
Daftar Isi ..... **ii**
Daftar Tabel ..... **iii**

Bab I Pendahuluan **1**
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja s.d. Triwulan II Tahun 2024. **6**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja s.d. Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian RENSTRA PD 6
2.2 Faktor Pendorong Dan Penghambat dalam Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2024 19
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Perangkat Daerah 24
2.5 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser. 26
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28
2.7 Review terhadap RKPD 30

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan **41**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 43

Bab IV Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser..... **44**

Bab V Penutup **53**

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Evaluasi Renja Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7
Tabel II.2	Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024.....	21
Tabel II.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.....	25
Tabel II.4	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser	26
Tabel II.5	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser	28
Tabel II.6	Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser	31
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	43
Tabel IV.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.....	45

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3/KEP- /2024
TANGGAL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser sebagai unit kerja yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perumahan, bidang kawasan permukiman dan bidang pertanahan menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawabnya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah.

Visi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tanggal 26 Agustus Tahun 2021, yaitu *"***MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA***"*, dan visi ini diterjemahkan ke dalam 4 misi sebagaimana tertuang dalam gambar 1.1. berikut :



Sumber : RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berkaitan erat dalam mensukseskan misi kedua yakni meningkatkan tata kelola permerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan, serta misi ketiga yaitu mengurangi Ketimpangan Antar wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan. Dengan tugas yang demikian penting, maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser harus didukung aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser, maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser tahun 2024 sebagai dokumen

perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

2.1 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.Tahun 2023
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser.

3.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 Kabupaten Paser.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2024 bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2024, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja s.d. Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian RENSTRA PD
2.2 Faktor Pendorong Dan Penghambat dalam Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2024
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.5. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
2.7. Review terhadap Rancangan RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan II ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja s.d. Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian RENSTRA PD

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja s.d. Triwulan II Tahun 2024 dan capaian Renstra Tahun 2024, rata-rata pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 belum menunjukkan kemajuan yang signifikan karena kegiatan fisik baru akan dilaksanakan pada akhir Juni dan awal Bulan Juli, menyesuaikan dengan tahapan perencanaan dan tahap lelang pekerjaan.

Bertambahnya jumlah pekerjaan juga terjadi pada pergeseran APBD karena masuknya bantuan keuangan provinsi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun Hasil evaluasi kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sampai dengan triwulan 2 Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana tabel II.1 berikut.

EVALUASI RENJA 2024 TRIWULAN II

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Nomor	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Renja		Target Kinerja Dan Pagu 2024 Renja		Realisasi 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Triwulan I		Triwulan II						
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
							0		0						
	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan			285.462.809.949,00		304.319.365.321,00	0	2.215.824.083,00	0	7.931.300.271,00		10.161.664.754,00		3,34	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	47,4 Persen	2.100.625.500,00	66,88 Persen	1.699.760.000,00	0	140.837.000,00	0	117.248.802,00	0	258.085.802,00	0,00	15,18	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah	2 dokumen	501.319.400,00	2 dokumen	123.600.000,00	0	4.800.000,00	0	38.592.000,00	0	43.392.000,00	0,00	35,11	

	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	dokumen	345.832.000,00			0		0		0	-	0,00	0	
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1	Dokumen	155.487.400,00	1	Dokumen	123.600.000,00	0	4.800.000,00	0	38.592.000,00	0	43.392.000,00	0	35,11	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Tertangani	26	Unit	1.524.757.100,00	25	Unit	1.516.160.000,00		117.221.000,00		73.559.956,00	0	190.780.956,00	0,00	12,58	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	14	Unit	552.428.400,00	16	Unit	731.690.400,00	0	70.976.000,00	0	-	0	70.976.000,00	0	9,70	
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	12	unit	972.328.700,00	9	unit	784.469.600,00	0	46.245.000,00	0	73.559.956,00	0	119.804.956,00	0	15,27	

	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Terkait Penyediaan, Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	dokumen	74.549.000,00	1	dokumen	60.000.000,00		18.816.000,00		5.096.846,00	0	23.912.846,00	0,00	39,85	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	dokumen	74.549.000,00	1	Laporan	60.000.000,00	0	18.816.000,00	0	5.096.846,00	0	23.912.846,00	0	39,85	
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani	30	Persen	8.141.078.776,00	50	Persen	8.750.866.000,00	0	119.880.400,00	0	256.869.700,00	0,00	376.750.100,00	0,00	4,31	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokuman Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang disusun	1	dokumen	189.202.700,00	1	dokumen	483.426.000,00		26.558.400,00		11.080.000,00	0	37.638.400,00	0,00	7,79	
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	0			0			0	-	0	-	0	-	0,00	0	

	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1	dokumen	189.202.700,00	1	dokumen	483.426.000,00	0	26.558.400,00	0	11.080.000,00	0	37.638.400,00	0	7,79	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	67,36	Hektar	7.951.876.076,00	112,26	Hektar	8.267.440.000,00	75,37	93.322.000,00	75,37	245.789.700,00	75,37	339.111.700,00	67,1388	4,10	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	65	Unit	2.025.000.000,00	74	Unit	2.310.000.000,00	0	10.960.000,00	0	63.101.500,00	0	74.061.500,00	0	3,21	
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	67,36	Ha	5.926.876.076,00	112,26	Ha	5.957.440.000,00	75,37	82.362.000,00	75,37	182.688.200,00	75,37	265.050.200,00	67,14	4,45	
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni	91,3	Persen	14.316.159.300,00	92,17	Persen	3.399.000.000,00	0	65.115.000,00	0	135.794.000,00	0	200.909.000,00	0,00	5,91	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tidak layak huni yang tertangani di Luar Kawasan Kumuh Perkotaan	41,66	Persen	14.316.159.300,00	49,93	Persen	3.399.000.000,00	0	65.115.000,00	0	135.794.000,00	0,00	200.909.000,00	0,00	5,91	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	489	Unit	14.316.159.300,00	137	Unit	3.399.000.000,00	0	65.115.000,00	0	135.794.000,00	0	200.909.000,00	0	5,91	

		dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki													
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	51,58 Persen	225.360.578.438,00	58,58 Persen	228.706.548.612,00	0	159.759.200,00	0	4.576.087.276,00	0	4.735.846.476,00	0,00	2,07	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan PSU di Lingkungan Perumahan	107112 meter	225.360.578.438,00	101000 meter	228.706.548.612,00	0	159.759.200,00	0	4.576.087.276,00	0	4.735.846.476,00	0,00	2,07	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU yang disusun	0	-	1 dokumen	100.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Panjang jalan di lingkungan perumahan yang ditangani	107.112 meter	225.360.578.438,00	0 meter	228.606.548.612,00	0	159.759.200,00	0	4.576.087.276,00	0	4.735.846.476,00	0,00	2,07	
		Panjang Drainase di lingkungan perumahan yang ditangani	0 meter		0 meter		0		0		0		0,00		
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang	397 Lokasi		174 Lokasi		0		0		0		0		

		Fungsi Hunian													
5	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	57	Persen	417.808.000,00	71,43	Persen	353.000.000,00		-		73.343.400,00		73.343.400,00	0,00	20,78	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mediasi Sengketa Pertanahan yang tertangani	3	kasus	417.808.000,00	3	kasus	353.000.000,00		-		73.343.400,00		73.343.400,00	0,00	20,78	
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	117.000.000,00	1	Dokumen	60.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00	
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	kasus	300.808.000,00	3	berita acara	293.000.000,00	0	-	1	73.343.400,00	1	73.343.400,00	33,3333	25,03	
6	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	55,56	Persen	26.408.232.126,00	66,67	Persen	53.008.235.000,00		67.898.000,00		433.302.200,00		501.200.200,00	0,00	0,95	

	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Penyelesaian Ganti Rugi Dan Santunan Tanah	7	Lokasi	26.408.232.126,00	9	Lokasi	53.008.235.000,00		67.898.000,00		433.302.200,00	0	501.200.200,00	0,00	0,95	
	Penetapan Daftar Masyarakat penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1	dokumen	59.700.000,00	1	dokumen	50.000.000,00	0	4.542.000,00	0	-	0	4.542.000,00	0	9,08	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9	dokumen	26.348.532.126,00	9	dokumen	52.958.235.000,00	0	63.356.000,00	1	433.302.200,00	1	496.658.200,00	11,11	0,94	
7	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase proses penetapan tanah ulayat (2 lokasi)	50	Persen	232.189.400,00	80	Persen	60.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat (2 lokasi)	1	Dokumen	232.189.400,00	1	Dokumen	60.000.000,00		-		-	0	-	0,00	0,00	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	60.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00	
	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	1 dokumen	232.189.400,00			0	-	0	-	0	-	0	0,00	
8	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah yang dilaksanakan	30 Persen	180.358.660,00	50 Persen	170.000.000,00	0	-	0	-	0	14.540.400,00	0,00	8,55	
	Penggunaan Tanah Hamparanya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan zona nilai tanah	4 Lokasi	180.358.660,00	2 Lokasi	170.000.000,00		-		-	0	14.540.400,00	0,00	8,55	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			1 Laporan	50.000.000,00	0	-	0	14.540.400,00	0	14.540.400,00	0	29,08	

	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	4 dokumen	180.358.660,00	2 dokumen	120.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 Persen	8.305.779.749,00	74 Persen	8.171.955.709,00	18,5	1.662.334.483,00	18,5	2.338.654.893,00	37	4.000.989.376,00	50,00	48,96	
		Persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	80 Persen		85 Persen		21,25		21,25		42,5		50,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun	100 Persen	176.135.880,00	100 Persen	181.080.885,00	30,77	40.801.592,00	15,38	40.047.300,00	46,15	80.848.892,00	46,15	44,65	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	76.997.600,00	3 dokumen	81.942.605,00	1	26.415.356,00	1	12.037.500,00	2	38.452.856,00	66,67	46,93	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00	1	-	0	2.700.000,00	1	2.700.000,00	50	27,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	2 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	10.000.000,00	1	-	0	986.000,00	1	986.000,00	50	9,86	

		Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD													
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	7.172.440,00	1 Laporan	7.172.440,00	0	-	0	1.309.000,00	0	1.309.000,00	0	18,25	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	71.965.840,00	5 Laporan	71.965.840,00	1	14.386.236,00	1	23.014.800,00	2	37.401.036,00	40	51,97	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang terlaksana	100 Persen	7.192.489.327,00	100 Persen	7.209.099.171,00	25	1.468.439.026,00	25	2.168.472.622,00	50	3.636.911.648,00	50	50,45	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	39 Orang/Bulan	6.442.489.327,00	40 Orang/Bulan	6.474.099.171,00	10	1.341.590.385,00	10	1.990.827.853,00	20	3.332.418.238,00	50,00	51,47	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	750.000.000,00	12 Dokumen	735.000.000,00	3	126.848.641,00	3	177.644.769,00	6	304.493.410,00	50	41,43	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	Persen	661.870.800,00	100	Persen	604.410.653,00	20	143.233.710,00	30	95.068.911,00	50	238.302.621,00	50	39,43	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	jenis	4.020.500,00	11	jenis	4.020.500,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	jenis	180.000.000,00	15	jenis	154.073.853,00	2	25.020.000,00	2	2.653.100,00	4	27.673.100,00	26,67	17,96	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35	jenis	155.000.000,00	35	jenis	155.000.000,00	4	17.094.500,00	10	40.036.685,00	14	57.131.185,00	40,00	36,86	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	buku	18.256.700,00	60	buku	18.256.700,00	15	5.000.000,00	10	892.000,00	25	5.892.000,00	41,67	32,27	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	531	eksemplar	4.593.600,00	531	eksemplar	4.593.600,00	120	990.000,00	120	990.000,00	240	1.980.000,00	45,20	43,10	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	kali	300.000.000,00	40	kali	268.466.000,00	15	95.129.210,00	7	50.497.126,00	22	145.626.336,00	55,00	54,24	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang administrasi perkantoran yang terlayani	100 Persen	109.368.742,00	100 Persen	61.450.000,00	25	6.620.155,00	25	2.581.760,00	50	9.201.915,00	50,00	14,97	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	145 lembar	1.450.000,00	12 Laporan	1.450.000,00	3	1.441.000,00	3	-	6	1.441.000,00	50	99,38	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	107.918.742,00	12 Laporan	60.000.000,00	3	5.179.155,00	3	2.581.760,00	6	7.760.915,00	50	12,93	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	100 Persen	165.915.000,00	100 Persen	115.915.000,00	0	3.240.000,00	32,35	32.484.300,00	32,35	35.724.300,00	32,35	30,82	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	6 unit	154.200.000,00	6 unit	104.200.000,00	0	3.240.000,00	2	32.169.300,00	2	35.409.300,00	33,3333	33,98	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	25 unit	11.715.000,00	28 unit	11.715.000,00	0	-	1	315.000,00	1	315.000,00	3,57143	2,69	

2.2. Faktor Pendorong Dan Penghambat dalam Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Kerjasama yang baik dalam melaksanakan pekerjaan, secara internal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta antar organisasi perangkat daerah
2. Dukungan dan partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan dan fisik kegiatan
3. Tenaga teknis yang cukup memadai dibantu konsultan perencana dan pengawas dalam pengendalian teknis dan perencanaan
4. Pagu dana tersedsia yang cukup memadai untuk mencapai indicator dan sasaran yang ingin dicapai
5. Adanya sumber anggaran lain seperti bantuan provinsi, CSR, BSPS Provinsi dan lain-lain, sehingga membantu meningkatkan tujuan dan indikator yang dicapai

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

a. Pembangunan sarana transportasi jalan yang meningkat seiring dengan bertambahnya beban, jumlah kendaraan serta populasi, sehingga jalan lingkungan, drainase yang harus diperbaiki juga bertambah.
b. Kasus penyelesaian sengketa tanah, mediasi, memerlukan waktu yang lama, pendekatan personal serta rapat koordinasi yang ulet.
c. Waktu yang dibutuhkan untuk tahapan pembuatan KAK, lelang, perencanaan teknis, sehingga rata-rata pekerjaan fisik baru dapat dilaksanakan diakhir triwulan II atau awal triwulan III.

Adapun tindakan yang akan diambil untuk meminimalisir hambatan yang terjadi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser ini diantara:

a. Mengusahakan anggaran yang cukup untuk pembangunan jalan lingkungan dan drainase, baik melalui dana APBD, APBDP, Bantuan Keuangan, sehingga kebutuhan akan infrastruktur perumahan dan pemukiman cukup memadai.
b. Rapat koordinasi dan kerjasama yang intens antar dinas teknis untuk menyelesaikan masalah/konflik pertanahan.
c. KAK pekerjaan dibuat segera diawal tahun perencanaan sehingga proses lelang dan pengerjaan fisik secara bertahap dapat dilanjutkan segera setelah proses perencanaan selesai.

2.3. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tabel II.1, maka dapat diuraikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Keberhasilan kinerja SKPD dari persentase pencapaian rasio pelayanan yang dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan.

Sesuai Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser dan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Tahun 2021 – 2026. Gambaran pelayanan SKPD secara jelas dapat dilihat dari tugas dan fungsi pokok yang dibebankan pada satu SKPD. Pelayanan umum di bidang Perumahan meliputi pembangunan rumah layak huni, rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah korban bencana, gorong-gorong, drainase, untuk bidang kawasan permukiman meliputi penyiapan prasarana sarana dasar permukiman sedangkan untuk bidang pertanahan meliputi pengadaan tanah untuk sarana prasarana pemerintah dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Lebih detailnya mengenai gambaran pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan, dapat dilihat dari tabel II.2. program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024 dan tabel II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tabel II.2. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jomlah Dokumen perencanaan penyediaan PSU yang disusun.
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
7	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Daftar Masyarakat penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

8	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dasn pengukuhan Masyarakat hukum adat dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Kota	Jumlah Perkada tentang pengukuhan Masyarakat hukum adat dalam 1(satu) Daerah Kabupaten Kota
9	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah Hamparanya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1(satu) Kabupaten Kota
			Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya

Renstra 2021-2026 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser memiliki 3 (tiga) tujuan utama dan 4 (empat) sasaran dan indikator sasaran yakni :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Insfrastruktur permukiman yang berkualitas dan perumahan yang layak huni, dan sasaran ada 2 (dua), yakni
   a. Meningkatnya masyarakat yang memiliki hunian yang layak, indikator sasaran : Rasio Rumah Layak Huni Per KK
   b. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman, indikator sasaran : Persentase permukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik
2. Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan dengan sasaran meningkatnya pelayanan dalam penyelenggaraan tata kelola pertanahan dan indikator sasaran adalah Persentase Penyelesaian Kasus Pertanahan.
3. Tujuan 3 : Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi dengan sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel dan indicator sasaran Predikat Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP.

2.4. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen terkait (RPJP Kabupaten, RPJM Kabupaten, dan RTRW Kabupaten Paser), dan hasil dari rangkaian FGD (Focus Group Discussion) baik internal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser maupun dengan

SKPD terkait, maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan.

Identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas Kawasan Permukiman
2. Rendahnya Kualitas Jalan Lingkungan Dan Drainase
3. Masih Adanya Kawasan Kumuh Perkotaan
4. Belum meratanya kualitas perumahan yang layak
5. Tingginya jumlah rumah tidak layak huni
6. Tingginya jumlah baclog perumahan
7. Banyaknya rumah korban bencana yang belum tertangani

Tabel II.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Rasio Rumah Layak Huni Per KK		Rasio Rumah Layak Huni Per KK	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82	**0,91**	**0,92**	0,79	0,80	0,81	
		Jumlah Rumah Korban Bencana yang ditangani		16	16	16	16	16	**15**	**26**	16	16	16	
2	Cakupan Kawasan Permukiman yang Memiliki Infrastru		Persentase permukiman yang memiliki infrastru	58,92%	61,87%	64,96%	68,21%	71,62%	65,14%	65,14%	61,87%	64,96%	68,21%	

	ktur dalam Kondisi Baik		ktur dalam kondisi baik											
3	Presentase Penyelesaian Kasus Pertanahan		Presentase Penyelesaian Kasus Pertanahan	41,46%	56,10%	68,29%	85,37%	71,62%	50%	**60%**	56,10%	68,29%	85,37%	
4	Predikat Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP		Predikat Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	B	BB	A	A	A	BB	**BB**	BB	A	A	

2.5. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

Adapun identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan digambarakan sesuai program pada tabel II.4. sebagai berikut:

Tabel II.4. Identifikasi permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser

No	Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Pengembangan Perumahan, dan Program Kawasan Permukiman	Usulan rehabilitasi rumah tidak layak huni warga kurang mampu yang terus bertambah setiap tahunnya	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan Rehabilitasi RTLH ini belum maksimal	Masih banyak pos pos anggaran lain diluar APBD untuk membantu rumah tidak layak huni masyarakat kurang mampu

2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kondisi jalan lingkungan belum seluruhnya dalam kondisi baik.	Penggunaan sarana transportasi jalan yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan.	Partisipasi masyarakat desa dalam pemeliharaan jalan
		Belum optimalnya sosialisasi pemeliharaan jaringan drainase.	Trend kegiatan pembangunan di Kabupaten *Paser* yang cenderung meningkatkan *runoff*.	Partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase.
		Opini masyarakat bahwa drainase tanggung jawab pemerintah.	Kesadaran masyarakat terhadap fungsi drainase masih kurang.	Kemampuan tanah di Wilayah Paser untuk menyerap air cukup tinggi.
		Pemanfaatan saluran drainase untuk pembuangan limbah rumah tangga.	Penutupan drainase dengan tidak mengindahkan kaidah teknis sehingga mengakibatkan terganggunya saluran drainase.	Banyak sungai yang melintas di Wilayah Paser.
3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program	Masih banyak penyelesaian pertahanan yang belum terselesaikan	Penyelesaian kasus sengketa pertanahan memerlukan waktu yang sangat lama	Adanya integrasi program dan kegiatan antar OPD terkait dan kerjasama dengan tim penilai (apraisal).

	Pengelolaan Izin Membuka Tanah			

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kabupaten Paser merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat dusun. Hasil dari musrenbang desa akan diusulkan di tingkat Kecamatan, dan Forum RKPD sehingga disepakati Program dan Kegiatan prioritas yang akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi yang sesuai dengan usulan dari masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel II.5. Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	**Program Pengembangan Perumahan**		**Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani**		
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		**Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Tertangani**		
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		
	a Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Tersebar di Kab. Paser		142 unit	Teknokrat
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		
	a Pembangunan Rumah Layak Huni	Tersebar di Kab. Paser		12 unit	Teknokrat
II	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**		**Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni**		
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Rumah Tidak layak huni yang tertangani di Luar Kawasan Kumuh**		

			Perkotaan		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		
	a Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Tanah Grogot		50 Unit	Musrenbang
	b Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Pasir Belengkong		60 Unit	Musrenbang
	c Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Long Ikis		270 Unit	Musrenbang
	d Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Muara Komam		122 Unit	Musrenbang
	e Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Batu Engau		99 Unit	Musrenbang
	f Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Tanjung Aru		112 Unit	Musrenbang
	g Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Muara Samu		50 Unit	Musrenbang
	h Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Long Kali		252 Unit	Musrenbang
	i Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Kuaro		426 Unit	Musrenbang
III	**Program Kawasan Permukiman**		**Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani**		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		**Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani**		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		
	a Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Batu Engau		20 unit	Musrenbang
	b Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Kuaro		121 unit	Musrenbang
	c Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Long Kali		40 unit	Musrenbang
IV	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**		**Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**		
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		**Penyediaan PSU di Lingkungan Perumahan**		
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
	a Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kecamatan Muara Komam		4 Lokasi	Musrenbang
	b Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kecamatan Pasir Belengkong		7 Lokasi	Musrenbang
	c Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kecamatan Batu Engau		10 Lokasi	Musrenbang
	d Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kecamatan Kuaro		4 Lokasi	Musrenbang

	e	Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kecamatan Batu Sopang		2 Lokasi	Musrenbang
	f	Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kecamatan Long Ikis		21 Lokasi	Musrenbang
	g	Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kecamatan Tanjung Harapan		5 Lokasi	Musrenbang
	h	Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kecamatan Long Kali		20 Lokasi	Musrenbang
	i	Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kecamatan Tanah Grogot		17 Lokasi	Musrenbang

2.7. Review terhadap Rancangan RKPD

Review terhadap Rancangan RKPD ini dimaksudkan untuk membandingkan Rancangan RKPD dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran dari RENSTRA 2021-2026 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dan telah sesuai kebutuhan, namun dalam masa pelaksanaan pada Tahun 2024 terdapat pagu indikatif sehingga target kinerja yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 menyesuaikan dengan ketersediaan dana. Berikut review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dalam Tabel II.6.

Tabel II.6. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser

No	Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Program Pengembangan Perumahan**		**Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani**	**Persen**	**66,68**	**1.699.760.000,00**	**Program Pengembangan Perumahan**		**Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani**	**66,68**	**3.142.694.180,00**	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Kabupaten/Kota		**Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemeri**	**Dokumen**	**1**	**123.600.000,00**	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Kabupaten/Kota**		**Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemeri**	**1**	**416.716.980,00**	

			ntah						**ntah**		
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	123.600.000,00	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1	416.716.980,00	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		**Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Tertangani**	**Unit**	**25**	**1.516.160.000,00**	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Tertangani**	**28**	**2.665.977.200,00**	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit	16	731.690.400,00	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	16	834.462.400,00	
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	9	784.469.600,00	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	12	1.831.514.800,00	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		**Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Terkait Penyediaan, Pembanguna**	**Dokumen**	**1**	**60.000.000,00**	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**		**Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Terkait Penyediaan, Pembanguna**	**1**	**60.000.000,00**	

			n dan Pengembangan Perumahan						**n dan Pengembangan Perumahan**			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1	60.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	60.000.000,00	
2	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**		**Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni**	**Persen**	**92,17**	**4.849.000.000,00**	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**		**Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni**	**92,17**	**10.890.986.620,00**	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Rumah Tidak layak huni yang tertangani di Luar Kawasan Kumuh Perkotaan**	**Persen**	**49,93**	**4.849.000.000,00**	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Rumah Tidak layak huni yang tertangani di Luar Kawasan Kumuh Perkotaan**	**49,93**	**10.890.986.620,00**	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepulu	Unit	152	4.849.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepulu	152	10.890.986.620,00	

			h) Ha yang Diperbaiki						h) Ha yang Diperbaiki			
3	**Program Kawasan Permukiman**		**Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani**	**Persen**	**50**	**8.750.866.000,00**	**Program Kawasan Permukiman**		**Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani**	**50**	**8.750.866.000,00**	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		**Jumlah dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang disusun**	**Dokumen**	**1**	**483.426.000,00**	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		**Jumlah dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang disusun**	**1**	**483.426.000,00**	
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevi ew /Terlegalisasi	Dokumen	1	483.426.000,00	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevi ew /Terlegalisasi	1	483.426.000,00	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		**Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani**	**Hektar**	**112,26**	**8.267.440.000,00**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		**Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani**	**112,26**	**8.267.440.000,00**	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	72	2.310.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	72	2.310.000.000,00	

	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh		Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Hektar	33,7	5.957.440.000,00	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh		Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	33,7	5.957.440.000,00	
4	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**		**Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**	**Persen**	**58,58**	**228.973.288.612,00**	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**		**Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**	**58,58**	**228.973.288.612,00**	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		**Penyediaan PSU di Lingkungan Perumahan**	**meter**	**151.425**	**228.973.288.612,00**	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**		**Penyediaan PSU di Lingkungan Perumahan**	**151.425**	**228.973.288.612,00**	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1	100.000.000,00	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1	100.000.000,00	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	233	228.873.288.612,00	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	233	228.873.288.612,00	
5	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**		Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	Persen	71,43	**353.000.000,00**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**		Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	71,43	**573.973.000,00**	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Mediasi Sengketa Pertanahan yang tertangani	Kasus	3	353.000.000	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Mediasi Sengketa Pertanahan yang tertangani	3	573.973.000,00	

	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	60.000.000	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	101.393.000,00	
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	0	293.000.000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	472.580.000,00	
6	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	66,67	**53.008.235.000,00**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	66,67	**53.029.717.000,00**	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Penyelesaian Ganti Rugi Dan Santunan Tanah	Lokasi	2	53.008.235.000	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Lokasi Penyelesaian Ganti Rugi Dan Santunan Tanah	2	53.029.717.000,00	
	Penetapan Daftar Masyarakat penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Keputusan Bupati/ Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	1	50.000.000	Penetapan Daftar Masyarakat penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Keputusan Bupati/ Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1	71.482.000,00	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	52.958.235.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	52.958.235.000,00	
7	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**		Persentase proses penetapan tanah ulayat (2 lokasi)	Persen	80	**60.000.000,00**	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**		Persentase proses penetapan tanah ulayat (2 lokasi)	80	**316.244.000,00**	
	Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat (2 lokasi)	Dokumen	1	60.000.000,00	**Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat (2 lokasi)	1	316.244.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	60.000.000,00	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku		Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	316.244.000,00	
8	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**		Persentase penatagunaan tanah yang dilaksa	Persen	50	**170.000.000,00**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**		Persentase penatagunaan tanah yang dilaksa	50	**357.089.000,00**	

			nakan						nakan			
	Penggunaan Tanah Hamparanya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan zona nilai tanah	Lokasi	2	170.000.000,00	**Penggunaan Tanah Hamparanya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan zona nilai tanah	2	357.089.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	50.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	93.749.000,00	
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dokumen	2	120.000.000,00	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	2	263.340.000,00	
9	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Persen	74	**8.171.955.709**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	74	**7.405.180.056,00**	
			Persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	Persen	85				Persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	85		

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun**	**Persen**	100	**181.080.885**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun**	100	**196.080.885,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	81.942.605	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	81.942.605,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	10.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	10.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.172.440	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	7.172.440,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi	Dokumen	5	71.965.840	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi	5	86.965.840,00	

			Kinerja Perangkat Daerah						Kinerja Perangkat Daerah			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase pelayanan administrasi keuangan yang terlaksana**	**Persen**	100	**7.209.099.171**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pelayanan administrasi keuangan yang terlaksana**	100	**7.209.099.171,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	40	6.474.099.171	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40	6.474.099.171,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	735.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	735.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Persen**	100	**604.410.653**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	100	**881.731.053,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11	4.020.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	4.020.500,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	154.073.853	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	281.394.253,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedia	Paket	35	155.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedia	35	155.000.000,00	

			kan					kan			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengga ndaan yang Disedia kan	Pak et	60	18.256.7 00	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengga ndaan yang Disedia kan	60	18.256.70 0,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokume n Bahan Bacaan dan Peratur an Perund ang-Undang an yang Disedia kan	Dok um en	531	4.593.60 0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokume n Bahan Bacaan dan Peratur an Perund ang-Undang an yang Disedia kan	531	4.593.600 ,00	
	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyele nggaraa n Rapat Koordin asi dan Konsult asi SKPD	Lap ora n	40	268.466. 000	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyele nggaraa n Rapat Koordin asi dan Konsult asi SKPD	40	418.466.0 00,00	
	Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah		**Persen tase penunj ang admini strasi perkan toran yang terlaya ni**	**Per sen**	100	**61.450.0 00**	**Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah**		**Persen tase penunj ang admini strasi perkan toran yang terlaya ni**	100	**46.450.00 0**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Surat Menyur at	Lap ora n	12	1.450.00 0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Surat Menyur at	12	1.450.000	
	Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedia kan	Lap ora n	12	60.000.0 00	Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedia kan	12	45.000.00 0	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara**	**Persen**	100	**115.915.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara**	100	**155.915.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	104.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	144.200.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	28	11.715.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28	11.715.000	
						306.036.105.321,00					**313.440.038.468,00**	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020 - 2024 adalah **"Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung

penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR, dan sasaran ketiga yakni Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:

- Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
- Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan misi utama dalam RPJMD Kabupaten Paser adalah "**Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau".** Misi ini juga sejalan dengan misi ketiga Provinsi Kalimantan Timur yakni "**Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan".**

Visi Provinsi Kalimantan Timur "***Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat"*** dan Misi;

- Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
- Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.
- Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
- Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.
- Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah darah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama lima tahun.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) sasaran sebagaimana tabel III.1 berikut ini.

Tabel III.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja tujuan dan sasaran	Target Kinerja Trujuan/Sasaran Tahun 2024
1	2	3	4
Meningkatkan Insfrastruktur permukiman yang berkualitas dan perumahan yang layak huni		Rasio permukiman layak huni	0,53
	Meningkatnya masyarakat yang memiliki hunian yang layak	Rasio Rumah Layak Huni Per KK	0,8
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase permukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik	64,96
Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan		Persentase Luasan Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	37
	Meningkatnya pelayanan dalam penyelenggaraan tata kelola pertanahan	Persentase Penyelesaian Kasus Pertanahan	68,29
Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi		Indeks Reformasi Birokrasi Unit	70
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Predikat Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	A

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PASER

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) beserta target indikator sasaran pada tahun 2024 beserta prognosis tahun berikutnya yang disertai capaian target kinerja beserta kerangka pendanaannya dapat dilihat pada tabel IV.1. berikut ini:

Tabel IV.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran program (outcome) dan kegiatan (output)	satuan	Sebelum Perubahan Tahun 2024		Sesudah Perubahan Tahun 2024		Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		Unit kerja PD Penanggung jawab
				Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04.02	**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani**	**Persen**	**66,88**	**1.699.760.000,00**	**66,68**	**1.699.760.000,00**		**66,68**	**1.550.174.461,00**	**DPKP2**
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Kabupaten/Kota**	**Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah**	**Dokumen**	**3**	**123.600.000,00**	**1**	**123.600.000,00**		**4**	**157.601.353,40**	**DPKP2**
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	300.000.000,00	1	345.832.000,00		0	-	
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	123.600.000,00	1	123.600.000,00		4	157.601.353,40	
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program**	**Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Tertangani**	**Unit**	**28**	**1.516.160.000,00**	**25**	**1.516.160.000,00**		**28**	**1.286.688.000,60**	**DPKP2**

	Kabupaten/Kota										
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Tertangani	Unit Rumah	16	731.690.400,00	16	731.690.400,00		16	590.174.919,40	
1.04.02.2.03.01	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah yang direhabilitasi Akibat Bencana	Unit Rumah	12	784.469.600,00	9	784.469.600,00		12	696.513.081,20	
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Terkait Penyediaan, Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Dokumen**	**3**	**60.000.000,00**	**1**	**60.000.000,00**		**1**	**105.885.107,00**	**DPKP2**
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		1	105.885.107,00	
1.04.04	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**	**Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**	**Persen**	**92,17**	**4.399.000.000,00**	**92,17**	**4.849.000.000,00**		**91,2**	**12.791.995.092,00**	**DPKP2**
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Tidak layak huni yang tertangani di Luar Kawasan Kumuh Perkotaan**	**Persen**	**49,93**	**4.399.000.000,00**	**49,93**	**4.849.000.000,00**		**49,93**	**12.791.995.092,00**	**DPKP2**
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukim	Unit	137	4.399.000.000,00	152	4.849.000.000,00		700	12.791.995.092,00	

	10 (sepuluh) Ha	an Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki									
1.04.03	**Program Kawasan Permukiman**	**Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani**	**Persen**	**50**	**8.750.866.000,00**	**50**	**8.750.866.000,00**		**50**	**9.356.089.467,00**	**DPKP2**
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokuman Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang disusun	Dokumen	4	483.426.000,00	1	483.426.000,00		2	253.840.305,00	**DPKP2**
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview /Terlegalisasi	Dokumen	2	483.426.000,00	1	483.426.000,00		1	253.840.305,00	
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani**	**Hektar**	**112,26**	**8.267.440.000,00**	**112,26**	**8.267.440.000,00**		**33,68**	**9.102.249.162,00**	**DPKP2**
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	5	2.310.000.000,00	72	2.310.000.000,00		200	3.356.667.263,80	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Hektar	112,26	5.957.440.000,00	33,7	5.957.440.000,00		44,9	5.745.581.898,20	
1.04.05	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**	**Persen**	**58,58**	**109.106.548.612,00**	**58,58**	**228.973.288.612,00**		**58,58**	**166.055.042.519,00**	**DPKP2**
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan PSU di Lingkungan Perumahan	meter	545.694	109.106.548.612,00	151.425	228.973.288.612,00		90.123	166.055.042.519,00	**DPKP2**

1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		0	-	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	136	109.006.548.612,00	233	228.873.288.612,00		300	166.055.042.519,00	
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan**	**Persen**	**71,43**	**353.000.000,00**	**71,43**	**353.000.000,00**		**71,43**	**413.044.212,00**	**DPKP2**
2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Mediasi Sengketa Pertanahan yang tertangani	Kasus	11	353.000.000	3	353.000.000		3	413.044.212	**DPKP2**
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	60.000.000,00	1	60.000.000		1	116.436.212	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	3	293.000.000,00	3	293.000.000		3	296.608.000	
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum**	**Persen**	**66,67**	**53.008.235.000,00**	**66,67**	**53.008.235.000,00**		**66,67**	**7.095.532.778,00**	**DPKP2**

2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Lokasi Penyelesaian Ganti Rugi Dan Santunan Tanah	Lokasi	2	53.008.235.000	2	53.008.235.000		3	7.095.532.778	**DPKP 2**
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	1	50.000.000,00	1	50.000.000		1	96.680.000	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Dokumen	2	52.958.235.000,00	2	52.958.235.000		3	6.998.852.778	
2.10.07	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**Persentase proses penetapan tanah ulayat (2 lokasi)**	**Persen**	**80**	**60.000.000,00**	**80**	**60.000.000,00**		**0**	**-**	**DPKP 2**
2.10.07.2.01	**Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat (2 lokasi)	Lokasi	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		0	-	**DPKP 2**
2.10.07.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Dokumen	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		0	-	

2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase penatagunaan tanah yang dilaksanakan**	**Persen**	**50**	**170.000.000,00**	**50**	**170.000.000,00**		**50**	**182.004.230,00**	**DPKP2**
2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah Hamparanya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan zona nilai tanah	Lokasi	2	170.000.000,00	2	170.000.000,00		2	182.004.230,00	**DPKP2**
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		1	90.000.000,00	
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dokumen	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00		2	92.004.230,00	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**Persen**	**85**	**8.171.955.709**	**74**	**8.171.955.709**		**0**	**9.082.326.090**	**DPKP2**
		Persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	**Persen**	**74**		**85**			**85**		
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun**	**Persen**	100	181.080.885	100	181.080.885		100	163.492.390	**DPKP2**
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	81.942.605,00	3	81.942.605		3	62.636.866	

1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	10.000.000,00	2	10.000.000		2	10.000.000	
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	10.000.000,00	2	10.000.000		2	11.000.000	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.172.440,00	1	7.172.440		1	7.889.684	
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	71.965.840,00	5	71.965.840		5	71.965.840	
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan yang terlaksana**	**Persen**	100	7.209.099.171	100	7.209.099.171		100	7.964.124.900	**DPKP2**
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	40	6.474.099.171,00	40	6.474.099.171		40	7.170.124.900	
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	735.000.000,00	12	735.000.000		12	794.000.000	

1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Persen**	100	604.410.653	100	604.410.653		100	673.556.810	**DPKP2**
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11	4.020.500,00	11	4.020.500		11	4.221.525	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	154.073.853,00	15	154.073.853		15	200.000.000	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	35	155.000.000,00	35	155.000.000		35	162.750.000	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	18.256.700,00	60	18.256.700		60	19.169.535	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	531	4.593.600,00	531	4.593.600		550	4.915.750	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	268.466.000,00	40	268.466.000		45	282.500.000	
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penunjang administrasi perkantoran yang terlayani**	**Persen**	100	61.450.000	100	61.450.000		100	159.441.240	**DPKP2**

1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.450.000,00	12	1.450.000		12	1.522.500	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	60.000.000,00	12	60.000.000		12	157.918.740	
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara**	**Persen**	100	115.915.000	100	115.915.000		100	121.710.750	**DPKP2**
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	104.200.000,00	6	104.200.000		6	109.410.000	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	28	11.715.000,00	28	11.715.000		31	12.300.750	
					185.719.365.321		**306.036.105.321**			**206.526.208.847**	

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Perubahan Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, penyusunan Perubahan Reja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas maupun di lingkup daerah.

1.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

1.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Untuk menjaga konsistensi dan efektifitas pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 akan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja maupun evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja dan hasilnya disampaikan kepada Bupati Paser melalui Beppeda.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan visi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tanggal 26 Agustus Tahun 2021, yaitu **"MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA".**

Tana Paser, 16 Agustus 2024

Kepala Dinas,

Hulaimi, S.Sos., M.Si

NIP. 19641228 198602 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Komplek Perkantoran Jl. Kusuma Bangsa KM.05 Gedung B Lantai 2 Kavling 1
Tana Paser Kode Pos 76211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
NOMOR : 800/ 61 /SEK-DPKP2/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENJA DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PASER TAHUN 2024
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah atas penggunaan anggaran setiap instansi pemerintah berkewajiban membentuk tim penyusun Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah.
b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menunjuk tim penyusun Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta perubahannya);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor. 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Bupati Paser Nomor : 990/KEP-08/2023, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / pengguna barang / kuasa pengguna barang, kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran bendahara, kuasa pengguna anggaran PPKD / kuasa pengguna barang PPKD, bendahara pengeluaran pembantu PPKD dan penetapan rekening PPKD, perangkat daerah pada PPKD dan Bank pembangunan daerah Kalimantan timur Kalimantan utara cabang tanah paser tahun anggaran 2024

Memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor : 9 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024, tanggal 27 Desember 2023;

2. Peraturan Bupati Paser Nomor: 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 Desember 2023;

Memutuskan :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Renja Dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dengan komposisi dan personalia:

Ketua	: Mahyudi Sandy, S.ST
Sekretaris	: Emilda Savitri, ST, M.Si
Anggota	: 1. Moentamimah, SE
	2. Melinda Lestari, ST
	3. Dhea Monika Khair, S.Ikom
	4. Muhamad Toha, SP

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA keputusan ini bertugas:

1. Menyusun Renja, Rancangan Awal Renja dan Rancangan Akhir Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2025.
2. Mengevaluasi RENJA pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2024.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawabnya harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 08 Januari 2024 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 08 Januari 2024

KEPALA DINAS,

Hulaimi, S.Sos, M.Si
NIP.19641228 198602 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Paser (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tana Paser
3. Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser
4. Arsip.

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASER

PERUBAHAN RENJA
TAHUN 2024



dis.tph.paser20@gmai.com
https://dtph.paserkab.go.id/

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan RENJA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser tahun 2024.

Perubahan RENJA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2024 pada hakikatnya merupakan rancangan agenda kerja tahunan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi OPD sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Paser nomor 17 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser. Penyusunan Perubahan RENJA OPD tahun 2024 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan mengacu pada renja tahun sebelumnya dan Renstra OPD tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Perubahan RENJA 2024 ini tidak terlepas dari peran serta seluruh Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser. Namun demikian, hasil penyusunan buku ini tentu saja masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dari semua pihak demi penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan.

Akhirnya, semoga Perubahan RENJA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda kerja tahunan pembangunan Pertanian di Kabupaten Paser.

DAFTAR ISI

BAB/Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

I. **PENDAHULUAN** ..... I – 1
1.1 LATAR BELAKANG ..... I – 1
1.2 LANDASAN HUKUM ..... I – 3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN …… I – 5
1.3.1 Maksud ..... I – 5
1.3.2 Tujuan …… I – 5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN …….. I – 6

II. **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .....** II – 9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024…..... II – 9
2.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER …… II – 18
2.3 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT DAN SOLUSI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN HASIL RENJA PD TAHUN 2024 ……. II – 20

III. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA** ..... III – 22
3.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... III – 22
3.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024..... III – 26
3.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT……..…….. III – 34
3.4 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2024……..…….. III – 35

IV. PENUTUP ..... V - 46

DAFTAR TABEL

Tubuh Utama

Nomor		BAB/Halaman
T-II.1	Evaluasi Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024 Triwulan II.....	II – 10
T-II.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2024	II – 19
T-3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	II – 22
T-3.2	Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024	II – 26
T-3.3	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024.....	III – 38

DAFTAR LAMPIRAN

Tubuh Utama

Nomor **Halaman**

1. SK Tim Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Paser pada tahun 2024 akan melakukan perubahan RKPD, Seiring dengan hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura juga perlu melakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan paket kegiatan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, Musrenbang, Teknokratik, maupun Pokok pokiran Dewan
b. Adanya beberapa kesalahan Kode rekening belanja, Kesalahan Nomenklatur Paket Belanja, yang menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dilaksanakan untuk mengakomodir kegiatan/keperluan mendesak yang perlu dimasukkan dalam perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024; Sinkronisasi prioritas belanja antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah

Tahun Anggaran 2024; dan mengakomodir pergeseran belanja dalam izin mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan pelaksanaan (realisasi) hasil kegiatan selama periode Triwulan I, triwulan II tahun 2024 baik itu kegiatan Musrenbang, Teknokratik, dan Prioritas Daerah yang telah dilaksanakan selama tahun 2024, baik itu kelebihan maupun kekurangan kekurangan yang didapatkan selama Triwulan 1, Triwulan II tahun berjalan hingga akhir Tahun Angaran 2024.

Adanya beberapa kekurangan kekurangan yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas menyebabkan perlu dilaksanakannya Perubahan Rencana Kerja yang akan dituangkan ke dalam Dokumen Perubahan Renja.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perubahan Renja Perangkat Daerah, disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA) Perangkat Daerah dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Kabupaten/Kota serta sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun berjalan yang menitikberatkan kepada pemenuhan kebutuhan anggaran yang masih belum terakomodir serta masalah-masalah yang terjadi selama tahun anggaran berjalan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Renja ini dimaksudkan untuk mengakomodir kegiatan dinas yang belum bisa terlaksana dengan baik yang diakibatkan oleh adanya beberapa masalah seperti, Anggaran yang belum mencukupi, kode rekening belanja yang salah, nomenklatur paket pekerjaan yang kurang tepat dan lain lain.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024 dengan target dan sasaran

pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024

3. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4. Terlaksananya Program dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja OPD, proses penyusunan Rancangan Perubahan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, serta tidak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Perubahan Renja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rancangan Perubahan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Perubahan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Pada Bab ini memuat hasil evaluasi Renja OPD Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja OPD Kabupaten Paser, maka OPD Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Menyusun Tabel Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, kemudian diberi penjelasan terkait pencapaian tersebut, misal:

2.3. Faktor Pendorong Dan Pengahambat dan Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Berdasarkan table tujuan dan sasaran diberikan penjelasan apakah target mengalami perubahan atau tidak.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Paser sesuai yang diampu oleh Perangkat Daerah.

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjelasan terkait ada atau tidaknya usulan masyarakat (musrenbang dan pokir) yang terdapat pada Perubahan RKPD.

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikat murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indicator serta pagu indikatif setelah Rancangan Perubahan RKPD telah dibagikan.

BAB IV PENUTUP

Penjelasan terkait Kaidah-kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut. Dilengkapi dengan tandatangan Kepala Perangkat Daerah dan stempel Dinas.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi renja sampai dengan triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk menyesuaian / perubahan rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja perangkat daerah pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser sampai dengan triwulan II tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut :

Tabel. T-II.I.

Evalusi Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024
Triwulan II

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Sampai Dengan Triwulan II / Semester I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2024	
						II			
1	2	3	4	5		6		12 = (8+9+10+11)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Indeks kepuasan pelayanan sekretarist**	**72**	**19.938.087.779,00**	**-**	**5.195.882.105**	**-**	**5.135.876.744,00**
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah dengan baik**	**100**	**234.775.000,00**	**25,00**	**59.016.900**	**25,00**	**59.016.900**
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	203.840.000,00	3,00	52.434.500	1,00	52.434.500

2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	935.000,00			-	-
3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat	4	30.000.000,00	1,00	6.582.400,00	1,00	6.582.400,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**presentasi PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu**	**100**	**19.071.088.779,00**	**25,00**	**5.006.472.282,00**	**25,00**	**5.006.472.282,00**
4		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gajidan tunjangan ASN	1296	18.991.088.779,00	460	4.982.874.834,00	460	4.982.874.834,00
5		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	200	80.000.000,00	32,00	23.597.448,00	32,00	23.597.448,00
								-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1. persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran**	**100**	**458.607.300**	**25,00**	**58.182.900**	**25,00**	**58.182.900**
6		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	1.000.000,00	5	940.800	-	940.800

7		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	225.519.300		0	-	-
8		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	65.000.000,00	1,00	21.435.800	1,00	21.435.800
9		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	15.000.000,00	1	6.891.600	1	6.891.600
10		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	252	2.088.000,00	63,00	600.000,00	63,00	600.000,00
11		Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	52	150.000.000,00	10,00	27.639.700	10,00	27.639.700
		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	**100**	**235.636.000,00**	**25,00**	**55.497.623**	-	**55.497.623**
12		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	2.000.000,00	-		-	-
13		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	50.000.000,00	3,00	8.317.623	-	8.317.623
14		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan kantor yang disediakan	12	183.636.000,00	3,00	47.180.000	-	47.180.000

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatue**	**100**	**77.746.500**	**25,00**	**16.712.400**	**25,00**	**16.712.400**
16		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dirbayarkan pajak perijinannya	4	74.246.500	1,00	16.712.400	1,00	16.712.400
17		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4	2.500.000,00	-		-	-
18		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2	1.000.000,00	-		-	-
	Peningkatan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hotikultura	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura yang di Manfaatkan**	**100**	**38.591.655.940,00**	**25,00**	**145.476.720,00**	**25,00**	**145.476.720,00**
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentasi pengawasan penggunaan sarana pertanian	**100**	**39.456.997.840**	**25,00**	**262.509.720**	**25,00**	**262.509.720**
19		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	60	38.112.798.300	10	219.909.720	10	219.909.720

20		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	10	1.344.199.540,00	2,00	42.600.000	2,00	42.600.000
	Peningkatan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hotikultura	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Prasarana Pertanian Yang di Manfaatkan**	**100**	103.635.248.588	**25,00**	**58.560.000,00**	**25,00**	**58.560.000,00**
		Pengembangan Prasarana Pertanian	**Persentasi pengembangan prasarana pertanian**	**100**	**282.200.000,00**	**25,00**	**4.600.000,00**	**25,00**	**4.600.000,00**
21		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan / LPC2B yang dikelola	2	9.600.000	1,00	4.600.000,00	1,00	4.600.000,00
22		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B	1	240.000.000,00	-		-	-
23		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi prasarana pertanian lainnya	1	5.000.000,00			-	-

		Pembangunan Prasarana Pertanian	**Tersedianya Prasarana Pendukung Pertanian**	**88**	**85.280.460.288,00**	**0**	**153.843.000**	**0**	**153.843.000**
24		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1	272.200.000,00	0,25	24.000.000	0,25	24.000.000
25		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	4	805.000.000,00	-		-	
26		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	41	100.699.760.588	1,00	117.843.000	1,00	117.843.000
27		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1	5.000.000,00	-		-	
29		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2	138.600.000,00	0,50	9.600.000,00	0,50	9.600.000,00
31		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	4	1.460.088.000,00				
	Peningkatan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hotikultura	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)**	**10**	**2.019.500.000,00**	**2,50**	**23.200.000,00**	**-**	**23.200.000,00**

		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100	2.019.500.000,00	25,00	32.400.000	25,00	32.400.000
32		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	10	723.000.000,00	2,00	32.400.000	2,00	32.400.000
33		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Gortikultura dan Perkebunan	5	275.000.000,00			-	-
35		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	10	1.021.500.000,00	-		-	-
	Peningkatan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hotikultura	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Pertumbuhan Produksi kelompok yang disuluh**	**62**	**2.798.260.689**	**10,00**	**271.012.998**	**10,00**	**271.012.998**
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**terlaksananya penyuluhan pertanian**	**100**	**2.798.260.689**	**25,00**	**271.012.998**	**25,00**	**271.012.998**

39		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	2	241.800.000,00	0,50	84.106.400	0,50	84.106.400
40		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	5	789.174.000,00	1,00	91.581.300	1,00	91.581.300
41		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	6	1.761.786.689,00	1,00	95.325.298	1,00	95.325.298
43		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		1	1.000.000,00				
44		Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani		1	1.000.000,00				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM					**167.958.570.646**		**5.925.247.823**		**5.925.247.823**

Berdasarkan tabel evaluasi renja di atas, realisasi RKPD tahun 2024 hingga Triwulan II dapat di jelaskan bahwa :

Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 6,64%, dengan realisasi keuangan sbesar Rp. 11.164.282.891 (Sebelas Milya Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) dari total pagu Rp. 167.958.570.646 (Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)

Sampai dengan bulan Triwulan II realisasi baik keuangan maupun fisik kegiatan masih rendah, hanya beberapa kegiatan operasional kantor seperti Gaji ASN, Gaji PTT, Pembayaran Listrik, Air yang terealisasi setiap bulan, untuk kegiatan fisik masih dilakukan proses CPCL pada kelompok tani penerima bantuan seperti JUT, Rehab Irigasi, Pintu Air, Embung, Bankeu Penyuluhan sehingga untuk realisasi keuangan dan fisik masih rendah, total realisasi fisik sampai dengan bulan Juni adalah 7,06%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Keberhasilan kinerja OPD dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. T-II.2.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2024
Kabupaten Paser

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Penigkatan Produksi Padi												
	- Produksi Padi (Ton)	-	-	52.428,00	52.849,00	53.189,20	53483,5	53.820	48.202,66	26.369,02	52.849,00	53.820	
2.	Peningkatan Produksi Palawija Produksi (Ton)	-	-	11.264,52	11.593,41	11.872,5	12.060,032	12.442,70	9.009,73	4.146,68	12.060,32	12.442,70	
3.	Peningkatan Produksi Hortikultura												
	- Produksi (Ton)	-	-	13.044,82	13.194,31	13.414,42	13.634,48	13.871,85	38.085,84	60.465,06	13.634,48	13.871,85	

*** Data Sementara (Prognosa)**

Dari table di atas dapat dikatakan bahwa realisasi capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan hrotikultura mengalami penurunan dibeberapa indicator yaitu Produksi padi yang realisasi tahun 2022 sebesar 48.202,66 Ton menjadi 26.369,02 Ton pada tahun 2023 dan produksi palawija dengan realisasi tahun 2022 sebesar 9.009,73 ton menjadi 4.146,68 Ton pada tahun 2023.

Penurunan ini disebabkan karena adanya beberapa sebab yaitu adanya serangan hama yang menyerang tanaman palawija terutama tanaman jagung, sehingga banyak tanaman jagung menjadi mati, selain itu juga adanya banjir pada awal tahun 2023 yang menyebabkan tergenangnya padi sawah dalam waktu lama sehingga banyak tanaman padi sawah menjadi Puso/rusak, banjir yang terbesar berada di Kecamatan Long Kali dan Kecamatan Pasir Belengkong yang memang merupakan sentra padi sawah, selain itu juga perubahan Iklim yaitu El Nino yang mengalami kekeringan pada pertengahan tahun sehingga petani menggeser waktu tanam nya ke bulan Oktober 2023.

Sedangkan peningkatan kinerja terdapat pada Produksi Hortikultura yaitu 38.085,84 ton pada tahun 2022 menjadi 60.465,06 ton pada tahun 2023, hal ini disebabkan karena adanya bantuan tanaman buah tahunan hingga tahun 2015 yang sudah mulai berbuah optimal pada tahun 2023 dan juga banyaknya bantuan tanaman sayuran untuk kelompok tani sehingga bias meningkatkan produksi hortikultura

2.3 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT SERTA SOLUSI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN HASIL RENJA PD TAHUN 2024

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian rencana strategis sampai dengan Triwulan II tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih dibawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan rencana kerja dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser periode Juni 2024 antara lain :

1. Meningkatkan dukungan infrastruktur pertanian dengan mendorong pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) untuk kelancaran distribusi pada Kawasan pertanian
2. Proses pengadaan Barang dan jasa melalui e katalog sehingga di bantu oleh ULP

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya adalah:

1. Adanya pergantian pejabat administrator dan proses perencanaan baru di proses pada bulan April, pejabat pengadaan mendahului paket-paket yang dilelang dengan nilai yang lebih besar pada dinas-dinas lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan sehingga penyerapan anggaran masih kecil
2. Kurangnya Koordinasi antar instansi terkait, sehubungan dengan pengadaan alsintan yang berhubungan dengan Pagu Anggaran dan Spesifikasi Teknis alat (jenis alat) dan waktu waktu pelaksanaan yang harus menyesuaikan Musim tanam petani
3. Spesifikasi Paket Pengadaan Tidak Sesuai dengan Pagu Anggaran dan Realisasi di Lapangan
4. Terjadi Perubahan Spek pada konsultan Perencanaan sehingga proses pekerjaan fisik juga mengalami keterlambatan
5. adanya Paket Kegiatan yang sama dengan dinas lain menyebabkan tertundanya proses fisik paket kegiatan tersebut

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah :

1. Perlu adanya koordinasi antara instansi terkait sehubingan dengan Spek Paket Pengadaan yang sesuai dengan Anggaran
2. Perlu adanya Koordinas antara instansi terkait Paket Kegiatan yang sama
3. Perlu adanya penambahan personil untuk melakukan pedataan, pengawasan dan monitoring di Lapangan
4. Perlunya pemahaman mengenai proses panjang pengadaan melalui e-katalog

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Perubahan Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran (nama OPD) Kabupaten Paser tidak mengalami perubahan tetapi ada beberapa sub kegiatan yang mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam table berikut.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Tujuan: Mengoptimalkan ketersediaan produksi padi, palawija dan hortikultura secara lokal	Peningkatan Produksi Padi (Ton)	Jumlah produksi padi tahun n	53.483,50	53.483,50
	Peningkatan Produksi Palawija (Ton)	Jumlah produksi palawija tahun n	12.060,32	12.060,32
	Peningkatan Produksi Hortikultura	Jumlah produksi hortikultura tahun n	13.634,48	13.634,48
	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP eksternal	Laporan hasil pemeriksaan BPK dan Badan ekstemal	0	0
	Nilai evaluasi Sakip dan APIP	Hasil reviu tim penilai SAKIP (Ekstemal)	CC	B
	Indeks kepuasan layanan sekretariat	Jumlah Bobot x 100% Jumlah Unsur Pelayanan	72	0

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan pada Target Sasaran Teknis yaitu Peningkatan Produksi meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja, sedangkan untuk Indikator Tujuan dan Sasaran Kegiatan Penunjang Sekretariat mengalami perubahan yaitu menaikan target Nilai Hasil Evaluasi SAKIP dari CC ke B dan menghilangkan Indeks kepuasan secretariat pada tujuan Dinas dan memasukkan indikator tersebut pada indikator Program Serketariat.

B. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu “PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN BERBASIS PERTANIAN UNTUK MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke-1 yaitu “Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian” dan sasaran ke-3 yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah”

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan Rancangan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2.

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72	17.419.063.849	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72	19.938.087.779	Kegiatan Lanjutan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Terlaksananya Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah dengan baik	100%	234.775.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Terlaksananya Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah dengan baik	100%	274.775.000	Kegiatan Lanjutan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen	203.840.000	Penyusunan Dokumen Perenc anaan Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen	223.840.000	Kegiatan Lanjutan

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1 Laporan	935.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1 Laporan	935.000	Kegiatan Lanjutan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50.000.000	Kegiatan Lanjutan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Presentasi PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu (%)	100%	19.071.088.779	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Presentasi PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu (%)	100%	19.096.088.779	Kegiatan Lanjutan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Org/Bln	18.991.088.779	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Org/Bln	18.991.088.779	Kegiatan Lanjutan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	200 Dokumen	80.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikai Keuangan SKPD (Dokumen)	400 Dokumen	105.000.000	Kegiatan Lanjutan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100%	458.607.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100%	538.095.500	Kegiatan Lanjutan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5 Paket	1000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5 Paket	1000.000	Kegiatan Lanjutan

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10 Paket	225.519.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7 Paket	186.877.600	Kegiatan Lanjutan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3 Paket	65.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3 Paket	75.000.000	Kegiatan Lanjutan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3 Paket	15.000.000	Kegiatan Lanjutan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan (Dokumen)	348 Dokumen	2.088.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan (Dokumen)	348 Dokumen	2.088.000	Kegiatan Lanjutan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	250.000.000	Kegiatan Lanjutan
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Kabupaten Paser	Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	235.145.950	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Kabupaten Paser	Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	275.145.950	Kegiatan Lanjutan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	2.000.000	Kegiatan Lanjutan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	50.000.000	Kegiatan Lanjutan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	183.145.950	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	223.145.950	Kegiatan Lanjutan

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Paser	persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	77.746.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Paser	persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	88.596.500	Kegiatan Lanjutan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6 Unit	74.246.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6 Unit	74.246.500	Kegiatan Lanjutan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	13.350.000	Kegiatan Lanjutan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	1.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	1.000.000	Kegiatan Lanjutan
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kabupaten Paser	Persentase Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura yang di Manfaatkan	100%	38.237.198.300	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kabupaten Paser	Persentase Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura yang di Manfaatkan	100%	35.544.656.250	Kegiatan Lanjutan
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kabupaten Paser	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	38.237.198.300	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kabupaten Paser	Persentase pengawasan penggunaan sarana	100%	38.544.656.250	Kegiatan Lanjutan
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kabupaten Paser	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	45 Laporan	38.112.798.300	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kabupaten Paser	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	136 Laporan	38.420.256.250	Kegiatan Lanjutan
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kabupaten Paser	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	40 Laporan	124.400.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kabupaten Paser	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	40 Laporan	124.400.000	Kegiatan Lanjutan
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kabupaten Paser	Persentase Prasarana Pertanian Yang di Manfaatkan	100%	56.917.854.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kabupaten Paser	Persentase Prasarana Pertanian Yang di Manfaatkan	100%	98.975.554.000	Kegiatan Lanjutan

	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kabupaten Paser	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	254.600.000	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kabupaten Paser	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	404.600.000	Kegiatan Lanjutan
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kabupaten Paser	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dokumen)	1 Dokumen	9.600.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kabupaten Paser	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	9.600.000	Kegiatan Lanjutan
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Kabupaten Paser	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1 Dokumen	240.000.000	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Kabupaten Paser	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	2 Dokumen	390.000.000	Kegiatan Lanjutan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kabupaten Paser	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	5000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kabupaten Paser	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	5000.000	Kegiatan Lanjutan
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kabupaten Paser	Tersedianya Prasarana Pendukung Pertanian	78 Unit	103.380.648.588	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kabupaten Paser	Tersedianya Prasarana Pendukung Pertanian	46 Unit	103.380.648.588	Kegiatan Lanjutan
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kabupaten Paser	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang di bangun, di rehabilitasi dan di pelihara	2 Unit	272.200.000	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kabupaten Paser	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang di bangun, di rehabilitasi dan di pelihara	2 Unit	272.200.000	Kegiatan Lanjutan
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kabupaten Paser	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	2 Unit	805.000.000	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kabupaten Paser	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	2 Unit	805.000.000	Kegiatan Lanjutan

	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kabupaten Paser	Jalan Usaha Tani yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	51 Unit	100.699.760.588	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kabupaten Paser	Jalan Usaha Tani yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	51 Unit	100.699.760.588	Kegiatan Lanjutan
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kabupaten Paser	Jumlah DAM Parit yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	0 Unit	5000.000	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kabupaten Paser	Jumlah DAM Parit yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	1 Unit	237.000.000	Kegiatan Lanjutan
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kabupaten Paser	Jumlah Pintu Air yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	1 Unit	138.600.000	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kabupaten Paser	Jumlah Pintu Air yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	2 Unit	370.600.000	Kegiatan Lanjutan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah sarana pendukung lainnya yang di bangun	4 Unit	1.460.088.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah sarana pendukung lainnya yang di bangun	4 Unit	1.460.000.000	Kegiatan Lanjutan
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kabupaten Paser	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	100%	1.990.700.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kabupaten Paser	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	100%	1.990.700.000	Kegiatan Lanjutan
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%	1.990.700.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%	1.990.700.000	Kegiatan Lanjutan
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kabupaten Paser	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Di kendalikan	10 Ha	694.200.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kabupaten Paser	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	10 Ha	694.200.000	Kegiatan Lanjutan

	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kabupaten Paser	Terlaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5 Ha	275.000.000	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kabupaten Paser	Terlaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5 Ha	275.000.000	Kegiatan Lanjutan
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kabupaten Paser	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura , Perkebunan	10 Laporan	1.021.500.000	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kabupaten Paser	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura , Perkebunan	10 Laporan	1.021.500.000	Kegiatan Lanjutan
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kabupaten Paser	Pertumbuhan Produksi kelompok yang disuluh	62%	2.798.260.689	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kabupaten Paser	Pertumbuhan Produksi kelompok yang disuluh	62%	2.798.260.689	Kegiatan Lanjutan
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Paser	terlaksananya penyuluhan pertanian	100%	2.798.260.689	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Paser	terlaksananya penyuluhan pertanian	100%	4.292.593.099	Kegiatan Lanjutan
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Paser	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Yang di Tingkatkan Kapasitasnya	2 Unit	241.800.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Paser	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Yang di Tingkatkan Kapasitasnya	3 Unit	251.800.000	Kegiatan Lanjutan
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Paser	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang di tingkatkan kapasitasnya	10 Unit	789.174.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Paser	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang di tingkatkan kapasitasnya	11 Unit	799.174.000	Kegiatan Lanjutan

	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	6 Unit	1.761.786.689	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	6 Unit	3.236.119.099	Kegiatan Lanjutan
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk danBeroperasi	0 Unit	1000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk danBeroperasi	0 Unit	1000.000	Kegiatan Lanjutan
	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Kabupaten Paser	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	0 Unit	4500.000	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Kabupaten Paser	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	0 Unit	4500.000	Kegiatan Lanjutan
	UPT BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA										
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kabupaten Paser	Persentase Sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	100%	1.219.799.540	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kabupaten Paser	Persentase Sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	100%	1.219.799.540	Kegiatan Lanjutan
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kabupaten Paser	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	1.219.799.540	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kabupaten Paser	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	1.219.799.540	Kegiatan Lanjutan
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kabupaten Paser	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100%	1.219.799.540	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kabupaten Paser	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100%	1.219.799.540	Kegiatan Lanjutan

3.3 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. saran dan pendapat DPRD berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Beberapa usulan program/kegiatan yang masuk juga ada yang di usulkan pada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang nantinya di anggarkan dalam APBD Propinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Benkeu . Biasanya usulan program/kegiatan tersebut yang nantinya bisa terealisasi merupakan program prioritas propinsi atau program yang memang memberikan manfaat banyak kepada masyarakat, di antaranya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu instansi pemerintah daerah di Kabupaten Paser guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan bidang pertanian seperti yang ditargetkan dalam RPJMD dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Paser.

Usulan program/kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser di samping berdasarkan masukan dari Kecamatan, juga dari pengumpulan informasi dan pengamatan/penelitian di lapangan baik yang di lakukan sendiri maupun masukan dari Perguruan Tinggi dan pihak swasta yang ada di Kabupaten Paser.

Pada Perubahan Rancangan RKPD 2024 terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

3.4 Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Renja P D Tahun 2024

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagai berikut :

1. PROGRAM

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
3) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
4) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
5) Program Penyuluhan Pertanian;

2. KEGIATAN

1) Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
7) Pengembangan Prasarana Pertanian;
8) Pembangunan Prasarana Pertanian;
9) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota;
10) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; dan

3. SUB KEGIATAN

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
5) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKP;
6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
9) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
11) Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
12) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
13) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
14) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
15) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau lapangan;
16) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
17) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
18) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
19) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
20) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
21) Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B;
22) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
23) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
24) Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian;
25) Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
26) Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit;
27) Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air;
28) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

29) engendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan;
30) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
31) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
32) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
33) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
34) Pembentukan dan Pengelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
35) Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani
36) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (UPT)

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Tahun 2024

No	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			167.958.570.646				172.885.209.206	4.926.638.560
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72	17.419.063.849	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekreta riat	72	19.938.087.779	0
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah dengan baik	100%	234.775.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah dengan baik	100%	274.775.000	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen	203.840.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen	223.840.000	20.000.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1 Laporan	935.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1 Laporan	935.000	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50.000.000	20.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentasi PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu (%)	100%	19.071.088.779	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentasi PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu (%)	100%	19.096.088.779	25.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Org/Bln	18.991.088.779	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Org/Bln	18.991.088.779	0
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	200 Dokumen	80.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikai Keuangan SKPD (Dokumen)	400 Dokumen	105.000.000	25.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100%	458.607.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100%	538.095.500	0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5 Paket	1000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5 Paket	1000.000	0

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10 Paket	225.519.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7 Paket	278.403.300	-30.511.800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3 Paket	65.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3 Paket	75.000.000	10.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3 Paket	15.000.000	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan (Dokumen)	348 Dokumen	2.088.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan (Dokumen)	354 Dokumen	2.088.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	250.000.000	100.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	235.145.950	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	275.145.950	0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12 Laporan	2000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12 Laporan	2000.000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	50.000.000	0)

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	183.145.950	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	223.145.950	40.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	77.746.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	88.596.500	10.850.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6 Unit	74.246.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6 Unit	74.246.500	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	13.350.000	10.850.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	1.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	1.000.000	0
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura yang di Manfaatkan	100%	38.237.198.300	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura yang di Manfaatkan	100%	38.544.656.250	0
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	38.237.198.300	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana	100%	38.544.656.250	0
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	45 Laporan	38.112.798.300	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	136 Laporan	38.420.256.250	307.457.950

	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	40 Laporan	124.400.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	40 Laporan	124.400.000	0
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian Yang di Manfaatkan	100%	56.917.854.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian Yang di Manfaatkan	100%	98.975.554.000	0
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	254.600.000	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	404.600.000	0
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dokumen)	1 dokumen	9.600.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 dokumen	9.600.000	0
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1 Dokumen	240.000.000	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	2 Dokumen	390.000.000	150.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	5000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	5000.000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pendukung Pertanian	78 Unit	103.380.648.588	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pendukung Pertanian	82 Unit	105.887.958.588	0

	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang di bangun, di rehabilitasi dan di pelihara	2 Unit	272.200.000	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang di bangun, di rehabilitasi dan di pelihara	2 Unit	272.200.000	0
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	2 Unit	805.000.000	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	2 Unit	805.000.000	0
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	69 Unit	100.699.760.588	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	71 Unit	103.015.270.588	2.315.510.000
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	0 Unit	5000.000	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	1 Unit	237.000.000	232.000.000
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	1 unit	138.600.000	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	2 unit	370.600.000	232.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung lainnya yang di bangun	4 unit	1.460.088.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung lainnya yang di bangun	4 Unit	1.460.088.000	0
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	100%	1.990.700.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	100%	1.990.700.000	0
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%	1.990.700.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%	1.990.700.000	0

	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Di kendalikan	10 Ha	694.200.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	10 Ha	694.200.000	0
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5 Ha	275.000.000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5 Ha	275.000.000	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura , Perkebunan	10 Laporan	1.021.500.000	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura , Perkebunan	10 Laporan	1.021.500.000	0
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertumbuhan Produksi kelompok yang disuluh	62%	2.798.260.689	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertumbuhan Produksi kelompok yang disuluh	62%	4.292.593.099	0
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	terlaksananya penyuluhan pertanian	100%	2.798.260.689	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	terlaksananya penyuluhan pertanian	100%	4.292.593.099	0
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Yang di Tingkatkan Kapasitasnya	2 Unit	241.800.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Yang di Tingkatkan Kapasitasnya	3 Unit	251.800.000	10.000.000

	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang di tingkatkan kapasitasnya	10 Unit	789.174.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang di tingkatkan kapasitasnya	11 Unit	799.174.000	10.000.000
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	6 Unit	1.761.786.689	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	6 Unit	3.236.119.099	1.474.332.410
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	0 Unit	1000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	0 Unit	1000.000	
	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	0 Unit	4.500.000	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	0 Unit	4.500.000	
	UPT BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA								
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	100%	1.219.799.540	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	100%	1.219.799.540	0
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	1.219.799.540	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	1.219.799.540	0
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100%	1.219.799.540	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100%	1.219.799.540	0

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

A. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024.

B. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tana Paser, 12 Agustus 2024

KEPALA
DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

Dr. Erwan Wahyudi, SP,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19781230 200801 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jln. RA. Kartini ☎ (0543) 21300 - 21049
Email : dis.tph.paser20@gmail.com
TANAH PASER

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASER
NOMOR 387 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 2024
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER
TAHUN 2024

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASER

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu di bentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaan lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai denga jadwal yang ditetapkan;
2. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf (a) tersebut diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026
9. Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2024 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas melakukan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja), Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2024, dan didalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada petunjuk dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari tedapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 02 Mei 2024

Kepala Dinas

Dr. Erwan Wahyudi, SP M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19781230 200801 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 387TAHUN 2024
TANGGAL : 02 MEI 2024

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER
TAHUN 2024

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan hortikultura Kabupaten Paser
Ketua	:	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan HortikulturaKabupaten Paser
Sekretaris	:	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Anggota	:	1. Kepala Bidang Sarana, Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian 2. Kepala Bidang Prasarana 3. Kepala Bidang Penyuluhan 4. Perencana Ahli Pertama 4. Staf Perencanaan dan Keuangan

Kepala Dinas

Dr. Erwan Wahyudi, SP M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19781230 200801 1 006

Rencana Jadwal Pelaksanaan

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Penyusunan SK TIM												
2	Penyusunan Rancangan Renja												
3	Rancangan Perubahan Renja												
4	Penyusunan Ranhir Renja												
5	Penyusunan Ranhir Perubahan Renja												
6	Penyusunan Ranwal Renja												

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2024

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nyalah maka penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini merupakan salah satu kewajiban untuk merencanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif, efisien, bersih dan responsif serta akuntabel.

Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser dan pencapaian target kinerja yang diharapkan. Rancangan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) ini juga merupakan upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Paser terpilih tahun 2021-2026.

Merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai tuntutan tugas dan harapan masyarakat merupakan suatu tugas besar yang harus segera direalisasikan. Untuk itu, dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan kinerja DPMPTSP Kabupaten Paser akan sangat diperlukan demi meningkatnya realisasi investasi di daerah, meningkatnya kualitas pelayanan yang lebih baik dan terwujudnya akuntabilitas kinerja.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) ini merupakan dokumen yang dinamis sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan dan perbaikan yang dianggap strategis serta sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah.

Tana Paser, 05 Agustus 2024

Kepala DPMPTSP Kab. Paser,

Ir. Toto Hariadi, ST., M.Ling
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP 19731116 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……. 14

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024 ……..……. 16

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Tujuan dan Sasaran 18

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 19

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA PD Tahun 2023 25

BAB IV PENUTUP 30

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser mengacu padakerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan I Tahun 2024.

Selanjutnya Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

23. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser;
25. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2024 tentang perubahan RKPD Nomor 20 tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, keterkaitan antaraRenja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Perubahan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Tahun 2024 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target Tahun 2024

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan capaian renstra sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II
Tahun 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target Program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/dtahun 2024		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP**	**75.5%**		**75.5%**	**38**	**50**	**75.5%**	**75.5%**	**75.5%**	
2.18.001.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Sasaran Strategis DPMPTSP**	**Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**		**100%**	**60**	**59.66**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.18.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	1	33.33	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
2.18.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1	100	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
2.18.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
2.18.001.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**		**100%**	**42**	**41.82**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.18.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	30 Orang/Bulan		30 Orang/Bulan	30	100	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	

2.18.001.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
2.18.001.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian**	**Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**		**100%**	**41**	**41.04**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.18.001.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Peserta yang mendapatkan informasi peraturan pembinaan peningkatan wawasan perundang - undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	40 Orang		40 Orang	-	-	40 Orang	40 Orang	40 Orang	
2.18.001.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**		**100%**	**38**	**38.39**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.18.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		1 Paket	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
2.18.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		1 Paket	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
2.18.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kant	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket		1 Paket	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
2.18.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket		1 Paket	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
2.18.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen		2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
2.18.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1	50	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
2.18.001.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran**	**Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**		**100%**	**33**	**33.14**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.18.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

2.18.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
2.18.001.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan BMD**	**Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**		**100%**	**8**	**7.65**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.18.001.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0		0	-	-	0	0	0	
2.18.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit		3 Unit	1	33.33	3 Unit	3 Unit	3 Unit	
2.18.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit		17 Unit	-	-	17 Unit	17 Unit	17 Unit	
2.18.002	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA (dalam juta rupiah)**	**Meningkatnya kemudahan berusaha**	**3.000.000**		**3.000.000**	**-**	**-**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	
2.18.002.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha**	**Tersedianya dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha**	**2 Dokumen**		**2 Dokumen**	**-**	**-**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	
2.18.002.2.02.001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal DaerahKabupaten/Kota (Dokumen)	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.18.003	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investor Non Tambang dan Non Sawit**	**Terciptanya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mempromosikan investasi**	**71 Investor**		**71 Investor**	**-**	**-**	**71 Investor**	**71 Investor**	**71 Investor**	
2.18.003.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**	**3 Dokumen**		**3 Dokumen**	**-**	**-**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	

2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab./Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2 Dokumen		2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
2.18.004	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Meningkatnya daya tarik bagi investor dan mendorong investasi yang berkelanjutan**	**82,08**		**82,08**	**-**	**-**	**82,08**	**82,08**	**82,08**	
2.18.004.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Unsur SPM yang terpenuhi**	**Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sesuai NSPK**	**82,08 %**		**82,08 %**	**-**	**-**	**82,08 %**	**82,08 %**	**82,08 %**	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	928 Pelaku Usaha		928 Pelaku Usaha	1919	207.24	928 Pelaku Usaha	928 Pelaku Usaha	928 Pelaku Usaha	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	20 Orang		20 Orang	-	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	
2.18.005	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan**	**Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**71 Investor**		**71 Investor**	**30**	**46.15**	**71 Investor**	**71 Investor**	**71 Investor**	
2.18.005.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengendalian terhadap perusahaan**	**Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap perusahaan (Perusahaan)**	**71 Perusahaan**		**71 Perusahaan**	**30**	**46.15**	**71 Perusahaan**	**71 Perusahaan**	**71 Perusahaan**	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	31 Kegiatan Usaha		31 Kegiatan Usaha	4	16	31 Kegiatan Usaha	31 Kegiatan Usaha	31 Kegiatan Usaha	

2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	-	-	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	26	130	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	
2.18.006	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal**	**Meningkatnya Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal**	**90%**		**90%**	**40**	**50**	**90%**	**90%**	**90%**	
2.18.006.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah ketersedian data dan informasi perizinan dan nonperizinan**	**Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan**	**90%**		**90%**	**40**	**50**	**90%**	**90%**	**90%**	
2.18.006.2.01.001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen		1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:

1. penetapan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
2. perencanaan program di bidang penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
3. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang meliputi penanaman modal, perizinan, serta data dan pengaduan;
4. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan pengkoordinasian di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang meliputi penanaman modal, perizinan, serta data dan pengaduan.

Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Mewujudkan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	**Persentase Pertumbuhan Investasi**	30	35	40	45	50		
Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA (Milyar)	690	2000	2500	3000	3500	-	16.83
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,02	81,04	81,06	81,07	81,12	23.12	23.12
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Akuntabiltas Kinerja	75	75,2	75,5	75,8	80	42.02	42.02

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Mewujudkan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase Pertumbuhan Investasi, dimana target yang ditetapkan adalah 40 % dengan realisasinya 18.63% capaian

kinerja sebesar 18.63%;

b. Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi memiliki 1 indikator kinerja yaitu Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA (Milyar) dimana target yang ditetapkan adalah 2.500 milyar sampi dengan triwulan I ini realisasinya capaian kinerja sebesar 6.56%;
c. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan indikator kinerja yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana target yang ditetapkan adalah 81,06 sampai dengan triwulan I ini realisasinya 2.75% capaian kinerja sebesar 2.75%;
d. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai Akuntabiltas Kinerja dimana target yang ditetapkan adalah 75,5% dengan realisasinya 22.04% capaian kinerja sebesar 22.04%;

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis sebagian besar sudah diatas 25% dari target yang ditetapkan. Hanya saja untuk sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi masih dibawah 25%. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser sampai dengan Periode Juni 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

a. Belum Optimalnya kinerja realisasi investasi terkait pelaporan kegiatan penanaman modal dari perusahaan sehingga Perangkat Daerah belum mendapatkan data yang lebih lengkap dan valid.

b. Belum optimalnya implementasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dikarenakan keterbatasan sarana transportasi yang diperlukan untuk kegiatan ke lapangan
c. Belum optimalnya pengawasan karena kurangnya SDM.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka diusulkan beberapa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur secara reguler melalui bimbingan teknis/pelatihan/studi tiru pengayaan informasi dan peningkatan kapasitas.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi yang memadai utnuk mendukung tugas tugas lapangan
3. Meningkatkan kinerja pelaporan kegiatan penanaman modal melalui pembinaan dan sosialisasi tatacara pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal kepada perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Paser

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang meliputi pelayanan terpadu satu pintu dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formulasi/Penjelasan	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Mewujudkan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	**Persentase Pertumbuhan Investasi**	**Persentase Pertumbuhan Investasi** **Definisi Operasional : Persentase Pertumbuhan Investasi adalah kondisi yang menunjukkan kenaikan atau penurunan pertumbuhan dengan membandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya**		
Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA (Milyar)	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN PMA Definisi Operasional : Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) adalah seluruh Nilai Investasi PMA dan PMDN dalam Bentuk Rupiah	2500	2500
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survey IKM satu tahun sesuai acuan KEP MENPAN No : 14 Tahun 2016. Definisi Operasional : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang	81,06	81,06

		diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Akuntabiltas Kinerja	Nilai SAKIP perangkat daerah atas review Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Definisi Operasional : SAKIP merupakan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah) meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja oleh evaluator SAKIP (APIP Inspektorat)	75,5	75,5

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan namun terdapat perubahan/penambahan dari sisi anggaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja serta penyesuaian beberapa sub kegiatan sebagai antisipasi tuntutan kebutuhan yang bersifat mendesak.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu “Pemerataan Pembangunan untuk Menciptakan Kesejahteraan yang Merata di seluruh Kabupaten Paser **”** yang dijabarkan ke dalam rangka Penguatan Perekonomian melalui empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
2. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas

daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung pencapaian sasaran ke-1, yaitu "**Meningkatnya multiplier effect sektor pertanian. Yang meliputi urusan pertanian, pangan,perindustrian, penanaman modal dan ketenagakerjaan**".

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran Tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab paser**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP**	**75,5 %**	**6,671,511,383**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab paser**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP**	**76%**	**11,145,025,412**	
A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab paser	Persentase Capaian Sasaran Strategis DPMPTSP	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	165,412,519	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab paser	Persentase Capaian Sasaran Strategis DPMPTSP	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	236,002,519	
A.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	62,678,900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	105,978,900	
A.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	65,799,819	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	65,799,819	
A.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	36,933,800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	64,223,800	
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab paser	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6,203,410,776	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab paser	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6,203,410,776	
A.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	30 Orang/Bulan	5,730,333,100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	30 Orang/Bulan	5,730,333,100	
A.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	473,077,676	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	473,077,676	
A.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab paser	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	17,499,500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab paser	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	88,500,000	
A.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab paser	Jumlah Peserta yang mendapatkan informasi peraturan pembinaan peningkatan wawasan perundang - undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	40 Orang	17,499,500	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab paser	Jumlah Peserta yang mendapatkan informasi peraturan pembinaan peningkatan wawasan perundang - undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	40 Orang	88,500,000	

A.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab paser	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	257,162,788	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab paser	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	4,544,420,573	
A.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1,723,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1,723,000	
A.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	26,899,588	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	3,866,391,473	Tambahan Untuk MPP
A.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	11,103,000	Penyediaan Bahan Logistik Kant	Kab paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	129,685,900	Untuk MPP Jasa Soft Opening dan Makan Minum
A.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	20,141,600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	20,141,600	
A.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	3,688,800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	3,688,800	
A.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	193,606,800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	522,789,800	Untuk MPP dalam rangka untuk konsultasi kemenpan terkait MPP dan studi tiru tenaga kerja outsourcing MPP
A.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab paser	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	11,025,800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab paser	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	11,025,800	
A.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	
A.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	9,025,800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	9,025,800	
A.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab paser	Persentase Pemeliharaan BMD	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	17,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab paser	Persentase Pemeliharaan BMD	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	61,665,744	
A.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	2,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	2,000,000	
A.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	12,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	56,665,744	

A.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit	3,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit	3,000,000	
B	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Kab paser**	**Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA (dalam juta rupiah)**	**Meningkatnya kemudahan berusaha**	**2.500.000**	**510,894,881**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Kab paser**	**Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA (dalam juta rupiah)**	**Meningkatnya kemudahan berusaha**	**2.500.000**	**510,894,881**	
B.1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha	Tersedianya dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha	2 Dokumen	510,894,881	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha	Tersedianya dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha	2 Dokumen	510,894,881	
B.1.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal DaerahKabupaten/Kota (Dokumen)	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	122,664,350	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal DaerahKabupaten/Kota (Dokumen)	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	122,664,350	
B.1.2	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	388,230,531	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	388,230,531	
C	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Kab paser**	**Jumlah Investor Non Tambang dan Non Sawit**	**Terciptanya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mempromosikan investasi**	**65 Investor**	**182,400,000**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Kab paser**	**Jumlah Investor Non Tambang dan Non Sawit**	**Terciptanya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mempromosikan investasi**	**65 Investor**	**422,941,000**	
C.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	3 Dokumen	182,400,000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	3 Dokumen	422,941,000	
C.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab./Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47,400,000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab./Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47,400,000	
C.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2 Dokumen	135,000,000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2 Dokumen	375,541,000	
D	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Kab paser**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Meningkatnya daya tarik bagi investor dan mendorong investasi yang berkelanjutan**	**81,06**	**1,252,740,077**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Kab paser**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Meningkatnya daya tarik bagi investor dan mendorong investasi yang berkelanjutan**	**81,06**	**1,683,037,077**	
D.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab paser	Jumlah Unsur SPM yang terpenuhi	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sesuai NSPK	81,06 %	1,252,740,077	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab paser	Jumlah Unsur SPM yang terpenuhi	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sesuai NSPK	81,06 %	1,683,037,077	
D.1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab paser	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	926 Pelaku Usaha	1,182,340,077	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab paser	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	926 Pelaku Usaha	1,612,637,077	

D.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab paser	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	20 Orang	70,400,000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab paser	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	20 Orang	70,400,000	
E	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Kab paser**	**Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan**	**Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**65 Investor**	**415,671,000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Kab paser**	**Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan**	**Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**65 Investor**	**491,609,000**	
E.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah pengendalian terhadap perusahaan	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap perusahaan (Perusahaan)	65 Perusahaan	415,671,000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah pengendalian terhadap perusahaan	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap perusahaan (Perusahaan)	65 Perusahaan	491,609,000	
E.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab paser	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Kegiatan Usaha	173,428,000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab paser	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Kegiatan Usaha	173,428,000	
E.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab paser	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 Pelaku Usaha	156,746,000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab paser	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 Pelaku Usaha	232,684,000	
E.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Kab paser	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 Pelaku Usaha	85,497,000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab paser	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 Pelaku Usaha	85,497,000	
F	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Kab paser**	**Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal**	**Meningkatnya Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal**	**80%**	**138,259,154**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Kab paser**	**Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal**	**Meningkatnya Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal**	**80%**	**138,259,154**	
F.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah ketersedian data dan informasi perizinan dan nonperizinan	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	80%	138,259,154	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah ketersedian data dan informasi perizinan dan nonperizinan	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	80%	138,259,154	
F.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab paser	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	138,259,154	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab paser	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	138,259,154	
Jumlah						**9,171,476,495**						**14,391,766,524**	

3.2.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser tidak mendapat masukan program / kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perizinan berusaha, maupun dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi ataupun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Paser

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. PASER
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							8.566.781.369,00	9.171.476.495,00	9.171.476.495,00							10.111.573.194,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.566.781.369,00	9.171.476.495,00	9.171.476.495,00							10.111.573.194,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							8.566.781.369,00	9.171.476.495,00	9.171.476.495,00							10.111.573.194,00	
1	**2**	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan**	**90% 80% 80%**		**75,20%**	**74 85 % %**	**74 85 % %**	**6.702.342.907,00**	**6.702.191.383,00**	**6.671.511.383,00**							**8.593.331.414,00**	
	2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Sasaran Strategis DPMPTSP**	**100%**		**100%**	**75,5 %**	**75,5 %**	**165.412.519,00**	**165.412.519,00**	**165.412.519,00**			**-**	**Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya**	**Pemerintah Daerah/Stakeholder Terkait**		**271.309.509,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	62.678.900,00	62.678.900,00	62.678.900,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			124.312.939,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	65.799.819,00	65.799.819,00	65.799.819,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			87.310.741,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	36.933.800,00	36.933.800,00	36.933.800,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			59.685.829,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**		**100%**	**100 %**	**100 %**	**6.234.242.300,00**	**6.234.090.776,00**	**6.234.090.776,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya**	**Pimpinan atau kepala SKPD serta seluruh pegawai/ staf**		**7.737.836.863,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/Bulan		30 Orang/Bulan	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	5.730.333.100,00	5.730.333.100,00	5.730.333.100,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			7.176.738.263,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	503.909.200,00	503.757.676,00	473.077.676,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			561.098.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**		**100%**	**100 %**	**100 %**	**17.499.500,00**	**17.499.500,00**	**17.499.500,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya**	**Pimpinan atau kepala SKPD serta seluruh pegawai/ staf**		**103.145.842,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	2	18	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang		40 Orang	0 Orang	0 Orang	17.499.500,00	17.499.500,00	17.499.500,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			103.145.842,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**		**100%**	**100 %**	**100 %**	**257.162.788,00**	**257.162.788,00**	**257.162.788,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya**	**Pimpinan atau kepala SKPD serta seluruh pegawai/ staf**		**382.140.579,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.723.000,00	1.723.000,00	1.723.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			8.163.868,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	26.899.588,00	26.899.588,00	26.899.588,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			108.898.038,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.103.000,00	11.103.000,00	11.103.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			49.847.784,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.141.600,00	20.141.600,00	20.141.600,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			36.554.468,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.688.800,00	3.688.800,00	3.688.800,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			4.479.922,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Dokumen		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	193.606.800,00	193.606.800,00	193.606.800,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			174.196.499,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran**	**100%**		**100%**	**100 %**	**100 %**	**11.025.800,00**	**11.025.800,00**	**11.025.800,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya**	**Pimpinan atau kepala SKPD serta seluruh pegawai/ staf**		**20.391.250,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			2.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9.025.800,00	9.025.800,00	9.025.800,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			18.191.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
01	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan BMD**	**100%**		**100%**	**100 %**	**100 %**	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya**	**Pimpinan atau kepala SKPD serta seluruh pegawai/ staf**		**78.507.371,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			3.638.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			55.725.862,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit		17 Unit	17 Unit	17 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			19.143.259,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
02			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA**	**837.851 juta rupiah**		**3.200.000 Juta Rupiah**	**undefined undefined**	**761.683 juta rupiah**	**158.839.231,00**	**510.894.881,00**	**510.894.881,00**							**276.011.780,00**	
02	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha**	**10 Dokumen**		**2 Dokumen**	**undefined undefined**	**undefined undefined**	**158.839.231,00**	**510.894.881,00**	**510.894.881,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya**	**Pelaku Usaha/Investor Dalam dan Luar Negeri**		**276.011.780,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
				Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	5 Doumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	122.664.350,00	122.664.350,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			138.005.890,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																	
				Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5 Doumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	158.839.231,00	388.230.531,00	388.230.531,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			138.005.890,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
03			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor non tambang dan non sawit**	**335 Investor**		**62 Investor**	**65 Investor**	**65 Investor**	**213.600.000,00**	**213.600.000,00**	**182.400.000,00**							**269.830.000,00**	
03	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**	**15 Event**		**3 Event**	**2 Event**	**2 Event**	**213.600.000,00**	**213.600.000,00**	**213.600.000,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya**	**Investor domestik dan Investor asing**		**269.830.000,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			155.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																	
				Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	78.600.000,00	78.600.000,00	47.400.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			114.180.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
04			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**405.30%**		**81,04%**	**82,06 %**	**82,06 %**	**1.253.740.077,00**	**1.221.540.077,00**	**1.252.740.077,00**							**671.440.000,00**	
04	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Unsur SPM yang terpenuhi Jumlah Unsur SPM Yang Terpenuhi**	**405.30%**		**81,04%**	**82,06 %**	**82,06 %**	**1.253.740.077,00**	**1.221.540.077,00**	**1.221.540.077,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya**	**Pelaku Usaha/Investor Dalam dan Luar Negeri**		**671.440.000,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4.626 Pelaku Usaha		922 Pelaku Usaha	1926 Pelaku Usaha	1926 Pelaku Usaha	1.183.340.077,00	1.151.140.077,00	1.182.340.077,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			559.020.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																	
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	70.400.000,00	70.400.000,00	70.400.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			112.420.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
05			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan**	**336 Investor**		**62 Investor**	**65 Investor**	**65 Investor**	**100.000.000,00**	**384.991.000,00**	**415.671.000,00**							**112.420.000,00**	
05	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengendalian terhadap perusahaan**	**336 Perusahaan**		**62 Perusahaan**	**24 Perusahaan**	**24 Perusahaan**	**100.000.000,00**	**384.991.000,00**	**384.991.000,00**			-	**Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya**	**Pelaku Usaha/Investor PMDN/PMA**		**112.420.000,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																	
				Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	136 Kegiatan Usaha		22 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha.	12 Kegiatan Usaha.	100.000.000,00	142.748.000,00	173.428.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			112.420.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	133 Pelaku Usaha	0,00	156.746.000,00	156.746.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																	
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan Usaha		20 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	8 Kegiatan Usaha	0,00	85.497.000,00	85.497.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
06			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal**	**400%**		**70%**	**80 %**	**80 %**	**138.259.154,00**	**138.259.154,00**	**138.259.154,00**							**188.540.000,00**	

2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah ketersedian data dan informasi perizinan dan non perizinan**	**400%**		**70%**	**80 %**	**80 %**	**138.259.154,00**	**138.259.154,00**	**138.259.154,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya**	**Pemerintah Daerah/Pemohon Perizinan/Stakeholder Terkait**		**188.540.000,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																	
						Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	138.259.154,00	138.259.154,00	138.259.154,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			188.540.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
											J U M L A H	**8.566.781.369,00**	**9.171.476.495,00**	**9.171.476.495,00**							**10.111.573.194,00**	

IV
P E N U T U P

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2024, merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah, target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser .

Selain itu Rancangan Akhir Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Paser ini juga merupakan dokumen perencanaan tahunan yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan arah dan rencana ke depan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta kemampuan sumber daya dan pembiayaan yang berasal dari APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024.

4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan, untuk :

a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
b. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun;
e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.
f. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024 .

4.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan tersusunnya Renja ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran visi misi instansi diharapkan akan lebih terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta terwujudnya komunikasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser maupun dengan instansi/lembaga terkait yang membidangi fungsi lain.

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.K.Bangsa KM.5 Komp.Perkantoran Gdg.F Lt.1 Kav.2, T.Grogot, Kab.Paser, 76251
Website : http://dpmptsp.paserkab.go.id, Email : dpmptsp@paserkab.go.id

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER
NOMOR : 31 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER

KEPALA DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024, perlu dibentuk Tim Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser;

b. Bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Paser.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/05/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Umum Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelimpahan kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

10. Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membuat dan menyusun Laporan Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser;
2. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan pada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 05 Agustus 2024

Kepala DPMPTSP Kab. paser,

Ir. Toto Irianto, ST, M.Ling
Pembina TK. I/IVb
NIP. 19731116 199203 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP
KAB. PASER
NOMOR : 31 Tahun 2024
TANGGAL : 05 Agustus 2024

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER

Ketua	:	Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kab. Paser
Sekretaris	:	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kab. Paser
Anggota PNS	:	1. Akhmad Faridi Wijaya SE., M.Si, Perencana Ahli Muda / Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan
		2. Vera Juliati Simamora, SE Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		3. Zainal Arifin, A.Md, Pelaksana
Anggota Non PNS	:	1. Noorhasanah S.I.P, Pelaksana

Kepala DPMPTSP Kab. paser,

Ir. Toto Ifrianto, ST, M.Ling
Pembina TK. I/IVb
NIP. 19731116 199203 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dokumen ini merupakan implementasi dari Renstra dan bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Paser di Bidang Kelautan dan Perikanan secara tahunan untuk tahun 2024 agar kebijakan yang dimaksud tepat sasaran sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Perubahan Renja Perangkat Daerah ini adalah dokumen perencanaan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Kami mengharapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi, dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Paser, sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya kami mengharapkan kritik, saran, masukan serta dukungan semua pihak, demi suksesnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam Perubahan Renja Dinas Perikanan ini dan atas bantuan semua pihak yang terkait dengan penyusunan Renja Dinas Perikanan ini diucapkan terima kasih.

Tana Paser, 09 Agustus 2024
Kepala Dinas Perikanan

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PERIKANAN PASER

Rudiansyah, S.Pi.,M.Si.
Pembina
NIP. 19710311 199803 1 007

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar..... i
Daftar Isi..... ii
Daftar Tabel iii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud Dan Tujuan..... 6
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD..... 23
2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat serta Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 28

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan 30
3.2 Review terhadap Perubahan Rencana Kerja Perangkat DaerahKabupaten Paser Tahun 2024 31
3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 43
3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024..... 45

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan..... 53
4.2 Rencana Tindak Lanjut 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Periode Pelaksanaan hingga Triwulan II Tahun 2024	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Paser.....	25
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024...	26
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Tahun 2024...	30
Tabel 3.2	Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Paser.....	33
Tabel 3.3	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Paser	44
Tabel 3.4	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah..... 4

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Tahun 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Berpedoman pada Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Paser mengacu pada Sembilan (9) arah baru tujuan pengelolaan perikanan yaitu: (1). Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya kecil, (2) Meningkatkan penerimaan dan devisa Negara, (3) Mendorong perluasan kesempatan kerja,(4) Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5) Mengoptimalkan pengelolaan pembudidayaan ikan, (6) Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing, (7) Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri

pengolahan ikan, (8) Mencapai, pemanfaatan sumberdaya ikan,lahan pembudidaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan secara optimal, dan (9) Menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidaya ikan dan tata ruang.

Pada Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 diarahkan sebagai upaya untuk memenuhi capaian sasaran Renstra dan RPJMD yang sampai pada triwulan II berdasarkan evaluasi belum mencapai target sasaran sehingga untuk penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam triwulan I dan II dimana titik berat pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk Pemerataan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh kabupaten Paser melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap maupun budidaya serta pembinaan teknis kepada pelaku usaha baik pembudidaya, nelayan dan pengolah hasil perikanan.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

a) Percepatan pelaksanaan program Prioritas Kepala Daerah
b) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

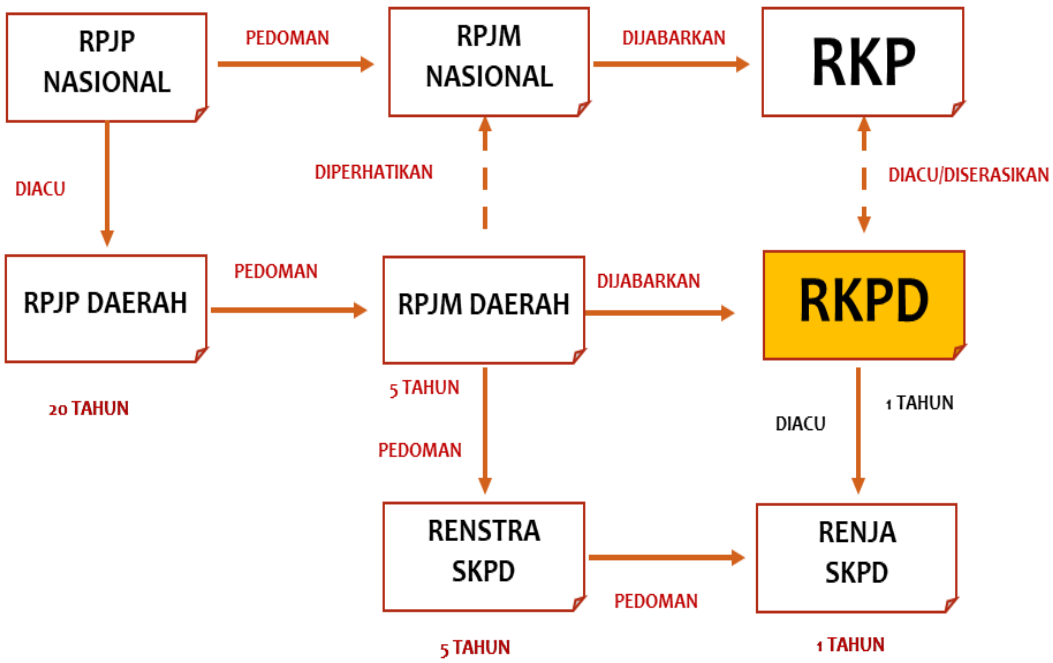
Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perikanan, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan, proses *top-down* dan proses *bottom-up* secara berjenjang berdasarkan hasil Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Gambar 1.1.Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2006- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2006 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 4);dan
15. Peraturan Bupati Paser Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser.
16. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser untuk periode satu tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah. Disamping itu pula sebagai acuan bagi bidang–bidang pada Dinas Perikanan dalam pencapaian program/kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Paser.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan, penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Perikanan, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Perikanan ,serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Dinas Perikanan, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampaidengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkankajian(review)terhadaphasilevaluasiRenja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumenPerubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat padamasing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV : PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Pada bagian ini juga berisikan tanda tangan Kepala OPD.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Perikanan tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Perubahan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja hingga triwulan II tahun 2024 dan pencapaian kinerja Renstra perangkat daerah yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra perangkat daerah serta identifikasi faktor-faktor yang mendukung pencapaian target maupun hambatan/kendala yang menyebabkan pencapaian target per triwulan belum tercapai.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser pada Tahun 2024 tetap mengacu pada pencapaian indikator program Dinas perikanan yang tertuang dalam Renstra Dinas

Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 maupun dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024, Dinas Perikanan Kabupaten Paser mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp. 17.119.096.096,- untuk melaksanakan 5 program, yang dijabarkan dalam 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan hingga triwulan II Tahun 2024, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan
Periode Pelaksanaan hingga Triwulan II Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah Tujuan/Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Sisa Anggaran	Predikat	
						Triwulan-I		Triwulan-II								
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(9)		(10)		(11)	(11)	
			K		RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP	K	RP
3.25.0.00.0.00.25.0000	Dinas Perikanan	-	0		17.119.096.096	10	1.322.925.894	11	3.998.028.974		5.320.954.868			11.798.141.228	SR	ST
	TUJUAN Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap Ekonomi Lokal/Non Tambang	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)														
	SASARAN Meningkatknya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	75,41													
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	74	%	7.072.711.896		1.086.848.305		2.282.868.088	0	3.369.716.393	0,00	47,64	3.702.995.503	SR	ST
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	100	%	199.887.900	25	40.494.900	25	51.472.000	50	91.966.900	50	46	107.921.000	SR	ST

3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	105.000.000	1	29.358.900	1	16.332.400	2	45.691.300	40,00	43,52	59.308.700	SR	ST
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	3.500.000	0	-			0	-			3.500.000	SR	ST
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	2.000.000	1	-			1	-			2.000.000	SR	ST
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	3.112.000	0	-			0	-			3.112.000	SR	ST
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	86.275.900	1	11.136.000	1	35.139.600	2	46.275.600	40,00	53,64	40.000.300	R	ST
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan Dinas Perikanan**	**100**	**%**	**6.344.559.829**	**25**	**976.899.825**	**25**	**2.072.534.167**	**50**	**3.049.433.992**	**50**	**48,06**	**3.295.125.837**	**SR**	**ST**
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	6.275.280.329	3	967.081.425	5	2.059.077.367	8	3.026.158.792	57,14	48,22	3.249.121.537	SR	ST
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300	Dokumen	47.671.500	45	-	174	11.355.600	219	11.355.600	73,00	23,82	36.315.900	SR	ST

3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	21.608.000	1	9.818.400		2.101.200	1	11.919.600	50,00	55,16	9.688.400	R	ST
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Dinas Perikanan**	**100**	**%**	**232.889.217**	**25**	**40.853.580**	**25**	**63.088.841**	**50**	**103.942.421**	**50**	**44,63**	**128.946.796**	**SR**	**ST**
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	39.500.000	1	-			1	-			39.500.000	SR	ST
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	45.154.000	1	-		14.125.800	1	14.125.800	33,33	31,28	31.028.200	SR	ST
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	18.235.217	1	-			1	-			18.235.217	SR	ST
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13	Laporan	130.000.000	3	40.853.580	4	48.963.041	7	89.816.621	53,85	69,09	40.183.379	S	ST

3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**2**	**Jenis**	**236.608.350**		**28.600.000**	**1**	**86.713.080**	**1**	**115.313.080**	**50**	**48,74**	**121.295.270**	**SR**	**ST**
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	999.400	0	-			0	-	0,00		999.400	SR	ST
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	235.608.950	3	28.600.000	5	86.713.080	8	115.313.080	66,67	48,94	120.295.870	SR	ST
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintahan daerah yang dipelihara**	**4**	**Jenis**	**58.766.600**	**0**	**-**	**1**	**9.060.000**	**1**	**9.060.000**	**25,00**	**15,42**	**49.706.600**	**SR**	**ST**
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	45.936.600	0	-	1	8.000.000	1	8.000.000	33,33	17,42	37.936.600	SR	ST
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	Unit	12.830.000	2	-	0	1.060.000	2	1.060.000	11,11	8,26	11.770.000	SR	ST
	SASARAN Meningkatnya kapasitas produksi kelautan dan perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	**10,849,37**	**Ton**			2.555		2.544							
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap**	**0,6**	**%**	**4.000.155.300**	**0,1**	**56.818.164**	**0,2**	**155.594.581**	**0,3**	**212.412.745**	**50,00**	**5,31**	**3.787.742.555**	**SR**	**ST**

3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah wilayah pengelolaan penangkapan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya**	**5**	**Kecamatan**	**3.901.655.300**	**1**	**51.512.000**	**1**	**108.925.468**	**2**	**160.437.468**	**40,00**	**4,11**	**3.741.217.832**	**SR**	**ST**
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	5	Dokumen	50.000.000	1	4.854.000	1	14.146.000	2	19.000.000	40,00	38,00	31.000.000	SR	ST
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1741	Unit	3.851.655.300	0	46.658.000		94.779.468	0	141.437.468	0,00	3,67	3.710.217.832	SR	ST
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelompok nelayan kecil yang diberdayakan**	**10**	**Kelompok**	**78.500.000**	**2**	**5.306.164**	**7**	**40.969.113**	**9**	**46.275.277**	**90,00**	**58,95**	**32.224.723**	**R**	**ST**
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	10	Orang	48.500.000	3	5.306.164	7	24.758.347	10	30.064.511	100,00	61,99	18.435.489	R	ST
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10	Kelompok	30.000.000	2	-		16.210.766	2	16.210.766	20,00	54,04	13.789.234	R	ST

3.25.03.2.06	**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota**	**Realisasi tanda daftar kapal perikanan di wilayah PUD**	**10**	**Dokumen**	**20.000.000**	**0**	**-**	**10**	**5.700.000**	**10**	**5.700.000**	**100,00**	**28,50**	**14.300.000**	**SR**	**ST**
3.25.03.2.06.0002	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	5	Rekomendasi	20.000.000	0	-	3	5.700.000	3	5.700.000	60,00	28,50	14.300.000	SR	ST
	SASARAN Meningkatnya kapasitas produksi kelautan dan perikanan	**Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)**	**14.435,25**	**Ton**			**3.754**		**3.753**							
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**1**	**%**	**3.960.234.400**	**0,15**	**75.779.364**	**0,25**	**1.273.894.662**	**0,4**	**1.349.674.026**	**40,00**	**34,08**	**2.610.560.374**	**SR**	**ST**
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah kelompok pembudi daya ikan yang diberdayakan**	**7**	**Kelompok**	**58.500.000**	**-**	**-**	**4**	**21.360.945**	**4**	**21.360.945**	**57,14**	**36,51**	**37.139.055**	**SR**	**ST**
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	4	Kelompok	20.000.000	0	-	2	6.540.951	2	6.540.951	50,00	32,70	13.459.049	SR	ST

3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3	Kelompok	38.500.000	0	-	2	14.819.994	2	14.819.994	66,67	38,49	23.680.006	SR	ST
3.25.04.2.03	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota**	**Jumlah rekomendasi perizinan bagi pembudidaya ikan**	**4**	**Dokumen**	**24.000.000**	**-**	**-**	**2**	**14.794.388**	**2**	**14.794.388**	**50,00**	**61,64**	**9.205.612**	**R**	**ST**
3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4	Rekomendasi	24.000.000	0	-	2	14.794.388	2	14.794.388	50,00	61,64	9.205.612	R	ST
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah wilayah pengelolaan pembudidayaan ikan**	**10**	**Kec.**	**3.877.734.400**	**2**	**75.779.364**	**3**	**1.237.739.329**	**5**	**1.313.518.693**	**50,00**	**33,87**	**2.564.215.707**	**SR**	**ST**
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	404.000.000	1	14.773.600	1	11.598.500	2	26.372.100	40,00	6,53	377.627.900	SR	ST
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	244	Unit	3.415.734.400	15	48.861.364	100	1.217.614.829	115	1.266.476.193	47,13	37,08	2.149.258.207	SR	ST

3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	3	Dokumen	28.000.000		2.130.000	1	8.526.000	1	10.656.000	33,33	38,06	17.344.000	SR	ST
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20	Orang	24.000.000	5	10.014.400	5		10	10.014.400	50,00	41,73	13.985.600	SR	ST
3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	120	Ha	6.000.000					0	-	0,00	0,00	6.000.000	SR	ST
	SASARAN Meningkatnya daya saing produk olahan hasil perikana	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	**2.484,40**	**Ton**			**530**		**528**							
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Cakupan wilayah PUD yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya perikanan**	**45**	**%**	**26.000.000**	**10**	**-**	**10**	**9.896.400**	**20**	**9.896.400**	**44,44**	**38,06**	**16.103.600**	**SR**	**ST**
3.25.05.2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kab./Kota**	**Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan**	**60**	**%**	**26.000.000**	**15**	**-**	**15**	**9.896.400**	**30**	**9.896.400**	**50,00**	**38,06**	**16.103.600**	**SR**	**ST**

3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5	Dokumen	20.000.000	0	-	1	8.342.400	1	8.342.400	20,00	41,71	11.657.600	SR	ST
3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2	Dokumen	6.000.000	0	-	1	1.554.000	1	1.554.000	50,00	25,90	4.446.000	SR	ST
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase peningkatan produksi olahan hasil Perikanan**	**0,9**	**%**	**2.059.994.500**	**0,12**	**103.480.061**	**0,3**	**275.775.243**	**0,42**	**379.255.304**	**46,67**	**18,41**	**1.680.739.196**	**SR**	**ST**
3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah rekomendasi izin usaha pengolahan hasil perikanan**	**2**	**Dokumen**	**105.645.000**		**18.262.800**	**1**	**21.874.400**	**1**	**40.137.200**	**50,00**	**37,99**	**65.507.800**	**SR**	**ST**

3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5	Dokumen	105.645.000	1	18.262.800	1	21.874.400	2	40.137.200	40,00	37,99	65.507.800	SR	ST
3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah pelaku usaha yang menerapkan standar mutu dan keamanan hasil olahan**	**7**	**Pelaku Usaha**	**76.330.000**	**1**	**9.595.200**	**1**	**16.713.800**	**2**	**26.309.000**	**28,57**	**34,47**	**50.021.000**	**SR**	**ST**
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	5	Unit Usaha	76.330.000	1	9.595.200	1	16.713.800	2	26.309.000	40,00	34,47	50.021.000	SR	ST
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia**	**3.264,32**	**Ton**	**1.878.019.500**	**400**	**75.622.061**	**750**	**237.187.043**	**1.150**	**312.809.104**	**35,23**	**16,66**	**1.565.210.396**	**SR**	**ST**
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah	2543,2	Ton	1.024.694.500	700	57.965.061	800	137.739.469	1500	195.704.530	58,98	19,10	828.989.970	SR	ST

		Kabupaten/Kota													
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	118	Pelaku Usaha	853.325.000	0	17.657.000	20	99.447.574	20	117.104.574	16,95	13,72	736.220.426	SR	ST
Rata-rata Capaian Kinerja												**51,73**	**36,91**		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Total rata-rata capaian kinerja hingga triwulan II adalah 51,73% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.320.954.868,- (lima milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp 17.119.096.096,- (tujuh belas milyar seratus sembilan belas juta sembilan puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) dengan capaian fisik mencapai 36,22%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Perikanan sebesar 50 % dengan predikat kinerja sangat rendah
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 0 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 0 indikator capaian kinerja 0%-50% = 42 indikator.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah dinilai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja yang masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain adalah :

1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

   Indikator kinerja pada jumlah produksi perikanan budidaya merupakan penghitungan besarnya peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2024. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah produksi perikanan budidaya baik budidaya air tawar, air payau maupun laut. Target kinerja indikator ini pada tahun 2024 adalah 14.435,25 ton untuk dapat mencapai target tersebut strategi yang dilakukan pada sektor perikanan budidaya dengan cara; a) Meningkatkan produktivitas budidaya dengan penerapan teknologi,penggunaan benih unggul, pengendalian hama penyakit ikan, dan b) Peningkatan kapasitas usaha budidaya yang dilakukan dengan pemenuhan infrastruktur kawasan serta sarana dan prasarana perikanan budidaya.

2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

   Indikator kinerja pada jumlah produksi perikanan tangkap merupakan penghitungan jumlah volume produksi perikanan tangkap dari produksi laut dan perairan umum daratan (PUD)

selama satu tahun. Target kinerja indikator ini pada tahun 2024 adalah 10.849,37 ton. Strategi yang digunakan untuk mencapai target kinerja indikator jumlah produksi perikanan tangkap dengan cara; a) Meningkatkan kapasitas usaha dengan dukungan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan b) Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.

3. Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan

   Indikator kinerja pada jumlah produk olahan hasil perikanan merupakan penghitungan besarnya jumlah produk olahan hasil perikanan pada tahun 2024, indikator ini digunakan untuk melihat peningkatan produksi perikanan dari sektor pengolahan hasil perikanan. Target kinerja indikator ini pada tahun 2024 adalah 2.484,40 ton.

   Strategi yang digunakan untuk melihat peningkatan kinerja disektor pengolahan hasil perikanan yaitu dengan a) meningkatkan kualitas produksi hasil olahan dilaksanakan dengan melatih para pelaku usaha pengolahan hasil perikanan produk pengolahan baru/diversifikasi serta pelatihan dan fasilitasi poklahsar untuk mengurus sertifikat PIRT, b) peningkatan kapasitas usaha pengolahan hasil perikanan dilakukan dengan memberikan bantuan sarana pengolahan, serta sarana pengolahan untuk peningkatan kapasitas produk ini disebabkan oleh perbaikan/update data base pelaku usaha pengolah.

   Berikut gambaran pelayanan urusan perikanan tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Paser

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Rentra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB			1,86	1,88	1,90	1,90	1,86		1,88	1,94	
2	Jumlah produksi perikanan tangkap			10.593,1	10.677,84	10.763,27	10.849,37	10.628,60	10.876,45	10.849,37	10.936,17	
3	Jumlah produksi perikanan budidaya			14.010,7	14.150,82	14.292,33	14.435,25	14.159,20	14.293,62	14.435,25	14.579,61	
4	Jumlah produksi olahan hasil perikanan			2.433,36	2.440,30	2.462,30	2.484,40	3.385,25	2.843,26	2.484,40	2.506,80	
5	Nilai evaluasi SAKIP dari APIP			61,42	66,38	71,59	75,41	73,08	69,65	75,41	80,72	

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Perikanan terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan: Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap Ekonomi Lokal/Non Tambang	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,88	1,88	1,90	1,90	1,90	0	
Sasaran:								
1. Meningkatnya kapasitas produksi kelautan dan perikanan	1. Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	10.677,84	10.763,27	10.849,37	10.936,17	11.023,66	5.099,2	47,00
	2. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	14.150,82	14.292,33	14.435,25	14.579,60	14.725,4	9,463,30	52,00
2. Meningkatnya daya saing produk olahan hasil perikanan	1. Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	2.440,30	2.447,62	2.454,96	2.462,33\	2.469,72	1.506,95	43,00
3. Meningkatknya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	1. Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal	0	0	0	0	0	0	0
	2. Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	66,38	71,59	75,41	80,72	86,26	65,0	86

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap ekonomi lokal/non tambang memiliki 1 indikator kinerja yaitu kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%), saat ini tidak dapat diketahui realisasi capaian kinerjanya dikarenakan nilai PDRB merupakan data tahunan yang akan diketahui pada tahun berikutnya;

b. Sasaran 1 (satu) meningkatnya kapasitas produksi kelautan dan perikanan memiliki 2 indikator kinerja, pertama jumlah produksi perikanan tangkap belum mencapai target dimana realisasinya sebesar 5.099,21 ton dari target sebesar 10.849,37 ton dengan capaian kinerja sebesar 47%, dan kedua jumlah produksi perikanan budidaya belum mencapai target dimana realisasinya sebesar 9.463,30 ton dari target sebesar 14.435,25 ton dengan capaian kinerja sebesar 65 % ;
c. Sasaran 2 (dua) meningkatnya daya saing produk olahan hasil perikanan memiliki 1 indikator kinerja yaitu jumlah produksi olahan hasil perikanan belum mencapai target dimana realisasinya sebesar 1.506,95 ton dari target sebesar 2.454,96 ton dengan capaian kinerja sebesar 61 %; dan
d. Sasaran 3 (tiga) meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel memiliki 2 indikator kinerja, pertama jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal telah melampaui mencapai target dimana realisasinya sebesar 0 (nol) temuan dari target sebesar 0 (nol) temuan dengan capaian kinerja sebesar 100%, dan kedua nilai evaluasi SAKIP dari APIP telah melampaui target dimana realisasinya sebesar 65 poin dari target sebesar 75,41 poin dengan capaian kinerja sebesar 86%.

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat serta Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Dinas Perikanan Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian rencana strategis sampai dengan triwulan II tahun 2024 diatas, secara keseluruhan realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser periode juni 2024:

1. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah dan Provinsi;
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal;
2. Adanya mutasi pegawai, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan program/kegiatan;
3. Adanya perubahan harga barang dipasaran;
4. Adanya kebijakan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah yang berubah; dan
5. Adanya perubahan spesifikasi terhadap barang yang diusulkan oleh masyarakat dan kesiapan calon kelompok penerima baik dari segi administrasi maupun teknis.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan perubahan renja tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana

Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan

Berdasarkan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, dengan tema “Pemerataan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh kabupaten Paser” dengan program prioritas daerah pada RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 yaitu program peningkatan produksi, mutu hasil dan olahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Paser sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan mewujudkan program prioritas tersebut kedalam 4 (empat) program prioritas diantaranya program pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 yang telah memuat rumusan isu-isu penting terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Perikanan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Paser, sebagai berikut :

Tabel 3.1.Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Target	
	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Tujuan: Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap Ekonomi Lokal/Non Tambang	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,90	1,90
Sasaran:				
- Meningkatnya kapasitas produksi kelautan dan perikanan	1. Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) 2. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	10.849,37 14.435,25	10.849,37 14.435,25
- Meningkatnya daya saing produk olahan hasil perikanan	1. Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	2.454,96	2.454,96
- Meningkatknya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	1. Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal 2. Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	0 75,41	0 70,58

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu *Pemerataan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh kabupaten Paser* yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar wilayah
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan kedalam sepuluh sasaran daerah yaitu:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan mendukung pencapaian sasaran ke-1, yaitu “meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Perikanan telah melakukan *review* dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rencana Kerja Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rencana Kerja P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Paser

No.	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				**17.119.096.096**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**19.748.627.096**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**74 %**	**7.072.711.896**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**74 %**	**7.224.957.596**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun**	**100%**	**199.887.900**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun**	**100%**	**276.758.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	105.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	150.182.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.500.000	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.112.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.112.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	86.275.900	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	117.964.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan Dinas Perikanan**	**100%**	**6.344.559.829**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan Dinas Perikanan**	**100%**	**6.354.315.829**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	6.275.280.329	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	6.275.280.329	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	47.671.500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	47.671.500	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	21.608.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	31.364.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Dinas Perikanan**	**100%**	**232.889.217**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Dinas Perikanan**	**100%**	**342.406.817**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	39.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	62.231.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	45.154.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	45.154.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18.235.217	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18.235.217	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	130.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	216.786.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**2 Jenis**	**236.608.350**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**2 Jenis**	**236.608.350**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	999.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	999.400	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	235.608.950	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	235.608.950	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jenis sarana penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**4 Jenis**	**58.766.600**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis sarana penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**4 Jenis**	**58.766.600**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	45.936.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	45.936.600	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	12.830.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	12.830.000	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap**	**0.6 %**	**4.000.155.300**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap**	**0.6 %**	**5.965.802.300**	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**Jumlah wilayah pengelolaan penangkapan ikan di wilayah PUD**	**5 Kecamatan**	**3.901.655.300**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah wilayah pengelolaan penangkapan ikan di wilayah PUD**	**5 Kecamatan**	**5.746.078.300**	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	66.040.000	

	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	447 Unit	3.851.655.300	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	447 Unit	5.680.038.300	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah kelompok nelayan kecil yang diberdayakan**	**10 Kelompok**	**78.500.000**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah kelompok nelayan kecil yang diberdayakan**	**10 Kelompok**	**199.724.000**	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	10 Orang	48.500.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	10 Orang	169.724.000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	30.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	30.000.000	
	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Realisasi tanda daftar kapal perikanan di wilayah PUD**	**35 Dokumen**	**20.000.000**	**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Realisasi tanda daftar kapal perikanan di wilayah PUD**	**35 Dokumen**	**20.000.000**	
	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	20.000.000	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	20.000.000	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya**	**1,00%**	**3.960.234.400**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya**	**1,00%**	**4.061.236.700**	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		**Jumlah kelompok pembudi daya ikan yang diberdayakan**	**7 Kelompok**	**58.500.000**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**		**Jumlah kelompok pembudi daya ikan yang diberdayakan**	**7 Kelompok**	**211.958.000**	

	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	4 Kelompok	20.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	4 Kelompok	20.000.000	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 Kelompok	38.500.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 Kelompok	191.958.000	
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Realisasi izin pencatatan tanda daftar pembudidaya ikan kecil**	**3 Dokumen**	**24.000.000**	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Realisasi izin pencatatan tanda daftar pembudidaya ikan kecil**	**3 Dokumen**	**24.000.000**	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4 Rekomendasi	24.000.000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4 Rekomendasi	24.000.000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		**Jumlah wilayah pengelolaan pembudidayaan ikan**	**10 Kecamatan**	**3.877.734.400**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		**Jumlah wilayah pengelolaan pembudidayaan ikan**	**10 Kecamatan**	**3.825.278.700**	

	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	404.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	404.000.000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33 Unit	3.415.734.400	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33 Unit	3.363.278.700	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	3 Dokumen	28.000.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	3 Dokumen	28.000.000	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Orang	24.000.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Orang	24.000.000	
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	120 Ha	6.000.000	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	120 Ha	6.000.000	

4	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**Cakupan wilayah PUD yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya perikanan**	**45 %**	**26.000.000**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**Cakupan wilayah PUD yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya perikanan**	**45 %**	**26.000.000**	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		**Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan perundang-undangan**	**55%**	**26.000.000**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**		**Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan perundang-undangan**	**55%**	**26.000.000**	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	20.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kab./Kota	5 Dokumen	20.000.000	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	6.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kab./Kota	2 Dokumen	6.000.000	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		**Persentase peningkatan produksi olahan hasil Perikanan**	**0.9 %**	**2.059.994.500**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**Persentase peningkatan produksi olahan hasil Perikanan**	**0.9 %**	**2.470.630.500**	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		**Jumlah rekomendasi izin usaha pengolahan hasil perikanan**	**2 Dokumen**	**105.645.000**	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**		**Jumlah rekomendasi izin usaha pengolahan hasil perikanan**	**2 Dokumen**	**105.645.000**	

	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5 Dokumen	105.645.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5 Dokumen	105.645.000	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		**Jumlah pelaku usaha yang menerapkan standar mutu dan keamanan hasil olahan**	**7 Kelompok**	**76.330.000**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**		**Jumlah pelaku usaha yang menerapkan standar mutu dan keamanan hasil olahan**	**7 Kelompok**	**76.330.000**	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	76.330.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	76.330.000	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia**	**3.232 Ton**	**1.878.019.500**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia**	**3.232 Ton**	**2.288.655.500**	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.543,6 Ton	1.024.694.500	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.543,6 Ton	1.043.664.500	

	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	118 Pelaku Usaha	853.325.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	118 Pelaku Usaha	1.244.991.000	

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023. yaitu melalui Musrenbang Desa/Kelurahan. Musrenbang Kecamatan.Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.saran dan pendapat DPRD berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan.lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Tidak semua aspirasi tersebut dapat diakomodir dalam Renja Dinas Perikanan Tahun 2024. sehingga sebagian diusulkan dalam Perubahan Renja Tahun 2024. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat yang direncanakan pada Perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Paser

Perangkat Daerah: Dinas Perikanan Kabupaten Paser

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**				
	- Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
	- Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				
		Desa Pondong Kec. Kuaro	Alat tangkap Udang Kelompok Nelayan Desa Pondong	450 Set	
		Desa Pondong Kec. Kuaro	Pengadaan Mesin Penggerak Kapal Desa Pondong	13 Unit	
		Desa Pondong Kec. Kuaro	Perahu/kapal berbahan fiberglass Kelompok Nelayan Desa Pondong	6 Unit	
		Desa Pasir Mayang Kec. Kuaro	Alat tangkap Ikan Kelompok Nelayan Desa Pasir Mayang	400 set	
		Desa Muara Pasir Kec, Tanah Grogot	Mesin Penggerak Kapal Kelompok Nelayan Desa Muara Pasir	23 set	
		Desa Lori Kec. Tanjung Harapan	Mesin Penggerak Kapal Kelompok Nelayan Desa Lori	25 unit	
		Desa Harapan Baru Kec. Kuaro	Mesin Penggerak Kapal Kelompok Nelayan Desa Harapan Baru	11 Unit	
		Desa Kerang Kec. Batu Engau	Motor Tempel / Mesin Ketinting Desa Kerang	12 unit	
2	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**				
	- Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
	- Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Kresik Bura Kec. Pasir Belengkong	Paket Budidaya Ikan Lele	10 Unit	

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024. maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

Kode					Uraian	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Sumber Dana	Lokasi	Kelompok Sasaran	Sebelum	Sesudah	Tahun + 1
											Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
Dinas Perikanan													
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						17.119.096.096	19.390.668.695	Rp. 21.732.465.407,00
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						17.119.096.096	19.390.668.695	Rp. 21.732.465.407,00
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	**74%**				**7.072.711.896**	**7.279.532.390**	**Rp. 6.548.707.894,00**
3	25	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Tersusun	**100%**				**199.887.900**	**259.887.900**	**Rp. 328.612.000,00**
3	25	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	ASN Dinas Perikanan	105.000.000	135.000.000	Rp. 154.500.000,00
3	25	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyususnan	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	ASN Dinas Perikanan	3.500.000	3.500.000	Rp. 3.500.000,00
3	25	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyususnan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	ASN Dinas Perikanan	2.000.000	2.000.000	Rp. 2.000.000,00
3	25	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	ASN Dinas Perikanan	3.112.000	3.112.000	Rp. 8.612.000,00

3	25	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASN Dinas Perikanan	86.275.900	116.275.900	Rp. 160.000.000,00
3	**25**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi Keuangan Dinas Perikanan**	**100%**				**6.344.559.829**	**6.364.559.829**	**Rp. 5.635.440.894,00**
3	25	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	ASN Dinas Perikanan	6.275.280.329	6.275.280.329	Rp. 5.535.440.894,00
3	25	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	ASN Dinas Perikanan	47.671.500	47.671.500	Rp. 65.000.000,00
3	25	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	ASN Dinas Perikanan	21.608.000	41.608.000	Rp. 35.000.000,00
3	**25**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Dinas Perikanan**	**100%**				**232.889.217**	**359.709.711**	**Rp. 287.000.000,00**
3	25	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	ASN Dinas Perikanan	39.500.000	106.320.494	Rp. 30.000.000,00
3	25	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	ASN Dinas Perikanan	45.154.000	45.154.000	Rp. 50.000.000,00
3	25	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	ASN Dinas Perikanan	18.235.217	18.235.217	Rp. 22.000.000,00
3	25	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	13 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASN Dinas Perikanan	130.000.000	190.000.000	Rp. 185.000.000,00
3	**25**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis Jasa/ Pelayanan untuk Menunjang Urusan Pemda**	**2 Jenis**				**236.608.350**	**236.608.350**	**Rp. 244.655.000,00**

3	25	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	ASN Dinas Perikanan	999.400	999.400	Rp. 1.000.000,00
3	25	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasapelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	ASN Dinas Perikanan	235.608.950	235.608.950	Rp. 243.655.000,00
3	25	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	**4 Jenis**				**58.766.600**	**58.766.600**	**Rp. 53.000.000,00**
3	25	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	ASN Dinas Perikanan	45.936.600	45.936.600	Rp. 45.000.000,00
3	25	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	ASN Dinas Perikanan	12.830.000	12.830.000	Rp. 8.000.000,00
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	**0,6%**				**4.000.155.300**	**6.036.247.405**	**Rp. 10.000.000.000,00**
3	25	03	2,01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya	**5 Kecamatan**				**3.901.655.300**	**5.937.747.405**	**Rp. 9.628.300.000,00**
3	25	03	2,01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Nelayan Kecil	50.000.000	66.040.000	Rp. 92.125.000,00
3	25	03	2,01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	2500 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Nelayan Kecil	3.851.655.300	5.871.707.405	Rp. 9.536.175.000,00
3	25	03	2,02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Diberdayakan	**10 Kelompok**				**78.500.000**	**78.500.000**	**Rp. 246.700.000,00**

3	25	03	2,02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	10 Orang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Nelayan Kecil	48.500.000	48.500.000	Rp. 180.000.000,00
3	25	03	2,02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Nelayan Kecil	30.000.000	30.000.000	Rp. 66.700.000,00
3	25	03	2,06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Realisasi Tanda Daftar Kapal Perikanan di Wilayah PUD	**10 Dokumen**				**20.000.000**	**20.000.000**	**Rp. 125.000.000,00**
3	25	03	2,06	0002	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Nelayan Kecil	20.000.000	20.000.000	Rp. 125.000.000,00
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	**1%**				**3.960.234.400**	**3.944.494.400**	**Rp. 4.200.000.000,00**
3	25	04	2,02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Diberdayakan	**7 Kelompok**				**58.500.000**	**58.500.000**	**Rp. 195.850.000,00**
3	25	04	2,02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	4 Kelompok	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembudidaya Ikan	20.000.000	20.000.000	Rp. 80.850.000,00
3	25	04	2,02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 Kelompok	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembudidaya Ikan	38.500.000	38.500.000	Rp. 115.000.000,00
3	25	04	2,03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Realisasi Izin Pencatatan Tanda Daftar Pembudidayaan Ikan Kecil	**4 Dokumen**				**24.000.000**	**24.000.000**	**Rp. 58.815.000,00**

3	25	04	2,03	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4 Rekomendasi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembudidaya Ikan	24.000.000	24.000.000	Rp. 58.815.000,00
3	25	04	2,04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Wilayah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**10 Kecamatan**				**3.877.734.400**	**3.861.994.400**	**Rp. 3.945.335.000,00**
3	25	04	2,04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembudidaya Ikan	404.000.000	404.000.000	Rp. 97.125.000,00
3	25	04	2,04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupataen/Kota	305 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Pembudidaya Ikan	3.415.734.400	3.396.282.400	Rp. 3.372.210.000,00
3	25	04	2,04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	3 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembudidaya Ikan	28.000.000	28.000.000	Rp. 146.000.000,00
3	25	04	2,04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Orang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembudidaya Ikan	24.000.000	27.712.000	Rp. 130.000.000,00
3	25	04	2,04	0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	120 Ha	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembudidaya Ikan	6.000.000	6.000.000	Rp. 200.000.000,00
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah PUD yang Diawasi dari IUU Fishing dan Kegiatan yang Merusak Sumberdaya	**45%**				**26.000.000**	**26.000.000**	**Rp. 108.086.000,00**

3	25	05	2,01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan terhadap Peraturan Perundang-undangan	**60%**				**26.000.000**	**26.000.000**	**Rp. 108.086.000,00**
3	25	05	2,01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembudidaya Ikan	20.000.000	20.000.000	Rp. 83.086.000,00
3	25	05	2,01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan IKan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembudidaya Ikan	6.000.000	6.000.000	Rp. 25.000.000,00
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	**0,9%**				**2.059.994.500**	**2.104.394.500**	**Rp. 875.671.513,00**
3	25	06	2,01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	**2 Dokumen**				**105.645.000**	**105.645.000**	**Rp. 131.305.513,00**
3	25	06	2,01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	105.645.000	105.645.000	Rp. 131.305.513,00
3	25	06	2,02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang Menerapkan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Olahan	**7 Kelompok**				**76.330.000**	**78.730.000**	**Rp. 146.310.000,00**

3	25	06	2,02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Junlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usha dan Risiko	5 Unit Usaha	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	76.330.000	78.730.000	Rp. 146.310.000,00
3	**25**	**06**	**2,03**		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang Tersedia	**3264,32 Ton**				**1.878.019.500**	**1.920.019.500**	**Rp. 598.056.000,00**
3	25	06	2,03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2543,2 Ton	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	1.024.694.500	1.066.694.500	Rp. 473.056.000,00
3	25	06	2,03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	118 Pelaku Usaha	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	853.325.000	853.325.000	Rp. 125.000.000,00
									Jumlah		**17.119.096.096**	**19.390.668.695**	**Rp. 21.732.465.407,00**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah. program dan kegiatan. indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2024. merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu. dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Perikanan mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD. Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

LAMPIRAN

Lampiran. 1 SK. Tim Penyusun Renja Perubahan Tahun 2024 dan Renja 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PERIKANAN
Jl. Kusuma Bangsa, KM.05 Komplek Perkantoran
Gedung D Lt.1 Kav.1
TANA PASER **Kode Pos 76211**

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASER

Nomor : 188.4 /053 /SK/DISKAN/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024 DAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASER

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASER,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2025, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025 ;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Paser selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser;
11. Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser;
b. Mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser
c. Melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser
d. Merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser
e. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser yaitu Anggaran Perubahan Tahun 2024 dan Anggaran Tahun 2025.
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser tepat waktu
g. Melaporkan hasilnya pada Kepala Dinas Perikanan selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Paser selaku Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari tedapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 02 Mei 2024

Plt. Kepala Dinas,

Rudiansyah, S.Pt, M.Si
Pembina
NIP. 19710311 199803 1 0007

TAHUN ANGGARAN
2024

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PERINDUSTRIAN

PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

PERUBAHAN RENCANA KERJA

(P-RENJA) 2024

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, atas berkat dan rahmat Nya sehingga kami dapat menyelesaikan PERUBAHAN RENJA Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM Tahun 2024.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & Ukm Kabupaten Paser berkomitmen untuk membangun Kabupaten Paser melalui tugas pokok dan fungsinya yang diamanatkan oleh peraturan Bupati Paser berhasil menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) SKPD tahun 2024 yang fokus pada pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P- RENJA)SKPD Tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi & UKM disusun setelah tambahan Perubahan Anggaran tahun 2024 yang telah disepakati menjadi sebuah kegiatan, dan menjadi acuan pembangunan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser . Dokumen Perencanaan ini merupakan janji yang harus ditunaikan.

Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan sektor Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM. Tugas membangun Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM ke depan yaitu tugas bersama, bukan merupakan tugas pemerintah semata-mata oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dan sinergi dari masyarakat luas dan kerja keras tanpa pamrih .

Demikian penyusunan PERUBAHAN RENJA Tahun 2024 yang kami buat sebagai acuan atas kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan, dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser.

Tana Paser , 22 Juli 2024

Kepala



YUSUF. SP. MP
Pembina Tk.I
Nip. 19720421 199803 1 011

D A F T A R I S I

Halaman.

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistimatika Penulisan 6

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 .. 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindagkop dan UKM 20

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024 25

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran 26

3.2 Reviu terhadap Perubahan RKPD 27

3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 38

3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024 40

BAB.IV. PENUTUP

4.1 Kaidah Pelaksanaan 51

4.2. Rencana tindak lanjut 52

LAMPIRAN .

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor … Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); (khusus 8 OPD yg menangani SPM)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal:
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Paser;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.
27. Perbup Perubahan RKPD Nomor 20 Tahun 2024 tgl 18 juli 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokokbahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

2.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target (jika ada)

3.2 Review Terhadap Perubahan Renja RKPD Tahun 2024 Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Pada bagian ini juga berisikan tanda tangan Kepala OPD.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
						Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV					
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)				(8)		(9)	
			KINERJA		RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	KINERJA	RP	K	RP	K	RP
	Tujuan : Meningkatnya perekonomian yang mandiri dan berdaya saing	**Laju pertumbuhan pdrb sektor perdagangan**	**6,4**	**%**										-	-		
3.31.2.17.3.30.01.0000	**Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				**34.393.494.963**									-	**11.138.530.101**	0,0	**32,39**
	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	**Nilai evaluasi SAKIP Disperindagkop**	**66**														
2.17.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**74**	**persen**	**11.590.059.109**	**20**	**2.433.316.526**	**20**	**3.485.952.420**					**40,0**	**5.919.268.946**	**54,1**	**51,07**
2.17.001.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah***	***94***	***persen***	**87.677.800**	***20***	**22.383.494**	**30**	**29.377.231**					**50,0**	**51.760.725**	**53,2**	**59,04**
2.17.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	27.234.000	2		3	**11.839.231**					**5,0**	**11.839.231**	**100,0**	**43,47**
2.17.001.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	dokumen	11.127.800	1		1	-					**2,0**	-	**100,0**	-

2.17.001. 2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	dokumen	9.244.000	1			**4.698.000**					**1,0**	**4.698.000**	**100,0**	**50,82**
2.17.001. 2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	dokumen	40.072.000	2	22.383.494	1	**12.840.000**					**1,0**	**35.223.494**	**25,0**	**87,90**
2.17.001. 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN***	***90***	***persen***	***11.080.671.349***	***25***	***2.326.722.639***	***25***	**3.320.797.035**					**50,0**	**5.647.519.674**	**55,6**	**50,97**
2.17.001. 2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	62	orang/Bulan	10.226.442.890	62	2.179.531.515	62	**3.070.557.711**					**31,0**	**5.250.089.226**	**50,0**	**51,34**
2.17.001. 2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	854.228.459	3	147.191.124	3	**250.239.324**					**6,0**	**397.430.448**	**50,0**	**46,53**
2.17.001. 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Pelayanan adminitrasi SKPD***	***90***	***persen***	***359.887.960***	***20***	***83.640.393***	***22***	**114.248.154**					**42,0**	**197.888.547**	**46,7**	**54,99**
2.17.001. 2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	72.200.000			1	**68.800.000**					**1,0**	**68.800.000**	**50,0**	**95,29**
2.17.001. 2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23	pkt	53.389.960	5		5	**23.812.200**					**10,0**	**23.812.200**	**43,5**	**44,60**
2.17.001. 2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	pkt	31.884.000	2	7.805.000	2	**-**					**4,0**	**7.805.000**	**50,0**	**24,48**
2.17.001. 2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	600	dokumen	4.060.000	60	660.000	50	**990.000**					**110,0**	**1.650.000**	**18,3**	**40,64**

2.17.001. 2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66	lap	198.354.000	20	75.175.393	10	**20.645.954**					**30,0**	**95.821.347**	**45,5**	**48,31**
2.17.001. 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***	***100***	***persen***	***4.900.000***	***20***	***570.000***	***30***	-					**50,0**	**570.000**	**50,0**	**11,63**
2.17.001. 2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	lap	2.500.000	3	570.000	3	-					**6,0**	**570.000**	**50,0**	**22,80**
2.17.001. 2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	lap	2.400.000				-					-	-	**0,0**	-
2.17.001. 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD dan peralatan***	***100***	***persen***	***56.922.000***		-	*30*	**21.530.000**					**30,0**	**21.530.000**	**30,0**	**37,82**
2.17.001. 2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	unit	53.392.000			1	**19.800.000**					**1,0**	**19.800.000**	**50,0**	**37,08**
2.17.001. 2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	unit	3.530.000			2	**1.730.000**					**2,0**	**1.730.000**	**40,0**	**49,01**
	Sasaran : Meningkatnya kwalitas kelembagaan dan usaha koperasi	Persentase koperasi aktif	62	%					-					-	-	**0,0**	
2.17.003	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**persentase koperasi sehat**	**65**	**%**	**63.383.000**	**8**	**10.194.100**	**9,5**	-					**17,5**	**10.194.100**	**26,9**	**16,08**
2.17.003. 2.01	***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota***	***Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT***	**54**	**Kop**	***63.383.000***	**1**	***10.194.100***	***3***	-					**4,00**	**10.194.100**	**7,41**	**16,08**

2.17.003. 2.01.001	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	10	unit usaha	63.383.000		10.194.100	1	-					**1,0**	**10.194.100**	**10,0**	**16,08**
2.17.005	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Jumlah Koperasi yang maju**	**12**	**%**	**200.000.000**		**-**	**3**	**50.735.346**					**3,0**	**50.735.346**	**25,0**	**25,37**
2.17.005. 2.01	***Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wlayah keanggotaannya dalam kab/kota***	**Jumla pelatihan yang dilaksanakan**	**2**	***kali***	***200.000.000***		-		**50.735.346**					-	**50.735.346**	**0,0**	**25,37**
2.17.005. 2.01.001	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian sertakapasita dan kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang MemahamiPengetahuanPerkoperasian	60	orang	200.000.000				**50.735.346**					-	**50.735.346**	**0,0**	**25,37**
2.17.006	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Rata-rata Omset Perkoperasi**	260	*jt*	**566.617.000**	**41**	**43.695.074**	**157**	**18.149.352**					**157**	**61.844.426**	**60,4**	**10,91**
2.17.006. 2.01	***Pemberdayaan dan perlindiungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/kota***	**Pelaksanaan pemberdayaan koperasi**	**6**	***kecamatan***	***566.617.000***		***43.695.074***	***1***	**18.149.352**					**1,0**	**61.844.426**	**16,7**	**10,91**
2.17.006. 2.01.001	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	60	Unit Usaha	566.617.000		43.695.074		**18.149.352**					-	**61.844.426**	**0,0**	**10,91**
	Sasaran : Meningkatnya skala usaha mikro menjadi usaha kecil	Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil	0,05	**%**				0,01	-					**0,01**	-	**20,0**	

2.17.007	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Peningkatan jumlah UMKM yang diberdayakan**	**5**	**%**	**522.680.000**		**66.429.550**	**1**	**38.426.000**					**1,0**	**104.855.550**	**20,0**	**20,06**
2.17.007.2.01	***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan***	***jumlah UMKM yang diberdayakan***	**50**	***orang***	***522.680.000***	***20***	***66.429.550***	***15***	**38.426.000**					**35,0**	**104.855.550**	**70,0**	**20,06**
2.17.007.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	3	orang	50.000.000	1		1	**15.540.000**					**2,0**	**15.540.000**	**66,7**	**31,08**
2.17.007.2.01.003	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	30	unit usaha	472.680.000	30	66.429.550	30	**22.886.000**					**60,0**	**89.315.550**	**200,0**	**18,90**
2.17.008	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Peningkatan Jumlah UMKM yang naik kelas**	**0,05**	**%**	**3.584.980.000**		**88.651.820**	**0,01**	**520.782.124**					**0,01**	**609.433.944**	**20,0**	**17,00**
2.17.008.2.01	***Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil***	***Jumlah UMKM yang dikembangkan menjadi usaha kecil***	**50**	***umkm***	***3.584.980.000***		***88.651.820***	***20***	**520.782.124**					**20,0**	**609.433.944**	**40,0**	**17,00**
2.17.008.2.01.001	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50	unit usaha	3.584.980.000	56	88.651.820	190	**520.782.124**					**246,0**	**609.433.944**	**492,0**	**17,00**
	Sasaran : Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	Nilai pdrb sektor perdagangan	2.405,5	Miliar					-					-	-	**0,0**	
3.30.002	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Jumlah Rekomendasi Perizinan yang dikeluarkan**	**50**	**Rekomendasi**	**210.000.000**	**3**	**43.397.193**	**3**	**47.282.949**					**6,0**	**90.680.142**	**12,0**	**43,18**

3.30.002. 2.01	***Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan***	***Persentase rekomendasi izin yang dikeluarkan***	***2***	***%***	***210.000.000***		***43.397.193***	***0,5***	**47.282.949**					**0,5**	**90.680.142**	**25,0**	**43,18**
3.30.002. 2.01.001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	dokumen	210.000.000		43.397.193	1	**47.282.949**					**1,0**	**90.680.142**	**50,0**	**43,18**
3.30.003	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase sarana distribusi dan fasilitas yang dibangun / rehab**	**4**	**persen**	**10.489.859.720**		**1.425.505.110**	**1**	**1.961.515.405**					**1,0**	**3.387.020.515**	**25,0**	**32,29**
3.30.003. 2.01	***Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan***	***Jumlah Sarana distribusi yang dibangun***	***5***	***pasar rakyat***	***1.874.712.000***		***90.969.046***		**34.019.300**					**-**	**124.988.346**	**0,0**	**6,67**
3.30.003. 2.01.001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun	5	unit	1.874.712.000		90.969.046		**34.019.300**					**-**	**124.988.346**	**0,0**	**6,67**
3.30.003. 2.02	***Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya***	***Jumlah sarana distrubusi yang terbina***	***5***	***pasar rakyat***	***8.615.147.720***		***1.334.536.064***	***1***	**1.927.496.105**					**1,0**	**3.262.032.169**	**20,0**	**37,86**
3.30.003. 2.02.002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	dokumen	8.615.147.720	3	1.334.536.064	3	**1.927.496.105**					**6,0**	**3.262.032.169**	**50,0**	**37,86**
3.30.004	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil**	**60**	**persen**	**497.378.000**	**10**	**120.721.773**	**10**	**95.309.420**					**20,0**	**216.031.193**	**33,3**	**43,43**
3.30.004. 2.02	***Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota***	***Terjaminnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan penting ditingkat agen, pasar rakyat***	***30***	***pelaku usaha***	***368.018.000***	***5***	***77.621.840***	***5***	**75.952.620**					**10,0**	**153.574.460**	**33,3**	**41,73**

3.30.004.2.02.001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	laporan	228.030.000	3	39.381.500	3	**51.439.620**				**6,0**	90.821.120	**50,0**	**39,83**
3.30.004.2.02.002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	240	dokumen	139.988.000	60	38.240.340	60	**24.513.000**				**120,0**	62.753.340	**50,0**	**44,83**
3.30.004.2.03	***Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Terlaksananya pengawasan Pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan masyarakat***	***32***	***kios***	***129.360.000***	***6***	***43.099.933***	***6***	**19.356.800**				**12,0**	**62.456.733**	**37,5**	**48,28**
3.30.004.2.03.001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	60	dokumen	129.360.000	18	43.099.933	18	**19.356.800**				**36,0**	62.456.733	**60,0**	**48,28**
3.30.005	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase peningkatan produk lokal yang dieksport**	**20**	**persen**	**170.000.000**		**17.554.900**	**5**	**54.651.920**				**5,0**	72.206.820	**25,0**	**42,47**
3.30.005.2.01	***Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Terlaksananya promosi dan misi dagang produk eksport***	***1***	***kegiatan***	***170.000.000***		**17.554.900**		**54.651.920**				**-**	**72.206.820**	**0,0**	**42,47**
3.30.005.2.01.001	Peningkatan Citra Produk Eksport	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10	Produk	170.000.000	2	*17.554.900*	*3*	**54.651.920**				**5,0**	72.206.820	**50,0**	**42,47**
3.30.006	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase jumlah UTTP yang ditera/ tera ulang**	**100**	**persen**	**639.821.134**	**10**	**90.602.352**	**20**	**66.140.519**				**30,0**	156.742.871	**30,0**	**24,50**
3.30.006.2.01	***Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan***	***Pelaksanaan tera, tera ulang alat UTTP***	***7***	***kecamtan***	***639.821.134***		***90.602.352***	***3***	**66.140.519**				**3,0**	**156.742.871**	**42,9**	**24,50**

3.30.006. 2.01.001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	300	unit	354.821.134	100	18.665.875	230	**25.026.440**					**330,0**	43.692.315	**110,0**	**12,31**
3.30.006. 2.01.002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	250	unit	285.000.000	54	71.936.477	75	**41.114.079**					**129,0**	113.050.556	**51,6**	**39,67**
3.30.007	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Peningkatan Produk UMKM yang dipasarkan/dipromosikan**	**15**	**persen**	**608.992.000**		**16.222.800**	**5**	**51.236.166**					**5,0**	67.458.966	**33,3**	**11,08**
3.30.007. 2.01	***Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri***	***Jumlah kegiatan promosi yang diikuti***	***2***	***kali***	***608.992.000***		***16.222.800***		**51.236.166**					**-**	**67.458.966**	**0,0**	**11,08**
3.30.007. 2.01.001	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10	umkm	608.992.000		16.222.800	1	**51.236.166**					**1,0**	67.458.966	**10,0**	**11,08**
	Sasaran : Persentase Pertumbuhan produksi industri berbasis pertanian	Persentase Pertumbuhan industri baru	5,5	%					-					**-**		**0,0**	
3.31.002	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pertumbuhan produksi industri berbasis pertanian**	2,4	**%**	**5.148.925.000**	**0,4**	**79.839.029**	**1**	**270.886.253**					**1,4**	350.725.282	**58,3**	**6,81**
3.31.002. 2.01	***Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota***	***Jumlah Pertumbuhan IKM Baru***	**2**	**ikm**	***5.148.925.000***	***5***	***79.839.029***	***5***	**270.886.253**					**10,0**	**350.725.282**	**500,0**	**6,81**
3.31.002. 2.01.004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	dokumen	3.208.925.000	0	47.508.393	1	**187.867.200**					**1,0**	235.375.593	**100,0**	**7,34**

3.31.002.2.01.005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10	dokumen	300.000.000	0		1	**10.016.603**					**1,0**	10.016.603	**10,0**	**3,34**
3.31.002.2.01.006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5	dokumen	1.640.000.000	0	32.330.636	1	**73.002.450**					**1,0**	105.333.086	**20,0**	**6,42**
3.31.003	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemutahiran data IKM**	**55**	**%**	**100.800.000**	**10**	**15.353.000**	**12**	**25.979.000**					**22,0**	41.332.000	**40,0**	**41,00**
3.31.003.2.01	***Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota***	***jumlah IKM yang difasilitasi perizinannya***	***5***	***ikm***	***100.800.000***	***1***	***15.353.000***	***2***	**25.979.000**					**3,0**	**41.332.000**	**60,0**	**41,00**
3.31.003.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	5	dokumen	100.800.000	1	15.353.000	2	**25.979.000**					**3,0**	41.332.000	**60,0**	**41,00**

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi Renja Tahun 2024 Semester II dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 32,39%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.138.530.101 (sebelas milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu seratus satu rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 34.393.494.963 (tiga puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga) atau sebesar 32,39%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser sebesar 34,91% dengan predikat kinerja Sangat Rendah penentuan peringkat disesuaikan skala pada:

Tabel T-E.1 PMDN

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJ
(1)	91% ≤	Sangat tinggi
(2)	76%	Tinggi
(3)	66%	Sedang
(4)	51%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 5 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 0 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 15 indikator capaian kinerja 0%-50% = 10 indikator

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindagkop dan UKM

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Paser, maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melapor.k.an pelaksanaan. kebijakan da1am penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusun-an rencana kerja;

b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;

c. pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai d-engan rencana kerja yang telah - ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;

e. penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;

f. perumusan kebijakan di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Perindustrian, Perdagangan-dan Koperasi, Usaha Kecil -dan Menengah;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

l. pnyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas

m. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan;

n. pengoordinasian penyusunan rencana Fungsional dan pelaksana pada Dinas;

o. pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;

p. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;

q. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku - dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

r. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser adalah:

1. Pembinaan dan pengembangan industri
2. Pembinaan dan pengembangan perdagangan
3. Pembinaan kepada koperasi dan UMKM

Upaya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.2

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN
1	Meningkatnya penerimaan PAD sector retribusi Pasar	Persentase Penerimaan Retribusi Pasar	Jumlah Penerimaan / Target Penerimaan x 100%
2	Meningkatnya Koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif / Jumlah seluru koperasi x 100%
3	Meningkatnya kwalitas skala usaha UKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil / Jumlah usaha mikro x 100%
4	Meningkatnya kwalitas pertumbuhan industry berbasis pertanian	Persentasi Pertumbuhanindustri berbasis pertanian	Jumlah Industru tahun n – Jumlah Industri -n / Jumlah Industri -n x 100%

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel di bawah ini

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Paser
sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	Target Kinerja					Realisasi	Capaian
			2022	2023	2024	2025	2026	Triwulan II 2024	
			n-2	n-1	n	n+1	n+2	n	n
	Tujuan : Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing Sasaran :	Laju pertumbuhan sektor perdagangan			6,4%	6,5%	6,6%		
1	Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Pasar	Persentase peningkatan penerimaan PAD Retribusi Pasar	5%	5%					
	Meningkatnya pdrb sektor perdagangan	Nilai pdrb sektor perdagangan			2.405,50	2.415,7	2.431,1	2.059	85,6
2	Meningkatkan kwalitas usaha dan kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	59%	62%	61,50%	61,50%	62%	17,50%	28,5
3	Meningkatkan kwalitas skala usaha UKM	Persentase peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,02%	40,0
4	Meningkatkan kwalitas Pertumbuhan sektor Industri berbasis pertanian	Persentase pertumbuhan industri berbasis pertanian	2,40%	2,40%					
		Persentase Pertumbuhan industri baru			5,5%	6%	6%	2%	36,36

Berdasarkan Tabel 2.3 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “ Laju pertumbuhan sektor perdagangan”, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0 dari target sebesar 6,4% dengan capaian kinerja sebesar 0 % dikarenakan perhitungan dilakukan diawal tahun depan oleh BPS kabupaten Paser ;

b. 1. Sasaran “Meningkatnya pdrb sektor perdagangan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai pdrb sektor perdagangan”, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 2.059 dari target sebesar 2.405,50 dengan capaian kinerja sebesar 85,6 %

2. Sasaran “Meningkatkan kwalitas usaha dan kelembagaan koperasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase koperasi aktif”, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 17,50% dari target sebesar 61,50% dengan capaian kinerja sebesar 28,5 %

3. Sasaran “Meningkatkan kwalitas skala usaha UKM” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil”, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0,02% dari target sebesar 0,05% dengan capaian kinerja sebesar 40%

4. Sasaran “Meningkatkan kwalitas Pertumbuhan sektor Industri berbasis pertanian” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Pertumbuhan industri baru”, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 2% dari target sebesar 5,5% dengan capaian kinerja sebesar 36,36%

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja (nama OPD) Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
2. Juknis pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang terlambat
3. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
4. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat
5. Pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Sekretariat perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI		Renja 2024	Renja P 2024
Meningkatnya pdrb sektor perdagangan	Nilai pdrb sektor perdagangan	Jumlah Penerimaan / Target Penerimaan	x100	2.405,50	2.405,50
Meningkatkan kwalitas usaha dan kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif / Jumlah seluru koperasi	x100	61,50%	61,50%
Meningkatkan kwalitas skala usaha UKM	Persentase peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil / Jumlah usaha mikro	x100	0,05%	0,05%
Meningkatkan kwalitas Pertumbuhan sektor Industri berbasis pertanian	Persentase Pertumbuhan industri baru	Jumlah Industru tahun n – Jumlah Industri -n / Jumlah Industri -n	x100	5,50%	5,50%

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu "PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT".

Sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu "PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UNTUK KABUPATEN PASER YANG SEJAHTERA"

Tema tersebut merupakan arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan pada RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 danmerupakan strategi keempat dalam mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Paser. Tema RKPD Tahun 2025 merupakan arah kebijakan pembangunan sebagai tindak lanjut dari tema sebelumnya, dimana evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya menunjukkan perlu adanya peningkatan daya saing SDM untuk Kabupaten Paser yang sejahtera. Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Merata, Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Perempuan serta Pemuda.
2. Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal.
3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik.
4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur

7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke 1 yaitu “Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian” dan sasaran ke 2 yaitu “Berkembangnya sektor kepariwisataan”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2
Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser

Rancangan Akhir Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target kinerja**	**Pagu Indikatif**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab.Paser**	**Persentase keterpenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah**	**74%**	**11.690.059.109,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab.Paser**	**Persentase keterpenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah**	**74%**	**11.590.059.109,00**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab.Paser**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan**	**94%**	**87.677.800,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab.Paser**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan**	**94%**	**87.677.800,00**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	27.234.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	27.234.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	11.127.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	11.127.800,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	9.244.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	9.244.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	40.072.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	143.722.000,00	

Rancangan Akhir Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target kinerja**	**Pagu Indikatif**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab.Paser**	**Persentase pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**90 %**	**11.180.671.349,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab.Paser**	**Persentase pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**90 %**	**11.080.671.349,00**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	10.326.442.890,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	10.326.442.890,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	854.228.459,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	971.066.459,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab.Paser**	**persentase pelayanan administrasi umum SKPD**	**90 %**	**359.887.960,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab.Paser**	**persentase pelayanan administrasi umum SKPD**	**90 %**	**359.887.960,00**	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	72.200.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.222.900,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket	53.389.960,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket	53.389.960,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	31.884.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	31.884.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	600 Dokumen	4.060.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	600 Dokumen	4.060.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	198.354.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	348.554.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab.Paser**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**4.900.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Paser**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**4.900.000,00**	

Rancangan Akhir Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target kinerja**	**Pagu Indikatif**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2.400.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2.400.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab.Paser**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD dan peralatan**	**100%**	**56.922.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Paser**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD dan peralatan**	**100%**	**56.922.000,00**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	53.392.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	53.392.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.530.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.530.000,00	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		**Persentase Koperasi Sehat**	**65 %**	**63.383.000,00**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		**Persentase Koperasi Sehat**	**65 %**	**63.383.000,00**	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Kab.Paser**	**Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT**	**54%**	**63.383.000,00**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab.Paser**	**Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT**	**54%**	**63.383.000,00**	
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	10 Unit Usaha	63.383.000,00	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	10 Unit Usaha	63.383.000,00	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Kab.Paser**	**Persentase peningkatan jumlah koperasi maju**	**12 %**	**200.000.000,00**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Kab.Paser**	**Persentase peningkatan jumlah koperasi maju**	**12 %**	**200.000.000,00**	

Rancangan Akhir Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target kinerja**	**Pagu Indikatif**	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab.Paser**	**Jumlah pelatihan yang dilaksanakan**	**2 kali**	**200.000.000,00**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Paser**	**Jumlah pelatihan yang dilaksanakan**	**2 kali**	**200.000.000,00**	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab.Paser	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	200.000.000,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab.Paser	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	486.917.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Kab.Paser**	**Rata-Rata Omzet per Koperasi**	**260 Juta Rp**	**566.617.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Kab.Paser**	**Rata-Rata Omzet per Koperasi**	**260 Juta Rp**	**566.617.000,00**	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab.Paser**	**Pelaksanaan pemberdayaan koperasi**	**6 kec**	**566.617.000,00**	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Paser**	**Pelaksanaan pemberdayaan koperasi**	**6 kec**	**566.617.000,00**	
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	60 Unit Usaha	566.617.000,00	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	60 Unit Usaha	566.617.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Kab.Paser**	**Persentase ukm yang diberdayakan**	**5 %**	**522.680.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Kab.Paser**	**Persentase ukm yang diberdayakan**	**5 %**	**522.680.000,00**	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Kab.Paser**	**Persentase Peningkatan jumlah UMKM yang diberdayakan**	**50 ukm**	**522.680.000,00**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Kab.Paser**	**Persentase Peningkatan jumlah UMKM yang diberdayakan**	**50 ukm**	**522.680.000,00**	
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab.Paser	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	3 Orang	50.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab.Paser	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	3 Orang	50.000.000,00	

Rancangan Akhir Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target kinerja**	**Pagu Indikatif**	
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kab.Paser	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	30 Unit Usaha	472.680.000,00	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kab.Paser	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	30 Unit Usaha	472.680.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Kab.Paser**	**Persentasi usaha mikro menjadi usaha kecil**	**0,05 %**	**4.082.980.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Kab.Paser**	**Persentasi usaha mikro menjadi usaha kecil**	**0,05 %**	**3.584.980.000,00**	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Kab.Paser**	**Jumlah usaha mikro yang dikembangkan menjadi usaha kecil**	**50 ukm**	**4.082.980.000,00**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Kab.Paser**	**Jumlah usaha mikro yang dikembangkan menjadi usaha kecil**	**50 ukm**	**3.584.980.000,00**	
Pengembangan Usaha Mikro	Kab.Paser	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	4.082.980.000,00	Pengembangan Usaha Mikro	Kab.Paser	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	4.615.520.600,00	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Kab.Paser**	**Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan**	**50 rekom**	**210.000.000,00**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Kab.Paser**	**Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan**	**50 rekom**	**210.000.000,00**	
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	**Kab.Paser**	**persentase perizinan yang dikeluarkan**	**2 %**	**210.000.000,00**	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Kab.Paser**	**persentase perizinan yang dikeluarkan**	**2 %**	**210.000.000,00**	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab.Paser	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	210.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab.Paser	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	543.404.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Kab.Paser**	**Persentase sarana distribusi dan fasilitasi yang dibangun / direhab**	**4%**	**10.489.859.720,00**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Kab.Paser**	**Persentase sarana distribusi dan fasilitasi yang dibangun / direhab**	**4%**	**15.216.373.820,00**	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Kab.Paser**	**Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/direhap**	**9 unit**	**1.874.712.000,00**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Kab.Paser**	**Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/direhap**	**9 unit**	**3.219.145.600,00**	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Paser	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit	1.874.712.000,00	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Paser	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit	3.219.145.600,00	

Rancangan Akhir Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target kinerja**	**Pagu Indikatif**	
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Kab.Paser**	**terlaksananya pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**	**5 pasar**	**8.615.147.720,00**	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Kab.Paser**	**terlaksananya pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**	**5 pasar**	**11.997.228.220,00**	
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	8.615.147.720,00	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	11.997.228.220,00	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Kab.Paser**	**Persentase harga kebutuhan pokok dan bahan penting yang stabil**	**60%**	**497.378.000,00**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Kab.Paser**	**Persentase harga kebutuhan pokok dan bahan penting yang stabil**	**60%**	**1.017.978.200,00**	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Kab.Paser**	**Terjaminnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan penting ditingkat agen, pasar rakyat**	**30 Pelaku Usaha**	**368.018.000,00**	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Kab.Paser**	**Terjaminnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan penting ditingkat agen, pasar rakyat**	**30 Pelaku Usaha**	**888.618.200,00**	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab.Paser	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	228.030.000,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab.Paser	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	581.533.200,00	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab.Paser	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	139.988.000,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab.Paser	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	307.085.000,00	

Rancangan Akhir Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target kinerja**	**Pagu Indikatif**	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab.Paser**	**terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan masyarakat**	**32 kios**	**129.360.000,00**	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Paser**	**terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan masyarakat**	**32 kios**	**129.360.000,00**	
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab.Paser	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	60 Dokumen	129.360.000,00	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab.Paser	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	60 Dokumen	129.360.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Kab.Paser**	**Persentase peningkatan produk lokal bahan eksport**	**20%**	**170.000.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Kab.Paser**	**Persentase peningkatan produk lokal bahan eksport**	**20%**	**363.799.800,00**	
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kab.Paser**	**Terlaksananya promosi dan missi dagang produk ekspor**	**1 Kegiatan**	**170.000.000,00**	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Paser**	**Terlaksananya promosi dan missi dagang produk ekspor**	**1 Kegiatan**	**363.799.800,00**	
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab.Paser	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	170.000.000,00	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab.Paser	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	363.799.800,00	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Kab.Paser**	**Persentase alat uttp yang ditera tera ulang**	**100%**	**639.821.134,00**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Kab.Paser**	**Persentase alat uttp yang ditera tera ulang**	**100%**	**989.385.034,00**	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Kab.Paser**	**Jumlah kecamatan yang dilaksanakan tera ,tera ulang**	**6 kec**	**639.821.134,00**	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Kab.Paser**	**Jumlah kecamatan yang dilaksanakan tera ,tera ulang**	**6 kec**	**989.385.034,00**	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab.Paser	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	300 Unit	354.821.134,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab.Paser	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	300 Unit	531.173.134,00	
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab.Paser	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	250 Orang	285.000.000,00	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab.Paser	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	250 Orang	458.211.900,00	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Kab.Paser**	**persentase produk umkm yang dipromosikan**	**15%**	**608.992.000,00**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Kab.Paser**	**persentase produk umkm yang dipromosikan**	**15%**	**1.138.466.577,00**	

Rancangan Akhir Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target kinerja**	**Pagu Indikatif**	
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Kab.Paser**	**Meningkatnya pelaksanaan promosi dan penggunaaan produk lokal**	**2 Kegiatan**	**608.992.000,00**	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Kab.Paser**	**Meningkatnya pelaksanaan promosi dan penggunaaan produk lokal**	**2 Kegiatan**	**1.138.466.577,00**	
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Paser	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	608.992.000,00	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Paser	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	1.138.466.577,00	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Kab.Paser**	**Persentase pertumbuhan industri berbasis pertanian**	**2,4% %**	**6.148.925.000,00**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Kab.Paser**	**Persentase pertumbuhan industri berbasis pertanian**	**2,4% %**	**7.908.040.839,00**	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Kab.Paser**	**Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan industri**	**2 Dokumen**	**6.148.925.000,00**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Kab.Paser**	**Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan industri**	**2 Dokumen**	**7.908.040.839,00**	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab.Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	3.208.925.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab.Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	5.053.018.170,00	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab.Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1.300.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab.Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	505.200.000,00	
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab.Paser	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1.640.000.000,00	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab.Paser	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	2.349.822.669,00	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	**Kab.Paser**	**Persentase pemutahiran data ikm**	**55%**	**100.800.000,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Kab.Paser**	**Persentase pemutahiran data ikm**	**55%**	**400.800.000,00**	

Rancangan Akhir Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target kinerja**	**Pagu Indikatif**	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab.Paser**	**Jumlah industri yang difasilitasi perizinannya**	**5IKM**	**100.800.000,00**	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab.Paser**	**Jumlah industri yang difasilitasi perizinannya**	**5IKM**	**400.800.000,00**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Paser	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	5 Dokumen	100.800.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Paser	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	5 Dokumen	400.800.000,00	

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. saran dan pendapat DPRD berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Pada Perubahan Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2024 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

Tabel. 3.3

Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 pada

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target kinerja	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah /Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target kinerja	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	-4	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian Perdagangan KOperasi dan UKM Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD

Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	17
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan kebutuhan penunjang pemerintah daerah**	**77 %**	**74%**	**10.532.656.529,00**	**11.657.259.109,00**	**11.690.059.109,00**	**Kab.Paser**	
3	**31**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan**	**100 %**	**94%**	**87.677.800,00**	**87.677.800,00**	**87.677.800,00**	**Kab.Paser**	Pegawai Diperindagkop
3	31	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	27.234.000,00	27.234.000,00	Kab.Paser	Pegawai Diperindagkop
3	31	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	11.127.800,00	11.127.800,00	Kab.Paser	Pegawai Diperindagkop
3	31	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0,00	9.244.000,00	9.244.000,00	Kab.Paser	Pegawai Diperindagkop
3	31	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	0,00	40.072.000,00	40.072.000,00	Kab.Paser	Pegawai Diperindagkop

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	17
3	**31**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**90 %**	**90 %**	**10.045.268.769,00**	**11.147.871.349,00**	**11.180.671.349,00**	**Kab.Paser**	**Pegawai Diperindagkop**
3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	0,00	10.226.442.890,00	10.326.442.890,00	Kab.Paser	Pegawai Diperindagkop
3	31	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	921.428.459,00	854.228.459,00	Kab.Paser	Pegawai Diperindagkop
3	**31**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase pelayanan administrasi umum SKPD**	**90 %**	**90 %**	**337.887.960,00**	**359.887.960,00**	**359.887.960,00**	**Kab.Paser**	**Pegawai Diperindagkop**
3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	72.200.000,00	72.200.000,00	Kab.Paser	Pegawai Diperindagkop
3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket	23 Paket	0,00	53.389.960,00	53.389.960,00	Kab.Paser	Pegawai Diperindagkop
3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	0,00	31.884.000,00	31.884.000,00	Kab.Paser	Pegawai Diperindagkop
3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	600 Dokumen	600 Dokumen	0,00	4.060.000,00	4.060.000,00	Kab.Paser	Pegawai Diperindagkop
3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	66 Laporan	0,00	198.354.000,00	198.354.000,00	Kab.Paser	Pegawai Diperindagkop
3	**31**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**90 %**	**100%**	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**Kab.Paser**	**Pegawai Diperindagkop**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	17
3	31	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	0	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab.Paser	Pegawai Diperindagkop
3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	0	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab.Paser	Pegawai Diperindagkop
3	**31**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD dan peralatan**	**90 %**	**100%**	**0**	**56.922.000,00**	**56.922.000,00**	**Kab.Paser**	**Pegawai Diperindagkop**
3	31	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	0	53.392.000,00	53.392.000,00	Kab.Paser	Pegawai Diperindagkop
3	31	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	0	3.530.000,00	3.530.000,00	Kab.Paser	Pegawai Diperindagkop
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Sehat**	**65 %**	**65 %**	**63.383.000,00**	**63.383.000,00**	**63.383.000,00**		
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT**	**25 %**	**54%**	**63.383.000,00**	**63.383.000,00**	**63.383.000,00**	**Kab.Paser**	**Koperasi**
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	63.383.000,00	63.383.000,00	63.383.000,00	Kab.Paser	Koperasi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	17
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase peningkatan jumlah koperasi maju**	**12 %**	**12 %**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**Kab.Paser**	
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelatihan yang dilaksanakan**	**2 kali**	**2 kali**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**Kab.Paser**	**Anggota Koperasi**
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	60 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab.Paser	Anggota Koperasi
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Rata-Rata Omzet per Koperasi**	**260 Juta Rp**	**260 Juta Rp**	**46.617.000,00**	**566.617.000,00**	**566.617.000,00**	**Kab.Paser**	
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan pemberdayaan koperasi**	**6 kec**	**6 kec**	**46.617.000,00**	**566.617.000,00**	**566.617.000,00**	**Kab.Paser**	**Koperasi**
2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	46.617.000,00	566.617.000,00	566.617.000,00	Kab.Paser	Koperasi
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase ukm yang diberdayakan**	**5 %**	**5 %**	**372.680.000,00**	**522.680.000,00**	**522.680.000,00**	**Kab.Paser**	
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase Peningkatan jumlah UMKM yang diberdayakan**	**50 ukm**	**50 ukm**	**372.680.000,00**	**522.680.000,00**	**522.680.000,00**	**Kab.Paser**	**UMKM**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	17
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	3 Orang	3 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab.Paser	UMKM
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	322.680.000,00	472.680.000,00	472.680.000,00	Kab.Paser	UMKM
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentasi usaha mikro menjadi usaha kecil**	**0,05 %**	**0,05 %**	**2.250.000.000,00**	**3.734.180.000,00**	**4.082.980.000,00**	**Kab.Paser**	
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah usaha mikro yang dikembangkan menjadi usaha kecil**	**50 ukm**	**50 ukm**	**2.250.000.000,00**	**3.734.180.000,00**	**4.082.980.000,00**	**Kab.Paser**	**UMKM**
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	2.250.000.000,00	3.734.180.000,00	4.082.980.000,00	Kab.Paser	UMKM
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan**	**50 rekom**	**50 rekom**	**35.000.000,00**	**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	**Kab.Paser**	
3	**30**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**persentase perizinan yang dikeluarkan**	**2 %**	**2 %**	**35.000.000,00**	**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	**Kab.Paser**	**Pelaku usaha**
3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kab.Paser	Pelaku usaha

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	17
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase sarana distribusi dan fasilitasi yang dibangun / direhab**	**7 %**	**4%**	**9.059.147.720,00**	**10.523.459.720,00**	**10.489.859.720,00**	**Kab.Paser**	
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/direhap**	**9 unit**	**9 unit**	**1.515.000.000,00**	**1.874.712.000,00**	**1.874.712.000,00**	**Kab.Paser**	**pasar rakyat**
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	8 Unit	9 Unit	1.515.000.000,00	1.874.712.000,00	1.874.712.000,00	Kab.Paser	pasar rakyat
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**terlaksananya pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**	**5 pasar**	**5 pasar**	**7.544.147.720,00**	**8.648.747.720,00**	**8.615.147.720,00**	**Kab.Paser**	**pasar rakyat**
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	7.544.147.720,00	8.648.747.720,00	8.615.147.720,00	Kab.Paser	pasar rakyat
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase harga kebutuhan pokok dan bahan penting yang stabil**	**50 %**	**60%**	**268.030.000,00**	**497.378.000,00**	**497.378.000,00**	**Kab.Paser**	
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Terjaminnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan penting ditingkat agen, pasar rakyat**	**15 Pelaku usaha**	**30 Pelaku Usaha**	**253.030.000,00**	**368.018.000,00**	**368.018.000,00**	**Kab.Paser**	**Pelaku usaha**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	17
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	228.030.000,00	228.030.000,00	228.030.000,00	Kab.Paser	pasar rakyat
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	139.988.000,00	139.988.000,00	Kab.Paser	pasar rakyat
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan masyarakat**	**32 kios**	**32 kios**	**15.000.000,00**	**129.360.000,00**	**129.360.000,00**	**Kab.Paser**	**Pelaku usaha**
3	30	04	2.03	0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	60 Dokumen	60 Dokumen	15.000.000,00	129.360.000,00	129.360.000,00	Kab.Paser	Pelaku usaha
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase peningkatan produk lokal bahan eksport**	**30 %**	**20%**	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	**Kab.Paser**	
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya promosi dan missi dagang produk ekspor**	**1 kali**	**1 Kegiatan**	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	**Kab.Paser**	**Pelaku usaha**
3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	10 Produk	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	Kab.Paser	Pelaku usaha

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	17
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat uttp yang ditera tera ulang**	**27 %**	**100%**	**539.821.134,00**	**639.821.134,00**	**639.821.134,00**	**Kab.Paser**	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah kecamatan yang dilaksanakan tera ,tera ulang**	**6 kec**	**6 kec**	**539.821.134,00**	**639.821.134,00**	**639.821.134,00**	**Kab.Paser**	**Pelaku usaha**
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	300 Unit	300 Unit	354.821.134,00	354.821.134,00	354.821.134,00	Kab.Paser	Pelaku usaha
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	250 Orang	250 Orang	185.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	Kab.Paser	Pelaku usaha
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**persentase produk umkm yang dipromosikan**	**60 %**	**15%**	**408.992.000,00**	**608.992.000,00**	**608.992.000,00**	**Kab.Paser**	
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Meningkatnya pelaksanaan promosi dan penggunaaan produk lokal**	**2 kali**	**2 Kegiatan**	**408.992.000,00**	**608.992.000,00**	**608.992.000,00**	**Kab.Paser**	**UMKM**
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	10 UMKM	408.992.000,00	608.992.000,00	608.992.000,00	Kab.Paser	UMKM
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pertumbuhan industri berbasis pertanian**	**2,4% %**	**2,4% %**	**4.718.925.000,00**	**5.388.925.000,00**	**6.148.925.000,00**	**Kab.Paser**	
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan industri**	**20 ikm**	**2 Dokumen**	**4.718.925.000,00**	**5.388.925.000,00**	**6.148.925.000,00**	**Kab.Paser**	**IKM**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	17
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	2.778.925.000,00	3.248.925.000,00	3.208.925.000,00	Kab.Paser	IKM
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	1.300.000.000,00	Kab.Paser	IKM
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1.440.000.000,00	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	Kab.Paser	IKM
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase pemutahiran data ikm**	**50 %**	**55%**	**100.800.000,00**	**100.800.000,00**	**100.800.000,00**	**Kab.Paser**	
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah industri yang difasilitasi perizinannya**	**-**	**5IKM**	**100.800.000,00**	**100.800.000,00**	**100.800.000,00**	**Kab.Paser**	**Pelaku Industri**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	17
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	5 Dokumen	5 Dokumen	100.800.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00	Kab.Paser	Pelaku Industri

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
NAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI & UKM
pleks Perkantoran KM 4,5 Gedung I Lt 2 Kav 2 Fax. (0543) 21167
TANA PASER

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PASER

NOMOR : 188.4/25/Sek.1/ V /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

3. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2022tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Kabupaten Paser sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Kabupaten Paser;

b. Mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Kabupaten Paser;

c. Melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Kabupaten Paser;

d. Merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser;

e. Melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser tepat waktu;

g. Melaporkan hasilnya pada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 13 Mei 2024

Kepala Dinas

YUSUF. SP. MP
NIP. 19720421 199803 1 011

Tembusan Keputusan ini disampaikankepada Yth.

1. Bupati Paser di Tana Paser (sebagai laporan).
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASER

NOMOR : 188.4/ 25 /Sek.1/ V /2024

TANGGAL: 13 Mei 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PASER TAHUN 2024

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1.	Yusuf SP. MP	Kepala Disperindagkop &UKM	Penanggung Jawab
2.	Syamsul Rizal, SP.M.Si	Sekretaris	Ketua
3.	Lina Wati, SE	Perencana Pertama	Sekretaris
4.	Suherman, S.Sos	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
5.	Eric Apriantour, SE	Kepala Bidang UKM	Anggota
6.	Maristen L. Sijabat SE	Kepala Bidang Industri	Anggota
7.	H. Zailani SE. MM	Kepala Bidang Pengawasan	Anggota
8.	Haryono	Pelaksana	Anggota
9.	Abdul Hafidz	Pelaksana	Anggota
10.	Rasyadi Andzar	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 13 Mei 2024

Kepala Dinas

YUSUF. SP. MP
NIP. 19720421 199803 1 011

KABUPATEN PASER

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RANHIR RENJA) PERUBAHAN 2024

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rancangan akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Perubahan PD ini adalah merupakan dokumen perubahan perencanaan PD atas Renja PD yang telah dibuat sebelumnya untuk periode 4 (Empat) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perubahan PD tetap mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD dan Renja PD sebelumnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser sebagai unit kerja yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawabnya diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan tugas yang demikian penting, maka diperlukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, maka disusunlah Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser sebagai dokumen perencanaan pembangunan PD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra PD yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan.....5

1.4 Sistematika Penulisan.....5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN BERJALAN 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Triwulan II Tahun Berkenaan 8

2.2 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024.....15

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 18

3.1 Tujuan dan Sasaran 17

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 21

3.3 Rencana Kerja Dan Pendanaan Daeran Tahun 2024 24

BAB IV PENUTUP 36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor. Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rancangan akhir Renja Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana

program dan kegiatan prioritas daerah.

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Rancangan akhir Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser mengacu padakerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan akhir Renja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasi onal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal:
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser;
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Paser Nomor : Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan

Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024.

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, target tahun 2024

3.2 Review Terhadap Rancangan akhir Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024.

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rancangan akhir Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan

target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMERINTAH KABUPATEN PASER
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

Sasaran SKPD Tahunan : Anggaran 2024

-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d		Ket
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 7 + 10		11=10/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		1				1,272,382,719,814.00		1,151,204,292,023.00		1,009,459,461,630.00									
		1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1,272,382,719,814.00		1,151,204,292,023.00		1,009,459,461,630.00									
1		1:03:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat ()	100	17,787,233,836.00	100	**15,971,105,046.00**	100	**21,670,704,088.00**									
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran dari total anggaran yang dialokasikan untuk setiap program atau	100	69,596,000.00	100%	64,903,964.00	100	110,000,000.00									
		1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	10	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	0	-		-					
		1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	10	9,966,000.00	5	8,016,000.00	5	10,000,000.00	0	-		-					
		1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	10	9,966,000.00	5	9,696,000.00	5	10,000,000.00	0	-		-					
		1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	9,994,000.00	5	9,474,000.00	5	10,000,000.00	0	-		-					
		1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	10,000,000.00	5	9,780,000.00	5	10,000,000.00	1	8,624,246.00		8,624,246.00					
		1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	10,000,000.00	5	9,877,482.00	5	20,000,000.00	0	-		-					
		1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	9,670,000.00	5	8,060,482.00	5	40,000,000.00	1	8,615,800.00		8,615,800.00					
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji pegawai yang dibayarkan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	100	10,495,843,403.00	100%	9,310,315,834.00	100	11,733,062,978.00									
		1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70	9,835,741,003.00	14	8,653,899,606.00	14	11,055,093,330.00	4	3,347,762,828.00		4,944,422,566.00					
		1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	17	608,059,600.00	14	605,919,600.00	14	656,000,000.00	4	175,288,500.00		295,581,904.00					
		1.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	119	52,042,800.00	12	50,496,628.00	12	21,969,648.00	3	4,343,760.00		8,660,304.00					
		1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase rekonsiliasi barang yang dilakukan dengan keteraturan dan kelengkapan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	100	51,158,800.00	100%	50,478,800.00	100	10,000,000.00									
		1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	51,158,800.00	2	50,478,800.00	1	10,000,000.00	0	-		-					

		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan data pada profil pegawai yang mencakup informasi pribadi, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan	100	60,000,000.00	100%	59,263,955.00	100	20,000,000.00										
		1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	60,000,000.00	1	59,263,955.00	1	20,000,000.00	0	8,135,600.00		14,380,400.00						
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persntase Peralatan dan perlengkapan kantor, RAKOR sesuai jadwal yang ditetapkan	100	379,998,800.00	100%	351,922,600.00	100	280,000,000.00										
		1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1169.17	64,998,800.00	1168	37,135,400.00	1168	50,000,000.00	584	30,371,400.00		30,371,400.00						
		1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	112.88	15,000,000.00	56440	15,000,000.00	56496.44	15,000,000.00	28248	5,000,000.00		5,000,000.00						
		1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	398	300,000,000.00	198	299,787,200.00	198	215,000,000.00	49	46,091,150.00		93,484,355.00						
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang yang berhasil terpenuhi melalui proses pengadaan	0	83,251,000.00	0	81,962,900.00	100	416,619,200.00										
		1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	83,251,000.00	10	81,962,900.00	10	416,619,200.00	0	-		-						
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase target layanan yang berhasil dicapai oleh penyedia jasa penunjang pemerintahan daerah (OPD)	809	4,449,999,573.00	100%	4,009,746,893.00	409	6,325,210,950.00										
		1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	4,449,999,573.00	12	4,009,746,893.00	12	6,325,210,950.00	3	973,750,434.00		2,143,095,721.00						
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase total aset yang menjalani pemeliharaan terhadap total aset yang dimiliki oleh OPD	100	2,197,386,260.00	100%	2,042,510,100.00	100	2,775,810,960.00										
		1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	119,971,600.00	9	119,113,400.00	9	120,000,000.00	4	31,789,700.00		36,028,900.00						
		1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	9,490,000.00	10	9,300,000.00	10	0	0	-		-						
		1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Pendukiung Yang terpelihara (%)	0	2,067,924,660.00	100	1,914,096,700.00	100	2,655,810,960.00	25	239,099,800.0		388,899,800.00						
2		37259	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kawasan Sumber Daya air yang dikelola dengan baik.	43	151,959,000,401.00	94.89	**144,487,000,421.00**	30	**107,750,001,728.00**										
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Pengelolaan pemantauan kondisi fisik dan kekuatan struktur tanggul serta bangunan pengaman pantai untuk memastikan kelayakan dan kinerja yang optimal.	100	39,685,405,832.00	92.89%	34,695,912,142.00	100	34,975,001,440.00										
		1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Panjang Saluran Irigasi yang Ditingkatkan (KM)	26	10,099,986,686.00	31349.4	7,060,748,400.00	2	2,525,000,000.00	0	-		-						
		1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang dibina dan diberdayakan	-	-	-	-	1	500,000,000.00	0	-		-						
		1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstora si (KM)	40	16,370,419,521.00	39229.41	15,817,096,015.00	10	26,400,000,000.00	0	49,403,729.00		55,345,929.00						
		1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung yg dipelihara (Unit)	7	275,000,000.00	4	263,240,000.00	1	425,000,000.00	0	-		-						
		1.03.02.2.01.0116	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun	-	-	-	-	1	2,200,000,000.00	0	122,000,000.00		215,300,000.00						
		1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	7	7,200,000,000.00	12	6,937,602,500.00	10	1,925,001,440.00	0	-		-						
		1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit/m)	3	5,389,999,625.00	5	4,403,722,200.00	1/3700	1,000,000,000.00	3700	29,485,964.00		29,485,964.00						
		1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen pendukung Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	1	350,000,000.00	1	213,503,027.00	-	0	0	-		-						

		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas lahan yang tercakup oleh sistem irigasi primer dan sekunder.	100	112,273,594,569.00	95.24%	109,791,088,279.00		72,775,000,288.00									
		1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun (Dokumen)	6	350,000,000.00	2	313,756,205.00	-	0	0	-		-					
		1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	7053	61,772,843,472.00	233035.9	60,212,632,933.00	6	43,700,000,288.00		2,697,300.00		2,697,300.00					
		1.03.02.2.02.0011	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang ditingkatkan	-	-	-	-	4	4,625,000,000.00		1,460,300.00		1,460,300.00					
		1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	5100	37,520,820,181.00	164144.6	37,522,063,157.00	7	22,600,000,000.00		15,318,100.00		15,318,100.00					
		1.03.02.2.02.17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (KM)	10	9,029,930,916.00	33137.98	8,787,245,984.00	-	0		-		-					
		1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	15	3,600,000,000.00	21.84	2,955,390,000.00	1	1,850,000,000.00		2,586,100.00		2,586,100.00					
3		37624	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase capaian akses air minum layak	93	62,173,396,130.00	98.79	**58,256,098,842.00**		**98,489,082,288.00**									
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase yang terlayani oleh sistem penyediaan air minum, baik dari segi cakupan wilayah maupun jumlah rumah tangga yang terlayani.	100	62,173,396,130.00	98.79%	58,256,098,842.00		98,489,082,288.00									
		1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Yang dibangun	-	-	-	-	10	4,101,200,000.00	0	2,328,400.00		2,328,400.00					
		1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana , Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakn, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	-	-	-	-	4	3,594,882,000.00	0	17,127,900.00		17,127,900.00					
		1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan yang dibangun	-	-	-	-	100	24,790,000,288.00		57,742,186.00		92,875,336.00					
		1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat (SR)	-	-	-	-	500	66,003,000,000.00	0	183,381,799.00		255,918,449.00					
		1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani oleh Perluasan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	8050	593,706,130.00	859	591,294,700.00	-	0	0	-		-					
		1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Rumah Tangga)	235	18,211,290,000.00	1437	16,578,641,300.00	-	0	0	-		-					
		1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang Jaringan (M)	50.043,08	42,368,400,000.00	124357	40,961,552,842.00	-	0	0	-		-					
		1.03.03.2.01.20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	1	1,000,000,000.00	1	124,610,000.00	-	0	0	-		-					
4		37989	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase bangunan dan infrastruktur persampahan yang berfungsi	65	25,000,000.00	100	10,443,459.00		3,000,000,000.00									
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan infrastruktur pengelolaan persampahan, termasuk tempat pembuangan akhir, fasilitas pengolahan sampah, dan tempat penimbunan sementara.	100	25,000,000.00	100%	10,443,459.00		3,000,000,000.00									
		1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	-	-	-	-	6	3,000,000,000.00		-		-					
		1.03.04.2.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi (Unit)	1	25,000,000.00	1	10,443,459.00	-	0		-		-					

5		38355	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase capaian pengelolaan sistem air limbah	86	3,057,282,000.00	100	**3,005,564,138.00**		**2,932,000,000.00**									
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah, termasuk jaringan saluran air limbah dan instalasi pengolahan.	100	3,057,282,000.00	100%	3,005,564,138.00		2,932,000,000.00									
		1.03.06.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan di pelihara	-	-	-	-	1	232,000,000.00	0	101,949,101.00		140,949,101.00					
		1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar	-	-	-	-	100	2,700,000,000.00	0	-		-					
		1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman (Rumah Tangga)	0	57,282,000.00	5	22,242,817.00	-	0	0	-		-					
		1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik (Rumah Tangga)	2	3,000,000,000.00	14	2,983,321,321.00	-	0	0	-		-					
6		38720	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase peningkatan kapasitas sistem drainase	80	13,237,608,864.00	99.27	**7,838,298,900.00**		**36,008,800,576.00**									
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase yang diperbaiki, ditingkatkan, atau dibangun kembali, serta peningkatan	100	13,237,608,864.00	99.27%	7,838,298,900.00		36,008,800,576.00									
		1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	0	4,947,100,000.00	3708.47	5,721,124,500.00	1000	12,000,000,000.00	0	4,163,400.00		4,163,400.00					
		1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang di Tingkatkan	-	-	-	-	4	600,000,000.00	0	-		-					
		1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang diRehabilitasi	-	-	-	-	2	1,190,000,288.00	0	-		-					
		1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	-	-	-	-	10	22,218,800,288.00	0	-		-					
		1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (M)	0	4,700,000,000.00	2175.3	4,501,363,000.00	-	0	0	-		-					
		1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi (M)	0	1,144,508,864.00	909.5	1,137,970,300.00	-	0	0	-		-					
		1.03.06.2.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (M)	0	2,446,000,000.00	1171	2,198,965,600.00	-	0	0	-		-					
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	persentase sistem Pengembangan Permukiman yang berfungsi dengan baik				-		**150,000,000.00**									
		1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman dikawasan strategis daerah Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap kelancaran Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman dikawasan	-	-	-	-		150,000,000.00									
		1.03.07.2.01.0006	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Stategis Kabupaten/Kota yang terlayani jasa penyedotan lumpur Tinja	-	-	-	-	100	150,000,000.00		59,182,800.00		59,182,800.00					

7		39450	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung pemerintah yang berfungsi dengan baik	88	181,870,448,080.00	97.38	**163,344,984,393.00**		**283,328,630,650.00**									
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	persentase bangunan yang memperoleh IMB sebelum memulai konstruksi	100	181,870,448,080.00	97.38%	163,344,984,393.00		283,328,630,650.00									
		1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan dan Pelestarian dan Pembongkaran Banguan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	42	283,128,630,650.00	33	1,710,779,424.00		1,820,403,424.00						
		1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rencana Teknis pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT) Penilik dan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rencana Teknis pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT) Penilik dan	-	-	-	-	10	200,000,000.00	40	-		-					
		1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (Dokumen)	0	168,856,000.00	209	162,693,100.00	-	0				-					
		1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0	181,701,592,080.00	199	163,182,291,293.00	-	0		-		-					
8		40181	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	66	838,293,214,530.00	90.68	**749,108,624,706.00**		**541,266,157,800.00**									
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kondisi fisik jalan	100	838,293,214,530.00	90.68%	749,108,624,706.00		541,266,157,800.00									
		1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	750	1,570,139,600.00	350	1,265,821,200.00	400	520,000,000.00	100	128,024,400.00		205,304,400.00					
		1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilaksanakan Rekonstruksi Jalan (KM)	110	771,439,055,930.00	119.25	700,654,712,981.00	20	427,942,766,600.00	1457	9,983,371,953.00		10,067,531,953.00					
		1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan Yang dipelihara secara Rutin	160	2,715,000,000.00	185	2,000,284,639.00	6	5,200,000,000.00	3	5,808,300.00		5,808,300.00					
		1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan Yang di Rehabilitasi	505	11,442,511,000.00	400	8,347,562,835.00	3	5,307,353,300.00		6,687,400.00		6,687,400.00					
		1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	180	30,236,262,569.00	190.7	22,964,429,223.00	11	94,446,937,100.00		2,335,156,300.00		2,335,156,300.00					
		1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	2	14,472,008,000.00	6	10,867,812,580.00	1	562,109,400.00		115,400,000.00		154,260,000.00					
		1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (KM)	50	6,418,237,431.00	14	3,008,001,248.00	25	7,286,991,400.00		1,329,508,726.00		1,329,508,726.00					
9		40546	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga operator dan teknis/analisdi Kabupaten Paser yang bersertifikat standar nasional	376	2,141,440,000.00	92.91	**1,673,635,265.00**		**1,514,136,200.00**									
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentasi jumlah total pelatihan yang diselenggarakan dalam periode waktu tertentu	100	1,944,840,000.00	78.73%	1,480,022,504.00		978,260,000.00									
		1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang difasilitasi sertifikasi	-	-	-	-	200	345,130,000.00	10	130,661,600.00		130,661,600.00					
		1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang dilatih	-	-	-	-	100	633,130,000.00	10	296,301,094.00		310,701,094.00					
		1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	130	956,180,000.00	58	832,118,072.00	-	0	0	-		-					
		1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi (Orang)	275	988,660,000.00	58	647,904,432.00	-	0	0	-		-					

		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dan ketepatan data yang disediakan oleh sistem informasi Jakons	500	82,200,000.00	100%	80,894,900.00		57,200,000.00									
		1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Kontruksi yang dioperasikan	-	-	-	-	1	57,200,000.00	0	13,280,000.00		20,180,000.00					
		1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Laporan)	4	82,200,000.00	1	80,894,900.00	-	0	0	-		-					
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha konstruksi terhadap aturan dan peraturan yang berlaku, seperti perizinan, standar konstruksi, dan tata tertib kerja.	500	114,400,000.00	100%	112,717,861.00		478,676,200.00									
		1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Tertib Pemanfaatan Produk	-	-	-	-	10	478,676,200.00	10	152,682,371.00		166,482,371.00					
		1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (Laporan)	40	114,400,000.00	40	112,717,861.00	-	0	0	-		-					
10		40911	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase dokumen tata ruang	329.11	1,838,095,973.00	100	**1,787,412,353.00**		**3,313,800,000.00**									
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	persentase tingkat implementasi RTRW dan RRTR dalam proses perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten/Kota.	500	513,556,000.00	100%	513,186,689.00		1,729,880,000.00									
		1.03.12.2.01..0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	-	-	-	-	2	1,631,600,000.00	0	33,673,500.00		64,284,900.00					
		1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti kegiatan sosialisasi	-	-	-	-	1	98,280,000.00	0	34,773,918.00		83,766,947.00					
		1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	295,016,000.00	1	295,016,000.00	-	0	0	-		-					
		1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	218,540,000.00	2	218,170,689.00	-	0	0	-		-					
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase menyusun RDTR dan RTRW, dari tahap perencanaan hingga penerbitan dokumen final.	500	773,000,000.00	100%	772,790,788.00		1,583,920,000.00									
		1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	53,000,000.00	1	52,790,944.00	1	1,083,920,000.00	0	154,150,788.00		210,592,480.00					
		1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	720,000,000.00	1	719,999,844.00	1	500,000,000.00	0	6,746,640.00		22,302,812.00					
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota	500	176,540,000.00	100%	175,937,872.00		-									
		1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	141,540,000.00	1	141,360,992.00	-	0	0	-		-					
		1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang (Dokumen)	2	35,000,000.00	100	34,576,880.00	-	0	0	-		-					
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penataan ruang dan implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	500	374,999,973.00	100%	325,497,004.00		-									
		1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Rapat)	40	374,999,973.00	15	325,497,004.00	-	0	0	-		-					
	JUMLAH					1,272,382,719,814.00		-		1,099,423,313,330.00		21,964,706,711.00		25,805,537,182.00					
	Rata-rata capaian kinerja (%)												1.15	2.35%			0%	49.86	
	Predikat kinerja												Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester II dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah **1,15 %,** dengan realisasi keuangan sebesar Rp.25.805.537.182,00 (Dua puluh lima milyard Delapan Ratus Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 1.009.459.461.630 (Satu Triliun Sembilan Seratus Empat Ratus Lima Puluh Sembilan juta Empat ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah)
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 4,44 % dengan predikat kinerja **Sangat Rendah** .
3. Capaiankinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 0 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 0 indikatorcapaian kinerja 0%-50% = 1 indikator

2.2. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja (nama OPD) Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses Perencanaa dan pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.

2. Juknis pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang terlambat
3. Belum optimalnya Penerapan pelaksanaa rencana aksi perangkat daerah.
4. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat
5. Pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Rancangan Akhir Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pase tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

No.	TUJUAN		SASARAN		TARGET TUJUAN KINERJA PADA TAHUN	
					Renja 2024	Perubahan Renja 2024
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	2023	2023
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Penataan Ruang serta SDM Konstruksi	Persentase Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Penataan Ruang serta SDM Konstruksi	1. Peningkatan Konektifitas dan Asesibilata infrstruktur jalan dan jembatan	**1.** Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	37%	40%

			Meningkatnya Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air dan Jaringan Air Bersih	Persentase Kawasan Sumber Daya air yang dikelola dengan kualitas yang baik (%)	40%	87% 90%
			Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan dan Pedesaan	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	87%	
			Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah) permukiman perkotaan	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah	90%	80% 73%
			Meningkatkan kapasitas dan efektifitas sitem drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	80%	90 %
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung negara	Persentase Bangunan gedung pemerintah dan bangunan publik lainnya yang dikelola dengan	73%	90 %

				baik (%)		
			Meningkatkan kapasitas infrastruktur pengolahan sampah	Persentase jumlah inprastruktur pengolahan sampah yang dibangun dan ditingkatkan	90 %	40 %
			Meningkatnya ketersediaan informasi, Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase jumlah dokumen Rencana Tata Ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	90 %	65
			Meningkatkan sistem informasi dan kapasitas serta kompetensi SDM bidang jasa konstruksi	Persentase tenaga operator dan teknis/analis konstruksi yg bersertifikat standar nasional (%)	40 %	40%
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan kinerja Organisasi yang akuntabel	Predikat Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	65	56

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Rancangan Akhir Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2024 mengalami perubahan dan terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Akhir Renja Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu "PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**"** yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tatat Ruang mendukung pencapaian sasaran ke 6 yaitu **"Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur".**

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.1
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Paser

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	28.086.000.000	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Paser	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	100%	19.014.893.128,00	
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Kab. Paser	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	62%	191.387.799.868	2	Program Penyelenggaraan Jalan	Kab. Paser	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	75 %	742.152.064.134,00	
			Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	85%	17807918302							
3	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kab. Paser	Persentase Kawasan Sumber Daya air yang dikelola dengan baik.	30%	25.249.032.000	3	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kab. Paser	Persentase Kawasan Sumber Daya air yang dikelola dengan baik.	40 %	107.750.001.728,00	

4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kab. Paser	Persentase capaian akses air minum layak	87%	134.500.000.000	4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kab. Paser	Persentase capaian akses air minum layak	87%	98.489.082.288,00	
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kab. Paser	Persentase capaian akses air limbah domestik yang layak	72%	500.000.000	5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kab. Paser	Persentase capaian pengelolaan sistem air limbah	86%	2.932.000.000,00	
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Kab. Paser	Persentasesistemjaringandrainase yang berfungsibaik	73%	7.000.000.000	6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Kab. Paser	Persentase peningkatan kapasitas sistem drainase	56%	36.008.800.576,00	
7	Penataan Bangunan Gedung	Kab. Paser	Persentase Bangunan gedung pemerintah untuk pelayanan publik yang dikelola dengan baik	87%	160.170.000.000	7	Penataan Bangunan Gedung	Kab. Paser	Persentase bangunan gedung pemerintah yang berfungsi dengan baik	90%	397.676.679.182,00	
8	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan	Kab. Paser	Persentase Bangunan dan Infrastruktur Persampahan yang dikelola	82%	1.050.000.000	8	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Kab. Paser	Persentase bangunan dan infrastruktur persampahan yang berfungsi	80%	3.000.000.000,00	

	Persampahan Regional		dengan baik									
9	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Paser	Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	65,82%	2.237.848.966	9	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Paser	Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	50 %	3.313.800.000,00	
10	Pengembangan Jasa Konstruksi	Kab. Paser	Persentase Tenaga Terampil di Kabupaten Paser yang bersertifikat standard nasional	74%	1.050.000.000	10	Pengembangan Jasa Konstruksi	Kab. Paser	Persentase tenaga operator dan teknis/analisdi Kabupaten Paser yang bersertifikat standar nasional	82 %	1.514.136.200,00	

3.3. **Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024**

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. PASER
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
1,	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**indeks kepuasan pelayanan masyarakat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik**	**74 85 % %**	**74 85 % %**	**20.586.718.876,00**	**18.675.873.928,00**	**19.014.893.128,00**	**-2.061.718.876,00**							**18.525.000.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dukungan terhadap kelancaran Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja SKPD*	100 %	100 %	90.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	20.000.000,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Menyusun dokumen perencanaan yang berisi tujuan, kebijakan, dan program kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	**NON URUSAN**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

	1	**NON URUSAN**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	**NON URUSAN**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	

	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	**NON URUSAN**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dukungan terhadap kelancaran Adiministrasi Keuangan SKPD*	100 %	100 %	11.727.062.978,00	11.760.662.978,00	11.733.062.978,00	6.000.000,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Memastikan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		12.720.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	0,00	11.055.093.330,00	11.055.093.330,00	11.055.093.330,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN		12.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	**NON URUSAN**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	

	1.03.01.2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	0,00	683.600.000,00	656.000.000,00	656.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.02.00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	21.969.648,00	21.969.648,00	21.969.648,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Dukungan terhadap kelancaran Adiministrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD*	100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Memastikan adanya catatan yang akurat dan terkini mengenai barang milik daerah yang meliputi identifikasi, kondisi, nilai, dan lokasi barang.		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	**NON URUSAN**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.05.00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dukungan terhadap kelancaran Adiministrasi Umum Pada SKPD*	100 %	100 %	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Memastikan adanya sistem pengelolaan arsip yang efektif dan efisien, serta memenuhi standar tata kelola arsip yang berlaku.		295.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1170 Paket	1170 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	56 Paket	56 Paket	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	**NON URUSAN**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	**NON URUSAN**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Dukungan terhadap kelancaran Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pada SKPD*	100	100	50.000.000,00	50.000.000,00	416.619.200,00	366.619.200,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Memastikan bahwa pengadaan barang milik daerah dilakukan secara terencana dan sesuai dengan kebutuhan serta anggaran yang tersedia.		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	0,00	50.000.000,00	416.619.200,00	416.619.200,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	**NON URUSAN**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	

	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan terhadap kelancaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan SKPD*	100 %	100 %	6.902.331.238,00	6.325.210.950,00	6.325.210.950,00	-577.120.288,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Meningkatkan pelayanan administrasi Perkantoran		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	6.325.210.950,00	6.325.210.950,00	6.325.210.950,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	**NON URUSAN**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.08.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan terhadap kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD*	100 %	100 %	1.507.324.660,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-1.387.324.660,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Pemeliharaan dan pengawasan terhadap inventaris barang milik daerah, seperti peralatan kantor, mebel, perangkat elektronik, dan barang inventaris lainnya. Kegiatan ini meliputi pencatatan, pemeliharaan fisik, pembaruan inventaris, dan manajemen penyimpanan.		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	**NON URUSAN**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**538.183.069.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.818.387.898,00**							**177.439.800.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	
1,	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**persentase kawasan sumber daya air yang dikelola dengan baik**	**36 %**	**36 %**	**64.780.401.728,00**	**82.450.001.728,00**	**107.750.001.728,00**	**-28.680.401.728,00**							**36.100.000.000,00**	

	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Dukungan terhadap kelancaran Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah WS*	100 %	100 %	19.000.401.440,00	18.275.001.440,00	34.975.001.440,00	15.974.600.000,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Untuk menjaga dan memperbaiki infrastruktur sungai seperti tanggul, jembatan, bendungan, atau saluran air agar tetap berfungsi dengan baik dan aman.		12.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir															
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2.000.000.000,00	1.025.000.000,00	2.525.000.000,00	525.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat pengguna		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.00[illegible]	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	1 Lembaga	150.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat pengguna		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai															
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	10 KM	10 KM	8.900.400.000,00	9.400.000.000,00	26.400.000.000,00	17.499.600.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat pengguna		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya															
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	-	1 Unit	0,00	225.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat pengguna		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	-1.400.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat pengguna		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya															
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	10 Unit	10 Unit	4.350.001.440,00	3.925.001.440,00	1.925.001.440,00	-2.425.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat pengguna		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir															
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	-	1 Unit	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat pengguna		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Dukungan terhadap kelancaran Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah WS*	100 %	100 %	45.780.000.288,00	64.175.000.288,00	72.775.000.288,00	26.995.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air	Untuk memperbaiki dan memelihara infrastruktur irigasi primer dan sekunder, termasuk saluran irigasi, bendungan, pintu air, agar dapat mengalirkan air dengan efisien dan merata ke lahan pertanian		23.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan															
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	6 KM	11 KM	19.430.000.288,00	45.400.000.288,00	43.700.000.288,00	24.270.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air	Masyarakat pengguna		20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0011	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak															
			Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	-	5 KM	0,00	4.625.000.000,00	4.625.000.000,00	4.625.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Air	Masyarakat pengguna		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan															
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	7 KM	13 KM	26.200.000.000,00	12.300.000.000,00	22.600.000.000,00	-3.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat pengguna		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan															
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	15 KM	150.000.000,00	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	1.700.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat pengguna		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2,	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**persentase capaian akses air minum layak**	**87 %**	**87 %**	**14.588.800.288,00**	**38.620.000.288,00**	**98.489.082.288,00**	**-8.088.800.288,00**							**6.500.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Dukungan terhadap kelancaran Pengelolaan dan Pengembangan SPAM*	100 %	100 %	14.588.800.288,00	38.620.000.288,00	98.489.082.288,00	83.900.282.000,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Untuk memastikan keberlanjutan sistem penyediaan air minum di daerah kabupaten/kota,		6.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan															
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	10 Unit	1096 Unit	4.770.000.000,00	3.500.000.000,00	4.101.200.000,00	-668.800.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat pengguna		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)															
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	-	4 Dokumen	0,00	4.100.000.000,00	3.594.882.000,00	3.594.882.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat pengguna		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan															
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	100 Liter/Detik	100 Liter/Detik	890.000.288,00	21.390.000.288,00	24.790.000.288,00	23.900.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat pengguna		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan															
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	16 KM SR	2500 SR	8.928.800.000,00	9.630.000.000,00	66.003.000.000,00	57.074.200.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat pengguna		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3,	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat pengguna		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS															
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	-	6 Ton/hari	0,00	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat pengguna		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4,	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**persentase capaian akses air limbah domestik yang layak**	**82 %**	**82 %**	**0,00**	**2.882.000.000,00**	**2.932.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Dukungan terhadap kelancaran Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dalam Daerah*	100 %	100 %	0,00	2.882.000.000,00	2.932.000.000,00	2.932.000.000,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Meningkatkan akses penduduk ke sistem pengolahan air limbah yang aman dan efektif, termasuk perencanaan dan pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah yang mencakup pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan akhir yang tepat.		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)															
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	1 Unit	0,00	182.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat dan Pengguna		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat															
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	-	100 Rumah Tangga	0,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat dan Pengguna		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	-	100 Rumah Tangga	0,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat dan Pengguna		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5,	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**persentase sistem jaringan drainase yang berfungsi dengan baik**	**76 %**	**76 %**	**1.846.000.288,00**	**30.130.000.576,00**	**36.008.800.576,00**	**953.999.712,00**							**2.800.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Dukungan terhadap kelancaran Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Draenase*	100 %	100 %	1.846.000.288,00	30.130.000.576,00	36.008.800.576,00	34.162.800.288,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Untuk menjaga dan memperbaiki infrastruktur sungai seperti tanggul, jembatan, bendungan, atau saluran air agar tetap berfungsi dengan baik dan aman.		2.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan															
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1000 M	6000 M	1.456.000.000,00	4.750.000.000,00	12.000.000.000,00	10.544.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat dan Pengguna		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan															
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1000 Sistem Drainase Lingkungan	29 Sistem Drainase Lingkungan	200.000.000,00	2.100.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat dan Pengguna		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan															
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	76,63 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	190.000.288,00	1.190.000.288,00	1.190.000.288,00	1.000.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat dan Pengguna		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan															
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2 Sistem Drainase Perkotaan	11 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	22.090.000.288,00	22.218.800.288,00	22.218.800.288,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat dan Pengguna		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6,	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat dan Pengguna		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

	1.03.07.2.01.0006	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota															
			Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	-	100 Rumah Tangga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat dan Pengguna		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7,	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan gedung pemerintah yang berfungsi dengan baik**	**86 %**	**86 %**	**45.290.025.000,00**	**293.731.147.250,00**	**397.676.679.182,00**	**4.709.975.000,00**							**50.000.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Dukungan terhadap kelancaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung*	100 %	100 %	45.290.025.000,00	293.731.147.250,00	397.676.679.182,00	352.386.654.182,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Kegiatan yang melibatkan proses pemberian izin mendirikan bangunan kepada pemilik atau pengembang bangunan gedung. Sasaran kegiatan ini termasuk peninjauan perencanaan bangunan, persyaratan teknis dan		50.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	42 Unit Dokumen	164 Unit Dokumen	45.290.025.000,00	293.531.147.250,00	397.476.679.182,00	352.186.654.182,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN dan Masyarakat		50.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG															
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-	10 Dokumen	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	ASN dan Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8,	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap persentase jembatan dalam kondisi baik**	**62 85 % %**	**62 85 % %**	**387.853.083.158,00**	**535.085.177.000,00**	**742.152.064.134,00**	**-326.615.483.158,00**							**61.237.600.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Dukungan terhadap kelancaran Penyelenggaraan Jalan Kabupaten SKPD*	100 %	100 %	387.853.083.158,00	535.085.177.000,00	742.152.064.134,00	354.298.980.976,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Meningkatkan kondisi fisik jalan, termasuk perbaikan dan pemeliharaan rutin jalan, peningkatan kualitas permukaan jalan, perbaikan drainase, atau penanganan titik-titik rawan kecelakaan.		61.237.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

	1.03.10.2.01.00 33	Rekonstruksi Jalan															
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	20 KM	34 KM	317.307.443.158,00	426.542.766.600,00	628.081.672.934,00	310.774.229.776,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat Pengguna		981.960.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.00 38	Pemeliharaan Rutin Jembatan															
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	6 Jembatan	6 Jembatan	5.000.000.000,00	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat Pengguna		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.00 39	Rehabilitasi Jembatan															
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan	3 Jembatan	7.200.000.000,00	4.807.353.300,00	5.307.353.300,00	-1.892.646.700,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat Pengguna		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.00 40	Pembangunan Jembatan															
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	11 Jembatan	104 Jembatan	49.570.000.000,00	90.246.937.100,00	95.713.937.100,00	46.143.937.100,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat Pengguna		50.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.00 44	Rehabilitasi Jalan															
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM	1 KM	0,00	288.120.000,00	562.109.400,00	562.109.400,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat Pengguna		255.640.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.00 46	Pemeliharaan Rutin Jalan															
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	25 KM	25 KM	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	7.286.991.400,00	-713.008.600,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat Pengguna		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
9,	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Tenaga Terampil di Kabupaten Paser yang bersertifikat standar nasional**	**74 %**	**74 %**	**263.800.000,00**	**1.514.136.200,00**	**1.514.136.200,00**	**-86.600.000,00**							**177.200.000,00**	

	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Dukungan terhadap kelancaran Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*	100 %	100 %	117.200.000,00	978.260.000,00	978.260.000,00	861.060.000,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Kegiatan ini mencakup pelatihan dalam berbagai aspek konstruksi, termasuk pembangunan struktur, pemasangan sistem utilitas, tata letak dan instalasi, teknik pemeliharaan, dan keamanan kerja.		67.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis															
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	200 Orang	200 Orang	25.000.000,00	345.130.000,00	345.130.000,00	320.130.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat Pengguna		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis															
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100 Orang	100 Orang	92.200.000,00	633.130.000,00	633.130.000,00	540.930.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat Pengguna		67.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Dukungan terhadap kelancaran Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi*	100 %	100 %	57.200.000,00	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	mencakup perancangan, pengembangan, dan implementasi sistem yang mencakup basis data, antarmuka pengguna, alur kerja, dan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mendukung proses jasa konstruksi.		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi															
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	57.200.000,00	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat Pengguna		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Dukungan terhadap kelancaran Pengawasan Tertib Usaha, Penyelenggaraan, Pemanfaatan Jasa Konstruksi*	100 %	100 %	89.400.000,00	478.676.200,00	478.676.200,00	389.276.200,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Mencakup pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan kontrak, pemenuhan jadwal, mutu pekerjaan, dan pemenuhan kewajiban kontraktor serta pemilik proyek.		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi															
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	0 Lembaga	0 Lembaga	89.400.000,00	478.676.200,00	478.676.200,00	389.276.200,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat Pengguna		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

10,	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang**	**65.82 %**	**65.82 %**	**3.229.880.000,00**	**3.313.800.000,00**	**3.313.800.000,00**	**-1.129.880.000,00**							**2.100.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Dukungan terhadap kelancaran Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci TR*	100 %	100 %	1.729.880.000,00	1.729.880.000,00	1.729.880.000,00	0,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Mencakup pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan kontrak, pemenuhan jadwal, mutu pekerjaan, dan pemenuhan kewajiban kontraktor serta pemilik proyek.		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota															
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	1.631.600.000,00	1.631.600.000,00	1.631.600.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat Pengguna		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang															
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 Orang	1 Orang	98.280.000,00	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat Pengguna		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Dukungan terhadap kelancaran Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan TR*	100 %	100 %	1.500.000.000,00	1.583.920.000,00	1.583.920.000,00	83.920.000,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Mencakup pertemuan, diskusi, dan koordinasi dalam mengidentifikasi kebutuhan, memperhatikan kebijakan provinsi, serta memastikan keterpaduan dan keselarasan antara perencanaan kabupaten/kota		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.083.920.000,00	1.083.920.000,00	83.920.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat Pengguna		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat Pengguna		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

		UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN DAN MATERIAL				**0,00**	**520.000.000,00**	**520.000.000,00**	**520.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**0,00**	**520.000.000,00**	**520.000.000,00**	**520.000.000,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**0,00**	**520.000.000,00**	**520.000.000,00**	**520.000.000,00**							**0,00**	
1,	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Dokumen Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap persentase jembatan dalam kondisi baik**	**62 85 400 % % Dokumen**	**400 62 85 Dokumen % %**	**0,00**	**520.000.000,00**	**520.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Dukungan terhadap kelancaran Penyelenggaraan Jalan Kabupaten SKPD*	100 %	100 %	0,00	520.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	Pengujian untuk mengevaluasi kekuatan, keawetan, dan kualitas bahan konstruksi seperti beton, aspal, batu, , dan bahan bangunan lainnya.		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan															
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	400 Dokumen	400 Dokumen	0,00	520.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Pengguna		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.00 29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan															
		UPTD PERKANTORAN GENTUNG TEMIANG				**0,00**	**1.387.324.660,00**	**2.655.810.960,00**	**2.655.810.960,00**							**3.000.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**0,00**	**1.387.324.660,00**	**2.655.810.960,00**	**2.655.810.960,00**							**3.000.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**0,00**	**1.387.324.660,00**	**2.655.810.960,00**	**2.655.810.960,00**							**3.000.000.000,00**	
1,	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase barang milik daerah yang berada dalam kondisi baik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya indeks kepuasan pelayanan masyarakat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik**	**74 85 100 % % persen**	**100 74 85 persen % %**	**0,00**	**1.387.324.660,00**	**2.655.810.960,00**	**3.000.000.000,00**							**3.000.000.000,00**	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan terhadap kelancaran Adiministrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD*	100 %	100 %	0,00	1.387.324.660,00	2.655.810.960,00	2.655.810.960,00			-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat Pengguna		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	0,00	1.387.324.660,00	2.655.810.960,00	2.655.810.960,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masyarakat Pengguna		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
		J U M L A H				**538.438.709.338,00**	**1.007.552.136.970,00**	**1.412.001.457.236,00**	**873.562.747.898,00**							**177.439.800.000,00**	

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Akhir Renja Perubahan (Ranhir Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rancangan Akhir Renja Perubahan (OPD) Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan

Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tanah Grogot 11 Agustus 2024

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 11 Agustus 2024

Kepala Dinas,

Asnawi, ST, M.Si
Pembina/IV.a
NIP 19720422 200604 1 012

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Kompleks Perkantoran Jl.Kusuma Bangsa KM 05 Gedung A Lantai I Kavling 1-2
TANA PASER KODE POS 76211
Telepon (0543) - Faksimili (0543) - Email paserpu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER

NOMOR : 050/ 207/DPUTR/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR, RENJA PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PaserTahun Anggaran 2024;

c. Tim sebagaimana dimaksud di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Tim Penyusun Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 10 Juli 2024
Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Asnawi, ST, M.Si
Pembina/IV.a
NIP 19720422 200604 1 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I
Keputusan Kepala DPUTR Kab. Paser
Nomor : 050/207/DPUTR/2024
Tanggal : 10 Juli 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER TAHUN 2024

Jabatan Dalam Tim		**Nama / Jabatan**
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
Ketua	:	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
Anggota	:	1. Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kab. Paser 2. Kepala Bidang Tata Ruang DPUTR Kab. Paser 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUTR Kab.Paser 4. Kepala Bidang Cipta Karya DPUTR Kab. Paser 5. Kepala Bidang Jasa Konstruksi DPUTR Kab. Paser 6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPUTR Kab. Paser 7. Kasubbag Keuangan DPUTR Kab. Paser 8. Rahman, SE 9. Zuleha Widya Sartika, SE 10. Eka Hartiana, A.Md 11.Ira Hasriana, SE 12.Herlinna, A.Md

Kepala Dinas,

Asnawi, ST, M.Si
Pembina/IV.a
NIP 19720422 200604 1 012

PERUBAHAN RENJA
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lantai 2

TANA PASER

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
Jln. Kusuma Bangsa KM 5 Komplek Perkantoran F Lantai 2
Website://disbunak.paserkab.go.id, email: disbunak2020@gmail.com
Tana Paser 76211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASER
NOMOR 188.4/ 02 /SET/DISBUNAK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN DAN DOKUMEN PERENCANAAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASER
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASER

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan dan Dokumen Perencanaan SKPD yang akurat, relevan dan lengkap yang sangat diperlukan dalam proses perencanaan/perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, maka perlu di bentuk Tim untuk penyusunan tersebut;
b. bahwa pembentukan tim penyusunan Laporan dan Dokumen Perencanaan SKPD sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20C4 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaoan Keuangan Dalam Rangaka Dekosentrasi dan Tugas-tugas Perbantuan;
5. Pereturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
7. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 80 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Paser;

9. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2023, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024.
11. Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Tugas Tim sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah :

a. Melakukan rekapitulasi terhadap kegiatan SKPD yang telah dilaksanakan;
b. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja kegiatan yang telah dilakukan rekapitulasinya; dan
c. Membuat laporan dan melaporkannya ke Pemerintah Daerah yang berbentuk Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP, Rencangan awal Renja, Rancangan Rencana Kerja, Rancangan Akhir Renja, Rencana Renja Perubahan dan Rancangan Akhir Perubahan).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal,05 Januari 2024

KEPALA DINAS,

DJOKO BAWONO, SP.M.Si
Pembina Tk. I IVb
NIP. 19730113 199803 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. *Inspektur Kabupaten Paser di Tana Paser*
2. *Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.*

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser
Nomor : 188.4/ 02 /SET/DISBUNAK/2024
Tanggal 05 Januari 2024

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN DAN DOKUMEN PERENCANAAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASER TAHUN 2024

Penanggung Jawab	Kepala Dinas
Ketua	Sekretaris
Sekretaris	Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan
Anggota	1. Siti Fatimah, S.Pt.MP
	2. Drh. Alhabib
	3. Rusdiansyah, ST
	4. Hidayat Permana, SE
	5. Isyana Maya Savitri, SP
	6. Tri Setyo oetomo
	7. Muhammad Junaidi, S.IP

Ditetapkan Di Tana Paser
pada tanggal, 05 Januari 2023

KEPALA DINAS,

DJOKO BAWONO, SP.M.Si
Pebina Tk. I IVb
NIP. 19730113 199803 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan ini akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan serta memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang akan dilaksanakan di daerah.

Diharapkan Perubahan Rencana Kerja ini akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan serta menjadi arahan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang oleh Pimpinan serta seluruh staf Dinas Perkebunan dan Peternakan, yang akhirnya akanberimplikasi pada peningkatan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja ini. Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Paser.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR..... I
DAFTAR ISI..... II
DAFTAR TABEL..... III

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum..... 3
1.3. Maksud dan Tujuan..... 5
1.4. Sistematika Penulisan..... 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN I DAN II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Sampai dengan Triwulan II..... 8
2.2 Analisis Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan..... 14
2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat..... 18

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
3.1 Tujuan dan Sasaran..... 20
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD..... 22
3.3 Review Terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat..... 34
3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan..... 34

BAB IV PENUTUP..... 56

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Realisasi Renja Tahun 2024	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan sampai dengan Triwulan II	16
Tabel 3.1	Target Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan	21
Tabel 3.2	Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024	24
Tabel 3.4	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagaiacuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

b. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Review Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perkebunan dan Peternakan, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Pergeseran dilakukan dikarenakan terdapat perubahan pada rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Paser tahun 2024. Sedangkan Penambahan sub kegiatan baru dilakukan dikarenakan adanya perubahan nomenklatur sub kegiatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Sawit

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Renja Perubahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman TeknisPengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005- 2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 22 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser.
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 tahun 2024 tentang Perubahan RKPD

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Review Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 2 (Dua) tahun 2024:

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangandan pergeseran mata anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagaiberikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Perubahan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan, proses penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalambentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024.

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukansebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 Yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat tabel usulan program dan kegiatan Masyarakat yang diusulkan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser

3.4 Rencana Program dan Kegiatan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi RENJA Tahun 2024

No.	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2022 s.d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d RENJA PD Tahun Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTR s.d 2024	
1	2	3	4	5	6			7		8			9		10		11		12		13		14		15	
					K		Rp	K	Rp	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
		3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan masyarakat	70	%	3,483,250,540			72	persen	12,118,050,602	25	1,882,030,661	25	4,203,141,792	0	-	0	-	50	6,085,172,453	50	6,085,172,453	71.43	174.70
		3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	%	687,800,000			100	persen	123,800,000	25	19,658,000	15	27,075,000	0	-	0	-	40	46,733,000	40	46,733,000	40	6.79
		3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu	25	Dokumen	520,000,000	10	334,264,908	5	Dokumen	108,800,000	2	19,658,000	1	27,075,000	0	-	0	-	3	46,733,000	13	380,997,908	52	73.27
		3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5	Dokumen	47,800,000	2	19,960,800	1	Dokumen	5,000,000	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	3	19,960,800	60	41.76
		3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi Renja Disbunak	20	Dokumen	120,000,000	8	39,456,800	4	Dokumen	10,000,000	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	9	39,456,800	45	32.88
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	60	Bulan	528,000,000			12	bulan	11,616,773,274	3	1,809,804,269	3	4,047,830,128	0	-	0	-	6	5,857,634,397	6	5,857,634,397	10	1109.40
		3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang	51,241,870,900	60	18,873,746,777	60	Orang	11,526,773,274	60	1,802,649,269	60	3,997,412,285	0	-	0	-	60	5,800,061,554	60	24,673,808,331	100	48.15
		3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang akuntabel	2500	Dokumen	528,000,000	1000	144,400,000	500	Dokumen	90,000,000	100	7,155,000	220	50,417,843	0	-	0	-	320	57,572,843	1,320	57,572,843	53	10.90
		3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	60	Bulan	560,000,000			12	Bulan	97,200,000	3	4,800,000	3	49,510,000	0	-	0	-	6	54,310,000	6	54,310,000	10	9.70
		3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	10	Dokumen	560,000,000	4	296,434,400	2	Dokumen	97,200,000	0.5	4,800,000	1	49,510,000	0	-	0	-	1.5	54,310,000	6	350,744,400	55	62.63
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum di dinas	100	%	1,165,500,000			100	persen	178,000,000	25	32,522,492	25	51,386,664	0	-	0	-	50	83,909,156	50	83,909,156	50	7.20
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik	50	Unit	4,500,000			0	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	0.00
		3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	Paket	80,000,000	4	57,954,000	2	Paket	18,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4	57,954,000	30.77	72.44
		3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	Paket	220,000,000	13	72,848,180	5	Paket	35,000,000	3	9,843,900	0	-	0	-	0	-	3	9,843,900	16	9,843,900	64	4.47
		3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	46,000,000	4	15,700,000	2	Paket	5,000,000	1	1,200,000	0	-	0	-	0	-	1	1,200,000	5	16,900,000	50	36.74

No.	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2022 s.d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d RENJA PD Tahun Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTR s.d 2024	
1	2	3	4	5	6			7		8			9		10		11		12		13		14		15	
					K		Rp	K	Rp	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
		3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi baik ke provinsi maupun kepusat	125	Laporan	700,000,000	35	195,055,783	25	Laporan	120,000,000	5	21,478,592	11	51,386,664	0	-	0	-	16	72,865,256	51	267,921,039	40.80	38.27
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	222,600,000			100	persen	47,277,328	25	7,445,900	25	13,800,000	0	-	0	-	50	21,245,900	50.00	21,245,900	50	9.54
		3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	4,600,000	2	1,113,000	1	Laporan	1,000,000	0		0	-	0	-	0	-	0	-	2	1,113,000	40	24.20
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan komunikasi telfon, air dan listrik kantor (bulan)	0	0	-			0	Bulan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	Laporan	218,000,000	4	67,044,465	2	Laporan	46,277,328	0	7,445,900	1	13,800,000	0	-	0	-	1	21,245,900	5	88,290,365	50	40.50
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100	%	819,152,540			100	persen	55,000,000	25	7,800,000	25	13,540,000	0	-	0	-	50	21,340,000	50	21,340,000	50.00	2.61
		3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)	15	Unit	383,150,508	6	59,477,091	3	Unit	45,000,000	1	7,800,000	1	9,000,000	0	-	0	-	2	16,800,000	8	76,277,091	53.33	19.91
		3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)	70	Unit	70,000,000	20	13,405,400	15	Unit	10,000,000	2	-	5	4,540,000	0	-	0	-	7	4,540,000	27	17,945,400	39	25.64
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehap Gedung Kantor / UPT / PKH	10	Unit	366,002,032			0	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	0.00

No.	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2022 s.d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d RENJA PD Tahun Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTR s.d 2024	
1	2	3	4	5	6			7		8			9		10		11		12		13		14		15	
					K		Rp	K	Rp	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentasi sarana pertanian (Perkebunan dan Peternakan) yang dimanfaatkan	100	%	27,764,965,200			100	persen	10,358,220,061	25	163,110,682	15	1,298,517,403	0	-	0	-	40	1,577,479,485	40	1,577,479,485	40.00	5.68
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang terlaksana	100	%	729,647,000			100	persen	2,100,716,061	25	51,850,500	15	110,679,800	0	-	0	-	40	278,381,700	40	278,381,700	40.00	38.15
		3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	96	Laporan	267,766,000	47	183,604,000	20	Laporan	20,000,000	5	-	0	-	0	-	0	-	5	-	52	183,604,000	54.17	68.57
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	60	Laporan	461,881,000	24	1,196,498,613	12	Laporan	1,016,526,000	3	51,850,500	3	29,742,000	0	-	0	-	6	81,592,500	30	1,278,091,113	50.00	276.71
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (UPTD Petangis)	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian UPTD Pembibitan Petangis	60	Laporan	2,510,006,600	24	989,166,124	12	Laporan	1,064,190,061	3	115,851,400	3	80,937,800	0	-	0	-	6	196,789,200	30	1,185,955,324	50.00	47.25
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan mutu benih / bibit ternak	100	%	780,320,000			100	persen	50,000,000	25	-	0	-	0	-	0	-	25	-	25	-	25.00	0.00
		3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	60	Laporan	780,320,000	24	511,606,300	12	Laporan	50,000,000	3	-	0	-	0	-	0	-	3	-	27	511,606,300	45.00	65.56
			Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase pengawasan obat hewan ditingkat pengecer	100	%	1,782,000,000			100	Persen	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	0.00
			Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan	60	Unit	1,782,000,000			0	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	0.00
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan penyediaan dan peredaran benih / bibit ternak	100	%	442,160,000			100	Persen	1,467,200,000	25	-	45	1,001,627,203	0	-	0	-	70	1,001,627,203	70	1,001,627,203	70.00	226.53
		3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	60	Laporan	442,160,000	24	498,360,600	12	Laporan	1,467,200,000	3	-	6	1,001,627,203	0	-	0	-	9	1,001,627,203	33	1,499,987,803	55.00	339.24
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Kegiatan penyediaan Bibit Ternak yang dilaksanakan	100	%	24,030,838,200			100	Persen	6,740,304,000	25	111,260,182	0	186,210,400	0	-	0	-	25	297,470,582	25	297,470,582	25.00	1.24
		3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih / Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2500	Ekor	24,030,838,200	1000	3,769,829,698	500	Ekor	6,740,304,000	100	111,260,182	0	186,210,400	0	-	0	-	100	297,470,582	1,100	4,067,300,280	44.00	16.93

No.	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2022 s.d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d RENJA PD Tahun Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTR s.d 2024	
1	2	3	4	5	6			7		8			9		10		11		12		13		14		15	
					K		Rp	K	Rp	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Prasarana Perkebunan dan Peternakan yang dimanfaatkan	100	%	100,319,488,323			100	Persen	60,915,455,346	25	712,017,930	0	1,544,801,002	0	-	0	-	25	2,256,818,932	25	2,256,818,932	25.00	2.25
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan	100	%	5,032,074,400			100	Persen	3,927,040,449	0	294,769,264	25	559,649,944	0	-	0	-	25	854,419,208	25	854,419,208	25.00	16.98
		3.27.03.2.01.0003	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	20	Dokumen	4,666,824,400	8	585,390,807	4	Dokumen	2,618,572,000	0	47,904,100	1	123,904,000	0	-	0	-	1	171,808,100	9	757,198,907	45.00	16.23
		3.27.03.2.01.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	20	Laporan	365,250,000	8	350,439,694	4	Laporan	56,250,000	0	-	3	41,130,334	0	-	0	-	3	41,130,334	11	391,570,028	55.00	107.21
		3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B (UPTD Pembibitan Tan. Perkebunan)	Tersedianya data bibit sawit (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B) yang dikelola	60	Dokumen	2,956,438,449	24	799,309,498.00	12	Dokumen	1,252,218,449	3	246,865,164	4	394,615,610	0	-	0	-	7	641,480,774	31	799,309,505	51.67	27.04
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Jalan Produksi Perkebunan)	100	%	93,600,000,000			100	Persen	46,083,964,897	10	297,493,235	0	877,780,958	0	-	0	-	10	1,175,274,193	10	1,175,274,193	10.00	1.26
		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	93	Unit	93,600,000,000	33	78,578,273,933	31	Unit	45,621,997,023	5	297,493,235	2	701,328,398	0	-	0	-	7	998,821,633	40	79,577,095,566	43.01	85.02
		3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Pemeliharaan dan pelaksanaan potong hewan di RPH	60	Bulan	1,687,413,923	2	527,611,832	1	Unit	461,967,874	0	-	0	176,452,560	0	-	0	-	0	176,452,560	2	704,064,392	3.33	41.72
		3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Persentase Lahan Penggembalaan Umum yang tersedia	100	%	1,687,413,923			100	Persen	10,904,450,000	25	119,755,431	0	107,370,100	0	-	0	-	25	227,125,531	25.00	227,125,531	25.00	13.46
		3.27.03.2.04.0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	125	Ha	1,687,413,923	50	1,176,472,158	25	Ha	10,904,450,000	0	119,755,431	0	107,370,100	0	-	0	-	0	227,125,531	50.00	1,403,597,689	40.00	83.18
				Jumlah Kandang yang dibangun	4	Kandang				4	Kandang		1		0		0		0		1					

No.	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2022 s.d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d RENJA PD Tahun Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTR s.d 2024	
1	2	3	4	5	6			7		8			9		10		11		12		13		14		15	
					K		Rp	K	Rp	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana	100	%	890,394,000			100	Persen	157,050,000	25	30,978,400	35	58,480,900	0	-	0	-	60	89,459,300	60	89,459,300	60.00	10.05
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian gangguan tanaman perkebunan	100	%	890,394,000			100	Persen	157,050,000	25	30,978,400	35	58,480,900	0	-	0	-	60	89,459,300	60	89,459,300	60.00	10.05
		3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	25	Ha	890,394,000	10	305,332,060	5	Ha	157,050,000	1	30,978,400	2	58,480,900	0	-	0	-	3	89,459,300	13	394,791,360	52.00	44.34
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan	100	%	2,040,980,000			100	Persen	2,469,367,000	10	168,331,030	5	160,139,472	0	-	0	-	15	328,470,502	15	328,470,502	15.00	16.09
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin usaha pertanian yang dibuat (STDB)	7500	Dokumen	2,040,980,000			1500	Dokumen	2,469,367,000	100	168,331,030	100	160,139,472	0	-	0	-	200	328,470,502	200	328,470,502	2.67	16.09
		3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	7500	Dokumen	2,040,980,000	3543	1,141,413,307	1500	Dokumen	2,469,367,000	100	168,331,030	100	160,139,472	0	-	0	-	200	328,470,502	3,743	1,469,883,809	49.91	72.02
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM							**139,854,998,003**					**90,265,496,985.00**										**11,222,209,617.00**				
															Predikat Kinerja Dinas										

FAKTOR PENDORONG :

- Dukungan dari Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Pusat
- Komitmen dari Pimpinan hingga staf untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerja Dinas (SAKIP)

FAKTOR PENGHAMBAT

- Kurangnya SDM terutama ASN
- Keterlambatan pencairan dana Bankeu, Carbon Fund
- Perubahan nomenklatur sub kegiatan untuk DBH Sawit
- Harga di SIPD belum sesuai dengan ongkir dan penawaran rekanan

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 40,04 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.509.126.462,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 5,49% dari total pagu Rp. 209.777.693.524,- (Dua Ratus Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh empat Rupiah).
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan sebesar 41% dengan predikat kinerja Sangat Rendah (penentuan peringkat berdasarkan Skala Nilai Perangkat Kinerja Permendagri No 86).
3. Capaian kinerja sub kegiatan >70%-100% = 4 Indikator, capaian kinerja >50%-70% = 16 indikator , capaian kinerja 0%-50% = 19 indikator.

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, maka Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan dan peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Perkebunan dan Peternakan serta penguatan daya saing produk Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
b. Penetapan kebijakan di bidang Perkebunan dan Peternakan
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan dan peternakan yang meliputi Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan norma, standar, prosedurdan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Upaya Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam meningkatkan kualitaspenyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Persentase pengembangan komoditas perkebunan
2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana perkebunan dan Peternakan yang termanfaatkan
3. Jumlah Penerbitan STDB yang dilaksanakan
4. Persentase Kenaikan Jumlah Populasi Ternak Besar
5. Persentase kenaikan ketersediaan produk hewan yang higienis
6. Persentasi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perkebunan dan Peternakan

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Review Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi			Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2024
Meningkatkan pertumbuhan sektor Perkebunan dan Peternakan yang mandiri dan berdaya saing	Persentase Kontribusi sektor perkebunan dan peternakan terhadap PDRB	8%	10%	10%	12%	15%	8%	10%		
Meningkatnya pertumbuhan sektor Perkebunan dan Peternakan	Persentase Pengembangan Komoditas Perkebunan	0.20%	0.25%	0.50%	1%	15%	2%	0.29%	_	_
	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perkebunan dan peternakan yang termanfaatkan	30.00%	75%	75.00%	75%	75.00%	95%	95%	10.45	13.93%
	Jumlah Penertiban STDB yang dilaksanakan	1500	1500	1500	1500	1500	2293	1250	560	37.33%
	Persentase Kenaikan Jumlah Populasi Ternak Besar	0.11%	6%	6%	6%	6%	0.11%	8%	_	_
Meningkatnya Ketersedian produk hewan dan produk asal hewan yang aman dan berdaya saing	Persentase kenaikan ketersedian produk hewan yang higienis	5.04%	5.50%	5.90%	6.12%	6.50%	27%	24%	_	_
	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	95.71%	95.74%	95.83%	95.90%	96.05%	98.77%	101.92%	55.83%	58.24%
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	70%	72%	74%	76%	80%	70%	72%		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	60	62	64	66	70	60	63.77	74.40	100%

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan pertumbuhan sektor Perkebunan dan Peternakan yang mandiri dan berdaya saing “ memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Kontribusi sektor perkebunan dan peternakan terhadap PDRB”, belum bisa ditentukan realisasinya karena menunggu perhitungan PDRB di akhir tahun.

b. Sasaran “Meningkatnya pertumbuhan sektor Perkebunan dan Peternakan” memiliki 4 indikator kinerja yaitu “Persentase pengembangan komoditas perkebunan”; “Persentase peningkatan sarana dan prasarana perkebunan yang termanfaatkan”; “jumlah penerbitan STDB yang dilaksanakan” dan “Persentase Kenaikan Jumlah Populasi Ternak Besar” dimana keempatnya belum mencapai target. Realisasi STDB adalah sebesar 560 dokumen (37,33%) sedangkan dengan capaian kinerja persentase sarana prasarana perkebunan peternakan hingga semester II adalah sebesar 13,93%, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pengembangan komoditas perkebunan dan kenaikan jumlah populasi ternak belum bisa diukur sampai didapat data angka tetap diakhir tahun.

   Sedangkan Sasaran “Meningkatnya ketersediaan produk hewan dan produk asal hewan yang berdaya saing” memiliki 2 indikator yaitu “Meningkatnya ketersediaan produk hewan yang higienis” dimana realisasi masih 0, dan indikator “Persentase pelayanan Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner” dengan realisasi 55,83 dari target 95,83% dengan capaian kinerja sebesar 58,24%.

   Sasaran “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas” dengan indikator “Nilai Evaluasi SAKIP” mencapai target yaitu dengan total nilai 74,40 atau capaian kinerja sebesar 100%.

2.3. Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan.

Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antar PD dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. SDM yang masih kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, terutama berkaitan dengan pelayanan kesehatan hewan serta administrasi kantor.
2. Terlambatnya pencairan dana Bankeu dari Provinsi dan Dana DAK Non Fisik dari Pusat, sehingga menyebabkan bidang teknis tidak bisa memulai melaksanakan kegiatan sesuai jadwal awal.
3. Status lahan perkebunan yang masih sering bermasalah.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam upaya untuk pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Merekrut tenaga pendamping PDKT (Program Desa Korporasi Ternak)
2. Melaksanakan koordinasi lebih intensif dengan berbagai pihak terkait dana Bankeu dari Propinsi dan DAK Non Fisik dari Pemerintah pusat.
3. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait permasalah lahan yang dihadapi.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang perlu dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang ekonomi perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Review Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan

Tujuan / Sasaran	Indikator	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Peningkatan kontribusi sektor Perkebunan dan Peternakan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi sektor perkebunan dan peternakan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi perkebunan dan peternakan / Jumlah kontribusi Pertanian, Kehutanan dan perikanan x 100%	10%	10%
Meningkatnya pertumbuhan sektor Perkebunan dan Peternakan	Persentase Pengembangan komoditas Perkebunan	Jumlah Tahun Ini - Jumlah Tahun Lalu / Jumlah Tahun Lalu x100%	0.50%	0.50%
	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perkebunan dan peternakan yang termanfaatkan	Jumlah Tahun Ini - Jumlah Tahun Lalu / Jumlah Tahun Lalu x100%	75%	75%
	Jumlah Penerbitan STDB yang dilaksanakan	Jumlah STDB yang diterbitkan	1500	1500
	Persentase Kenaikan Jumlah Populasi Ternak Besar	Jumlah Tahun Ini - Jumlah Tahun Lalu / Jumlah Tahun Lalu x100%	6%	6%
Meningkatnya ketersediaan produk hewan dan produk asal hewan yang berdaya saing	Persentase kenaikan ketersediaan produk hewan yang higienis	Jumlah Tahun Ini - Jumlah Tahun Lalu / Jumlah Tahun Lalu x100%	5.90%	5,90%
	Persentasi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pelayanan UPTD / Jumlah UPTD x100%	95,83%	95,83%
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Tingkat kepuasan pelayanan kesekretariatan	Jumlah Bobot / Jumlah Unsur Pelayanan x100%	80%	80%
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perkebunan dan Peternakan	Hasil reviu Tim Penilai SAKIP (Eksternal)	64	70

Memperhatikan tabel diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Tahun 2024 yang mengalami perubahan hanya pada target Nilai Evaluasi SAKIP. Hal ini dikarenakan penyesuaian dengan memperhatikan perkembangan baik dari internal maupun eksternal Dinas serta memperhatikan hasil penilaian sementara SAKIP telah melampaui target sehingga perlu dilakukan perubahan target.

Selain itu perubahan anggaran diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu **"PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DISELURUH KABUPATEN PASER"** yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Penguatan Ekonomi Daerah
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu:

1. Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan dan Peternakan mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 ke-3 yaitu "Penguatan Ekonomi Daerah" dan sasaran ke-1, yaitu "meningkatnya efek berganda (multiplier effect) dengan melaksanakan beberapa program dalam upaya untuk mencapai prioritas dan sasaran tersebut, diantaranya :

1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Perkebunan dan Peternakan telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks kepuasan pelayanan masyarakat	100	persen	12,252,331,952	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks kepuasan pelayanan masyarakat	100	persen	12,699,416,702	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	persen	143,600,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	persen	200,564,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	108,800,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	135,764,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	24,800,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	24,800,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	10,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	40,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	12	bulan	11,632,862,874	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	12	bulan	11,656,773,274	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	OB	11,526,773,274	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	OB	11,526,773,274	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500	Dokumen	106,089,600	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500	Dokumen	130,000,000	

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	12	Bulan	97,200,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	12	Bulan	157,200,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	2	Dokumen	97,200,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	2	Dokumen	157,200,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum di dinas	100	persen	276,391,750	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum di dinas	100	persen	582,602,100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen instalasi Listrik	0	Unit	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen instalasi Listrik	0	Unit	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	116,391,750	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	316,992,700	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	35,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	60,609,400	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	5,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	5,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	Laporan	120,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	Laporan	200,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	47,277,328	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	47,277,328	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah kebutuhan komunikasi telfon, air dan listrik kantor (bulan)	0	Bulan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah kebutuhan komunikasi telfon, air dan listrik kantor (bulan)	0	Bulan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	46,277,328	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	46,277,328	

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	55,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	55,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	45,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	45,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	10,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	10,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rehap Gedung Kantor / UPT / PKH	0	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rehap Gedung Kantor / UPT / PKH	0	Unit	-	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Presentasi sarana pertanian (Perkebunan dan Peternakan) yang dimanfaatkan	100	persen	10,795,335,339	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Presentasi sarana pertanian (Perkebunan dan Peternakan) yang dimanfaatkan	100	persen	10,967,481,339	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang terlaksana	100	persen	3,060,434,800	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang terlaksana	100	persen	3,081,434,800	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12	Laporan	2,040,848,800	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12	Laporan	2,061,848,800	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12	Laporan	1,019,586,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12	Laporan	1,019,586,000	

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan mutu benih / bibit ternak	100	persen	50,000,000	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan mutu benih / bibit ternak	100	persen	50,000,000	
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12	Laporan	50,000,000	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12	Laporan	50,000,000	
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Persentase pengawasan obat hewan ditingkat pengecer	100	Persen	-	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Persentase pengawasan obat hewan ditingkat pengecer	100	Persen	-	
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan		Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan	0	Unit	-	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan		Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan	0	Unit	-	
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengawasan penyediaan dan peredaran benih / bibit ternak	100	Persen	1,530,400,000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengawasan penyediaan dan peredaran benih / bibit ternak	100	Persen	1,530,400,000	
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12	Laporan	1,530,400,000	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12	Laporan	1,530,400,000	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Persentase Kegiatan penyediaan Bibit Ternak yang dilaksanakan	100	Persen	6,154,500,539	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Persentase Kegiatan penyediaan Bibit Ternak yang dilaksanakan	100	Persen	6,305,646,539	
	Pengadaan Benih / Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota lain		Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	500	Ekor	6,154,500,539	Pengadaan Benih / Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota lain		Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	500	Ekor	6,305,646,539	

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Presentase Prasarana Perkebunan dan Peternakan yang dimanfaatkan	100	Persen	177,301,269,023	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Presentase Prasarana Perkebunan dan Peternakan yang dimanfaatkan	100	Persen	179,429,051,803	
	Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan	100	Persen	2,676,822,000	Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan	100	Persen	3,148,155,580	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	4	Dokumen	2,618,572,000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	4	Dokumen	2,804,500,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4	Laporan	58,250,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4	Laporan	343,655,580	
	Pembangunan Prasarana Pertanian		Persentase Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Jalan Produksi Perkebunan)	100	Persen	163,546,997,023	Pembangunan Prasarana Pertanian		Persentase Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Jalan Produksi Perkebunan)	100	Persen	165,081,997,023	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	88	Unit	163,546,997,023	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	88	Unit	165,081,997,023	
	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum		Persentase Lahan Penggembalaan Umum yang tersedia	100	Persen	11,077,450,000	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum		Persentase Lahan Penggembalaan Umum yang tersedia	100	Persen	11,198,899,200	
	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum		Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	25	Ha	11,077,450,000	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum		Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	25	Ha	11,198,899,200	
			Jumlah Kandang yang dibangun	4	Kandang				Jumlah Kandang yang dibangun	4	Kandang		

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Populasi hewan ternak yang sehat	65	Persen	836,027,668	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Populasi hewan ternak yang sehat	65	Persen	1,275,227,668	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya kegiatan penjaminan kesehatan hewan dalam daerah kab/kota	100	Persen	442,300,000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya kegiatan penjaminan kesehatan hewan dalam daerah kab/kota	100	Persen	442,300,000	
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4	Laporan	442,300,000	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4	Laporan	442,300,000	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengawasan produk hewan	100	Persen	232,927,668	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengawasan produk hewan	100	Persen	232,927,668	
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan		Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	12	Laporan	232,927,668	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan		Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	12	Laporan	232,927,668	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase terlaksananya pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	100	Persen	160,800,000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase terlaksananya pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	100	Persen	600,000,000	
	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan		Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	12	Laporan	50,000,000	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan		Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	12	Laporan	50,000,000	
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12	Laporan	110,800,000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12	Laporan	550,000,000	

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana	100	Persen	157,050,000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana	100	Persen	352,050,000	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian gangguan tanaman perkebunan	100	Persen	157,050,000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian gangguan tanaman perkebunan	100	Persen	352,050,000	
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5	Ha	157,050,000	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5	Ha	352,050,000	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan	100	Persen	2,469,367,000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan	100	Persen	2,749,367,000	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin usaha pertanian yang dibuat (STDB)	1500	Dokumen	2,469,367,000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin usaha pertanian yang dibuat (STDB)	1500	Dokumen	2,749,367,000	
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1500	Dokumen	2,469,367,000	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1500	Dokumen	2,749,367,000	

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
	UPTD Balai Pembibitan dan Tanaman Perkebunan						UPTD Balai Pembibitan dan Tanaman Perkebunan						
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Presentase Prasarana Perkebunan yang dimanfaatkan	100	100	1,252,218,449	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Presentase Prasarana Perkebunan yang dimanfaatkan	100	100	1,751,978,599	
	Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan	100	Persen	1,252,218,449	Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan	100	Persen	1,751,978,599	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	12	Dokumen	1,252,218,449	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	12	Dokumen	1,751,978,599	
	UPT Pembibitan dan Perawatan Ternak Petangis						UPT Pembibitan dan Perawatan Ternak Petangis						
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Presentasi sarana Peternakan yang dimanfaatkan	100	Persen	651,386,600	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Presentasi sarana Peternakan yang dimanfaatkan	100	Persen	1,559,058,161	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang terlaksana	100	Persen	651,386,600	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang terlaksana	100	Persen	1,559,058,161	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12	Laporan	651,386,600	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12	Laporan	1,559,058,161	

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
	UPT PKH						UPT PKH						
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Populasi hewan ternak yang sehat	65	Persen	2,883,304,940	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Populasi hewan ternak yang sehat	65	Persen	3,527,489,476	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Pelayanan kesehatan hewan di Kab. Paser	100	Persen	2,883,304,940	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Pelayanan kesehatan hewan di Kab. Paser	100	Persen	3,527,489,476	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Kuaro)		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan	502,599,883	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Kuaro)		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan	522,599,883	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Long Ikis)		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan	311,025,532	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Long Ikis)		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan	470,225,532	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Batu Engau)		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan	390,634,725	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Batu Engau)		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan	440,092,125	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Muara Komam)		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan	355,514,000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Muara Komam)		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan	355,514,000	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Tana Paser)		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan	353,504,550	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Tana Paser)		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan	373,504,550	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Pasir Belengkong)		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan	970,026,250	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Pasir Belengkong)		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan	1,365,553,386	
	UPT RPH Jone						UPT RPH Jone						
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Presentase Prasarana Perkebunan dan Peternakan yang dimanfaatkan	100	Persen	461,967,874	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Presentase Prasarana Perkebunan dan Peternakan yang dimanfaatkan	100	Persen	1,209,967,874	
	Pembangunan Prasarana Pertanian		Persentase Terlaksananya pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH) Jone	100	Persen	461,967,874	Pembangunan Prasarana Pertanian		Persentase Terlaksananya pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH) Jone	100	Persen	1,209,967,874	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1	Unit	461,967,874	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1	Unit	1,209,967,874	

3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. saran dan pendapat DPRD berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pada Rancangan Akhir perubahan Renja 2024 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

3. 4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Paser

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel 3.4 Rencana Program dan Kegiatan RKPD dibawah ini:

tabel 3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Dinas Perkebunan dan Peternakan				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
	3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
1	3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks kepuasan pelayanan masyarakat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	74 85 % %	74 85 % %	10.839.651.508,00	12.118.050.602,00	12.252.331.952,00							10.767.000.000,00
	3 27 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	100 %	123.800.000,00	123.800.000,00	123.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan		140.000.000,00
	3 27 01 2.01 00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	108.800.000,00	108.800.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			110.000.000,00
	3	NON URUSAN				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
	3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
2	3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks kepuasan pelayanan masyarakat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	74 85 % %	74 85 % %	10.839.651.508,00	12.118.050.602,00	12.252.331.952,00							10.767.000.000,00
	3 27 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	100 %	123.800.000,00	123.800.000,00	123.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan		140.000.000,00
	3 27 01 2.01 00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
	3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
3	3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks kepuasan pelayanan masyarakat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	74 85 % %	74 85 % %	10.839.651.508,00	12.118.050.602,00	12.252.331.952,00							10.767.000.000,00
	3 27 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	100 %	123.800.000,00	123.800.000,00	123.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan		140.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0,00	5.000.000,00	24.800.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			10.000.000,00
3					NON URUSAN				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks kepuasan pelayanan masyarakat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	74 85 % %	74 85 % %	10.839.651.508,00	12.118.050.602,00	12.252.331.952,00							10.767.000.000,00
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	100 %	123.800.000,00	123.800.000,00	123.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan		140.000.000,00
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks kepuasan pelayanan masyarakat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	74 85 % %	74 85 % %	10.839.651.508,00	12.118.050.602,00	12.252.331.952,00							10.767.000.000,00
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	100 %	123.800.000,00	123.800.000,00	123.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan		140.000.000,00
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			20.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3					NON URUSAN				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks kepuasan pelayanan masyarakat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	74 85 % %	74 85 % %	10.839.651.508,00	12.118.050.602,00	12.252.331.952,00							10.767.000.000,00
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	100 %	123.800.000,00	123.800.000,00	123.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan		140.000.000,00
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks kepuasan pelayanan masyarakat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	74 85 % %	74 85 % %	10.839.651.508,00	12.118.050.602,00	12.252.331.952,00							10.767.000.000,00
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	10.338.374.180,00	11.616.773.274,00	11.616.773.274,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan		10.146.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	0,00	11.526.773.274,00	11.526.773.274,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			10.026.000.000,00
3					NON URUSAN				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks kepuasan pelayanan masyarakat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	74 85 % %	74 85 % %	10.839.651.508,00	12.118.050.602,00	12.252.331.952,00							10.767.000.000,00
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	10.338.374.180,00	11.616.773.274,00	11.616.773.274,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan		10.146.000.000,00
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks kepuasan pelayanan masyarakat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	74 85 % %	74 85 % %	10.839.651.508,00	12.118.050.602,00	12.252.331.952,00							10.767.000.000,00
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	10.338.374.180,00	11.616.773.274,00	11.616.773.274,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan		10.146.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	500 Dokumen	0,00	90.000.000,00	106.089.600,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			120.000.000,00
3					NON URUSAN				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks kepuasan pelayanan masyarakat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	74 85 % %	74 85 % %	10.839.651.508,00	12.118.050.602,00	12.252.331.952,00							10.767.000.000,00
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	10.338.374.180,00	11.616.773.274,00	11.616.773.274,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan		10.146.000.000,00
3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				37.920.302.039,00	84.603.815.661,00	204.337.402.350,00							20.780.750.581,00
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks kepuasan pelayanan masyarakat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	74 85 % %	74 85 % %	10.839.651.508,00	12.118.050.602,00	12.252.331.952,00							10.767.000.000,00
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	97.200.000,00	97.200.000,00	97.200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan		100.000.000,00
3	27	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	97.200.000,00	97.200.000,00	97.200.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			100.000.000,00
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum di dinas	100 %	100 %	178.000.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan		240.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	116.391.750,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			30.000.000,00
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			50.000.000,00
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			10.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			150.000.000,00
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	47.277.328,00	47.277.328,00	47.277.328,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan		46.000.000,00
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			1.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	46.277.328,00	46.277.328,00	46.277.328,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			45.000.000,00
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan		95.000.000,00
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			80.000.000,00
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			15.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian (perkebuan dan peternakan) yang dimanfaatkan	100 %	100 %	3.821.386.600,00	9.294.030.000,00	10.795.335.339,00							5.151.840.000,00
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang terlaksana	100 %	100 %	1.752.186.600,00	1.036.526.000,00	1.036.526.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Kelompok Tani Pekebun		146.120.000,00
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi													
						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	12 Laporan	53.600.000,00	20.000.000,00	2.040.848.800,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			53.040.000,00
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian													
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	12 Laporan	1.047.200.000,00	1.016.526.000,00	1.019.586.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			93.080.000,00
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan mutu benih / bibit ternak	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Kelompok Peternak		151.360.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil													
						Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			151.360.000,00
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan penyediaan dan peredaran benih / bibit ternak	100 %	100 %	107.200.000,00	1.467.200.000,00	1.467.200.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Kelompok Tani Peternak, Masyarakat		86.680.000,00
3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan													
						Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	12 Laporan	107.200.000,00	1.467.200.000,00	1.530.400.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			86.680.000,00
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Kegiatan penyediaan Bibit Ternak yang dilaksanakan	100 %	100 %	1.912.000.000,00	6.740.304.000,00	6.740.304.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Kelompok Tani Peternak		4.767.680.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain													
						Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	500 Ekor	500 Ekor	1.912.000.000,00	6.740.304.000,00	6.154.500.539,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			4.767.680.000,00
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase prasarana perkebunan dan peternakan yang dimanfaatkan	100 %	100 %	19.850.486.323,00	59.001.269.023,00	177.299.269.023,00							3.720.784.600,00
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan	100 %	100 %	2.231.918.449,00	2.474.822.000,00	2.474.822.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Kelompok Tani Pekebun		1.220.784.600,00
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya													
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	4 Laporan	56.250.000,00	56.250.000,00	56.250.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Sawit	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			89.950.000,00
3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian													
						Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	-	5 Ha	0,00	0,00	0,00	-	DBH Sawit	-	-			0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota													
						Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	4 Dokumen	4 Dokumen	923.450.000,00	2.418.572.000,00	2.618.572.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			1.130.834.600,00
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Terlaksananya pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH) Jone Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pertanian	100 %	100 %	16.901.367.874,00	45.621.997.023,00	45.621.997.023,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Kelompok Tani Pekebun, Masyarakat		2.000.000.000,00
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													
						Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 Unit	20 Unit	14.914.400.000,00	45.621.997.023,00	163.546.997.023,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya													
						Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1.525.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			2.000.000.000,00
3	27	03	2.04		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Persentase Lahan Penggembalaan Umum yang tersedia	100 %	100 %	717.200.000,00	10.904.450.000,00	10.904.450.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Kelompok Tani Peternak		500.000.000,00
3	27	03	2.04	0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum													
						Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	25 Ha	25 Ha	717.200.000,00	10.904.450.000,00	11.077.450.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			500.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	60 %	60 %	2.524.332.608,00	1.364.049.036,00	1.364.049.036,00							491.125.981,00
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan penjaminan kesehatan hewan dalam daerah kab/kota	100 %	100 %	442.300.000,00	442.300.000,00	442.300.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Kelompok Tani Peternak, Masyarakat		153.745.981,00
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	4 Laporan	442.300.000,00	442.300.000,00	442.300.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			153.745.981,00
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan produk hewan	100 %	100 %	232.927.668,00	760.949.036,00	760.949.036,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Kelompok Tani Peternak, Masyarakat		107.800.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	27	04	2.02	0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya													
						Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	12 Laporan	12 Laporan	232.927.668,00	760.949.036,00	760.949.036,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			107.800.000,00
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase terlaksananya pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	100 %	100 %	160.800.000,00	160.800.000,00	160.800.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Unit Usaha Produk Hewan		229.580.000,00
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan													
						Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	110.800.000,00	110.800.000,00	110.800.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			209.580.000,00
3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan													
						Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			20.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pertumbuhan produksi tanaman Pangan dan hortikultura Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana	100 09.34 % %	09.34 100 % %	157.050.000,00	157.050.000,00	157.050.000,00							200.000.000,00
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian gangguan tanaman perkebunan	100 %	100 %	157.050.000,00	157.050.000,00	157.050.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Kelompok Tani Pekebun, Masyarakat		200.000.000,00
3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
						Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5 Ha	5 Ha	157.050.000,00	157.050.000,00	157.050.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			200.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	100 %	100 %	727.395.000,00	2.669.367.000,00	2.469.367.000,00							450.000.000,00
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin usaha pertanian yang dibuat (Dokumen)	1500 Dokumen	1500 Dokumen	727.395.000,00	2.669.367.000,00	2.669.367.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Kelompok Tani Pekebun, Masyarakat		450.000.000,00
3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian													
						Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1500 Dokumen	1500 Dokumen	727.395.000,00	2.669.367.000,00	2.469.367.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			450.000.000,00
					UPTD Balai Pembibitan dan Tanaman Perkebunan				0,00	1.252.218.449,00	1.252.218.449,00							650.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				0,00	1.252.218.449,00	1.252.218.449,00							650.000.000,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				0,00	1.252.218.449,00	1.252.218.449,00							650.000.000,00
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase prasarana perkebunan dan peternakan yang dimanfaatkan	100 %	100 %	0,00	1.252.218.449,00	1.252.218.449,00							650.000.000,00
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan	100 %	100 %	0,00	1.252.218.449,00	1.252.218.449,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Kelompok Tani Pekebun, Masyarakat		650.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota													
						Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.252.218.449,00	1.252.218.449,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			650.000.000,00
					UPT Pembibitan dan Perawatan Ternak Petangis				0,00	651.386.600,00	1.064.190.061,00							492.160.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				0,00	651.386.600,00	1.064.190.061,00							492.160.000,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				0,00	651.386.600,00	1.064.190.061,00							492.160.000,00
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian (perkebuan dan peternakan) yang dimanfaatkan	100 %	100 %	0,00	651.386.600,00	1.064.190.061,00							492.160.000,00
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang terlaksana	100 %	100 %	0,00	651.386.600,00	651.386.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Kelompok Tani Peternak, Masyarakat		492.160.000,00
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian													
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	12 Laporan	0,00	651.386.600,00	1.064.190.061,00	Kab. Paser, Batu Engau, Petangis	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			492.160.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					UPT PKH Kuaro				0,00	502.599.883,00	502.599.883,00							175.999.300,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				0,00	502.599.883,00	502.599.883,00							175.999.300,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				0,00	502.599.883,00	502.599.883,00							175.999.300,00
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	60 %	60 %	0,00	502.599.883,00	502.599.883,00							175.999.300,00
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Pelayanan kesehatan hewan di Kab. Paser	100 %	100 %	0,00	502.599.883,00	502.599.883,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Kelompok Tani Peternak, Masyarakat		175.999.300,00
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner													
						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	0,00	502.599.883,00	502.599.883,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			175.999.300,00
					UPT PKH Long Ikis				0,00	311.025.532,00	311.025.532,00							69.525.532,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				0,00	311.025.532,00	311.025.532,00							69.525.532,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				0,00	311.025.532,00	311.025.532,00							69.525.532,00
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	60 %	60 %	0,00	311.025.532,00	311.025.532,00							69.525.532,00
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Pelayanan kesehatan hewan di Kab. Paser	100 %	100 %	0,00	311.025.532,00	311.025.532,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Kelompok Tani Peternak, Masyarakat		69.525.532,00
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner													
						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	0,00	311.025.532,00	311.025.532,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			69.525.532,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					UPT PKH Batu Engau				0,00	390.634.725,00	390.634.725,00							120.334.725,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				0,00	390.634.725,00	390.634.725,00							120.334.725,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				0,00	390.634.725,00	390.634.725,00							120.334.725,00
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	60 %	60 %	0,00	390.634.725,00	390.634.725,00							120.334.725,00
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Pelayanan kesehatan hewan di Kab. Paser	100 %	100 %	0,00	390.634.725,00	390.634.725,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Kelompok Tani Peternak, Masyarakat		120.334.725,00
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner													
						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	0,00	390.634.725,00	390.634.725,00	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			120.334.725,00
					UPT PKH Muara Komam				0,00	355.514.000,00	355.514.000,00							65.364.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				0,00	355.514.000,00	355.514.000,00							65.364.000,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				0,00	355.514.000,00	355.514.000,00							65.364.000,00
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	60 %	60 %	0,00	355.514.000,00	355.514.000,00							65.364.000,00
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Pelayanan kesehatan hewan di Kab. Paser	100 %	100 %	0,00	355.514.000,00	355.514.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Kelompok Tani Peternak, Masyarakat		65.364.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner													
						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	0,00	355.514.000,00	355.514.000,00	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			65.364.000,00
					UPT PKH Tana Paser				0,00	353.504.550,00	353.504.550,00							132.254.550,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				0,00	353.504.550,00	353.504.550,00							132.254.550,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				0,00	353.504.550,00	353.504.550,00							132.254.550,00
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	60 %	60 %	0,00	353.504.550,00	353.504.550,00							132.254.550,00
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Pelayanan kesehatan hewan di Kab. Paser	100 %	100 %	0,00	353.504.550,00	353.504.550,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Kelompok Tani Peternak, Masyarakat		132.254.550,00
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner													
						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	0,00	353.504.550,00	353.504.550,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			132.254.550,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan			Nasional	Daerah			
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					UPT PKH Pasir Belengkong				0,00	970.026.250,00	970.026.250,00							102.776.250,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				0,00	970.026.250,00	970.026.250,00							102.776.250,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				0,00	970.026.250,00	970.026.250,00							102.776.250,00
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	60 %	60 %	0,00	970.026.250,00	970.026.250,00							102.776.250,00
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Pelayanan kesehatan hewan di Kab. Paser	100 %	100 %	0,00	970.026.250,00	970.026.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Kelompok Tani Peternak, Masyarakat		102.776.250,00
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner													
						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	0,00	970.026.250,00	970.026.250,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			102.776.250,00
					UPT RPH Jone				0,00	461.967.874,00	461.967.874,00							386.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				0,00	461.967.874,00	461.967.874,00							386.000.000,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				0,00	461.967.874,00	461.967.874,00							386.000.000,00
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase prasarana perkebunan dan peternakan yang dimanfaatkan	100 %	100 %	0,00	461.967.874,00	461.967.874,00							386.000.000,00
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Terlaksananya pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH) Jone	100 %	100 %	0,00	461.967.874,00	461.967.874,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Masyarakat		386.000.000,00
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan													
						Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit	0,00	461.967.874,00	461.967.874,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Jone	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya			386.000.000,00
								J U M L A H	**37.920.302.039,00**	**84.603.815.661,00**	**204.337.402.350,00**							**20.780.750.581,00**

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tana Paser, 05 Agustus 2024
Kepala Dinas
Perkebunan dan Peternakan

Djoko Bawono, SP. M.Si
Pembina Tk I / IV b
NIP 19730113 199803 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KETAHANAN PANGAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER

TAHUN 2024

DINAS KETAHANAN PANGAN
Kompleks Perkantoran Jl. Kesuma Bangsa
Km 5 Gedung D lantai 2 TANA PASER

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2024 sesuai waktu yang telah ditentukan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2024 mempunyai arti strategis karena merupakan tahun awal dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalan Renstra 2022-2026, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2024 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan yang berkesinambungan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi Instansi Pemerintah maupun Mitra Kerja. Diharapkan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 dapat berjalan dengan tertib sehingga makin mendekatkan pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... ii

Daftar Tabel iiii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud Dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser 15

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024..... 20

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran..... 22

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024..... 24

3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024..... 32

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 38

4.2 Rencana Tindak Lanjut 39

Lampiran - Lampiran

D A F T A R T A B E L

Tabel 2.1	Laporan Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2024	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	18
Tabel 3.1	Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024	22
Tabel 3.2	Reviu Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser	26
Tabel 3.4	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Reviu Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Reviu Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;

3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser, serta susunan garis besar isi dokumen

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Perubahan RKPD 2024 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

TABEL 2.1
LAPORAN EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER

Indikator dan Target kinerja Perangkat Daerah mengacu pada sasaran RKPD :

1. Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan 70%
2. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 98
3. Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 88,5
4. Persentase Penanganan Pangan pada desa rentan rawan Pangan 90,91%
5. Persentase keamanan pangan segar yang diuji 84%

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.			
1	2	3		4			7		8		9		10		11		12	13	14
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya urusan pemerintah	100	persen	6.997.831.234	25	1.226.843.343	25	1.757.276.796				-	50	2.984.120.139	50	42.64	Dinas Ketahanan Pangan
			Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah dengan baik	100	persen		25		25						50		50		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penggganggaran dan evaluasi kinerja	100	persen	225.635.932	25	16.828.639	25	42.375.422				-	50	59.204.061	50	26.24	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	215.000.000	0	16.828.639	0	42.375.422					0	59.204.061	0	27.54	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	laporan	2.000.000	0	0	0	0					0	-	0	0	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	1	laporan	8.635.932	0	0	0	0					0	-	0	0.00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	persen	6.399.218.252	25	1.180.290.286	25	1.682.945.764				-	50	2.863.236.050	50	44.74	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	rg/Bula	6.129.818.252	8	1.117.202.686	8	1.605.712.564					16	2.722.915.250	50	44.42	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Laporan	269.400.000		63.087.600		77.233.200					0	140.320.800	0	52.09	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	persen	244.994.900	25	24.342.357	25	26.948.748				-	50	51.291.105	50	20.94
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	60.000.000	0	0	0	-					0	-	0	0.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	40.524.900	1	1.350.000	1	8.195.000					2	9.545.000	50	23.55
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4	Paket	7.000.000	0	0	0	454.400					0	454.400	0	6.49
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dok	2.475.000	0	-	0	450.000					0	450.000	0.00	18.18
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	129.995.000	0	22.992.357	0	17.849.348					0	40.841.705	0	31.42
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dok	5.000.000	0	0	0	-					0	-	0	0.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	100	persen	85.982.150	25	5.382.061	25	4.055.362				-	50	9.437.423	50	10.98
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1	Laporan	433.200	0	0	0	-					0	-	0.00	0.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan'	1	Laporan	78.568.950	0	5.382.061	0	4.055.362					0	9.437.423	0.00	12
	Penyediaan Jasa Peralata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	6.980.000	0	0	0	-					0	-	0	0.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD	100	persen	42.000.000	0	0	0	951.500				-	0	951.500	0	2.27
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	unit	42.000.000	0	0	0	951.500					0	951.500	0	2.27
Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu,	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	55	persen	1.450.000.000	0	7.752.000	0	24.894.800				-	0	32.646.800	0.00	2.25

aman,merata dan terjangkau yang berbasis sumberdaya lokal secara berkelanjutan serta Meningkatnya penganekaragam an konsumsi pangan masyarakat	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah insfrastruktur lantai jemur	5	unit	1.450.000.000	0	7.752.000	0	24.894.800				-	0	32.646.800	0	2.25
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Infrastruktur lantai jemur	5	unit	1.450.000.000	0	7.752.000	0	24.894.800					0	32.646.800	0	2.25
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat ketersediaan	98		2.734.200.000	24.5	135.154.030	24.5	316.879.615				-	49	220.807.900.00	50.00	8.08
		Tingkat konsumsi	87		3.334.764.498	21.8		21.8						43.5	231.225.745.00	50.00	6.93
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penya	100	persen	2.699.200.000	25	66.322.680	25	155.257.065				-	50	221.579.745	50	8.21
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1	laporan	925.619.500	0	7.080.000	0	28.132.100					0	35.212.100	0	3.80
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1	unit	1.526.380.500	0	44.842.680	0	93.792.800					0	138.635.480	0	9.08
	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1	laporan	158.600.000	0	7.200.000	0	19.966.165					0	27.166.165	0	17.13
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1	dok	88.600.000	0	7.200.000	0	13.366.000					0	20.566.000	0	23.21
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data potensi dan kebutuhan pangan lokal	1	dok	35.000.000	0	7466000	0	2.180.000				-	0	9.646.000	0	27.56
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1	dok	35.000.000	0	7466000	0	2.180.000					0	9.646.000	0	27.56
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian target konsumsi pangan berdasarkan AKG	97.5	persen	3.334.764.498	24	61.365.350	24	159.442.550				-	48	220.807.900	49	6.62

Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	dok	104.524.498	0	8.470.000	0	10.053.750					0	18.523.750	0	17.72
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	laporan	3.166.640.000	0	45.695.350	0	136.838.800					0	182.534.150	0	5.76
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	laporan	63.600.000	0	7.200.000	0	12.550.000					0	19.750.000	0	31.05
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rawan pangan	17.36	persen	340.000.000	4.34	43.431.077	4.34	537.686.843				-	8.68	80.395.277	50.00	23.65
	Persentase penyaluran cadangan pangan	10	persen	1.658.600.000	2.5		2.5						5	500.722.643	50	30.19
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen update data peta FSVA	1	dok	90.000.000	0	0	0	19.519.400				-	0	19.519.400	0	21.69
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan	1	dok	90.000.000	0	0	0	19.519.400					0	19.519.400	0	21.69
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Teratasinya kerawanan pangan da	8	Kec	1.908.600.000	2	43.431.077	2	518.167.443				-	4	561.598.520	50	29.42
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(Satu) Daerah	1	dok	1.658.600.000	0	27.503.077	0	473.219.566					0	500.722.643	0	30.19
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1	laporan	250.000.000	0	15.928.000	0	44.947.877					0	60.875.877	0	24.35
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	84	persen	959.810.000	21	37.030.600	21	459.318.200				-	42	496.348.800	50	51.71
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	84	persen	959.810.000	21	37.030.600	21	459.318.200				-	42	496.348.800	50	51.71

		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	'Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	1	Dok	75.000.000	0	10544000	0	2.322.500					0	12.866.500	0	17.16	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dok	726.210.000	0	7.396.500	0	450.849.600					0	458.246.100	0	63.10	
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1	Dok	158.600.000	0	19.090.100	0	6.146.100					0	25.236.200	0	15.91	
Rata-rata capaian kinerja (%)						17.475.205.732		1.450.211.050		3.096.056.254						4.546.267.304	44	26.02	
Predikat kinerja																	Rendah		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
- UU No.18 Tahun 2012 ttg Pangan Pasal 60
- Tersedianya anggaran pada DPA

Faktor penghambat pencapaian kinerja:
- Surat Perjanjian Kerja berakhir di teriwulan IIIBelum tersedia sumber data pangan lokal di Desa
- Beberapa lokasi akses masih sulit pada saat musim hujan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan III
- Mempercepat proses pengadaan sesuai dengan tahapan dalam SPK
- Berkoordinasi dengan pihak pengambil kebijakan infrastruktur

Tana Paser, Juli 2024

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS KETAHANAN PANGAN

Ir. Hatharudin
Pembina TK. I
NIP. 19650905 199403 1 010

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 44%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.546.267.304 (Empat milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 17.475.205.732 (Tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) atau sebesar 26,02%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser sebesar 44% dengan predikat kinerja Rendah.

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser, maka:

1. Tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser :
   Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.
2. Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser :
   a) Penyusunan perencanaan program di Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
   b) Penetapan kebijakan teknis Bidang Ketahanan Pangan ;
   c) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahananan pangan yang meliputi ketersediaan dan sumberdaya pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan sesuai

dengan norma, standart, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan fungsi organisasi, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser dipimpin oleh Kepala yang disebut dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser, untuk melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan rumah tangga Dinas, dan memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di lingkungan Dinas.

Upaya Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
2. Tingkat ketersediaan pangan (PPH) Ketersediaan
3. Persentase Penyaluran cadangan Pangan
4. Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji
5. Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan
6. Tingkat konsumsi pangan (PPH)Konsumsi
7. Nilai SAKIP
8. Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah dengan baik.

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022-2026, sehingga pengukuran

kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Ketahanan Pangan secara terperinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser mengacu pada Indikator kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada table 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra tahun ke-						Realisasi Capaian			Realisasi	Capaian Kinerja
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tujuan : Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang berbasis pangan lokal	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	30%	31%	50%	55%	60%	65%	NA	64,51	64,51	NA	
Sasaran : Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman,merata dan terjangkau yang berbasis sumberdaya lokal secara berkelanjutan serta Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat	Tingkat ketersediaan pangan (PPH) Ketersediaan	97,70	97,77	97,90	98	98,5	99	98,11	98,42	98,42	NA	
	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	71,67%	80%	82%	84%	86%	88%	72,73	80	80	NA	
	Persentase Penanganan Desa Rentan Rawan Pangan	20,80%	18,75%	18,05%	17,36%	16,66%	15,97%	24,31	17,36	17,36	NA	
	Tingkat konsumsi pangan (PPH)Konsumsi	85	85	86	87	88	89	86,5	85,70	85,70	NA	
Tujuan : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang responsif dan tangkas	Nilai SAKIP dan APIP eksternal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	
Sasaran : Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Indikator kinerja persentase penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian pangan, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar N/A dari target sebesar 55% dengan persentase capaian kinerja sebesar N/A %;
2. Indikator kinerja Tingkat ketersediaan pangan (PPH) Ketersediaan, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar N/A dari target sebesar 98 dengan persentase capaian kinerja sebesar N/A %;
3. Indikator kinerja persentase Penyaluran cadangan Pangan, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar N/A dari target sebesar 10% dengan persentase capaian kinerja sebesar N/A %;
4. Indikator kinerja Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar N/A dari target sebesar 84% dengan persentase capaian kinerja sebesar N/A %;
5. Indikator kinerja Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar N/A dari target sebesar 17,36% dengan persentase capaian kinerja sebesar N/A %;
6. Indikator kinerja Tingkat konsumsi pangan (PPH) Konsumsi, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar N/A dari target sebesar 87% dengan persentase capaian kinerja sebesar N/A %;

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang

ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
2. Juknis pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang terlambat
3. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
4. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat
5. Pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang pangan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Reviu Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Tujuan : Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang berbasis pangan lokal	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan	Jumlah Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang diadakan dibagi jumlah target Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan x 100%	70%	70%
Sasaran : Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman,merata dan	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Jumlah angka yang dicapai dalam keragaman ketersediaan kelompok pangan (% AKE x bobot masing-masing kelompok pangan)	98	98

terjangkau yang berbasis sumberdaya lokal secara berkelanjutan serta Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat	Persentase keamanan pangan segar yang diuji	Jumlah Sampel pangan aman yang diuji dibagi Jumlah Sampel pangan yang diuji dikali 100%	84%	84%
	Persentase Penanganan Pangan pada Desa rentan rawan Pangan	Jumlah Desa yang dibantu pangan dibagi Jumlah Desa rentan rawan pangan dikali 100%	10,42%	10,42%
	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Jumlah angka yang dicapai dalam keragaman konsumsi kelompok pangan (% AKG x bobot masing-masing kelompok pangan)	87	87
Tujuan : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang responsif dan tangkas	Nilai SAKIP dan APIP eksternal	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	BB
Sasaran : Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah dengan baik	Jumlah Pelaksanaan urusan pemerintahan x 100%	100%	100%

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan dan tidak terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023 yaitu “PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke-1, yaitu “**Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian”.**

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

TABEL 3.2
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER

No.	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				**17.230.210.832**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**21.175.084.781**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Paser	**Terlaksananya urusan pemerintah**	**100%**	**6.752.836.334**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Paser	**Terlaksananya urusan pemerintah**	**100%**	**6.862.464.534**	
		Kab. Paser	**Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah dengan baik**	**100%**			Kab. Paser	**Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah dengan baik**	**100%**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	**Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**100%**	**225.635.932**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Paser	**Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**100%**	**335.264.132**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	215.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	324.628.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	2.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	1 laporan	8.635.932	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	1 laporan	8.635.932	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser	**Tingkat kepuasan pelayanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**6.399.218.252**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Paser	**Tingkat kepuasan pelayanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**6.399.218.252**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Org/Bulan	6.129.818.252	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Org/Bulan	6.129.818.252	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	269.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	269.400.000	

No.	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser	**Tingkat Kepuasa Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**271.410.250**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Paser	**Tingkat Kepuasa Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**271.410.250**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	60.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	408.543.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.524.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.524.900	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	7.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	7.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	2.475.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	2.475.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	129.995.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	129.995.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	5.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	**Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran**	**100%**	**85.982.150**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Paser	**Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran**	**100%**	**85.982.150**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 Laporan	433.200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 Laporan	433.200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	78.568.950	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	78.568.950	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.980.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.980.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	**Persentase Pemeliharaan BMD**	**100%**	**42.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Paser	**Persentase Pemeliharaan BMD**	**100%**	**42.000.000**	

No.	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	42.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	42.000.000	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Kab. Paser	**Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan**	**55%**	**1.450.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Kab. Paser	**Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan**	**55%**	**1.450.000.000**	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	**Jumlah Infrasuruktur pendukung kemandirian pangan**	**5 Unit**	**1.450.000.000**	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Paser	**Jumlah Infrasuruktur pendukung kemandirian pangan**	**5 Unit**	**1.450.000.000**	
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Kab. Paser	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	1 Unit	1.450.000.000	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Insfrastruktur pendukung kemandirian pangan	6 Unit	1.450.000.000	
3	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Kab. Paser	**- Tingkat Ketersediaan**	**98**	**6.068.964.498** **2.734.200.000**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Kab. Paser	**- Tingkat Ketersediaan**	**98**	**8.635.050.448** **3.485.057.200**	
		Kab. Paser	**- Tingkat Konsumsi**	**87**	**3.334.764.498**		Kab. Paser	**- Tingkat Konsumsi**	**87**	**5.149.993.248**	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Paser	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan	100%	**2.699.200.000**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Kab. Paser	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan	100%	**3.450.057.200**	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Paser	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	925.619.500	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Paser	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1.130.776.000	
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kab. Paser	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 unit	1.526.380.500	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kab. Paser	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 unit	1.995.388.500	
	Pemantauan Stok Pangan	Kab. Paser	Informasi Stok Pangan	1 laporan	158.600.000	Pemantauan Stok Pangan	Kab. Paser	Informasi Stok Pangan	1 laporan	235.292.700	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Dok	88.600.000	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Dok	88.600.000	

No.	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	**Tersedianya data potensi dan kebutuhan pangan lokal**	**1 Dok**	**35.000.000**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Kab. Paser	**Tersedianya data potensi dan kebutuhan pangan lokal**	**1 Dok**	**35.000.000**	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Paser	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dok	35.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Paser	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dok	35.000.000	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Paser	**Persentase capaian target konsumsi pangan berdasarkan AKG**	**98**	**3.334.764.498**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Kab. Paser	**Persentase capaian target konsumsi pangan berdasarkan AKG**	**98**	**5.149.993.248**	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kab. Paser	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dok	104.524.498	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kab. Paser	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dok	923.024.498	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Paser	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	3.166.640.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Paser	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	4.143.122.750	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kab. Paser	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	63.600.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kab. Paser	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	83.846.000	
4	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Kab. Paser	**Persentase penanganan desa rawan pangan**	**17.36%**	**1.998.600.000** **340.000.000**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Kab. Paser	**Persentase penanganan desa rawan pangan**	**17.36%**	**3.122.942.300** **340.000.000**	
		Kab. Paser	**Persentase penyaluran cadangan pangan**	**10%**	**1.658.600.000**		Kab. Paser	**Persentase penyaluran cadangan pangan**	**10%**	**2.782.942.300**	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kab. Paser	**Dokumen Update data peta FSVA**	**1 Dok**	**90.000.000**	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Kab. Paser	**Dokumen Update data peta FSVA**	**1 Dok**	**90.000.000**	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Paser	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan	1 Dok	90.000.000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Paser	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan	1 Dok	90.000.000	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	**Teratasinya kerawanan pangan pangan daerah**	**8 Kec**	**1.908.600.000**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kab. Paser	**Teratasinya kerawanan pangan pangan daerah**	**8 Kec**	**3.032.942.300**	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(Satu) Daerah	1 dok	1.658.600.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Lap	2.782.942.300	

No.	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 laporan	250.000.000	Pelaksanaaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah	1 Dok	250.000.000	
5	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Kab. Paser	**Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji**	**84%**	**959.810.000**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Kab. Paser	**Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji**	**84%**	**1.104.627.500**	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	**Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar**	**84%**	**959.810.000**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Paser	**Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar**	**84%**	**1.104.627.500**	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Paser	'Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dok	75.000.000	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dok	120.200.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	726.210.000	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	815.127.500	
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dok	158.600.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	169.300.000	

Tana Paser, Juli 2024

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS KETAHANAN PANGAN

Ir. Tajuddin

Pembina TK. I

NIP. 19650905 199403 1 010

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. saran dan pendapat DPRD berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Pada Perubahan RKPD 2024 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2023

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2023, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	APBD Murni Tahun 2024			Perubahan Tahun 2024			Bertambah/ Berkurang		Ket
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09	Dinas Ketahanan Pangan				17.475.205.732			17.475.205.732	-	-	
2.09	Dinas Ketahanan Pangan				17.475.205.732			17.475.205.732	-	-	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaria	Kab. Paser	72%	6.997.831.234	Kab. Paser	72%	6.997.831.234	-	-	
		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah dengan baik	Kab. Paser	100%		Kab. Paser	100%				
2.09.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Paser	100%	225.635.932	Kab. Paser	100%	225.635.932	-	-	
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	4 dokumen	215.000.000	Kab. Paser	4 dokumen	215.000.000	-	-	
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	1 laporan	2.000.000	Kab. Paser	1 laporan	2.000.000	-	-	
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	mlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangk	Kab. Paser	1 laporan	8.635.932	Kab. Paser	1 laporan	8.635.932	-	-	
2.09.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Paser	100%	6.399.218.252	Kab. Paser	100%	6.399.218.252	-	-	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kab. Paser	14 Bulan	6.129.818.252	Kab. Paser	14 Bulan	6.129.818.252	-	-	
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Paser	3 Laporan	269.400.000	Kab. Paser	3 Laporan	269.400.000	-	-	
2.09.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Paser	100%	244.994.900	Kab. Paser	100%	244.994.900	-	-	
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	4 paket	60.000.000	Kab. Paser	4 paket	60.000.000	-	-	
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	4 Paket	40.524.900	Kab. Paser	4 Paket	40.524.900	-	-	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	4 Paket	7.000.000	Kab. Paser	4 Paket	7.000.000	-	-	
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Paser	1 Dokumen	2.475.000	Kab. Paser	1 Dokumen	2.475.000	-	-	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	APBD Murni Tahun 2024			Perubahan Tahun 2024			Bertambah/ Berkurang		Ket
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.01.2.06.0007	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	1 Laporan	129.995.000	Kab. Paser	1 Laporan	129.995.000	-	-	
2.09.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Paser	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Paser	1 Dokumen	5.000.000			
2.09.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	Kab. Paser	100%	85.982.150	Kab. Paser	100%	85.982.150	-	-	
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Kab. Paser	1 Laporan	433.200	Kab. Paser	1 Laporan	433.200	-	-	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan'	Kab. Paser	1 Laporan	78.568.950	Kab. Paser	1 Laporan	78.568.950	-	-	
2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	1 Laporan	6.980.000	Kab. Paser	1 Laporan	6.980.000	-	-	
2.09.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD	Kab. Paser	100%	42.000.000	Kab. Paser	100%	42.000.000	-	-	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Paser	2 Unit	42.000.000	Kab. Paser	2 Unit	42.000.000	-	-	
2.09.002	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Kab. Paser	50%	1.450.000.000	Kab. Paser	50%	1.450.000.000	-	-	
2.09.002.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah insfrastruktur lantai jemur	Kab. Paser	5 Unit	1.450.000.000	Kab. Paser	5 Unit	1.450.000.000	-	-	
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Infrastruktur lantai jemur	Kab. Paser	5 Unit	1.450.000.000	Kab. Paser	5 Unit	1.450.000.000	-	-	
2.09.003	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat konsumsi pangan	Kab. Paser	86	3.334.764.498	Kab. Paser	86	3.334.764.498	-	-	
		Tingkat ketersediaan pangan	Kab. Paser	97.9	2.734.200.000	Kab. Paser	97.9	2.734.200.000			
2.09.003.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran	Kab. Paser	100 persen	2.699.200.000	Kab. Paser	100 persen	2.699.200.000	-	-	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kab. Paser	1 Laporan	925.619.500	Kab. Paser	1 Laporan	925.619.500	-	-	
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Kab. Paser	1 unit	1.526.380.500	Kab. Paser	1 unit	1.526.380.500	-	-	
2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Kab. Paser	1 laporan	158.600.000	Kab. Paser	1 laporan	158.600.000	-	-	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	APBD Murni Tahun 2024			Perubahan Tahun 2024			Bertambah/ Berkurang		Ket
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	1 Dok	88.600.000	Kab. Paser	1 Dok	88.600.000	-	-	
2.09.003.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data potensi dan kebutuhan pangan lokal	Kab. Paser	1 Dokumen	35.000.000	Kab. Paser	1 Dokumen	35.000.000	-	-	
2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Paser	1 dokumen	35.000.000	Kab. Paser	1 dokumen	35.000.000	-	-	
2.09.003.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian target konsumsi pangan berdasarkan AKG	Kab. Paser	97.5	3.334.764.498	Kab. Paser	97.5	3.334.764.498	-	-	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Paser	1 dokumen	104.524.498	Kab. Paser	1 dokumen	104.524.498	-	-	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Paser	1 Laporan	3.166.640.000	Kab. Paser	1 Laporan	3.166.640.000	-	-	
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kab. Paser	1 Laporan	63.600.000	Kab. Paser	1 Laporan	63.600.000	-	-	
2.09.004	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rawan pangan	Kab. Paser	17.36%	1.748.600.000	Kab. Paser	17.36%	1.748.600.000	-	-	
		Persentase penyaluran cadangan panga	Kab. Paser	10%	250.000.000	Kab. Paser	10%	250.000.000	-	-	
2.09.004.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen update data peta FSVA	Kab. Paser	1 Dokumen	90.000.000	Kab. Paser	1 Dokumen	90.000.000	-	-	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terupdatenya peta kerentanan dan ket	Kab. Paser	1 dokumen	90.000.000	Kab. Paser	1 dokumen	90.000.000	-	-	
2.09.004.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Teratasinya kerawanan pangan daerah	Kab. Paser	8 Kev.	1.908.600.000	Kab. Paser	8 Kev.	1.908.600.000	-	-	
2.09.04.2.02.0003	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(Satu) Daerah	Kab. Paser	1 dok	1.658.600.000	Kab. Paser	1 dok	1.658.600.000	-	-	
2.09.04.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	1 laporan	250.000.000	Kab. Paser	1 laporan	250.000.000	-	-	
2.09.005	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	Kab. Paser	82%	959.810.000	Kab. Paser	82%	959.810.000	-	-	
2.09.005.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	Kab. Paser	84.50%	959.810.000	Kab. Paser	84.50%	959.810.000	-	-	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	APBD Murni Tahun 2024			Perubahan Tahun 2024			Bertambah/ Berkurang		Ket
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.04.2.01.0004	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Kab. Paser	1 dokumen	75.000.000	Kab. Paser	1 dokumen	75.000.000	-	-	
2.09.04.2.01.0007	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Paser	1 dokumen	726.210.000	Kab. Paser	1 dokumen	726.210.000	-	-	
2.09.04.2.01.0009	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	1 dokumen	158.600.000	Kab. Paser	1 dokumen	158.600.000	-	-	

Tana Paser, Juli 2024

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KETAHANAN PANGAN PASER

Ir. Kaharudin

Pembina T.K. I

NIP. 19650905 199403 1 010

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai arti yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2 Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tana Paser, 1 Agustus 2024

Kepala Dinas,

Ir. Taharudin
Pembina Tk I
NIP 19650905 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KETAHANAN PANGAN
Komplek Perkantoran Jl. Kesuma Bangsa KM.5 Gedung D Lt 2 Kav.1
Telp. (0543) 5220951 Fax (0543) 5220951 Kode Pos. 76211
TANA PASER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PASER
NOMOR : 800/20/DKP/2023

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PASER

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang diartikan sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun ;

b. bahwa untuk maksud butir a konsideran ini dan demi lebih efektif dan terarahnya pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah (PD) Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026.

6. Peraturan Bupati Paser Nomor 23 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susuanan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) adalah :
1. Membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
2. Mengevaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun lalu dan Capaian Renstra;
3. Menyiapkan Dokumen Pendukung;
4. Melakukan Koreksi dan Perbaikan terhadap draft RENJA PD dan finalisasi RENJA PD Tahun 2024;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi pada instansi terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 05 Desember 2023

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KETAHANAN PANGAN

Ir. TAHARUDIN
Pembina Tk.I/IV b
NIP. 19650905 199403 1 010

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser
Nomor : 800/20/DKP/2023
Tanggal : 05 Desember 2023
Tentang : Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) Dinas Ketahanan Kabupaten Paser Tahun 2024

Daftar Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Sekretaris	Ketua Pelaksana
3.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Staf Subbag Perencanaan	Anggota
5.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Sumberdaya Pangan	Anggota
6.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Anggota
7.	Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Anggota
8.	Kepala Bidang Keamanan Pangan	Anggota

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 05 Desember 2023

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS KETAHANAN PANGAN

Ir. TAHARUDIN
Pembina Tk.I/IV b
NIP. 19650905 199403 1 010

AGENDA KERJA PERUBAHAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2024

No.	Tahapan Penyusunan RENJA Perubahan	Tanggal	Keterangan
1	Penyusunan Rancangan perubahan RENJA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024	17-22 Mei 2024	
2	Penyampaian Rancangan perubahan RENJA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 kepada BAPPEDA	23 Mei 2024	
3	Verifikasi Rancangan perubahan RENJA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 oleh BAPPEDA	9 Juli 2024	
4	Penyempurnaan Rancangan perubahan RENJA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 berdasarkan hasil verifikasi BAPPEDA	10-25 Juli 2024	
5	Penyampaian Rancangan Akhir perubahan RENJA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 kepada BAPPEDA	30 Juli 2024	
6	Verifikasi Rancangan Akhir perubahan RENJA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 oleh BAPPEDA	31 Juli 2024	
7	Penyempurnaan Rancangan Akhir perubahan RENJA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 berdasarkan hasil verifikasi BAPPEDA	1-8 Agustus 2024	
8	Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan RENJA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 kepada BAPPEDA	9 Agustus 2024	

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 2

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Triwulan II 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 16

2.3. Faktor Pendorong dan Penghambat..... 18

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA KAB.PASER

3.1. Tujuan dan Sasaran 19

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 20

3.3. Penelaahan Program dan Usulan Masyarakat 29

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan 29

BAB IV PENUTUP

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan..... 40

4.2. Rencana Tindak Lanjut 40

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2/KEP- /2024
TANGGAL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan

RKPD Tahun 2024;

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Pendapatan Daerah hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Paser Nomor 27 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventariasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;
Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah, keterkaitan antara Renja Badan Pendapatan Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Badan Pendapatan Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Secara detail pelaksanaan untuk program-program Bapenda Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 2.250.000,- atau 2,96% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 75.999.500,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini di antaranya tersedianya dokumen RENJA dan RENSTRA SKPD.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 150.540.263,- atau 49,23% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 305.765.500,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu Tersusunnya dokumen RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024.

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 38.675.800,- atau 43,25% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 89.429.984,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu Tersusunnya dokumen Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024.

1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 34.253.200,- atau 34,44% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 99.446.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu Tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (LKjIP).

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 4.613.429.235,- atau 43,34% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.643.889.195,- Tersedianya gaji dan tunjangan ASN adalah hasil dari capaian sub kegiatan ini.

1.2.2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 161.655.385,- atau 36,83% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 438.910.000,- Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini yaitu Tersedianya Laporan keuangan SKPD serta dokumen pelaksanaan akutansi SKPD.

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 302.215.000,- atau 82,44% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 366.592.176,- hasil yang akan dicapai tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

1.3.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 147.044.000,- atau 50,37% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 291.947.364,- hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini yaitu Tersedianya ATK, sarana kebersihan dan makanan dan minuman rapat.

1.3.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 97.922.600,- atau 40,38% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 242.531.800,- hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini tersedianya barang cetak seperti Amplop, Map, SPPT dan STTS, Fotocopy dan Penjilidan.

1.3.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 3.817.500,- sudah terealisasi sebesar Rp.1.350.000,- atau 35,36% hasil yang telah diselesaikan yaitu tersedianya koran dan bahan bacaan perundang-undangan.

1.3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 44.827.022,- atau 12,81% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 350.000.000,- hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini yaitu terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di dalam maupun luar daerah.

1.3.6. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 188.374.849,- atau 37,67% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 500.046.991,- hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini yaitu Terlaksananya Penatausahaan Arsip dinamis yang baik dan benar pada SKPD

1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 349.980,- telah terealisasi 97,43% atau sebesar Rp. 341.000,- hasil yang dicapai tersedianya Materai untuk kegiatan kantor.

1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 67.195.918,- atau 40,87% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 164.400.000,- Untuk keperluan belanja jasa kantor meliputi belanja telepon , belanja air dan belanja listrik.

1.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 9.091.000,- atau 23,02% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 39.500.000,- hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini tersedianya mobil dinas yang dipelihara dan surat perizinan kendaraan dinas.

1.5.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 18.300.000,- atau 38,14% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 47.985.000,- hasil dicapai yaitu perlengkapan gedung kantor yang terpelihara serta tercapainya pemeliharaan/rehab gedung kantor.

2. Program pengelolaan Pendapatan Daerah

2.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.1.1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 103.321.419,- atau 41,58% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.248.489.000,- hasil yang akan dicapai tersedianya Dokumen Perencanaan dan pengembangan pendapatan.

2.1.2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 95.859.714,- atau 38,94% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 246.202.000,-. Hasil yang dicapai masih setengah dari target dikarenakan kegiatan dilaksanakan pada bulan desember.

2.1.3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.120.227.574,- atau 28,76% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 418.072.900,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi pajak daerah meliputi kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Paser.

2.1.4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 67.274.036,- atau 26,25% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 256.265.200,- Pada sub kegiatan ini didapatkan hasil berupa jumlah objek pajak yang didata dalam bentuk satuan dokumen.

2.1.5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 89.910.724,- atau 26,19% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 343.268.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tersedianya dokumen penerimaan pajak daerah.

2.1.6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 352.098.570,- atau 45,58% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 772.453.300,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu tersedianya dokumen jumlah PBB dan BPHTB yang telah diverifikasi.

2.1.7. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 82.403.102,- atau 33,56% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 245.572.200,-. Hasil yang dicapai yaitu Tersedianya dokumen wajib pajak yang telah ditetapkan.

2.1.8. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 53.320.000,- atau 21,83% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 244.300.000,-.Hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen tentang jumlah pelayanan dan konsultasi pajak yang diterima.

2.1.9. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 30.624.800,- atau 9,19% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 333.144.000,- tersedianya dokumen berisi jumlah data hasil pemeriksaan pajak daerah adalah capaian yang terdapat pada sub kegiatan ini.

2.1.10. Penagihan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 215.036.749,- atau 37,63% dari jumlah

anggaran yang tersedia sebesar Rp. 571.391.600,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan adalah tunggakan pajak daerah yang telah diselesaikan.

2.1.11. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 23.265.448,- atau 11,85% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 196.393.200,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah diselesaikan 12 kasus keberatan pajak daerah dari 41 kasus yang ditargetkan.

2.1.12. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 73.461.460,- atau 29,38% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 250.000.000,- Tersedianya Dokumen Laporan Retribusi Daerah.

Hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**80%**		**Rp 13,766,194,037**		**Rp 24,512,145,274**	**74%**	**Rp 13,660,610,990**		**Rp 1,854,963,450**		**Rp 4,022,501,822**	74.80%	**Rp 5,877,465,272**		**Rp 30,389,610,546**		**221%**	Badan Pendapatan Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**6**	**Dokumen**	**Rp 399,736,371**	**12**	**Rp 899,779,189**	6	**Rp 570,640,984**	**2**	**Rp 66,070,266**	2	**Rp 159,648,997**	6	**Rp 225,719,263**	18	**Rp 1,125,498,452**	**300%**	**258%**	Badan Pendapatan Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen RENSTRA dan RENJA	2	Dokumen	Rp 42,560,680	4	Rp 56,552,000	2	Rp 75,999,500	0	-	1	Rp 2,250,000	1	2,250,000	5	Rp 58,802,000	250%	138%	Badan Pendapatan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan	1	Dokumen	Rp 125,869,026	2	Rp 439,733,018	1	Rp 305,765,500	1	Rp 52,975,866	0	Rp 97,564,397	1	Rp 150,540,263	3	Rp 590,273,281	300%	469%	Badan Pendapatan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1	Dokumen	Rp 90,394,182	2	Rp 182,942,538	1	Rp 89,429,984	0	Rp 13,094,400	0	Rp 25,581,400	0	Rp 38,675,800	2	Rp 221,618,338	200%	245%	Badan Pendapatan Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja	2	Dokumen	Rp 140,912,483	4	Rp 220,551,633	2	Rp 99,446,000	0	Rp -	1	Rp 34,253,200	1	Rp 34,253,200	5	Rp 254,804,833	250%	181%	Badan Pendapatan Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan**	**100%**	**Persen**	**Rp 12,380,954,983.23**	95%	**Rp 20,472,136,853**	**100%**	**Rp 11,082,799,195**	13.42%	**Rp 1,487,480,959**	30%	**Rp 3,287,603,661**	43%	**Rp 4,775,084,620**	**138%**	Rp 25,247,221,473	**138%**	**270%**	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	Rp 12,110,846,090.76	14	Rp 19,719,637,930	14	Rp 10,643,889,195	4	Rp 1,427,211,391	4	Rp 3,186,217,844	8	Rp 4,613,429,235	22	Rp 24,333,067,165	2200%	201%	Badan Pendapatan Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Tahun	Rp 270,108,892.47	2	Rp 752,498,923	1	Rp 438,910,000	0	Rp 60,269,568	0	Rp 101,385,817	0	Rp 161,655,385.00	2	Rp 914,154,308	200%	338%	Badan Pendapatan Daerah

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Umum**	**100%**	**Persen**	**Rp 523,397,040.38**	100%	**Rp 2,762,254,418**	**100%**	**Rp 1,754,935,831**	13.88%	**Rp 243,655,863**	30.66%	**Rp 538,077,608**	45%	**Rp 781,733,471**	1	Rp 3,543,987,889	**145%**	**665%**	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	Unit	Rp 92,000,000	31	Rp 454,394,193	15	Rp 366,592,176	0	Rp -	7	Rp 302,215,000	7	Rp 302,215,000	38	Rp 756,609,193	253%	822%	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK, sarana Kebersihan dan makanan dan minuman Rapat	10	Jenis	Rp 70,254,182	82	Rp 472,920,350	10	Rp 291,947,364	3	Rp 46,849,600	4	Rp 100,194,400	7	Rp 147,044,000	89	Rp 619,964,350	890%	882%	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	20	Jenis	Rp 102,602,632	28	Rp 449,363,100	20	Rp 242,531,800	3	Rp 97,922,600	0	Rp -	3	Rp 97,922,600	31	Rp 547,285,700	155%	533%	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya koran dan peraturan perundang-undangan	365	Exampler	Rp 1,246,345.38	1025	Rp 4,125,000	365	Rp 3,817,500	180	Rp 675,000	180	Rp 675,000	360	Rp 1,350,000	1385	Rp 5,475,000	379%	439%	Badan Pendapatan Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah maupun luar daerah	40	Kali	Rp 141,551,424	75	Rp 468,564,495	35	Rp 350,000,000	6	Rp 16,626,422	6	Rp 28,200,600	12	Rp 44,827,022	87	Rp 513,391,517	218%	363%	Badan Pendapatan Daerah
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola SKPD	1850	Berkas	Rp 115,742,457	8249	Rp 912,887,280	1800	Rp 500,046,991	107	Rp 81,582,241	201	Rp 106,792,608	308	Rp 188,374,849	8557	Rp 1,101,262,129	463%	951%	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pengadministrasian Umum Berjalan dengan Baik**	**100%**	**Persen**	**Rp 462,105,642**	100%	**Rp 227,464,352**	**100%**	**Rp 164,749,980**	21.58%	**Rp 35,556,362**	19.41%	**Rp 31,980,556**	0.41	**Rp 67,536,918**	1	**Rp 295,001,270**	**141%**	**208%**	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya benda pos dan Materai	60	Lembar	Rp 727,650	124	Rp 1,022,600	60	Rp 349,980	30	Rp 341,000	0	Rp -	30	Rp 341,000	154	Rp 1,363,600	257%	187%	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik	tersedianya belanja telepon,air,listrik, dan internet	12	Bulan	Rp 128,201,978	25	Rp 226,441,752	12	Rp 164,400,000	3	Rp 35,215,362	3	Rp 31,980,556	6	Rp 67,195,918	31	Rp 293,637,670	258%	229%	Badan Pendapatan Daerah

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berjalan dengan baik**	**100%**		**Rp 166,588,007**	100%	**Rp 150,510,462**	**100%**	**Rp 87,485,000**	25.38%	**Rp 22,200,000**	5.93%	**Rp 5,191,000**	31%	**Rp 27,391,000**	1	Rp 177,901,462	**131%**	**196%**	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jumlah mobil jabatan/operasional yang dipelihara dan surat perizinan kendaraan dinas/operasional	5	Unit	Rp 26,588,007	22	Rp 77,675,462	5	Rp 39,500,000	0	3,900,000	2	Rp 5,191,000	2	Rp 9,091,000	24	Rp 86,766,462	480%	326%	Badan Pendapatan Daerah
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	1	Tahun	Rp 140,000,000	2	Rp 72,835,000	1	Rp 47,985,000	0	18,300,000	0	Rp -	0	Rp 18,300,000	2	Rp 91,135,000	200%	65%	Badan Pendapatan Daerah
2	**Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Rasio PAD terhadap APBD**	**8.50%**	**Persen**	**Rp 2,783,392,576.50**	5.38%	**Rp 7,021,142,096**	**8%**	Rp 4,125,551,400	0.27%	**Rp 422,675,949**	2.11%	**Rp 884,127,647**	2.38%	**Rp 1,306,803,596**	18%	**Rp 8,327,945,692**	**215%**	**299%**	Badan Pendapatan Daerah
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Persentase Peningkatan PAD**	**15%**	**Persen**	**Rp 2,783,392,576.50**	-57.80%	**Rp 7,021,142,096**	**12%**	**Rp 4,125,551,400**	-51.92%	**Rp 422,675,949**	-39.00%	**Rp 884,127,647**		**Rp 1,306,803,596**	-279.53%	Rp 8,327,945,692	**-1864%**	**315%**	Badan Pendapatan Daerah
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp 195,369,021.50	2	Rp 434,249,708	1	Rp 248,489,000	0	Rp 11,300,000	0	Rp 92,021,419	0	Rp 103,321,419	2	Rp 537,571,127	200%	275%	Badan Pendapatan Daerah
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak dan Kebijakan Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp 178,385,828	2	Rp 474,323,461	1	Rp 246,202,000	0	Rp 15,850,000	0	Rp 80,009,714	0	Rp 95,859,714	2	Rp 570,183,175	200%	320%	Badan Pendapatan Daerah
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan, Penyuluhan dan Penyebarluasan	10	Kecamatan	Rp 185,209,847	20	Rp 647,311,690	1	Rp 418,072,900	0	Rp 24,893,168	9	Rp 95,334,406	9	Rp 120,227,574	29	Rp 767,539,264	290%	414%	Badan Pendapatan Daerah
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang didata	1	Dokumen	Rp 171,153,825	2	Rp 374,006,269	1	Rp 256,265,200	0	Rp 12,160,000	0	Rp 55,114,036	0	Rp 67,274,036	2	Rp 441,280,305	200%	258%	Badan Pendapatan Daerah

		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Dokumen Penerimaan Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp 192,790,667	2	Rp 496,952,221	1	Rp 343,268,000	0	Rp 43,591,000	0	Rp 46,319,724	0	Rp 89,910,724	2	Rp 586,862,945	200%	304%	Badan Pendapatan Daerah
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah PBB yang diverifikasi	87600	WP PBB	Rp 300,870,668	100750	Rp 891,783,000	87200	Rp 772,453,300	527	Rp 158,629,018	334	Rp 193,469,552	861	Rp 352,098,570	101,611	Rp 1,243,881,570	116%	413%	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah BPHTB yang diverifikasi	1550	WP BPHTB		7361		1480		334		468		802		8163		527%	527%	Badan Pendapatan Daerah
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang ditetapkan	1700	WP	Rp 236,112,264	11865	Rp 547,788,664	1610	Rp 245,572,200	847	Rp 23,024,000	1042	Rp 59,379,102	1889	Rp 82,403,102	13754	Rp 630,191,766	809%	267%	Badan Pendapatan Daerah
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak yang diterima	1	Dokumen	Rp 340,000,000	2	Rp 923,361,306	1	Rp 244,300,000	0	Rp 12,898,000	0	Rp 40,422,000	0	Rp 53,320,000	2	Rp 976,681,306	200%	287%	Badan Pendapatan Daerah
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp 196,631,727	2	Rp 503,232,472	1	Rp 333,144,000	0	Rp 13,765,800	0	Rp 16,859,000	0	Rp 30,624,800	2	Rp 533,857,272	200%	272%	Badan Pendapatan Daerah
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah tunggakan Pajak Daerah yang diselesaikan	Rp 1,600,000,000	Rupiah	Rp 320,305,815	Rp 1,810,321,950	Rp 757,606,919	1,400,000,000	Rp 571,391,600	Rp 152,989,041	Rp 71,780,803	Rp 167,103,772	Rp 143,255,946	Rp 320,092,813	Rp 215,036,749	Rp 2,130,414,763	Rp 972,643,668	133%	304%	Badan Pendapatan Daerah
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang diselesaikan	12	Kasus	Rp 239,468,047	133	Rp 517,834,932	27	Rp 196,393,200	28	Rp 5,203,300	5	Rp 18,062,148	33	Rp 23,265,448	166	Rp 541,100,380	1383%	226%	Badan Pendapatan Daerah
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan, serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp 227,094,867	2	Rp 452,691,454	1	Rp 250,000,000	0	Rp 29,580,860	0	Rp 43,880,600	0	Rp 73,461,460	2	Rp 526,152,914	200%	232%	Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 40,39%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.184.268.868 (tujuh milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 17.786.162.390 (tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar 36,40% dengan predikat kinerja Sangat Rendah.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 2 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 1 indikator capaian kinerja 0%-50% = 25 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok

a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang pendapatan daerah;
b. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan dibidang pendapatan daerah;
c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
d. Melaksanakan kegiatan lain dibidang pendapatan daerah yang ditugaskan oleh Bupati.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional dibidang Pendapatan, Perimbangan dan Peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
b. Penetapan kebijakan dibidang Pendapatan Daerah;
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan yang meliputi Pendapatan, Perimbangan dan Peningkatan Pendapatan daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Upaya Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

a. Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah
b. Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah

c. Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
d. Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah
e. Indeks Kepuasan Masyarakat
f. Evaluasi SAKIP dari APIP
g. Temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor PAD	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	80%	85%	90%	95%	100%		
Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah	12%	13%	14%	15%	16%	58.14%	
	Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah	4%	5%	6%	7%	8%	40.22%	
	Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	4%	5%	6%	7%	8%	4.36%	
	Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah	8%	9%	10%	11%	12%	25.46%	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	82	83	84	79	
Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Responsif dan Tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	80%	81%	82%	83%	84%		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Evaluasi SAKIP dari APIP	B	B	BB	A	A	BB	

Perangkat Daerah								
	Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal	0	0	0	0	0	0	

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Sasaran "Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah" memiliki 5 indikator kinerja yaitu "Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah telah melampaui target, dengan capaian kinerja sebesar 58,14%, "Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah" telah melampaui target, dengan capaian kinerja sebesar 40,22%, "Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan" belum mencapai target dengan capaian kinerja 4,36%, "Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah" telah melampaui target, dengan capaian kinerja sebesar 25,46%, dan "Indeks Kepuasan Masyarakat" belum mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 79%.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
2. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
3. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat
4. Pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada

Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Sektor PAD	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah		90%	90%
Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah	∑ Penerimaan Pjk Daerah (tahun n) - ∑ Penerimaan Pajak Daerah(tahun n-1) / ∑ Penerimaan Pjk Daerah (tahun n-1) x 100%	14%	14%
	Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah	∑ Penerimaan Retribusi (tahun n) - ∑ Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah (tahun -n1) / ∑ Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah (tahun -n1) x 100%	6%	6%
	Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (By. Simda Keuangan)	6%	6%
	Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah	∑ Pembayaran WP Aset Daerah : ∑ WP Aset Daerah x 100%	10%	10%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penilaian berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017	82	82

Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Responsif dan Tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		82	82
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Evaluasi SAKIP dari APIP	Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP	BB	BB
	Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal	Jumlah Temuan Penyimpangan BMD dan Keuangan yang Material dan BPK Ridan APIP Eksternal	0	0

Memperhatikan tabel 3.1. diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu "PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT" yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah mendukung pencapaian sasaran ke-1 yaitu “Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Badan Pendapatan Daerah telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2.
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
5.02.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Paser**	**indeks kepuasan pelayanan masyarakat**	**74%**	**13,660,610,990.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Paser**	**indeks kepuasan pelayanan masyarakat**	**74%**	**13,660,610,990.00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Paser**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**6 Dokumen**	**570,640,984.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**6 Dokumen**	**570,640,984.00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kab. Paser**	tersedianya dokumen RENSTRA dan RENJA	2 Dokumen	75,999,500.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kab. Paser**	tersedianya dokumen RENSTRA dan RENJA	2 Dokumen	75,999,500.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Kab. Paser**	tersusunnya dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	305,765,500.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Kab. Paser**	tersusunnya dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	305,765,500.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Kab. Paser**	tersusun nya dokumen RKA perubahan SKPD	1 DOkumen	89,429,984.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Kab. Paser**	tersusun nya dokumen RKA perubahan SKPD	1 DOkumen	89,429,984.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Paser**	tersusunnya dokumen	2 Dokumen	99,446,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Paser**	tersusunnya dokumen	2 Dokumen	99,446,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
			evaluasi Kinerja SKPD					evaluasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Pasaer**	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan**	**100%**	**11,082,799,195.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Pasaer**	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan**	**100%**	**11,082,799,195.00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kab. Pasaer**	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	1 Tahun	Rp 10,643,889,195	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kab. Pasaer**	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	1 Tahun	Rp 10,643,889,195	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Kab. Pasaer**	Dokumen Pelaksanaan Akuntansi	1 Tahun	Rp 438,910,000.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Kab. Pasaer**	Dokumen Pelaksanaan Akuntansi	1 Tahun	Rp 438,910,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Pasaer**	**Persentanse Peningkatan Administrasi Umum**	**100%**	**1,754,935,831.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Pasaer**	**Persentanse Peningkatan Administrasi Umum**	**100%**	**1,754,935,831.00**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kab. Pasaer**	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15 Unit	Rp 366,592,176	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kab. Pasaer**	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15 Unit	Rp 366,592,176	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Kab. Pasaer**	tersedianya ATK,sarana kebersihan dan makanan dan minuman Rapat	10 Jenis	Rp 291,947,364	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Kab. Pasaer**	tersedianya ATK,sarana kebersihan dan makanan dan minuman Rapat	10 Jenis	Rp 291,947,364	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (RP.000)**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Kab. Pasaer**	tersedianya barang cetak dan penggandaan	20 Jenis	Rp 242,531,800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Kab. Pasaer**	tersedianya barang cetak dan penggandaan	20 Jenis	Rp 242,531,800	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Kab. Pasaer**	tersedianya koran dan peraturan perundang undangan	365 Exampler	Rp 3,817,500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Kab. Pasaer**	tersedianya koran dan peraturan perundang undangan	365 Exampler	Rp 3,817,500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kab. Pasaer**	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah maupun luar daerah	35 Kali	Rp 350,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kab. Pasaer**	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah maupun luar daerah	35 Kali	Rp 350,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**Kab. Pasaer**	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola SKPD	1850 Berkas	Rp 500,046,991	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**Kab. Pasaer**	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola SKPD	1850 Berkas	Rp 500,046,991	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Pasaer**	**Persentase Pengadministrasian Umum Berjalan Dengan Baik**	**100%**	**164,749,980.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Pasaer**	**Persentase Pengadministrasian Umum Berjalan Dengan Baik**	**100%**	**164,749,980.00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kab. Pasaer**	tersedianya benda pos dan materai	60 Lembar	Rp 349,980	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kab. Pasaer**	tersedianya benda pos dan materai	60 Lembar	Rp 349,980	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kab. Paser**	tersedianya belanja telepon,air ,Listrik, dan Internet	12 Bulan	Rp 164,400,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kab. Paser**	tersedianya belanja telepon,air ,Listrik, dan Internet	12 Bulan	Rp 164,400,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Paser**	**Persentase Pemeliharan Barang milik daerah Berjalan Dengan Baik**	**100%**	**87,485,000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Pemeliharan Barang milik daerah Berjalan Dengan Baik**	**100%**	**87,485,000.00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Kab. Paser**	Tersedianya jumlah mobil jabatan/operasional yang dipelihara dan surat perizinan kendaraan dinas/operasional	5 Unit	Rp 39,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Kab. Paser**	Tersedianya jumlah mobil jabatan/operasional yang dipelihara dan surat perizinan kendaraan dinas/operasional	5 Unit	Rp 39,500,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Kab. Paser**	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Tahun	Rp 47,985,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Kab. Paser**	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Tahun	Rp 47,985,000	
5.02.004	**PROGRAM PENGELOLAAN**	**Kab. Paser**	**Rasio PAD terhadap APBD**	**8%**	**4,125,551,400.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN**	**Kab. Paser**	**Rasio PAD terhadap APBD**	**8%**	**4,125,551,400.00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
	PENDAPATAN DAERAH					**PENDAPATAN DAERAH**					
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Kab. Paser**	**Persentase Peningkatan PAD**	**14%**	**4,125,551,400.00**	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Peningkatan PAD**	**14%**	**4,125,551,400.00**	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	**Kab. Paser**	Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	1 Dokumen	Rp 248,489,000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	**Kab. Paser**	Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	1 Dokumen	Rp 248,489,000	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	**Kab. Paser**	Dokumen Intensifikasi Pajak Daerah	1 Dokumen	Rp 246,202,000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	**Kab. Paser**	Dokumen Intensifikasi Pajak Daerah	1 Dokumen	Rp 246,202,000	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	**Kab. Paser**	Jumlah Sosialisasi Pajak Daerah	10 Kecamatan	Rp 418,072,900	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	**Kab. Paser**	Jumlah Sosialisasi Pajak Daerah	10 Kecamatan	Rp 418,072,900	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	**Kab. Paser**	jumlah objek pajak yang didata	1 Dokumen	Rp 256,265,200	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	**Kab. Paser**	jumlah objek pajak yang didata	1 Dokumen	Rp 256,265,200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	**Kab. Pasaer**	dokumen Penerimaan Pajak Daerah	1 Dokumen	Rp 343,268,000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	**Kab. Pasaer**	dokumen Penerimaan Pajak Daerah	1 Dokumen	Rp 343,268,000	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	**Kab. Pasaer**	Jumlah PBB dan BPHTB yang telah diverifikasi	87400 WP PB 1500 WP BPHTB	Rp 772,453,300	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	**Kab. Pasaer**	Jumlah PBB dan BPHTB yang telah diverifikasi	87400 WP PB 1500 WP BPHTB	Rp 772,453,300	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	**Kab. Pasaer**	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan	1670 WP	Rp 245,572,200	Penetapan Wajib Pajak Daerah	**Kab. Pasaer**	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan	1670 WP	Rp 245,572,200	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	**Kab. Pasaer**	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak yang diterima	1 Dokumen	Rp 244,300,000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	**Kab. Pasaer**	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak yang diterima	1 Dokumen	Rp 244,300,000	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	**Kab. Pasaer**	Jumlah Data Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah	1 Dokumen	Rp 333,144,000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	**Kab. Pasaer**	Jumlah Data Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah	1 Dokumen	Rp 333,144,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (RP.000)**	
	Penagihan Pajak Daerah	**Kab. Pasaer**	Jumlah tunggakan Pajak Daerah yang di selesaikan	Rp 1,500,000,000	Rp 571,391,600	Penagihan Pajak Daerah	**Kab. Pasaer**	Jumlah tunggakan Pajak Daerah yang di selesaikan	Rp 1,500,000,000	Rp 571,391,600	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	**Kab. Pasaer**	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang di Selesaikan	20 Kasus	Rp 196,393,200	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	**Kab. Pasaer**	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang di Selesaikan	20 Kasus	Rp 196,393,200	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	**Kab. Pasaer**	Dokumen Laporan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Rp 250,000,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	**Kab. Pasaer**	Dokumen Laporan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Rp 250,000,000	
TOTAL					**Rp 17,786,162,390.00**	**TOTAL**				**Rp 17,786,162,390.00**	

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. saran dan pendapat DPRD berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Tidak semua aspirasi tersebut dapat diakomodir dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024, sehingga sebagian diusulkan dalam Perubahan Renja Tahun 2024. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat yang direncanakan pada Perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pada Perubahan Rancangan RKPD 2024 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.4.
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**02**				**KEUANGAN**								**17,786,162,390**					**16,000,351,046**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**13,660,610,990**					**13,173,198,054.38**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**570,640,984**					**415,991,954.00**
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	74 %	2 Dokumen	6 Dokumen	Rp 75,999,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76 %	Rp 31,212,954
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	74 %	1 Dokumen	6 Dokumen	Rp 305,765,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76 %	Rp 189,278,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Tersediannya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	74 %	1 Dokumen	6 Dokumen	Rp 89,429,984	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76 %	Rp 5,275,000
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	74 %	2 Laporan	6 Dokumen	Rp 99,446,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76 %	Rp 190,226,000
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**11,082,799,195**					**11,457,802,576.00**
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Peningkatan Administrasi Keuangan	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	74 %	1 Tahun	100 %	Rp 10,643,889,195	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76 %	Rp 11,197,693,684
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan	Tersediannya Dokumen Pelaksanaan Akutansi SKPD	Presentase Peningkatan Administrasi Keuangan	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	74 %	1 Dokumen	100 %	Rp 438,910,000.00	Dana Transfer Umum-		Indeks Kepuasan Pelayanan	76 %	Rp 260,108,892.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Sekretariat								Dana Bagi Hasil		Sekretariat		
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,754,935,831**					**1,047,495,999.38**
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Peningkatan Administrasi Umum	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	74 %	15 Unit	100 %	Rp 366,592,176	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76 %	Rp 117,116,900
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebersihan Gedung Kantor, Alat Tulis Kantor, Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Presentase Peningkatan Administrasi Umum	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	74 %	0 Paket 10 Jenis	100 %	Rp 291,947,364	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76 %	Rp 256,373,800
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Pelaya	Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Peningkatan Administrasi Umum	Tanah Grogot, Kabupa	74 %	20 Jenis	100 %	Rp 242,531,800	Dana Transfer Umu		Indeks Kepuasan Pelaya	76 %	Rp 73,228,832

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						nan Sekretariat			ten Paser					m-Dana Bagi Hasil		nan Sekretariat		
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Tersedianya Koran dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase Peningkatan Administrasi Umum	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	74 %	365 exemplar	100 %	Rp 3,817,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76 %	Rp 1,246,345
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah Raat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Presentase Peningkatan Administrasi Umum	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	74 %	1 Laporan35 Koordinasi	100 %	Rp 350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76 %	Rp 348,130,122
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola SKPD	Presentase Peningkatan Administrasi Umum	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	74 %	1800 Berkas	100 %	Rp 500,046,991	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76 %	Rp 251,400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**164,749,980**					**164,749,980.00**
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Tersedianya Benda Pos	Terlaksananya Pengadministrasian umum Berjalan Baik	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	74 %	60 Lembar	100 %	Rp 349,980	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76 %	Rp 349,980
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Tersedianya Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet	Terlaksananya Pengadministrasian umum Berjalan Baik	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	74 %	12 Bulan	100 %	Rp 164,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76 %	Rp 164,400,000
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**87,485,000**					**87,157,545.00**
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berjalan Baik	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	74 %	5 Unit	100 %	Rp 39,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76 %	Rp 66,144,300

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berjalan Baik	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	74 %	4 Unit	100 %	Rp 47,985,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76 %	Rp 21,013,245
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**4,125,551,400**					**2,827,152,992.00**
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**4,125,551,400**					**2,827,152,992.00**
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	Dokumen Perencanan dan Pengembangan Pendapatan	Presentase Peningkatan PAD	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	8.0 %	1 Dokumen	10 %	Rp 248,489,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Rasio PAD terhadap APBD	8.3 %	Rp 93,600,000
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	Dokumen Intensifikasi Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	8.0 %	1 Dokumen	10 %	Rp 246,202,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Rasio PAD terhadap APBD	8.3 %	Rp 142,236,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	8.0 %	1 Laporan	10 %	Rp 418,072,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Rasio PAD terhadap APBD	8.3 %	Rp 275,000,000
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	Tanah Grogot, Kabupaten Paser					Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Rasio PAD terhadap APBD	8.3 %	Rp 100,000,000
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah Objek Pajak yang Didata	Presentase Peningkatan PAD	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	8.0 %	0 Laporan 1 Dokumen	10 %	Rp 256,265,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Rasio PAD terhadap APBD	8.3 %	Rp 222,753,825
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	Dokumen Penerimaan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	8.0 %	1 Dokumen	10 %	Rp 343,268,000	Dana Transfer Umum-Dana		Rasio PAD terhadap APBD	8.3 %	Rp 301,165,667

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
														Bagi Hasil				
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rasio PAD terhadap APBD	Jumlah BPHTB yang diverifikasi Jumlah PBB yang diverifikasi	Presentase Peningkatan PAD	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	8.0 %	1480 Wajib Pajak 87200 Wajib Pajak	10 %	Rp 772,453,300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Rasio PAD terhadap APBD	8.3 %	Rp 550,000,000
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang ditetapkan	Presentase Peningkatan PAD	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	8.0 %	1640 Wajib Pajak	10 %	Rp 245,572,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Rasio PAD terhadap APBD	8.3 %	Rp 127,200,000
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak yang diterima	Presentase Peningkatan PAD	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	8.0 %	1 Dokumen	10 %	Rp 244,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Rasio PAD terhadap APBD	8.3 %	Rp 166,436,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	Jumlah Data Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Presentase Peningkatan PAD	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	8.0 %	1 Dokumen 0 Dokumen	10 %	Rp 333,144,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Rasio PAD terhadap APBD	8.3 %	Rp 275,525,500
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah yang diselesaikan	Presentase Peningkatan PAD	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	8.0 %	Rp 1,400,000,000.00	Rupiah	Rp 571,391,600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Rasio PAD terhadap APBD	8.3 %	Rp 345,000,000
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang diselesaikan	Presentase Peningkatan PAD	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	8.0 %	27	10 %	Rp 196,393,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Rasio PAD terhadap APBD	8.3 %	Rp 90,036,000
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	Dokumen Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	Tanah Grogot, Kabupaten Paser	8.0 %	1 Dokumen	10 %	Rp 250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana		Rasio PAD terhadap APBD	8.3 %	Rp 138,200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
														Bagi Hasil				
					TOTAL								**17,786,162,390**					**16,000,351,046**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tanah Grogot, Juli 2024

Kepala
Badan Pendapatan Daerah

Ali Nour Muhamad, SP, M.Si
Pembina
NIP. 197309032006041012

PERUBAHAN RENJA 2024
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PASER TAHUN 2024

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ijin dan perlindunganNya penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Perubahan RENJA-PD) ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Bupati Paser Nomor 22 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser.

Dalam peraturan-peraturan tersebut diamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyusun rancangan akhir perubahan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah tahun berikutnya. Untuk memenuhi ketentuan diatas, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Perubahan RENJA-PD) yang terdiri dari dari 2 (dua) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan dengan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Paser sebesar Rp **11.753.720.598.**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rancangan Perubahan RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser tahun 2024 ini dijadikan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan bagi seluruh jajaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser tahun 2025.

Tana Paser, 20 Juni 2024
Kepala,

Muhammad Lukman Darma, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19771023 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Landasan Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 23
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 25
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 25
3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah 26
3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 36
BAB IV Penutup 56
4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 56
4.2. Rencana Tindak Lanjut 57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil

Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Formulir E.8 1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser
Periode Pelaksanaan : Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	7	9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat**	**5,29**	**0**	**4.524.758.380,00**	**0**	**4.524.758.380,00**	**5**	**11.090.972.475,00**	**0,645**	**1,880**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**9**	**4**	**51.056.800,00**	**4**	**51.056.800,00**	**13**	**149.022.484,00**	**1,444**	**6,719**	**Bagian Perencanaan dan Keuangan Disdamkar Kab. Paser**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	3	39.074.400,00	3	39.074.400,00	9	101.585.701,00	1,500	9,532	Bagian Perencanaan dan Keuangan Disdamkar Kab. Paser
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	1	11.982.400,00	1	11.982.400,00	4	47.436.783,00	1,333	4,117	Bagian Perencanaan dan Keuangan Disdamkar Kab. Paser
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Temuan Yang Ditindak Lanjuti**	**100**	**50**	**4.072.739.387,00**	**50**	**4.072.739.387,00**	**150**	**9.868.494.947,00**	**1,500**	**1,844**	Bagian Perencanaan dan Keuangan Disdamkar Kab. Paser
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	48	3.948.125.269,00	48	3.948.125.269,00	96	10.780.859.809,00	2,000	2,045	Bagian Perencanaan dan Keuangan Disdamkar Kab. Paser
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15	6	124.614.118,00	6	124.614.118,00	21	300.123.118,00	1,400	3,768	Bagian Perencanaan dan Keuangan Disdamkar Kab. Paser
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi**	**100**	**100**	**63.010.000,00**	**100**	**63.010.000,00**	**120**	**112.750.000,00**	**74,501**	**1,611**	Bagian Umum Disdamkar Kab. Paser
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51	51	63.010.000,00	51	63.010.000,00	102	112.750.000,00	1,457	#VALUE!	Bagian Umum Disdamkar Kab. Paser
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**100**	**50**	**97.317.423,00**	**50**	**97.317.423,00**	**140**	**279.940.091,00**	**1,400**	**1,153**	Bagian Umum Disdamkar Kab. Paser
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	29	12	29.418.900,00	12	29.418.900,00	41	64.167.650,00	0,683	2,015	Bagian Umum Disdamkar Kab. Paser

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	0	0	0	0	12	10.122.400,00	1,000	0,954	Bagian Umum Disdamkar Kab. Paser
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	7	4	67.898.523,00	4	67.898.523,00	10	205.650.041,00	1,250	1,026	Bagian Umum Disdamkar Kab. Paser
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD (persen)**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	**0,000**	**0,000**	Bagian Umum Disdamkar Kab. Paser
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	0	0	0	0	0	-	0,000	0,000	Bagian Umum Disdamkar Kab. Paser
		Pengadaan Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Bagian Umum Disdamkar Kab. Paser
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi**	**100**	**50**	**45.988.870,00**	**50**	**45.988.870,00**	**150**	**109.856.712,00**	**1,500**	**2,057**	Bagian Umum Disdamkar Kab. Paser
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	1	1.001.000,00	1	1.001.000,00	2	2.015.600,00	2,000	1,899	Bagian Umum Disdamkar Kab. Paser
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	6	44.987.870,00	6	44.987.870,00	18	107.841.112,00	1,500	2,060	Bagian Umum Disdamkar Kab. Paser
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100**	**50**	**194.645.900,00**	**50**	**194.645.900,00**	150	799.770.414,00	1,500	1,066	Bagian Umum Disdamkar Kab. Paser

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	19	6	194.645.900,00	6	194.645.900,00	17	716.639.414,00	0,895	1,373	Bagian Umum Disdamkar Kab. Paser
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	24	0	0	0	0	0	4.800.000,00	0,000	0,049	Bagian Umum Disdamkar Kab. Paser
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	0	0	0	78.331.000,00	0,000	0,603	Bagian Umum Disdamkar Kab. Paser
	Terwujudnya Sistem Pemadaman Kebakaran yang Cepat, Tepat dan Efisien	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Cakupan layanan kebakaran kabupaten**	**50**	**30**	**996.851.857,00**	**30**	**996.851.857,00**	60	18.381.174.728,00	0,857	8,621	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pencegahan ,Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Yang ditangani**	**50**	**30**	**937.477.115,00**	**30**	**937.477.115,00**	60	5.448.456.124,00	0,857	1,367	**Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana**
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12	6	902.583.535,00	6	902.583.535,00	18	2.463.420.004,00	1,500	1,415	Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi

	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala (Setiap Tahun), sah dan Legal	12	3	22.073.000,00	3	22.073.000,00	15	370.726.000,00	1,250	1,728	Seksi Sarana dan Prasarana
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Saranan dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	286	0	12.820.580,00	0	12.820.580,00	1.585	1.643.485.787	1.871	1.662.287.787	Seksi Sarana dan Prasarana
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis dalam Pencegahan dan Penanggulangan	15	0	0	0	0	15	130.505.060,00	1,000	0,247	Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**Jumlah dokumen terkait kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran**	1	0	9.430.000,00	0	9.430.000,00	1	177.503.600,00	1,000	0,729	**Bidang Pencegahan**
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan /Gedung/Lingkunga n yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	48	3	5.520.000,00	3	5.520.000,00	23	68.501.600,00	0,479	0,344	Seksi Pencegahan dan Inspeksi
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana proteksi kebakaran	48	3	3.910.000,00	3	3.910.000,00	23	109.002.000,00	0,479	2,455	Seksi Pencegahan dan Inspeksi
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Persentase relawan/kelompok yang dibina**	100	50	49.944.742,00	50	49.944.742,00	150	2.284.682.788,00	1,500	0,569	**Bidang Pencegahan**

	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat Yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	175	5	25.516.251,00	5	25.516.251,00	629	163.098.551,00	2,516	0,049	Seksi Pencegahan dan Inspeksi
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	10	0	24.428.491,00	0	24.428.491,00	5	391.844.326,00	0,500	0,780	Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1	0	0	0	0	1	156.654.400,00	1,000	0,851	Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	**Persentase Kejadian membahayakan yang mendapatkan operasi pencarian dan pertolongan**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	100	40.977.961,00	1,000	0,326	**Bidang Pencegahan**
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1	0	0	0	0	1	40.977.961,00	1,000	0,326	Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat
		Rata-rata capaian kinerja (%)		34,91	5.521.610.237,00	34,91		101,56		1,30	1,76	
		Predikat Kinerja										

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 37,44%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.521.610.237,00 (Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp 11.855.860.998,00 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 46,57%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser sebesar 34,91% dengan predikat kinerja Sangat Rendah
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 3 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 4 indikator capaian kinerja 0%-50% = 18 indikator.
4. Adanya sub kegiatan yang sebagian kinerjanya dibawah 50%, hal ini karena masih pada koordinasi dan pelaksaanya dilakukan di triwulan III dsn IV

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas.
2. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
   a. Pemberian petunjuk penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rancangan rencana kerja;
   b. Pemberian petunjuk penyusunan rancangan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
   c. Perumusan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   d. Pemberian petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rancangan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;
   e. Pengoorganisasian penyusunan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas;
   f. Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
   g. Pelaksanaan administrasi keuangan Dinas;
   h. Pelaksanaan administrasi barang milik Daerah pada Dinas;
   i. Pelaksanaan administrasi pendapatan Daerah kewenangan Dinas;
   j. Pelaksanaan administrasi kepegawaian Dinas;
   k. Pelaksanaan administrasi umum Dinas;
   l. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
   m. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
   n. Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
   o. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaporan penerapan standar pelayanan minimal di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
   p. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan;
   q. Pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
   r. Fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;

s. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
t. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
u. Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas;
v. Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
w. Pemberian petunjuk penyiapan bahan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
x. Pemberian petunjuk penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional pada Dinas;
y. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Dinas;
z. Pemberian petunjuk penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;

Bidang Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana

1. Bidang Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana.
2. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:
   a. Perencanaan dan Keuangan Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rancangan rencana kerja Dinas;
   b. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rancangan rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
   c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana berdasarkan rancangan rencana kerja yang telah ditetapkan;
   d. Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana

Prasarana guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
f. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana ;
g. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana ;
h. Pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah;
i. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
j. Pelaksanaan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah;
k. Pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
l. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
m. Pelaksanaan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan;
n. Pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar Lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penyelamatan dan Non kebakaran;
o. Pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
p. Pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia;
q. Pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
r. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
s. Pelaksanaan pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia penyelamatan dan evakuasi;
t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana ;
u. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir,

pemberian penghargaan dan sanksi;

v. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana ; dan

w. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pencegahan

1) Bidang Pencegahan mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan.
2) Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi :
   a. Perencanaan dan Keuangan Bidang Pencegahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rancangan rencana kerja Dinas;
   b. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rancangan rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
   c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pencegahan berdasarkan rancangan rencana kerja yang telah ditetapkan;
   d. Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pencegahan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
   e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebujakan di Bidang Pencegahan;
   f. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan;
   g. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Pencegahan;
   h. Pelaksanaan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten;
   i. Pelaksanaan pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
   j. Pelaksanaan pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
   k. Pelaksanaan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;
   l. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;
   m. Pelaksanaan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;
   n. Pelaksanaan dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran;
   o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan pada Dinas;
   p. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia

sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

q. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Pencegahan; dan
r. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser adalah:

1. Pemadaman Kebakaran;
2. Evakuasi Korban Kebakaran;
3. Evakuasi ular, evakuasi lebah/tawon, evakuasi hewan lainnya yang mampu ditangani;
4. Penyelamatan manusia dari ketinggian, evakuasi korban tenggelam, pertolongan pertama lainnya;
5. Pembentukan dan pembinaan relawan;
6. Sosialisasi/simulasi/penyuluhan kepada masyarakat;
7. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
8. Inspeksi alat proteksi kebakaran.

Upaya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1) Persentase Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK yang tertangani)
2) Tersusunnya RISPK
3) Response Time Rate (Waktu Tanggap Darurat)
4) Jumlah Kelompok Relawan
5) Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel 2.1 di bawah ini :

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser
sampai dengan Triwulan II
Tahun 2024
Tabel 2.2

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan: Meningkatnya	Indikator penilaian mandiri reformasi	B	B	B	B	BB		

Pelayanan dan Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta meminimalisir korban dan Dampaknya	birokrasi							
	Cakupan layanan kebakaran kabupaten	50%	50%	50%	50%	50%		
Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan kinerja organisasi yang ankuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP DAN APIP	B	B	BB	A	A	B	88,34
Sasaran : Terwujudnya sistem Pemadaman Kebakaran yang cepat tepat dan efesien	Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	1	1	1	1	2	1	100
	Tersusunnya RISPK	0	0	1	0	0	0	0
	Respon Time (Waktu Tanggap)	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	12,18 menit	81,2
	Jumlah Kelompok Relawan	45	5	5	5	5	10	200

Berdasarkan Tabel 2.3 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Nilai Evaluasi SAKIP DAN APIP” belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar B dari target sebesar BB dengan capaian kinerja sebesar 88,34 %.

b. Sasaran “Terwujudnya sistem Pemadaman Kebakaran yang cepat tepat dan efesien” memiliki 4 indikator kinerja yaitu :

1) “Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani” telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 1 dari target sebesar 1 dengan capaian kinerja sebesar 100 %;
2) “Tersusunnya RISPK” belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0 dari target sebesar 1 dengan capaian kinerja sebesar 0 %;
3) “Respon Time (Waktu Tanggap)” telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 12,18 menit dari target sebesar 15 menit dengan capaian kinerja sebesar 81,2 %. Formulasi perhitungan perhitungan respon time yaitu jumlah menit keseluruhan kejadian yang tertangani dibagi dengan jumlah kejadian yang tertangani.
4) “Jumlah Kelompok Relawan” telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 10 dari target sebesar 5 dengan capaian kinerja sebesar 200 %.

CAPAIAN SPM SUB URUSAN KEBAKARAN

NO	LANGKAH KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KOTA	PERHITUNGAN		TARGET NASIONAL
1.	Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten / kota yaitu pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	1. Layanan Response time Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 menit	15 Menit	Kasus kebakaran di WMK yang ditangani x dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser Jumlah kejadian Kebakaran di Kabupaten Paser	545 / 46 =11,84menit	15 menit
		2. Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Perngendalian Kebakaran	46	Jumlah Layanan Pemadaman yang ditangani / Jumah Kasus Kebakaran di Kabupaten Paser tahun 2023 X 100	46 / 46 X100=100 %	100 %
		3. Layanan Pelaksanaan Evakuasi	148	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Paser tahun 2023	1. Operasi Tangkap Tawon 15 Kali 2. Operasi Tangkap Ular 90 Kali 3. Operasi Tangkap Anjing 2 Kali 4. Operasi Tangkap Biawak 7 Kali 5. Operasi Tangkap Buaya 1 Kali 6. Operasi Tangkap Monyet 1 Kali 7. Operasi Tangkap Musang 1 Kali 8. Tabung Gas Bocor 1 kali 9. Operasi Tangkap Kucing 4 Kali 10. Kecelakaan 10 kali 11. Pohon tumbang 6 kali 12. Operasi Bangunan Runtuh 2 kali 13. Operasi Pelepasan Anting 1 kali 14. Operasi Pelespasan CIncin 7 kali	
		4. Layanan Pemberdayaan Masyarakat/	25	Jumlah Layanan yang ditangani Relawan / Jumlah Layanan Pemadam di Kabupaten Paser X 100	25 / 46 X100=54,352%	

		Relawan Kebakaran	701	Jumlah Sosialisasi / Simulasi Penyuluhan dalam rangka pemberdayaan dan edukasi masyarakat	1. Bulan Januari 40 orang 2. Bulan Februari 72 Orang 3. Bulan Maret 150 Orang 4. Bulan April 116 Orang 5. Bulan Mei 142 Orang 6. Bulan Juni 181 Orang	
			0 Orang	Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran	0 Orang	
		5. Layanan Pendataan, Inspeksi, dan Investigasi Pasca Kebakaran	49 Pendataan	1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Retribusi APAR dan Pengecekan	1. Bulan Maret 49	
			216 Unit APAR	1. Inventarisasi Sarana Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung	216 Unit APAR	

Untuk sub kegiatan Pembentukan Dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran dengan indikator Layanan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Kebakaran belum memiliki capain SPM karena masih dalam tahap koordinasi dan belum melakukan pelaksaan kegiatan yang akan dilakukan di triwulan III dan IV.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja (nama OPD) Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1) Terlaksananya tindak penanganan yang telah sesuai dengan waktu respond time yang ditentukan dengan baik;
2) SDM yang berusaha secara maksimal melaksanakan kinerja dengan baik dan tanggap darurat.
3) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser seluruh petugas lapangannya telah mengikuti diklat dasar pemadam kebakaran.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1) Kurangnya jumlah SDM dalam pelaksanaan kegiatan sehingga begitu banyak job desk yang diampu oleh masing-masing pegawai, sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam penyelesaian tugas.
2) Tahun anggaran 2022 dan 2023 Dinas Pemadam Kebakaran medapatkan alokasi pendanaan dari DBH DR sehingga sangat membantu dalam pencapaian indikator kinerja yang berhubungan kegiatan pemadaman, sedangkan pada tahun 2024, seluruh anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser dibebankan pada APBD Kabupaten Paser.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :

Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Tujuan: Meningkatnya Pelayanan dan Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta meminimalisir korban dan Dampaknya	Indikator penilaian mandiri reformasi birokrasi			
Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan kinerja organisasi yang ankuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP DAN APIP	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP pada Tahun Sebelumnya	BB	BB
Tujuan : Meningkatnya Pelayanan dan Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta meminimalisir korban dan Dampaknya	Cakupan layanan kebakaran kabupaten			

Sasaran : Terwujudnya sistem Pemadaman Kebakaran yang cepat tepat dan efesien	Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang menerima penanganan sesuai laporan	1	1
	Tersusunnya RISPK	Jumlah RISPK yang tersusun	1	1
	Respon Time (Waktu Tanggap)	Jumlah Kebakaran yang ditangani x tingkat waktu tanggap (respon time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser / Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten Paser	15 menit	15 menit
	Jumlah Kelompok Relawan	Jumlah Kelompok Relawan yang telah dibentuk	5	10

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu "PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER"" yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air

5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke-5, yaitu “Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kabupaten Paser**	**Indeks Kepuasan layanan Sekretariat**		**9.131.760.987**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kabupaten Paser**	**Indeks Kepuasan layanan Sekretariat**		**10.327.933.641**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**4 Dokumen**	**112.970.049**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**4 Dokumen**	**196.812.049**	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	51.952.224	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	91.718.224	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	61.017.825	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	105.093.825	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Persentase Temuan Yang Ditindak Lanjuti**	**100%**	**8.099.874.100**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Persentase Temuan Yang Ditindak Lanjuti**	**100%**	**8.694.627.169**	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang/ bulan	7.933.893.700	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang/bulan	8.465.599,569	
2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15 dokumen	165.980.400	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15 dokumen	229.027.600	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi**	**100%**	**63.840.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi**	**100%**	**0**	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 stel	63.840.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 stel	0	

4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**310.387.900**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**499.066.800**	
4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 paket	72.604.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 paket	92.488.800	
4.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	10.150.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	10.150.000	
4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 laporan	227.633.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 laporan	396.428.000	
4.4	Pengadaan Mebel	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	Pengadaan Mebel	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 unit	0	
4.5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD**	**100%**	**38.200.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD**	**100%**	**370.888.400**	
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Paser	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Paser	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	0	
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	13.200.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	302.123.000	
5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	
5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	25.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 unit	68.765.400	

			yang Disediakan								
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi**	**100%**	**97.016.183**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi**	**100%**	**147.066.468**	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Paser	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.015.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Paser	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.015.000	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	96.001.183	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	146.051.468	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Paser**			**409.472.755**					**419.472.755**	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	409.472.755	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	409.472.755	
7.2	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0	
7.3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	10.000.000	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Kabupaten Paser**	**Cakupan layanan kebakaran kabupaten**	**50%**	**2.621.959.611**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Kabupaten Paser**	**Cakupan layanan kebakaran kabupaten**	**50%**	**8.852.972.770**	
8	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran**	**Kabupaten Paser**	**Persentase Pencegahan ,Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan**	**50%**	**2.469.209.000**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam**	**Kabupaten Paser**	**Persentase Pencegahan ,Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan**	**50%**	**7.156.565.420**	

	dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Beracun Yang ditangani**			**Daerah Kabupaten/Kota**		**Beracun Yang ditangani**			
8.1	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	0	0	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 laporan	0	
8.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	0	
8.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 dokumen	2.082.738.200	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 dokumen	2.526.639.100	
8.4	Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	0	
8.5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	4 dokumen	29.932.800	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat	4 dokumen	430.363.520	

			Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal					Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal			
8.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	12 dokumen	18.802.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	12 dokumen	3.719.250.000	
8.7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kabupaten Paser	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	21 orang	337.736.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kabupaten Paser	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	21 orang	480.312.800	
8.8	Pengelolaan Sistem Komunikasi Dan Informasi Kebakaran Dan Penyelamatan (SKIK)	Kabupaten Paser	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	0	0	Pengelolaan Sistem Komunikasi Dan Informasi Kebakaran Dan Penyelamatan (SKIK)	Kabupaten Paser	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	1 Desa/Kelurahan	0	
	Penyelenggaraan	Kabupaten	Jumlah Dokumen	0	0	Penyelenggaraan	Kabupat	Jumlah Dokumen Hasil	1 dokumen	0	

8.9	Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanngulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Paser	Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran			Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanngulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	en Paser	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran			
8.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Kabupaten Paser	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	0	0	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Kabupaten Paser	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	25 Keluarga	0	
9	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Kabupaten Paser**	**Jumlah bangunan yang diperiksa**	**96 Inspeksi**	**37.897.500**	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Kabupaten Paser**	**Jumlah bangunan yang diperiksa**	**96 Inspeksi**	**237.859.600**	
9.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	20 Dokumen	15.150.000	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	20 Dokumen	70.686.600	
9.2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelayakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	20 Dokumen	22.747.500	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelayakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	20 Dokumen	167.173.000	
10	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Kabupaten Paser**	**Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran yang di Tangani**	**100%**	**0**	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Kabupaten Paser**	**Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran yang di Tangani**	**100%**	**0**	
10.1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian Dan Pengujian Penyebab	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang	0	0	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian Dan Pengujian Penyebab Kejadian	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi	1 dokumen	0	

	Kejadian		Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian					Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian			
11	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Kabupaten Paser**	**Persentase relawan/kelompok yang dibina**	**100%**	**100.478.111**	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Kabupaten Paser**	**Persentase relawan/kelompok yang dibina**	**100%**	**1.426.672.750**	
11.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kabupaten Paser	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 Orang	47.065.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kabupaten Paser	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	135 Orang	240.257.400	
11.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kabupaten Paser	Jumlahnya desa/kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	10 Desa/Kelurahan	38.413.111	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kabupaten Paser	Jumlahnya desa/kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	10 Desa/Kelurahan	1.075.762.600	
11.3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	15.000.000	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	110.652.750	
12	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Kabupaten Paser**	**Jumlah Pertolongan dan Pencarian terhadap kondisi yang membahayakan**	**2 Orang**	**14.375.000**	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Kabupaten Paser**	**Jumlah Pertolongan dan Pencarian terhadap kondisi yang membahayakan**	**2 Orang**	**31.875.000**	
12.1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Pada peristiwa yang menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	0	0	Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Pada peristiwa yang menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 laporan	0	
12.2	Standarisasi Sarana	Kabupaten	Jumlah Dokumen	0	0	Standarisasi Sarana dan	Kabupat	Jumlah Dokumen yang	1 dokumen	0	

	dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan Dan Evakuasi	Paser	yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar			Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan Dan Evakuasi	en Paser	Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar			
12.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan Dan Evakuasi	Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/Penyelamatan dan Evakuasi sesuai dengan standar teknis	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan Dan Evakuasi	Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/Penyelamatan dan Evakuasi sesuai dengan standar teknis	286 unit	0	
12.4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kabupaten Paser	Jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal	2 laporan	14.375.000	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kabupaten Paser	Jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal	2 laporan	31.875.000	
					11.753.720.598					**19.180.906.411**	**7.427.185.813**

Dana yang besar pada sub kegiatan tertentu, seperti sub kegiatan penyelamatan dan evakuasi, didalamnya memuat gaji PTT dan kebutuhan makan minum aktivitas lapangan petugas pemadam kebakaran. sehingga sub kegiatan tersebut terkesan memiliki dana yang besar, sementara untuk pelaksanaan kegiatan operasional lainnya masih terbatas dananya. Kebutuhan penambahan pagu dana pada sub kegiatan yang ada di renja perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser ini, dikarenakan pagu dana yang ada, tidak sesuai atau kurang dengan kebutuhan pemenuhan target yang telah ditetapkan. Sehingga dibutuhkan adanya penyesuaian antara pagu dana dengan target yang ada.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

Diisi Matriks Renja yang bersumber dari SIPD

DINAS PEMADAM KEBAKARAN KAB. PASER

TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Pemadam Kebakaran							9.327.652.407,00	10.859.834.598,00	12.285.426.467,00					
	1					NON URUSAN							9.327.652.407,00	10.859.834.598,00	12.285.426.467,00					
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							9.327.652.407,00	10.859.834.598,00	12.285.426.467,00					
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan layanan Sekretariat				5.29 %	5.29 %	7.879.578.796,00	9.131.760.987,00	9.663.466.856,00					

	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	-			5 Dokumen	5 Dokumen	72.970.049,00	112.970.049,00	112.970.049,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	51.952.224,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.327.652.407,00	10.859.834.598,00	12.285.426.467,00					
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							9.327.652.407,00	10.859.834.598,00	12.285.426.467,00					
2	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan layanan Sekretariat				5.29 %	5.29 %	7.879.578.796,00	9.131.760.987,00	9.663.466.856,00					

	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	-			5 Dokumen	5 Dokumen	72.970.049,00	112.970.049,00	112.970.049,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	21.017.825,00	61.017.825,00	61.017.825,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Yang Ditindak Lanjuti	-			100 persen	100 persen	6.943.633.292,00	8.099.874.100,00	8.099.874.100,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

																		Perubahan Iklim	dan Tangkas	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	0,00	7.933.893.700,00	8.465.599.569,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1					NON URUSAN							9.327.652.407,00	10.859.834.598,00	12.285.426.467,00					
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							9.327.652.407,00	10.859.834.598,00	12.285.426.467,00					
3	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan layanan Sekretariat				5.29 %	5.29 %	7.879.578.796,00	9.131.760.987,00	9.663.466.856,00					

	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Yang Ditindak Lanjuti	-			100 persen	100 persen	6.943.633.292,00	8.099.874.100,00	8.099.874.100,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.327.652.407,00	10.859.834.598,00	12.285.426.467,00					
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							9.327.652.407,00	10.859.834.598,00	12.285.426.467,00					
4	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan layanan Sekretariat				5.29 %	5.29 %	7.879.578.796,00	9.131.760.987,00	9.663.466.856,00					
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Yang Ditindak Lanjuti	-			100 persen	100 persen	6.943.633.292,00	8.099.874.100,00	8.099.874.100,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser
	1	05	01	2.02	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													

					04														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	165.980.400,00	165.980.400,00	165.980.400,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	-			75 stel	75 stel	63.840.000,00	63.840.000,00	63.840.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	80 Paket	63.840.000,00	63.840.000,00	63.840.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	

	1					NON URUSAN							9.327.652.407,00	10.859.834.598,00	12.285.426.467,00						
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							9.327.652.407,00	10.859.834.598,00	12.285.426.467,00						
5	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan layanan Sekretariat				5.29 %	5.29 %	7.879.578.796,00	9.131.760.987,00	9.663.466.856,00						
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 persen	100 persen	310.387.900,00	310.387.900,00	310.387.900,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	72.604.900,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.327.652.407,	10.859.834.59	12.285.426.467,00						

												00	8,00								
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						9.327.652.407,00	10.859.834.598,00	12.285.426.467,00							
6	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan layanan Sekretariat				5.29 %	5.29 %	7.879.578.796,00	9.131.760.987,00	9.663.466.856,00							
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 persen	100 persen	310.387.900,00	310.387.900,00	310.387.900,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser		
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubah	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	

																		an Iklim		
	1	0 5	0 1	2. 06	0 0 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	227.633.000,00	227.633.000,00	227.633.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	0 5	0 1	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	-			100 persen	100 persen	146.460.500,00	146.460.500,00	146.460.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser
	1	0 5	0 1	2. 07	0 0 0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	68.790.500,00	68.790.500,00	13.200.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	77.670.000,00	77.670.000,00	25.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1					NON URUSAN							9.327.652.407,00	10.859.834.598,00	12.285.426.467,00					
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							9.327.652.407,00	10.859.834.598,00	12.285.426.467,00					
7	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan layanan Sekretariat				5.29 %	5.29 %	7.879.578.796,00	9.131.760.987,00	9.663.466.856,00					

	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi	-			100 persen	100 persen	41.074.800,00	97.016.183,00	97.016.183,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.015.000,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.327.652.407,00	10.859.834.598,00	12.285.426.467,00					
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							9.327.652.407,00	10.859.834.598,00	12.285.426.467,00					
8	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan layanan Sekretariat				5.29 %	5.29 %	7.879.578.796,00	9.131.760.987,00	9.663.466.856,00					

	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi	-			100 persen	100 persen	41.074.800,00	97.016.183,00	97.016.183,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	40.059.800,00	96.001.183,00	96.001.183,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	-			100 persen	100 persen	301.212.255,00	301.212.255,00	301.212.255,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

																		Perubahan Iklim	dan Tangkas	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	226.112.255,00	226.112.255,00	409.472.755,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.100.000,00	75.100.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	

9	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan layanan kebakaran kabupaten				50 %	50 %	1.448.073.611,00	1.728.073.611,00	2.621.959.611,00					
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan ,Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Yang ditangani	-			50 persen	50 persen	1.295.323.000,00	1.575.323.000,00	1.575.323.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	12 Dokumen	1.236.070.000,00	1.236.070.000,00	2.082.738.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	0	0	2.	0	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

		5	4	01	005															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				4 Dokumen	4 Dokumen	25.395.000,00	25.395.000,00	29.932.800,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				1 Orang	1 Orang	15.056.000,00	295.056.000,00	337.736.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				6 Unit	6 Unit	18.802.000,00	18.802.000,00	18.802.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan yang diperiksa	-			96 Inspeksi	96 Inspeksi	37.897.500,00	37.897.500,00	37.897.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pemilik Bangunan Gedung
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				20 Dokumen	20 Dokumen	15.150.000,00	15.150.000,00	15.150.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	04	2.02	00	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														

					02														
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				20 Dokumen	20 Dokumen	22.747.500,00	22.747.500,00	22.747.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Peningkatan Masyarakat Paham Terhadap Pencegahan dan penyelamatan Kebakaran	-			135 Orang	135 Orang	100.478.111,00	100.478.111,00	100.478.111,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat, MPA
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat													
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				50 Orang	50 Orang	47.065.000,00	47.065.000,00	47.065.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	

	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran													
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				10 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	38.413.111,00	38.413.111,00	38.413.111,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana													
							Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Pertolongan dan Pencarian terhadap kondisi yang membahayakan	-			2 Orang	2 Orang	14.375.000,00	14.375.000,00	14.375.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive	Masyarakat

																		Perubahan Iklim	dan Tangkas	
	1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				2 Laporan	2 Laporan	14.375.000,00	14.375.000,00	14.375.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	JUMLAH													**9.327.652.407,00**	**10.859.834.598,00**	**12.285.426.467,00**				

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2 Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

Tana Paser, 20 Juni 2024
Kepala,

Muhammad Lukman Darma, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19771023 199703 1 003

Rancangan Renja Perubahan 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran Km. 5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Tanah Grogot, Kabupaten Paser
Kode Pos 76211, *Email : kesbangpol_paser@yahoo.com*

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

Lampiran : Keputusan Bupati Paser
No. 100.3.3.2/Kep-786 /2024
Tanggal : 16 Agustus 2024
Tentang Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN BUPATI PASER NO. 100.3.3.2/KEP-786/2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2024 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwunan II Tahun 2024 8

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 51

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024 57

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 58

3.1 Tujuan dan Sasaran 58

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 60

3.3 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 70

3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024 71

BAB IV PENUTUP 81

4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan 81

4.2 Rencana Tindak Lanjut 81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 (Tabel E.81)	9
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser	54
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 (Tabel TC.30)	55
Tabel 3.1	Perubahan Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	59
Tabel 3.2	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser (Tabel TC. 31)	62
Tabel 3.3	Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70
Tabel 3.4	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024 Tabel TC. 33)	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-786/2024 Tanggal 16 Agustus Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
    Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 20212026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser;

24. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024 Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masingmasing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024 Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut :

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Paser
Periode Pelaksanaan : 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD: 2022-2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 =	15

																						13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel		Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP					BB	47.267.771.529,00															
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Sekertariat	80%	30.239.441.080,00	100%	7.212.162.360,00	100%	7.212.162.360,00	27,07	1.952.325.184,00	30,67	2.211.900.508,00					57,74	4.164.225.692,00		11.376.388.052,00		37,62	

		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	216.375.104,00	100%	89.300.000,00	100%	89.300.000,00	39,13	34.941.750,00	44,35	39.603.243,00					83,48	74.544.993,00		163.844.993,00		75,72	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	25	72.799.919,00	5	29.300.000,00	5	29.300.000,00	2	13.011.400,00	1	9.939.000,00					3,00	22.950.400,00		52.250.400,00		71,77	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen RKA SKPD	5	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	12.679.500,00		-					1,00	12.679.500,00		27.679.500,00		184,53	
		Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	25	143.575.185,00	5	45.000.000,00	5	45.000.000,00	1	9.250.850,00	2	29.664.243,00					3,00	38.915.093,00		83.915.093,00		58,45	

			Kinerja Perangkat Daerah																				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	100 %	27.811.063.903,00	97 %	6.163.535.004,00	97 %	6.163.535.004,00	26,17	1.613.290.834,00	28,44	1.753.143.681,00					54,62	3.366.434.515,00		9.529.969.519,00		34,27	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175	25.948.582.358,00	25	5.715.184.416,00	25	5.715.184.416,00	7	1.586.032.786,00	7	1.531.935.065,00					14,00	3.117.967.851,00		8.833.152.267,00		34,04	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	1270	1.862.481.545,00	250	448.350.588,00	250	448.350.588,00	11	27.258.048,00	96	221.208.616,00					107,00	248.466.664,00		696.817.252,00		37,41	
		Administrasi Umum	Terlaksananya	100	1.647.6	96 %	893.930	96 %	893.930	18	300.889	44	393.931					62,	694.820		1.588.7		96,	

		Perangkat Daerah	Administrasi Umum Daerah	%	83.741,00		.420,00		.420,00	,26	.100,00	,07	.084,00					33	.184,00		50.604,00		42	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	1.800.653,00	1	700.000,00	1	700.000,00		-		-					-	-		700.000,00		38,87	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	10	101.156.250,00	2	122.952.700,00	2	122.952.700,00	1	121.760.200,00	1	1.157.600,00					2,00	122.917.800,00		245.870.500,00		243,06	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang tersedia	10	210.788.854,00	2	46.259.200,00	2	46.259.200,00	1	28.542.000,00	1	17.713.200,00					2,00	46.255.200,00		92.514.400,00		43,89	

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10	182.333.122,00	2	35.059.800,00	2	35.059.800,00	1	8.754.900,00	0	8.761.900,00					1,00	17.516.800,00		52.576.600,00		28,84	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan perundang - undangan yang disediakan	60	26.604.861,00	12	5.200.000,00	12	5.200.000,00		-		-					-	-		5.200.000,00		19,55	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	600	100.000.000,00	120	683.757.920,00	120	683.757.920,00	15	141.832.000,00	60	366.298.384,00					75,00	508.130.384,00		1.191.888.304,00		1.191,89	

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	Tersedianya Barang Milik Pemerintah Daerah	12	97.664.588,00	100%		100%	19.713.900,00		-		-				-	-		-		-	
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	12	97.664.588,00	2	19.713.900,00	2	19.713.900,00		-		-				-	-		19.713.900,00		20,19	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	362.051.812,00	100%		100%	23.663.036,00	13,54	3.203.500,00	31,56	7.467.400,00				45,10	10.670.900,00		10.670.900,00		2,95	
		Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyura	60	32.734.509,00	12	6.429.800,00	12	6.429.800,00	2	640.000,00	7	3.150.000,00				9,00	3.790.000,00		10.219.800,00		31,22	

			t																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunukasi, jaringan sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	60	329.317.303,00	2	17.233.236,00	2	17.233.236,00	0	2.563.500,00	1	4.317.400,00				1,00	6.880.900,00		24.114.136,00		7,32	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	104.601.931,00	100%		100%	22.020.000,00		-	80,63	17.755.100,00				80,63	17.755.100,00		17.755.100,00		16,97	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	33.090.872,00	3	17.760.000,00	3	17.760.000,00		-	2	13.735.100,00				2,00	13.735.100,00		31.495.100,00		95,18	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	50	36.511.059,00	10	4.260.000,00	10	4.260.000,00		-	9	4.020.000,00				9,00	4.020.000,00		8.280.000,00		22,68	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	Presentase Penurunan Konflik Berbau	100%	764.791.141,32	100%		100%	3.355.982.300,00	5,08	170.427.200,00	52,76	1.770.774.430,00				57,84	1.941.201.630,00		1.941.201.630,00		253,82	

		Kebangsaan	Sara																			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Teknis dibidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	30	764.791.141,32	100%		100%	3.355.982.300,00	5,08	170.427.200,00	52,76	1.770.774.430,00					57,84	1.941.201.630,00		1.941.201.630,00		253,82	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	10	255.700.803,82	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00		-		-					-	-		60.000.000,00		23,46	

		Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembau	1000	407.272.270,00	90	3.295.982.300,00	90	3.295.982.300,00	20	170.427.200,00	70	1.770.774.430,00					90,00	1.941.201.630,00		5.237.183.930,00		1.285,92	

		Ika dan Sejarah Kebangsaan	ran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi politik yang demok		Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu														-	-		-		

	ratis																					
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	80	4.277.106.495,25	100%		100%	33.731.271.197,00	72,13	24.328.880.500,00	20,34	6.859.520.475,00					92,46	31.188.400.975,00		31.188.400.975,00		729,19	

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Terlaksananyan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	25	4.277.106.495,25	100 %		100 %	33.731.271.197,00	72,13	24.328.880.500,00	20,34	6.859.520.475,00					92,46	31.188.400.975,00		31.188.400.975,00		729,19	

		Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah . Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi																				
		Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokras	Jumlah Dokumen Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningk	10	12.500.000,00	2	25.124.000,00	2	25.124.000,00	1	12.740.985,00	1	2.712.100,00					2,00	15.453.085,00		40.577.085,00		324,62	

		i, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	atan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun.																					

		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	Jumlah Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	5	12.500.000,00	1	21.472.500,00	1	21.472.500,00		8.974.675,00	1	8.974.675,00					1,00	17.949.350,00		39.421.850,00		315,37	

		Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun.																			
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakila	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokr	6650	253.550.339,00	2650	1.025.396.300,00	2650	1.025.396.300,00		-	1200	78.149.860,00				1.200,00	78.149.860,00		1.103.546.160,00		435,24	

		n dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	asi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah																				

		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	1635	3.883.356.744,00	400	32.095.483.997,00	400	32.095.483.997,00		24.238.184.740,00	400	6.769.544.015,00					400,00	31.007.728.755,00		63.103.212.752,00		1.624,97	

		an Situasi Politik di Daerah	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	15	155.199.414,00	3	563.794.400,00	3	563.794.400,00	0	68.980.100,00	1	9.114.500,00				1,00	78.094.600,00		641.889.000,00		413,59	

		Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																				
	Mewujudkan pembinaan dan pemberday		Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan															-	-		-			

	aan ormas																					
		Program Pemberdaayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Organisasi Masyarakat (Ormas) yang aktif	75 %	643.825.476,00	100 %		100 %	908.741.292,00	6,43	58.465.635,00	9,67	87.846.290,00					16,10	146.311.925,00		146.311.925,00		22,73	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organis	5	643.825.476,00	100 %		100 %	908.741.292,00	6,43	58.465.635,00	9,67	87.846.290,00					16,10	146.311.925,00		146.311.925,00		22,73	

		Kemasyarakatan	asi Kemasyarakatan yang dirumuskan																			
		Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	1	7.500.000,00	2	18.890.392,00	2	18.890.392,00		178.200,00	1	178.200,00				1,00	356.400,00		19.246.792,00		256,62	

			Asing di Daerah yang disusun.																			
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	Jumlah Dokumen Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	1	7.500.000,00	2	17.724.000,00	2	17.724.000,00		5.273.800,00	1	5.273.800,00					1,00	10.547.600,00		28.271.600,00		376,95	

		Asing di Daerah	Ormas Asing di Daerah yang disusun.																			
		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	890	196.287.300,00	200	242.473.300,00	200	242.473.300,00		6.323.395,00	50	29.885.490,00					50,00	36.208.885,00		278.682.185,00		141,98	

			Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
		Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	920	190.149.200,00	300	238.295.600,00	300	238.295.600,00		-	30	33.204.000,00					30,00	33.204.000,00		271.499.600,00		142,78	

			Ormas dan Ormas Asing di Daerah																				
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	10	232.388.974,00	2	391.358.000,00	2	391.358.000,00	1	46.690.240,00	0	24.756.800,00					1,00	71.447.040,00		462.805.040,00		199,15	

		dan Ormas Asing di Daerah	Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																				
	Mewujudkan ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama		Fasilitasi kebijakan dibidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya														-	-		-			
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan	Presentase kebijakan bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	4.429.085.918,00	100 %		100 %	295.000.000,00	5,09	15.020.000,00	6,36	18.757.878,00					11,45	33.777.878,00		33.777.878,00		0,76	

		Budaya	yang ditindaklanjuti																			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan budaya yang dirumuskan	25	4.429.085.918,00	100%		100%	295.000.000,00	5,09	15.020.000,00	6,36	18.757.878,00					11,45	33.777.878,00		33.777.878,00		0,76	

		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200	1.018.180.675,00	5	80.000.000,00	5	80.000.000,00	1	750.000,00	1	1.400.000,00					2,00	2.150.000,00		82.150.000,00		8,07	

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	560	2.570.905.848,00	120	200.000.000,00	120	200.000.000,00	10	10.650.000,00	20	17.357.878,00					30,00	28.007.878,00		228.007.878,00		8,87	

		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperca	20	76.363.550,63	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	0	3.620.000,00	2	3.620.000,00					2,00	7.240.000,00		22.240.000,00		29,12	

			yaan di Daerah																			
	Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib dan aman		Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser														-	-		-		

		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Presentase kasus konflik sosial yang tertangani / terselesaikan	100 %	8.304.752.763,68	100 %		100 %	1.764.614.380,00	8,21	144.834.135,00	45,47	802.447.881,00					53,68	947.282.016,00		947.282.016,00		11,41	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan	30	8.304.752.763,68	100 %		100 %	1.764.614.380,00	8,83	155.834.135,00	44,85	791.447.881,00					53,68	947.282.016,00		947.282.016,00		11,41	

			konflik social yang dirumuskan																			
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembag	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	10	15.920.453,26	2	39.196.460,00	2	39.196.460,00	0	1.950.000,00	1	20.062.600,00					1,00	22.012.600,00		61.209.060,00		384,47	

		aan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																				
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga	2	26.235.093,75	2	39.196.460,00	2	39.196.460,00		-	1	15.441.760,00					1,00	15.441.760,00		54.638.220,00		208,26	

		Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah																			

		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	23	1.048.840.625,00	23	39.196.460,00	23	39.196.460,00	5	17.563.000,00		-					5,00	17.563.000,00		56.759.460,00		5,41	

			Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																				
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang	12	636.362.921,88	12	357.075.000,00	12	357.075.000,00	0	28.150.100,00	5	117.076.340,00					5,00	145.226.440,00		502.301.440,00		78,93	

		Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																				

		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	4	122.204.590,06	4	289.950.000,00	4	289.950.000,00	1	17.563.000,00	1	141.472.785,00					2,00	159.035.785,00		448.985.785,00		367,41	

		serta Penanganan Konflik di Daerah	Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																					
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupa-ten/Kota	60	5.345.448.543,75	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00	1	97.171.035,00	4	508.394.396,00					5,00	605.565.431,00		1.605.565.431,00		30,04	

Rata-rata capaian kinerja (%)									72,32	38.421.200.116				1.055,53	
Predikat Kinerja									Sangat Tinggi						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya Kerja sama yang solid menyebabkan Kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang dijadwalkan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum adanyanua Kepastian Tahapan Pemilu sehingga Untuk Anggaran Pendampingan Pemilu belum dapat dilaksanakan Tepat Waktu
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam kegiatan selanjutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya :

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Paser
Periode Pelaksanaan : 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD: 2022-2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

No	Sasaran	Program /Kegiata	Indikator	Target Renstra	Realisasi Capaian	Target Kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat	Unit Pera

		n/Sub Kegiatan	Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		I		II		III		IV		dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		ngkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan		Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP					BB	47.267.771.529,00															

	Kinerja Organisasi yang akuntabel																					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Sekertariat	80 %	30.239.441.080,00	100 %	7.212.162.360,00	100 %	7.212.162.360,00	27,07	1.952.325.184,00	30,67	2.211.900.508,00				57,74	4.164.225.692,00	11.376.388.052,00		37,62	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	216.375.104,00	100 %	89.300.000,00	100 %	89.300.000,00	39,13	34.941.750,00	44,35	39.603.243,00				83,48	74.544.993,00	163.844.993,00		75,72	

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	25	72.799.919,00	5	29.300.000,00	5	29.300.000,00	2	13.011.400,00	1	9.939.000,00					3,00	22.950.400,00		52.250.400,00		71,77	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen RKA SKPD	5	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	12.679.500,00		-					1,00	12.679.500,00		27.679.500,00		184,53	
		Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	143.575.185,00	5	45.000.000,00	5	45.000.000,00	1	9.250.850,00	2	29.664.243,00					3,00	38.915.093,00		83.915.093,00		58,45	
		Administrasi Keuangan Perangkat	Terlaksananya Administrasi Keuangan	100%	27.811.063.903,00	97%	6.163.535.004,00	97%	6.163.535.004,00	26,17	1.613.290.834,00	28,44	1.753.143.681,00					54,62	3.366.434.515,00		9.529.969.519,00		34,27	

		Daerah	Daerah																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175	25.948.582.358,00	25	5.715.184.416,00	25	5.715.184.416,00	7	1.586.032.786,00	7	1.531.935.065,00					14,00	3.117.967.851,00		8.833.152.267,00		34,04	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	1270	1.862.481.545,00	250	448.350.588,00	250	448.350.588,00	11	27.258.048,00	96	221.208.616,00					107,00	248.466.664,00		696.817.252,00		37,41	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Daerah	100%	1.647.683.741,00	96%	893.930.420,00	96%	893.930.420,00	18,26	300.889.100,00	44,07	393.931.084,00					62,33	694.820.184,00		1.588.750.604,00		96,42	
		Penyediaan Komponen	Penyediaan Komponen	5	1.800.653,00	1	700.000,00	1	700.000,00		-		-					-	-		700.000,00		38,87	

		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor																				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	10	101.156.250,00	2	122.952.700,00	2	122.952.700,00	1	121.760.200,00	1	1.157.600,00					2,00	122.917.800,00		245.870.500,00		243,06	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang tersedia	10	210.788.854,00	2	46.259.200,00	2	46.259.200,00	1	28.542.000,00	1	17.713.200,00					2,00	46.255.200,00		92.514.400,00		43,89	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggan	Jumlah paket Bahan Cetakan dan Pengga	10	182.333.122,00	2	35.059.800,00	2	35.059.800,00	1	8.754.900,00	0	8.761.900,00					1,00	17.516.800,00		52.576.600,00		28,84	

		daan	ndaan yang disedia kan																			
		Penyedi aan Bahan Bacaan dan Peratura n Perunda ng-undanga n	Jumlah Dokum en bahan bacaan dan perund ang - undang an yang disedia kan	6 0	26.604 .861,0 0	1 2	5.200.0 00,00	1 2	5.200.0 00,00		-		-				-	-	5.200.0 00,00		19, 55	
		Penyele nggaraa n Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD	Jumlah laporan rapat koordin asi dan konsult asi SKPD	6 0 0	100.00 0.000, 00	1 2 0	683.75 7.920,0 0	1 2 0	683.75 7.920,0 0	1 5	141.83 2.000,0 0	6 0	366.298.384,00					75, 00	508.130.38 4,00		1.191.8 88.304, 00		1.1 91, 89	
		Pengada an Barang Milik Daerah Penunja	Tersedi anya Barang Milik Pemeri ntah	1 2	97.664 .588,0 0	1 0 0 %		1 0 0 %	19.713. 900,00		-		-				-	-	-		-	

		ng Urusan Pemerintah Daerah	Daerah																			
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	12	97.664.588,00	2	19.713.900,00	2	19.713.900,00		-		-				-	-	19.713.900,00		20,19	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	362.051.812,00	100%		100%	23.663.036,00	13,54	3.203.500,00	31,56	7.467.400,00					45,10	10.670.900,00		10.670.900,00		2,95	
		Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60	32.734.509,00	12	6.429.800,00	12	6.429.800,00	2	640.000,00	7	3.150.000,00					9,00	3.790.000,00		10.219.800,00		31,22	

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunukasi, jaringan sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	60	329.317.303,00	2	17.233.236,00	2	17.233.236,00	0	2.563.500,00	1	4.317.400,00					1,00	6.880.900,00		24.114.136,00		7,32	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	104.601.931,00	100%		100%	22.020.000,00		-	80,63	17.755.100,00					80,63	17.755.100,00		17.755.100,00		16,97	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	33.090.872,00	3	17.760.000,00	3	17.760.000,00		-	2	13.735.100,00					2,00	13.735.100,00		31.495.100,00		95,18	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	50	36.511.059,00	10	4.260.000,00	10	4.260.000,00		-	9	4.020.000,00					9,00	4.020.000,00		8.280.000,00		22,68	

		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase Penurunan Konflik Berbau Sara	100%	764.791.141,32	100%		100%	3.355.982.300,00	5,08	170.427.200,00	52,76	1.770.774.430,00					57,84	1.941.201.630,00		1.941.201.630,00		253,82	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Teknis dibidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	30	764.791.141,32	100%		100%	3.355.982.300,00	5,08	170.427.200,00	52,76	1.770.774.430,00					57,84	1.941.201.630,00		1.941.201.630,00		253,82	

		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10	255.700.803,82	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00		-		-					-	-		60.000.000,00		23,46	

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebang	1000	407.272.270,00	90	3.295.982.300,00	90	3.295.982.300,00	20	170.427.200,00	70	1.770.774.430,00					90,00	1.941.201.630,00		5.237.183.930,00		1.285,92	

			saan																				
	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi		Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu															-	-		-		

	politik yang demo kratis																					
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	80	4.277.106.495,25	100%		100%	33.731.271.197,00	72,13	24.328.880.500,00	20,34	6.859.520.475,00					92,46	31.188.400.975,00		31.188.400.975,00		729,19	

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Terlaksananya n Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	25	4.277.106.495,25	100%		100%	33.731.271.197,00	72,13	24.328.880.500,00	20,34	6.859.520.475,00					92,46	31.188.400.975,00		31.188.400.975,00		729,19	

		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah . Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi																					

		Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	Jumlah Dokumen Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/	10	12.500.000,00	2	25.124.000,00	2	25.124.000,00	1	12.740.985,00	1	2.712.100,00					2,00	15.453.085,00		40.577.085,00		324,62	

		Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun.																			
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	5	12.500.000,00	1	21.472.500,00	1	21.472.500,00		8.974.675,00	1	8.974.675,00					1,00	17.949.350,00		39.421.850,00		315,37	

		Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun.																					

		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	650	253.550.339,00	250	1.025.396.300,00	250	1.025.396.300,00		-	1200	78.149.860,00					1.200,00	78.149.860,00		1.103.546.160,00		435,24	

		serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah																			
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	163 5	3.883.356.744,00	400	32.095.483.997,00	400	32.095.483.997,00		24.238.184.740,00	400	6.769.544.015,00				400,00	31.007.728.755,00		63.103.212.752,00		1.624,97	

		Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																					

		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/P	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	15	155.199.414,00	3	563.794.400,00	3	563.794.400,00	0	68.980.100,00	1	9.114.500,00					1,00	78.094.600,00		641.889.000,00		413,59	

		emilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sittuasi Politik di Daerah	Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sittuasi Politik di Daerah																				
	Mewujudkan pembinaan dan pemberdayaan ormas		Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan															-	-		-			
		Program Pemberdaayaan dan Pengaw	Presentase Organisasi Masyar	75%	643.825.476,00	100%		100%	908.741.292,00	6,43	58.465.635,00	9,67	87.846.290,00					16,10	146.311.925,00		146.311.925,00		22,73	

		asan Organisasi Kemasyarakatan	akat (Ormas) yang aktif																			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan	5	643.825.476,00	100%		100%	908.741.292,00	64,43	58.465.635,00	9,67	87.846.290,00					16,10	146.311.925,00		146.311.925,00		22,73	

		Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun.	1	7.500.000,00	2	18.890.392,00	2	18.890.392,00		178.200,00	1	178.200,00					1,00	356.400,00		19.246.792,00		256,62	

		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun.	1	7.500.000,00	2	17.724.000,00	2	17.724.000,00		5.273.800,00	1	5.273.800,00					1,00	10.547.600,00		28.271.600,00		376,95	

		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	890	196.287.300,00	200	242.473.300,00	200	242.473.300,00		6.323.395,00	50	29.885.490,00					50,00	36.208.885,00		278.682.185,00		141,98	

			Daerah																				
		Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	920	190.149.200,00	300	238.295.600,00	300	238.295.600,00		-	30	33.204.000,00					30,00	33.204.000,00		271.499.600,00		142,78	

		Asing di Daerah	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																				
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengaw	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	10	232.388.974,00	2	391.358.000,00	2	391.358.000,00	1	46.690.240,00	0	24.756.800,00					1,00	71.447.040,00		462.805.040,00		199,15	

		asan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																				
	Mewujudkan ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama		Fasilitasi kebijakan dibidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya														-	-		-			
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahan	Presentase kebijakan bidang ketaha	100 %	4.429.085.918,00	100 %		100 %	295.000.000,00	5,09	15.020.000,00	6,36	18.757.878,00					11,45	33.777.878,00		33.777.878,00		0,76	

		an Ekonomi Sosial dan Budaya	nan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditindaklanjuti																				
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan budaya yang dirumuskan	25	4.429.085.918,00	100%		100%	295.000.000,00	5,09	15.020.000,00	6,36	18.757.878,00					11,45	33.777.878,00		33.777.878,00		0,76	

		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengha	200	1.018.180.675,00	5	80.000.000,00	5	80.000.000,00	1	750.000,00	1	1.400.000,00					2,00	2.150.000,00		82.150.000,00		8,07	

			yat Kepercayaan di Daerah																			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beraga	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaa	560	2.570.905.848,00	120	200.000.000,00	120	200.000.000,00	10	10.650.000,00	20	17.357.878,00					30,00	28.007.878,00		228.007.878,00		8,87	

		ma dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	n Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	20	76.363.550,63	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	0	3.620.000,00	2	3.620.000,00				2,00	7.240.000,00		22.240.000,00		29,12	

		Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																					
	Meningkatkan kewaspadaan dala		Terwujudnya stabilitas keamanan dan															-	-		-			

	m menjaga kondusifitas yang tertib dan aman		ketertiban di Kabupaten Paser																				
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Presentase kasus konflik sosial yang tertangani / terselesaikan	100%	8.304.752.763,68	100%		100%	1.764.614.380,00	8,21	144.834.135,00	45,47	802.447.881,00					53,68	947.282.016,00		947.282.016,00		11,41	

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social yang dirumuskan	30	8.304.752.763,68	100%		100%	1.764.614.380,00	8,83	155.834.135,00	44,85	791.447.881,00					53,68	947.282.016,00		947.282.016,00		11,41	

		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewasp	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara	10	15.920.453,26	2	39.196.460,00	2	39.196.460,00	0	1.950.000,00	1	20.062.600,00					1,00	22.012.600,00		61.209.060,00		384,47	

		adaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	2	26.235.093,75	2	39.196.460,00	2	39.196.460,00		-	1	15.441.760,00					1,00	15.441.760,00		54.638.220,00		208,26	

		Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah																					

		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewasp	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbat	23	1.048.840.625,00	23	39.196.460,00	23	39.196.460,00	5	17.563.000,00		-					5,00	17.563.000,00		56.759.460,00		5,41	

		adaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	asan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen	12	636.362.921,88	12	357.075.000,00	12	357.075.000,00	0	28.150.100,00	5	117.076.340,00					5,00	145.226.440,00		502.301.440,00		78,93	

		Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di																					

			Daerah																				
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemant	4	122.204.590,06	4	289.950.000,00	4	289.950.000,00	1	17.563.000,00	1	141.472.785,00					2,00	159.035.785,00		448.985.785,00		367,41	

		Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	auan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																					

		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupa-ten/Kota	60	5.345.448.543,75	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00	1	97.171.035,00	4	508.394.396,00					5,00	605.565.431,00		1.605.565.431,00		30,04	
Rata-rata capaian kinerja (%)																72,32	38.421.200.116				1.055,53		
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya Kerja sama yang solid menyebabkan Kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang dijadwalkan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum adanyanua Kepastian Tahapan Pemilu sehingga Untuk Anggaran Pendampingan Pemilu belum dapat dilaksanakan Tepat Waktu
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam kegiatan selanjutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya :

Disusun Tanah Grogot, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser	Dievaluasi Tanah Grogot, Kepala Bappedalitbang Kab. Paser
Nonding, S.Sos, M.M	Rusdian Nor, SE, M.Si
NIP. 19710607 199703 1 007	NIP. 19770309 199803 1 004

Berdasarkan Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Semester II dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 72,32 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 38.421.200.116 (Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua ratus Ribu Seratus Enam Belas Rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 47.267.771.529 (Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Paser sebesar 72,32 % dengan predikat kinerja Tinggi .
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 17 Indikator, capaian kinerja >70%-100% = 3 Indikator, capaian kinerja >50%-70% = 1 Indikator capaian kinerja 0%-50% = 16 Indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

A. Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser mempunyai tugas membantu Bupati Paser dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi :

   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

   b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan

kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganganan konflik sosial;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;

e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sebagai berikut :

I. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

II. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

III. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi terdiri dari:

1. Subbidang Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan.

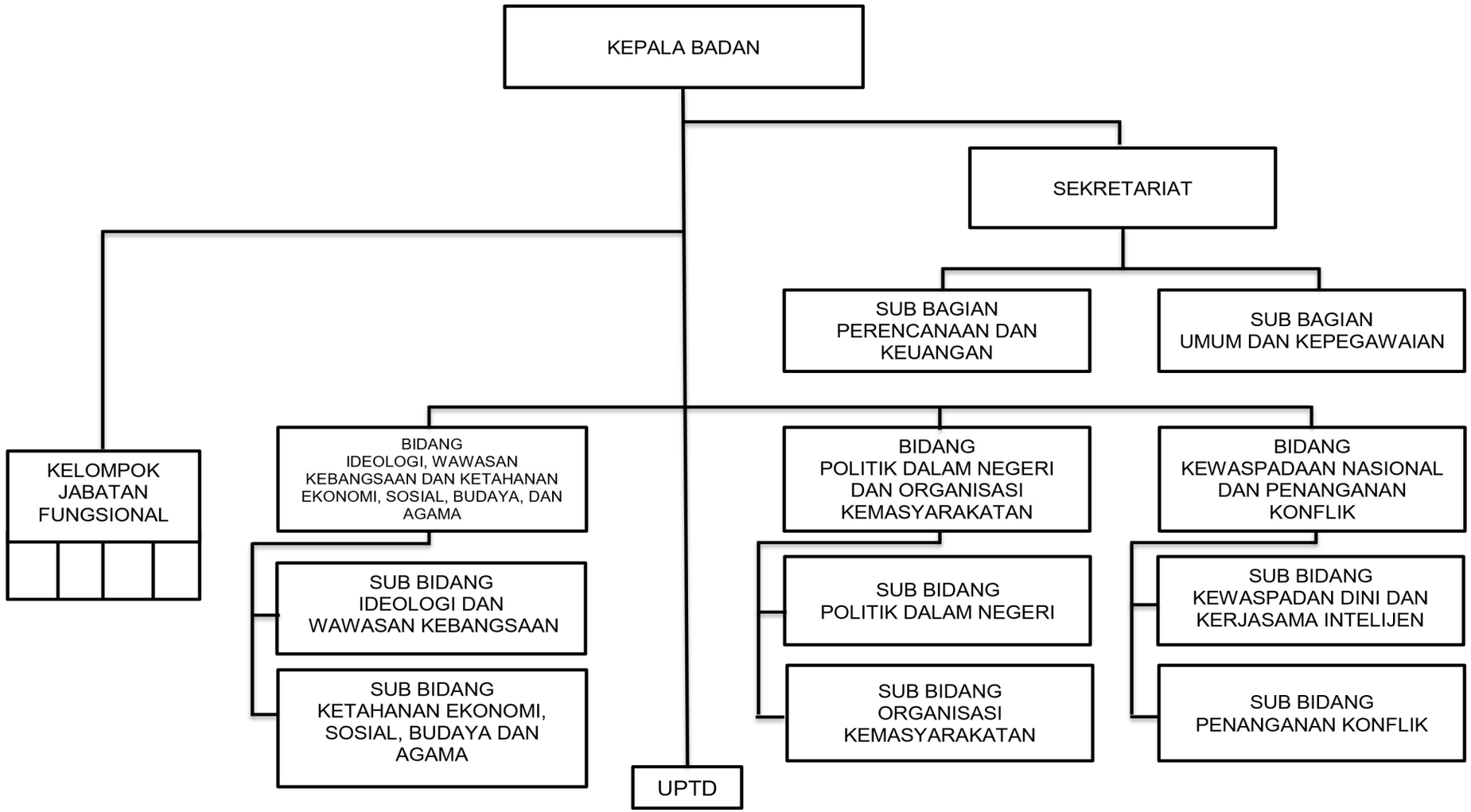
2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama.

IV. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
1. Subbidang Politik Dalam Negeri.
2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

V. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik terdiri dari :
1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen.
2. Subbidang Penanganan konflik.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dapat dilihat pada bagan Gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER



sumber : Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel di bawah ini

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II
Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -					Realisasi	Capaian Kinerja
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas		Indikator Penilaian mandiri reformasi birokrasi	70 B	73 B	75 B	80 B	85 B	4.164.225.692,-	57,74 %
			Nilai Sakip dari Inspektorat	B	B	BB	A	A	BB 72,58	
2	Mewujudkan Masyarakat yang memahami dan menjaga kesatuan bangsa dan politik	Mewujudkan Masyarakat kabupaten paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi pokitik yang demokratis	Fasilitasi penyelenggaraan pemilu	76%	78%	80%	85%	90%	31.188.400.975	92,46 %
3		mewujudkan pembinaan dan pemberdayaan ormas	Presentase masyarakat yang difasilitasi	80%	80%	90%	100%	100%	146.311.925	16,10%
4		mewujudkan ketahanan ekonomi,sosial budaya dan agama	fasilitasi kebijakan dibidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	80%	80%	90%	100%	100%	33.777.878	11,45 %
5		Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib dan aman	terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser	100%	100%	100%	100%	100%	947.282.016	53,68 %
6		meningkatkan pemahaman idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan	peningkatan kesadaran masyarakat tentang idiologi pancasila	100%	100%	100%	100%	100%	1.941.201.630	57,84 %

Berdasarkan Tabel di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan " Mewujudkan Masyarakat yang memahami dan menjaga kesatuan bangsa dan Politik." memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif, mencapai target yang diharapkan, dimana realisasinya sebesar Rp. 38.421.200.116,- dari target sebesar Rp. 47.267.771.529,- dengan capaian kinerja sebesar 72,32 %;

b. 1). Sasaran "Mewujudkan masyarakat Kabupaten paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi politik yang demokratis memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Fasilitasi penyelenggaraan pemilu", sudah mencapai target, dimana realisasinya sebesar Rp. 31.188.400.975 dari target sebesar 33.731.271.197 dengan capaian kinerja sebesar 92.46%

2). Sasaran mewujudkan pembinaan dan pemberdayaan ormas memiliki 1 indikator kinerja yaitu Presentase masyarakat yang difasilitasi belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 146.311.925 dari target sebesar 908.741.292 dengan capaian kinerja sebesar 16,10 %

3). Sasaran mewujudkan ketahanan ekonomi , sosial budaya dan agama memiliki 3 indikator kinerja yaitu fasilitasi kebijakan dibidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar Rp. 33.777.878. dari target sebesar 295.000.000 dengan capaian kinerja sebesar 11.45 % .

4). Sasaran Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib dan aman memiliki 1 indikator kinerja yaitu terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser masih belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar Rp. 947.282.016 dari target sebesar Rp. 1.764.614.380 dengan capaian kinerja sebesar 53.68 %

5) Sasaran meningkatkan pemahaman idiologi Pancasila dan wawasan kebangsaan memiliki 1 indikator kinerja yaitu peningkatan kesadaran masyarakat tentang idiologi Pancasila masih belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar Rp. 1.941.201.630 dari target sebesar 3.355.982.300. dengan capaian kinerja sebesar 57.84 %

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih mengalami Peningkatan yaitu sebesar 72,32 % dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
2. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
3. Bantuan Dana Hibah Parpol yang pelaksanaan kegiatannya terdapat pada triwulan Ke III yang pencairannya harus menyesuaikan dengan Anggaran Kas yang disusun sebelumnya.
4. Adanya dana Forkopimda Yang belum optimal dalam penyerapannya dikarenakan penggunaan pagu tersebut harus menyesuaikan dengan jadwal dari jajaran Forkopimda.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, beberapa target tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser mengalami perubahan penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi	Target	
					Renja 2024	Perubahan Renja 2024
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel	Indikator Penilaian mandiri reformasi birokrasi	Cukup Jelas	80%	80%
			Nilai Sakip dari Inspektorat	Cukup Jelas	B	BB
2	Mewujudkan masyarakat yang memahami dan menjaga kesatuan bangsa dan politik	Mewujudkan Masyarakat kabupaten paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi politik yang demokratis	Penyelenggaraan pemilu	$\frac{Jumlah\ yang\ mengikuti\ partisipasi\ politik}{Jumlah\ partisipasi\ politik}\ x\ 100\ \%$	80%	80%
3		Mewujudkan pembinaan dan pemberdayaan ormas	Presentase masyarakat yang difasilitasi	$\frac{Jumlah\ Organisasi\ Kemasyarakatan\ yang\ masih\ aktif}{Jumlah\ Organisasi\ Kemasyarakatan\ yang\ terdaftar}\ x\ 100\ \%$	75%	75%
4		Mewujudkan ketahanan ekonomi, sosiaL, budaya dan agama	Fasilitasi Kebijakan dibidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	$\frac{Jumlah\ terlaksananya\ peningkatan\ wawasan\ ketahanan\ ekonomi,\ sosial,budaya,dan\ agama\ tahun\ (n)}{Jumlah\ sosialisasi\ tahun\ (n)}\ x\ 100\ \%$	100%	100%
5		Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib dan aman	Stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser	$\frac{Jumlah\ konflik\ sosial\ yang\ terselesaikan}{Jumlah\ konflik\ sosial\ yang\ ada}\ x\ 100\ \%$	100%	100%
6		Meningkatkan pemahaman idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang idiologi pancasila	$\frac{Jumlah\ terlaksananya\ peningkatan\ kesadaran\ masyarakat\ tentang\ idiologi\ pancasila}{Jumlah\ sosialisasi\ tahun\ (n)}\ x\ 100\ \%$	100%	100%

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023 yaitu “PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing - masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke-4 yakni meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Murni	Target Capaian	Pagu Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**45.146.011.329**		**50.805.251.630**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	80 %	**7.112.162.360**	**80 %**	**7.824.770.790**
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	11 Dokumen	**89.300.000**	11 Dokumen	**162.434.680**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	29.300.000	5 Dokumen	55.096.000
	Koordinasi danPenyusunan Dokumen RKA SPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	48.248.680
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	45.000.000	5 Dokumen	59.000.000
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentasi temuan yang ditindak lanjutin	100 %	6.163.535.004	100 %	6.349.535.004
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 orang/ Bulan	5.715.184.416	35 orang/ Bulan	5.925.184.416
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	250 Dokumen	448.350.588	250 Dokumen	424.350.588
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	**793.930.420**	100%	**1.210.806.920**

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	700.800	1 paket	700.800
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	122.952.700	0 Paket	473.517.450
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	46.259.200	2 Paket	46.259.200
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket bahan cetakan penggandaan yang disediakan	2 Paket	35.059.800	2 Paket	26.559.800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 Dokumen	5.200.000	0 Dokumen	5.200.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120 Laporan	583.757920	120 Dokumen	658.569.670
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	2 Unit	**19.713.900**	2 Unit	**32.012.150**
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Unit	19.713.900	2 unit	32.012.150
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	**23.663.036**	12 Laporan	**24.663.036**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		6.429.800	0 Laporan	7.429.800
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	17.233.236	12 Laporan	17.233.236
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Negara yang terpelihara	13 Unit	**22.020.000**	13 Unit	**45.319.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan nya	3 Unit	17.760.000	3 Unit	37.760.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara	10 Unit	4.260.000	10 Unit	7.559.000

2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase penurunan konflik berbau SARA	100%	**1.355.982.300**	100%	**4.940.224.215**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pemantapan bidang ideology Pancasila dan Karekter Bangsa yang dirumuskan	80%	**1.355.982.300**	80%	**4.940.224.215**
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dirumuskan	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	60.000.000
b	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dirumuskan	90 Orang	1.259.982.300	90 Orang	4.880.224.215
3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	80%	**33.831.271.197**	80%	33.991.031.563
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan yang dirumuskan	5 Dokumen	**33.831.271.197**	5 Dokumen	33.991.031.563

	Pemantauan					
	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Dokumen Program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2 Dokumen 10 Kecamatan	25.124.000	2 Dokumen 10 Kecamatan	25.124.000
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1 Dokumen 10Kecamatan	21.472.500	11 Dokumen 10Kecamatan	21.472.500
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2650 Orang	1.025.396.300	2650 Orang	1.025.396.300
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400 Orang	32.195.483.997	400 Orang	32.355..244.353
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,	3 Laporan	563.794.400	3 Laporan	563.794.400

	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	persentase organisasi masyarakat (ormas) yang aktif	75%	**908.741.292**	75%	908.741.292
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan	5 Dokumen	**908.741.292**	5 Dokumen	908.741.292
	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Dokumen	18.890.392	2 Dokumen	18.890.392
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Dokumen	17.724.000	2 Dokumen	17.724.000
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	200 Orang	242.473.300	200 Orang	242.473.300

	Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	238.295.600	300 Orang	238.295.600
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	391.358.000	2 Laporan	391.358.000
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	100%	**295.000.000**	100%	**295.000.000**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan agama yang ditindaklanjuti	5 Dokumen	**295.000.000**	5 Dokumen	**295.000.000**
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	5 Dokumen	80.000.000	5 Dokumen	80.000.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	120 Orang	200.000.000	120 Orang	200.000.000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000

	Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	100%	**1.764.614.380**	100%	2.845.483.780
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	6 Dokumen	**1.764.614.380**	6 Dokumen	2.845.483.780
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Dokumen	39.196.460	2 Dokumen	39.196.460
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun	2 Dokumen	39.196.460	Dokumen	154.596.460

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	23 Orang	39.196.460	Orang	195.065.860
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Orang	357.075.000	Orang	615.125.000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	289.950.000	Laporan	441.510.000
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota FORKOPIMDA	12 Dokumen	1.000.000.000	Dokumen	1.399.990.000
	TOTAL			**45.267.771.529**		**50.805.251.630**

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Perubahan Rancangan RKPD 2024 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

Tabel. 3.3 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Nama OPD										
	Urusan ……..										
	Tidak Ada Usulan										

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Murni	Target Capaian	Pagu Perubahan	Bertambah / Berkurang
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**45.267.771.529**		**50.805.251.630**	**4.058.429.750**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tanah Grogot	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	80 %	**7.112.162.360**	**80 %**	**7.824.770.790**	**406.669.962**
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanah Grogot	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	11 Dokumen	**89.300.000**	10 Dokumen	**162.434.680**	73.134.680
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah Grogot	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	29.300.000	5 Dokumen	55.096.000	25.796.000
	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil Koordinas dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	48.248.680	33.248.680
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanah Grogot	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	45.000.000	05 Dokumen	59.090.000	14.090.000
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tanah Grogot	Presentasi temuan yang ditindak lanjutin	100 %	6.163.535.004	100 %	6.349.535.004	186.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanah Grogot	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 orang/ Bulan	5.715.184.416	35 orang/ Bulan	5.925.184.416	210.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tanah Grogot	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	250 Dokumen	448.350.588	250 Dokumen	424.350.588	(24.000.000)
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tanah Grogot	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	**793.930.420**	100%	**1.210.806.920**	**416.876.500**

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanah Grogot	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	700.800	1 paket	700.800	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah Grogot	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	122.952.700	0 Paket	473.517.450	350.564.750
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanah Grogot	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	46.259.200	2 Paket	46.259.200	0
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tanah Grogot	Jumlah paket bahan cetakan penggandaan yang disediakan	2 Paket	35.059.800	2 Paket	26.559.800	(8.500.000)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tanah Grogot	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 Dokumen	5.200.000	0 Dokumen	5.200.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah Grogot	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120 Laporan	583.757.920	0 Dokumen	658.569.670	74.811.750
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanah Grogot	Tersedianya barang milik daerah	2 Unit	**19.713.900**	2 Unit	**32.012.150**	12.298.250
	Pengadaan Mebel	Tanah Grogot	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Unit	19.713.900	2 unit	32.012.150	12.298.250
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanah Grogot	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	**23.663.036**	12 Laporan	**24.663.036**	1.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanah Grogot	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	6.429.800	12 Laporan n	7.429.800	1.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanah Grogot	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	17.233.236	12 Laporan	17.233.236	0
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanah Grogot	Terpeliharanya Barang Milik Negara yang terpelihara	13 Unit	**22.020.000**	13 Unit	**45.319.000**	23.299.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah Grogot	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan nya	3 Unit	17.760.000	3 Unit	37.760.000	20.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanah Grogot	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara	10 Unit	4.260.000	10 Unit	7.559.000	3.299.000

2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Tanah Grogot	Persentase penurunan konflik berbau SARA	100%	**1.355.982.300**	100%	**4.940.224.215**	3.584.241.915
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tanah Grogot	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pemantapan bidang ideology Pancasila dan Karekter Bangsa yang dirumuskan	80%	**1.355.982.300**	80%	**4.940.224.215**	3.584.241.915
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tanah Grogot	Jumlah kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dirumuskan	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	60.000.000	0
b	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Paser	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dirumuskan	90 Orang	1.295.982.300	90 Orang	4.880.224.215	3.584.241.915
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tanah Grogot	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	80%	**33.831.271.197**	80%	33.991.031.553	159.760.356

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Tanah Grogot	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan yang dirumuskan	5 Dokumen	**33.831.271.197**	5 Dokumen	33.991.031.553	159.760.356
	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2 Dokumen 10 Kecamatan	25.124.000	2 Dokumen 10 Kecamatan	25.124.000	0
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1 Dokumen 10 Kecamatan	21.472.500	11 Dokumen 10 Kecamatan	21.472.500	**0**
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah orang yang Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2650 Orang	1.025.396.300	2650 Orang	1.025.396.300	0

	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tanah Grogot	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400 Orang	32.195.483.997	400 Orang	32.355.244.353	159.760.356
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 Laporan	563.794.400	3 Laporan	563.794.400	0
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Tanah Grogot	persentase organisasi masyarakat (ormas) yang aktif	80%	**908.741.292**	80%	**908.741.292**	0
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tanah Grogot	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan	5 Dokumen	**908.741.292**	5 Dokumen	**908.741.292**	0

	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tanah Grogot	JumlahDokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Dokumen	18.890.392	2 Dokumen	18.890.392	0
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Dokumen	17.724.000	2 Dokumen	17.724.000	0
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	242.473.300	200 Orang	242.473.300	0
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	238.295.600	300 Orang	238.295.600	0
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	391.358.000	2 Laporan	391.358.000	0

5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Tanah Grogot	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	100%	**295.000.000**	100%	**295.000.000**	0
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tanah Grogot	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan agama yang ditindaklanjuti	5 Dokumen	**295.000.000**	5 Dokumen	**295.000.000**	0
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	5 Dokumen	80.000.000	5 Dokumen	80.000.000	0
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. paser	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	120 Orang	200.000.000	120 Orang	200.000.000	0
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	0
6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Tanah Grogot	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	100%	**1.764.614.380**	100%	2.845.483.780	**1.080.869.400**

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tanah Grogot	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	6 Dokumen	**1.764.614.380**	6 Dokumen	2.845.483.780	**1.080.869.400**
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Dokumen	39.196.460	2 Dokumen	39.196.460	0
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	Tanah Grogot	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun	2 Dokumen	39.196.460	Dokumen	154.596.460	115.400.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	23 Orang	39.196.460	Orang	195.065.860	155.869.400

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Orang	357.075.000	Orang	615.125.000	258.050.000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	289.950.000	Laporan	441.510.000	151.560.000
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota FORKOPIMDA	12 Dokumen	1.000.000.000	Dokumen	1.399.990.000	399.990.000
TOTAL					**47.267.771.529**		**51.326.151.279**	**4.058.429.750**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2 Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara



RENJA PERUBAHAN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024

JL. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran KM. 5 Gd. D Lt. I Kav. II Tana Paser

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI PASER
100.3.3.2/KEP- /2024
TANGGAL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagaiacuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II

Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026
22. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasandalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target (jika ada)

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Pada bagian ini juga berisikan tanda tangan Kepala OPD.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (TA 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Angaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Th Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
											I		II											
1	2	3	4	5			6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	17
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Indeks kepuasan pelayanan sekretariat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik**	**74**	**Persen**	**9.861.348.704**	**-**	**8.416.096.334**	**100**	**7.682.923.281**	**14**	**1.040.565.737**	**27**	**2.107.642.012**	**40,9767**	**3.148.207.749**	**41%**	**41%**	**40,97669**	**11.564.304.083**	**55%**	**117%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	100	Persen	446.600.000	-	166.171.309	72	155.000.000	14	22.180.400	5	8.094.000	**19,5319**	**30.274.400**	**27%**	**20%**	**19,53187**	**196.445.709**	**20%**	**44%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	110.000.000	-	-	1	35.000.000	21	7.190.000	23	8.094.000	**43,6686**	**15.284.000**	**4367%**	**44%**	**43,66857**	**15.284.000**	**437%**	**14%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	Dokumen	165.000.000	-	86.256.849	1	60.000.000	-	-	-	-	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**0**	**86.256.849**	**0%**	**52%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	21.600.000	-	79.914.460	1	30.000.000	-	-	-	-	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**0**	**79.914.460**	**0%**	**370%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	150.000.000	-	-	1	30.000.000	50	14.990.400	-	-	**49,968**	**14.990.400**	**4997%**	**50%**		**14.990.400**		**10%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	100	Persen	8.737.748.704	-	8.079.256.900	100	7.273.846.420	13	960.424.295	28	2.069.940.927	**41,6611**	**3.030.365.222**	**42%**	**42%**	**41,66111**	**11.109.622.122**	**42%**	**127%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	

			Persentase LHP nihil	100	Persen		-		100		#DIV/0!		-		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Oran yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/ Bulan	8.500.000.000	-	8.079.256.900	33	7.036.097.716	13	937.664.295	29	2.016.982.419	**41,9927**	**2.954.646.714**	**127%**	**42%**	**41,99269**	**11.033.903.614**	**70%**	**130%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10	Dokumen	237.748.704	-	-	10	237.748.704	10	22.760.000	22	52.958.508	**0**	**75.718.508**	**0%**	**32%**	**0**	**75.718.508**	**0%**	**32%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase muatan rancangan awal Dokumen Perencanaan Daerah yang disetujui sebagai rancangan Akhir	100	Persen	577.000.000	-	165.418.125	100	214.076.861	25	53.442.242	10	22.427.085	**35,4402**	**75.869.327**	**35%**	**35%**	**35,44023**	**241.287.452**	**35%**	**42%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	17.500.000	-	95.235.700	15	20.000.000	-	-	-	-	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**0**	**95.235.700**	**0%**	**544%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	17.500.000	-	-	10	5.000.000	-	-	-		**0**	**-**	**0%**	**0%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Paket	135.000.000	-	55.375.600	50	24.576.861	-	-	2	550.000	**2,23788**	**550.000**	**4%**	**2%**	**2,237877**	**55.925.600**	**4%**	**41%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25	Paket	7.000.000			25	7.000.000	-	-	-	-	**0**	**-**	**0%**	**0%**		**-**		**0%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	400.000.000	-	14.806.825	20	157.500.000	34	53.442.242	14	21.877.085	**47,8218**	**75.319.327**	**239%**	**48%**	**47,82179**	**90.126.152**	**239%**	**23%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	57	Persen	100.000.000	-	5.250.000	45	40.000.000	11	4.518.800	18	7.180.000	**29,247**	**11.698.800**	**65%**	**29%**	**29,247**	**16.948.800**	**65%**	**17%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	85.000.000	-	5.250.000	4	25.000.000	18	4.518.800	-	-	**18,0752**	**4.518.800**	**452%**	**18%**	**18,0752**	**9.768.800**	**452%**	**11%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Unit	15.000.000	-	-	100	15.000.000	-	-	48	7.180.000	**47,8667**	**7.180.000**	**48%**	**48%**	**47,86667**	**7.180.000**	**48%**	**48%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	97	Persen	441.734.400	-	88.479.553	97	595.000.000	**8**	46.459.800	**-**	-	**7,80837**	**46.459.800**	**8%**	**8%**	**7,80837**	**134.939.353**	**8%**	**31%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen dan laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk	97	Persen	232.790.400	-	88.479.553	97	430.000.000	11	46.459.800	36	154.764.969	**46,7965**	**201.224.769**	**48%**	**47%**	**46,79646**		**48%**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100	Dokumen	35.208.000	-	37.398.898	100	15.000.000	19	2.830.000	14	2.100.000	**32,8667**	**4.930.000**	**33%**	**33%**	**32,86667**	**42.328.898**	**33%**	**120%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	8.000	Dokumen	144.000.000	-	51.080.655	8.000	400.000.000	11	43.629.800	38	152.664.969	**49,0737**	**196.294.769**	**1%**	**49%**	**49,07369**	**247.375.424**	**1%**	**172%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Penerbitan Dokumen Atas Hail Laporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2	Laporan	53.582.400	-	-	2	15.000.000	-	-	-	-	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen penataan pendaftaran penduduk	97	Persen	3.024.000	-	-	97	100.000.000	-	-	-	-	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10.000	Dokumen	3.024.000	-		10000	100.000.000	-	-	-	-	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	

		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendafataran penduduk	97	Persen	61.920.000	-	-	97	15.000.000	-	-	45	6.693.000	**44,62**	**6.693.000**	**46%**	**45%**	**44,62**	**6.693.000**	**46%**	**11%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	2	Laporan	61.920.000	-		2	15.000.000	-	-	45	6.693.000	**0**	**6.693.000**	**0%**	**45%**	**0**	**6.693.000**	**0%**	**11%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	97	Persen	144.000.000	-	-	97	50.000.000	-	-	-	-	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	144.000.000	-		1	50.000.000	-	-	-	-	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	97	Persen	444.555.216	-	434.017.300	97	256.050.000	**19**	49.005.100	**-**	-	**19,1389**	**49.005.100**	**20%**	**19%**	**19,13888**	**483.022.400**	**20%**	**109%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	97	Dokumen	444.555.216	-	434.017.300	97	223.050.000	22	49.005.100	4	9.808.000	**26,3677**	**58.813.100**	**27%**	**26%**	**26,36768**	**492.830.400**	**27%**	**111%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6000	Dokumen	444.555.216	-	434.017.300	6000	223.050.000	22	49.005.100	4	9.808.000	**26,3677**	**58.813.100**	**0%**	**26%**	**26,36768**	**492.830.400**	**0%**	**111%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	97	Persen	53.280.000	-	-	97	33.000.000	-	-	23	7.455.800	**22,5933**	**7.455.800**	**23%**	**23%**	**22,59333**	**7.455.800**	**23%**	**14%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	50	Laporan	31.680.000	-	-	50	15.000.000	-	-	50	7.455.800	**49,7053**	**7.455.800**	**99%**	**50%**	**49,70533**	**7.455.800**	**99%**	**24%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	

		Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	5	Dokumen	21.600.000	-	-	5	18.000.000	-	-		-	**0**	-	**0%**	**0%**	**0**	-	**0%**	**0%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	97	Persen	1.371.811.536	-	1.846.341.385	97	1.786.214.740	**14**	243.290.608	**32**	574.389.000	**45,7772**	**817.679.608**	**47%**	**46%**	**45,77723**	**2.664.020.993**	**47%**	**194%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase dokumen dan laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	97	Persen	1.184.334.912	1	1.720.077.580	97	1.627.984.220	15	243.290.608	35	562.195.000	**49,4775**	**805.485.608**	**51%**		**50,47748**		**52%**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	Dokumen	1.184.334.912	-	1.720.077.580	12	1.627.984.220	15	243.290.608	35	562.195.000	**49,4775**	**805.485.608**	**412%**	**49%**	**49,47748**	**2.525.563.188**	**412%**	**213%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase dokumen dan laporan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan**	97	Persen	115.476.624	-	126.263.805	97	98.230.520	-	-	12	12.194.000	**12,4137**	**12.194.000**	**13%**	**12%**	**12,41366**	**138.457.805**	**13%**	**120%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	Laporan	31.680.000	-	-	2	26.400.000	-	-	5	1.344.000	**5,09091**	**1.344.000**	**255%**	**5%**	**5,090909**	**1.344.000**	**255%**	**4%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10	Laporan	62.196.624	-	81.883.500	2	51.830.520	-	-	21	10.850.000	**20,9336**	**10.850.000**	**1047%**	**21%**	**20,93361**	**92.733.500**	**209%**	**149%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	10	Dokumen	21.600.000	-	44.380.305	10	20.000.000	-	-	-	-	**0**	-	**0%**	**0%**	**0**	**44.380.305**	**0%**	**205%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen/laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	97	Persen	72.000.000	-	-	97	60.000.000	-	-	-	-	**0**	-	**0%**	**0%**	**0**	-	**0%**	**0%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	2	Laporan	72.000.000	-	-	2	60.000.000	-	-	-	-	**0**	-	**0%**	**0%**	**0**	-	**0%**	**0%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	

			Kependudukan																				
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100	persen	34.560.000	-		97	28.800.000	-	-	-	-	**0**	-	**0%**	**0%**	**0**	-	**0%**	**0%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase laporan profil kependudukan	100	Persen	34.560.000	-	-	97	28.800.000	-	-	-	-	**0**	-	**0%**	**0%**	**0**	-	**0%**	**0%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	4	Dokumen	34.560.000	-	-	4	28.800.000	-	-	-	-	**0**	-	**0%**	**0%**	**0**	-	**0%**	**0%**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 41,20%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.247.710.265,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 10.348.988.021,00 (Sepuluh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh satu Rupiah) atau sebesar 59,80%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 22,74% dengan predikat kinerja Sangat Rendah.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 0 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 0 indikator capaian kinerja 0%-50% =2 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksudn pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
c. pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;
e. penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
f. perumusan kebijakan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
l. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
m. pembinaan Jabatan Fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
o. pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
p. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
q. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
r. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan

masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah, dan

s. pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan
2. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)
3. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)
4. Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian
Tujuan: Meningkatkan Penataan dan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	82	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Perekaman KTP Electronic	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 207.524 Jumlah penduduk 17 tahun ke atas 207.626	99.95%
Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2 Jam		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 55.378 Jumlah anak usia 0-17 tahun 55.378	100%
	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1 Jam		Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anka usia 0-18 tahu yang sudah memiliki akta lahir = 94.811 Jumlah anak usia 0-18 tahun 95.424	99.35%
Sasaran 2: Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	20		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 22 Jumlah Perangkat Daerah 41	53.66%

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan Penataan dan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan”, mencapai target, dimana realisasinya sebesar 82% dari target sebesar 82% dengan capaian kinerja

sebesar 100%;

b. Sasaran 1 “Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)” dan “Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)” mencapai target, dimana realisasinya sebesar 2 Jam dari target sebesar 2 Jam dengan capaian kinerja sebesar 100%

c. Sasaran 2 “Sasaran 2: Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan” mencapai target, dimana realisasinya sebesar 1 Jam dari target sebesar 1 Jam dengan capaian kinerja sebesar100%

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Pelayanan Langsung ke desa-desa
2. Pelayanan Online melalui aplikasi E-Buen
3. Pelayanan hari Senin-Sabtu

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Kurangnya SDM
2. Kurangnya Pejabat Fungsional
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Operator Pelayanan

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Publik perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Tujuan: Meningkatkan Penataan dan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	Jumlah responden SKM	82	82
Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	Waktu maksimal penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2 Jam	2 Jam
	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	Waktu maksimal penyelesaian dokumen catatan sipil (akta kelairan, akta kematian,akta pengangkatan anak, akta perceraian/perkawinan)	1 Jam	1 Jam
Sasaran 2: Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Lembaga Pengguna Data Kependudukan x 100 Jumlah Lembaga yang ada di Kab. Paser	20	20

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian

kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu ""PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER"" yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung pencapaian sasaran ke 4, yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik".

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel. 3.2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Paser**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**74**	**7.682.923.281,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Paser**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**74**	**8.858.877.410,00**	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Paser**	**Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD**	**100**	**155.000.000,00**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD**	**100**	**320.000.000,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	35.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	90.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	5	30.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	5	60.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	60.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	110.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	30.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	60.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Paser**	**Persentase temuan ditindaklanjuti**	**100**	**7.273.846.420,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase temuan ditindaklanjuti**	**100**	**7.333.990.420,00**	
			Persentase LHP nihil	**100**				**Persentase LHP nihil**	**100**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60	7.036.097.716,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60	7.036.097.716,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	237.748.704,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	297.892.704,00	

No.	RANCANGAN AWAL 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	9	10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Paser**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100**	**214.076.861,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100**	**1.041.086.990,00**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	20.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	160.531.600,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10	10.000.000,00	
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	24.576.861,00	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	490.707.740,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Barang Cetak	25	7.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Barang Cetak	25	22.347.650,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumla Perjalanan Dinas dan Rapat Kordinasi	60	157.500.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumla Perjalanan Dinas dan Rapat Kordinasi	60	357.500.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Paser**	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	**80**	**40.000.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	**80**	**163.800.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Mobil Operasional Yang Dipelihara	4	25.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Mobil Operasional Yang Dipelihara	4	45.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah peralatan Komputer Yang Dipelihara	4	15.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah peralatan Komputer Yang Dipelihara	4	118.800.000,00	

No.	RANCANGAN AWAL 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	9	10
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Kab. Paser**	**Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)**	**98**	**595.000.000,00**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Kab. Paser**	**Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)**	**98**	**675.383.600,00**	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Kab. Paser**	**Persentase jumlah dokumen kependudukan pelayanan pendaftaran penduduk**	**97**	**430.000.000,00**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Paser**	**Persentase jumlah dokumen kependudukan pelayanan pendaftaran penduduk**	**97**	**510.383.600,00**	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	2	15.000.000,00	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	2	15.000.000,00	
	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	8000	400.000.000,00	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	8000	480.383.600,00	
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12	15.000.000,00	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12	15.000.000,00	
	Penataan Pendaftaran Penduduk	**Kab. Paser**	**Persentase jumlah dokumen penataan pendaftaran penduduk**	**97**	**100.000.000,00**	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Paser**	**Persentase jumlah dokumen penataan pendaftaran penduduk**	**97**	**100.000.000,00**	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000	100.000.000,00	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000	100.000.000,00	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Kab. Paser**	**Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendafataran penduduk**	**97**	**65.000.000,00**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Paser**	**Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendafataran penduduk**	**97**	**65.000.000,00**	

	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Terkait Pendaftaran Penduduk	10	15.000.000,00	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Terkait Pendaftaran Penduduk	10	15.000.000,00	
	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	50.000.000,00	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	50.000.000,00	

No.	RANCANGAN AWAL 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	9	10
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Kab. Paser**	**Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)**	**97**	**256.050.000,00**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Kab. Paser**	**Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)**	**97**	**289.507.500,00**	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	**Kab. Paser**	**Persentase Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil**	**97**	**223.050.000,00**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Kab. Paser**	**Persentase Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil**	**97**	**256.507.500,00**	
	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6000 Dok	223.050.000,00	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6000 Dok	256.507.500,00	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Kab. Paser**	**Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil**	**97**	**33.000.000,00**	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Kab. Paser**	**Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil**	**97**	**33.000.000,00**	
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	10	15.000.000,00	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	10	15.000.000,00	
	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	5	18.000.000,00	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	5	18.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Kab. Paser**	**Persentase data kependudukan yang valid**	**97**	**1.786.214.740,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Kab. Paser**	**Persentase data kependudukan yang valid**	**97**	**2.630.022.220,00**	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Kab. Paser**	**Persentase Jumlah Dokumen pengumpulan, pemanfaatan dan penyajian database kepenedudukan**	**97**	**1.627.984.220,00**	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Kab. Paser**	**Persentase Jumlah Dokumen pengumpulan, pemanfaatan dan penyajian database kepenedudukan**	**97**	**1.797.580.220,00**	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	1.627.984.220,00	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	1.797.580.220,00	

No.	RANCANGAN AWAL 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	9	10
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Kab. Paser**	**Persentase jumlah dokumen/laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**97**	**98.230.520,00**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Paser**	**Persentase jumlah dokumen/laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**97**	**772.442.000,00**	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	26.400.000,00	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	402.054.000,00	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	51.830.520,00	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	143.644.000,00	
	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	1	20.000.000,00	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	1	226.744.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Kab. Paser**	**Persentase dokumen/laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**2**	**60.000.000,00**	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Paser**	**Persentase dokumen/laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**2**	**60.000.000,00**	
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	4	60.000.000,00	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	4	60.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Kab. Paser**	**Persentase pemanfaatan data kependudukan**	**100**	**28.800.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Kab. Paser**	**Persentase pemanfaatan data kependudukan**	**100**	**28.800.000,00**	
	Penyusunan Profil Kependudukan	**Kab. Paser**	**Persentase Laporan Profil Kependudukan**	**100**	**28.800.000,00**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Kab. Paser**	**Persentase Laporan Profil Kependudukan**	**100**	**28.800.000,00**	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kab. Paser	Persentase pemanfaatan data kependudukan	4	28.800.000,00	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kab. Paser	Persentase pemanfaatan data kependudukan	4	28.800.000,00	
JUMLAH					**10.348.988.021,00**	**JUMLAH**				**12.482.590.730,00**	

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024
Diisi Matriks Renja yang bersumber dari SIPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.00.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 10.283.230.821	Rp. 65.757.200			Rp. 10.348.988.021	Rp. 11.242.777.850	Rp. 675.999.900			Rp. 11.918.777.750	Rp. 13.059.532.234,00

2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				Rp. 10.283.230.821	Rp. 65.757.200			Rp. 10.348.988.021	Rp. 11.242.777.850	Rp. 675.999.900			Rp. 11.918.777.750	Rp. 13.059.532.234,00
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 7.617.166.081	Rp. 65.757.200			Rp. 7.682.923.281	Rp. 8.301.733.510	Rp. 435.999.900			Rp. 8.737.733.410	Rp. 9.343.849.634,00
2	12	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 113.671.900	Rp. 41.328.100			Rp. 155.000.000	Rp. 173.671.900	Rp. 41.328.100			Rp. 215.000.000	Rp. 1.976.000.000,00
2	12	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 55.000.000				Rp. 55.000.000	Rp. 121.000.000,00
2	12	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 18.671.900	Rp. 41.328.100			Rp. 60.000.000	Rp. 18.671.900	Rp. 41.328.100			Rp. 60.000.000	Rp. 180.000.000,00
2	12	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 25.000.000,00
2	12	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 1.650.000.000,00
2	12	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 7.273.846.420				Rp. 7.273.846.420	Rp. 7.397.626.420	Rp. 0			Rp. 7.397.626.420	Rp. 6.631.849.634,00
2	12	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 7.036.097.716				Rp. 7.036.097.716	Rp. 7.036.097.716				Rp. 7.036.097.716	Rp. 6.331.849.634,00

2	12	01	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 237.748.704				Rp. 237.748.704	Rp. 361.528.704	Rp. 0			Rp. 361.528.704	Rp. 300.000.000,00
2	12	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 189.647.761	Rp. 24.429.100			Rp. 214.076.861	Rp. 566.635.190	Rp. 394.671.800			Rp. 961.306.990	Rp. 595.000.000,00
2	12	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 570.900	Rp. 19.429.100			Rp. 20.000.000	Rp. 1.643.900	Rp. 138.887.700			Rp. 140.531.600	Rp. 17.500.000,00
2	12	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Rp. 5.000.000			Rp. 5.000.000	Rp. 25.374.700	Rp. 79.625.300			Rp. 105.000.000	Rp. 17.500.000,00
2	12	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 24.576.861				Rp. 24.576.861	Rp. 249.768.940	Rp. 176.158.800			Rp. 425.927.740	Rp. 135.000.000,00
2	12	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 7.000.000				Rp. 7.000.000	Rp. 22.347.650				Rp. 22.347.650	Rp. 25.000.000,00
2	12	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 157.500.000				Rp. 157.500.000	Rp. 267.500.000				Rp. 267.500.000	Rp. 400.000.000,00
2	12	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 40.000.000				Rp. 40.000.000	Rp. 163.800.000				Rp. 163.800.000	Rp. 141.000.000,00
2	12	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 45.000.000				Rp. 45.000.000	Rp. 93.000.000,00

2	12	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 118.800.000				Rp. 118.800.000	Rp. 48.000.000,00
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				Rp. 595.000.000				Rp. 595.000.000	Rp. 635.383.600				Rp. 635.383.600	Rp. 1.201.635.400,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	12	02	2,01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				Rp. 430.000.000				Rp. 430.000.000	Rp. 470.383.600				Rp. 470.383.600	Rp. 846.035.400,00
2	12	02	2,01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 35.208.000,00
2	12	02	2,01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 400.000.000				Rp. 400.000.000	Rp. 440.383.600				Rp. 440.383.600	Rp. 275.000.000,00
2	12	02	2,01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 535.827.400,00
2	12	02	2,02		Penataan Pendaftaran Penduduk				Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 180.000.000,00
2	12	02	2,02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 180.000.000,00

					Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														
2	12	02	2,03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 61.600.000,00
2	12	02	2,03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 61.600.000,00
2	12	02	2,04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 114.000.000,00
2	12	02	2,04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 114.000.000,00
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				Rp. 256.050.000				Rp. 256.050.000	Rp. 276.050.000				Rp. 276.050.000	Rp. 692.055.216,00
2	12	03	2,01		Pelayanan Pencatatan Sipil				Rp. 223.050.000				Rp. 223.050.000	Rp. 243.050.000				Rp. 243.050.000	Rp. 644.555.216,00
2	12	03	2,01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 223.050.000				Rp. 223.050.000	Rp. 243.050.000				Rp. 243.050.000	Rp. 644.555.216,00
2	12	03	2,02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				Rp. 33.000.000				Rp. 33.000.000	Rp. 33.000.000				Rp. 33.000.000	Rp. 47.500.000,00
2	12	03	2,02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 27.500.000,00

2	12	03	2,02	0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.000.000				Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000				Rp. 18.000.000	Rp. 20.000.000,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				Rp. 1.786.214.740				Rp. 1.786.214.740	Rp. 2.000.810.740	Rp. 240.000.000			Rp. 2.240.810.740	Rp. 1.787.431.984,00
2	12	04	2,01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				Rp. 1.627.984.220				Rp. 1.627.984.220	Rp. 1.797.580.220	Rp. 240.000.000			Rp. 2.037.580.220	Rp. 1.600.000.000,00
2	12	04	2,01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.627.984.220				Rp. 1.627.984.220	Rp. 1.797.580.220	Rp. 240.000.000			Rp. 2.037.580.220	Rp. 1.600.000.000,00
2	12	04	2,03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Rp. 98.230.520				Rp. 98.230.520	Rp. 143.230.520				Rp. 143.230.520	Rp. 117.431.984,00
2	12	04	2,03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 26.400.000				Rp. 26.400.000	Rp. 71.400.000				Rp. 71.400.000	Rp. 35.235.360,00
2	12	04	2,03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 51.830.520				Rp. 51.830.520	Rp. 51.830.520				Rp. 51.830.520	Rp. 62.196.624,00
2	12	04	2,03	0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000,00

2	12	04	2,04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 70.000.000,00
2	12	04	2,04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 70.000.000,00
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 34.560.000,00
2	12	05	2,01		Penyusunan Profil Kependudukan				Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 34.560.000,00
2	12	05	2,01	00 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 34.560.000,00
Jumlah									**Rp. 10.283.230.821**	**Rp. 65.757.200**			**Rp. 10.348.988.021**	**Rp. 11.242.777.850**	**Rp. 675.999.900**			**Rp. 11.918.777.750**	**Rp. 13.059.532.234,00**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

5.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tanah Grogot, 17 Juli 2024

Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Paser,

PEMERINTAH KABUPATEN DISDUKCAPIL PASER

Muhd. Isnaini Nanuardi, S. Hut. MM
NIP. 197001051998031010

PENETAPAN RENJA AKHIR PERUBAHAN TAHUN 2024
Kecamatan Tanah Grogot

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANAH GROGOT
Jl. Pangeran Menteri No. 1 Telp (0543) 21091
TANAH GROGOT

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagaiacuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangkapendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kantor Kecamatan Tanah Grogot hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Tanah Grogot sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal:
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

24. Peraturan Bupati Paser Nomor … Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Kantor Kecamatan Tanah Grogot, proses penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Tanah Grogot, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Kantor Kecamatan Tanah Grogot, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tanah Grogot

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel Hasil Evaluasi sesuai Format E. 81

Evaluasi Terhadap Hasil Renstra dan Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota

Kantor Camat Tanah Grogot Kabupaten Paser

Periode Pelaksanaan: Triwulan II (April sd Juni 2024)

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RKPD :

1	Jumlah temuan penyimpangan BMD dan Keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal	0
2	Nilai SAKIP dari Inspektorat	B
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81
4	Angka Kriminalitas	51
5	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakataniban	100

NO	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Faktor Penyebab tidak Tercapainya Realisasi Kinerja	Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab	Sub Unit Penanggung Jawab
						kecamatan		kelurahan	Jumlah	I		II						
										Jumlah		Jumlah						
1	2	3	4	5		7				8		9		12 =8+9+10+11				15
				K	RP	K	RP	RP	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan, Desa dan Kelurahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80	6.474.155.296	74	7.082.428.541	479.856.163	7.562.284.704	17,00	1.200.948.196	20	3.312.038.412	37	4.512.986.608			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100	34.295.872	100	72.731.800		72.731.800	30,00	5.300.000	20	12.904.800	50	16.304.800			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	19.481.800	4	54.731.800		54.731.800	1,00	3.400.000	1	11.004.800	2	14.404.800			Kantor Kec. Tanah Grogot

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	**4**	14.814.800	4	18.000.000		**18.000.000**	2,00		**1**	**1.900.000**	**3**	**1.900.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Keuangan yang tepat waktu	**100**	**5.867.762**	**100**	**5.915.902.773**	**95.126.208**	**6.011.028.981**	25,00	**963.340.285**	**25**	**2.855.689.965**	**50**	**3.828.530.250**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	5.504.898.963	37	5.650.996.245		**5.650.996.245**	37,00	**892.820.485**	37	**2.670.631.285**	**37**	**3.563.451.770**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	12	343.009.605	12	245.816.728	95.126.208	**340.942.936**	3,00	**72.880.100**	3	**177.918.980**	**6**	**250.799.080**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	19.853.600	1	19.089.800		**19.089.800**	1,00	**7.139.700**	0	**7.139.700**	**1**	**14.279.400**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik	**100**	**212.178.216**	**100**	**417.890.876**	**107.161.891**	**525.052.767**	25	**148.127.220**	25	**260.039.971**	**50**	**408.167.191**			

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**3**	**5.643.238**	**3**	3.550.200	10.196.800	**13.747.000**	**1,00**	**4.935.090**	1	**11.841.200**	**2**	**16.776.290**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	**1**	**-**	**1**			**-**	**-**	**-**		**-**	**0**	**-**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	59.511.639	12	47.200.800	39.331.296	**86.532.096**	3,00	**29.020.185**	3	**46.325.956**	**6**	**75.346.141**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	21.442.366	3	35.143.000	12.636.795	**47.779.795**	1,00	**14.098.260**	1	**22.804.145**	**2**	**36.902.405**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**12**	80.277.600	12	331.996.876	44.997.000	**376.993.876**	3,00	**100.073.685**	3	**179.068.670**	**6**	**279.142.355**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang pada PD dalam kondisi baik	**100**	**7.826.943**	**100**	**257.099.610**	**151.574.800**	**408.674.410**	**25,00**	**-**	**25**	**-**	**50**	**-**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**2**	**7.826.943**	**2**	**257.099.610**	**151.574.800**	**408.674.410**	**1,00**	**-**		**-**	**1**	**-**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	**100**	**160.522.613**	**100**	**122.551.440**	**72.413.264**	**194.964.704**	25,00	**43.749.891**	**25**	**100.662.876**	**50**	**144.412.767**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**4**	**2.500.000**	4	2.500.000		**2.500.000**	**1,00**	**615.700**	1	**1.244.500**	**2**	**1.860.200**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**4**	**145.265.962**	4	55.651.440	72.413.264	**128.064.704**	1,00	**33.934.191**	1	**62.618.376**	**2**	**96.552.567**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**1**	**12.756.651**	1	64.400.000		**64.400.000**	1,00	**9.200.000**	1	**36.800.000**	**2**	**46.000.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan inventarisasi pada PD dalam kondisi baik	**100**	**140.674.394**	**100**	**296.252.042**	**53.580.000**	**349.832.042**	25,00	**30.930.800**	**25**	**82.740.800**	**50**	**113.671.600**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**4**	**-**	**4**	**9.550.000**		**9.550.000**		**-**		**-**	**0**	**-**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**4**	**8.965.320**	**4**	33.790.400	18.580.000	**52.370.400**	**1,00**	**13.655.500**	1	**20.425.500**	**2**	**34.081.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**2**	**130.440.274**	**2**	125.292.870		**125.292.870**	**1,00**	**17.275.300**	1	**59.875.300**	**2**	**77.150.600**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	**1.268.800**	2	127.618.772		**127.618.772**	**-**	**-**	1	**2.440.000**	**1**	**2.440.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	2	**16.673.800**	2		**35.000.000**	**35.000.000**		**-**		**-**	**0**	**-**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100	**206.256.368**	100	**432.637.502**	**30.000.000**	**462.637.502**	25,00	**24.813.200**	**25**	**197.528.200**	**50**	**222.341.400**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	**100**	**206.256.368**	**100**	**432.637.502**	**30.000.000**	**462.637.502**	15,00	**24.813.200**	**15**	**197.528.200**	**30**	**222.341.400**			
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4	9.578.379	4	16.419.860		**16.419.860**	1,00	**-**	1	**3.060.000**	**2**	**3.060.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	9.578.379	1	37.102.066	30.000.000	**67.102.066**	1,00	**-**		**5.400.000**	**1**	**5.400.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**4**	20.333.074	4	333.007.370		**333.007.370**	**1,00**	**18.800.000**	1	**133.303.000**	**2**	**152.103.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4	148.384.465	4	46.108.206		**46.108.206**		**6.013.200**	1	**55.765.200**	**1**	**61.778.400**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
2	**Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80	**408.557.416**	82	**734.435.947**	**964.381.690**	**1.698.817.637**	16,00	**93.175.400**	**16**	**445.709.400**	**32**	**538.884.800**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**100**	**288.640.493**	**100**	**332.298.220**	**964.381.690**	**1.296.679.910**	25,00	**58.967.400**	**25**	**353.829.400**	**50**	**412.796.800**			
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	**4**	104.695.268	4		964.381.690	**964.381.690**	1,00	**14.400.000**	1	**217.120.000**	**2**	**181.276.800**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	183.945.225	4	332.298.220		**332.298.220**	**1,00**	**44.567.400**	1	**136.709.400**	**2**	**181.276.800**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**100**	**119.916.923**	**100**	**402.137.727**		**402.137.727**	**25,00**	**34.208.000**	**25**	**91.880.000**	**50**	**126.088.000**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	**4**	**119.916.923**	**4**	**402.137.727**		**402.137.727**	**1,00**	**34.208.000**	**1**	**91.880.000**	**2**	**126.088.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
3	**Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan di wilayah kecamatan	70	**280.466.626**	60	**400.780.000**		**400.780.000**	**15,00**	**37.000.000**	**15**	**188.230.000**	**30**	**225.230.000**			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**100**	**33.221.316**	**100**	**55.860.000**		**55.860.000**	**25,00**	**-**	**25**	**20.996.000**	**50**	**20.996.000**			

		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	16.702.400	4	44.660.000		**44.660.000**	**1,00**	**-**	1	**20.996.000**	**2**	**20.996.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	16.518.916	1	11.200.000		**11.200.000**	**-**	**-**		**-**	**0**	**-**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan perda dan penegakan peraturan kepala daerah	**100**	**247.245.310**	**100**	**344.920.000**		**344.920.000**	**20,00**	**37.000.000**	**25**	**167.234.000**	**45**	**204.234.000**			
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia	4	247.245.310	4	344.920.000		**344.920.000**	**1,00**	**37.000.000**	**1**	**167.234.000**	**2**	**204.234.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100	**51.288.433**	100	**215.212.900**		**215.212.900**	**25,00**	**-**	**25**	**17.928.000**	**50**	**17.928.000**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	**3**	**51.288.433**	**3**	**215.212.900**		**215.212.900**	**3,00**	**-**		**17.928.000**	**3**	**17.928.000**			
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**400**	**27.197.576**	**400**	**100.000.000**		**100.000.000**	**-**	**-**		**-**	**0**	**-**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	**119**	**24.090.857**	**119**	**88.332.900**		**88.332.900**		**-**		**5.850.000**	**0**	**5.850.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	**1**	**-**	**1**	**26.880.000**		**26.880.000**		**-**	1	**12.078.000**	**1**	**12.078.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
4	**Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Pertumbuhan usaha/ kelompok usaha baru	40	**1.573.325.781**	30	**245.686.500**	**1.755.898.048**	**2.001.584.548**	5,00	**230.550.000**	**10**	**658.023.812**	**15**	**888.573.812**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	**100**	**261.402.954**	**100**	**245.686.500**	**80.090.000**	**325.776.500**	25,00	**41.550.000**	**25**	**148.273.812**	**50**	**189.823.812**			

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**15**	**34.543.530**	15	19.827.000	80.090.000	**99.917.000**	16,00	**20.570.000**	16	**63.696.100**	**32**	**84.266.100**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**4**	**226.856.424**	4	225.859.500		**225.859.500**	**1,00**	**20.980.000**	1	**84.577.712**	**2**	**105.557.712**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	**100**	**1.311.949.827**	**100**		**1.675.808.048**	**1.675.808.048**	25,00	**189.000.000**	**25**	**509.750.000**	**50**				
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	**15**	**113.533.930**	15			**-**	**5,00**	**-**		**-**	**5**	**-**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan Prasarna Kelurahan yang Terbangun	**2**	**180.803.336**	2		336.428.317	**336.428.317**		**-**		**-**	**0**	**-**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	**20**	**993.504.805**	20		1.232.230.931	**1.232.230.931**	20,00	**175.200.000**	20	**461.450.000**	**40**	**636.650.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	**1**	**24.107.756**	1		107.148.800	**107.148.800**		**13.800.000**		**48.300.000**	**0**	**72.660.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persentase Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dan pembangunan	**100**	**236.937.180**	100			**-**	25,00	**-**	25	**-**	**50**	**-**			

		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	**1000**	**16.950.000**	**1000**			**-**		**-**	1.000	**-**	**1000**	**-**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	**1000**	**219.987.180**	**1000**			**-**		**-**	1.000	**-**	**1000**	**-**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
					8.994.049.920		9.111.181.390	3.230.135.901	**12.341.317.291**		**1.586.486.796**		**4.819.457.824**		**6.405.994.620**			

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 39,02%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.819.457.824 (empat milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 12.351.317.291 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) atau sebesar 39,02 %.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot sebesar 39,02%.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 38 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 0 indikator capaian kinerja 0%-50% = 0 indikator untuk tahun 2023.

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tanah Grogot

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, maka Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

a. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan otonomi daerah;
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
g. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan; dan
i. Penyusunan program, pembinaan adminsitrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Kantor Kecamatan Tanah Grogot adalah:

1. Surat Keterangan Ahli Waris Khusus Akta Kematian;
2. Surat Keterangan Ahli Waris Untuk Peralian Hak;
3. Pengantar Surat Pindah;
4. Registrasi Surat Keterangan Domisili dan Rekomendasi;
5. Dispensasi Nikah;
6. Surat Pengantar Kartu Keluarga;
7. Permohonan Surat Izin Keramaian;
8. Registrasi Pertanahan (SPMHAT);
9. Registrasi SKTM Berobat / Bantuan Pendidikan;

10. Registrasi Keterangan Tidak Mampu Untuk Bantuan Rehab Rumah dan Bantuan Rumah;
11. Rekomendasi Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara WNA.

Upaya Kantor Kecamatan Tanah Grogot dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
3. Angka Kriminalitas
4. Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kantor Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Kantor Kecamatan Tanah Grogot terdapat dalam Tabel 2….. di bawah ini

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Tanah Grogot sampai dengan Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi		Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	
Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas		70	72	75	80	85			
Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B (61)	B (65)	BB (70)	BB (75)	A (81)	B (64,50)	B (65,78)	101,2
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80	80	82	83	84	87,42	87,42	109
	Angka Kriminalitas	52	51	50	49	48	17,41	16	31,37
	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 2.1 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan

Tanah Grogot sampai dengan Tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintah an yang responsif dan tangkas” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”, telah mencapai target.
b. Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, memiliki 1 indikator kinerja yaitu Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar B (65,78)dari target sebesar B (65) dengan capaian kinerja sebesar BB 101,2 %.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan telah mencapai dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Pelaksanaan program maupun kegiatan dilakukan tepat waktu
2. Adanya motivasi dari pimpinan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja pemerintah;
2. Adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang akuntabilitas kinerja yang kurang selaras;
3. Kurangnya penyediaan Sarana dan Prasarana untuk mendukung kinerja pegawai;
4. Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja.
5. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar dari setiap seksi- seksi.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tanah Grogot sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Kecamatan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target		
			Renstra	Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				
Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan				
Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Nilai SAKIP dari Inspektorat	Nilai hasil evaluasi SAKIP atas Implementasi Sistem Akuntabilitas	BB	BB (70)	BB (75)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil penghitungan survey indeks kepuasan masyarakat setiap tahun	82	82	84
Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	jumlah kriminalitas setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000	50	50	48
Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	Perentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan dibagi jumlah desa/kelurahan	100	100	100

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu ““PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER”” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
11. Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Tanah Grogot mendukung pencapaian sasaran ke- 4 yaitu “ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Kantor Kecamatan Tanah Grogot telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3 TC. 31

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kantor Kecamatan Tanah Grogot

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kantor Kecamatan Tanah Grogot										
	Urusan Kecamatan										
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	81	5.656.378.607	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	81	9.828.177.077	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100	32.976.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100	72.731.800	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	18.731.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	54.731.800	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4 Dokumen	14.245.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4 Dokumen	18.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase dokumen Keuangan yang tepat waktu**	**100**	**5.146.315.578**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen Keuangan yang tepat waktu**	**100**	**6.075.642.773**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	4.798.303.650	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	5.650.996.245	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	12 Dokumen	328.921.928	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	12 Dokumen	405.556.728	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	19.090.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	19.089.800	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase kegiatan pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik**	**100 %**	**199.519.064**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase kegiatan pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik**	**100 %**	**589.170.876**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.426.190	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.550.200	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	NA	0	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	NA	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	69.687.778	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	47.200.800,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	19.984.660	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	35.143.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	104.420.436	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	503.276.876	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Barang pada PD dalam kondisi baik**	**100%**	**9.133.583**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Barang pada PD dalam kondisi baik**	**100%**	**1.132.295.253**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	9.133.583	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.132.295.253	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor**	100%	122.878.980	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	100%	192.551.440	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	12 Laporan	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.378.980	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	125.651.440	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	64.400.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		**Persentase Pemeliharaan**	**100 %**	**427.921.042**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**		**Persentase Pemeliharaan**	**100 %**	**427.921.042**	

	Urusan Pemerintah Daerah		**inventarisasi pada PD dalam kondisi baik**			**Urusan Pemerintah Daerah**		**inventarisasi pada PD dalam kondisi baik**			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9.550.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9.550.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	43.169.400	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	43.169.400	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	125.292.870	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	125.292.870	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	249.908.772	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	249.908.772	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	0	**0**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	**0**	**0**	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu**		**199.814.250**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**		**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu**		**542.894.102**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Jumlah Desa yang terfasilitasi**	**15 Desa**	**199.814.250**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Jumlah Desa yang terfasilitasi**	**15 Desa**	**542.894.102**	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	6.866.600	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	16.419.860	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	32.667.650	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	67.969.066	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	138.520.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		333.007.370	

	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	21.760.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		125.497.806	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**84 Indeks**	**351.953.280**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**		**1.126.868.847**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100 %**	**261.944.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**5.670 dok**	**332.298.220**	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	200 Laporan	82.809.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	417 dok	82.809.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	179.135.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		332.298.220	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100 %**	**90.009.280**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**794.570.627**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	90.009.280	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		794.570.627	
2.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan di wilayah kecamatan**	**100 %**	**260.480.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan di wilayah kecamatan**		**747.058.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		**Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**12.660.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**5 kasus**	**121.458.000**	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12.660.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 kali	94.300.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	11.200.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		27.158.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Persentase penerapan perda dan penegakan peraturan kepala daerah**	**100 %**	**236.620.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Persentase penerapan perda dan penegakan peraturan kepala daerah**		**625.600.000**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	236.620.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia		625.600.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan**	**100 %**	**53.415.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan**		**209.646.100**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan**	**3 Kegiatan**	**53.415.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan**	**24 kali**	**209.646.100**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	330 Orang	22.610.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika		60.305.200	

	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	180 Orang	16.740.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		119.832.900	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	14.065.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		29.508.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Tingkat Pertumbuhan usaha/ kelompok usaha baru**	**100 %**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Tingkat Pertumbuhan usaha/ kelompok usaha baru**		**1.147.105.702**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	**100 %**	**194.440.700**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	**1 keg**	**1.147.105.702**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Lembaga Kemasyarakatan	19.840.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		350.161.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	174.600.700	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		796.944.702	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	**100 %**	**949.930.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**		**949.930.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	15 Lembaga Kemasyarakatan	62.370.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di		62.370.000	

			Kelurahan					Kelurahan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah sarana dan Prasarna Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah sarana dan Prasarna Kelurahan yang Terbangun		0	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80 Pokmas/ Ormas	876.600.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		876.600.000	
	Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	10.960.000	Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		10.960.000	
	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN		**Persentase Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dan pembangunan**	**20 Pokmas / Ormas -**	**993.504.805**	**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN**		**Persentase Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dan pembangunan**	**20 Pokmas/ Ormas**	**993.504.805**	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			

Catatan :

- **Kolom 6 diisi dengan APBD terakhir**

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Kecamatan Tanah Grogot pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 TC. 33
Penetapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2024

PENETAPAN RENJA AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. PASER TAHUN 2024

N+A2:T104O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KANTOR CAMAT TANAH GROGOT							11.228.624.696,00	9.111.181.390,00	9.161.181.390,00	-2.067.443.306,00							9.128.087.671,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.228.624.696,00	9.111.181.390,00	9.161.181.390,00	-2.067.443.306,00							9.128.087.671,00	
	7.01	KECAMATAN							11.228.624.696,00	9.111.181.390,00	9.161.181.390,00	-2.067.443.306,00							9.128.087.671,00	

1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**				**74 %**	**74 %**	**6.682.342.446,00**	**7.082.428.541,00**	**7.092.428.541,00**	**170.117.093,00**							**6.852.459.539,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu*				100 %	100 %	72.731.800,00	72.731.800,00	72.731.800,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kantor Kecamatan Tanah Grogot		80.004.980,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	4 Dokumen	54.731.800,00	54.731.800,00	54.731.800,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan			60.204.980,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

															Tangkas				
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	4 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			19.800.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase dokumen Keuangan yang tepat waktu*				100 %	100 %	5.160.163.506 ,00	5.915.902.773 ,00	5.925.902.773 ,00	765.739.267,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kantor Kecamatan Tanah Grogot		5.569.531.195 ,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.798.303.650 ,00	5.650.996.245 ,00	5.650.996.245 ,00	852.692.595,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			5.278.134.015 ,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	245.816.728,00	245.816.728,00	255.816.728,00	10.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			270.398.400,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	1 Laporan	19.089.800,00	19.089.800,00	19.089.800,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			20.998.780,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase kegiatan pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik*				100 %	100 %	519.144.048,00	417.890.876,00	417.890.876,00	-101.253.172,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kantor Kecamatan Tanah Grogot		459.679.963,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	3 Paket	3.550.200,00	3.550.200,00	3.550.200,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			3.905.220,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	47.200.800,00	47.200.800,00	47.200.800,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			51.920.880,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3 Paket	35.143.000,00	35.143.000,00	0,00	-35.143.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			0,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7	**NON URUSAN**							**11.228.624.696,00**	**9.111.181.390,00**	**9.161.181.390,00**	**-2.067.443.306,00**							**9.128.087.671,00**	

	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**11.228.624.696,00**	**9.111.181.390,00**	**9.161.181.390,00**	**-2.067.443.306,00**							**9.128.087.671,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**11.228.624.696,00**	**9.111.181.390,00**	**9.161.181.390,00**	**-2.067.443.306,00**							**9.128.087.671,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**11.228.624.696,00**	**9.111.181.390,00**	**9.161.181.390,00**	**-2.067.443.306,00**							**9.128.087.671,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350 Laporan	12 Laporan	331.996.876,00	331.996.876,00	331.996.876,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			365.196.563,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang pada PD dalam kondisi baik*				100 %	100 %	394.259.610,00	257.099.610,00	257.099.610,00	-137.160.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kantor Kecamatan Tanah Grogot		282.809.571,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	257.099.610,00	257.099.610,00	257.099.610,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			282.809.571,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor*				100 %	100 %	189.591.440,00	122.551.440,00	122.551.440,00	-67.040.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kantor Kecamatan Tanah Grogot		134.556.584,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			2.500.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4 Laporan	55.651.440,00	55.651.440,00	55.651.440,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			61.216.584,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	64.400.000,00	64.400.000,00	64.400.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			70.840.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan inventarisasi pada PD dalam kondisi baik*				100 %	100 %	346.452.042,00	296.252.042,00	296.252.042,00	-50.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kantor Kecamatan Tanah Grogot		325.877.246,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	9.550.000,00	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			10.505.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	4 Unit	33.790.400,00	33.790.400,00	33.790.400,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			37.169.440,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	125.292.870,00	125.292.870,00	125.292.870,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			137.822.157,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	127.618.772,00	127.618.772,00	127.618.772,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			140.380.649,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
1,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**				**74 %**	**74 %**	**1.701.773.127,00**	**734.435.947,00**	**734.435.947,00**	**-893.893.586,00**							**807.879.541,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	1.299.635.400,00	332.298.220,00	332.298.220,00	-967.337.180,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		365.528.042,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	332.298.220,00	332.298.220,00	332.298.220,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			365.528.042,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				100 %	100 %	402.137.727,00	402.137.727,00	402.137.727,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		442.351.499,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	4 Laporan	402.137.727,00	402.137.727,00	402.137.727,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			442.351.499,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Pertumbuhan Usaha/ Kelompok Usaha Baru**				**30 %**	**30 %**	**1.765.878.721,00**	**245.686.500,00**	**245.686.500,00**	**-1.495.623.571,00**							**270.255.150,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana*				100 %	100 %	245.686.500,00	245.686.500,00	245.686.500,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		270.255.150,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	19.827.000,00	19.827.000,00	19.827.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			21.809.700,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	225.859.500,00	225.859.500,00	225.859.500,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			248.445.450,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Kasus Gangguan Keamanan dan Ketertiban**				**60 %**	**60 %**	**400.780.000,00**	**400.780.000,00**	**400.780.000,00**	**40.078.000,00**							**440.858.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	55.860.000,00	55.860.000,00	55.860.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		61.446.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	4 Laporan	44.660.000,00	44.660.000,00	44.660.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			49.126.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			12.320.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	344.920.000,00	344.920.000,00	344.920.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		379.412.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	

			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	4 Laporan	344.920.000,00	344.920.000,00	344.920.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			379.412.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kasus Konflik Sosial yang Tertangani/ Terselesaikan di Wilayah Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**215.212.900,00**	**215.212.900,00**	**215.518.100,00**	**65.521.290,00**							**280.734.190,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan*				-	3 Kegiatan	215.212.900,00	215.212.900,00	215.518.100,00	305.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		280.734.190,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				12 Orang	400 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	60.305.200,00	-39.694.800,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			110.000.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	119 Orang	88.332.900,00	88.332.900,00	128.332.900,00	40.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			141.166.190,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																	

			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				4 Dokumen	1 Dokumen	26.880.000,00	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			29.568.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang menyampaikan LKP Desa tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**462.637.502,00**	**432.637.502,00**	**472.332.302,00**	**13.263.749,00**							**475.901.251,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana dengan baik*				15 Desa	100 %	462.637.502,00	432.637.502,00	472.332.302,00	9.694.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat Desa		475.901.251,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				16 Dokumen	4 Dokumen	16.419.860,00	16.419.860,00	16.419.860,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			18.061.846,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				16 Dokumen	1 Dokumen	37.102.066,00	37.102.066,00	37.102.066,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			40.812.272,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				16 Dokumen	4 Dokumen	333.007.370,00	333.007.370,00	333.007.370,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			366.308.107,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	4 Dokumen	46.108.206,00	46.108.206,00	85.803.006,00	39.694.800,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			50.719.026,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
		KELURAHAN TANAH GROGOT							**0,00**	**3.170.135.901,00**	**6.035.135.901,00**	**6.035.135.901,00**							**6.244.008.577,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.170.135.901,00**	**6.035.135.901,00**	**6.035.135.901,00**							**6.244.008.577,00**	

	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.170.135.901,00**	**6.035.135.901,00**	**6.035.135.901,00**						**6.244.008.577,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**479.856.163,00**	**479.856.163,00**	**483.232.451,00**						**483.232.451,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	95.126.208,00	95.126.208,00	95.126.208,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		106.648.660,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	95.126.208,00	95.126.208,00	95.126.208,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah			106.648.660,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

															an yang Responsive dan Tangkas				
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	107.161.891,00	107.161.891,00	107.161.891,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		108.623.791,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	10.196.800,00	10.196.800,00	10.196.800,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			4.513.586,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	0,00	39.331.296,00	39.331.296,00	39.331.296,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			40.687.505,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	12.636.795,00	12.636.795,00	12.636.795,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			13.922.700,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	44.997.000,00	44.997.000,00	44.997.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			49.500.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	151.574.800,00	151.574.800,00	151.574.800,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		150.876.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	151.574.800,00	151.574.800,00	151.574.800,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			150.876.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	72.413.264,00	72.413.264,00	72.413.264,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		73.744.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	72.413.264,00	72.413.264,00	72.413.264,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			73.744.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	53.580.000,00	53.580.000,00	53.580.000,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		43.340.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	0,00	18.580.000,00	18.580.000,00	18.580.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			16.720.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			26.620.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**964.381.690,00**	**987.218.790,00**	**1.095.778.189,00**							**1.095.778.189,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	0,00	964.381.690,00	987.218.790,00	987.218.790,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan	-		1.095.778.189,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

																Tangkas				
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				200 Laporan	200 Laporan	0,00	964.381.690,00	987.218.790,00	987.218.790,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			1.095.778.189,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.695.898.048,00**	**4.538.060.948,00**	**4.648.510.037,00**							**4.648.510.037,00**	

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	1.695.898.048,00	4.538.060.948,00	4.538.060.948,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		4.648.510.037,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	80.090.000,00	80.090.000,00	80.090.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			92.004.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	276.428.317,00	336.428.317,00	336.428.317,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			163.043.743,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				62 Pokmas / Ormas	62 Pokmas / Ormas	0,00	1.232.230.931,00	4.014.393.831,00	4.014.393.831,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			4.381.443.694,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	

	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	107.148.800,00	107.148.800,00	107.148.800,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			12.018.600,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																	
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**16.487.900,00**							**16.487.900,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang	-		16.487.900,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

															Responsive dan Tangkas				
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				16 Dokumen	16 Dokumen	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			16.487.900,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
	J U M L A H								**11.228.624.696,00**	**12.281.317.291,00**	**15.196.317.291,00**	**2.288.017.373.093,00**						**15.372.096.248,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kantor Kecamatan Tanah Grogot mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2 Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tanah Grogot, Agustus 2024
Camat Tanah Grogot



ABDUL RASYID, S.STP, MA
Pembina TK. I
NIP. 19790716 200003 1 001

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

KANTOR KECAMATAN PASER BELENGKONG
KABUPATEN PASER
TAHUN 2024

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan

kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Kantor Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kantor Kecamatan Paser Belengkong, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Paser Belengkong sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Kantor Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tentang Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Kantor Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Kantor Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Paser Belengkong
2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Kantor Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu				Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran RENJA yang dievaluasi (Tahun 2024) (%)	
							Tahun 2022		Tahun 2023				I		II		III		IV					
1	2	3	4	5	6		7				8		9		10		11		12		13		14=13/8 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7	UNSUR KEWILAYAHAN							-		6.343.005.296		0								0		
		7.01	KECAMATAN					5.803.687.464		6.711.139.020		6.343.005.296		1.036.319.104		1.845.764.528						2.882.083.632		45
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	80	4.838.627.097	73	4.322.272.796	78	4.952.651.000	74	5.075.848.996	-	847.569.104	-	1.614.305.778	-	-	-	-	-	2.461.874.882	-	49
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu (Persen)	100	15.816.373	100	13.456.000	75	10.275.000	100	30.210.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	5	7.458.673	4	5.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA)	4	8.357.700	4	8.356.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	29.834.692			2	5.220.000	2	24.760.000	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0	50	-
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	33.430.800			2	5.055.000	2	5.450.000	-	-	1	-	-	-	-	-	1	0	50	-

		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen Keuangan yang tepat waktu (Persen)	100	4.544.098.082	100	3.767.601.548	100	4.059.830.414	100	4.329.326.110	25	765.781.696	25	1.385.428.779	-	-	-	-	50	2.151.210.475	50	50
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	4.141.834.066	14	3.554.751.548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen keuangan (SPM, SPP)	100	180.304.016	130	177.590.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan	15	33.720.000	15	35.260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	104	16.203.684.963			26	3.818.228.948	26	4.036.825.920	26	714.084.074	-	1.307.482.780	-	-	-	-	26	2.021.566.854	100	50
		7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	400	721.216.064			130	205.666.466	130	256.220.190	21	44.797.622	44	68.745.999	-	-	-	-	65	113.543.621	50	44
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	60	134.880.000			15	35.935.000	15	36.280.000	-	6.900.000	-	9.200.000	-	-	-	-	-	16.100.000	-	44
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Data Pegawai Yang Diperbarui Datanya (Persen)	100	60.180.000	100	69.700.000	100	93.375.000	100	105.860.000	25	21.180.000	25	28.240.000	-	-	-	-	50	49.420.000	50	47
		7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang diperbarui datanya	12	60.180.000	12	69.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	48	240.720.000			12	93.375.000	12	105.860.000	3	21.180.000	3	28.240.000	-	-	-	-	6	49.420.000	50	47
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik (Persen)	100	109.861.680	100	123.391.042	100	139.075.184	100	277.799.793	25	22.198.999	25	70.328.999	-	-	-	-	50	92.527.998	50	33

7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen yang disediakan	30	2.000.000	2	1.329.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan			11	7.379.000																
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	15	26.778.500	11	46.615.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	10	5.767.800	7	5.767.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	140	40.000.000	60	62.298.852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	6.026.000			1	1.314.000	1	2.222.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	16	111.516.400			1	38.282.100	4	27.780.293	-	-	4	26.616.000	-	-	-	-	4	26.616.000	**100**	**96**
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	23.071.200			1	5.756.050	3	5.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	500	226.329.885			110	93.723.034	60	242.757.500	15	22.198.999	15	43.712.999	-	-	-	-	30	65.911.998	**50**	**27**
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang pada PD dalam kondisi baik (Persen)	100	22.000.000	100	137.272.000	100	473.205.749	100	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	14	22.000.000	3	40.355.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19	97.445.785	1	98.917.000																
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	50	81.969.400			16	473.205.749	2	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor (Persen)	100	193.955.778	100	158.159.648	100	170.223.053	100	184.844.648	25	38.408.409	25	35.462.000	-	-	-	-	50	73.870.409	50	40
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	100	6.640.000	100	6.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jaringan Listrik dan Air yang Dibayarkan	12	109.955.778	12	54.919.648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	12	82.800.000	12	96.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	26.560.000			1	991.800	1	1.140.000	-	0	1	1.100.000	-	-	-	-	1	1.100.000	100	96
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	96	439.823.112			2	72.631.253	2	87.104.648	-	17.708.409	-	6.762.000	-	-	-	-	-	24.470.409	-	28
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	4	331.200.000			1	96.600.000	1	96.600.000	-	20.700.000	-	27.600.000	-	-	-	-	-	48.300.000	-	50
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	100	77.590.184	100	52.692.558	100	6.666.600	100	141.808.445	-	-	50	94.846.000	-	-	-	-	50	94.846.000	50	67
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5	21.735.850	5	49.152.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	24	2.000.000	2	1.527.550	2	1.460.000	3	2.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1	178.974.800			-	-	1	97.866.665	-	-	-	82.846.000	-	-	-	-	-	82.846.000	-	85
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	2.013.000	3	2.013.000	2	1.220.000	20	12.200.000	-	-	20	12.000.000	-	-	-	-	20	12.000.000	100	98

		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	71.943.400			5	3.986.600	5	29.551.780	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	20	-
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		:	Koordinasi yang intens antar sub bagian dan seksi di dalam OPD dalam pelaksanaan kegiatan																				
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		:	Aturan baru tentang pengadaan melalui e-Katalog mempengaruhi kelancaran kegiatan pengadaan barang dan jasa																				
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya		:	Melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam pengadaan melalui e-Katalog																				
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya		:																					
2	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (%)**	**80**	**379.530.639**		**388.942.550**	**86**	**948.451.200**	**74**	**555.734.000**	-	**103.500.000**	-	**133.200.000**	-	-	-	-	-	**236.700.000**	-	**43**
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Persen)	100	188.679.696		206.435.000	100	308.185.000	100	321.525.000	25	62.700.000	25	78.800.000	-	-	-	-	50	141.500.000	50	44
		7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan yang diberikan (SPMHT, Rekom IMB, Rekom Ijin Usaha, Surat Pengantar KK, Surat Pindah, Surat Ahli Waris, SKTM, Surat Keterangan Belum Menikah, Surat Keterangan Domisili)	665	198.633.385	673	200.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	60	6.285.989	60	5.535.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	748.177.354			1	293.760.000	1	304.875.000	-	62.700.000	-	78.800.000	-	-	-	-	-	141.500.000	-	46
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	23.676.959			1	14.425.000	1	16.650.000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-

		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum (Persen)	100	174.852.064		167.207.550	100	194.375.200	100	194.384.000	25	40.800.000	25	54.400.000	-	-	-	-	50	95.200.000	50	49
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Sarana dan prasarana publik yang terpelihara	1	174.852.064	1	167.207.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	4	684.056.317			1	194.375.200	1	194.384.000	-	40.800.000	-	54.400.000	-	-	-	-	-	95.200.000	-	49
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (Persen)	100	15.998.879		15.300.000	100	445.891.000	100	39.825.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Bansos yang dilayani	3	15.300.000	3	15.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	8	62.590.822			1	445.891.000	1	39.825.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:	Peremajaan beberapa peralatan sarana pelayanan publik mempengaruhi kelancaran dalam memberikan pelayanan																				
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	:																					
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya	:																					
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya	:																					
3	**Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif**	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan kasus gangguan**	**75**	**287.417.772**		**316.262.500**	**57**	**368.879.500**	**60**	**399.275.000**	-	**69.000.000**	-	**92.000.000**	-	-	-	-	-	**161.000.000**	-	**40**
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Persen)	100	14.872.161		14.222.500	100	48.889.500	100	65.000.000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan (FKDM)	15	14.872.161	15	14.222.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	58.182.874			1	48.889.500	1	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan perda dan penegakan peraturan kepala daerah (Persen)	100	272.545.612		302.040.000	100	319.990.000	100	334.275.000	25	69.000.000	-	92.000.000	-	-	-	-	25	161.000.000	25	48
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi bidang penegakkan peraturan yang dilaksanakan	12	272.545.612	12	302.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	4	1.066.253.096			1	319.990.000	1	334.275.000	-	69.000.000	-	92.000.000	-	-	-	-	-	161.000.000	-	48
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		:	Personil tenaga keamanan yang selalu siaga dalam menerima laporan gangguan kemanan																			
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		:	Armada transportasi yang masih terbatas untuk sarana mobilitas personil																			
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya		:																				
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya		:																				
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah**	**100**	**41.032.011**		**104.625.800**	**100**	**65.652.000**	**100**	**49.780.000**	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan (Persen)	100	41.032.011		104.625.800	100	65.652.000	100	49.780.000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Jumlah HUT RI Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	1	16.087.953	1	20.676.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Safari Ramadhan	1	20.010.738	1	83.949.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe	684	60.597.277			300	47.557.000	300	30.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	800	75.372.936			100	18.095.000	100	19.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:																							
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	:	Anggaran masih terbatas untuk mengakomodir seluruh elemen masyarakat																						
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya	:																							
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya	:																							

		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang menyampaikan LKP**	**100**	**89.615.682**		**101.726.000**	**100**	**80.595.200**	**100**	**100.910.000**	**25**	**0**	**25**	-	-	-	-	-	**50**	-	**50**	-
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana dengan baik (Persen)	100	89.615.682		101.726.000	100	80.595.200	100	100.910.000	25	0	25	-	-	-	-	-	50	-	50	-
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Kepala Desa yang difasilitasi	9	28.392.000	15	27.537.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa yang mengikuti lomba	3	13.628.160	15	13.126.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah rekomendasi pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan	27	11.356.800	45	16.953.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	3	2.271.360	3	39.720.000		-		-		0								0		
		7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Tapal Batas	2	1.135.680	3	4.390.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	60	106.942.000			15	31.008.400	15	19.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	60	51.332.160			15	14.929.800	15	19.005.000	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-	100	-
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	60	42.776.800			15	22.767.000	15	27.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10	90.395.207					1	25.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan	8	12.833.040			2	11.890.000	2	10.225.000	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	50	-
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:	Telah diaturnya secara matang jadwal monitoring untuk mengakomodir pendampingan terkait administrasi seluruh desa di Kec.Paser Belengkong																					
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	:	Jarak tempuh dan medan yang beragam untuk masing-masing desa tidak disertai dengan sarana transportasi yang cukup																					
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya	:																						
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya	:																						
4	**Meningkatnya Peran lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan**	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan**					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru (%)**	**90**	**133.317.196**	**55**	**569.857.818**	**60**	**294.910.120**	**60**	**161.457.300**	-	**16.250.000**	-	**6.258.750**	-	-	-	-	-	**22.508.750**	-	**14**
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (Persen)	100	133.317.196	100	569.857.818	100	294.910.120	100	161.457.300	25	16.250.000	25	6.258.750	-	-	-	-	50	22.508.750	50	14
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan musrenbang desa yang dilaksanakan	15	29.322.809	15	21.152.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (LPTQ, PKK, TTG, Posyantek)	3	90.854.400	2	548.705.318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	120	110.448.008			15	21.499.600	15	22.762.500	15	16.250.000	-	6.258.750	-	-	-	-	15	22.508.750	100	99
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	342.214.400			1	273.410.520	1	138.694.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menjadi suatu moment yang dinanti-nanti oleh perangkat desa dalam upaya memajukan Desa																				
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	:																					
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya	:																					
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya	:																					

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 40%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.882.083.632 dari total pagu Renja sebesar Rp. 6.343.005.296 (lima miliyar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sebesar 45,44%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Kantor Camat Paser Belengkong sebesar 28% dengan predikat kinerja SR (Sangat Rendah)
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = Tidak ada, capaian kinerja >70%-100% = 6 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 0 indikator, capaian kinerja 0%-50% = 27 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Paser Belengkong

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Camat Paser Belengkong melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Tugas :

1. Camat mempunyai tugas yang meliputi :
   a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
   b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
   c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
   d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
   e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
   f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
   g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan
   h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu oleh perangkat kecamatan

Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Upaya Kantor Camat Paser Belengkong dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Jumlah temuan penyimpanan pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK dan APIP eksternal
2. Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
3. Nilai indeks kepuasan masyarakat
4. Angka kriminalitas
5. Presentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kantor Camat Paser Belengkong Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Kantor Camat Paser Belengkong terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kantor Camat Paser Belengkong
sampai dengan Triwulan II
Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					Realisasi	Capaian Kinerja
			2022	2023	2024	2025	2026		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70	73	75	80	85		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	CC (60)	B (61)	B (63)	B (64)	BB (71)	64,76	102,79
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84	84	85	95	95	86,29	101,51
	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	3	3	3	3	3		
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa		Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan	6	6	13	20	26	6	46,15
	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif	50	55	60	65	70		

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kantor Camat Paser Belengkong sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”, belum mencapai target, dimana realisasinya belum dapat dilaksanakan karena belum adanya jadwal penilaian dari pemerintah daerah

b. Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat” mencapai target, dimana realisasinya sebesar 64,76 dari target sebesar 63 dengan capaian kinerja sebesar 102,79 %.

c. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan”, melampaui target, dimana realisasinya sebesar 86,29 dari target sebesar 85 dengan capaian kinerja sebesar 101,51 %.

d. Sasaran “Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Menurunnya Angka Kriminalitas”, belum mencapai target, dimana realisasinya masih sebesar 0 dari target sebesar 3

e. Tujuan “Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan”, Belum

mencapai target, dimana realisasinya sebesar 6% dari target 13%

f. Sasaran “Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif”, belum mencapai target, karena data belum tersedia.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Camat Paser Belengkong Periode Juni 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
2. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat
3. Ganguan akses jariangan internet dan Aplikasi SIPD

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Paser Belengkong sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Kantor Camat Paser Belengkong tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		75	75
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai Hasi Evaluasi dari Inspektorat	B 63	B 63
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat/Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan PATEN kecamatan yang dilaksanakan 1 tahun sekali	85	85
	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	Jumlah peristiwa kriminal/gangguan keamanan/ketertiban selama setahun dibagi jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000	3	3
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa		Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan		13	13
	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Jumlah desa yang memiliki Lembaga kemasyarakatan ----- x 100 % Jumlah Desa	60	60

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan

sasaran pada Perubahan Renja Kantor Camat Paser Belengkong Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu "PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**"** yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Camat Paser Belengkong mendukung pencapaian sasaran ke – 3, 4, 5 dan 10 yaitu "Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif dan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat".

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Kantor Camat Paser Belengkong telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 Kantor Kecamatan Paser Belengkong
Kantor Camat Paser Belengkong

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikantor Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikantor Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
	KANTOR KECAMATAN PASER BELENGKONG					**6,343,005,296**						**6,623,203,148**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	%	75		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	%	75	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD**	%	100		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD**	%	100	
			Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	%	79				**Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten**	%	79	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	Dokumen	2	24,760,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	Dokumen	2	24,760,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA)	Laporan	1	5,450,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA)	Laporan	1	5,450,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase temuan ditindaklanjuti**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase temuan ditindaklanjuti**			
			Persentase LHP nihil						**Persentase LHP nihil**			

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	25	4,036,825,920	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Paser Beler	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	25	4,277,023,772
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SPP,SPM,EBilling)	Dokumen		256,220,190	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Paser Beler	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SPP,SPM,EBilling)	Dokumen		256,220,190
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan rekonsiliasi keuangan: 12 dok, CALK: 1 dok, Prognosis: 2 dok)	Laporan	15	36,280,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Paser Beler	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan rekonsiliasi keuangan: 12 dok, CALK: 1 dok, Prognosis: 2 dok)	Laporan	15	36,280,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase ratarata capaian IKI dengan nilai ≥ 80**	%	80		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase ratarata capaian IKI dengan nilai ≥ 80**	%	80	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegegawaian	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		105,860,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegegawaian	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		105,860,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	%	100		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	%	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2,222,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2,222,000

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	27,780,293	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	27,780,293
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5,040,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5,040,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	242,757,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	242,757,500
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	%	80		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	%	80	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	6,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	6,000,000
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	%	100		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	%	100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1,140,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1,140,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	87,104,648	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	87,104,648
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	96,600,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	96,600,000

7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	%	70		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	%	70	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	29,551,780	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	29,551,780
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	2,190,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	2,190,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	97,866,665	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	97,866,665
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		20	12,200,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	20	12,200,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu**	%	100		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**		**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu**	%	100	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Jumlah Desa yang terfasilitasi**	Desa	15		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Jumlah Desa yang terfasilitasi**	Desa	15	

	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	15	19,325,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	15	19,325,000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	15	19,005,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	15	19,005,000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	15	27,125,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	15	27,125,000
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	2	10,225,000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	2	10,225,000
	Fasilitasi Pelaksanaan Kepala Desa	Kec. Paser Belengkong			1	25,230,000	Fasilitasi Pelaksanaan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	25,230,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	%	85		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	%	85	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	300	304,875,000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	300	304,875,000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	15	16,650,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	15	16,650,000
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	%	100		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	%	100	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	12	194,384,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	12	194,384,000

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	39,825,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	39,825,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Presentase Penurunan Kasus Gangguan Keamanan dan**	%	55		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**		**Presentase Penurunan Kasus Gangguan Keamanan dan**	%	55	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	%	100		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	%	100	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	65,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,000,000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	%	100		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	%	100	

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	15	334,275,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	15	334,275,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/tersele saikan di wilayah kecamatan**	%	100		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/tersele saikan di wilayah kecamatan**	%	100	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	Kegiatan	2		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Jumlah Kegiatan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	Kegiatan	2	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	10	30,280,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	10	30,280,000
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	300	19,500,000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	300	19,500,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	%	30		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	%	30	

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	%	100		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	%	100	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	30	22,762,500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	30	22,762,500
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	138,694,800	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Paser Belengkong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	138,694,800

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Perubahan Rancangan RKPD 2024 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kantor Camat Paser Belengkong baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

Tabel 3.3

Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 pada Kantor Camat Paser Belengkong

No	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kantor Camat Paser Belengkong										
	Urusan ……..										
1	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										
2.	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										
2.	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										

NIHIL

3.4. **Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024**

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Camat Paser Belengkong pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG KAB. PASER
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG						**6.623.203.148,00**							**2.510.917.426,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.623.203.148,00**							**2.510.917.426,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.623.203.148,00**							**2.510.917.426,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.316.046.848,00**						**-**	**1.131.530.926,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30.210.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-	-	39.145.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	24.760.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		30.385.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	5.450.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		8.760.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.569.523.962,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-	-	292.500.190,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	4.277.023.772,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		0,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				130 Dokumen	256.220.190,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		256.220.190,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15 Laporan	36.280.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		36.280.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	105.860.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-	-	105.860.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15 Dokumen	105.860.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		105.860.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	277.799.793,00			-	-	-	-	221.167.293,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.222.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		2.222.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	27.780.293,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		27.780.293,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	5.040.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		5.040.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	242.757.500,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		186.125.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-	-	88.951.600,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	6.000.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		88.951.600,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	184.844.648,00			-	-	-	-	184.844.648,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.140.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		1.140.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	87.104.648,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		87.104.648,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	96.600.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		96.600.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	141.808.445,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-	-	199.062.195,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	29.551.780,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		29.551.780,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	2.190.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		2.190.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	97.866.665,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		155.120.415,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	12.200.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		12.200.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-			-	**555.734.000,00**						-	**555.734.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	321.525.000,00			-	-	-	-	321.525.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				300 Laporan	304.875.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Olong Pinang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		304.875.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15 Laporan	16.650.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		16.650.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	194.384.000,00			-	-	-	-	194.384.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	194.384.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		194.384.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	39.825.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-	-	39.825.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	39.825.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		39.825.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**161.457.300,00**						**-**	**237.562.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	161.457.300,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-	-	237.562.500,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				30 Lembaga Kemasyarakatan	22.762.500,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		37.562.500,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	138.694.800,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		200.000.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**439.275.000,00**						**-**	**399.275.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	105.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-	-	65.000.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	105.000.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		65.000.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	334.275.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-	-	334.275.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				15 Laporan	334.275.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		334.275.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**49.780.000,00**						**-**	**62.780.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	49.780.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-	-	62.780.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				10 Orang	30.280.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		30.280.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				300 Orang	19.500.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		32.500.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-			-	**100.910.000,00**						-	**124.035.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	100.910.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-	-	124.035.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				15 Dokumen	19.325.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		19.325.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				15 Dokumen	19.005.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		19.005.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				15 Dokumen	27.125.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		44.125.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	25.230.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Olong Pinang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		28.680.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	10.225.000,00	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		12.900.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	J U M L A H							**6.623.203.148,00**							**2.510.917.426,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Paser Belengkong Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kantor Camat Paser Belengkong mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Paser Belengkong, 18 Juli 2024
Plt. Camat

Abdillah, S.STP
NIP 198207052001121004

RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA) TAHUN 2024

KECAMATAN BATU ENGAU
TAHUN 2023

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Batu Engau dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Kecamatan Batu Engau Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamantkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas Renja sementara ini disusun dengan masih mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Batu Engau Tahun 2022 – 2026.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Batu Engau ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.

Batu Engau, Juli 2024
CAMAT,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN BATU ENGAU

MUHAMMAD TAUHID,S.Sos,MM
Pembina TK. I / IV.b
NIP. 19680202 198803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan tujuan 5

1.4. Sistematika Penyusunan Renja 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU **7**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 17

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH **23**

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 23

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 23

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **27**

4.1. Program dan Kegiatan 27

4.2. Matriks Pendanaan 28

BAB V PENUTUP

RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN BATU ENGAU KABUPATEN PASER TAHUN 2024

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja apabila diartikan berdasarkan frasa yakni terdiri dari kata rencana dengan definisi rancangan, konsep maupun laporan pemberitaan (KBBI, 2008:1194), sedangkan kerja dapat dimaknai sebagai kegiatan melakukan sesuatu (KBBI, 2008:703). Oleh karena itu rencana kerja juga dapat diartikan sebagai suatu rancangan terhadap kegiatan yang akan dilakukan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian Ketujuh yang membahas mengenai Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahap Persiapan. Persiapan merupakan pra kondisi yang diciptakan sebagai upaya insepsi dengan tujuan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya dari persiapan yang telah dilaksanakan dan merujuk pada pasal 126 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perangkat daerah menyusun penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan tersebut dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan penetapan Rencana Kerja berpedoman kepada Renstra yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Penetapan Rencana Kerja juga mempedomani hasil evaluasi Renja yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja sebagaimana pasal 130 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disempurnakan dengan mengacu pada surat edaran Kepala Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran RKPD.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh perangkat kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa.

Selain itu dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , camat harus Menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Banyaknya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh kecamatan sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan yang nyata dari pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran di kecamatan sudah seharusnya dapat di selesaikan guna mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dan desa. Pemenuhan sumberdaya aparatur dan anggaran yang cukup akan membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

   dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005 -2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor ..);
13. Peraturan Bupati Paser Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser tahun 2024 dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser selama satu tahun. Rumusan yang disusun adalah wujud dari perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan dan diharapkan berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Paser yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaannya.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser tahun 2024 bertujuan :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2022 sebagai bahan penyusunan Renja Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Tahun 2024;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Tahun 2024 dan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA -PPAS) Tahun 2024;
3. Mengetahui isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser berserta peluang dan tantangan yang dihadapi;
4. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas keputusan pimpinan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja,maksud dan tujuan, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan(tahun n-1).

BAB III. TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat tentang tujuan,sasaran dan kegiatan dari penyusunana Renja merupakan suatu aspek yang dapat menggambarkan program yang diinginkan .

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BATU ENGAU

Bab ini memuat tentang Pendanaan Kecamatan Batu Engau

BAB V. PENUTUP

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka ada keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahunan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Renja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga mengakomodasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, forum Perangkat Daerah. Selanjutnya Rencana Kerja Kantor Kecamatan Batu Engau tahun 2024 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kecamatan Batu Engau Tahun 2024, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2024 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kecamatan Batu Engau untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kcrja Kecamatan Batu Engau merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD unluk periode 1 (satu) tahun yang meliputi pcnjabaran perencanaan tahunan dai.1 Rencana Strategis Kecamatan Batu Engau. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabillitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Batu Engau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Batu Engau selama tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran Tahun 2024.

Sejalan dengan bcrjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamalan Batu Engau Tahun 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Rekapitulasi Realisasi Kerja selama Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

2.2.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Paser

Kantor Kecamaatan Batu Engau

Jalan Haur Kuning Telp.- Batu Engau (Kode Pos 76261)

Telp,- Email:kecbatuengau_kabpaser@yahoo.co.id

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Batu Engau
Provinsi/Kabupaten/Kota : Paser

Kode	Program/Kegiatan			Belanja			Hasil/Keluaran			
				Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Rencana	Realisasi	Satuan	%
1	2			3	4		5	6	7	8
7.01.01	PROGRAM		**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				72	90,28	Persen	
7.01.01.2.01	Kegiatan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100	85	Persen	
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.738.600	6.738.600	100	5	5	Dokumen	100

7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.947.460		96	5	5	Dokumen	100
7.01.01.2.02	Kegiatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.697.580			100	85	Persen	
7.01.01.2.02.04	Sub Kegiatan		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	82.215.800	82.215.800	100	150	160	Dokumen	107
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.992.568.299,00	2.766.185.352,00	92	14	14	Bulan	100
7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan					100	15	15	Dokumen	100

	Kegiatan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**100**	85	Persen	
7.01.01.2.05		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7.690.100,00	7.690.100,00						
7.01.01.2.05.03	Sub Kegiatan		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	130.150.000,00	130.120.000,00	100	6	6	Orang	
7.01.01.2.06	Kegiatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah				**100**	80	Persen	
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.653.700	3.644.000,00	100	30	30	buah	100
7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.617.400,00	2.608.520	100	10	9	Jenis	
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.440.300,00	55.435.300,00	100	3	3	Paket	100
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.545.000,00	4.545.000	100	5	5	Jenis	100
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.111.560,00	90.975.000,00	100	234	234	Kali	100
7.01.01.2.08	Kegiatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**100**	100	Persen	100
7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	100	50	50	lembar	100
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.570.000	39.127.991	74	12	12	Bulan	100
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.200.000	29.400.000	91	12	12	Bulan	100
7.01.01.2.09	Kegiatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**70**	78,57	Persen	89,09
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.720.000	10.720.000	100	15	15	unit	100
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.186.500	6.711.780	82	2	2	unit	100
7.01.02	**PROGRAM**		**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**80**	87,5	Persen	

7.01.02.2.03	**Kegiatan**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**				**100**	75	Persen	
7.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	36.550.000,00	36.549.900,00	100	7	7	Dokumen	100
7.01.02.2.04	**Kegiatan**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**100**	85	Persen	
7.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	57.920.000,00	57.920.000	100	13	13	Dokumen	100
7.01.03	**PROGRAM**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**75**	70	Persen	
7.01.03.2.01	**Kegiatan**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**100**	95	Persen	
7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.255.540,00	6.254.250	100	13	13	Dokumen	100
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	511.280.400,00	508.876.480	100	1	1	Kali	100
7.01.04	PROGRAM		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**55**	40	Persen	
7.01.04.2.01	Kegiatan		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**100**	75	Persen	
7.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	41.350.000,00	40.900.000	99	2	2	Kali	100
7.01.04.2.04	Kegiatan		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**				**100**	75	Persen	
7.01.04.2.04.01	Sub Kegiatan		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	301.708.460,00	294.100.000	97	12	12	Kali	100
7.01.05	PROGRAM		**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**100**	80	Persen	
7.01.05.2.01	Kegiatan		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**100**	80	Persen	
7.01.05.2.01.01	Sub Kegiatan		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	29.000.000,00	29.000.000	100	40	40	Orang	100

7.01.05.2.01.04	Sub Kegiatan		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	69.104.540,00	68.550.000	99	1	1	Kali	100
7.01.06	PROGRAM		**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**100**	80	Persen	
7.01.06.2.01	Kegiatan		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**100**	80	Persen	
	Sub Kegiatan		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.615.220,00	.320.800,00	95	13	13	Desa	100
7.01.06.2.01.02	Sub Kegiatan		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.945.190,00	.900.000,00	100	13	13	Desa	100
7.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	134.816.915,00	134.825.300,00	100	78 78		dokumen	100
7.01.06.2.01.06	Sub Kegiatan		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	35.220.000,00	34.630.000,00	98	7	7	Desa	100
7.01.06.2.01.12	Sub Kegiatan		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	77.310.345,00	77.295.345,00	100	13	13	Desa	100
7.01.06.2.01.15	Sub Kegiatan		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	13.536.000,00	13.535.900,00	100	8	8	Segmen	100
7.01.06.2.01.16	Sub Kegiatan		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	15.685.000,00	15.635.000,00	100	39	39	dokumen	100
	TOTAL			**5.010.160.714,00**	**4.750.599.613,00**	**94,82**				

Kerang, 31 Desember 2022
Pengguna Anggaran



MUHAMMAD TAUHID, S.Sos, MM
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 19680202 198803 1 004

Jika dilihat dari pencapaian realisasi keuangan yang menunjukkan 94,82% dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran untuk tahun 2022 berhasil. Namun jika dilihat dari pencapaian realisasi output kegiatan secara fisik akan diperoleh angka sebesar 100%. Hasil tersebut diperoleh dengan memperhitungkan rasio target dengan realisasi output dimana dari 30 Sub Kegiatan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Kecamatan Batu Engau merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Paser. Oleh karena itu, Rencana Kerja Kecamatan Batu Engau berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Batu Engau dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Paser sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Kecamatan Batu Engau bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, maupun di tingkat Provinsi dan Kabupaten Paser (RPJMD dan RKPD).

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batu Engau adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan OPD dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembangunan di Kabupaten Paser sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat meberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran Organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut, maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, atau disebut juga sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran.

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan sebelumnya,maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan mengfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Visi Periode 2021 – 2026

Kabupaten Paser Maju Adil dan Sejahtera (Paser MAS)

Dalam mewujudkan Visi dan Misi maka Tujuan yang diperoleh adalah sebagi berikut :

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mengimplementasikan visi dan misi tersebut sebagai berikut:

1) Misi ke 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisifatif dan Transparan

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas

Sasaran : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamtan
3. Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif

2) Misi ke 4 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing

Tujuan : Meningkatnya kemandirian masyarakat desa

Sasaran : 1. Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan

VISI	Menuju Kabupaten Paser Maju Adil, dan Sejahtera		
MISI 2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Peningkatan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan
		Meningkatkan kualitas perencanaan yang akuntabel	Peningkatan kualitas perencanaan yang akuntabel
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik	Pengoptimalan pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik
		Menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik	Peyusunan dan Penerapan Standar pelayanan publik
	3. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penegakan Perda	Peningkatan kuantitas dan kualitas penegakan Perda
		Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
		Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis
		Pencanangan gerakan antisipasi bahaya narkoba di tiap Kecamatan/Desa	Gerakan antisipasi bahaya narkoba di tiap Kecamatan/Desa
MISI 4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		

1. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	3. Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Keluarahan	Meningkatkan peran partisipasi masyarakat sangat penting karena masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan dan potensi sumberdaya yang ada sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menstimulasi dan memotivasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa diharapkan akan menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat desa	Peningkatan Keterlibatan Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakat Desa dalam kaitan perencanaan, Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Pengawasannya

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah KabupatenPaser

Visi : Menuju Kabupaten Paser Maju Adil, dan Sejahtera

(PASER MAS)

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					(N-2)	(N)	(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	
1	Meningkatkan tata kelola permerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi							
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	CC	B	B	BB	BB	A	A
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	81	82	83	84	84
			Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	N/A	52	51	50	49	48	48
		Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa		Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakata n Desa/Keluraha n	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100	100	100	100	100	100	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Batu Engau pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DAERAH/KOTA
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegegawaian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Peneyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Mebel
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeiliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pemeilharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat **Daerah yang ada di Kecamatan**
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.1. Matriks Pendanaan

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Kecamatan Batu Engau tercantum pada tabel berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KANTOR CAMAT BATU ENGAU KAB. PASER TAHUN 2024

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KANTOR CAMAT BATU ENGAU						**4.664.256.475,00**							**6.037.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.664.256.475,00**							**6.037.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.664.256.475,00**							**6.037.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1).Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik***	**80 %** **90 %** **80 %** **80 Persen**			**74 %** **74 Persen** **85 %**	**3.618.850.320,00**						**80 %** **90 %** **80 %** **80 Persen**	**4.794.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD, Persentase capaian sasaran strategis perangkat daerah, Kualitas pelaksanaan SPIP Perangkat Daerah, Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten, Persentase rata-rata capaian area perubahan RB PD*	-			100 Persen	92.000.000,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-	-	140.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-		20.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	85.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-		120.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase temuan ditindaklanjuti, Persentase LHP nihil*	-			100 Persen	3.156.373.522,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-	-	3.834.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				294 Orang/bulan	3.065.683.422,00	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-		3.700.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				150 Dokumen	83.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-		120.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15 Laporan	7.690.100,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-		14.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase rata-rata capaian I K I*	-			90 Persen	130.650.000,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-	-	181.500.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	500.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-		31.500.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	130.150.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-		150.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat*	-			100 Persen	135.816.100,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-	-	162.500.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.653.700,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-		6.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.617.400,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-		5.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	50.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-		65.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.545.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-		6.500.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				234 Laporan	75.000.000,00	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-		80.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik*	-			80 Persen	200.000,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-	-	80.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	100.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-		20.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	100.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-		60.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan*	-			100 Persen	72.700.698,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-	-	106.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	500.000,00	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		1.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	40.000.698,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		65.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	32.200.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		40.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang inventaris dalam kondisi baik*	-			47 Persen	31.110.000,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-	-	290.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-		40.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	10.910.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-		25.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-		200.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-		25.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan***	**90 Persen**			**85 Persen**	**232.570.000,00**						**90 Persen**	**315.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			100 Persen	146.550.000,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-	-	180.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	136.550.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		160.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		20.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum*	-			100 Persen	3.100.000,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-	-	35.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	3.100.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		35.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	-			100 Persen	82.920.000,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-	-	100.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	82.920.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		100.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif***	**100 %**			**100 %**	**23.280.400,00**						**100 %**	**52.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana*	-			100 Persen	23.280.400,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-	-	52.500.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		27.500.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	11.280.400,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		25.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan di wilayah kecamatan***	**100 Persen**			**100 Persen**	**395.000.000,00**						**100 Persen**	**380.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	90.000.000,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-	-	50.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		30.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				7 Laporan	65.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		20.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	305.000.000,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-	-	330.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	305.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		330.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan***	**100 Persen**			**100 Persen**	**110.000.000,00**						**100 Persen**	**150.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan*	-			3 Kegiatan	110.000.000,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-	-	150.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*				40 Orang	40.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-		85.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	70.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-		65.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu*** ***Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu***	**100 Persen** **100 %**			**100 %** **100 Persen**	**284.555.755,00**						**100 Persen** **100 %**	**345.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa yang terfasilitasi*	-			13 Desa	284.555.755,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondu sivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah an yang Responsive dan Tangkas	-	-	345.500.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				13 Dokumen	5.615.220,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		15.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	9.945.190,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		16.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	136.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		155.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				15 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		32.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				13 Dokumen	77.310.345,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		85.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				9 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		25.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				13 Dokumen	15.685.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	-		17.500.000,00	KANTOR CAMAT BATU ENGAU
	J U M L A H							**4.664.256.475,00**							**6.037.000.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja OPD Kantor Kecamatan Batu Engau merupakan dasar pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) untuk pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Batu Engau selama jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan tahun 2024, sebagai dasar dan referensi untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan ANggaran OPD (RKA OPD) dalam rangka hal tersebut Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser menerapkan prinsip-prinsip efisien,efektif,transparan,akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan,baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggun jawab / tugas sesuai tupoksi masing-masing bidang dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melelui forum musyawarah koordinasi perencanaan.

Rencana Kerja Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser ini merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur.Selain itu, Rencana Kerja Kecamatan Batu Engau ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan,sasaran,program dan kegiatan guna mendukung Visi dan Misi Kabupaten Paser Maju, Adil, Sejahtera (Paser MAS).

Camat Batu Engau,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN BATU ENGAU

Muhammad Tauhid, S.Sos, MM
Pembina TK.I / IV.b
NIP.19680202 198803 1 004

RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2024

KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

TAHUN 2024

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) PD Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2024.

Renja Perubahan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2024 merupakan bahan materi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tema, prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur serta isu-isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Paser tahun 2021-2026.

Renja Perubahan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2024 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2024 . Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan PD Kecamatan Tanjung harapan Kabupaten Paser Tahun 2024 semoga dapat diimplementasikan sebaik- baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan PD Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak. Akhirnya atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar- besarnya.

Tanjung Aru, 19 Agustus 2024

Camat



H. Sudarsono, SP,. MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR : 100.3.3.2/KEP-786/2024
TANGGAL : 16 Agustus 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan

RKPD Tahun 2024;

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kantor Kecamatan Tanjung Harapan, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Harapan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Harapan proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Harapan keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Tanjung Harapan, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjung Harapan

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang diserta narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024.

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2023 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Sebagaimana Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi atau diukur dalam pelaksanaannya. Pengukuran Kinerja adalah Proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui pencapaian Realisasi Keuangan dan capaian Kinerja, kemajuan dan kendala yang di hadapi dalam rangka pencapaian Visi dan misi, supaya dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efesiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi.

Hasil evaluasi Renja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana termuat pada tabel 2.1 dalam format berikut ini:

Tabel 2.1

Capaian kinerja Program dan Kegiatan Sampai dengan Triwulan II

Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2024

Laporan Renja Triwulan-II 2024 [7.01.0.00.0.00.08.0000] Kantor Camat Tanjung Harapan

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Predikat	
						Triwulan-I		Triwulan-II							
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	
			K		RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kantor Camat Tanjung Harapan	-	0	-	5.061.789.587,00	10,6	529.632.016,00	24,8	1.256.611.050,00	35,40	1.784.243.066,00	0	35,25	SR	SR
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kantor Camat Tanjung Harapan	-	0	-	5.061.789.587,00	10,6	529.632.016,00	24,8	1.256.611.050,00	35,40	1.784.243.066,00	0	35,25	SR	SR
7.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	74	%	3.177.170.145,00	20	483.632.016,00	20	1.102.361.050	40	1.585.993.066,00	54,05	49,92	T	R
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100	%	35.720.000,00	25	-	25	26.229.300,00	50	26.229.300,00	50	73,43	SR	SR

7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	25.040.000,00	1	0	2	21.529.300,00	3	21.529.300,00	60	85,97	T	SR
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	10.680.000,00	2	0	1	4.700.000,00	3	4.700.000,00	60	44,00	T	SR
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Keuangan yang tepat waktu	100	persen	2.785.968.646,00	25	463.423.616,00	25	1.033.420.687,00	50	1.496.844.303,00	50	53,73	SR	R
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144	Orang/ bulan	2.563.828.346,00	26	430.955.016,00	65	953.740.687,00	91	1.384.695.703,00	63	54,00	ST	R
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14	Dokumen	207.100.300,00	2	23.200.000,00	5	79.680.000,00	7	102.880.000,00	50	49,68	R	SR
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	15.040.000,00	1	9.268.600,00	1	-	2	9.268.600,00	40	61,63	SR	SR

7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80	**100**	**persen**	**15.1200.000,00**	**25**	**-**	25	-	50	-	50	0	SR	SR
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	persen	15.1200.000,00	**25**	**-**	25	-	50	-	50	0	SR	SR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi PD yang berjalan dengan Baik	100	persen	273.901.499,00	25	20.208.400,00	25	42.711.063,00	50	62.919.463,00	50	22,97	SR	SR
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45	Paket	3.750.000,00	10	-	10	-	20	-	44,44	0	SR	SR
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	Paket	26.386.499,00	10	-	5	-	15	-	62,5	0	SR	SR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	8.850.000,00	2	-	0	-	2	-	20	0	SR	SR
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145	Laporan	234.915.000,00	15	20.208.400,00	15	42.711.063,00	30	62.919.463,00	20,69	26,78	SR	SR
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	persen	28.560.000,00	25	-	25	-	50	-	50	0	SR	SR

7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.200.000,00	3	-	3	-	6	-	50	**0**	SR	SR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	27.360.000,00	3	-	0	-	3	-	25	0	SR	SR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Inventarisasi pada PD dalam Kondisi Baik	100	persen	38.500.000,00	0	-	25	-	25	-	25	0	SR	SR
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	35.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	3.500.000,00	0	-	2	-	2	-	40	0	SR	SR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	74	%	1.184.605.000,00	25	-	25	11.850.000,00	50	11.850.000,00	67,57	1,00	SR	SR

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	24.487.500,00	25	-	25	2.820.000,00	50	2.820.000,00	50	11,52	SR	SR
7.01.02.2.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksana Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7	Laporan	16.447.500,00	1	-	1	-	2	-	28,57	0	SR	SR
7.01.02.2.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	140	Dokumen	8.040.000,00	5	-	50	2.820.000,00	55	2.820.000,00	39,28	35,07	SR	SR
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	77.202.500,00	25	-	25	9.030.000,00	50	9.030.000,00	50	11,71	SR	SR
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	26.047.500,00	3	-	3	9.030.000,00	6	9.030.000,00	50	34,67	SR	SR

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	16.807.500,00	1	-	0	-	1	-	20	0	SR	SR
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat	100	Persen	1.083.022.500,00	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	Laporan	1.083.022.500,00	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase P r o g r a m Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan dengan baik	80	Persen	87.335.000,00	20	-	20	3.760.000,00	40	3,760.000,00	50	4,30	SR	SR
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100	persen	87.335.000,00	25	-	25	3.760.000,00	50	3.760.000,00	50	4,30	SR	SR
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	87.335.000,00	3	-	3	3.760.000,00	6	3.760.000,00	50	4,30	SR	SR

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	60	%	375.9097.500,00	15	46.000.000,00	15	115.000.000,00	30	161.000.000,00	50	42,83	SR	SR
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	13.120.000,00	**25**	**-**	**25**	**-**	**50**	**-**	**50**	**0**	SR	SR
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8	Laporan	13.120.000,00	**25**	**-**	**25**	**-**	**50**	**-**	**50**	**0**	SR	SR
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	kegiatan yang ditindaklanjuti (berjalan baik) / seluruh kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum dikoordinasikan x 100	100	persen	362.787.500,00	25	46.000.000,00	25	115.000.000,00	50	161.000.000,00	50	44,38	SR	SR
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan	362.787.500,00	2	46.000.000,00	5	115.000.000,00	7	161.000.000,00	50	44,38	S	SR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100	%	141.391.400,00	25	-	25	-	50	-	50	0	SR	SR

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	persen	141.391.400,00	25	-	25	-	50	-	50	0	SR	SR
7.01.005.2.01.001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INdonesia	25	Orang	59.576.400,00	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR

7.01.005.2.01.004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	35	Orang	81.815.000,00	5	-	5	-	10	-	28,57	0	SR	SR
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100	%	94.780.000,00	25	-	25	21.640.000,00	50	21.640.000,00	50	22,83	SR	SR
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	7	Desa	94.780.000,00	1	-	2	21.640.000,00	3	21.640.000,00	28,57	22,83	SR	SR
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	Dokumen	26.047.500,00	0	-	7	11.460.000,00	7	11.460.000,00	100	43,99	SR	SR
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7	Dokumen	17.930.000,00	0	-	1	-	1	-	14,28	0	SR	SR

7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	7	Laporan	14.005.000,00	0	-	1	-	1	-	14,28	0	SR	SR
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7	Dokumen	22.447.500,00	7	-	0	10.180.000,00	7	10.180.000,00	100	45,35	ST	SR
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan Batas Desa	2	Laporan	14.350.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	SR	SR

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 35,40 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.784.243.066,00 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 5.061.789.045,00 (Lima milyar enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) atau sebesar 35,25%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Kecamatan Tanjung Harapan sebesar 35,22% dengan predikat kinerja pada formulir E.15, dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel T-E.1 sebagai berikut :

Tabel T-E.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	70% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
   Gradasi ini menunjukkan pencapaain/realisasi kinerja capaian telah memnuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang

   Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratn minimal.
3. Hasil Sangat Rendan dan Rendah

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 1 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 4 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 9 indikator capaian kinerja 0%-50% = 19 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjung Harapan

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, maka Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Tugas Pokok Kecamatan Tanjung Harapan

   Kecamatan Tanjung Harapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

2. Fungsi Kecamatan Tanjung Harapan

   Untuk melaksanakan Tugasnya, Kecamatan Tanjung Harapan mempunyai fungsi antara lain:

   a. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan otonomi daerah
   b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa
   c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
   d. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Peraturan Perundang-Undangan
   e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
   f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
   g. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
   h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atauyang belum dapat dilaksanakanPemerintah Desa atau Kelurahan
   i. Penyusunan program, pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Kecamatan Tanjung Harapan adalah:

1. Pelayanan kepada Masyarakat dalam pengurusan KTP, Kartu Keluarga (KK) dan pindah domisili
2. Pemberian Surat Rekomendasi pembuatan IMB
3. Pelayanan SKTM

Upaya Kecamatan Tanjung Harapan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanjung Harapan

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2024	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	70,15 (BB)	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat ***Definisi Operasional :*** Nilai SAKIP merupakan Hasil Evaluasi atas kompnen perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat, Sekcam, Kasubag Program dan Keuangan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 %	Hasil Penghitungan Survei Indeks KepuasanMasyarakat di Kecamatan setiap Tahun ***Definisi Operasonal :*** Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan Kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan	Dokumen Laporan Hasil Survet Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	Kasi Pemerintahan dan Kependudkan & Kasi Kesejahteraan Masyarakat
3	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	50 %	$\frac{\sum \text{Kriminalitas setahun}}{\sum \text{penduduk}} \times 100.000$ ***Definisi Operasional :*** Angka Kriminalitas merupakan indikator negatife dari rasa aman. Semakin tinggi angka kriminalitas,	Data Kriminalitas dariKepolisian setempat	Kasi Ketentraman dan Ketertiban

				menunjukan bahwa kehidupan pada masyarakat disuatu daerah semakin tidak aman.		
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	6,80 %	Jumlah Masyarakat Miskin _____ X 100 % Jumlah Penduduk dalam satu Daerah **Definisi Operasional :** Angka Kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah pemduduk dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka kemiskinan maka semakin rendah kesejahteraan masyarakatnya..	Hasil Survei dan Data Statistik	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kasi Kesmas.

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Kecamatan Tanjung Harapan terdapat dalam Tabel TC-29 di bawah ini

Tabel TC-29

Pencapaian Kinerja ,Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tanjung Harapan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi		Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif dan Tangkas Sasaran: Meningkatkan Akuntabiltas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	B	B	BB	BB	A	B	B (61,20)	B (65,53)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	81%	82%	84%	84%	82%	81,99%	55,35%
Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	52%	51%	50%	49%	48%	47,5%	84,1%	35 %
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	8%	7,30%	6,80%	6,30%	5,80%	2,19%	3,35%	1,029%.

Berdasarkan Tabel TC-29 di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tanjung Harapan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas
   Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerka Pemerintah dengan 1 indikator

kinerja yaitu Nilai Evaluasi SAKIP. Untuk penilaian Evaluasi SAKIP tahun 2023 dari Inspektorat mendapat Nilai B atau dengan realisasi 65,53 Nilai.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 55,35% dari target sebesar 82%.

Sasaran 3 : Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif dengan Indikator Angka Kriminalitas, dengan realisasi capaian Kinerja sebesar 35% dari target 50%. Dari hasil Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II, perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Tanjung Harapan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat.

b. **Tujuan :** Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata

Sasaran : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan indikator kinerja yaitu Menurunnya Angka Kemiskinan dari Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Harapan sebesar 10.464 Jiwa jumlah Masyarakat Miskin Sebesar 1.017 Jiwa atau sebesar 1,029%. Jika dilihat dari Target persentase Angka kemiskinan masih dibawah target hal ini menunjukkan capaian yang baik. Karena untuk mengukur Angka Kemiskinan semakin kecil capaian Target maka semakin baik capaian Kinerjanya, yang menunjukkan bahwa Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan meningkat.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Adanya Kerangka Acuan Kegiatan
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Juknis pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang terlambat
2. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
3. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat
4. Pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan

Kegiatan (KAK) yang telah disusun.

5. Sarana dan Prasarana Penunjang kurang memadai
6. Kurangnya Pagu Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Kegiatan dan ada beberapa sub kegiatan yang belum teranggarkan pada Anggaran Murni 2024.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tanjung Harapan sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Kewilayahan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021- 2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel TC-30

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tanjung Harapan

Tahun 2024

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET	
					Renja 2024	Perubahan Renja 2024
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif dan Tangkas	Meningkatkan Akuntabiltas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat ***Definisi Operasional*** : Nilai SAKIP merupakan Hasil Evaluasi atas kompnen perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	B (70,15)	B (70,15)
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penghitungan Survei Indeks KepuasanMasyarakat di Kecamatan setiap Tahun ***Definisi Operasonal :*** Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan Kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan	82%	82%
3		Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	$\frac{\sum \text{Kriminalitas setahun}}{\sum \text{penduduk}} \times 100.000$ ***Definisi Operasional :*** Angka Kriminalitas merupakan indikator negatife dari rasa aman. Semakin tinggi angka kriminalitas, menunjukan bahwa kehidupan pada masyarakat disuatu daerah semakin tidak aman.	50%	50%

4	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Jumlah Masyarakat Miskin ——————————— X 100 % Jumlah Penduduk dalam satu Daerah **Definisi Operasional :** Angka Kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah pemduduk dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka kemiskinan maka semakin rendah kesejahteraan masyarakatnya..	6,80	6,80

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan pada Target Indikator Sasaran.

Namun pada Tahun Anggaran 2024 telah di usulkan perubahan atau pergeseran anggaran Murni 2024, hal ini di sebabkan pada anggaran Murni Tahun 2024 terdapat anggaran pelaksanaan kegiatan MTQ Kabupaten yang semula telah di Agendakan akan dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Harapan, namun karena ada perubahan agenda pada tingkat Kabupaten yang telah di informasikan dari bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Paser untuk pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Tahun 2024 di tunda pelaksanaannya. Melihat kondisi tersebut, maka akan sangat mempengaruhi realisasi anggaran Tahun 2024 pada Kantor Camat Tanjung Harapan. Melihat kondisi tersebut maka dilakukan perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja untuk program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada Kantor Camat Tanjung Harapan.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu **"**PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**"** yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Tanjung Harapan mendukung pencapaian sasaran ke satu yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Kecamatan Tanjung Harapan telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

Berdasarkan Review Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 terdapat 1 Sub Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya penundaan pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, dengan perencanaan awal Kecamatan Tanjung Harapan sebagai tuan Rumah. Sub kegiatan tersebut adalah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terakit dengan kewenangan lain yang dilimpahkan pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 1.083.022.500,- Untuk Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 dapat di geser atau lakukan perubahan ke sub kegiatan yang lain yang masih kekurangan Pagu Anggaran. Kantor Camat Tanjung Harapan juga mengajukan Penambahan Anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk belanja Modal Laptop dan Printer dengan Anggaran sebesar Rp. 109.670.500. Belanja Modal ini sangat diperlukan melihat kondisi sarana dan prasarana peralatan Kantor yang tersedia di Kantor Camat Tanjung Harapan sangat kurang memadai.

Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Renja Tahun 2024
Kantor Camat Tanjung Harapan

No	KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
		Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN										
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**										
	7.01	**KECAMATAN**										
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**%**	**74** **2.587.432.562**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**%**	**100** **3.536.204.749**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen Perencanaan dan Penganggaran tepat waktu	%	100 15.720.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen Perencanaan dan Penganggaran tepat waktu	%	100 40.192.000	
				Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	%	70,15			Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	%	65,25	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	Dokumen	5 5.040.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	Dokumen	5 28.912.000	

	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	10.680.000	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA)	Dokumen	10	11.280.000	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase LHP nihil Persentase temuan ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**2.215.631.063**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase temuan ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**2.914.012.750**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	11	2.003.490.763	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan ASN	Orang/ bulan	180	2.687.460.430	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	207.100.300	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	**12**	211.513.320	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	5.040.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	15.040.000	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat**	**%**	**100**	**15.120.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat**	**%**	**100**	**18.800.000**	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**Dokumen**	**11**	15.120.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**Dokumen**	**13**	**18.800.000**	

	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tersedianya pemenuhan Kebutuhan administrasi Umum di Kecamatan**	**%**	**100**	**273.901.499**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tersedianya pemenuhan Kebutuhan administrasi Umum di Kecamatan yang Akuntabel**	**%**	**100**	**496.139.999**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	3.750.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	3.750.000	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	5	109.670.500	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	38	26.386.499	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	38	26.386.499	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	5	8.850.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	8.850.000	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	85	234.915.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	145	347.483.000	

	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor**	**%**	**100**	**28.560.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**28.560.000**	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100	1.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	**100**	**1.200.000**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan penyediaan Listrik, air Bersih dan Internet	Laporan	12	27.360.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan penyediaan Listrik, air Bersih dan Internet	Laporan	12	27.360.000	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**		**Persentase Pemeliharaan Inventarisasi pada PD dalam kondisi Baik**	**%**	**100**	**38.500.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**		**Jumlah Waktu Pemeliharaan bara milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**38.500.000**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	2	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan	Unit	2	35.000.000	
		Dinas Operasional atau Lapangan		dan dibayarkan pajak dan perizinanya				Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan pajak dan perizinanya				

	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Peralatan kantor lainnya yang dipelihara	Unit	3	3.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Peralatan kantor lainnya yang dipelihara	Unit	5	3.500.000	
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Tanjung Harapan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**%**	**74**	**1.184.605.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Tanjung Harapan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**%**	**74**	**184.605.000**	Pergeseran anggaran MTQ Kabupaten karena di tunda pelaksanaanya
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Tanjung Harapan**	**Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan**	**%**	**100**	**24.487.500**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec. Tanjung Harapan	**Presentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan**	**%**	**100**	**24.487.500**	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	**Kec. Tanjung Harapan**	Jumlah Laporan koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Intansi Vertikal terkait	laporan	7	16.447.500	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah UKS yang dibina	Desa	7	16.447.500	

	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec. Tanjung Harapan**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	140	8.040.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec. Tanjung Harapan**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	140	8.040.000	
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**%**	**83**	**77.095.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Tersedianya Fasilitas Percepatan Standar Pelayanan**	%	**100**	**93.672.500**	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	26.047.500	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	28.685.000	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	**7**	**51.047.500**	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	**5**	**64.987.500**	

	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat	%	**100**	**1.083.022.500**	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat	%	**100**	**83.022.500**	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	**2**	**1.083.022.500**	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	**2**	**83.022.500**	Pelaksanaan MTQ Kabupaten tunda pelaksanaanya
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**	%	**100**	**87.335.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Program Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	%	**100**	**158.593.450**	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	%	**100**	**87.335.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Kegiatan Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan**	%	**100**	**158.593.450**	**Penambahan Kegiatan PP PAUD**
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Laporan**	**4**	**87.335.000**	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	**Laporan**	**12**	**158.593.450**	

										Kecamatan				
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Tanjung Harapan**	**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban**	**%**	**65**	**375.907.500**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan da n ketertiban**	**%**	**65**	**380.225.000**	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Kec. Tanjung Harapan	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**13.120.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**13.120.000**	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan forum Kerukunan beragama yang dilaksanakan	Laporan	**1**	13.120.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan forum Kerukunan beragama yang dilaksanakan	Laporan	**1**	13.120.000	
	7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		Presentase penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**%**	**100**	**362.787.500**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Jumlah Frekuensi Monitoring Trantibnas yang dilakukan oleh aparat Kecamatan**	**%**	**100**	**367.105.000**	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia	Kec. Tanjung Harapan	Laporan koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	**Laporan**	**12**	**362.787.500**	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik	Kec. Tanjung Harapan	Laporan koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/Atau Kepolisian	**Laporan**	**12**	**367.105.000**	

								Indonesia		Negara Republik Indonesia				
5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/ terseles aikan di wilayah kecamatan**	**%**	**100**	**141.391.400**	**PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM**		**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/ terseles aikan di wilayah kecamatan**	**%**	**100**	**141.391.400**	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**%**	**100**	**141.391.400**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasi dengan baik**	**%**	**100**	**141.391.400**	
	7.01.05.2.0 1.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan p e ngamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	25	59.576.400	Pembinaan Wawasan Kebangsaan da n Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tanju ng Harap an	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	25	59.576.400	

	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	35	81.815.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Orang	35	81.815.000	
6	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Desa yang Menyampaikan LKP Desa Tepat Waktu**	**%**	**100**	**94.780.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Desa yang Menyampaikan LKP Desa Tepat Waktu**	**%**	**100**	**105.946.000**	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Tanjung Harapan**	umlah Desa yang terfasilitasi	**Desa**	**7**	94.780.000	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Tanjung Harap an**	Jumlah Koordinasi/rapat Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah	**Persen**	**100**	105.946.000	
	7.01.06.2.01.0002	**Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**	**Kec. Tanjung Harapan**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Dokumen**	**7**	26.047.500	**Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**	**Kec. Tanjung Harapan**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Dokumen**	**7**	26.047.500	

	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	7	17.930.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	7	17.930.000	
	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Laporan	7	14.005.000	Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Laporan	7	19.631.000	Kegiatan Rapat di Luar Daerah dalam Provinsi
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi/Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	7	22.447.500	Fasilitasi/Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	7	22.447.500	
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	2	14.350.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dan	Kec. Tanju	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	2	19.890.000	**Usulan Anggaran Perubaha**
		JUMLAH					**4.471.452.462**						**4.506.965.599**	

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. PD Kecamatan Tanjung Harapan sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke PD terkait sebagaimana Tabel TC.32

Tabel TC-32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Besaran/ volume

Nihil

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tanjung Harapan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel TC-33

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN														
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN				4.471.451.462	5.061.789.045	5.225.421.129							3.267.313.027	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	74 %	74 %	2.587.432.562	3.177.770.145	3.301.402.229						76 %	2,553,558,517	
7	01	01	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran PD	100 %	100 %	15.720.000	35.720.000	35.720.000						100 %	14.250.000	
7	01	01	02.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5.040.000	25.040.000	25.040.000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	Meningkatkan konsistensi dan kesalarasaan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	6.750.000	Kantor Camat Tanjung Harapan

7	01	01	02.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	5 Laporan	5 Laporan	10,080,000	10,080,000	15,720,000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	Meningkatkan konsistensi dan kesalarasaan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Laporan	7.500.000	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	**01**	**01**	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase LHP Nihil		100 %	**2.215.631.063**	**2.785.968.646**	**2.909.600.730**						100 %	**2.350.961.753**	
						Persentase temuan ditindaklanjuti		100 %									100 %		
7	01	01	02.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Org/bulan	180 Orang/bulan	2,003,490,763	2.563.828.346	2.687.460.430	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	Meningkatnya kemampuan PD dlm menyusun laporan kinerja	180 Orang/bulan	2.145.837.253	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	01	01	02.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	207.100.300	207.100.300	207.100.300	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	Meningkatnya kemampuan PD dlm menyusun laporan kinerja	5 Dokumen	196.212.940	Kantor Camat Tanjung Harapan

7	01	01	02.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5,040,000	15,040,000	15,040,000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	Meningkatnya kemampuan PD dlm menyusun laporan kinerja	2 Laporan	8.911.560	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	**01**	**01**	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat*	100 %	100 %	**15.120.000**	**15.120.000**	**15.120.000**						**100 %**	**15.120.000**	
7	**01**	**01**	02.05	**0003**	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	**11 Dokumen**	**11 Dokumen**	**15.120.000**	**15.120.000**	**15.120.000**	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	meningkatkan kualitas pelayanan adminitasi umum kec tanjung harapan	**13 Dokumen**	**15.120.000**	**Kantor Camat Tanjung Harapan**
7	**01**	**01**	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai >80	100 %	100 %	**273.901.499**	**273.901.499**	**273.901.499**						100 %	**111.871.764**	
7	01	001	02.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	3.750.000	3.750.000	3.750.000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	meningkatkan kualitas pelayanan adminitasi umum kec tanjung harapan	1 Paket	2,100,000	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	01	01	02.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	38 Paket	26.386.499	26.386.499	26.386.499	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive	meningkatkan kualitas pelayanan adminitasi umum kec tanjung harapan	4 Paket	23.134.210	Kantor Camat Tanjung Harapan

														Publik	dan Tangkas				
7	01	01	02.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	8.850.000	8.850.000	8.850.000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkata Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	meningkatkan kualitas pelayanan adminitasi umum kec tanjung harapan	1 Paket	10.542.654	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	01	01	02.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**85** Laporan	85 Laporan	234.915.000	234.915.000	234.915.000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	meningkatkan kualitas pelayanan adminitasi umum kec tanjung harapan	85 Laporan	76.094.900	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	**01**	**01**	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	100 persen	100 persen	**28.560.000**	**28.560.000**	**28.560.000**						100 persen	**28.910.000**	
7	**01**	**01**	02.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	100 Laporan	100 Laporan	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	meningkatkan kualitas pelaynaan penyediana n jasa penunjang urusan kec tanjung harapan	**100 Laporan**	**1.100.0000**	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	01	01	02.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	27.360.000	27.360.000	27.360.000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive	meningkatkan kualitas pelaynaan penyediana n jasa penunjang urusan kec tanjung harapan	12 Laporan	27.810.000	Kantor Camat Tanjung Harapan

															dan Tangkas				
7	**01**	**01**	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Presentase Pemeliharaan Inventarisasi pada PD dalam Kondisi Baik*	100 %	100 %	**38.500.000**	**38.500.000**	**38.500.000**						100 perse n	**32.445.000**	
7	01	01	02.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Uni t	2 Unit	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memper k uat Stabilita s Polhukh a nkam Dan Transfor m asi Pelayan an Publik	Pengembang an Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	Meningkatk an barang inventaris dalam kondisi baik	2 Unit	30.900.000	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	01	01	02.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Uni t	3 Unit	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memper k uat Stabilita s Polhukh a nkam Dan Transfor m asi Pelayan an Publik	Pengembang an Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas Responsive dan Tangkas	Meningkatk an barang inventaris dalam kondisi baik	3 Unit	1.545.000	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	74 %	74 %	**1.184.605.000**	**1.184.605.000**	**1.184.605.000**						76 %	**108.895.000**	
7	**01**	**02**	02.01		**Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	100 %	100 %	**24.487.500**	**24.487.500**	**24.487.500**						100 %	**41.342.500**	

7	01	002	02.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	7 Laporan	16.447.500	16.447.500	16,447,500	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	persentase Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat	7 Laporan	17.447.500	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	01	002	02.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	140 Dokumen	140 Dokumen	8.040.000,00	8.040.000,00	8.040.000,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	persentase Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat	140 Dokumen	23.895.000	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	**01**	**02**	02.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	83 %	83 %	77.095.000	77.095.000	77.095.000						100 %	**46.942.500**	
7	01	02	02.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	26.047.500	26.047.500	26.047.500	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	Terselenggaranya kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	12 Laporan	20.895.000	Kantor Camat Tanjung Harapan

7	01	02	02.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	7 Laporan	51.047.500	51.047.500	51.047.500	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	Terselenggaranya kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	5 Laporan	26.047.500	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	**01**	**02**	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat	**100 %**	**100 %**	1.083.022.500	1.083.022.500	1.083.022.500						**100 %**	20.610.000	
7	**01**	**02**	02.04	**0003**	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	2 Laporan	2 Laporan	1.083.022.500	1.083.022.500	1.083.022.500	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	**Terselenggaranya Kegiatan Kewenangan lain yang dilimpahkan**	**2 Laporan**	20.610.000	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha **baru**	100 %	100%	**87.335.000**	**87.335.000**	**87.335.000**						100 %	**125.700.726**	
7	**01**	**03**	02.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	*Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana*	100 %	100 %	**87.335.000**	**87.335.000**	**87.335.000**						100 %	125.700.726	Kantor Camat Tanjung Harapan

7	01	03	02.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Lapora n	4 Lapo ran	**87.335.000**	**87.335.000**	**87.335.000**	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	4 Laporan	125.700.726	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	**65 %**	**65 %**	**375.907.500**	**375.907.500**	**375.907.500**						60 %	**310.250.000,**	
7	**01**	**04**	02.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	13.120.000	13.120.000	13.120.000						100 %	12.750.000	
7	01	04	02.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	13.120.000	13.120.000	13.120.000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan	1 Laporan	12.750.000	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	**01**	**04**	02.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	100 %	100 %	362.787.500	362.787.500	362.787.500						100 %	297.500.000	

7	01	04	02.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	362.787.500	362.787.500	362.787.500	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	12 Laporan	297.500.000	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/tersel esaikan di wilayah kecamatan	100 %	100 %	**141.391.400**	**141.391.400**	**141.391.400**						100 %	**51.676.906**	
7	**01**	**05**	02.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	jumlah Koordinasi/rapat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %	100 %	**141.391.400**	**141.391.400**	**141.391.400**						100 %	**51.676.906**	

7	01	005	02.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	25 Orang	59.576.400	59.576.400	59.576.400	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	Meningkatkan urusan pemerintah umum sesuai penugas kepala daerah	25 Orang	29.098.987	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	01	005	02.01	004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	35 Orang	50 rang	81.815.000,	81.815.000	121.815.000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	Meningkatkan urusan pemerintah umum sesuai penugas kepala daerah	50 Orang	22,577.919	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	100 %	**94.780.000**	**94.780.000**	**94.780.000**						100 %	**117.231.878**	

7	**01**	**06**	02.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Desa yang terfasilitasi	7 Desa	7 Desa	**94.780.000**	**94.780.000**	**94.780.000**						7 Desa	**117.231.878**	
7	01	06	02.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	26.047.500	26.047.500	26.047.500	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	Meningkatkan urusan pemerintah umum sesuai penugas kepala daerah	**7 Dokumen**	**12.263.698**	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	01	06	02.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	17.930.000	17.930.000	17.930.000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	Meningkatkan urusan pemerintah umum sesuai penugas kepala daerah	7 Dokumen	22.412.500	
7	01	06	02.01	0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	7 Laporan	7 Laporan	14.005.000	14.005.000	14.005.000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	Meningkatkan urusan pemerintah umum sesuai penugas kepala daerah	7 Laporan	22.170.750	Kantor Camat Tanjung Harapan

7	01	06	02.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	22.447.500	22.447.500	22.447.500	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	Meningkatkan urusan pemerintah umum sesuai penugas kepala daerah	7 Dokumen	38.980.350	Kantor Camat Tanjung Harapan
7	01	06	02.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		2 Dokumen	14.350.000	14.350.000	14.350.000	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Responsive dan Tangkas	Meningkatkan urusan pemerintah umum sesuai penugas kepala daerah	2 Dokumen	21.404.580	Kantor Camat Tanjung Harapan
TOTAL									**4.471.451.462**	**5.061.789.045**	**5.225.421.129**							**3.267.313.027**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Tanjung Harapan mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tanjung Aru, 19 Agustus 2024

Camat

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

H. Sudarsono, SP,. MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Jalan M. Dachri Desa Tanjung Haru Kode Pos : 76261

Email : tanjungharapan7621i@gmail.com Website : http//kectanjungharapan.paserkab.go.id/.paser.go

SURAT KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG HARAPAN

NOMOR : 289 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KANTOR TANJUNG HARAPAN TAHUN 2024

Menimbang :

a. Bahwa Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah;

b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dalam tahap persiapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2024 dengan Keputusan Camat Tanjung Harapan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
17. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2006 -2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.
20. Peraturan Bupati Paser Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kecamatan.

Memperhatikan : -

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada jalur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Renja Perubahan Tahun 2024 pada Kecamatan Tanjung Harapan.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Aru
Tanggal : 22 Juli 2024

Camat



H. Sudarsono, SP,. MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

Lampiran : Surat Keputusan Camat Tanjung Harapan
Nomor : 289 Tahun 2024
Tanggal : 22 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
KABUPATEN PASER TAHUN 2024

NO.	N A M A	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4
1	H. SUDARSONO, SP, MP	Camat	Ketua
2	AGUS SURYANTO, S.Sos	Sekretaris	Sekretaris
3	KTISTININGATI, SE	Kasubbag Perencanaan Program & Keuangan	Anggota
4	EDDY FAZRYYANTO, S.Sos	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Anggota
5	KASFUL ANWAR, SE	Kasi Pemerintahan dan Kependudukan	Anggota
6	SURENDRO, S. ST, M.Si	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
7	MOCH. AREIF YUDI ISMANTO, A.Md	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
8	FARID BUDI SUKOCO, SP	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
9	ZAINAL ABIDIN, M.Pd.I	Analis Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di : Tanjung Aru
Tanggal : 22 Juli 2024

Camat

H. Sudarsono, SP,. MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024



KANTOR KECAMATAN KUARO
KABUPATEN PASER

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **3**
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2024 ..... **9**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 9
2.2 Analisis Capaian Kinerja 14
2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **17**
3.1 Tujuan dan Sasaran 17
3.2 Review Terhdp Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 18
3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28
3.4 Rencana Program & Kegiatan Perubahan Renja Thn 2024 28
BAB IV PENUTUP **29**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kantor Kecamatan Kuaro, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kuaro sampai dengan Triwulan I Tahun 2024.

Selanjutnya Rancangan Akhir Perubahan Renja Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2024;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang incian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser dalam satu tahun;

2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Kantor Kecamatan Kuaro, proses penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Kuaro, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Kantor Kecamatan Kuaro, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kuaro

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kuaro Triwulan II Tahun 2024

Formulir E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KANTOR CAMAT KUARO
Periode Pelaksanaan: April s.d Juni Tahun 2024

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RKPD:

1. Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP — B
2. Jumlah temuan penyimpangan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan — 0 Temuan
3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat — 82
4. Angka Kriminalitas — 52%
5. Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan — 100%

NO	Sasaran	Program (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output))	Target Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Sampai dengan Kinerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun berkenan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan ini Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan ini Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah yang mengampu Kegiatan
										I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=9/8*100*11		13=9+11		14=13/7*100		15
1	dan terjangkaunya pelayanan kinerja perangkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEGIATAN SUB KEGIATAN	Indeks kepuasan Pelayanan Masyarakat	80%	20.000.000,00	80%	400.000.000,00	90,00	0.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	1.700.000.000,00	0%	-	0%	-	400%	2.100.000.000,00	1,22	2.700.000.000,00	152,27	28,57	
		Pemenuhan Hak Pelayanan dan Penyediaan Informasi yang Aktif Jumlah	Terlaksananya Pelayanan Informasi yang Aktif			20,00	72.500.000,00	20,00	20.000.000,00	5,00	-	5,00	2.700.000,00	5,00	-	10,00	-	40,00	2.700.000,00	40,00	77.500.000,00	-	-	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renja Kecamatan, Tahapan RKA, DPA, RKA, RKA, RKA)	5,00	40.200.000,00	5,00	0.000.000,00	1	-	1	1.770.000,00	0	-	0	-	2	1.770.000,00	200%	58.200.000,00	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD	Jumlah Dokumen RKA yang	5,00	12.000.000,00	5,00	0.000.000,00	1	-	1	1.770.000,00	0	-	0	-	2	1.770.000,00	7,00	15.620.000,00	-	-	
			Jumlah Dokumen RKA/DPPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-OPD	5,00		5,00										0%		5,00		-		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD	Jumlah Dokumen RKA - DA Perubahan	5,00	7.122.000,00	5,00	0.000.000,00		-			0	-	0	-	0	-	5,00	7.122.000,00	-	-	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD	5,00		5,00										0%		5,00		-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKIP) yang tersusun	5,00	2.075.000,00	5,00	0.000.000,00		-	1	1.225.000,00	0	-	0	-	1	1.225.000,00	5,00	4.600.000,00	-	-	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	5,00		5,00										0%		5,00		-		
		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Kinerja (LKIP, Realisasi RENJA, SPIP, Laporan PAPBKN)													0%				-	-	
			Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah													0%				-		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terhadap jumlah kegiatan SKPD							0%	527.120.013,00	0%	1712.160.000,00	0%	-	0%	-	0%	2.239.280.013,00	0,32	7.040.360.000,00	-	-	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16,00	400.000.000,00	16,00	0.000.000,00	5	0.000.000,00	5	1.000.000.000,00	0	-	0	-	5	2.176.000.000,00	31,25	6.000.000.000,00	-	-	
			Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16,00		16,00										0%		31,25		-		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Anjabaru OPD	Dokumen Anjabar (DPM, SPP)	120,00	600.000.000,00	120,00	922.000.000,00	25	0.000.000,00	25	100.000.000,00	0	-	0	-	50	200.000.000,00	13%	600.000.000,00	-	-	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Anjabaru OPD	120,00		10,00										0%		120,00		-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Laporan keuangan	20,00	0.000.000,00	10,00	12.000.000,00		-		1.000.000,00		-	0,00	-	1,00	1.000.000,00	10,00	12.000.000,00	-	-	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	20,00		20,00										0%		20,00		-		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terhadap jumlah pegawai yang													0%				-	-	
			Jumlah																				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang													0%				-	-	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapan													0%				-		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terhadap jumlah kegiatan							0%	0.000.000,00	0%	0.000.000,00	0%	-	0%	-	0%	167.120.000,00	0,24	480.000.000,00	-	-	
		Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen yang	10,00	2.000.000,00	10,00	2.400.000,00		-						-	0	-	10,00	2.100.000,00	-	-	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1,00		1,00										0%		1,00		-		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor						-						-	0%	-			-	-	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1,00		1,00										0%		1,00		-		



3		PROGRAM PENGELOLAAN ASET PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nama Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	00	1.663.827.870,00		1.678.446.830,00	101%	1.811.204.000,00	20%	119.120.000,00	20%	177.040.000,00	0%	-	0%	-	40%	178.160.000,00	40%	177.078.830,00	0,00	49,98	
			Nama Kegiatan Kegiatan Pendukung															0%		-		-		
		Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang Optimal, Tertib, Akuntabel, dan Transparan di Kecamatan	Presentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan yang Optimal, Efektif dan Efisien Pada Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan			100%	212.918.200,00	100%	364.320.000,00	19%	69.600.000,00	35%	71.040.000,00	0%	-	54%	-	36%	140.640.000,00	1,79	152.976.200,00	-	-	
		Fasilitasi Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang Difasilitasi			240,00	212.093.200,00	240,00	340.320.000,00	60,00	40.560.000,00	65,00	62.400.000,00	0,00	-	-	-	125,00	116.224.000,00	379,00	340.208.200,00	-	-	
			Jumlah Laporan Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			240,00		240,00										0%		379,00		-		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan			0,00	-	0,00	-	1,00	-	1,00	44.640.000,00	-	-	-	-	2,00	44.640.000,00	2,00	44.640.000,00	-	-	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			0,00		0,00										0%		-		-		
		Koordinasi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Presentase Koordinasi pemerintahan Kecamatan dan Lainnya			100,00	662.015.190,00	100%	529.000.000,00	10%	100.000.000,00	10%	100.000.000,00	0%	-	0%	-	21%	211.000.000,00	0,31	384.139.190,00	-	-	
		Koordinasi dan Konsultasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sosial dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Sarana Prasarana dan			1,00	662.015.190,00	1,00	529.000.000,00		100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	-	-	-	-	1	211.000.000,00	4,00	384.139.190,00	-	-	
			Dinas Terkait/Instansi Lain			4,00		4,00										0%		4,00		-		
			Pihak Ketiga/Instansi yang Dibina			1,00		1,00										0%		1,00		-		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Konsultasi dengan Perangkat Daerah Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sosial dan Prasarana Pelayanan Umum			6,00		6,00										0%		6,00		-		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Optimal dan Terpadu di Kecamatan	Presentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang				116.276.440,00	100%	35.900.000,00		3.720.000,00		-	0%	-	0%	-	0%	17.000.000,00	-	113.996.440,00	-	-	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelayanan Terlibat Lain			15,00	116.276.440,00	15,00	35.900.000,00	3,00	3.720.000,00			0	-	-	-	1	17.000.000,00	15,00	113.996.440,00	-	-	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			15,00		12,00										0%		15,00		-		
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase kasus konflik sosial yang ditangani Kecamatan dan Kelurahan	100	207.270,00		74.136.710,00	100,00	212.300.750,00		-	7%	17.100.000,00	0%	-	0%	-	7%	17.100.000,00	7%	91.236.710,00	0,07	2,54	
		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan				74.136.710,00	0,00	212.300.750,00	0,00	-	0,00	17.100.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	17.100.000,00	0,00	91.236.710,00	-	-	
		Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan			1,00	40.364.400,00	1,00	149.722.400,00		-				-		-	0%	-	1,00	40.364.400,00	-	-	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan			100,00		100,00										0%		100,00		-		
		Pembinaan Kelembagaan Ketahanan dan Ketrampilan, Kesatuan Bangsa, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Memelihara Stabilitas Kemanusian Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan pembinaan dilaksanakan			4,00	4.469.000,00	4,00	6.930.000,00	1,00	-	1,00	-	-	-	0	-	2	-	3,00	6.469.000,00	-	-	
			Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan kondisikan Antar Etnis seperti Ras, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Memelihara Stabilitas Kemanusian Lokal, Regional, dan Nasional			120,00		120,00										0%		120,00		-		
		Pelaksanaan Pemberdayaan pemerintahan yang Dalam pengelolaan Kewenangan daerah dan Desa Kelurahan dan Instansi Vertikal	Jumlah kegiatan pembinaan dilaksanakan			1,00	7.312.390,00	1,00	35.710.350,00		-	1,00	17.100.000,00	-	-	0	-	1	17.100.000,00	2,00	24.472.390,00	-	-	
			Jumlah Dokumen Bentuk Bagan Pemerintahan yang Bisnis Mempunyai Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			12,00		12,00										0%		12,00		-		
5	Meningkatnya Pengelolaan Desa yang Berkualitas	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan konflik dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	100	1.410.264.010,00		171.400.000,00	100%	667.752.520,00	10%	43.000.000,00	10%	110.000.000,00	0%	-	0%	-	20%	81.000.000,00	20%	913.230.000,00	0,28	38,87	
			Persentase Kecamatan yang melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban															0%		20,00		-		
		Koordinasi dengan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			100,00	166.400.000,00	100%	80.187.520,00	10%	43.000.000,00	10%	110.000.000,00	0%	-	0%	-	20%	81.000.000,00	20,00	142.230.000,00	-	-	
		Meningkatkan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan			12,00	91.400.000,00	12,00	484.171.520,00	2,00	43.000.000,00	3,00	110.000.000,00	0	-	0	-	5	81.000.000,00	10,00	48.230.000,00	-	-	
			Jumlah Laporan Hasil Meningkatkan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12,00		12,00										0%		10,00		-		
		Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Presentase Jumlah Kegiatan			12,00	66.264.000,00	12,00	47.796.000,00	2,00	-	3,00		-	-	0	-	5	-	19,00	66.264.000,00	-	-	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Kelembagaan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			12,00		12,00		1,00		1,00				0		0		19,00		-		
		Koordinasi dan Pembinaan dan Pengelola Pemilihan Kepala Desa	Presentase Kegiatan Pembinaan dan Pengelola Pemilihan Daerah dan Perangkat			100,00	5.340.000,00	100,00	5.765.000,00		-			0%		0%		0%			5.340.000,00	-	-	
		Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pengelola di Bidang Pemajuan Pendapat Pemerintah Undangan Kesatuan Republik Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi Bidang pengelolaan pemerintah yang dilaksanakan			6,00	5.340.000,00	6,00	5.765.000,00	1,00	-	1,00	-	0	-	0	-	2	-	0,00	5.340.000,00	-	-	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Bidang dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pengelola di Bidang Pemajuan Pendapat Pemerintah Undangan Kesatuan Republik Negara Republik Indonesia			6,00		6,00		1,00		1,00						2		0,00		-		

8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100	[illegible]		[illegible]	100%	[illegible]			-	0%	[illegible]	0%	-	0%	-	0%	[illegible]	0,00	[illegible]		[illegible]							
		[illegible]	[illegible]				[illegible]	0,00	[illegible]				0%	[illegible]	0%	-	0%	-	0%	[illegible]	0,00	[illegible]		[illegible]							
		Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan			6,00	20.712.000,00	10,00	21.771.900,00		-	0,00	0.840.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0.840.000,00	22,00	28.99.000,00	-	-								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			0,00		0,00												0,00		-									
		Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kawasan Perdesaan	Jumlah kegiatan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan (UPTD, PDK,			0,00	426.120.000,00	0,00	200.701.200,00		-		6.000.000,00	0	-		-	0%	6.000.000,00	0,00	6210.16.000,00	-	-								
			Jumlah Laporan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Kawasan di Wilayah Kecamatan			0,00		0,00												0,00		-									
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang	100	100.172.742,00	30	437.160.000,00	100	92.000.000,00			17%	157.000.000,00	0%	-	0%	-	17%	457.000.000,00	30,17	344.140.000,00	30,17	94,12								
		Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Perdesaan	Jumlah partisipasi Masyarakat dalam	30	2.811.109,00	30	2.963.000,00	30	2.700.000,00	10,00	-	60,00	-	-	-		-	20,00	-	50,33	2.160.000,00	166,67	79,83								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kawasan					0,00														-									
		Pembangunan Balai dan Prasarana Kelurahan/Kelurahan Kuaro	Jumlah balai dan prasarana kelurahan yang	1	401.261.716,00	2	297.796.900,00	1	400.000.000,00						-		-	-	-	0,00	297.796.900,00	66,67	74,12								
			Jumlah Balai dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1,00														-									
		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan/Kelurahan Kuaro	Terbentuknya 10 Program PKK	12	179.361.995,00	12	35.277.900,00	12	916.996.000,00	2,00		2,00	167.000.000,00	-	-		-	4,00	167.000.000,00	16,33	634.776.000,00	133,33	392,40								
			Jumlah kunjungan Lapo RT yang Terbentuk	20		20		20												20,00		100,00									
			Jumlah Pelatihan dan Dinas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					5,00														-									
		Evaluasi Kinerja Kelurahan Kuaro	Terlaksananya Rapat Kelurahan	10	5.765.716,00	10	6410.900,00	10	5.000.000,00						-		-	-	-	10,00	44.10.000,00	100,00	76,42								
			Jumlah Laporan Hasil Rakyat Kelurahan					10,00														-									

Rata-rata capaian kinerja (%)	
Predikat kinerja	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Musrenbang berikutnya*):	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):	

Disusun
Kuaro, 09 Juli 2024

[illegible] KUARO

[illegible] ASTAMAN, S.STP
NIP. 19881127 200802 1 001

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Tahun 2024 Semester I dapat dilihat dari table diatas sesuai dari evaluasi Renja Triwulan II E.81 Tahun 2024

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kuaro

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Dan Fungsi Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kecamatan mempunyai fungsi:

a) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Pemerintahan Umum dan otonomi daerah;
b) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
c) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
h) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan;
i) Penyusunan program, pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Kantor Kecamatan Kuaro adalah:

1. Pelayanan Kependudukan
2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Pelayanan Pertanahan

Upaya Kantor Kecamatan Kuaro dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kantor Kecamatan Kuaro Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Kantor Kecamatan Kuaro terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Kuaro sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	0	0	0	0		
Sasaran: 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat	50.01	62.00	63.00	70.01	70.01	62,63	99,41
2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	80	80	85	85	90	86,74	102,04
3) Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	15	14	13	12	11	5,7	43,84
Tujuan Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0		
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Kuaro sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat” hampir mencapai target, dimana realisasinya sebesar 62,63 dari target sebesar 63,00 dengan capaian kinerja sebesar 99,41 %.
b. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan”, mencapai target sebesar 102,04 dibulan Maret 2024
c. Sasaran “Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Menurunnya Angka Kriminalitas”, Belum mencapai target, dimana realisasinya adalah 5,7.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan;
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait;
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai;
4. Tersedianya SOP pelayanan.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
2. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Kuaro sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			
Sasaran: 1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat	Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat	63.00	63.00
2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat selama 1 Tahun	85	85
3.Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	Jumlah peristiwa kriminal/gangguan keamanan/ketertiban selama setahun dibagi jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000	13	13
Tujuan: Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan			
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif/100 %	100%	100%

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu "PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT" yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Penguatan Ekonomi Daerah;
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian;
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif;
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur ;
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana;
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan;
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kuaro mendukung pencapaian sasaran ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-10 yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
3. Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif;
4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Kantor Kecamatan Kuaro telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2
Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024 Kantor Kecamatan Kuaro

No	Rancangan Akhir Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kantor Kecamatan Kuaro dan Kelurahan Kuaro				8.205.277.848					9.404.552.958	
	Urusan Kewilayahan										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kuaro	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76	5.619.928.648	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kuaro	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76	6.466.140.779	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kuaro	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	63.00	16.048.500	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kuaro	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	70.01	34.800.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kuaro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	5	5.160.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kuaro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	5	8.700.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kuaro	Jumlah Dokumen RKA Murni	5	5.160.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kuaro	Jumlah Dokumen RKA Murni	5	8.700.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Kec. Kuaro	Jumlah Dokemen RKA, LK Perubahan	5	2.378.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Kec. Kuaro	Jumlah Dokemen RKA, LK Perubahan	5	8.700.000	

	Perubahan RKA- SKPD					Perubahan RKA- SKPD					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kuaro	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKjIPyang tersusun)	5	3.350.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kuaro	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKjIPyang tersusun)	5	8.700.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kuaro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA)	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kuaro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA)	0	0	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kec. Kuaro**	Persentase LHP nihil	100	5.058.238.226	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kuaro	Persentase LHP nihil	100	4.887.453.226	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kuaro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	4.544.729.306	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kuaro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	4.544.749.306	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kuaro/Lurah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SPP,SPM,E-Billing)	50 Dokumen	504.523.920	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kuaro/Lurah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SPP,SPM,E-Billing)	338 Dokumen	330.523.920	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kuaro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	8.985.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kuaro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	12.180.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kec.Kuaro**	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70 %	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kec.Kuaro**	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70 %	53.425.735	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Kuaro	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	54 Orang	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Kuaro	Jumlah pegawai yang diperbarui datanya	54 Orang	53.425.735	

	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec.Kuaro/Lurah**	Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	100 %	345.952.050	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec.Kuaro/Lurah**	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.080.795.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kuaro/Lurah	Jumlah komponen yang disediakan	4 Paket	2.400.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kuaro/Lurah	Jumlah komponen yang disediakan	4 Paket	2.400.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kuaro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Unit	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kuaro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 unit	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kuaro/Lurah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	126.220.050	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kuaro/Lurah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	747.559.200	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kuaro/Lurah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.276.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kuaro/Lurah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	5.276.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan(Kelurahan Kuaro)	Kec.Kuaro/Lurah	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundanagan-undangan	360 Eksempar	2.300.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan(Kelurahan Kuaro)	Kec.Kuaro/Lurah	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundanagan-undangan	360 Eksempar	2.300.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kuaro/Lurah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	199.756.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kuaro/Lurah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	323.260.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kec.Kuaro**	Persentase barang inventaris peralatan	N/A	-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kec.Kuaro**	Persentase barang inventaris peralatan	N/A	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kuaro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan	Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kuaro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan	Unit	-	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec.Kuaro/Lurah**	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	166.289.872	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec.Kuaro/Lurah**	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	203.496.618	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kuaro/Lurah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80 Laporan	5.778.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kuaro/Lurah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80 Laporan	5.417.029	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kuaro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	160.511.872	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kuaro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	**198.079.589**	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec.Kuaro/Lurah**	Persentase Pemeliharaan BMD		33.400.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec.Kuaro/Lurah**	Persentase Pemeliharaan BMD		206.170.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kuaro/Lurah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	450.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kuaro/Lurah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	450.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kuaro/Lurah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.450.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kuaro/Lurah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	5.720.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kuaro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	4 Unit	31.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kuaro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	4 Unit	200.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kuaro	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90	960.052.880	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kuaro	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90	**808.304.680**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	**Kec.Kuaro**	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	100%	258.025.680	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	**Kec.Kuaro**	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	100%	263.725.680	

	yang ada di Kecamatan		Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			yang ada di Kecamatan		Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kuaro	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	246.525.680	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kuaro	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	250 Laporan	246.525.680	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kuaro/Lurah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	11.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kuaro/Lurah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15 Laporan	17.200.000	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	100%	684.827.200	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	100%	528.059.000	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Kuaro	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	8 Laporan	684.827.200	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Kuaro	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	8 Dokumen	528.059.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kec. Kuaro**	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	17.200.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kec. Kuaro**	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	**16.520.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Kuaro	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15 Laporan	17.200.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Kuaro	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15 Laporan	16.520.000	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kuaro	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	100%	1.034.863.300	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kuaro	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	100%	1.129.847.995	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kec.Kuaro**	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100%	221.063.300	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kec.Kuaro**	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100%	222.435.050	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kuaro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	4 Lembaga	21.733.800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kuaro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	13 Laporan	21.733.800	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kuaro	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	199.329.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kuaro	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	280 Lembaga Kemasyarakatan	200.701.250	
	Kegiatan Perberdayaan Kelurahan	**Lurah**	Presentasi Kegiatan	100%	813.800.000	Kegiatan Perberdayaan Kelurahan	**Lurah**	Presentasi Kegiatan	100%	907.412.945	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Lurah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	30 Lembaga	2.700.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Lurah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	30 Lembaga	2.822.400	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Kelurahan)	Lurah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ter bangun	1 Unit	400.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Kelurahan)	Lurah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ter bangun	1 Unit	400.000.000	
	Perberdayaan masyarakat di Kelurahan(Kelurahan Kuaro)	**Lurah**	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Poskmas	406.100.000	Perberdayaan masyarakat di Kelurahan(Kelurahan Kuaro)	**Lurah**	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Poskmas	485.300.000	
	Evaluasi Kelurahan (Kelurahan Kuaro)	**Lurah**	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kelurahan (Kelurahan Kuaro)	**Lurah**	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10 Laporan	19.290.545	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kuaro	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan	100%	384.925.120	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kuaro	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan	100%	657.732.520	

			ketertiban					ketertiban			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kec.Kuaro**	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	379.160.120	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kec.Kuaro**	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	651.967.520	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kuaro	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	12 Laporan	300.334.320	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kuaro	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	12 Laporan	584.171.520	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kuaro	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13 Laporan	78.825.800	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kuaro	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13 Laporan	67.796.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kec.Kuaro**	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	5.765.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kec.Kuaro**	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	100%	5.765.000	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kuaro	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9 Laporan	5.765.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kuaro	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	5.765.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kuaro	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah	100%	79.343.750	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kuaro	**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah**	100%	152.365.750	

			kecamatan					**kecamatan**			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	79.343750	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	152.365.750	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	Kec. Kuaro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kali	49.722.500	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	Kec. Kuaro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kali	49.722.500	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Kuaro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	120 Orang	6.925.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Kuaro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	120 Orang	6.925.000	
	Pelaksanaan Semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Kec. Kuaro	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak	12 Dokumen	22.696.250	Pelaksanaan Semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Kec. Kuaro	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak	13 Dokumen	95.718.250	

			Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kuaro	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100%	126.144.150	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kuaro	**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu**	100%	**146.679.150**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kec.Kuaro**	Jumlah Desa yang terfasilitasi	6 Desa	126.144.150	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kec.Kuaro**	**Jumlah Desa yang terfasilitasi**	6 Desa	146.679.150	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kuaro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	21.581.750	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kuaro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	21.581.750	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kuaro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36 Dokumen	50.437.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kuaro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	74.167.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Kuaro	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	41.240.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Kuaro	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 Dokumen	41.240.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Kuaro	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4 Dokumen	12.885.400	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Kuaro	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	6 Dokumen	9.690.400	

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Perubahan Rancangan RKPD 2024 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kantor Kecamatan Kuaro baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

Tabel. 3.3
Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 pada Kantor Kecamatan Kuaro

No	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Nama OPD										
	Urusan ……..										
1	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										
2.	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										
2.	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										

NIHIL

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Kecamatan Kuaro pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL TC.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN PASER

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KUARO

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Kec. Kuaro			APBD		74%	5.155.144.025
7	01	001	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	Kec. Kuaro			APBD		100	15.725.650
					Persentase capaian sasaran strategis perangkat daerah						92	
					Kualitas pelaksanaan SPIP Perangkat Daerah						3	
					Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten				APBD		79	
					Persentase rata-rata capaian area perubahan RB PD				APBD		70	
7	01	001	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	Kec. Kuaro	5 Dokumen	4.350.000	APBD		5 Dokumen	5.175.000
7	01	001	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kuaro	5 Dokumen	5.160.000	APBD		5 Dokumen	5.175.000
7	01	001	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Kuaro	5 Dokumen	2.900.000	APBD		5 Dokumen	2.000.650
7	01	001	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Hasil Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kuaro	5 Laporan	0	APBD		5 Laporan	3.375.000
7	01	001	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kec. Kuaro	5 Laporan	2.900.000	APBD			

7	01	001	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti Persentase LHP nihil	Kec. Kuaro	100% 100%		APBD		100% 100%	4.819.980.863
7	01	001	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kuaro	28 Orang/bulan	7.649.620.504	APBD		28 Orang/bulan	4.544.746.743
7	01	001	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SPP,SPM,E-Billing)	Kec. Kuaro	338 Dokumen	246.807.040	APBD		338 Dokumen	266.279.120
7	01	001	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan rekonsiliasi keuangan: 12 dok, CALK: 1 dok, Prognosis: 2 dok)	Kec. Kuaro	15 Laporan	4.060.000	APBD		15 Laporan	8.955.000
7	01	001	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	Kec. Kuaro	100%		APBD		100%	184.925.640
7	01	001	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Kuaro	26 Paket	354.480.589	APBD		26 Paket	102.258.490
7	01	001	2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Kuaro	10 Paket	1.000.000	APBD		10 Paket	10.399.950
7	01	001	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kuaro	110 Laporan	312.635.000	APBD		110 Laporan	72.267.200
7	01	001	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Kec. Kuaro	100%		APBD		100%	134.511.872
7	01	001	2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kuaro	325 laporan	4.000.000	APBD		325 laporan	5.000.000
7	01	001	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Kuaro	12 Laporan	150.000.000	APBD		12 Laporan	129.511.872
7	01	003		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kec. Kuaro	80%		APBD		80%	952.347.335
7	01	003	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Kuaro	100%		APBD		100%	250.320.080

				Kecamatan								
7	01	003	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kuaro		111.503.600	APBD		250 Laporan	250.320.080
				Pelaksanaan Fasilitasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan		Kec. Kuaro	12 Laporan	140.503.600	APBD			
7	01	003		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kec. Kuaro	100%		APBD		100%	684.827.255
7	01	003	2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Kuaro	12 Dokumen	354.480.589	APBD		12 Dokumen	684.827.255
7	01	003	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kuaro	100%		APBD		100%	17.200.000
7	01	003	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Kuaro	15 Dokumen	28.080.000	APBD		15 Dokumen	17.200.000
7	01	006		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	Kec. Kuaro	90%		APBD		90%	235.212.226
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Kec. Kuaro	100%		APBD		100%	132.063.606
7	01	006	2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kuaro	280 Lembaga Kemasyarakatan	58.417.055	APBD		280 Lembaga Kemasyarakatan	24.001.000
7	01	006	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kuaro	13 Laporan	273.640.000	APBD		13 Laporan	211.211.226
7	01	004		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	Kec. Kuaro			APBD		55%	384.683.320
7	01	004	2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kuaro	100%		APBD		100%	379.028.320
7	01	004	2	Sinergitas dengan Kepolisian	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	Kec.	12 Laporan	620.068.389	APBD		12 Laporan	300.604.320

				Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kuaro						
7	01	004	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kuaro	13 Laporan	66.086.718	APBD		13 Laporan	78.424.000
7	01	004	2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Kuaro	100%		APBD		100%	5.655.000
7	01	004	2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kuaro	5 Laporan	8.600.000	APBD		5 Laporan	5.655.000
7	01	005		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	Kec. Kuaro	100%		APBD		100%	86.629.227
7	01	005	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	Kec. Kuaro	2 Kegiatan		APBD		2 Kegiatan	86.629.227
7	01	005	2	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Kuaro	50 Orang	150.000.000	APBD		50 Orang	48.091.727
7	01	005	2	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Kuaro	8 Orang	7.150.000	APBD		8 Orang	6.165.000

7	01	005	2	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanan oleh Instansi Vertikal	Kec. Kuaro	13 Dokumen	238.047.135	APBD		13 Dokumen	32.372.500
7	01	006		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		Kec. Kuaro	100%		APBD		100%	176.160.996
7	01	006	2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec. Kuaro	100%		APBD		100%	198.273.105
7	01	006	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kuaro	12 Dokumen	348.682.889	APBD		12 Dokumen	21.302.125
7	01	006	2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kuaro	50 Dokumen	158.624.045	APBD		50 Dokumen	36.471.200
7	01	006	2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Kuaro	5 Dokumen	0	APBD		5 Dokumen	127.345.000
7	01	006	2	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Kuaro	12 Dokumen	16.480.000	APBD		6 Dokumen	13.154.780

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kantor Kecamatan Kuaro mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Kuaro, 19 Agustus 2024

Camat



Finandar Astaman, S.STP

Pembina /IVa

NIP.198611272006021001

RENJA PERUBAHAN
Perangkat Daerah Tahun 2024



KANTOR CAMAT LONG IKIS
KABUPATEN PASER

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Long Ikis Tahun 2024 merupakan tahun kedua dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalan Renstra 2021-2026, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Kantor Camat Long Ikis Tahun Anggaran 2023. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Long Ikis, 20 September 2024

Plt. Camat Long Ikis,

Husni, S.Sos

Pembina

NIP. 196710081982031015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 ..... **8**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 8
2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Long Ikis 15
2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024 21
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **22**
3.1 Tujuan dan Sasaran 22
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 23
3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32
3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024 32
BAB IV PENUTUP **50**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Long Ikis Semester I Tahun 2024 9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Long Ikis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 18
Tabel 3.1 Target Tahunan Tujuan dan Sasaran 22
Tabel 3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kantor Kecamatan Long Ikis 24
Tabel 3.3 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 pada Kantor Kecamatan Long Ikis 32
Tabel 3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangkapendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung

dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kantor Kecamatan Long Ikis, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Long Ikis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

25. Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2023 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2023 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2024 Tentang P APBD TA 2024, Tanggal 20 September 2024;
28. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Penjabaran P APBD TA 2024, Tanggal 20 September 2024.
29. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Tahun 2024 ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Kantor Kecamatan Long Ikis, proses penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Long Ikis, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Kantor Kecamatan Long Ikis, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kantor Kecamatan Long Ikis, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Long Ikis

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Long Ikis Sampai Dengan Triwulan IITahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat: 72
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat: 84
3. Angka Kriminalitas: 50
4. Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan: 100%

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
					36.397.122.199		14.832.253.236		7.806.243.645		1.281.010.220		2.631.660.193		3.912.670.413		18.744.923.649		175,8	
		KECAMATAN			36.397.122.199		14.832.253.236		7.806.243.645		1.281.010.220		2.631.660.193		3.912.670.413		18.744.923.649		175,8	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (Indeks)	80	28.988.464.105	74,83	10.794.810.346	74	5.895.062.463	0	1.048.421.020	0	2.155.008.193	0	3.203.429.213	74,83	13.998.239.559	93,54	48,29	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD (Persen)	500	101.741.700	100	37.635.804	100	18.182.604	25	7.890.000	25	0	50	7.890.000	150	45.525.804	30	44,75	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25	59.428.000	13	20.084.200	5	11.000.000	1	4.715.000	1	0	2	4.715.000	15	24.799.200	60	41,73	Kantor Camat Long Ikis
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	25	42.313.700	11	17.551.604	5	7.182.604	2	3.175.000	1	0	3	3.175.000	14	20.726.604	56	48,98	Kantor Camat Long Ikis

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti; Persentase LHP nihil (Persen)	500	26.688.328.852	200	9.906.230.831	100	4.997.817.898	0	941.699.970	0	1.852.466.991	0	2.794.166.961	200	12.700.397.792	40	47,59	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.800	24.913.602.057	387	9.190.098.759	360	4.644.374.934	112	849.015.558	112	1.756.589.783	224	2.605.605.341	611	11.795.704.100	34	47,35	Kantor Camat Long Ikis
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1301	1.762.715.747	452	711.750.372	270	351.252.064	50	91.444.412	70	95.877.208	120	187.321.620	572	899.071.992	44	51,00	Kantor Camat Long Ikis
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (dokumen)	75	12.011.048	27	4.381.700	15	2.190.900	4	1.240.000	4	-	8	1.240.000	35	5.621.700	47	46,80	Kantor Camat Long Ikis
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai > 100 (Persen)	100	47.950.000	80	19.319.300	0	23.309.700	0	0	0	17.889.500	0	17.889.500	80	37.208.800	80	77,60	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beseta Atribut Kelengkapan	1	22.500.000	0	0	1	15.000.000	0	0	1	14.039.500	1	14.039.500	1	14.039.500	100	62,40	Kantor Camat Long Ikis
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	60	25.450.000	12	19.319.300	12	8.309.700	3	0	3	3.850.000	6	3.850.000	18	23.169.300	30	91,04	Kantor Camat Long Ikis
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat (Persen)	100	888.387.815	75	464.454.851	100	252.308.057	0	21.505.400	0	83.588.800	0	105.094.200	75	569.549.051	75	64,11	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	23.420.000	1	9.290.880	3	4.688.000	0	0	0	0	0	0	1	9.290.880	10	39,67	Kantor Camat dan Lurah Long Ikis
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	46.294.865	8	104.041.758	2	44.008.000	1	14.522.900	0	39.685.100	1	54.208.000	9	158.249.758	180	341,83	Kantor Camat dan Lurah Long Ikis

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	50	204.579.532,50	8	97.924.353	11	37.317.600	0	6.982.500	4	16.291.900	4	23.274.400	12	121.198.753	24	59,24	Kantor Camat dan Lurah Long Ikis
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	42.848.745	1	14.499.100	4	5.985.900	0	0	0	1.153.800	0	1.153.800	1	15.652.900	10	36,53	Kantor Camat dan Lurah Long Ikis
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	807	571.244.672,50	242	238.698.760	166	160.308.557	0	0	24	26.458.000	24	26.458.000	266	265.156.760	33	46,42	Kantor Camat dan Lurah Long Ikis
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik (Persen)	90	113.555.000	75	14.305.000	80	50.620.000	0	39.454.400	40	43.550.000	40	83.004.400	115	97.309.400	128	85,69	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2	64.055.000	1	14.305.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14.305.000	50	22,33	Kantor Camat Long Ikis
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	49.500.000	0	0	3	50.620.000	3	39.454.400	2	43.550.000	5	83.004.400	5	83.004.400	100	167,69	Kantor Lurah Long Ikis
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan (Persen)	100	675.305.550	100	304.071.270	100	176.569.204	25	35.431.250	25	56.990.902	50	92.422.152	150	396.493.422	150	58,71	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	375.005.550	12	156.171.270	12	100.969.204	3	18.431.250	3	19.990.902	6	38.422.152	18	194.593.422	30	51,89	Kantor Camat dan Lurah Long Ikis
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	300.300.000	12	147.900.000	12	75.600.000	3	17.000.000	3	37.000.000	6	54.000.000	18	201.900.000	30	67,23	Kantor Camat Long Ikis

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik (Persen)	75	473.195.188	60	48.793.290	65	376.255.000	0	2.440.000	30	100.522.000	30	102.962.000	90	151.755.290	120	32,07	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	56.375.000	2	12.243.290	4	104.715.000	0	0	1	45.802.000	1	45.802.000	3	58.045.290	15	102,96	Kantor Camat Long Ikis
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	33	87.200.000	4	36.550.000	8	11.540.000	1	2.440.000	3	4.720.000	4	7.160.000	8	43.710.000	24	50,13	Kantor Camat dan Lurah Long Ikis
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	7	329.620.188	0	0	4	260.000.000	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	14	15,17	Kantor Camat Long Ikis
2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (%)**	**80**	1.237.904.286	79,67	**1.129.644.570**	**74**	**497.813.076**	**0**	**18.720.000**	**0**	**46.800.000**	**0**	**65.520.000**	**79,67**	**1.195.164.570**	**99,59**	**96,55**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Persen)	100	499.056.780	100	221.550.000	100	109.520.000	25	9.400.000	25	23.500.000	50	32.900.000	150	254.450.000	150	50,99	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	15	499.056.780	3	221.550.000	3	109.520.000	0	9.400.000	0	23.500.000	0	32.900.000	3	254.450.000	20	50,99	Kantor Camat Long Ikis
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Persen)	100	738.847.506	100	908.094.570	100	388.293.076	25	9.320.000	25	23.300.000	50	32.620.000	150	940.714.570	150	127,32	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	10	738.847.506	4	908.094.570	2	388.293.076	0	9.320.000	0	23.300.000	0	32.620.000	4	940.714.570	40	127,32	Kantor Camat Long Ikis
3		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok**	**90**	**3.723.418.769**	**0**	**2.000.457.260**	**80**	**888.514.106**	**0**	**128.000.700**	**0**	**214.163.000**	**0**	**342.163.700**	**0,00**	**2.342.620.960**	**0,00**	**62,92**	

		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (Persen)	100	1.028.418.769	100	1.051.085.010	100	288.512.060	25	5.395.000	25	36.420.000	50	41.815.000	150	1.092.900.010	150	106,27	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)	25	137.290.000	5	5.883.060	5	16.170.060	5	3.595.000	0	-	5	3.595.000	10	9.478.060	40	6,90	Kantor Camat Long Ikis
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	15	891.128.769	4	1.045.201.950	3	272.342.000	0	1.800.000	1	36.420.000	1	38.220.000	5	1.083.421.950	33	121,58	Kantor Camat Long Ikis
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terlaksana (Persen)	100	2.695.000.000	100	949.372.250	100	600.002.046	25	122.605.700	25	177.743.000	50	300.348.700	150	1.249.720.950	150	46,37	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	15	60.000.000	5	16.110.000	3	4.110.000	3	2.150.000	0	1.935.000	3	4.085.000	8	20.195.000	53	33,66	Kantor Lurah Long Ikis
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29	1.500.000.000	0	0	6	30.000	0	0	0	39.760.000	0	39.760.000	0	39.760.000	0	2,65	Kantor Lurah Long Ikis
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	20	1.075.000.000	4	910.547.250	4	584.912.046	4	120.455.700	0	126.852.000	4	247.307.700	8	1.157.854.950	40	107,71	Kantor Lurah Long Ikis
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	4	60.000.000	1	22.715.000	1	10.950.000	0	0	0	9.196.000	0	9.196.000	1	31.911.000	25	53,19	Kantor Lurah Long Ikis

6		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat**	**100**	**699.587.400**	**50**	**186.085.300**	**100**	**140.324.000**	**100**	**12.648.500**	**100**	**27.600.000**	**200**	**40.248.500**	**250,00**	**226.333.800**	**250,00**	**32,35**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi (Desa)	125	699.587.400	25	186.085.300	25	140.324.000	0	12.648.500	0	27.600.000	0	40.248.500	25	226.333.800	20	32,35	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	25	57.717.400	5	14.315.000	5	7.680.000	0	0	0	0	0	0	5	14.315.000	20	24,80	Kantor Camat Long Ikis
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	375	427.243.500	75	158.830.000	75	81.448.700	0	12.648.500	0	27.600.000	0	40.248.500	75	199.078.500	20	46,60	Kantor Camat Long Ikis
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	15	54.626.500			4	43.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kantor Camat Long Ikis
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	12	160.000.000	3	12.940.300	3	8.045.300	0	0	0	0	0	0	3	12.940.300	25	8,09	Kantor Camat Long Ikis
Rata-rata capaian kinerja (%)														**31,33**	**3.912.670.413,00**	**119,13**	**18.744.923.649,00**	**104,19**	**64,52**	

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi keuangan sebesar Rp. 3.912.670.413,00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga belas rupiah) dari total pagu APBD sebesar Rp. 8.571.069.957,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sebesar 45,64%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Kantor Kecamatan Long Ikis sebesar 31,33% dengan predikat kinerja sangat rendah, yaitu ≤50%. Predikat ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 4 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 3 indikator capaian kinerja 0%-50% = 26 indikator.

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Long Ikis

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Paser, maka Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Tugas : melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

Fungsi :
1) pengoordinasian penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan otonomi daerah;
2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4) pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

6) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7) pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
8) pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan; dan
9) penyusunan program, pembinaan adminsitrasi dan pengelolaan ketatausahaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Kantor Kecamatan Long Ikis adalah:

1. Pelayanan pembuatan akta kelahiran dan surat keterangan lahir
   Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah terealisasi pembuatan akta kelahiran sebanyak 42 dokumen dan surat keterangan lahir sebanyak 4 dokumen (kelurahan).
2. Pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK)
   Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah terealisasi pembuatan Kartu Keluarga sebanyak 185 dokumen.
3. Pelayanan pembuatan/perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)
   Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah terealisasi pembuatan/perekaman KTP sebanyak 0 dokumen dikarenakan alat perekaman KTP tidak berfungsi/rusak.
4. Pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)
   Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah terealisasi pembuatan KIA sebanyak 251 dokumen.
5. Pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah terealisasi pembuatan IMB sebanyak 0 dokumen dikarenakan perijinan IMB telah diambil alih oleh Kabupaten (Dinas Penanaman Modal).
6. Pelayanan pembuatan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
   Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah terealisasi pembuatan IUMK sebanyak 3 dokumen (kecamatan) dan 29 dokumen (kelurahan).
7. Pelayanan pembuatan surat pindah
   Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah terealisasi pembuatan surat pindah

sebanyak 19 dokumen (kecamatan) dan 9 dokumen (kelurahan).

8. Pelayanan pembuatan surat keterangan ahli waris

   Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah terealisasi pembuatan surat keterangan ahli waris sebanyak 81 dokumen (kecamatan) dan 5 dokumen (kelurahan).

9. Pelayanan pembuatan surat dispensasi dan pengantar nikah

   Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah terealisasi pembuatan surat dispensasi sebanyak 31 dokumen dan pengantar nikah sebanyak 11 dokumen (kelurahan).

10. Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

    Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah terealisasi pembuatan SKTM sebanyak 22 dokumen (kecamatan) dan 38 dokumen (kelurahan).

11. Pelayanan pembuatan surat rekomendasi

    Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah terealisasi pembuatan surat rekomendasi sebanyak 19 dokumen.

12. Pelayanan pembuatan Surat Kepemilikan Tanah (SKT)

    Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah terealisasi pembuatan SKT sebanyak 0 dokumen (kelurahan).

13. Pelayanan pembuatan surat keterangan kematian

    Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah terealisasi pembuatan akta kematian sebanyak 29 dokumen (kecamatan) dan surat keterangan kematian sebanyak 2 dokumen (kelurahan).

14. Pelayanan pembuatan surat keterangan domisili

    Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah terealisasi pembuatan surat keterangan domisili sebanyak 60 dokumen (kecamatan) dan sebanyak 20 dokumen (kelurahan).

15. Pelayanan pembuatan surat keterangan lainnya (kelurahan)

    - Keterangan belum terdaftar pajak : 10 dokumen
    - Keterangan belum menikah : 6 dokumen
    - Keterangan kehilangan : 2 dokumen
    - Keterangan pelepasan hak : 0 dokumen

Upaya Kantor Kecamatan Long Ikis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai hasil evaluasi SAKIP atas implementasi sistem akuntabilitas	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP atas implementasi sistem akuntabilitas dari Inspektorat	Kasubbag Program dan Keuangan
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey indeks kepuasan masyarakat setiap tahun	Dokumen IKM	Kasi Pemerintahan dan Kependudukan & Kasi Kesejahteraan Masyarakat
3.	Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif	Angka kriminalitas	Jumlah kriminalitas setahun dibagi jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000	Data kriminalitas dari kepolisian setempat	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4.	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan dibagi jumlah desa	Data lembaga kemasyarakatan per desa	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kantor Kecamatan Long Ikis Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Kantor Kecamatan Long Ikis terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Kantor Kecamatan Long Ikis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Penilaian mandiri pelaksanaa reformasi birokrasi	60	65	70	75	80	-	-

Sasaran: 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP dari Inspektorat	B/65	B/70	BB/72	BB/75	A/81	-	-
2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80	84	85	90	95	-	-
3) Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif	Angka kriminalitas	52	51	50	49	48	-	-
Tujuan 2: Meningkatnya kemandirian masyarakat	Persentase desa mandiri di wilayah Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	36 persen	36%
Sasaran: Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Long Ikis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas"** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu *"Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi"*, belum mencapai target karena belum dilakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan reformasi birokrasi, dimana realisasinya sebesar 0 dari target sebesar 70 dengan capaian kinerja sebesar 0,00%.
b. Tujuan **"Meningkatnya kemandirian masyarakat desa"** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu *"Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan"*, belum mencapai target karena belum dilakukan penilaian atas desa mandiri, dimana realisasinya sebesar 36% dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 36,00%. Hasil ini sesuai dengan data IDM Kecamatan Long Ikis

tahun 2023, dimana terdapat 9 desa mandiri dari 25 desa yang ada di Kecamatan Long Ikis.

LONG IKIS	6401062002	MUARA ADANG	0.7029	0.7500	0.8000	0.7510	Maju
LONG IKIS	6401062003	TELUK WARU	0.8514	0.6500	0.8667	0.7894	Maju
LONG IKIS	6401062004	TAJUR	0.9540	0.9170	0.9333	0.9348	Mandiri
LONG IKIS	6401062005	SAMUNTAI	0.9600	0.8000	0.8000	0.8533	Mandiri
LONG IKIS	6401062006	LOMBOK	0.8743	0.7333	0.9333	0.8470	Mandiri
LONG IKIS	6401062007	PAIT	0.9600	1.0000	1.0000	0.9867	Mandiri
LONG IKIS	6401062008	OLUNG	0.7943	0.6167	0.7333	0.7148	Maju
LONG IKIS	6401062009	KAYUNGO	0.8343	0.7167	0.7333	0.7614	Maju
LONG IKIS	6401062010	JEMPARING	0.8000	0.8333	1.0000	0.8778	Mandiri
LONG IKIS	6401062011	TIWEI	0.7314	0.6167	0.9333	0.7605	Maju
LONG IKIS	6401062012	BELIMBING	0.6855	0.5666	0.8667	0.7063	Berkembang
LONG IKIS	6401062013	LONG GELANG	0.8400	0.6500	0.8667	0.7856	Maju
LONG IKIS	6401062014	KRAYAN JAYA	0.8230	0.7170	0.9330	0.8243	Mandiri
LONG IKIS	6401062015	BUKIT SALOKA	0.7829	0.7667	0.9333	0.8276	Mandiri
LONG IKIS	6401062016	KRAYAN SENTOSA	0.8343	0.7000	0.8667	0.8003	Maju
LONG IKIS	6401062017	KRAYAN MAKMUR	0.8000	0.8167	0.8667	0.8278	Mandiri
LONG IKIS	6401062018	KAYUNGO SARI	0.7770	0.5667	0.8000	0.7146	Maju
LONG IKIS	6401062019	KRAYAN BAHAGIA	0.8343	0.7000	0.8000	0.7781	Maju
LONG IKIS	6401062020	SAWIT JAYA	0.8400	0.6500	0.9333	0.8078	Maju
LONG IKIS	6401062021	SEKUROU JAYA	0.8514	0.7000	0.8000	0.7838	Maju
LONG IKIS	6401062022	KERTA BHAKTI	0.7714	0.6667	0.8667	0.7683	Maju
LONG IKIS	6401062023	ADANG JAYA	0.7143	0.6333	0.8667	0.7381	Maju
LONG IKIS	6401062024	TAJER MULYA	0.7486	0.7167	0.8000	0.7551	Maju
LONG IKIS	6401062025	BREWE	0.7660	0.5500	0.8666	0.7275	Maju
LONG IKIS	6401062026	ATANG PAIT	0.9543	0.9000	0.8667	0.9070	Mandiri

c. Sasaran **"Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah"** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu *"Nilai SAKIP dari Inspektorat"*, dimana capaian Nilai SAKIP tahun 2023 adalah 69,24 dari target 72 dengan capaian kinerja sebesar 96,17%. SAKIP tahun 2024 baru akan dinilai pada tahun 2025 mendatang.

d. Sasaran **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu *"Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat"*, dimana capaian IKM tahun 2023 adalah 79,67 dengan capaian kinerja 97,15%. Sedangkan capaian IKM tahun 2024 belum dilakukan survey kepuasan masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 0,00%.

e. Sasaran **"Meningkatnya lingkungan Daerah yang Kondusif"** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu *"Angka Kriminalitas"*, dimana capaian tahun 2023 adalah 41,85 dengan capaian 100,17%. Sedangkan angka kriminalitas tahun 2024 belum mencapai target, dimana realisasinya belum terukur karena belum dilakukan pengukuran tingkat kriminalitas dari target sebesar 50 dengan capaian kinerja sebesar 0,00%.

f. Sasaran **"Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan"** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu *"Persentase desa/kelurahan yang*

memiliki lembaga kemasyarakatan", telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan.
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai.
4. Tersedianya SOP pelayanan.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
2. Pelaksanaan kegiatan OPD dimana capaian kinerja belum dibarengi dengan realisasi capaian keuangan sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun.
3. Terdapat beberapa belanja sub kegiatan yang direncanakan untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sehingga tidak direalisasikan sesuai anggaran kas.

Implikasi yang timbul akibat kondisi di atas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Long Ikis sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang kewilayahan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Target Tahunan Tujuan dan Sasaran

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Tujuan 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	70	70
Sasaran: 1). Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP dari Inspektorat	Nilai hasil evaluasi SAKIP atas Implementasi Sistem Akuntabilitas	72	72
2).Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil penghitungan survey indeks kepuasan masyarakat setiap tahun	84	84
3).Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	jumlah kriminalitas setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000	50	50
Tujuan 2: Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan		100 persen	100 persen
Sasaran: Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan dibagi jumlah desa/kelurahan	100 persen	100 persen

Memperhatikan tabel 3.1 di atas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran

dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Long Ikis mendukung pencapaian sasaran ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-10, yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya lingkungan Daerah yang Kondusif
4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Kantor Kecamatan Long Ikis telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel. 3.2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kantor Kecamatan Long Ikis

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan APBD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KANTOR KECAMATAN LONG IKIS					**KANTOR KECAMATAN LONG IKIS**					
	Urusan Kewilayahan				**6.918.109.599**	**Urusan Kewilayahan**				**7.458.819.543**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**74%**	**5.606.930.463**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**74%**	**6.135.264.208**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD**	**100 persen**	**18.182.604**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD**	**100 persen**	**27.938.604**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	5 dokumen	11.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	5 dokumen	17.598.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	7.182.604	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	10.340.604	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase LHP Nihil Persentase temuan ditindaklanjuti**	**100 Persen 100 Persen**	**4.835.302.602**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase LHP Nihil Persentase temuan ditindaklanjuti**	**100 Persen 100 Persen**	**5.203.911.746**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	4.644.374.934	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392 Orang/bulan	5.037.664.078	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	180 dokumen	188.736.768	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	180 dokumen	164.056.768	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 dokumen	2.190.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 dokumen	2.190.900	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80**	**90 Persen**	**23.309.700**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80**	**90 Persen**	**30.994.700**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	8.309.700	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	15.994.700	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat**	**100 Persen**	**208.970.557**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat**	**100 Persen**	**269.826.757**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1.184.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1.184.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	2 Paket	44.008.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	2 Paket	107.051.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	20.845.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	21.593.300	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.784.900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.784.900	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	140.148.557	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	137.213.557	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**100 Persen**	**151.570.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**100 Persen**	**186.570.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.970.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.970.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	110.600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	**65 Persen**	**369.595.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	**65 Persen**	**416.022.400**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	104.715.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	93.132.400	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4.880.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	7.390.000	
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	260.000.000	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	315.500.000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**74%**	**497.813.076**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**74%**	**211.156.200**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100 Persen**	**109.520.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100 Persen**	**77.320.000**	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	109.520.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	77.320.000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100 Persen**	**388.293.076**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100 Persen**	**133.836.200**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	388.293.076	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	133.836.200	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**	**80%**	**288.512.060**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**	**80%**	**203.789.060**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	**100 Persen**	**288.512.060**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	**100 Persen**	**203.789.060**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	16.170.060	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	10.095.060	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatan di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	272.342.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatan di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	193.694.000	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban**	**60%**	**278.870.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban**	**60%**	**599.390.575**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 Persen**	**269.940.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 Persen**	**590.460.576**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	269.940.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	590.460.576	

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100 Persen**	**8.930.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100 Persen**	**8.930.000**	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	8.930.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	8.930.000	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan**	**100 Persen**	**105.660.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan**	**100 Persen**	**159.813.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan**	**2 Kegiatan**	**105.660.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan**	**2 Kegiatan**	**159.813.000**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamanan Pancasila, Pelaksanan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republk Indonesia	40 Orang	30.460.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamanan Pancasila, Pelaksanan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republk Indonesia	40 Orang	54.813.000	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas keamanan Lokal, Regionan dan Nasional	50 Orang	75.200.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas keamanan Lokal, Regionan dan Nasional	50 Orang	105.000.000	

6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu**	**100%**	**140.324.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu**	**100%**	**149.406.500**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Jumlah Desa yang terfasilitasi**	**25 Desa**	**140.324.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Jumlah Desa yang terfasilitasi**	**25 Desa**	**149.406.500**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	7.680.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	14.300.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	75 Dokumen	81.448.700	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	75 Dokumen	129.581.200	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Dokumen	43.150.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Dokumen	-	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	8.045.300	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	5.525.300	
					6.918.109.599					**7.458.819.543**	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan APBD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KANTOR KELURAHAN LONG IKIS					**KANTOR KELURAHAN LONG IKIS**					
	Urusan Kewilayahan				**888.134.046**	**Urusan Kewilayahan**				**2.483.708.464**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**74%**	**288.132.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**74%**	**494.223.964**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis**	**Persentase LHP Nihil Persentase temuan ditindaklanjuti**	**100 Persen 100 Persen**	**162.515.296**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis**	**Persentase LHP Nihil Persentase temuan ditindaklanjuti**	**100 Persen 100 Persen**	**281.181.360**	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	90 dokumen	162.515.296	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	90 dokumen	281.181.360	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis**	**Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat**	**100 Persen**	**43.337.500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis**	**Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat**	**100 Persen**	**84.181.400**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	3.504.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	3.504.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	16.472.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	26.830.400	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.201.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.201.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	20.160.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	50.646.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis**	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik**	**80 Persen**	**50.620.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis**	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik**	**80 Persen**	**83.102.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.620.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	83.102.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis**	**Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**100 Persen**	**24.999.204**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis**	**Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**100 Persen**	**14.999.204**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.999.204	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.999.204	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis**	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	**65 Persen**	**6.660.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis**	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	**65 Persen**	**30.760.000**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	6.660.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	30.760.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**	**80%**	**600.002.046**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan**	**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**	**80%**	**1.989.484.500**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terlaksana	100 Persen	**600.002.046**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terlaksana	100 Persen	**1.989.484.500**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga	4.110.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga	4.110.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	30.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	179.530.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	584.912.046	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.775.382.500	Tambahan terkait kegiatan penilaian kelurahan tingkat nasional
	Evaluasi Kelurahan	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	10.950.000	Evaluasi Kelurahan	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	30.462.000	
					888.134.046					**2.483.708.464**	

3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Rancangan Perubahan RKPD 2024 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kantor Kecamatan Long Ikis baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

Tabel. 3.3
Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tahun 2024 pada Kantor Kecamatan Long Ikis

No	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nama OPD										
	Urusan ……..										
1	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										
2.	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										
3.	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										

NIHIL

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Kecamatan Long Ikis pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA DAERAH PENANGGUN JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KANTOR CAMAT LONG IKIS							**7.806.243.645,00**	**7.311.398.743,00**	**7.351.398.743,00**	**-454.844.902,00**							**6.787.924.903,50**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.806.243.645,00**	**7.311.398.743,00**	**7.351.398.743,00**	**-454.844.902,00**							**6.787.924.903,50**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.806.243.645,00**	**7.311.398.743,00**	**7.351.398.743,00**	**-454.844.902,00**							**6.787.924.903,50**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**				**74 %**	**74 %**	**5.895.062.463,00**	**6.025.775.607,00**	**6.024.375.607,00**	**-94.370.992,50**							**5.800.691.470,50**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD*				100 Persen 70 Persen 92 Persen BB Nilai	100 Persen	18.182.604,00	27.938.604,00	27.938.604,00	9.756.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kantor Kecamatan dan Kelurahan Long Ikis		20.348.340,00	KANTOR CAMA LONG IKIS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	11.000.000,00	20.756.000,00	20.756.000,00	9.756.000,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			11.885.600,00	KANTOR CAMA LONG IKIS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	7.182.604,00	7.182.604,00	7.182.604,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			8.462.740,00	KANTOR CAMA LONG IKIS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase temuan ditindaklanjuti; Persentase LHP nihil*				100 Persen	100 Persen	4.997.817.898,00	5.231.391.746,00	5.197.791.746,00	199.973.848,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kantor Kecamatan dan Kelurahan Long Ikis		5.201.325.873,00	KANTOR CAMA LONG IKIS

	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			360 Orang/ bulan	360 Orang/ bulan	4.644.374.934,00	5.037.664.078,00	5.037.664.078,00	393.289.144,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			5.000.000.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			180 Dokumen	180 Dokumen	188.736.768,00	191.536.768,00	157.936.768,00	-30.800.000,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			199.134.368,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			15 Laporan	15 Laporan	2.190.900,00	2.190.900,00	2.190.900,00	0,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			2.191.505,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase rata-rata capaian I K I d e n g a n*			90 Persen	90 Persen	23.309.700,00	30.994.700,00	30.994.700,00	7.685.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Pegawai Kantor Kecamatan dan Kelurahan Long Ikis		8.309.700,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			0,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS

	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	8.309.700,00	15.994.700,00	15.994.700,00	7.685.000,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			8.309.700,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat*				100 Persen	100 Persen	252.308.057,00	211.485.557,00	211.485.557,00	-40.822.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kantor Kecamatan Long Ikis		129.862.557,50	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.184.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00	0,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			1.184.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	44.008.000,00	54.208.000,00	54.208.000,00	10.200.000,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			31.500.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	20.845.100,00	20.845.100,00	20.845.100,00	0,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			20.845.100,00	KANTOR CAMA LONG IKIS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.784.900,00	2.784.900,00	2.784.900,00	0,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			2.784.900,00	KANTOR CAMA LONG IKIS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	140.148.557,00	132.463.557,00	132.463.557,00	-7.685.000,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			73.548.557,50	KANTOR CAMA LONG IKIS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan*				100 Persen	100 Persen	176.569.204,00	154.370.000,00	186.570.000,00	10.000.796,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kantor Kecamatan Long Ikis		138.570.000,00	KANTOR CAMA LONG IKIS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.970.000,00	75.970.000,00	75.970.000,00	0,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			62.970.000,00	KANTOR CAMA LONG IKIS

	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.600.000,00	78.400.000,00	110.600.000,00	35.000.000,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			75.600.000,00	KANTOR CAMA LONG IKIS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang inventaris dalam kondisi baik*				65 Persen	65 Persen	376.255.000,00	369.595.000,00	369.595.000,00	-6.660.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kantor Kecamatan Long Ikis		302.275.000,00	KANTOR CAMA LONG IKIS
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	104.715.000,00	104.715.000,00	104.715.000,00	0,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			11.275.000,00	KANTOR CAMA LONG IKIS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			5.000.000,00	KANTOR CAMA LONG IKIS

2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**				**74 74 % %**	**74 %**	**497.813.076,00**	**260.782.500,00**	**228.582.500,00**	**-234.925.276,00**							**262.887.800,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				100 Persen	100 Persen	109.520.000,00	109.520.000,00	77.320.000,00	-32.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat Kecamatan Long Ikis		112.070.000,00	KANTOR CAMA LONG IKIS
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	109.520.000,00	109.520.000,00	77.320.000,00	-32.200.000,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			112.070.000,00	KANTOR CAMA LONG IKIS
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*				100 Persen	100 Persen	388.293.076,00	151.262.500,00	151.262.500,00	-237.030.576,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat Kecamatan Long Ikis		150.817.800,00	KANTOR CAMA LONG IKIS
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	2 Laporan	388.293.076,00	151.262.500,00	151.262.500,00	-237.030.576,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			150.817.800,00	KANTOR CAMA LONG IKIS
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**				**80 80 % %**	**80 %**	**888.514.106,00**	**233.512.060,00**	**229.312.060,00**	**-671.794.618,00**							**216.719.488,00**	

	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana*				100 Persen	100 Persen	288.512.060,00	233.512.060,00	229.312.060,00	-59.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat Kecamatan Long Ikis		216.719.488,00	KANTOR CAMA LONG IKIS
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	16.170.060,00	16.170.060,00	16.170.060,00	0,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			34.058.000,00	KANTOR CAMA LONG IKIS
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	272.342.000,00	217.342.000,00	213.142.000,00	-59.200.000,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			182.661.488,00	KANTOR CAMA LONG IKIS
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban**				**60 60 % %**	**60 %**	**278.870.000,00**	**541.700.576,00**	**579.500.576,00**	**35.983.500,00**							**314.853.500,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				100 Persen	100 Persen	269.940.000,00	532.770.576,00	570.570.576,00	300.630.576,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat Kecamatan Long Ikis		305.000.000,00	KANTOR CAMA LONG IKIS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	269.940.000,00	532.770.576,00	570.570.576,00	300.630.576,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			305.000.000,00	KANTOR CAMA LONG IKIS

	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				100 Persen	100 Persen	8.930.000,00	8.930.000,00	8.930.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat Kecamatan Long Ikis		9.853.500,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	4 Laporan	8.930.000,00	8.930.000,00	8.930.000,00	0,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			9.853.500,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kasus konflik sosial yang tertanganiterselesaikan di wilayah kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**105.660.000,00**	**107.904.000,00**	**147.904.000,00**	**-56.920.055,00**							**48.739.945,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah kegiatan yang dilaksanakan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	105.660.000,00	107.904.000,00	147.904.000,00	42.244.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat Kecamatan Long Ikis		48.739.945,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				40 Orang	40 Orang	30.460.000,00	42.904.000,00	42.904.000,00	12.444.000,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			34.460.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS

6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**140.324.000,00**	**141.724.000,00**	**141.724.000,00**	**3.708.700,00**							**144.032.700,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa yang terfasilitasi*				25 Desa	25 Desa	140.324.000,00	141.724.000,00	141.724.000,00	1.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Desa di wilayah Kecamatan Long Ikis		144.032.700,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	7.680.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			11.338.700,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				75 Dokumen	75 Dokumen	81.448.700,00	82.848.700,00	82.848.700,00	1.400.000,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			81.448.700,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	43.150.000,00	43.150.000,00	43.150.000,00	0,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			40.000.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		

			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	8.045.300,00	8.045.300,00	8.045.300,00	0,00	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			11.245.300,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
		KELURAHAN LONGIKIS							**0,00**	**1.259.671.214,00**	**1.264.671.214,00**	**1.264.671.214,00**							**828.466.825,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**1.259.671.214,00**	**1.264.671.214,00**	**1.264.671.214,00**							**828.466.825,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**1.259.671.214,00**	**1.264.671.214,00**	**1.264.671.214,00**							**828.466.825,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**				**74 %**	**74 %**	**0,00**	**494.223.964,00**	**494.223.964,00**	**286.466.825,00**							**286.466.825,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase temuan ditindaklanjuti; Persentase LHP nihil*				100 Persen	100 Persen	0,00	281.181.360,00	281.181.360,00	281.181.360,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kantor Kelurahan Long Ikis		178.766.825,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				90 Dokumen	90 Dokumen	0,00	281.181.360,00	281.181.360,00	281.181.360,00	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			178.766.825,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS

	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat*				100 Persen	100 Persen	0,00	84.181.400,00	84.181.400,00	84.181.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kantor Kelurahan Long Ikis		72.200.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	3.504.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			3.500.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	26.830.400,00	26.830.400,00	26.830.400,00	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			21.000.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	3.201.000,00	3.201.000,00	3.201.000,00	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			5.700.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS

	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66 Laporan	66 Laporan	0,00	50.646.000,00	50.646.000,00	50.646.000,00	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			42.000.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik*				80 Persen	80 Persen	0,00	83.102.000,00	83.102.000,00	83.102.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kantor Kelurahan Long Ikis		5.500.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	83.102.000,00	83.102.000,00	83.102.000,00	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			5.500.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan*				100 Persen	100 Persen	0,00	14.999.204,00	14.999.204,00	14.999.204,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kantor Kelurahan Long Ikis		25.000.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	14.999.204,00	14.999.204,00	14.999.204,00	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			25.000.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS

	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang inventaris dalam kondisi baik*				65 Persen	65 Persen	0,00	30.760.000,00	30.760.000,00	30.760.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kantor Kelurahan Long Ikis		5.000.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	0,00	30.760.000,00	30.760.000,00	30.760.000,00	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			5.000.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**				**80 80 % %**	**80 80 % %**	**0,00**	**765.447.250,00**	**770.447.250,00**	**542.000.000,00**							**542.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terlaksana*				100 Persen	100 Persen	0,00	765.447.250,00	770.447.250,00	770.447.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat Kelurahan Long Ikis		542.000.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS

	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	4.110.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			15.000.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	179.530.000,00	179.530.000,00	179.530.000,00	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			300.000.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	551.345.250,00	556.345.250,00	556.345.250,00	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			215.000.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	30.462.000,00	30.462.000,00	30.462.000,00	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			12.000.000,00	KANTOR CAMAT LONG IKIS
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																	
	J U M L A H								**7.806.243.645,00**	**8.571.069.957,00**	**8.616.069.957,00**	**2.288.017.373.093,00**						**7.616.391.728,50**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kantor Kecamatan Long Ikis mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

1.2. Rencana Tindak Lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Long Ikis, 20 September 2024

Plt. Camat Long Ikis,

Husni, S.Sos

Pembina

NIP. 196710081992031015

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

KANTOR CAMAT LONG KALI

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kantor Camat Long Kali Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalan Renstra 2021-2026, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Kantor Camat Long Kali Tahun Anggaran 2024. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Long Kali, Juli 2024

Camat

M. ARFAH, S.STP

NIP. 198508112003121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 ..... **8**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 8

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Long Kali 12

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024 16

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **18**

3.1 Tujuan dan Sasaran 18

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 19

3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024 27

BAB IV PENUTUP **35**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Long Kali Semester I Tahun 2024 9

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Long Kali sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....16

Tabel 3.1 Target Tahunan Tujuan dan Sasaran 19

Tabel 3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kantor Kecamatan Long Kali 21

Tabel 3.3 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 pada Kantor Kecamatan Long Kali 26

Tabel 3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024.....27

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASER NOMOR 100.3.3.2/KEP- /2024
TANGGAL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagaiacuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangkapendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kantor Kecamatan Long Kali, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Long Kali sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kecamatan;

23. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Kantor Kecamatan Long Kali, proses penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Long Kali, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Kantor Kecamatan Long Kali, serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalampenulisan Renja Kantor Kecamatan Long Kali, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Long Kali

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan

RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Long Kali Semester I Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (%)		Ket
				I		II						
1	2	3		4		5		6 = 4+5		7 = 6/3*100		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	%
KECAMATAN LONG KALI												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Indeks Kepuasan Pelaksanaan Sekrertariat**	**82**										
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	0										
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	16,153,050	2	4,560,000		4,560,000.00	2	9,120,000	40.00	56.46	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Kinerja (LKjiP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA) (Laporan)	7	11,268,600	1	3,040,000		3,800,000.00	1	6,840,000	14.29	60.70	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100								0.00		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	3	5,037,232,132		1,187,938,590		1,708,746,843.00	0	2,896,685,433	0.00	57.51	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38								0.00		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen keuangan (SPM, SPP) (Dokumen)	0	568,787,420		105,006,420		126,470,380.00	0	231,476,800	0.00	40.70	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0								0.00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan (Laporan)	1	12,266,200		6,095,750		-	0	6,095,750	0.00	49.70	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase rata rata capaian IKI dengan Nilai ≤ 75	75								0.00		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Adminisrasi Kepegawaian Pengolahan	0	98,476,000		15,732,000		31,360,000.00	0	47,092,000	0.00	47.82	
	Jumlah Admnistrasi Pegawai yang diperbarui datanya	38								0.00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	0								0.00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah komponen yang disediakan	0	211,882,500							0.00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan disediakan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0								0.00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	66,916,162				9,471,000.00	0	9,471,000	0.00	14.15	

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	0	23,233,618							0.00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	0	382,750,700		89,201,624		54,598,860.00	0	143,800,484	0.00	37.57	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan kebutuhan administrasi Perkantoran											
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebelair yang disediakan yang Disediakan (Unit)		150,000,000.00					0	-	0.00	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	366,085,700				61,250,000.00	0	61,250,000	0.00	16.73	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor (%)	0						0	-			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	1,560,000					0	-	0.00!	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	154,144,800		20,758,083		21,983,870.00	0	42,741,953	0.00	27.73	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa yang disediakan Pelayanan Umum	0	10,306,250		-		-	0	-		-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Inventaris dalam kondisi baik (%)	0						0	-			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	23,994,200				2,381,300.00	0	2,381,300		9.92	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	10,240,000				20,144,400.00	0	20,144,400		196.72	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	12,990,400				12,704,400.00	0	12,704,400		97.80	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**72**						0	-	0.00		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0						0	-			
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan	2	91,464,200		4,800,000		15,420,000.00	0	20,220,000	0.00	22.11	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	100,819,800	1	9,600,000		30,275,000.00	1	39,875,000	50.00	39.55	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelyanan Umum yang layak	Presentase Sarana dan Prasarana pelayanan umum yang layak	0						0	-			
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2	617,220,250		70,894,166		95,891,990.00	0	166,786,156	0.00	27.02	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0						0	-			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	336,936,700		9,400,000		133,268,750.00	0	142,668,750	0.00	42.34	

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Lembaga Kemasyarakaan yang aktif**	**75**						0	-	0.00		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	0						0	-			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga)	23	37,626,300	23	17,890,000		2,340,000.00	23	20,230,000	100.00	53.77	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	290,292,827	3	30,538,751		16,338,000.00	3	46,876,751	300.00	16.15	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	0						0	-			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan		161,218,700			1	109,958,800.00	1	109,958,800		68.20	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga masyarakat yang diberdayakan (Lembaga)	0	415,411,300		26,460,000		25,200,000.00	0	51,660,000		12.44	
Evaluasi Kelurahan			13,847,800					0	-		-	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban (%)**	**0**						0	-			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0						0	-			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	361,358,750	3	54,274,000	3	120,484,000.00	2	174,758,000	100.00	48.36	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	11,895,000		-		-	0	-	0.00	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaik an di wilayah kecamatan (%)**	**0**						0	-	#DIV/0!	-	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (Kegiatan)	0						0	-	#DIV/0!		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	98,098,900		-		-	0	-	#DIV/0!	-	
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	65,795,000			60	7,425,000.00	60	7,425,000	#DIV/0!	11.29	

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu (%)**	**0**						0	-			
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah Desa yang terfasilitasi (Desa)	0						0	-			
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								0	-			
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	22	100,140,000		9,600,000	22	36,815,400.00	22	46,415,400	100.00	46.35	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	12,010,000			3		3	-		-	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	22	45,240,000	22	15,656,000	22	19,254,000.00	44	34,910,000	200.00	77.17	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	0	35,740,000		-		-	0	-		-	
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	2	72,131,500		7,570,000	2	4,340,000.00	2	11,910,000	100.00	16.51	
			10,025,534,759		**1,689,015,384**		**2,674,481,993.00**		**4,363,497,377**		43.52	

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga semester I adalah 43.52 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4,363,497,377,00 (Empat milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari total pagu RKPD sebesar Rp. 10,025,534,759 (Sepuluh milyar dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah)
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Kantor Kecamatan Long Kali sebesar 43.52% dengan predikat kinerja sangat rendah, yaitu ≤50%. Predikat ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Long Kali

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Paser, maka Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Tugas : melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

Fungsi :
1) pengoordinasian penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan otonomi daerah;
2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4) pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

7) pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
8) pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan; dan
9) penyusunan program, pembinaan adminsitrasi dan pengelolaan ketatausahaan

Upaya Kantor Kecamatan Long Kali dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK dan APIP eksternal	Jumlah temuan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK dan APIP eksternal	Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK dan APIP eksternal	Kasubbag Program dan Keuangan & Kasubbag Kepegawaian dan Umum
		Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai hasil evaluasi SAKIP atas Implementasi Sistem Akuntabilitas	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP atas Implementasi Sistem Akuntabilitas dari Inspektorat	Kasubbag Program dan Keuangan
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil penghitungan survey indeks kepuasan masyarakat setiap tahun	Dokumen IKM	Kasi Pemerintahan dan kependudukan & Kasi Kesejahteraan Masyarakat
3.	Meningkatnya lingkungan daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	jumlah kriminalitas setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000	Data kriminalitas dari Kepolisian setempat	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4.	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan dibagi jumlah desa/kelurahan	Data lembaga kemasyarakatan per desa	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kantor Kecamatan Long Kali Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Kantor Kecamatan Long Kali terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Kantor Kecamatan Long Kali sampai dengan Triwulan II
Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	60	65	70	75	80	-	-
Sasaran: 1). Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK (Badan APIP Eksternal)	0 temuan	0 temuan	0 temuan	0 temuan	0 temuan	0 temuan	50
	Nilai SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB	A	-	80
2). Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80	84	85	90	95	46,04	387,2
3). Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	52	51	50	49	48	-	-
Tujuan 2: Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-	-
Sasaran: Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Long Kali sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas"** memiliki 1 indikator kinerja yaitu *"Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi"*, belum mencapai target karena belum dilakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan reformasi birokrasi, dimana realisasinya sebesar 0 dari target sebesar 60 dengan capaian kinerja sebesar 0,00%.
b. Tujuan **"Meningkatnya kemandirian masyarakat desa"** memiliki 1 indikator kinerja yaitu *"Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan"*, belum mencapai target karena belum dilakukan penilaian atas desa mandiri, dimana realisasinya sebesar 0% dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar

0,00%.

c. Sasaran **"Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah"** memiliki 2 indikator kinerja yaitu *"Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK (Badan APIP Eksternal)"*, telah mencapai target, dimana realisasinya tidak ada temuan penyimpangan atau sebesar 0 temuan dari target sebesar 0 temuan dengan capaian kinerja sebesar 50%; dan indikator *"Nilai SAKIP dari Inspektorat"*, belum mencapai target karena belum dilakukan penilaian SAKIP oleh Inspektorat dimana realisasinya 0 dari target B dengan capaian kinerja sebesar 80%.
d. Sasaran **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"** memiliki 1 indikator kinerja yaitu *"Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat"*, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 46,04 (mutu pelayanan tidak baik) dari target sebesar 80 dengan capaian kinerja sebesar 50%.
e. Sasaran **"Meningkatnya lingkungan Daerah yang Kondusif"** memiliki 1 indikator kinerja yaitu *"Angka Kriminalitas"*, belum mencapai target, dimana realisasinya belum terukur karena belum dilakukan pengukuran tingkat kriminalitas dari target sebesar 52 dengan capaian kinerja sebesar 0,00%.
f. Sasaran **"Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan"** memiliki 1 indikator kinerja yaitu *"Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan"*, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan.
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.

3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai.
4. Tersedianya SOP pelayanan.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
2. Juknis pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang terlambat.
3. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
4. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat.
5. Pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya mengacu pada anggaran kas yang telah disusun.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Long Kali sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang kewilayahan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2023, target tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Target Tahunan Tujuan dan Sasaran

Tujuan/Sasaran	Tujuan/Sasaran	Formulasi	Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Tujuan 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		60	60
Sasaran: 1). Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK (Badan APIP Eksternal)	Jumlah temuan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK dan APIP eksternal	0 temuan	0 temuan
	Nilai SAKIP dari Inspektorat	Nilai hasil evaluasi SAKIP atas Implementasi Sistem Akuntabilitas	B	B
2).Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil penghitungan survey indeks kepuasan masyarakat setiap tahun	80	80
3).Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	jumlah kriminalitas setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000	52	52
Tujuan 2: Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan		100 persen	100 persen
Sasaran: Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan dibagi jumlah desa/kelurahan	100 persen	100 persen

Memperhatikan tabel 3.1 di atas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023 yaitu "PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**"** yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Long Kali mendukung pencapaian sasaran ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-10, yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

3. Meningkatnya lingkungan Daerah yang Kondusif
4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Kantor Kecamatan Long Kali telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel. 3.2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kantor Kecamatan Long Kali

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGUINDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAI	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	AN10	11	12
	KANTOR CAMAT LONG KALI				**8,128,350,033.00**	**KANTOR CAMAT LONG KALI**				**8,128,350,033.00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**8,128,350,033.00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**8,128,350,033.00**	
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	**Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Kecamatan**	**85**	**635,206,000.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	**Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Kecamatan**	**85**	**635,206,000.00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	85	181,629,800.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	85	181,629,800.00	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80,810,000.00	`Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80,810,000.00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	100,819,800.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	100,819,800.00	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	85	116,639,500.00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	85	116,639,500.00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	116,639,500.00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	116,639,500.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	336,936,700.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	336,936,700.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	336,936,700.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	336,936,700.00	

2.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	**Presentase Desa yang menyampaikan LKP Desa tepat waktu**	**100**	**272,428,527.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	**Presentase Desa yang menyampaikan LKP Desa tepat waktu**	**100**	**272,428,527.00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	272,428,527.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	272,428,527.00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23 Lembaga Kemasyarakatan	32,328,000.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23 Lembaga Kemasyarakatan	32,328,000.00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	240,100,527.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	240,100,527.00	
3.	**PROGRAMKOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	**Presentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**373,253,750.00**	**PROGRAMKOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	**Presentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**373,253,750.00**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	373,253,750.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	373,253,750.00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	361,358,750.00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	361,358,750.00	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	11,895,000.00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	11,895,000.00	
4.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	**Presentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum yang dilaksanakan**		**203,893,900.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	**Presentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum yang dilaksanakan**		**203,893,900.00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	203,893,900.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	203,893,900.00	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	98,098,900.00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	98,098,900.00	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	105,795,000.00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	105,795,000.00	
5.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	**Presentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	**252,649,000.00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	**Presentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	**252,649,000.00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Desa yang di Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	252,649,000.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Desa yang di Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	252,649,000.00	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22 Dokumen	100,140,000.00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22 Dokumen	100,140,000.00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	12,010,000.00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	12,010,000.00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 Dokumen	45,240,000.00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 Dokumen	45,240,000.00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	35,740,000.00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	35,740,000.00	

	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5 Dokumen	59,519,000.00	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5 Dokumen	59,519,000.00	
6.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	**Presentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**5,843,540,776.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA**	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	**Presentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**5,843,540,776.00**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Barang Inventaris dalam kondisi baik	80 %	40,644,600.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Barang Inventaris dalam kondisi baik	80 %	40,644,600.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12,990,400.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12,990,400.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	12 Dokumen	21,845,300.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	12 Dokumen	21,845,300.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10,576,700.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10,576,700.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	369,500,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	-	-	369,500,000.00	
	Pengadaan Mebel	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	150,000,000.00	Pengadaan Mebel	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	150,000,000.00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	219,500,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	219,500,000.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	12 Dokumen	21,845,300.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	12 Dokumen	21,845,300.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	11,268,600.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	11,268,600.00	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5,274,102,338.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5,274,102,338.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	5,065,019,498.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	5,065,019,498.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	324 Dokumen	196,816,640.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	324 Dokumen	196,816,640.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12,266,200.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12,266,200.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	98,476,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	98,476,000.00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	98,476,000.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	98,476,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumnlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	485,679,618.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	485,679,618.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	209,167,500.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	209,167,500.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0.0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	25,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	25,000,000.00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7,887,318.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7,887,318.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286 Laporan	243,624,800.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286 Laporan	243,624,800.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100,671,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100,671,000.00	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	250,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	250,000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	100,421,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	100,421,000.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Barang Inventaris dalam kondisi baik	80 %	40,644,600.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Barang Inventaris dalam kondisi baik	80 %	40,644,600.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	23,994,200.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	23,994,200.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3,660,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3,660,000.00	
NO	**RANCANGAN AWAL RKPD**					**HASIL ANALISIS KEBUTUHAN**					**CATATAN PENTING**
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET CAPAIAN**		
	KELURAHAN LONGKALI										
	UNSUR KEWILAYAHAN										
	-					-					
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	**Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Kecamatan**	-	**511,234,950.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	**Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Kecamatan**	-	**511,234,950.00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	10,654,200.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	10,654,200.00	

	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10,654,200.00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10,654,200.00	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	500,580,750.00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	500,580,750.00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	500,580,750.00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam	1 Dokumen	500,580,750.00	
						Prasarana Pelayanan Umum					
2.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	**Presentase Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**-**	**645,968,400.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	**Presentase Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**-**	**645,968,400.00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	50,192,300.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	50,192,300.00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50,192,300.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50,192,300.00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	595,776,100.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	595,776,100.00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	5,298,300.00	Peningkatan Partisipasi Masyaraka dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarak atan	5,298,300.00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	161,218,700.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	161,218,700.00	

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	57,361,300.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	57,361,300.00	
	Evaluasi Kelurahan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	13,847,800.00	Evaluasi Kelurahan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	13,847,800.00	
3.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	**Presentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**-**	**12,612,500.00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	**Presentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**-**	**12,612,500.00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	12,612,500.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	12,612,500.00	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas	1 Dokumen	12,612,500.00	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan	1 Dokumen	12,612,500.00	
4.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	**Presentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**795,156,242.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	**Presentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**795,156,242.00**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	65,340,050.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	65,340,050.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	53,723,800.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	53,723,800.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	-	5,576,350.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	-	5,576,350.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5,576,350.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5,576,350.00	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Barang Inventaris dalam kondisi baik			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Barang Inventaris dalam kondisi baik	-		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	6,580,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	6,580,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	65,340,050.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	65,340,050.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10,306,250.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10,306,250.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	371,970,780.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	371,970,780.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	106 Dokumen	338,142,780.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	106 Dokumen	338,142,780.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	199,103,362.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	199,103,362.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,715,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,715,000.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	41,916,162.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	41,916,162.00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15,346,300.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15,346,300.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163 Laporan	139,125,900.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163 Laporan	139,125,900.00	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit-	146,585,700.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit-	146,585,700.00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	115,378,640.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	115,378,640.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	65,340,050.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	65,340,050.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	1,310,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	1,310,000.00	

3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Perubahan Rancangan RKPD 2024 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kantor Kecamatan Long Kali baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

Tabel. 3.3

Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahun 2024 pada Kantor Kecamatan Long Kali

No	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Nama OPD										
	Urusan ……..										
1	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										
2.	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										
2.	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										

NIHIL

3.4. Penetapan Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Kecamatan Long Kali pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						Bertambah / Berkurang
				TARGET CAPAIAN KINERJA 2024			KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)			
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		KANTOR CAMAT LONG KALI					**6,359,558,745.00**	**7,855,842,667.00**	**8,128,350,033.00**	**1,768,791,288.00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**6,359,558,745.00**	**7,855,842,667.00**	**8,128,350,033.00**	**1,768,791,288.00**
	7.01	**KECAMATAN**					**6,359,558,745.00**	**7,855,842,667.00**	**8,128,350,033.00**	**1,768,791,288.00**
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,772,669,305.00**	**6,145,631,490.00**	**6,390,918,856.00**	**860,048,752.00**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	22,042,400.00	21,845,300.00	21,845,300.00	-197,100.00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	14,892,400.00	10,576,700.00	10,576,700.00	-4,315,700.00
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	7,150,000.00	11,268,600.00	11,268,600.00	4,118,600.00
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	4,312,936,030.00	5,246,314,972.00	5,274,102,338.00	961,166,308.00
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	434 Orang/ bulan	434 Orang/ bulan	434 Orang/ bulan	4,113,901,590.00	5,037,232,132.00	5,065,019,498.00	951,117,908.00
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	324 Dokumen	324 Dokumen	324 Dokumen	189,512,240.00	196,816,640.00	196,816,640.00	7,304,400.00
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9,522,200.00	12,266,200.00	12,266,200.00	2,744,000.00
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	97,360,000.00	98,476,000.00	98,476,000.00	1,116,000.00
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	38 Dokumen	38 Dokumen	38 Dokumen	97,360,000.00	98,476,000.00	98,476,000.00	1,116,000.00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	175,659,818.00	280,719,618.00	485,679,618.00	310,019,800.00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1,707,500.00	4,207,500.00	209,167,500.00	207,460,000.00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2,887,318.00	7,887,318.00	7,887,318.00	5,000,000.00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	220 Laporan	220 Laporan	146,065,000.00	243,624,800.00	243,624,800.00	97,559,800.00

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	3,000,000.00	352,000,000.00	369,500,000.00	366,500,000.00
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Unit	1 Unit	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	11 Unit	11 Unit	0.00	202,000,000.00	219,500,000.00	219,500,000.00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	110,820,857.00	105,631,000.00	100,671,000.00	-10,149,857.00
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	110,570,857.00	105,381,000.00	100,421,000.00	-10,149,857.00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	50,850,200.00	40,644,600.00	40,644,600.00	-10,205,600.00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	22,199,800.00	23,994,200.00	23,994,200.00	1,794,400.00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	7 Unit	3,660,000.00	3,660,000.00	3,660,000.00	0.00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	24,990,400.00	12,990,400.00	12,990,400.00	-12,000,000.00
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Kecamatan**	**85 %**	**85 %**	**85 %**	**598,806,000.00**	**635,206,000.00**	**635,206,000.00**	**35,790,200.00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	-	181,629,800.00	181,629,800.00	181,629,800.00	0.00
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1125 Laporan	1125 Laporan	1125 Laporan	80,810,000.00	80,810,000.00	80,810,000.00	0.00
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,819,800.00	100,819,800.00	100,819,800.00	0.00
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	-	-	80,239,500.00	116,639,500.00	116,639,500.00	36,400,000.00
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	80,239,500.00	116,639,500.00	116,639,500.00	36,400,000.00
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	-	336,936,700.00	336,936,700.00	336,936,700.00	0.00
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	336,936,700.00	336,936,700.00	336,936,700.00	0.00
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**240,205,440.00**	**313,108,527.00**	**272,428,527.00**	**55,629,560.00**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	240,205,440.00	313,108,527.00	272,428,527.00	32,223,087.00
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	23 Lembaga K	23 Lembaga K	23 Lembaga K	32,328,000.00	32,328,000.00	32,328,000.00	0.00

	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	di Desa	emasyarak	emasyarak	emasyarak				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	207,877,440.00	280,780,527.00	240,100,527.00	32,223,087.00
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**	**-**	**-**	**453,163,000.00**	**427,153,750.00**	**373,253,750.00**	**-36,998,894.00**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	453,163,000.00	427,153,750.00	373,253,750.00	-79,909,250.00
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	377,310,000.00	361,358,750.00	361,358,750.00	-15,951,250.00
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	75,853,000.00	65,795,000.00	11,895,000.00	-63,958,000.00
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42,066,000.00**	**82,093,900.00**	**203,893,900.00**	**147,030,600.00**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	42,066,000.00	82,093,900.00	203,893,900.00	161,827,900.00
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	40 Orang	40 Orang	30,165,000.00	70,198,900.00	98,098,900.00	67,933,900.00
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	60 Orang	60 Orang	11,901,000.00	11,895,000.00	105,795,000.00	93,894,000.00
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**252,649,000.00**	**252,649,000.00**	**252,649,000.00**	**60,845,000.00**
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	252,649,000.00	252,649,000.00	252,649,000.00	0.00
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	100,140,000.00	100,140,000.00	100,140,000.00	0.00
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	12,010,000.00	12,010,000.00	12,010,000.00	0.00
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	45,240,000.00	45,240,000.00	45,240,000.00	0.00
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	35,740,000.00	35,740,000.00	35,740,000.00	0.00
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	59,519,000.00	59,519,000.00	59,519,000.00	0.00
		KELURAHAN LONGKALI					**1,714,972,092.00**	**1,964,972,092.00**	**1,969,972,092.00**	**255,000,000.00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**1,714,972,092.00**	**1,964,972,092.00**	**1,969,972,092.00**	**255,000,000.00**

	7.01	**KECAMATAN**					**1,714,972,092.00**	**1,964,972,092.00**	**1,969,972,092.00**	**255,000,000.00**
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**745,156,242.00**	**795,156,242.00**	**795,156,242.00**	**1,413,758.00**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	5,576,350.00	5,576,350.00	5,576,350.00	0.00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5,576,350.00	0.00	0.00	-5,576,350.00
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	371,970,780.00	371,970,780.00	371,970,780.00	0.00
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	106 Dokumen	106 Dokumen	106 Dokumen	371,970,780.00	0.00	0.00	-371,970,780.00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	149,103,362.00	199,103,362.00	199,103,362.00	50,000,000.00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	2,715,000.00	0.00	0.00	-2,715,000.00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	0.00	41,916,162.00	41,916,162.00	41,916,162.00

	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	15,346,300.00	0.00	0.00	-15,346,300.00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138 Laporan	138 Laporan	138 Laporan	0.00	139,125,900.00	139,125,900.00	139,125,900.00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	146,585,700.00	146,585,700.00	146,585,700.00	0.00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	146,585,700.00	0.00	0.00	-146,585,700.00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	65,340,050.00	65,340,050.00	65,340,050.00	0.00
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	0.00	1,310,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	53,723,800.00	0.00	0.00	-53,723,800.00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0.00	10,306,250.00	10,306,250.00	10,306,250.00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Inventaris dalam kondisi baik	-	80 %	80 %	6,580,000.00	6,580,000.00	6,580,000.00	0.00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	0.00	6,580,000.00	6,580,000.00	6,580,000.00
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Kecamatan**	**-**	**85 %**	**85 %**	**511,234,950.00**	**511,234,950.00**	**511,234,950.00**	**3,519,250.00**

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	83 %	83 %	10,654,200.00	10,654,200.00	10,654,200.00	0.00
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10,654,200.00	0.00	0.00	-10,654,200.00
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Presentase Sarana dan Prasarana pelayanan umum yang layak	-	70 %	70 %	500,580,750.00	500,580,750.00	500,580,750.00	0.00
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,580,750.00	0.00	0.00	-500,580,750.00

3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**-**	**100 %**	**100 %**	**445,968,400.00**	**645,968,400.00**	**645,968,400.00**	**15,863,900.00**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	-	100 %	100 %	50,192,300.00	50,192,300.00	50,192,300.00	0.00
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50,192,300.00	0.00	0.00	-50,192,300.00
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	-	100 %	100 %	395,776,100.00	595,776,100.00	595,776,100.00	200,000,000.00
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	5,298,300.00	0.00	0.00	-5,298,300.00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	3 Unit	3 Unit	0.00	161,218,700.00	161,218,700.00	161,218,700.00
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	376,630,000.00	0.00	0.00	-376,630,000.00
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0.00	13,847,800.00	13,847,800.00	13,847,800.00
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	5 Orang	5 Orang	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu**	**-**	**100 %**	**100 %**	**12,612,500.00**	**12,612,500.00**	**12,612,500.00**	**2,791,500.00**
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	-	22 Desa	22 Desa	12,612,500.00	12,612,500.00	12,612,500.00	0.00
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	12,612,500.00	12,612,500.00	12,612,500.00

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kantor Kecamatan Long Kali mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Long Kali, Juli 2024

Camat



M. ARFAH, S.STP

NIP. 198508112003121003

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN LONG KALI
JL.Negara Penajam – Kuaro Km. 68 RT.016 No.01 Telp.
(0543) 5231652 LONG KALI (Kode Pos 76283)

KEPUTUSAN CAMAT LONG KALI

NOMOR : 23 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PADA PEMERINTAH KANTOR KECAMATAN LONG KALI

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) dengan menetapkan dalam Keputusan Camat Long Kali Kabupaten Paser.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancanagan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

14. Kepmendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Iiventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2021- 2026.

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Mengesahkan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Long Kali, Juli 2024

Camat



M. ARFAH, S.STP

NIP. 198508112003121003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Paser di Tana Paser
2. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tana Paser
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser
4. Kepala Bappeda Kabupaten Paser di Tana Paser
5. Inspektur Kabupaten Paser di Tana Paser
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
7. Arsip.

Lampiran Keputusan Camat Long Kali

Nomor : 23 Tahun 2024

Tanggal : Juli 2024

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Long kali Tahun 2024

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PADA PEMERINTAH KANTOR KECAMATAN LONG KALI TAHUN 2024

Supervisi : Camat

Ketua : Sekretaris Camat

Sekretaris : Kasubbag Program dan Keuangan

Anggota : 1. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2. Pengadministrasi Keuangan

Ditetapkan di : Long Kali
Pada Tanggal : Juli 2024

Camat



M. ARFAH, S.STP

NIP. 198508112003121003

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN BATU SOPANG

RENJA PERUBAHAN TANUN 2024

"Olo Manin Aso Buen Siolondo"
Hari Esok Lebih Baik dari Hari Ini

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Perkenan- Nya Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Sopang Tahun 2024, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan kedudukannya, dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja di Tahun 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran di Tahun 2024. Sedangkan sasarannya adalah terjabarkannya Rencana Strategis Kecamatan Batu Sopang Tahun 2021 – 2026 khususnya Rencana Kerja di Tahun 2024.

Rencana Kerja ini memuat Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

Semoga Perubahan Rencana Kerja ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistimatika 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU **8**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24

2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Derah 26

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD 27

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATA **41**

3.1. Tujuan dan sasaran 41

3.2. Review terhadap rancangan perubahan RKPD Tahun 2024 42

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan PD Tahun 2024 57

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **83**

4.1. Program dan Kegiatan 83

BAB V PENUTUP **109**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangkapendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kantor Camat Batu Sopang hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kantor Camat Batu Sopang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

22. Peraturan Bupati Paser Nomor ... Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024
25. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Tanggal 20 September 2024
26. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah.
27. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Tanggal 20 September 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi

makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Kantor Kecamatan Batu Sopang, proses penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Batu Sopang, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Kantor Kecamatan Batu Sopang, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Batu Sopang

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TW II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Batu Sopang Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kantor Camat Batu Sopang maka melalui APBD Kabupaten Paser tahun 2024 disediakan dana sebesar Rp. 5.852.662.308,00 (Lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan ribu Rupiah). Adapun Realisasi Anggaran Kantor Camat Batu Sopang TW II tahun 2024 sebesar Rp. 2.452.265.683,00 (Dua miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga Rupiah) atau sebesar 41,90 % dari pagu yang tersedia.

Berikut akan disajikan Tabel Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Batu Sopang tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatab Batu Sopang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahhun – tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Batu Sopang tahun berjalan (Tahun 2024). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Batu Sopang sampai dengan tahun 2024, disajikan sebagaimana table 1 berikut:

Pencapaian Target Kinerja dan Anggaran secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

IKHTISAR REALISASI ANGGARAN TARGET KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT BATU SOPANG TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	0
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	5,72
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dantunjangan ASN	47,05	44,97
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	41,74
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100	0
		Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	53,33	53,23
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	99,99
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50	49,51
			Penyelenggaraan rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46	40,02
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50	46,40
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	50	42,86
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	66,6	44,60

		Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Operasional		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	99,97
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33,33	6,41
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	49,80	48,89
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50	34,17
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Peningkatan Efektifiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00	62,65
			Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	99,46	99,46
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50	49,31
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100	100
		Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	100,00	99,97

			Republik Indonesia		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umumsesuai penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	0
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30,76	30,02
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	44,44	31,40
			Fasilittasi administrasi tata pemerintahan Desa	33,3	7,87
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	0	0
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	66,66	41,05
			Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya	0	0

			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0	0

Adapun hasil analisa yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja dan keuangan dapat dikategorikan sebagai berikut :

1) Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan:

Adapun realisasi capaian program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi capaian target kinerja dan keuangan adalah sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capaian kinerja	Capaian Keuangan
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	0	0

			serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	0	0
			Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	0	0
			Fasilitas penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa sertapenetapan dan penegasan batas desa	0	0

2) Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Secara keseluruhan program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 TW II telah memenuhi target kinerja yang direncanakan. Adapun realisasi capaian program yang telah memenuhi target kinerja dan keuangan adalah sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capaian kinerja	Capaian Keuangan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	0
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	5,72
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47,05	44,97
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	41,74
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100	0
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	53,33	53,23
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	99,99
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50	49,,51
			Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46	40,02
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50	46,40
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50	42,86

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	66,6	44,60
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	100	99,97
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33,33	6,41
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	49,80	48,89
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50	34,17
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Peningkatan Partisipadi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	62,65

			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99,,46	99,46
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tantara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50	49,31
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daearah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	99,97
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30,76	30,02

			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	44,44	31,40
			Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	33,3	7,87
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitas pengelolahan perencanaan desa dan pembedayagunaan asset desa	66,66	41,05

3) Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

- Faktor penyebab keberhasilan:

  Secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang berarti dalam pencapaian target kinerja dan keuangan.

  Keberhasilan capaian

  kinerja dan keuangan yang dicapai disebabkan karena pelaksanaan program maupun kegiatan dibarengi dengan peng-spj-an yang tepat waktu.

- Faktor penyebab kegagalan:

  Sedangkan kegagalan capaian kinerja dan keuangan bukan disebabkan kegagalan pengelolaan

anggaran atau kegiatan. Yang terjadi hanya ada beberapa kegiatan mengalami perubahan anggaran dikarenakan anggaran yang tersedia digeser untukmembiayai program dan kegiatan lain sehingga anggaran yang bersangkutan dikurangi atau dinolkan, dan ada belanja kegiatan yang memang tidak dilaksanakan yaitu pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional.

4) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi atau dampak langsung yang timbul dari pencapaian target realisasi capaian kinerja terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa/kelurahan
- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis
- Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Meningkatnya Keberdayaan masyarakat perdesaan
- Meningkatnya percepatan pembangunan kecamatan

5) Kebijakan untuk menindaklanjuti kegagalan pencapaian target

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan alam perencanaan penganggaran untuk mengantisipasi kegagalan pencapaian kinerjaprogram/kegiatan adalah:

- Dengan melakukan perencanaan dan penganggaran yang lebihmatang
- Melakukan efisiensi serta efektifitas anggaran yang disesuaikandengan kebutuhan di lapangan.

- Evaluasi dan estimasi serapan anggaran secara berkala sebagai bahan pertimbangan pada saat penyusunan anggaran perubahan di tahun berjalan.Sehingga tidak terjadi kelebihan anggaran di satu program atau kegiatan yang pada akhirnya tidak mampu terserap secara maksimal.
- Perlu adanya pembinaan dan peningkatan keterampilan serta kompetensi aparatur Kecamatan
- Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana serta pembuatan aplikasi pelayanan guna peningkatan kualitas pelayanan di Kecamatan

TC. 29 Rincian ikhtisar realisasi anggaran target kinerja keuangan pada Kantor Kecamatan Sopang dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2022 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=(13/5)*100		15
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		Kantor Camat Batu Sopang							**Rp 5.852.662.308**		**Rp 413.834.455**		**Rp 509.394.836**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp 923.229.291**		**Rp 7.165.841.790**			
		Kantor Camat Batu Sopang							**Rp 5.852.662.308**		**Rp 413.834.455**		**Rp 509.394.836**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp 923.229.291**		**Rp 7.165.841.790**			
1	**S1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinaerja Pemerintah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**80**	**Rp 22.577.629.547,34**	**72**	**Rp 3.413.855.399**	**84**	**Rp 4.320.360.173**	**20**	**Rp 228.150.155**	**20**	**Rp 110.381.736**					**40**	**R338.531.891,00p**	**112**	**3.752.387.290**	**140**	**16,61993**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu**	**80**	**Rp 106.919.457,79**	**82**	**Rp 16.970.100**	**84**	**Rp 17.958.600**	**0**	**Rp -**	**20**	**Rp -**					**20**	**Rp -**	**102**	**16.970.100**	**127,5**	**15,87185**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 23.445.696,22	**5**	**Rp 4.643.400**	**5**	**Rp 5.632.000**	**0**	**Rp -**	**3**	**Rp -**					**3**	**Rp -**	**8**	**4.643.400**	**160**	**19,80491**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Rp 47.341.054,15	**4**	**Rp 12.326.700**	**4**	**Rp 12.326.600**	**0**	**Rp -**	**2**	**Rp -**					**2**	**Rp -**	**6**	**12.326.700**	**150**	**26,03808**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase temuan ditindak lanjuti**	**126**	**Rp 20.457.475.731,28**	**85**	**Rp 2.899.929.716**	**85**	**Rp 3.587.663.623**	**20**	**Rp 73.682.377**	**25**	**Rp -**					**45**	**Rp 73.682.377,00**	**130**	**2.973.612.093**	**103,175**	**14,53558**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238	Rp 19.743.122.154,52	**14**	**Rp 2.744.523.776**	**238**	**Rp 3.387.500.000**	**56**	**Rp 462.236.976**	**56**	**Rp 992.320.398**					**112**	**Rp 1.454.557.374,00**	**126**	**4.199.081.150**	**52,941**	**21,26858**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	135	Rp 688.660.295,07	**100**	**Rp 152.705.940**	**120**	**Rp 197.463.623**	**36**	**Rp 34.370.800**	**36**	**Rp 48.056.200**					**72**	**Rp 82.427.000,00**	**172**	**235.132.940**	**127,407**	**34,14353**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Rp 13.632.980,10	**2**	**Rp 2.700.000**	**2**	**Rp 2.700.000**	**1**	**Rp -**	**1**	**Rp -**					**2**	**Rp -**	**4**	**2.700.000**	**200**	**19,80491**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentase rata rata capaian IKI dengan nilai ≥ 75**	**80**	**Rp 60.399.403,55**	**75**	**Rp 14.602.000**	**75**	**Rp 16.079.010**	**40**	**Rp 6.662.000**	**0**	**Rp 1.897.000**					**40**	**Rp 8.559.000,00**	**115**	**23.161.000**	**143,75**	**38,34641**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15	Rp 60.399.403,55	**15**	**Rp 14.602.000**	**15**	**Rp 16.079.010**	**6**	**Rp 6.662.000**	**2**	**Rp 1.897.000**					**8**	**Rp 8.559.000,00**	**23**	**23.161.000**	**153,333**	**38,34641**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100**	**Rp 585.341.321,97**	**100**	**Rp 178.903.866**	**100**	**Rp 332.155.840**	**25**	**Rp 89.737.900**	**25**	**Rp 48.184.800**					**50**	**Rp 137.922.700,00**	**150**	**316.826.566**	**150**	**54,12681**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Rp 9.781.410,76	**3**	**Rp 1.927.200**	**3**	**Rp 3.305.200**	**3**	**Rp 3.305.100**	**0**	**Rp -**					**3**	**Rp 3.305.100,00**	**6**	**5.232.300**	**200**	**53,49228**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26	Rp 142.457.724,54	**25**	**Rp 33.236.000**	**26**	**Rp 31.780.640**	**7**	**Rp 8.834.200**	**6**	**Rp 6.899.500**					**13**	**Rp 15.733.700,00**	**38**	**48.969.700**	**146,154**	**34,3749**	**Kantor Camat Batu Sopang**

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Rp 389.468.995,13	95	Rp 143.740.666	100	Rp 297.070.000	26	Rp 77.598.600	20	Rp 41.285.300					46	R p 118.883.900,00	141	262.624.566	141	67,43144	Kantor Camat Batu Sopang
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	**100**	**Rp 91.694.558,34**	**100**	**Rp 55.182.200**	**100**	**Rp 26.092.800**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**					**0**	**R p -**	**100**	**55.182.200**	**100**	**60,18045**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Rp 66.694.558,34	**5**	**Rp 55.182.200**	**5**	**Rp 26.092.800**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**					**0**	**R p -**	**5**	**55.182.200**	**100**	**82,73868**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat**	**85**	**Rp 1.065.348.689,46**	**80**	**Rp 214.100.300**	**100**	**Rp 218.213.000**	**25**	**Rp 40.657.409**	**25**	**Rp 54.888.694**					**50**	**R p 95.546.103,00**	**130**	**309.646.403**	**152,941**	**29,06526**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp 363.098.736,87	**12**	**Rp 60.000.300**	**12**	**Rp 57.213.000**	**3**	**Rp 17.657.409**	**3**	**Rp 8.888.694**					**6**	**R p 26.546.103,00**	**18**	**86.546.403**	**150**	**23,8355**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp 696.796.760,54	**12**	**Rp 154.100.000**	**12**	**Rp 161.000.000**	**3**	**Rp 23.000.000**	**3**	**Rp 46.000.000**					**6**	**R p 69.000.000,00**	**18**	**223.100.000**	**150**	**32,01794**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	**85**	**Rp 210.450.384,95**	**80**	**Rp 34.167.217**	**85**	**Rp 122.197.300**	**20**	**Rp 17.410.469**	**10**	**Rp 5.411.242**					**30**	**R p 22.821.711,00**	**110**	**56.988.928**	**129,412**	**27,07951**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Rp 110.578.616,35	**6**	**Rp 5.594.100**	**6**	**Rp 9.910.000**	**4**	**Rp 4.419.400**	**0**	**Rp -**					**4**	**R p 4.419.400,00**	**10**	**10.013.500**	**166,667**	**9,055548**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	Rp 39.576.541,22	**13**	**Rp 7.830.000**	**18**	**Rp 11.980.000**	**16**	**Rp 10.980.000**	**2**	**Rp 996.800**					**18**	**R p 11.976.800,00**	**31**	**19.806.800**	**163,158**	**50,04682**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Rp 60.295.227,38	**3**	**Rp 20.743.117**	**3**	**Rp 100.307.300**	**1**	**Rp 2.011.069**	**0**	**Rp 4.414.442**					**1**	**Rp 6.425.511,00**	**4**	**27.168.628**	**133,333**	**45,05933**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa yang menyampaikan LKP Desa tepat waktu**	**100**	**Rp 468.829.335,55**	**80**	**Rp 84.000.000**	**100**	**Rp 135.160.000**	**25**	**Rp 9.600.000**	**25**	**Rp 24.362.000**					**50**	**Rp 33.962.000,00**	**130**	**117.962.000**	**130**	**25,16097**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa yang terfasilitasi**	**9**	**Rp 468.829.335,55**	**9**	**Rp 84.000.000**	**9**	**Rp 135.160.000**	**2**	**Rp 9.600.000**	**2**	**Rp 24.362.000**					**4**	**Rp 33.962.000,00**	**13**	**117.962.000**	**144,444**	**25,16097**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	9	Rp 22.620.648,46	**9**	**Rp 4.420.000**	**9**	**Rp 4.600.000**	**0**	**Rp -**	**3**	**Rp 362.000**					**3**	**Rp 362.000,00**	**12**	**4.782.000**	**133,333**	**21,13998**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	Rp 275.335.705,45	**9**	**Rp 67.990.000**	**9**	**Rp 81.850.000**	**3**	**Rp 9.600.000**	**3**	**Rp 24.000.000**					**6**	**Rp 33.600.000,00**	**15**	**101.590.000**	**166,667**	**36,89678**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	Rp 44.771.800,00	**0**	**Rp -**	**4**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**					**0**	**Rp -**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9	Rp 26.507.925,60	**9**	**Rp 6.500.000**	**9**	**Rp 6.000.000**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**					**0**	**Rp -**	**9**	**6.500.000**	**100**	**24,52097**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2	Rp 36.139.307,57	**2**	**Rp 3.825.000**	**2**	**Rp 3.825.000**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**					**0**	**Rp -**	**2**	**3.825.000**	**100**	**10,58404**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9	Rp 16.066.719,51	**9**	**Rp 1.265.000**	**9**	**Rp 1.265.000**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**					**0**	**Rp -**	**9**	**1.265.000**	**100**	**7,873418**	**Kantor Camat Batu Sopang**
2	**S2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan**	**80**	**Rp 3.667.623.988,55**	**72**	**Rp 2.016.756.300**	**80**	**Rp 692.577.135**	**20**	**Rp 74.324.700**	**20**	**Rp 197.173.000**					**40**	**Rp 271.497.700,00**	**112**	**2.288.254.000**	**140**	**62,39064**	**Kantor Camat Batu Sopang**

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100**	**Rp 407.882.101,99**	**100**	**Rp 115.330.000**	**100**	**Rp 122.040.000**	**25**	**Rp 16.734.000**	**25**	**Rp 42.936.000**					**50**	**Rp 59.670.000,00**	**150**	**175.000.000**	**150**	**42,90455**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	260	Rp 407.882.101,99	**255**	**Rp 115.330.000**	**257**	**Rp 122.040.000**	**64**	**Rp 16.734.000**	**64**	**Rp 42.936.000**					**128**	**Rp 59.670.000,00**	**383**	**175.000.000**	**147,308**	**42,90455**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100**	**Rp 2.131.453.530,08**	**100**	**Rp 206.577.350**	**100**	**Rp 251.528.195**	**25**	**Rp 31.190.700**	**25**	**Rp 71.617.000**					**50**	**Rp 102.807.700,00**	**150**	**309.385.050**	**150**	**14,51521**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	Rp 1.131.453.530,52	**4**	**Rp 206.577.350**	**4**	**Rp 251.528.195**	**1**	**Rp 31.190.700**	**1**	**Rp 71.617.000**					**2**	**Rp 102.807.700,00**	**6**	**309.385.050**	**150**	**27,34404**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat**	**100**	**Rp 1.128.288.356,48**	**100**	**Rp 1.694.848.950**	**100**	**Rp 319.008.940**	**25**	**Rp 26.400.000**	**25**	**Rp 82.620.000**					**50**	**Rp 109.020.000,00**	**150**	**1.803.868.950**	**150**	**159,8766**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Rp 1.128.288.356,48	**4**	**Rp 1.694.848.950**	**4**	**Rp 319.008.940**	**1**	**Rp 26.400.000**	**1**	**Rp 82.620.000**					**2**	**Rp 109.020.000,00**	**6**	**1.803.868.950**	**150**	**159,8766**	**Kantor Camat Batu Sopang**
3	**S.3 Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusih**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban**	**70**	**Rp 1.637.685.465,71**	**55**	**Rp 356.984.150**	**75**	**Rp 411.605.400**	**15**	**Rp 61.250.000**	**10**	**Rp 153.901.500**					**25**	**Rp 215.151.500,00**	**80**	**572.135.650**	**114,286**	**34,93562**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**Rp 1.535.310.621,37**	**100**	**Rp 327.916.150**	**100**	**Rp 374.389.400**	**25**	**Rp 51.830.000**	**25**	**Rp 145.781.500**					**50**	**Rp 197.611.500,00**	**150**	**525.527.650**	**150**	**34,2294**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Rp 1.521.363.325,34	**12**	**Rp 325.153.900**	**12**	**Rp 348.717.400**	**3**	**Rp 51.830.000**	**3**	**Rp 120.117.500**					**6**	**Rp 171.947.500,00**	**18**	**497.101.400**	**150**	**32,67473**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9	Rp 13.947.296,03	**3**	**Rp 2.762.250**	**4**	**Rp 25.672.000**	**0**	**Rp -**	**4**	**Rp 25.664.000**					**4**	**Rp 25.664.000,00**	**7**	**28.426.250**	**77,7778**	**203,8119**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	**Presentase penyelenggaraan Penerapan dan PenegakanPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100**	**Rp 102.374.844,34**	**100**	**Rp 29.068.000**	**100**	**Rp 37.216.000**	**25**	**Rp 9.420.000**	**0**	**Rp 8.120.000**					**25**	**Rp 17.540.000,00**	**125**	**46.608.000**	**125**	**45,52681**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi bidang penegakkan peraturan yang dilaksanakan	12	Rp 102.374.844,34	**12**	**Rp 29.068.000**	**12**	**Rp 37.216.000**	**3**	**Rp 9.420.000**	**3**	**Rp 8.120.000**					**6**	**Rp 17.540.000,00**	**18**	**46.608.000**	**150**	**45,52681**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan**	**100**	**Rp 311.306.575,90**	**70**	**Rp 152.390.500**	**100**	**Rp 198.330.000**	**25**	**Rp 20.416.000**	**25**	**Rp 22.900.600**					**50**	**Rp 43.316.600,00**	**120**	**195.707.100**	**120**	**62,86636**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**Rp 311.306.575,90**	**100**	**Rp 152.390.500**	**100**	**Rp 198.330.000**	**25**	**Rp 20.416.000**	**25**	**Rp 22.900.600**					**50**	**Rp 43.316.600,00**	**150**	**195.707.100**	**150**	**62,86636**	**Kantor Camat Batu Sopang**

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60	Rp 37.081.705,87	60	Rp 44.981.000	60	Rp 69.500.000	0	Rp -	0	Rp -					0	Rp -	60	44.981.000	100	121,3024	Kantor Camat Batu Sopang
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	65	Rp 17.344.180,24	60	Rp 60.314.500	65	Rp 77.590.000	7	Rp 9.126.000	13	Rp 10.900.600					20	Rp 20.026.600,00	80	80.341.100	123,077	463,2165	Kantor Camat Batu Sopang
		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kantor Camat Batu Sopang)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	9	Rp 256.880.689,80	9	Rp 47.095.000	9	Rp 51.240.000	1	Rp 11.290.000	3	Rp 12.000.000					4	Rp 23.290.000,00	13	70.385.000	144,444	27,3998	Kantor Camat Batu Sopang
4	**S4. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**	**40**	**Rp 463.449.371,48**	**75**	**Rp 218.626.150**	**85**	**Rp 94.629.600**	**20**	**Rp 20.093.600**	**20**	**Rp 676.000**					**40**	**Rp 20.769.600,00**	**115**	**239.395.750**	**287,5**	**51,65521**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	**88**	**Rp 463.449.371,48**	**85**	**Rp 218.626.150**	**85**	**Rp 94.629.600**	**20**	**Rp 20.093.600**	**20**	**Rp 676.000**					**40**	**Rp 20.769.600,00**	**125**	**239.395.750**	**142,045**	**51,65521**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Rp 200.201.575,05	**6**	**Rp 33.149.750**	**6**	**Rp 33.149.600**	**6**	**Rp 20.093.600**	**0**	**Rp 676.000**					**6**	**Rp 20.769.600,00**	**12**	**53.919.350**	**200**	**26,93253**	**Kantor Camat Batu Sopang**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Rp 263.247.796,43	**4**	**Rp 185.476.400**	**4**	**Rp 61.480.000**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**					**0**	**Rp -**	**4**	**185.476.400**	**133,333**	**70,45696**	**Kantor Camat Batu Sopang**
			Rata-rata capaian kinerja (%)																				
			Predikat Kinerja																				

2.2 Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Kecamatan Batu Sopang, merupakan lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Di sisi lain, Kabupaten Paser sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara, merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Paser dan masyarakat Kecamatan Batu Sopang khususnya.

Kecamatan Batu Sopang selaku lembaga teknis di bidang perencanaan harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dappat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah – ubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Kecamatan Batu Sopang yang berfungsi sebagai Peranggkat Daerah Koordinatif dan pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelatyanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batu Sopang dapat dicapai bila indeks kepuasan masyarakat tercapai sesuai dengan target RPJMD Kanbupataen Paser Tahun 2021 – 2026.

TABEL TC-30

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 KECAMATAN BATU SOPANG

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi		Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	
I. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi								
1).Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP dari Inspektorat	B	B	B	B	B	B	65	100
2).Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	80	80	81	82	82	87,53	0	0
3). Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif	Angka Kriminalitas	20	67	57	50	50	49	0	0
II.Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan								
4). Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	80	80	85	85	85	80	0	0

Melihat kondisi tersebut di atas, Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser selaku lembaga teknis mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan, baik tingkat kabupten maupun tingkat Kecamatan dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat,
4. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

2.3 Isu – Isu penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya maka isu – isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Batu Sopang antara lain sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan public yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih Kurangnya sarana dan prasarana pelayanaan public guna mendukung pelaksanaan pelayanan public yang berkualitas.
3. Belum semua system pelayanaan public terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruuhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggran PERDA tentang ketentraman dan ketertiban umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

6. Masih banyaknya infrastruktur dasar baik jalan, jembatan, saluran drainas, sarana Pendidikan dan sarana Kesehatan yang kurang baik dan mendesak untuk dibangun.
7. Perlunya peningkatan kualitas tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan, guna menciptakan pelayyanan publik yang berkualitas di Desa dan Kelurahan.
8. Masih kurang memadai anggaran yang diterima oleh Kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di Kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja (RENJA) RKPD

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Batu Sopang Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten paser Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Sopang Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, pasal 125—143.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaran Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kot, penyusunan RKPD Kabupaten/Kota berpedoman pada sasran pokok arah kebijakan RPJMD Kabupaten Paser dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam di dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 seperti yang tertuang dalam table berikut.

Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Batu Sopang

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kantor Camat Batu Sopang	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	84	4.320.360.173,00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kantor Camat Batu Sopang	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	84	4.516.078.145,20	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu**	84	17.958.600,00	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu**	84	17.958.600,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5.632.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5.632.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	12.326.600,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	12.326.600,00	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase temuan ditindak lanjuti**	85	3.587.663.623,00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase temuan ditindak lanjuti**	85	3.613.295.623,20	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238	3.387.500.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238	3.387.500.000,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	120	197.463.623,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	120	223.095.623,20	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2.700.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2.700.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase rata rata capaian IKI dengan nilai ≥ 75**	75	16.079.010,00	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase rata rata capaian IKI dengan nilai ≥ 75**	75	136.679.010,00	

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15	16.079.010,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15	136.679.010,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	100	332.155.840,00	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	100	337.355.839,93	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3.305.200,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3.305.199,97	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26	31.780.640,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26	36.980.640,01	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	297.070.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	297.069.999,95	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	100	26.092.800,00	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	100	26.092.800,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	26.092.800,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	26.092.800,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	**Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat**	100	218.213.000,00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kantor Camat Batu Sopang	**Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat**	100	234.350.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	57.213.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	73.350.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	161.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	161.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	85	122.197.300,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	85	176.439.072,07	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	9.910.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	11.630.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	11.980.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	11.980.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	100.307.300,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	152.829.072,07	
2	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase desa yang menyampaikan LKP Desa tepat waktu**	100	135.160.000,00	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase desa yang menyampaikan LKP Desa tepat waktu**	100	136.363.999,50	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Batu Sopang	**Jumlah Desa yang terfasilitasi**	9	135.160.000,00	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kantor Camat Batu Sopang	**Jumlah Desa yang terfasilitasi**	9	136.363.999,50	

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	9	4.600.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	9	5.384.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	81.850.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	82.270.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	37.620.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	37.620.000,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9	6.000.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9	6.000.000,00	

	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2	3.825.000,00	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2	3.824.999,50	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9	1.265.000,00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9	1.265.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Batu Sopang	**Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan**	80	692.577.135,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kantor Camat Batu Sopang	**Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan**	80	1.699.204.934,97	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	100	122.040.000,00	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	100	128.645.200,00	

	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	257	122.040.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	257	128.645.200,00	
3	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	100	251.528.195,00	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	100	1.185.867.794,97	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	251.528.195,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	1.185.867.794,97	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat**	100	319.008.940,00	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat**	100	384.691.940,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	319.008.940,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	384.691.940,00	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban**	75	411.605.400,00	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban**	75	424.587.599,70	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	100	374.389.400,00	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	100	377.721.599,80	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	348.717.400,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	352.049.600,00	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	25.672.000,00	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	25.671.999,80	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase penyelenggaraan Penerapan dan PenegakanPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	100	37.216.000,00	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase penyelenggaraan Penerapan dan PenegakanPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	100	46.865.999,90	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah kegiatan koordinasi bidang penegakkan peraturan yang dilaksanakan	12	37.216.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah kegiatan koordinasi bidang penegakkan peraturan yang dilaksanakan	12	46.865.999,90	

5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan**	100	198.330.000,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan**	100	217.928.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	100	198.330.000,00	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	100	217.928.000,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60	69.500.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60	89.098.000,00	

	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	65	77.590.000,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	65	77.590.000,00	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kantor Camat Batu Sopang)	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	9	51.240.000,00	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kantor Camat Batu Sopang)	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	9	51.240.000,00	
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kantor Camat Batu Sopang	**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**	85	94.629.600,00	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kantor Camat Batu Sopang	**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**	85	201.662.599,50	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	85	94.629.600,00	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	85	201.662.599,50	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	33.149.600,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	33.149.600,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	61.480.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	168.512.999,50	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Batu Sopang sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang pelayanan publik perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser tidak mengalami perubahan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Renja Perubahan 2024
Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai hasil evaluasi SAKIP atas Implementasi Sistem Akuntabilitas	B	B
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil penghitungan survey indeks kepuasan masyarakat setiap tahun	81	81
Sasaran : Meningkatnya lingkungan daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	Jumlah kriminalitas setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000	57	57
Tujuan : Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan			

Sasaran : Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dibagi Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang ada dikalikan 100	85	85

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Kanntor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu ““PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER”” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur

7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Batu Sopang mendukung pencapaian sasaran ke-1 s.d 4, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan
3. Meningkatnya lingkungan Daerah yang kondusif
4. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Kecamatan Batu Sopang telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut

Tabel. 3.3
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kecamatan Batu Sopang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kantor Camat Batu Sopang	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	84	4.320.360.173,00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kantor Camat Batu Sopang	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	84	4.516.078.145,20	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu**	84	17.958.600,00	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu**	84	17.958.600,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5.632.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5.632.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	12.326.600,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	12.326.600,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase temuan ditindak lanjuti**	85	3.587.663.623,00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase temuan ditindak lanjuti**	85	3.613.295.623,20	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238	3.387.500.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238	3.387.500.000,00	

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	120	197.463.623,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	120	223.095.623,20	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2.700.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2.700.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase rata rata capaian IKI dengan nilai ≥ 75**	75	16.079.010,00	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase rata rata capaian IKI dengan nilai ≥ 75**	75	136.679.010,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15	16.079.010,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15	136.679.010,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	100	332.155.840,00	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	100	337.355.839,93	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3.305.200,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3.305.199,97	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26	31.780.640,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26	36.980.640,01	
	Penyelenggaraan Rapat Koorinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	297.070.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	297.069.999,95	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	100	26.092.800,00	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	100	26.092.800,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	26.092.800,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	26.092.800,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	**Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat**	100	218.213.000,00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kantor Camat Batu Sopang	**Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat**	100	234.350.000,00	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	57.213.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	73.350.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	161.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	161.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	85	122.197.300,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	85	176.439.072,07	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	9.910.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	11.630.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	11.980.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	11.980.000,00	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	100.307.300,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	152.829.072,07	
2	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase desa yang menyampaikan LKP Desa tepat waktu**	100	135.160.000,00	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase desa yang menyampaikan LKP Desa tepat waktu**	100	136.363.999,50	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Batu Sopang	**Jumlah Desa yang terfasilitasi**	9	135.160.000,00	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kantor Camat Batu Sopang	**Jumlah Desa yang terfasilitasi**	9	136.363.999,50	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	9	4.600.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	9	5.384.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	81.850.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	82.270.000,00	

	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	37.620.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	37.620.000,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9	6.000.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9	6.000.000,00	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2	3.825.000,00	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2	3.824.999,50	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9	1.265.000,00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9	1.265.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Batu Sopang	**Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan**	80	692.577.135,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kantor Camat Batu Sopang	**Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan**	80	1.699.204.934,97	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	100	122.040.000,00	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	100	128.645.200,00	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	257	122.040.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	257	128.645.200,00	
3	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	100	251.528.195,00	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	100	1.185.867.794,97	

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	251.528.195,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	1.185.867.794,97	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat**	100	319.008.940,00	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat**	100	384.691.940,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	319.008.940,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	384.691.940,00	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban**	75	411.605.400,00	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban**	75	424.587.599,70	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	100	374.389.400,00	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	100	377.721.599,80	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	348.717.400,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	352.049.600,00	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	25.672.000,00	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	25.671.999,80	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase penyelenggaraan Penerapan dan PenegakanPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	100	37.216.000,00	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase penyelenggaraan Penerapan dan PenegakanPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	100	46.865.999,90	

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah kegiatan koordinasi bidang penegakkan peraturan yang dilaksanakan	12	37.216.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah kegiatan koordinasi bidang penegakkan peraturan yang dilaksanakan	12	46.865.999,90	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan**	100	198.330.000,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kantor Camat Batu Sopang	**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan**	100	217.928.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	100	198.330.000,00	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	100	217.928.000,00	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60	69.500.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60	89.098.000,00	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	65	77.590.000,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	65	77.590.000,00	

	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kantor Camat Batu Sopang)	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	9	51.240.000,00	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kantor Camat Batu Sopang)	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	9	51.240.000,00	
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kantor Camat Batu Sopang	**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**	85	94.629.600,00	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kantor Camat Batu Sopang	**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**	85	201.662.599,50	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	85	94.629.600,00	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kantor Camat Batu Sopang	**Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	85	201.662.599,50	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	33.149.600,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	33.149.600,00	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	61.480.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Batu Sopang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	168.512.999,50	

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Kecamatan Batu Sopang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Batu Sopang

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kantor Camat Batu Sopang							5.802.662.308,00	5.852.662.308,00	6.289.527.071,00							6.411.889.779,80	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							5.802.662.308,00	5.852.662.308,00	6.289.527.071,00							6.411.889.779,80	
	7	01				KECAMATAN							5.802.662.308,00	5.852.662.308,00	6.289.527.071,00							6.411.889.779,80	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat				84 %	84 %	4.270.360.173,00	4.320.360.173,00	4.543.059.536,00							5.006.527.186,30	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	-			84 Persen	84 Persen	17.958.600,00	17.958.600,00	17.958.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola	Kecamatan Batu Sopang		14.471.724,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																		Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas				
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.632.000,00	5.632.000,00	5.632.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			4.799.823,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	12.326.600,00	12.326.600,00	12.326.600,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata			9.671.901,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																		Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas				
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindak lanjuti	-			85 %	85 %	3.587.663.623,00	3.587.663.623,00	3.615.731.623,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		4.305.032.506,30	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	238 0	3.387.500.000,00	3.387.500.000,00	3.387.500.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerinta			4.085.031.566,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																		han yang Responsive dan Tangkas				
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				120 Dokumen	120 Dokumen	197.463.623,00	197.463.623,00	225.531.623,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			217.209.985,30	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata			2.790.955,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																		Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas				
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase rata rata capaian dengan nilai ≥ 75	-			75 %	75 %	16.079.010,00	16.079.010,00	90.342.210,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		12.365.018,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15 Dokumen	15 Dokumen	16.079.010,00	16.079.010,00	90.342.210,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerinta			12.365.018,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																		han yang Responsive dan Tangkas				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	-			100 %	100 %	282.155.840,00	332.155.840,00	351.574.840,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		302.943.527,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.305.200,00	3.305.200,00	3.305.200,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerinta			2.002.459,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																		han yang Responsive dan Tangkas				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	31.780.640,00	31.780.640,00	31.780.640,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			29.164.068,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	247.070.000,00	297.070.000,00	316.489.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata			271.777.000,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																		Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas				
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	-			100 %	100 %	26.092.800,00	26.092.800,00	26.092.800,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		13.653.767,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	26.092.800,00	26.092.800,00	26.092.800,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerinta			13.653.767,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																		han yang Responsive dan Tangkas				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat	-			100 %	100 %	218.213.000,00	218.213.000,00	241.522.163,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		216.982.720,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57.213.000,00	57.213.000,00	80.522.163,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive			74.333.886,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																		dan Tangkas				
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	161.000.000,00	161.000.000,00	161.000.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			142.648.834,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	-			85 %	85 %	122.197.300,00	122.197.300,00	199.837.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerinta	Kecamatan Batu Sopang		141.077.924,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																		han yang Responsive dan Tangkas				
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	9.910.000,00	9.910.000,00	15.910.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			22.637.750,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	11.980.000,00	11.980.000,00	33.620.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata			8.102.144,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																			Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas				
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	100.307.300,00	100.307.300,00	150.307.300,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			110.338.030,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan				80 %	80 %	692.577.135,00	692.577.135,00	796.861.735,00							711.092.824,50	

	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-			100 %	100 %	122.040.000,00	122.040.000,00	135.840.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		83.501.976,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				257 Laporan	257 Laporan	122.040.000,00	122.040.000,00	135.840.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			83.501.976,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-			100 %	100 %	251.528.195,00	251.528.195,00	301.643.795,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		276.681.014,50	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	251.528.195,00	251.528.195,00	301.643.795,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			276.681.014,50	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat	-			100 %	100 %	319.008.940,00	319.008.940,00	359.377.940,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		350.909.834,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan															
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	4 Laporan	319.008.940,00	319.008.940,00	359.377.940,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			350.909.834,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif				85 %	85 %	94.629.600,00	94.629.600,00	157.268.600,00							94.877.755,00	

	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	-			85 %	85 %	94.629.600,00	94.629.600,00	157.268.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Desa sekecamatan Batu Sopang		94.877.755,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	33.149.600,00	33.149.600,00	33.149.600,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			40.985.439,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	61.480.000,00	61.480.000,00	124.119.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			53.892.316,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban				75 %	75 %	411.605.400,00	411.605.400,00	424.637.200,00							335.268.380,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 %	100 %	374.389.400,00	374.389.400,00	387.421.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		314.310.114,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	

							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	348.717.400,00	348.717.400,00	361.749.200,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			311.454.812,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	25.672.000,00	25.672.000,00	25.672.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			2.855.302,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan Penerapan dan PenegakanPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-			100 %	100 %	37.216.000,00	37.216.000,00	37.216.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		20.958.266,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	37.216.000,00	37.216.000,00	37.216.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			20.958.266,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan				-	100 %	198.330.000,00	198.330.000,00	238.330.000,00							145.529.235,00	

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			-	100 %	198.330.000,00	198.330.000,00	238.330.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		145.529.235,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara				60 Orang	60 Orang	69.500.000,00	69.500.000,00	69.500.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			7.591.399,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

							Kesatuan Republik Indonesia																
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				65 Orang	65 Orang	77.590.000,00	77.590.000,00	117.590.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			85.349.000,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																	

							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				9 Dokumen	9 Dokumen	51.240.000,00	51.240.000,00	51.240.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			52.588.836,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu				100 %	100 %	135.160.000,00	135.160.000,00	129.370.000,00							118.594.399,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	-			9 Desa	9 Desa	135.160.000,00	135.160.000,00	129.370.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Desa sekecamatan Batu Sopang		118.594.399,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																

							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			4.630.919,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	81.850.000,00	81.850.000,00	105.580.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			56.366.963,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																	

							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	37.620.000,00	37.620.000,00	-	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			41.382.000,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			4.553.640,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																	

							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	3.825.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			8.371.684,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				9 Laporan	9 Laporan	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			3.289.193,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	JUMLAH												5.802.662.308,00	5.852.662.308,00	6.289.527.071,00							6.411.889.779,80	

BAB lV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Dan Kegiatan.

Program, kegiatan dan pendanaan, disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 32 ayat (1) menyebutkan "Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dan RPJMD menggunakan bahan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah". Oleh karena itu Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Sopang disusun dengan bentuk matrik yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif untuk tahun 2024 s/d tahun 2025 beserta sumber dana kegiatan, sebagai berikut :

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Batu Sopang

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kantor Camat Batu Sopang							5.802.662.308,00	5.852.662.308,00	6.289.527.071,00							6.411.889.779,80	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							5.802.662.308,00	5.852.662.308,00	6.289.527.071,00							6.411.889.779,80	
	7	01				KECAMATAN							5.802.662.308,00	5.852.662.308,00	6.289.527.071,00							6.411.889.779,80	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat				84 %	84 %	4.270.360.173,00	4.320.360.173,00	4.543.059.536,00							5.006.527.186,30	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	-			84 Persen	84 Persen	17.958.600,00	17.958.600,00	17.958.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola	Kecamatan Batu Sopang		14.471.724,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																		Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas				
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.632.000,00	5.632.000,00	5.632.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			4.799.823,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	12.326.600,00	12.326.600,00	12.326.600,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerinta			9.671.901,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																		han yang Responsive dan Tangkas				
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindak lanjuti	-			85 %	85 %	3.587.663.623,00	3.587.663.623,00	3.615.731.623,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		4.305.032.506,30	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	238 0	3.387.500.000,00	3.387.500.000,00	3.387.500.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive			4.085.031.566,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																		dan Tangkas				
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				120 Dokumen	120 Dokumen	197.463.623,00	197.463.623,00	225.531.623,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			217.209.985,30	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerinta			2.790.955,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																		han yang Responsive dan Tangkas				
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase rata rata capaian dengan nilai ≥ 75	-			75 %	75 %	16.079.010,00	16.079.010,00	90.342.210,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		12.365.018,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15 Dokumen	15 Dokumen	16.079.010,00	16.079.010,00	90.342.210,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive			12.365.018,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																			dan Tangkas			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	-			100 %	100 %	282.155.840,00	332.155.840,00	351.574.840,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		302.943.527,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.305.200,00	3.305.200,00	3.305.200,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive			2.002.459,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																		dan Tangkas				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	31.780.640,00	31.780.640,00	31.780.640,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			29.164.068,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	247.070.000,00	297.070.000,00	316.489.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerinta			271.777.000,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																		han yang Responsive dan Tangkas				
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	-			100 %	100 %	26.092.800,00	26.092.800,00	26.092.800,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		13.653.767,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	26.092.800,00	26.092.800,00	26.092.800,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive			13.653.767,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																		dan Tangkas				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat	-			100 %	100 %	218.213.000,00	218.213.000,00	241.522.163,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		216.982.720,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57.213.000,00	57.213.000,00	80.522.163,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan			74.333.886,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																		Tangkas				
	7	0 1	0 1	2.0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	161.000.000 ,00	161.000.000 ,00	161.000.000 ,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Des a	Dana Trans fer Umu m-Dana Bagi Hasil	Memperk uat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	Pengemba ngan Kualitas Birokrasi dan Kondusivit as Daerah Dalam Mendukun g Tata Kelola Pemerinta han yang Responsive dan Tangkas			142.648.834 ,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	0 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	-			85 %	85 %	122.197.300 ,00	122.197.300 ,00	199.837.300 ,00			Memperk uat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transform asi Pelayanan Publik	Pengemba ngan Kualitas Birokrasi dan Kondusivit as Daerah Dalam Mendukun g Tata Kelola Pemerinta han yang Responsive	Kecamat an Batu Sopang		141.077.924 ,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																		dan Tangkas				
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	9.910.000,00	9.910.000,00	15.910.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			22.637.750,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	11.980.000,00	11.980.000,00	33.620.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerinta			8.102.144,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

																		han yang Responsive dan Tangkas				
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	100.307.300,00	100.307.300,00	150.307.300,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			110.338.030,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan				80 %	80 %	692.577.135,00	692.577.135,00	796.861.735,00							711.092.824,50	

	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-			100 %	100 %	122.040.000,00	122.040.000,00	135.840.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		83.501.976,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				257 Laporan	257 Laporan	122.040.000,00	122.040.000,00	135.840.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			83.501.976,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-			100 %	100 %	251.528.195,00	251.528.195,00	301.643.795,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		276.681.014,50	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	251.528.195,00	251.528.195,00	301.643.795,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			276.681.014,50	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat	-			100 %	100 %	319.008.940,00	319.008.940,00	359.377.940,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		350.909.834,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan															
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	4 Laporan	319.008.940,00	319.008.940,00	359.377.940,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			350.909.834,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif				85 %	85 %	94.629.600,00	94.629.600,00	157.268.600,00							94.877.755,00	

	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	-			85 %	85 %	94.629.600,00	94.629.600,00	157.268.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Desa sekecamatan Batu Sopang		94.877.755,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	33.149.600,00	33.149.600,00	33.149.600,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			40.985.439,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	61.480.000,00	61.480.000,00	124.119.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			53.892.316,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban				75 %	75 %	411.605.400,00	411.605.400,00	424.637.200,00							335.268.380,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 %	100 %	374.389.400,00	374.389.400,00	387.421.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		314.310.114,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	

							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	348.717.400,00	348.717.400,00	361.749.200,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			311.454.812,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	25.672.000,00	25.672.000,00	25.672.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			2.855.302,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan Penerapan dan PenegakanPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-			100 %	100 %	37.216.000,00	37.216.000,00	37.216.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		20.958.266,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	37.216.000,00	37.216.000,00	37.216.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			20.958.266,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan				-	100 %	198.330.000,00	198.330.000,00	238.330.000,00							145.529.235,00	

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			-	100 %	198.330.000,00	198.330.000,00	238.330.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Kecamatan Batu Sopang		145.529.235,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik				60 Orang	60 Orang	69.500.000,00	69.500.000,00	69.500.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			7.591.399,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

							Indonesia																
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				65 Orang	65 Orang	77.590.000,00	77.590.000,00	117.590.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			85.349.000,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																	

							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				9 Dokumen	9 Dokumen	51.240.000,00	51.240.000,00	51.240.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			52.588.836,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu				100 %	100 %	135.160.000,00	135.160.000,00	129.370.000,00							118.594.399,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	-			9 Desa	9 Desa	135.160.000,00	135.160.000,00	129.370.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Desa sekecamatan Batu Sopang		118.594.399,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																

							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			4.630.919,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	81.850.000,00	81.850.000,00	105.580.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			56.366.963,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																	

							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	37.620.000,00	37.620.000,00	-	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			41.382.000,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			4.553.640,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																	

							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	3.825.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			8.371.684,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				9 Laporan	9 Laporan	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas			3.289.193,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
												J U M L A H	5.802.662.308,00	5.852.662.308,00	6.289.527.071,00							6.411.889.779,80	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batu Sopang Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan batu Sopang mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

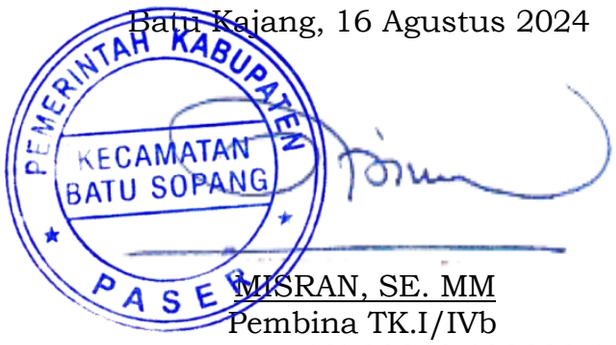
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

5.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum

Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Batu Kajang, 16 Agustus 2024



MISRAN, SE. MM
Pembina TK.I/IVb
NIP 19720210 199303 1 006

RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN MUARA KOMAM
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN MUARA KOMAM
TAHUN 2024

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Renja Perubahan Kantor Kecamatan Muara Komam Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun kedua dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024.

Renja Perubahan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Kantor Kecamatan Muara Komam Tahun Anggaran 2024. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Muara Komam, Juli 2024
CAMAT,

MUSTAFA, S.Sos
Pembina
NIP.197505272003121007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang..... **1**
B. Landasan Hukum..... **2**
C. Maksud dan Tujuan..... **3**
D. Sistematika Penyusunan ……..... **4**

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024 5
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024..... **5**
B. Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024..... **19**

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 38
A. Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2024..... **38**
B. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 ..... **41**

BAB IV PENUTUP..... 48

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah sebuah dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Selain dalam dokumen Renja Perangkat Daerah juga memuat lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan RKPD.

Proses penyusunan Renja diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rancangan Renja Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Rancangan Renja Pemerintah Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Proses penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 dan Renstra Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Muara Komam, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Muara Komam sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya Renja Perubahan Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja OPD mengacu pada perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser;
14. Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
15. Peraturan Bupati Paser Nomor 57 Tahun 2017 tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Paser 2016-2021.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
   a) Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun Anggaran.

D. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Sistematika Penyusunan Renja Kecamatan Muara Komam Tahun 2024 adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2024

B. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/ tidak tercapai kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/ perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

Hasil evaluasi Renja Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Muara Komam Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai denganRenja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 * 100		15
		KECAMATAN MUARA KOMAM			**37.231.260.860**		**5.769.407.190**		**7.047.109.288**		**1.096.260.516**		**1.981.037.731**	-	**3.077.298.247**	-	**8.846.705.437**	**#DIV/0!**	**23,76**	
		KANTOR KECAMATAN MUARA KOMAM			**37.231.260.860**		**5.769.407.190**		**7.047.109.288**		**1.096.260.516**		**1.981.037.731**	-	**3.077.298.247**	-	**8.846.705.437**	**#DIV/0!**	**23,76**	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Indeks)**	**372**	**24.203.226.212**	**70**	**3.566.863.451**	**74**	**4.218.620.588**	**19,51**	**847.139.129**	**32,0**	**1.391.118.496**	**51,6**	**2.238.257.625**	**122**	**5.805.121.076**	**33**	**23,98**	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD (Persen)**	**500**	**106.865.835**	**100**	**24.520.000**	**100**	**23.000.000**	**13,35**	**3.070.000**	**23,2**	**5.330.000**	**37**	**8.400.000**	**137**	**32.920.000**	**27**	**30,80**	
			Persentase Capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah (Persen)	**97**										-		-		**0**	**#DIV/0!**	
			Kualitas pelaksanaan SPIP Perangkat Daerah (Angka)	**4**										-		-		**0**	**#DIV/0!**	
			Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten (Persen)	**84**										-		-		**0**	**#DIV/0!**	

			Persentase rata-rata capaian area perubahan RB PD	**80**										-		-		**0**	**#DIV/0!**	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	53.350.544			1	12.500.000	0	3.070.000	1	5.330.000	1	8.400.000	1	8.400.000	13	15,74	**Kecamatan Muara Komam**
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			5	14.775.000							-		5	14.775.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	25	53.515.291			5	10.500.000	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0,00	**Kecamatan Muara Komam**
			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP,Evaluasi Renja, SPIP,Tepra) (Dokumen)			4	9.745.000							-		4	9.745.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Temuan Ditindaklanjuti**	**500**	**20.197.002.656**	**100**	**3.226.267.096**	**100**	**3.827.188.420**	**19,65**	**776.319.125**	**32,4**	**1.280.347.469**	**52**	**2.056.666.594**	**152**	**5.282.933.690**	**30**	**26,16**	
			Persentase LHP Nihil	**500**										-		-		0	#DIV/0!	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	121	17.613.757.158			24	3.473.292.180	6	709.904.125	6	1.191.827.389	12	1.901.731.514	12	1.901.731.514	10	10,80	**Kecamatan Muara Komam**
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)			14	2.934.636.536							-		14	2.934.636.536	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	514	392.300.479									-		-		0	0,00	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	60	1.427.194.519			12	353.896.240	3	66.415.000	3	88.520.080	6	154.935.080	6	154.935.080	10	10,86	**Kecamatan & Kelurahan Muara Komam**
			Jumlah Dokumen Keuangan (SPP,SPM,E-Billing) (Dokumen)			115	291.630.560							-		115	291.630.560	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	10	763.750.500				-					-		-		0	0,00	

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80 (Persen)**	**500**	**386.112.500**			**90**	**5.400.000**		-		-	-		-		**0**	**0,00**	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	30	36.900.000				5.400.000		-		-	-		-		0	0,00	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	174	349.212.500				-					-		-		0	0,00	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Rata2 Capaian Indeks Kepuasan Sekretariat**	**500**	**1.048.313.123**	**100**	**227.340.039**	**100**	**232.822.340**	**24,19**	**56.311.038**	**26,5**	**61.615.100**	**51**	**117.926.138**	**151**	**345.266.177**	**30**	**32,94**	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	17	29.773.759			3	4.275.500	1	1.424.940	0	-	1	1.424.940	1	1.424.940	6	4,79	**Kecamatan Muara Komam**
			Jumlah Komponen Listrik yang disediakan (Buah)			10	5.388.300							-		10	5.388.300	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	39	27.628.156									-		-		0	0,00	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	160	414.572.884			32	84.666.840	8	20.276.100	7	16.076.900	15	36.353.000	15	36.353.000	9	8,77	**Kecamatan & Kelurahan Muara Komam**
			Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)			37	75.471.940							-		37	75.471.940	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Makanan dan Minuman (Kotak)			700								-		700		#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	28	78.308.385			6	18.840.000	2	4.101.400	2	4.470.600	4	8.572.000	4	8.572.000	14	10,95	**Kecamatan & Kelurahan Muara Komam**
			Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan (Jenis)			14	14.259.532							-		14	14.259.532	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	950	470.572.119			190	125.040.000	65	30.508.598	70	41.067.600	135	71.576.198	135	71.576.198	14	15,21	**Kecamatan & Kelurahan Muara Komam**

			Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan (Kali)			170	132.220.267							-		170	132.220.267	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan (Kali)			205								-		205		#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	50	27.457.820									-		-		0	0,00	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik**	**430**	**124.787.938**	**80**	**34.395.000**	**85**	**49.275.000**	**0**	**-**	**37,9**	**18.697.200**	**38**	**18.697.200**	**118**	**53.092.200**	**27**	**42,55**	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	17	124.787.938			3	49.275.000	0	-	2	18.697.200	2	18.697.200	2	18.697.200	12	14,98	**Kecamatan Muara Komam**
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			3	34.395.000							-		3	34.395.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		□ Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pembangunan			0	-							-		-		#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pembangunan			0	-							-		-		#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan**	**500**	**1.233.080.653**	**100**	**54.341.316**	**100**	**55.882.828**	**20,25**	**11.438.966**	**18,9**	**10.676.727**	**39**	**22.115.693**	**139**	**76.457.009**	**28**	**6,20**	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	10	16.100.000			2	2.600.000	1	500.000	1	500.000	2	1.000.000	2	1.000.000	20	6,21	**Kecamatan & Kelurahan Muara Komam**
			Jumlah Materai yang disediakan (Lembar)			110	3.100.000							-		110	3.100.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	120	283.369.997			24	53.282.828	6	10.938.966	6	10.176.727	12	21.115.693	12	21.115.693	10	7,45	**Kecamatan & Kelurahan Muara Komam**

			Jumlah Jaringan Listrik dan Air yang dibayarkan (Bulan)			24	51.241.316							-		24	51.241.316	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	933.610.656									-		-		0	0,00	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik (Persen)**	**228**	**1.107.063.507**		-	**47**	**25.052.000**		**-**	**57,7**	**14.452.000**	**58**		**58**		**25**	**0,00**	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	40	209.973.988			5	25.052.000	0	-	3	14.452.000	3		3		8	0,00	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	66	127.089.519									-		-		0	0,00	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	270.000.000									-		-		0	0,00	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	500.000.000									-		-		0	0,00	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**432**	**4.210.403.946**	**80**	**831.161.900**	**87**	**1.008.571.450**	**9,9**	**93.774.487**	**22,1**	**209.664.888**	**32,0**	**303.439.375**	**112**	**1.134.601.275**	**26**	**26,95**	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan**	**500**	**1.056.952.991**	**100**	**208.352.750**	**100**	**217.730.000**	**11,33**	**24.665.387**	**29,7**	**64.595.000**	**41**	**89.260.387**	**141**	**297.613.137**	**28**	**28,16**	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	□ Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60	915.860.947			12	198.830.000	3	24.665.387	3	64.595.000	6	89.260.387	6	89.260.387	10	9,75	**Kecamatan Muara Komam**

			Jumlah Dokumen Pelayanan yang diberikan (Dokumen)			78	189.452.750							-		78	189.452.750	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	□ Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60	141.092.044			-	18.900.000	0	-			-	-	-	-	0	0,00	**Kelurahan Muara Komam**
			Jumlah Posyandu Kelurahan Yang Terlayani (Posyandu)			9	18.900.000							-		9	18.900.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**500**	**745.840.755**	**100**	**114.958.380**	**100**	**141.877.900**	**9,64**	**13.672.000**	**9,2**	**13.097.888**	**19**	**26.769.888**	**119**	**141.728.268**	**24**	**19,00**	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	□ Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	5	745.840.755			1	141.877.900	0	13.672.000	0	13.097.888	-	26.769.888	-	26.769.888	0	3,59	**Kecamata Muara Komam**
			Jumlah ObyekTaman/Median Jalan (Obyek)			1	114.958.380							-		1	114.958.380	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah sarana persampahan (Unit)			1								-		1		#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**500**	**2.407.610.200**	**100**	**507.850.770**	**100**	**648.963.550**	**9,4**	**55.437.100**	**22,4**	**131.972.000**	**32**	**187.409.100**	**132**	**695.259.870**	**26**	**28,88**	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	□ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	20	2.407.610.200			4	648.963.550	0	55.437.100	2	131.972.000	2	187.409.100	2	187.409.100	10	7,78	**Kecamatan & Kelurahan Muara Komam**
			Jumlah Laporan Musibah yang tertangani (Dokumen)			3	507.850.770							-		3	507.850.770	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan (PATEN) (Dokumen)			1								-		1		#DIV/0!	#DIV/0!	

			Jumlah Cabang MTQ yang diikuti (Cabang)			9								-		9		#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah UKS yang di Bina (Sekolah)			7								-		7		#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah Kegiatan PKK Kelurahan yang terlaksana (Kegiatan)			12								-		12		#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**100**	**4.004.097.633**	**100**	**913.350.489**	**100**	**1.167.323.750**	**7,74**	**90.340.500**	**17,6**	**205.355.447**	**25,3**	**295.695.947**	**125**	**1.209.046.436**	**125**	**30,20**	
	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan**	**500**	**1.234.649.036**	**100**	**797.256.589**	**100**	**330.570.000**	**5,91**	**19.536.600**	**19,2**	**63.605.447**	**25**	**83.142.047**	**125**	**880.398.636**	**25**	**71,31**	
	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	□ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	75	319.622.572			15	27.500.000	7	14.811.600	0	-	7	14.811.600	7	14.811.600	9	4,63	**Kecamatan Muara Komam**
			Jumlah Usulan Desa yang terakomodir (Usulan)			50	27.721.700							-		50	27.721.700	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	□ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	915.026.464			3	303.070.000	0	4.725.000	1	63.605.447	1	68.330.447	1	68.330.447	6	7,47	**Kecamatan Muara Komam**
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan (PKK, Posyantek, Posyandu, TTG) (Kali)			4	769.534.889							-		4	769.534.889	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana**	**500**	**2.769.448.597**	**100**	**116.093.900**	**100**	**836.753.750**	**8,46**	**70.803.900**	**16,9**	**141.750.000**	**25**	**212.553.900**	**125**	**328.647.800**	**25**	**11,87**	
	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	□ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	85	74.376.769			-	13.393.900	0	8.703.900		-	-	8.703.900	-	8.703.900	0	11,70	**Kelurahan Muara Komam**

			Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)																		
			Jumlah Usulan Masyarakat yang terakomodir (Usulan)			9	8.093.900							-		9	8.093.900	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	□ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	26	1.657.689.375									-		-		0	0,00		
			Jumlah Paket Kegiatan Pembagunan Sarana & Prasarana Kelurahan (Paket)											-		-		#DIV/0!	#DIV/0!		
	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	□ Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	90	1.037.382.453			-	823.359.850	0	62.100.000		141.750.000	-	203.850.000	-	203.850.000	0	19,65	**Kelurahan Muara Komam**	
			Terpenuhinya Jasa Honorarium RT/RW Kelurahan (Bulan)			12	108.000.000							-		12	108.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif	**KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Kasus Gangguan Keamanan dan Ketertiban**	**500**	**3.302.896.302**									-		-		**0**	**0,00**		
			Persentase pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan di wilayah kecamatan			**100**	**313.743.150**	**100**	**394.405.000**	11,35	**44.768.400**	33,7	**132.882.700**	**45**	**177.651.100**	**145**	**491.394.250**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**500**	**1.728.014.313**	**100**	**10.629.200**	**100**	**75.253.000**		-	**30,3**	**22.777.400**	**30**	**22.777.400**	**130**	**33.406.600**	**26**	**1,93**		
	Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif	□ Sinergisitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60	1.564.332.675									-		-		0	0,00		
	Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif	□ Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	10	163.681.638			2	75.253.000	0	-	1	22.777.400	1	22.777.400	1	22.777.400	10	13,92	**Kecamatan Muara Komam**	

			Tokoh Masyarakat (Laporan)																	
			Jumlah Kegiatan FKDM yang dilaksanakan (Kali)			12	10.629.200							-		12	10.629.200	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**	**45**	**1.574.881.989**									-		-		**0**	**0,00**	
			Jumlah kegiatan Koordinasi Bidang Penegakan Peraturan yang dilaksanakan			**9**	**303.113.950**	**9**	**319.152.000**	**2**	**44.768.400**	**3**	**110.105.300**	**5**	**154.873.700**	**14**	**457.987.650**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
	Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif	□ Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	45	1.574.881.989			9	319.152.000	0	44.768.400	4	110.105.300	4	154.873.700	4	154.873.700	9	9,83	**Kecamatan Muara Komam**
			Jumlah kegiatan Koordinasi Bidang Penegakan Peraturan yang dilaksanakan (Kali)			12	303.113.950							-		12	303.113.950	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kasus Konflik Sosial Yang Tertangani/ Terselesaikan di Wilayah Kecamatan**	**500**	**532.084.013**	**100**	**62.169.600**	**100**	**92.859.500**	**-**	**-**	10,7	**9.940.000**	**11**		**111**	**62.169.600**	**22**	**11,68**	
	Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan**	**10**	**532.084.013**	**2**	**62.169.600**	**2**	**92.859.500**	**-**	**-**	**-**	**9.940.000**	**-**		**2**	**62.169.600**	**20**	**11,68**	

	Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif	□ Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	1700	406.144.813			350	64.000.000	0	-	0	2.440.000	-	2.440.000	-	2.440.000	0	0,60	**Kecamatan Muara Komam**
			Jumlah Penyelenggaraan HUT RI Tingkat Kecamatan (Kali)			1	49.996.600							-		1	49.996.600	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif	□ Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	660	125.939.200			120	28.859.500	0	-	0	7.500.000	-	7.500.000	-	7.500.000	0	5,96	**Kecamatan Muara Komam**
			Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan (safari Ramadhan) (Kali)			12	12.173.000							-		**12**	12.173.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Yang Menyampaikan LKP Desa Tepat Waktu**	**500**	**978.552.754**	**100**	**82.118.600**	**100**	**165.329.000**	**12,24**	**20.238.000**	**19,4**	**32.076.200**	**32**	**52.314.200**	**132**	**134.432.800**	**26**	**13,74**		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa Yang Terfasilitasi dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**45**	**978.552.754**	**9**	**82.118.600**	**9**	**165.329.000**	**2**	**20.238.000**	**2**	**32.076.200**	**4**	**52.314.200**	**13**	**134.432.800**	**29**	**13,74**		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	45	111.341.414									-		-		0	0,00		

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	5	142.008.723			1	20.617.000	0	-	1	20.405.000	1	20.405.000	1	20.405.000	20	14,37	**Kecamatan Muara Komam**
			Jumlah Desa yang mengikuti Lomba (Desa)			12	5.906.500							-		12	5.906.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	60	417.185.159			12	55.032.000	5	20.238.000	3	7.880.000	8	28.118.000	8	28.118.000	13	6,74	**Kecamatan Muara Komam**
			Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan (Dokumen)			48	15.798.800							-		48	15.798.800	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	12	71.889.000			1	34.450.000	0	-	0	-	-		-		0	0,00	
			Jumlah Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Desa)			10	41.370.000							-		10	41.370.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	30	42.731.364			6	47.830.000	0	-	0	2.371.200	-	2.371.200	-	2.371.200	0	5,55	**Kecamatan Muara Komam**
			Jumlah Kegiatan Desiminasi yang terlaksana (Kali)			1	7.633.300							-		1	7.633.300	#DIV/0!	#DIV/0!	

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	□ Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	10	193.397.094			2	7.400.000	0	-	0	1.420.000	-	1.420.000	-	1.420.000	0	0,73	**Kecamatan Muara Komam**
			Jumlah Tapal Batas Desa (Segmen)			2	11.410.000							-		2	11.410.000	#DIV/0!	#DIV/0!	

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi Renja Kantor Kecamatan Muara Komam Tahun Anggaran 2024 sampai dengan triwulan II dapat dijelaskan bahwa :

1. Total realisasi kinerja hingga semester II adalah 43,67%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.077.298.247 (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dari total pagu RKPD sebesar Rp. 7.047.109.288 (tujuh milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
2. Tingkat capaian kinerja sub kegiatan berkisar antara 32,26%. Adapun capaian kinerja sub kegiatan tertinggi adalah pada sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
   b. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum,
   c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa,
   d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan,
   e. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional, serta
   f. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

   dimana Sub Kegiatan pada Kantor Kecamatan Muara Komam tersebut di atas pada Triwulan II sudah terealisasi sekitar 43,67%.
3. Hingga triwulan II Tahun Anggaran 2024 capaian kinerja sub kegiatan hanya terdapat satu sub kegiatan yang belum terealisasi sama sekali (0%) yaitu Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebuat dikarenakan anggaran kasnya baru akan direalisasikan pada triwulan III.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

1. Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

Berikut di bawah ini adalah faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Muara Komam sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 :

a. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan.
b. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik.
c. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang membuat manajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berjalan sinergis.
d. Sebagian besar belanja yang tertuang dalam anggaran kas Triwulan II Tahun Anggaran 2024 telah direalisasikan sesuai dengan rencana anggaran kas.
e. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai.

2. Faktor Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

Berikut di bawah ini adalah faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Muara Komam sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 :

a. Tidak ada faktor penghambat yang signifikan dalam pencapaian realisasi kinerja Triwulan II, hanya saja terdapat satu belanja sub kegiatan yang perencanaan anggarannya di Triwulan III sehingga tidak direalisasikan pada Triwulan II ini.
b. Terdapat beberapa belanja sub kegiatan yang juga belum maksimal pada realisasi keuangannya pada Triwulan II yang dikarenakan anggaran kas yang di tetapkan terdapat di Triwulan III dan IV, hal tersebut mempengaruhi jumlah bobot realisasi.

3. Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diperlukan
   a. Menyusun kembali rencana anggaran kas sesuai dengan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan perencanaan yang telah dianggarkan.
   b. Melakukan penyesuaian dan pergeseran atas belanja yang tidak dapat dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan target prioritas perangkat daerah.
   c. Mengoptimalkan penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2024

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Muara Komam Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Muara Komam Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan hasil analisa, merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Paser.

Anggaran Belanja Kantor Kecamatan Muara Komam dalam RKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.047.109.288 (tujuh milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dan mengalami penambahan pada Perubahan RKPD sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dari anggaran RKPD murni sehingga bertambah menjadi Rp.7.092.109.288 (tujuh milyar sembilan puluh dua juta seratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)

B. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Adapun Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Muara Komam Tahun Anggaran 2024 terinci dalam Tabel 3.2.1 ini :

TABEL TC.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN PASER

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MUARA KOMAM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
KANTOR KECAMATAN MUARA KOMAM													
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**								
7	**01**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
7	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Muara Komam	1 Dokumen	12.500.000	APBD		1 Dokumen	14.500.000
7	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Muara Komam	5 Laporan	10.500.000	APBD		5 Laporan	11.500.000
7	**01**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
7	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Muara Komam	24 Orang	3.595.565.919	APBD		25 Orang	3.700.000.000
7	01	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Muara Komam	12 Dokumen	199.197.120	APBD		12 Dokumen	207.550.000
7	01	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Muara Komam	-	-	-		2 Laporan	180.810.000
7	**01**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
7	01	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Muara Komam	-	-	-		34 Dokumen	74.256.000
7	**01**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								

7	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Muara Komam	3 Paket	4.275.500	APBD		3 Paket	5.250.000
7	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Muara Komam	32 Paket	51.344.022	APBD		32 Paket	49.857.750
7	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Muara Komam	5 Paket	15.096.000	APBD		6 Paket	16.400.000
7	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Muara Komam	190 Laporan	74.920.000	APBD		190 Laporan	98.300.000
7	**01**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
7	01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Muara Komam	3 Unit	45.096.000	APBD		3 Unit	40.000.000
7	**01**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
7	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Muara Komam	2 laporan	2.000.000	APBD		2 laporan	3.250.000
7	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Muara Komam	24 Laporan	39.999.816	APBD		24 Laporan	60.000.000
7	**01**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
7	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Muara Komam	5 Unit	25.052.000	APBD		6 Unit	40.000.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								
7	**01**	**02**	**202**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**								
7	01	02	202	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Muara Komam	12 Laporan	198.830.500	APBD		12 Laporan	205.000.000
7	**01**				**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana**								

		02	**203**		**dan Sarana Pelayanan Umum**								
7	01	02	203	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Muara Komam	1 Dokumen	141.877.900	APBD		1 Dokumen	215.000.000
7	**01**	**02**	**204**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								
7	01	02	204	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Muara Komam	4 Laporan	455.697.850	APBD		4 Laporan	520.000.000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								
7	**01**	**03**	**201**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								
7	01	03	**201**	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Muara Komam	15 Lembaga	27.500.000	APBD		15 Lembaga	25.000.000
7	01	03	**201**	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Muara Komam	3 Laporan	303.070.000	APBD		3 Laporan	315.000.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								
7	**01**	**04**	**201**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**								
7	01	04	201	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Muara Komam	2 Laporan	115.253.000	APBD		2 Laporan	85.000.000
7	**01**	**04**	**204**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**								
7	01	04	204	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Muara Komam	9 Laporan	319.152.000	APBD		9 Laporan	330.000.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								
7	**01**	**05**	**201**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**								

					Penugasan Kepala Daerah								
7	01	05	201	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Muara Komam	350 Orang	123.126.700	APBD		350 Orang	65.000.000
7	01	05	201	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Muara Komam	120 Orang	28.859.500	APBD		120 Orang	30.000.000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**								
7	**01**	**06**	**201**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								
7	01	06	201	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Muara Komam	1 Dokumen	20.617.000	APBD		1 Dokumen	22.000.000
7	01	06	201	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Muara Komam	12 Dokumen	55.032.000	APBD		12 Dokumen	58.000.000
7	01	06	201	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Muara Komam	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	35.000.000
7	01	06	201	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Muara Komam	6 Dokumen	70.030.000	APBD		6 Dokumen	50.000.000
7	01	06	201	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Muara Komam	2 Dokumen	7.400.000	APBD		2 Dokumen	18.000.000
JUMLAH									**5.941.990.327**				**6.349.800.000**
KANTOR KELURAHAN MUARA KOMAM													
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**								
7	**01**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
7	01	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	Kel.	10 Dokumen	162.788.000	APBD		12 Dokumen	200.000.000

					SKPD	Akuntansi SKPD	Muara Komam						
7	**01**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
7	01	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Kel. Muara Komam	12 Paket	5.400.000	APBD		12 Paket	10.000.000
7	**01**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
7	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Muara Komam	16 Paket	33.982.818	APBD		20 Paket	35.000.000
7	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Muara Komam	6 Paket	4.695.120	APBD		4 Paket	4.000.000
7	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Muara Komam	0 Laporan	91.610.000	APBD		90 Laporan	55.000.000
7	**01**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
7	01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kel. Muara Komam	2 Unit	16.430.000	APBD		2 Unit	20.000.000
7	**01**	**01**	**208**	**01**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
7	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Muara Komam	2 laporan	600.000	APBD		2 laporan	700.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Muara Komam	24 Laporan	13.283.012	APBD		24 Laporan	14.000.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								
7	**01**	**02**	**202**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**								
7	01	02	202	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kel. Muara Komam	14 Laporan	5.000.000	APBD		14 Laporan	25.000.000
7	**01**	**02**	**204**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								

7	01	02	204	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kel. Muara Komam	-	106.680.000	APBD		-	135.000.000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								
7	**01**	**03**	**202**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								
7	01	03	**202**	**01**	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Muara Komam	17 Lembaga	11.203.900	APBD		17 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000
7	01	03	**202**	**03**	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Muara Komam	18 Pokmas	820.719.850	APBD		18 Pokmas	650.000.000
JUMLAH									**1.272.392.700**				**1.162.700.000**

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser merupakan pedoman penentuan, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser wajib menerapkan prinsip - prinsip efektif, efesien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program - program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program, kegiatan dan sub kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser dengan sebaik-baiknya.
2. Rancangan Renja Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahun an sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Muara Komam, Juli 2024

CAMAT,

MUSTAFA, S.Sos
Pembina
NIP. 197505272003121007

PENETAPAN

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

KANTOR KECAMATAN MUARA SAMU
KABUPATEN PASER

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-786/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **3**

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penyusunan 7

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024 ..... **9**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 9

2.2 Analisis Capaian Kinerja 12

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 15

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **17**

3.1 Tujuan dan Sasaran 17

3.2 Review Terhdp Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 18

3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

3.4 Rencana Program & Kegiatan Perubahan Renja Thn 2024 27

BAB IV PENUTUP **49**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kantor Kecamatan Muara Samu, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Muara Samu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang incian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Kantor Kecamatan Muara Samu, proses penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Muara Samu, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Kantor Kecamatan Muara Samu, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Muara Samu

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Muara Samu Triwulan II Tahun 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KANTOR CAMAT MUARA SAMU
Periode Pelaksanaan: April s.d Juni Tahun 2024

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Predikat	
					I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		4	5		6		7		8 = 6+7		9 = 8 / 5 * 100		10	
	Kantor Camat Muara Samu		**100**	**4.215.228.927**	**25**	**727.582.043**	**25**	**1.175.570.531**	**50**	**1.903.152.574,00**	**50,00**	**45,15**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**74**	**3.139.196.532**	**0**	**584.290.543**	**0**	**980.492.531**	0	**1.564.783.074**	**0,00**	**49,85**	**SR**	**SR**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kualitas pelaksanaan SPIP Perangkat Daerah**	**3**	**49.090.665**	**3**	**10.885.134**	**0**	**2.820.000**	**3**	**13.705.134**	**100**	**27,92**	**ST**	**R**
		Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	**75**		**69,87**		**0**		**69,87**		**93,16**		**ST**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu renstra, ranwal renja,	5	33.059.665	1	7.595.134	3	2.820.000	4	10.415.134	80	31,50	T	SR
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	16.031.000	1	3.290.000	1	0	2	3.290.000	40	84,12	SR	T
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase temuan ditindaklanjuti**	**100**	**2.224.573.018**	**25**	**408.240.661**	**25**	**861.383.337**	**50**	**1.269.623.998**	**50**	**57,07**	**SR**	**SR**
		Persentase LHP nihil	**100**		**25**		**25**		**50**		**50**		**SR**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144	2.114.591.190	33	392.629.461	34	822.420.637	67	1.215.050.098	46,53	57,46	SR	R
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SPP,SPM,E-Billing)	200	72.061.448	55	12.660.000	87	25.180.000	142	37.840.000	71	52,51	S	R
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15	37.920.380	5	2.951.200	3	13.782.700	8	16.733.900	53,33	44,13	R	SR
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80**	**90**	**84.477.348**		**9.200.000**		**27.700.000**	**0**	**36.900.000**	**0**	**43,68**	**SR**	**SR**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	84.477.348	3	9.200.000	3	27.700.000	6	9.200.000	50	10,89	SR	SR
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat**	**100**	**223.962.506**	**25**	**38.995.400**	**25**	**36.087.117**	**50**	**75.082.517**	**50**	**33,52**	**SR**	**SR**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	2.030.000	10	2.016.000	0	0	10	2.016.000	0	99,31	SR	ST
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2.030.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	SR	SR
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	30.670.025	5	15.201.800	0	0,00	5	15.201.800	25,00	49,57	SR	SR
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4.881.643	1	2.398.400	0	0,00	1	2.398.400	25	49,13	SR	SR
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130	179.275.838	25	19.379.200	45	36.087.117	70	55.466.317	53,85	30,94	R	SR
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	5.075.000	0	0	0	0	0				SR	SR
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik**	**80**	**115.204.259**	**20**	**60.962.000**	**0**	**0**	**20**	**60.962.000,0**	**25,00**	**52,92**	**SR**	**ST**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37	115.204.259	2	60.962.000	0	0,00	2	60.962.000	5,41	52,92	SR	R
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**100**	**163.957.000**	**25**	**29.857.848**	**0**	**52.502.077**	**25**	**82.359.925**	**25,00**	**50,23**	**SR**	**SR**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	1.015.000	100	1.012.000	0		100	1.012.000	100	99,70	ST	ST

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	50.886.000	6	10.445.848	6	6.502.077	12	16.947.925	50	33,31	SR	SR
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	112.056.000	3	18.400.000	3	46.000.000	6	64.400.000	50	57,47	SR	R
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	**70**	**277.931.736**	**5**	**26.149.500**	**0**	**0**	**5**	**26.149.500**	**7,14**	**9,41**	**SR**	**SR**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	118.324.104	1	15.789.500	0	0,00	1	15.789.500	16,67	13,34	SR	SR
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	20.153.632	4	10.360.000	0	0,00	4	10.360.000	50	51,41	SR	R
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	7	120.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	SR	SR
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	19.154.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	SR	SR
2	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu**	**100**	**211.273.421**	**44**	**31.484.000**	**0**	**28.630.000**	**44**	**60.114.000**	**44**	**28,45**	**SR**	**SR**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa yang terfasilitasi**	**9**	**211.273.421**	**9**	**31.484.000**	**0**	**28.630.000**	**9**	**60.114.000**	**100**	**28,45**	**ST**	**SR**
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18	44.494.200	9	15.100.000	3	3.050.000	12	18.150.000	66,67	40,79	S	SR
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3	24.274.900	1	820.000	1	940.000	2	1.760.000	66,67	7,25	S	SR
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27	105.599.809	9	15.564.000	9	24.640.000	18	40.204.000	66,67	38,07	S	SR
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3	36.904.512	0	0	0	0	0		0	0,00	SR	SR
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	**85**	**373.451.713**	**88,32**	**32.637.500**	**0**	**58.812.500**	**88,32**	**91.450.000**	**103,91**	**24,49**	**ST**	**T**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100**	**162.893.534**	**25**	**22.260.000**	**25**	**34.500.000**	**50**	**56.760.000**	**50**	**34,84**	**SR**	**SR**
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3	137.006.834	0	18.500.000	1	34.500.000	1	53.000.000	33,33	38,68	SR	SR
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	25.886.700	1	3.760.000	0	0,00	1	3.760.000	33,33	14,52	SR	SR
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum**	**100**	**105.558.179**	**25**	**4.900.000**	**25**	**13.000.000**	**50**	**17.900.000**	**50,00**	**16,96**	**SR**	**SR**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12	105.558.179	3	4.900.000	3	13.000.000	6	17.900.000	50	16,96	SR	SR
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**105.000.000**	**25**	**5.477.500**	**25**	**11.312.500**	**50**	**16.790.000**	**50,00**	**15,99**	**SR**	**SR**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	105.000.000	0	5.477.500	1	11.312.500	1	16.790.000	50,00	15,99	SR	SR

4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban**	**60**	**237.215.819**	**0**	**52.684.000**	**0**	**96.410.000**	**0**	**149.094.000**	**0**	**62,85**	**SR**	**SR**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**225.257.451**	**25**	**52.684.000**	**25**	**96.410.000**	**50**	**149.094.000**	**50**	**66,19**	**SR**	**SR**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	208.724.551	3	37.400.000	3	96.410.000	6	37.400.000	50	17,92	SR	SR
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	16.532.900	2	15.284.000	0	0,00	2	15.284.000	100	92,45	ST	ST
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan**	**100**	**11.958.368**	**25**	**0,00**	**25**	**0,00**	**50**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**SR**	**ST**
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9	11.958.368	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	96,15	SR	ST
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/ terselesa ikan di wilayah kecamatan**	**100**	**127.200.489**	**25**	**0,00**	**25**	**0,00**	**50**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**SR**	**SR**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**2**	**127.200.489**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**SR**	**SR**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20	56.675.641	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	SR	SR
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	30	70.524.848	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	SR	SR
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**	**30**	**126.890.953**	**0**	**26.486.000**	**0**	**11.225.500**	**0**	**37.711.500**	**0,00**	**5,37**	**SR**	**SR**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	**100**	**126.890.953**	**25**	**26.486.000**	**25**	**11.225.500**	**50**	**37.711.500**	**50,00**	**29,72**	**SR**	**SR**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	25.919.453	6	20.550.000	0	0,00	6	20.550.000	100	79,28	ST	T
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	100.971.500	0	5.936.000	1	11.225.500	1	17.161.500	33,33	17,00	SR	SR

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester II dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 46,16 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.903.152.574 (satu milyar sembilan ratus tiga juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 4.215.228.927 (empat milyar dua ratus lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuhrupiah) atau sebesar 45,68%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Kantor Kecamatan Muara Samu sebesar 46,16% dengan predikat kinerja Rendah (R).
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 4 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 5 indikator capaian kinerja 0%-50% = 26 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Muara Samu

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Dan Fungsi Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kecamatan mempunyai fungsi:

a) pengoordinasian penyelenggaraan tugas Pemerintahan Umum dan otonomi daerah;
b) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
c) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d) pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
h) pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas an/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan;
i) Penyusunan program, pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Kantor Kecamatan Muara Samu adalah:

1. Pelayanan Kependudukan
2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Pelayanan Pertanahan

Upaya Kantor Kecamatan Muara Samu dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kantor Kecamatan Muara Samu Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Kantor Kecamatan Muara Samu terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Muara Samu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2024	2024	2025	2026		
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70	73	75	80	85		
Sasaran:								
1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat	65	70	70	75	80	69,87	99,8
2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	80	82	84	84	85	0	
3) Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	41,85	27,90	13,95	13,95	0,00	13,95	100
Tujuan Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan	73,03	73,4	74	74,5	75		
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif	55%	70	80	90	100	81,48	101,9

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Muara Samu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”, belum mencapai target, dimana realisasinya belum dapat dilaksanakan karena belum adanya jadwal penilaian dari pemerintah daerah.
b. Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat” hampir mencapai target, dimana realisasinya sebesar 69,87 dari target sebesar 70 dengan capaian kinerja sebesar 99,8 %.
c. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan”, belum mencapai target, dikarenakan belum selesainya penilaian SKM tersebut di Kecamatan.
d. Sasaran “Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Menurunnya Angka Kriminalitas”, sudah mencapai target, dimana realisasinya adalah 13,95.
e. Tujuan “Meningkatnya kemandirian masyarakat desa” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan”, telah melampaui target dimana realisasinya sebesar 81,48% dari target sebesar 80 dengan capaian kinerja sebesar 101,9 %.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.

2. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Muara Samu sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			
Sasaran: 1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat	Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat	70	70
2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat selama 1 Tahun	84	82
3.Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	Jumlah peristiwa kriminal/gangguan keamanan/ketertiban selama setahun dibagi jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000	13,95	13,95
Tujuan: Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan			
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif/100 %	80%	81,48 %

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran

dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu "PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT" yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Muara Samu mendukung pencapaian sasaran ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-10 yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif
4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Kantor Kecamatan Muara Samu telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2
Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 Kantor Kecamatan Muara Samu

No	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kantor Kecamatan Muara Samu				4.693.945.445					4.117.782.222	
	Urusan Kewilayahan										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Muara Samu	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	74	3.524.824.997	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	74	3.524.824.997	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	74	49.090.665			Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	74	49.090.665	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Muara Samu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	5	33.059.665			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	5	65.981.665	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA)	5	16.031.000			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA)	5	16.031.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase LHP nihil	100	2.593.116.883			Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2.593.116.883	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Muara Samu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang	2.483.135.055			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang	2.483.135.055	

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Muara Samu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SPP,SPM,E-Billing)	200 Dokumen	72.061.448			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SPP,SPM,E-Billing)	200 Dokumen	78.641.448	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	37.920.380			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	37.920.380	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70 %	84.477.348			Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70 %	84.477.348	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Muara Samu	Jumlah pegawai yang diperbarui datanya	12 Orang	84.477.348			Jumlah pegawai yang diperbarui datanya	12 Orang	127.155.348	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	223.962.506			Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	223.962.506	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Muara Samu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.030.000			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.030.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Muara Samu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.030.000			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.030.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Muara Samu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	30.670.025			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	30.670.025	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Muara Samu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4.881.643			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4.881.643	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	179.275.838			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	309.615.838	

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	5 Dokumen	5.075.000			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	5 Dokumen	5.075.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan BMD	80%	115.204.259			Persentase Ketersediaan BMD	80%	115.204.259	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Muara Samu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	115.204.259			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	193.258.659	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	181.041.600			Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	181.041.600	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	1.015.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	1.015.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	50.886.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	62.738.400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	129.140.600			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	129.140.600	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan BMD	70%	277.931.736			Persentase Pemeliharaan BMD	70%	277.931.736	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Muara Samu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	118.324.104			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	119.974.104	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Muara Samu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	20.153.632			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	20.153.632	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Muara Samu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	7 Unit	120.300.000			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	7 Unit	200.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Muara Samu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.154.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.154.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Muara Samu	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	74	306.051.713	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	74	306.051.713	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	162.893.534			Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	162.893.534	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	137.006.834			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	158.954.834	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	25.886.700			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	25.886.700	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	100%	38.158.179			Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	100%	38.158.179	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Muara Samu	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	38.158.179			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	38.158.179	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	105.000.000			Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	105.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	105.000.000			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	260.034.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Muara Samu	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	30%	197.063.606	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	30%	197.063.606	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100%	197.063.606			Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100%	197.063.606	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Muara Samu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	6 Lembaga	28.032.372			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	6 Lembaga	28.032.372	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	169.031.234			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	212.927.234	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Muara Samu	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	60%	310.960.019	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	60%	310.960.019	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	299.001.651			Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	299.001.651	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kec. Muara Samu	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	12	282.468.751			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	12	308.798.751	

	Vertikal di Wilayah Kecamatan							dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	16.532.900			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	16.532.900	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	11.958.368			Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	11.958.368	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9 Laporan	11.958.368			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9 Laporan	17.873.368	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Muara Samu	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100%	160.856.289	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100%	160.856.289	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	160.856.289			Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	160.856.289	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	Kec. Muara Samu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	56.675.641			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	25 Orang	139.525.641	

								Negara Kesatuan Republik Indonesia			
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Muara Samu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10 Orang	64.180.648			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10 Orang	86.128.648	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Muara Samu	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100%	194.188.821	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100%	194.188.821	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100%	194.188.821			Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100%	194.188.821	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Muara Samu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Dokumen	44.494.200			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Dokumen	44.494.200	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Muara Samu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	19.525.000			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	22.775.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Muara Samu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27 Dokumen	110.349.709			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27 Dokumen	127.799.709	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Muara Samu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	19.819.912			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	19.819.912	

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Perubahan Rancangan RKPD 2024 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kantor Kecamatan Muara Samu baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

Tabel. 3.3
Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 pada Kantor Kecamatan Muara Samu

No	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Nama OPD										
	Urusan ……..										
1	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										
2.	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										
2.	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										

NIHIL

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Kecamatan Muara Samu pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel TC.33

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KE S
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		KANTOR CAMAT MUARA SAMU							**4.285.401.580,00**	**4.649.246.645,00**	**4.693.945.445,00**	**408.543.865,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.285.401.580,00**	**4.649.246.645,00**	**4.693.945.445,00**	**408.543.865,00**					
	7.01	**KECAMATAN**							**4.285.401.580,00**	**4.649.246.645,00**	**4.693.945.445,00**	**408.543.865,00**					
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**indeks kepuasan pelayanan kesekretariatan**				**74 %**	**74 %**	**3.139.196.532,00**	**3.520.126.197,00**	**3.524.824.997,00**	**-29.608.220,00**					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	*Kualitas pelaksanaan SPIP Perangkat Daerah* *Nilai SAKIP Perangkat Daerah*				3 Level 75 Nilai	3 Level 75 Nilai	49.090.665,00	49.090.665,00	49.090.665,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	Apara
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	33.059.665,00	33.059.665,00	33.059.665,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	16.031.000,00	16.031.000,00	16.031.000,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.224.573.018,00	2.588.418.083,00	2.593.116.883,00	368.543.865,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	Apara
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				144 Orang/ bulan	144 Orang/ bulan	2.114.591.190,00	2.478.436.255,00	2.483.135.055,00	368.543.865,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				200 Dokumen	200 Dokumen	72.061.448,00	72.061.448,00	72.061.448,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KE S
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15 Laporan	15 Laporan	37.920.380,00	37.920.380,00	37.920.380,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				90 %	90 %	84.477.348,00	84.477.348,00	84.477.348,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	Apara
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	84.477.348,00	84.477.348,00	84.477.348,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	223.962.506,00	223.962.506,00	223.962.506,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	Apara
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	30.670.025,00	30.670.025,00	30.670.025,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KE S
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.881.643,00	4.881.643,00	4.881.643,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	130 Laporan	179.275.838,00	179.275.838,00	179.275.838,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan BMD*				80 %	80 %	115.204.259,00	115.204.259,00	115.204.259,00	0,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	Apara
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	115.204.259,00	115.204.259,00	115.204.259,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan*				100 %	100 %	163.957.000,00	181.041.600,00	181.041.600,00	17.084.600,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	Apara
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KE S
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	50.886.000,00	50.886.000,00	50.886.000,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	112.056.000,00	129.140.600,00	129.140.600,00	17.084.600,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan BMD*				70 %	70 %	277.931.736,00	277.931.736,00	277.931.736,00	0,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	Apara
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	118.324.104,00	118.324.104,00	118.324.104,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	20.153.632,00	20.153.632,00	20.153.632,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	120.300.000,00	120.300.000,00	120.300.000,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	19.154.000,00	19.154.000,00	19.154.000,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**				**74 %**	**74 %**	**373.451.713,00**	**306.051.713,00**	**306.051.713,00**	**-127.564.259,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KE S
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Adadi Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	162.893.534,00	162.893.534,00	162.893.534,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	Masy
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	137.006.834,00	137.006.834,00	137.006.834,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	25.886.700,00	25.886.700,00	25.886.700,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum*				100 %	100 %	105.558.179,00	38.158.179,00	38.158.179,00	-67.400.000,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	Lingku Masya
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum															
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	105.558.179,00	38.158.179,00	38.158.179,00	-67.400.000,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				100 %	100 %	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	Masy
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	3 Laporan	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**				**30 %**	**30 %**	**197.063.606,00**	**197.063.606,00**	**197.063.606,00**	**-68.886.821,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KE S
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana*				100 %	100 %	197.063.606,00	197.063.606,00	197.063.606,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	Masya
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	28.032.372,00	28.032.372,00	28.032.372,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	169.031.234,00	169.031.234,00	169.031.234,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban**				**60 %**	**60 %**	**237.215.819,00**	**310.960.019,00**	**310.960.019,00**	**63.997.369,00**					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	*Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	225.257.451,00	299.001.651,00	299.001.651,00	73.744.200,00			-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	Lingku Masya
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	208.724.551,00	282.468.751,00	282.468.751,00	73.744.200,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	16.532.900,00	16.532.900,00	16.532.900,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				100 %	100 %	11.958.368,00	11.958.368,00	11.958.368,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	Masya
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KE S
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				9 Laporan	9 Laporan	11.958.368,00	11.958.368,00	11.958.368,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**127.200.489,00**	**120.856.289,00**	**160.856.289,00**	**-63.366.992,00**					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	127.200.489,00	120.856.289,00	160.856.289,00	33.655.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	Masya
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				25 Orang	25 Orang	56.675.641,00	56.675.641,00	56.675.641,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				25 Orang	10 Orang	70.524.848,00	64.180.648,00	104.180.648,00	33.655.800,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Pemerataan Konektivitas Untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**211.273.421,00**	**194.188.821,00**	**194.188.821,00**	**-83.613.398,00**					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana*				100 %	100 %	211.273.421,00	194.188.821,00	194.188.821,00	-17.084.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	Aparat
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa															
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				18 Dokumen	18 Dokumen	44.494.200,00	44.494.200,00	44.494.200,00	0,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	24.274.900,00	19.525.000,00	19.525.000,00	-4.749.900,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KE S
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				27 Dokumen	27 Dokumen	105.599.809,00	110.349.709,00	110.349.709,00	4.749.900,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa															
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	36.904.512,00	19.819.912,00	19.819.912,00	-17.084.600,00	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahanyang Responsive dan Tangkas	
	J U M L A H								**4.285.401.580,00**	**4.649.246.645,00**	**4.693.945.445,00**	**2.288.017.373.093,00**					

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kantor Kecamatan Muara Samu mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Muara Samu, 16 Agustus 2024
Camat

A. Rusdiansyah, S.Sos
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19720423 199803 1 009